KRONIK

REVOLUSI INDONESIA

Pramoedya Ananta Toer
Koesalah Soebagyo Toer
Ediati Kamil

"Ini suatu pekerjaan yang maha hebat, memerlukan energi, usaha, biaya, dll., yang hebat."

(Onghokham, Sejarawan)

Jilid V (1949)

Kronik Revolusi Indonesia Jilid V (1949)

Pramoedya Ananta Toer
Koesalah Soebagyo Toer
Ediati Kamil

KRONIK REVOLUSI INDONESIA JILID V (1949)

Jakarta,
KPG (Kepustakaan Populer Gramedia)

Daftar Isi

Daftar Isi v
Daftar Lampiran vii
Daftar Istilah dan Singkatan xiii
Pengantar xv

Januari 1949 3
Februari 1949 26
Maret 1949 45
April 1949 74
Mei 1949 85
Juni 1949 103
Juli 1949 137
Agustus 1949 162
September 1949 250
Oktober 1949 366
November 1949 393
Desember 1949 495

Lampiran 607
Bahan yang Dipakai 784
Indeks 789

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 608
KETERANGAN PEMERINTAH
KEPADA BADAN PEKERJA KNI PUSAT
(19 Juli 1949)

Lampiran 2. 617
PIDATO PEMBUKAAN KONFERENSI INTER-INDONESIA DI YOGYAKARTA
(20 Juli 1949)

Lampiran 3. 621
JAWABAN PEMERINTAH
KEPADA BADAN PEKERJA KNI PUSAT
(29 Juli 1949)

Lampiran 4. 631
PIDATO SAMBUTAN PADA PEMBUKAAN
KONFERENSI INTER-INDONESIA BAGIAN II DI JAKARTA
(30 Juli 1949)

Lampiran 5. 635
BATIK, PAYUNG, DAN TEKSTIL INDUSTRI DI TASIKMALAYA

Lampiran 6. 637
KETERANGAN RESMI DELEGASI REPUBLIK
(Bagian 2)
(*Bagian 1 tidak ditemukan*)

Lampiran 7. 639
KETERANGAN RESMI DELEGASI REPUBLIK
Tentang Penglaksanaan Penghentian Permusuhan

Lampiran 8. 641
MAKLUMAT BERSAMA NO. 3
Peraturan Wajib Bekerja Guna Pembangunan Negara

Lampiran 9. 642
MENUJU KEPADA PENYERAHAN KEDAULATAN
BAGI BANGSA INDONESIA
oleh Arnold C. Brackman
Koresponden *United Press*

Lampiran 10. 644
PIDATO
PERDANA MENTERI BELANDA DR. W. DREES
PADA PEMBUKAAN KONFERENSI MEJA BUNDAR
(23 Agustus 1949)

Lampiran 11. 646
PIDATO
KETUA DELEGASI REPUBLIK INDONESIA
DRS. MOH. HATTA
PADA PEMBUKAAN KONFERENSI MEJA BUNDAR
(23 Agustus 1949)

Lampiran 12. 653
PIDATO
KETUA DELEGASI BFO SULTAN HAMID II
PADA PEMBUKAAN KONFERENSI MEJA BUNDAR
(23 Agustus 1949)

Lampiran 13. 655
PIDATO
MENTERI DAERAH SEBERANG LAUTAN BELANDA
MR. J.H. VAN MAARSEVEEN
PADA PEMBUKAAN KONFERENSI MEJA BUNDAR
(23 Agustus 1949)

Lampiran 14. 657
PIDATO
KETUA MINGGUAN KOMISI PBB UNTUK INDONESIA (UNCI)
T.K. CRITCHLEY (AUSTRALIA)
PADA PEMBUKAAN KONFERENSI MEJA BUNDAR
(23 Agustus 1949)

Lampiran 15. 658
KETERANGAN
SEORANG DELEGASI REPUBLIK DI DEN HAAG
Mgr. Sugyopranoto Diminta Datang

Lampiran 16. 660
PANDANGAN DR. P.J. KOETS
TERHADAP SOAL INDONESIA-BELANDA

Lampiran 17. 662
KEGIATAN GERILYA DI KALIMANTAN SELATAN

Lampiran 18. 664
USAHA MENAMBAH SEKOLAH MENENGAH DIPERGIAT

Lampiran 19. 665
SEKITAR KONFERENSI MEJA BUNDAR

Lampiran 20. 667
MERAH PUTIH BERKIBAR DI PEGANGSAAN KEMBALI
Gedung Beriwayat Dikembalikan pada Republik

Lampiran 21. 669
STATEMENT WAKIL KETUA UNCI
DALAM SIDANG KMB 27 AGUSTUS 1949

Lampiran 22. 670
BERCAKAP-CAKAP DENGAN DR. A.K. GANI,
GANI DAN RUM-ROYEN STATEMENT

Lampiran 23. 673
RESEPSI KONFERENSI WANITA SELURUH INDONESIA
Dalam Suasana Persatuan yang Erat

Lampiran 24. 676
SULTAN DELI TENTANG PELBAGAI SOAL
Rela Menarik Diri sebagai Zelfbestuurder

Lampiran 25. 678
PENGUMUMAN
KEMENTERIAN PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA

Lampiran 26. 680
PIR TETAP BERDIRI DI BELAKANG DELEGASI REPUBLIK
Kata Mr. Tadjuddin Noor

Lampiran 27. 682
PSII SELURUH INDONESIA BERGERAK KEMBALI

Lampiran 28. 683
INDONESIA DI HARI BESOK
DENGAN SOAL PERDAGANGANNYA
Beberapa Pandangan Drs. Caron dari “Unilever”

Lampiran 29. 686
DESAKAN-DESAKAN KAUM BURUH

Lampiran 30. 688
KONGRES PENDIDIKAN INTER-INDONESIA
HARUS PECAHKAN SOAL-SOAL PRAKTIS

Lampiran 31. 691
MOSI-MOSI DAN PROTES DI MAKASAR

Lampiran 32. 693
SEKITAR PERGURUAN TINGGI DAN PENDIDIKAN UMUM DI INDONESIA

Lampiran 33. 696
KABINET MEMBICARAKAN LAPORAN KMB

Lampiran 34. 698
FORMULE BARU BAGI UNIE INDONESIA-BELANDA
Ujudnya seperti Perjanjian Eropa Barat

Lampiran 35. 699
PUTUSAN-PUTUSAN
KONGRES GERAKAN MUSLIMIN INDONESIA

Lampiran 36. 701
INDONESIA DAN PEKERJAAN-BERSAMA INTERNASIONAL
Pendapat Drs. Tan Goan Po

Lampiran 37. 703
YAMIN PIDATO DI MUKA MASYARAKAT INDONESIA DI DEN HAAG

Lampiran 38. 705
INDONESIA PENTING ARTINYA BAGI DUNIA
Keterangan Dr. Sumitro Djojohadikusumo

Lampiran 39. 707
SUARA PERS DI JAKARTA TENTANG DEVALUASI

Lampiran 40. 709
PERSETUJUAN SEMENTARA NAMEN
Keterangan Hatta Sangat Tiba-tiba

Lampiran 41. 711
STATEMENT DELEGASI REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA

Lampiran 42. 713
AZAS PERSETUJUAN TERCAPAI
Mengenai Uniestatuut

Lampiran 43. 715
MEMERIKSA KEMUNGKINAN MEMBANTU “NEGARA-NEGARA TERBELAKANG”
Satu dari Maksud Kedatangan Anggota-anggota Kongres USA

Lampiran 44. 717
SEKITAR PERSELISIHAN PAHAM DI KMB

Lampiran 45. 719
PIDATO
KETUA DELEGASI REPUBLIK INDONESIA
PADA SIDANG PENUTUP KONFERENSI MEJA BUNDAR
(2 November 1949)

Lampiran 46. 721
KETERANGAN PEMERINTAH
KEPADA BADAN PEKERJA KNI PUSAT
(25 November 1949)

Lampiran 47. 731
SUSUNAN TENTARA PELAJAR
PADA AWAL PERJUANGAN (1945)

Lampiran 48. 733
KESATUAN RESERVE UMUM (KRU)

Lampiran 49. 736
LAPORAN KEADAAN KOTA SOLO
Dari Tanggal 7-8-1949 hingga
Tanggal 11-8-1949

Lampiran 50. 739
THE ROUND TABLE CONFERENCE

Lampiran 51. 742
CRITICISM ON THE RESULTS
OF THE ROUND TABLE CONFERENCE

Lampiran 52. 744
US RESPONSE

Lampiran 53. 746
ON SOBSI

Lampiran 54. 747
DUTCH TROOPS TO LEAVE

Lampiran 55. 749
MUTUAL ADVANTAGES

Lampiran 56. 750
MILITARY ASPECTS OF THE HAGUE AGREEMENT

Lampiran 57. 751
ON THE HAGUE AGREEMENT

Lampiran 58. 753
WORKING COMMITTEE'S SESSION

Lampiran 59. 757
DEBATE AT THE U.N. GENERAL ASSEMBLY

Lampiran 60. 760
A STRONG NATIONAL ECONOMY

Lampiran 61. 762
GENERAL DEBATE OF THE KNIP (1)

Lampiran 62. 764
GENERAL DEBATE OF THE KNIP (2)

Lampiran 63. 766
ON REPUBLICAN PARLIAMENTARY SESSION
(by G. Harsono, *United Press* Special Correspondent)

Lampiran 64. 768
CRITICISMS TOWARD THE
ROUND TABLE CONFERENCE

Lampiran 65. 771
PROVISIONAL CONSTITUTION
OF THE REPUBLIC OF THE UNITED STATES
OF INDONESIA

Lampiran 66. 773
PRESIDENT SUKARNO'S SPEECH

Lampiran 67. 775
RADIO SPEECH
OF COMMANDER IN CHIEF OF THE
NETHERLANDS FORCES IN INDONESIA

Lampiran 68. 777
MESSAGES BY INDIAN LEADERS

Lampiran 69.
TRANSFER OF SOVEREIGNTY 778

Lampiran 70. 782
UNITED STATES REMARKS

Daftar Istilah dan Singkatan

BFO	Bijeenkomst voor Federaal Overleg
	Bijzonder Federaal Overleg
Brig.	Brigade
Cease fire	Gencatan senjata, penghentian tembak-menembak
CGD	Commissie van Goede Diensten
CM	Corps Mahasiswa
CPI	Corps Pelajar Islam
Det.	Detasemen
Div	Divisi
IPI	Ikatan Pelajar Indonesia
IVG	Inlichtingen Veiligheids Groep
Juki	Senapan mesin menengah buatan Jepang
KNIL	Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
KDM	Komando Distrik Militer
KDS	Komando Daerah Solo
KODM	Komando Onder Distrik Militer
KST	Korps Speciale Troepen
KM	Karabijn Mitrailleur
Keki	Senapan mesin ringan buatan Jepang
Ki.	Kompi
KMK	Komando Militer Kota
L.E.	Lee Enfield
Lewis	Senapan mesin ringan buatan Amerika
LJC	Local Joint Committee

MBKD	Markas Besar Komando Djawa
MBB	Mobiele Brigade Besar
MBK	Mobiele Brigade Keresidenan
Mobpel	Mobilisasi Pelajar
MTD	Militaire Transport Dienst
Nefis	Netherlands Expeditionary Forces Intelligence Service
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PI	Polisi Istimewa
PMI	Palang Merah Indonesia
RI	Republik Indonesia
RRI	*Radio Republik Indonesia*
RVD	Regeerings Voorlichtingen Dienst
Si.	Seksi
Status quo	Garis pertahanan daerah Indonesia/Belanda
Straffing	Penembakan tanpa pandang bulu
SWK	Sub Wehrkreise
TBS	Territoriale Batalyon Soerakarta
Terugval basis	Basis untuk mundur
TGP	Tentara Genie Pelajar
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TP	Tentara Pelajar
TRIP	Tentara Republik Indonesia Pelajar
UNCI	United Nations Commission for Indonesia
Wehrkreise	Satuan wilayah gerilya militer
Wingate	Nama Jenderal Inggris tokoh gerilya di Birma.

***

PENGANTAR

Peristiwa-peristiwa besar tahun 1949 secara langsung dipengaruhi oleh peristiwa besar terakhir tahun sebelumnya, yaitu Agresi Militer Kedua, agresi militer Belanda terhadap Republik Indonesia mulai 19 Desember 1948, yang merupakan pelanggaran terhadap Persetujuan Renville yang ditandatangani pada 17 Januari 1948. Peristiwa ini disebut juga Agresi Militer II, Aksi Polisionil Kedua (oleh Belanda), atau Clash Kedua.

Betapa hebat peristiwa itu ditunjukkan oleh kenyataan bahwa dalam agresi ini Belanda mengerahkan seluruhnya 150.000 tentara sementara dalam Agresi Militer I hanya digunakan 90.000 tentara (G. Moedjanto, "Adu Kecanggihan Siasat", *Kompas*, 19 Agustus 2003: 40). Juga oleh kenyataan bahwa, dalam dua agresi militer ini, pengadilan militer Belanda di Indonesia sampai harus mengadili 225 peristiwa tentang perkosaan dan 401 peristiwa tentang perampokan (CL502).

Enam peristiwa tahun 1949—yang merupakan rangkaian akibat logis Agresi Militer Kedua—adalah Serangan Umum 1 Maret 1949, Persetujuan Rum-Van Roijen 7 Mei 1949, Pertempuran Empat Hari di Solo dan Sekitarnya antara 7–10 Agustus 1949, *Cease Fire* 11 Agustus 1949, Konferensi Meja Bundar antara 23 Agustus–2 November 1949, dan akhirnya Penyerahan Kedaulatan 27 Desember 1949.

Serangan Umum 1 Maret 1949

Serangan umum TNI atas ibu kota RI Yogyakarta yang diduduki Belanda, dilancarkan tepat jam 06.00, serentak dengan bunyi sirene Belanda sebagai

tanda berakhirnya jam malam, pada 1 Maret 1949. Disebut juga Operasi Janur Kuning, karena semua anggota pasukan yang jumlahnya 2.000 (termasuk pemuda gerilyawan) mengenakan janur kuning di dada kiri. Serangan dilakukan mendadak dari segala penjuru. Pertempuran terjadi di seluruh kota, dan banyak tangsi Belanda berhasil direbut TNI.

Serangan ini berhasil menduduki Yogya selama enam jam, karena itu film yang kemudian dibuat tentang peristiwa tersebut dinamakan “Enam Jam di Yogya” (SK44-45).

Serangan itu adalah gagasan Sultan Hamengku Buwono IX yang selalu mendengarkan siaran radio luar negeri. Kebetulan, salah satu siaran yang didengarkannya menyampaikan berita tentang rencana Dewan Keamanan PBB untuk membicarakan masalah Indonesia. Untuk menarik perhatian dunia terhadap masalah Indonesia dan untuk membangkitkan kembali semangat juang rakyat yang mengalami penurunan hebat, Sultan punya gagasan untuk menyerang Yogyakarta. Belakangan Suharto mengklaim bahwa dialah yang punya gagasan tersebut (SK47).

Perundingan Rum-Roijen

Perundingan untuk melancarkan jalan ke arah KMB (Konferensi Meja Bundar) di Den Haag, diadakan pada 7 Mei 1949 yang menghasilkan Statemen Rum-Roijen, dengan isi:

1. Tentara Belanda akan ditarik dari Yogyakarta dan Yogyakarta akan diserahkan kembali kepada RI.
2. Pemimpin-pemimpin Republik akan dibebaskan dan dikembalikan ke Yogyakarta.
3. Akan dinyatakan penghentian tembak-menembak antara kedua belah pihak.
4. Akan diadakan KMB antara Negeri Belanda, Republik, dan negara-negara federal untuk membicarakan penyerahan kedaulatan dan pembentukan Uni Belanda-Indonesia. (ABA17)

Pertempuran Empat Hari di Solo dan Sekitarnya

Pertempuran empat hari yang diakibatkan oleh serangan umum terhadap kota Solo dan sekitarnya antara 7–10 Agustus 1949.

“Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pertempuran di Solo justru memiliki skala yang lebih besar dibandingkan dengan serangan umum enam jam di Yogyakarta. Bahkan buku yang ditulis sejarawan

Belanda Prof. Dr. P. M. H. Groen berjudul *Het Nederlands Militair-Strategisch Beleid in Indonesia 1945-1950* menyebutkan, korban jiwa dalam pertempuran itu mencapai 2.526 orang," papar Ketua Dewan Harian Cabang (DHC) Angkatan 45 Surakarta H. S. Sumaryono, Selasa (2/8) (*Kompas*, 3 Agustus 2005: 23).

Tujuan serangan umum ini adalah untuk mendukung kekuatan diplomasi Pemerintah RI, agar memperoleh posisi dan lapangan yang menguntungkan sebelum *cease fire* diberlakukan pada 11 Agustus 1949.

Kekuatan Belanda di Solo waktu itu—sebelum Juli 1949—terdiri atas lima batalion, tidak termasuk kesatuan yang didatangkan dari Yogya, TBS (Territoriale Batalyon Soerakarta), dan Polisi.

Pasukan RI datang dari keempat Rayon Gerilya: Rayon I di bawah Kapten Suhendro, Rayon II di bawah Lettu Sumarto, Rayon III di bawah Kapten Prakoso, dan Rayon IV di bawah Kapten Abdul Latief, masing-masing menyerang dari selatan, dari timur laut, dari utara, dan dari barat dan selatan.

Sasaran tidak hanya kedudukan tentara Belanda di dalam kota, tapi juga pos-pos Belanda di luar kota. Hubungan antara markas Belanda dengan pos-posnya diputuskan, hingga pasukan Belanda terkurung pada kedudukan masing-masing, dan tak dapat saling membantu. Di tiap kampung yang diduduki, dikibarkan Merah-Putih pada tiang listrik, tiang telepon, dan di puncak pepohonan. Dan, bersama rakyat, dibuat rintangan di jalan-jalan.

Sumber pihak Indonesia menyatakan, dalam serangan umum ketiga ini (yang pertama pada 8 Februari 1949 dan yang kedua pada 2 Mei 1949) ikut serta k.l. 2.000 Tentara Pelajar (TP), di antaranya tujuh orang gugur, dan dari kesatuan-kesatuan lain 156 orang. (*PEH28-58*)

Cease Fire

Penghentian tembak-menembak tercapai pada 11 Agustus 1949, sebagai hasil perundingan Indonesia-Belanda di bawah UNCI (United Nations Commission for Indonesia) dengan Ketua Merle Cochran dari AS. (*LU[1949]*)

Konferensi Meja Bundar (KMB)

KMB adalah konferensi Indonesia-Belanda-BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg) di Den Haag dari 23 Agustus sampai 2 November 1949. Delegasi Indonesia dipimpin Mohammad Hatta yang sudah datang sejak 17 Agustus 1949. Keputusannya:

1. Pengakuan kedaulatan dilaksanakan selambat-lambatnya 30 Desember 1949.
2. Segera diadakan pembentukan negara Republik Indonesia Serikat (RIS).
3. Tentang Irian Barat akan diadakan perundingan tersendiri dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan atas RIS.
4. Segera dilakukan pembubaran tentara Hindia Belanda (HB), yaitu KL (Koninklijk Leger) dan KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger), yang kemudian diintegrasikan ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS).
5. Segera dilakukan pembentukan Uni Indonesia-Belanda.
6. RIS akan mengambil alih utang Hindia-Belanda, sebesar 4,3 miliar gulden. (RKZ110)

KMB sarat dengan kompromi:

- Indonesia menerima penyerahan kedaulatan dari Belanda minus Irian Barat.
- Indonesia menyetujui bentuk RIS yang ditolak UUD (Undang-undang Dasar) 1945.
- Indonesia menyetujui dibentuknya Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai Kepala Uni. (ASE170)

Dengan pengakuan kemerdekaan kita, kita akan menanggung segala yang patut kita tanggung menurut kedudukan kita. Segala utang Hindia sebelum penyerahan Jepang, dan patut menjadi tanggungan kita, kita akui sebagai utang kita.

Segala milik bangsa asing selain daripada yang diperlukan oleh negara kita untuk diusahakan oleh negara sendiri, dikembalikan pada yang berhak, serta yang diambil oleh negara akan dibayar kerugian dengan seadil-adilnya. (HKP315)

Konferensi mencapai persetujuan bahwa kedaulatan atas bekas wilayah Hindia Belanda diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 27 Desember 1949, terkecuali Irian Barat yang statusnya akan ditentukan kemudian. (BHS39; SSA42)

Setelah ditinjau daripada sudut pembicaraan yang dilakukan di Bangka ataupun di Jakarta oleh kedua belah pihak, maka ternyata bahwa soal satu atau dua delegasi itu tidak begitu penting. Yang penting ialah bahwa dalam pokok-pokok soal yang akan dibicarakan pada Konferensi Meja Bundar kita mencapai persamaan pendapat atau persetujuan pikiran. [...] tidak masuk akal, bahwa segala masalah yang akan dipecahkan pada Konferensi Meja Bundar yang waktunya telah dirancangkan kira-kira enam sampai delapan minggu, akan dapat kita persoalkan di sini dalam waktu yang kurang satu minggu. (HKP289-290)

Dipukul rata, hasil yang dicapai pada KMB itu boleh dikatakan memuaskan, sungguhpun tidak segala orang sudah merasa puas. Orang yang tidak merasai sulitnya perundingan mudah mengabaikan pendirian dan kemauan lawan. Ia hanya melihat tuntutan sendiri, sebab itu ia tidak akan puas dengan hasil yang dicapai itu. Tetapi dengan peninjauan seluruhnya, historis dan internasional, apa yang kita capai pada KMB itu adalah yang sebaik-baiknya yang mungkin dicapai pada waktu itu. (HKP325)

Penyerahan Kedaulatan (*Souvereniteits-overdracht*)

Penyerahan kedaulatan dari tangan Kerajaan Belanda ke tangan Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949 serentak di Amsterdam pada jam 10.00 dan di Jakarta pada jam 17.00 sebagai salah satu hasil Konferensi Meja Bundar (KMB); di Den Haag dilakukan oleh Ratu Juliana kepada Perdana Menteri Republik Indonesia Mohammad Hatta dan di Jakarta dilakukan oleh Wakil Tinggi Kerajaan Belanda Lovink kepada Sultan Hamengku Buwono IX (HR231).

Presiden Sukarno tak menyukai istilah itu dan menyebutnya pengakuan kedaulatan, karena menurutnya kedaulatan itu sudah diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 (SDA112-113).

Seperti dalam KRI Jilid IV (1948), KRI Jilid V ini mengandalkan diri terutama pada buletin *Antara*. Tetapi sayang, buletin tersebut tidak lengkap (hanya ada untuk bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember 1949, dalam bahasa Inggris).

Itu sebabnya, peristiwa yang paling lengkap liputannya adalah yang terjadi pada bulan-bulan tersebut. Kadang-kadang ada berita yang sumbernya tidak lagi dapat dilacak. Maka di akhir berita itu diberi tanda titik tiga di antara tanda kurung (...). Ini soal teknis, misalnya waktu menggarap bahan

berita itu, penyusun lupa mencantumkan sumber beritanya. Belakangan baru diketahui, sumbernya belum tercantum, tapi teks berita sudah tak ketahuan di mana. Dalam hal ini penyusun berprinsip pada pepatah: Tak ada rotan, akar pun jadi.

Penyusun
31 Januari 2006

Kronik
Revolusi Indonesia
Jilid V (1949)

JANUARI 1949

1949 JANUARI 1.

* *Radio Republik Indonesia* (*RRI*) Solo mulai melakukan monitoring di Desa Balong, dipimpin oleh Harsono dari Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP)/Tentara Pelajar (TP). (*PEH82*)

* Di Desa Briu-Baki terjadi pertempuran antara Tentara Pelajar (TP) Solo melawan tentara Belanda. (*PEH82*)

* Di Desa Mijipinilihan, Solo, terjadi pencegatan atas pasukan artileri Belanda oleh anggota pasukan TP Seksi II Kompi di bawah Pangat. Dalam peristiwa itu 1 jip Belanda hangus terbakar, 2 perwira dan 1 prajurit Belanda tewas, dan 1 stengun, 1 Lee Enfield, dan 1 pistol berhasil dirampas. (*PEH12-13, 82*)

* Di Desa Prenggan terjadi Peristiwa Cemani, saat 6 anggota Seksi Jelata/ Kandar TP Solo gugur, 3 anggota terluka, dan 2 penduduk Prenggan—Pak Kromo dan anaknya—ditawan Belanda. (*PEH82*)

* Berkenaan dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Sumatra Utara, mulai hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Aceh dibubarkan, demikian Maklumat Residen Aceh.

* Seperti diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat Sumatra Utara telah diresmikan pada 13 Desember 1948 dalam upacara yang berlangsung di Tapaktuan, Aceh Selatan, dihadiri oleh para anggota dari Keresidenan Aceh, Sumatra Timur, dan Tapanuli. (TS3)

* Sehubungan dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Sumatra Utara, maka Badan Pekerja Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pun dibubarkan dan mulai hari ini pemerintahan umum di Keresidenan Aceh dinyatakan tidak ada lagi.

  Penjelasan ini termuat dalam Maklumat Residen Aceh No. 73-M.R.A. (TS3)

* Persatuan Sastrawan Indonesia Cabang Tapaktuan menerbitkan majalah bulanan *Teruna*, memuat karangan-karangan bertema ilmu pengetahuan, kebudayaan dan sejarah perjuangan, dengan sidang pengarang Dhahiry D. (ketua), Tezet, M. Sanusi, Manursja, dan Warrahman As. (TS3)

1949 Januari 2.

* Kompi Prakoso dari Tentara Pelajar (TP) Solo bergerak ke Desa Sawit. (*PEH82*)

* Wakil Republik Indonesia di luar negeri, L. N. Palar, meminta data sekitar pemerintahan di daerah Aceh kepada Gubernur Sumatra Utara di Kotaraja (kini Banda Aceh). Data dimaksudkan sebagai bahan pegangan untuk perjuangan diplomasi di luar negeri. (TS3)

* Markas Pertahanan Aceh Timur mengeluarkan alat pembayaran bernilai Rp100,00 yang disebut *Bon Contan*. *Bon Contan* berupa uang kertas, ditandatangani atas nama Markas Pertahanan Aceh Timur oleh Usman Adamy, “dipersaksikan” oleh Bupati Aceh Timur, Tk. Maimun. (TS6)

* Di front Tanah Karo terjadi pertempuran antara para prajurit RI melawan tentara Belanda. Sebuah kendaraan Belanda terkena ranjau dan tiga serdadunya tewas. (TS28)

1949 JANUARI 3.

* Persatuan Sastrawan Indonesia Cabang Labuhan Haji mengadakan pertemuan dengan utusan Persatuan Sastrawan Indonesia Pusat dari Kotaraja (kini Banda Aceh), Ismail Suny.

* Dalam pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota dan undangan tersebut Ismail Suny selaku Wakil Ketua Badan Pendidikan Persatuan Sastrawan Indonesia Pusat menjelaskan tentang perkembangan organisasi sejak didirikan dan rencana kerja untuk masa mendatang. Ia pun mengharapkan agar anggota organisasi aktif melibatkan diri dalam perjuangan kemerdekaan dengan bergabung dalam barisan bersenjata dan organisasi perjuangan lainnya. (TS6)

1949 JANUARI 4.

* Jam 04.30 para prajurit RI menggempur pertahanan Belanda di front Tanah Karo. Akibatnya, 22 serdadu Belanda tewas, 4 orang luka ringan, dan 4 kendaraan hancur. Di pihak RI, 2 orang gugur, 1 orang tertangkap, 2 orang luka berat, dan 4 luka ringan. (TS28)

1949 JANUARI 5.

* Peristiwa Joko Songo: Pertempuran Tentara Pelajar (TP) Solo melawan Belanda di Desa Pablengan, Matesih, yang mengakibatkan sembilan anggota gugur dan seorang hilang. (*PEH82-83*)

1949 JANUARI 6.

* Tentara Pelajar (TP) Solo menyerang pos Belanda di jembatan Pongpongan, Delanggu. (*PEH83*)

* Panglima Tentara Territorial Sumatra Kolonel Hidajat mengeluarkan seruan kepada rakyat dan anggota Angkatan Perang dalam bentuk Komunike No. 21/PDRI-1949 a.l. sbb.:

  "Diperintahkan supaya diteruskan perlawanan totaliter, sampai kita menang dan sebelum diterima lima syarat Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang telah diinstruksikan kepada Wakil Republik di UNO tanggal 23 Desember 1948. Kami berada di tengah-tengah saudara-saudara seperjuangan dan Tuhan akan melindungi kita.

... penangkapan pemimpin-pemimpin kita adalah suatu penghinaan dan yang harus ditebus dengan menghancurkan musuh di Tanah Air kita. Kepada rakyat dan anggota Angkatan Perang diserukan supaya bersatu memusnahkan kebiadaban dan kebuasan Belanda dan *cease fire* tidak boleh diadakan jika tidak ada perintah dari Panglima Tentara Territorial Sumatra. Seluruh kedudukan musuh sedang dikepung, terutama di Sumatra Tengah menanti kehancurannya saja lagi, sedang di Sumatra Timur Angkatan Perang kita telah memasuki kota Medan dari empat jurusan dan semua kaum buruh *onderneming* di Sumatra Timur berontak terhadap Belanda dengan menjalankan politik bumi hangus.

... uang kertas Nica yang disebarkan di tempat-tempat yang diduduki musuh telah disobek-sobek oleh rakyat, sedang ORIPS naik kursnya. Perlawanan rakyat di kota yang diduduki musuh bertambah hebat. Di mana-mana terjadi terus-menerus pembakaran, penculikan, pembunuhan, dan perlawanan terhadap musuh.

Musuh menyerobot bahan-bahan makanan rakyat di sekitar mereka dan melakukan kebiadaban terhadap perempuan dan anak-anak kita. Rakyat Indonesia tidak suka mempedulikan *C* dari Dewan Keamanan sebelum syarat-syarat kita diterima." (TS6-8)

* Penerangan TNI Divisi X mengeluarkan Komunike No. 006-H-1949 sbb.:

"Meskipun ada berita-berita radio Belanda tentang perintah Letnan Jenderal Spoor (Panglima Tentara Belanda di Indonesia) untuk mengadakan gencatan senjata di Sumatra pada tanggal 5 Januari 1949 pukul 12.00 w.I., namun pihak Komandan TNI ataupun Pemerintah Darurat Republik Indonesia tidak ada mengeluarkan suatupun penegasan tentang penghentian tembak-menembak itu.

Berdasarkan kepada batas-batas yang telah diberikan oleh Pemerintah Darurat Republik Indonesia pada tanggal 23 Desember 1948 kepada Delegasi Republik Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berdasar kepada Perintah Harian Panglima Sumatra tanggal 28 Desember 1948 yang ditandatangani oleh Kolonel Hidajat, maka seluruh Angkatan Perang Republik Indonesia dan rakyat Indonesia umumnya di Daerah Aceh, Langkat, dan Tanah Karo diperintahkan harus taat dan harus melawan pasukan-pasukan Belanda dengan segenap tenaga.

Kita akan meneruskan perang suci ini sampai tercapai kemerdekaan yang abadi untuk seluruh Indonesia. Tiap-tiap saat seluruh Tentara dan Rakyat tidak boleh lalai dalam menjalankan kewajibannya masing-masing." (TS8)

1949 JANUARI 7.

* Wakil Pemerintah Belanda di Dewan Keamanan PBB Dr. J. H. van Roijen menerangkan kepada DK bahwa tuduhan tentang disekapnya para pemimpin RI di dalam kerangkeng kawat berduri adalah tidak benar. Katanya, para tawanan di Bangka menikmati kebebasan di seluruh pulau yang luasnya lebih dari 4.500 mil persegi (*enjoy complete liberty throughout the entire island, which has an area of over 4500 square miles*). (AT249)

* *Radio Republik Indonesia* di Kotaraja (kini Banda Aceh) dan *Radio Rimba Raya* menyiarkan instruksi Pemerintah Darurat Republik Indonesia kepada Wakil Indonesia di luar negeri yang menyatakan bahwa Republik Indonesia hanya bersedia menjalankan *cease fire* (gencatan senjata) dan berunding dengan Belanda, dengan syarat-syarat. (TS10)

* Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kotaraja (kini Banda Aceh), Dr. N. Ratumbuisang, menyerukan kepada barang siapa yang ingin dengan sukarela menyumbangkan tenaga untuk PMI Bagian Mobiele Colonne supaya mendaftarkan namanya pada Kantor Rumah Sakit Umum Kotaraja mulai hari ini. (TS10)

* Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo mengeluarkan seruan sbb.:

  "Sekarang perjuangan kemerdekaan Negara kita meminta kepada kita sekalian supaya lebih mematuhkan diri kepada peraturan-peraturan Agama. Oleh sebab itu, dengan penuh percaya akan ketaatan sekalian saudara-saudara dari anggota Tentara Nasional Indonesia Divisi X, saya perintahkan supaya mulai dari sekarang lebih giat mencari keridlaan Allah dan menyesuaikan diri lebih dari yang sudah-sudah dengan segala apa yang menjadi keridlaan Allah, untuk keselamatan dan kemerdekaan Bangsa dan Tanah Air kita." (TS10)

* Juru bicara TNI Divisi X Komando Sumatra mengumumkan:

"Pagi ini, pukul 06.00 w.I., sebuah kapal perang Belanda muncul dari jurusan timur dengan maksud melakukan pengintaian.

Pada pukul 06.45 kapal tersebut menurunkan sebuah sekoci berisi tentara, lalu menyerobot sebuah *motorboat* yang berlabuh di perairan Lhokseumawe. Melihat kelancangan ini, Angkatan Perang kita pun menembaki sekoci itu dengan tomong.

Pukul 06.49 tembak-menembak terhenti sebentar, tetapi pada pukul 07.00 musuh terus-menerus menembak ke darat dengan meriam selama 55 menit.

Setelah pada pukul 07.15 kapal itu berangkat, keadaan pun aman kembali. Dalam peristiwa ini, 2 orang penduduk tewas, 3 orang luka berat dan 3 orang luka enteng, sementara seorang anggota tentara mengalami luka enteng terkena pecahan peluru." (TS10)

1949 JANUARI 8.

* Tentara Pelajar (TP) Solo menyerang pos Belanda di jembatan Sanggung, Kartosuro. (*PEH83*)

* Badan Perbekalan Perang Sabil (BPPS) Daerah Aceh mengeluarkan pengumuman sbb.:

  "Badan Perbekalan Perang Sabil (BPPS) Daerah Aceh memperingatkan masyarakat bahwa pada tanggal 19 Desember 1948 tentara Belanda mulai melancarkan serangannya dengan tiba-tiba terhadap Republik Indonesia.

  Anak-anak dan saudara-saudara kita sekarang di garis depan sedang berjuang menangkis serangan Belanda itu dengan segala kekuatan. Dalam soal perjuangan, meskipun cukup alat senjata untuk melawan musuh, kalau perbekalan kurang maka akhirnya tenaga kita menjadi lemah.

  Oleh sebab itu, kami serukan pada saudara-saudara, terutama pada cabang-cabang Badan Perbekalan Perang Sabil, supaya mengumpulkan secepat mungkin perbekalan dan mengirimkan lapurannya kepada Pusat BPPS di Banda Aceh.

  Pintu jihad telah terbuka. Dalam keadaan seperti dewasa ini kita tidak boleh lalai lagi. Segala usaha hendaklah dilaksanakan secepat-cepatnya dan segala sengketa hendaknya sama-sama kita hilangkan. Bulatkanlah tenaga pada satu jurusan, yaitu menangkis serangan musuh." (TS10-11)

1949 JANUARI 9.

* Gerilya Republik menyerang Yogyakarta, khususnya Hotel Merdeka yang dihuni para pejabat Belanda.

  George McTurnan Kahin, yang waktu itu berada di Yogyakarta, menyaksikan dengan mata kepala sendiri, betapa gencar serangan itu. Tetapi peristiwa itu tak pernah disinggung dalam sejarah Indonesia, jadi termasuk yang dilupakan dalam sejarah nasional. (Asvi Warman Adam, *Kompas*, 1 Januari 2000)

* Gerilya Solo melakukan pencegatan terhadap tentara Belanda di Desa Nigasan. (*PEH83*)

* Gerilya Solo menyerang pos Belanda di Sanggrahan, Tegalgondo. (*PEH83*)

* Gerilya Solo beberapa kali melakukan pencegatan di Ngasem dan Banyudono. (*PEH83*)

* Pesawat musuh melakukan provokasi di udara Lhokseumawe dengan terbang rendah dan menukik. Setengah jam kemudian, setelah ditembaki dengan meriam pertahanan Republik, ia menghilang ke jurusan laut. (TS11)

* Di gedung bioskop Laut Tawar, Takengon, berlangsung pertemuan umum yang diadakan oleh Pejabat Penerangan Kabupaten Aceh Tengah, dihadiri oleh para pembesar sipil dan militer serta rakyat umum. Dalam kesempatan itu Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo Tgk. Muhd. Daud Beureueh menyampaikan amanat a.l. sbb.:

  "Manusia dilahirkan Tuhan ke alam wujud dengan berjodoh-jodoh dan dari kedua makhluk itu lahirlah manusia beribu-ribu yang bertebar meratai alam ini.

  Masa itu telah diatur, antara seorang dengan lainnya berhak hidup dan mengurus dirinya sendiri. Di samping itu telah diturunkan Tuhan utusan-Nya untuk memimpin manusia yang bertebaran itu.

  Bagi orang yang tiada patuh pada amanat Tuhan, terbitlah nafsu serakahnya, sehingga milik orang lain pun mau dirampasnya.

Kita telah ditakdirkan Tuhan hidup dalam alam yang boleh disebut Syurga Tuhan, di tanah yang subur dan karya raya. Kita telah merasakan nikmat dan karunia Tuhan itu, lebih-lebih kita telah ber-Negara dan berdaulat, mengatur hidup sendiri dengan aman dan sentosa.

Sekarang nikmat yang kita rasai itu hendak direbut oleh orang yang tamak dan serakah, yaitu Belanda, yang mengatakan bangsa Indonesia ini tidak berhak mengatur kehidupan sendiri dan masih biadab, yang belum boleh ber-Negara dan berdaulat.

Dewasa ini dia mengadakan serangan-serangan cara besar-besaran untuk memenuhi nafsu tamak dan serakahnya itu.

Tuhan menyuruh kita menyirami bumi Indonesia ini dengan darah, harta nyawa, untuk mempertahankan Negara, Bangsa, dan Agama dari serangan musuh yang durjana. Semua warga negara wajib mempertahankannya, tidak terkecuali kaya dan miskin. Bahkan yang terutama diperintahkan Tuhan adalah pada orang-orang yang kaya, gagah, dan bertenaga."

* Gubernur Militer mengakhiri amanatnya dengan harapan agar rakyat bahu-membahu dan bersatu padu dalam melanjutkan perjuangan." (TS11-13)

1949 JANUARI 10.

* Pihak Belanda memberitahukan kepada Mohammad Rum bahwa Pemerintahannya tidak mengakui lagi Pemerintah Republik yang dianggapnya sudah bubar sebagai negara dan tak punya daerah kekuasaan lagi. (*PEH3*)

* Sejumlah wartawan dari berbagai media massa di Kotaraja (kini Banda Aceh), yaitu *Penerangan Tentara*, *Pejabat Penerangan Aceh*, *Antara*, dan *Semangat Merdeka*, berangkat ke salah satu front di Sumatra Timur.

Dalam upacara perpisahan yang diadakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kring Kotaraja, Kepala Jabatan Penerangan Aceh Osman Raliby berpesan agar para wartawan mengadakan koordinasi seerat-eratnya dengan koresponden-koresponden perang yang telah lebih dulu ditempatkan di berbagai front pertempuran.

Kepala Penerangan Divisi X Kapten A. Gani Mutyara sementara itu mengharapkan agar di samping berita, para wartawan mengirim pula *inside*

information kepada Pemerintah dan Komando TNI di Kotaraja untuk bahan penelitian dan penilaian situasi. (TS11)

* Di pekarangan Masjid Raya Baiturrakhman Kotaraja (kini Banda Aceh) berlangsung acara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW., dipimpin oleh Tgk. Hamzah Junus dari Pejabat Agama Sumatra Utara.

  Dalam pidatonya Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo Tgk. Muhd. Daud Beureueh mengungkapkan kebesaran Nabi Muhammad dan menguraikan berbagai contoh teladan yang dapat diambil daripadanya.

  Zainal Arifin Abbas dan M. Yunan Nasution menjelaskan bahwa Nabi Muhammad telah berjuang dengan gigih dan penuh penderitaan dalam menegakkan agama Islam yang suci. Mereka mengharapkan agar dalam perjuangan membela kemerdekaan Republik Indonesia kita mengambil teladan dari perjuangan para pahlawan dan ulama Aceh yang dengan gigih melawan Belanda di masa lalu.

  A. Mu'thie menegaskan perlunya keyakinan dan keimanan putra-putri Indonesia dalam perjuangan menghadapi musuh.

  Said Abubakar sebagai pembicara terakhir menyatakan: Selama kita masih menjunjung Nabi Besar, selama dalam dada kita masih ada jiwa Islam, selama itu kita tidak ingin dijajah. (TS13-15)

1949 JANUARI 11.

* Belanda melancarkan *kanonase* ke Desa Krecek, Solo, disusul penggerebekan dan pembakaran rumah-rumah penduduk yang berdiri di tepi jalan besar. (*PEH83*)

1949 JANUARI 12.

* Belanda melakukan penggerebekan di Desa Sawahan, Solo. Tandio dari Tentara Pelajar (TP) gugur, dan Heru Supardi terluka. (*PEH83*)

* Rombongan ulama terkemuka Aceh melakukan perjalanan keliling di kampung-kampung dalam lingkungan Kabupaten Aceh Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, dll. untuk mengobarkan semangat jihad melawan Belanda yang hendak menjajah kembali Indonesia. Rombongan terdiri dari Tgk. H. Ahmad Hasballah Indrapuri, Tgk. Di Lam U, H. Abdurrachman Sjihab,

Bachtiar Junus, Junus Harahap, A. R. Hasjim, Mawardi Noor, dan Ismail Muhammad.

Para ulama menyampaikan berbagai nasihat dan tuntunan kepada penduduk sehubungan dengan kewajiban berjuang mempertahankan Tanah Air. Di semua tempat yang didatangi, rombongan mendapat sambutan meriah dari penduduk yang siap sedia melancarkan perang gerilya apabila Belanda berhasil memasuki Aceh. (TS15)

1949 JANUARI 13.

* Diumumkan hari ini bahwa Jabatan Penerangan Keresidenan Aceh telah diubah menjadi Jabatan Penerangan Provinsi Sumatra Utara, berkedudukan di Kotaraja (kini Banda Aceh).

  Oleh Komisaris Pemerintah Pusat di Bukittinggi, Kepala Jabatan Penerangan Aceh, Osman Raliby, telah diangkat menjadi Kepala Jabatan Penerangan Provinsi Sumatra Utara pada 1 Desember 1948. (TS15)

* Komandan Angkatan Laut RI Daerah Aceh, Kapten R. E. Martadinata, mengeluarkan pengumuman No. 1/P/Cdt/AL berisi seruan agar para calon anggota Angkatan Laut selekas mungkin berkumpul di Jalan Tutupan No. 80 Kotaraja (kini Banda Aceh) untuk mengikuti ujian dan pemeriksaan badan.

  Menurut pengumuman yang dimuat dalam harian *Semangat Merdeka* itu mereka sudah harus hadir di tempat yang ditentukan selambat-lambatnya pada 25 Januari 1949 antara pukul 18.30 sampai 12.30. (TS15)

* Gubernur Sumatra Utara Mr. S. M. Amin mengeluarkan Maklumat No. 6-KO-1949 tentang larangan memasukkan uang ORIPS ke Daerah Aceh. Barang siapa memasukkan uang ORIPS ke “daerah larangan” tersebut dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp100,00, sedangkan uang yang menjadi tanda bukti disita dan dimusnahkan.

  Yang dimaksud dengan “daerah larangan” adalah sebagian daerah Provinsi Sumatra Utara yang meliputi Keresidenan Aceh. Dasar pertimbangan untuk mengeluarkan maklumat tersebut ialah adanya kemungkinan Belanda mengalirkan uang ORIPS yang telah disitanya dari daerah yang

telah didudukinya ke Daerah Aceh dengan maksud menimbulkan inflasi dan kekacauan dalam keuangan di Aceh.

Maklumat dikeluarkan dengan persetujuan Badan Eksekutif Dewan Perwakilan Sumatra Utara. (TS16)

* Juru bicara TNI Divisi X menerangkan bahwa pada jam 10.05 w.I. pesawat Catalina dan bomber musuh menembaki lokomotif No. 82 yang sedang berjalan antara Peudada dan Cot Lureng. Satu tembakan mengenai lokomotif tersebut, tapi korban tidak ada. (TS16)

* Pemimpin Partai Masyumi Kabupaten Aceh Pidie mengumumkan susunan pengurus baru, terdiri atas (Penasihat) Tgk. Abdul Wahab, Bupati Aceh Pidie, (Ketua Umum) Ibrahim Abduh, Camat Kewedanaan Sigli, (Ketua I) Ramali Dt. Sati, Direktur SMP Sigli, (Ketua II merangkap Ketua Penerangan) M. Ajub Sami, Kepala Penerangan Kabupaten Aceh Pidie, (Sekretaris I merangkap Ketua Organisasi) Abdullah Adik, anggota Badan Pekerja Dewan Perwakilan Kabupaten Aceh Pidie, (Sekretaris II) M. Said Jatim, (Bendahara merangkap Ketua Keuangan) Bahauddin, Camat kota Sigli, dan sejumlah pembantu. (TS16)

* Kantor Pusat Tambang Minyak RI Sumatra Utara mengumumkan bahwa Abdur Rachman yang menurut Ketetapan Gubernur Sumatra Utara No. 84-GSO-P-48, tertanggal 27 Desember 1948, diangkat menjadi Pemimpin Umum Tambang Minyak RI Sumatra Utara, hari ini telah ditempatkan kembali pada jabatannya. Wakilnya, M. Hasan Abbas, telah menyerahkan jabatan kepada Abdur Rachman pada 11 Januari 1949. (TS16-17)

* Dengan ketetapan Gubernur Sumatra Utara No.7-GSO-P-49, terhitung mulai 14 Desember 1948 nama-nama berikut ini telah ditetapkan sebagai anggota Badan Eksekutif Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatra Utara: (1) Amelz, (2) M. Nur Ibrahimy, (3) M. Yunan Nasution (4) Malanton Siregar, dan (5) Jahja Siregar. (TS17)

1949 Januari (pertengahan).

* Mr. Brouwer dan pembantunya (sebagai utusan pribadi Wakil Tinggi Mahkota Belanda Dr. Beel) mendatangi Hatta dkk. dalam tahanan di

Menumbing, Bangka. Mr. Brouwer atas nama Dr. Beel menyampaikan kepada para tawanan bahwa Pemerintah Hindia Belanda tidak mengakui lagi RI sebagai organisasi kenegaraan yang punya wilayah dan pemerintah sendiri. Karena itu ia bicara kepada Hatta dll. tidak sebagai Perdana Menteri dan pejabat-pejabat resmi, melainkan sebagai tokoh masyarakat Indonesia.

Ia pun menyampaikan pesan Dr. Beel bahwa para tawanan akan diperkenankan bergerak bebas di seluruh Bangka, apabila mereka mau berjanji tidak akan menjalankan kegiatan politik. (AT248)

1949 JANUARI 15.

* Anggota KTN Merle Cochran dan Critchley datang di Menumbing, Bangka, untuk mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Hatta dkk. Mereka heran melihat bahwa para tawanan berada dalam kerangkeng kawat berduri, padahal pada 7 Januari sebelumnya Van Roijen di DK PBB membantah kenyataan itu.

  Dalam kesempatan itu Hatta mengemukakan dengan tegas pendirian Pemerintah RI:

  1. Menolak rencana Beel untuk membentuk pemerintah federal sementara tanpa RI.
  2. Menolak ajakan Beel untuk turut serta dalam pemerintah federal sementara sebagai perorangan; mendukung konsep Negara Indonesia Serikat dengan syarat Pemerintah RI sebagai negara merdeka dan berdaulat ikut serta membentuknya lewat perundingan.
  3. Menolak berunding dengan pihak Belanda selama masih berada dalam tahanan dan belum dipulihkan kekuasaannya di Yogyakarta.
  4. Menegaskan bahwa Pemerintah RI belum lumpuh, karena sebelum ditawan, Pemerintah RI telah memberikan kuasa kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintah darurat di Sumatra. (AT249-50)

* Pemimpin BFO memilih sepuluh tokoh terkemuka RI yang dianggap dapat diajak berunding dengan BFO. Pemilihnya: 13 wakil dari negara-negara ciptaan Belanda itu. Dari 23 calon, terpilih 10 orang terkemuka, yaitu: Sutan Sjahrir, Sultan Hamengku Buwono, Hj. A. Salim, Sukarno,

Mohammad Hatta, Prof. Mr. Supomo, Mr. Assaat, dan Dr. Darmasetiawan dari pihak RI, dan Abdulkadir Widjojoatmodjo dan Mr. Urip Kartohardjo dari pihak BFO. (AT260)

* Residen Sudiro dan Mayor Achmadi melakukan rapat pemerintahan di Desa Nongko, Solo, dalam rangka koordinasi pemerintahan militer (gerilya). (*PEH83*)

* Komandan Sub-Wehrkreise (SWK) 106 Arjuna Mayor Achmadi mengadakan rapat dengan Staf Komando Rayon, yang mengambil keputusan untuk: melaksanakan operasi gerilya seterusnya; menyusun rencana serangan serempak atas Solo; dan melakukan Wingate. (*PEH83*)

* Pejabat Sosial Daerah Aceh menganjurkan kepada seluruh warga negara agar di samping menyumbangkan tenaga langsung demi pertahanan dan perjuangan, dapat juga mengusahakan tanam-tanaman pangan seperti padi, jagung, ubi, ubi rambat, kacang tanah, kacang kuning, kacang ijo, pisang, dsb. Semua itu untuk persediaan pasukan gerilya kita nanti, apabila terpaksa bertempur berpuluh tahun dalam mempertahankan kedaulatan negara. Segala tenaga perlu dimanfaatkan dan tak boleh terbuang sia-sia. (TS 17)

* Komandan kota Kotaraja (kini Banda Aceh) mengeluarkan pemberitahuan No. 28-I-U-1949 berisi permintaan kepada penduduk agar apabila pesawat musuh menjatuhkan selebaran, penduduk mengumpulkannya dan menyerahkannya kepada Komando Kota.

  Selanjutnya, penduduk dilarang menyimpan selebaran tersebut atau membicarakan isinya. Apabila larangan ini dilanggar, akan diambil tindakan sesuai dengan undang-undang tentara. (TS17)

* Gubernur Sumatra Utara mengeluarkan Peraturan Gubernur Sumatra Utara No. 21-IN-GSO-49 pada 15 Januari 1949 berisi ketetapan bahwa untuk setiap pemotongan hewan dikenakan tarif tambahan sebesar Rp400,00 untuk kas Provinsi Sumatra Utara. Ketetapan ini berlaku untuk pemotongan hewan yang akan diperdagangkan maupun karena terpaksa, baik untuk hewan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. (TS17)

* Menurut juru bicara TNI Divisi X Komando Sumatra, hari ini terjadi pertempuran di Bukit Securai, Langkat Area, antara pasukan Republik dengan pasukan Belanda. Dalam pertempuran itu di pihak Republik seorang luka parah dan seorang luka enteng, sedangkan di pihak Belanda 2 orang tewas dan 4 orang luka parah. (TS21)

1949 JANUARI 16.

* Dua kapal Belanda menyerobot sebuah tongkang di Kuala Perlis, Langkat. Hari ini juga, jam 23.00, sebuah kapal Belanda melakukan serangan, yang dibalas dengan tembakan meriam Republik. (TS21)

1949 JANUARI 17.

* Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo mengeluarkan Penetapan No. 56-GM-1949 berisi pernyataan bahwa bahan makanan berupa beras, padi, dll. yang dibawa secara tidak sah menurut Peraturan Komandan Daerah Militer Istimewa tanggal 5 November 1948 No. 2-1948 akan disita dan diserahkan kepada BPBM (Badan Pembagian Bahan Makanan). Seperempat dari harga bahan makanan tersebut diserahkan sebagai hadiah kepada penangkapnya. Adapun harganya adalah harga beli yang biasa bagi BPBM. (TS19)

1949 JANUARI 18.

* Sutan Sjahrir dibebaskan dari tahanan di Prapat oleh Belanda dan kembali ke Jakarta. Ia tiba di Jakarta atas undangan Pemerintah Hindia Belanda untuk mengadakan pertemuan dengan PM Drees yang waktu itu berkunjung ke Indonesia untuk berkonsultasi dengan Beel. (AT259)

  Rakyat Aceh Tengah mengambil resolusi sbb.:

  "Kami rakyat Aceh Tengah yang berjumlah 120.000 jiwa mendesak dengan sekeras-kerasnya dengan perantaraan Gubernur Sumatra Utara kepada UNO (United Nations Organization) agar Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan semua pemimpin-pemimpin Republik yang lain, dengan segera dilepaskan dari tahanan Belanda dan dikembalikan kepada Rakyat Indonesia.

  Kami menyokong dengan sepenuh-penuhnya lima syarat dasar perundingan yang telah dimajukan oleh Pemerintah Darurat Republik Indonesia kepada UNO. Kami tetap menjunjung tinggi amanah Presiden Soekarno

yang berbunyi: Pertahankan Republik dengan segala daya upaya dan dengan keuletan semangat walaupun Republik tinggal sebesar payung. Pakailah ini sebagai modal untuk terus berjuang." (TS20)

* Diumumkan di Kotaraja (kini Banda Aceh) bahwa anggota Pengurus Besar Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (Gasida) yang berangkat ke India dengan pesawat sumbangan rakyat Aceh, RI.001 Seulawah, telah berada di India sejak 7 Desember 1948.

  Dalam surat M. Djuned Js., Said Muhammad dan Wahi, tertanggal 30 Desember 1948, disebut bahwa mereka berada dalam keadaan selamat dan pada 7 Desember 1949 telah sampai di Kalkuta. Dijelaskannya, perhatian bangsa-bangsa Asia terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia sangat besar. Agresi Militer Belanda II telah menggegerkan seluruh Asia. Mereka menyerukan kepada rakyat Aceh khususnya dan bangsa Indonesia umumnya supaya meneruskan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. "Dengan tekad yang satu dan bulat hancurkanlah musuh yang ingin menjajah kita," demikian akhir surat. (TS20)

1949 JANUARI 19.

* Mr. A. A. Maramis dan Dr. Sudarsono menyampaikan memorandum kepada Ketua Konferensi New Delhi Jawaharlal Nehru berisi keterangan tentang keadaan Indonesia dan politik Pemerintah RI serta pendirian Pemerintah RI dalam menghadapi pihak Belanda. (AT252)

1949 JANUARI 20.

* Diprakarsai dan dibuka oleh Jawaharlal Nehru, Conference on Indonesia di New Delhi untuk membicarakan soal Indonesia sebagai reaksi atas Agresi Militer II Belanda terhadap Republik Indonesia berlangsung sampai 23 Januari 1949. Hadir Afghanistan, Australia, Arab Saudi, Birma, Ethiopia, India, Irak, Mesir, Lebanon, Pakistan, Filipina, Srilanka (diwakili oleh SWRD Bandaranaike), Suriah, dan Yaman. RRT, Nepal, Selandia Baru, dan Thailand hadir sebagai peninjau (AT251, 259).

* Delegasi Indonesia terdiri dari: Mr. A. A. Maramis, Menlu PDRI; Mr. Utojo, wakil RI di Singapura; Dr. Sudarsono, wakil RI di India; H. Rasjidi, wakil RI di Mesir; Dr. Sumitro Djojohadikusumo, wakil perdagangan RI di AS.

Delegasi Indonesia memasuki konferensi dengan sebuah memorandum yang isinya:

1. Dengan segera harus dimerdekakan semua pembesar Republik yang ditahan Belanda.
2. Penarikan tentara Belanda sebelum bulan Maret 1949.
3. Blokade Belanda terhadap Republik dari laut dan udara harus dihentikan.
4. Pemerintah Republik harus dapat menjalankan kedaulatan serta kewajibannya.
5. Pada 1 Maret harus sudah didirikan sebuah Pemerintah Interim Indonesia dengan sifat-sifat dan dasar-dasar kebangsaan yang sesungguhnya.
6. Mengadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Perancang Undang-Undang Dasar pada 1 Juni di bawah pengawasan Komisi PBB dengan memberikan kemerdekaan berbicara, bersidang, serta persiapan guna mengadakan pemilihan umum.
7. Penyerahan kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat harus dilakukan pada 1 September 1949.
8. Pada 1 September itu juga seluruh tentara Belanda ditarik dari seluruh Kepulauan Indonesia.(TS24)

* Dalam kesempatan tersebut wakil Birma mengusulkan dibentuknya tentara sukarela untuk membantu bangsa Indonesia melawan agresor Belanda. India dan Pakistan melarang pesawat KLM mendarat, hingga pesawat-pesawat tersebut terpaksa melewati Mauritius (*LU[1949]*; SSA17).

* Lewat *RRI* Banda Aceh dan *Radio Rimba Raya*, Ketua PDRI Mr. Sjafruddin Prawiranegara dan Panglima Sumatra Kolonel Hidajat mengirimkan bahan-bahan informasi mengenai keadaan di Indonesia kepada delegasi Indonesia (TS22).

* Ketua PDRI Mr. Sjafruddin Prawiranegara mengirim radiogram kepada Menteri Luar Negeri Mr. A. A. Maramis yang sedang menghadiri Conference on Indonesia di New Delhi sbb.:

dr maramis

menteri luar negeri rep indonesia di new delhi ttk

pada hari pembukaan konp asia ini saja atasnama pemerintah darurat republik indonesia dan rakjatnja mengambil kesempatan ini utk mengutjapkan setinggi tinggi rasa terimakasih dan utjapan selamat kepada semua pemerintah jang oleh karena memenuhi undangan pm india nehru dengan segala senang hati telah mengirim wakil wakilnja utk menghadiri konp ini ttk kami insaf bahwa konp asia tidak akan dapat terudjud djikalau pemerintah2 jang turut ambil bagian didalamnja tidak pertjaja bahwa masalah2 indonesia adalah berhubungan rapat dgn masaalah negara mereka ttk perdamaian dan keamanan di indonesia bukanlah satu perkara jang hanja mengenai bangsa indonesia sadja koma maupun belanda koma bahkan djuga ini adalah satu perkara jang penting mengenai semua negara tetangga kita dan dunia umumnja ttk oleh sebab itu kita jakin bahwa konp asia akan dapat mentjari djalan dan tjara untuk menghentikan kekedjaman atau agressi belanda di indonesia dan akan dapat pula meletakkan dasar2 utk satu perdamaian jang kekal di asia dan seluruh asia umumnja ttk semoga konp asia selandjutnja mendjadi satu tjontoh bagaimana tjaranja bekerdjasama antara bangsa2 utk mentjapai tjita2 jang tlh termaktub didalam piagam atlantik ttk sebagaimana telah kami njatakan kepada paduka tuan pandit nehru koma pemerintah dan rakjat indonesia dengan segala senang hati sudi menerima satu2 keputusan jang adil dalam pertikaian indonesia belanda ini menurut garis2 besar jang telah tertjantum didalam lima dasar jang telah dinjatakan oleh pemerintah republik berhubung dengan perintah hentikan tembak menembak dan perundingan2 selandjutnja dengan belanda ttk sekiranja keputusan seperti itu tidak bisa djuga tertjapai meskipun tekanan internasional sudah ditimpakan atas belanda koma maka rakjat indonesia sememangnja sudah sedia meneruskan perdjuangannja menentang imperialisme belanda hingga tjita2 kemerdekaannja tertjapai dgn sepenuhpenuhnja ttk

ketua pemerintah darurat republik indonesia mr sjarifuddin prawiranegara (TS22-23)

* Dalam pidatonya hari ini Presiden Truman menyatakan bahwa Pemerintah Amerika bersedia memberi bantuan militer kepada negara-negara yang

mau "*cooperate in maintaining peace and security*" (bekerja sama mempertahankan perdamaian dan keamanan), yang berarti secara tidak langsung memberi peringatan kepada Pemerintah Belanda. (AT254)

1949 JANUARI 22.

* Juru bicara TNI Divisi Komando Sumatra mengumumkan bahwa pada jam 12.30 sebuah kapal perang Belanda mendekati Pelabuhan Calang di pantai barat Aceh. Selanjutnya pada jam 18.10 kapal tersebut muncul di Lhok Seudu dalam perjalanan menuju Lhoknga. (TS26)

1949 JANUARI 23.

* Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) menunjuk Mr. A. A. Maramis yang sedang berada di New Delhi mengikuti Konferensi Asia menjadi Menteri Luar Negeri PDRI. (TS25)

* PDRI mengirim radiogram kepada Ketua Konferensi Asia, Jawaharlal Nehru, yang direlai oleh Radio Rimba Raya di Aceh Tengah malam hari. Isinya:

  pres asia konf pjm p j nehru d/p dr maramis menteri luar negeri rep indonesia di new delhi no ttk 50/pdri tgl 23/1/49 ttk pjm ttk pdri telah mengetahui pokokpokok sepenuhnja daripada resolusi jang telah diambil oleh conf asia ttk sekalipun putusan itu menurut hemat kami blm sesuai dgn harapan kami koma terutama oleh karena tdk dimasukkan dlm putusan itu pengakuan dejure thd republik ttk pengakuan dejure ini kami pandang sbg esentieel karena itulah djaminan jg sesempurnanja bahwa bld tdk akan menjerang rep dan alasan bahwa itu adalah urusan dlm negeri sematamata ttk tetapi oleh karena kami jakin bahwa negaranegara asia jg mengambil keputusan itu djuga selandjutnja akan memberikan bantuan sepenuhnya untuk mendjamin terbentuknja negara indonesia jg merdeka dan berdaulat selambatnja pada tgl 1 januari 1950 koma maka djuga atas perasaan solidariteit dgn negara2 jg ikut konf itu kami menerima resolusi itu dgn penuh rasa tanggungdjawab ttk perlu kami kemukakan satu hal jakni bahwa akan dilakukan pengembalian tempattempat rep dan kerdja kembali pemerintahnja didlm tempattempat tsb kami akan mendjumpai kekurangankekurangan jg sangat besar terutama didlm lapangan keuangan koma perhubungan dan perekonomian pada umumnja sbg akibat dari serangan bld koma kesukaran mana sukar akan diatasi koma

kalau kita tidak dapat bantuan dari negaranegara sahabat kami ttk atas djasa-djasa pjm dan pemerintah lainnja jg ikut serta dlm asia konf pdri mengutjapkan banjak terimakasih koma djuga atasnama rakjat indonesia ttk mudahmudahan keputusan asia konf jg tlh diterima baik dapat diterima oleh dewan keamanan serikat bangsabangsa sebab apabila kurang daripada ini tentu bagi kami akan sukar dapat menerimanja full stop

pdri. (TS25-26)

* Peristiwa di Desa Belimbing, Tawangmangu: Waluyo gugur dan Kapten Sumadi tertembak kakinya. (*PEH83*)

* Mengomentari resolusi Konferensi New Delhi kepada DK PBB, *New York Herald Tribune* menyatakan: *"Asia is an undubitable fact and its pronouncements and its emotions cannot be ignored."* (Asia adalah suatu kenyataan yang tak bisa diragu-ragukan dan pernyataan-pernyataan serta emosi-emosinya tidak dapat diabaikan). (AT253)

* *Radio Republik Indonesia* Banda Aceh menyiarkan berita tentang penunjukan Mr. A. A. Maramis yang sedang berada di luar negeri sebagai Menteri Luar Negeri Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), sebagaimana ditetapkan oleh Ketua PDRI. (TS26)

* Juru bicara TNI Divisi X Komando Sumatra mengumumkan bahwa pada jam 05.30 sebuah kapal perang Belanda jenis pemburu mendekati pantai Uleelheue. (TS26)

1949 JANUARI 24.

* Konferensi Asia mengirimkan resolusinya kepada Dewan Keamanan PBB, yang isinya a.l.:
  1. Pemulihan Pemerintah Republik ke Yogyakarta;
  2. Pembentukan Pemerintah Interim yang mempunyai kemerdekaan dalam politik luar negeri;
  3. Penarikan tentara Belanda dari seluruh Indonesia; dan
  4. Pernyerahan kedaulatan kepada Pemerintah Indonesia Serikat pada 1 Januari 1950. (TS25, 35)

1949 JANUARI 25.

* Sutan Sjahrir datang di Bangka atas permintaan Bung Hatta untuk diminta pergi ke Lake Success, New York, mewakili Republik Indonesia dalam perdebatan di Dewan Keamanan.

* Sutan Sjahrir menolak permintaan itu. Memang sejak Agresi Belanda II, Sjahrir sudah tidak setuju dengan garis politik Pemerintah Hatta. (AT269)

* *The New York Times* menulis: "*We hope that the Dutch government, whose impatience and folly have done so much harm, will yield in the interests of justice and humanity*." (Kami mengharapkan bahwa Pemerintah Belanda, yang ketidaksabarannya dan kegila-gilaannya sudah mengakibatkan begitu banyak penderitaan, akan tunduk demi keadilan dan perikemanusiaan). (AT253)

* Dengan Maklumat Militer No. I, Darul Islam (DI) di Margantara menyatakan Siliwangi sebagai musuh, sesudah Siliwangi merembes ke Jawa Barat sewaktu Yogyakarta diserbu oleh Belanda, karena Siliwangi dianggap sebagai tentara pelarian liar dan masuk daerah *de facto* DI tanpa permisi dahulu. (*Star Weekly*, 30 Oktober 1949:21)

* Sehubungan dengan terjadinya Agresi Militer II, di Tapaktuan diselenggarakan rapat Dewan Perjuangan yang dihadiri oleh para kepala jawatan serta para pemimpin partai dan organisasi di Kabupaten Aceh Selatan. Rapat mengambil keputusan, bahwa seluruh penduduk Aceh Selatan siap sedia dan waspada menghadapi segala kemungkinan, patuh kepada Pemerintah, dan taat kepada segala peraturan yang ditetapkannya. (TS26)

1949 JANUARI 26.

* Hari ini didirikan Indonesia Airways dengan modal pertama pesawat Dakota C-47 yang dibeli dengan *Fonds Dakota*, yaitu dana yang terkumpul sebagai hasil pertemuan Presiden Sukarno dengan masyarakat Aceh pada 16 Juni 1948 di Atjeh Hotel, Banda Aceh. Pesawat diberi nomor registrasi RI-001 dengan nama Seulawah dan pada badan pesawat ditulis "Sumbangan Rakjat Atjeh". (TS28)

Catatan: Keuntungan dari pengoperasian pesawat RI-001 ini dipergunakan untuk membiayai pelajar-pelajar AURI yang sedang menuntut ilmu di luar negeri dan membiayai staf-staf Perwakilan Republik Indonesia di Birma, India, dan Pakistan. Selanjutnya, keuntungan dipakai juga untuk membeli dua lagi pesawat Dakota, yaitu RI-007 dan RI-009. (TS28-30)

* Juru bicara TNI Divisi X Komando Sumatra mengumumkan bahwa mulai jam 11.00 sebuah kapal perang Belanda jenis jager (pemburu) melepaskan tembakan meriam ke pantai Lhoknga. Penembakan berlangsung tiga jam, dengan peluru melebihi 100 butir. Serangan itu mendapat balasan dari meriam-meriam pantai.

* Jam 14.00 muncul kapal perang lain dan baku tembak menjadi lebih seru. Diperkirakan, beberapa di antara tembakan dari pantai tepat mengenai sasaran, karena tak lama kemudian kedua kapal berlindung di balik Pulau Rusa, sekitar enam mil dari Lhoknga. Seekor lembu penduduk menjadi korban. (TS28)

1949 JANUARI 27.

* Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) memerintahkan kepada Menteri Luar Negeri Mr. A. A. Maramis untuk mengusahakan agar Komisi Tiga Negara (KTN) mengirimkan para peninjau militer ke Sumatra. Di wilayah RI, keselamatan para peninjau militer akan dijamin, demikian *Radio Singapura*. Menteri Luar Negeri pun diminta menyampaikan kepada KTN bahwa perang gerilya akan sukar dihentikan. (TS32)

1949 JANUARI 28.

* Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang mendesak Belanda supaya menghentikan agresinya dan memulihkan Pemerintah RI dalam kedudukan dan kekuasaannya seperti sediakala. Isi lengkapnya: (1) kedua pihak yang bertikai hendaklah menghentikan aksi militernya, (2) Belanda membebaskan para pemimpin RI dan mengembalikan mereka beserta pemerintahannya ke Yogyakarta, (3) melanjutkan perundingan atas dasar kesepakatan Linggajati dan Renville, dan (4) membentuk UNCI (United Nations Commission for Indonesia) menggantikan Committee of Good Offices.

* Resolusi yang diusulkan oleh Amerika Serikat, Tiongkok, Kuba, dan Norwegia ini disetujui dengan suara terbanyak dan dukungan penuh dari Wakil AS Prof. Philip C. Jessup. Resolusi pun mencantumkan supaya penyerahan kedaulatan kepada Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat dilakukan sebelum 1 Juli 1950. (AT253; HKP282; *PEH4*; TS34; G. Moedjanto, “Adu Kecanggihan Siasat”, *Kompas*, 19 Agustus 2003: 40)

1949 JANUARI 29.

* Kabinet RI VI terbentuk di bawah pimpinan Mohammad Hatta. Menurut D. N. Aidit dalam pembelaannya di muka Pengadilan Negeri Jakarta pada 24 Februari 1955, kabinet ini pada hakikatnya adalah kabinet Masyumi, yang sejak terbentuknya sepenuhnya menjalankan politik Masyumi. (*FAK150*)

* Gabungan Perkumpulan Tionghoa Perantauan Banda Aceh menyatakan sangat menyesalkan kejadian di Jambi, bahwa segolongan Tionghoa perantauan telah dipersenjatai oleh Belanda dan membantu Belanda menjaga simpang-simpang jalan.

Dinyatakan: “Kami tetap bekerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia serta rakyat Indonesia untuk memelihara suatu masyarakat yang berbahagia.” Diserukan agar orang Tionghoa perantauan di seluruh Aceh bersama dengan bangsa Indonesia berusaha menyingkirkan segala perasaan yang tidak sehat antara satu sama lain, menghapuskan provokasi, dan mempererat persahabatan antara kedua bangsa. (TS35)

* Juru bicara TNI Divisi X Komando Sumatra mengumumkan bahwa pada jam 15.00 sepasukan RI dengan kekuatan satu seksi telah menyerbu ke daerah musuh dari beberapa jurusan di Langkat Area. Sesudah satu jam bertempur, pasukan RI berhasil memasuki Kebun Sosial dan membakar sebuah gedung besar penuh getah. Selanjutnya pasukan RI menyerang lapangan terbang tanpa mendapat perlawanan. (TS36)

1949 JANUARI 31.

* Wakil Tinggi Mahkota Belanda menjawab pertanyaan Sultan Hamid II sebagai ketua BFO tentang kemungkinan mengadakan perundingan dengan para pemimpin Republik dan tentang status para pemimpin Republik yang berada dalam tawanan. Isinya:

Pemerintah Belanda menganggap para pemimpin Republik itu sebagai "orang-orang pemerintahan dari suatu Republik yang statusnya dan bentuknya akan tergantung pada kehendak rakyat". Pemerintah Belanda bersedia memberikan kesempatan kepada "tuan-tuan Sukarno dkk." untuk secara bebas mengadakan pertukaran pikiran dengan BFO di suatu tempat yang akan ditentukan kemudian. Beel setuju dengan diadakannya perundingan, dan kalau mencapai hasil hingga dalam waktu singkat bisa terbentuk suatu pemerintah federal sementara, maka mungkin kebebasan pada pemimpin Republik itu ditinjau "dalam rangka keadaan-keadaan yang akan terjadi". (AT257)

* Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) melalui *RRI* Banda Aceh menyatakan kepada seluruh Angkatan Perang dan rakyat Indonesia bahwa penghentian tembak-menembak hanya dapat diberikan oleh Panglima Tertinggi sesudah ada perundingan dengan PDRI. Selama belum ada perintah itu, perjuangan diteruskan sehebat-hebatnya. (TS35-36)

* Lewat JBJ6/JBT1 di Banda Aceh, hari ini dikirim kawat PDRI kepada Menteri Luar Negeri Mr. A. A. Maramis di luar negeri dengan isi sbb.:

dr maramis min of foreign affairs emerg govt ri through dr sudarsono rep indonesia newdelhi no 93/pdri date 31 january 1949 stop according decision emerg govt rep indonesia cease fire order can only be issued by pres in quality supreme commander after conference between at least pres comma vice pres and prov emerg govt stop as to attitude emerg govt ri towards security council resolution in general this too depends upon same conference comma the contents of security council resolution being much less than asia conference resolution full stop

emerg govt rep indonesia head

dr s prawiranegara

(TS36)

***

(Akhir Januari 1949)

Februari 1949

1949 Februari.

* Pembunuhan atas tokoh Partai Murba Tan Malaka di Jawa Timur, diperkirakan dilakukan oleh Resimen Surachmad. (SO86)

* *Long March* Divisi Siliwangi yang dimulai pada 19 Desember 1948 berakhir, setelah semua pasukan tiba kembali di bekas pangkalan gerilya mereka masing-masing, yaitu (1) Brigade XIV di bawah Mayor Sjamsu di daerah Priangan Timur, (2) Brigade XIII di bawah Letnan Kolonel Sadikin di daerah Jakarta dan Cirebon (Batalion Rukman kini berada di daerah Cirebon-Kuningan), dan (3) Brigade XII di bawah Letnan Kolonel Kusno Utomo di daerah Priangan Barat dan Bogor Selatan. (SDA106-107)

* Ibrahim Datuk Tan Malaka ditangkap oleh Mayor Sabaruddin dan ditembak mati di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Sumber lain mengatakan, ia ditangkap oleh pasukan Surachmad dan ditembak mati di lereng Gunung Merbabu, Jawa Tengah. (RK71; RM314-316; SO86)

* Dari pagi hingga siang berlangsung pertempuran di sekitar Sawit, Solo. Belanda mengerahkan pasukan infanteri dan artileri serta pesawat Cocor Merah, hingga banyak penduduk menjadi korban. Dua puluh lima orang

penduduk Bendosari tewas seketika dan 27 lainnya menderita luka berat dan ringan. Keesokan harinya 5 orang penduduk tewas, tidak terhitung yang tewas di desa Manjung, Pengging, dll. (*PEH84*)

* Gerilya Solo menyerang tangsi Belanda di Bangak, Kartosuro. (*PEH84*)

* Belanda melakukan operasi pembersihan dan penangkapan di sekitar Solo. (*PEH84-85*)

1949 Februari (awal).

* Sultan Hamengkubuwono IX mengirim surat kepada Jenderal Sudirman, minta ijin untuk melakukan serangan umum terhadap Yogyakarta sesudah mendengar berita dari radio-radio luar negeri bahwa awal Maret 1949 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan membicarakan masalah Indonesia. Dengan kata-kata Sultan Hamengkubuwono IX sendiri:

  "[...] pada permulaan Februari saya mengirim surat kepada Pak Dirman, minta ijin agar supaya diadakan suatu serangan umum, akan tetapi pada siang hari, sudah barang tentu dengan segala risiko yang ada pada suatu serangan. Ini disetujui oleh Pak Dirman dan dinyatakan agar supaya saya berhubungan langsung dengan komandan yang bersangkutan, yaitu Suharto, sekarang presiden kita." (WG189-190)

* Serangan malam gerilya ke-4 dilancarkan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap Yogyakarta, menurut Jenderal Suharto. Dengan kata-kata Suharto sendiri:

  "Lalu kami laksanakan serangan ketiga pada pertengahan Januari (1949) dan serangan ke-4 kalinya di permulaan Februari. Pada serangan umum ketiga itulah saya bentuk Komando Sektor kota dengan Letnan Marsudi sebagai komandannya." (SP60)

1949 Februari 1.

* Delegasi Republik menyampaikan dua keterangan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Pertama, keterangan tentang kedudukan Pemerintah Republik sehubungan dengan Agresi Militer II Belanda. Kedua, keterangan tentang keadaan para menteri dan tokoh-tokoh Republik yang ditawan oleh Belanda. (*KU114*)

* Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) mengundang para pemimpin Republik untuk merundingkan pembentukan pemerintahan nasional. (*KU114*)

* *Radio Republik Indonesia* (*RRI*) Solo memulai siarannya dari Balong-Jenawi dengan pemancar bergelombang 80 m (yang kemudian diganti dengan gelombang 60 m). (*PEH83*)

* Supo dkk. merebut senapan bren Belanda di jembatan Jurug, Solo. (*PEH84*)

* Gerilya Solo memasang *landsmijn* (ranjau darat) di jalan Solo-Gembongan dan Gembongan-Kartosuro. (*PEH84*)

* Gerilya Solo menyerang pos Kartosuro dan tangsi artileri/kavaleri Kleco. (*PEH84*)

* Dalam rapat kilatnya semalam di Labuhan Haji, Aceh Selatan, Partai Politik Islam Perti mengambil resolusi yang menyatakan mendukung penuh Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), menyetujui gencatan senjata dengan lima syarat PDRI yang diajukan kepada PBB pada 23 Desember 1948, menetapkan bahwa peperangan sekarang ini adalah *fii sabilillah*, dan mewajibkan kepada seluruh anggota Perti serta menganjurkan kepada seluruh kaum Muslimin untuk berjihad *fii sabilillah* dengan pikiran, tenaga, harta, dan jiwa. Rapat dihadiri oleh staf dan wakil Pengurus Besar Perti, staf Pimpinan Wilayah Istimewa Perti Aceh Selatan, para ulama cabang Perti Tapaktuan, para guru Perti, para pemuda Perti, dll. (TS38)

* Menteri Sosial Belanda, L. Neher, diberhentikan dari jabatannya. (*KU114*)

1949 FEBRUARI 3.

* Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO) menyampaikan surat jawaban kepada Presiden Sukarno di Prapat dan Wakil Presiden Mohammad Hatta di Bangka, berisi keterangan Wakil Tinggi Kerajaan Belanda di Indonesia kepada BFO. (*KU114-115*)

* BFO mengirimkan dua telegram, satu kepada Bung Karno di Prapat, dan satu lagi kepada Bung Hatta di Bangka. Isinya sama, yaitu minta supaya diadakan pertemuan antara BFO dengan pemimpin-pemimpin Republik untuk merundingkan penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda. Dalam telegram dilampirkan salinan surat Beel kepada Sultan Hamid II, tertanggal 31 Januari 1949. (AT257)

* *All India Radio* mengumumkan maklumat Pemerintah Pusat Darurat Republik Indonesia kepada Angkatan Perang Republik Indonesia. Maklumat tersebut menyatakan bahwa perintah untuk menghentikan tembak-menembak di pihak Republik hanya dapat diberikan oleh Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia, yaitu Presiden Sukarno sendiri. Perintah tersebut dapat dikeluarkan oleh Panglima Tertinggi hanya sesudah mengadakan perundingan terlebih dahulu dengan Pemerintah Pusat Darurat Republik Indonesia. Selama perintah itu belum ada, maka seluruh Angkatan Perang Republik Indonesia mesti berjuang terus dengan sekuat-kuat tenaganya hingga tercapai kemenangan akhir. (TS39)

* Badan Pekerja Dewan Pimpinan Pemuda Republik Indonesia Sumatra Utara di Banda Aceh mengirim radiogram kepada Serikat-serikat Sekerja Pelabuhan-pelabuhan di Bangkok berisi pernyataan bahwa semenjak 19 Desember 1948 Belanda telah melancarkan aksi militer kedua untuk menghancurkan Republik Indonesia.

  Penyerangan yang tak kenal perikemanusiaan itu berarti memperkosa sebuah negara Asia yang kini merdeka dan mengatur dirinya sendiri. Karena itu:

  "... kami menganjurkan agar Serikat-serikat Pekerja Pelabuhan-pelabuhan di Bangkok mengadakan pemboikotan terhadap kapal-kapal Belanda yang berlabuh di sana. Selanjutnya kami pemuda-pemuda dan seluruh rakyat Indonesia telah mengadakan perlawanan kepada Belanda dan siapa saja yang memperkosa kemerdekaan kami, hingga kemerdekaan itu dapat kami miliki dengan sepenuhnya." (TS39)

* Permusyawaratan Ulama-ulama Kabupaten Aceh Selatan di Labuhan Haji mengambil resolusi untuk menentang agresi Belanda, karena perjuangan sekarang ini adalah kewajiban *fii sabilillah,* sehingga penjajahan terkikis

dari Indonesia, membasmi kekejaman Belanda sehingga tercipta keamanan di seluruh Indonesia, dan menjalankan pertahanan semesta.

Dinyatakan, pengkhianat-pengkhianat yang nyata terhadap kemerdekaan Republik Indonesia halal darahnya dan diambil tindakan atas dirinya, diserahkan kepada Pemerintah. Terhadap pengkhianat-pengkhianat yang dicurigai harus ditahan untuk diperiksa dan diserahkan juga kepada Pemerintah.

Resolusi ditandatangani oleh Tgk. Zamzami Jahja atas nama 73 orang ulama yang menghadiri permusyawaratan. (TS39-40)

1949 FEBRUARI 4.

* Bung Hatta menjawab telegram Sultan Hamid II, tertanggal 3 Februari 1949. Isinya: Pemerintah RI tetap berpegang pada resolusi DK PBB tanggal 28 Januari 1949, dan menolak ajakan BFO untuk mengadakan pertemuan, "*hoe gaarne ook wij van gedachten willen wisselen met onze landgenoten over het lot van ons Vaderland* [betapa besar pun keinginan kami untuk bertukar pikiran dengan teman-teman sebangsa kami tentang nasib Tanah Air kita]". Soal Indonesia dapat dipecahkan dengan cepat dan baik apabila, baik Pemerintah Belanda maupun Pemerintah Republik, dengan tegas menyatakan kesediaannya menyetujui resolusi DK. (AT257-258)

* Melalui radio *Suara Indonesia Merdeka* Sumatra Utara di Banda Aceh, Gubernur Sumatra Utara Mr. S. M. Amin membacakan teks pidato Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) sbb.:

"Konperensi Asia dengan suara bulat telah mengambil suatu resolusi tentang soal Indonesia, yang menurut pendapat Pemerintah, sekalipun tidak memuaskan sepenuhnya, dapat menjamin terwujudnya suatu Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat yang meliputi seluruh kepulauan Indonesia pada tanggal 1 Januari 1950.

Oleh karena itu maka Pemerintah telah menyatakan kesediaannya kepada Ketua Konperensi Asia, PYM Jawaharlal Nehru, untuk menjalankan resolusi tersebut.

Resolusi Konperensi Asia itu telah diteruskan kepala Dewan Keamanan dengan permintaan yang sangat dari pihak negara-negara yang telah mengadakan Konperensi Asia itu, supaya resolusi itu diterima oleh Dewan

Keamanan sebagai dasar penyelesaian pertikaian antara Indonesia dan Belanda.

Tetapi rupanya Dewan Keamanan tak sanggup mengatasi pertentangan hebat di kalangan sendiri antara negara-negara besar yang menjadi anggota Dewan Keamanan, hingga akhirnya putusan Dewan isinya jauh lebih kurang daripada resolusi Konperensi Asia. Bukan saja waktu penyerahan *souvereiniteit* (kedaulatan) kepada Negara Indonesia diperpanjang sampai tanggal 1 Juli 1950, tetapi jaminan tercapainya Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, letaknya pada Rakyat Indonesia sendiri dan Tenteranya sebagai tulang-punggung.

Penarikan tentara Belanda dari daerah-daerah yang baru didudukinya hanya nyata terhadap Yogya dan sekitarnya, hingga dalam prakteknya penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Republik akan menemui kesulitan-kesulitan yang luar biasa.

Penarikan tentara Belanda dari seluruh Indonesia, apabila Negara Indonesia Serikat sudah dibentuk, tidak disinggung-singgung dalam resolusi Dewan Keamanan.

Juga pembentukan Pemerintah Federal Sementara yang tidak ditegaskan susunan dan kekuasaannya, dalam praktek akan menjumpai kesulitan-kesulitan yang tidak sedikit, hingga kami sangsi dapat dibentuknya pada tanggal 15 Maret yang akan datang.

Sekalipun Panitia Penyelenggara Jasa-Jasa Baik telah dirubah namanya (dari Komisi Tiga Negara, *peny*.) dan diberi kekuasaan yang sedikit lebih besar, tetapi alat-alat untuk memaksakan (*sanctie*) putusan-putusannya tidak ada.

Walhasil, menurut pendapat Pemerintah Darurat Republik Indonesia, resolusi Dewan Keamanan baru-baru ini tentang Indonesia pada hakikatnya tidak berbeda daripada resolusi-resolusi Dewan Keamanan yang lebih dulu. Rakyat Indonesia telah mempunyai pengalaman yang pahit tentang resolusi-resolusi semacam itu. Sebab kalau Belanda tidak mengindahkannya, Dewan Keamanan tidak sanggup mengambil tindakan-tindakan yang tegas terhadap Belanda. Ditambah pula perkataan-perkataan Wakil Belanda di Dewan Keamanan, dr. Van Roijen dan Menteri Luar Negerinya Stikker, bahwa Pemerintah Belanda akan mencoba menyelenggarakan resolusi Dewan Keamanan disesuaikan dengan tanggung jawab Negara

Belanda terhadap 60 juta bangsa Indonesia, maka Pemerintah Darurat Republik Indonesia berpendapat bahwa resolusi Dewan Keamanan dalam prakteknya hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat Indonesia, apabila kita mengikutinya. Belanda tidak merobah pendiriannya selebar rambutnya pun.

Menurut laporan yang kami terima, Belanda bermaksud hendak menghancurkan kota Yogyakarta karena mereka tidak sanggup menahan serangan gerilya kita. Juga terror yang dilakukan mereka terhadap rakyat dan pemimpin-pemimpinnya luar biasa kejamnya. Belanda merasa dirinya kuat untuk menghancurkan Republik dan mereka telah menyatakan pula bahwa mereka tidak lagi memandang Republik sebagai kesatuan politik. Terhadap sikap ini maka ternyata sekali betapa lemahnya resolusi Dewan Keamanan.

Oleh karena itu Pemerintah Darurat Republik Indonesia terpaksa mengambil pula sikap yang tegas.

Rakyat Indonesia di bawah pimpinan pemerintahnya akan melanjutkan perjuangannya terhadap agressi Belanda. Janganlah Belanda mengira bahwa Bangsa Indonesia akan tunduk kepada terrornya. Balasan pasti akan datang, kalau tidak sekarang nanti. Kalau bukan oleh rakyat Indonesia, oleh kekuasaan yang lebih tinggi. Tetapi sekalipun demikian, Pemerintah Darurat Republik Indonesia sanggup menunda sikap yang terakhir terhadap resolusi Dewan Keamanan, apabila kepada kami diberi kesempatan untuk berunding, sekurang-kurangnya dengan Paduka Yang Mulia Presiden dan Wakil Presiden di suatu tempat di daerah yang dikuasai Republik.

Untuk kemungkinan pertemuan ini, kami minta perhatian dari Panitia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia. Selama pertemuan itu, dan sikap kami terakhir belum ditentukan, maka kepada rakyat kami serukan: Lanjutkanlah perjuangan sehebat-hebatnya. Siapkanlah diri dan jiwa untuk berjuang, bertahun-tahun bahkan kalau perlu berpuluh-puluh tahun.

Dalam pada itu kami yakin bahwa negara-negara yang telah menyatakan pendiriannya dalam Konperensi Asia, akan membantu perjuangan kita. Tuhan beserta kita! Sekali Merdeka, tetap Merdeka!" (TS40-42)

* Jawatan Penerangan PDRI mengumumkan bahwa PDRI tidak dapat menerima resolusi Dewan Keamanan yang jauh lebih kurang dari resolusi Konferensi Asia. Pengalaman rakyat Indonesia tentang sikap dan perbuatan Belanda sudah cukup pahit dan tidak perlu kita menunggu kegagalan baru dalam suatu keadaan yang tidak atau sukar bagi rakyat kita memberi perlawanan lagi terhadap agresi Belanda di kemudian hari. Lebih baik kita melanjutkan perjuangan sekarang, sampai Belanda memenuhi tuntutan kita. (TS44)

1949 FEBRUARI 6.

* Perdana Menteri Negara Indonesia Timur (NIT) Ida Anak Agung Gde Agung dan Dr. Ateng Kartarahardja selaku penghubung Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) berkunjung ke Bangka untuk menemui para pemimpin Republik (Presiden Sukarno dan kawan-kawan) yang sedang dibuang ke sana, untuk berunding. (*AL88; KU115; LUxviii*)

* (Jam 13.00:) Sukarno dan Hj. A. Salim tiba di Bangka dari Prapat. Hari ini juga mereka menuju Menumbing untuk melakukan pembicaraan dengan Mohammad Hatta dkk. tentang permintaan BFO. Hari ini juga rapat selesai.

  Sebetulnya Presiden Sukarno dan Haji Agus Salim boleh kembali lagi ke Prapat, tetapi atas keputusan rapat mereka diminta tetap tinggal di Bangka untuk memudahkan menghadapi perkembangan politik seterusnya. (AT259,265; *Kompas*, 13 Mei 2003: 30)

1949 FEBRUARI 7.

* Radio *Suara Indonesia Merdeka* (*SIM*) Sumatra Utara di Banda Aceh menyiarkan pengumuman Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang menyatakan bahwa PDRI tidak dapat menerima resolusi Dewan Keamanan yang jauh lebih kurang dari resolusi Konferensi Asia.

  Alasan penolakan ialah tidak adanya jaminan yang tegas bahwa Negara Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat benar-benar akan terbentuk pada waktu yang ditetapkan, melihat sikap Pemerintah Belanda hingga sekarang. Belanda atas dorongan tentaranya di bawah Jenderal Spoor akan menyabotase tiap tindakan yang tidak sesuai dengan rancangannya, yakni mengembalikan penjajahan dalam bentuk yang baru.

Pengalaman rakyat Indonesia tentang sikap dan perbuatan Belanda sudah cukup pahit. Tidak perlu kita menunggu kegagalan baru dalam suatu keadaan yang tidak atau sukar bagi rakyat kita memberi perlawanan lagi terhadap agresi Belanda di kemudian hari. Lebih baik kita melanjutkan perjuangan sekarang sampai Belanda memenuhi tuntutan kita.

Bentuk dan kedudukan Pemerintah Sementara tidak ditegaskan dalam resolusi Dewan Keamanan, hingga dalam praktik akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam penyelesaian seperti Pemerintah telah mengalami dalam perundingan-perundingan yang lain.

Sikap akhir PDRI ditangguhkan sampai ada kemungkinan untuk berunding dulu sekurang-kurangnya dengan Presiden dan Wakil Presiden. (TS44)

* Dalam amanatnya kepada seluruh warga TNI Divisi X Komando Sumatra, Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo minta, berhubung suasana perjuangan kian lama kian memuncak dan bertambah berat, agar kita memberikan pengorbanan lebih baik dan lebih banyak dari yang sudah-sudah.

Gubernur Militer mengajak seluruh warga TNI Divisi X Komando Sumatra agar patuh kepada peraturan agama yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu dasar negara. Dengan patuh melaksanakan perintah Tuhan, dengan sendirinya kita menegakkan negara yang sekarang kita perjuangkan dengan jiwa dan segala apa yang ada pada kita.

"Untuk memperoleh kekekalan nikmat keridhaan Tuhan Yang Maha Esa, kita sekalian supaya melakukan pekerjaan yang diridhakan Tuhan, supaya nikmat kemerdekaan kita tetap dan kekal.

Berhubung dengan perintah Presiden supaya kita mencari keridhaan Tuhan untuk melanjutkan perjuangan kita terhadap musuh Negara kita yang tidak mengenal perikemanusiaan, maka dengan ini saya amanatkan kepada sekalian warga Tentara Nasional Indonesia Divisi X supaya lebih banyak memberikan perhatian kepada amanat Presiden, lebih banyak menekan diri kepada peraturan-peraturan Agama kita, dan sembahlah Tuhan pada waktu-waktu yang telah ditentukan.

Untuk itu kita perlu ingat akan janji Tuhan, bahwa barang siapa yang menolong Allah, maka Allah akan menolongnya. Janji yang pertama ini

apakala dipenuhi oleh setiap orang, akan diiringi oleh janji Tuhan yang kedua: Bahwa jika kamu telah ditolong Allah, maka tidak ada yang mengalahkan kamu." (TS44-45)

* Komandan Angkatan Laut RI Daerah Aceh melalui Pengumuman No. 4-P menyerukan kepada mereka yang berhasrat untuk berjuang dalam Angkatan Laut agar mendaftarkan diri di Kantor Angkatan Laut, Jalan Tutupan No. 80, Banda Aceh.

  Mereka yang diterima adalah pemuda-pemuda yang sekurang-kurangnya berpendidikan Sekolah Rakyat tamat, berumur 18 sampai 25 tahun, dan sebaiknya tidak beristri. (TS45)

1949 Februari 8.

* Komisi Tiga Negara (KTN) mengeluarkan komunike yang berisi desakan agar tawanan politik Republik dibebaskan oleh Belanda, sesuai dengan keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). (*KU115; LUxviii*)

* Di bawah SWK 106 Arjuna di Solo dibentuk Rayon V khusus untuk mengatur segala kegiatan perjuangan di dalam kota. Wilayah Rayon V meliputi Solo, dengan titik pusat Pasar Pon. Sebelum itu sudah dibentuk empat Rayon yang berkedudukan di luar kota. (*PEH11, 17*)

* Jam 15.00 Selasa sampai jam 03.00 Rabu: Gerilya menyerang Solo dengan mengerahkan hampir seluruh kekuatan Sub-Wehrkreise/Rayon dengan sasaran: menyerang semua markas dan asrama/pos/bivak serta patroli Belanda; membakar toko Drie Hoek di Pasar Legi, toko Eng Bo, dan Obral di Singosaren.

  Serangan ini untuk menandai pembentukan Komando Rayon V dalam kota dan bertepatan dengan hari lahir Diponegoro. Juga untuk membuktikan bahwa pemerintahan RI masih ada, untuk mencegah pembentukan pemerintahan Belanda dan untuk mengacaukan perekonomian. (*PEH18, 84*)

* Beel terbang ke Den Haag untuk menyampaikan usulnya yang kemudian terkenal dengan nama "Plan Beel" kepada Pemerintah Belanda. (AT261)

* DPR Belanda mengadakan sidang khusus untuk membicarakan soal Indonesia. Dalam kesempatan itu Menteri Daerah Seberang E. M. J. A. Sassen menjadi sasaran pihak oposisi—Partai Buruh dan Partai Komunis. Mereka menuntut supaya soal Indonesia diselesaikan dengan sungguh-sungguh dan mengikutsertakan RI dalam perundingan.

  Sassen yang didukung partai-partai kanan, terutama Partai Katolik, bersikukuh pada pendiriannya bahwa RI sudah dihapuskan oleh Aksi Militer II dan tidak bisa diikutsertakan dalam pembentukan NIS. Karena itu Sassen tidak menyetujui resolusi DK tanggal 28 Januari 1949. (AT255)

1949 FEBRUARI 9.

* Komunike Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) a.l. memuat keterangan Wakil Presiden Mohammad Hatta, yaitu bahwa cara yang tercepat dan terbaik untuk menyelesaikan masalah Indonesia ialah bilamana baik Pemerintah Belanda maupun Pemerintah Republik Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa kedua-duanya mau menerima keputusan Dewan Keamanan PBB. (*KU115*)

1949 FEBRUARI 10.

* *Radio Pemerintah Darurat Republik Indonesia* (PDRI) dalam siaran yang ditangkap kantor berita *Aneta* Jakarta menyatakan [PDRI] tidak dapat menerima resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) tanggal 28 Januari 1949 yang tidak sesuai dengan resolusi Konferensi New Delhi. Oleh karena itu PDRI akan berunding dengan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) sebelum menentukan sikap. (MA...)

* Tentara Belanda melakukan operasi di Desa Klodran, Sawahan, Donoyudan, dan Colomadu di utara luar kota Solo. Penduduk diungsikan ke utara dengan perlindungan anggota Tentara Pelajar (TP). (*PEH85*)

1949 FEBRUARI 11.

* Kabinet Belanda mempertimbangkan usul Wakil Tinggi Kerajaan Belanda Dr. L. J. M. Beel untuk mempercepat penyerahan kedaulatan kepada Indonesia tanpa melalui Pemerintah Interim, tapi disertai beberapa syarat. (*KU115; LUxviii*)

* Menteri Seberang Lautan Belanda, E. M. J. A. Sassen, mengajukan permintaan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. (*KU115*)

* Menteri Daerah Seberang Belanda E. M. J. A. Sassen mengundurkan diri dari kabinet dan digantikan oleh Mr. J. H. van Maarseveen dari Partai Katolik. (AT255)

* Siaran Jawatan Penerangan PDRI No. 2/pnr yang diumumkan di seluruh Aceh menyatakan bahwa segala perundingan yang terjadi antara Republik Indonesia dan Belanda di luar pengetahuan dan persetujuan PDRI hanya mempunyai sifat tidak resmi dan tidak mengikat bagi PDRI. (TS45)

1949 FEBRUARI 12.

* Wakil Presiden Mohammad Hatta menyatakan kepada wartawan majalah *Newsweek*,

  "Nederland telah berdaya upaya mencari bermacam-macam akal yang dapat ditemuinya untuk bisa lolos dari resolusi Dewan Keamanan mengenai Indonesia." Dan, "Kita menjalankan dan menerima baik resolusi PBB." (*KU115*)

* Desa Jenggrik dan sekitarnya mengalami *kanonase*. (*PEH85*)

1949 FEBRUARI 13.

* Wakil Presiden Mohammad Hatta secara resmi menyatakan pendapatnya bahwa perundingan dengan Belanda dapat saja dimulai, dengan syarat Pemerintah Republik Indonesia (RI) dikembalikan ke Yogyakarta dan pasukan Belanda ditarik dari wilayah RI sesuai dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

  Keinginan Wakil Presiden ini kemudian disetujui dan didukung oleh Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO). (S6 63)

* Pasukan gerilya menembak mati dua tentara Belanda di front Batang Serangan, Langkat. (TS45)

1949 FEBRUARI 14.

* Sultan Hamengkubuwono IX bertemu dengan Kolonel Suharto untuk membicarakan serangan umum terhadap Yogyakarta sesudah

Hamengkubuwono IX bertemu dengan Jenderal Sudirman untuk minta ijin dilakukannya serangan tersebut, dan disetujui. Ditetapkan, serangan akan dilakukan pada 28 Februari 1949. (MA...; WG191)

* Gerilya Solo menyerang pos Belanda di jembatan Jurug, Solo. (*PEH85*)

* Gerilya Solo menyerang pos polisi di Sragen, Solo. (*PEH85*)

* Gerilya Solo menyerang pos Belanda di Jagalan, Solo. (*PEH85*)

* Harian *Semangat Merdeka* memberitakan bahwa Tentara Pelajar Islam Batalion I telah melangsungkan pertemuan di gedung Sekolah Menengah Islam (SMI) Banda Aceh. Dalam kesempatan itu, seorang wanita pejuang Aceh, Ibu Tjut Andjung, menyatakan a.l., telah banyak pemuda kita gugur di medan pertempuran, melukis sejarah dengan tinta emas. Pemuda saat ini pun harus tahan menderita dan tabah menghadapi segala kemungkinan.

  Pengawas Tentara Pelajar, Kapten Mudjihardjo, menganjurkan agar pengalaman-pengalaman yang telah diperoleh hendaknya ditularkan kepada teman-teman yang belum mengalaminya. (TS47)

* Rapat Masyumi Sumatra Utara di Banda Aceh menetapkan nama para anggota Majelis Syura dengan Ketua Tgk. Haji Ahmad Hasballah Indrapuri, para pemimpin Departemen Pembelaan, Departemen Penerangan, Departemen Keuangan, dan anggota Pleno Dewan Daerah. (TS47)

* Wakil Tinggi Kerajaan Belanda Dr. L. J. M. Beel menyatakan akan bertolak ke Den Haag untuk memberikan penjelasan tentang usul-usulnya. (*KU115; LUxviii*)

* Menteri Seberang Lautan Belanda, E. M. J. A. Sassen, berhenti dari jabatannya dan digantikan oleh J. H. van Marseveen. (*KU115*)

1949 FEBRUARI 15.

* Belanda melakukan pembalasan atas penembakan dua prajuritnya pada 13 Februari 1949 dengan membakar 50 rumah penduduk dan menyiksa

rakyat. Tidak kurang dari 50 penduduk melarikan diri ke tempat kedudukan pasukan RI. (TS45)

1949 Februari 18.

* Menteri Seberang Lautan Belanda, J. H. van Maarseveen, menyatakan dalam jawabannya kepada *Tweede Kamer* (Majelis Rendah) bahwa Pemerintah Belanda akan berusaha sedapat-dapatnya untuk membentuk suatu pemerinah interim dengan segera, yang akan mewakili seluruh Indonesia, termasuk Republik Indonesia. (*KU115*)

1949 Februari 19.

* Sepuluh orang pegawai tinggi "Pemerintah Hindia Belanda" mengirimkan sebuah dokumen kepada Pemerintah Belanda. (*KU115-116*)

* (Diperkirakan pada tanggal ini) Tan Malaka ditangkap dan ditembak mati oleh pasukan Tentara Republik Indonesia (TNI) di Jawa Timur. (*Kompas*, 1 Januari 2000)

1949 Februari 20.

* Tentara Belanda melakukan penggerebekan di Kampung Belong (di dalam kota) untuk mencari pemancar *RRI* yang berada di desa Balong-Jenawi, Karanganyar. (*PEH85*)

1949 Februari 21.

* Parlemen Negara Pasundan menerima mosi yang mencela Agresi Militer II Belanda dan menyatakan bahwa resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) 28 Januari 1949 hendaknya dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan Indonesia-Belanda. (*KU116; LUxviii*)

* Dewan Perwakilan Rakyat Filipina mengajukan resolusi kepada Pemerintah Filipina untuk mengakui secara *de jure* Republik Indonesia (RI). (*KU116*)

* *Radio Republik Indonesia* (*RRI*) Solo memperbaiki siarannya dan mengubah gelombang 60 m dengan 30,4 m yang mampu menjangkau wilayah luar Jawa. (*PEH83-84*)

1949 FEBRUARI 22.

* Komandan Batalion 3 dari Brigade XIII/Kiansantang Tentara Nasional Indonesia (TNI), Mayor Dharsono, memerintahkan kepada Letnan II Darmawan masuk kota Jakarta untuk menghubungi "orang-orang kita" di lingkungan pemerintahan dan perusahaan, menyusun organisasi teritorial dalam kota, dan mengurus perbekalan seperti beras dan obat-obatan untuk batalionnya. (SDA197)

1949 FEBRUARI 24.

* Menteri Pembangunan dan Pemuda Supeno yang ikut bergerilya di Jawa Timur tewas ditembak Belanda ketika tertangkap di Sawahan, Nganjuk. Supeno satu-satunya menteri Republik yang tidak kembali ke Yogyakarta sesudah ditandatanganinya Persetujuan Rum-Roijen. (*KU116; LUxviii; LU t.h.*)

* Gubernur Jawa Timur Dr. Murdjani dan Wakil Gubernur Dul Arnowo ditangkap oleh Belanda dan dibawa ke Surabaya. (*KU116*)

1949 FEBRUARI 25.

* Komunike TNI Divisi X Komando Sumatra memberitakan bahwa pada jam 08.10 sebuah kapal perang musuh jenis pemburu telah melintasi perairan Uleelheue pada jarak satu mil dari pantai.

  Setelah baterai pantai melepaskan tembakan ke arah kapal itu, terjadi baku tembak sampai jam 09.30 dan kapal mengundurkan diri ke arah barat-laut. Tak lama kemudian sebuah pesawat Catalina terbang di atas Uleelheue dan Banda Aceh, namun sampai kembali ke Sabang ia tak melakukan penembakan. (TS49)

* Wakil Tinggi Kerajaan Belanda Dr. L. J. M. Beel tiba kembali di Jakarta dari Den Haag. (*KU116; LUxviii*)

* Dr. Gieben menyampaikan undangan Pemerintah Belanda kepada pembesar-pembesar Republik di Bangka untuk ikut dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yang akan dibuka pada 12 Maret 1949 di Den Haag. (*KU116; LUxviii*)

1949 FEBRUARI 26.

* Komandan Militer kota Banda Aceh mengeluarkan Maklumat No. 29-1-U-1949 berisi keterangan bahwa apabila sirene berbunyi terus-menerus selama lima menit, itu berarti terjadi pendaratan musuh. Dalam keadaan demikian, penduduk diwajibkan:

    1. Dengan secepat mungkin meninggalkan kota
    2. Hanya membawa barang-barang berharga (penting) dan lain-lain yang dapat dibawa dengan mudah, agar jangan memakai waktu lama
    3. Penduduk yang pergi ke luar kota yang mendiami rumah-rumah yang akan dibumihanguskan, tidak boleh dikunci, begitu juga mengenai bangunan-bangunan kepunyaan Pemerintah
    4. Penduduk yang keluar kota harus melalui jalan-jalan yang ditunjuk oleh pengawal-pengawal yang bertugas pada waktu itu
    5. Apabila bumi hangus akan dimulai, semua jalan yang masuk-keluar kota ditutup. Tidak dibenarkan orang-orang masuk ke kota. Hanya dibolehkan orang-orang yang keluar, meninggalkan kota
    6. Dilarang keras kepada siapa pun juga, kecuali Barisan Bumi Hangus, memasuki rumah-rumah atau bangunan-bangunan yang akan dibumihanguskan
    7. Kepada orang-orang yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut akan diambil tindakan keras menurut undang-undang perang.

    Maklumat ditandatangani oleh Komandan Militer kota Banda Aceh, Akting Kapten Ali Hasan A. S. (TS49-50)

* Wakil Tinggi Kerajaan Belanda Dr. L. J. M. Beel atas nama Pemerintah Belanda mengirim surat undangan kepada Presiden Sukarno di Bangka berisi permintaan untuk membentuk delegasi yang akan menghadiri Konferensi Meja Bundar (KMB) dengan Belanda di Den Haag, yang akan dibuka pada 12 Maret 1949. Surat dibawa oleh Mr. Gieben, tapi kemudian disusul oleh Dr. P. J. Koets dengan penjelasan lucu kepada Presiden Sukarno tentang surat itu. Katanya, surat tidak ditujukan kepada Perdana Menteri Mohammad Hatta, karena Pemerintah Belanda menganggap Pemerintah Republik Indonesia (RI) sudah tidak ada lagi. Karenanya, surat itu dialamatkan kepada “Presiden Republik” tanpa kata “Indonesia”.

Waktu itu anggota Komisi Tiga Negara (KTN) untuk Indonesia adalah Thomas K. Critchley dari Australia, Merle Cochran dari Amerika Serikat, dan R. Herremans dari Belgia. (*AL84*; MA...)

* Beel atas nama Pemerintah Belanda mengirimkan surat undangan kepada Presiden Sukarno di Mentok sebagai "Presiden Republik" untuk membentuk delegasi guna menghadiri Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada 12 Maret 1949. Surat dibawa oleh Mr. Gieben.[1]

1949 FEBRUARI 27.

* Jawatan Penerangan TNI Divisi X Komandemen Sumatra menyiarkan perintah Ketua PDRI selaku wakil Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI agar seluruh rakyat memperhebat perjuangan sampai kemenangan tercapai. (TS50)

* Muhammadiyah Banda Aceh menyelenggarakan peringatan Hari Yatim di gedung Anak Yatim, Banda Aceh. Hadir dalam acara tersebut Gubernur Sumatra Utara Mr. S. M. Amin, Gubernur Militer Tgk. Muhd. Daud Beureueh, Residen t/b (diperbantukan) Tuanku Mahmoed, Residen T. T. Mohammad Daudsjah, para terkemuka partai-partai, cendekiawan, dll.

  Gubernur Militer a.l. menyatakan syukur karena masih ada segolongan umat, yaitu Muhammadiyah, yang berjiwa hidup untuk melaksanakan perintah Tuhan, yakni memperingati Hati Yatim ini.

  Kepala Jawatan Sosial Provinsi Sumatra Utara A. Hasjmy menyatakan bahwa sejak puluhan tahun bangsa Indonesia berhasrat menciptakan masyarakat yang bebas dari kemiskinan dan kesengsaraan. Lebih lanjut:

  "Kita melihat perkumpulan Muhammadiyah menjelma sebagai satu organisasi yang meretas jalan untuk mengambil tanggung jawab memenuhi salah satu suruhan agama, berjuang di tengah masyarakat untuk membela nasib bangsa."

  Memberikan sambutan terakhir, Gubernur Mr. S. M. Amin menyatakan bahwa kemiskinan adalah soal yang memusingkan kepala tiap pemerintah

1 Beberapa hari kemudian datang Mr. Koets untuk memberikan penjelasan kepada Presiden Sukarno tentang maksud surat undangan tersebut. Surat undangan yang seharusnya dialamatkan kepada PM Mohammad Hatta dikirimkan kepada "Presiden Republik" tanpa kata "Indonesia" sesuai pendirian Belanda bahwa Pemerintah RI sudah tidak ada lagi. (AT261)

di dunia. Harus diakui, usaha Pemerintah untuk memperbaiki keadaan tersebut belum boleh dikatakan memuaskan. Karena itu Pemerintah menghargai usaha Muhammadiyah ini. (TS50-51)

* Juru bicara TNI Divisi X Komando Sumatra mengumumkan bahwa pada 19.45 sebuah kapal perang musuh telah mendatangi perairan Telaga Tujuh, Langsa, disusul tembak-menembak dengan pasukan pengawal pantai. Akibatnya, seorang prajurit kita tewas. (TS51)

1949 Februari 28.

* Hari ini adalah tanggal yang direncanakan oleh Sultan Hamengkubuwono IX bersama Kolonel Suharto (dalam pertemuan tanggal 14 Februari 1949) untuk melakukan serangan umum terhadap Yogyakarta, tapi ternyata rencana itu tercium oleh Belanda (menurut Hamengkubuwono IX). Karena itu, rencana serangan diundur menjadi tanggal 1 Maret 1949 jam 06.00, waktu sirene berbunyi.

  Rencana itu terancam gagal, karena pada hari ini juga satu kelompok tempur TNI melancarkan serangan terhadap Yogyakarta. Sang komandan lupa bahwa tahun itu adalah tahun kabisat. Serangan itu dilancarkan dari selatan dan mencapai batas utara alun-alun Yogyakarta, tapi segera diusir oleh pasukan lapis baja Belanda. Tiga orang prajurit TNI gugur tepat di bawah pohon beringin di tengah alun-alun. Dengan kata-kata Suharto sendiri:

  "Pada waktu sirene akhir jam malam berbunyi tanggal 28 Februari 1949 pagi, kami dikejutkan oleh bunyi ledakan dan tembakan yang cukup gencar. Mana pula tidak terkejut sebab telah saya tetapkan serangan itu akan kita lakukan pada tanggal 1 Maret, pagi, pada waktu sirene akhir jam malam. Ternyata Letnan Komarudin telah salah hitung." (HA173; SP61; WG191)

* Dr. P. J. Koets datang di Bangka untuk menjelaskan maksud Pemerintah Belanda dan mengundang Presiden Sukarno untuk menghadiri Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Isi penjelasan:

  1. Pemerintah Belanda akan mengadakan KMB di Den Haag guna membahas penyerahan kedaulatan yang dipercepat;

2. Penarikan pasukan Belanda secepat-cepatnya setelah pengakuan kedaulatan;
3. Tentang pengembalian Pemerintah Republik Indonesia (RI) ke Yogyakarta dinyatakan bahwa hal itu tak mungkin dilaksanakan. (*LUxviii*; S6 64)

* Dalam kawat No. 2801, Wakil Tinggi Kerajaan Belanda Dr. L. J. M. Beel menyatakan a.l. kepada Mr. J. H. van Maarseveen:

  Tingkah laku Sultan Yogya makin lama makin menimbulkan banyak kesulitan. Pada waktu penggerebegan Kepatihan Yogya a.l. terdapat satu dokumen tulisan tangannya sendiri, yang menyatakan bahwa berhubung dengan adanya resolusi Dewan Keamanan, perlu diambil langkah-langkah yang erat kaitannya dengan pengembalian Pemerintah RI ke Yogya:

  a. Isolasi (pengucilan) pasukan Belanda di tempat-tempat sekitar Yogya yang mereka duduki dengan cara melakukan sistem blokade;
  b. Melakukan kampanye desas-desus (*fluistercampagne*);
  c. Menyerobot satu atau dua lurah NICA di Bantul.

  Dari hal-hal di atas ini, tidaklah mustahil bahwa Sultan akan mengambil tindakan-tindakan yang lebih spektakuler, umpamanya menggabungkan diri dengan gerombolan (gerilyawan). Dengan sikap di atas ini, pemerintahan di seluruh kesultanan dan kabupaten tidak bisa berjalan, sedangkan unsur-unsur yang konstruktif (orang-orang yang memihak Belanda) tidak berani menampilkan diri, sehingga gengsi (citra) kita menurun. (ABA5)

1949 FEBRUARI (AKHIR).

* Batalion Achmad Wiranatakusuma tiba kembali di pangkalannya yang lama, Soreang, 17 km selatan Bandung dari Solo (berangkat 19 Desember 1949). (*Star Weekly*, 18 Agustus 1956)

***

(Akhir Februari 1949)

Maret 1949

1949 Maret.

* Gerilya Solo menyerbu asrama polisi Beskalan dan berhasil merampas 28 pucuk senapan. (*PEH85*)

* Gerilya Solo menyerang pasukan TBS (Territoriale Batalyon Soerakarta) yang sedang latihan di Lapangan Pamedan Mangkunegaran. (*PEH86*)

* Gerilya Solo menyerang rumah makan Kusuma. Tiga serdadu Belanda tewas dan senjatanya dirampas. Belanda membalas dengan mengobrak-abrik rumah makan tersebut dan menangkap beberapa pelayan dan penduduk sekitar. (*PEH86*)

* Regu Tory dan Seksi Suradji dari gerilya Solo menyerang pos Jagalan. Tory berhasil menggranat overval hingga hancur. (*PEH86*)

1949 Maret 1.

* Selasa jam 06.00: Serangan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari *Subwehrkreise* Yogyakarta dan sekitarnya, terhadap kota Yogyakarta, di bawah pimpinan Komandan Wehrkreise III, Letnan Kolonel Suharto, dengan 2.000 anggota bertanda janur kuning di bahu. Serangan ini adalah

gagasan Sultan Hamengkubuwono IX di bulan Februari, setelah ia mendengar bahwa Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) akan bersidang awal bulan Maret 1949.

Yogyakarta dipertahankan oleh pasukan Kolonel van Langen yang sebagian terdiri dari prajurit KNIL.

Malam sebelumnya pasukan Indonesia sudah menyusup ke posisi di pinggir kota. Seluruhnya terdiri atas dua belas kelompok tempur yang terbagi dalam enam sektor.

Dari selatan pasukan Republik dengan cepat menerobos sampai alun-alun dan kantor pos.

Dari barat, kelompok tempur di bawah Suharto sendiri mencapai jalan utama kota Yogyakarta, yaitu Malioboro.

Dari timur pasukan Kapten Rakido menduduki pabrik Watson yang menjadi tempat penyimpanan amunisi. Menurut para prajurit Republik, prajurit KNIL yang menjaga kompleks itu hanya berpura-pura mempertahankan pabrik. Mereka sekadar menembak-nembak ke udara dan dengan demikian membiarkan pabrik beserta amunisinya direbut oleh TNI.

Hanya dari utara serangan pasukan Republik kurang gencar. Tapi memang pasukan ini hanya bertugas mencegah datangnya bala bantuan Belanda dari Maguwo.

Dengan demikian gerilya berhasil menduduki Yogyakarta.

Salah satu sumber (HA173) menyatakan, menjelang jam dua belas datang bala bantuan pasukan Belanda dari Magelang berupa dua batalion KNIL yang paling berpengalaman dalam pertempuran di Bali dan Sumatra, yaitu Batalion Anjing NICA dan Gajah Merah.

Jam 14.00: Sultan Hamengkubuwono mendapat informasi bahwa tank-tank Belanda sudah berangkat ke Yogyakarta dari Magelang, karena itu ia mengusulkan kepada Kolonel Suharto supaya menarik diri dari Yogyakarta, untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban.

Jam 15.00: TNI mengundurkan diri dari Yogyakarta.

Korban di pihak gerilya dalam serangan “enam jam di Yogya” itu 200 orang (ada yang menyebutkan 300 orang, HA173), dan di pihak Belanda 17 orang. Namun di mata internasional, pendudukan Yogyakarta oleh TNI

itu merupakan pukulan hebat terhadap pasukan dan politik Belanda.

Sesudah itu Belanda melakukan pembersihan terhadap penduduk dan pembakaran rumah-rumah penduduk. Pada hari yang disebut *Dolle Dinsdag* (Selasa gila) itu hadir 3 pengawas United Nations Commission for Indonesia (UNCI, 2 opsir Amerika dan 1 opsir Prancis), karenanya laporan tentang peristiwa itu segera sampai di DK PBB. Serangan ini berhasil mencapai tujuan politik yang dikehendaki dan mempercepat proses penyelesaian masalah Indonesia sesuai dengan resolusi DK PBB tanggal 28 Januari 1949. (ABA15; HA173; *LUxix*; MA...)

* Serangan umum terhadap Yogyakarta yang menurut Sultan Hamengkubuwono IX direncanakan pada tanggal 28 Februari 1949 olehnya sendiri bersama Kolonel Suharto itu dengan kata-katanya sendiri adalah sbb.:

"Ternyata berhasil sekali. Kita dapat menduduki kembali Yogyakarta itu sampai jam 3, oleh karena jam 2 siang saya dapat informasi bahwa kavaleri, yaitu berupa tank-tank dari Magelang telah berangkat menuju Yogyakarta. Oleh karena itu saya mengusulkan kepada Pak Harto agar supaya korban jangan sampai terlalu banyak, untuk mengundurkan diri, dan persis jam 3, TNI mengundurkan diri, dan menurut pendapat saya, sudah cukup untuk menarik perhatian dari Security Council. Kejadian ini disiarkan oleh pemancar kita yang ada di Gunung Kidul, di Playen, ke Bukittinggi, dan dari Bukittinggi ke India, dan dari India ke PBB. Dan ternyata ini mempunyai suatu pengaruh yang besar sekali, sehingga terjadi keputusan daripada Security Council bahwa Republik harus kembali. Dan sebagai akibat dari keputusan itu diadakan perundingan antara Van Royen dan Rum." (WG191)

* Menurut kata-kata Jenderal Suharto, serangan terhadap Yogyakarta itu adalah sbb.:

"[...] saya perintahkan setiap pasukan mempersiapkan diri untuk melaksanakan serangan umum. Waktu saya tentukan: pada tanggal 1 Maret, serangan pagi. Pasukan kita saya tetapkan menggunakan janur kuning sebagai tanda pengenal. Saya tekankan, serangan itu bukan untuk menduduki dan terus mempertahankan kota itu. Mempertahankan itu bertentangan dengan taktik gerilya. Mengambil sikap mempertahankan itu

bisa dihancurkan lawan yang punya senjata lebih ampuh. Sebab itu, kita menyerang untuk tujuan politis, agar supaya dunia mengetahui bahwa TNI masih mampu mengadakan perlawanan. Sementara itu saya anggap penting adanya unsur pendadakan, karena hal itu merupakan salah satu unsur yang bisa membuahkan kemenangan. Alhasil, serangan itu kami lakukan dengan perencanaan dan persiapan yang matang. Saya pimpin serangan itu dari sebelah barat masuk lewat Kuncen terus ke Pathuk. Saya rahasiakan rencana ini. Tidak boleh bocor." (SP60-61)

* Lebih lanjut tentang serangan terhadap Yogyakarta, menurut Jenderal Suharto:

  "Dalam percakapan malam itu, sebelum berangkat, beliau [Jenderal Sudirman] menunjukkan penghargaannya pada apa yang saya lakukan dengan serangan umum 1 Maret." (SP70)

* Wakil Tinggi Kerajaan Belanda di Indonesia, Dr. L. J. M. Beel, mengawatkan kepada Mr. J. H. van Maarseveen bahwa terdapat kabar Sultan (Hamengkubuwono IX) telah meninggalkan keraton dan menggabungkan diri dengan pasukan gerilya dengan pangkat mayor jenderal (kabar ini ternyata kemudian tidak benar). Hari ini juga ia melaporkan:

  "Yogyakarta telah diserang oleh pasukan-pasukan musuh dalam satu serangan yang dikoordinasi. Pasukan kita yang melakukan pembersihan ditembaki juga dari bagian dalam keraton. Ketika dilakukan pemeriksaan di keraton tidak terdapat perlawanan. Sultan Yogya yang ditemukan di keraton langsung ikut serta dalam melakukan pemeriksaan itu. Ia menyangkal bahwa ada tembakan-tembakan dari dalam keraton. Sikap Sultan adalah korek, tetapi sangat dingin dan tidak kooperatif, dan menimbulkan kesan bahwa ia orang yang keras kepala. Setelah meninggalkan keraton Belanda menempatkan satu kesatuan pasukan di Siti Inggil demi keamanan Sultan. Keadaan dikuasai sepenuhnya." (ABA5-6)

* Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) Maruto Nitimihardjo dari Partai Murba ditangkap oleh NICA dan dimasukkan penjara Wirogunan, Yogyakarta, kemudian dipindahkan ke Ambarawa bersama politisi lain seperti Adam Malik dan lain-lain. (SUS158)

* Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) mengeluarkan resolusi menyokong resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang ditolak Pemerintah Belanda. (*LU t.h.*)

* Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo selaku Panglima Angkatan Perang Divisi X TNI mengeluarkan Surat Keputusan No. 149/UM-KD/1949 berisi keputusan bahwa anggota Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) harus kembali belajar ke sekolah masing-masing karena dinilai tingkat permusuhan dengan Belanda telah mengendor. Pelaksanaan keputusan ini tertunda, karena ternyata situasi tanah air menghendaki agar anggota TRIP tetap siaga di medan juang. (TS55)

* Perihal serangan umum terhadap Kota Yogyakarta disiarkan ke luar negeri oleh *Radio Rimba Raya* di pedalaman Aceh dan *RRI* Banda Aceh, dan direlai oleh *All India Radio* (*AIR*) di New Delhi. Siaran dilakukan dalam bahasa Indonesia, Inggris, Belanda, Urdu, Arab, dan Tionghoa. Pemancar dan studio *Radio Rimba Raya* ditempatkan di Ronga-ronga, sebuah desa pegunungan antara Bireuen di Aceh Utara dan Takengon di Aceh Tengah. (TS55)

* Gubernur Sumatra Utara mengeluarkan uang kertas bernilai Rp250,00 sebagai alat pembayaran yang sah di daerah Sumatra Utara. Uang kertas itu dikeluarkan di ibu kota Provinsi Sumatra Utara, Banda Aceh. (TS55)

* Dr. P. J. Koets pergi ke Bangka untuk memberikan penjelasan tentang undangan Pemerintah Belanda kepada para pemimpin Republik. (*KU116*)

* Komisi Tiga Negara (KTN) menganggap undangan Belanda kepadanya untuk menghadiri Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag sebagai usul balasan kepada DK PBB atau sebagai pengganti resolusinya tanggal 28 Januari 1949. (*KU116; LUxix*)

* Serangan besar-besaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap kota Yogyakarta yang diduduki oleh Belanda sejak 19 Desember 1948, di bawah pimpinan Letnan Kolonel Suharto. Serangan dimulai tepat jam 06.00 saat sirene Belanda tanda berakhirnya jam malam berbunyi. Ikut serta 2.000

personil (termasuk pemuda gerilyawan) yang semuanya mengenakan tanda janur kuning di dada kiri, karena itu serangan tersebut disebut juga Operasi Janur Kuning. (*SK*44)

TNI berhasil menduduki kota tersebut selama 6 jam, kemudian mengundurkan diri ke luar kota. Berdasarkan peristiwa ini dibuat film oleh sutradara Usmar Ismail dengan judul *Enam Jam di Yogya*. (SSA17,42; Asvi Warman Adam, *Kompas*, 1 Januari 2000)

* UNCI mengirimkan laporan kepada Dewan Keamanan dan minta instruksi tentang bagaimana UNCI menghadapi undangan Pemerintah Belanda tertanggal 26 Februari 1949 kepada Presiden Sukarno yang sedang berada dalam tahanan Belanda di Mentok, Bangka, untuk menghadiri Konferensi Meja Bundar di Den Haag tanggal 12 Maret 1949. (AT263)

1949 MARET 2.

* Gerilya Solo melakukan pencegatan terhadap tentara Belanda di Tegalduwur. (*PEH86*)

* Di Mesjid Lueng Bata, Banda Aceh, berlangsung rapat yang dihadiri oleh para ulama dari daerah Aceh, Sumatra Timur, dan Tapanuli. Dalam kesempatan itu dibentuk Majelis Ulama Sumatra Utara dengan nama Haiah Kibarul Ulama dan disahkan juga anggaran dasarnya.

* Majelis beranggotakan 24 orang dari Aceh, 20 orang dari Sumatra Timur, dan 17 orang dari Tapanuli, dengan Ketua Umum Syekh Abdullah Afifuddin dan 2 penasihat: Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan Tgk. Haji Dja'far Sadiq (Tgk. Lamjabat). (TS56)

* Menteri Daerah Seberang Lautan Belanda Mr. J. H. van Maarseveen mengawatkan kepada Wakil Tinggi Kerajaan Belanda di Indonesia, Dr. L. J. M. Beel:

  "Jika keadaan memburuk supaya dipertimbangkan mengambil tindakan menduduki keraton dan menggantikan Sultan. Tetapi sebelumnya perlu diberitahukan kepada UNCI (Komisi PBB untuk Indonesia) untuk kelakuan Sultan. Selanjutnya diserahkan kepada Beel untuk memutuskan tindakan apa yang perlu diambil." (ABA6)

* Rapat BFO dengan para pemimpin Republik, yang berlangsung sampai keesokan harinya (3 Maret 194) tetap minta dilaksanakannya resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 28 Januari 1949. (*PEH4*)

1949 Maret 3.

* Rapat BFO dengan para pemimpin Republik yang dimulai sehari sebelumnya (2 Maret 1949) tetap minta dilaksanakannya resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 28 Januari 1949. (*PEH4*)

* Presiden Sukarno mengadakan pembicaraan dengan penghubung Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) dan menegaskan perlunya kedudukan Pemerintah Republik Indonesia (RI) dipulihkan sebagai syarat dilangsungkannya perundingan, selaras dengan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) tanggal 28 Januari 1949. (S6 64)

* Sidang BFO menerima resolusi yang menyetujui tuntutan Republik supaya pada tingkat permulaan pemerintahan Republik dipulihkan di Yogyakarta. Resolusi ini disampaikan kepada Wakil Tinggi Kerajaan Belanda Dr. L. J. M. Beel. (*KU116;LUxix*)

* Gerilya Solo melakukan pencegatan di Bangsri dan Mudjiono—Komandan Si I Ki I—gugur. (*PEH86*)

* Menteri Daerah Seberang Lautan Belanda, Mr. J. H. van Maarseveen, lewat kawat No. 1477 membenarkan sikap Wakil Tinggi Kerajaan Belanda di Indonesia Dr. L. J. M. Beel bahwa:
  "Pemerintah Republik tidak boleh kembali ke Yogyakarta. Sultan yang merupakan bagian dari pemerintah Republik telah menyalahgunakan kebebasan yang diberikan kepadanya di Yogyakarta. Harap hal ini ditekankan oleh Van Royen dalam pembicaraan di Dewan Keamanan." (ABA6)

* Darul Islam (DI) menerbitkan buku stensilan sederhana cetakan kedua 36 halaman berjudul *Menyongsong ad-Daulatul Islamiyah* karangan penganjur DI, Abu Darda. Dalam buku itu a.l. disebutkan bahwa Aksi Militer I Belanda yang kemudian mengakibatkan ditandatanganinya Perjanjian Renville adalah suatu pertolongan dari Tuhan, karena dengan demikian

revolusi Islam di Indonesia mendapat jalan untuk meletus. (A. Karim D.P. dalam *Star Weekly*, 30 Oktober 1949:22)

* Presiden Sukarno membalas undangan Wakil Tinggi Kerajaan Belanda di Indonesia tertanggal 26 Februari 1949 untuk menghadiri Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Isi balasan: menolak undangan tersebut, kecuali dengan syarat:

1. pengembalian kekuasaan Republik Indonesia (RI) merupakan syarat mutlak untuk memulai perundingan;
2. kedudukan dan kewajiban United Nations Commission for Indonesia (UNCI, Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia) dalam membantu melaksanakan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak akan terganggu.

Surat balasan itu dimulai dengan kata-kata: "*Tezamen met de andere leden der Republikeinse Regering die op Bangka vertoeven, heb ik deze uitnodiging zorgvuldig in overweging genomen* .... [Bersama dengan para anggota Pemerintah Republik lain yang sedang berada di Bangka saya sudah mempertimbangkan undangan ini dengan saksama ....]."

Sementara itu Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) mengeluarkan pernyataan yang berisi pemberitahuan bahwa BFO tetap pada pendirian semula:

1. supaya Pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta;
2. supaya Komisi PBB untuk Indonesia [UNCI] membantu;
3. supaya RI memerintahkan gencatan senjata. (S6 64-65)

* Anggota Eertse Kamer (Majelis Tinggi) Belanda dari Partij van de Arbeid (P.v.d.A., Partai Buruh), Prof. Donkersloot, melepaskan keanggotaannya dalam Eerste Kamer karena tidak setuju dengan politik Pemerintah Belanda dalam masalah Indonesia. (*KU116*)

* Presiden Sukarno menjawab surat Beel tertanggal 26 Februari 1949. Surat dalam bahasa Belanda itu menyatakan a.l.: "*Tezamen met de andere leden der Republikeinse Regering die op Bangka vertoeven heb ik deze uit-nodiging zorgvuldig in overweging genomen* [Bersama anggota Pemerintah Republik lainnya yang berada di Bangka saya telah mempertimbangkan

undangan ini dengan saksama].” Dengan kata-kata itu ditegaskan bahwa Pemerintah RI masih ada dan belum terhapuskan oleh agresi Belanda, seperti hendak mereka perlihatkan kepada dunia. (AT261)

1949 Maret 5.

* Di Kantor Jawatan Penerangan Sumatra Utara di Banda Aceh berlangsung peresmian pemancar *Radio Republik Indonesia* (*RRI*) Provinsi Sumatra Utara. Hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur Militer Tgk. Muhd. Daud Beureueh, Tuanku Mahmud mewakili Gubernur Sumatra Utara, para pejabat pemerintahan sipil dan militer, pemuka masyarakat, cendekiawan, dll.

  Osman Raliby sebagai Kepala Jawatan Penerangan Provinsi Sumatra Utara menyatakan bahwa Jawatan Penerangan bukan jawatan yang mengandalkan propaganda atau senden, tapi jawatan yang bertugas memberikan penjelasan kepada rakyat dan pemerintah tentang keadaan tanah air, juga keadaan luar negeri. Hal itu dapat kita lakukan dengan berbagai cara—lisan, tulisan, lukisan dll.

  Menurut Osman Raliby, penerangan dengan lisan—dalam hal ini lewat radio—lebih efektif dan memuaskan. Hilangnya *Suara Indonesia Merdeka* (*SIM*) dari udara (berhubung dengan didudukinya Yogyakarta) lebih berat dari hilangnya daerah. Maka penyiaran radio harus digiatkan sebagai pertahanan keempat sesudah pertahanan darat, laut, dan udara. Osman Raliby berharap, fungsi *SIM* dapat digantikan oleh *RRI* Provinsi Sumatra Utara.

  Residen *t/b* Tuanku Mahmud mengharapkan agar di masa depan Jawatan Radio di daerah ini lebih giat lagi bekerja.

  Sementara itu anggota Badan Eksekutif Dewan Perwakilan Sumatra Utara, Amelz, mengharapkan agar dilakukan perubahan-perubahan radikal dalam isi penyiaran radio. Di samping berita-cerita yang umum, seyogianya disiarkan juga berita-berita dari Pemerintah, untuk membantu Pemerintah dalam rangka desentralisasi.

  Gubernur Militer menyatakan penghargaannya kepada *RRI* Sumatra Utara yang menurutnya telah dapat menggantikan sesuatu yang patah dalam siaran radio. Ia mengharapkan agar para pekerja *RRI* bekerja dengan penuh semangat. Penerangan tidak perlu dilebihkan atau dikurangkan,

baik yang mengenai pemerintah dan rakyat, maupun mengenai hubungan antara keduanya. “Berkatalah sebagaimana sebelumnya,” demikian Gubernur Militer. (TS58)

* Juru bicara TNI Divisi X Komando Sumatra mengumumkan, pada jam 11.40 kapal perang musuh “Paugent” mendekati pantai Lhokseumawe pada jarak ½ mil dari pantai dan menurunkan sekoci berisi serdadu. Tentara kita menembaki sekoci tersebut dan salah seorang serdadu terkena tembakan dan terlempar ke laut. Sekoci kembali ke kapal, lalu terjadi tembak-menembak dengan senjata berat selama hampir 40 menit. Salah satu peluru meriam dan mortir kita mengenai buritan kapal, tampak dari asap yang mengepul di atas kapal. Musuh lalu menembaki Kota Lhokseumawe. Dua orang terluka ringan, sebuah rumah dan sebuah kantor rusak. Jam 12.30 kapal meninggalkan perairan Lhokseumawe. (TS58)

* Gubernur Militer-Komandan Divisi X TNI Komando Sumatra mengeluarkan Maklumat No. 2432/G.M.-KD-49 berisi ketentuan bahwa:

  Pembelian segala macam senjata api dan/atau pelurunya hanya dikuasakannya kepada Komandan Resimen TNI Divisi X dan pendaftaran pembelian senjata api dan peluru tersebut dilakukan oleh Jawatan Persenjataan Resimen yang berhak mencari, membeli, dan menetapkan harga senjata api dan pelurunya.

  Di luar Komandan Resimen dan Jawatan Persenjataan tidak dibenarkan membeli dan melakukan pembelian barang-barang tersebut. Pelanggar ketentuan ini akan dituntut menurut undang-undang perang. (TS58-59)

* Komandan Militer Kota Banda Aceh mengeluarkan Maklumat No. 30-1-U-1949 berisi ketentuan bahwa di waktu berlangsung bahaya udara yang ditandai dengan bunyi lonceng atau sirene:

  - Semua motor dan kendaraan lain, termasuk gerobak tangan dan umum yang berlalu-lintas atau yang sedang berada di pasar, dilarang bergerak tanpa tujuan, tetapi sedapat mungkin menuju tempat perlindungan terdekat.
  - Anak-anak sekolah di sekolah tidak dibenarkan pulang, tetapi dengan tenang harus dibawa ke tempat perlindungan oleh para gurunya.

- Semua motor dan kendaraan lain, termasuk gerobak tangan, baik yang sedang berjalan maupun berhenti, tidak dibenarkan meneruskan perjalanan, tapi harus berhenti di tempat yang terlindung, agar tak tampak dari udara.
- Motor dan kereta angin Komandan Militer Kota, Corps Polisi Militer, Polisi Wilayah, Mobile Brigade dan Komando Distrik Tentara dibenarkan berjalan terus. (TS59)

1949 MARET 6.

* Harian *Semangat Merdeka* memberitakan telah diterimanya kawat dari Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Isinya:

1. Pengakuan dan pembangunan kembali Republik Indonesia yang meliputi Jawa, Sumatra, Madura, dan pulau-pulau sekitarnya sesuai dengan persetujuan Linggajati;
2. Pengunduran tentara Belanda berangsur-angsur, selambat-lambatnya dalam tempo 3 bulan, dari seluruh Republik Indonesia;
3. Konferensi Meja Bundar dilangsungkan di bawah pengawasan Panitia PBB. Konferensi Meja Bundar diadakan dengan dasar:
   a. Pembentukan Pemerintah Federal Sementara yang merdeka dan berdaulat, selambat-lambatnya tanggal 1 Juli 1949, terdiri dari 50% wakil-wakil Republik Indonesia, 40% wakil-wakil negara bahagian lainnya, dan 10% golongan terkecil;
   b. Kepada Pemerintah Federal Sementara itu Belanda menyerahkan kedaulatannya;
   c. Sebelum dibentuk Tentara Federal, penjaga keamanan dan ketertiban atas permintaan Pemerintah Federal Sementara dilakukan di daerah Republik Indonesia oleh Tentara Nasional Indonesia dan di daerah-daerah lainnya oleh tentara Belanda;
   d. Pemerintah Federal Sementara segera mengadakan pemilihan umum di bawah pengawasan Panitia PBB untuk membentuk Konstituante. Kontituante membuat Undang-Undang Dasar dan memilih Pemerintah Federal yang tetap;
   e. Tentara Belanda ditarik seluruhnya dari Indonesia pada waktu yang akan ditentukan bersama oleh Pemerintah Federal, Pemerintah Belanda, dan Panitia PBB;

f. Setelah itu statemen UNI Indonesia-Belanda ditetapkan dan disahkan oleh Perlemen Indonesia dan Belanda. (TS59-61)

* Harian Belanda *De Tijd* menulis:
  "*Yang penting bukan jalan ke Den Haag, melainkan jalan ke Yogya*."
  (*KU117*)

1949 MARET 7.

* Perwakilan Republik Indonesia (RI) di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membeberkan sukses Serangan Umum 1 Maret 1949 dalam Sidang Umum PBB berdasarkan berita radio yang disiarkan dari Playen, Wonosari, dengan rute Bukittinggi-Aceh-Birma-India-seluruh dunia. (BS46)

* Surat kabar *Merdeka* mengabarkan bahwa Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) berpendirian sama dengan pemimpin-pemimpin Republik yang ditawan Belanda di Bangka: bahwa pembebasan para pemimpin itu tidak bersyarat dan pengembalian Pemerintah Republik ke Yogyakarta merupakan dasar minimum untuk membuka kembali perundingan dengan Belanda.

  PDRI pun tidak hendak mengesampingkan kekuasaan dan kedudukan Komisi PBB. (*KU117*)

* Persetujuan Rum-Roijen ditandatangani, yang menjadi dasar dibebaskannya Sukarno-Hatta untuk kembali ke Yogyakarta. (Hasjim Djalal "Mengenang Dubes Palar dan Diplomasi Indonesia, *Kompas*, 16 Agustus 2002)

* Gubernur Sumatra Utara mengeluarkan Maklumat No. 107-URIPS tentang dikeluarkannya alat pembayaran dari Rp250,00 yang berlaku di daerah Sumatra Utara. Ciri-ciri alat pembayaran adalah sbb.:

  a. Hari bulan: 1 Maret 1949;

  b. Ditandatangani oleh: Gubernur Sumatra Utara, Mr. S. M. Amin;

  c. Ukuran gambar muka: Lebar 65 mm, panjang 123 mm;

  d. Warna dasar gambar muka dan belakang: Lembayung (violet);

  e. Warna teks: Hitam;

f. Angka Seri: Sebelah kiri bawah dengan tinta merah;

g. Huruf Seri: Di belakang angka seri dengan tinta merah;

h. Alat pembayaran ini mulai diedarkan pada 10 Maret 1949. (TS61)

* Amerika Serikat (AS) berpendapat bahwa dalam masalah Indonesia resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) bukanlah satu-satunya jalan penyelesaian. Namun syarat untuk penyelesaian itu adalah bahwa Republik Indonesia harus ikut di dalamnya. (*KU117*)

1949 Maret 9.

* Sultan Hamid II dari Pontianak yakin bahwa kalau ada orang yang dapat menenteramkan keadaan di Indonesia, maka orang itu adalah Ir. Sukarno. (*KU117*)

* Pemerintah Belanda mengumumkan bahwa Konferensi Meja Bundar (KMB) ditunda pembukaannya, karena Republik Indonesia (RI) tidak bersedia ikut serta. (*KU117; LUxix*)

* Di Bandung, Belanda menyiapkan pasukan payung yang akan diterjunkan ke Wonosari, Jawa Tengah, untuk "merebut markas besar pasukan Republik dan sebuah stasiun radio". (HA176)

* Pertempuran di jembatan Nguter, Solo. Jigido gugur. (*PEH86*)

* *Radio Republik Indonesia* (*RRI*) Banda Aceh berulang-ulang menyiarkan radiogram Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) Mr. Sjafruddin Prawiranegara berisi permintaan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar memperhatikan kekejaman tentara Belanda di Yogyakarta. Isi radiogram:

  no 248/pdri tgl 9/3-49 ttk mohon dengan perantaraan sdrsdr meminta perhatian panitia pbb ttg kekejaman bld didjokja sbg balasan penjerangan tentera kita barubaru ini ttk dua anggauta badan pekerdja sdr mengunsarkoro koma walikota djakarta suwirjo koma walikota djokja mr kadarisman dan bekas gubernur maluku mr latuharhary dianiaja ttk lk enampuluh pemuda dibunuh dgn listrik dikantor aniem ttk djokja

diangkut bersih oleh belanda ttk perampokan siang dan malam dilakukan oleh tentera belanda ttkhbs ketua pdri mr sjafruddin prawiranegara (TS61-62)

* Pemerintah Belanda mengubah pendiriannya. Kabinet Belanda kabarnya sedang meninjau kembali sikapnya yang menolak berdirinya kembali Pemerintah RI di Yogyakarta. (*KU117*)

* Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) bersidang kembali untuk membicarakan masalah Indonesia. (*KU117*)

1949 MARET 10.

* Belanda mengadakan penerjunan besar-besaran di lapangan udara Gading untuk membersihkan daerah Wonosari yang sudah lama dicurigai sebagai sarang pemancar gelap PC-2 yang pernah menyiarkan berita tentang suksesnya Serangan Umum 1 Maret terhadap Yogyakarta.

  Pasukan payung yang diangkut dengan kurang-lebih dua puluh pesawat Dakota itu berangkat dari lapangan terbang Andir, Bandung. Perintah yang diberikan: Merebut markas besar pasukan Republik dan stasiun radio. Belanda menduga bahwa Jenderal Sudirman berada di sekitar tempat itu.

  Kedua perintah tidak mencapai hasil, karena Jenderal Sudirman sudah menyingkir dan pemancar radio pun sudah dipindahkan ke Brosot, Wates. Jenderal Suharto melukiskan peristiwa itu demikian:

  “Kita beruntung masih memiliki pemancar radio di Playen (Wonosari). Pemancar yang dipimpin Perwira AURI Boediardjo inilah yang memberitakan ke luar negeri. Belanda mengetahui pemancar ini. Karena marahnya, pada tanggal 9-10 Maret Belanda menyerang Wonosari secara besar-besaran.” (BS46; HA176; SP62)

* Harian *Mestika* Medan menulis panjang lebar tentang keadaan pemerintahan Republik di Aceh. Diakuinya, jalannya pemerintahan Republik di Aceh sangat lancar dan persenjataan TNI pun sangat kuat. *Mestika* adalah harian yang berhaluan federalis dan penunjang politik Negara Sumatra Timur. (TS62)

* Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengadakan sidang lagi untuk membicarakan soal Indonesia, a.l. tentang:
   1. Rencana Belanda untuk mengadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) guna merundingkan pencepatan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia;
   2. Resolusi PBB tanggal 28 Januari 1949, terutama tentang pemulihan pemerintahan Republik ke Yogyakarta. (*KU117; LUxix*)

* Sidang DK PBB dimulai untuk membicarakan laporan UNCI yang secara lengkap menguraikan Plan Beel dan siasat Belanda untuk melaksanakannya, pendirian Pemerintah RI sebagai jawaban terhadap siasat itu, dan sikap BFO. Laporan mengakibatkan kemarahan di antara anggota DK PBB, hingga sidang berlangsung enam kali, dan baru selesai pada 23 Maret 1949. (AT263)

1949 MARET 11.

* Pertempuran di Gunungan, Pengging, Solo. Sri Dadio gugur. (*PEH86*)

1949 MARET 12.

* Hari ini tanggal yang direncanakan untuk memulai Konferensi Meja Bundar (KMB), menurut surat Pemerintah Belanda tertanggal 26 Februari 1949 kepada Presiden Sukarno. (*AL84*)

* Jawatan Penerangan Sumatra Utara Bagian Radio di Banda Aceh mengumumkan bahwa permintaan umum agar *Radio Republik Indonesia* (*RRI*) dan *Suara Indonesia Merdeka* (*SIM*) di Banda Aceh melakukan juga siaran dalam bahasa Tionghoa, Urdu, dan Arab untuk sementara belum dapat dipenuhi, karena kurangnya tenaga. Siaran yang dilakukan sekarang adalah sbb.:
   1. Seksi Indonesia dengan *announcer* Nurmala Lali dan Nur Azhar, komentator Mustafa Sulaiman, Rustam Thaib, Abduh Mu'thi, dan Teuku Alibasjah (Talsya). Musik Sunrise Quintet Band, Rayuan Timur, dan anak-anak sekolah.
   2. Seksi Inggris dengan *announcer* Alida Alamsjah dan Wildani Lubis, komentator Sunarjo, S. Suraputra, dan Martadinata. Musik pimpinan Sujono, piring-piring hitam, band, dan anak-anak sekolah.

3. Seksi Belanda dipimpin Kusen Tjokrosentono. (TS62-63)

* Berkenaan dengan keterlibatan Dewan Pusat Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) dalam Peristiwa Madiun, maka Dewan Pimpinan Umum Majelis Pesindo daerah Aceh telah bersidang di Banda Aceh dan mengambil resolusi sbb.:
  1. Menganggap bahwa Dewan Pusat Pesindo tidak ada lagi, karena Dewan Pusat ini telah meleburkan dirinya ke dalam gerakan-gerakan PKI Muso, yaitu suatu perbuatan yang melanggar Anggaran Dasar Pesindo sendiri; karena untuk mengubah dasar bukanlah hak Dewan Pusat, hanya hak kongres.
  2. Menganggap Instruktur Daerah Besar Sumatra yang diangkat oleh Dewan Pusat, bukan dipilih oleh anggota di Sumatra, pun tidak ada lagi bersamaan dengan tidak adanya Dewan Pusat.
  3. Oleh sebab itu DPU Majelis Pesindo Daerah Aceh mengambil tanggung jawab Dewan Pusat Pesindo dalam daerahnya, yaitu Daerah Aceh.
  4. Resolusi ini ditandatangani oleh Ketua Umum DPU Majelis Pesindo Daerah Aceh A. Hasjmy dan Setia Usaha Umum Tuanku Hasjim. (TS65)

* Pengurus Besar maskapai Belanda Nederlandse Mij. voor Nijverheid en Handel mengajukan permintaan perlindungan kepentingan Belanda di Indonesia kepada Perdana Menteri Belanda. Maskapai itu tidak mau ikut campur soal-soal politik. (*KU117-118*)

* Tanggal yang diusulkan oleh Wakil Tinggi Mahkota Belanda Beel untuk menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar, menanggapi adanya resolusi DK PBB tanggal 28 Januari 1949 yang bersifat menekan pihak Belanda. (AT256)

1949 MARET 13.

* Atas inisiatif Letnan Kolonel Husin Jusuf diadakan rapat raksasa untuk memupuk semangat perjuangan 17 Agustus 1945 di lapangan VOA Bireuen. Rapat yang dihadiri oleh sekitar 25.000 orang itu dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya", disusul dengan uraian

Komandan Batalion TNI Bireuen mengenai kedudukan dan hubungan tentara dengan rakyat.

Dalam sambutannya Letkol Husin Jusuf a.l. menyatakan, Sukarno-Hatta tahu bahwa sesuai dengan Perjanjian Potsdam dan Perjanjian San Francisco, sesudah Jepang menyerah kepada Sekutu, Indonesia akan diserahkan kembali kepada Belanda. Tapi karena tahu pemuda berdiri di belakang mereka, maka Sukarno-Hatta berani memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia.

“Sekarang sesudah Sukarno-Hatta ditahan, apakah sudah lupa kamu, wahai pemuda, kepada sumpahmu?” kata Husin Jusuf. “Saudara-saudara jangan terpengaruh perkataan juridis, karena pada waktu memproklamasikan kemerdekaan dahulu pun perkataan itu tidak terpakai.”

Selanjutnya kata-kata sambutan diberikan oleh Encik Marjam dari Idi, Mayor M. Nasir, Tgk. Syekh Peusangan, dan Jenderal Mayor Tituler Tgk. Amir Husin al Mudjahid yang menganjurkan agar semangat juang terus ditingkatkan. (TS65-67)

1949 Maret 14.

* Staf Komando Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) dan Tentara Pelajar Islam (TPI) mengeluarkan Perintah Harian bersama No. 14/R/II/IV/49 kepada segenap anggota tentara pelajar supaya kembali ke bangku sekolah masing-masing pada 4 April 1949.

  Selanjutnya diharapkan agar mereka tetap siap sedia menantikan segala kemungkinan. Perintah Harian itu ditandatangani oleh Komandan TRIP Resimen II Amir Hamzah Ali dan Komandan TPI Resimen Aceh M. Hasan Ben. (TS67)

1949 Maret 15

* Hari ini batas waktu bagi Belanda untuk menyerahkan kembali daerah-daerah di Jawa-Madura-Sumatra yang sebelum tanggal 18 Desember 1948 dikuasai Republik Indonesia (RI), tapi dalam rangka Agresi Militer II direbut oleh Belanda. (MA...)

* Hari ini batas waktu bagi Belanda untuk secara berangsur-angsur menarik pasukannya dari residensi Yogyakarta. (MA...)

* ECA (Economic Cooperation Administration) menganjurkan agar masalah Indonesia segera diselesaikan, karena Indonesia penting artinya bagi perbaikan ekonomi Eropa. (*KU118*)

* Batas akhir bagi Belanda untuk mengembalikan daerah-daerah di Jawa, Madura, dan Sumatra yang pada tanggal 18 Desember 1948 dikuasai oleh RI, menurut resolusi Konferensi New Delhi yang berlangsung di bawah pimpinan Jawaharlal Nehru antara 20-23 Januari 1949. (AT252)

* Ancar-ancar tanggal pembentukan pemerintah federal sementara yang diusulkan oleh Bung Hatta dalam surat kepada Sultan Hamid II tanggal 4 Februari 1949. (AT258)

1949 MARET 16.

* Jawatan Penerangan Sumatra Utara di Banda Aceh membuka Kantor Monitoring Service di paviliun Aceh Hotel, bertugas memonitor berita-berita dari dalam dan luar negeri dan menyebarkannya kepada umum lewat buletin tetap tiap pagi.

  Untuk melengkapi tenaga pada kantor tersebut ditempatkan radio operator, stenograf dalam bahasa Indonesia, Belanda, dan Inggris, penerjemah bahasa Tionghoa, dan stenotypist, lelaki-perempuan. (TS69)

1949 MARET 17.

* Sebuah pesawat Belanda terbang rendah dan menjatuhkan tabung di Banda Aceh dan Takengon. Tabung itu berisi surat Wali Negara Sumatra Timur T. Dr. Mansur kepada Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo berisi undangan untuk menghadiri Muktamar Sumatra di Medan.

  Isi undangan selengkapnya:

  Kehadapan Paduka Jang Mulia

  Gubernur Militer Atjeh

  di Kutaradja.

  Perkembangan perdjalanan politik di Indonesia menundjukkan makin-makin djelas, bahwa adalah berfaedah dan baik bagi suku-suku bangsa Sumatera untuk mentjapai kerdjasama jang lebih rapat dan lebih baik, jaitu suatu kerdjasama jang akan dapat terzhahir bukan sadja dalam lapangan politik dan ekonomi, tetapi djuga dalam beberapa banjak tjara jang lain.

Itulah sebabnja maka saja merasa boleh memulai menggerakkan untuk mengundang wakil-wakil segala daerah Sumatera buat turut serta dalam suatu Muktamar-Sumatera, jang akan dilangsungkan di Medan pada 28 Maret ini.

Tudjuan conferentie ini, jang l.k. 5 hari lamanja, ialah mengadakan perhubungan jang pertama diantara daerah-daerah dan suku-suku bangsa Sumatera jang berbagai-bagai itu dan saja menjatakan penghargaan saja moga-moga perhubungan jang pertama ini berangsur-angsur tumbuh mendjadi pertalian jang bertambah-tambah eratnja untuk kebahagiaan bangsa Sumatera dan bangsa Indonesia seluruhnja.

Negara Sumatera Timur akan merasa sebagai suatu kehormatan untuk menerima perutusan Tuan sebagai tamu selama muktamar itu.

Jang diundang ialah:

Atjeh,

Tapanuli,

Nias,

Minangkabau,

Bengkalis,

Indragiri,

Djambi,

Riau,

Bangka,

Belitung,

Sumatera Selatan,

Lampung,

Bengkulu.

Terlepas dari segala perbedaan faham politik saja menjatakan penghargaan saja, supaja Atjeh djuga akan menjuruh suatu perutusan mewakilinja pada muktamar pertama dari suku-suku bangsa Sumatera ini.

Pembesar-pembesar di Sabang telah diperintahkan untuk menjambut perutusan Tuan dan mengawaninja ke Medan dengan kapal terbang.

WALI NEGARA SUMATERA TIMUR,

T. Dr. Mansur. (TS69-70)

* Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo mengeluarkan Maklumat No. 157-GM-49 berisi pengumuman bahwa pegawai Kereta Api, Telepon, dan lain-lain Jawatan penting (vital) dilarang turut serta mengerjakan pertahanan semesta, seperti menjaga pantai dan lain-lain pekerjaan yang berhubungan dengan pertahanan.

  Mereka harus selalu berada di tempat pekerjaannya, harus dapat melanjutkan dengan bebas pekerjaan di jawatan masing-masing sesuai tugas kewajibannya, dan tidak diperkenankan meninggalkan tempatnya jika tidak mendapat ijin dari kepala masing-masing.

  Pelanggaran atas Maklumat ini akan dituntut. (TS71)

1949 MARET 18.

* Partai-partai politik dan perkumpulan-perkumpulan di daerah Aceh dan Sumatra Utara melakukan pertemuan hari ini di Banda Aceh untuk membicarakan berbagai masalah, a.l.:

  a. Perkembangan pertikaian politik Indonesia-Belanda.
  b. Peperangan dan pertahanan rakyat semesta.
  c. Persatuan rakyat dan usaha musuh untuk merusakkannya.
  d. Kesulitan di dalam negeri sebagai akibat tekanan politik-ekonomi Belanda.
  e. Aliran dan penerangan destruktif (merusak), provokatif, dll. dari orang-orang yang tak bertanggungjawab.
  f. Lain-lain soal berkenaan dengan suasana di dalam negeri.

  Pertemuan mengambil keputusan sbb.:

  1. Memberikan kepercayaan dan mendukung tindakan-tindakan Pemerintah Darurat Republik Indonesia dalam menentukan langkah-langkah dan sikap Republik terhadap masalah Indonesia-Belanda.
  2. Menunjukkan kepada bangsa Indonesia di daerah pendudukan Belanda dan bangsa-bangsa asing di dunia luar bahwa rakyat yang berdiam di daerah Aceh tetap bersemangat kesatuan Republik dan menolak tiap-tiap usaha yang hendak membangkit-bangkitkan rasa kepuakan dan kedaerahan seperti yang hendak dilancarkan oleh T. Dr. Mansur dengan rancangan Konferensi Sumatra.

3. Menganjurkan kepada seluruh rakyat supaya memelihara, menjaga, dan memupuk persatuan yang sudah tumbuh dewasa ini.
4. Memberikan sokongan lahir-batin kepada pertahanan rakyat semesta yang telah tersusun dalam organisasi Distrik Militer.

   Memberantas segala rupa perbuatan-perbuatan yang memecah-belahkan persatuan.
5. Menyokong tindakan-tindakan instansi pemerintahan dan ketentaraan dalam usaha mewujudkan dan mempertahankan keamanan dalam negeri dan membasmi pengacau-pengacau.

Resolusi tersebut ditandatangani oleh wakil-wakil:

1. Komisariat PSII Sumatra Utara.
2. Dewan Pimpinan Umum Pesindo Aceh, Langkat, dan Tanah Karo.
3. Dewan Pimpinan Daerah PNI Aceh.
4. Dewan Daerah Masyumi Aceh/Sumatra Utara.
5. SOBSI Daerah Aceh.
6. Dewan Pimpinan Daerah Partai Sosialis Indonesia Aceh.
7. Pengurus Besar POESA.
8. Majelis Pimpinan Muhammadiyah Daerah Aceh.
9. Pimpinan Daerah GPII Aceh/Sumatra Utara.
10. Haiah Kibarul Ulama Sumatra Utara di Aceh. (TS71-72)

1949 Maret 20.

* Di Banda Aceh berlangsung rapat Dewan Pertahanan Daerah untuk membahas situasi perjuangan kemerdekaan, dipimpin oleh Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, Tgk. Muhd. Daud Beureueh.

Dalam rapat itu dibicarakan surat undangan Wali Negara Sumatra Timur dan rapat menolak dengan tegas undangan tersebut. Gubernur Militer menegaskan, tidak perlu menjawab surat undangan tersebut, akan tetapi kita akan mengeluarkan keterangan pers saja, berupa pernyataan sikap Aceh terhadap muktamar.

Rapat pun memutuskan akan melipatgandakan kekuatan pertahanan dan meningkatkan kewaspadaan rakyat untuk menghadapi segala

kemungkinan, dan usaha membantu daerah-daerah pendudukan di luar Aceh akan digiatkan dengan mengirimkan pasukan tambahan, persenjataan, bahan makanan, dan pakaian. (TS73-74)

1949 Maret 21.

* L. N. Palar menyatakan di hadapan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) bahwa Belanda kini melumpuhkan Yogyakarta, agar Pemerintah Republik tidak mungkin bekerja kembali.

  Ia minta DK PBB memberikan perintah kepada Komisi PBB agar segera memberikan laporan tentang keadaan Yogyakarta. (*KU118*)

* Pertempuran di selatan Desa Jabung, Solo. Komandan Si. II Ki. I Pangat gugur. (*PEH86*)

* Pertempuran di Kartosuro, Solo. Hadirun S. gugur. (*PEH86*)

1949 Maret 22.

* Gerilya Solo melakukan pencegatan di Manahan, Solo. Pulangnya menembak mati mata-mata perempuan tua di Kampung Sumber. (*PEH86*)

* Mulai hari ini sampai 1 April 1949 di Banda Aceh dibuka kembali kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai anggota Angkatan Laut RI Daerah Aceh (ALDA).

  Melalui siarannya dalam harian *Semangat Merdeka*, Komandan ALDA mengumumkan bahwa untuk menambah jumlah kader pimpinan ALDA dibutuhkan pemuda-pemuda yang berminat untuk menyumbangkan tenaganya pada ALDA, di mana secara kilat para pemuda itu akan diberi pendidikan sekurang-kurangnya setingkat Sekolah Menengah Pertama.

  Pendaftaran dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan kepada Komandan ALDA disertai lampiran salinan ijazah dan surat keterangan lain. (TS74)

  Surat kabar *Waspada* Medan memberitakan bahwa undangan untuk menghadiri Muktamar Sumatra di Medan diterima dengan dingin di Aceh. Mengutip siaran *Radio Republik Indonesia* di Aceh, surat kabar

itu menyatakan bahwa Aceh tidak akan ambil bagian dalam Muktamar Sumatra tersebut. Walau demikian, hingga hari ini belum diterima jawaban resmi Aceh atas undangan Dr. T. Mansur itu.

Seperti diketahui, pada 17 Maret 1949 sebuah pesawat telah menjatuhkan tabung di Banda Aceh dan Takengon. Tabung ternyata berisi surat undangan Wali Negara Sumatra Timur Dr. T. Mansur kepada Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo untuk ambil bagian dalam Muktamar Sumatra yang akan diadakan di Medan. (TS74)

1949 MARET 23

* Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengeluarkan petunjuk pelaksanaan resolusi PBB tertanggal 28 Januari 1949 tentang:

  1. Penghentian perang gerilya Republik Indonesia (RI);
  2. Kerja sama dalam menegakkan perdamaian dan juga keamanan/ketertiban;
  3. Kesertaan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada negara Republik Indonesia Serikat (RIS) tanpa syarat.

  Resolusi yang diusulkan Kanada ini diterima dengan 8 suara pro dan 3 suara blanko (Rusia, Ukraina, Perancis). (*KU118; LUxix; LU t.h.;* MA...)

* Sidang DK PBB dengan suara mayoritas menerima usul Kanada yang kemudian terkenal dengan nama Pedoman Kanada (Canadian Directive) mengenai masalah Indonesia, khususnya berkaitan dengan resolusi PBB tanggal 28 Januari 1949. (AT264,270)

* Sesuai dengan sifatnya sebagai badan yang mengandung banyak aliran, Dewan Keamanan mencari jalan untuk mengadakan penyelesaian yang seboleh-bolehnya berdasar kepada kompromi. Jalan kompromistis itu ialah *ruling* tanggal 23 Maret 1949, yang dipandang sebagai langkah pertama untuk menyelenggarakan Resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 1949. (HKP282)

* Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo Tgk. Muhd. Daud Beureueh memberikan keterangan kepada surat kabar *Semangat Merdeka* mengenai undangan dari Wali Negara Sumatra Timur Dr. T. Mansur sbb.:

  Perasaan kedaerahan di Aceh tidak ada, sebab itu kita tidak bermaksud untuk membentuk satu Aceh Raya sebagai Tapanuli Raya, Bengkulu Raya, Bangka Raya, dan lain-lain, karena kita di sini adalah bersemangat Republiken.

  Sebab itu juga, undangan dari "Wali Negara Sumatra Timur" tersebut kita pandang sebagai tidak ada saja dan karena itulah tidak kita balas.

  Di Aceh tidak ada terdapat salah faham sebagaimana diterangkan oleh Belanda itu, bahkan kita mengerti betul, apa yang dimaksud oleh Belanda itu dengan Muktamar Sumatranya. Maksud Belanda ialah hendak mendiktekan kepada Dr. Mansur supaya menjalankan politik pintar-busuknya itu untuk memecah-belah Republik ini karena Belanda sendiri telah selalu gagal dan tidak bisa menjalankan politik *divide et impera*-nya lagi.

  Sebab itu kita menolak adanya Muktamar Sumatra tersebut dan kita sendiri telah siap sedia menanti segala kemungkinan yang bakal timbul dari sikap penolakan kita itu.

  Kita yakin bahwa mereka yang telah menerima baik undangan Dr. Mansur tersebut bukanlah orang Republiken, tetapi adalah kaki tangan kolonialisme Belanda yang selama ini sudah diberi makan roti.

  Menghadapi berbagai usaha untuk memisahkan Aceh dari Republik Indonesia, pemimpin-pemimpin dan rakyat Aceh bersama Angkatan Perang dan Pemerintah bersatu padu. (TS76)

* *RRI* Banda Aceh menyiarkan radiogram Ketua PDRI Mr. Sjafruddin Prawiranegara kepada wakil-wakil Republik Indonesia di luar negeri: Mr. Maramis, L.N. Palar, dan Dr. Sudarsono.

  Radiogram menyatakan bahwa mengenai keputusan Dewan Keamanan PBB supaya diadakan perundingan antara Indonesia dan Belanda guna melaksanakan resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 1949. PDRI tidak berkeberatan diadakan perundingan tersebut oleh para pemimpin Republik yang berada di Bangka, dengan ketentuan sbb.:

a. Pengembalian Pemerintah Republik ke Yogya berarti *implicite* pengakuan pada azasnya oleh Belanda daripada kekuasaan Pemerintah Republik atas seluruh Jawa dan Sumatra dan pulau-pulau sekitarnya seperti diakui oleh Belanda dalam Persetujuan Linggajati.

b. Pengakuan yang dimaksud sub a berarti pasukan-pasukan TNI yang sekarang tersebar di seluruh Jawa dan Sumatra dan pulau-pulau sekitarnya tidak akan ditarik kembali dari tempatnya masing-masing sampai terbentuk Pemerintah Federal Indonesia. (TS77)

1949 Maret 24.

* Persbiro Nederlands Hervormde Kerk mengumumkan perbuatan-perbuatan tentara Belanda terhadap umat Kristen di Peniwen, Malang, Jawa Timur, yang dinilai melanggar perikemanusiaan, waktu mereka melakukan aksi pembersihan tanggal 19-20 Februari 1949.

  Dalam peristiwa itu sepuluh orang anggota jemaat ditembak mati, seorang di antaranya anggota Dewan Gereja. Laporan tentang pelanggaran terhadap perikemanusiaan ini dibuat oleh Ds. H. A. C. Hildering dari Surabaya. (*KU118; LUxix*)

1949 Maret 26.

* Sultan Hamid dari Kalimantan Barat atas nama Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) minta perantaraan Belanda agar dalam perundingan antara Republik dan Belanda yang akan datang, BFO bisa diikutsertakan sebagai pihak ketiga. (*KU118; LUxix*)

* Wali Negara Sumatra Timur Dr. Mansur mengundang daerah-daerah seluruh Sumatra untuk mengadakan Konferensi Sumatra di Medan. Daerah-daerah Republik yang diundang ternyata tidak bersedia datang. (*KU118; LUxix*)

* Wali Negara Sumatra Timur mengambil keputusan untuk melarang para pegawai menjadi anggota Front Nasional. (*KU118*)

1949 Maret 27.

* Gerilya Solo melakukan serangan ke dalam kota. (*PEH86*)

1949 MARET 28.

* Presiden Sukarno melakukan perjalanan di seluruh pulau Bangka dengan mengunjungi semua tempat besar yang ada di sana. Di mana-mana ia mendapat sambutan meriah dari rakyat. A.l. ia mengunjungi Sungailiat dan Muntok. Perjalanan berlangsung sampai tanggal 31 Maret 1949. Dari sambutan tersebut dapat diketahui bahwa rakyat Bangka tetap bersemangat republiken. (*LU t.h.*)

* Penyair Chairil Anwar meninggal di Jakarta dan dimakamkan di pemakaman Karet. (*Sobron Aidit: "Kisah Serba-Serbi", 1999*)

* *RRI* Banda Aceh dan *Radio Rimba Raya* menyiarkan radiogram Panglima Komando Jawa No. 0094/pl 0309 kepada para simpatisan Republik Indonesia di luar negeri. Isi radiogram:

  Meminta perhatian dunia supaya Dewan Keamanan PBB segera mengambil tindakan untuk mengakhiri *plundering* terhadap Pemerintah dan rakyat di Yogya oleh Belanda. (TS78)

* *RRI* Banda Aceh dan *Radio Rimba Raya* menyiarkan radiogram Ketua PDRI kepada Mr. Maramis di New Delhi, India. Isi radiogram:
  mr maramis new delhi india

  no 311/pdri tgl 27/3-49 ttk harap beritahu mr rum supaya minta perhatian uncommission for Indonesia ttg pembunuhan terhadap sdr supeno menteri pembangunan dan pemuda pada tgl 24 febr didekat ngandjuk jawa oleh tentera bld dan supaya minta diadakan pemeriksaan ttg hal tsb ttkhbs

  ketua pdri (TS78)

1949 MARET 29.

* Susunan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) mengalami perubahan. Mr. Sjafruddin Prawiranegara menjadi Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Penerangan. (*KU119*)

* Harian *Semangat Merdeka* memberitakan bahwa hingga hari ini belum ada jawaban resmi dari Aceh atas undangan Wali Negara Sumatra Timur Dr. T. Mansur untuk mengirimkan wakilnya ke Konferensi Sumatra di Medan.

Reaksi dari Aceh atas undangan tersebut hanya berupa komentar yang telah disiarkan oleh *Radio Republik Indonesia* di Banda Aceh, yang menunjukkan bahwa undangan tersebut diterima dengan dingin.

Surat kabar yang terbit di Aceh pun menyatakan bahwa undangan itu ditolak. (TS78)

* Di tempat kediaman resmi Gubernur Sumatra Utara di Banda Aceh berlangsung upacara untuk memperingati gugurnya Menteri Pembangunan dan Pemuda Supeno di Jawa Timur. Dengan rasa haru, Gubernur Amin mengatakan:

  "Atas meninggalnya Paduka Tuan Supeno dalam pertempuran di Jawa Timur, pada tempatnya kita menghormati beliau sebagai salah seorang angkatan muda yang senantiasa giat dan gesit dalam perjuangan. Kita hendaknya dapat menunjukkan rasa hormat atas jasa-jasa beliau yang ditumpahkannya dalam perjuangan. Janganlah menyebabkan kelemahan semangat perjuangan kita, tetapi peristiwa ini hendaklah bagi kita sebagai suatu dorongan yang hebat untuk meneruskan perjuangan kita."

  Mewakili Badan Eksekutif, M. Yunan Nasution a.l. mengatakan:

  "Atas nama Badan Eksekutif dan rakyat umumnya yang sekarang sedang berjuang, kami menyatakan hormat kami atas berpulangnya Paduka Tuan Supeno. Dari jauh kami mendoakan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas arwah beliau yang telah syahid dalam menunaikan kewajibannya terhadap Ibu Pertiwi. Kami menyatakan rasa sedih kami, tetapi tidaklah hal itu menjadikan suatu sebab yang akan melemahkan perjuangan total ini, tetapi adalah suatu dorongan yang hebat hingga tercapai kelak cita-cita nasional yang sedang diperjuangkan." (TS79-80)

* Mulai hari ini sampai (menurut rencana) 2 April 1949 di Medan berlangsung Muktamar Sumatra yang dipelopori oleh Dr. Tengku Mansur, Wali Negara Sumatra Timur, dihadiri oleh 86 utusan berbagai daerah dan suku bangsa di Sumatra.

  Hadir utusan dari Bangka, Indragiri, Bengkulu, Siak, Bengkalis, Belitung, Jambi, Lampung, Minangkabau, Riau, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Sabang, Sumatra Selatan, Sumatra Timur.

Tujuan Muktamar, menurut Dr. T. Mansur dalam pidato pembukaannya adalah “supaya dalam masa yang sesingkat-singkatnya terbentuk Negara Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat”.

Muktamar tidak dihadiri oleh Aceh yang juga diundang, karena masyarakat Aceh tidak menaruh perhatian terhadap muktamar tersebut. Lagi pula Aceh sedang memusatkan perhatian dan kegiatan pada usaha memperkuat pertahanan di seluruh daerah Aceh untuk menghadapi percobaan pendaratan tentara Belanda yang akhir-akhir ini makin sering dilakukan. (TS79-80)

1949 MARET 31.

* Tiga bulan sesudah Belanda menduduki Yogyakarta perampokan bertambah sering terjadi. Penjara Wirogunan penuh dengan tersangka perampokan, di samping tahanan politik. (*KU119*)

* Dengan Maklumat Militer No. II, Darul Islam (DI) memerintahkan agar negara dan tentara mengibarkan satu macam bendera, yaitu “bendera perang” dengan warna dasar merah berbulan-bintang, dan menaikkannya terus selama negara dalam keadaan bahaya dan perang (*staat van beleg en oorlog*). Waktu itu belum ada Negara Islam Indonesia (NII) yang baru akan diproklamasikan oleh S. M. Kartosuwirjo pada 7 Agustus 1949. (A. Karim D.P. dalam *Star Weekly*, 30 Oktober 1949: 21)

* Kepala Staf TNI Komando Sumatra, Letnan Kolonel Ahmad Tahir, memberikan petunjuk kepada seluruh kesatuan di Sumatra agar tidak bimbang dan ragu dalam melancarkan perjuangan kemerdekaan.

  Dijelaskan bahwa sampai saat ini Komando Sumatra belum mendapat perintah dari Panglima Tentara Teritorial Sumatra (PTTS) dan Panglima Besar untuk mengubah taktik perjuangan kita. Sejak penyerangan Belanda pada 19 Desember 1948 sampai 28 Januari 1949 saat keluarnya resolusi Dewan Keamanan PBB, kita menyaksikan bahwa di Sumatra khususnya dan di daerah Republik Indonesia umumnya:

  a. Angkatan Perang Belanda terus melakukan pemboman-pemboman terhadap kampung-kampung, pekan, rumah, dan rakyat yang berada dalam daerah yang kita kuasai.

b. Perampokan harta Bangsa Indonesia, penculikan-penculikan, dan pembunuhan-pembunuhan terhadap pemimpin-pemimpin Republik Indonesia dalam daerah-daerah yang didudukinya.
c. Keadaan kesatuan-kesatuan kita—yang telah masuk kembali ke seluruh pelosok daerah Jawa, Sumatra, dan Madura, sehingga pos-pos Angkatan Perang Belanda merupakan kantong-kantong yang tidak aman bagi mereka—terkepung.

Dari kenyataan-kenyataan di atas dapat disimpulkan:

a. Belanda bagaimanapun tidak akan ingin menarik tentaranya mundur dari Indonesia dan memberikan kemerdekaan pada Bangsa Indonesia, sebagai yang kita cita-citakan dalam Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.
b. Kemerdekaan dan ketertiban umum tidak akan ada di Indonesia selama tentara Belanda masih berada di bumi kita.

Oleh karena itu, Kepala Staf TNI Komando Sumatra memberikan petunjuk agar tiap Komandan Daerah Militer dan Komandan Kesatuan jangan sekali-kali mengubah atau mengurangi corak perjuangan kita, selama tentara Belanda masih berada di sini. (TS81)

1949 Maret (akhir).

* United Nations Commission for Indonesia (UNCI, Komisi PBB untuk Indonesia) mengirimkan undangan kepada pihak Belanda dan pihak Republik untuk mengadakan pertemuan di Jakarta guna membicarakan usul pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 1949.

  UNCI sengaja menggunakan kata “pembicaraan” (*discussions*) dan bukan “perundingan” karena tahu, pihak Republik berpendirian bahwa perundingan dengan pihak Belanda hanya bisa diadakan setelah Pemerintah Republik dipulihkan kembali di Yogyakarta. (AT270)

***

(Akhir Maret 1949)

April 1949

1949 April.

* North Atlantic Treaty Organization (NATO, Organisasi Perjanjian Atlantik Utara) ditandatangani di Washington.

* Perintis organisasi ini adalah Western European Union (WEU, Uni Eropa Barat) yang dibentuk tahun 1948, ketika Eropa Barat sedang mencari-cari dan akhirnya menemukan keseimbangan politik yang baru. (LM219)

* Pertempuran di desa Larangan, Kebak Kramat, Solo. Herman, Irawan, dan Tiono dari Seksi Murdio gugur. (*PEH86*)

* Gerilya Solo memasang bom tarik di pos Kalioso. (*PEH87*)

* Pertempuran di Kedusan, Bekonang, Solo. Gianto (?) gugur. (*PEH87*)

* Di daerah gerilya Solo beredar desas-desus bahwa Pemerintah Republik sedang terlibat dalam perundingan tentang gencatan senjata dengan pihak Belanda. Untuk mengimbangi berita yang simpang siur dan dianggap dapat melemahkan semangat tempur pasukan Republik itu, Mayor

Achmadi mengeluarkan perintah masuk kota sebagai pedoman bagi para Komandan Rayon dan Perwira Staf. (*PEH18-19*)

1949 April 1.

* Menjawab undangan UNCI akhir Maret 1949 untuk membicarakan usul pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan, Mr. Mohammad Rum sebagai ketua delegasi Indonesia mengirimkan surat jawaban yang menandaskan, “Kami hanya bisa membicarakan detail-detail praktis tentang pemulihan Pemerintah Republik di Yogyakarta.” (AT270)

1949 April 2.

* Mr. Mohammad Rum mengirim surat kepada Komisi Tiga Negara (KTN) berisi pernyataan bersedia melangsungkan perundingan pendahuluan dengan Belanda di Jakarta. (*KU119; LUxix*)

1949 April 3.

* Menteri Luar Negeri Belanda, D. U. Stikker, bertemu dengan J. H. van Roijen yang akan berangkat ke Indonesia sebagai ketua Delegasi Belanda dalam perundingan dengan Indonesia. (*KU119*)

1949 April 4.

* Perdana Menteri Negara Indonesia Timur (NIT), Anak Agung Gde Agung, menyatakan di Parlemen NIT bahwa Pemerintah NIT setuju dengan pendapat pemimpin Fraksi Progresif dalam Parlemen, Arnold Mononutu, bahwa penyerahan kedaulatan harus sudah dilaksanakan sebelum sesuatu persetujuan ditandatangani. (*KU119*)

1949 April 5.

* Pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di bawah Kolonel Suharto tiba kembali di Imogiri dan Segoroyoso. (SP62)

* *Speedboat* A.58 di bawah Mayor John Lie dikejar kapal Angkatan Laut dan pesawat Belanda dalam perjalanan kembali ke Aceh dari Penang, Malaya. *Speedboat* dilarikan *fullspeed* dengan gaya zig-zag untuk mengelakkan tembakan yang dihamburkan oleh kapal musuh, namun selamat sampai memasuki muara Kuala Raja, Seruai, Aceh Timur.

* Sampai di tempat, *speedboat* oleh penduduk segera ditutup dengan dedaunan agar luput dari penglihatan musuh. (TS84)

* Sebelum bertolak ke Indonesia dari Amerika Serikat (AS) J. H. van Roijen telah berunding dengan Menteri Luar Negeri Belanda, D. U. Stikker, wakil Belanda di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), E. N. van Kleffens, dan wakil-wakil beberapa negara lain. (*KU119*)

1949 April 7.

* Garis besar petunjuk Delegasi Belanda dalam berunding dengan Indonesia adalah sbb.:

  Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) ikut dalam perundingan pendahuluan.

  Pemerintah interim federal tidak ikut dalam perundingan.

  Tidak menghendaki penetapan lanjut agenda.

  Memegang teguh hubungan yang tak terpisahkan antara tiga pasal dalam Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) 23 Maret 1949. (*KU119*)

1949 April 8.

* Belanda mengajukan protes kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) karena India dan Australia mengusulkan untuk memasukkan soal Indonesia dalam agenda sidang umum PBB. (*KU119; LUxix*)

1949 April 9.

* Pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di bawah Kolonel Suharto berpindah ke Bibis dari Imogiri, yang berarti lebih mendekati kota. (SP62)

1949 April 11.

* Sultan Hamengkubuwono IX untuk pertama kali sesudah Agresi Militer II Belanda berkunjung ke Jakarta untuk melakukan perundingan tentang pengembalian Yogyakarta dengan pihak Belanda. (*KU119; LUxix*)

1949 April 12.

* Moh. Natsir dan Dr. J. Leimena tiba di Mentok, Bangka, dengan pesawat UNCI yang akan menjemput ketua delegasi Indonesia dalam perundingan dengan pihak Belanda, Mr. Mohammad Rum.

  Di Hotel Mentok mereka bertemu dengan Bung Hatta dan mereka mempertimbangkan perlu-tidaknya Ali Sastroamidjojo ikut hadir dalam perundingan dengan pihak Belanda yang akan diadakan pada 14 April di Hotel des Indes Jakarta. Mereka berdua menyatakan perlu. Hari ini juga Ali Sastroamidjojo ikut bertolak ke Jakarta. (AT272)

  Wali kota Kotaraja (sekarang Banda Aceh) mengumumkan bahwa rapat Panitia kota telah memutuskan akan mengadakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan kota Kotaraja untuk enam *kiesdistrik* Haminte (daerah pemilihan Kotapraja), yaitu:

  1. *Kiesdistrik* I (Perkampungan I) pada 18 April 1949
  2. *Kiesdistrik* II (Perkampungan II) pada 19 April 1949
  3. *Kiesdistrik* III (Perkampungan III) pada 24 April 1949
  4. *Kiesdistrik* IV (Perkampungan IV) pada 22 April 1949
  5. *Kiesdistrik* V (Perkampungan V) pada 20 April 1949
  6. *Kiesdistrik* VI (Perkampungan VI) pada 21 April 1949 (TS86)

  Dr. J. H. van Roijen, wakil Belanda di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), selaku ketua baru delegasi Belanda tiba di Jakarta bersama para penasihat.

  Ia akan berunding dengan delegasi Indonesia yang diketuai oleh Mr. Mohammad Rum. (*KU129; LUxix; LU t.h.*)

1949 April 13.

* Untuk pertama kali sejak Agresi Militer II Belanda, Mr. Mohammad Rum memberikan wawancara kepada kantor berita *United Press*. (*KU120*)

* Konsekuen dengan keputusan sidang pleno Pesindo Aceh tanggal 20 September 1948, maka Pimpinan Pesindo Aceh menentang Dewan Pusat Pesindo yang telah bersekutu dengan gerakan Muso cs.

  Mengenai tidak diakuinya lagi Sarwono Sastro Sutardjo sebagai Instruktur Pesindo Sumatra ialah karena ia diangkat oleh Dewan Pimpinan Pusat,

juga karena banyak sebab lain. Di antara sebab-sebab itu: tidak cakap dan tidak bijaksana dalam menghadapi berbagai masalah, melakukan kegiatan yang merugikan organisasi, bercampur tangan, atau sekurang-kurangnya menjadi dalang peristiwa yang terjadi tahun 1948 di Aceh. Menghadapi Peristiwa Muso dkk., Sarwono sebagai Instruktur Pesindo Sumatra pun bersikap ragu-ragu.

Kepada seluruh cabang dan ranting Pesindo dijelaskan, Pesindo Aceh tetap melaksanakan pasal 2 dan 3 Anggaran Dasarnya, yaitu membela Negara Republik Indonesia dan mempertahankan hukum demokrasi tulen, bukan diktator proletar, dan Pesindo Aceh tidak pernah mau dijadikan alat.

Penjelasan ini ditandatangani oleh Ketua Umum dan Setia Usaha Umum Dewan Pimpinan Majelis Pesindo Daerah Aceh, masing-masing A. Hasjmy dan Tuanku Hasjim. (TS88)

1949 APRIL 14.

* Atas prakarsa United Nations Commission for Indonesia (UNCI, Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia) hari ini dimulai lagi Perundingan Indonesia-Belanda di Hotel des Indes, Jakarta, di bawah pimpinan Merle Cochran, anggota UNCI dari Amerika Serikat (AS).

  Delegasi Republik Indonesia (RI) dipimpin oleh Mr. Mohammad Rum dengan wakil Ali Sastroamidjojo dan anggota-anggota Dr. J. Leimena, Ir. Djuanda, Prof. Mr. Dr. Supomo, Mr. J. Latuharhary, dengan penasihat: Sutan Sjahrir, Ir. Laoh. Moh. Natsir, Dr. Darmasetiawan, Wakil Kepala Kepolisian Negara Sumarto, Mr. Dr. A. Kusumaatmadja, dan dengan sekretaris umum Mr. A. K. Pringgodigdo.

  Delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. J. A. van Roijen dengan anggota-anggota Mr. N. S. Blom, Mr. A. Jacob, Dr. J. J. van der Velde, dan empat penasihat.

  Perundingan baru bisa diselenggarakan hari ini karena ketua delegasi Belanda Van Roijen terlambat datang.

  Perundingan berlangsung sampai 7 Mei 1949. Menghasilkan Pernyataan Rum-Roijen yang pada tanggal ini juga ditandatangani. (AT270,273; *KU120; LU t.h.; PSPB2 26;* SDA108; S6 65; WGxix)

* Panglima Tentara dan Teritorial Sumatra Kolonel Hidajat mengeluarkan Surat Penetapan No. 105/B.D/49 tanggal 14 April 1949 berisi pengangkatan

nama-nama berikut sebagai Penasihat Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo: Letnan Kolonel Husin Jusuf; Letnan Kolonel Tituler Tgk. Abd. Wahab, Bupati Aceh Pidie; Letnan Kolonel Tituler Sutikno Padmo Sumarto, Kepala Kehakiman Daerah Aceh; Mayor Tituler Hasan Aly, Auditur Militer; Mayor Tituler Nyak Neh, Komandan Artileri Divisi X; Mayor Tituler Ali Hasjmy, Wakil Kepala Jabatan Sosial Provinsi Sumatra Utara. (TS88)

* Gubernur Sumatra Utara mengeluarkan Maklumat yang menyatakan bahwa uang Jepang *f*100,–, *f*10,–, *f*5,–, *f*1,–, dan *f*0,50,– masih tetap berlaku di daerah Provinsi Sumatra Utara.

  Maklumat ini dikeluarkan karena minggu-minggu terakhir ini para pedagang di Kotaraja dan kota-kota lain di Aceh enggan menerima pembayaran dengan uang Jepang. (TS88)

1949 APRIL 15.

* Sudarpo, atase pers Republik Indonesia (RI) di Lake Success, New York, tiba di Jakarta atas permintaan L. N. Palar.

  Dari Jakarta ia meneruskan perjalanan ke Bangka guna menyampaikan pelbagai keterangan kepada para pemimpin RI yang sedang dalam penahanan Belanda di tempat itu. (*KU120*; *LUxix*)

1949 APRIL 16.

* Telah dibentuk delegasi untuk menghadiri perundingan pendahuluan dengan Belanda, terdiri dari Ketua Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), 2 orang dari Sumatra, 2 orang dari Kalimantan, 2 dari Jawa, dan 1 dari Indonesia Timur. (*KU120*)

* Pencegatan dan pertempuran di Padokan, Jetak, Solo. Noro Trigonggo gugur. (*PEH86*)

1949 APRIL 17.

* Parlemen Negara Pasundan membicarakan masalah bendera nasional, tapi belum diperoleh keputusan tentang kesimpulannya. (*KU120*)

* Pertempuran di desa Daleman, Baki. Sudiro gugur. (*PEH86*)

1949 APRIL 18.

* Negara Indonesia Timur (NIT) berpendirian bahwa sebelum Konferensi Meja Bundar (KMB) diadakan, harus diadakan dahulu perundingan antara Republik Indonesia dan Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO). (*KU120*)

* Pertempuran di Ngapeman, Solo. Suparno Glembong gugur, Rauf terluka di perut. (*PEH87*)

1949 APRIL 19.

* Salah seorang tokoh Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) tewas akibat perampokan. (*KU120*)

1949 APRIL 20.

* Gerilya Republik kembali menyerang Yogyakarta. (*KU120; LUxix*)

* Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) dianggap belum waktunya ikut serta dalam perundingan, karena tahap perundingan baru sampai pada hubungan Republik Indonesia dengan Belanda. (*KU120*)

* Pertempuran di desa Jelobo, Delanggu, Solo. Jareban gugur. (*PEH87*)

1949 APRIL 21.

* Presiden Sukarno menulis surat dengan tulisan tangan berisi pujian kepada rakyat Bangka sbb.:

  "Terima kasih kepada rakyat Bangka. Semangatnya tetap semangat kemerdekaan. Siapa dapat memadamkan api-kemerdekaan yang telah berkobar dalam jiwa sesuatu rakyat? Soekarno. Hari Kartini 21-4-'49."

  Disusul tulisan Wakil Presiden Mohammad Hatta di halaman yang sama:

  "Perjoangan hanya dapat mencapai hasil apabila berpedoman kepada suatu cita-cita besar yang umurnya lebih lama dan lebih lanjut daripada hidup manusia. Hatta 21-4-'49."

  Surat ditandatangani juga oleh Ali Sastroamidjojo. (*LU t.h.*)

* Dr. J. H. van Roijen menerangkan bahwa pemerintahnya bersedia memulihkan Pemerintah Republik Indonesia (RI) ke Yogyakarta.
  Delegasi RI menyatakan bahwa RI hanya bersedia melakukan perundingan tentang cara-cara yang praktis untuk memulihkan Pemerintah RI ke Yogyakarta. (*KU120; LUxix*)

1949 April 22.

* Republik Indonesia (RI) tidak beranjak dari pendiriannya semula: Hanya bersedia membicarakan cara-cara yang praktis tentang pemulihan Pemerintah RI ke Yogyakarta. (*KU120*)

* Melalui Perwakilan Republik Indonesia di Penang dan Singapura, *RRI* di Kotaraja (sekarang Banda Aceh) mengirim radiogram No. 437/pdri/1949 dari Ketua PDRI kepada Perwakilan RI di New Delhi.

  Isi radiogram:

  "Pernyataan bahwa kiriman obat-obatan dari Intercross Asia Tenggara yang dijatuhkan dengan pesawat di Lubuk Sikaping telah diterima dengan baik. Selanjutnya diminta kiriman obat-obatan tambahan seperti bibit cacar lengkap dengan glycerin untuk 200.000 orang." (TS89)

1949 April 23.

* Staf Operasi Divisi X TNI mengawatkan kepada *Semangat Merdeka* di Banda Aceh bahwa pada jam 10.15 Kutacane yang sedang hari pasar diserang dari udara oleh dua pesawat pemburu musuh. Kedua pesawat memberondong juga Lawe Sigalagala dengan senapan mesin.

  Kecuali pasar, yang menjadi sasaran adalah kantor pemerintah dan sekolah. Korban penduduk di Kutacane 3 orang tewas, seorang luka berat, dan 6 orang luka ringan. Di Sekolah Tionghoa seorang guru menderita luka. (TS89)

1949 April 24.

* Perundingan Indonesia-Belanda berjalan sangat lamban, bahkan hampir menemui jalan buntu.

  Karena itu delegasi Republik Indonesia (RI) ingin menempuh cara lain, yaitu mengadakan perundingan tak resmi dan langsung dengan pihak Belanda disaksikan oleh anggota United Nations Commission for Indonesia (UNCI, Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia)

dari Amerika Serikat (AS), Merle Cochran. Untuk itu delegasi Indonesia meminta kedatangan Wakil Presiden Mohammad Hatta dari Bangka.

Selanjutnya dengan restu Presiden Sukarno, Mohammad Hatta datang ke Jakarta dari Bangka untuk mencoba sendiri memecahkan kesulitan itu. Dan, akan terbukti kemudian, bahwa campur tangan Wakil Presiden itu berhasil. (AT277; *KU120*; *LUxx*; S6 66)

* Menteri Pembangunan dan Pemuda, Supeno, gugur dalam perang gerilya di daerah Nganjuk, Jawa Timur. (ABA13; lj. 24 Februari 1949)

1949 April 25.

* Sultan Hamengkubuwono IX tiba di Jakarta dari Yogyakarta untuk menemui delegasi Republik Indonesia (RI) yang sedang berunding dengan delegasi Belanda. (*KU120; LUxx*)

* Pertemuan tak resmi pertama antara Mohammad Hatta dan ketua Delegasi Belanda Dr. J. H. van Roijen di Jakarta.

  Hasilnya tidak diumumkan, namun Mohammad Hatta menyatakan bahwa pertemuan tak resmi itu adalah untuk membantu memberikan penjelasan kepada delegasi Belanda. Pertemuan demikian dilakukan dua kali lagi oleh ketua Delegasi Indonesia dengan ketua Delegasi Belanda, yaitu pada 28 April 1949 dan 4–5 Mei 1949. (*KU120*; S6 66-67)

* Mayor Achmadi selaku Komandan SWK 106 Arjuna bersama Mayor Suhardi dan Letkol Dr. Sumantri merumuskan perintah rencana masuk kota sebagai pedoman bagi para Komandan Rayon dan Perwira Staf. (*PEH19*)

1949 April 26.

* Sidang Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) menerima baik peraturan umum yang baru dan membentuk delegasi untuk turut serta dalam perundingan pendahuluan dengan Belanda. (*KU120*)

1949 April 27.

* Wakil Presiden Mohammad Hatta menyatakan kepada kantor berita *AFP*: Kemajuan komunis di Tiongkok hendaknya menjadi pendorong bagi Belanda dan Republik Indonesia untuk mencapai persetujuan. (*KU120-121*)

* Belanda melancarkan *kanonase* ke desa Nogosari, Kemusu. Rachmat terluka di tangan. (*PEH87*)

* Dewan Pimpinan Barisan Tani Indonesia (BTI) Daerah Aceh mengambil resolusi untuk memutuskan hubungan sementara dengan Pusat BTI di Jawa dan Komisariat BTI di Sumatra. Dengan ini segala tanggung jawab mengenai organisasi BTI di daerah ini dipikul sepenuhnya oleh BTI Daerah Aceh.

  Resolusi ini diambil dengan pertimbangan bahwa hubungan dengan Pusat BTI di Jawa dan dengan Komisariat BTI di Sumatra sangat sulit, dan bahwa BTI Daerah Aceh harus menyelaraskan kegiatannya dengan keadaan masyarakat setempat.

  Resolusi ditandatangani oleh Ketua Umum Tgk. Nja' Makam dan Panitera Umum T. M. Rasjad. (TS90)

1949 APRIL 28.

* Pertemuan tak resmi ketua delegasi Indonesia, Mr. Mohammad Rum, dengan ketua delegasi Belanda, Dr. J. H. van Roijen, menyusul pertemuan serupa antara Mohammad Hatta dengan Van Roijen disaksikan oleh anggota United Nations Commission for Indonesia (UNCI, Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia), Merle Cochran.

  Pertemuan ini kemudian disusul pertemuan tanggal 4–5 Mei 1949. (S6 67)

* Penyair Chairil Anwar meninggal di Rumah Sakit Pusat Jakarta dan dimakamkan di pemakaman Karet. Beritanya dimuat dalam surat kabar. (Sobron Aidit, *Kisah Serba-Serbi*, 1999; Sitor Situmorang, *Sitor Situmorang Seorang Sastrawan 45 Penyair Danau Toba*, h. 202)

* Komando Militer kota Kotaraja (sekarang Banda Aceh) mengingatkan kepada seluruh penduduk Kotaraja agar tetap waspada menghadapi segala kemungkinan serangan musuh.

  Diminta agar tempat-tempat perlindungan terhadap bahaya udara dijaga kebersihannya hingga dapat dipergunakan pada saat diperlukan. Selanjutnya diharapkan agar alat-alat dalam perlindungan selalu dalam keadaan siap dan terjaga kerapiannya. (TS90)

* Mulai hari ini sampai 30 April 949 Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Sumatra Utara mengadakan konferensi kilat dihadiri para utusan dari cabang-cabang seluruh Aceh. (TS90)

1949 April 29.

* Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX bertolak ke Bangka untuk membicarakan masalah pemulihan pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Presiden Sukarno. (*KU121; LUxx*)

* Sultan Hamid II mengajukan permintaan berhenti dari jabatan Ketua Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO). (*KU121*)

1949 April 30.

* Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa akan membicarakan usul untuk membentuk komisi khusus bagi permasalahan Indonesia. (*KU121*)

* Pertempuran di Pasar Nongko, Solo. Empat gerilyawan gugur: Gutomo, Slamet, Husni, dan Sujachman. (*PEH87*)

* Konferensi kilat GPII (Gerakan Pemuda Islam Indonesia) Sumatra Utara yang dibuka pada 28 April 1949 mengambil beberapa keputusan di bidang pertahanan, pendidikan, organisasi, dan peranan wanita. (TS90)

***

(Akhir April 1949)

MEI 1949

1949 MEI.

* Rapat antar komandan rayon gerilya Solo di Wonoido, Jenggrik. (*PEH87*)

* Belanda melakukan operasi pembersihan dan menangkapi penduduk yang dicurigai. Supat dan Sumardjo ditangkap dan disiksa. (*PEH87*)

* Pertempuran di Coyudan, Solo. Parmo gugur. (*PEH87*)

1949 Mei 1.

* Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) Jenderal Sudirman memberikan pernyataan kepada semua anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang isinya a.l. supaya jangan sekali-kali para komandan turut-turut memikirkan akan datangnya perundingan dengan Belanda, karena hal itu akan merugikan pertahanan dan perjuangan Indonesia.

  Oleh karena itu Persetujuan Rum-Roijen disambut oleh APRI dengan rasa curiga. (MA282; S6 69)

1949 MEI 2.

* Ketua delegasi Indonesia dalam perundingan dengan Belanda, Mr. Mohammad Rum, bertolak ke Bangka untuk berunding dengan para pemimpin Republik Indonesia (RI) mengenai prosedur perundingan selanjutnya dengan Belanda. (*KU121; LUxx*)

* Serangan Umum kedua dari gerilyawan Solo dilancarkan terhadap kota Solo. (*PEH18*)

1949 MEI 3.

* Pertemuan kedua antara Sultan Hamengkubuwono IX dengan ketua delegasi Belanda dalam perundingan dengan Republik Indonesia (RI), Dr. J. H. van Roijen, mengenai penyelenggaraan praktis pemulihan Pemerintah RI ke Yogyakarta. (*LUxx*)

1949 MEI 4.

* Mohammad Natsir meletakkan jabatan sebagai penasihat delegasi Republik Indonesia (RI) dalam perundingan dengan Belanda karena tidak setuju dengan kebijakan perundingan. Lagi pula ia diperlukan tenaganya untuk mengkonsolidasikan partainya. (*KU121; LUxx*)

* Pertemuan tak resmi kedua antara ketua delegasi RI, Mr. Mohammad Rum, dengan ketua delegasi Belanda, Dr. J. H. van Roijen, dihadiri oleh anggota United Nations Commission for Indonesia (UNCI, Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia) dari Amerika Serikat, Merle Cochran.

* Pertemuan tak resmi pertama terjadi pada 28 April 1949. (*KU121*; *LUxx*; *LU t.h.*; S6 67)

1949 Mei 5.

* Panglima Tentara dan Territorium Jawa, Kolonel A. H. Nasution, mengeluarkan pernyataan untuk mempertegas amanat Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) Jenderal Sudirman tanggal 1 Mei 1949 agar para komandan kesatuan tidak memikirkan masalah perundingan.

  Dinyatakan, bahwa perundingan itu hanya taktik perjuangan. Diingatkan

kepada semua komandan agar membedakan antara gencatan senjata untuk kepentingan politik dan untuk kepentingan militer. (S6 69)

* Perundingan tak resmi antara ketua delegasi Republik Indonesia (RI) dan ketua delegasi Belanda dengan dihadiri oleh anggota United Nations Commission for Indonesia (UNCI, Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia) dari Amerika Serikat (AS), Merle Cochran, sebagai kelanjutan perundingan tak resmi sehari sebelumnya, 4 Mei 1949. (S6 67)

1949 Mei 6.

* Delegasi Indonesia di bawah Moh. Rum dan delegasi Belanda di bawah J. H. van Roijen menyampaikan konsep kesepakatan mereka kepada pemerintah masing-masing.

  Konsep kesepakatan itu memuat:

  1. Pengembalian Ir. Sukarno beserta pengikutnya ke Yogyakarta dan pengosongan daerah Yogyakarta oleh pasukan-pasukan Belanda.
  2. Pengakuan Republik Indonesia sebagai suatu negara dalam lingkungan Republik Indonesia Serikat.
  3. Gencatan senjata setelah para pemimpin Republik kembali ke Yogyakarta.
  4. Akan diadakan Konferensi Meja Bundar, yang akan membahas pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. (SDA108)

1949 Mei 7.

* Di dalam pertemuan resmi dengan pihak Belanda dan UNCI menyusul pertemuan-pertemuan tak resmi sebelumnya, ketua delegasi Indonesia Mr. Mohammad Rum menyatakan bahwa ia diberi kuasa oleh Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta untuk memberikan jaminan mereka pribadi, bahwa sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB 28 Januari 1949 dan Pedoman Kanada, mereka pribadi memberikan jaminan untuk:

  1. mengeluarkan perintah kepada penganut-penganut Republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya,
  2. bekerja sama guna memulihkan dan mempertahankan ketertiban dan keamanan, dan

3. turut serta dalam KMB dengan maksud untuk mempercepat penyerahan tak bersyarat daripada kedaulatan yang sungguh-sungguh dan lengkap kepada Indonesia Serikat.

Sebagai imbalannya, pihak Belanda menyetujui:

1. Kembalinya Pemerintah Republik ke Yogyakarta, dan untuk itu dibentuknya panitia-bersama di bawah naungan UNCI dengan tugas mengadakan persiapan-persiapan pendahuluan dan memberi nasehat tentang tindakan-tindakan untuk penghentian perang gerilya dan mempertahankan ketertiban dan keamanan.
2. Bahwa Pemerintah Republik akan bebas dan dipermudah untuk menjalankan fungsi-fungsinya yang perlu di residensi Yogyakarta.
3. Bahwa Negeri Belanda akan menghentikan seketika semua operasi-operasi militer dan membebaskan semua tahanan politik yang ditahan sejak 17 Desember 1948.
4. Bahwa Negeri Belanda tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara atau daerah-daerah di dalam wilayah yang dikuasai Republik sebelum 19 Desember 1948 dan tidak akan memperluas negara-negara atau daerah-daerah yang akan merugikan wilayah Republik.
5. Bahwa Negeri Belanda mengakui kehidupan Republik sebagai suatu negara yang akan memunyai kedudukan di dalam Indonesia Serikat yang berhak memunyai sepertiga jumlah keanggotaan di dalam badan perwakilan federal.
6. Bahwa Negeri Belanda akan berusaha sekeras-kerasnya untuk mengadakan KMB segera sesudah Republik kembali di Yogyakarta dan KMB itu akan merundingkan tentang bagaimana caranya mempercepat "penyerahan tak bersyarat daripada kedaulatan yang sungguh dan lengkap" kepada Indonesia Serikat sesuai dengan azas-azas Renville.
7. Bahwa Negeri Belanda setuju pegawai-pegawai Republik sipil, polisi dll. yang bekerja di luar residensi Yogyakarta akan tetap meneruskan pekerjaan-pekerjaan mereka. (AT277-278)

* Jam 17.00: Rum-Roijen Statements (Persetujuan Rum-Roijen) tercapai dan ditandatangani di Hotel des Indes, Jakarta.

  Isi persetujuan ini adalah rumusan tentang gencatan senjata (penghentian perang gerilya) dan janji untuk mengikuti Konferensi Meja Bundar (KMB)

yang akan diadakan di Den Haag untuk merundingkan soal penyerahan kedaulatan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) yang merdeka dan berdaulat.

Tercapai juga persetujuan permulaan tentang pembebasan Sukarno-Hatta dan lain-lain, dan kembalinya Pemerintah Republik Indonesia (RI) ke Yogyakarta, yang berarti pulihnya Pemerintah RI.

Dalam pernyataannya, Rum menjanjikan bahwa "pengikut-pengikut bersenjata Republik" akan menghentikan kegiatan gerilya, Pemerintah Republik akan bekerja sama memulihkan keamanan dan ketertiban, serta akan mengambil bagian dalam KMB yang akan diadakan.

Dalam pernyataannya, Van Roijen a.l. menegaskan bahwa Pemerintah Belanda akan membebaskan para pemimpin Republik, mengembalikan Yogyakarta, dan tidak lagi akan membentuk negara-negara bagian.

Tidak seluruh isi persetujuan ini dapat diterima oleh Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) Jenderal Sudirman. Maka untuk menghilangkan kesan adanya perpecahan dalam pimpinan RI, Jenderal Sudirman yang waktu itu masih bergerilya harus didatangkan ke Yogyakarta.

Di pihak RI, kebijakan yang ditempuh bagi tercapainya persetujuan ini disebut "*Tracee Bangka*" yang digariskan oleh Presiden Sukarno.

Adapun jadwal realisasi persetujuan tersebut adalah sbb.:

1. Penarikan tentara Belanda dari daerah Yogyakarta pada 24 Juni 1949.
2. Pengembalian RI pada 1 Juli 1949.
3. KMB pada 1 Agustus 1949.
4. Penyerahan kedaulatan kepada RIS sebelum tahun 1950.

Selanjutnya negara-negara bagian di Indonesia yang tergabung dalam Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) mengeluarkan komunike berisi pernyataan setuju dengan hasil yang telah tercapai tersebut, dan berunding dengan pihak RI, hingga tersusun rancangan konstitusi untuk RIS.

Karena tak dapat menerima persetujuan itu, Letnan Jenderal S.H. Spoor sebagai Panglima Angkatan Perang Belanda di Indonesia mengajukan permintaan berhenti dari jabatannya. (ABA17; *AL92*; *KU121*; LM7,45,49; *LUxx*; *LU t.h.*; MA273; *PSPB2 27*; RM165; RKZ106; ST59,65; WG180,212; *Jaya Baya*, 24 Oktober 1993)

* Statemen Rum-Roijen ditandatangani, sebagai hasil perundingan Indonesia-Belanda yang masing-masing diwakili oleh Mr. Mohammad Rum, dan Dr. Van Roijen. (SSA18,42; “Lukisan Revolusi” dalam *FAK132*)

* Berdasar kepada putusan tanggal 23 Maret 1949, UNCI mengundang kedua pihak berunding di Jakarta, yang berhasil dengan Persetujuan Rum-Van Roijen pada tanggal 7 Mei 1949. (HKP283)

* Jaminan yang diberikan oleh Belanda dalam keterangan Van Roijen pada 7 Mei 1949, pada pasal 4, 5 dan 7:

  “Bahwa daerah Republik seluruhnya tidak diabaikan ternyata dari jaminan yang kita kehendaki dari pihak Belanda, supaya Belanda tidak akan mendirikan negara baru di atas daerah kita yang didudukinya dan tidak pula akan memperluas daerah negara yang sudah ada ke atas daerah kita yang didudukinya sementara. Pun kita minta dijamin, bahwa pegawai sipil Republik, polisinya dan pegawai lainnya yang masih terus bekerja pada tempat-tempat yang tak ada pegawai administrasi Belanda, akan tetap dalam jabatan mereka. Hal ini adalah pengakuan daripada keadaan yang sebenarnya bahwa tentara Belanda hanya menduduki beberapa pusat dan tidak menduduki seluruh daerah di mana ada pemusatan tentara atau pasukannya. Daerah itu tetap daerah Republik.” (HKP384-285)

1949 MEI 8.

* Wakil Tinggi Kerajaan Belanda di Indonesia, Dr. L. J. M. Beel, menjadi orang pertama yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan Persetujuan Rum-Roijen. Sejalan dengan sikapnya itu, ia mengundurkan diri dari jabatannya. (HA174; *KU121*; *LU t.h.*)

* Untuk keperluan perjuangan, Pemerintah Provinsi Sumatra Utara di Banda Aceh mengeluarkan uang kertas Uripsu (Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatra Utara).

* Menurut Gubernur Sumatra Utara, kurs uang kertas Uripsu ini dapat dipertahankan, walau pemerintah telah mencetak uang ini dalam jumlah besar. Dalam tujuh hari dari tanggal 2 sampai 8 Mei 1949 telah dicetak senilai Rp156.750.000,00. (TS98)

1949 MEI 9.

* Jawatan Penerangan Sumatra Utara di Kotaraja (sekarang Banda Aceh) mulai menerbitkan majalah bulanan *Tjahaja* berisi penerangan dan penjelasan mengenai keadaan tanah air. Selain itu disajikan artikel mengenai soal-soal politik, sosial, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Memuat juga undang-undang dan peraturan pemerintah, ruang agama, sejarah, dan hiburan. (TS98)

1949 MEI 10.

* Mayor Harjono dari Staf Angkatan Perang Bagian Penerangan di Jawa mengirim radiogram kepada *RRI* Kotaraja (sekarang Banda Aceh) via Sumatra Selatan. Isi radiogram:

  "Permintaan agar *RRI* Kotaraja menyampaikan kepada PDRI dan Perwakilan Indonesia di New Delhi perihal tindakan militer Belanda yang menutup Kantor Palang Merah Indonesia di Yogyakarta, juga permintaan agar berita ini disampaikan kepada Intercross."

  Hari ini juga *RRI* Kotaraja menyiarkan radiogram tersebut. (TS99-100)

1949 MEI 11.

* Empat pesawat Belanda jenis Mustang menggempur Kotaraja (sekarang Banda Aceh) dengan bom, granat, dan senapan mesin. Sasaran utamanya adalah bangunan strategis dalam kota, kubu pertahanan di sepanjang pantai, pemusatan meriam penangkis serangan udara di perbukitan sekitar Lhoknga, dan tangsi militer.

  Stasiun kereta api dan Kantor Jawatan Penerangan Aceh tidak luput dari serangan yang berlangsung hampir satu jam tersebut. (TS100)

1949 MEI 13.

* Mr. J. H. van Maarseveen menyatakan di depan *Tweede Kamar* (Majelis Rendah), bahwa Belanda terpaksa menerima persetujuan dengan Republik Indonesia karena desakan dunia internasional. (*KU121*)

1949 MEI 14.

* Kubu pertahanan di Ladong antara Kotaraja (sekarang Banda Aceh) dan Krueng Raya di Aceh Besar mendapat gempuran dari korvet musuh yang berlabuh tak jauh dari pantai.

Pasukan penjaga pantai membalas gempuran tersebut dengan meriam 13 PR dari perbukitan di sekitar Ladong. Duel senjata itu berlangsung sekitar satu jam. (TS100)

1949 MEI (PERTENGAHAN).

* Suharto menyatakan dalam bukunya *Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya*:

  "Saya menyamar masuk kota menemui Sri Sultan itu pada pertengahan bulan Mei, bertolak dari Bibis, jadi sesudah serangan umum 1 Maret 1949." (SP66)

1949 MEI 16.

* Pers Belanda meramalkan bahwa dengan pengunduran diri tentara Belanda dari Yogyakarta akan terjadi kekacauan dan pembunuhan. (*LUxx*)

* Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) mengambil keputusan membentuk Komisariat PDRI untuk Jawa sbb.:

  1. Menteri Kehakiman: Mr. Susanto Tirtoprodjo;
  2. Menteri Persediaan Makanan Rakyat: J. Kasimo;
  3. Menteri Agama: KH Masjkur;
  4. Menteri Urusan Dalam Negeri: R. P. Suroso.

  Keputusan ini berlaku sampai tanggal 4 Agustus 1949. (*KU121*)

* PDRI mengeluarakan Keputusan No. 21-Pem-PDRI yang isinya:

  Pasal 1

  Dalam daerah-daerah militer istimewa segala kekuasaan sipil dan militer dilakukan oleh Gubernur Militer.

  Pasal 2

  Gubernur Militer mempunyai tugas kewajiban:

  menjalankan pemerintahan sipil menurut Peraturan-peraturan Negara dan instruksi-instruksi dari Pemerintah Pusat dan bertanggung jawab dalam hal ini kepada Pemerintah Pusat, dan mengadakan tindakan-tindak-an yang mengenai lapangan militer yang dianggapnya perlu dan mem-

perhatikan pertimbangan Komandan Sub Territorial yang bersangkutan dan pada umumnya atas pimpinan dan petunjuk Panglima Tentara Territorial Sumatra dan dalam hal ini bertanggung jawab kepada Panglima Tentara Territorial Sumatra.

Pasal 3

Pemerintah sipil dalam Keresidenan-keresidenan dijalankan oleh Dewan Pertahanan Daerah atas nama dan bertanggung jawab kepada Gubernur Militer yang bersangkutan.

Urusan militer di Keresidenan-keresidenan dijalankan oleh Komandan Sub Territorial atas nama dan bertanggung jawab kepada Gubernur Militer yang bersangkutan.

Pasal 4

Dewan Pertahanan Daerah dalam daerahnya berhak atas nama Gubernur Militer yang bersangkutan mengambil tindakan-tindakan dan mengadakan peraturan-peraturan yang tidak berlawanan dengan peraturan-peraturan yang berlaku atau yang akan dikeluarkan oleh badan-badan pemerintahan yang lebih tinggi.

Pasal 5

Sekalian peraturan-peraturan Gubernur Militer selama ini terus berlaku sampai diadakan perobahan-perobahan atau peraturan-peraturan baru

Pasal 6

Ketetapan Pemerintah Darurat Republik Indonesia tanggal 7 Januari 1949 bahagian ke IV sub 1 dan 2 dicabut kembali. (TS102-104)

* *RRI* Kotaraja (sekarang Banda Aceh) menyiarkan radiogram PDRI No. 453/pol/pdri yang isinya membantah siaran radio Belanda dan beberapa radio luar negeri yang seolah-olah menyatakan persetujuan Ketua Delegasi RI, Mr. Rum atas statemen Rum-Roijen.

Dikatakan bahwa PDRI sampai sekarang belum menyatakan pendirian terhadap statemen tersebut, dan sedang menunggu penjelasan lengkap dari Presiden dan Wakil Presiden untuk menentukan pendiriannya.

Bantahan itu ditandatangani oleh Ketua PDRI Sjafruddin Prawiranegara. (TS101)

* Kepala Staf Umum Angkatan Udara Republik Indonesia di Kotaraja Opsir Udara I Sujoso Karsono membuka kesempatan bagi para pemuda umur 19 sampai 25 tahun berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat, untuk dididik dalam dinas Jawatan *Meteo*, Teknik Penerbangan, Pertahanan Lapangan Udara dan Administrasi. (TS101)

* Komunike United Nations Commission for Indonesia (UNCI, Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia) menyatakan bahwa perundingan tentang pemulihan Pemerintah Republik ke Yogyakarta sudah mendapat banyak kemajuan. (*LUxx*)

* A. H. J. Lovink akan menggantikan Dr. L. J. M. Beel sebagai Wakil Tinggi Kerajaan Belanda di Indonesia. (*KU121*)

1949 MEI 17.

* Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) menetapkan Keputusan No. 22-Pem-PDRI yang isinya:

  Pasal I

  Dengan berlakunya pemusatan kekuasaan sipil dan militer kepada Gubernur Militer di daerah-daerah militer istimewa, jabatan Gubernur-gubernur Provinsi di Sumatra buat sementara waktu dihapuskan.

  Pasal II

  Pengawasan-pengawasan atas daerah-daerah otonomi seperti termaksud dalam Peraturan Pemerintah tahun 1948 No. 22 dilakukan oleh Komisaris Pemerintah.

  Pasal III

  Tugas Komisaris Pemerintah ditetapkan sebagai berikut:

  1. Mengawasi dan memberi tuntunan agar supaya alat-alat pemerintahan, militer maupun sipil, menjalankan kewajibannya menurut peraturan-peraturan Negara, instruksi-instruksi dari Pemerintah Pusat.
  2. Memajukan usul-usul kepada Pemerintah Pusat dan anjuran-anjuran kepada Gubernur Militer yang dapat memperkokohkan peraturan dan pemerintahan dalam segala lapangan.

3. Dalam urusan-urusan yang masuk kekuasaan Pemerintah Pusat, maka Komisaris Pemerintah berhak dalam keadaan yang mendesak mengambil keputusan, menunggu pengesahan dari Pemerintah Darurat Republik Indonesia.
4. Dengan tidak mengurangi hak Gubernur Militer untuk langsung berhubungan dengan Pemerintah Darurat Republik Indonesia maka untuk memudahkan pekerjaan sehari-hari Gubernur Militer berhubungan dengan Komisaris Pemerintah.
5. Komisaris Pemerintah mengunjungi daerah-daerahnya paling sedikit satu kali dalam enam bulan.

Pasal IV

Menetapkan daerah-daerah di Sumatra yang berada di bawah pengawasan Komisaris Pemerintah sebagai berikut:

1. Daerah Sumatra Utara yang meliputi Keresidenan Aceh, Tapanuli dan Sumatra Timur.
2. Daerah Sumatra Tengah yang meliputi Keresidenan Sumatra Barat, Riau dan Jambi.
3. Daerah Sumatra Selatan yang meliputi Keresidenan Palembang, Bengkulu, Lampung dan Bangka Biliton.

Pasal V

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan. Diumumkan oleh Sekretaris PDRI R. Marjono Danubroto pada tanggal 18 Mei 1949. (TS104-105)

* Dengan keputusan No. 23/Pem/PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia menetapkan Mr. S. M. Amin, Gubernur Sumatra Utara, sebagai Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatra Utara, sedangkan kekuasaan sipil dan militer dipusatkan pada Gubernur Militer.

Untuk Aceh dan Sumatra Timur yang meliputi Kabupaten Langkat dan Tanah Karo, kekuasan sipil dan militer dikendalikan oleh Gubernur Militer Tgk. M. Daud Beureueh.

Di tiap keresidenan, pemerintahan sipil dijalankan atas nama dan bertanggungjawab kepada Gubernur Militer, oleh Dewan Pertahanan Daerah, yang kedudukannya setaraf dengan Residen di masa lalu.

Dewan Pertahanan Daerah berhak di daerahnya, atas nama Gubernur Militer, mengambil tindakan dan mengadakan peraturan yang tidak berlawanan dengan peraturan yang berlaku atau yang dikeluarkan oleh instansi yang lebih tinggi. Kepala Daerah (Bupati, Wedana dll.) berdiri *hierarchie* di bawah DPD, serupa perhubungan mereka dengan Residen di masa lalu.

Pemerintahan sipil di daerah yang di masa lalu merupakan Keresidenan Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, dijalankan atas nama dan bertanggungjawab pada Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, oleh Dewan Pertahanan Daerah Aceh, dibantu oleh Kepala Daerah (Bupati, Wedana dll.) terhitung mulai 14 Juni 1949.

DPD Aceh berkedudukan di Kotaraja (sekarang Banda Aceh) dan terdiri (menurut Ketetapan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatra Utara, tertanggal 13 Juni 1949, No. 3/KPPSU/P) dari Residen T. M. Dausjah sebagai ketua, dan anggota-anggota Badan Eksekutif DPSU M. Nur Ibrahimy, M. Yunan Nst., Jahja Siregar dan Amelz. DPD Aceh menjalankan pemerintahan sipil di bawah pengawasan Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, yang dalam hal ini bertanggungjawab kepada Pemerintah Pusat.

Dengan berlakunya pemusatan kekuasaan sipil dan militer pada Gubernur Militer di daerah-daerah militer istimewa, maka dihapuskan jabatan Gubernur/Kepala Provinsi, dan diadakan jabatan Komisaris Pemerintah Pusat, yang daerah komisariatnya masing-masing serupa dengan daerah jabatan Gubernur yang digantikannya. (TS105-106)

1949 MEI 19.

* Pemerintah Belanda meluluskan permohonan berhenti Wakil Tinggi Kerajaan Belanda di Indonesia, Dr. L. J. M. Beel, yang tidak dapat menyetujui Persetujuan Rum-Roijen.

* Sebagai gantinya diangkat A. H. J. Lovink, pegawai tinggi Kementerian Luar Negeri Belanda urusan Asia. (*LUxx*)

1949 MEI 20.

* Dua puluh orang Minahasa membentuk Komite Ketatanegaraan Minahasa dengan maksud membentuk Daerah Minahasa sebagai negara bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS). (*KU121*)

* Jam 18.00: Gerilya Solo melakukan serangan serentak ke Solo untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional, dengan sasaran: tangsi/asrama dan pos Belanda, dan studio RVD (Regeerings Voorlichtingen Dienst). Serangan juga dimaksudkan untuk anjangsana. (*PEH87*)

* Hari Kebangkitan Nasional ke-41 diperingati di Kotaraja (sekarang Banda Aceh), dihadiri oleh tokoh-tokoh terkemuka sipil dan militer, pemimpin masyarakat dan para undangan, a.l. Gubernur Sumatra Utara Mr. S. M. Amin dan Gubernur Militer Tgk. Muhd. Daud Beureueh.

  Dalam kesempatan itu Kepala Jawatan Penerangan Sumatra Utara Osman Raliby menguraikan sejarah kebangkitan nasional sejak Budi Utomo hingga dewasa ini.

  Anggota Badan Eksekutif Dewan Perwakilan Sumatra Utara M. Yunan Nasution, Gubernur Sumatra Utara, dan Gubernur Militer, dalam sambutannya masing-masing menganjurkan supaya kita selalu bersatu padu dalam melanjutkan perjuangan yang telah dirintis oleh tokoh-tokoh pejuang di masa lampau. (TS114)

1949 Mei 21.

* Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Koordinator Keamanan mengeluarkan pengumuman yang isinya memberikan jaminan keamanan dan ketertiban kepada penduduk daerah Yogyakarta sesudah tentara Belanda ditarik kembali dari Yogyakarta. (*KU122*)

* Misi Republik Indonesia (RI) berkunjung ke Manila untuk membicarakan pinjaman Pemerintah Filipina kepada Pemerintah RI sebesar 2 juta pesos. (*AL78*)

* Tentara Belanda melakukan penangkapan, penembakan atas rumah penduduk di Kampung Kestalan, dan pembunuhan di Kepunton. Hari-hari berikutnya mereka menangkap beberapa orang penduduk, a.l. Darmosugondo, dan dua anggota Tentara Pelajar (TP), Jacob Mardjadi dan Mudhakir. (*PEH87-88*)

* Belanda meningkatkan perang urat syaraf dengan menyebarkan berita bohong lewat kaki tangannya, a.l. bahwa Panglima Besar Jenderal Sudirman telah tertangkap. Sementara itu jam malam dimajukan, mulai jam 17.00. (*PEH88*)

1949 MEI 24.

* Gubernur Sumatra Utara menetapkan Peraturan Sementara tentang tambahan (*opcenten*) untuk kas Provinsi Sumatra Utara atas tarif bea meterai tempel.

* Untuk tiap surat yang digunakan untuk sesuatu perbuatan seperti dimaksud dalam Aturan Bea Meterai 1921 yang sudah diubah dan ditambah, terkecuali yang tersebut dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Gubernur Sumatra Utara tanggal 1 Februari 1949 No. 1-GSO-Oe-49 tentang Bea Meterai Dagang, ditambah tarifnya dan *opcenten* untuk Kas Provinsi Sumatra Utara sebanyak 10 kali bea yang semula harus dibayar.

  Ketetapan ini mulai berlaku tanggal 1 Juni 1949. (TS115)

1949 MEI 25.

* Panglima Angkatan Perang Belanda di Indonesia, Letnan Jenderal S. H. Spoor, mendadak meninggal dunia. S.H Spoor adalah pelaksana dua agresi militer Belanda di Indonesia. Banyak yang mempertanyakan penyebab kematiannya yang sesungguhnya. Atas permintaan pribadi, ia dikebumikan di pemakaman militer Menteng Pulo, Jakarta, di antara anak buahnya.Untuk sementara ia digantikan oleh Jenderal Mayor Buurman van Vreeden. (HA179; *KU122*; *LUxx*; *LU t.h.*)

1949 MEI 26.

* Enam pesawat pemburu musuh menyerang Kutacane selama dua jam terus-menerus dengan sasaran Bukit Tusam, Lawe Sigalagala, Lawe Deski, dan dua tempat lain. Di Lawe Deski dijatuhkan 26 bom, 25 di antaranya meledak.

  Korban yang jatuh 30 orang, di antaranya 12 orang tewas. Sementara itu lebih 50 rumah hancur, dan banyak ternak menjadi korban. (TS115)

1949 MEI 27.

* Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Menteri Negara Republik Indonesia (RI) merangkap Koordinator Keamanan Dalam Negeri mengeluarkan pengumuman sbb.:

  "Sesudah tentara Belanda mengundurkan diri, setiap orang, juga mereka yang telah bekerja pada Pemerintah Federal Sementara, dengan tidak

membeda-bedakan bangsa atau agama dijamin keamanan diri dan keselamatan badan serta bendanya.” (*LUxx*)

1949 Mei 27.

* Di Lhokseumawe dibentuk cabang Panitia Penyokong Yogya atas usaha cabang Gasida (Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh) di kota itu. (TS115)

1949 Mei 28.

* Jam 12.30: Serombongan militer Belanda mendatangi Sultan Hamengkubuwono IX di Gedung Kepatihan Yogyakarta yang waktu itu dipakai sebagai Kantor Persiapan Pemulihan Pemerintah Pusat Republik Indonesia secara tiba-tiba dan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  Banyak pegawai Republik ditangkap, dan dokumen disita. (*LUxx*)

* Konferensi PNI Daerah Aceh dan Langkat ke-3 di Takengon mengambil keputusan:
  1. Dewan Pimpinan PNI Daerah Aceh di Kotaraja (sekarang Banda Aceh) dan Sub Komisariat PNI Andalas Utara di Langsa dibubarkan. Apa yang dinamakan Instruktur untuk PNI yang berkedudukan di Langsa dipandang tidak ada.
  2. Dibentuk Sub Komisariat PNI Sumatra Utara berkedudukan di Kotaraja, dengan Ketua Umum R. Supeno dan Ketua I A. Mu’thi. (TS116)

* Mulai hari ini sampai 30 Mei 1949 berlangsung Muktamar Sumatra kedua di Medan. Seperti yang pertama, muktamar kedua ini pun tidak dihadiri oleh wakil Daerah Aceh. (TS116)

* Kota Meulaboh diserang angkatan laut musuh dengan tembakan meriam. Korban manusia tidak ada, hanya beberapa bangunan rusak. (TS118)

1949 Mei 29.

* Di Kotaraja (sekarang Banda Aceh) berlangsung Konferensi Kilat Daerah Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) Daerah Aceh untuk mempertanggungjawabkan keputusan Majelis Pimpinan Pesindo Daerah Aceh beserta semua unit bawahannya yang telah melepaskan diri dari Pesindo Pusat.

Ketua Umum Pesindo Aceh, A. Hasjmy, menjelaskan bahwa:

"Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) kita tafsirkan sebagai suatu gerakan pemuda yang bercita-cita untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur, yang sifatnya bercorak dan berwarna Indonesia, dan corak dan warna mana bersinar-sinar cahaya Ketuhanan Yang Maha Esa (Agama) yang menjadi salah satu dasar negara kita.

Bila dipahami dengan seksama jelaslah, bahwa Pesindo dalam pandangan kita adalah suatu gambaran masyarakat yang adil dan makmur, menurut warna dan bentuk Indonesia sendiri, kita ciptakan dengan otak dan pertimbangan kita sendiri, menurut ukuran dan iklim Timur, bukan mengekor kepada Karl Marx, Engels, Lenin dan sebagainya.

Di sinilah letaknya perbedaan pandangan antara kita dengan mereka yang memandang bahwa Pesindo itu adalah suatu gambaran masyarakat yang tersusun menurut ajaran Karl Marx, Engels, Lenin dan sebagainya." (TS120)

1949 MEI 30.

* Kapal musuh melakukan serangan dari laut terhadap Susoh di Aceh Selatan. Serangan dibalas dengan tembakan meriam pantai, hingga kapal terpaksa mengundurkan diri ke tengah laut. (TS120)

* Wakil Tinggi Kerajaan Belanda di Indonesia, A. H. J. Lovink, berangkat dari Negeri Belanda ke Indonesia. (*LUxx*)

1949 MEI 31.

* All India Radio menyiarkan dari New Delhi bahwa Drs. Mohammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia, diduga akan berangkat ke Kotaraja (sekarang Banda Aceh), ibu kota Keresidenan Aceh dan Sumatra Utara, tanggal 4 bulan depan.

  Sementara itu Balai Penerangan Republik Indonesia di New Delhi menyatakan bahwa Wakil Presiden akan ditemani oleh beberapa pemimpin RI. Rombongan akan datang dengan pesawat Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa. (TS122)

* Gubernur Sumatra Utara mengeluarkan Surat Ketetapan No. 405/R.I. tanggal 31 Mei 1949 tentang pembentukan Badan Pengawas Ekonomi

tingkat Provinsi, diketuai oleh Tgk. M. Mur el Ibrahimy, dengan anggota: M. Hanafiah, Osmansjah, M. Thajeb, R. Hadri, M. Adam, P. J. Puspo-sudjipto, M. Insja, A. Hasjmy, Kolonel Subijakto, Mayor Nja' Neh, dan T. R. Adijan.

Badan ini bertugas mengawasi pelaksanaan berbagai program ekonomi serta memberikan pertimbangan dan usul kepada Gubernur dan Badan Eksekutif Dewan Perwakilan Rakyat Sumatra Utara mengenai usaha-usaha perbaikan ekonomi. (TS121)

* Konferensi Kilat Pesindo Daerah Aceh di Kotaraja yang dimulai tanggal 29 Mei 1949 diakhiri hari ini dengan hasil-hasil penting berupa perubahan-perubahan besar mengenai organisasi Pesindo Daerah Aceh. (TS120)

Dengan suara bulat peserta sidang menyetujui beleid Pimpinan Pesindo Daerah Aceh berkenaan dengan pemutusan hubungan dengan Pesindo Pusat yang melibatkan diri dalam Pemberontakan PKI Muso, dengan Pesindo Komisariat Besar Sumatra Sarwono dkk., dan dengan Komisariat Pesindo Sumatra Utara.

Peserta sidang pun tidak menyetujui royemen Sarwono dkk. terhadap A. Hasjmy dan Tuanku Hasjim, masing-masing sebagai Pemimpin Umum dan Sekretaris Umum Pesindo Daerah Aceh.

Juru bicara Kepenataan Penerangan Dewan Pimpinan Darurat Pesindo Sumatra Utara mengumumkan, bahwa Konferensi Kilat Pesindo Daerah Aceh telah mengambil keputusan a.l.:

1. Menyetujui dan mensahkan *beleid* (kebijakan) Pimpinan Majelis Pesindo Daerah Aceh terhadap Peristiwa Madiun, Dewan Pusat Pesindo di Solo yang tersangkut peristiwa Madiun, Komisariat Dewan Pusat di Sumatra dan terhadap apa yang dinamakan Komisariat Daerah Besar Pesindo Sumatra Utara yang dipimpin oleh sdr. Ishak Djanggawirana.
2. Membubarkan Pimpinan Pesindo Daerah Aceh, dan membentuk Dewan Pimpinan Darurat Pesindo Sumatra Utara, yang batas daerahnya hanya meliputi lingkungan bekas daerah Majelis Pesindo Aceh setelah Konferensi Pesindo Ke-IV di Langsa. Pembentukan ini berlaku sementara menunggu pembentukan Dewan Pimpinan Pesindo Sumatra Utara, yang meliputi seluruh daerah Sumatra Utara dalam satu konferensi yang dihadiri semua wakil-wakil yang bersangkutan.

3. Menunjuk bekas-bekas anggota Pimpinan Pesindo Daerah Aceh untuk menjadi anggota-anggota Dewan Pimpinan Darurat Pesindo Sumatra Utara.
4. Menghapuskan WMD-WMD Pesindo di Kewedanaan dan membentuk Dewan Pimpinan Pesindo Kabupaten. (TS121)

***

(Akhir Mei 1949)

JUNI 1949

1949 JUNI 1.

* Pertempuran di Grogol, Solo. Suwardi gugur. (*PEH88*)

* Sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 5-GSO, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Sumatra Utara di Jalan Nasional, Kotaraja (sekarang Banda Aceh) berlangsung sidang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar.

  Hadir dalam sidang itu a.l. Gubernur Mr. S. M. Amin, para anggota Badan Eksekutif DPRSU, Residen Tuanku Mahmud, Residen T. T. Mohammad Daudsjah.

  Lebih dahulu Gubernur menjelaskan tentang hak dan kewajiban seorang warga negara dari suatu negara demokrasi, kedudukan DPR dan para anggotanya, pandangan mengenai pergolakan politik di daerah, penjelasan tentang Peraturan Gubernur No. 5-GSO yang lahir sebagai akibat keputusan-keputusan sidang pleno DPRSU di Tapaktuan dan usaha-usaha Badan Eksekutif DPRSU dalam menyusun beberapa peraturan mengenai hak dan tugas kewajiban masing-masing kabupaten otonom.

  Kemudian Gubernur melantik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Besar yang terdiri atas 12 orang. Para anggota mengucapkan sumpah,

disusul dengan pidato sambutan oleh anggota Ali Hasjmy yang berisi janji akan menunaikan kewajiban dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya dipilih empat orang anggota Badan Eksekutif. (TS124)

1949 JUNI 2.

* Wakil Tinggi Kerajaan Belanda di Indonesia, A. M. J. Lovink, tiba di Jakarta, menggantikan Dr. L. J. M. Beel yang meletakkan jabatannya pada 19 Mei 1949 karena tidak setuju dengan Statemen Rum-Roijen. (*KU122; LUxx*)

* Radio Singapura memberitakan bahwa Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta dan Dr. Sukiman serta beberapa pemimpin Republik Indonesia lainnya akan bertolak menuju Kotaraja (sekarang Banda Aceh) dari Bangka hari Sabtu, 4 Juni mendatang dengan pesawat UNCI (United Nations Commission for Indonesia).

  Maksud kunjungan Wakil Presiden dan rombongan adalah untuk bertukar pikiran dengan Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) Mr. Sjafruddin Prawiranegara, sesuai dengan permintaan yang disampaikan kepada Mr. Mohammad Rum beberapa hari yang lalu. Menurut rencana, Wakil Presiden dan rombongan akan tinggal tiga hari lamanya di Kotaraja.

  Menurut Radio Singapura, dari Kotaraja dikabarkan bahwa lapangan terbang sudah disiapkan untuk pendaratan pesawat yang akan dinaiki oleh Wakil Presiden dan rombongan.

  Sementara itu dari Bukittinggi dikabarkan bahwa pertemuan dengan Mr. Sjafruddin Prawiranegara akan diadakan hari Sabtu, 4 Juni. Dalam kesempatan itu Wakil Presiden akan berusaha agar Ketua PDRI menerima baik persetujuan yang baru-baru ini dicapai antara Belanda dan Republik Indonesia, yang isinya adalah pengembalian Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta dan penyelenggaraan Konferensi Meja Bundar. (TS124-126)

1949 JUNI 3.

* Dalam wawancara dengan wartawan AP (*Associated Press*) Sutan Sjahrir menyatakan bahwa:

  "...pemimpin-pemimpin RI di Bangka mengikuti politik dualisme. Sebab Pemerintah Darurat dimaksudkan untuk memimpin perjuangan terus dan

tidak untuk berkompromi dengan Belanda. Tetapi pernyataan-pernyataan Rum-Van Roijen adalah kompromi. Pemerintah Darurat tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Sekarang kita akan pergi ke Konperensi Meja Bundar di Den Haag dan semuanya masih tetap kabur sebagai semula... Pemimpin-pemimpin Republik di Bangka terlalu memperhatikan soal berdirinya kembali pemerintah di Yogya." (AT279)

1949 JUNI 4.

* Ketua Pusat Persatuan Sastrawan Indonesia Daerah Aceh T. A. Talsya meletakkan jabatan karena kesibukannya selaku perwira staf pada Sub Penerangan TNI Divisi X Komando Sumatra.

  Bersama Abdullah Arif, Talsya, dengan pangkat Letnan I TNI Divisi X Komando Sumatra, ditugaskan menangani pemancar Radio Rimba Raya yang diselenggarakan oleh Sub Penerangan TNI Divisi Komando Sumatra.

  Sejalan dengan itu dipilih pengurus baru Persatuan Sastrawan Indonesia Daerah Aceh dengan Ketua An. Mahmud dan Sekretaris Angkasah. Di dalam pengurus baru dibentuk Badan Pekerja yang dirangkap oleh Ketua, dengan Wakil Ketua Syurca. (TS126)

* Sub Komisariat PNI Sumatra Utara mengeluarkan Pengumuman No. 1/ SK/II-49 yang ditandatangani oleh Ketua I Abdul Mu'thi, berisi keputusan Konferensi PNI Daerah Aceh dan Kabupaten Langkat yang berlangsung antara 24-28 Mei 1949. Isi Pengumuman:

  1. PNI menolak Persetujuan Rum-Van Roijen. Jika perundingan akan dilangsungkan juga, maka tuntutan PDRI tanggal 27 Maret 1949 dan yang diulang pada tanggal 14 Mei 1949, haruslah dijadikan tuntutan minimum dengan syarat adanya jaminan tegas bahwa Belanda tidak mensabotir perjanjian lagi sebagaimana telah diperbuatnya dengan Linggajati dan Renville.
  2. PNI anti imperialis kapitalis dan fascisme.
  3. PNI tetap berdiri di belakang Pemerintah Darurat Republik Indonesia selama PDRI tetap memperjuangkan kemerdekaan 100% untuk seluruh Kepulauan Indonesia secara repolusioner menuju kesatuan Negara Republik Indonesia.

4. PNI tidak menyetujui setiap perundingan bagaimanapun sifatnya, sebelum terjamin kemerdekaan politik, ekonomi dan sosial 100%.
5. PNI mengunjukkan dengan nyata-nyata bahwa pahamnya bukan paham nasionalisme yang sempit, tetapi nyata anti imperialis, kapitalis dan fascisme dari luar dan dari dalam Negara dan membasmi borjuis nasional.
6. PNI menolak segala macam usaha untuk mengalihkan repolusi nasional ke jurusan lain dan mengambil jalan kebijaksanaan guna mengatasi kesulitan-kesulitan sosial.
7. PNI bersedia, baik sebagai pelopor maupun sebagai pengikut dalam tiap-tiap usaha untuk memelihara dan memperkokoh persatuan rakyat dan meligatkan perjuangan rakyat (Nasional).
8. Konferensi membentuk sebuah badan Pimpinan yang akan memegang Pimpinan Partai di seluruh Daerah Aceh dan Langkat, dengan nama Sub Komisariat PNI Sumatra Utara, berkedudukan di ibukota Provinsi Sumatra Utara.
9. Mulai saat terbentuknya badan ini, maka badan Pimpinan yang bernama Dewan Daerah dan Sub Komisariat Andalas Utara dihapuskan. (TS128)

1949 JUNI 5.

* Sejak pagi rakyat berduyun-duyun menuju lapangan terbang Blang Bintang untuk menyambut kedatangan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan rombongan yang bermaksud melakukan kontak dan berunding dengan Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).

  Rombongan pengiring adalah: Mr. Ali Sastroamidjojo, Menteri Pengajaran dan Wakil Ketua Delegasi Republik Indonesia, Dr. Sukiman Wirjosandjojo, Menteri Dalam Negeri, Mr. Nazir St. Pamontjak, Mohammad Natsir, Menteri Penerangan, Dr. Halim, Anggota Badan Pekerja KNIP, Zainal Baharuddin, Anggota Badan Pekerja KNIP dari Aceh, Mr. A. G. Pringgodigdo, Sekretaris Negara, Suryadarma, Komodor Udara, A. R. Baswedan dari Kementerian Penerangan, dan Lukman Hakim dari Kementerian Penerangan.

  Wakil Presiden dan rombongan bermaksud juga membujuk para pemimpin rakyat Aceh untuk mau menerima penyelesaian dengan Belanda lewat

KMB (Konferensi Meja Bundar), karena Pemerintah Pusat merasa bahwa selama ini banyak resolusi dari Aceh kepada PDRI dan Pemerintah Pusat yang isinya menolak perundingan dengan Belanda, kalau bukan atas dasar pengakuan kemerdekaan 100%. (AT280-281; *KU122*; *LUxx*; TS130,133)

* Rancangan acara kunjungan Wakil Presiden dan rombongan di Kotaraja (sekarang Banda Aceh) adalah sbb.:

- Tanggal 6 Juni (Senin): Pawai.
- Tanggal 6 Juni (Senin) jam 11.30-12.30 WS: Pertemuan dengan Gubernur Sumatra Utara, Badan Eksekutif Dewan Perwakilan Sumatra Utara, para Residen, Bupati, Kepala Jawatan, dan Wedana di tempat penginapan Tamu Agung.
- Tanggal 7 Juni (Selasa) jam 09.00: Keliling kota, termasuk Uleelheue.
- Tanggal 7/8 Juni (Selasa malam Rabu) jam 20.30: Rapat umum di Taman Sari.
- Tanggal 8 Juni (Rabu) jam 09.00: Pertemuan dengan para Pemimpin Partai, termasuk wanita, GPTP, Wakil Golongan India dll.
- Tanggal 8 Juni (Rabu) jam 16.00: Kunjungan ke Lhoknga. (TS133)

* Wakil Presiden Mohammad Hatta beserta pengiring mendarat dengan pesawat Dakota Komisi PBB untuk Indonesia di lapangan terbang Blang Bintang, Kotaraja (sekarang Banda Aceh), disambut oleh Gubernur Sumatra Utara Mr. S. M. Amin, Gubernur Militer Tgk. Muhd. Daud Beureueh, Residen Tuanku Mahmud selaku Ketua Panitia Penyambutan, para pejabat sipil dan militer, pemimpin perjuangan, pemuka masyarakat, cerdik pandai, dan lebih dari 10.000 penduduk.

Sepanjang jalan yang dilalui dari Blang Bintang ke Kotaraja lewat Peukan Seuneulop, Montasiek, Sibre, Lam Baro, dan Lueng Bata, Wakil Presiden dan rombongan dielu-elukan dan disambut dengan pekik "Merdeka".

Di kediaman Wakil Presiden di Meuligoe Keresidenan Aceh, rombongan disambut oleh Residen Aceh T. T. Mohammad Daudsjah, para Kepala Jawatan, alim ulama, wakil-wakil golongan dan perkumpulan, juga oleh rakyat. (TS130-132)

* Di hadapan puluhan ribu rakyat yang menyambutnya di pekarangan Meuligoe Keresidenan Aceh, Wakil Presiden Mohammad Hatta mengucapkan pidato, yang a.l. berbunyi sbb.:

  "Sungguh saya merasa gembira hari ini sampai di Banda Aceh. Sudah tiga kali saya merancang perjalanan kemari. Yang pertama gagal, yang kedua gagal, yang ketiga ini diperkenankan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan saya sampai di tengah-tengah saudara-saudara.

  Seperti saudara ketahui, Belanda mencoba mengasingkan kami dari rakyat dan kami ditempatkan di tengah-tengah gunung, di atas satu gunung di Bangka, terpisah daripada saudara-saudara, daripada rakyat. Tetapi maksud Belanda ini pun gagal. Maksud Belanda memisahkan kami daripada rakyat, tetapi Belanda menempatkan kami di tengah-tengah rakyat, rakyat Bangka yang berjiwa Republik.

  Oleh karena seluruh rakyat Indonesia berjiwa Republikein, bercita-cita Republikein, bercita-cita kemerdekaan Indonesia, itulah maka bagaimanapun juga usaha Belanda memisahkan kami daripada rakyat, tidak bisa. Selalu kami kembali ke tengah-tengah rakyat, Belanda terpaksa menempatkan kami di tengah-tengah rakyat.

  Perjuangan kita belum lagi selesai. Tetapi perjuangan kita sudah meningkat kepada satu tingkat yang lebih tinggi yang akan menetapkan satu langkah yang penghabisan daripada perjuangan kita.

  Sudah lebih daripada 3,5 tahun kita berjuang untuk mencapai cita-cita kemerdekaan kita. Seperti di mana-mana saya terangkan: Kita Bangsa Indonesia selalu mau damai untuk mencapai kemerdekaan kita, tetapi kita lebih cinta pada kemerdekaan daripada perdamaian. Kita cinta damai tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan.

  Kalau saudara-saudara semuanya melihat ke dalam percaturan politik yang kita jalankan dalam medan internasional, maka kita telah mendapat kedudukan yang kuat dan tidak bisa dilenyapkan oleh kekuasaan apapun juga. Dunia internasional mengakui Belanda tidak akan sanggup melenyapkan Republik.

  Itulah makanya kita tetap berpegang kepada patokan yang diterima oleh Dewan Keamanan. Memang segala keputusan yang diambil oleh Dewan Keamanan banyak yang tidak memuaskan kita. Tetapi kita terima dan

kita jalankan untuk mendapat jaminan untuk mencapai selekas-lekasnya kemerdekaan Indonesia.

Inilah soal yang kita perjuangkan.

Masa datang banyak sekali menghendaki dari kita kerukunan dalam membangun Negara, kerukunan dalam perjuangan. Apabila kita sanggup menjaga persatuan, sanggup memperkuat kerukunan kita terhadap Negara kita, insya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa akan melindungi kemerdekaan kita. Tetapi kalau kita tidak bisa menyimpan dasar perjuangan yang suci, kalau kita tidak mendasarkan perjuangan kita kepada kesucian daripada cita-cita kita, kalau kita sudah mulai mendasarkan perjuangan untuk mencapai kemegahan diri sendiri, maka di sana kita akan gugur, di sana kita akan kalah.

Tetapi selama kita berjuang dengan cita-cita yang suci, kesucian Tanah Air kita, memajukan perjuangan dengan tidak mengenal keuntungan bagi diri sendiri, tetapi memperjuangkan cita-cita kita dengan sepenuh-penuh kesucian jiwa, insya Allah Tuhan akan memperkenankan cita-cita kita itu.

Pendeknya cita-cita yang kita ciptakan dahulu, yaitu kemerdekaan seluruh Bangsa Indonesia, yang kita perjuangkan dengan korban yang tidak sedikit, dengan memberikan Republik kita sebagai modal, mestilah lagi disertai kerukunan daripada kita, kesetiaan daripada kita, persatuan yang kuat antara Pemerintah dan Rakyat, antara Rakyat dan Tentara.

Apabila kita tetap memperkuat persatuan kita ini, memperkuat tekad kita, insya Allah tidak lama lagi cita-cita itu akan tercapai." (TS132-133)

* Tengah malam: Mengomentari kunjungan Wakil Presiden Mohammad Hatta ke ibu kota Provinsi Sumatra Utara, Kotaraja, Radio Belanda di Jakarta menyatakan bahwa Hatta bermaksud mengadakan perundingan dengan Pemerintah Pusat Darurat Republik Indonesia mengenai persetujuan yang baru saja tercapai dalam perundingan antara Mr. Mohammad Rum di pihak Indonesia dan Dr. Van Roijen di pihak Belanda.

Pemerintah Indonesia menganggap perundingan itu sangat penting sehingga Hatta sendiri yang datang ke Kotaraja, tempat kedudukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia.

Di masa lalu pihak Belanda selalu mencari-cari PDRI tersebut, tetapi mereka tidak tahu dengan pasti di mana tempat kedudukannya, demikian Radio Belanda tersebut. (TS130)

1949 JUNI 6.

* Pagi: Wakil Presiden dan rombongan, Gubernur Militer dan Gubernur Sumatra Utara, serta para pejabat lain melakukan perjalanan keliling kota dengan mobil. Di sepanjang jalan yang dilaluinya mereka dielu-elukan dengan pekik "Merdeka" oleh rakyat. (TS135)

* Wakil Presiden mengadakan pertemuan dengan pamong praja yang datang dari seluruh Aceh. Dalam pertemuan itu Wakil Presiden berbicara panjang-lebar mengenai situasi politik dan hubungan Indonesia-Belanda dalam hubungan pembentukan Negara Indonesia Serikat di masa depan.

  Wakil Presiden juga memberikan tuntunan kepada para pamong praja di Aceh mengenai hal-hal yang perlu dilakukannya dalam memimpin rakyat dan dalam perjuangan kemerdekaan. Ia mengharapkan terjalinnya persatuan erat antara Pemerintah dengan Rakyat, antara Rakyat dengan Tentara. (TS135)

* Pawai besar diadakan di Kotaraja (sekarang Banda Aceh) untuk menyambut kedatangan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan rombongan. Pawai diiringi musik TNI, diikuti oleh anggota Angkatan Laut, Angkatan Udara, Polisi, murid Sekolah Rendah, Sekolah Menengah, Sekolah Teknik, Sekolah Tionghoa, golongan bangsa India, Ocyma, pegawai, barisan putri sekolah-sekolah Islam, Palang Merah Indonesia dan rakyat umum.

  Pawai disambut oleh Wakil Presiden dan rombongan di Meuligoe Keresidenan Aceh. (TS135)

* Di Meureudu, Aceh Pidie, dibentuk cabang Panitia Penyokong Yogya dengan Ketua I M. Amin. Selain berbagai sumbangan dari penduduk, telah terkumpul juga 10 ton pinang.

  Demikian diumumkan oleh Panitia Penyokong Yogya Pusat di Kotaraja. (TS135)

1949 JUNI 7.

* Di Meuligoe Keresidenan Aceh diselenggarakan pertemuan Wakil Presiden dengan lima anggota Pengurus Pusat Gasida dan anggota Panitia Penyokong Yogya, dengan dihadiri oleh Gubernur Sumatra Utara dan

Kepala Jawatan Perdagangan Daerah Aceh. Dalam pertemuan ramah-tamah yang berlangsung 1,5 jam itu dibicarakan soal-soal ekonomi.

Wakil Presiden menyatakan kegembiraannya ketika mengetahui bahwa di Aceh telah dibentuk Panitia Penyokong Yogya yang dibangun atas inisiatif Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (Gasida). Wakil Presiden mengharapkan kerja sama yang lebih rapat antara Gasida dengan Pemerintah di daerah ini agar kita bisa dengan mudah mengatasi kesulitan dalam perekonomian negara. (TS138)

* Dalam pertemuan di Aceh Hotel, Kotaraja (sekarang Banda Aceh), Komodor Udara Suryadarma menerangkan kepada Pengurus Gasida a.l. bahwa kini semakin banyak calon pilot Republik Indonesia yang dilatih di luar negeri. Mereka perlu sekali mendapat perhatian dan tunjangan dari seluruh bangsa kita.

  Sementara itu Panitia Pembelian Kapal Udara Daerah Aceh mengharapkan supaya pesawat terbang yang sudah dibeli waktu Presiden Sukarno berkunjung ke Daerah Aceh dulu kiranya dapat melayang di angkasa Daerah Aceh untuk menunjukkan bukti sokongan yang telah diberikan, dan untuk membangkitkan semangat yang lebih besar dalam perkara ini.

  Komodor Suryadarma menyetujui keinginan ini. Ia pun mengharap agar juga di daerah ini lebih banyak pemuda yang berani dan sanggup berjuang di udara. (TS138)

* Ketua Pusat Masyumi Dr. Sukiman Wirjosandjojo dan anggota Dewan Partai Masyumi M. Natsir mengadakan pertemuan dengan keluarga Masyumi, Muslimat, GPII dan Perpiindo di Kotaraja, yang dihadiri juga oleh A. R. Baswedan dari Kementerian Penerangan dan Gubernur Militer Tgk. Muhd. Daud Beureueh. (TS139-140)

* Malam: Dalam rapat samodra di Taman Sari, Kotaraja, yang dihadiri 50.000–60.000 orang dari Kotaraja dan sekitarnya. Rapat dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan *Indonesia Raya*, disusul pidato pembukaan oleh Residen T. T. Mohammad Daudsjah, disusul dengan pidato para menteri.

Menteri Dalam Negeri Dr. Sukiman Wirjosandjojo menggambarkan garis besar rencana Belanda yang hendak melebur dan menghilangkan Republik Indonesia. Mereka melakukan blokade supaya republik kelaparan, melakukan kepungan politik dan membentuk daerah-daerah istimewa untuk mengadu-domba kita.

Tetapi maksud Belanda ini gagal karena timbul reaksi dunia internasional yang menyatakan bahwa Republik Indonesia tidak mati, tetapi terus hidup. Karena inilah di kalangan orang Belanda timbul kegelisahan. Apalagi negara-negara ciptaan Belanda makin hari makin memihak Republik.

Menteri PPK Ali Sastroamidjojo memberikan penerangan mengenai Persetujuan Rum-Van Roijen, dan mengatakan bahwa perundingan akan mendapat penyelesaian terakhir. Dikatakannya, "Perundingan kalau bisa ditempuh kita tempuh, tetapi bukanlah berarti kalau kita diserang hanya diam saja, kita harus siap sedia".

Mr. Nazir Dt. Pamontjak menyatakan bahwa negara-negara Arab amat bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Pengakuan negara-negara Arab dan Asia sangat besar harganya, lebih-lebih di saat Belanda menyerang kembali Republik. Dikatakannya bahwa di berbagai tempat di luar negeri kini sudah ada Perwakilan Republik Indonesia.

Menteri Penerangan M. Natsir menyatakan rasa bangga dapat datang ke Aceh, merasakan suasana tempat di mana Sang Merah-Putih masih berkibar dengan jaya, dan masih mendengar lagu *Indonesia Raya* di tengah udara merdeka. Ini adalah suatu nikmat, dan kita harus pandai menghargai dan memakai nikmat itu, demikian Menteri.

Wakil Presiden sebagai pembicara terakhir menggembleng semangat rakyat untuk terus berjuang. Dikatakannya a.l.,

"Perjuangan 3,5 tahun yang telah kita hadapi memang pahit. Pengorbanan adalah wajib bagi kita untuk mencapai kemerdekaan. Tidak mudah mencapai negara merdeka dan menjadi bangsa yang merdeka. Perjuangan menghendaki penderitaan dan pengorbanan, dan janganlah ditujukan kemerdekaan kita itu untuk kesenangan diri sendiri. Siapa yang berjuang dan sudah mengaku kalah, dia pasti kalah. Kita dalam perjuangan bisa menderita kekalahan, tetapi jangan sekali-kali mengaku kalah. Dalam kekalahan, kita mesti tetap dalam tekad kita, bahwa kita musti menang, dan akhirnya kita musti menang juga.

Kedudukan Negara Republik Indonesia kini semakin hari semakin kuat. Soal Indonesia sudah menjadi soal internasional, bukan soal dalam negeri. Kita tidak terlepas dari dunia internasional dan Dewan Keamanan. Inilah yang menjadikan kita kuat.

Oleh karena kuatnya kedudukan kita dalam dunia internasional, maka Belanda sendiri akan bersedia mengakui kedaulatan yang nyata, yang tidak bersyarat. Inilah dasar yang kita pegang. Di atas dasar inilah kita berunding.

Mungkin perundingan ini adalah perundingan yang penghabisan. Dan kita harus banting tenaga untuk mencapai cita-cita kita.

Memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu bukan hasil perjuangan Sukarno-Hatta, kalau tidak ada rakyat yang berjuta-juta, yang bersatu hati di belakangnya. Pemimpin tidak bisa bikin apa-apa kalau rakyat tidak menyokong di belakangnya. Berjuanglah dengan tidak memikirkan hasil diri sendiri, kata Wakil Presiden.

Untuk mencapai persatuan, jangan mengadakan permusuhan di antara kita sama kita, adakanlah persatuan. Persatuan adalah sendi yang kuat, padulah persatuan, jagalah persatuan, kalau tidak ada persatuan kita pasti hancur.

Selanjutnya Wakil Presiden menyatakan penghargaan atas ketabahan rakyat Aceh, dan menjelaskan bahwa maksud kunjungannya ini ialah untuk berunding dengan PDRI.

Ia pun minta kepada para pemimpin dan rakyat di Aceh supaya mau menerima penyelesaian sengketa dengan Belanda melalui Konferensi Meja Bundar.

Kepastian sikap Aceh dalam hal ini dianggap sangat penting, karena Pemerintah Pusat mengetahui banyak resolusi datang dari Aceh yang isinya menolak perundingan dengan Belanda apabila bukan atas dasar pengakuan kemerdekaan 100%."

Kemudian terbukti bahwa rombongan ini tidak dapat berjumpa dengan Ketua PDRI. (TS118,128,135-138)

1949 JUNI 8.

* Wakil Presiden Mohammad Hatta bertemu dengan beberapa ulama seperti Tgk. H. Ahmad Hasballah Indrapuri, Tgk. H. Abdullah Lam U, Tgk. Abdul

Wahab Seulimeum, Tgk. Ismail Jakub, Tgk. Abubakar Adamy, dan Tgk. H. Hamzah Ateuek di Meuligoe Keresidenan Aceh.

Kepada para ulama Wakil Presiden menyampaikan beberapa pesan, a.l. menyangkut penyiaran dan pendidikan agama di Aceh. (TS140)

* Wakil Presiden dan anggota rombongan pun melakukan pertemuan dengan wakil-wakil partai di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Sumatra Utara, dihadiri juga oleh Komisaris Pemerintah Sumatra Utara Mr. S. M. Amin, Gubernur Militer Tgk. Muhd. Daud Beureueh, Residen T. T. Mohammad Daudsjah, Tuanku Mahmud, Sultan Siak Sjarif Kasim dll.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Presiden menjelaskan mengenai keadaan politik dalam negeri, disusul dengan tanya-jawab. (TS140)

* Di Kotaraja, berlangsung pertemuan antara Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan para pelajar sekolah lanjutan. Dalam kesempatan itu menteri menyerukan kepada para pelajar supaya giat belajar, karena tenaga mereka sangat dibutuhkan untuk pembangunan tanah air.

"Kalau kamu tanya kepada Bapak, apa nasehat Bapak yang sebaik-baiknya untuk meneruskan sekolahmu, maka Bapak berkata ialah belajar di Sekolah Guru. Sekolah guru paling baik, karena kita kekurangan guru, karena di sini pun Bapak lihat juga kekurangan guru. Di samping Sekolah Guru, Sekolah Teknik juga sekolah yang terbaik, karena tenaga teknik kita juga kurang.

Saya serukan kepada kamu sekalian, pemuda-pemuda harapan bangsa dan Ibu Pertiwi, kaulah sekalian harapan rakyat di kemudian hari, sebab yang tua-tua itu pada suatu saat harus meletakkan jabatannya, diambil over oleh pemuda-pemuda." (TS140-141)

* Menteri Penerangan M. Natsir dan Pejabat Kementerian Penerangan A. R. Baswedan mengadakan pertemuan dengan para pelajar Sekolah Lanjutan Islam Kotaraja bertempat di gedung *Debating Club* Sekolah Menengah Islam kota ini.

Pertemuan dibuka dengan ucapan selamat kepada para pejabat tersebut oleh Sofjan Hamzah mewakili Pengurus Persatuan Pelajar Islam Indonesia Daerah Aceh.

Kemudian A. R. Baswedan memberikan uraian mengenai sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Anatara lain ia ungkapkan kelicikan Van der Plas, seorang tokoh bangsa Belanda, dalam mempengaruhi umat Islam di daerah pendudukan, dengan menggunakan soal-soal psikologis. Baswedan menganjurkan kepada para pemuda untuk giat mempelajari kitab-kitab dan ajaran Islam agar dapat melakukan perbandingan.

Selanjutnya Menteri Penerangan M. Natsir menguraikan adanya beberapa macam penyakit dalam tubuh umat Islam. Ia anjurkan supaya penyakit-penyakit itu diperiksa, dan di mana perlu dioperasi.

Umat Islam kekurangan kader untuk menghubungkan para pemimpin besar Islam dengan umat Islam yang besar jumlahnya, demikian Natsir..

Menjadi kewajiban bagi pemuda Islam untuk mengisi lowongan itu supaya jarak antara pemimpin dengan umat tidak terlalu jauh. Dianjurkannya, supaya pemuda Islam menceburkan diri dalam masyarakat, mempelajari kehidupan umat, mempersenjatai diri dengan ilmu pengetahuan, agar batin mereka dapat dikendalikan oleh moral. Dengan demikian mereka dapat menjadi kader Islam yang sangat dibutuhkan, dan mengusahakan agar umat Islam tidak sekadar menjadi dongkrak untuk mengangkat beban-beban yang berat.

Bila semua itu dapat kita laksanakan, barulah kita berhak berkata: Kitalah umat yang disebut umat pilihan yang dibangkitkan Tuhan, demikian Natsir. (TS141)

Panitia Penyokong Yogya mengeluarkan seruan sbb.:

Bantulah ‘Panitia Penjokong Djokja’ dalam usahanja menjediakan:

1. Bahan keperluan Pemerintah Pusat di Djokjakarta.
2. Bahan keperluan rakjat di sana.

Alamat Kantor Panitia Pusat:

1. B.P. ‘Gasida’, Kutaradja;
2. Bank Dagang, Kutaradja. (TS140)

* Komandan lapangan Komando Sektor Barat Utara (KSBO) mengadakan rapat staf di Markas KSBO di Pelawi, Pangkalan Berandan, untuk membicarakan perkembangan terakhir keadaan di front.

Rapat a.l. memutuskan untuk melipatgandakan kegiatan gerilya dan sabotase terhadap kedudukan tentara Belanda. Diputuskan juga untuk membantu perjuangan gerilyawan di daerah-daerah pendudukan, yang dilakukan oleh Batalion B di bawah Kapten Sudirman, Batalion XVII di bawah Kapten Widji Alfisah, Batalion XII di bawah Kapten Burhanuddin, Batalion XIX di bawah Kapten Yusman Kandouw, dan Batalion XVI di bawah Kapten Langlangbuana. (TS141-142)

1949 JUNI 9.

* Wakil Presiden Mohammad Hatta dan rombongan melakukan darmawisata ke pantai Leupung di Aceh Besar, didampingi para pembesar daerah ini.

Tamasya berlangsung meriah. Wakil Presiden dengan gembira berbaur dengan anak-anak pantai dan bersama-sama menarik pukat dan berkayuh dengan sampan. Selanjutnya Wakil Presiden pun makan bersama dan mandi di laut.

Sebelum kembali ke kota, Wakil Presiden mengucapkan terima kasih kepada penduduk atas sambutannya yang menggembirakan. Ia pun memberikan dorongan untuk meneruskan perjuangan. (TS144-146)

* Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mengadakan pertemuan dengan kaum wanita di Aceh, yang diusahakan oleh Perwari, di gedung Aceh Bioskop, Kotaraja. (TS141)

* Gubernur Militer merangkap Komandan Divisi X TNI Komando Sumatra mengeluarkan Maklumat No. 223-GM-KD-1949. Isi Maklumat:

"Tidak dibenarkan siapapun juga membeli barang-barang apa saja dari warga TNI, demikian juga tidak dibolehkan warga TNI menjual barang-barang apapun juga kepada siapapun juga.

Tidak dibolehkan pula siapapun juga menjadi orang-orang perantara untuk menjual barang-barang apa saja yang berasal dari warga TNI.

Larangan tersebut di atas dapat dikecualikan jika ada mempunyai surat keterangan yang cukup yang menyatakan barang-barang itu miliknya sendiri.

Tidak dibenarkan siapapun juga memakai warga TNI sebagai alat perantara untuk memperoleh sesuatu keuntungan ekonomi bagi dirinya

sendiri baik dalam soal jual-beli barang-barang dan/atau pengangkutan barang, begitu juga tidak dibolehkan warga TNI dipakai atau membiarkan dirinya dipakai orang lain untuk sesuatu kepentingan tersebut di atas guna keuntungan untuk yang memakai dan/atau yang dipakai.

Perbuatan-perbuatan yang tersebut di atas dapat dihukum menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana." (WvS). (TS142)

* Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo mengeluarkan Maklumat No. 224-G.M.-49 mengenai pembasmian perjudian. Dalam maklumat tersebut dinyatakan, bahwa permainan judi dengan cara apapun di Daerah Kemiliteran Aceh, Langkat, dan Tanah Karo harus dibasmi sampai habis. Dilarang siapapun juga bermain dengan alat-alat yang dapat dipakai dalam permainan judi.

  Barang siapa kedapatan atau terbukti menjadi kepala judi, turut bermain judi, memberi kesempatan lain orang berjudi dan/atau bermain dengan salah satu alat perkakas yang biasa dipakai untuk bermain judi, sekalipun tidak dengan bertaruh uang atau barang, akan dihukum menurut ketentuan dalam Maklumat Gubernur Militer 9 Agustus 1948 No. GM-10-M, dan 11 September 1948 No. GM-12-M.

  Segala alat-alat yang dapat dipergunakan untuk bermain judi, kartu-kartu judi, dadu putar, dadu kocok dan lain-lain, akan disita dan dibinasakan.

  Segala alat-alat yang tersebut di atas, yang kedapatan diperjualbelikan di pasar-pasar, toko-toko, disimpan untuk diperjualbelikan atau untuk dipakai sendiri, akan disita dan dibinasakan.

  Kepada saudagar yang barang-barangnya seperti tersebut di atas disita, akan diberi ganti kerugian menurut ketetapan dari Kepolisian Keresidenan Aceh.

  Dilarang siapapun membuat, mengangkut, menyimpan atau membawa masuk dari luar negeri atau dari luar daerah ke daerah ini segala macam alat permainan judi dan atau alat permainan yang biasanya dipakai untuk bermain judi, dalam roman dan bentuk apapun.

  Segala alat-alat tersebut yang dibuat atau dibawa masuk ke daerah ini setelah penetapan ini diumumkan akan disita dan dibasmi dengan tidak mengganti kerugian apapun untuk yang membuat/yang empunya.

Pelanggaran-pelanggaran atas maksud peraturan ini dianggap sebagai kejahatan dan akan dihukum menurut Undang-undang Dewan Pertahanan Negara No. 30. (TS142-144)

* Panitia Penyokong Yogya Daerah Aceh cabang Langsa dalam kawatnya kepada Pengurus Besar Gasida di Kotaraja menyatakan bahwa mereka sanggup menyerahkan sekurang-kurangnya satu kapal terbang dan lain-lain bantuan untuk menyokong pengembalian Pemerintah Pusat ke Yogyakarta.

  Sokongan serupa akan diikuti oleh saudagar-saudagar Indonesia yang berada di tempat-tempat lain. (TS144)

* Malam: Di Meuligoe Keresidenan Aceh berlangsung jamuan makan untuk Wakil Presiden dan rombongan bersama para opsir TNI di Kotaraja. Jamuan makan dilanjutkan dengan malam gembira dengan tampilan lagu-lagu perjuangan. (TS146)

1949 JUNI 10.

* Sultan Hamengkubuwono IX berunding dengan Residen Lijcklama di Kepatihan Yogyakarta dalam rangka pengembalian Yogyakarta dan Pemerintah Republik Indonesia (RI) ke Yogyakarta.

  Sementara itu Sultan membentuk komisi timbang terima Yogyakarta dari tangan Belanda. (*AL90; LUxx*)

* Mayor Achmadi menerima instruksi dari Gubernur Militer DMI II Kolonel Gatot Subroto No. 16 yang isinya menyatakan bahwa anggota Angkatan Perang dan pegawai pemerintah sipil sekeluarganya harus berjuang terus selama belum ada perintah *cease fire* dari Gubernur Militer. (*PEH19*)

* Wakil Presiden dan rombongan meninggalkan Kotaraja (sekarang Banda Aceh) menuju Bangka, tempat mereka ditawan oleh Belanda.

  Dalam percakapan dengan *Semangat Merdeka*, Wakil Presiden menyatakan sangat bahagia dapat mengunjungi Daerah Aceh, dan terharu melihat gelora semangat rakyat yang ingin terus berjuang. Ia mengharapkan agar selanjutnya ia akan selalu berjumpa dengan rakyat Aceh di dalam kenangan. “Rakyat Aceh telah begitu ramah-tamah selama kami berada di sini,

dan ini tentulah akan membawa kenang-kenangan yang kekal abadi," kata Wakil Presiden. (TS147)

* Sultan Siak Sjarif Kasim yang telah menetap di Aceh mengucapkan pidato radio melalui pemancar Suara Indonesia Merdeka, ditujukan ke daerah pendudukan Belanda umumnya dan daerah Siak khususnya.

Secara panjang lebar Sultan Siak menguraikan kelicikan Belanda yang berkali-kali melanggar persetujuan yang telah dicapainya dengan Republik Indonesia. Selanjutnya Sultan menyatakan bahwa kejadian akhir-akhir ini di daerah Siak khususnya dan beberapa daerah di Sumatra umumnya menimbulkan kekhawatiran. Di beberapa daerah itu terus-menerus diadakan *aktiviteit* untuk mempersiapkan dewan-dewan, yang katanya untuk menentukan status daerah itu.

"Ini bertentangan dengan dasar-dasar penyelesaian, berlawanan dengan persetujuan Rum-Roijen. Ini merusakkan semangat kepercayaan antara kedua pihak, yang sedang ditumbuhkan dengan susah-payah.

Tidak dimaksudkan oleh Republik mengadakan perundingan, apabila di luar perundingan pihak yang satu lagi (maksudnya Belanda) terus berusaha melemahkan kedudukannya dengan memecah belah daerahnya. Memang ada yang mengatakan bahwa itu semua kehendak rakyat.

Maka di sini saya sebagai putera dari daerah Siak, yang telah hidup di tengah-tengah rakyat Siak dan mengetahui apa yang terkandung dalam hasrat rakyatnya, saya menegaskan bahwa kegiatan-kegiatan politik untuk melepaskan diri dari Republik kitu, bukanlah kemauan rakyat Siak sendiri. Bukan! Walaupun orang-orang mengobar-ngobarkan seperti itu.

Saya percaya, rakyat Siak sebagaimana juga rakyat-rakyat Republik di lain-lain tempat yang sekarang dalam kekuasaan Belanda, hanya mempunyai satu keinginan. Keinginan hendak hidup bebas di bawah kibaran Sang Merah Putih Republik Indonesia, dalam pimpinan Presiden dan Wakil Presiden kita yang tercinta Soekarno-Hatta.

Dalam kekuasaan pendudukan tentara Belanda sekarang ini, rakyat tidak dapat mengeluarkan keinginan yang bebas. Dalam keadaan yang sedemikian itu memang amat mudahlah beberapa orang di bawah lindungan dan tuntutan dari aparat pemerintah pendudukan Belanda melakukan kegiatan politik atas nama rakyat, dengan memakai nama

rakyat, untuk menghasilkan kehendak sendiri. Begitu duduk perkara yang sebenarnya.

Permainan yang semacam ini sudah terlampau sering dilakukan. Tak ada orang sadar dapat terpedaya olehnya lagi. Akan tetapi permainan yang semacam ini amat berbahaya. Berbahaya bagi usaha penyelesaian politik, berbahaya bagi keselamatan kedua bangsa, bangsa Belanda sendiri dan bangsa kita, Indonesia.

Oleh karena itu aku berseru kepada penduduk Siak yang kucintai! Janganlah diturutkan hawa nafsu beberapa orang. Marilah kita bersama-sama mengatasi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Setia berdiri di belakang Pemerintah kita yang sah, Republik Indonesia, dalam tuntunan pemimpin-pemimpin kita, Soekarno-Hatta."

Sultan menyerukan kepada pihak Belanda supaya memakai pedoman politik yang telah digariskan oleh Pemerintah Belanda sendiri semenjak 12 Mei yang lalu, yang menghendaki "politik bestaan" selama usaha penyelesaian politik sedang berjalan di bawah pimpinan Dewan Keamanan.

Kepada Komisi UNO untuk Indonesia ia serukan, supaya Komisi memperhatikan kejadian-kejadian yang mungkin menjadi sebab gagalnya usaha Komisi kelak.

Kepada Delegasi Republik Indonesia di Yogyakarta diminta supaya menumpahkan perhatian terhadap bahaya yang sedang mengancam berhasilnya usaha Delegasi yang bersusah-payah itu. (TS146-147)

1949 JUNI 12.

* Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam perundingan dengan Belanda, Mr. Mohammad Rum, menerangkan bahwa Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia Mr. Sjafruddin Prawiranegara berada di pedalaman Sumatra. Wakil Presiden Mohammad Hatta yang baru-baru ini berkunjung ke Aceh untuk menemuinya tidak dapat berjumpa dengannya ataupun dengan anggota pemerintahannya. Tapi Wakil Presiden sempat melakukan perundingan dengan para pembesar dan pemimpin politik di daerah itu.

  Atas pertanyaan apakah Wakil Presiden akan berkunjung lagi ke Aceh, ataukah Mr. Sjafruddin Prawiranegara yang akan diminta berkunjung ke Bangka, Mr. Rum tidak memberikan jawaban.

Hari ini juga Mr. Mohammad Rum bersama beberapa anggota Delegasi Republik dan Sultan Yogya berangkat ke Bangka. Ia katakan bahwa ia hanya melakukan kunjungan biasa kepada para pemimpin Republik di sana untuk menyampaikan laporan. (TS149)

* Sebuah pesawat Catalina Belanda melakukan pengintaian atas kubu pertahanan Baterai I dan Baterai II di pantai Uleelheue, Ladong dan Krueng Raya di Aceh Besar.

  Menyusul empat pesawat Mustang yang serta-merta menembaki kubu-kubu pertahanan tersebut dengan senapan mesin dan menjatuhkan bom. Dalam pertempuran yang berlangsung lebih dari satu jam, prajurit Ja'far gugur, dan prajurit Ali Diman menderita luka berat. (TS149)

1949 JUNI 13.

* Pesawat-pesawat Mustang Belanda yang kemarin menyerang kubu pertahanan Baterai I dan Baterai II di Aceh Besar, hari ini membom lapangan terbang di Kotaraja (sekarang Banda Aceh) dan Lhoknga serta menembakinya dengan senapan mesin. (TS149)

* Berdasarkan Ketetapan Pemerintah Darurat Republik Indonesia No. 21/Pem/PDRI mengenai Dewan Pertahanan Daerah, hari ini dengan Ketetapan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatra Utara No. 3/KPPSU/P dibentuk Dewan Pertahanan Daerah Provinsi Sumatra Utara di Kotaraja dengan susunan sbb.:

  Ketua: Residen T. T. Mohammad Daudsjah; Anggota: M. Nur el Ibrahimy; M. Yunan Nasution; Jahja Siregar; Amelz.

  Keempat anggota tersebut adalah bekas anggota Badan Eksekutif Dewan Perwakilan Rakyat Sumatra Utara. (TS 151-152)

* Sebagai balasan atas serangan yang dilancarkan oleh TNI Komando Sektor Barat Utara (KSBO) tanggal 12 Juni, hari ini pesawat Mustang Belanda menembaki daerah Gebang, Sicurai dan Rantau di Kualasimpang. Serangan ini dibarengi tembakan dahsyat artileri. (TS152)

1949 JUNI 14.

* *Radio Republik Indonesia* di Sumatra menyiarkan pernyataan Mr.

Sjafruddin Prawiranegara sebagai ketua PDRI bahwa dirinya menyetujui hasil pembicaraan Rum-Van Roijen dengan syarat sbb.:

1. TNI tetap berada dalam daerah-daerah yang didudukinya.
2. Tentara Belanda harus ditarik dari daerah-daerah yang didudukinya.
3. Pemulihan Pemerintah RI di Yogyakarta harus tanpa syarat. (AT281)

* Panglima Tentara Nasional Indonesia di Sumatra, Kolonel Hidajat, tiba di Jakarta dari Kotaraja (sekarang Banda Aceh) dengan pesawat Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia. (TS152)

* Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatra Utara, Mr. S.M. Amin, bersama para anggota Badan Eksekutif Dewan Perwakilan Sumatra Utara dan Mr. Hadi dari Kementerian Dalam Negeri berangkat ke timur Aceh untuk melantik Dewan Perwakilan Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tengah, dan Aceh Pidie.

  Rombongan akan mengunjungi juga kabupaten Langkat untuk meninjau dan untuk urusan dinas lainnya. Sesudah itu rombongan akan melanjutkan perjalanan ke Aceh Barat dan Aceh Selatan untuk urusan yang sama. (TS152)

* Daerah terpencil di Aceh Selatan mendapat serangan dari angkatan laut Belanda berupa tembakan meriam. Kerugian yang diakibatkannya tidak seberapa. (TS152)

1949 JUNI 15.

* Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) telah menerima undangan dari Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia (KPBBI) untuk ikut serta dalam perundingan pendahuluan Indonesia-Belanda. (*KU122*)

* Panglima Tentara Territorial Sumatra yang berkedudukan di Kotaraja (sekarang Banda Aceh), Kolonel Hidajat, bertolak ke Yogyakarta dari Jakarta bersama Mr. Mohammad Rum, Ir. Djuanda, Dr. Darma Setiawan, Mr. Kosasih, dan perutusan BFO.

  Di Yogyakarta ia menyatakan bahwa pelaksanaan gencatan senjata di Sumatra mungkin sangat sulit, karena pasukan RI di Sumatra bertebaran di seluruh pulau itu, sedangkan hubungan lalu-lintas tidak baik. (TS153)

* Komandan Militer kota Kotaraja, Kapten Said Usman, minta kepada para pemegang kartu bebas jalan malam supaya selekas mungkin menyerahkan kembali kartu tersebut kepada Komando Militer kota selambat-lambatnya pada 25 Juni 1949.

  Dijelaskannya, mereka yang mendapat kartu bebas jalan malam ialah orang yang dirasa perlu dan penting sehubungan dengan tugasnya. (TS152)

* Kepala Jawatan Penerangan Sumatra Utara, Osman Raliby, melakukan serangkaian kunjungan ke berbagai tempat di Aceh Tengah untuk meninjau perkembangan politik, ekonomi dan sosial, sambil memberikan penerangan.
  Dalam kunjungan tersebut ia disertai oleh wartawan *Semangat Merdeka*, Letnan I TNI Staf Penerangan Divisi X T. Alibasjah Talsya, dan Letnan I Abdullah Arif. (TS152-153)

1949 JUNI 16.

* Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta beserta rombongan tiba kembali di ibu kota Republik.

  Lagu kebangsaan *Indonesia Raya* didengungkan. Presiden menyerahkan bendera pusaka Sang Merah-Putih yang selalu dibawanya ke mana pun ia diasingkan, kepada seorang perwira.

  Dengan kata-kata Sukarno sendiri:

  "Setelah dibuang selama beberapa bulan di pulau Bangka, maka akhirnya Bung Hatta dan aku tiba kembali di lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta, 16 Juni 1949 dengan disambut oleh wakil-wakil Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Hadir juga a.l. Ki Hadjar Dewantara dan anggota-anggota UNCI." (AB237; *LU t.h.*)

* Di Kotaraja (sekarang Banda Aceh) diadakan musyawarah antarorganisasi wanita, yaitu Pimpinan Muslimat Masyumi Daerah Aceh, Pimpinan Aisyiah, Pimpinan Perwari, GPII Putri, IPPI Putri, dan Perguruan Kaum Ibu, guna membahas bersama usaha wanita daerah ini untuk membantu penduduk di Yogyakarta.

  Sebagai pedoman digunakan keterangan Wakil Kementerian Penerangan yang ikut dalam rombongan Wakil Presiden dalam rapat dengan golongan wanita di Kotaraja baru-baru ini.

Musyawarah sepakat untuk menyerukan kepada seluruh kaum wanita di Daerah Aceh agar memberikan bantuan dalam usaha pengumpulan pakaian untuk kaum ibu dan anak-anak di Yogya. Isi seruan:

1. Masing-masing partai dan perkumpulan di cabang dan ranting, berusaha sendiri-sendiri dengan jalan yang sah, mengumpulkan pemberian dari anggotanya.
2. Masing-masing partai/perkumpulan di cabang dan ranting mengirimkan hasil pengumpulannya sendiri-sendiri langsung kepada Pimpinan Daerahnya di Kotaraja.
3. Pimpinan Daerah tiap-tiap partai/perkumpulan akan menyerahkan hasil pengumpulan tersebut kepada Badan Penerimaan yang terdiri dari: 1). Ny. Mr. S. M. Amin; 2). Ny. Tgk. Nja' Asma Daud Beureueh; 3). Ny. T. T. Mohammad Daudsjah.

Pengangkutan ke Yogyakarta akan dilakukan dengan perantaraan Kolonel Subijakto. (TS153-155)

* Di Langsa dilangsungkan rapat Panitia Penyokong Pengembalian Pemerintah Republik ke Yogya. Pertemuan yang dipimpin oleh Ismail Usman itu dihadiri juga oleh para anggota Badan Eksekutif Dewan Perwakilan Rakyat Sumatra Utara. (TS153)

* Latihan Barisan Gerilya Rakyat dalam hal mengatur taktik perjuangan secara gerilya, yang diadakan sejak 14 Juni di Bireuen, berakhir hari ini dengan hasil baik.

Dalam rapat raksasa yang diadakan sebagai penutup latihan tersebut, para pemimpin perjuangan memberikan penerangan kepada puluhan ribu rakyat Bireuen dan sekitarnya.

Ahmad Abdullah, salah seorang pemimpin Barisan Gerilya Rakyat, menganjurkan supaya semangat juang dengan cara gerilya dipupuk hingga bertambah kuat untuk menentang keangkaraan musuh.

Letnan Kolonel Husin Jusuf menyerukan supaya anggota Barisan Gerilya Rakyat mementingkan juga usaha-usaha produktif dan turut giat dalam pembangunan demi kemakmuran Indonesia.

"Kita janganlah lengah dan lalai dengan adanya persetujuan dalam perundingan-perundingan yang telah tercapai, tetapi tetaplah waspada

dan percaya kepada tenaga sendiri untuk memperoleh kemenangan, banyak kali kita telah dibuai-buai oleh adanya persetujuan-persetujuan dalam perundingan, tetapi untuk masa yang akan datang hendaklah kita hati-hati dan waspada serta berjuang terus untuk mencapai kemerdekaan yang abadi."

Selanjutnya Kepala Jawatan Penerangan Sumatra Utara menguraikan situasi politik dalam dan luar negeri. Ditegaskannya,

"Tidak ada alasan bagi kita untuk optimistis terhadap Persetujuan Rum-Roijen yang telah tercapai baru-baru ini, karena dalam langkah-langkah perjuangan kita di masa yang akan datang masih banyak kesukaran-kesukaran yang perlu kita atasi".

Kepala Jawatan Penerangan membayangkan kejayaan gerilyawan kita di Jawa dan Sumatra, dan akhirnya berpesan supaya hadirin mengamalkan ucapan Wakil Presiden Hatta yang baru-baru ini berkunjung ke Aceh. (TS155-157)

1949 JUNI 17.

* Delegasi wali-wali Negara Sumatra Timur, Sumatra Selatan, Madura, dan Jawa Timur, demikian juga Kepala Daerah Kalimantan Barat dan para Perdana Menteri Negara Indonesia Timur (NIT) dan Pasundan, berkunjung ke Bangka untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Sukarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan lain-lain. (*LUxx*)

* Komisaris Pemerintah untuk Sumatra Utara Mr. S. M. Amin dan rombongan melakukan peninjauan di Kabupaten Langkat. Di perbatasan Aceh Timur-Langkat rombongan disambut Bupati Langkat O. K. Salamuddin.

  Mulai dari Bukit Kubu dan Besitang sampai Pangkalan Berandan rombongan dielu-elukan dengan pekik "Merdeka" oleh penduduk yang berdiri di pinggir jalan.

  Dalam rapat umum di kantor Bupati, Komisaris Pemerintah menyampaikan pesan-pesan dan menguraikan keadaan terakhir sehubungan dengan tercapainya Persetujuan Rum-Roijen. Ia menganjurkan persatuan dan kerja sama yang erat di antara Rakyat dengan Pemerintah dan di antara segenap lapisan penduduk, juga dengan sungguh-sungguh berusaha menghindarkan perpecahan.

Usai rapat umum diadakan resepsi di Gedung Muhammadiyah. Setelah itu rombongan berkunjung ke Pangkalan Susu, dan sorenya kembali ke Langsa. (TS157)

1949 JUNI 18.

* Sultan Hamengku Buwono yang dibebani tanggung jawab untuk mempersiapkan daerah Yogyakarta bagi kembalinya Pemerintah Republik, atas nama Pemerintah mengeluarkan perintah penghentian tembak-menembak kepada TNI. Perintah itu segera ditaati, sehingga segera kemudian penarikan pasukan-pasukan Belanda dapat dimulai. (AT281)

* Rapat komando dengan Gubernur Militer Kolonel Gatot Subroto dan staf serta unsur lain, di Grogol, Solo, berlangsung hari ini, diteruskan sampai keesokan harinya. Komando SWK 106/Arjuna menyusun rencana umum untuk menduduki Solo. (*PEH88*)

* Di Sekolah Polisi Kotaraja (sekarang Banda Aceh) berlangsung upacara penyerahan ijazah kepada para pelajar Sekolah Kepolisian Daerah Aceh yang telah selesai mengikuti kursus kilat bagian kriminil reserse.

  Dalam kesempatan itu Kepala Polisi Daerah Aceh, Komisaris Polisi Klas I M. Insja, menyampaikan nasihat kepada para lulusan. Ia menyatakan kegembiraannya dengan hasil yang diperoleh para pelajar dengan angka nilai yang baik. Ia mengharapkan agar pendidikan itu memberikan manfaat.

  "Ingatlah, bahwa angka-angka itu saja tidak akan berguna kepada masyarakat dan Pemerintah, kalau ia hanya tinggal dalam teori belaka, sedangkan dalam prakteknya tidak.

  Cita-cita kita selaku prajurit tanah air ialah mempunyai satu Kepolisian Republik Indonesia yang setaraf dengan kepolisian internasional. Menjadi kewajiban kita dari kepolisian untuk mengisi dada kita dengan makanan rohani dan jasmani untuk kesempurnaan Jawatan Kepolisian ini".

  Kepala Polisi mengharapkan agar para kader menunaikan kewajiban dengan seksama, dan menuruti dan patuh kepada peraturan negara. Juga menyebarkan pengetahuan yang telah didapat kepada rekan-rekan yang tidak atau belum mendapat kesempatan menempuh pendidikan ini.

  Mewakili Jawatan Penerangan Sumatra Utara, Kusen Tjokrosentono

mengingatkan para pelajar bahwa mereka akan menempuh ujian yang lebih berat di tengah masyarakat.

"Kita tidak selamanya berada dalam peperangan. Ada masanya akan datang di mana kita akan melihat perdamaian itu di negeri kita. Oleh sebab itu, di sinilah letaknya kewajiban yang berat bagi korps kepolisian, yaitu untuk memimpin keamanan dan memperingatkan masyarakat bahwa untuk menjaga keamanan itu ada peraturan-peraturannya yang harus kita turut bersama-sama," [demikian Kusen Tjokrosentono]. (TS157-159)

* Empat pesawat Belanda jenis Mustang mendatangi Pangkalan Berandan dari arah laut, menembaki Pelawi tempat markas KSBO dan benteng pertahanan Peleton D Baterai II. Seorang polisi Republik gugur, dan dua anggota Baterai II cedera. (TS159)

1949 JUNI 19.

* Lima belas orang wartawan Amerika tiba di Indonesia atas undangan Pemerintah Belanda, untuk menyaksikan keadaan di Indonesia.

  A.l. mereka berkunjung juga ke Bangka, tempat penahanan para pemimpin Republik Indonesia (RI), seperti Presiden Sukarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan lain-lain. (*LU t.h.*)

* Di gedung Sekolah Menengah Islam Krueng Geukuh tak jauh dari Lhokseumawe berlangsung sidang pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara, dihadiri oleh Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatra Utara Mr. S. M. Amin dan rombongan, di antaranya anggota-anggota Badan Eksekutif DPSU.

  Terpilih sebagai anggota Badan Eksekutif DPRK Aceh Utara: Ali Balwy dan Tgk. Syekh Abdul Hamid, dan dua orang lagi segera akan dipilih. (TS159)

1949 JUNI 20.

* Sidang Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) dengan suara 11 lawan 3 menolak resolusi Konferensi Sumatra di bawah Dr. Mansur, yang bermaksud mendirikan Federasi Sumatra. (*LUxx*)

* Lima puluh pemuda anggota Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) berangkat dari Kotaraja (sekarang Banda Aceh) ke Aceh Selatan untuk menyumbangkan tenaga dalam pembangunan di daerah itu. Mereka pun akan ikut dalam usaha pemberantasan buta huruf di kalangan penduduk. (TS159)

1949 JUNI 21.

* Sultan Hamengkubuwono IX sebagai koordinator keamanan mengeluarkan maklumat berisi jaminan keamanan dan ketertiban bagi penduduk Yogyakarta sesudah tentara Belanda ditarik dari Yogyakarta. (*LU t.h.*)

* Para wartawan Amerika dalam kunjungan ke Indonesia atas undangan Pemerintah Belanda berkunjung juga pada para pemimpin Indonesia yang berada dalam tawanan Belanda di Bangka, a.l. Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.

  Dalam kesempatan itu Presiden Sukarno memberikan keterangan tentang perjuangan dan pendirian Republik Indonesia (RI) mengenai soal-soal internasional. (*AL100; LUxx*)

* Di tempat penahanannya di Menumbing, Bangka, Presiden Sukarno memberikan wawancara pers kepada para wartawan, a.l. wartawan Amerika H.R Knickerbocker.[2] (BHS45)

* Kepala Jawatan Agama Sumatra Utara di Kotaraja (sekarang Banda Aceh) mengeluarkan Maklumat No. 1. Isi Maklumat: permintaan kepada segenap penduduk yang beragama Islam agar menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadhan ini, dan tidak lengah terhadap setiap kemungkinan serangan musuh dari laut dan udara, atau lewat front Sumatra Timur Aceh.

  Di bulan Puasa, penduduk yang beragama Islam maupun yang tidak beragama Islam dilarang menjual makanan pada siang hari sampai pukul 17.00. Penduduk yang tidak beragama Islam diminta agar menghormati orang berpuasa dengan tidak makan, minum dan merokok di tempat-tempat yang dapat dilihat umum. (TS159)

---

2 Dalam perjalanan pulang, pesawat yang ditumpangi para wartawan jatuh di India, dan para wartawan tewas (BHS45).

* Di gedung bioskop Takengon berlangsung upacara pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah oleh Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatra Utara.

  Terpilih sebagai anggota Badan Eksekutif Mat Rahim Djindan, Malik Sjaharmansjah, Mursid, dan Kali Abubakar. (TS159)

1949 JUNI 22.

* Sebagai tindak lanjut Persetujuan Rum-Roijen, diadakan perundingan resmi antara Republik Indonesia (RI), Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan Belanda di bawah pengawasan United Nations Commission for Indonesia (UNCI, Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia) yang diwakili oleh T.K. Critchley. Hasil perundingan:

  1. Pengembalian Pemerintah RI ke Yogyakarta dilaksanakan. Pada 24 Juni 1949 Keresidenan Yogyakarta dikosongkan oleh tentara Belanda, dan pada 1 Juli 1949 Pemerintah RI kembali ke Yogyakarta setelah Tentara Nasional Indonesia (TNI menguasai keadaan sepenuhnya di daerah itu.
  2. Mengenai penghentian permusuhan akan dibahas setelah kembalinya Pemerintah RI ke Yogyakarta.
  3. Konferensi Meja Bundar (KMB) diusulkan akan diadakan di Den Haag. (*KU122*; *LUxx*; *LU t.h.*; S6 69-70)

* Panglima Besar Sudirman mengirim radiogram kilat kepada komandan-komandan pasukan-pasukan dan juga kepada Sultan Hamengku Buwono IX yang berisi protes keras terhadap “Pernyataan-pernyataan Rum-Van Roijen” tanggal 7 Mei 1949. Dalam Pasal 1 penyataan ketua delegasi Indonesia, TNI disebut dengan kata-kata “penganut-penganut Republik yang bersenjata”. Penggunaan kata-kata itu menunjukkan bahwa ketua delegasi Indonesia tidak mengakui lagi adanya Angkatan Perang RI yang sampai saat itu masih tetap meneruskan perjuangan, sehingga dunia internasional masih tetap mengakui adanya Pemerintah dan Negara RI, dan bersimpati pada perjuangannya.

  Sudirman mengusulkan kepada Pemerintah Darurat di Sumatra supaya memberi perintah kepada ketua delegasi Indonesia untuk segera mengubah dan mengganti kata-kata “penganut-penganut bersenjata” dengan “APRI” atau “Tentara”.

Sudirman baru hari ini memberikan reaksi terhadap "Pernyataan-pernyataan Rum-Van Roijen" karena jauhnya tempat markas besar TNI dan sukarnya dihubungi karena terus berpindah-pindah. (AT280)

* Di Meulaboh, Aceh, berlangsung upacara pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. Hadir a.l. Residen Aceh T. T. Mohammad Daudsjah, para anggota Badan Eksekutif Dewan Perwakilan Sumatra Utara Amelz dan M. Yunan Nasution, Dr. M. Mahjudin, pejabat sipil dan militer, pemuka masyarakat dan pemimpin perjuangan Aceh Barat.

  Usai pelantikan dilanjutkan dengan pemilihan anggota Badan Eksekutif terdiri dari:

  (1) Nashiruddin Daud Pane

  (2) Tgk. Hasan Hanafiah

  (3) Djamaluddin

  (4) A. Murad Baden. (TS161)

* Dalam kawatnya kepada Pengurus Besar Gasida di Kotaraja (sekarang Banda Aceh), para saudagar Indonesia yang tergabung dalam Gasida cabang Langsa menyatakan sanggup menyumbangkan sekurang-kurangnya satu pesawat terbang dll. tanda bakti.

  Sumbangan itu tidak hanya dari para saudagar, tapi juga dari seluruh rakyat Aceh Timur dan Langkat. (TS161)

1949 JUNI 23.

* Pertempuran melawan tentara Belanda terjadi di desa Ngambi, Nguter, Solo. Sukandar gugur. (*PEH88*)

* Jam 10.00: Pelawi, Securai dan Pangkalan Berandan diintai pesawat Catalina, kemudian dihujani peluru biring satu jam lamanya. Akibat serangan itu, 2 orang penduduk tewas, dan 8 orang cedera. (TS162)

* Badan Pembangunan Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) Daerah Aceh mengadakan malam perpisahan dengan rombongan anggota IPPI yang akan berangkat ke Pantai Cermin di Aceh Selatan untuk ambil bagian dalam menggerakkan pembangunan di sana.

Dalam pesannya, Kepala Jawatan Penerangan Sumatra Utara, Osman Raliby, menganjurkan agar di samping pembangunan pertanian, dilakukan juga pembangunan rumah dan gedung yang akan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan.

Ketua IPPI Daerah Aceh, Jahja Zamzamy, mengharapkan agar rekan-rekannya yang akan berangkat itu melakukan pembangunan dengan giat.

Mewakili ke-50 pemuda-pemudi IPPI tersebut, Yusda mengucapkan pidato perpisahan, dan berjanji akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Akhirnya Pimpinan Jawatan Pembangunan dan Pemuda Daerah Aceh, Muhammad Z. Z. menyampaikan beberapa nasihat kepada para pemuda yang akan bertugas tersebut. (TS161-162)

* Di Sigli berlangsung pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Pidie oleh Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatra Utara. Sebagai anggota Badan Eksekutif terpilih Ibrahim Abduh, Teungku Harun, Haji Abdullah Adik, dan Ajub Samy.

  Usai melakukan kunjungan ke Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tengah, dan Aceh Pidie, Komisaris Pemerintah Mr. S. M. Amin bersama rombongan kembali ke Kotaraja. Sementara itu satu rombongan Badan Eksekutif Dewan Perwakilan Rakyat Sumatra Utara melakukan pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Selatan. (TS161-162)

* Malam: Rapat umum untuk menyambut rombongan Wakil Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatra pimpinan Residen T. T. Mohammad Daudsjah diadakan di Tapaktuan, dihadiri oleh penduduk Tapaktuan dan sekitarnya.

  Residen Daudsjah memberikan beberapa petunjuk, sedangkan anggota Badan Eksekutif Provinsi Sumatra Utara M. Yunan Nasution memberikan pandangan umum mengenai berbagai masalah perjuangan dan pemerintahan. (TS162)

1949 JUNI 24.

* Hari ini adalah tanggal penarikan tentara Belanda dari daerah Keresidenan

Yogyakarta menurut Persetujuan Rum-Roijen yang ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel des Indes, Jakarta.

Tentara Belanda mengundurkan diri tanpa insiden apapun. Penduduk Yogyakarta dilarang keras keluar rumah atau berada di jalan-jalan. Gedung-gedung penting segera dijaga oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Sultan Hamengkubuwono IX sebagai koordinator keamanan menjamin keamanan dan ketertiban di daerah Yogyakarta seluruhnya apabila tentara Belanda telah mengosongkan daerah tersebut. (*AL92, 94*; S6 70; SP65)

* Di gedung Jamiatul Chairiah Tapaktuan berlangsung sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan, dipimpin oleh Bupati M. Husin.

  Dalam pidato pembukaannya Bupati menjelaskan susunan pemerintahan dari masa lalu hingga saat pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan Peraturan Keresidenan Aceh No. 3, paling akhir pembentukan Dewan Perwakilan dengan Badan Pekerjanya, dan perubahan-perubahan yang dibawa oleh Peraturan Gubernur Sumatra Utara No. 5 yang berlaku sekarang.

  Residen T. T. Mohammad Daudsjah mewakili Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatra Utara melantik para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan, sesudah itu dilakukan pemilihan anggota Badan Eksekutif yang terdiri atas (1) A Ghafur Achier, (2) Nja' Diwan, (3)Tgk. Zamzami Jahja, dan (4) T. Zulkifli. (TS162-164)

* Selesai melantik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, rombongan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatra Utara mengunjungi Desa Pemuda di Pantai Cermin, Aceh Selatan, dalam perjalanan kembali ke Kotaraja (sekarang Banda Aceh).

  Dalam pidatonya Residen Daudsjah menggambarkan pentingnya usaha pembangunan di segala bidang, yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ia menyampaikan penghargaan Pemerintah terhadap usaha pembangunan Desa Pemuda tersebut, dan mengajak segenap lapisan masyarakat untuk turut serta dalam perjuangan pembangunan, terutama untuk masa sekarang dan masa depan, ketika bangsa kita harus sanggup mengusahakan kebutuhan sendiri dalam berbagai keperluan.

Anggota Badan Eksekutif M. Yunan Nasution menjelaskan pentingnya usaha pertanian yang sedang digerakkan oleh Desa Pemuda bagi keperluan negara kita yang masih muda ini.

Rombongan meninggalkan tempat setelah melakukan peninjauan. (TS164)

* Malam: Di Meulaboh berlangsung pertemuan khusus antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat, pamong praja, dan Pimpinan Tentara dengan rombongan Wakil Komisaris Pemerintah Pusat.

  Dalam kesempatan tersebut anggota Badan Eksekutif Amelz menjelaskan tentang berbagai perubahan dalam pemerintahan, sedangkan M. Yunan Nasution menguraikan masalah sekitar Persetujuan Rum-Roijen.

  Residen T. Daudsjah yang mewakili Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatra Utara menyampaikan pemandangan umum mengenai berbagai masalah pemerintahan, perjuangan, dan kemasyarakatan. (TS161)

1949 JUNI 25.

* Tentara Belanda mulai ditarik dari Wonosari di selatan Yogyakarta, dalam iring-iringan truk tentara yang dikawal tank dan kendaraan lapis baja.

  Peristiwa itu disaksikan oleh Sultan Hamengkubuwono IX, komandan tentara Belanda di Yogyakarta Kolonel van Langen, para peninjau militer dari United Nations Commission for Indonesia (UNCI, Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia), dan para wartawan dalam dan luar negeri.

  Tidak terjadi kekacauan apapun sesudah itu. (*LUxx; PSPB2 27*)

* Perwari cabang Kotaraja (sekarang Banda Aceh) menyelenggarakan Pasar Derma di Taman Pelipur untuk mengumpulkan dana yang akan disumbangkan kepada penduduk Yogyakarta.

  Malam ini acara khusus diperuntukkan para undangan dan anggota Perwari, sedangkan malam besok diperuntukkan umum. (TS164)

* Panitia Pusat Penyokong Yogya dan Pengurus Besar Gasida mengadakan pertemuan dengan para saudagar di Kotaraja dan membentuk Panitia Penyokong Yogya cabang Kotaraja dengan Ketua I T. Djohan. (TS164)

* Satu peleton tentara Belanda diturunkan di Kampung Perlis dekat Pangkalan Berandan oleh sebuah kapal perang jenis korvet. Di sana dua jam lamanya mereka menanyai penduduk tentang keadaan pertahanan Republik. (TS165)

1949 Juni 26.

* Mayor Achmadi menerima perintah Siasat No. 447/VI/M.P2S/Ps-49 dari Gubernur Militer DMI II Kolonel Gatot Subroto yang isinya instruksi agar pasukan mengadakan serangan terus-menerus baik siang maupun malam. Isi perintah tersebut dilaksanakan oleh rayon-rayon militer dengan menyerang pos-pos dan patroli-patroli Belanda. (*PEH19*)

1949 Juni 27.

* Jam 17.15: Tiga pesawat musuh jenis Mustang menyerang Pangkalan Berandan dan Pelawi dengan bom dan tembakan senapan mesin. Banyak bangunan mengalami kerusakan, tapi korban manusia tidak ada. (TS165)

1949 Juni 29.

* Jam 08.00: Pasukan Belanda meninggalkan kota Yogyakarta.

  Jam 09.00: Batalion 1 Brigade 10 Tentara Nasional Indonesia (TNI) pimpinan Suharto berbaris memasuki bagian selatan Yogyakarta yang sejam sebelumnya ditinggalkan oleh pasukan Belanda. Selanjutnya sepanjang hari itu pasukan Belanda pun meninggalkan bagian-bagian lain Yogyakarta, dan satu demi satu posisinya digantikan oleh Pasukan TNI dan Brigade Mobil Kepolisian Negara.

  Pada hari ini selama 24 jam penduduk Yogyakarta diharuskan tinggal dalam rumah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. (BS52; HA178; *KU122*; *LUxx*; *LU t.h.*; *PEH88*; WG191)

* Tentara Belanda mengosongkan daerah Yogyakarta sebagai awal pemulihan Pemerintah Republik. Dengan demikian, hanya sekitar enam bulan Belanda berhasil menduduki daerah *de facto* Republik. (HR231; MMK221)

* Komandan Tentara Belanda Van Langen menyatakan kepada koresponden istimewa *Aneta* di Yogyakarta berkenaan dengan penarikan tentara Belanda dari Yogyakarta: “Segala sesuatunya berlangsung menurut rencana, dan sampai sekarang tidak terjadi insiden.” (TS165)

* Berita *RRI* Kotaraja (sekarang Banda Aceh) dan Radio Rimba Raya di pedalaman Aceh mengenai masuknya kembali Tentara Nasional Indonesia ke Yogyakarta yang ditinggalkan oleh tentara Belanda diterima rakyat Aceh dengan gembira. Di tempat-tempat umum terjadi pembicaraan ramai mengenai berkuasanya kembali TNI di ibu kota negara RI. (TS165)

* Jawatan Pembangunan dan Pemuda Sumatra Utara mengumumkan: Untuk menjalankan keputusan Komisi Teknik Desa Pemuda yang bersidang bulan Maret yang lalu, akan dibuka Desa Pemuda berturut-turut di tiap kabupaten.

  Dimulai di Aceh Besar dengan pembukaan Desa Pemuda di Telaga Tujuh, disusul di Aceh Selatan dengan Desa Pemuda di Pantai Cermin, dilanjutkan dengan Desa Pemuda di Ulee Gle, Kenegerian Bandar Dua, Kewedanaan Meureudu.

  Jawatan Pembangunan dan Pemuda memanggil para pemuda yang ahli dalam bidang masing-masing untuk menyumbangkan tenaga dalam pembangunan Desa Pemuda tersebut. (TS165)

1949 JUNI 30.

* Tentara Belanda selesai mengosongkan Keresidenan Yogyakarta, Pemerintah Republik Indonesia (RI) dipulihkan di situ, dan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengambil alih tanggung jawab atas keamanan dan ketertiban. Dengan demikian Yogyakarta berada kembali di bawah pengawasan langsung Sultan Hamengkubuwono IX, Menteri Negara dalam Kabinet Hatta.

  Berakhir pula pembuangan Sukarno-Hatta semenjak mereka ditawan Belanda pada Aksi Militer II 19 Desember 1948. (AT281; LM52; RKZ105; RM165; SP67)

* Dr. G. S. S. J. Ratulangie meninggal di kediamannya di Jalan Asem Baru, Jakarta, dalam usia 59 tahun karena sakit jantung. (Ia lahir di Tondano,

Sulawesi pada 5 November 1890.) Beberapa hari kemudian jenazahnya diberangkatkan ke Minahasa untuk dimakamkan di sana. (*LUxx*)

* Kantor berita *Aneta* mengabarkan, jalan pemindahan pasukan Belanda kelihatan sama saja dengan hari-hari sebelumnya. Serombongan tentara Belanda berbaris perlahan-lahan di bawah perlindungan tank-tank meninggalkan Yogyakarta yang sepi. Sebuah jip Komisi PBB untuk Indonesia berjalan kian kemari.

  Di Aceh berita ini disiarkan oleh harian *Semangat Merdeka*. *Semangat Merdeka* memberitakan pula bahwa menurut *All India Radio* di New Delhi, Tentara Nasional Indonesia telah kembali menjaga keamanan di Yogyakarta.

  Berkenaan dengan berita tersebut, Jawatan Penerangan Sumatra Utara mengadakan penerangan serentak di seluruh Aceh dan menjelaskan peristiwanya secara kronologis, untuk menghilangkan keragu-raguan masyarakat. (TS166)

* Pesawat-pesawat musuh jenis Mustang kembali menyerang daerah Gebang, Pelawi, Securai, Palu Manis, Pangkalan Berandan, dan sekitarnya. Pasukan pertahanan kita menghalaunya dengan tembakan meriam. (TS166)

1949 JUNI (AKHIR).

* Sepasukan Tentara Pelajar (TP) dari Sektor III Rayon I berhasil menyerang kubu pertahanan Belanda di jembatan Cluringan dan merampas satu *bren* dan dua *Lee Enfield*. (*PEH19*)

***

(Akhir Juni 1949)

JULI 1949

1949 JULI.

* Gerilya Solo melucuti Polisi Keraton dan berhasil merampas 30 pucuk senapan. (*PEH89*)

1949 JULI 1.

* Hari ini adalah hari dikembalikannya Republik ke Yogyakarta oleh Belanda, menurut Persetujuan Rum-Roijen yang ditandatangani di Hotel des Indes, Jakarta, pada 7 Mei 1949. (*AL92*; S6 70)

* Belanda menambah pasukannya di daerah *Wehrkreise* (kabupaten) Surakarta dengan kekuatan 3 batalion. (*PEH88*)

* Di bekas Taman Pelipur di Kotaraja (sekarang Banda Aceh) dibuka resmi Taman Kesatria, tempat para perwira dan prajurit melepaskan lelah, makan-minum, dan menenangkan pikiran.

  Pengguntingan pita dilakukan oleh Gubernur Militer Tgk. Muhd. Daud Beureueh dalam suatu upacara resmi yang dihadiri oleh para pejabat pemerintahan sipil dan militer, serta pemimpin masyarakat.

  Komandan Militer Kota, Said Usman, selaku Ketua Panitia Penyelenggara mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang diterimanya untuk

melengkapi taman tersebut, kemudian mempersilakan Kepala Staf TNI Divisi X Letnan Kolonel Tje' Mat Rahmany membentangkan maksud pembukaan taman tersebut.

Selanjutnya Jenderal Mayor Tgk. Muhd. Daud Beureueh selaku Panglima TNI Divisi X memberikan arahan kepada para perwira dan prajurit supaya menggunakan dan memelihara Taman Kesatria dengan baik, dengan mengutamakan adat-istiadat timur.

"Saya tidak melarang sesuatu perkara yang datang dari Barat itu. Boleh kita tiru dan boleh kita kerjakan, asal saja tidak menjatuhkan kita ke lembah kerendahan budi kesopanan. Yang baik boleh kita tiru dan yang buruk hendaklah kita buang."

Akhirnya Komisaris Pemerintah Mr. S. M. Amin mengajak agar selagi bergembira dan melepaskan lelah, kita tidak lupa meneruskan perjuangan, "karena perjuangan itu adalah tanggung jawab kita bersama yang sangat penting". (TS169)

* Batalion VI Resimen Tentara Pelajar Islam (TPI) Aceh dipindahkan ke Langsa, agar apabila keadaan di front bertambah genting, dengan cepat pasukan dapat digerakkan.

  Batalion I di Kotaraja dipimpin T. Abdullah Mahmud dan Wakil Komandan Husin Ahmad.

  Batalion II di Sigli dipimpin A. Gani Hasan dan Wakil Komandan Ishak Ibrahim dan Ishak Ben.

  Batalion III di Bireuen dipimpin Junus Hasan dan Wakil Komandan Said Umar.

  Batalion IV di Meulaboh dikomandani A. Djalil Mahmud.

  Batalion V di Susoh (Aceh Selatan) dikomandani Muchsinsjah.

  Batalion VI di Lhokseumawe dikomandani Husin H. A.

  Kompi Istimewa I di Langsa dikomandani Isa Bugis.

  Kompi Istimewa II di Takengon dikomandani Abubakar Mizan. (TS169)

1949 JULI 2.

* Malam: Di gedung Sekretariat Gasida Langsa berlangsung rapat pembentukan badan pembantu pemerintah dan rakyat di Yogyakarta.

Pemimpin rapat, Ismail Usman, membentangkan maksud dan tujuan rapat tersebut, kemudian rapat memutuskan membentuk Panitia Penolong Pemerintah Pusat dan Rakyat di Yogyakarta dengan Ketua Umum Ismail Usman, Ketua I Abd. Aziz Husin, dan Ketua II Hasan Permai. (TS170)

1949 JULI 3.

* Gerilya Solo merebut bren Belanda di jembatan Cluring, Sukoharjo. (*PEH88*)

1949 JULI 4.

* Utusan Republik—Mohammad Natsir, Dr. J. Leimena, dan Dr. Halim—pergi ke Bukittinggi untuk melakukan kontak dengan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra. (*LUxx*)

* Di Muntok, Bangka, diadakan malam perpisahan dengan para pemimpin Republik oleh Panitia Penolong Pembangunan Republik Indonesia. (*KU122*)

* Di Pangkalpinang, juga di Bangka, diadakan pertemuan antara para pemimpin Republik dengan rakyat.

  Dalam kesempatan itu rakyat Bangka menyumbangkan uang sebesar *f*90.000 dan barang-barang lain kepada Presiden Sukarno. (*KU122*)

* Badan Eksekutif Dewan Perwakilan Rakyat Sumatra Utara mengumumkan bahwa sehubungan dengan adanya Ketetapan Pemerintah Darurat Republik Indonesia 16 Mei 1949 No. 21/Pem/PDRI dan 7 Mei 1949 No. 22/Pem/PDRI, maka susunan Badan Eksekutif Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatra Utara mengalami perubahan pula. (TS171)

1949 JULI 5.

* Berkenaan dengan peresmian pembukaan Kursus Bahasa Inggris di kantor Gasida cabang Kotaraja (sekarang Banda Aceh), Ketua Gasida M. Djuned Js mengharapkan kepada para pemuda dan saudagar peserta kursus agar mereka belajar dengan tekun dan jangan patah semangat di tengah jalan.

  Pengajar M. Rously menekankan bahwa bahasa asing seperti bahasa Inggris itu sangat penting bagi kita sebagai alat memperoleh ilmu penge-

tahuan. Banyak buku ditulis dalam bahasa Inggris, karena itu marilah kita sediakan payung sebelum hujan, demikian dikatakannya. (TS171)

1949 JULI 6.

* Jam 12.35: Dengan pesawat DC-3 dari United Nations Commission for Indonesia (UNCI, Komisi PBB untuk Indonesia) Sukarno-Hatta dan pemimpin-pemimpin Republik Indonesia (RI) yang lain tiba kembali di Yogyakarta dari pengasingan di Bangka.

  Sultan Hamengkubuwono IX yang tak pernah mau bekerja sama dengan Belanda dan terus memimpin perjuangan dari keraton, menjadi orang pertama yang menjabat tangan Presiden, disaksikan oleh wartawan dalam dan luar negeri, juga para anggota Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia.

  Ratusan ribu rakyat berjejal-jejal menyambut para pemimpin yang menumpang dua mobil mulai dari lapangan Maguwo sampai istana: Mobil pertama membawa Presiden Sukarno yang didampingi Sri Sultan Hamengku Buwono IX, mobil kedua membawa Wakil Presiden Mohammad Hatta yang didampingi Sri Paku Alam. Di sepanjang Jalan Malioboro mereka mengucapkan pekik "Merdeka" kepada Presiden dan Wakil Presiden, dan kedua pemimpin yang tegak berdiri di mobil membalasnya dengan pekik "Merdeka" juga.

  Sesampai di istana, Presiden menerima persembahan Merah-Putih untuk dikibarkan kembali.

  "Tetapi dalam kemeriahan itu dua tokoh utama yang memimpin perjuangan ketika para pemimpin Republik ditawan belum datang. Dalam suasana kemeriahan ini," kata Simatupang, "Yogyakarta menunggu kedatangan Sjafruddin Prawiranegara dan Sudirman."

  Di depan massa yang menyambutnya, Presiden Sukarno menyatakan: "Ada dua faktor yang memungkinkan Pemerintah RI kembali ke Yogyakarta, yang pertama kekuatan dan keuletan rakyat; dan yang kedua, Bantuan dunia internasional." (*AL96,107*; BHS46; *KU122*; LM52; *LUxx*; MMK87; *PEH88*; *PSPB2 28*; RKZ105; SSA18,42; TS173; WG185,191; *Suara Karya*, 19 Desember 1996)

* Atas inisiatif P4RD (Panitia Penolong Pemerintah Pusat dan Rakyat

Djokjakarta) kembalinya Pemerintah Republik di Yogyakarta disambut meriah di Langsa, ibu kota Kabupaten Aceh Timur.

Pagi-pagi di seluruh kota sudah dikibarkan Merah-Putih. Rumah-rumah, kantor-kantor, dan toko-toko dihias dengan berbagai gaba-gaba. Dan, di persimpangan jalan bergantungan semboyan: “Bantulah, berkorbanlah untuk menunjang pembangunan ibu kota Yogyakarta”.

Jam 09.00 kedengaran bunyi sirene, diikuti bunyi lonceng di stasiun, dan bunyi beduk di kampung-kampung.

Malam: Berlangsung rapat raksasa dengan puluhan ribu hadirin, penduduk kota Langsa dan desa-desa di sekitarnya. Ketua P4RD yang juga Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur, Ismail Usman, menjelaskan bahwa P4RD adalah badan milik bersama, bukan hanya milik kaum saudagar.

Bupati Aceh Timur dengan panjang lebar menguraikan tentang keadaan tanah air saat terakhir dan tentang kedudukan Pemerintah RI.

Kemudian Komandan Resimen V TNI menyerukan agar kita memperkuat serangan gerilya, supaya posisi delegasi Indonesia dalam perundingan dengan Belanda lebih kuat.

Dr. I Made Bagiastra mengajak hadirin mengenangkan penderitaan rakyat Yogyakarta. Ia anjurkan supaya masyarakat di sini lebih giat menyokong P4RD dengan bahan yang ada pada kita masing-masing.

Rapat kemudian mengambil resolusi yang isinya a.l.: Demi kelancaran dalam mewujudkan Statemen Rum-Roijen, hendaknya pihak Belanda di Sumatra pun:

1. Mengembalikan ibu kota Pemerintah Republik Indonesia di Sumatra, Bukittinggi, kepada Pemerintah Republik Indonesia;
2. Mengosongkan daerah Keresidenan Sumatra Barat dari pemerintah dan tentara Belanda. Dan, hendaknya segenap warga negara Indonesia tidak henti-hentinya menuntut penarikan mundur segera tentara Belanda dari seluruh Indonesia. (TS173-174)

* Oleh Pimpinan Eksploitasi Kereta Api Sumatra Utara di Kotaraja (sekarang Banda Aceh), Aceh, diumumkan bahwa mulai hari ini ongkos penumpang, barang dll. yang tersebut dalam daftar tarif kereta dinaikkan lima kali lipat dari ongkos yang berlaku sekarang. (TS173)

1949 JULI 7.

* Jam 14.05: Pesawat yang membawa Bung Karno, Bung Hatta, Hj. A. Salim, Mr. Assaat, Komodor Suryadarma, Mr. A. G. Pringgodigdo dan Ali Sastroamidjojo mendarat di Maguwo dari Bangka. Penjemputan oleh para pembesar dan rakyat sangat meriah. (AT282)

* Di gedung negara diadakan upacara singkat penyambutan rombongan para pemimpin RI dari Bangka. Wakil ketua panitia penyambutan Tedja Sukmana memberikan ucapan selamat datang.

  Dalam jawabannya Bung Karno menegaskan bahwa:
  "Kembalinya Pemerintah ke Yogya adalah nyata bahwa perjuangan kemerdekaan harus dilanjutkan. Dua faktor terutama yang memungkinkan kembalinya Pemerintah itu, ialah kekuatan dan keuletan rakyat dan bantuan dunia internasional.

  ...lebih daripada yang sudah-sudah kita harus insaf hendaknya bahwa hanya dengan persatuan yang menjadi sendi perjuangan kita, akan dapat tercapailah cita-cita kita." (AT282)

* Jenderal Sudirman dijemput untuk kembali ke Yogyakarta dari daerah Wonosari oleh Letnan Kolonel Suharto, Rosihan Anwar, dan Frans Sumardjo Mendur dari IPPHOS.

  Pagi-pagi: Perjalanan Malioboro-Wonosari ditempuh dengan jeep yang disetiri oleh Suharto, diteruskan dengan sepeda sepanjang hari lewat Gunung Kendeng.

  Jam 21.00: Sepeda ditinggal, dan perjalanan diteruskan dengan jalan kaki sampai di tempat.

  Rombongan yang mengiringi Jenderal Sudirman terdiri dari a.l. Kapten Tjokropranoto, Letnan Kolonel Suadi, Dr. Irsan, Letnan Heru, Kapten Muhammad dll. (RKU193; RKZ109)

* Panitia Penyokong Yogya mengumumkan di Kotaraja (sekarang Banda Aceh) bahwa di Aceh Barat telah berdiri dua cabangnya, dan di Aceh Selatan masing-masing di Meulaboh, Jeuram, dan Blang Pidie. (TS174)

* Rapat Dewan Pimpinan Daerah GPII (Gerakan Pemuda Islam Indonesia)

Sumatra Utara dan Daerah Aceh di Kotaraja mengambil resolusi yang isinya memperkuat serta mendukung Peraturan Daerah No. 1 tanggal 24 Juni 1946.

Dalam resolusi yang ditandatangani oleh Ketua A. R. Hasjim dan Sekretaris Mudamdy itu dituntut pula supaya diutamakan pembayaran kerugian kepada rakyat akibat Peristiwa Cumbok, terutama kepada anak yatim, orang cedera, dan perempuan janda.

Dituntut pula supaya Pemerintah bertindak terhadap siapa pun yang menghalang-halangi atau merusak nama baik Majelis Penimbang. (TS174-175)

* Indische Nederlandsche Partij dan partai Indo De Blijver dilebur menjadi satu dengan nama Indo Nationale Partij. (*LUxx*)

1949 JULI 8.

* Konsul Jenderal India untuk Indonesia menghadap Presiden Sukarno, disertai Mani. Mani adalah Konsul India untuk Yogyakarta, yang akan segera menggantikan Junus. (*KU122*)

* Pertempuran di Manahan, Solo. Enam serdadu Belanda tewas. (*PEH88-89*)

1949 JULI 9.

* Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) Mr. Sjafruddin Prawiranegara tiba di Jakarta dari Aceh dalam perjalanan ke Yogyakarta memenuhi panggilan Pemerintah Pusat untuk menyerahkan kembali mandatnya selaku Kepala PDRI kepada Presiden.

  Di lapangan udara Kemayoran, Jakarta, ia menerangkan kepada pers bahwa ia akan menyerahkan mandat tersebut. (TS175)

* Dua tank dan empat truk pasukan Belanda beroperasi di Kalioso Utara. (*PEH89*)

* Gerilya Solo menghancurkan jembatan Salam, Kalioso. Marjono dan Muljadi dari TGP (Tentara Genie Pelajar) gugur. (*PEH89*)

* Panglima Tentara Territorium Sumatra (PTTS) Kolonel Hidajat bertolak dari Kotaraja (sekarang Banda Aceh) ke Medan untuk ambil bagian dalam perundingan dengan pihak Belanda mengenai gencatan senjata. (TS175)

* Di Kotaraja dibuka Konferensi PSII Kabupaten Aceh Besar, dihadiri 5.000 orang peserta dan undangan. Hadir juga a.l. anggota Dewan Penasihat Komisariat PSII Mr. S. M. Amin, Tuanku Mahmud, dan Letkol Husin Jusuf.

  Ketua Departemen Penerangan dan Penyiaran PSII M. Abduh Sjam menjelaskan bahwa PSII yang didirikan sejak 1913 dengan langkah tegas tiada henti berjuang.

  Kemudian tampil Mr. S. M. Amin memberikan beberapa nasihat, disusul Tgk. Mariani dari Departemen Wanita PSII. Mariani a.l. menyatakan bahwa suami dalam rumah tangga merupakan Menteri Luar Negeri, sedangkan istri adalah Menteri Dalam Negeri. Akan berbahagialah wanita Indonesia apabila mereka sadar akan kewajiban dan haknya, baik di dalam rumah tangga maupun di tengah masyarakat.

  Pembicara selanjutnya Amir Husin al Mudjahid yang menguraikan sejarah dari jaman ke jaman, diakhiri dengan pidato penutup Letkol Husin Jusuf. (TS175)

1949 JULI 10.

* Rombongan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di bawah pimpinan Perdana Menteri Sjafruddin Prawiranegara datang di Yogyakarta dari Sumatra Barat.

  Bersama Sjafruddin datang juga Menteri Keuangan Mr. Lukman Hakim, Menteri Mohammad Natsir, Menteri Dr. Leimena dan Dr. Halim yang menjemput rombongan PDRI dari Sumatra.

  Datang juga Mr. Susanto Tirtoprodjo, Menteri Kehakiman dan Komisaris Tinggi PDRI di Jawa, dan Mr. Wongsonegoro, Gubernur Jawa Tengah.

  Mereka disambut oleh Presiden Sukarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, Sultan Hamengku Buwono IX, Mr. Mohammad Rum, Mr. Assaat, Mr. Tadjuddin Noor, Ki Hadjar Dewantara, dan pembesar-pembesar lain. (*AL82*; *KU122-3*; *PSPB2 29*; TS177)

* Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta tiba kembali di Yogyakarta dari tempat pengasingannya.

Hari ini juga Jenderal Sudirman berhasil dibujuk oleh Suharto yang menjadi utusan Pemerintah Republik, untuk kembali ke Yogyakarta. Perundingan antara Jenderal Sudirman dengan komandan brigadenya berlangsung berjam-jam, tetapi akhirnya Sudirman bersedia kembali dengan syarat bahwa "tentara tetap berada dalam posisi gerilyanya agar dapat kembali bergerak bila ada alasan sekecil apa pun".

Jenderal Sudirman datang dengan ditandu dari daerah gerilya.

Sambutan yang diberikan masyarakat Yogyakarta kepadanya lebih meriah dan mengharukan daripada kepada para pemimpin pemerintahan yang datang sebelumnya. Para prajurit melakukan parade di alun-alun untuk menghormati Panglima Besarnya. Banyak yang terharu dan meneteskan air mata melihat sosok tubuh yang kurus kering di atas podium itu.

Dan bertemulah kembali Presiden Sukarno dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman di tempat mereka berpisah dahulu, pada 19 Desember 1948.

Rosihan Anwar menulis sbb. tentang peristiwa tersebut:

"Tanggal 10 Juli 1949, alun-alun depan keraton, sore hari. Pasukan penghormatan sudah berdiri dengan tertib. Pak Dirman yang siangnya telah memasuki kota Yogya, dan bertemu dengan Bung Karno dan Bung Hatta di Kepresidenan, berjalan kaki perlahan-lahan memeriksa barisan pasukan. Ia diiringi oleh Letkol Soeharto dan Kolonel Suhud.

Mr. Sjafruddin Prawiranegara, kepala Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang sudah tiba dari Sumatra, hadir di upacara di alun-alun itu dan berjalan bersama-sama Pak Dirman. Juga Mr. Lukman Hakim, seorang menteri dari PDRI turut serta. Suasana upacara menyambut kembalinya Pak Dirman di alun-alun itu berlangsung secara sederhana, azmat, dan penuh persaudaraan. (*AL82*; AT283; HA179; *KU123*; RMU173,177)

* Jam 12.00: Panglima Besar Sudirman menemui Presiden Sukarno di Istana Yogyakarta. Dalam kesempatan itu Sukarno memeluk Sudirman, suatu peristiwa yang mengisyaratkan bahwa Angkatan Bersenjata tunduk kepada Pemerintah Sukarno dan bersedia menerima persetujuan yang akan dicapai dengan Belanda. (BHS46; TS177)

Setelah diterima oleh Presiden, Jenderal Sudirman menghadiri upacara kemiliteran di Alun-alun Utara, tempat ia disambut oleh para Menteri,

Kepala PDRI, pembesar sipil dan militer lain. Disusul acara memeriksa barisan kehormatan.

Dalam sambutannya Jenderal Sudirman mengucapkan terima kasih atas penjemputan dan penyambutan rakyat dan para pembesar yang diberikan kepada dirinya dan para pengawalnya. Ia mengakhiri pidatonya dengan kata-kata: "Marilah kita berjuang terus, walaupun menghadapi segala macam soal, karena korban sudah cukup banyak." (TS177)

* Panglima Tentara Komando Sumatra Kolonel Hidajat mengeluarkan Surat Penetapan yang menyatakan bahwa barang-barang yang baru-baru ini dimasukkan lagi oleh Mayor John Lie dari luar negeri harus dibagikan kepada Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara di Aceh, sesuai urgensi kebutuhan masing-masing.

  Barang-barang itu a.l. berupa persenjataan modern seperti *stengun*, *jungle carbine*, F.N. Browning, mortir, hampir 100 granat tangan, sekitar 3.620 peluru berbagai ukuran dan jenis, 5 *stengun magazine*, kain bahan pakaian dll. (TS175-177)

* Jawatan Penerangan Sumatra Utara di Kotaraja (sekarang Banda Aceh) mencetak puluhan ribu lembar selebaran yang memuat pesan Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman ia kembali ke Yogyakarta agar kita "berjuang terus karena korban sudah cukup banyak". (TS177)

* *Speedboat* A.66 di bawah Mayor J. Simon yang memuat minyak sawit, getah dan kuningan untuk dibawa ke Malaya dari pelabuhan Limau Mungkur (Serang Jaya) disergap patroli Belanda, diseret ke Belawan, muatannya disita, dan anak buahnya diperiksa. (TS179)

1949 JULI 11.

* Sabtu jam 18.00: Rombongan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) tiba di lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta, terdiri dari Mr. Sjafruddin Prawiranegara (Kepala PDRI), Mr. Lukman Hakim (Menteri Keuangan), dan Danusubroto (Sekretaris PDRI). (*AL98*; HA178)

* Negara Indonesia Timur (NIT) memberikan sumbangan tekstil dan obat-obatan seberat 15 ton kepada Pemerintah Republik Indonesia (RI). (*LUxx*)

* Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo mengeluarkan Surat Perintah No. 242/GM/49 berisi perintah kepada Komandan Baterai II di Rantau, Kuala Simpang, agar memberikan bantuan kepada Mayor John Lie dalam memasukkan barang-barang kebutuhan perjuangan lewat Kuala Seruwai atau Serang Jaya di Aceh Timur.

  Diperintahkan pula supaya "Barang-barang apa saja yang dimasukkan melalui pelabuhan-pelabuhan tersebut, diterima dan diserahkan kepadanya". (TS179)

1949 Juli 12.

* Panglima Komando Sumatra, Kolonel Hidajat, ditunggu kedatangannya di Yogyakarta hari ini dari Kotaraja (sekarang Banda Aceh) yang menjadi posnya selama ini. (TS179)

* Gerilyawan Tory Biantoro *nyengklak* (melompat ke) truk Belanda di Kleco, Solo, dan merebut bren. (*PEH89*)

* Pertempuran di Pasar Legi, Solo. (*PEH89*)

* Pesawat perusahaan penerbangan Belanda KLM "*Franeker*" jatuh dan terbakar di dekat lapangan terbang Jonta Cruz dekat Bombay, India, hingga seluruh penumpangnya tewas.

  Mereka antara lain adalah 13 dari 15 wartawan Amerika yang selesai berkunjung ke Indonesia.

  Selama di Indonesia mereka sempat berkunjung pada para pemimpin Republik Indonesia (RI) yang berada dalam tawanan Belanda di Bangka (21 Juni 1949).

  Pesawat itu jatuh dalam perjalanan ke Negeri Belanda. (*AL100; LUxx; PEH89*)

1949 Juli 13.

* Mr. Sjafruddin Prawiranegara selaku Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) menyerahkan kembali mandat kepada Pemerintah Republik Indonesia (RI), disusul kedatangan Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Pemerintah Darurat Pulau Jawa yang diwakili oleh Mr. Susanto Tirtoprodjo dan J. Kasimo.

Sebelum sidang dimulai, hadirin mengheningkan cipta untuk almarhum Menteri Supeno yang telah gugur dalam gerilya pada 24 Februari 1949.

Dilanjutkan dengan sidang kabinet yang pertama sejak Agresi Militer II Belanda, dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta. Mr. Sjafruddin mengikuti sidang ini sebagai Menteri Kemakmuran, jabatannya yang lama dalam Kabinet Hatta sebelum Yogyakarta diduduki oleh Belanda.

Ketika menyerahkan kembali mandat kepada Wakil Presiden/Perdana Menteri, Ketua PDRI mengucapkan kata-kata yang patut dikenang sbb.:

"PDRI tidak menentukan sikap terhadap persetujuan Rum-Van Roijen. PDRI menyerahkan putusan mengenai persetujuan itu kepada Kabinet, BP KNIP dan Pimpinan Angkatan Perang. Akibat-akibat dari putusan yang akan diambil akan dipikul bersama."

Ia katakan juga, bahwa Sumatra dapat bertahan dari serangan-serangan gencar Belanda, sedangkan Aceh merupakan benteng *waja* yang tidak bisa ditembusi.

Dalam sidang ini juga diputuskan untuk mengangkat Sultan Hamengku-buwono IX sebagai Menteri Pertahanan menggantikan Mohammad Hatta, merangkap Menteri Pembangunan/Pemuda dan jabatannya yang lama sebagai Koordinator Keamanan Dalam Negeri. (AT283; *KU123*; LM53; *LUxxi*; *LU t.h.*; MA288; RKZ110; TS180)

* Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) bersidang. Mayoritas anggota mendukung diterimanya Persetujuan Rum-Roijen. (RKZ110)

* Mr. Sjafruddin Prawiranegara menyerahkan kembali mandat untuk membentuk PDRI kepada Presiden Sukarno di Yogyakarta. (Hasjim Djalal "Mengenang Dubes Palar dan Diplomasi Indonesia, *Kompas*, 16 Agustus 2002)

* Pesawat Komisi PBB untuk Indonesia yang membawa Anggota Staf Umum Tentara Nasional Indonesia Mayor Harjono akan berangkat dari Jakarta menuju Kotaraja (sekarang Banda Aceh) untuk menjemput Panglima Sumatra Kolonel Hidajat dari Kotaraja, demikian disiarkan oleh Radio Medan hari ini.

Penjemputan itu adalah atas perintah Panglima Besar Jenderal Sudirman. (TS180)

* Dikabarkan oleh kantor berita *Aneta* bahwa iring-iringan pasukan perbekalan tentara Belanda telah diserang dengan mitraliur dan mortir di dekat Telaga, Sumatra Timur, oleh pasukan dari Aceh. Seorang tentara Belanda tewas, dan 3 orang lainnya luka-luka.

  Sementara itu menurut Jawatan Penghubung Tentara Belanda di Jakarta, enam orang tentara Belanda telah hilang, di antaranya seorang dokter dan seorang juru rawat. Diduga, mereka diculik. Dalam peristiwa tersebut, dua kendaraan bermotor terbakar. (TS180-181)

1949 JULI 14.

* Kabinet Republik Indonesia (RI) menerima Persetujuan Rum-Roijen. (*LUxxi*)

* Anggota Komisi PBB untuk Indonesia dari Australia, Belgia, dan Amerika tiba dengan pesawat di Kotaraja (sekarang Banda Aceh) hari ini dan mendapat sambutan resmi dari pejabat sipil dan militer setempat. (TS181)

* Kolonel Hidajat, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) seluruh Sumatra, bertolak ke Yogyakarta dengan pesawat Komisi PBB untuk Indonesia, untuk memberikan laporan kepada Pemerintah Pusat.

  Ikut dalam rombongannya: perwira-perwira TNI, AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia), dan Mr. Hadi dari Kementerian Kehakiman Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).

  Di lapangan terbang Blang Bintang, Panglima Hidajat dilepas oleh para perwira semua angkatan yang berkedudukan di Kotaraja, para pejabat pemerintah, dan pemimpin perjuangan. (*AL98*; TS181-182)

* Pertempuran di Wonosari. Enam anggota TP (Tentara Pelajar) gugur: Sumito, Woworo Murdono, Murmanto, Supojo, dan Boy Surjatmanto. Di pihak Belanda sembilan tewas dan beberapa orang luka. (*PEH89*)

* Tentara Belanda melakukan operasi ke desa Tlatar, Simo. (*PEH89*)

* Belanda menghentikan aksi militernya yang kedua terhadap Republik Indonesia. (SDA108)

* Diumumkan oleh Panitia Penyokong Yogya cabang Kotaraja bahwa mulai 9 Juli 1949 di kota itu disediakan 12 celengan dari kaleng warna coklat dengan tulisan putih "Panitia Penjokong Djokja Tjabang Kutaradja", dengan nomor urut dari 1 sampai 12.

  Tiap 10 hari ke-12 celengan tersebut akan dibuka isinya oleh Bendahari Panitia. (TS181)

1949 JULI 15.

* Utusan Negara Indonesia Timur (NIT) Jahja dan Ny. Warouw diterima oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta untuk menyerahkan sumbangan NIT kepada Republik Indonesia (RI) berupa tekstil, susu, sepatu dll. seharga *f*83.000,00. (*LUxxi*)

* Di Jakarta dibuka pertemuan "Kebangsaan" atas usaha Gabungan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia (Gabki). (*LUxxi*)

* Gerilya Solo menyerang TBS (*Territoriaal Bataljon Surakarta*, pasukan yang dibentuk Belanda) dan berhasil merebut 120 pucuk senapan berbagai tipe, termasuk melarikan sejumlah anggota TBS beserta keluarganya ke luar kota (Jenggrik). (*PEH89*)

1949 JULI 16.

* *Bijeenkomst voor Federaal Overleg* (BFO) menyetujui usul Presiden Sukarno untuk menyelenggarakan Konferensi Inter-Indonesia, sebagian di Yogyakarta, dan sebagian lagi di Jakarta. (*KU123*)

* Zending Islam Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Langkat menerbitkan majalah tengah bulanan *Menara*, dipimpin oleh Zainal Arifin Abbas. Majalah ini memuat tulisan-tulisan di bidang ilmu pengetahuan, sejarah, agama, politik, ekonomi, sosial, perjuangan, dll.

  Dalam kata pengantar redaksi disebutkan bahwa di Indonesia telah tumbuh paham komunisme dan sosialisme yang belum menanam modal

untuk kemerdekaan Indonesia sebanyak modal yang telah ditanam oleh golongan Islam dll. Mereka itu hendak membelokkan perjuangan ke arah yang lain. Dijelaskan bahwa maksud dan cita-cita penerbitan itu adalah untuk menjunjung tinggi perintah Tuhan dan meluruskan arah perjuangan. (TS182-184)

* Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo mengeluarkan Ketetapan No. 247/GM/49 berisi ketetapan bahwa mulai hari ini daerah Perusahaan Tambang Minyak RI Sumatra Utara dibagi dua, yaitu Resor Pertama dan Resor Kedua, dengan Pemimpin Umum Tgk. Amir Husin al Mudjahid.

  Resor Pertama meliputi Langsa, Rantau Kuala Simpang, Pangkalan Berandan, dan Pangkalan Susu (Langkat) dengan Wakil Pemimpin Umum Djohan. Resor Kedua meliputi Peureulak sampai Kotaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Wakil Pemimpin Umum Abdurrachman.

  Dengan ketetapan ini, maka ketetapan sebelumnya dibatalkan. (TS184)

1949 JULI 17.

* Kabinet Negara Pasundan terbentuk dengan Perdana Menteri Mr. R. Djumhana Wiriaatmadja. (*LUxxi*; *lj*. 10 Januari 1949)

* Radio Medan memberitakan: Panglima Angkatan Perang RI di Sumatra, Kolonel Hidajat, yang baru tiba di Yogyakarta dari Aceh untuk ambil bagian dalam perundingan gencatan senjata dengan delegasi Belanda, menerangkan bahwa pelaksanaan gencatan senjata di Sumatra sulit sekali.

  Itu disebabkan karena jarak daerah dan kedudukan antarkesatuan cukup jauh, sedangkan alat perhubungan sukar. (TS184)

1949 JULI 18.

* Kabinet Republik Indonesia (RI) memilih wakil-wakilnya untuk Konferensi Inter Indonesia. Terpilih Wakil Presiden Mohammad Hatta sebagai ketua delegasi, dengan anggota Mr. Mohammad Rum, Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), dan pemimpin-pemimpin partai.

  Dibahas juga dalam sidang tersebut:

1. Konsepsi Republik tentang Konferensi Meja Bundar (KMB), yang akan diajukan sebagai usul Konferensi Inter Indonesia; dan
2. Soal Konstituante Republik Indonesia Serikat (RIS) oleh Prof. Dr. Supomo.

Adapun wakil-wakil *Bijeenkomst voor Federaal Overleg* (BFO) a.l. adalah Sultan Hamid, Anak Agung Gde Agung dll. dalam jumlah besar. (*KU123; LUxxi*)

1949 JULI 19.

* Konferensi Inter-Indonesia babak pertama antara para pemimpin Republik Indonesia (RI) dan Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) dibuka di Yogyakarta untuk mencari dan menentukan siasat guna menghadapi Konferensi Meja Bundar (KMB) yang akan dibuka di Den Haag.

  Banyak tamu dari BFO yang baru untuk pertama kali itu mengunjungi ibu kota RI.

  Konferensi yang sudah dirancang sejak para pemimpin Indonesia berada di Bangka itu memperlihatkan bahwa politik *divide et impera* Belanda mengalami kegagalan.

  Dibicarakan masalah bentuk ketatanegaraan dan hal-hal yang bertalian dengan ketatanegaraan Negara Indonesia Serikat (NIS) a.l.:

  - perlunya NIS disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasar demokrasi dan federalisme;
  - bahwa RIS akan dikepalai seorang presiden, dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggungjawab kepada presiden; dan
  - perlunya dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS).

  Konferensi akan berlangsung sampai 22 Juli 1949. Kemudian akan dilanjutkan dari 30 Juli sampai 2 Agustus 1949 di Jakarta. (AT284-285; *LU t.h.*: MA285; *PSPB2 36-37*; S6 70-71; *Star Weekly*, 13 November 1949:25)

* Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) bersidang untuk mendengarkan keterangan Pemerintah mengenai Statemen Roem-Roijen.

  Sidang itu sendiri mendapat perhatian besar dari masyarakat. Ikut hadir para anggota *Bijeenkomst voor Federaal Overleg* (BFO) yang kebetulan masih ada di Yogyakarta untuk menghadiri Konferensi Inter Indonesia.

Dalam kesempatan itu Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri Mohammad Hatta berkata a.l.:

"Republik sebelum 19 Desember 1948 adalah suatu kenyataan yang tak dapat dihancurkan, adalah simbol kemerdekaan bangsa dan modal untuk menyelenggarakan cita-cita 17 Agustus 1945. Memang, bentuk negara boleh berobah, tetapi tetap dan tak berobah cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi suatu bangsa yang bersatu padu, takkan terpisah-pisah dalam sengsara maupun gembira." (HKP288; *LU t.h.*)

* Tentang politik dalam dan luar negeri, Wakil Presiden mengatakan a.l.: "Kalau sekiranya kita memusatkan perjuangan kita kepada perang gerilya saja, maka presiden dan wakil presiden sebenarnya harus menyingkirkan diri ke luar dengan menghadapi risiko bertemu dengan tentara payung Belanda. Tetapi setelah ditinjau dengan saksama, maka anggota-anggota kabinet dan penasihat pemerintah yang ada di Yogyakarta memutuskan bahwa pemerintah tidak dapat menanggung risiko sebesar itu terhadap dirinya kepala negara dan memutuskan supaya kedua dasar politik tetap dijalankan, yaitu berjuang secara gerilya karena Belanda telah menyerang, dan serentak dengan itu menjalankan dengan aktif politik internasionalnya dengan memajukan soal Indonesia kepada Dewan Keamanan." (HKP279)

* Diadakan sidang Dewan Siasat Militer di Rumah Sakit Panti Rapih, tempat Panglima Besar Jenderal Sudirman dirawat.

  Hadir Panglima Tertinggi/Presiden, Wakil Presiden/Perdana Menteri/Menteri Pertahanan, Panglima Besar, mantan Perdana Menteri Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Dr. J. Leimena yang menjadi ketua delegasi Republik Indonesia (RI) dalam pembicaraan dengan Belanda mengenai gencatan senjata, Panglima Tentara dan Territorium Jawa Kolonel A. H. Nasution, Panglima Tentara dan Territorium Sumatra Kolonel Hidayat, dan Wakil Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) Kolonel T. B. Simatupang.

  Sidang berlangsung hanya satu jam, sesuai nasihat dokter kepada Panglima Sudirman.

  Presiden memberikan penjelasan tentang permintaan-permintaan Panglima Sudirman, dan Panglima Sudirman memberikan saran-saran.

Selanjutnya dibicarakan soal gencatan senjata, penunjukan perwira-perwira yang akan turut dalam pelaksanaan gencatan senjata, dan prospek perundingan dengan BFO di Jakarta tanggal 31 Juni 1949. (MA...)

* Konsul Jenderal Inggris Sir Francis Sepherd yang akan pulang ke negerinya berkunjung pada Presiden di istana Yogyakarta bersama penggantinya A.C. Stewart. (*LUxxi*)

* Menjelang subuh ada laporan bahwa patroli Belanda yang terdiri dari satu scout car dan satu jeep masuk Gembong, kabupaten Pati.

  Komandan Pasukan 051/RL Ronggolawe, Kapten Ali Mahmudi, yang bergerilya di daerah itu langsung memerintahkan kepada Co. I untuk bersiap dan *ready for fire*, sedang ia sendiri mempersiapkan Co. II untuk keluar dari desa dan menempati medan G.I (medan desa Trowelo, 3 km di luar Gembong ke arah Pati).

  Terjadi pertempuran di tengah kampung (di selatan Pasar Gembong). Menurut laporan kompi I, dua orang Belanda terkena tembakan, menyusul tiga orang lagi, tapi kelima serdadu itu berhasil dimasukkan jeep dan diangkut ke Pati.

  Scout car diam di tempat, tapi serdadu Belanda tidak keluar. Kapten Ali Mahmudi bertiarap di belakang sebuah pohon, sementara anak buah menghentikan tembakan. Kapten Ali bermaksud berjibaku menghalau *scout car* dengan granat. Sersan Minu memberikan tanda agar tak ada yang bergerak, karena bren *scout car* dalam keadaan *ready for fire*. Justru waktu itu Kapten Ali keluar dari balik pohon untuk melaksanakan misinya. Tapi, tepat pada waktu itulah bren Belanda menyalak, dan Kapten Ali Mahmudi rebah.

  Tembak-menembak mulai lagi, sampai akhirnya pasukan 051/RL meng-undurkan diri, dan *scout car* meninggalkan tempat, kembali ke Pati. (*Peta*, Juli/Agustus 1993)

1949 JULI 20.

* Sidang pertama Konferensi Inter-Indonesia di Yogyakarta dimulai.

  Dalam pidato pembukaannya Wakil Presiden Mohammad Hatta di antaranyanya menyatakan:

"Sesudah Konferensi Inter-Indonesia yang resmi ini, kita akan meneruskan mencari persesuaian pikiran yang akan dibawa ke dalam Konferensi Meja Bundar. Yang paling penting ialah kemauan kita untuk kerja bersama, untuk memperoleh persamaan pendapat tentang cara kita melaksanakan penyerahan kedaulatan yang tidak bersyarat kepada bangsa kita. Selain daripada menerima hak dalam arti memperoleh Indonesia merdeka, kita juga akan menghadapi soal-soal menerima kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat daripada penerimaan kedaulatan itu. Soal ini tidak mudah dan banyak seluk-beluknya, sehingga tak habis ditinjau dalam beberapa hari.

Saudara-saudara, bagi saya bukanlah tercapainya persesuaian dalam segala hal yang terpenting pada Konferensi Inter-Indonesia ini melainkan Konferensi Inter-Indonesia ini penting karena ia adalah satu saat yang bersejarah dalam hidup kita. Konferensi Inter-Indonesia ini adalah satu simbol daripada persatuan kita kembali, simbol daripada kemauan kita untuk melaksanakan cita-cita rakyat kita dalam perjuangan yang berpuluh-puluh tahun, yaitu melaksanakan Indonesia bersatu dan tak terpisah-pisah." (HKP290)

Dalam sidang itu juga dibentuk panitia-panitia *steering*, ketatanegaraan, ekonomi dan keuangan, dan keamanan. (HKP290; *KU123-124*)

1949 JULI 21.

* Republik Indonesia (RI) menerima sumbangan tekstil dari Negara Indonesia Timur (NIT) dalam suatu upacara resmi.

  Hadir dalam upacara tersebut Jachja dari NIT, dan Mr. A. G. Pringgodigdo dari RI. (*KU124*)

1949 JULI 22.

* Konferensi Inter-Indonesia babak pertama di Yogyakarta di bawah pimpinan Mohammad Hatta selesai. Konferensi yang dibuka pada 19 Juli 1949 itu berjalan lancar. Pokok-pokok pikiran dari kedua belah pihak cepat disesuaikan.

  Hatta selaku Ketua Delegasi Republik Indonesia (RI) berkata a.l.:

  "Konferensi Inter Indonesia ini adalah satu simbol dari persatuan kita, simbol dari kemauan kita untuk melaksanakan cita-cita rakyat kita dalam

perjuangan yang berpuluh tahun, yaitu untuk melaksanakan Indonesia bersatu dan tak terpisah-pisah."

Konferensi sepakat untuk menetapkan:

1. Negara Indonesia Serikat (NIS) akan dinamai Republik Indonesia Serikat (RIS)
2. Presiden RIS adalah Sukarno
3. Bendera kebangsaan adalah Merah-Putih
4. Lagu kebangsaan adalah "Indonesia Raya"
5. Bahasa nasional adalah Bahasa Indonesia
6. 17 Agustus ditetapkan sebagai Hari Nasional (AT284-285; *LUxxi*; *LU t.h.*)

Keputusan penting lain:

1. Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) adalah Angkatan Perang Nasional
2. Pimpinan Angkatan Perang (Darat, Laut dan Udara) harus di tangan Bangsa Indonesia
3. Presiden Republik Indonesia Serikat adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS
4. Dalam pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus menjadi intinya. (TS184)

1949 JULI 23.

* Tahap pertama Konferensi Inter-Indonesia berakhir. (*KU124*)

1949 JULI 24.

* Delegasi Republik Indonesia (RI) ke Konferensi Meja Bundar (KMB) terbentuk, dengan susunan sbb.:

1. Drs. Mohammad Hatta–Ketua
2. Mr. Mohammad Rum–Wakil Ketua
3. Dr. Sukiman Wirjosandjojo–Anggota
4. Dr. J. Leimena–Anggota
5. Ali Sastroamidjojo–Anggota

6. Sujono Hadinoto–Anggota
7. Prof. Dr. Mr. Supomo–Anggota
8. R. Margono Djojohadikusumo–Anggota (kemudian diganti oleh Dr. Sumitro Djojohadikusumo)
9. T. B. Simatupang–Anggota
10. Ir. Djuanda–Anggota

Anggota delegasi mendapat kedudukan sebagai Menteri Negara RI. Mereka didampingi sepuluh orang penasihat ahli di berbagai bidang, a.l.: Mr. Muh. Yamin, Dr. Darmasetiawan, Prof. Sunario Kolopaking, Dr. A. Kusumaatmadja, R. Sewaka, R. Surasno, dan R. Sediono, Sekjen Kementerian Kemakmuran. (AT287-288; MA...)

1949 JULI 25.

* Sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) dibuka untuk membicarakan Persetujuan Rum-Roijen di bawah Mr. Assaat.

Para anggota menyetujui persetujuan tersebut dengan syarat-syarat seperti diajukan oleh PDRI pada 14 Juni 1949. (AT283; *LUxxi*)

Sidang pertama Dewan Sekretaris Jenderal dibuka oleh Menteri Kusnan dengan acara:

1. *Skrining* pegawai-pegawai pemerintah Republik Indonesia.
2. Pembentukan susunan formasi inti di semua kementerian. (*KU124*)

1949 JULI 26.

* Rombongan Persatuan Isteri Tentara Nasional Indonesia (PITNI) di bawah ketuanya Tjut Andjung, menjenguk para anggota militer yang sakit di Rumah Sakit kota Kotaraja (sekarang Banda Aceh). Mereka membawa berbagai jenis makanan sumbangan anggota PITNI sehubungan dengan perayaan Hari Idul Fitri. (TS186)

1949 JULI 27.

* Diadakan rapat komando SWK 106/Arjuna di bawah pimpinan Mayor Achmadi, di Jenggrik, untuk menetapkan rencana serangan umum menduduki kota Solo. (*PEH89*)

1949 JULI 28.

* Panitia Penyokong Yogya dan Taman Kesatria Cabang Kotaraja (sekarang Banda Aceh) menyelenggarakan pertunjukan kesenian yang akan berlangsung sampai 30 Juli 1949. Lima puluh persen dari pendapatan bersih akan disumbangkan kepada Panitia Penyokong Yogya, dan lima puluh persen lagi kepada Taman Bacaan.

  Selebaran mengenai pertunjukan tersebut telah disebarkan di kota dan desa-desa di sekitarnya. Selebaran berasal dari Komandan Komando Militer Kota, Kapten Said Usman, selaku Ketua Cabang Panitia Penyokong Yogya dan Taman Ksatria. (TS186)

1949 JULI 29.

* Pesawat Dakota VT-CLA yang dicarter Republik Indonesia (RI) melakukan "mercy flight", penerbangan perikemanusiaan, dari Singapura ke Maguwo membawa obat-obatan sumbangan pengusaha India terkenal, Mr. Patnaik, yang bersimpati pada RI.

  Sesampai di Maguwo pesawat melakukan putaran, tapi disergap pesawat Belanda, padahal pesawat itu sudah memakai tanda palang merah.

  Ikut menjadi korban dalam peristiwa tersebut: Komodor Muda Udara Agustinus Adisutjipto yang dikenal sebagai Bapak Penerbangan, Dr. Abdulrachman Saleh yang terkenal dengan panggilan Pak Karbol, Opsir Muda Udara I Adi Sumarno dari Perhubungan (PHB) Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI), Zainal Abidin, Wakil Perdagangan RI, Pilot Australia A. N. Constantine dan istrinya, Ko-Pilot Inggris R. Hazelhust, dan Juru Teknik India Bhidan Ram.

  Tanggal terjadinya peristiwa ini kemudian dijadikan Hari Bhakti AURI. (BS60)

* Delegasi Republik ke Konferensi Inter-Indonesia ke-II di bawah pimpinan Wakil Presiden Mohammad Hatta bertolak ke Jakarta. (*KU124*)

* Wakil Presiden Mohammad Hatta memberikan jawaban pemerintah kepada Badan Pekerja KNI Pusat. Mengenai Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) ia mengatakan:

"Saudara Ketua! Dalam keterangannya pada hari Selasa tanggal 19 yang lalu pemerintah dengan tegas telah mengemukakan dua sendi pokok sebagai dasar daripada politiknya yang dilakukan hingga waktu ini. Pun tindakan-tindakan politik presiden dan wakil presiden disandarkan atas dua sendi pokok itu. Dengan singkat sendi pokok politik pemerintah itu dapat dikatakan secara ringkas sebagai politik keseimbangan antara kekuatan ke luar dan kekuatan ke dalam.

Oleh karena imbangan kekuatan itulah makanya presiden dan wakil presiden di Bangka menjalankan politiknya terhadap dunia internasional sebagaimana yang telah diketahui itu.

Pemerintah telah menegaskan pula, bahwa tindakan-tindakan politik yang demikian itu tidak bermaksud untuk melemahkan atau mengabaikan Pemerintah Darurat yang dipimpin oleh Saudara Sjafruddin Prawiranegara, tetapi ialah untuk membantu PDRI yang terhadap dunia internasional ada di dalam posisi yang terpencil." (HKP294)

* Panitia Raya Penyokong Yogya cabang Kotaraja (sekarang Banda Aceh) menyelenggarakan berbagai pertandingan, pertunjukan, dan perlombaan di lapangan Blang Padang dan gedung Aceh Bioskop, yang akan berlangsung sampai 7 Agustus 1949. Dalam acara itu akan digelar pertandingan sepak bola, pacuan kuda, lomba panjat pinang, dan pagelaran sandiwara.

  Seluruh pendapatan bersih akan diserahkan kepada Fonds Penyokong Pemerintah Pusat dan Rakyat di Yogyakarta. Adapun susunan acara adalah sbb.:

  1. Pertandingan sepak bola pada 29 Juli–4 Agustus.
  2. Pacuan kuda pada 6 dan 7 Agustus.
  3. Pagelaran sandiwara oleh Perkumpulan Sandiwara "Sunrise" pada 2–5 Agustus.
  4. Perlombaan panjat pinang pada 6 Agustus. (TS186)

1949 JULI 30.

* Konferensi Inter-Indonesia babak kedua dibuka dengan resepsi meriah di Jakarta, dipimpin oleh Perdana Menteri Republik Indonesia (RI) Mohammad Hatta.

Dalam sambutannya Mohammad Hatta menyatakan a.l.:

"[...]kalau antara kita sama kita tak ada kemauan untuk kerja sama, kalau antara kita tak ada persesuaian pendapat, tak ada orang luar akan dapat menolong kita dalam hal penyerahan kedaulatan itu. Persengketaan antara Republik Indonesia dengan Belanda dapat ditolong menyelesaikannya oleh Dewan Keamanan, akan tetapi perselisihan antara kita sama kita dengan tak memungkinkan kata sepakat sukar dicampuri oleh orang luar. Sebab itu besar tanggung jawab yang kita pikul dalam Konferensi Inter-Indonesia ini, tanggung jawab yang harus kita buktikan terhadap sekarang dan masa datang. Anak cucu kita akan berterima kasih kepada kita atau akan menuntut kita di muka mahkamah sejarah apabila usaha kita tak berhasil atau pun membahayakan nasib bangsa." (AT284-285; HKP305)

* Konferensi membahas masalah pelaksanaan pokok-pokok persetujuan yang telah diambil di Yogyakarta dalam Konferensi Inter-Indonesia babak pertama tanggal 19–22 Juli 1949.

Kedua belah pihak (RI dan Bijeenkomst voor Federaal Overleg [BFO]) menyetujui membentuk Panitia Persiapan Nasional (PPN) yang bertugas menyelenggarakan suasana tertib sebelum dan sesudah Konferensi Meja Bundar (KMB).

Konferensi ini berlangsung sampai 2 Agustus 1949. (AT284-285; *KU124*; *LUxxi*; MA...; *PSPB2 37*; S6 71)

1949 JULI 31.

* Diadakan lanjutan sidang Konferensi Inter Indonesia babak kedua yang dimulai pada 30 Juli 1949.

Sambutan rakyat sangat meriah, hingga ketika wakil-wakil Republik masuk ruang sidang, Mohammad Hatta sebagai Ketua Delegasi Indonesia didukung masuk dan pekik "Merdeka" berkumandang.

Dalam sambutannya Mohammad Hatta menyatakan a.l.:

"Pada akhirnya Indonesia hanyalah akan dapat mempertahankan diri atas dasar-dasar demikian dan dengan cara pemerintahan yang di-dukung oleh rasa tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Hanya kalau rakyat sadar bahwa nasibnya ada di tangannya sendiri, rakyat

akan sanggup mempertahankan dan membela kemerdekaannya."
(*LU t.h.*)

1949 JULI (AKHIR).

* Untuk mencari keterangan tentang kebenaran berita tentang *cease fire*, Mayor Achmadi dan Mayor Suhardi meninggalkan markasnya di Jenggrik menuju markas Gubernur Militer Kolonel Gatot Subroto di Balong.[3] (*PEH19-20*)

***

(Akhir Juli 1949)

3 Sesudah dua hari berjalan, mereka temui markas dalam keadaan kosong, dan banyak rumah sepanjang jalan roboh dan hangus terbakar, suatu tanda bahwa telah terjadi serangan Belanda. Gatot Subroto sendiri waktu itu sedang dirawat di rumah sakit di Yogyakarta (*PEH19-20*).

AGUSTUS 1949

1949 AGUSTUS 1.

* Penyelesaian perundingan tentang *cease fire* (gencatan senjata) antara delegasi Republik Indonesia (RI) dan Belanda di bawah pengawasan United Nations Commission for Indonesia (UNCI, Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Indonesia) tercapai.

  Sidang resmi diketuai oleh Merle Cochran, Ketua UNCI untuk minggu ini. Tiga dokumen tentang penyelesaian gencatan senjata tsb. adalah:

  1. perintah penghentian permusuhan,
  2. pengumuman bersama, dan
  3. peraturan-peraturan (manual) tentang pelaksanaan gencatan senjata.

  Perintah penghentian tembak-menembak harus dikeluarkan oleh kedua belah pihak serentak pada 3 Agustus 1949. Dan dalam perintah itu harus ditandaskan bahwa pelaksanaannya secara efektif paling lambat pada 11 Agustus 1949 untuk seluruh Jawa dan 15 Agustus 1949 untuk seluruh Sumatra. (AT285; *KU124*; *LUxxi*; *LU t.h.*)

* Hari ini adalah hari diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar (KMB) menurut Persetujuan Rum-Van Roijen yang ditandatangani di Hotel des Indes, Jakarta pada 7 Mei 1949. (*AL92*)

1949 AGUSTUS 2.

* Jenderal Sudirman dan Kolonel Abdul Haris Nasution menghadap Presiden Sukarno untuk mempertahankan apa yang disebutnya "amanat gerilya", yang secara politis tak bersedia mengakui negara-negara bagian ciptaan Van Mook, dan secara militer menolak gencatan senjata dan diciptakannya kembali garis-garis demarkasi dengan Belanda, yang berarti Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus hijrah dari daerah yang sangat luas di seluruh Jawa dan Sumatra. (MA283)

* Konferensi Inter-Indonesia tahap kedua ditutup, setelah tercapai satu konsepsi antara Republik dan Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) tentang negara yang akan dibentuk. Konsepsi tersebut nantinya akan diperjuangkan bersama dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Dengan demikian tibalah satu fase baru dalam perkembangan politik di Indonesia, saat akhirnya Belanda berhadapan dengan seluruh rakyat Indonesia yang tak terpecah-belah. Konferensi ini dibuka pada 30 Juli 1949.

  Dalam dua kali perundingan itu dicapai kata sepakat bahwa BFO tidak berkeberatan bila:

  1. Negara Indonesia Serikat menerima penyerahan kedaulatan baik dari Negeri Belanda maupun dari Republik Indonesia.
  2. Penyerahan kedaulatan dari Negeri Belanda harus "nyata, tanpa syarat dan tanpa ikatan politik atau ekonomi".
  3. Dalam undang-undang dasar RIS, dijamin dua pertiga dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk kaum federalis yang tergabung dalam BFO.
  4. Harus diadakan badan Senat di samping DPR, yang jumlah anggotanya sama dengan dua kali jumlah negara-negara bagian, karena tiap negara bagian berhak mempunyai dua orang wakil dalam Senat itu. (AT284-285; *KU124*; *LU t.h.*)

* Belanda melancarkan serangan udara atas Desa Kerjo, Karanganyar. (*PEH89*)

1949 AGUSTUS 3.

* Perintah gencatan senjata diberikan kepada angkatan perang kedua belah pihak yang bersengketa: Indonesia dan Belanda. Dengan demikian

gagal rencana dan keinginan Belanda untuk menghancurkan sama sekali Republik Indonesia melalui aksi militer kedua yang mereka namakan *Operatie Kraai* (Operasi Gagak) dengan *speerpunten-strategie* (strategi ujung tombak)-nya. (SDA108)

* Presiden Sukarno selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) lewat *Radio Republik Indonesia* (*RRI*) Yogyakarta mengeluarkan perintah gencatan senjata kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) di seluruh Indonesia sebagai syarat mutlak untuk dimulainya perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB). Panglima Besar Jenderal Sudirman mengumumkan gencatan senjata berlaku mulai 10/11 Agustus 1949 jam 24.00 untuk Jawa, dan 15 Agustus 1949 untuk luar Jawa, yang segera ditaati oleh semua komandan dan prajurit. Sementara itu Wakil Tinggi Kerajaan Belanda di Indonesia, A. H. J. Lovink, selaku Panglima Angkatan Perang Kerajaan Belanda lewat radio Jakarta memerintahkan gencatan senjata kepada tentara Belanda di seluruh Indonesia.

  Gencatan senjata akan berlaku paling lambat mulai 11 Agustus 1949 untuk Jawa dan 15 Agustus untuk seluruh Sumatra. (AT285; *KU124*; *LUxxi*; MA282-283; *PEH4,20,90*; *PSPB2 37*; *Kompas*, 8 Agustus 1993)

* Dalam pidatonya yang bertema "*tracee* baru", Presiden Sukarno menegaskan bahwa perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia belum selesai, karena tentara dan kaum kolonial Belanda masih berat untuk meninggalkan Indonesia. Ia mengatakan a.l.:

  "Aku tahu, hai anak-anakku dari Angkatan Perang, engkau akan tunduk pada perintahku itu. Korban-korbanmu telah banyak dan aku, seluruh tanah air, berterima kasih atas korbananmu itu.

  Dengan persetujuan politik itu, berobahlah kewajibanmu dari mengadakan perang gerilya kepada menghentikan perang gerilya itu sambil ikut serta menjaga keamanan pada tempatmu masing-masing untuk keselamatan rakyat. Tentara Nasional Indonesia adalah tentera buatanmu, dan sikapmu bahwa juga di waktu tidak berperang atau di waktu damai, engkau tetap pahlawan-pahlawan dan perisai-perisai rakyat penjaga keamanan rakyat, penjaga ketenteraman rakyat, penjaga keselamatan rakyat." (*LU t.h.*)

* Wakil Presiden Mohammad Hatta dan rombongan terbang menuju Den Haag untuk mengikuti Konferensi Meja Bundar (KMB). (*PEH4*)

* Pimpinan tentara Belanda berusaha menduduki tempat-tempat yang strategis di Kota Solo agar dapat mempertahankan kedudukan dengan mudah.

  Di pihak Indonesia, Gatot Subroto, Slamet Rijadi, dan Achmadi menempuh strategi yang sama, yaitu berusaha merebut kantong-kantong strategis dalam Kota Solo. Untuk itu akan dilakukan Serangan Umum empat hari mulai 7 Agustus. (*PEH4*)

* Mayor Achmadi memanggil para Komandan Rayon ke markasnya di Jenggrik untuk menentukan Serangan Umum menduduki Kota Solo. Rapat memutuskan untuk:

  1. tetap berpegang teguh pada perintah Kolonel Gatot Subroto,
  2. melakukan Serangan Umum besar-besaran ke dalam Kota Solo untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan apabila *cease fire* diperintahkan, didahului dengan serangan snijpers (penembak jitu) dan pemasangan bom tarik/tekan. (*PEH89*)

* Tentara Belanda menyerbu Balong, Karanganyar, dengan mengerahkan satuan artileri dan pesawat terbang untuk menghancurkan zender *RRI* dan markas GM II, tetapi tidak berhasil, karena gerilyawan sudah lebih dulu melakukan pengamanan. (*PEH90*)

* Diumumkan bahwa rombongan Panglima Teritorial Sumatra Kolonel Hidajat dan Letnan Kolonel Sujono Karsono dari Angkatan Udara Komando Sumatra yang tiba di Aceh dari Jawa hari ini mencakup juga Penerbang Kapten Muljono.

  Kapten Muljono yang berijazah penerbang militer rendah dan tinggi serta mempunyai Limited Commercial Licence dari Manila mendapat tugas mendidik kader-kader penerbang di Aceh. Untuk itu segera akan dibuka sebuah Sekolah Penerbang.

  Sementara itu pesawat yang kini sedang diperbaiki di Lhoknga akan segera diselesaikan agar dapat dipergunakan untuk melatih para penerbang tersebut. (TS192)

* Organisasi gerilya pimpinan Letnan Kolonel Hasan Basri di pedalaman Banjar, Kalimantan Selatan, mendesak posisi Belanda. Rakyat di kota-kota yang dikuasai Belanda mendukung Hasan Basri, begitu juga pegawai sipil, Dewan Banjar, dan Dewan Dayak Besar. Dalam waktu singkat Hasan Basri menguasai bagian terluas Kalimantan Selatan. Gerilyawan Kalimantan Barat dan Timur menyusul. (BS52)

* Perintah gencatan senjata diberikan kepada angkatan bersenjata Indonesia dan Belanda. (SSA18)

1949 AGUSTUS 4.

* Delegasi Republik Indonesia (RI) ke Konferensi Meja Bundar (KMB) diangkat, dengan anggota: Drs. Mohammad Hatta, Mr. Mohammad Rum, Prof. Dr. Mr. Supomo, Dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo, Ir. Djuanda, Dr. Sukiman Wirjosandjojo, Mr. Sujono Hadinoto, Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Mr. A. K. Pringgodigdo, Kolonel T. B. Simatupang, dan Mr. Sumardi. Delegasi Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) dipimpin oleh Sultan Hamid dari Pontianak. (S6 71)

* Dengan Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1949 diputuskan susunan Kabinet Presidentil yang selesai dibentuk oleh Wakil Presiden Hatta sbb.
  1. Perdana Menteri: Drs. Mohammad Hatta
  2. Wakil Perdana Menteri untuk Sumatra: Mr. Sjafruddin Prawiranegara
  3. Menteri Pertahanan merangkap Koordinator Keamanan Dalam Negeri: Sultan Hamengkubuwono IX
  4. Menteri Dalam Negeri: Mr. Wongsonegoro
  5. Menteri Luar Negeri: Haji Agus Salim
  6. Menteri Penerangan: Mr. Sjamsudin
  7. Menteri Keuangan: Mr. Lukman Hakim
  8. Menteri Pekerjaan Umum merangkap Menteri Perhubungan: Ir. H. Laoh
  9. Menteri Kesehatan a.i.: Dr. Darsono (sumber lain menyebut Dr. Suroso)
  10. Menteri Perburuhan dan Sosial: Kusnan

11. Menteri Kehakiman: Mr. Susanto Tirtoprodjo
12. Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan: S. Mangunsarkoro (menggantikan Mr. Ali Sastroamidjojo)
13. Menteri Kemakmuran dan Persediaan Makanan Rakyat: I. J. Kasimo
14. Menteri Agama: K. H. Masjkur
15. Menteri Negara: Dr. Sukiman Wirjosandjojo, Dr. J. Leimena, dan Ir. Djuanda

Dalam Penetapan itu disebutkan juga Kotaraja (sekarang Banda Aceh) sebagai tempat kedudukan Wakil Perdana Menteri Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Sementara itu sebagian menteri akan menjadi anggota delegasi ke perundingan Konferensi Meja Bundar di Den Haag. (AT288; *KU124-125*; *LUxxx*; TS192-193)

* Diumumkan oleh Sekretaris Dewan Menteri bahwa T. Daudsjah dll. dari Sumatra termasuk dalam susunan penasihat Delegasi Republik Indonesia ke Konferensi Meja Bundar yang akan berlangsung di Den Haag, Belanda. (TS193)

* Setelah membentuk kabinetnya yang baru (4 Agustus 1949) dan menunjuk Sjafruddin Prawiranegara sebagai wakil Perdana Menteri dengan kedudukan resmi di Kotaraja (sekarang Banda Aceh), Mohammad Hatta berangkat ke Negeri Belanda sebagai pimpinan delegasi RI ke Konferensi Meja Bundar yang akan dimulai di Den Haag. (LM53)

* Gerakan Darul Islam (DI) dari organisasi Hisbullah dan Sabilillah, yang dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo, membentuk Negara Islam Indonesia (NII). (S6 71)

1949 AGUSTUS 5.

* Untuk mendukung perintah *cease fire* Presiden Sukarno, tertanggal 3 Agustus 1949 kepada APRI, Komandan SWK 106 Arjuna mengeluarkan Perintah Siasat No. 1/8/SWK/A-3/Ps-49 disertai instruksi teknis yang termuat dalam Perintah Harian No. 5/8/SWK-A-3/Ph-49 dan instruksi No. 2/R/SWK-A/3/Instr-49 dan No. 10/8/SWK/A-3/N-STR-49. (*PEH20*)

* Dengan surat No. 387/35, Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatra Utara minta kepada Ketua Dewan Pertahanan Daerah Aceh, para Kepala Jawatan, Kantor, dan Perusahaan Negara agar bantuan untuk Yogyakarta dikirimkan lewat Bagian Keuangan Kantor Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatra Utara di Kotaraja (sekarang Banda Aceh). Surat yang ditandatangani oleh Residen t/b Tuanku Mahmud tersebut menyatakan a.l.:

  "Sepanjang kami ketahui, baru-baru ini telah mulai diusahakan oleh beberapa Jawatan di kota ini mengirimkan bantuan berupa alat kantor, bahan pakaian dan sebagainya ke Yogyakarta, guna mengatasi kekurangan materiel yang sedang dialami oleh Pemerintah Pusat kita, sebagai akibat dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh tentera Belanda selama masa pendudukannya di daerah itu.

  Perhatian yang penuh terhadap kesukaran Pemerintah Pusat kita ini dan minat yang ikhlas untuk menolong mengatasinya sebagaimana yang dibuktikan oleh masing-masing Jawatan tersebut kami hargakan tinggi dan sangat mengharukan kami.

  Akan tetapi, supaya bantuan itu dapat hendaknya rata-rata menolong Badan-badan Pemerintahan yang ada di daerah Yogyakarta, ada baiknya apabila disampaikan kepada suatu badan yang tertentu untuk mengurus penerimaan dan pembagiannya, dan jangan sebagaimana yang telah dilakukan, yakni dikirim langsung kepada masing-masing kementerian." (TS193)

1949 AGUSTUS 6.

* Wakil Presiden Mohammad Hatta, Mohammad Rum, Abdul Rivai dll. Anggota delegasi Indonesia ke Konferensi Meja Bundar (KMB) berangkat ke Den Haag, disusul Dr. J. Leimena, Kolonel Simatupang dll. Anggota delegasi bidang militer. Ikut berangkat juga kedua anggota United Nations Commission for Indonesia (UNCI, Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia) H. Merle Cochran dan R. Herremans.

  Mereka singgah di New Delhi, disambut oleh wakil Indonesia di India, Dr. Sudarsono. Di New Delhi mereka berziarah ke makam Mahatma Gandhi dan meletakkan karangan bunga. Sementara itu Komodor Udara Suryadarma menengok putra-putra Indonesia yang sedang mengikuti pendidikan pilot di India. (*KU125; LU t.h.*)

* Di kantor Pembangunan dan Pemuda Sumatra Utara di Kotaraja (sekarang Banda Aceh) berlangsung rapat untuk memilih wakil-wakil pemuda Daerah Aceh/Sumatra Utara yang akan menghadiri Kongres Pemuda di Jawa. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua kantor Pembangunan dan Pemuda Sumatra Utara.

  Terpilih tiga orang wakil, yaitu A. Malik Sjafii dari Pemuda Muhammadiyah, Annie Kamarusid dari Aisjiah, dan A. R. Hasjim dari OPII. (TS193-194)

1949 AGUSTUS 7.

* Wakil Presiden Mohammad Hatta selaku ketua delegasi Republik Indonesia (RI) ke Konferensi Meja Bundar (KMB) berangkat ke Den Haag. Ia singgah di New Delhi untuk bertemu dengan Pandit Jawaharlal Nehru.

  Sementara itu Mr. Sjafruddin Prawiranegara menjabat Perdana Menteri yang berkedudukan di Kotaraja (sekarang Banda Aceh), selama Mohammad Hatta berada di luar negeri. (*LUxxi*)

* Letnan Kolonel Slamet Rijadi sebagai Komandan Brigade V memberikan perintah untuk melakukan serangan besar-besaran ke Kota Solo. (*PEH90*)

* Jam 06.00: Letnan Kolonel Slamet Rijadi memimpin gempuran atas pasukan Belanda yang menduduki Kota Solo dari segala jurusan:

  Rayon Prakoso menyerang dari arah utara;
  Rayon Sumarto dari arah timur laut;
  Rayon Suhendro dari arah selatan;
  Rayon Abdul Latief bersama pasukan SA-CSA Muktio dari barat dan selatan.

  Gempuran menyasar pada semua markas dan kedudukan tentara Belanda di Solo, berlangsung sampai 10 Agustus 1949, sebelum orang Indonesia mematuhi himbauan UNCI (United Nations Commission for Indonesia, Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia). Peristiwa ini kemudian terkenal sebagai pertempuran 4 hari di Solo dan sekitarnya, yang mengakibatkan menyerahnya pasukan Belanda.

  Serangan umum ini merupakan jawaban Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap tindakan Belanda yang tetap melanjutkan apa yang

mereka namakan aksi pembersihan sesudah ditandatanganinya Statemen Rum-Roijen. Serangan ini pun dianggap mempunyai nilai operasional.

Historis pelaku Serangan Umum tersebut ialah Tentara Pelajar (TP) di bawah Letkol Slamet Rijadi selaku Komandan Wehrkreise 100/Komandan Brigade V Div. II, bersama kesatuan-kesatuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di bawah Mayor Achmadi selaku Komandan Sub-Wehrkreise Arjuna 106/Komandan Det. II TP Brig. 17 KMK Surakarta. Akibat serangan tersebut, tentara Belanda terkurung di markas-markas dan pos-posnya, dan ¾ Kota Solo berhasil direbut dan diduduki. (HA175; *KU125*; *PEHvii, 18-23*; *Kompas*, 8 Agustus 1993, 12 Agustus 1996)

* Komandan Regu Si. I Ki. II Sahir gugur dalam pertempuran di Penularan, Solo. (*PEH90*)

* Jam 15.00: Belanda melakukan serangan balasan. Enam pesawat melakukan pemboman dan penembakan, hingga banyak rakyat menjadi korban. Pertempuran berlangsung sampai larut malam. (*PEH21*)

* Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo atas nama umat Islam bangsa Indonesia memproklamasikan Negara Islam Indonesia (NII) di Madinah-Indonesia (kira-kira di daerah Tasikmalaya). (*Star Weekly*, 30 Oktober 1949:21)

* Di Taman Ksatria Kotaraja (sekarang Banda Aceh) berlangsung pertemuan ramah-tamah antara pengurus dan anggota Persatuan Isteri Tentera Nasional Indonesia (PITNI) Daerah Aceh dan Cabang Kotaraja dengan Ny. Kolonel Hidajat, Ny. Letkol Sujono Karsono, dan Ny. Kapten Muljono yang baru tiba dari Yogyakarta.

  Dalam pertemuan yang dipimpin oleh ketua PITNI Ny. Tjut Andjung itu, Ny. Hidajat menguraikan kesan-kesannya selama beberapa hari mengikuti suami ke Yogyakarta. (TS194)

1949 AGUSTUS 8.

* Serangan Umum hari kedua atas Kota Solo. Hubungan antara markas dengan pos-pos Belanda diputuskan, hingga pasukan Belanda dalam kedudukan terkurung dan tak dapat saling membantu.

Di setiap kampung yang telah diduduki dikibarkan Merah-Putih pada tiang listrik, tiang telepon, dan puncak pepohonan. Dan di jalan-jalan dibuat rintangan. (*PEH21-22*)

* Dari tempat kedudukannya di Kotaraja (sekarang Banda Aceh), Panglima Tentara dan Territorium Sumatra (PTTS) Kolonel Hidajat mengeluarkan instruksi mengenai gencatan senjata. Isi instruksi a.l.:

1. Perintah menghentikan permusuhan di seluruh Indonesia dikeluarkan pada waktu bersamaan oleh kedua belah pihak.
2. Mulai 10/11 Agustus 1949 tengah malam mengenai Jawa dan 14/15 Agustus 1949 tengah malam mengenai Sumatra, segala tindakan harus dilakukan untuk menghentikan tembak-menembak dan segala perbuatan yang bertujuan merugikan pihak yang lain.
3. Tentara Belanda harus menghentikan segala gerakan militer.
4. Segala anak buah TNI dan segala penganut Republik lainnya yang bersenjata diperintahkan supaya menghentikan peperangan gerilya.
5. Pelanggaran terhadap perintah ini sesudah waktu dan tanggal tersebut akan dihukum. (TS194-195)

* Perwari Daerah Aceh menerima surat berisi ucapan terima kasih Dewan Pimpinan Kowani Pusat di Yogyakarta kepada Perwari, Asyiah, PPI dan Perguruan Kaum Ibu Kotaraja atas sumbangan mereka berupa beberapa blok kain, benang jahit dll.

"Sumbangan dari wanita-wanita Aceh tersebut merupakan satu kenyataan, bahwa wanita Indonesia di mana-mana telah sadar akan perjuangan bangsanya. [Demikian a.l. isi surat itu,] Maka dengan perantaraan harian ini (*Semangat Merdeka*) diaturkan terima kasih kepada sekalian hartawan dan dermawan, lebih-lebih kepada anggota dari organisasi-organisasi tersebut di atas, terhadap kerelaan mereka menyumbangkan keperluan saudara-saudaranya di Yogyakarta.

Surat berisi juga undangan Kowani Pusat kepada organisasi wanita di Kotaraja untuk menghadiri Kongres Kowani yang akan diadakan pada 17 Agustus 1949 di Yogyakarta." (TS194)

1949 AGUSTUS 9.

* Serangan Umum hari ketiga atas Kota Solo. Tentara Belanda kewalahan dan terpaksa mendatangkan bala bantuan dari daerah lain. Mereka menembak setiap orang lelaki yang mereka jumpai. (*PEH22*)

* Jam 18.00: Berita tentang tercapainya *cease fire* (gencatan senjata) antara Indonesia dan Belanda disampaikan oleh kurir dari Komando Muria kepada pasukan 051/RL (Ronggo Lawe) pimpinan Iskandar Jayusman di daerah Gunung Muria. (Peta, Juli/Agustus 1993)

* Angkatan Udara RI mengeluarkan Maklumat AURI No. 2-P yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Udara III, Opsir Udara I Sujoso Karsono, tentang pembukaan Sekolah Penerbangan di Kotaraja. Isi Maklumat:

  Menerima pemuda berijazah SMA, berumur kurang dari 22 tahun, berbadan sehat menurut pemeriksaan dokter, dan tinggi badan 1,60 m. Pelamar yang memenuhi persyaratan harus menempuh ujian masuk. Akan diterima 20 orang calon. Pelajaran yang akan diberikan: pendidikan militer, teori teknik terbang, ilmu bumi, pengetahuan meteo, pengetahuan radio, navigasi, dan bahasa Inggris. Setelah disaring, akan ditentukan 5 pelajar untuk calon penerbang (pilot), 5 ahli radio (flight operator), dan 10 flight engineer.

  Selain itu, kepada calon penerbang akan diberikan pelajaran lebih mendalam tentang latihan terbang praktis dengan pesawat latih, pengetahuan mengenai pesawat, meteo, navigasi, ilmu bumi, dan bahasa Inggris. Para calon flight operator mendapat pelajaran mendalam tentang pengetahuan radio, teknik pesawat, navigasi, dan bahasa Inggris, sedangkan para calon flight engineer mendapat pelajaran mendalam tentang pengetahuan radio, teknik pesawat, navigasi, dan bahasa Inggris.

  Pendaftaran dilakukan mulai 10 Agustus 1949 sampai 20 Agustus 1949 antara jam 09.00–12.00 di Kantor AURI di Kotaraja. (TS195-196)

* PORI (Persatuan Olahraga RI) Sigli menyerahkan sumbangan sebesar Rp10.000,00 kepada Panitia Penyokong Djokja. Uang itu diperoleh dari bermacam pertandingan yang dilakukan di Kotaraja. (TS195)

* Motor bot “Seulawah Jantan” milik penduduk Kotaraja yang meninggalkan Penang, Malaya, menuju Uleelheue berjumpa dengan kapal perang Belanda 40 mil dari Sabang.

  Oleh Belanda, motorbot tersebut digeledah dan diseret ke Sabang, sedangkan sembilan anak buahnya ditahan. Kerugian ditaksir $28.275. (TS195)

* Sekretaris Negara memberikan pengumuman sbb.:
  1. Dengan Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1949 telah ditetapkan susunan Presidentiel Kabinet dengan Wakil Presiden menjadi Perdana Menteri dan Mr. Sjafruddin Prawiranegara menjadi Wakil Perdana Menteri, dengan tempat kedudukan Kutaraja (sekarang Banda Aceh).
  2. Berhubung dengan kepergian Wakil Presiden/Perdana Menteri ke luar negeri, maka dengan Surat Keputusan Presiden No. 10-A-1949 Sri Paduka Hamengku Buwono IX Menteri Pertahanan diangkat menjadi Acting Perdana Menteri, dengan tugas kewajiban melakukan pekerjaan Perdana Menteri selama Wakil Presiden/Perdana Menteri ada di luar negeri. (TS196)

1949 AGUSTUS 10.

* Serangan Umum hari keempat atas Kota Solo. Belanda mengerahkan pesawat terbang yang membom dan melakukan *strafing* atas pasukan gerilya. (*PEH22*)

* Selama berlangsungnya Serangan Umum 4 hari atas Kota Solo, tentara Belanda kewalahan dan hampir kehabisan logistik. Bantuan yang datang dari Semarang terpaksa berbalik haluan karena tak dapat masuk Kota Solo. (*PEH90*)

* Hari ini tanggal mulai berlakunya *cease fire* (gencatan senjata) Indonesia-Belanda, yang di pihak Indonesia diperintahkan oleh Presiden Sukarno selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI), pada 3 Agustus 1949.

  Sementara itu insiden-insiden masih banyak terjadi. (*LU t.h.*)

* Jenderal Sudirman memerintahkan gencatan senjata kepada angkatan bersenjata Republik Indonesia. (Sabam Siagian, *Suara Pembaruan*, 8 April 2000)

* Jam 24.00: Gencatan senjata di daerah Solo mulai berlaku. (*PEH5*)

1949 AGUSTUS 11.

* Hampir seluruh Kota Solo dikuasai oleh pasukan TP (Tentara Pelajar) serta gerilyawan lain. Pasukan Belanda terkurung di markas, asrama, atau pos. (*PEH90*)

* Sejumlah anggota Tentara Pelajar (TP) gugur dalam Serangan Umum: Sahir, Suwarno, Sridjoko, Sukandar, Seno Utoro, Muljomargono, Kusat. Mijuk Supangat disiksa empat serdadu Belanda di Kleco hingga menderita luka berat.

  Ratusan penduduk tewas atau luka berat/ringan, dan sejumlah rumah terbakar. (*PEH91*)

* Kolonel Ohl mengirim kurir kepada Letkol Slamet Rijadi untuk membicarakan masalah gencatan senjata. (*PEH90*)

* Letkol Slamet Rijadi selaku Komandan Wehrkreise/Brigade V/II memberikan perintah/instruksi kepada Mayor Achmadi selaku Komandan SWK (Sub-Wehrkreise) 106/Arjuna untuk melaksanakan perintah gencatan senjata dan menarik kesatuan ke garis tepi kota. (*PEH91*)

* Hari ini adalah batas terakhir mulai berlakunya secara efektif *cease fire* (gencatan senjata) yang diperintahkan oleh kedua belah pihak, Indonesia dan Belanda, untuk Jawa.

  Jauh sebelumnya, pasukan Divisi Siliwangi dan partai Islam masing-masing sudah menguasai sepertiga Negara Pasundan. (AT285; PPK111; *PEH4*; *Kompas*, 8 Agustus 1993)

* Dalam pertemuan ramah-tamah dengan rombongan utusan Aceh yang sedang berada di Yogyakarta, Bapak Taman Siswa Ki Hadjar Dewantara menyatakan bahwa Aceh dan Mataram memiliki persamaan

simbolik dalam sejarah, yaitu keduanya merupakan pusat pendorong kemerdekaan.

Ketua rombongan utusan Aceh, Amelz, yang juga anggota Komite Nasional Indonesia Pusat menjelaskan mengenai keadaan di Aceh sejak awal perjuangan kemerdekaan hingga sekarang. Dikatakannya bahwa di bidang perdagangan telah dicapai kemajuan-kemajuan, a.l. meluasnya perdagangan Aceh tidak hanya dengan Malaya, tapi juga dengan Birma, Siam, dan India. Yang sangat diperlukan oleh Aceh kini adalah tenaga terpelajar. Disinggung pula bahwa di Aceh kini hanya ada sebuah surat kabar, yaitu *Semangat Merdeka*. (TS196)

* Perusahaan penerbangan Belanda KLM mulai membuka hubungan udara Yogyakarta-Jakarta lewat Semarang. (*KU125*)

1949 Agustus 12.

* Perintah penghentian tembak-menembak telah dipatuhi oleh pasukan gerilya, tapi pasukan Belanda baret hijau terus melakukan teror, hingga di sana-sini masih terjadi insiden. (*PEH91*)

* Pasukan Komando Baret Hijau Belanda melakukan pembunuhan membabi buta di daerah Kratonan, Jayengan, Pasar Kembang, Pasar Nongko, Gading dan tempat-tempat lain di Solo. Di Gading, di Markas Palang Merah Indonesia yang menempati rumah Dr. Padmonegoro, mereka membunuh 7 orang petugas PMI dan 50 pasien yang tak berdaya—rakyat dan pejuang yang terluka. Hanya seorang mahasiswa berhasil menyelamatkan diri, yaitu Pratignjo. (*PEH22-23*)

* Serah terima kekuasaan di Solo dari Pasukan Belanda kepada pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

  Pertemuan antara pasukan Belanda di bawah Kolonel Van Ohl dengan Komandan Brigade V Letnan Kolonel Slamet Rijadi berlangsung di sebuah rumah di sebelah barat Stadion Sriwedari (sekarang gedung Kodim 0735).

  Kepada Slamet Rijadi yang baru berusia 23 tahun, Van Ohl berkata: “Oh, Overste tidak pantas menjadi musuhku. Overste lebih pantas jadi anakku, tetapi kepandaianmu seperti bapakku. Saya kagum, saya kagum.” (*Kompas*, 12 Agustus 1996)

* Mulai hari ini pasukan Belanda dikondisikan di tempat masing-masing. (*PEH91*)

1949 AGUSTUS 14.

* Konferensi Pemuda Seluruh Indonesia dibuka di Yogyakarta oleh ketua panitia konferensi: Latumahina.

  Konferensi dihadiri oleh 28 organisasi pemuda, dan akan berlangsung sampai 18 Agustus 1949. (*KU125; LUxxi; LU t.h.*)

* Konferensi Pemuda Seluruh Indonesia ke-IV diadakan di Yogyakarta, yang berlangsung sampai 18 Agustus 1949. Di tengah konferensi, pada 17 Agustus 1949, dibentuk Sekretariat Pemuda Indonesia sebagai badan penghubung organisasi-organisasi pemuda. (HR140,231; *PEH91*)

1949 AGUSTUS 15.

* Hari ini adalah batas terakhir mulai berlakunya secara efektif *cease fire* (gencatan senjata) yang diperintahkan oleh kedua pihak Indonesia dan Belanda untuk Sumatra. (AT285; *Kompas*, 8 Agustus 1993)

* Di Kepatihan, Yogyakarta, diselenggarakan resepsi untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan India. (*KU125*)

1949 AGUSTUS (PERTENGAHAN).

* Mr. Ali Sastroamidjojo dan Mr. Sujono Hadinoto berangkat ke Den Haag untuk ikut menjadi bagian dari delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar. (AT160)

1949 AGUSTUS 16.

* Perundingan tak resmi pertama dalam kerangka Konferensi Meja Bundar (KMB) dibuka di Den Haag antara Republik Indonesia, Belanda, dan *Bijeenkomst voor Federaal Overleg* (BFO). (*KU125*)

* Angkatan Udara Republik Indonesia Staf Umum Komando Sumatra di Kotaraja (sekarang Banda Aceh) mengumumkan bahwa prioritas untuk terbang dengan pesawat United Nations Commission for Indonesia (UNCI) ditentukan oleh (1) Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatra Utara bagi

orang sipil, dan (2) Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo bagi tentara.

Prioritas untuk terbang harus dilengkapi dengan *clearance* dari Delegasi Republik Indonesia di Jakarta. Sementara itu nama calon penumpang harus sudah diserahkan kepada Wakil Kepala Staf III AURI di Kotaraja selambat-lambatnya satu minggu sebelum pesawat datang. (TS196-197)

1949 Agustus 17.

* Ulang tahun proklamasi yang ke-4 diperingati oleh seluruh bangsa Indonesia di seluruh dunia, juga di Negeri Belanda.

  Di Jakarta perayaan berpusat di gedung delegasi Republik, Gambir Selatan No. 4. Puluhan ribu orang masuk halaman gedung tersebut, hingga pintu dan jendela mengalami kerusakan.

  Dalam pidato kenegaraannya Presiden Sukarno menyatakan bahwa sejak semula bangsa Indonesia menempuh jalan diplomasi untuk melepaskan perjuangannya dari pengepungan politik, dan dengan tegas menempatkan perjuangannya di atas papan percaturan internasional.

  Presiden pun menyatakan:

  “Alhamdulillah, telah 4 tahun kita berjuang, bekerja membanting tulang, mengisi proklamasi kemerdekaan, menunaikan apa yang telah diikrarkan, memberi konkretisasi kepada kata-kata: ‘Kita bebas, kita merdeka.’ Tetaplah bersemangat elang rajawali! Bagaimana kita dapat menjalankan gerilya, kalau tidak seluruh rakyat kita bersemangat elang rajawali? Ya, sesudah RIS nanti tercapai pun, tetaplah hendaknya bersemangat elang rajawali!” (*KU125-126*; *LU t.h.*; MA280)

* Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dirayakan dengan meriah di seluruh daerah Solo sampai ke pelosok desa. (*PEH91*)

* Untuk pertama kali diadakan pesta besar-besaran untuk merayakan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia di bekas ibukota Negara Indonesia Timur (NIT), Makassar. Sebelumnya perayaan demikian dilarang oleh NIT. (*LU t.h.*)

* Panitia perayaan ulang tahun kemerdekaan di Gorontalo telah berhasil mengumpulkan uang sebanyak *f*35.000 untuk disumbangkan kepada korban perjuangan dan mereka yang menderita di daerah Republik.

Inilah untuk pertama kalinya hari ulang tahun kemerdekaan 17 Agustus dirayakan di tempat ini. (*Antara*, 21/8/1949)

* Ketua delegasi Republik Indonesia (RI) untuk Konferensi Meja Bundar (KMB) sudah berada di Kurthaus, Scheveningen, siap menghadapi KMB dengan Belanda. (RKZ110)

* Bertepatan dengan ulang tahun ke-IV Negara Republik Indonesia, dibuka Konferensi Pemuda Seluruh Indonesia di Yogyakarta, yang tujuannya a.l.: mengadakan silaturahmi, *herordening* , dan menentukan Kongres Pemuda mendatang. (HR153)

* Tercapai Manifest Politik Pemuda Indonesia, yang isi pokoknya adalah:

1. Hanya mengenal 17 Agustus sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan; dan
2. Hanya bernegara kesatuan RI yang berdaulat ke dalam dan ke luar, meliputi seluruh kepulauan Indonesia, termasuk Irian Barat. (*LUxxi*)

* Sesudah mendengarkan *prae-advies* dari Tatang Machmud dan Sutomo dkk., Konferensi Pemuda Seluruh Indonesia ke-IV di Yogyakarta mengeluarkan manifes sbb.:

MANIFEST

Pemuda Seluruh Indonesia yang diadakan di Djokjakarta tgl. 14 sampai 18 Agustus 1949

Sedjalan dengan tingkat perdjuangan jang dihadapi seluruh rakjat Indonesia pada waktu ini, maka kami jang bertanda tangan dibawah ini, perutusan dua puluh delapan organisasi pemuda dari seluruh Indonesia dengan ini menjusun pembaharuan tekad, tenaga dan pikiran untuk melandjutkan perdjuangan pemuda diseluruh Indonesia dengan pedoman sebagai berikut:

1. Dasar: Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

2. Tudjuan: Kesempurnaan Negara Republik Indonesia jang Satu merdeka dan berdaulat keluar dan kedalam, jang meliputi seluruh kepulauan Indonesia (termasuk Irian) dan berdasarkan Pantjasila.
3. Sembojan Perdjuangan:

   Satu Bangsa – Bangsa Indonesia

   Satu Bahasa – Bahasa Indonesia

   Satu Tanah Air – Tanah Air Indonesia

   Satu Negara – Negara Indonesia.
4. Lambang Kebangsaan:

   Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.

   Bendera Negara ialah Sang Merah Putih.

Djogjakarta, 17 Agustus 1949

Ketua:	Wk. Ketua:	Sekretaris:
Ttd.	Ttd.	Ttd.
(S. Harnopidjati)	(Supardo)	(Warouw J.V.)

(HR138-141)

* Konferensi juga mengeluarkan dua Resolusi , yang bunyinya sbb.:

Resolusi 1.

Konferensi Pemuda Seluruh Indonesia jang diadakan di Jogjakarta mulai tanggal 14 sampai 18 Agustus 1949, jang dihadiri oleh perwakilan 28 organisasi pemuda dari seluruh Indonesia, dengan ini:

Menuntut penarikan tentera Belanda se-tjepat-tjepatnja dari seluruh Indonesia dengan ketentuan waktu jang pasti, dan selandjutnya dengan tegas menentang setiap usaha untuk mengadakan perang kolonial.

Jogjakarta, 17 Agustus 1949.

a.n. Konferensi Pemuda Seluruh Indonesia.

Sekretaris:	Ketua:
Ttd.	Ttd.
(Warouw J.V.)	(Soepardo)

Resolusi 2.

Konferensi Pemuda Seluruh Indonesia jang diadakan di Jogjakarta mulai tanggal 14 sampai 18 Agustus 1949, jang dihadiri oleh perwakilan 28 organisasi pemuda seluruh kepulauan Indonesia:

1. Menjatakan dengan ini perhatian dan penghargaan pada semua kawan jang semendjak 17 Agustus 1945 hingga hari ini masih meringkuk dalam tawanan Belanda, akibat perdjuangan kemerdekaan.
2. Mendesak kepada seluruh wakil-wakil rakjat Indonesia supaja memperdjuangkan pembebasan mereka selekas mungkin.

Jogjakarta, 17 Agustus 1949.

a.n. Konferensi Pemuda Seluruh Indonesia.

Sekretaris:	Ketua:
Ttd.	Ttd.
(Warouw J.V.)	(Soepardo)

Manifes dan resolusi ditandatangani 28 organisasi pemuda. (HR141-142)

* Konferensi juga memutuskan mendirikan Sekretariat Pemuda Indonesia dengan pimpinan yang akan dipilih pada 23 Agustus 1949. (HR145-146)

* Beberapa orang tawanan yang selama ini ditahan di kamp Boom Baru, Palembang, dibebaskan oleh pihak Belanda. Tidak semua mereka itu tawanan perang. Banyak di antaranya orang sipil yang sebelumnya tinggal di daerah Republik. (*Antara*, 19/8/1949)

* Dari Palembang dikabarkan, kemarin sore telah tiba di kota ini delapan orang bekas pegawai Republik di Lubuk Linggau yang telah diperintahkan untuk keluar dari daerah TBA (*territoriaal bestuur adviseur*, penasihat pemerintahan teritorial). Alasan pengusiran: sudah lama mereka tidak mau bekerja sama dengan pihak Belanda

Empat dari orang-orang tersebut adalah Hakim Nasution (bekas Inspektur Sosial RI), Anwar (pegawai Jawatan Penerangan RI), Mansjur Junus (pegawai Jawatan Sosial RI), dan Abdul Aziz (Wedana RI).

Keempat orang tersebut akan dikirim ke Jawa, sedangkan lainnya akan ditempatkan di daerah-daerah Sumatra Selatan. (*Antara*, 19/8/1949)

* Ulang tahun ke-4 kemerdekaan Indonesia dirayakan besar-besaran di seluruh Aceh, dan untuk pertama kali dirayakan dalam suasana reda pertempuran.

  Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatra Utara Mr. S. M. Amin dan Gubernur Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, Jenderal Mayor Tgk. Muhd. Daud Beureueh mengucapkan pidato di hadapan rakyat di Kotaraja (sekarang Banda Aceh) yang dihadiri puluhan ribu penduduk dari dalam dan luar kota.

  Kedua pejabat menguraikan sejarah pergerakan kebangsaan, perjuangan menegakkan kemerdekaan, juga perintah tembak-menembak dari Panglima Tertinggi yang harus ditaati. (TS198)

* Percetakan Negara RI di Kotaraja mencetak uang kertas Republik Indonesia bernilai seratus rupiah, ditandatangani oleh Menteri Keuangan RI Mr. Lukman Hakim, bertanggal 17 Agustus 1949.

  Di tengah masyarakat Aceh uang kertas itu disebut “peng mata lembu” (uang mata lembu) karena gambar di sisi belakangnya mirip mata lembu. Namun belum sampai seminggu beredar, uang kertas itu dicabut kembali, karena ditemukan banyak palsuannya. (TS198)

* Menyambut ulang tahun ke-4 kemerdekaan Indonesia, Ketua Dewan Pertahanan Daerah Aceh T. T. M. Daudsjah menulis dalam *Suara Merdeka*, di mana a.l. ia menyatakan:

  “Pada hari ini genaplah usia kemerdekaan kita itu 4 tahun. Dalam masa 4 tahun itu bermacam-macam telah terjadi, karena gangguan dan serangan lawan kita, Belanda. Meskipun demikian kita selalu tetap mengatasinya. Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati perjuangan kita, disebabkan kita membela keadilan.

  Republik Indonesia yang hendak dihapuskan oleh pemerintah Belanda dari muka bumi, rupanya belum dikehendaki oleh yang Maha Kuasa, sehingga pada saat ini masih tegak di atas fundamennya, dan bendera Sang Saka Merah Putih berkibar dengan jayanya.

  Marilah kita berdoa kepada Yang menjadikan sekalian alam, moga-moga perjuangan kita senantiasa diberkatinya dan tercapailah cita-cita kita bersama.” (TS198-200)

* Di Kotaraja berlangsung perayaan menyambut ulang tahun ke-4 kemerdekaan Indonesia. Perayaan dipusatkan di Tanah Lapang Blang Padang, dihadiri para pembesar sipil dan militer, Kepala Jawatan, pemimpin perjuangan, pemuka masyarakat dan rakyat umum.

  Acara dimulai dengan penembakan meriam, tafakur mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur, pengibaran Sang Merah Putih, dan menyanyikan Indonesia Raya.

  Sesudah itu acara diisi dengan pidato Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatra Utara Mr. S. M. Amin, yang a.l. mengatakan:

  "Pada perayaan yang besar seperti hari ini sudah sepatutnya kita melayangkan pikiran kepada pahlawan-pahlawan yang telah berkorban dan gugur untuk kemerdekaan negara, bangsa dan tanah air.

  Marilah kita berdoa untuk arwah mereka itu. Perjuangan kita telah berlangsung 4 tahun dan telah meminta banyak pengorbanan. Tetapi dunia luar dengan ini mengetahui betapa besar cinta kita kepada kemerdekaan dan mempersaksikan sendiri pengorbanan kita itu.

  Bolehlah di sini saya bagi tingkat perjuangan kita atas dua bahagian: Dalam tahun 1945 titik berat perjuangan kita adalah dengan alat senjata. Kemudian kita beralih ke lapangan diplomasi atau politik. Perjanjian Linggajati disusul dengan agressi Belanda yang pertama. Persetujuan Renville juga diikuti dengan agressi militer Belanda yang kedua. Dan sekarang kita telah tiba pada Perjanjian Rum-Van Roijen, di mana kita menuju ke Konferensi Meja Bundar.

  Kita sebagai bangsa yang mempunyai disiplin, harus patuh kepada keputusan-keputusan pemimpin-pemimpin negara kita. Semoga di sebelah barat Lautan Pasifik berdiri satu negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, aman dan makmur.

  Disusul pidato Gubernur Militer Tgk. Muhd. Daud Beureueh yang a.l. menyatakan bahwa Angkatan Perang bersama rakyat dengan insaf berjuang mempertahankan derajat bangsa dan negara kita yang merdeka.

  Gubernur menganjurkan agar kita selalu mengenang jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa raga untuk mempertahankan kemerdekaan." (TS200)

* Dalam rangka memperingati ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-4, Gubernur Militer Tgk. Muhd. Daud Beureueh disertai Letnan Kolonel Husin Jusuf dan sejumlah perwira lain melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Tentara untuk menjenguk para prajurit yang sedang dirawat.

  Pengurus Taman Kesatria Kotaraja pun melakukan kunjungan serupa dan membagikan makanan kepada para pasien. (TS202)

* Di Kotaraja diadakan pawai keliling kota yang diakhiri dengan rapat raksasa, dihadiri puluhan ribu penduduk kota dan sekitarnya

  Rapat dimulai dengan acara kebangsaan, disusul dengan pengajian ayat-ayat suci Alquran oleh Said Ubaidillah, dan diakhiri dengan pidato A. Mu'thi dari Jawatan Penerangan Sumatra Utara, dan Kepala Kantor Pembangunan dan Pemuda Sumatra Utara M. Abduh Sjam. (TS202)

1949 AGUSTUS 18.

* Letkol Suprapto dan Maladi menyampaikan perintah pelaksanaan gencatan senjata dari Kolonel Gatot Subroto kepada Mayor Achmadi. (*PEH91*)

* Pagi: *Landgerecht* (Pengadilan Negeri) Belanda di Jakarta memeriksa perkara delik pers mingguan buruh, *Pekerdja,* dengan pemimpin redaksinya Suhardjo sebagai terdakwa. Ia dituduh telah melakukan hasutan dalam majalah No. 98 yang terbit bulan Juni yang lalu. Menurut tuduhan itu, dalam tulisan berjudul "Perang Saudara?" terdakwa telah memuji gerilyawan yang berkeras meneruskan perjuangan sebagai orang-orang yang konsekuen antiimperialis dan antikapitalis, meskipun *cease fire* telah diberlakukan.

  Orang-orang Indonesia yang tak menyetujui *cease fire* di dalam tulisan tersebut dibayangkan akan menjelma menjadi tentara pembebasan rakyat, sedangkan orang-orang yang menyetujui dinyatakan sebagai jongos-jongos imperialisme dan kapitalisme.

  Menjawab *Landrechter* (Hakim) Mr. De Groot, terdakwa menyangkal dirinya telah melakukan hasutan dengan tulisan itu. Dikatakannya, ia hanya menggambarkan tentang perpecahan yang mungkin terjadi antara para gerilyawan yang mau meneruskan pertempuran dan mereka yang mau menerima *cease fire*. Terdakwa sendiri tidak menyetujui *cease fire*, tetapi

sebagai warga negara Republik Indonesia ia akan tetap taat pada putusan Pemerintah Republik. Terdakwa juga menyangkal tuduhan Landrechter bahwa tulisannya berbau komunis.

Dalam perkara tersebut, Suhardjo dibela oleh Mr. Sudiman. Sesudah tuduhan dibacakan, pembela minta agar perkara tersebut disesuaikan dengan suasana kini, yaitu suasana berlakunya penghentian permusuhan. Sebaliknya Landrechter berpendapat, bahwa perkara itu harus dinilai dari keadaan ketika kesalahan tersebut dilakukan.

Dalam perkara ini telah didengar juga keterangan saksi, anggota redaksi *Pekerdja*, yaitu Iskandar (k.l. 24). Pemeriksaan akan dilanjutkan pada 1 September mendatang.

Majalah *Pekerdja* adalah majalah independen dengan tiras 2.000 eksemplar, dan hingga kini masih diberangus.

Semua anggota pengurus Persatuan Wartawan Indonesia hadir dalam sidang perkara ini. Perhatian umum terhadap perkara ini sangat besar. (*Antara*, 19/8/1949)

* Kantor berita *Aneta* mengabarkan bahwa hari ini, Kamis, telah dibebaskan 130 orang tahanan politik dari tempat penahanan Bubutan, Surabaya, dan dikembalikan ke tempat tinggal masing-masing.

  Ini adalah rombongan tahanan kelima yang dibebaskan dari kamp penahanan Bubutan. (*Antara*, 19/8/1949)

* Dikabarkan oleh *Aneta* bahwa dua gerombolan bersenjata lengkap telah menyerang pelabuhan Semarang pada 16 Agustus yang lalu.

  Menurut berita itu, gerombolan yang pertama sempat diketahui oleh Belanda sebelum berhasil memasuki kota, sedangkan gerombolan kedua yang lebih besar telah sampai di luar kota Semarang pagi tanggal 17 Agustus.

  Setelah melepaskan tembakan ke arah kamp militer Belanda, gerombolan kabarnya dapat dicerai-beraikan. (*Antara*, 19/8/1949)

* Sesuai dengan semangat Rum-Roijen *Statement*, hari Sabtu 12 Agustus yang lalu telah dibebaskan 65 orang anggota TNI dari kamp tahanan Boom Baru, Palembang. Dengan demikian, masih setidak-tidaknya 150 tahanan lagi yang belum dibebaskan oleh pihak Belanda. (*Antara*, 20/8/1949)

* Jumat pagi: Sumarjo, seorang utusan Komisi *Cease Fire*, berangkat ke Muara Aman untuk menemui gubernur Militer Sumatra Selatan A.K. Gani dan Mayor Abd. Basit di Baturaja.

  Rabu pagi utusan Komisi *Cease Fire* lainnya berangkat ke Jambi untuk menemui Dr. Isa. (*Antara*, 20/8/1949)

* *Aneta* mengabarkan bahwa dalam debat mengenai masalah Indonesia di Majelis Rendah Belanda, Menteri Daerah Seberang Lautan Van Maarseveen menyinggung masalah infiltrasi pasukan Indonesia ke Mojokerto, Jawa Timur. Katanya, pasukan tersebut telah diperingatkan oleh para peninjau militer dari UNCI untuk menarik diri, tetapi peringatan tidak digubris. Pasukan Belanda lalu bertindak, menangkap 50 orang dan merampas sejumlah senjata. (*Antara*, 19/8/1949)

* Wakil Kepala Staf III Angkatan Udara Republik Indonesia, Opsir Udara I Sujoso Karsono, mengeluarkan Maklumat AURI No. 5/P berisi pernyataan bahwa pembukaan Sekolah Penerbang untuk Bagian Opsir tertunda, dan lebih dahulu akan dibuka Sekolah Penerbang untuk Opsir Rendah (*Onder Officier*).

  Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para calon: berijazah Sekolah Menengah Pertama, berbadan sehat menurut pemeriksaan dokter, tak beristri, tinggi 1,60 m, dan berumur kurang dari 22 tahun.

  Jumlah calon yang akan diterima 15 orang. Kepada mereka akan diberikan pelajaran teori dan kemiliteran selama 4 bulan, sesudah itu pelajaran praktek terbang. Calon yang lulus akan mendapat pangkat Kadet II, Sersan Mayor Udara Penerbang. (TS202)

* Dua orang pemuda di Martapura merampas pistol seorang agen polisi, dan menghilang. Penggeledahan yang dilakukan polisi atas orang-orang di pasar tidak menghasilkan apapun. Dua malam berturut-turut (12 dan 13 Agustus) Kota Kandangan mengalami serangan gerilya, yang berlangsung sampai pagi. Tanggal 13 Agustus malam, kota minyak Murung Pudak untuk pertama kali mendapat serangan gerilya. Sedangkan Senin pagi (15 Agustus) seorang pemuda merampas senapan seorang agen polisi, lalu menyerang tangsi polisi seorang diri. Ia gugur dalam penyerangan itu. (*Antara*, 23/8/1949)

* Delegasi Republik dan BFO (*Bijeenkomst voor Federaal Overleg*) ke Konferensi Meja Bundar (KMB) telah mengadakan resepsi bertempat di Palace Hotel di Den Haag berkenaan dengan Hari Kemerdekaan Republik, demikian dikabarkan oleh *Aneta* dari Den Haag.

  Resepsi dengan tuan rumah Mohammad Hatta dan Sultan Hamid II ini dihadiri oleh beberapa pembesar Pemerintah Belanda, a.l. Dr. Van Roijen, bekas Menteri Logemann, Jonkman, dan Schermerhorn, anggota buruh dari Majelis Rendah, semua anggota UNCI (United Nations Commission for Indonesia) dan wakil-wakil perhimpunan-perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda. (*Antara*, 19/8/1949)

* Soal yang akan dibicarakan dalam KMB besok adalah prosedur konferensi. Hari ini pembicaraan tak resmi mengenai soal-soal detil konferensi berjalan terus, tetapi hanya bersifat pertukaran pikiran.

  Hari Selasa mendatang, pada waktu konferensi telah dibuka, semua surat untuk konferensi akan diberi tanda kantor pos istimewa. (*Antara*, 20/8/1949)

1949 AGUSTUS 19.

* Tadi malam Sultan Hamengku Buwono IX telah melakukan pertemuan beberapa waktu lamanya dengan Wakil Tinggi Mahkota Belanda, A. H. J. Lovink.

  Dengan disertai Mr. Ali Budiardjo, pagi ini Sultan berangkat ke Surabaya. Menurut rencana, hari ini juga ia akan kembali ke Yogyakarta. (*Antara*, 19/8/1949)

* Sore kemarin telah tiba di Jakarta dari Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono IX dengan anggota delegasinya, Moh. Natsir, Mr. Ali Budiardjo serta Kolonel Simatupang. Telah tiba juga hari itu Konsul Jenderal India Dr. Alagappan dengan keluarga.

  Ditanya tentang keberangkatannya ke daerah-daerah *cease fire* yang lain dari Jawa Barat, Sultan menyatakan bahwa ia berharap akan dapat melakukannya minggu depan. Mula-mula ke Jawa Tengah, lalu ke Jawa Timur, dan baru sesudah itu ke Sumatra.

  Berkenaan dengan *cease fire*, Kolonel Simatupang menyatakan bahwa ini menyangkut masalah psikologis dan teknis, yang untuk kelancaran

dan kesempurnaan pelaksanaannya dibutuhkan waktu. Berapa lama dibutuhkan waktu, hal itu tergantung dari *goodwill* kedua belah pihak. Memang untuk mengatasi kesulitan-kesulitan teknis, pihak Republik memerlukan bantuan dari pihak Belanda, misalnya dalam hal alat-alat perhubungan seperti radio dll. (*Antara*, 19/8/1949)

* Tentang pertemuan Sultan Yogya dengan Wakil Tinggi Mahkota Lovink kemarin malam, lebih jauh diketahui, bahwa yang dibicarakan adalah soal-soal yang bersangkutan dengan *cease fire*.

  Dari pembicaraan panjang lebar itu akhirnya dianggap Peristiwa Solo telah selesai, dan soal *cease fire* di Jawa Barat pun telah beres. Soal Semarang sedang dibereskan, sedangkan untuk soal Surabaya diperlukan kedatangan Sultan Yogya ke sana untuk bertemu dengan Panglima TNI Jawa Timur.

  Jadi kesulitan-kesulitan yang masih ada dalam melaksanakan *cease fire* itu berkaitan dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. (*Antara*, 19/8/1949)

* Presiden Republik Vietnam Ho Chi Minh mengirim ucapan selamat kepada Presiden Sukarno berhubung dengan perayaan ulang tahun keempat Republik Indonesia pada 17 Agustus yang lalu. Ucapan selamat selengkapnya berbunyi sbb.:

  "Berhubung dengan perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia, maka atas nama Pemerintah, rakyat dan tentera Vietnam, dan atas nama saya sendiri, saya mendapat kehormatan menyampaikan kepada Yang Mulia ucapan selamat persaudaraan. Saya berharap agar Yang Mulia menyampaikan kepada rakyat dan tentara Indonesia perasaan bangga kita dan selamat bagi keperwiraan mereka dalam memperjuangkan kemerdekaannya, serta berdoa, agar mereka hendaknya dirahmati dengan kemenangan dan perdamaian." (*Antara*, 25/8/1949)

* Letkol TNI Tri Sudewo yang baru datang dari Banten menyatakan hari ini bahwa Banten dalam keadaan baik. Tentang *cease fire* dikatakannya, baru dalam taraf permulaan.

  Telah diadakan pertemuan antara pihak kita dengan pihak Belanda. "Saya datang kemari ini untuk urusan selanjutnya," demikian Tri Sudewo. (*Antara*, 19/8/1949)

* Menjawab pertanyaan tentang *cease fire,* juru bicara UNCI mengatakan di Jakarta hari ini, "Sampai sekarang jalannya baik. Laporan-laporan yang lengkap dari peninjau-peninjau militer UNCI, baik dari Jawa maupun daerah-daerah lainnya, belum diterima." (*Antara,* 19/8/1949)

* Di Jakarta Sultan Hamengku Buwono mengadakan pertemuan dengan Ketua Delegasi RI Mr. Susanto Tirtoprodjo, dihadiri oleh anggota delegasi Moh. Natsir, Mr. Ali Budiardjo dan Sekretaris Jenderal Delegasi Mr. A. Wahab.

  Beberapa waktu sesudah itu diberikan keterangan oleh Juru Bicara Delegasi RI berkenaan dengan keterangan Mr. Van Maarseveen di Tweede Kamer (Majelis Rendah) baru-baru ini. Keterangan itu selengkapnya sbb.:

  "Pendapat kami tentang keterangan Menteri Van Maarseveen di rapat terbuka dari Tweede Kamer, seperti yang tertera di dalam siaran *Aneta* tanggal 18/8 itu adalah bahwa pengumuman tuduhan tentang insiden-insiden seperti itu sendiri sebenarnya adalah bertentangan dengan peraturan cease fire sendiri, karena hal yang demikian itu harus melalui UNCI.

  Selain daripada itu kejadian-kejadian yang diterangkan di sana terjadinya sebelum tanggal 11/8.

  Lain daripada itu tuduhan-tuduhan Belanda tersebut sudah dibicarakan dalam rapat Central Joint Board tanggal 11/8 yang lalu. Dan hasil dari pembicaraan itu sudah disiarkan dengan resmi oleh UNCI dalam komunikenya tanggal 15/8 yang lalu, yang sudah diketahui oleh umum. Dengan ini sebenarnya soal itu sudah selesai.

  Kalau yang berkenaan dengan kejadian-kejadian sebelum tanggal 11/8 itu pihak delegasi Indonesia sendiri memang banyak yang bisa dikemukakan sebagai tuduhan. Umpamanya pihak delegasi Indonesia tidak pernah menyiarkan, bahwa Solo sudah pernah dua kali dibom oleh pihak Belanda, yaitu pada tanggal 7/8 selama satu jam dengan 5 buah kapal terbang dan satu kali lagi pada tanggal 8/8.

  Cara-cara kita menghadapi kejadian-kejadian semacam ini sebenarnya tergantung kepada niat apa yang hendak kita capai.

  Menurut pendapat kami, inilah cara yang sewajarnya untuk menghadapi kejadian semacam itu." (*Antara,* 19/8/1949)

* Hari Sabtu lusa Delegasi RI akan berangkat ke Yogyakarta, dan menurut rencana akan kembali ke Jakarta hari Selasa minggu depan.

  Keberangkatan delegasi ini sesuai dengan rencana kerja yang mengharuskan Delegasi berganti-ganti tinggal di Jakarta dan Yogyakarta.

  Tentang tugas Delegasi RI diterangkan oleh Ketua Delegasi Mr. Susanto Tirtoprodjo, bahwa tugas delegasinya adalah berkenaan dengan pelaksanaan soal-soal yang tercakup dalam Rum-Roijen Statement, yaitu *cease fire*, tawanan perang dll. (*Antara*, 19/8/1949)

* Angkatan Komunis Muda (ACOMA) baru menandatangani manifes dan resolusi Konferensi Pemuda Seluruh Indonesia 14-18 Agustus 1949. (HR142)

* Rombongan utusan dari luar Yogyakarta untuk mengikuti Permusyawaratan Wanita Indonesia di Yogyakarta akan berangkat dengan kereta api dari Jakarta pada 24 Agustus lewat Semarang.

  Rombongan akan datang dari: Jakarta 40 orang, NIT 7 orang, Kalimantan Selatan 2 orang, Kalimantan Barat 3 orang, Sumatra Timur 6 orang, Bangka 11 orang, Tanjung Pandan 2 orang, Palembang 5 orang, Malang 9 orang, Surabaya 1 orang, Kudus 1 orang, Bandung 1 orang, Bogor 1 orang, Sukabumi 1 orang, Semarang 2 orang, Tarutung 3 orang, dan Belitung 1 orang. (*Antara*, 19/8/1949)

* Mulai 1 September mendatang harian federalis *Warta Indonesia* Jakarta akan dilikuidasi, demikian berita dari kalangan yang layak dipercaya.

  Tindakan likuidasi ini sampai sekarang masih terbatas pada pemberhentian sebagian anggota redaksinya.

  Sesudah likuidasi terlaksana, mungkin akan diterbitkan harian federalis lain dengan nama lain pula. (*Antara*, 21/8/1949)

* Mulai hari ini cukai gula dinaikkan 25 sen per kilo. Dengan demikian, harga penjualan gula harus dinaikkan sesuai kenaikan cukainya.

  Direktur CVO di Jakarta minta agar semua cabang CVO dan wakil-wakil departemen urusan ekonomi, demikian juga wakil-wakil Gabungan Penjual Gula (Verkoop Combinatie voor Suiker) dari CVO di seluruh daerah pabean di Indonesia memperhatikan hal ini.

Kepada umum diberitahukan bahwa mulai hari ini harga eceran terendah gula yang telah ditetapkan itu bisa dinaikkan 25 sen sekilo. (*Antara*, 19/8/1949)

* Sehubungan dengan persetujuan gencatan senjata Belanda-Indonesia, wakil-wakil Republik dari Aceh berangkat hari ini dari Langsa ke Medan dengan pesawat Catalina yang dikirim oleh Belanda.

  Di Medan mereka akan melakukan perundingan mengenai pembentukan *Local Joint Committee* dalam rangka gencatan senjata. (TS204)

* Usai mewakili Republik Indonesia dalam perundingan dengan Belanda di Medan, Mayor Nazir dan Letnan Muda Chaidir Anwar (dari Aceh) menuju Pematang Siantar bersama Kapten Abst (anggota peninjau militer Belgia dari UNCI), dan seorang opsir Belanda.

  Mereka akan melakukan kontak dengan komandan-komandan TNI setempat berhubung masih seringnya terjadi insiden setelah berlakunya penghentian tembak-menembak. Hari ini juga mereka kembali ke Medan.

  Dalam wawancara dengan wartawan *Harian Waspada*, Mayor Nazir menerangkan bahwa ia tidak berhasil menemui para komandan tersebut, tetapi ia telah mengirim surat kepada mereka. (TS204)
* Menjawab pertanyaan wartawan mengenai pendapat umum di Aceh berkenaan dengan penghentian tembak-menembak dan rencana pembukaan Konferensi Meja Bundar, Mayor Nazir menyatakan di Langkat Hotel, Medan, bahwa pada umumnya rakyat di Aceh yakin akan kebijakan Pemerintah Sukarno-Hatta. Kalangan militer pun mematuhi perintah Panglima Tertinggi. (TS204)

* Kepolisian Keresidenan Aceh kembali akan membuka Kursus Kepolisian bagi anggota polisi dan umum. Calon peserta yang akan diselenggarakan selama enam bulan di Kotaraja harus memenuhi syarat-syarat sbb.:

  1. Umur 20 sampai 30 tahun
  2. Pendidikan sekurang-kurangnya klas 3 SMP atau yang sederajat
  3. Tinggi badan 1,6 meter lebih
  4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena sesuatu kejahatan
  5. Mempunyai sikap yang baik (*houding*) dan tiada cedera
  6. Mempunyai surat keterangan dokter atau jururawat yang berwewenang.

Mereka yang lulus ujian penghabisan akan dipekerjakan pada Jawatan Kepolisian dengan pangkat Komandan Polisi, sedangkan yang tidak lulus dapat dipekerjakan sebagai Agen Polisi klas 1, dan diwajibkan berdinas selama sekurang-kurangnya dua tahun. (TS204-205)

* Ditanya kesan-kesannya sekembali dari Yogyakarta kemarin, Konsul Jenderal India Dr. Alagappan menyatakan:

  "Dibandingkan dengan perkunjungan saya ke Yogya pada tanggal 8 Juli dulu, ternyatalah, bahwa dalam perkunjungan saya sekali ini rakyat Yogya gembira sekali kelihatannya. Ternyata juga bahwa soal makanan sudah dapat dipecahkan oleh Pemerintah republik. Hanya yang masih kurang ialah tentang soal obat-obatan.

  (Tentang cease fire dan keadaan politik Indonesia-Belanda, Dr. Alagappan menyatakan) Terhadap pelaksanaan cease fire itu, rupanya kedua pihak mencoba menghindarkan insiden-insiden. Republik sendiri kelihatan ingin melakukan cease fire ini dengan sungguh-sungguh.

  Terhadap perkembangan politik, umpamanya tentang keterangan Prof. Romme itu, masih memberi kemungkinan untuk mengadakan pertukaran fikiran. Maka itu dengan memperhatikan semuanya ini, saya merasa optimistis terhadap tercapainya suatu persetujuan di antara Belanda dengan Indonesia.

  Ditanya tentang kemungkinan Tuan Mani menggantikan Tuan Junus di Yogya, ia menerangkan bahwa sampai sekarang belum ada kabar akan kembalinya Tuan Junus ke Indonesia. Bahkan kemungkinan besar sekali ia akan ditempatkan di kawasan negara-negara Arab.

  Diketahui, Konsul Jenderal India tersebut akan berkunjung sepekan lamanya ke Indonesia Timur mulai 22 Agustus yang akan datang untuk bertemu dengan para pembesar NIT dan orang-orang India di sana. Akan dipertimbangkan juga kemungkinan membuka hubungan kebudayaan antara penduduk NIT dengan masyarakat India di sana." (*Antara*, 19/8/1949)

* Dari pihak resmi India di Jakarta didapat kabar bahwa oleh Dr. Alagappan atas nama Pemerintah dan Perdana Menteri India, telah diserahkan kepada Presiden Sukarno film tentang Konferensi Asia yang telah diadakan di New Delhi bulan Januari tahun ini untuk membahas soal Indonesia.

Penyerahan film itu dilakukan dalam acara resepsi untuk merayakan Hari Proklamasi 17 Agustus di Istana Presiden, dihadiri oleh wakil-wakil korps konsuler, tokoh-tokoh terkemuka Republik dll. (*Antara*, 19/8/1949)

1949 AGUSTUS 20.

* Delegasi Militer Indonesia untuk Konferensi Meja Bundar (KMB) bertolak dari Jakarta ke Den Haag. (*KU126*)

* Kemarin sore jam 4 lewat sedikit telah kembali dari Surabaya Sultan Yogya dan Mr. Ali Budiardjo dengan pesawat pembom Belanda. Di Surabaya Sultan Yogya telah mengadakan pembicaraan sekitar *cease fire* dengan opsir-opsir TNI, Belanda dan UNCI.

  Sultan menceritakan, bahwa situasi tenteram, dan tidak sebagaimana yang terlalu digembar-gemborkan belakangan ini.

  "Dari cerita yang didengar, saya menyangka akan bertemu dengan serdadu TNI setelah melangkah ke kota," kata Sultan sambil tertawa.

  Setibanya di Jakarta, Sri Sultan dan Mr. Ali Budiardjo lalu mengadakan perundingan dengan Mr. Susanto Tirtoprodjo (ketua delegasi Republik), M. Natsir, dan Kolonel Simatupang.

  Hari ini juga Sultan Yogya akan berangkat kembali ke Yogya. (*Antara*, 20/8/1949)

* Pagi ini Wakil PM Hamengku Buwono dan Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim berangkat kembali ke Yogyakarta dari Jakarta untuk menghadiri sidang kabinet Republik yang akan diadakan malam nanti.

  Wakil PM menerangkan bahwa yang akan dibicarakan dalam sidang kabinet itu adalah soal-soal yang mengenai keadaan umum sekarang. (*Antara*, 20/8/1949)

* "*Cease fire* berjalan baik," kata Haji Agus Salim pagi ini kepada wartawan *Antara* dalam percakapan di lapangan terbang Kemayoran. "Di Negeri Belanda orang berteriak-teriak meniup-niup soal pertempuran yang sebenarnya telah selesai, seperti di Surabaya, Semarang, dan Solo," tambahnya.

  Haji Agus salim, Sultan Yogya, Mr. Susanto Tirtoprodjo dan Ir. Laoh berangkat hari ini ke Yogyakarta untuk menghadiri sidang kabinet yang akan diadakan nanti malam.

Ditanya, apakah yang akan dibicarakan dalam sidang tersebut, Ir. Laoh menjawab bahwa salah satu acara terpenting adalah *cease fire*. Haji Agus Salim menambahkan, bahwa jika *cease fire* dan Konferensi Meja Bundar berjalan baik, ia merencanakan akan tinggal 20 hari di Yogyakarta dan 10 hari di Jakarta tiap bulannya. "Di Jakarta untuk melakukan kontak-kontak yang perlu," katanya. (*Antara*, 20/8/1949)

* Berhubung dengan keberangkatan wakil-wakil golongan Arab ke Konferensi Meja Bundar di Den Haag yang terdiri dari Hamid Algadrie, Abdulkadir Asegaff, dan J. A. Alaydrus semalam bertempat di pavilyun Hotel Des Indes oleh perkumpulan-perkumpulan bangsa Arab di Jakarta, diadakan pertemuan silaturahmi yang a.l. dihadiri oleh gubernur Hilman Djajadiningrat, wakil-wakil Belanda dan pemuka-pemuka kalangan Arab di Jakarta.

J. A. Alaydrus atas nama ketua panitia a.l. menyatakan bahwa wakil-wakil golongan Arab yang mengikuti Konferensi Meja Bundar itu tergabung dalam delegasi Republik dan BFO, di mana mereka akan menjadi tenaga advies dalam hal-hal khusus.

Lebih jauh ditegaskan bahwa wakil-wakil golongan Arab tersebut tidak akan mempertahankan kepentingan golongan Arab, apabila kepentingan itu dapat menghalangi kepentingan Indonesia. Sebab, "kami telah bertekad bulat akan mengorbankan kepentingan golongan sendiri untuk kepentingan Indonesia, dan pertanggungjawaban atas nasib kami sebagai warga negara Indonesia tidak terletak pada utusan-utusan kami itu, yang merupakan tenaga advies, tetapi semata-mata terletak dan tergantung pada seluruh perwakilan Indonesia, baik Republik maupun BFO yang termasuk juga di dalamnya utusan-utusan kami itu".

Sesudah itu diberikan sambutan oleh ketiga wakil golongan Arab dan oleh Gubernur Hilman Djajadiningrat, yang semuanya mengharap agar konferensi mendatangkan hasil sebaik-baiknya bagi kepentingan Indonesia.

Hamid Algadrie akan berangkat hari ini, sedangkan lainnya akan menyusul pada 25 Agustus mendatang. (*Antara*, 20/8/1949)

* Rombongan terakhir delegasi Republik ke Konferensi Meja Bundar telah berangkat pagi ini dengan pesawat *contellation* "Pontianak". Rombongan terdiri dari Dr. J. Leimena, Kol. Simatupang, Letkol Daan Jahja, Mayor

Marjono, Abikusno Tjokrosujoso, Hamid Algadrie, Sabaruddin dari Bank Negara dll.

Sebelum berangkat, Abikusno menerangkan bahwa menurut pandangannya konferensi akan dapat berjalan baik. Menurut dugaannya, waktu satu setengah bulan telah cukup untuk menyelesaikan soal-soal di Den Haag, yang titik beratnya adalah soal-soal ekonomi dan keuangan. (*Antara*,20/8/1949)

* Hari ini diumumkan bahwa naskah prosedur dan agenda sementara KMB yang akan dilangsungkan hari Selasa sudah selesai.

Para pemimpin delegasi tidak bersedia memberi komentar tentang *cease fire* di Indonesia, hanya menyatakan bahwa di waktu permulaan akan ditemui kesulitan-kesulitan.

Ketika surat Menteri Daerah Seberang Lautan J. H. van Maarseveen yang menuduh Republik melanggar perintah *cease fire* dibacakan di Parlemen Selasa y.l., reaksi dari pihak Republik yang mula-mula adalah bahwa hal itu “tidak pada waktunya”.

Seorang anggota delegasi Republik menyatakan, barangkali surat itu diperlukan untuk memenuhi janji kepada Parlemen Belanda, sekalipun kabar-kabar itu boleh jadi berlainan maksudnya.

Pemimpin Delegasi Republik Mohammad Hatta menyatakan bahwa ia tak mau mempertengkarkan isi surat itu, karena hanya akan merusak suasana di Den Haag yang sudah baik dalam menghadapi konferensi.

Delegasi Republik tampaknya sudah puas dengan menyampaikan protes resmi kepada Central Joint Board di Jakarta terhadap pengumuman itu.

Hari ini kesibukan konferensi berupa pertemuan informal dan pertemuan perorangan antara para anggota delegasi, yang hasilnya adalah prosedur dan lain-lain soal detil. Kesibukan lain adalah penentuan tempat konferensi pers di ruangan “*Ridderzaal*”, dan rencana seksi film Indonesia yang akan menyiapkan dokumen mengenai konferensi ini.

Tak seorang pun peninjau dari Hindia Barat Belanda datang. Suriname telah mengumumkan beberapa hari y.l. bahwa mereka tak akan mengirimkan peninjaunya ke konferensi. Mereka kecewa terhadap Pemerintah Belanda yang telah menyusun ketatanegaraan baru sementara bagi mereka.

Besok di semua gereja Protestan Belanda akan dibacakan pesan istimewa berisi harapan agar permusyawaratan di Den Haag itu akan berlangsung dalam semangat perdamaian dan tidak mengedepankan kebencian. (*Antara*, 22/8/1949)

* Perundingan tak resmi antara delegasi Republik Indonesia yang datang dari Aceh dengan delegasi Belanda dimulai di Medan di bawah tilikan UNCI. Dalam kesempatan itu dibentuk Local Joint Committee untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan penghentian tembak-menembak.

  Dibicarakan pula tentang teknik pelaksanaan gencatan senjata, penentuan daerah-daerah patroli (*patrouille gebieden*), perbekalan, serta pembagian pakaian dan obat-obatan kepada yang memerlukan.

  Delegasi Republik Indonesia terdiri dari Mayor M. Nazir (Ketua), Tk. Maimun Habsjah, Kapten Mudjihardjo, Letnan II Azwar L., Letnan Muda Arifin Pulungan, Letnan Muda Chaidir Anwar, O.K. Salamuddin (Bupati Langkat), dan Bachtiar (Penasihat). (TS205)

* *Radio Makasar* memberitakan bahwa Komandan Pasukan Republik di Sumatra, Kolonel Hidajat, akan mendatangi berbagai kesatuan TNI di Sumatra berkenaan dengan adanya perintah penghentian tembak-menembak. (TS205)

1949 AGUSTUS 21.

* *Radio Republik Indonesia* (*RRI*) Yogyakarta memberitakan bahwa Wakil Perdana Menteri Mr. Sjafruddin Prawiranegara akan berangkat ke tempat kedudukannya di Kotaraja (sekarang Banda Aceh) bersama Menteri Agama besok. Selanjutnya akan disusul oleh rombongan di bawah bekas Menteri Penerangan Mohd. Natsir, yang terdiri dari para ahli di bidang pembangunan, kesehatan dll.

  Dalam percakapan dengan wartawan, Sjafruddin menerangkan bahwa penempatannya di Aceh menjadi bukti bahwa Sumatra mendapat perhatian penuh dari Pemerintah Pusat. “Sumatra memang sangat penting bagi pembangunan Indonesia, terutama di lapangan ekonomi,” demikian Sjafruddin.

Mengenai perhubungan langsung antara Kotaraja dan Yogyakarta, menurut Sjafruddin akan digunakan pesawat Republik Indonesia yang kini masih berada di luar negeri (maksudnya pesawat RI-001 Seulawah). (TS205-207)

* "Mengingat suasana politik dewasa ini, saya akan berusaha menciptakan lagu-lagu baru yang dapat menambah semangat perjuangan menuju ke arah yang terakhir," demikian Sutedjo, pemimpin Orkes Studio Jakarta dalam percakapan dengan *Antara* pada malam peringatan setahun usia orkes tersebut di ruang pertemuan Kantor Polisi, Gambir Barat, Jakarta.

Perayaan tersebut dihadiri oleh ratusan tamu, dan disiarkan oleh *Radio Republik Indonesia*. Dalam kesempatan itu diperdengarkan berbagai lagu, a.l. *potpouri* (rangkaian lagu) daerah dari Maluku sampai Sriwijaya, yang mendapat sambutan hangat dari hadirin.

Sutedjo menerangkan, dalam setahun, dengan bantuan Iskandar, Zaiful, dan Jahja selaku ahli dalam seni suara, ia telah berhasil menciptakan l.k. 60 lagu baru dengan jiwa dan semangat baru pula, a.l. lagu *Sayang-sayang dibuang sayang* dan *Pilihan Hati*.

Perlu disebutkan bahwa Orkes Studio Jakarta beranggota 25 orang, terdiri dari 6 penyanyi, 8 pemain biola, 3 peniup trompet, 4 peniup saksofon dll. (*Antara*, 21/8/1949)

* Untuk mencegah terjadinya salah paham, pimpinan harian *Warta Indonesia* mengumumkan bahwa berita tentang rencana likuidasi harian tersebut harus diartikan sebagai perubahan-perubahan dalam organisasi perusahaan, redaksi, dan administrasi.

Perubahan-perubahan itu semata-mata untuk perbaikan. *Warta Indonesia* akan tetap terbit, tetapi dengan staf dan semangat serba baru, demikian pengumuman tersebit. (*Antara*, 21/8/1949)

* Dari sumber yang dapat dipercaya diperoleh kabar bahwa sampai Agustus 1949 di seluruh Indonesia tercatat (dengan lisensi) 24.500 pesawat tenun tangan (bukan gedogan, atau alat tenun kampung) dan 1.060 pesawat tenun motor.

Tanggal Januari 1949 jumlah itu masing-masing adalah 17.600 dan 980,

sedangkan sebelum perang (tahun 1942) jumlahnya masing-masing 16.000 dan 900.

Angka-angka di atas menunjukkan betapa besar minat orang terhadap industri tenun. Kebanyakan pesawat tenun tangan tercatat dengan nama orang Indonesia selaku pemilik, tapi belakangan ini tidak sedikit pesawat tersebut dijual kepada orang Tionghoa, karena kehabisan modal. (*Antara*, 21/8/1949)

* Tahun ini dilakukan persiapan untuk mentransmigrasikan 100 keluarga dari Madura ke Kalimantan Selatan.

Usaha semacam ini telah dimulai tahun 1939. Ketika Perang Dunia II mulai, di Pengaron (tidak jauh dari Banjarmasin dan Martapura) sudah terdapat 500 keluarga dari Madura, dengan jumlah seluruhnya 2.000 jiwa. Untuk mereka ini disediakan tanah berbukit seluas 15.000 ha yang sebagian besar hanya bisa dipakai untuk penggembalaan ternak dan kebun jeruk. Padi hanya ditanam secara berladang, karena tanah tersebut tidak bisa diairi.

Daerah transmigrasi ini sampai sekarang masih terpelihara berkat tetap baiknya hubungan dengan Madura. Baiknya hubungan ini menjadi salah satu sebab juga berkembangnya peternakan sapi Madura. Saat ini di daerah itu sudah ada 1.000 ekor sapi Madura.

Selain bertani dan beternak, para transmigran mendapat pekerjaan pada Jawatan Kehutanan dan Pekerjaan Umum. Sebagian lagi berdagang hasil bumi, misalnya tembakau, dari Jawa.

Daerah transmigrasi untuk penduduk Madura ini, menurut kabar, akan diperluas. Kepadatan penduduk Madura pada saat ini 295 orang per km^2, sedangkan pulau tersebut sedikit sekali memberikan peluang kerja. (*Antara*, 21/8/1949)

* Komando TNI Divisi X Sumatra tetap menjaga kewaspadaan menghadapi setiap kemungkinan yang bisa terjadi dengan pihak Belanda, walau Konferensi Meja Bundar akan dimulai lusa.

Cara-cara yang digunakan pihak Belanda, yaitu selalu mengajak berunding tiap kali dalam keadaan terjepit, merupakan pelajaran bagi para pemimpin pemerintah, pemimpin perjuangan, pemimpin TNI dan rakyat Indonesia seluruhnya, untuk selalu berhati-hati.

Tangse di Aceh Pidie dan Takengon di Aceh Tengah dijadikan calon ibukota Republik Indonesia apabila sewaktu-waktu Yogyakarta jatuh kembali ke tangan Belanda. (TS207)

* Di mana-mana di daerah Kalimantan masih terdengar tembak-menembak. Wali Daerah M. Hanafiah, Kyai Besar H. Raden, dan Kyai Kepala Basuni yang pada 14 Agustus y.l. diculik, sampai sekarang belum kembali. Pihak pasukan perjuangan mendesak para pegawai pemerintah supaya meletakkan pekerjaan.

  Pada 14 Agustus sepasukan polisi di Gambut telah menghilang dengan senjatanya. Dan, belum diketahui apa sebab pada 20 Agustus 1949 Kyai Kepala Basri dan Kyai Rumawi dari Martapura ditangkap oleh polisi militer.

  Lewat selebaran-selebaran yang ditandatanganinya, Hasan Basri yang menamakan diri sebagai Gubernur Tentara telah menetapkan garis demarkasi bagi pasukan perjuangan, 2 km di luar kota Kandangan. Keadaan makin memburuk, dan penduduk gelisah.

  Untuk mengatasi keadaan itu telah dibentuk Badan Koordinasi yang terdiri dari Dewan Dayak Besar, Dewan Banjar, Persatuan Pamongpraja, dan Persatuan Pegawai Negeri. Badan ini telah mengirim kawat ke Jakarta berisi desakan agar Pemerintah mengambil tindakan, karena kelambatan dalam menyelenggarakan *cease fire* bisa membahayakan Kalimantan. Badan pun mendesak agar Komisi *Cease fire* datang untuk menyelesaikan masalah ini. (*Antara*, 21/8/1949)

1949 AGUSTUS 22.

* Delegasi Republik dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag telah tersusun dalam panitia-panitia sbb.:

  Steering: Hatta, Rum, Pringgodigdo.

  Panitia Ketatanegaraan: Supomo, Rum, Sukiman, Ali Sastroamidjojo, Kusumah Atmadja, Yamin, Hamid Algadrie dan Tan Po Goan.

  Sekretaris: Notosusanto. Pembantu: Atmodiningrat dan Tambunan.

  Panitia Militer: Tidak berubah susunannya. Sekretaris: Harjono.

  Panitia Kebudayaan: Ali Sastroamidjojo, Sunarjo Kolopaking, Yamin, Sim Kie Ay, Susuhunan Solo, Mangkunegoro. Sekretaris: Susilo.

Panitia Sosial/Perburuhan: Sujono Hadinoto, Surasno, Sediono, Suwarto dan Sewaka. Sekretaris: Wironegoro.

Panitia Keuangan/Perekonomian terbagi dalam 4 bagian:

1. Bagian Ekonomi Umum: Djuanda, Sujono Hadinoto, Sumitro, Sunarjo Kolopaking, Margono, Sutikno, Sabarudin dan Asmaun.
2. Bagian Keuangan Negara dan Hutang Piutang: Sutikno, Margono, Sumitro dan Sabarudin.
3. Bagian Pemulihan Hak (*rechtherstel*): Sediono, Surasno, Sujono Hadinoto, Suwarto dan Asmaun.
4. Bagian Lalu-Lintas di Darat, Laut dan Udara: Djuanda, Achmad Kosasih dan Sarsito.

Sekretaris Panitia Keuangan/Perekonomian: Asmaun. Pembantu: Ismael. (*Antara*, 23/8/1949)

* Wakil Perdana Menteri RI Mr. Sjafruddin Prawiranegara singgah di lapangan Kemayoran, Jakarta, dalam penerbangan dengan pesawat istimewa ke Kotaraja (sekarang Banda Aceh). Kepada wartawan *Aneta* ia menerangkan bahwa dirinya akan memegang segala kekuasaan RI di Sumatra.

Selanjutnya Sjafruddin meneruskan perjalanan ke Aceh. (TS207)

* *RRI* Yogyakarta memberitakan bahwa kepada Wakil Perdana Menteri Mr. Sjafruddin Prawiranegara telah diberikan berbagai instruksi oleh Pemerintah.

Secara umum, Wakil Perdana Menteri atas nama Kabinet atau salah seorang Menteri berwenang melaksanakan pemerintahan (kekuasaan eksekutif) untuk mewujudkan stabilitasi dan penyehatan pemerintahan di Sumatra, terutama di lapangan pertahanan, keuangan, perekonomian dan kepamongprajaan.

Dalam keadaan terpaksa, Wakil Perdana Menteri berwenang atas nama dan sambil menunggu pengesahan Presiden, mengambil keputusan yang termasuk kekuasaan Presiden.

Kepada Wakil Perdana Menteri diperbantukan sebuah dewan yang terdiri dari para Komisaris Pemerintah untuk Sumatra Utara, Tengah dan Selatan, serta Panglima Tentara Teritorial Sumatra.

Langkah Pemerintah ini diambil untuk mengatasi segala kesulitan yang disebabkan oleh sukarnya perhubungan, juga banyaknya masalah pemerintahan yang memerlukan penyelesaian segera dan sesuai dengan kepentingan daerah di Sumatra. (TS207-209)

* Lima soal yang akan dihadapi oleh delegasi-delegasi ke Konferensi Meja Bundar tentang Indonesia yang akan dibuka dengan resmi besok oleh Perdana Menteri Belanda Mr. W. Drees ialah:

  1. Penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada Republik Indonesia Serikat;
  2. Pembentukan Uni Indonesia-Belanda;
  3. Persetujuan keuangan dan ekonomi antara anggota-anggota Uni;
  4. Penarikan tentara Belanda dari Indonesia dan pembentukan satu tentara; dan
  5. Kedudukan New Guinea di masa depan.

  Belanda mengadakan konferensi ini setelah empat tahun bertengkar, berperang dan berunding, untuk “mencapai persetujuan tentang cara-cara memindahkan suatu kedaulatan yang sejati, penuh, dan tidak bersyarat kepada Republik Indonesia Serikat menurut prinsip persetujuan Renville yang diteken oleh negeri Belanda dan Republik Indonesia pada tanggal 17 Januari 1948”.

  Keputusan-keputusan Konferensi Meja Bundar ini, yang akan selesai dalam dua bulan, akan disahkan dalam enam minggu setelah selesainya, dan kaum yang berkonferensi akan berusaha sekuat-kuatnya menyempurnakan pemindahan kedaulatan dan membina satu Republik Indonesia Serikat sebelum habis tahun ini. (*Antara*, 22/8/1949)

* Bahwa wartawan Sudarjo Tjokrosisworo masih hidup, dapat dibuktikan dengan tulisannya berjudul “Kembali dari akhirat” dalam harian *Sedar*, tertanggal 22/8.

  Dalam tulisannya itu Sudarjo Tjokrosisworo menyangkal bahwa dirinya telah kena tembak di Alun-alun Utara Surakarta pada 7/8, seperti tersiar di surat-surat kabar. (*Antara*, 23/8/1949)

* Petang: Parki Bogor telah melangsungkan upacara pembukaan Sekolah Dagang Umum yang dihadiri oleh para peminat masalah perekonomian. Sekolah ini membuka lebar kesempatan kepada calon murid bangsa Indonesia maupun golongan penduduk yang lain.

Untuk memperkenalkan diri kepada khalayak ramai, pada 4 September mendatang akan diadakan resepsi di gedung Harso Dharsono. (*Antara*, 24/8/1949)

* Sejak diumumkannya perintah *cease fire*, keadaan di daerah Cirebon (terutama Kuningan) semakin tentram. Hanya sekali-sekali di Kuningan Timur masih terdengar tembakan. Pasukan TNI yang berada di bawah pimpinan Kapten Mahmud (Cirebon), A. Sukur (Majalengka), dan Sentot (Indramayu) telah melakukan kontak resmi dengan tentara Belanda. Demikian juga Mayor Rukman.

Sesudah mendapat ijin, banyak anggota TNI datang ke kota untuk menengok keluarga. Namun di beberapa tempat di Indramayu dan Salam Timur (Kuningan) masih terjadi bentrok antara DI dengan TNI. (*Antara*, 23/8/1949)

1949 AGUSTUS 23.

* Jam 21.00 waktu Jakarta atau jam 14.00 waktu Negeri Belanda: Konferensi Meja Bundar (KMB) sebagai kelanjutan dari Pernyataan Rum-Van Roijen 7 Mei 1949 dibuka dengan resmi di ruang De Ridderzaal (Gedung Ksatria) Den Haag oleh Perdana Menteri Belanda Dr. Willem Drees.

Delegasi Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta, dengan anggota a.l. Residen Aceh T. T. M. Daudsjah..

Delegasi Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) yang merupakan gabungan 15 negara bagian buatan Belanda diketuai oleh Sultan Hamid II.

Delegasi Belanda diketuai oleh Mr. J. H. van Maarseveen.

Delegasi United Nations Commission for Indonesia (UNCI, Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia) terdiri atas: Merle Cochran, R. Herremans, Thomas K. Critchley dengan wewenang “membantu perundingan-perundingan di KMB”.

Pidato pembukaan diucapkan oleh Perdana Menteri Belanda Dr. Willem Drees. Kemudian berturut-turut berpidato:

1. Ketua delegasi RI Mohammad Hatta;
2. Ketua delegasi BFO Sultan Hamid II;
3. Ketua delegasi Belanda Mr. J.H. van Maarseveen; dan
4. Ketua UNCI Thomas K. Critchley.

Dalam pidatonya Mohammad Hatta a.l. berkata:

"Tiap-tiap saat yang melambatkan penyerahan kedaulatan itu dirasakan oleh rakyat Indonesia sebagai siasat politik untuk meneruskan kekuasa-an kolonial di Indonesia dan karena itu menambah curiga atas maksud Belanda."

Tentang utang ia mengatakan:

"Dengan pengakuan kemerdekaan kita, kita akan menanggung segala yang patut kita tanggung menurut kedudukan kita. Segala utang Hindia sebelum penyerahan Jepang dan patut menjadi tanggungan kita, kita akui sebagai utang kita.

"Segala milik bangsa asing selain daripada yang diperlukan oleh negara kita untuk diusahakan oleh negara sendiri, dikembalikan pada yang berhak, serta yang diambil oleh negara akan dibayar kerugian dengan seadil-adilnya."

Selesai dengan pidato-pidato sambutan, PM Drees mengusulkan diadakan *pauze*, dan sesudah *pauze* konferensi dimulai kembali dengan sidang pleno.

Sementara itu untuk mengikuti jalannya pembukaan Konferensi Meja Bundar di Den Haag, di Istana Gambir Wakil Tinggi Mahkota mengadakan pertemuan dengan para anggota delegasi Republik di Indonesia. (HKP315; *Antara*, 24/8/1949)

Sementara itu dalam pertemuan dengan pers di Negeri Belanda, Menteri Penerangan RI Mr. Samsuddin berkata a.l. "... politik yang dijalankan oleh delegasi RI dalam KMB sesuai dengan politik Pemerintah RI di Yogyakarta..."

Konferensi ini akan berlangsung sampai 2 November 1949. (AT288; HA179; *KU126*; LM53; *LUxxi*; *LU t.h.*; *PSPB2 38*; RKZ110; SDA108; S6 71; ST59; TS209; WG180)

* Konferensi Meja Bundar (KMB) yang masing-masing delegasinya diketuai oleh W. Drees, Mohammad Hatta, dan Sultan Hamid mulai bersidang di Den Haag, Belanda. ("Peaceful settlement in Indonesia", h. 20, dalam *FAK132*)

Enam belas organisasi pemuda memilih anggota pimpinan Sekretariat Pemuda Indonesia yang didirikan pada 17 Agustus 1949, terdiri dari: a. Sekretaris I: Subagio Reksodipuro; b. Sekretaris II: Harsubeno; Sekretaris III: Nasrun. (HR146)

Jawatan Penerangan Pemerintah Federal mengeluarkan komunike sbb.:

"Berkenaan dengan pembukaan Konferensi Meja Bundar, Pemerintah Indonesia berpendapat untuk mencabut sebahagian peraturan-peraturan larangan terhadap pemakaian warna-warna Merah Putih, dalam pada mana pencabutan ini untuk sementara hanya berlaku bagi distrik federal.

Dalam hal ini Pemerintah berpedoman, bahwa jika ia sampai bertindak untuk mencabut peraturan-peraturan larangan ini, maka ia juga sedapat-dapatnya memikul pertanggungan jawab, agar warna-warna ini—yang dalam Konferensi Inter Indonesia telah diterima sebagai lambang nasional dari Negara Indonesia Serikat—tidak akan dikotorkan dan dicemarkan.

Pemerintah berkeyakinan, bahwa teristimewa untuk Distrik Federal kemungkinan adalah sangat kecil, bahwa warna-warna ini akan dipergunakan sebagai bendera perjuangan oleh orang-orang atau golongan-golongan yang tidak bertanggung jawab, bilamana peraturan-peraturan larangan ini dicabut atau dinodai.

Segera jika di sesuatu bahagian di Indonesia jalannya kejadian-kejadian memberikan jaminan-jaminan yang sama seperti keadaan dalam Distrik Federal, maka di bahagian-bahagian itu pun peraturan-peraturan larangan ini akan dapat dicabut juga, dalam pada mana Pemerintah melahirkan pengharapannya, bahwa hal sedemikian moga-moga dalam waktu yang singkat dapat terjadi di pelbagai bahagian-bahagian lainnya di Indonesia.

Pula Pemerintah berpendapat, bahwa ia dapat juga membuktikan dalam bentuk yang lain kegembiraannya tentang pembukaan Konferensi Meja Bundar. Pemerintah mengetahui, bahwa delegasi Republik selain daripada

gedung yang telah dikosongkan baginya itu di Gambir Selatan, ingin sekali dapat memakai gedung yang penuh kenang-kenangan baginya, yakni gedung Pegangsaan Timur 56.

Oleh karena itu, kepada Gubernur Distrik Federal telah dimajukan permintaan untuk berhubungan dengan ketua delegasi Republik agar penyerahan pemakaian gedung tersebut secepat mungkin dilangsungkan." (*Antara*, 24/8/1949)

* Berhubung dengan akan diadakannya Kongres Wanita Indonesia di Yogyakarta, dikabarkan dari Manado bahwa Gabungan Wanita Indonesia Minahasa telah mengambil keputusan tidak akan mengirimkan utusannya, karena waktu tidak mengijinkan. Sebagai gantinya, dan untuk menyatakan tetap menaruh perhatian pada jalannya Kongres, besok akan dikirimkan sumbangan uang lewat bank, untuk ikut menutup biaya Kongres. (*Antara*, 24/8/1949)

* Di antara TNI yang berada di bawah pimpinan Nasuhi dan TII yang bermarkas di timur Manonjaya telah didapat kata sepakat untuk mentaati perintah Pemerintah Republik mengenai soal *cease fire*. Bersama-sama mereka berusaha memberantas gerombolan-gerombolan yang tidak bertanggungjawab dan mengganggu rakyat. (*Antara*, 23/8/1949)

* Berhubung dengan diumumkannya perintah *cease fire*, Pemerintah Republik daerah Keresidenan Banten telah mengeluarkan "Maklumat Bersama No. 3" yang ditandatangani oleh Mayor Eri Sudewo (Kepala Pemerintah Militer), Tb. K. H. Achmad Chatib (Residen Banten) dan Mr. Jusuf Adiwinata (Wakil Gubernur Jawa Barat).. (Selanj. li. Lampiran 8)

* Mulai Januari hingga Juni 1949 ekspor kopi berjumlah 1.670 ton (netto) seharga *f*2,1 juta, lada hitam 1.926 ton seharga *f*5,9 juta, dan lada putih 24 ton seharga *f* 89.000,–. Angka-angka bagi segenap tahun 1948 adalah: Kopi 2.378 ton seharga *f*3,3 juta, lada hitam 829 ton seharga *f*2,2 juta dan lada hitam 976 ton seharga *f*1,9 juta. Dalam tahun 1949 barang-barang itu dijual ke:

	Kopi (ton)	Lada hitam (ton)	Lada putih (ton)
Belanda	763	15	18
Yugoslavia	10	0	0
Thailand	0,05	-	-
Singapura	896	1826	4
Jepang	0,5	-	-
USA	-	8,4	2

(*Antara*, 23/8/1949)

* Pagi: Untuk pelaksanaan *cease fire* order di Sumatra, telah tiba di Palembang Gubernur Militer Republik untuk Sumatra Selatan Dr. A. K. Gani.

  Dalam percakapan dengan *Antara*, Gubernur menyatakan bahwa di Sumatra Selatan tidak ada kesatuan-kesatuan liar. Semuanya berada di bawah satu komando.

  Gubernur akan tinggal di Palembang sampai urusan *cease fire* selesai. Sementara itu rakyat berduyun-duyun menemuinya di penginapan. (*Antara*, 24/8/1949)

* Dinas Pers Departemen Urusan Ekonomi mengabarkan, bahwa hingga Juni 1949 perusahaan di Medan berjumlah 135 kepunyaan Indonesia, 918 Tionghoa, 19 Asia lain, dan 59 Eropa, sedangkan pada akhir 1948 jumlah itu masing-masing hanya 73, 703, 9 dan 39. (*Antara*, 23/8/1949)

* Kemarin Konsul Jenderal India Dr. Alagappan telah tiba di Manado dan mendapat sambutan hangat dari pemuka-pemuka rakyat. Malam harinya di gedung Tjong Liang Hwee diadakan resepsi yang dihadiri oleh wakil-wakil pemerintah, partai politik dll. Dalam kesempatan itu Wali Kota Manado dan beberapa orang wakil partai politik memberikan pidato sambutan.

* Hari ini Dr. Alagappan berangkat kembali ke Makassar. (*Antara*, 24/8/1949)

* Menurut rencana, Central Joint Board (CJB) akan mengadakan sidang di Jakarta hari ini, tetapi berkenaan dengan kembalinya delegasi Republik

sore ini ke Yogyakarta, maka sidang tersebut diduga baru akan dapat dilaksanakan paling cepat besok. (*Antara*, 23/8/1949)

* Rombongan Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia Mr. Sjafruddin Prawiranegara tiba di Kotaraja (sekarang Banda Aceh) sebagai kedudukan resminya yang baru, dari Yogyakarta. Perjalanan ditempuh dengan pesawat lewat Jakarta dan Sabang, diteruskan dengan kapal perang Belanda "Van Galen" ke pelabuhan Uleelheue.

Di pelabuhan, rombongan disambut oleh Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatra Utara Mr. S. M. Amin, Gubernur Militer Tgk. Muhd. Daud Beureueh, Residen Tuanku Mahmued, para pembesar sipil dan militer.

Rombongan meliputi Menteri Agama Kyai Haji Masjkur, Sekretaris Wakil Perdana Menteri Mr. Imam Sudjahri, Zainal Baharuddin, H. Abubakar Atjeh, H. Muhammad, Sahar, Dr. Sumarto, B. Napitupulu, Sutandar, Munjamin, Haji Sjamsir, dan Seri Iswani.

Ikut juga dalam rombongan ini sebagian pejabat Aceh yang pada bulan lalu bertolak ke Yogyakarta: Mayor Hasballah Mada, Mayhor Hasballah Daud, Abubakar Adamy, anggota KNIP M. Yunan Nasution dan Amelz

Penempatan Wakil Perdana Menteri di Aceh didasarkan atas perhitungan matang Pemerintah Pusat dalam kaitan penyelenggaraan Konferensi Meja Bundar (KMB), yaitu apabila KMB mengalami kegagalan, ia akan dapat memimpin perjuangan Republik selanjutnya dari Aceh dan Sumatra umumnya.

Untuk melaksanakan tugasnya di Aceh, Wakil Perdana Menteri didampingi oleh Dewan Pembantu dan Penasihat terdiri dari Komisaris Pemerintah untuk Sumatra Utara, Tengah dan Selatan serta Panglima Tentara & Teritorium Sumatra Kolonel R. Hidajat. (TS209-210)

* Dari Uleelheue bertolak rombongan kedua dari Aceh ke Sabang dengan kapal perang Belanda "van Galen", untuk selanjutnya menuju Yogyakarta dengan pesawat.

Rombongan mencakup Residen T. M. Daudsjah yang akan ikut melengkapi delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar di Belanda, Letkol Husin Jusuf, Mayor ALRI Martadinata, dan Letnan M.S. Geudong.

Ikut juga rombongan wanita yang akan menghadiri Kongres Wanita Indonesia se-Indonesia di Yogyakarta: Nja' Asma Daud Beureueh, Ny.Z.F. Sutikno, Ny. Saribanun Daud, Ny. Munir, Nurmala Saleh, Nj. Ainul Mardliah Ali, dan Rohana Djamil. (TS210)

* Menjawab pertanyaan wartawan *Semangat Merdeka*, T. M. Daudsjah menyatakan rasa optimisnya bahwa Konferensi Meja Bundar akan berhasil.

"Kalau sebagian besar orang Belanda sudah dapat mengerti sebagaimana tampaknya sudah dimengerti oleh Dr. Van Royen tentang hasrat bangsa Indonesia untuk merdeka, insya Allah persetujuan yang sempurna akan segera tercapai," demikian ujarnya.

Letkol Husin Jusuf menyatakan, meskipun persetujuan gencatan senjata dan penghentian permusuhan tampaknya berjalan baik, tidak ada alasan bagi kita untuk berlengah diri, dan semangat untuk mempertahankan kemerdekaan harus dikobarkan terus.

Sementara itu Nja' Asma Daud Beureueh menyatakan bahwa perjuangan wanita di Aceh sama juga mutu dan pentingnya dengan perjuangan wanita Indonesia di tempat lain. Ia berharap, semoga kunjungannya ke Yogyakarta akan memberikan manfaat sebesar-besarnya. (TS210)

* Dalam perjalanannya ke Jakarta. T. M. Daudsjah, Residen Republik untuk daerah Aceh, yang turut dengan delegasi Republik ke Den Haag, ketika singgah di Medan, menerangkan kepada *Antara*, bahwa Aceh cukup makanan. Tawaran bantuan beras sebanyak 1.000 ton, yakni sebagian dari jumlah 10.000 ton yang diberikan kepada Republik oleh International Emergency Food Committee, telah ditolak. Apalagi jika diingat bahwa harga beras itu lebih tinggi dari harga beras Aceh.

Ia terangkan pula, bahwa dua pesawat Dakota yang telah dibeli oleh rakyat Aceh kini melakukan hubungan udara antara Birma dan India, dengan nama "Indonesian Airways". Kedua pesawat itu dibeli semasa Persetujuan Renville. Dan sekarang rakyat Aceh sedang giat berusaha untuk membeli satu pesawat lagi.

Mengenai pendidikan ia katakan bahwa tenaga pendidikan kurang, dan di masa pergolakan perhatian terhadap soal itu boleh dibilang tidak se-

berapa. Semua usaha diarahkan pada perjoangan mempertahankan diri dari serangan. Dikatakannya juga, dokter-dokter kurang sekali; hanya 6 orang dokter untuk penduduk sebanyak 1,2 juta jiwa.

Pengangkutan dari satu daerah ke daerah lain memuaskan. Pelabuhan-pelabuhan Republik di Aceh selalu disinggahi kapal asing. Dan 50% dari perdagangan dengan luar negeri berada di tangan pedagang-pedagang (partikelir) bangsa Indonesia.

Akhirnya dinyatakannya keyakinannya bahwa Konferensi Meja Bundar pasti memberi hasil baik.

Dalam perjalanan ini, Daudsjah dibarengi tujuh wanita Aceh yang akan menghadiri Kongres Wanita Indonesia di Yogyakarta. (*Antara*, 25/8/1949)

* Mulai hari ini R. Marjono Danubroto diangkat sebagai Sekretaris Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia Mr. Sjafruddin Prawiranegara, dengan pangkat Residen.

  Sebelumnya Marjono Danubroto adalah Sekretaris Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). (TS210)

* Ratu Juliana hari ini menerima Anak Agung Gde Agung, Perdana Menteri Negara Indonesia Timur (NIT) dan wakil ketua delegasi BFO ke Konferensi Meja Bundar. (*Antara*, 23/8/1949)

1949 AGUSTUS 24.

* Mayor Achmadi diserahi jabatan sebagai Komandan Garnisun KMK (Komando Militer Kota) Kota Solo. (*PEH91*)

* Susunan lengkap Central Joint Board yang terdiri dari wakil-wakil UNCI, delegasi Republik, Belanda dan BFO adalah sbb.:

  Wakil-wakil UNCI urusan sipil dan militer:

  Australia : W.B. Pritchett, Brigadier C.E. Prior.

  Belgia : J.R.L. van den Bloock, Mayor Th.J. Deckers.

  Amerika : E.A. Dow Jr., Letkol R.W. Taylor.

  Wakil-wakil delegasi Belanda:

1. Dr. H.L. Jacob, Dr. J.G. de Beus.
2. Dr. J.E. Usobeert.
3. Kolonel Jhr. Dr. H.L. van der Wijck.
4. Jhr. Dr. J.A. de Runitz.

Penasihat: Commander F.J. Burghard, R.N.N.

Wakil-wakil delegasi Republik:

1. Mr. Wongsonegoro (Ketua).
2. Kol. Djatikusumo.
3. Kol. Nasution (atau wakilnya).
4. Kol. Hidajat.
5. Kol. Simbolon (wakil).
6. Letkol. Askari (wakil).
7. Mr. Ali Budiardjo.

Penasihat: Dr. Murdjani, Ir. Ukar, Mr. Sutan Mhd. Rasjid, Mr. Tukadi Wirjahardja, Sumarto, Mayor Sutrisno Sudomo.

Wakil-wakil delegasi BFO:

1. M. Jahja.
2. R. Ardiwinangun.
3. Dr. Surjadi.
4. Alwi. (*Antara*, 24/8/1949)

* Atas usul Drs. Mohammad Hatta, yang didukung Sultan Hamid II, Perdana Menteri Belanda Dr. Willem Drees dipilih menjadi ketua konferensi, sedangkan pemimpin ketiga delegasi atas usul Mr. Van Maarseveen dipilih menjadi wakil ketua.

  Sebagai sekretaris jenderal konferensi diangkat Dr. M. J. Prinsen. (*Antara*, 24/8/1949)

* Delegasi Republik telah kembali di Jakarta setelah tinggal beberapa hari di Yogyakarta.

  Mr. Wongsonegoro, ketua delegasi Republik pada Central Joint Board, menerangkan berkenaan soal *cease fire* bahwa pelanggaran-pelanggaran

yang merupakan tembak-menembak sebenarnya tidak ada. Yang dikatakan pelanggaran oleh pihak Belanda itu adalah yang merupakan perluasan daerah. (*Antara*, 24/8/1949)

* Local Joint Committee (LJC) Daerah Surabaya belum bekerja karena Dul Arnowo, pegawai tinggi Kementerian Dalam Negeri Republik, yang bulan Februari yang lalu ditangkap tentara Belanda di lereng Gunung Wilis, sampai sekarang masih berada dalam tahanan di Kalisosok.

  Akibatnya perundingan yang mestinya dilakukan pada 22 dan 23 Agustus terpaksa ditunda. Pun kurir yang dikirim untuk menemui Letkol Kretarto sampai kini belum kembali ke tempatnya.

  Seperti diketahui, bersama Dr. Murdjani dan Letkol Kretarto, Dul Arnowo duduk dalam LJC Daerah Surabaya. (*Antara*, 24/8/1949)

* Jam 10.00: Menurut rencana Central Joint Board (CJB) akan bersidang di Jakarta. Baik pihak Republik maupun kalangan UNCI belum bisa memberikan keterangan, apa acaranya. (*Antara*, 24/8/1949)

* Kemarin telah dibebaskan lagi dari penjara Glodok 12 tahanan politik, yaitu: Matin Effendi, Kadiman, Suroto, Sukanto, Ngadino. Saadi, Sahlani, M. Husaini, Salam, Abdulkarim, Mardjuki, dan Sofjan. Mereka ditahan sejak 3 Agustus 1947, dan semuanya berasal dari Jakarta. (*Antara*, 24/8/1949)

* Harian *Pemandangan* yang terkenal sebelum Perang Dunia II akan terbit kembali di Jakarta. Pimpinan redaksi yang dipegang oleh Anwar Tjokroaminoto, dan tanggal perkiraan untuk terbit adalah 1 Oktober 1949. (*Antara*, 24/8/1949)

* Utusan ke Kongres Wanita Indonesia dari Jakarta dan daerah-daerah luar Yogyakarta yang lain berangkat hari ini dengan kereta api lewat Semarang.

  Kemarin sore mereka telah mengadakan pertemuan di gedung Delegasi Republik di Jakarta. (*Antara*, 24/8/1949)

* Dalam laporan umum kepolisian di Jakarta tercatat kejadian-kejadian tanggal 23/8 kemarin sbb.:

1. Pencurian 5 kali.
2. Percobaan untuk mencuri 1 kali.
3. Pelanggaran 8 kali.
4. Pemukulan dengan kekerasan 2 kali. (*Antara*, 24/8/1949)

* Pemimpin rombongan utusan Perwari Bogor ke Kongres Wanita Indonesia di Yogyakarta, Nona Suretno, menerangkan sebelum berangkat, bahwa Perwari Bogor akan mengajukan dua usul (1) Supaya selekas mungkin didirikan panitia-panitia penolong korban politik di tempat-tempat di mana belum ada badan tersebut, dan (2) Supaya para pegawai Republik yang hingga kini masih menganggur mendapat perhatian semestinya. (*Antara*, 24/8/1949)

* Untuk membuka bagian Taman Dewasa (SMP), Taman Siswa Bogor telah berhasil mengumpulkan uang sebanyak *f*3.000,00 dari mementaskan sandiwara dengan lakon *Benang Sutra* gubahan E. Z. Effendi, mahasiswa PTKH. (*Antara*, 24/8/1949)

* Local Joint Committee (LJC) Daerah Palembang mengadakan pertemuan pertama, dihadiri oleh Dr. A. K. Gani, Kol. Hidajat, Letkol Askari, Dr. Ibnu Sutowo, Kapten Tak dan v. d. Grien, Wedana Prabumulih, dan Ockers. Hadir juga pihak UNCI.

Dalam beberapa hari ini ditunggu kedatangan Dr. Isa, Gubernur Republik untuk Sumatra Selatan, untuk menggantikan kedudukan Dr. A. K. Gani. (*Antara*, 25/8/1949)

* Pertemuan 140 buruh pelelangan ikan di Jakarta telah memutuskan membentuk Sarekat Buruh Pelelangan Ikan (SBPI) Jakarta dengan susunan pengurus sbb.:

Ketua : A. Tirdjaja;
Wakil Ketua : Musoro;
Penulis : Sugiarto;
Bendahari : M. Budhardjo;
Pembantu : Hamid Arsid, Djainudin, dan A. Martin;
Pengawas : A.C. Wynandts. (*Antara*, 25/8/1949)

* Kabar tentang akan datangnya Jenderal Mayor Suhardjo ke Banjarmasin diterima penduduk dengan gembira. Untuk itu telah dibentuk panitia penyambutan, terdiri atas Dr. Suranto (ketua), R. Sabah (Dewan Banjar), Kunum (Dayak Besar), Wali Kota Mansur, dan pemuka-pemuka partai politik. (*Antara*, 24/8/1949)

* Dalam percakapan dengan wartawan *Semangat Merdeka*, Wakil Perdana Menteri Mr. Sjafruddin Prawiranegara menyatakan bahwa soal kemakmuran, keamanan dan kebahagiaan seluruh rakyat lebih menarik hatinya. Dikatakannya, di hadapan kita masih terbentang bermacam kesulitan yang harus kita atasi bersama dengan segala tanggung jawab.

  Mengenai Konferensi Meja Bundar dikatakannya, ia mengharapkan yang baik saja. "Kalau Konferensi Meja Bundar tidak berhasil, berarti pihak sana tidak tahu memilih jalan yang bijaksana dalam menyelesaikan perselisihan.

  "Satu kepastian tidak pernah kita ragu-ragukan, Republik Indonesia tetap merasa dirinya cukup kuat untuk menuntut kedaulatan sepenuh-penuhnya dengan tidak bersyarat bagi seluruh bangsa Indonesia.

  "Andaikata Konferensi Meja Bundar berhasil baik dan kedaulatan sebulat-bulatnya diserahkan dengan tidak bersyarat, maka bukanlah berarti segala kesulitan sudah terhindar, akan tetapi kita harus pula mengatasi berbagai rupa kesukaran lagi dalam menyempurnakan kemerdekaan kita itu, sehingga seluruh warganegara kita merasa bahagia." Demikian Wakil Perdana Menteri. (TS211)

1949 AGUSTUS 25.

* Menjawab pertanyaan *Antara* mengenai pencabutan sebagian larangan menggunakan warna Merah Putih di daerah federal, Menteri Penerangan Mr. Sjamsuddin menyatakan:

  "Rakyat Indonesia di Jakarta menghargai sangat pencabutan larangan memakai bendera Merah Putih itu. Sayang bahwa rakyat di daerah-daerah pendudukan lainnya belum bisa ikut serta dalam kegembiraan itu. Jika hal yang demikian itu juga terjadi di daerah-daerah pendudukan lainnya, maka itu tentunya merupakan sumbangan yang berarti untuk menimbulkan suasana percaya-mempercayai dan saling mengerti."

Tentang pengembalian Gedung Republik di Pegangsaan Timur 56 dikatakannya, bahwa itu adalah karena suara gemuruh dihari-hari belakangan ini sekitar *cease fire* dan bendera, dan itu akan menjadi sumbangan untuk menambah baiknya susana saling mengerti dan saling percaya. (*Antara*, 25/8/1949)

* Setelah tersiar berita tentang pencabutan sebagian larangan terhadap penggunaan warna Merah Putih oleh pemerintah Federal, pagi hari tgl. 24/8 tampak di kampung-kampung sekitar Jakarta orang sibuk menaikkan bendera kebangsaan Merah Putih di rumah masing-masing. Bahkan tidak sedikit di antara pengendara becak yang juga turut memasang lambang Merah Putih pada becaknya, sedangkan mereka yang belum mempunyai bendera dari kain, segera membuatnya dari kertas.

  Pekik "Merdeka" pun pada hari itu berkumandang di udara, suatu bukti yang tegas bahwa semangat rakyat Jakarta tak pernah padam. Dikabarkan, tidak terjadi insiden sehubungan dengan ini. (*Antara*, 25/8/1949)

* Central Joint Board (CJB) telah mengadakan sidang dari jam 17.00 sampai l.k. jam 19.30 kemarin sore di Hotel des Indes. Sidang dilanjutkan malam itu juga, sesudah beristirahat beberapa waktu.

  Pada sidang yang pertama dibicarakan soal tuduhan pihak Belanda seolah-olah Republik telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap *cease fire*. Rupanya yang dimaksud dengan pelanggaran itu ialah kegiatan perang gerilya sebelum diberlakukannya perintah *cease fire*, namun baru dilaporkan sesudah keluarnya perintah tersebut.

  Sehubungan dengan sidang CJB ini UNCI telah mengeluarkan pengumuman sbb.:

  "Tuduhan-tuduhan tentang pelanggaran perintah penghentian tembak-menembak di Jawa Timur dan Jawa Barat dibincangkan dalam rapat formil yang ke-4 dari Central Joint Board (Dewan Pusat Bersama) hari ini di Hotel des Indes. Dewan menyetujui untuk meminta pada Dewan-dewan Daerah yang bersangkutan agar menyelidiki dan menyusun lamporan tentang tuduhan-tuduhan ini dan di mana pelanggaran-pelanggaran ternyata telah terjadi, agar dikembalikan status quo serta diambil langkah untuk mencegah berlakunya terus pelanggaran-pelanggaran tsb.

CJB pun telah membicarakan soal pelanggaran terhadap pasal 17 peraturan tentang pelaksanaan perintah cease fire, dan menegaskan perlunya ketaatan pada jiwa dan maksud pasal tsb." (*Antara*, 25/8/1949)

* Sampai kini belum sampai sepertiga dari jumlah tawanan politik yang sudah dibebaskan, yaitu tak lebih dari 800 orang. Menurut kabar, karena pihak Belanda menghendaki dipecahkannya lebih dulu dua hal: (1) siapakah di antara mereka itu yang dapat ditetapkan sebagai tawanan politik yang sebenarnya; dan (2) bagaimana persiapan untuk menerima mereka kembali dalam masyarakat, agar nantinya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

  Berkenaan dengan ini pihak Republik kemarin telah membentuk panitia khusus untuk mengurus soal ini, diketuai oleh Mr. Tirtadinata. Pihak Republik pun telah membentuk Panitia Urusan Pasal 7 Rum-Van Roijen Statement dengan ketua Mr. Ali Budiardjo, dan Panitia Urusan Supply dengan ketua Ir. Laoh.

  Dikabarkan, ada kemungkinan sore ini akan diadakan sidang pleno delegasi Belanda, Republik dan UNCI untuk menentukan susunan panitia sentral dan daerah urusan tawanan politik, pasal 7 R-R Statement, dan supply. (*Antara*, 25/8/1949)

* Untuk melihat langsung keadaan setempat yang sesungguhnya, pagi ini W.A.M. Lovink telah berangkat dengan pesawat ke Surabaya dari Jakarta. Hari ini juga diharapkan ia sudah kembali ke Jakarta. (*Antara*, 25/8/1949)

* Baru-baru ini antara pengurus *Nederlands Roode Kruis Afdeeling* Indonesia (Nerkai) dan Palang Merah Indonesia (PMI) telah tercapai persetujuan bahwa semua usaha Nerkai akan diserahkan kepada PMI. Untuk itu sekarang telah dibentuk sebuah Sekretariat Central. (*Antara*, 25/8/1949)

* Dari tanggal 22/8 sampai 26/8 oleh OKW di Jakarta diselenggarakan konferensi pengajaran bersifat peninjauan. Konferensi dibuka oleh Mr. Suwandi, *Adviseur Generaal* OKW, dihadiri oleh wakil-wakil pengajaran dari Jawa Tengah, Padang, Tapanuli, Bangka, Biliton, Riau, New Guinea, dan juga oleh wakil-wakil negara.

Sampai kemarin telah dibicarakan rencana pengajaran sekolah rendah dan kewajiban belajar. Telah dibicarakan juga pengajaran agama, pendidikan guru, dan rancangan pengajaran untuk pendidikan guru.

Sebagian peserta menghendaki agar bahasa Indonesia dijadikan bahasa pengantar resmi sekolah rendah. Sekolah yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dijadikan sekolah khusus yang akhirnya harus dijadikan usaha partikelir. Apabila memenuhi syarat, perguruan semacam itu akan mendapat tunjangan dari Pemerintah. (*Antara*, 25/8/1949)

* Berdasarkan pengumuman pemerintah Belanda baru-baru ini, mungkin sekali dalam minggu ini Gedung Republik (Pegangsaan Timur 56) akan diserahkan kembali kepada Pemerintah RI.

Hari ini Gubernur Daerah Jakarta sudah melakukan hubungan dengan Ketua Delegasi Republik sebagai persiapan bagi penyerahan kembali gedung tersebut. (*Antara*, 25/8/1949)

* Presiden Sukawati dari NIT ditunggu kedatangannya di Jakarta pada 28 Agustus 1949, demikian kabar dari Perwakilan NIT di Jakarta.

Presiden Sukawati diperkirakan akan tinggal di sini sepekan lamanya, dan ada kemungkinan ia akan berkunjung juga ke Bandung sebagai balasan atas kunjungan Wali Negara Pasundan ke NIT. (*Antara*, 25/8/1949)

* Kemarin sore telah tiba di Jakarta Residen Aceh Tk. Mohd. Daudsjah. Bersamanya telah datang juga 7 wanita Aceh untuk menghadiri Permusyawaratan Wanita Indonesia di Yogyakarta.

Tentang kehidupan rakyat Aceh, Tk. Daudsjah menerangkan bahwa yang dapat dikatakan kurang hanyalah alat-alat pengangkutan. Ditambahkannya, tembak-menembak di pantai dan lautan sekitar Aceh tidak ada lagi sejak ditandatanganinya Rum-Van Roijen Statement. (*Antara*, 25/8/1949)

* Hari ini telah berangkat dari Bandung Letkol Sadikin, wakil panglima Divisi Siliwangi, ke Sukabumi dan Cianjur untuk mengadakan pembicaraan dengan para komandan di daerah tersebut, juga untuk melihat dan memeriksa pelaksanaan *cease fire*, demikian keterangan dari delegasi republik.

Perjalanan ini akan diteruskan esok harinya ke Jakarta dan Serang, dan dari sana kembali ke Bandung. (*Antara*, 25/8/1949)

* Jam 17.00: Di pekarangan ADM di *Kasteelweg*, Jakarta, telah terjadi kebakaran. Akibatnya 200 ban luar truk seharga *f*50.000 yang tersusun di pekarangan tersebut habis terbakar, demikian kabar dari badan kepolisian.

  Kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa. Penyebab kebakaran diperkirakan karena pembakaran alang-alang oleh *Hollandsche Beton Mij* di dekat tumpukan ban tersebut. Karena kejadian ini berkaitan dengan militer, maka pemeriksaan selanjutnya dilakukan oleh MP. (*Antara*, 25/8/1949)

* Kepolisian memberitakan telah ditangkapnya Mansur bin Kenti di Gang Tongkang, Jakarta, atas tuduhan telah membunuh Rachmat bin Saleh di Cirebon pada 17 Juli 1949. Ia telah dikirim ke Cirebon untuk diperiksa, dan kini berada dalam tahanan di kota tersebut. (*Antara*, 25/8/1949)

* Menteri Agama Kyai Haji Masjkur menyatakan kepada wartawan *Semangat Merdeka* di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) bahwa Pemerintah sangat memperhatikan dasar-dasar hukum Islam.

  Pemerintah Republik Indonesia akan mengirimkan lagi misi ke negara-negara Arab tahun ini untuk memperkokoh hubungan silaturahmi antara kaum muslimin Indonesia dengan kaum muslimin di negara-negara Arab.

  Dalam misi itu nanti akan disertakan juga beberapa orang wakil dari Aceh. (TS211-212)

* Residen Aceh T. T. Mohd. Daudsjah menyatakan kepada wartawan *Merdeka* di Jakarta bahwa rakyat Indonesia di Aceh dapat dipastikan akan memperhatikan isi pidato Wakil Presiden Hatta yang diucapkan pada pembukaan Konferensi Meja Bundar (KMB) tanggal 23 Agustus lalu. Mereka menganggap pidato itu sebagai pedoman yang berharga dalam menghadapi konferensi.

  Daudsjah mengharapkan diperoleh hasil-hasil yang baik dari Konferensi Meja Bundar, karena pembangunan di Indonesia umumnya dan di Aceh

khususnya hanya dapat dilakukan dalam suasana damai dan bebas dari segala macam intimidasi.

Tentang kepartaian dikatakan, di Aceh pun ada berbagai partai politik dengan ideologi masing-masing. Tetapi menghadapi Belanda, semuanya bersatu dan berdiri bulat di belakang Pemerintah Republik Indonesia.

Rakyat Aceh sangat menghargai dan memperhatikan tiap usaha yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan Hamengku Buwono dalam rangka penghentian permusuhan.

Wakil Perdana Menteri Mr. Sjafruddin Prawiranegara pun mendapat kepercayaan dari rakyat Aceh. Rakyat Aceh percaya bahwa ia cukup memiliki keahlian untuk memperbaiki perekonomian dan keuangan, serta untuk memperkokoh pemerintahan.

Tentang pendidikan dikatakannya, di Aceh kini terdapat 120 sekolah, di antaranya 6 SMP di kota-kota besar, dan 1 SMA di Kutaraja (sekarang Banda Aceh). Yang dirasakan kurang di Aceh adalah tenaga guru. (TS212)

* Malam: Wakil Perdana Menteri Mr. Sjafruddin Prawiranegara berbicara di hadapan rapat umum yang diadakan di pekarangan Masjid Raya Baiturrakhman, Kutaraja, di mana a.l. ia mengatakan:

"Setelah Yogya dipulihkan, saya diangkat sebagai Perdana Menteri yang berkedudukan di Kutaraja. Saya sampai di Aceh pada tanggal 23 bulan ini, tepat bersamaan dengan Konferensi Meja Bundar.

Rupanya saya mesti menyaksikan dari tengah saudara-saudara yang sampai kini telah berhasil memelihara daerah saudara-saudara daripada Belanda. Rupanya saya diwajibkan untuk menyaksikan perundingan di Den Haag dari tengah rakyat Aceh yang sanggup, apabila perundingan itu gagal, meneruskan perjuangan.

Jadi rupanya semuanya itu sudah ada rancangan dari atas, bukan dari Pemerintah Pusat, tetapi dari yang lebih atas lagi, yang lebih berkuasa. Saya memang lambat-laun dalam perjuangan sekarang ini mesti mengakui, bahwa di atas segala rencana, di atas segala perhitungan manusia ini, ada rencana yang lebih besar, yang akhirnya tidak bisa kita elakkan, kita kesampingkan dengan rencana sebagaimana pun juga yang timbul dari akal manusia.

Jadi oleh karena itu kalau kini saudara-saudara bertanya kepada saya, bagaimana akan berlangsungnya Konferensi Meja Bundar ini, apakah

benar-benar Belanda akan menyerahkan kedaulatan sepenuhnya dan tidak bersyarat seperti telah dijanjikan oleh Pemerintah Belanda, maka saya tidak dapat memberikan jawaban yang pasti, hanya saya dapat mendoakan mudah-mudahan perundingan itu bisa selesai dengan membawa hasil yang sebaik-baiknya bagi kita.

Memang agresi Belanda yang kedua ini rupa-rupanya harus dialami oleh kita sebagai ujian untuk membersihkan jiwa kita sebersih-bersihnya.

Seperti saya terangkan tadi, kemerdekaan itu tidak bisa dihilangkan lagi. Atau, Belanda tidak bisa memutar jarum sejarah kembali. Kalau memang sudah pukul 12 tidak bisa dikembalikan menjadi pukul 11, karena itu berarti bahwa Belanda dapat memutar kembali matahari yang sedang berjalan. Begitu juga kemerdekaan kita tidak bisa dihalangi oleh Belanda.

Tetapi di samping itu kita harus insaf, bahwa kita tidak bisa juga mempercepat jalannya sejarah. Sebagaimana Belanda tidak bisa mengembalikan, begitu juga kita tidak bisa mendorong matahari untuk lebih cepat jalannya. Oleh karena itu, di samping keyakinan bahwa kemerdekaan kita itu tidak bisa dielakkan, maka kita juga harus sabar, bukan saja menanti apa yang akan terjadi, tetapi sabar mengerjakan usaha-usaha yang tidak usah dipusingkan apa akan hasilnya. Seperti juga kita bercocok tanam, kita mencangkul tanah, menabur benih. Tetapi hasilnya terserah kepada Tuhan. Kita percaya masih ada Tuhan. Kita melihat bahwa kemerdekaan kita itu telah ditakdirkan Allah, maka yakinlah kemerdekaan kita ini tidak akan sia-sia.

Kalau kita melihat jalannya sejarah, di samping kita tidak usah memusingkan tentang hasilnya daripada Konferensi Meja Bundar ini, lebih-lebih kita harus memperhatikan, apakah yang harus kita kerjakan pada masa sekarang ini. Tidak bisa diambil kembali oleh Belanda. Tetapi pekerjaan yang lebih berat nanti, yaitu sesudah kedaulatan nanti diserahkan kepada kita. Sesudah Republik Indonesia Serikat dibentuk barulah akan terjadi pekerjaan-pekerjaan yang berat sekali, yang lebih sulit daripada pekerjaan yang sudah-sudah. Belanda meninggalkan negeri kita dalam keadaan kacau-balau." (TS212-213)

* Sekembali dari kunjungan ke Aceh Pidie dan Aceh Utara, Menteri Agama Kyai Haji Masjkur mengadakan pertemuan dengan para pegawai Jawatan Agama dan alim ulama di Kutaraja.

Dikatakan oleh Menteri Agama, ia datang ke Aceh karena dua perkara. Pertama, karena sudah lama merencanakannya. Dan kedua, untuk mengurus Misi Haji ke Tanah Suci yang akan terdiri dari para pemuka Aceh. Selanjutnya:

"Soal agama adalah soal jiwa. Soal jiwa itu soal yang besar, sehingga kalau jiwa itu terganggu, keamanan tidak akan terdapat. Nabi berkata, bahwa apabila hati itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Oleh sebab itulah, maka Pemerintah Republik Indonesia sengaja mengadakan kementerian yang belum pernah diadakan di negara lain, yaitu Kementerian Agama. Ini karena Pemerintah memandang bahwa soal jiwa itu soal yang amat besar. Orang memandang seolah Kementerian Agama hanya mengurus soal nikah, fasah, talak dan rujuk. Ini pandangan yang sangat sempit, dan pula dengan kacamata penjajahan.

Karena inilah selama 350 tahun yang lalu Belanda dapat memecah-belah bangsa Indonesia, sehingga golongan ulama dengan golongan intelek seakan tidak lagi satu bangsa. Golongan intelek memandang sangat rendah golongan ulama, dan mensifatkan mereka dengan kupiah putih tengkulak dsb. Sebaliknya golongan ulama memandang rendah pula golongan intelek. Dan inilah yang justru diinginkan oleh penjajah.

Sekarang kita sudah merdeka. Tidak lagi hidup di jaman penjajahan. Kita harus bersatu. Semua golongan harus bersendel bahu dengan golongan lain untuk menegakkan, membela, dan memajukan negara."

Sebagai penutup Menteri Agama mengatakan bahwa daerah Aceh adalah daerah yang masih sempurna, sementara daerah lain sudah dikoyak-koyak oleh agresi Belanda yang kedua. Dari daerah yang masih sempurna inilah dipilih 3 orang untuk anggota Misi Haji yang kedua. (TS213-214)

* M. Yunan Nasution dan Amelz yang baru kembali dari Yogyakarta, dan H. Benjamin yang menjadi anggota rombongan Wakil Perdana Menteri, mengadakan pertemuan dengan keluarga Muhammadiyah di Aceh Bioskop, Kutaraja.

Yunan Nasution menyatakan bahwa pengembalian Yogyakarta kepada Republik amat menggembirakan ditinjau dari sudut moril dan politik. Tetapi keadaan ekonomi di sana amat berat. Karenanya ia berharap agar seluruh rakyat Aceh terus membantu rakyat dan Pemerintah di Yogyakarta.

Baik H. Benjamin maupun Amelz menguraikan kesan-kesannya mengenai Yogyakarta, terutama mengenai kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh Muhammadiyah. (TS214)

1949 AGUSTUS 26.

* Konferensi Inter Indonesia diadakan atas prakarsa Komite Wanita Indonesia (Kowani) yang panitianya diketuai oleh Ny. Jusupadi. (*LU t.h.*)
* Dalam sidang kabinet Republik Indonesia baru-baru ini telah diambil keputusan mengenai jaminan bagi para pegawai Republik yang pada waktu ini berada di daerah pendudukan. Keputusan itu adalah sbb.:

  1. Pegawai Republik di mana juga yang masih tetap setia pada pemerintah Republik tetap menjadi pegawai Republik Indonesia.
  2. Semua peraturan yang terdapat pada pegawai-pegawai Republik yang berada di Yogyakarta berlaku juga bagi mereka yang berada di luar daerah Yogyakarta.
  3. Di luar Yogyakarta dapat berlaku sesudah ada persetujuan tentang pasal 7 Rum-Roijen Statement. (*Antara*, 26/8/1949)

* Gedung di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta, tempat dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, diserahkan kembali kepada Republik Indonesia (RI). (*KU126; LUxxi*)

* Dalam rapat Panitia Acara hari ini telah dicapai kesepakatan bahwa ketua delegasi Belanda, Menteri Seberang Lautan J.A. van Maarseveen, akan mengetuai rapat panitia ini untuk pekan ini, sedangkan Drs. Mohammad Hatta Perdana Menteri Republik dan pemimpin delegasi Republik, akan menduduki jabatan ketua minggu depan.

  Dengan resmi diumumkan hari ini bahwa Panitia Acara telah minta kepada ketiga delegasi agar memasukkan nama-nama wakilnya pada kelima panitia besar esok hari, hingga mereka dapat langsung memulai pekerjaannya hari Jumat.

  Tugas kelima panitia telah ditentukan oleh Panitia Acara sbb.:

  1. Panitia Politik: Undang-Undang Dasar Sementara dari RIS, Piagam pemindahan kedaulatan, Uni Indonesia-Belanda, pengawasan pelaksanaan dari perjanjian-perjanjian, hubungan luar negeri, hak menentukan nasib

sendiri (*self-determination*), perjanjian-perjanjian dengan daerah-daerah yang mempunyai pemerintah sendiri, kebangsaan dan kewarganegaraan, penukaran komisaris-komisaris tinggi, dan New Guinea.

2. Panitia Keuangan: segala hubungan keuangan dan hubungan ekonomi.
3. Panitia Militer: perjanjian-perjanjian militer dan penarikan kembali tentara Belanda dari Indonesia.
4. Panitia Kebudayaan: Hubungan kebudayaan.
5. Panitia Sosial: pegawai-pegawai pamongpraja yang bekerja pada waktu penyerahan kedaulatan.

Panitia-panitia ini akan diketuai bergilir-gilir oleh seorang anggota dari masing-masing delegasi, Belanda, Republik dan Federalis.

Anggota dari UNCI (KPBBI) akan mengunjungi rapat-rapat panitia-panitia ini bilamana perlu.

Pemimpin-pemimpin delegasi dan anggota UNCI seluruhnya telah mengemukakan pendapatnya bahwa konferensi ini "sudah mulai berjalan dengan harmoni yang besar dan mereka percaya sekali bahwa konferensi ini akan berjalan lancar jika diteruskan dengan semangat yang sedemikian ini". Panitia-panitia akan bertemu dalam sidang tertutup dan akan memasukkan laporan-laporan serta keputusan-keputusannya kepada Panitia Acara.

Keputusan-keputusan ini nantinya akan disahkan oleh Panitia Acara atau ditinjau kembali oleh panitia yang bersangkutan. Jika telah disahkan, maka keputusan-keputusan itu akan diserahkan kepada sidang pleno konferensi. (*Antara*, 26/8/1949)

* Diperoleh kabar dari delegasi Republik bahwa pada jam 17.00 sore ini akan diadakan sidang lengkap kedua delegasi, Republik dan Belanda, di bawah UNCI.

Yang akan dibicarakan a.l. penyusunan panitia-panitia sentral dan daerah untuk urusan tahanan politik, pasal 7 "Rum-Van Roijen Statement" dan *supply*. (*Antara*, 26/8/1949)

* Dari ketua delegasi Republik diperoleh keterangan bahwa hari ini akan mulai dikibarkan Sang Saka Merah Putih di depan gedung delegasi Republik di Jakarta. (*Antara*, 26/8/1949)

* Menurut kabar yang belum dapat dipastikan kebenarannya, pemimpin Filipina Carlos Romulo tak lama lagi akan berkunjung ke Indonesia, khususnya ke Republik. Kabar ini berkaitan dengan rencana pembukaan perwakilan Filipina di Republik. (*Antara*, 26/8/1949)

* Kemarin sore telah tiba di Jakarta dari Yogyakarta Jenderal Mayor Suhardjo.

  Tentang dengan kunjungannya ke Jawa Timur baru-baru ini ia menerangkan, bahwa ia telah mengunjungi Surabaya, Kediri, dan Nganjuk, dan di Nganjuk ia bertemu dengan Jenderal Mayor Sungkono.

  Hasil pertemuan antara Jenderal Mayor Sungkono dan wakil Kolonel Baay di Trowulan pada 13/8 yang lalu dikatakannya baik. Yang sangat disesalkan oleh Jenderal Mayor Suhardjo ialah ditangkapnya satu kompi TNI oleh Belanda di Surabaya. Kompi itu sebenarnya telah berada di kota sebelum dikeluarkannya perintah *cease fire*, dan sesudah keluarnya perintah itu memajukan diri, agar diketahui.

  Sampai sekarang masalah tersebut belum terselesaikan .

  Jenderal Mayor Suhardjo akan segera meneruskan perjalanan ke Banjarmasin, begitu urusan di Jakarta terselesaikan. (*Antara*, 26/8/1949)

* Telah tiba di Jakarta dari Yogyakarta dengan pesawat kemarin, lima orang utusan Republik ke ECAFE yaitu Ir. Dipokusumo, Ir. Supardi Prawironegoro, Dr. Helmi, Sardju, dan Sunosusastro.

  Diperkirakan mereka akan berangkat ke Bangkok awal minggu depan, disertai Ir. Laoh yang akan bertindak selaku peninjau. (*Antara*, 26/8/1949)

* Belum lama telah didirikan di Jakarta Perkumpulan Wanita Islam yang bertujuan menegakkan agama Islam dan menyempurnakan cita-citanya dalam urusan sosial.

  Perkumpulan ini berdiri di belakang Republik. Pengurus terdiri dari: Ny. Dt. Besar (ketua), Ny.Dr. Abu Hanifah (ketua II), Ny. Chabidjah Razak (penulis I), Ny. Moh. Natsir (bendahari), dengan beberapa orang komisaris dan penasihat Ny. Sjamsuridjal. (*Antara*, 26/8/1949)

* Menurut Kol. Hidajat yang kemarin sore tiba di Jakarta dari Sumatra, pada umumnya pelaksanaan *cease fire* di Sumatra berjalan aman,

kecuali di beberapa tempat yang belum mendengar adanya perintah ini. Ditegaskannya, perhubungan merupakan syarat penting bagi kelancaran pelaksanaan *cease fire* di Sumatra. Jika kita mau menggunakan pesawat KLM tanpa banyak sentimen, pelaksanaan *cease fire* akan lebih ringan.

Kol. Hidajat telah mengunjungi Medan, Sibolga, Bukittinggi dan Palembang. Di tempat-tempat itu telah dibentuk panitia bersama daerah (*local joint board*), dan pertemuan di antara panitia-panitia itu telah dilakukan. Mula-mula mereka berunding, lalu ditentukan luas daerah masing-masing, dan sesudah itu dirundingkan lagi kelanjutannya.

Pada dasarnya kelancaran pelaksanaan cease fire itu tidak terlepas dari jalannya Konferensi Meja Bundar. Jika dalam konferensi telah dicapai penyelesaian, di sini pun mudah dicapai penyelesaian.

Sekembali di Yogyakarta, Kol. Hidayat akan meneruskan perjalanan ke Kotaraja (sekarang Banda Aceh). (*Antara*, 26/8/1949)

* Dr. Helmi, salah seorang anggota delegasi Republik ke Ecafe, telah mengajukan pandangannya sendiri, terlepas dari pandangan delegasi Republik, tentang soal-soal ekonomi. Dikatakannya a.l.:

  “Kita pergi ke sana karena kita telah menjadi anggota, jadi kita wajib menghadirinya. Kedua, lepas dari penyelesaian politik antara kita dengan Belanda, kita harus dapat memanfaatkan segala kesempatan yang terbuka. Ecafe adalah bagian dari Unesco. Jadi kita harus tahu bagaimana mereka mengatur soal-soal ekonomi internasional, termasuk ekonomi kita. Kita mengetahui kedudukan Amerika di dalamnya. Dalam hal ini kita tak perlu terikat dalam menetapkan sikap politik kepada mereka. Kita tak mau terima sedikit pun pada politik negara manapun.

  Masalah pokok dalam ekonomi kita ialah penumpukan kapital (kapitaalsbelegging). Mereka kaya, kita bertanah kaya, di sinilah terbuka jalan menuju pinjaman.

  Jika dalam lingkungan Ecafe kita dapat memperoleh kebutuhan kita, walau hanya sebagian, sudah ringanlah soal penumpukan kapital tadi bagi kita.” (*Antara*, 26/8/1949)

* Mulai 27/8 malam di Bandung akan diadakan Kongres Serikat Sekerja Pamong Praja. Kongres yang akan didahului dengan resepsi khusus untuk

para anggota dan undangan itu akan bertempat di kabupaten. Yang akan dibicarakan ialah soal-soal mengenai dunia kepamongprajaan. (*Antara*, 268/1949)

* Pemerintah Negara Pasundan telah mengangkat T. R. T. Sunarja sebagai Direktur Yayasan Pusat Kebudayaan Pasundan di Bandung.

  Di samping itu telah diangkat pula delapan orang sebagai anggota kurator ialah: Ir. Tan Hwat Tiang, R. M. Suriahudaja, R. Sumardja, R. G. Hardjasomantri, Dr. R. Musa Sastranegara, Dr. R. Djundjunan, R. Didi Kartasasmita, dan Ios Wiriaatmadja. (*Antara*, 26/8/1949)

* Sidang Kabinet Pasundan yang dilangsungkan pada 26/8 memutuskan untuk mendesak kepada Pemerintah Umum supaya larangan pengibaran Sang Merah Putih juga dicabut untuk daerah Pasundan.

  Untuk itu Wakil Perdana Menteri Pasundan Ardiwinangun bersama dua menteri lain akan ke Jakarta pada 29/8 yad. Menurut *Antara*, Wakil Tinggi Mahkota Belanda di Pasundan, Dr. van Diffolon, menyatakan tidak berkeberatan terhadap pencabutan larangan tersebut. Jenderal Engles, Territoriaal Commandant Jawa Barat, pun tidak berkeberatan, asalkan Pemerintah Umum menyetujuinya. (*Antara*, 28/8/1949)

* Tentang pasar malam yang akan diadakan di Bandung dapat dikabarkan lebih lanjut, bahwa pasar malam itu akan diadakan dari 2 sampai 15 September. Pasar malam tersebut akan bertempat di alun-alun, dan pendapatannya adalah untuk amal. (*Antara*, 26/8/1949)

* Berkenaan dengan pelaksanaan *cease fire* di Negara Sumatra Timur (NST) yang dimulai tanggal 14/15 malam, direktur wali negara NST Tengku Hafas menyatakan bahwa tidak terjadi satu pun insiden.

  Mengenai sikap TNI di Sumatra Timur dikatakannya, sikap itu membayangkan betapa besar hasrat untuk memperoleh penyelesaian segera. Menurutnya, di NST kini tentu berlaku *standfast* .

  Lebih jauh dikatakannya, di Medan telah datang sejumlah perwira TNI yang pasukannya memang berada di NST, a.l. Kapten Nip Karim di bagian utara NST, Mayor Djamin Ginting di bagian Karo, Mayor Bedjo di Sumatra Timur Tengah dan Selatan. Untuk pelaksanaan *cease fire* ini telah datang

di Medan Letkol Kawilarang yang berkedudukan di Sumatra Utara. Di Sumatra Timur sementara itu telah dibentuk Local Joint Committee, di mana pihak TNI diwakili oleh Mayor Nazir dan Kapten Nip Karim, dari pihak BFO oleh T. Arifin dan Rotty, dari pihak Belanda oleh Mayor Gerth van Wijk, Asisten Residen E. Luuring, dan dari pihak UNCI oleh Letkol J.W. Alexander, Kapten Abat dan Kapten Dellows. (*Antara*, 27/8/1949)

* Pada waktu ini di NST telah berdiri Persatuan Perkebunan Getah Rakyat Labuhan Batu, Sumatra Timur Selatan, yang akan mengusahakan pembukaan perkebunan rakyat dan mendirikan pabrik-pabrik yang dijalankan dengan mesin.

Persatuan yang didirikan di tahun 1948 ini dipimpin oleh Dahlan Nur, seorang pemuda ahli ekonomi. Tujuannya adalah mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan perkebunan getah rakyat menuju kemajuan.

Luas perkebunan getah rakyat di seluruh Labuhan Batu sekitar 40.000 ha. Kalau baik jalannya, perkebunan ini akan menghasilkan 20 juta kg getah asap (smoked sheet) setahun.

Kepada *Antara* Dahlan Nur menerangkan, ada niat pada persatuan ini untuk mengekspor getah rakyat langsung ke luar negeri. Dalam keadaan sekarang hal itu tidak mungkin karena tingginya biaya, karena kebanyakan kebun getah bertindak sendiri-sendiri, dan menjual getahnya hanya dengan perantaraan orang Tionghoa.

Dengan kelonggaran dari pemerintah di bidang *deviezen* , produksi getah rakyat akan lancar dan meningkat, dan dengan demikian rakyat akan makmur. (*Antara*, 27/8/1949)

1949 AGUSTUS 27.

* Kabinet bersidang untuk membicarakan kewajiban-kewajiban delegasi Republik yang berada di Indonesia. Diduga telah dibicarakan hal-hal yang masih perlu diusahakan kelancarannya, a.l. tentang *supply*, pembebasan tawanan perang dll.

Minggu terakhir ini BP KNIP pun terus-menerus melakukan sidang tertutup untuk membicarakan rencana Pemerintah di berbagai bidang. Dalam sidang-sidang tersebut telah memberikan keterangan a.l. Menteri Keuangan dan Menteri Kemakmuran. (*Antara*, 29/8/1949)

* Delegasi Belanda, Republik Indonesia, dan wakil dari daerah-daerah di luar Republik, BFO, telah melakukan pertemuan hari ini di bawah pimpinan UNCI untuk membicarakan pelaksanaan persetujuan-persetujuan yang telah dicapai pada 1 Agustus sementara Konferensi Meja Bundar sedang berlangsung di Den Haag.

  W.B. Pritchett yang mewakili utusan Australia dalam UNCI membuka sidang pada jam 17.00.

  Kemudian Dr. H. L. Jacob, ketua delegasi Belanda, dan Mr. Susanto Tirtoprodjo, ketua delegasi Republik, masing-masing mengucapkan pidato.

  Dalam sidang hari ini telah dicapai persetujuan untuk membentuk Joint Sub-Committee yang bertugas memberi nasihat dan mempercepat proses pembebasan tahanan politik dan tawanan perang, dan Joint Sub-Committee lain yang bertugas mengurus soal-soal perbekalan.

  Sidang ditutup dengan pidato ketua delegasi Belanda dan Republik, berisi pernyataan tentang perlunya melaksanakan hal-hal yang sudah disetujui bersama.

  Mr. Susanto menyatakan juga a.l. bahwa antara pekerjaan di Indonesia dan pembicaraan Konferensi Meja Bundar di Den Haag terdapat saling hubungan yang erat. (*Antara*, 27/8/1949)

* Berita yang diterima dari Yogya menyatakan bahwa pada 26/8 malam Kongres Wanita Indonesia telah dibuka dengan resepsi bertempat di Kepatihan Yogyakarta. Resepsi dihadiri a.l. oleh Presiden dan istri, H.A. Salim, Menteri Luar Negeri, Mr. Assaat, Ketua BP KNIP, Sutardjo, Ketua DPA dll.

  Pidato diucapkan oleh Ketua Panitia Kongres, wakil perkumpulan-perkumpulan wanita, dan juga oleh Presiden Sukarno. Semuanya mendoakan agar kongres berhasil, menganjurkan persatuan di antara kaum wanita seluruh Indonesia, dan agar dalam perjuangan terakhir ini kaum wanita ikut ambil bagian. (*Antara*, 28/8/1949)

* Kongres Wanita Indonesia dimulai di Yogyakarta, dihadiri oleh 82 organisasi.

  Kongres berhasil membentuk Badan Kontak berupa Sekretariat yang berkewajiban memelihara hubungan (1) ke dalam dengan organisasi-

organisasi wanita seluruh Indonesia; (2) ke luar dengan gerakan-gerakan wanita di seluruh dunia. (*KU126; LUxxi*)

* Di Prambanan telah dibuka rapat pendahuluan Kongres Gerilya Indonesia. Pembukaan dilakukan oleh A. Tompumu selaku panitia penyelenggara, kemudian pimpinan ia serahkan kepada M. Djoni yang menerangkan maksud dan tujuan kongres tersebut, a.l.:

1. mengkoordinasi seluruh gerilya di Indonesia;
2. mendesak dan menuntut supaya seluruh tahanan dan hukuman aksi subversif ketika aksi militer I dan II dilepaskan sekarang dengan tidak bersyarat;
3. Kongres Gerilya Indonesia meletakkan titik beratnya di atas dasar perjuangan gerilya seluruhnya;
4. menjaga dan memperbesar semangat gerilya;
5. menuntut ditarik mundurnya seluruh tentara Belanda dari Indonesia.

Selanjutnya diputuskan, bahwa Kongres Gerilya Indonesia akan dilangsungkan pada 17 September 1949 di daerah Prambanan. (*Antara*, 1/9/1949)

* Di Surabaya hari ini dibuka *Jaarmarkt* (Pasar Tahunan) ke-26. Di dalamnya terdapat a.l. seteleng *publisitet* yang mendapat perhatian besar dari penonton. Hampir seluruh harian dan majalah yang terbit di Indonesia ambil bagian dalam seteleng itu, demikian juga konsulat-konsulat asing.

Amerika Serikat tampil dengan seri News in the Making yang melukiskan jalannya berita buah tangan seorang juru warta sampai ke tangan pembaca. Inggris memamerkan contoh-contoh penerbitannya, juga seri foto pembangunan Inggris di segala bidang. Belgia, Perancis, Tiongkok dan India tidak ketinggalan, demikian juga Belanda yang memamerkan beberapa surat kabarnya.

Yang paling banyak menarik perhatian penonton adalah barang-barang pameran Republik Indonesia seperti foto-foto dari Menumbing sampai Yogya, brosur dan surat kabar yang terbit sebelum Agresi Militer Belanda dan dicetak di atas kertas merang, yang merupakan hal baru bagi penduduk Surabaya.

Untuk pameran ini RI khusus mendatangkan seorang pegawai penerangan. Dikabarkan bahwa RI akan memamerkan juga jenis-jenis meterai, termasuk yang dicetak di luar negeri. Panitia pameran sementara itu menyatakan bahwa kini sedang dipersiapkan buku berjudul *Publiciteit 1949* yang a.l. akan memuat tulisan Ruslan Abdulgani, Parada Harahap, Djawoto dll. (*Antara*, 31/8/1949)

* Telah tiba di Jakarta pada 26/8 dalam perjalanan inspeksi ke Banten, Kol. Sadikin, Panglima Divisi Siliwangi, bersama stafnya yang terdiri dari Mayor Taswin, Sentot Iskandar di Nata, dan Omong. Menurut kabar, May. Taswin akan duduk dalam Local Joint Board Banten menggantikan Dr. Eri Sudewo yang kini diangkat menjadi Kepala Staf Divisi Siliwangi. (*Antara*, 27/8/1949)

* Konferensi Pemuda Bandung yang diadakan di Bandung hari ini dan dihadiri oleh sembilan organisasi menyatakan dalam mosinya menyokong putusan Konferensi Pemuda Seluruh Indonesia yang baru-baru ini diadakan di Yogyakarta.

  Selain itu telah diambil empat resolusi sbb.:

  1. Memperkuat desakan bagi pembebasan tawanan-tawanan politik, terutama pemuda, sesuai dengan putusan Kongres Alim Ulama dan Kongres Perpindo.
  2. Mendesak segera diperkenankannya pengibaran bendera Merah Putih.
  3. Mendesak supaya peraturan “Staat van oorlog en beleg” dicabut kembali.
  4. Mendesak kepada Pemerintah untuk mengadakan balai pertemuan pemuda. (*Antara*, 30/8/1949)

* Untuk menyambut kabar bahwa k.l. enam desa di daerah Cimelati, Bogor, akan tetap berada di bawah pengawasan TNI, di Cimelati (yang terkenal dengan tempat pemandiannya) baru-baru ini diadakan upacara menaikkan bendera Merah Putih dan selamatan. Dari Bogor banyak tamu dan murid sekolah datang untuk menghibur para prajurit yang mendapat tugas menjaga keamanan di sana. (*Antara*, 27/8/1949)

* Tanggal 1 September yad. di Bogor akan dimulai Kursus Pemimpin (Hoofdkursus) Jawatan Kehutanan. Para pegawai menengah jawatan ini, setelah diuji, bisa mengikuti kursus, setelah itu terbuka kesempatan bagi mereka untuk menjabat pangkat-pangkat tinggi.

Sebagaimana diketahui, dalam fakultas Ilmu Pertanian (bagian dari Perguruan Tinggi Indonesia) ada kesempatan untuk memperdalam pengetahuan tentang ilmu kehutanan, tetapi ternyata kurang mendapat perhatian dari pelajar Indonesia.

Dengan diperluasnya kegiatan Jawatan Kehutanan, telah didatangkan tenaga akademisi dari Belanda, tetapi ini tidak mencukupi. Pendidikan akademisi makan waktu lama. Itu sebabnya, maka sekarang dibuka kesempatan bagi para pegawai menengah Jawatan Kehutanan untuk menuntut pelajaran Ilmu Kehutanan yang lebih tinggi. (*Antara*, 27/8/1949)

* Operasi militer terhadap Darul Islam (DI) di Jawa Barat dimulai.

Operasi bernama Operasi Bratayudha, dipimpin oleh Panglima Daerah Militer (Pangdam) VI/Siliwangi, Kolonel Ibrahim Adji. (*PSPB2 54*)

* Senin malam tgl. 26/8, oleh Dewan Partai dari Partai Persatuan Indonesia Raya di bawah Mr. Wongsonegoro telah didirikan cabang partai tersebut di Jakarta.. Susunan pengurus sementara adalah sbb.:

1.	P. A. de Queljoo	Ketua
2.	Dr. R. Hendarmin	Wakil Ketua
3.	Dulo Abdullah	Penulis/Bendahari
4.	Dr. Abdulkadir	Anggota
5.	Jahja (NIT)	Anggota
6.	Abdulrachman	Anggota
7.	Slamat	Anggota
8.	H. Andi Patoppoi	Anggota
9.	Subardjo	Anggota
10.	Prijowijono	Anggota
11.	A. Entus	Anggota

Alamat sekretariat sementara: Van Heutszplein 14, Jakarta. (*Antara*, 27/8/1949)

* Diperoleh kabar bahwa Abdul Malik, Wali Negara Sumatra Selatan, yang semula akan datang di Palembang untuk menghadiri sidang istimewa Dewan Perwakilan Negara Sumatra Selatan, tidak jadi datang. Sebab-sebabnya belum diketahui.

  Seperti diketahui, Abdul Malik kini berada di Negeri Belanda, menjadi anggota delegasi BFO dalam Konferensi Meja Bundar. (*Antara*, 27/8/1949)

* Atas inisiatif beberapa orang, di Palembang telah dibentuk Panitia Persiapan Pembentukan Front Nasional, dihadiri oleh 30 orang. Panitia ini bertugas melakukan kontak dengan partai-partai politik dan organisasi, hingga nantinya dapat terbentuk Front Nasional dengan keanggotaan luas.

  Panitia yang dipimpin oleh Z. Zainuddin, R. A. Hakky dan beberapa orang pembantu ini bertugas juga mengumpulkan keterangan, apakah rintangan yang menghambat berkembangnya partai politik sudah dapat diatasi. Seperti diketahui, sejak Agresi Militer II, organisasi-organisasi politik di Palembang hampir tak dapat bergerak sama sekali. (*Antara*, 27/8/1949)

* Atas prakarsa beberapa pemuda, di Palembang telah dibentuk panitia pengorganisasian pemuda, dipimpin oleh Mahjudin Abbas. Para pemrakarsa terutama adalah mereka yang di awal revolusi menjadi anggota organisasi-organisasi pemuda yang tergabung dalam Kongres Pemuda Indonesia.

  Panitia bertugas menyusun anggaran dasar sebagai pegangan untuk menyusun gerakan pemuda di Palembang. (*Antara*, 27/8/1949)

1949 AGUSTUS 28.

* Dikabarkan bahwa Hatta akan berkunjung ke London atas undangan Labour Party. Ia akan pergi sebelum atau mungkin sesudah Konferensi Meja Bundar selesai. Dikabarkan juga bahwa ia akan menghadiri General Assembly di Lake Succes. (*Antara*, 29/8/1949)

* Sesudah seminggu lamanya hubungan antara Banjarmasin dan Hulu Sungai terputus, tgl. 26/8 bis-bis "Bapindo" dan "Favoriet" yang selama ini tertahan perjalanannya oleh pertempuran, telah dapat meneruskan kembali perjalanan ke Banjarmasin.

Wartawan *Kalimantan Berdjuang* yang baru kembali dari Hulu Sungai mengabarkan bahwa kegiatan gerilya semakin meluas, dan tembak-menembak tidak henti-hentinya terjadi di sepanjang jalan Tanjung-Amuntai, Barabai dan Rantau yang panjangnya hampir 100 km. Karena itu kebanyakan rumah ditinggalkan penghuninya.

Pengumuman Gubernur Gerilya Hasan Basri menyatakan bahwa markas besarnya kini terletak di daerah Kandangan, sementara beberapa komandan daerah ditugaskannya mengatur urusan sipil dan militer selaku komisaris pemerintah. Diterangkan bahwa mereka ini ditugaskan juga untuk melakukan kontak dengan pihak pelaksana *cease fire*, setelah Jenderal Mayor Suhardjo datang.

Dikabarkan, hari ini beratus-ratus mobil dan truk bergerak menuju lapangan terbang Ulin dari Banjarmasin untuk menyambut kedatangan Jenderal Mayor Suhardjo. Untuk penyambutan itu di Kandangan telah dibentuk panitia penyambutan diketuai oleh Kyai Kepala Burhan Noor, dibantu oleh wakil-wakil partai. (*Antara*, 29/8/1949)

* Pemerintah Republik mengirim misi di bawah pimpinan Jenderal Mayor Suhardjo ke Kalimantan Selatan untuk mendamaikan pasukan gerilya di bawah Letnan Kolonel Hasan Basri dengan pasukan Belanda, sehubungan dengan terjadinya *cease fire* (gencatan senjata) 1 Agustus 1949 di bawah pengawasan United Nations Commission for Indonesia (UNCI, Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia).

Hasil misi adalah diakuinya Hasan Basri sebagai gubernur militer dengan pangkat letnan kolonel. (*KU126*)

* Jam 15.30: Telah tiba di Kemayoran Presiden Sukawati dari Negara Indonesia Timur (NIT), disambut oleh ajudan Wakil Tinggi Mahkota (WTM) Belanda dan wakil NIT di Jakarta, M. Jahja.

Bersama Presiden Sukawati datang juga Direktur Kabinetnya Van Krieken, wakil mahkota di NIT Dr. Mendelaar, Kol. Sheffelaar, Kepala Daerah dan Ketua Dewan Raja-raja Bali Anak Agung Gde Agung.

Dalam percakapan dengan *Antara* Sukawati menerangkan bahwa kunjungannya ke Jakarta akan berlangsung sekitar lima hari, untuk melakukan pembicaraan dengan Pemerintah Federal Sementara.

Mengenai kunjungan balasan kepada Wali Negara Pasundan di Bandung dikatakannya, hal itu baru dapat dilaksanakan dalam kesempatan lain. Untuk itu ia perlu membawa serta istri. Kapan harinya, belum dapat ditentukan.

Tentang Konferensi Meja Bundar di Den Haag dikatakannya: Memperhatikan pidato-pidato yang diucapkan oleh PM Drees, PM Hatta, Sultan Hamid, dan Mr. Van Maarseveen, ia berharap penuh Konferensi Meja Bundar akan berhasil. Diharapkannya bahwa soal pelanggaran-pelanggaran atas *cease fire* dan demonstrasi-demonstrasi sekitar Konferensi Meja Bundar jangan sampai merusak kemauan baik untuk mencapai persetujuan.

Ditanya mengenai soal Irian, Sukawati menyatakan bahwa baik pihak Republik maupun BFO telah mengemukakan pendiriannya tentang itu, yaitu supaya Irian tetap berada dalam lingkungan RIS. "Inilah yang pokok. Tentang administrasinya, bukankah sejak sebelum perang Irian sudah masuk wilayah Indonesia Timur? Dari itu, sepatutnya kami merasa, Irian harus termasuk ke Indonesia Timur."

Tentang tahanan politik dikatakannya, hal ini tidak menjadi soal di Indonesia Timur.

Tentang pengibaran bendera Merah Putih di NIT ia menerangkan: "Terhadap pengibaran ini saya berpendirian, agar kita mengibarkannya itu hendaklah dengan cara penghargaan dan kehormatan yang besar, yaitu apabila kedaulatan nanti telah diserahkan. Bahwa keberatan-keberatan terhadap hal ini pada pokoknya memang tidak ada, terbukti dari bagaimana meriahnya tanggal 17 Agustus dirayakan baru-baru ini di NIT, dengan tidak ada terdengarnya sesuatu wanklank," demikian Sukawati. (*Antara*, 29/8/1949)

* Menurut catatan Statistik, impor kertas koran selama setengah tahun ini berjumlah 1.422 ton dengan harga *f*856.000. Kertas ini sebagian besar dipakai di Jawa, yakni 1.130 ton. Sumatra Timur mendapat bagian 241 ton, Sumatra Selatan 8 ton, dan NIT 38 ton.

Di samping kertas koran, diimpor juga kertas pak 4.797 ton (*f*2 juta), dan kertas sigaret 456 ton (*f*1,2 juta). (*Antara*, 28/8/1949)

* Menurut catatan Statistik, dalam masa setengah tahun itu telah diekspor:

biji pinang	4.370 ton
minyak sereh	170 ton
kembang pala	181 ton
kopal	1.559 ton
biji pala	965 ton
damar	1.474 ton
rotan	9.834 ton

Total jumlah ekspor Indonesia selama setengah tahun ini adalah 3.584.024 ton (*f*668 juta). (*Antara*, 28/8/1949)

1949 AGUSTUS 29

* Pihak resmi di Yogyakarta menyatakan belum mengetahui adanya kabar bahwa Ketua Delegasi Republik Mohammad Hatta telah minta Presiden Sukarno untuk datang ke Den Haag. Kalaupun benar ada berita demikian, dipertanyakannya apa perlunya Presiden Republik Indonesia pergi ke Konferensi Meja Bundar, karena Republik telah mengirimkan delegasi yang lengkap.

  Sementara itu dikabarkan bahwa Ny. Hatta akan berangkat ke Den Haag 1 September mendatang dari Jakarta. (*Antara*, 29/8/1949)

* Ketua delegasi Republik di Konferensi Meja Bundar, Drs. Mohammad Hatta, menyangka. berita dari Indonesia yang menyatakan bahwa ia bermaksud berkunjung ke London sebagai tamu Partai Buruh Inggris.

  "Saya sama sekali tidak berpikir akan pergi," demikian Hatta. (*Antara*, 30/8/1949)

* Menjawab pertanyaan tentang pelaksanaan *cease fire*, Panglima Besar Sudirman menyatakan, tindakan nyata Belanda mengenai pelaksanaan *cease fire* masih ditunggu. Menurut Sudirman, kebebasan lalu-lintas belum ada. Pembentukan Local Joint Board masih sulit, padahal itu perlu lekas dilakukan untuk melancarkan *cease fire*, dan untuk mempermudah perjalanan opsir-opsir TNI ke daerah-daerah

Mengenai politik, Sudirman menyatakan, politik berunding Pemerintah bukan soal bagi angkatan perang. Yang penting ialah hasilnya, yang berupa perbaikan nasib tentara dan rakyat. (*Antara*, 29/8/1949)

* Di Madiun telah terbentuk panitia sosial yang berhasrat memberikan bantuan kepada penduduk Yogyakarta tanpa membedakan golongan, agama, kebangsaan atau paham politiknya.

Panitia itu dinamakan “Panitia Madiun Pembantu Djokja”, diketuai oleh Suwarno Samsudali. Panitia berencana untuk secara berangsur-angsur membentuk cabang-cabang dan ranting-ranting di seluruh Keresidenan Madiun. (*Antara*, 29/8/1949)

* Menurut kalangan industri rokok kretek dan Gabungan Perusahaan Tembakau di Semarang, besar kemungkinan pabrik-pabrik rokok kretek yang jumlahnya tak kurang dari 70 buah, dalam waktu dekat akan tutup jika harga cengkeh dan bahan kertas tak dapat dikendalikan. Bulan Desember 1948, harga cengkeh per kg *f*2,60, dan sekarang sudah meningkat menjadi *f*16,00. Dengan harga ini diderita kerugian satu sen untuk tiap batang rokok.

Pihak perusahaan akan mengirim utusan kepada yang berwajib, sebab kalau pabrik-pabrik itu ditutup, 35.000 buruh akan menganggur di Semarang dan masyarakat akan kekurangan rokok. Padahal menurut catatan, tiap hari dihasilkan 25 juta batang rokok.

Perlu diketahui, bahwa di Semarang saja tiap bulan dibayar cukai sebesar enam ribu rupiah, dan upah buruh sehari sebanyak *f*150.000,00. Kalangan industri rokok mengharapkan agar Pemerintah segera membentuk Komisi Studi. (*Antara* 30/8/1949)

* Dalam percakapan dengan *Antara*, beberapa perwira TNI daerah Ciamis menyatakan bahwa di sana TNI telah menyusun pemerintahan sipil di utara Ciamis, yang meliputi 12 kecamatan. Susunan pemerintahan ini lengkap mulai dari bupati sampai kepala desa, beserta instansi kemakmuran, penerangan, keagamaan dll. Sementara itu di tiap kecamatan dibentuk komando onderdistrik militer.

Pembentukan pemerintahan sipil ini tidak akan menyulitkan pelaksanaan *cease fire*, karena TNI selalu patuh pada perintah dari atas.

Sementara itu pada 25/8 telah diadakan pertemuan pertama antara tentara Belanda dan TNI di Desa Sindangrasa, dihadiri pula oleh wakil-wakil LJC, yakni Letkol Rubiono dan Kapten Van der Waag. Perundingan berjalan dalam suasana ramah tamah. (*Antara*, 30/8/1949)

* Baru-baru ini di Ciomas tampak berkibar bendera merah. Peristiwa ini segera diselidiki oleh TNI. Menurut keterangan penduduk, itu adalah perbuatan gerombolan liar yang hendak mencoba mengganggu *cease fire*. (*Antara*, 30/8/1949)

* Baru hari ini diketahui oleh yang berkepentingan bahwa 15 orang pengawal perkebunan di Cikopo telah melarikan diri lengkap dengan senjatanya, dengan membawa serta sejumlah persediaan bahan makanan. Apa alasannya, belum diketahui. (*Antara*, 31/8/1949)

* Atas usaha 3 partai federalis di Lampung, yaitu PRIS, PARDAFI dan PARAF (Partai Rakyat Federaal) antara 23-26 September mendatang di Tanjung Karang akan diselenggarakan Kongres Rakyat Daerah Pendudukan Lampung.

  Panitia kongres diketuai oleh Sjamsudin dari PRIS. (*Antara*, 29/8/1949)

* Sejak rombongan Dr. A. K. Gani tiba di Palembang, di tempat tersebut dibentuk panitia penyambutan tamu agung, yang tugasnya mengusahakan kebutuhan tamu-tamu agung yang sudah ada atau akan datang di Palembang.

  Sebagaimana diketahui, selama berada di Palembang, siang malam A. K. Gani mendapat kunjungan tamu-tamu dari kalangan rakyat, teristimewa pula dari kalangan Republikein.

  Didapat kabar, rakyat Palembang kini sedang bersiap-siap menyambut kedatangan Dr. M. Isa dan Kol. Simbolon yang masing-masing telah ditetapkan sebagai anggota Local Joint Board untuk Sumatra Selatan. (*Antara*, 30/8/1949)

* Setelah dua hari dalam perjalanan ke Lahat, Mayor TNI Dr. Ibnu Sutowo akhirnya tiba kembali di Palembang. Dikabarkan, bahwa ia sudah bertemu dengan perwira TNI Bambang Utojo dan menugaskannya untuk

memerintahkan penghentian permusuhan kepada anak buahnya di daerah Lubuk Linggau. Untuk menyampaikan perintah kepada Kapten Dani yang diduga berada di daerah Baturaja telah juga dikirim utusan.

Pagi ini Local Joint Board mengadakan sidang lengkap untuk membicarakan daerah patroli masing-masing pihak. Kalangan yang dekat dengan LJB optimis mengenai pelaksanaan *cease fire*, walaupun perhubungan di antara kesatuan-kesatuan TNI tidak gampang. (*Antara*, 29/8/1949)

* Kawat yang diterima Pemerintah Republik di Yogyakarta menyatakan bahwa Jenderal Mayor Suhardjo dan peninjau-peninjau Konferensi Tiga Negara telah tiba di Banjarmasin. Mereka disambut oleh Residen, para pembesar, wakil-wakil rakyat, dan ribuan rakyat di lapangan terbang.

Sebagaimana diketahui, Suhardjo datang berkenaan dengan timbulnya kekeruhan di daerah Kalimantan Selatan akhir-akhir ini. Karena keadaan, pihak Republik maupun Konferensi Tiga Negara harus ikut melaksanakan perintah tembak-menembak

Dalam pertemuan dengan rakyat Minggu malam, Suhardjo menyampaikan salam dari Presiden Sukarno dan Panglima Besar TNI kepada rakyat Kalimantan. (*Antara*, 29/8/1949)

* Dari pihak resmi NIT dikabarkan, waktu ini Senat NIT sedang mengadakan sidang untuk membicarakan Rencana Undang-undang Dasar NIT.

Sementara itu pada 10/9 yad. Parlemen NIT akan mengadakan sidang juga untuk a.l. membicarakan masalah kontrak dengan daerah-daerah *zelfbestuur* di NIT. (*Antara*, 29/8/1949)

* Rakyat Irian daerah Hollandia telah mengirimkan kawat kepada Presiden Sukarno berisi pernyataan tidak mengakui Johan Ariks dan memprotes mosi Ariks yang disampaikan di Konferensi Meja Bundar.

Dinyatakan selanjutnya, rakyat Irian tak mau dipisahkan dari RIS, dan rakyat Irian mengakui Republik Indonesia dan BFO sebagai lambang perjuangan kemerdekaan seluruh Indonesia, termasuk Pulau Irian. (*Antara*, 29/8/1949)

* Wakil Konsul Jenderal Inggris A. Goodden dan Wakil Konsul J. A. Cabee

akan menemui Menteri Kemakmuran Republik Indonesia untuk membicarakan masalah-masalah kemakmuran.

Sementara itu Wakil Konsul Amerika dan Ny. M. Davies akan menghadap Presiden Sukarno dan Menteri Luar Negeri untuk minta diri berhubung dengan kepindahannya ke Medan. (*Antara*, 29/8/1949)

* Delegasi Republik Indonesia tidak dapat menghadiri sidang subkomite Ecafe bagian besi dan baja di Bangkok hari ini, karena pembesar Belanda di Jakarta menolak memberikan visa. Sesudah wakil Republik, Dr. Suroso, mendesak sekretariat Ecafe agar memberikan bantuannya, barulah wakil Republik tersebut dapat meninggalkan Jakarta.

Dr. Suroso mengatakan, kabinet di Yogyakarta akan memberikan instruksi kepada delegasi Republik di Konferensi Meja Bundar Den Haag untuk membicarakan masalah penahanan delegasi Indonesia ke Konferensi Ecafe ini. (*Antara*, 30/8/1949)

1949 Agustus 30.

* Sultan Hamengkubuwono IX dan Kol Sungkono yang semula direncanakan bertemu di Surabaya hari ini, menurut kabar belakangan baru akan melangsungkan pertemuan pada 4 September yad.

Seperti diketahui, Kol. Sungkono akan mengunjungi komandan-komandan bawahannya yang tersebar di Jawa Timur. Diduga, perjalanan itu akan dilakukannya setelah pertemuan dengan Sultan Yogya. (*Antara*, 31/8/1949)

* Setelah berapat pada 29/8, Komisi Keuangan dan Ekonomi dalam Konferensi Meja Bundar bersidang lagi hari ini. Pendirian Republik dan Belanda dalam soal keuangan dan ekonomi berbeda jauh. Belanda menghendaki *medezeggenschap* (hak ikut berbicara) terlampau besar, sehingga kedaulatan yang akan diserahkannya akhirnya tiada artinya bagi bangsa Indonesia.

Mengenai keuangan dan ekonomi, Republik setuju bahwa dalam soal-soal penting RIS harus berembuk dulu dengan Belanda, tapi putusan akhir terletak di tangan Pemerintah RIS sebagai negara merdeka yang berdaulat.

Kerja sama dalam Uni tidak merupakan ikatan.

Tentang utang piutang, Belanda telah memajukan 5½ miliar rupiah sebagai utang yang harus diambil alih oleh RIS, yaitu pengeluaran Hindia Belanda dari sebelum 1942 sampai bulan Juli 1949. Dalam jumlah ini belum termasuk ongkos-ongkos Pemerintah Hindia Belanda di Australia.

Republik hanya bersedia mengambil alih utang piutang Belanda sampai tahun 1942. Ongkos-ongkos perang, umpamanya pengeluaran untuk membelanjai aksi militer pertama dan kedua tak dapat diterima. Pengeluaran Hindia Belanda sesudah tahun 1942 untuk kepentingan rakyat Indonesia bisa diambil alih oleh RIS.

Dalam rapat hari ini dibicarakan soal-soal perdagangan dan luar negeri RIS. Juru bicara Republik mengatakan, orang-orang Indonesia yang sekarang bekerja pada Dinas Luar Negeri Belanda akan bisa menyumbangkan tenaganya pada Dinas Luar Negeri RIS menurut kecakapan masing-masing. Selain kecakapan, sudah tentu syarat utama ialah bahwa mereka harus dapat bekerja dan menyesuaikan diri dengan keadaan politik yang baru.

Pembicaraan dalam komisi-komisi lain baru sampai pada tingkat awal. Pertukaran *working papers* (kertas kerja) belum terjadi, walau delegasi Republik sudah siap dengan working papers mengenai ketatanegaraan, keuangan-ekonomi, militer, dan kebudayaan. (*Antara*, 31/8/1949)

* Komisi Militer Konferensi Meja Bundar hari ini mengadakan pembicaraan tak resmi pertama, dihadiri oleh wakil-wakil UNCI.

Setelah ketua dari ketiga delegasi dan ketua Komisi Militer minggu ini, Dr. Leimena, mengucapkan kata pengantar, diputuskan bahwa ketua dari ketiga delegasi bersama wakil masing-masing akan merundingkan prosedur sidang-sidang selanjutnya. (*Antara*, 31/8/1949)

* Sore ini telah tiba di Jakarta dengan pesawat dari ibu kota Republik: Ny. Hatta beserta Ketua delegasi Republik Mr. Susanto Tirtoprodjo, ketua panitia tawanan politik Mr. Tirtawinata, Menteri Penerangan Mr. Samsudin, dan Kol. Hidajat.

Pada Kamis, 1 September Ny. Hatta akan meneruskan perjalanan ke Negeri Belanda, kemungkinan disertai Ny. Mr. Ali Sastroamidjojo.

Menurut keterangan Mr. Susanto, keberangkatan Ny. Hatta ke Negeri Belanda adalah untuk mengikuti suami. Sebenarnya ia sudah akan berangkat bersama Wakil Preiden, tetapi karena waktu itu kurang tempat di pesawat, keberangkatan ditunda.

Adapun Kol. Hidajat akan segera meneruskan perjalanan ke Sumatra. (*Antara*, 31/8/1949)

* Dalam percakapan dengan *Antara* Ny. Siti Rachmijati Meutia, istri Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta, menerangkan bahwa kepergiannya ke Negeri Belanda adalah untuk meninjau gerakan wanita. Terutama yang akan diperhatikannya adalah usaha wanita Belanda di lapangan sosial sesudah Negeri Belanda diduduki Jerman.

Jika ada kesempatan, ia pun bersama suami akan melakukan perjalanan ke lain-lain tempat di Eropa, a.l. Inggris. (*Antara*, 31/8/1949)

* Akhir-akhir ini sering disebut nama Letkol Sudjono dari daerah Malang dan Dr. Murdjani sebagai anggota *Local Joint Board* untuk Surabaya. Ini berlainan dengan kabar semula yang menyatakan bahwa secara resmi telah ditetapkan Letkol Kretarto, Dr. Murdjani dan Dul Arnowo sebagai anggota LJB tersebut.

LJB Surabaya meliputi daerah Jawa Timur yang terletak di sebelah timur garis demarkasi di masa Persetujuan Renville. (*Antara*, 31/8/1949)

* Komandan Daerah 5 Siliwangi, Mayor Sambas, dan Residen Militer daerah tersebut, M. Mu'min, kemarin sore telah tiba di Jakarta.

Tentang *cease fire* di daerahnya, Mayor Sambas menyatakan bahwa TNI di sana taat kepada perintah Panglima Tertinggi, dan sampai kini di sana tidak terjadi satu insiden pun. Gerombolan bersenjata tidak banyak, dan dapat dikendalikan oleh TNI. "Semangat anak-anak baik, begitu pun disiplin mereka. Dan bantuan rakyat kepada TNI memuaskan," demikian Mayor Sambas. (*Antara*, 30/8/1949)

* Diperoleh kabar bahwa beberapa perkumpulan Arab berencana mengadakan rapat-rapat protes terhadap usul Kantor Pusat Islamitische Zaken (Jawatan Urusan Agama Islam) untuk mengubah susunan panitia

yang bertugas menentukan *deviezen* bagi keluarga Arab yang ada di Hadramaut.

Perkumpulan-perkumpulan tersebut tidak menyetujui susunan panitia itu, dan menginginkan agar susunan panitia sesuai dengan yang dikehendaki oleh mayoritas mayarakat Arab. (*Antara*, 30 Januari 1949)

* Konferensi Perhimpunan Al-Irsjad yang telah berlangsung beberapa hari lamanya di Jakarta, a.l. telah mengambil keputusan sbb.:
  1. Pengurus Besar Al-Irsjad sekarang berkedudukan di Jakarta dan terdiri dari: Ketua Ali Hubeis, Wakil Ketua Hasan Argubi, Penulis Ali Harharah, Bendahari Siddik Surkatti, dan Pembantu-pembantu terdiri dari wakil-wakil AI Jakarta, Bogor, Solo, dan Surabaya.
  2. Menetapkan Kongres Al-Irsjad yang akan datang di Solo.
  3. Rencana pelajaran sekolah-sekolah Al-Irsjad disesuaikan dengan rencana sekolah Pemerintah, dengan ditambah bahasa Arab dan Agama Islam
  4. Membentuk satu Badan Pelajaran yang mementingkan pelajaran-pelajaran di sekolah-sekolah Al-Irsjad dan badan ini berkewajiban untuk mengadakan sekolah Mu'allimin (*Kweekschool*) yang rencana pelajarannya sama dengan *Kweekschool* Pemerintah, ditambah bahasa Arab dan Agama Islam.
  5. Mengadakan Studiefonds untuk menyokong anak-anak yang orang tuanya tidak mampu mengongkosi anaknya.
  6. Membentuk satu badan penyiaran; di antaranya telah ditetapkan untuk menerbitkan majalah bahasa Arab yang diberikan nama *Al-Bajan*.
  7. Membentuk satu badan yang mementingkan soal-soal umum. (*Antara*, 30/8/1949)

* Konferensi Pemuda Bandung yang diadakan di Bandung antara 25 Agustus–26 Agustus y.l. oleh Panitia Penghubung Organisasi Pemuda Indonesia dan dihadiri oleh 9 organisasi pemuda, telah memutuskan untuk membentuk Badan Penghubung Organisasi Pemuda Indonesia sebagai badan kontak. Selanjutnya konferensi telah mengambil resolusi sbb.:
  1. Memperkuat desakan pembebasan para tawanan politik, terutama pemuda;

2. Mendesak agar Sang Merah Putih boleh dikibarkan di mana-mana;
3. Memperkuat tuntutan Kongres Alim Ulama 22 Agustus 1949 tentang pencabutan *staat van oorlog en beleg*. (*Antara*, 30/8/1949)

* Sehubungan dengan ulang tahun keempat Republik Indonesia, Panitia Penyokong Pengembalian Ibu Kota Republik Indonesia di Balikpapan telah mengirimkan sumbangan pertama sebesar *f*6.905,15 sebagai pernyataan bukti bakti patuh kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Selanjutnya panitia akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai angka sumbangan sebesar *f*100.000,-. (*Antara*, 31/8/1949)

* Mulai 1 Oktober 1949, Negara Indonesia Timur akan membentuk 3 komisariat (daerah), yaitu

1. Komisariat Utara yang meliputi Sulawesi Utara dan Maluku Utara dengan ibu kota Menado;
2. Komisariat Tengah yang meliputi Sulawesi Selatan dan Maluku Selatan dengan ibu kota Makassar; dan
3. Komisariat Selatan yang meliputi pulau-pulau Sunda Kecil dengan ibu kota Singaraja.

Dari kalangan yang mengetahui *Antara* mendapat kabar, bahwa sebagai Komisaris Negara untuk Komisariat Tengah besar kemungkinan akan diangkat M. A. Pelupessy yang sekarang menjadi Kepala Daerah Maluku Selatan, sedangkan sebagai Komisaris Negara untuk Komisariat Selatan akan diangkat Mr. Djelantik yang kini menjadi anggota delegasi BFO dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Komisaris Negara untuk Komisariat Utara belum ditentukan calonnya.

Dengan penunjukan Komisaris Negara ini, maka jabatan Residen ditiadakan. (*Antara*, 30/8/1949)

* Konsul Jenderal Australia Charles Eaton menerangkan bahwa 40 ton obat-obatan dari Australia, termasuk atebrin (pengganti kina) sedang diangkut ke Yogyakarta. Obat-obatan ini akan dibagi-bagikan dengan perantaraan Palang Merah Indonesia

Konsul Jenderal menerangkan, bahwa tidak lama lagi akan sampai di Jakarta sejumlah obat-obatan lain. (*Antara*, 31/8/1949)

1949 AGUSTUS 31.

* Hari ini dimulai pembicaraan resmi antara delegasi Republik dan BFO mengenai pemilihan Presiden pertama Republik Indonesia Serikat yang akan dibentuk. Pembicaraan mencakup juga masalah pembentukan kabinet pertama.

  Tugas pertama Presiden ialah memilih tiga orang, yang kemudian memilih dua orang lainnya. Kelima orang itu akan menjadi *kern-kabinet* (kabinet inti) yang selanjutnya diperluas sampai terbentuknya kabinet yang lengkap.

  Kabinet itu kemungkinan akan mencakup PM Hatta, Sultan Hamid II, PM NIT Anak Agung, Sultan Yogya, dan Sutan Sjahrir. Ada kemungkinan Hatta akan memegang jabatan Perdana Menteri.

  Terdapat tanda-tanda bahwa kedua delegasi telah sepakat untuk memilih Ir. Sukarno sebagai Presiden pertama RIS, dan pemilihannya akan segera dilakukan. (*Antara*, 31/8/1949)

* Komunike UNCI menyatakan bahwa untuk mempercepat pembebasan tawanan politik dan tawanan perang telah dibentuk Subkomite IV dengan susunan sbb.:

  Wakil-wakil UNCI:

W. B.Tritchett	Australia
J. R. L. van den Bloock	Belgia
E. A. Dow Jr.	Amerika Serikat

  Wakil-wakil Belanda:

Prof.W. L. G. Lemaire	(Sekretaris Jenderal Dep. Kehakiman) Ketua
Dr. E. Schokker	(Wakil Direktur Kabinet WTM) Wakil Ketua
Letkol J. Ph. H. E. van Lier	(Kepala Dep. Politik Kabinet Panglima Besar Tentara Belanda di Indonesia) Anggota
Dr. J. Akkerman	(Pembesar Dep. Sosial) Anggota
Dr. J. E. K. Bondam	Anggota

Wakil-wakil Indonesia:

Mr. Tirtawinata	Ketua
Mr. J. Latuharhary	Wakil Ketua
Mr. Teuku Moh. Hasan	Anggota
Dr. Abu Hanifah	Anggota
Mr. Satochid Kartanegara	Anggota
Harsono Tjokroaminoto	Anggota
Mr. Sartono	Penasihat
Supardo	Penasihat
Letkol Dr. Gunawan	Penasihat
Dan Pol. Memet Tanuwidjaja	Penasihat
Mr. Sudiman Kartohadiprodjo	Penasihat istimewa (Jakarta Jawa Barat)
Mr. Lukman Wiriadinata	Penasihat istimewa (Jakarta Jawa Barat)
Mr. Sujudi	Penasihat istimewa (Semarang Jawa Tengah)
Mr. Muchidin Affandi	Penasihat istimewa (Semarang Jawa Tengah)
Mr. Santoso Tohar	Penasihat istimewa (Surabaya Jawa Timur)
Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo	Penasihat istimewa (Surabaya Jawa Timur)
Mr. Moh. Jusuf	Penasihat istimewa (Medan Sumatra)
Tabrani	Sekretaris. (*Antara*, 31/8/1949)

* Di Jakarta belum terdengar reaksi resmi terhadap kabar *Aneta* dari New York yang mengatakan bahwa Amerika Serikat telah memberitahukan kepada pihak Belanda dan Indonesia tentang niatnya untuk memakai pangkalan marine Surabaya apabila ada perang.

Juru bicara resmi Pemerintah Belanda mengatakan, Pemerintah Belanda belum mendapat kabar apa pun tentang itu.

Kepala Bagian Pers delegasi Republik Indonesia, Gupito, menyatakan bahwa soal penggunaan pelabuhan Surabaya oleh Amerika Serikat itu tidak pernah disinggung dalam hubungan persoalan Indonesia-Belanda, baik selama perundingan Linggajati, Renville, maupun perundingan Rum-Van Roijen. Gupito pun tidak bisa memberikan keterangan tentang pendirian Republik mengenai hal ini.

Sutan Sjahrir pun mengatakan bahwa selama perundingan Linggajati, Renville maupun Rum-Van Roijen, masalah itu tidak pernah disebut-sebut. “Ini hal baru rupanya,” kata Sjahrir, karena ketika ia berada di Amerika Serikat dahulu, juga masalah ini tidak pernah dibisik-bisikkan padanya.

Pembesar-pembesar Amerika Serikat di Jakarta juga menolak memberikan komentar tentang ini. “Kita belum menerima sesuatu keterangan resmi di sini dari Washington,” kata juru bicara Pemerintah Amerika di sini.

Sementara itu kalangan peninjau politik Indonesia di Jakarta menyatakan bahwa soal ini memang mungkin diajukan oleh Amerika kepada kedua belah pihak. Tetapi soal ini tidak bisa diputuskan di Den Haag, karena soal demikian hanya bisa diputuskan dengan persetujuan parlemen. Kalangan itu menyatakan, jika diterima Amerika memakai Surabaya sebagai pangkalan marine, itu berarti dari sekarang Indonesia terang-terang telah memihak blok Amerika, padahal selama ini diketahui, bangsa Indonesia tidak hendak memihak pada sesuatu blok. Bersama bangsa-bangsa Asia yang lain, terutama bangsa-bangsa di Asia Tenggara, bangsa Indonesia ingin membentuk organisasi regional yang bekerja sama dengan negara-negara lain di dunia dalam memelihara perdamaian. (*Antara*, 30/8/1949)

* Kongres Wanita Indonesia yang berakhir hari ini mengambil resolusi sbb.:

1. Menuntut kemerdekaan penuh dalam lapangan politik dan ekonomi dengan tiada bersyarat tahun ini juga.
2. Memperkuat resolusi Kongres Pemuda Indonesia tentang penarikan tentara Belanda dari seluruh Indonesia dan harus selesai dalam waktu penyerahan kedaulatan.

3. Mengakui hanya satu bendera kebangsaan, yaitu Merah Putih dan satu lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya.
4. Menuntut pembebasan semua tawanan sebagai akibat perjuangan kemerdekaan.

Selanjutnya diputuskan bahwa kongres mendatang akan diadakan di Makassar. (*Antara*, 1/9/1949)

* Mengenai terhalangnya delegasi Republik ke Konferensi Ecafe di Bangkok diterangkan kini, bahwa hal yang menghalangi perjalanan itu telah diatasi. Juru bicara Pemerintah Belanda menerangkan bahwa masalahnya adalah paspor. Mereka tertahan karena Pemerintah Belanda di Jakarta telah mengetuk kawat ke Den Haag menanyakan, apakah delegasi Republik ke Ecafe bisa berangkat dengan paspor Republik. Dan ternyata dari Den Haag diperoleh balasan yang menyatakan tidak ada keberatan sama sekali. (*Antara*, 31/8/1949)

* Pemimpin pemerintahan militer TNI telah menemukan sejumlah uang Republik palsu beredar di beberapa tempat yang dikuasainya, yaitu uang kertas Rp25,00 (warna merah dan biru) dan uang kertas Rp100,00 (warna merah dan biru). Berhubung dengan hal itu pimpinan pemerintahan TNI mengeluarkan pengumuman berisi larangan menyimpan dan mengedarkan uang palsu tersebut.

Dijelaskan dalam pengumuman tersebut bahwa ORI tetap dianggap sebagai tanda pembayaran yang sah, asalkan nomornya cocok dan jelas. Dan nilainya tidak boleh dikurangi, misalnya uang kertas Rp100,00 dinilai sama dengan Rp70,00 uang receh. Terutama dilarang menimbun uang ORI receh di bawah nilai Rp50,00. (*Antara*, 2/9/1949)

* Gerakan Muslimin Indonesia akan menyelenggarakan kongres pertamanya antara 15–18 September 1949 mendatang.

Dikabarkan, selain dihadiri oleh cabang-cabang GMI, dalam kongres akan hadir juga wakil-wakil Masyumi dan organisasi-organisasi Islam lainnya di seluruh Indonesia. Dari Masyumi akan hadir a.l. M. Natsir, Dr. Abu Hanifah, Mr. Jusuf Wibisono, K.H.A. Wahid Hasjim, dan dari PSII diharapkan akan hadir Harsono Tjokroaminoto.

Pokok acara yang akan dibahas adalah “mencari kemungkinan adanya pemusatan perjuangan umat Islam seluruh Indonesia”. (*Antara*, 1/9/1949)

* Pada 1 September 1949 nanti di Bandung akan dibuka seteleng ilmu pengetahuan. Di dalamnya akan dipamerkan berbagai keterangan dan penerangan mengenai ilmu pengetahuan. (*Antara*, 31/8/1949)

* Dalam percakapan dengan *Antara* Ir. Ukar Bratakusuma menerangkan bahwa kedudukannya bukan sebagai Gubernur Militer, melainkan sebagai *fungerend* (pejabat) Gubernur Jawa Barat yang mencakup daerah Pasundan, distrik federal dan Banten.

  “Bagaimana wujud pemerintahan sipil kelak, tergantung pada konstituante,” katanya, “walaupun demikian saya tahu, bahwa ada golongan berhaluan politik yang menghendaki adanya negara-negara, a.l. Negara Pasundan yang masuk RIS, dan ada juga golongan yang berhaluan politik kesatuan Indonesia.

  Tentang kewajiban Local Joint Committee, Ir. Ukar yakin akan berhasil, asalkan kedua pihak bekerja atas dasar kenyataan, dan dengan cara yang praktis, tidak terlalu mengikatkan diri pada konsepsi-konsepsi yang kaku. Hasil perundingan-perundingan yang sudah dilakukan itu pun memuaskan.

  Mengenai gerakan-gerakan politik yang kini berlangsung di Pasundan, Ir. Ukar menyatakan belum dapat menyelami sedalam-dalamnya, karena baru beberapa hari ia berada di Bandung. (*Antara*, 1/9/1949)

* Konferensi Serikat Sekerja Pamong Praja Pasundan yang berlangsung antara 28–30 Agustus selesai hari ini. Konferensi itu dihadiri oleh peninjau-peninjau dari Republik Indonesia, Sumatra Timur, dan Jawa Timur. Konferensi telah mengambil lima keputusan:

  1. Berusaha mengadakan *studiefonds* (beasiswa);
  2. Mengadakan bank simpanan;
  3. SSPP masuk jadi anggota Pusat Sementara Organisasi Buruh Seluruh Indonesia;
  4. Berusaha melenyapkan dualisme dalam pemerintahan; dan

5. Mendesak supaya *rasdiscriminatie* (diskriminasi ras) dalam BBL terhadap pamong praja dihapuskan.

Konferensi pun menunjang sikap umum agar Sang Merah Putih boleh berkibar sekarang juga. (*Antara*, 1/9/1949)

* Dari Kementerian Kesehatan Pemerintah Pasundan diperoleh kabar bahwa wabah cacar di daerah itu telah menimpa k.l. 10.000 orang.

  Pada 10 Agustus y.l. tercatat 9.486 kasus, di antaranya di Bandung Kota 365, Priangan 3.117, Bogor 2.904, Cirebon 1.871, dan Krawang 1.229.

  Dari pihak TNI diperoleh kabar bahwa di daerah Ciamis Utara terdapat 1.500 penderita, di antaranya 30% dalam keadaan gawat. (*Antara*, 31/8/1949)

* Pada 2 September yad. untuk pertama kali di Bogor akan diadakan kembali pacuan kuda di lapangan pacuan Tanah Sereal yang selama ini digunakan sebagai tempat penimbunan mobil rongsokan. Diharapkan, untuk selanjutnya pacuan akan dapat diselenggarakan secara teratur. (*Antara*, 31/8/1949)

* Sidang lengkap Local Joint Board di Palembang yang diadakan kemarin tidak mengeluarkan sesuatu komunike. Didapat kabar bahwa pembicaraan masih berkisar sekitar laporan kedua belah pihak. Tentang daerah-daerah patroli belum tercapai sesuatu ketentuan.

  Perundingan mungkin akan dilanjutkan pada 1 September yad.

  Sementara itu dikabarkan bahwa Kol. Hasan Kasim yang sudah hampir dua bulan ditawan Belanda, kemarin (30/8) pagi telah dibebaskan, dan siangnya menemui Dr.A.K. Gani. (*Antara*, 31/8/1949)

* Mayor Bedjo bersama Letkol Kawilarang dan beberapa perwira TNI lainnya telah tiba di Medan hari ini dari Sibolga.

  Dalam percakapan dengan *Antara* Mayor Bedjo menyatakan bahwa beberapa waktu sebelum Aksi Militer II semua laskar telah dilebur dalam *stoottroep* (pasukan penggempur) Brigade B. Divisi X berada di bawah komando Mayor Bedjo.

Mengenai Barisan Harimau Liar Mayor Bedjo menyatakan bahwa barisan itu sudah tidak ada lagi. Dan ia menyangkal desas-desus seolah dirinya ada hubungan dengan kaum komunis Malaya. Ia katakan, bahwa selama bergerilya delapan bulan ini TNI mendapat bantuan penuh dari semua lapisan masyarakat. (*Antara*, 3/9/1949)

* Residen Aceh T. T. Mohd. Daudsjah menyatakan kepada harian *Nasional* di Yogyakarta bahwa sebelum berangkat ke Den Haag ia akan menghadap kepada Presiden Sukarno dan Menteri Pertahanan Hamengku Buwono IX.

Ia pun menerangkan, bahwa daerah Aceh masuk dalam daerah *Local Joint Committee* yang sudah dibentuk di Medan. Ia katakan, selama aksi militer kedua tentara Belanda tidak pernah melewati garis demarkasi Renville ke Aceh. Belanda hanya melakukan pemboman atas Kotaraja, Lhokseumawe dan beberapa tempat lain.

TNI di bawah pimpinan Gubernur Militer Tgk. Mohd. Daud Beureueh tetap patuh kepada petunjuk penghentian permusuhan.

Mengenai bahan makanan dikatakannya, rakyat Aceh yang 1.300.000 jiwa dalam hal ini tidak mengalami kesukaran. Komisi Bahan Makanan Internasional (International Food Commission) PBB telah menawarkan beras kepada Aceh, tetapi tawaran itu ditolak karena harganya lebih mahal dari harga di Aceh sendiri.

Mengenai kepartaian disebutkannya, partai-partai di Aceh berpedoman pada kebijakan Pemerintah di Yogyakarta. Dan mengenai situasi politik sekarang, rakyat Aceh menyerahkannya kepada kebijakan Pemerintah Pusat. (TS215)

* Komisi Rechtspositie Ambonezen mengirim kawat kepada Perdana Menteri Negara Indonesia Timur (NIT) Anak Agung Gde Agung yang sedang berada di Den Haag, berisi pernyataan tidak setuju atas dipisahkannya Irian dan Maluku Selatan dari Republik Indonesia Serikat (RIS). (...)

* Berhubung dengan lahirnya Partai Maluku Raya di Ambon baru-baru ini, PB Partai Rakyat Maluku Jakarta telah mengirim kawat ucapan selamat atas berdirinya partai tersebut selaku pejuang hak demokrasi rakyat

Maluku, termasuk Pulau Irian, menuju negara federasi Indonesia merdeka dan berdaulat.

Rakyat daerah Maluku berada dalam persatuan organisasi dengan golongan-golongan Indonesia Timur khususnya dan rakyat Indonesia umumnya berdasarkan pada kesadaran kebangsaan Indonesia, demikian kawat tersebut. (*Antara*, 31/8/1949)

***

(Akhir Agustus 1949)

SEPTEMBER 1949

1949 SEPTEMBER...

* Belanda mulai berangsur-angsur menarik pasukannya dari wilayah Surakarta. (*PEH92*)

* Para gerilyawan yang menjadi tawanan Belanda mulai dibebaskan. (*PEH92*)

* Pasukan TP (Tentara Pelajar) mulai memasuki Kota Solo dan menempati beberapa asrama/markas. (*PEH92*)

* George McTurner Kahin menulis dalam majalah Pacific Affairs:

  "Besar kemungkinan penyerahan kedaulatan oleh mahkota Belanda kepada Republik Indonesia Serikat sekalipun kelihatannya suatu hal hebat, dipandang dari segi hukum tidak akan membawa perubahan radikal dari pola dasar hubungan kekuasaan yang terdapat di Indonesia."

* Ini berarti bahwa tatanan ekonomi Indonesia masih akan tetap merupakan tatanan ekonomi kolonial. (ABA19)

1949 September (awal).

* Pemerintah Belanda mulai menarik tentaranya dari Indonesia dan memulangkannya ke negeri asalnya, dimulai dengan pasukan milisinya, yaitu Divisi 7 Desember. (SDA109)

1949 September 1.

* Wakil Konsul Inggris, A. M. Goodden telah menyampaikan harapannya kepada pihak Republik agar perintah penghentian tembak-menembak dilaksanakan sebaik-baiknya, dan agar KMB berhasil baik dalam waktu singkat, hingga Indonesia akan berdaulat penuh di samping negara-negara merdeka lainnya.

Bersama Wakil Konsul USA, Davies dan Cabac, Goodden telah menghadap Presiden Sukarno. Mereka membicarakan soal-soal ekonomi, dan dalam kesempatan itu mereka telah mengunjungi perusahaan batik terbesar di Yogyakarta milik Haji Bilal.

Hari ini juga ketiga wakil konsul kembali ke Jakarta. (*Antara,* 2/9/1949)

* Permusyawaratan Wanita Seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta antara 26 Agustus–1 September 1949 dan dihadiri oleh utusan 82 organisasi wanita seluruh Indonesia mengambil keputusan-keputusan sbb.:

1. Mengakui dasar-dasar pergerakan-pergerakan wanita Indonesia.
2. Memperjuangkan dan mewujudkan kemerdekaan penuh bagi seluruh Indonesia.
3. Menuntut supaya dalam konstitusi RIS dicantumkan:
   a. Persamaan kedudukan bagi semua warga negara;
   b. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi tiap-tiap warga negara.
4. Menuntut adanya peraturan UU Bekerja di RIS yang melindungi para pekerja umumnya dan pekerja-pekerja wanita khususnya.
5. Menuntut adanya peraturan yang melindungi hukum perkawinan yang sah menurut keagamaan masing-masing.

Keputusan-keputusan tersebut disampaikan kepada delegasi Republik Indonesia dan BFO untuk diperjuangkan dalam KMB. (*Antara,* 2/9/1949)

* Di istana Presiden di Yogyakarta, diadakan resepsi perpisahan dengan 82 wakil organisasi-organisasi wanita yang sejak 26/8 telah berkongres di Yogyakarta.

  Dalam kesempatan tersebut Presiden Sukarno berpesan kepada para utusan kongres untuk menggerakkan wanita dan rakyat di daerah mereka masing-masing agar menuntut penyerahan kedaulatan seluruh Indonesia sebelum tahun 1950; dalam memilih badan-badan perwakilan dan konstituante nanti, supaya rakyat memilih orang-orang yang cakap dan tepat; dan, dalam menyelenggarakan Pancasila, janganlah kelima sila itu dipisah-pisahkan. Perjuangan Republik bukan untuk rakyat di Jawa dan Sumatra saja, melainkan untuk seluruh Indonesia, sebab itu pandanglah Republik sebagai modal perjuangan kemerdekaan seluruh bangsa.

  Wakil dari NIT, Ny. Salawati, merasa bahwa pergaulan antara Presiden Sukarno dengan rakyat sama dengan antara bapak dengan anak. Rakyat di luar Republik merindukan pergaulan sedemikian dengan pemimpin besarnya.

  Kepada para peserta kongres, Presiden menghadiahkan bendera Merah Putih, buku seperti *Sarinah* dan *Tiga kali 17 Agustus*, dan gambar keluarga Presiden. Sebaliknya Ny. Presiden mendapat banyak bingkisan, a.l. dari Ny. Lim Sek Han di Banjarmasin.

  Kongres Wanita ini telah juga mengambil keputusan untuk memprotes keras perbuatan kejam anggota tentara Belanda yang bertentangan dengan perikemanusiaan. Kongres menuntut hukuman yang setimpal bagi mereka yang telah melakukan keganasan.

  Keputusan itu diambil sehubungan dengan terjadinya rentetan peristiwa pembunuhan 40.000 orang di Sulawesi Selatan, pembunuhan pegawai-pegawai PMI di Solo, Peristiwa Gunung Simping yaitu peristiwa pembantaian perempuan dan anak-anak di Pasar Kembang Solo, serta pembunuhan di sebuah pesta perkawinan di Cilacap.

  Wakil NIT menyampaikan kepada *Antara*, bahwa Pemerintah NIT telah mendapat desakan parlemen dan pihak luar untuk menyelidiki pembunuhan 40.000 orang di Sulawesi Selatan itu, tapi sampai kini belum ada hasilnya. (*Antara*, 3/9/1949)

* “Kita harus mendidik generasi baru dewasa ini menjadi manusia yang hidup, yang berani bertanggungjawab dan berdiri di atas kaki sendiri,

tidak sebagai pendidikan penjajahan yang membawa anak-anak kita ke arah penghambaan dalam lingkungan segi empat kantor saja," demikian Dr. A. K. Gani dalam pertemuan ramah tamah dengan para pemuda IPPI yang diadakan malam ini di Palembang.

Selanjutnya Dr. A. K. Gani menerangkan:

Kedudukan negara kita di tengah daerah pengaruh Anglo-Saxon ini akan memungkinkan sistem pendidikan kita mengarah pada sistem Anglo-Saxon. Keinginan rakyat kita untuk mempelajari bahasa Inggris misalnya, dan penyebaran lektur mereka di tanah air kita, mau tidak mau akan membawa kita ke dalam daerah pengaruh mereka. Tegasnya, infiltrasi kebudayaan Anglo-Saxon di Indonesia ini akan berhasil baik. Apakah semua ini akan mendatangkan kebaikan bagi kemajuan bangsa kita, hal itu tergantung pada penerimaan kita. Sistem pendidikan Anglo-Saxon yang demokratis, yang memberikan banyak kesempatan kepada anak-anak untuk berdiri sendiri, akan kita jadikan pengganti sistem pendidikan Belanda/Jerman yang bersifat otokratis, yang sampai kini masih berlaku.

* Perutusan Republik Indonesia ke Konferensi ECAFE (Economic Commission for Asia and the Far East) bertolak ke Bangkok. (*KU126*)

* Sekretaris Panitia Tawanan Politik dan Perang Republik, M. Tabrani, yang kini berada di Jakarta, menerangkan kepada *Antara* bahwa kalau disetujui oleh Panitia Tawanan Politik dan Perang Belanda, Jumat mendatang kedua belah pihak akan mengadakan pertemuan tak resmi pertama.

Dengan demikian, kabar-kabar yang menyatakan bahwa antara pihak Belanda dan Republik sudah ada persetujuan mengenai tawanan politik dan perang adalah tidak benar. Bagaimana mungkin ada sesuatu persetujuan, kalau kedua panitia belum pernah mengadakan pertemuan?
Sebelum bertemu dengan Panitia Tawanan Politik dan Perang Belanda, lebih dulu hari ini Panitia Republik akan berapat, a.l. untuk membicarakan masalah korespondensi yang telah dilakukan oleh panitia dengan daerah-daerah dan masalah fasilitas yang mestinya diberikan kepada mereka untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh panitia, yaitu mengumpulkan bahan dan memberikan laporan mengenai tawanan politik dan perang.

Fasilitas itu akan diperjuangkan oleh Panitia Republik, karena sampai kini perhatian pihak Belanda terhadap tawanan itu belum tampak. Kalaupun ada, perhatian tersebut baru di tingkat atas, sedangkan di tingkat bawah boleh dikata tidak ada. Berapa jumlah tawanan politik dan perang pun belum bisa disebutkan.

Kesukaran yang dihadapi sekarang, menurut Tabrani, adalah dalam menetapkan batas antara tawanan politik dan tawanan kriminal, juga dalam menetapkan batas antara kewajiban Panitia Tawanan Politik dan Perang, dan kewajiban masyarakat. (*Antara*, 1/9/1949)

* Kalangan Republik di Den Haag menganggap bahwa kabar tentang Amerika Serikat menghendaki pangkalan Surabaya itu hanya sebagai *proefballon* (balon percobaan). Dikatakan, bahwa kemungkinan Amerika menggunakan pangkalan Surabaya memang ada. Kalau benar demikian, RIS yang tak punya angkatan laut diduga tak akan dapat menolaknya. Tapi kalau Amerika memang menghendakinya, hal itu harus diatur dalam *verdrag* (perjanjian) tersendiri antara RIS dan USA.

Kalangan Republik itu berpendapat, mustahil Belanda akan tetap menduduki pangkalan Surabaya. Belanda tak mampu memberi perlindungan kepada bangsa Indonesia. Hal itu terbukti waktu Jepang menyerbu Indonesia, dan selama berlangsungnya Perang Pasifik. Masalah itu telah ditegaskan dalam Manifes Politik Republik pada 1 November 1945, demikian kalangan tersebut. (*Antara*, 1 September 1949)

* Jaksa Pengadilan Belanda di Jakarta memintakan hukuman denda *f*300 atau hukuman penjara 2 bulan bagi terdakwa Suhardjo dalam perkara *persdelict* (delik pers) mingguan *Pekerdja* hari ini. Putusan akan dijatuhkan pada 15 September mendatang.

Seperti diketahui, karena tulisannya dalam majalah *Pekerdja* No. 98 berjudul “Perang Saudara?” di Juni yang lalu Suhardjo telah dituduh menghasut. Dalam tulisan tersebut ia a.l. memuji gerilya yang akan meneruskan pertempuran meski ada *cease fire*, sebagai orang-orang yang konsekuen antiimperialis.

Pembela Mr. Sudiman menyatakan dalam pembelaannya, bahwa menurut pendapatnya terdakwa tidak bersalah, tetapi jika hakim berpendapat lain, hendaknya kepada terdakwa dijatuhkan hukuman *voorwaardelijk*

(percobaan) saja. Juga diminta oleh pembela, agar perkara tersebut disesuaikan dengan keadaan sekarang, yaitu keadaan penghentian permusuhan setelah lahirnya Rum-Van Roijen Statement.

Suhardjo dalam pembelaannya menyatakan a.l. bahwa dengan tulisan itu bukan maksudnya untuk menghasut atau menanam bibit kebencian pada bangsa Belanda sebagaimana dituduhkan. Menurut Suhardjo, maksud perjuangan kaum buruh atau pekerja bukan untuk memusuhi sesuatu bangsa; yang dilawan adalah paham, isme, dalam hal ini imperialisme dan kapitalisme. (*Antara*, 2/9/1949)

* Dari sumber pertama diperoleh kabar bahwa Lembaga Indonesia-Tionghoa bermaksud mendirikan cabang di Jakarta, dan usaha ke arah itu kini sudah dimulai.

  Sebagaimana diketahui, Lembaga Indonesia-Tionghoa didirikan awal 1940, dan bertujuan mempererat tali persaudaraan antara bangsa Indonesia dan Tionghoa. Lembaga ini bergerak a.l. di bidang kebudayaan. Sebelum Agresi Militer Belanda, jumlah anggotanya l.k. 200 orang, tersebar di seluruh Republik.

  Dapat dikabarkan bahwa keraguan untuk menjadi warga negara Indonesia yang semula ada di kalangan Tionghoa di daerah Republik, kini setelah berlangsungnya Konferensi Inter-Indonesia boleh dikata sudah lenyap. (*Antara*, 1/9/1949)

* Anggota delegasi Republik di Indonesia, Moh. Natsir, yang tadi malam kembali dari Bandung untuk melakukan pembicaraan dengan *Local Joint Board*, menerangkan kepada *Antara*, bahwa *cease fire* di Jawa Barat "*all quite well*".

  Ditanya, apakah benar kunjungannya itu pun untuk mencari hubungan dengan DI (Darul Islam) seperti disiarkan oleh beberapa surat kabar, ia menjawab: "Apakah mungkin dalam waktu 2 malam itu saya mengadakan hubungan dengan DI yang berpusat bukan di Bandung?" (*Antara*, 1/9/1949)

* Berkenaan dengan akan diselenggarakannya pemilihan umum di Sumatra Timur, ketua Front Nasional Sumatra Timur Elias St. Pangeran menerangkan kepada *Antara* bahwa Front Nasional akan ikut dalam pemilihan, asalkan pemilihan tersebut dilakukan secara demokratis.

Dikatakannya bahwa dalam konferensi kedua Front Nasional yang akan diadakan pada 10 dan 11 September di Medan, soal pemilihan ini akan menjadi pokok pembicaraan juga.

Berhubung dengan jernihnya suasana, Front Nasional meminta agar semua ranting dan cabangnya di Sumatra Timur bekerja kembali dengan segiat-giatnya untuk meneruskan perjuangan. Sementara itu pelarangan terhadap pegawai pemerintah untuk menjadi anggota Front tersebut telah ditarik kembali oleh Negara Sumatra Timur.

Rancangan pemilihan telah disiapkan oleh sebuah panitia yang ditunjuk Dewan Perwakilan Sementara NST. Untuk Kota Medan pemilihan dilakukan secara langsung, sedangkan di luar Medan secara bertingkat. Pemilih adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau lebih.

Rancangan ini akan dimajukan kepada Dewan Perwakilan Sementara NST untuk disetujui, kemudian akan dikemukakan kepada wali negara untuk disahkan. Pemilihan akan dilangsungkan seusai KMB, diperkirakan sesudah 1949 (menurut rancangan semula: sebelum 1950). (*Antara*, 1/9/1949)

* Di Lhoknga, Aceh Besar, dibuka Sekolah Penerbangan yang diprakarsai oleh Kapten Udara Muljono, Opsir Udara R. Sadjad dll., diikuti oleh 14 calon Kadet Penerbang.

Lulus dari pendidikan ini mereka akan melanjutkan pendidikan di Sekolah Penerbangan Kalijati, Jawa Barat. (TS218)

* Menteri Agama Kyai Haji Masjkur dan rombongan melakukan peninjauan ke Aceh Barat untuk memberikan penerangan tentang situasi terakhir tanah air sampai berlangsungnya Konferensi Meja Bundar.

Dikatakannya, walaupun perundingan kemungkinan berhasil, segenap lapisan masyarakat harus selalu waspada dan siap sedia. (TS218-219)

* Di Kotaraja (sekarang Banda Aceh) berlangsung upacara pembukaan kursus pertama Corps Polisi Militer dengan peserta dari seluruh Aceh, Langkat, dan Tanah Karo. Upacara dihadiri oleh Wakil Perdana Menteri Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Gubernur Militer Tgk. Mohd. Daud Beureueh, pejabat teras pemerintahan sipil dan militer, serta para undangan.

* Dalam pidatonya, Komandan CPM Sumatra Mayor Widya menjelaskan maksud diadakannya kursus tersebut. Dikatakannya:

  "Para opsir kita harus dilatih lagi, dengan maksud menambah pengetahuan, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban sehari-hari dengan sempurna. CPM adalah alat negara yang bertanggungjawab terhadap keselamatan negara dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu anggota CPM perlu diberikan latihan secukupnya."

  Dalam sambutannya, Wakil Perdana Menteri menerangkan, bahwa jawatan kepolisian, baik dari kalangan sipil maupun militer, adalah pendidik masyarakat ke arah keamanan dan ketentraman umum, bukan seperti polisi di jaman kolonial yang sengaja diadakan untuk menindas rakyat.

  Lebih lanjut:

  "Kita dan rakyat sekarang haruslah menjaga ketertiban, sehingga dalam masyarakat tidak ada lagi kekacauan yang dapat menimbulkan kekeruhan. Polisi kita hendaklah cukup mengerti akan kewajibannya masing-masing dan mengerti pula hukum-hukum negara, sehingga ia dapat menjalankan tugas pekerjaan dengan sempurna." (TS219)

* Dikabarkan bahwa hampir semua pangreh praja Banjarmasin, Martapura dan Pelaihari telah hilang, hingga roda pemerintahan tidak berjalan lancar.
  Dikabarkan selanjutnya, pada 30/8 hampir semua pegawai pejabat pemerintah di Banjarmasin tidak masuk kerja, hingga semua kantor tutup, kecuali kantor pos dan rumah sakit. Penyebab semua itu adalah ancaman terakhir yang konon datang dari kaum gerilya. Kegelisahan para pegawai tidak berkurang, walau Residen Kalimantan Selatan sudah mengingatkan, bahwa pegawai yang tak masuk kerja tidak akan dibayar gajinya. (*Antara*, 1/9/1949)

* Ketua Central Joint Board, Mr. Wongsonegoro, menerangkan tentang kepergian Jenderal Mayor Suhardjo ke Kalimantan Selatan yang bukan daerah Republik, bahwa memang ada dua tafsiran mengenai soal itu: Menurut pihak Republik, persetujuan *cease fire* meliputi seluruh Indonesia, sedangkan menurut pihak Belanda hanya meliputi daerah Republik.

Tafsiran Belanda ini dapat disangkal, karena dalam Central Joint Board duduk wakil-wakil BFO, dan menurut persetujuan, *cease fire* harus berlaku di Kalimantan 14 hari sesudah wakil Republik bertolak dari Jakarta. (*Antara*, 1/9/1949)

* Di Keresidenan Banyumas *cease fire* umumnya berjalan baik. Berita-berita menunjukkan bahwa di beberapa tempat telah dimulai kontak antara kedua belah pihak.

  Letnan Santosa dan Letnan Kardiman dari Pasukan Dulang Mas telah bertemu dengan komandan tentara Belanda setempat. Pertemuan a.l. memutuskan:

  1. Untuk memudahkan hubungan selanjutnya antara kedua belah pihak, TNI perlu membuka markas penghubung tetap di luar kota, yang akan dilengkapi dengan telepon.
  2. Anggota-anggota TNI diperbolehkan masuk kota sebagai orang preman, tanpa senjata, dengan membawa surat keterangan dari komandan atasannya. (*Antara*, 2/9/1949)

* Dewan Perwakilan Sumatra Selatan hari ini menolak resolusi Lampung dan Bengkulu yang menghendaki dimasukkan ke daerah Negara Sumatra Selatan, dengan alasan resolusi tersebut tidak sah.

  Mosi yang diajukan oleh 12 anggota tentang pemberian bantuan kepada TNI diterima dengan suara bulat.

  Mengenai pengibaran bendera Merah Putih di Palembang, sampai sekarang belum diputuskan, tetapi diduga akan mendapat suara terbanyak dalam pemungutan suara mendatang. (*Antara*, 4/9/1949)

* Kongres EVC (*Eenheidsvakcentrale*, atau Gabungan Serikat Buruh Persatuan) dibuka tadi malam bertempat di Apollohall, Amsterdam. Dalam kata pembukaannya Ketua EVC Berend Blokzijl a.l. menuntut penghentian segera pengiriman tentara Belanda ke Indonesia, demobilisasi Divisi 7 Desember disusul penarikannya dari Indonesia, pembebasan dengan segera tahanan politik, dan *herstel vakverenigingsrechten* (pemulihan hak-hak serikat sekerja) SOBSI di Republik.

  Blokzijl mengatakan bahwa perang di Indonesia menelan ongkos berjuta-juta sehari, yang harus dipikul rakyat Belanda. Ia menganjurkan supaya rakyat

Belanda menolak dengan tegas pengiriman anak-anaknya ke Indonesia untuk memerangi rakyat Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaannya.

Selanjutnya Blokzijl mengingatkan kaum buruh supaya jangan sampai tertipu dengan Linggajati, Renville dan Rum-Van Roijen Statement, sebab persetujuan-persetujuan itu hanya menghendaki penjajahan dalam bentuk baru. Blokzijl mencela keras sikap NVV yang menyetujui aksi militer kedua di Indonesia dan mengutus Vermeulen anggota PB NVV ke Amerika untuk membela politik Belanda.

Akhirnya Blokzijl memprotes ditolaknya utusan-utusan buruh dari Rusia, Polandia, Cekoslowakia dan Jerman oleh Pemerintah Belanda untuk datang di Nederland guna menghadiri kongres tersebut.

Perlu dicatat, bahwa sebelum kongres dimulai, pemuda buruh Belanda dan Indonesia ber-*defile* membawa poster menentang perang, menuntut penarikan tentara Belanda dari Indonesia, perbaikan perumahan dsb.

Pada hari kedua hari ini diadakan pemandangan umum terhadap pidato pembukaan Blokzijl. Wakil buruh pabrik Amsterdam, Molleman, menegaskan, bahwa tuntutan penarikan tentara tidak cukup dengan resolusi, tapi harus ditunjang dengan tindakan tegas.

Wakil buruh dok dan perkapalan, Helmers, menyatakan bahwa buruh Belanda merasa bersatu dengan segala bangsa yang cinta damai dan berjuang demi kemerdekaan.

Tuntutan penghentian segera pengiriman tentara ke Indonesia, demobilisasi Divisi 7 Desember dan penarikannya dari Indonesia agaknya akan menjadi resolusi kongres. Gerakan luas akan diadakan di seluruh Negeri Belanda untuk menunjang resolusi tersebut. (*Antara*, 2/9/1949)

* Dalam sidang komite istimewa PBB mengenai daerah-daerah koloni hari ini, wakil Rusia mengajukan lagi soal status Indonesia sebagai daerah yang merdeka. Wakil Rusia, A. Soldatov, mengusulkan agar komite jangan dulu memikirkan soal yang termasuk dalam dokumen, sebelum membicarakan soal Republik Indonesia berdasar kenyataan bahwa Indonesia sudah menjadi merdeka dengan kehendak penduduknya sendiri. (*Antara*, 1/9/1949)

1949 SEPTEMBER 2.

* Di samping mempersoalkan kesukaran-kesukaran yang kini dialami Republik karena buruknya persediaan makanan, kalangan politik di Yogyakarta kini sibuk juga membicarakan cara-cara menyusun kembali

KNIP menghadapi persetujuan KMB yang harus diratifikasi oleh Parlemen.

Mengenai hal ini ada empat pendapat:

1. Supaya diadakan pemilihan umum terbatas guna mengubah KNIP.
2. Supaya ditambah saja dengan wakil-wakil golongan dan partai yang belum mempunyai wakil.
3. Supaya perwakilan partai yang sudah ada ditinjau kembali dan ditambah dengan partai yang belum mempunyainya.
4. Supaya diubah sama sekali dan susunan diserahkan kepada komisi 13 organisasi.

Seperti diketahui, jumlah anggota KNIP adalah 516 orang, tersebar di seluruh Indonesia. (*Antara*, 3/9/1949)

* Kalangan Republik di Scheveningen menyatakan kekecewannya mendengar reaksi delegasi Belanda yang seolah-olah kecewa dengan hasil *Cease Fire*. Menurut ketentuan *Cease Fire,* kedua pihak sepakat tak akan mengeluarkan pengumuman apapun tanpa sepengetahuan *Central Joint Board*. Dan sampai sekarang CJB belum mengeluarkan pengumuman apa pun, hingga boleh dianggap segala pemberitaan dari pihak Belanda itu sama sekali tidak berdasar. Kabar demikian hanya mengeruhkan suasana di kalangan KMB sekarang.

Kalau dipelajari dengan teliti kabar tersebut, jelas tidak ada hal nyata yang telah dikemukakan. Tempat-tempat yang disebutkan di dalamnya pun tempat-tempat yang sudah disebut dalam nota *voorbarig* oleh Menteri Van Maarseveen dalam *Tweede Kamer* (Majelis Rendah) pertengahan bulan yang lalu. Kalangan Republik mendapat kesan bahwa pihak Belanda tidak punya pandangan baru tentang soal ini, sebaliknya hanya terus berpegangan pada isi nota yang sudah ditiadakan oleh peristiwa-peristiwa lain.

Perasaan kurang senang dan kesal dinyatakan juga oleh kalangan Republik di Scheveningen ketika mereka menjadi tamu *Gemeente* (Kotapraja) Amsterdam pada 31/8. Sebabnya, pertama-tama adalah pidato Burgemeester (Walikota) Amsterdam pada upacara penyambutan di gedung Gemeente.

Berkenaan dengan KMB ia katakan, mudah-mudahan hasil KMB akan memberikan kepastian bahwa karena perubahan tata negara yang baru,

akan tercipta kerja sama yang harmonis dan bermanfaat. Dikatakan, kerjasama itu adalah di antara bagian-bagian sederajat Kerajaan Belanda.

Sambutan yang kurang enak itu disusul dengan peristiwa yang lebih tidak sedap, yaitu ketika tamu-tamu Republik termasuk Hatta dan opsir-opsir tinggi Republik dalam jamuan makan tiba-tiba diharuskan ikut berdiri untuk mendengarkan lagu *Wilhelmus* dinyanyikan oleh tuan rumah yang kemudian mengajak mereka pula mengangkat sulang untuk Ratu Belanda.

Pihak Belanda mengatakan bahwa *Burgemeester* Amsterdam itu tidak punya arti di kalangan politik, dan tidak punya pengertian pula dalam politik. Ia hanya *amtenar*, demikian pihak Belanda. Tapi sumber yang dapat dipercaya menyatakan bahwa *Burgemeester* itu adalah anggota Partij van de Arbeid dan *ex directeur* Nederlandsche Handelsbank.

Sebagian anggota delegasi Republik menghendaki agar delegasi Republik resmi berusaha agar kejadian demikian tidak sampai terulang. (*Antara*, 2/9/1949)

* Untuk menjamin pelaksanaan perintah penghentian tembak-menembak yang untuk Sumatra berlaku mulai 14–15 Agustus yang lalu, pimpinan TNI Sub. Terr. Lampung di bawah Letkol S. Gaharu pada 4 Agustus telah memerintahkan kepada TNI dan pasukan bersenjata di Territorium Lampung agar menghentikan "semua gerakan gerilya dan tembak-menembak, sabot dll. perbuatan permusuhan". Diperintahkan juga agar mereka tetap tinggal di tempatnya.

Dikabarkan, telah diperoleh hubungan dengan semua pasukan gerilya yang terpencar di beberapa daerah pendudukan Lampung di sekitar Tanjung Karang, Teluk Betung, Pringsewu, Metro, Sukadana dll. Sebagai penghubung TNI di Tanjung Karang telah datang dari pedalaman Kapten Nurdin, Kapten Sukardi, dan para pembantunya.

Sementara itu dikabarkan, pimpinan Pemerintah Sipil Republik di Lampung masih tetap dipegang oleh Mr. G. Harun selaku Residen Darurat. Kedudukan pemerintahan berada di salah satu tempat di Kabupaten Lampung Utara, di mana pada 17 Agustus yang lalu telah diadakan peringatan Hari Kemerdekaan. (*Antara*, 2/9/1949)

* Konferensi Sarekat Buruh Kereta Api Palembang yang sudah berlangsung beberapa hari, berakhir hari ini Pengurus baru telah terpilih, dengan ketua A. L. Tobing.

  Sementara itu konferensi telah mengambil dua keputusan sbb.:

  1. Menggabungkan diri dengan SBKA di Jawa.
  2. Memperkeras tuntutan perbaikan sosial bagi kaum buruh daerah Palembang. (*Antara*, 2/9/1949)

* Jenderal Mayor Suhardjo selaku wakil Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) tiba beserta rombongan di lapangan terbang Ulin, Banjarmasin, untuk meninjau keadaan. Waktu itu kekuasaan Belanda masih berdiri, tapi rakyat dengan pasukan gerilya yang dipimpin oleh Hasan Basri (bermarkas di Pegunungan Munggu) hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia (RI). (*LU t.h.*)

* Jenderal Mayor Suhardjo datang menemui Letkol Hasan Basri di Banjarmasin dan kemudian mengakuinya sebagai Gubernur Militer dengan pangkat Letnan Kolonel. (*LU[1949]*)

* Robert Wolter Monginsidi yang dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Belanda dan sekarang berada dalam penjara di Makassar, telah mengirim kawat kepada ayahnya, yang bunyinya:

  "petrus monginsidi malalajang km menado ttk

  grasi ditolak km surat menyusul

  w monginsidi ttk hbs" (*KU126; LUxxi; Antara*, 5/9/1949)

* Kesatuan tentara Belanda beranggotakan 1.500 prajurit bertolak dari Amsterdam ke Indonesia dengan kapal *De Grote Beer*. Sementara itu di pelabuhan banyak terdapat plakat yang menentang pengiriman tentara tersebut.

  Dari sumber yang dapat dipercaya diperoleh kabar, bahwa sampai sekarang di antara 500 orang yang menghindarkan diri dari dinas militer ke Indonesia telah dihukum setinggi-tingginya empat tahun. Pengiriman tentara Belanda ke Indonesia semakin tidak disukai rakyat Belanda, pertama karena cemas kalau-kalau anaknya mati, dan kedua karena mereka

telah sadar bahwa rakyat Indonesia benar-benar berjuang untuk kemerdekaannya.

Sebelum dikirim ke Indonesia, pemuda-pemuda Belanda itu diberi perlop untuk berpamitan dengan sanak saudara. Menurut taksiran, 10% dari jumlah yang dikirim itu telah *onderduiken* (menyembunyikan diri) hingga tidak berangkat. (*KU126; Antara*, 5/9/1949)

* Bupati Aceh Timur Tengku Maimun Habsjah dengan didampingi Bupati Langkat O.K. Salamuddin, menjelaskan kepada wartawan di Kutaraja bahwa untuk pelaksanaan penghentian permusuhan dan gencatan senjata (*cease fire*), baru-baru ini telah berangkat delegasi dari Aceh ke Sumatra Timur.

  Dalam rangka penghentian permusuhan dan gencatan senjata telah dibentuk Central Joint Board dengan keanggotaan wakil-wakil Republik, BFO dan Belanda, diketuai oleh wakil dari UNCI. Untuk Sumatra Utara telah dibentuk Local Joint Committee.

  Dalam kesempatan itu telah dibicarakan juga masalah pembukaan hubungan antara Aceh dengan Sumatra Timur. Persetujuan telah tercapai untuk membuka kembali hubungan antara Pangkalan Berandan dengan Tanjungpura, guna melancarkan perekonomian rakyat.

  Maimun pun menyatakan bahwa warga negara Indonesia di Medan menaruh perhatian besar terhadap delegasi dari Aceh. (TS219-220)

* Perubahan suasana sesudah perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus di Makassar dan di daerah pedalaman Sulawesi Selatan kini mengakibatkan kegiatan di lapangan politik. Di mana-mana rapat umum yang tadinya dilarang kini diadakan. Dari tempat-tempat di pedalaman diterima permintaan untuk membentuk cabang partai politik yang berpusat di Makassar.

  Kegiatan ini ada kaitannya dengan pemilihan anggota Parlemen NIT di Oktober mendatang. Untuk seluruh Sulawesi Selatan akan diselenggarakan *getrapte verkiezing* (pemilihan bertingkat). Di ke-23 distrik di Sulawesi Selatan telah ditetapkan *kiesmannen* (para pemilih)-nya.

  Diharapkan akan terpilih kaum nasionalis progresif sebagai anggota Parlemen. (*Antara*, 2/9/1949)

* Masalah tahanan, hukuman, dan buangan politik yang ada di NIT kini mendapat banyak perhatian dari masyarakat di NIT. Anggota Parlemen Rondonuwu telah mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah tentang itu. Juga Gapki (Gabungan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia) telah mengambil resolusi yang mendesak kepada Pemerintah agar tahanan, hukuman, dan buangan politik segera dibebaskan dan dikembalikan ke tempat masing-masing.

  Juga surat-surat kabar dan majalah-majalah telah berulang kali mempermasalahkan hal tersebut. (*Antara*, 2/9/1949)

1949 SEPTEMBER 3.

* Jam 15.00: Jenderal Mayor Suhardjo tiba di Jakarta dari Banjarmasin, setelah tinggal di kota itu seminggu lamanya.

  Kepada *Antara* ia menerangkan bahwa sambutan rakyat di Banjarmasin dan tempat-tempat lain meluap. Waktu Indonesia Raya dinyanyikan di Banjarmasin, banyak di antara rakyat yang mengucurkan air mata, sedangkan pekik "Merdeka" berkumandang di angkasa.

  Di Kandangan, rakyat tak dapat melakukan penyambutan serentak karena faktor keamanan. Di Barabai yang jaraknya 45 km dari Kandangan, rakyat berjalan kaki untuk bertemu dengan Jenderal Mayor Suhardjo. Maksud itu pun tak dapat dilaksanakan, dan hanya tiga orang wakil mereka dapat diterima. Untuk membesarkan hati mereka, Jenderal Mayor Suhardjo mendatangi mereka ke perbatasan kota.

  Pada 1 September, Jenderal Mayor Suhardjo dan pengiring disertai Wakil Residen Kalimantan Selatan, Wakil Komandan Territorial dan enam orang anggota panitia penghubung yang terdiri dari anggota-anggota Dewan Dayak Besar dan Dewan Banjar, berangkat ke Kandangan. Undangan yang disampaikan dengan pesawat Belanda rupanya sampai ke tangan Hasan Basri, hingga pada 2 September jam 10.00 berlangsung pertemuan antara Jenderal Mayor Suhardjo cs. dengan Hasan Basri cs. di Munguraya (daerah Kandangan). Dalam kesempatan itu Jenderal Mayor Suhardjo memberikan perintah sbb.:

  1. Atas nama Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia dengan ini saya mengakui dengan resmi Tuan Hasan Basri sebagai Letkol, sebagai Komandan ALRI Divisi IV.

2. Atas nama Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia, Letkol Hasan Basri diperintahkan menghentikan permusuhan sesuai dengan pidato Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia yang diucapkan pada 3/8/1949.

* Kepada Letkol Hasan Basri diberikan juga tanggung jawab untuk menghentikan permusuhan dari pihak organisasi-organisasi atau golongan-golongan bersenjata yang ada di Kalimantan Selatan. Juga diperintahkan kepadanya menunjuk wakilnya untuk melakukan kontak a.l. dengan *locale autoriteiten* (pejabat-pejabat setempat) dalam rangka pelaksanaan penghentian permusuhan.

  Selanjutnya diperintahkan kepada Letkol Hasan Basri untuk melaksanakan perintah penghentian permusuhan selambat-lambatnya dalam tempo 14 hari terhitung mulai pada 2/9/1949.

  Letkol Hasan Basri menyatakan menerima dan sanggup melaksanakan perintah penghentian permusuhan itu. Sebagai wakilnya, Letkol Hasan Basri menunjuk Mayor P. Arya selaku ketua, dengan anggota-anggota yang akan ditunjuk kemudian.

  Letkol Hasan Basri (26) adalah putra Kandangan asli, berpendidikan HIS Banjarmasin, kemudian masuk pesantren di dekat Ponorogo. (...)

* Pengurus Besar Partai Rakyat Maluku dalam surat kepada Delegasi Republik Indonesia di Den Haag menyatakan sbb.:

  "Berhubung dengan resolusi dari Partai Rakyat Maluku tentang Irian, berdasar atas putusan Konferensi Inter-Indonesia, bahwa Nieuw-Guinea adalah bahagian mutlak dari Indonesia Serikat, dan berhubung juga dengan pidato PYM Presiden Sukarno tertanggal 17 Agustus '49 tentang Nieuw-Guinea tetap tinggal menjadi bahagian dari RIS, maka Partai Rakyat Maluku, untuk menghindarkan perpecahan dalam bangsa Indonesia umumnya dan rakyat Maluku khususnya, memohon sangat, upaya Delegasi Republik Indonesia mempertahankan Nieuw-Guinea pada Konferensi Meja Bundar sebagai bahagian dari RIS, atas kehendak rakyat Irian di Irian yang sebahagian dari pemimpin-pemimpinnya masih dalam penjara."

* Surat termaksud di atas telah dikirimkan juga kepada delegasi BFO pada KMB. Dalam surat tersebut ditambahkan bahwa Partai Rakyat Maluku memprotes aksi golongan-golongan yang menuntut Nieuw-Guinea sebagai "*stamland* (tanah kekuasaan) -nya, serta tidak menyetujui pemecahan persoalan Nieuw-Guinea oleh PTB. (*Antara*, 3/9/1949)

* Dikabarkan bahwa Ny. Lovink telah menjadi penyumbang Rumah Piatu Muslimin di Jalan Kramat, Jakarta. Sumbangan Ny. Lovink mulai bulan ini adalah *f*25 sebulan. (*Antara*, 3/9/1949)

* Dari kalangan yang mengetahui *Antara* mendapat kabar bahwa Pemerintah Belanda tak lama lagi akan mengeluarkan ijin untuk mengibarkan bendera Merah Putih di daerah-daerah di luar daerah federal Jakarta, kecuali untuk sementara daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

  Dikabarkan, bahwa ijin pengibaran ini dapat juga diberikan oleh pembesar-pembesar daerah, sesuai keadaan setempat.

  Peninjau Republik di Jakarta menyatakan kurang puas dengan keputusan ini karena sifatnya yang setengah-setengah. (*Antara*, 3/9/1949)

* Dalam keputusan pada hari penutup kongresnya hari ini di Amsterdam, EVC (*Eenheidsvakcentrale*, atau Gabungan Serikat Buruh Persatuan) menyatakan solidaritasnya dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama dengan SOBSI. Kongres berjanji akan berjuang bersama dengan lebih hebat dari waktu yang sudah-sudah, untuk kemerdekaan Indonesia yang penuh.

  Juga dinyatakan lagi protes keras terhadap penindasan dan pencengkeraman secara militer oleh *groot kapitaal* Belanda atas rakyat Indonesia. (*Antara*, 5/9/1949)

1949 SEPTEMBER 4.

* Menteri Luar Negeri Republik, Haji Agus Salim, menerangkan kepada *Reuters* bahwa politik putih Australia hanya sedikit pengaruhnya bagi bangsa Indonesia, karena Republik Indonesia Serikat yang berdaulat nanti akan mempunyai tanah pertanian yang luas dan sanggup menerima orang Asia dari negeri tetangganya, yang sedianya ingin ke Australia.

Bangsa Asia, kata Salim, lebih gampang berumah di Indonesia daripada di Australia, meskipun politik putih Australia itu tidak ada. Tidak diharapkan Australia menafsirkan politik eksklusif ini dengan keras, dan memandang politik ini dengan obyektif. "Meskipun bagaimana, bangsa Indonesia di Amerika dan Australia tidak mau bekerja dengan bayaran kurang sepeser pun dari upah yang telah ditetapkan oleh serikat-serikat sekerja bagi orang putih," demikian Salim.

Tentang penghapusan boikot perkapalan ke Indonesia oleh serikat buruh Australia, itu adalah soal bangsa Australia sendiri. Wakil dagang Indonesia di Canberra, Dr. Usman, sedang berunding dengan Pemerintah Australia tentang soal ini.

Tentang berita tak resmi mengenai niat Amerika Serikat menduduki Surabaya sebagai pangkalan armada setelah Belanda bertolak dari Indonesia, Salim menganggap kabar itu "Tidak sopan dan diperhitungkan untuk mempengaruhi konferensi yang sedang berlangsung di Den Haag". Menurut Salim, Republik tidak mempertimbangkan soal itu sedikit pun. "Sugesti itu hanya berpihak pada beberapa orang dan beberapa negara besar yang mengharapkan gagalnya konferensi di Den Haag itu."

Menteri Salim mengatakan juga bahwa pemerintah republik sudah mendirikan sebuah badan untuk memeriksa kaum komunis yang ditangkap sehubungan dengan pemberontakan di Madiun, dan akan memeriksa semua perkara mereka. Oleh karena itu, amnesti untuk kaum komunis akan ditiadakan.

Tentang kabar-kabar bahwa opsir-opsir tentara Inggris, Australia dan India akan diminta menjadi instruktur tentara Indonesia, Salim menyatakan bahwa ini tidak pernah diperbincangkan oleh Pemerintah Republik.

"Kita tidak percaya kepada orang yang mengatakan bahwa tentaralah yang berkuasa di Republik. Republik sendiri yang memegang tampuknya, dan ini akan tetap demikian. Kita memikirkan perdamaian lebih daripada memikirkan tentara. Kita mau agar prajurit-prajurit muda kita kembali ke sekolah dan kepada penghidupan damai (demikian Salim)." (*Antara*, 5/9/1949)

* Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Mr. Susanto Tirtoprodjo, mengatakan hari ini bahwa meskipun golongan-golongan yang ikut serta

dalam pemberontakan komunis di September tahun lalu belum mendapat amnesti umum, mereka tidak akan dituntut atau disekap, asalkan "mereka tidak melakukan kekacauan". "Ini hanya untuk sementara waktu," kata Menteri. Dikatakan selanjutnya oleh Menteri, "Bahkan bantuan mereka perlu untuk menghadapi bahaya dari luar", tetapi ia tidak menjelaskan, apa yang dimaksudkannya. (*Antara*, 5/9/1949)

* Ketua Delegasi Republik Indonesia, Mr. Susanto Tirtoprodjo, menerangkan kepada *Antara* bahwa jalan perundingan di Jakarta lancar, hingga kemungkinan terjadinya bentrokan tidak besar.

Mengenai persediaan makanan dikatakannya, bahwa untuk September Belanda sudah menyanggupi untuk mengadakan, terutama uang dan barang-barang keperluan Republik seperti *radiozender* (alat pemancar radio) dll. Untuk kelancaran perundingannya dengan Belanda, Ir. Laoh akan tetap tinggal di Jakarta.

Tentang KMB, Mr. Susanto menyatakan, ia *persoonlijk* (pribadi) merasa optimistis. (*Antara*, 5/9/1949)

* Hari ini Konsul Jenderal Perancis mengunjungi Negara Pasundan untuk mengadakan pertemuan dengan para pembesar Kementrian Sosial Pasundan pekan depan.

Diperkirakan Konsul Jenderal akan membicarakan masalah pengiriman kuli kontrak ke New Caledonia, walau Parlemen Pasundan telah menolak *wervingsordonnantie* (Ordonansi Pengerahan). (*Antara*, 4/9/1949)

* Kalangan Pemerintah Pasundan menerangkan kepada *Antara* bahwa akan diusahakan sekuat-kuatnya agar pada 1 Januari 1950 di Pasundan sudah tidak ada lagi kamp tawanan perang dan politik.

Waktu ini di seluruh Pasundan terdapat 1.700 orang tawanan, a.l. di Kebonwaru Bandung 1.100 orang. Tawanan yang berasal dari Purwakarta dan Sukabumi menurut kabar akan diperiksa oleh pengadilan militer.

Menurut rencana Pemerintah Pasundan, dalam September ini akan dikeluarkan 200 orang, Oktober 400 orang, dan November sisanya. (*Antara*, 4/9/1949)

* Kemarin malam kira-kira jam 01.30 *onderneming* (perkebunan) Wanasuka (Pangalengan) telah diserbu gerombolan luar yang bukan TNI.

  Pihak militer Belanda bersama polisi *onderneming* melakukan perlawanan. Peristiwa tembak menembak ini tidak menimbulkan korban. (*Antara*, 5/9/1949)

* Pada 13, 14 dan 15 Oktober mendatang di Bandung akan dilangsungkan Konferensi Pendidikan Nasional, demikian berita yang diterima *Antara* dari panitia konferensi tersebut.

  Di antara undangan terdapat nama Mr. Takdir Alisyahbana, S.K. Trimurti, Ki Hadjar Dewantara, Katopo, Dr. Abu Hanifah, Crijns dll. Mr. Takdir Alisyahbana dan Katopo sudah menyanggupi untuk memberikan prasaran. Dikabarkan bahwa Sutan Syahrir pun akan diundang.

  Maksud konferensi ialah untuk meninjau bentuk dan jiwa pendidikan nasional dari berbagai sudut, seperti dari sudut agama, nasionalisme, sosialisme dsb. (*Antara*, 5/9/1949)

* Partai Sosialis Indonesia (PSI) Dewan Daerah Aceh memilih pengurus baru dengan Ketua Umum A. Gani Adam dan Ketua I Muhammad Z. Z. (TS220)

* Rapat gabungan pimpinan Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) Daerah Aceh dengan pengurus-pengurus IPPI cabang di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) memilih Pimpinan Pusat IPPI Daerah Aceh yang baru dengan Ketua Umum M. Jahja Zamzami dan Ketua I Ismuwil. (TS221)

* Berhubung dengan penolakan grasi Robert Wolter Monginsidi, maka Gapki dkk. telah mengirim kawat kepada Ratu Belanda, UNCI di Den Haag, dan beberapa instansi di Jakarta sbb.:

  "Gabungan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia yang melingkungi 18 partai-partai politik, Badan Pimpinan Pemuda Indonesia sebagai gabungan dari 11 organisasi pemuda, Gabungan 5 organisasi wanita, yang semuanya berkedudukan di Makasar, memperhatikan penolakan HVK terhadap gratie Wolter Monginsidi, seorang pelopor perjuangan kemerdekaan Indonesia Sulawesi Selatan yang mendapat hukuman mati."

Gabungan-gabungan perjuangan itu merasa bahwa penolakan tersebut tidak sesuai dengan Rum-Van Roijen Statement, dan mengeruhkan suasana politik Nederland-Indonesia.

Mengingat pentingnya keberhasilan dalam perundingan Nederland-Indonesia, a.l. dalam kaitan masalah tahanan dan hukuman politik, gabungan-gabungan perjuangan mendesak pembatalan hukuman mati Wolter Monginsidi. (*Antara*, 5/9/1949)

1949 SEPTEMBER 5.

* Ketua Panitia Tawanan Politik, Mr. Tirtawinata, menerangkan kepada *Antara* bahwa kini baru dilakukan perundingan informal dengan panitia pihak Belanda. Kegiatan yang dilakukannya adalah mengumpulkan fakta-fakta.

  Tentang kriteria dikatakannya, pihak Republik berpegang pada prinsip bahwa semua orang Indonesia yang ditangkap Belanda karena Perjuangan Kemerdekaan, harus dibebaskan. Dalam hal ini harus dibebaskan tidak hanya tawanan politik di daerah Republik, tapi juga yang berada di luarnya. Belum dapat disebutkan, berapa jumlah tawanan politik yang ada pada pihak Belanda.

  Sementara itu Mr. Tirtawinata menerangkan bahwa Panitia Tawanan Politik Belanda pun memiliki kriteria sendiri. (*Antara*, 5/9/1949)

* Presiden Sukarno mengirim kawat kepada Ketua Delegasi Republik Mr. Susanto Tirtoprodjo. Isi kawat:

  "Gedung Republik di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, harus dianggap sebagai gedung pusaka, karena di sana dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945." (*KU126-127*)

* Anggota Panitia Militer Republik untuk Konferensi Meja Bundar (KMB), Letnan Kolonel Daan Jahja, terbang ke Yogyakarta untuk menyampaikan laporan pertama kepada Pemerintah Republik tentang jalannya KMB. (*KU127*)

* Menteri Daerah Seberang Lautan Belanda, Mr. J. H. Van Maarseveen, yang memimpin delegasi Belanda dalam Konferensi Meja Bundar menerangkan dalam suatu konferensi pers,

“Kita kini telah terlepas dari tingkat penentuan prosedur dan sampai pada masalah-masalah materiil daripada konferensi. Kita baru sampai pada permulaan konferensi dan telah mempergunakan waktu selama ini untuk saling mengemukakan pendapat masing-masing. Tiada satu pun dari kita mempunyai penglihatan bila konferensi ini akan berakhir.”

Ketika ditanya bagaimana sikap delegasi Belanda terhadap pelaksanaan perintah penghentian tembak-menembak di Indonesia, Menteri Maarseveen menyatakan, “Kemajuan pasti ada, meskipun penglaksanaan seluruhnya belum tercapai”.

Menjawab pertanyaan lain, Maarseveen berkata, bahwa mereka belum berhasil menentukan tanggal mulainya penarikan pasukan-pasukan Belanda dari Indonesia. “Tidak ada pasukan-pasukan lagi yang berangkat ke Indonesia kecuali untuk menggantikan mereka yang kembali, karena kita tidak menambah atau mengurangi kekuatan angkatan perang Belanda yang sekarang,” demikian Maarseveen.

Ketika ditanya tentang pangkalan laut Surabaya dan laporan-laporan yang menyatakan bahwa Amerika “sangat memperhatikan pangkalan tersebut di hari-hari yang akan datang”, van Maarseveen berkata bahwa ia dengan resmi tidak mengetahui apa-apa tentang soal tersebut.

Menjawab pertanyaan mengenai Uni Indonesia-Belanda, ia menyatakan ada persamaan pendapat di kalangan anggota-anggota delegasi Belanda mengenai soal ini. Ia berkata bahwa ia tidak boleh mengatakan sesuatu tentang rencana yang sedang diusulkan. (*Antara*, 6/9/1949)

* Senin pagi: Belanda melaksanakan hukuman mati atas Robert Wolter Monginsidi, pemimpin gerakan kemerdekaan Sulawesi Selatan (Desember 1946), di Makassar.

Sebelum menjalani hukuman mati Monginsidi menulis kepada teman-temannya:

“Dengan bantuan Tuhan aku akan menjalani hukuman mati ini. Aku tidak mempunyai rasa dendam pada siapapun, juga tidak pada mereka yang menjatuhkan hukuman ini. Tetapi aku yakin segala pengorbanan, air mata dan darah pemuda-pemuda kita, akan menjadi pondamen yang kuat untuk tanah air Indonesia, yang kita cintai ini.”

Hari itu juga ia menulis: “Setia hingga terakhir di dalam keyakinan.” (*KU126*; *LU t.h.*; *TI239*; *Antara*, 6/9/1949)

* Kalangan yang biasanya mengetahui, menerangkan pada *Antara* bahwa telah dilakukan pembicaraan orientasi tidak resmi antara pihak Republik dan Belanda mengenai penarikan mundur pasukan Belanda dari beberapa daerah di Jawa Tengah. Tempat yang disebut namanya adalah Solo dan Banyumas.

  Namun kalangan itu tidak tahu, apakah ini permulaan dari sebuah rencana yang tetap bagi penarikan tentara Belanda dari semua daerah Republik, seperti ditetapkan dalam Persetujuan Renville.

  Sementara itu kalangan yang dekat dengan delegasi Republik Indonesia menyatakan bahwa jika maksud menarik mundur tentara Belanda dari Solo dan Banyumas itu benar, itu akan banyak sekali gunanya bagi suasana dan saling percaya antara kedua belah pihak. Itu pasti akan ikut melancarkan jalannya perundingan dalam KMB di Den Haag, asalkan penarikan itu tidak bersifat lokal dan insidentil, tapi merupakan bagian dari rencana pengembalian daerah Republik. (*Antara*, 6/9/1949)

* Dewan Pusat Pesindo mengumumkan bahwa keputusan konferensinya akhir Agustus yang lalu ialah mengalihkan titik usaha dari bidang politik ke bidang pemuda khusus, hingga susunan corak organisasi harus disesuaikan dengan susunan corak organisasi massa pemuda, artinya nonpartai. (*Antara*, 5/9/1949)

* Pembantu *Antara* mengabarkan dari Semarang bahwa tidak lama lagi di Semarang akan terbit surat kabar Tionghoa *Mata Hari*. Surat kabar ini adalah lanjutan surat kabar yang pernah dimatikan ketika Jepang menduduki Indonesia. (*Antara*, 5/9/1949)

* Kemungkinan besar pabrik-pabrik rokok kretek di Pemalang, Kudus dan Semarang akan menghentikan produksinya minggu ini. Hal ini disebabkan oleh dinaikkannya cukai tembakau sampai 60%, dibatasinya harga rokok sebatang seperempat sen, dan tidak terkendalinya harga cengkeh yang terus naik (harga di Jakarta hari ini per 100 kg *f*1.250).

Di seluruh Jawa Tengah terdapat 200 pabrik rokok kretek, dengan 70.000 pekerja. Pusat Perserikatan Perusahaan Rokok Jawa Tengah akan mengirim utusan ke Jakarta untuk mengusulkan agar diadakan banderol, harga cengkeh dikendalikan oleh yang berwajib, dan dibentuk sebuah komisi penelitian. (*Antara*, 6/9/1949)

* Konsul Jenderal Perancis, Salade, melakukan pembicaraan dengan Menteri Sosial ad interim Negara Pasundan tentang pengiriman pekerja ke New Caledonia. Ia menyatakan kekhawatirannya bahwa apabila tidak ada penggantian 5.000 orang pekerja, kegiatan perusahaan-perusahaan perkebunan Perancis di New Caledonia akan terhambat.

  Menteri Sosial Negara Pasundan menyatakan kepada *Antara* bahwa sejak *doorgangshuis* (wisma persinggahan) dari *Wervingsorganisatie* (organisasi pengerah tenaga kerja) di Cirebon ditutup oleh yang berwajib, tidak ada lagi penandatanganan kontrak untuk bekerja di New Caledonia.

  Konsulat Jenderal Perancis menyatakan kesanggupannya untuk membiayai kedatangan peninjau-peninjau ke tanah jajahannya itu untuk menyaksikan keadaan buruh di sana. (*Antara*, 6/9/1949)

* Perundingan peletakan senjata untuk seluruh daerah Kuningan telah dilakukan baru-baru ini antara pihak TNI dan militer Belanda secara informal, dan berjalan lancar mulai dari soal penetapan daerah patroli sampai pada soal penjagaan keamanan rakyat. Perundingan formal diduga akan dilakukan dalam waktu dekat, demikian keterangan yang diperoleh *Antara* dari seorang Kapten anggota staf Mayor Rukman.

  Tentang soal DI dinyatakan bahwa pihak TNI berkeberatan pihak Belanda ikut campur, karena TNI sendiri akan sanggup menyelesaikannya. (*Antara*, 5/9/1949)

* Baru-baru ini telah dibentuk di Medan badan penyambutan pemimpin-pemimpin Indonesia yang datang berkunjung ke Medan.

* Akhir-akhir ini para pemimpin Indonesia banyak datang atau singgah di Medan, namun penyambutan mereka hanya dilakukan oleh beberapa orang. Atas inisiatif PB Front Nasional Sumatra Timur telah dibentuk

Badan Penyambutan, di mana duduk wakil-wakil perkumpulan berbagai corak, yaitu: Elias St. Pangeran (Front Nasional), Tengku Ismail (Taman Persahabatan), Sugondo (Taman Siswa), Hatuk Hafiz Haberham (Parnest), Ny. Fatimah Basuki (Persatuan Wanita Indonesia), Suwoto (Pandu Rakyat), dan Madong Lubis (Pencinta Bangsa). (*Antara*, 5/9/1949)

1949 SEPTEMBER 6.

* Dari Yogyakarta dikabarkan bahwa keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung yang tadinya berjumlah 20 orang, kini tinggal 15 orang. Tiga orang minta berhenti, yaitu Anwaruddin, Enoch dan Latumeten, dua orang meninggal dunia, yaitu Letjen Urip dan Surjo.

  Dalam pertemuan pers dengan ketua dan wakil ketua DPA, Sutardjo dan K.H. Dewantara, diterangkan, bahwa tugas DPA adalah sebagai penasihat Presiden. Menurut Sutardjo, pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh DPA sebagian besar dapat dipakai oleh Pemerintah dalam menghadapi kesulitan-kesulitan. (*Antara*, 6/9/1949)

* Dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh yang berasal dari Kalimantan kemarin di Medan, Mr. Tadjuddin Noor mengatakan bahwa sesudah Konferensi Inter-Indonesia perjuangan bukan lagi semata-mata untuk daerah Kalimantan-NIT dan Republik, tapi untuk mencapai kemerdekaan seluruh Indonesia. Selain kemerdekaan juga harus dipikirkan kemakmuran, supaya kita bisa hidup selekasnya sebagai negara merdeka di lapangan politik dan ekonomi. Rakyat Kalimantan-NIT tidak puas dengan partai-partai yang bersifat lokal.

  Dengan adanya perkembangan belakangan ini, perjuangan kita harus melingkungi segala segi kehidupan rakyat, demikian Tadjuddin Noor. (*Antara*, 7/9/1949)

* Pemerintah Pasundan tidak lama lagi akan membentuk sebuah badan yang bertugas memeriksa keadaan penghidupan dan kesehatan kaum pekerja yang bekerja di luar daerah Pasundan, terutama di Sumatra dan Borneo.

  Langkah ini diambil karena adanya berita bahwa para pekerja itu tidak mendapat cukup perhatian dari majikannya, dan banyak persyaratan kontrak yang tidak dipenuhi.

Selain itu akan diperiksa juga keadaan penghidupan kaum pekerja di perkebunan-perkebunan, terutama *loonstandaard* (standar upah)-nya. Dikabarkan, banyak pekerja yang sehari hanya menerima upah rata-rata 35 sen, jauh lebih rendah dari kebutuhan pekerja sehari-hari. (*Antara*, 6/9/1949)

* Seorang utusan panitia pusat Kongres Muslimin Seluruh Indonesia telah berhubungan dengan panitia penyelenggara kongres tersebut di Kota Bandung dan telah mencapai kata sepakat tentang prosedur dan waktu kongres, yakni pertengahan November yad.

  Mengenai kabar-kabar yang tersiar bahwa kongres tersebut diusahakan oleh Negara Pasundan, dibantah oleh Ketua Panitia Penyelenggara Isa Anshary yang menyatakan, bahwa kongres itu diusahakan oleh kaum Muslimin dan bertempat di Bandung. (*Antara*, 6/9/1949)

* Pejabat Gubernur Jawa Barat. Ir. Ukar Bratakusumah melakukan perjalanan ke daerah Ciamis. Di beberapa tempat ia turun dari kendaraannya khusus untuk mendengarkan kesan rakyat tentang pelaksanaan penghentian permusuhan.

  Menurutnya, keamanan tampak maju; rakyat sendiri menyatakan bahwa kini patroli tentara Belanda tidak lagi terlalu keras.

  Mengenai DI, Ukar menerangkan bahwa keadaannya tidak lebih kuat dari ketika TNI masuk kembali ke daerah Jawa Barat. Apa yang dinamakan DI sekarang ini, demikian Ukar, adalah gerombolan liar bersenjata. Menjawab pertanyaan, apakah betul DI memusuhi TNI, Ukar menyatakan bahwa harus hati-hati dengan tiap anggapan, karena mesti diselidiki lebih dulu sejelas-jelasnya. (*Antara*, 8/9/1949)

* Di Ciluwer belum lama berselang dibentuk yang diketuai oleh Ibnu Hasjim. Sampai sekarang telah tergabung l.k. 16 pandai besi. Setelah organisasi berjalan lancar, perhimpunan tersebut akan melebarkan sayapnya ke tempat-tempat lain. (*Antara*, 8/9/1949)

* Di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Sumatra Utara berlangsung acara perpisahan dengan Menteri Agama Kyai Haji Masjkur yang akan kembali

ke Yogyakarta. Acara dihadiri a.l. oleh Wakil Perdana Menteri Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Wakil Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatra Utara Tuanku Mahmud, Gubernur Militer Tgk. Muhd. Daud Beureueh, para anggota Badan Pekerja Dewan Perwakilan Sumatra Utara, alim ulama, opsir TNI, kepala jawatan dan kantor serta pemimpin masyarakat.

* Dalam pidatonya Wakil Perdana Menteri menyatakan bahwa tugas yang diserahkan Pemerintah kepadanya sangat berat.

"Justru karena itulah saya mengharapkan bantuan yang penuh dari orang-orang yang paham seluk-beluk agama dan masyarakat. [...] Kepergian Menteri Agama dari tengah-tengah kita, terutama akan dirasakan oleh saya sendiri. Tetapi mudah-mudahan kedatangan beliau kemari dalam waktu yang singkat telah meninggalkan benih yang baik bagi kita di sini."

* Dalam sambutannya Menteri Agama menyatakan puas berada di Aceh, dan kesan-kesan yang diperolehnya sangat baik. Suasana akrab antara pamong praja dan Angkatan Perang serta rakyat sangat memuaskan. Ia pun gembira dengan semangat rakyat di daerah ini.

Akhirnya dikatakannya, bahwa kedatangannya ke Aceh sangat memberikan faedah untuk kelancaran tugas-tugas saya kelak dalam pemerintahan pusat. Ia berharap dapat datang lagi ke daerah ini. (TS221-222)

* Perpiindo menyelenggarakan pertemuan dengan anggota rombongan Wakil Perdana Menteri, Haji Abubakar Atjeh dan Haji Benjamin, bertempat di gedung Sekolah Menengah Islam Kutaraja.

Dalam ceramahnya Haji Abubakar a.l. menyatakan:

"Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 benar-benar berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini bukan omong kosong lagi. Untuk meninjau kebenarannya mari kita melihat sesudah Perang Dunia Pertama, kala Inggris berperang dengan Jerman. Berapa banyaknya perempuan yang kehilangan suami, darah membanjir. Itu semuanya disebabkan karena keadilan itu di tangan manusia.

Riwayat Volkenbond yang menyerukan keamanan, tidak juga berhasil.

Lihat pula sejarah Jepang yang katanya memegang keadilan. Tetapi apa yang telah terjadi atas dirinya. Ini keadilan yang dipegang manusia.

Tetapi keadilan yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan mengalami hal-hal seperti itu."

* Sebagai penutup Haji Abubakar menganjurkan kepada para pemuda Islam agar semangat 17 Agustus 1945 dipelihara dengan sebaik-baiknya. (TS222)

* Ketua delegasi Belanda van Maarseveen menerangkan dalam sebuah konferensi pers bahwa tentara Belanda baru akan ditarik dari Indonesia setelah tercapai persetujuan KMB. Belum ada kepastian, kapan tentara Belanda akan mulai ditarik mundur. Sementara ini mereka masih harus berada di Indonesia.

  Maarseveen menerangkan juga bahwa bentuk Uni akan sesuai dengan Linggajati dan Renville. Dalam Linggajati dan Renville, Belanda menghendaki terbentuknya *Unie-hof*, *Unie-ministers* dan *Interparlementaire Commissie* dalam hubungan *Unie*. (*Antara*, 7/9/1949)

1949 SEPTEMBER 7.

* Petang ini oleh sebuah perusahaan kopiah di Surabaya telah disampaikan sebuah bingkisan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Penerangan Ruslan Abdulgani, dengan permintaan supaya bingkisan itu dipersembahkan kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

  Bingkisan itu berisi 10 kopiah berbagai ukuran, dibuat dari bahan-bahan istimewa, a.l. beledu kualitas terkenal dari Jerman. (*Antara*, 9/9/1949)

* Wartawan *Antara* di Den Haag menulis bahwa mengenai Uni Nederland-Indonesia pendirian Republik sampai sekarang belum berubah. Republik memegang teguh pendiriannya sejalan dengan Persetujuan Linggajati dan Renville, dan tidak dapat menerima susunan *Unie Ministers*, *Unie-hof* dan *inter-perlementaire commissie*, karena jika demikian Uni ini menyerupai suatu *superstaat* (negara adikuasa). Republik menghendaki supaya segala soal ini diserahkan kepada praktek nanti, dan supaya Uni jangan sampai terlampau banyak mengurangi kedaulatan kedua pihak.

* Ketua delegasi Republik di Indonesia, Mr. Susanto Tirtoprodjo, menerangkan kepada *Antara* bahwa sampai sekarang Pemerintah atau delegasi Republik belum menerima laporan resmi dari Den Haag. Kesukaran dalam pembicaraan mengenai keuangan, ekonomi dan militer di KMB memang sudah dibayangkan sebelum KMB dimulai, tapi ia berpendapat bahwa itu tidak perlu mengakibatkan gagalnya KMB Hanya mungkin jalan perundingan tidak lancar, hingga tidak dapat selesai pada waktu yang direncanakan.

  Ia menyatakan bahwa Hatta tidak akan dipanggil untuk memberikan laporan, sebab Pemerintah percaya penuh pada delegasi yang dipimpin Hatta. (*Antara*, 8/9/1949)

* Atas usaha Badan Kongres Pendidikan Indonesia telah dibentuk Panitia Konferensi Pengajaran Inter Indonesia yang diketuai oleh Ki Hadjar Dewantara dan penulis Brodjonagoro. Menurut rencana, konferensi itu akan dilangsungkan pertengahan Oktober 1949 di Yogyakarta. Yang akan diundang ialah badan-badan perguruan di dalam dan di luar Republik, guna membicarakan dan memutuskan *uniformiteit* (penyeragaman) bentuk sekolah dan mata pelajaran di sekolah-sekolah umum di seluruh Indonesia.

  Untuk itu akan dipergunakan bahan hasil komisi penyelidik pengajaran 1948 di bawah pimpinan Ki Hadjar Dewantara dan rencana undang-undang perguruan Republik yang waktu itu terhenti pembahasannya di Badan Pekerja.

  Selanjutnya masalah penting yang akan dibicarakan dalam konferensi adalah mengenai bahasa pengantar dan kedudukan bahasa daerah dan asing. Mungkin akan dibicarakan juga bentuk dan mata pelajaran sekolah vak. Hasil konferensi akan diajukan sebagai inisiatif partikelir kepada pemerintah sebagai bahan untuk menentukan politik pengajaran.

  Seperti diketahui, Badan Kongres Pendidikan Indonesia didirikan pada April 1947 di Solo, diketuai oleh Mr. Sunarjo Kolopaking, dengan Wakil Ketua Ki Hadjar Dewantara, dengan tujuan mempertinggi nilai pendidikan di sekolah dan masyarakat. (*Antara*, 7/9/1949)

* Balai Bahasa yang dibentuk oleh Kementerian Pengajaran dan Pendidikan

dan diketuai oleh Dr. Prijono dengan maksud memajukan bahasa-bahasa Indonesia kini ditambah susunannya dengan bagian sidang pengarang dan penerjemah.

Seperti diketahui, Balai Bahasa terbagi atas seksi bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda dan bahasa Madura. Sampai kini Balai Bahasa belum mengeluarkan hasil. (*Antara*, 7/9/1949)

* Dalam waktu singkat sekali akan dibuka di Jakarta Akademi untuk jabatan luar negeri. Akademi akan dipimpin oleh A. J. Schuurman. Pendidikan yang dilangsungkan di Universiteit Indonesia itu berlangsung tiga tahun, dan akan dipercayakan kepada para ahli.

Untuk sementara, akademi masih akan bernaung di bawah Departemen Pendidikan, Kesenian dan Pengetahuan yang menyediakan sumbangan *f*200,00 tiap bulan untuk tiap siswa yang tidak mampu atau kurang mampu. Akan diterima 25 orang siswa berijazah sekolah menengah (HBS, ANMS atau SMA).

* Keterangan lebih lanjut dapat diberikan oleh Departemen Pendidikan, Kesenian dan Pengetahuan. Pendaftaran dibuka sampai tanggal 20 September mendatang. (*Antara*, 7/9/1949)

* Atas usaha Kol. Dr. Mustopo, Bung Tomo, Sudradjat dari Perjuangan Jawa Barat, dan Suhantoro, kini di Yogyakarta telah didirikan Badan Pembela dan Penolong Korban dan Tenaga Perjuangan. Badan ini bertujuan: Memelihara dan memupuk juga potensial (*sic.*) perjuangan rakyat dan negara sesuai dengan tujuan proklamasi 17 Agustus 1945, dengan usaha-usaha sbb.:

- Memberikan petunjuk dan pembelaan yang diperlukan;
- Membantu lancarnya dan beresnya usaha jawatan-jawatan dan badan-badan serta usaha-usaha sosial dan ekonomi yang sudah ada;
- Mendirikan koperasi-koperasi dagang, produksi dan distribusi;
- Mengadakan tempat-tempat pendidikan dan pengobatan.

Sehubungan dengan usaha-usaha ini, dalam waktu dekat Pengurus Badan tersebut akan menghadap Presiden Sukarno. (*Antara*, 8/9/1949)

* Ikatan Central Organisasi Sekerja yang diketuai oleh Residen Surakarta Sudiro yang selama ini berada di Yogyakarta memutuskan:

  Perjuangan ICOS ke luar dan ke dalam berasas Pancasila dan berdasar kenasionalan. Mendesak Pemerintah supaya selekas mungkin memberikan pertolongan kepada kaum buruh Republik yang berada diluar daerah Yogyakarta dan sangat menderita karena pasal tujuh Rum-Van Roijen Statement.

  Perlu dicatat bahwa ICOS mencakup serikat-serikat sekerja Kementerian Dalam Negeri, Penerangan, dan Perburuhan Sosial. Sementara itu sedang dilakukan pembicaraan tentang kaitannya dengan Himpunan Ikatan Serikat-serikat Buruh Indonesia. Yang diketuai oleh Affandi. (*Antara*, 8/9/1949)

* Berita terlambat dari Garut menyatakan bahwa oleh pihak-pihak yang berwajib kini sedang diselesaikan perkara pelucutan senjata empat orang anggota TNI yang baru-baru ini terjadi di sana. Empat orang itu kini masih ditahan oleh militer Belanda. (*Antara*, 8/9/1949)

* Pagi: Dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Madura diumumkan bahwa larangan untuk mengibarkan bendera dan memakai lencana Merah Putih dihapuskan untuk seluruh Madura.

  Pengumuman itu disambut dengan pekik "hidup" dan "merdeka", dan segera kemudian di luar gedung, di rumah-rumah dan pada kendaraan-kendaraan, berkibar Sang Merah Putih. (*Antara*, 9/9/1949)

* Kabinet Negara Pasundan telah memutuskan kemarin untuk mengijinkan pengibaran bendera Merah Putih di seluruh daerah Pasundan. Sementara itu keputusan untuk mencabut larangan Wakil Tinggi Mahkota Belanda sudah dapat dipastikan.

  Sejak tersiar berita tentang akan dicabutnya larangan tersebut, banyak kantor dan penduduk menyediakan bendera Merah Putih.

  Pengumuman Pemerintah Pasundan mengenai pengibaran bendera Marah Putih ini ditandatangani oleh Wali Negara dan Wakil Perdana Menteri, dan disiarkan kemarin malam oleh Menteri Negara. (*KU127*; *LUxxi*; *Antara*, 7/9/1949)

* Diperoleh kabar bahwa dari Pasundan ada 6 orang (a.l. 3 perempuan) yang kini belajar di Negeri Belanda dengan *beurs* (beasiswa) “Malino”.

  Menurut sumber tersebut, Pemerintah Belanda di Indonesia menyediakan “Malino beurs” untuk 50 orang dari seluruh Indonesia, dan jumlah pelamar kini sudah mencapai 1.500 orang.

  Sementara itu Pemerintah Pasundan menyediakan bantuan untuk 200 pelajar lanjutan dengan jumlah maksimum seorang *f*200,00 sebulan. Untuk itu Kementerian Pengajaran menyediakan anggaran sebesar *f*200.000,00. (*Antara*, 7/9/1949)

* Anggota BP KNIP Zainal Arifin dan Zainal Abidin Achmad baru-baru ini melakukan kunjungan ke daerah Ciamis. Mereka menyatakan bahwa pelaksanaan *cease fire* tampak mulai lancar. Perundingan dilakukan di sebuah kontakbiro TNI, 2 km dari Ciamis.

  Mereka pun menyatakan bahwa sekarang sudah ada saling mengerti antara Republik dan DI, baik secara militer maupun politik. Soal DI bukan soal besar, demikian mereka, bisa diselesaikan antara kita sama kita, asalkan pihak lain tidak ikut campur. (*Antara*, 8/9/1949)

* Tiga orang pegawai distribusi, seorang asisten wedana dan seorang pedagang di Bandung kini ditahan polisi karena dituduh melakukan korupsi. Pemeriksaan untuk mengetahui lebih jauh, sampai di mana kejahatan ini dilakukan, masih berjalan.

  Menurut kabar, asisten wedana tersebut telah menjual *zegel* hak penduduk seharga *f*6.000,00. (*Antara*, 7/9/1949)

* Dua hari dua malam (Senin dan Selasa) di Cikawalu (sebelah selatan Banjaran) di kaki Gunung Malabar, terjadi kebakaran besar hingga nyala api tampak dari Bandung.

  Karena terjadi di musim kemarau, orang menduga kebakaran terjadi di tengah hutan, tapi ternyata itu adalah hutan yang telah dibabat seluas sekitar 36 ha. Menurut kabar, tanah itu akan ditanami pohon rasamala dan kayu damar. Sebab-sebab kebakaran masih diselidiki. (*Antara*, 7/9/1949)

* Surat kabar Belanda *Juliana Bode* di Palembang telah diubah namanya menjadi "*Het Dagblad voor Zuid Sumatera*". Menurut kabar, penerbitannya diselenggarakan oleh Negara Sumatra Selatan. (*Antara*, 7/9/1949)

* Pekan ini Maskapai Minyak Tanah SVPM di Palembang akan memberhentikan lebih dari 2.000 orang pegawai, sebagian besar di antaranya orang Indonesia. Tindakan ini diambil dengan alasan penghematan. (*Antara*, 8/9/1949)

* Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Madura disahkan Belanda sebagai perwakilan tetap. Sementara itu Merah-Putih boleh dikibarkan. (*LUxxi*)

* Menteri Agama Kyai Haji Masjkur bertolak ke Sabang dalam rangka perjalanan kembali ke Yogyakarta, disertai Haji Abubakar Atjeh dari Kementerian Agama.

  Di jembatan Peunayong ia dilepas oleh para pejabat sipil dan militer serta pemimpin masyarakat, dan di pelabuhan Sabang ia disambut oleh Kepala Pemerintah setempat dan Komandan Tentara Belanda yang kemudian mengantarkannya ke Pesanggerahan Sabang untuk beristirahat semalam.

  Di tengah perjalanan ke Sabang Menteri Agama menyatakan kepada wartawan bahwa banyak kesan memuaskan diperolehnya dari dua minggu kunjungannya di Aceh. Semangat keagamaan dan perjuangan di kalangan rakyat Aceh masih suci, dan semangat suci ini masih tetap bergolak untuk mempertahankan kemerdekaan. Kesadaran politik telah tumbuh di kalangan rakyat Aceh. Tetapi semangat keagamaan tampaknya lebih berpengaruh. Ini mungkin didorong oleh kesucian jiwa.

  Akhirnya Menteri berharap agar tanggal 20 bulan ini anggota Misi Haji dari Aceh sudah berada di Yogyakarta untuk menerima tugasnya. (TS222-224)

* Menyusul berita tentang dijalankannya hukuman tembak mati atas Wolter Monginsidi, lebih lanjut dikabarkan bahwa atas usaha para pemimpin partai, pergerakan wanita dan perkumpulan pemuda, jenazahnya telah digali dari tempat penembakan di Pacinang (8 km di luar Kota Makassar)

pada jam 11.00 di 6 September untuk dirawat di rumah keluarganya, lalu dimakamkan dengan upacara hari itu juga di pemakaman Pompang.

Perhatian rakyat dari segala lapisan atas pemakaman pahlawan kemerdekaan yang berusia 23 tahun ini sangat besar. Peristiwa semacam ini belum pernah terjadi di kota ini. Peti jenazah diselubungi bendera kebangsaan Merah Putih dan dipelopori 700 orang pandu. Ratusan kendaraan dan l.k. 20.000 orang mengiringinya. Jalan sepanjang 7 km yang dilalui iring-iringan ini tertutup untuk lalu-lintas. Jam 17.00 jenazah diturunkan ke tempat istirahatnya yang terakhir, lalu dibukiti dengan lebih dari 200 karangan bunga.

Pemakaman berjalan lancar, dan tidak terjadi sesuatu insiden. (*Antara*, 8/9/1949)

1949 SEPTEMBER 8.

* Sidang Kabinet Republik Indonesia yang diselenggarakan pada 7/9 malam mengambil keputusan-keputusan sbb.:

  Pelaksanaan pasal 7 Rum-Van Roijen Statement oleh Pemerintah Republik akan diusahakan begitu rupa hingga tidak bertentangan dengan kenyataan dan tidak merugikan Republik.

* Mengenai sikap Pemerintah terhadap kedudukan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tersangkut dalam Peristiwa Madiun diputuskan:

  Segala organisasi, baik yang bersifat sosial, ekonomi maupun politik, yang bekerja tidak bertentangan dengan hukum, dapat berjalan dengan bebas.

* Anggota-anggota Badan Perwakilan tetap diakui sebagai anggota yang sah selama tidak ada hal-hal yang menurut hukum menyebabkan hilangnya keanggotaan itu.

* Terhadap pegawai-pegawai negeri diambil keputusan sbb.:

  Politik Pemerintah terhadap pegawai negeri didasarkan atas pertahanan dan penegakan kedaulatan negara. Dalam menjalankan politik itu ditetapkan bahwa pegawai negeri yang taat kepada prinsip tadi dihargai dengan

nyata. Bekas pegawai negeri yang telah menjalani prinsip itu dapat diterima kembali, setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. (*Antara,* 9/9/1949)

* Mr. Djody Gondokusumo yang oleh Ketua BP KNP diserahi tugas melakukan penyelidikan tentang keadaan kemakmuran di Jakarta telah menemui kalangan industri dan perdagangan Amerika, Inggris, Belanda, Tionghoa, Arab, Indonesia dll.

  Kepada *Antara* ia menerangkan bahwa umumnya para pemimpin industri dan perdagangan asing bersedia menyesuaikan diri dengan RIS yad. Beberapa di antaranya telah menyatakan siap menyediakan separuh modal usaha atau 51% prioritas untuk pihak Indonesia dan 49% untuk pihak asing. Ada juga yang menyatakan siap melakukan percobaan dua tahun untuk membimbing orang Indonesia dalam pimpinan teknis, kemudian menyerahkannya sama sekali kepada pihak Indonesia.

  Menurut Djody, untuk beberapa golongan industri dan perdagangan asing, kemakmuran rakyat Indonesia merupakan syarat untuk menjadikan Indonesia sebagai pasar yang menguntungkan modal asing.

  Djody pun menerangkan bahwa dari tiga syarat kemakmuran, bangsa Indonesia sudah memiliki dua syarat, yaitu tenaga manusia dan kekayaan alam. Karena itu dapat disimpulkan bahwa modal asinglah yang lebih membutuhkan Indonesia, dan bukan Indonesia membutuhkan modal asing. Menurut Djody, upaya politik harus ditujukan pada pencapaian kemakmuran rakyat. (*Antara*, 8/9/1949)

* Harian *Berita* yang terbit di Surabaya mengabarkan bahwa pada Jumat, 2 September yang lalu di Sidoarjo telah dilaksanakan hukuman mati atas tujuh orang, yaitu Mudiani, Sanimun, Arsiyan, Mislan, Waridjen, Munasir dan Napi. Mereka berumur antara 20 dan 26 tahun.

  Ketujuh orang tersebut berasal dari daerah sekitar Klakah, dan pada 24 November 1948 yang lalu oleh Pengadilan Negeri Istimewa di Lumajang dijatuhi hukuman mati karena didakwa terlibat dalam perkara pencurian dan pembunuhan kepala desa Sentul. Permohonan grasi mereka telah ditolak oleh pihak Belanda.

  Berita menyatakan bahwa dalam suasana *cease fire* sekarang, peristiwa ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. (*Antara,* 8/9/1949)

* Dari sumber yang dapat dipercaya diperoleh kabar bahwa tidak lama lagi Pemerintah Republik Indonesia akan membagikan semacam surat pengangkatan atau penghargaan kepada 10.000 lurah yang sampai sekarang masih menjalankan pemerintahan Republik Indonesia di seluruh Jawa Timur. Sebagian besar dari lurah-lurah itu tetap setia kepada Republik, ikut hijrah, atau meletakkan jabatan dan menunggu kembalinya kekuasaan Republik.

  Lurah-lurah itu banyak yang sudah kembali pada fungsinya semula, dan bekerja kembali di bawah lindungan angkatan perang Republik. (*Antara*, 8/9/1949)

* Sehubungan dengan berita bahwa Dewan Perwakilan Sumatra Selatan telah menerima dengan suara bulat mosi 12 anggota mengenai pemberian bantuan kepada TNI, diperoleh kabar bahwa di Sumatra Timur sampai sekarang belum terdengar kabar tentang hal itu.

  Dikatakan, bahwa Sumatra Timur berlainan dengan Sumatra Selatan atau Pasundan, karena kedua negara terakhir ini tidak memiliki Barisan Pengawal sendiri sebagaimana Sumatra Timur. (*Antara*, 8/9/1949)

* Menteri Agama Kyai Masjkur menyatakan kepada *Antara* di Medan dalam perjalanan dari Kotaraja ke Jakarta, bahwa umumnya rakyat Aceh mengharapkan KMB berhasil bulan depan. Aceh merupakan modal bagi perjuangan kita di masa depan, baik moril maupun materiil. Aceh masih utuh. Karena itu wakil PM Sjafruddin berencana secepat mungkin membangun daerah itu di lapangan ekonomi, pertanian, industri dll.

  Dalam perjalanannya ke berbagai tempat seperti Sigli, Lhokseumawe, dan Meulaboh, telah diadakan rapat umum yang dikunjungi tak kurang dari 100.000 orang dari segala tempat yang jauh-jauh di sekitarnya. Menteri Agama mendapat kesan nyata sekali bahwa rakyat Aceh memerlukan hubungan tetap dengan Yogyakarta.

  Selanjutnya Menteri Agama menyatakan bahwa di Aceh tidak ada pertentangan agama. Sebaliknya, rakyat berbagai golongan agama hidup rukun. Pernah seorang Islam diangkat oleh pemeluk agama lain sebagai wakilnya.

  Sambutan terhadap Menteri Agama sangat hebat, karena itulah untuk pertama kali Menteri Agama berkunjung ke Aceh. Seorang perempuan

tua bahkan menyerahkan anak kambing sebagai penghargaan atas kedatangannya.

Tentang pembangunan dikatakannya bahwa di kaki Gunung Selawah Jantan atas usaha sebuah panitia kini telah dibangun perkampungan luas tempat tinggal para bekas *romusha* dari semua daerah di Indonesia. (*Antara*, 9/9/1949)

* Para mahasiswa Indonesia di India baru-baru ini membentuk perhimpunan yang dinamakan Perhimpunan Pelajar Indonesia (Perpi). Kantor besarnya di Kalkuta, dengan alamat No. 14 Bow Bazar Street. Selain mengadakan hubungan dan ikatan dengan perhimpunan-perhimpunan mahasiswa di India, perhimpunan ini juga mencari perhubungan dengan semua organisasi pelajar di dunia.

Dalam suratnya kepada seluruh mahasiswa di India, Perpi menyatakan bahwa bangsa Indonesia banyak berutang budi pada bangsa India atas bantuan dan simpati yang diberikan India kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia semenjak revolusi Indonesia mulai.

Dewasa ini di India terdapat l.k. 12 mahasiswa Indonesia yang terutama menuntut pelajaran dalam ilmu teknik pada Silver Jubilee Technological Institute, The School of Economics and Sociology, Polytechnic College of Engineering and Technology. Kira-kira setengah dari mereka mendapat beurs (beasiswa) dari Pemerintah India. Selain mereka, ada juga anak-anak Indonesia pelajar sekolah rendah dan menengah, yang tinggal bersama orang tuanya di India. (*Antara*, 8/9/1949)

1949 SEPTEMBER 9.

* Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi Belanda di bawah pimpinan UNCI (United Nations Commission for Indonesia) melakukan sidang pleno di Jakarta untuk membicarakan beberapa masalah penting: Panitia Supply, pasal 7, dan *cease fire*. (*KU127*)

* Menurut Kepala Jawatan Penerbangan Sipil Republik Indonesia, Ir. Sugoto, pihak Belanda telah berjanji untuk mendatangkan motor serep untuk *zender* (pemancar) dan alat-alat *meteoor* guna keperluan berita udara (*weerberichten*) bagi jawatannya. Diterangkannya bahwa Mr. Besar yang ditunjuk oleh Ir. Laoh kini sedang berunding dengan Belanda me-

ngenai pembentukan Indonesian Airways yang kini sudah mempunyai beberapa pesawat di luar negeri dan sedang berusaha membeli pesawat-pesawat lain lagi. Diusahakan juga supaya Indonesian Airways ini menjadi anggota International Civil Aviation Organization, demikian Sugoto. (*Antara*, 10/9/1949)

* Sekretariat Pemuda Indonesia (Gondolayu 22, Yogyakarta) yang dibentuk untuk melaksanakan putusan-putusan Konferensi Pemuda Seluruh Indonesia pertengahan Agustus yang lalu minta *Antara* memberitakan bahwa kini oleh 16 organisasi pemuda yang ada di Yogyakarta telah dipilih pimpinan sekretariat sbb.:

Sekretaris I	Subagjo Reksodipuro;
Sekretaris II	Hersubeno;
Sekretaris III	Nasrun;
Bagian Tata Usaha	Sumpono;
Bagian Perbendaharaan	Utojo
Bagian Umum	Bing Latumahina.

* Mulai Oktober yad. Sekretariat Pemuda Indonesia akan menerbitkan majalah *Pemuda Merdeka* untuk umum. (*Antara*, 10/9/1949)

* Harian *Semangat Merdeka* menyiarkan Pengumuman Kementerian Pertahanan Staf Angkatan Perang Bagian Penerangan No. 14 mengenai Tentara Pelajar. Isi pengumuman:

Antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan telah dicapai permufakatan:

1. Mereka yang hendak berjuang melakukan kewajiban Negara akan dipelihara sepenuh-penuhnya kebutuhan pelajarannya.
2. Kelak jika mereka itu menjadi pegawai negeri, masa perjuangan dihitung sebagai tahun dinas.
3. Bagi mereka yang dapat membuktikan jasa terhadap perjuangan nasional umumnya, disediakan Tanda Jasa, di antara lain pembiayaan negeri atas pelajaran selanjutnya (*studie-beurs*).
4. Setiap pelajar pejuang dijamin hak-haknya di samping mereka itu melakukan kewajiban untuk kepentingan Negara. Pada prinsipnya,

pengajaran tetap menjadi pemeliharaan pemerintah terus-menerus. (TS225)

* Dari komunike mengenai penyelesaian masalah Surakarta yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia diketahui sbb.:

  Untuk meringankan kesulitan sehari-hari penduduk Kota Solo, akan dibentuk *collegiaal-bestuur* (pemerintahan sejawat) oleh pihak Republik dan Belanda. Perondaan diserahkan kepada polisi sipil, sedangkan tentara kedua belah pihak di-*kazerneer* (dimasukkan ke barak) Baru kalau polisi tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, maka soal tersebut diserahkan kepada pihak tentara kedua pihak. Siapa yang dalam hal ini akan bertindak, akan ditentukan oleh komandan kedua belah pihak.

  Berkenaan dengan komunike tersebut kalangan Republik di Jakarta menyatakan kepada *Antara* bahwa dalam menyelesaikan masalah Surakarta, pihak *zelfbestuur* (Kasunanan dan Mangkunegaran) tidak merupakan pihak ketiga. Dalam perundingan-perundingan yang diadakan, Kasunanan dan Mangkunegaran tercakup di pihak Republik.

  Kalangan itu menyatakan lebih lanjut, bahwa berita-berita yang menyatakan seolah kedatangan Komandan Daerah Surakarta *Overste* Slamet Rijadi ke Yogyakarta baru-baru ini berkaitan dengan pemberhentiannya dari jabatan sekarang adalah tidak benar sama sekali. *Overste* Slamet Rijadi tetap Komandan Daerah Surakarta, sedangkan Mayor Achmadi tetap Komandan Kota Solo. (*Antara*, 9/9/1949)

* "Eksekusi hukuman mati atas pemuda kita sesudah *cease hostilities* seperti terjadi atas Monginsidi di Makasar dan 7 orang pemuda di Sidoarjo beberapa hari yang lalu, telah menimbulkan kegoncangan di kalangan Republik," demikian dinyatakan oleh Delegasi Republik di Jakarta.

  Dengan ini Belanda dianggap melanggar isi dan semangat pasal 3 pernyataan bersama yang diucapkan pada 3 Agustus yang lalu. Diterangkannya bahwa pada 26 Agustus yang lalu delegasi Republik secara resmi telah memprotes pihak Belanda berkenaan dengan hukuman mati yang dijatuhkan pada dua orang pemuda di Surabaya pada 23 Agustus 1949 yang dituduh melemparkan granat di gedung AMVJ Surabaya, tetapi terhadap protes tersebut delegasi Republik sampai kini belum mendapat jawaban. Sebaliknya eksekusi hukuman mati itu sekarang terus dijalankan.

Delegasi Republik akan menggugat delegasi Belanda mengenai hal itu. Tentang tawanan politik dan militer yang menurut kabar telah dikeluarkan dinyatakan, bahwa delegasi Republik tidak tahu-menahu, karena hal itu tidak diberitahukan kepada mereka. (*Antara*, 9/9/1949)

* "Aceh secara umum sungguh merupakan daerah modal bagi Republik, baik moril maupun materiil, terutama di masa depan. Dan di dalam praktek, sifat provinsialisme seperti pernah digembar-gemborkan orang, di Aceh itu tidak ada sama sekali," demikian kesan Menteri Agama Republik kepada *Antara* sekembali dari Aceh kemarin sore dengan pesawat KLM.

Tentang urusan Kementerian Agama di Sumatra dikatakannya, bahwa walau ia tidak lama berada di Sumatra, telah dapat dibereskannya beberapa hal yang tadinya menjadi perselisihan. Sekarang oleh Menteri Agama telah diserahkan sama sekali hal-hal yang belum dapat diselesaikannya sendiri, kepada Mr. Sjafruddin. (*Antara*, 9/9/1949)

* Sudah lebih dari setahun masalah pabrik tenun "Tjimalaka" (di daerah Sumedang) yang dapat dikatakan terbesar di seluruh Indonesia dan sebelum perang menjadi milik orang Jepang, sampai kini masih belum selesai. Baik Pemerintah Pasundan maupun perusahaan-perusahaan bangsa Indonesia sudah lama sepakat untuk menjadikan pabrik itu perusahaan bangsa Indonesia. Juga sudah disepakati bahwa pimpinan dan modal akan dipegang oleh bangsa Indonesia.

Kalangan pengusaha bangsa Indonesia hari-hari ini sedang giat berusaha agar pembelian pabrik tersebut dapat segera dilakukan. *Antara* memperoleh kabar bahwa Kementerian Kemakmuran Pasundan berencana agar masalah "Tjimalaka" ini sudah selesai pada September ini juga.

Perlu dicatat bahwa semula Pemerintah Belanda di Indonesia menganggap pabrik ini sebagai barang rampasan perang, dan harus dilelang. Pelelangan tidak terjadi, karena kalangan pengusaha Indonesia mendesak agar pabrik itu menjadi perusahaan milik bangsa Indonesia.

Untuk menjalankan perusahaan itu dibutuhkan modal awal sebesar 2 juta rupiah, *f*900.00 di antaranya harus dibayarkan sebagai persekot. (*Antara*, 9/9/1949)

* Harian komunis Belanda *De Waarheid* menulis dalam induk karangannya bahwa di belakang layar Konferensi Meja Bundar dilakukan usaha-usaha untuk menempatkan kekayaan alam Indonesia di dalam kekuasaan monopoli Amerika Serikat.

  Menurut *De Waarheid*, beberapa waktu yang lalu diperoleh keterangan bahwa perusahaan tambang minyak Belanda "Pacific Petroleum" mendapat konsesi di Kepulauan Riau. Sangat menarik bahwa perusahaan minyak itu hanya namanya saja Belanda, sedangkan segalanya adalah Amerika Serikat. Seluruh andil perusahaan tersebut berada di tangan Texas Company dan Standard Oil.

  Dengan pertolongan KMB, AS ingin mendapatkan kekuasaan atas tambang minyak yang kaya di Indonesia, demikian *De Waarheid*, menurut Tass. (*Antara*, 9/9/1949)

1949 SEPTEMBER 10.

* "Kemerdekaan hanya jalan menuju kemakmuran rakyat, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia bertujuan menciptakan dunia aman di mana ada kerja sama internasional abadi, berdasarkan perikemanusiaan, dan persamaan hak," demikian kata sambutan Hatta dalam rapat umum Perhimpunan Nederland-Indonesia hari ini di Den Haag.Hatta menyampaikan terima kasih bangsa Indonesia atas jasa perhimpunan tersebut yang telah memberikan bantuan moril dan materiil kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia.

  Rapat dibuka oleh Van den Berg, ketua Perhimpunan Nederland-Indonesia, lalu berturut-turut berbicara Stokvis, bekas anggota Volksraad, Domine J. J. Buskes, wartawan Jef Last, pujangga Henriette Roland Holst, dan *hoofd-redacteur* (pimpinan redaksi) *Vrij Nederland*, Van Randwijk.

  Pokok pembicaraan mereka adalah menghukum politik kolonial Belanda dengan aksi militernya dan menyokong perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.

  Gedung rapat dihiasi karangan bunga merah putih, sedangkan di dalam berkibar Sang Merah Putih dan Sang Tiga Warna.

  Suasana rapat yang dihadiri oleh kira-kira 1.000 orang Belanda dan 100 orang Indonesia kelihatan gembira. Selain Hatta, banyak anggota delegasi Republik turut hadir.

Seperti diketahui, Perhimpunan Nederland-Indonesia ini didirikan pada 29 Agustus 1945 dan tidak berhaluan politik. Antara lain, IA bertujuan memajukan kerja sama dan persahabatan antara Nederland dan Indonesia, berdasarkan persamaan hak dan sukarela. Perhimpunan ini merupakan suatu *intellectueele kring* (kelompok cendekiawan) yang berpendirian progresif terhadap soal Indonesia-Belanda dan menganggap aksi militer kedua bertentangan dengan hukum internasional, membahayakan dunia, dan menimbulkan bencana bagi kesejahteraan bangsa Indonesia dan Belanda. (*Antara*, 12/9/1949)

* Satu kompi pasukan Baret Hijau hari-hari terakhir ini telah melakukan kekacauan di Solo. Pasukan tersebut telah menimbulkan perkelahian dengan penduduk hingga jatuh korban tiga orang penduduk tewas, seorang prajurit TNI gugur, dan 22 penduduk menderita luka.

Atas persetujuan Kol. Ohl dan Komandan TNI, pasukan Baret Hijau itu akan dipindahkan ke luar Solo. Sementara itu pihak Belanda baru mau merundingkan soal-soal kecil. Mereka belum mau merundingkan soal penetapan daerah patroli di Solo. Dan sampai sekarang belum ada tanda-tanda tentara Belanda akan ditarik mundur. (*Antara*, 11/9/1949)

* Pemerintah akan memelihara sepenuhnya kebutuhan para pelajar yang telah berjuang melaksanakan kewajiban terhadap negara. Apabila mereka menjadi pegawai negeri, maka masa perjuangannya itu dihitung sebagai tahun dinas. Bagi mereka yang dapat membuktikan jasanya terhadap perjuangan nasional umumnya disediakan *studiebeurs* (beasiswa). (*Antara*, 11/9/1949)

* Dengan diantarkan oleh Panitia Tawanan untuk Surabaya, Mr. Iskaq Tjokroadisurjo dan Mr. Tohar, kemarin Sekretaris Jenderal Kementerian Penerangan Ruslan Abdulgani telah meninjau para tawanan Republik di penjara Kalisosok dan Bubutan, Surabaya.

Di Kalisosok ia berjumpa a.l. dengan pegawai tinggi Kementerian Dalam Negeri Dul Arnowo, Ajudan Presiden Sukarno Mayor Pramu Rahardjo, pegawai Jawatan Penerangan Bondowoso Dr. Abdulmanap, dan beberapa orang lain. Di Bubutan ia bertemu dengan anggota KNIP Njono Prawoto, dan mahasiswa Sulistyo.

* Lewat Ruslan Abdulgani Pemerintah telah menyampaikan beberapa puluh setel pakaian serta sejumlah bacaan.

  Menjawab pertanyaan *Antara* mengapa Dul Arnowo, Dr. Abdulmanap dll. belum dibebaskan, Ruslan Abdulgani pun menyatakan keheranannya, padahal mereka itu terang tidak tersangkut dalam perkara kriminal. Lebih mengherankan lagi ialah bahwa Dul Arnowo tercatat sebagai anggota Local Joint Committee (LJC) daerah Bojonegoro, sedangkan Dr. Abdulmanap anggota Kementerian Penerangan yang diperbantukan pada LJC Surabaya. (*Antara*, 12/9/1949)

* Pengurus Umum Buruh Administrasi Pemerintah dan Partikelir meminta *Antara* menyiarkan pengumuman berikut:

  Kabar yang mengatakan bahwa BAP akan ke Yogyakarta adalah tidak benar. Yang akan pergi ke Yogyakarta ialah Pusat Sementara Organisasi Buruh Seluruh Indonesia yang berpusat di Bandung dan dipimpin oleh Mr. Kusna Puradiredja.

  BAP adalah anggota Pusat Sementara. Kepergian Pusat Sementara ke Yogyakarta ialah untuk mempersatukan segenap kaum buruh, baik yang bekerja di daerah federal maupun di daerah Republik. (*Antara*, 10/9/1949)

* Mulai empat hari yang lalu telah berjalan kereta api Semarang-Yogyakarta pulang balik, melulu untuk mengangkut barang keperluan Pemerintah Republik yang waktu ini tertimbun di Semarang.

  Perjalanan dilakukan tiap hari dengan 30 kereta barang. Sesampai di Muntilan, Jawatan Kereta Api Republik menyediakan 30 kereta barang kosong untuk dibawa kembali ke Semarang. (*Antara*, 10/9/1949)

* Menurut catatan yang dihimpun dari pendaftaran penganggur, di seluruh Keresidenan Pati sampai akhir Agustus 1949 terdapat 2.790 penganggur, 600 di antaranya mendapat pekerjaan.

  Jumlah penganggur ini akan terus naik sejalan dengan penghematan yang akan dilakukan oleh beberapa kantor. (*Antara*, 10/9/1949)

* Partai kaum Indo, *Indo-Nationale Partij* (INP) hari ini mengirim kawat kepada ketua partai tersebut, I.P. Snell, di Den Haag. Isinya menyatakan

bahwa Pengurus Besar dan *afdeeling*-bestuur INP di Jakarta setuju dengan sikap yang diambil oleh I.P. Snell mengenai dasar politik.

INP selanjutnya menyatakan tetap percaya dan yakin pada para pemimpin Indonesia, mengakui Republik Indonesia sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia, dan minta agar penyerahan kedaulatan dilakukan tahun ini juga, tidak terbatas pada politik dan daerahnya saja. (*Antara*, 10/9/1949)

* Hari Ahad pada 11 September ini Gubernur Militer Sumatra Selatan Dr. A. K. Gani akan kembali ke Palembang, sesudah beberapa hari berada di Jakarta.

  Ikut ke Palembang beberapa opsir dari Markas Besar TNI, a.l. Kapten Islam Salim, dalam rangka penanganan perintah penghentian permusuhan di daerah Sumatra Selatan.

  Menjawab pertanyaan *Antara*, Dr. A. K. Gani menyatakan tidak bermaksud melakukan kunjungan ke Yogyakarta. Mengenai berita tentang kepergiannya ke KMB di Den Haag ia mengatakan: "Ada alasan apa bagi saya untuk ke KMB? Saya ingin kembali ke tempat saya di Bukit Barisan." (*Antara*, 10/9/1949)

* Atase Kebudayaan pada Konsulat AS di Jakarta, W.A. Hanna, yang sedang berkunjung ke Yogyakarta telah berunding dengan Menteri Penerangan, Menteri Pendidikan dan Menteri Luar Negeri tentang pengiriman buku-buku dan majalah-majalah Amerika oleh USIS ke Yogyakarta.

  Kepada *Antara* Hanna mengatakan bahwa 700 buku Amerika mengenai sejarah kesusasteraan, pengetahuan dsb. telah dikirimkan oleh USIS kepada Kementerian Pendidikan. Dan kini sudah siap lagi 200 buku di Jakarta untuk Pemerintah Republik. (*Antara*, 10/9/1949)

1949 September 11.

* Hari Radio diperingati oleh keluarga radio Yogyakarta, a.l. dengan berziarah ke makam Dr. Abdulrachman Saleh, salah seorang perintis radio Indonesia. (*LUxxi*)

* Dari tanya-jawab *Antara* dengan Kol Sungkono dalam konferensi pers di Surabaya hari ini dapat dicatat, bahwa menurut sumber yang dapat

dipercaya, “Tan Malaka sudah mati, tapi Kolonel Sungkono sendiri tidak pernah memberi perintah untuk menembak mati Tan Malaka”. (*Antara*, 12/9/1949)

* *Central Joint Board* dalam sidangnya 12 September nanti akan membahas protes pihak Republik terhadap pelaksanaan hukuman mati Monginsidi di Sulawesi Selatan dan beberapa pemuda lain di tempat lain oleh Belanda.

  Alasan protes pihak Indonesia adalah karena pelaksanaan hukuman itu terang-terang merupakan pelanggaran terhadap pasal tiga pengumuman bersama (Joint Proclamation) yang dikeluarkan bersama oleh pihak Republik dan Belanda.

  Pasal tiga pengumuman bersama itu berbunyi a.l. bahwa “Mereka yang sedang dituntut atau telah dihukum karena kejahatan yang merupakan akibat dari pertentangan politik antara kerajaan Nederland dan Republik, harus dibebaskan dari tuntutan dan hukuman sesuai dengan peraturan yang akan diambil.”

* Ketua Sementara Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, Kusna Puradiredja, menerangkan bahwa pertengahan bulan September nanti Pengurus Pusat Sementara Organisasi Buruh di Bandung akan berangkat ke Yogyakarta untuk berunding dengan organisasi-organisasi buruh di sana. Akan dirundingkan prosedur dan waktu untuk mengadakan Konferensi Buruh Seluruh Indonesia guna membentuk organisasi yang tetap.

  Dalam Konferensi Buruh di Bandung pada Agustus yang lalu, Yogyakarta hanya mengirimkan seorang peninjau. (*Antara*, 11/9/1949)

* Dikabarkan, Menteri Kemakmuran Pasundan telah memajukan surat kepada *Departemen Ekonomische Zaken* mengenai soal *deviezen*. Isinya desakan agar pembagian dan pengawasan atas *deviezen* untuk penduduk negara bagian diserahkan kepada negara bagian itu.

  Sampai sekarang tiap negara bagian hanya mempunyai wakilnya di Jakarta, sedangkan Kementerian-kementerian Kemakmuran di negara-negara bagian tidak mendapat laporan tentang jumlah pembagian *deviezen* dan pengawasannya. Pembagian dan pengawasan atas *deviezen* itu dilakukan di Jakarta. (*Antara*, 12/9/1949)

* Dewan Keputerian Perpiindo Daerah Aceh mengadakan pertemuan ramah-tamah dengan Haji Sjamsir, anggota rombongan Wakil Perdana Menteri Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Pertemuan dipimpin oleh Sofyan Hamzah, dan dibuka dengan uraian tentang sejarah pertumbuhan Perpiindo di Aceh oleh Ali Jusuf.

  Dalam ceramahnya, Haji Sjamsir menyatakan bahwa ketangkasan pemuda gerilya kita sangat ditakuti oleh tentara Belanda.

  Ia mengharapkan agar para pemuda tidak puas dengan pendidikan yang sudah diperoleh, dan bercita-cita melanjutkan pendidikan ke luar negeri, ke berbagai perguruan tinggi. Dalam hal ini diharapkannya agar pelajar Islam dari Aceh dapat memancarkan satu matahari, sesuai dengan namanya: Aceh Serambi Mekkah. Aceh hendaknya menjadi lambang kemajuan.

  Pelajar Islam di Aceh jangan hanya mengarahkan pandangan ke Mesir atau Mekkah. Tengoklah juga negeri lain seperti Eropa, Amerika dan Jepang. Dalam kemajuan industri kita harus mencontoh Jepang yang punya industri di setiap rumah.

  Pemuda dan pemudi tidak hanya perlu belajar kepandaian mengatur rumah tangga, tapi juga menuntut pengetahuan yang tinggi, demikian Haji Sjamsir. (TS225-227)

1949 September 12.

* Pembicaraan tentang tawanan perang antara Indonesia (diwakili oleh Ketua Delegasi Republik Mr. Susanto Tirtoprodjo) dan Belanda (diwakili oleh Wakil Tinggi Kerajaan Belanda di Indonesia, A. H. J. Lovink) dimulai. Jumlah tawanan yang belum dilepaskan oleh Belanda sekitar 22.000 orang. (*LUxxi*)

  Kesulitan dalam masalah tahanan politik kini bertambah dengan dilaksanakannya hukuman mati oleh pihak Belanda terhadap Wolter Monginsidi di Makassar dan terhadap beberapa pemuda di Surabaya.

  Pada 26 Agustus, beberapa waktu sebelum Wolter Monginsidi dijatuhi hukuman mati. Ketua delegasi republik sudah mengajukan surat kepada pihak Belanda supaya vonis hukuman mati ditangguhkan terlebih dahulu. Surat tersebut disampaikan kepada pihak Belanda, karena pada saat itu dua orang pemuda Indonesia di Surabaya sudah terlebih dahulu dijatuhi hukuman mati dengan tuduhan pelemparan granat.

Pihak delegasi republik menilai hukuman mati yang dijatuhkan pemerintah Belanda terhadap Wolter Monginsidi hanya akan memperkeruh keadaan antara Republik dan Belanda. Kini persoalan Monginsidi diajukan bersama-sama melalui delegasi Panitia Tahanan Politik dan Central Joint Board.

Pihak Republik sebenarnya sudah meminta penangguhan vonis hukuman mati sebelum vonis tersebut dijatuhkan di Makassar dan Surabaya. Mereka menilai vonis hukuman mati akan mempengaruhi suasana politik antara republik dan Belanda. Pihak Belanda sendiri menilai apa yang terjadi pada Wolter Monginsidi tidak ada hubungannya dengan situasi politik pada saat ini. Pendapat pihak Belanda tersebut ditentang oleh pihak republik. Hebatnya reaksi dari kalangan partai politik di Makassar sebelum hukuman mati Wolter Monginsidi dilaksanakan membuktikan eratnya keterkaitan Wolter Monginsidi dengan aktifitas politik. (*Antara*, 12/9/1949)

* Komunike UNCI mengumumkan diadakannya pertemuan oleh CJB di Hotel des Indes Jakarta.

  Wakil republik mengemukakan pendapatnya mengenai putusan hukuman mati atas Wolter Monginsidi, serta putusan hukuman mati di Sidoarjo atas Madini, Sanimun, Arsijan, Mislan, Waridjen, Munasir, dan Napi. Ia menilai eksekusi ini tidak hanya mengejutkan rakyat di daerah republik, tetapi juga di daerah-daerah federal terutama di Jawa Timur.

  Wakil Republik mengemukakan soal dilakukannya putusan hukuman mati atas Wolter Monginsidi beberapa hari yang lalu, demikian pun di Sidoarjo atas Madiani, Sanimun, Arsijan, Mislan, Waridjen, Munasir dan Napi. Ia nyatakan bahwa eksekusi ini telah mengejutkan rakyat, bukan saja di daerah-daerah Republik, tetapi juga di daerah-daerah federal, terutama di Jawa Timur. Ia meminta supaya kejahatan-kejahatan yang terjadi diselidiki sepenuhnya, dan dipisahkan antara kejahatan yang bersifat politik, atau kejahatan yang murni kriminal. Ia meminta juga supaya kasus-kasus tersebut diselidiki secara matang sebelum putusan hukuman dijalankan, terutama mengenai putusan hukuman mati. Ia menjelaskan bahwa delegasinya bersedia menyampaikan pengaduannya kepada subpanitia 4 yang dibentuk untuk memberi nasehat dan mempercepat pelepasan tawanan-tawanan politik dan perang. Namun ia lebih

menekankan supaya putusan hukuman mati diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup.

Wakil Belanda menjawab, bahwa Pemerintah Indonesia akan dengan senang hati mendapat kesempatan untuk sepenuhnya menerangkan sikapnya dalam subpanitia 4. Ia tegaskan, dalam hal yang mengenai jiwa manusia, soalnya diselidiki dengan teliti dan berhati-hati sebelum putusan dijatuhkan dan dijalankan. Dalam soal yang dikemukakan wakil Republik, sifat-lekas-merasa Republik telah dipertimbangkan. Sebaliknya ia tegaskan, bahwa kejahatan-kejahatan yang besar tak bisa bebas dari hukuman, dan bahwa paragraf 3 dari proklamasi-bersama hanya mengenai kejahatan yang tegas merupakan kelangsungan pertikaian politik dan tidak bisa digunakan sebagai penutup dan bagi kejahatan-kejahatan biasa.

Dalam halnya Wolter Monginsidi, wakil Belanda menyatakan, bahwa Monginsidi telah bersalah melakukan pembunuhan-pembunuhan, penculikan-penculikan dan perbuatan-perbuatan kekerasan terhadap penduduk Indonesia. Wakil Belanda menganggap benarnya sikap delegasinya mengenai permintaan Republik supaya putusan hukuman mati dipertangguh untuk diselidiki, dalam pada itu ia akan menyampaikan sugesti tersebut kepada Pemerintah Indonesia untuk dipertimbangkan. CJB setuju untuk menyampaikan pengaduannya kepada subpanitia 4.

CJB pun setuju untuk minta kepada LJC di Surabaya untuk memberi laporan mengenai pertanyaan Republik tentang ditahannya Mayor Djarot berkenaan dengan kejadian-kejadian di Surabaya pada 10-11 Agustus, yang kini sedang diselidiki.

Selain itu CJB menerima baik persetujuan antara kedua pihak untuk menetapkan status pasukan-pasukan gerilya berhubung dengan penetapan zona patroli. (*Antara*, 13/9/1949)

* Minggu malam yang lalu telah dilangsungkan peringatan *RRI* genap 4 tahun, yang dirayakan secara sederhana, tapi gembira. Ketua umum Marmadi meriwayatkan perjuangan *RRI* dalam mengatasi segala kesulitan dan penderitaan, didasarkan keinsafan bahwa radio adalah alat penting untuk perjuangan kemerdekaan.

Menteri Penerangan dalam amanatnya menyampaikan terima kasih Pemerintah atas kegiatan *RRI*. Ia harapkan agar perjuangan *RRI* tetap demikian selanjutnya. (*Antara*, 13/9/1949)

* Hari ini Presiden menerima resolusi Persatuan Gerakan Buruh Republikein Madiun yang beranggota 1.500 orang, terdiri dari kaum buruh pelbagai jawatan di kota tersebut.

  Resolusi ditandatangani oleh 1.200 orang yang minta agar pengembalian daerah Madiun dipercepat.

  Perlu dicatat, bahwa Persatuan Gerakan Buruh didirikan pada 1 Maret 1949. (*Antara*, 13/9/12949)

* Oleh 15 orang dari kalangan perniagaan, perindustrian, dan keuangan serta beberapa orang dari kalangan finansiil-ekonomi Indonesia di Bandung telah dibentuk panitia persiapan himpunan "Konsentrasi Pemikir Ekonomi Indonesia" terdiri dari Suchjar Tedjasukmana, Gondokusumo, Tambajong, Nitisumantri, Drs. Notonindito, Achmad Natanegara, Ir. Entjon, Mr. M. Sudja, A. Achsien, Supardjan, Tazar Ibrahim, Chasbullah dll.

  Panitia itu telah mulai mencari hubungan dengan eksponen-eksponen gerakan ekonomi di kota-kota besar di Indonesia supaya di tempat-tempat itu pun dimulai usaha-usaha semacam itu. Salah seorang pemuka usaha tersebut memberikan keterangan, bahwa seharusnya sekarang ini, ketika aksen penyelesaian pembentukan RIS di KMB diletakkan pada perundingan mengenai soal-soal finansiil-ekonomi, masyarakat Indonesia diajak untuk mengikuti dengan waspada dan seksama hal-hal tersebut.

  Selanjutnya dikatakan, bahwa meskipun delegasi Indonesia akan mempertahankan kepentingan-kepentingan ekonomi nasional bagi RIS, tidak berarti bahwa masyarakat nasional di Indonesia desa ini harus bersikap dingin. Di samping itu, saat sekarang ini dirasa perlu untuk memberikan penerangan agar rakyat mengerti kepentingan-kepentingan esensial yang sedang hangat-hangatnya dirundingkan di KMB.

* Panitia tersebut dalam waktu dekat akan mulai mengadakan ceramah-ceramah yang diberikan oleh tokoh-tokoh dan ahli-ahli yang erat hubungannya dengan delegasi Republik dan BFO. (*Antara*, 13/9/1949)

* Penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba syair, seni membuat gapura, dan menghias toko pada 17 Agustus, telah dilakukan Senin pagi dalam suatu upacara di Balai Kota Yogyakarta, dihadiri oleh Wali Kota.

Dua puluh delapan pemenang mendapat hadiah uang dan tanda penghargaan, a.l. tiga pemenang lomba syair, yakni Atje Widjajaputra dari Bandung, Sri Sanjoto dari Yogyakarta, dan Resida Siti Rohana dari Yogya. (*Antara*, 13/9/1949)

* Kepala Jawatan Kriminil dari Jawatan Kepolisian Republik yang sejak 2 bulan dirawat di Jakarta berhubung dengan sakit *Liesbreuk* (hernia) sesudah dioperasi, kini sudah sembuh dan dalam beberapa hari akan terbang kembali ke Yogyakarta untuk melaksanakan kewajiban. (*Antara*, 12/9/1949)

* Ny. Ema Puradiredja yang belum lama berada di Bandung telah terpilih menjadi ketua Perkiwa (Seksi Wanita dari Parki).

  Diperoleh kabar bahwa ia kini dicalonkan oleh Parki untuk menjadi anggota Parlemen Pasundan, sebagai pengganti salah seorang anggota Parki. Selama ini Ny. Ema Puradiredja menjabat pimpinan Yayasan Penolong Kecelakaan Pegawai Kereta Api yang didirikan oleh Jawatan Kereta Api atas desakan Persatuan Buruh Kereta Api dan *Spoorbond*. (*Antara*, 13/9/1949)

* Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia Mr. Sjafruddin Prawiranegara mengeluarkan Surat Penetapan tentang penunjukan anggota Misi Haji RI dari Aceh, yaitu H. Sjech Abdulhamid, M. Nur el Ibrahimy, dan Ali Hasjmy.

  Misi ditugaskan mewakili umat Islam Indonesia selama berlangsung ibadah haji, dan menyampaikan ucapan terima kasih Pemerintah RI kepada Raja Ibnu Saud atas bantuan-bantuannya kepada RI dan rakyat Indonesia yang bermukim di Hijaz.

  Misi pun ditugaskan memberikan penerangan untuk menarik simpati dunia Arab kepada RI, dan mempererat hubungan antara negara-negara Arab dengan RI. (TS227-229)

* Dalam percakapan dengan *Antara*, Jenderal Mayor Suhardjo menyatakan bahwa kepergiannya ke Kalimantan hanyalah untuk melakukan tugas menyampaikan perintah *cease fire* kepada komandan TNI Kalimantan, dan sama sekali tidak untuk berpolitik.

Sementara itu Acting PM Hamengku Buwono menerangkan bahwa kesan seolah-olah Republik mau “mencaplok daerah-daerah Kalimantan” adalah tidak benar. Rakyat sendiri yang menyatakan berdiri di belakang Republik. (*Antara*, 13/9/1949)

* Komandan Marine Belanda di Indonesia Laksamana Muda A. S. Pinke pada 30 September mendatang akan mengalihkan jabatannya kepada Laksamana Muda F.J. Kist. Kist sudah diangkat sebagai pengganti Pinke pada 1 September yang lalu (*Antara*, 12/9/1949)

1949 SEPTEMBER 13.

* Dewan Pertimbangan Agung (DPA) di Yogyakarta akan mengadakan pertemuan 24 September mendatang untuk memperingati genap 4 tahun usianya. Dalam pertemuan yang akan dilangsungkan di tempat kediaman Presiden Sukarno itu akan diadakan pula sidang istimewa dewan tersebut.

  Anggota Dewan Pertimbangan Agung yang kini ada di luar Yogyakarta adalah: Dr. Radjiman Wedyodiningrat di Walikukun, K. R. Wurjaningrat dan R. Haji Mohamad Adnan di Surakarta, Ir. Pangeran Noor, R. A. Suwarni Pringgodigdo dan S. Laoh di Jakarta, Ir. Liem Ing Hwie di Semarang, Dr. Setyabudhi di Bandung, K.H. Abdul Wahab Kasbullah di Surabaya, Teuku Daud Beureueh di Kotaraja, dan Mohamad Sjafie di Bukittinggi.

  Kepada para anggota yang berada di luar Yogyakarta telah disampaikan undangan untuk hadir dalam sidang istimewa tersebut. Ketua DPA, Sutardjo Kartohadikusumo, kini sudah berada di Yogyakarta. (*Antara*, 13/9/1949)

* Diperoleh kabar bahwa sebagai pengganti almarhum Abu Umar selaku wakil Sarekat Tani Indonesia Islam dalam BP KNIP adalah Mr. Dalijono dari Solo, sedangkan sebagai pengganti Kusnan sebagai wakil buruh yang kini menjadi Menteri Sosial adalah Kobarsih dari HISBI. (*Antara*, 14/9/1949)

* Kira-kira pada 15 September ini Wakil Perdana Menteri Mr. Sjafruddin Prawiranegara yang kini berada di Kotaraja akan terbang ke Yogyakarta. Menurut keterangan, kepergian Mr. Sjafruddin adalah sesuai rencana,

untuk setiap kali mengadakan hubungan langsung dengan Pemerintah Pusat di Yogyakarta.

Sementara itu Menteri Perhubungan Ir. Laoh yang merangkap ketua panitia supply delegasi Republik, tanggal 18 mendatang akan terbang ke Kotaraja untuk mengurus masalah hubungan Yogyakarta dengan Aceh. (*Antara*, 13/9/1949)

* Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia Mr. Sjafruddin Prawiranegara berkunjung ke kantor surat kabar *Semangat Merdeka* dan bertukar pikiran dengan redaksi surat kabar tersebut.

  Tentang Aceh, Wakil Perdana Menteri menyatakan, kesannya sangat baik. Ia mengatakan Aceh cukup terbuka. Khusus tentang kunjungannya ke Kabupaten Aceh Timur dikatakannya, memang ada perbedaan antarorang di sana-sini. Tapi jangan kita hanya memperhatikan anasir pengacau saja, sebab belum tentu si pengacau bermaksud sekadar mengacau. Mungkin cita-citanya baik. Karena itulah pejabat pemerintah harus dapat memahami perasaan golongan, partai dsb., jadi harus obyektif.

  Kepada *Semangat Merdeka* dianjurkan agar memuat lebih banyak karangan mengenai ilmu pengetahuan di berbagai bidang, hingga pembaca meningkat pengetahuannya.

  Mengenai kritik, yang a.l. ditujukan kepada Pemerintah, dianjurkannya agar kita tidak hanya pandai mengritik, tapi juga menunjukkan jalan keluar dari setiap keadaan yang dikritik. (TS229)

* Mr. Wongsonegoro yang mengetuai Kongres Kebudayaan di Magelang sebelum Agresi Militer Belanda II, menyatakan kepada *Antara* bahwa kini sedang diusahakan supaya pada Oktober mendatang di Jakarta dapat diselenggarakan Kongres Kebudayaan Indonesia kedua dengan hadirnya wakil-wakil segenap bagian Indonesia.

  Di antara perintis Kongres Kebudayaan ini, selain Mr. Wongsonegoro, adalah Dr. Abu Hanifah, Usmar Ismail, dan Armijn Pane. (*Antara*, 13/9/1949)

* Nahdlatul Ulama daerah Semarang yang diketuai oleh Karwi kini telah dibangun kembali. Sekarang ini umat Islam di Semarang sibuk memilih

dan menentukan utusannya untuk dikirim ke Muktamar Islam yang sebentar lagi akan diadakan di Bandung. (*Antara*, 14/9/1949)

* Untuk mengatasi masalah kurangnya tempat berkumpul dan berapat, dan terutama untuk mempererat hubungan rakyat Indonesia dengan lain-lain golongan, beberapa orang terkemuka dengan ketua Mochmad telah membentuk Panitia Penyelenggara "Gedung Rakyat Indonesia Semarang".

  Panitia akan membeli bekas gedung "*Sociteit Harmonie*" dengan harga *f*500.000,00. Untuk mendapatkan uang sejumlah itu akan diedarkan daftar sokongan dan kaleng sokongan, akan diadakan fancy-fair, pertunjukan-pertunjukan dan undian uang.

  Sebagai sokongan pertama, menurut kabar, Panitia Pasar Malam Semarang telah menyediakan ruangan di sekitar pasar malam tersebut untuk tempat penyimpanan sepeda. Penyimpanan sepeda selama pasar malam berlangsung ditaksir berjumlah *f*5.000,00. (*Antara*, 14/9/1949)

* Diperoleh kabar bahwa tidak lama lagi di Surabaya akan dilangsungkan Konferensi Masyumi yang a.l. akan membicarakan:
  - Persiapan menggiatkan kembali organisasi Masyumi.
  - Perlunya di tiap negara ada Departemen Agama seperti diadakan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

* Promotor konferensi adalah Kiai Haji A. Wahid Hasjim, bekas Menteri Agama RI, Kyai dari Tebu Ireng, Jombang. Kini pihak promotor sedang sibuk melakukan persiapan konferensi, dan tidak lama lagi akan mengirim undangan kepada semua cabang Masyumi di seluruh Jawa Timur. (*Antara*, 14/9.1949)

* Diperoleh kabar bahwa Muntu, redaktur surat kabar RVD Surabaya, *Pelita Rakyat*, telah mengadukan Goei Po An, pemimpin surat kabar *Trompet Masjarakat*, kepada Polisi.

  Pengaduan diajukan karena dalam tulisan pojoknya Goei Po An menyebut Muntu wartawan penjilat. Pojok tersebut ditulis berkenaan dengan ucapan Muntu dalam konferensi pers dengan Ruslan Abdulgani.

Goei Po An pun kabarnya telah mengajukan kontra pengaduan terhadap Muntu yang dalam konferensi pers tersebut mengatakan bahwa wartawan-wartawan Surabaya takut ke Yogya karena takut diculik atau dibunuh. Malam itu juga ucapan itu telah diprotes. (*Antara*, 14/9/1949)

* Badan Penghubung Organisasi Pemuda yang meliputi 9 organisasi pemuda di Bandung dalam pengumumannya pada 12/9 menyatakan penyesalan kepada Pemerintah Umum dan Pemerintah NIT berhubung dengan dijatuhkannya hukuman mati atas Wolter Monginsidi.

  Hal ini dihubungkan dengan perkembangan politik akhir-akhir ini, serta proklamasi bersama pada 5 Agustus, di mana dinyatakan bahwa mereka yang kehilangan kemerdekaannya selekas mungkin akan dimerdekakan kembali. Badan Pemuda tersebut menyatakan salam penghormatan kepada Monginsidi sebagai seorang patriot dan pahlawan perjuangan kemerdekaan. (*Antara*, 13/9/1949)

* Dengan kereta api, telah tiba di Palembang Gubernur Sumatra Selatan Dr. Isa dengan sekretarisnya. Di antara ratusan rakyat yang menyambut tampak Dr. A. K. Gani dengan staf, anggota LJC dari pihak Belanda Kapten Taak dan Letnan Michiels, seorang peninjau militer dari UNCI, dan keluarga Dr. Isa.

  "Saya masuk Muara Aman pada 11 April dan keluar dari situ tanggal 11 September. Genap 5 bulan saya bergaul langsung dengan rakyat tani yang spontan mau merdeka," kata Dr. Isa kepada wartawan *Antara*.

  Selanjutnya: "Rakyat menyambut perintah *cease fire* ini dengan gembira, tapi tetap waspada; persatuan sangat baik. Gembar-gembor tentang provinsialisme yang dibesar-besarkan itu hanya terdapat di kota saja, dan meliputi beberapa gelintir manusia. Rakyat di dusun-dusun keresidenan-keresidenan Bengkulen, Jambi dan Palembang tidak ingin meninggalkan Republik. Untuk masa datang, guna kepentingan rakyat, yang paling urgent adalah perhubungan lalu-lintas yang baik, dan pendidikan."

  Tentang politik dan perundingan Dr. Isa belum mau memberikan keterangan. Menurut sekretarisnya, mereka datang dari Sukadatang sehari perjalanan ke Muara Aman. Di tiap tempat yang mereka lalui, terutama di sepanjang jalan kereta api, berdiri ratusan rakyat yang memekikkan "Merdeka". (*Antara*, 14/9/1949)

* Diperoleh kabar bahwa pada 24/8 yang lalu EAC (Serikat Sekerja) telah mengadakan pertemuan untuk memberikan keterangan tentang pengurangan pegawai SVPM (Maskapai Pertambangan Minyak Tanah) sebanyak 2.000 orang.

* Peraturan pemberhentian menurut ketua EAC E. J. Gunen adalah sbb.:
  1. Pegawai harian atau jam-jaman, dengan pokok gaji di bawah *f*100,00 sebulan, bisa diberhentikan pada hari apa saja; upah dibayar hingga hari ia bekerja.
  2. Pegawai bulanan yang berpokok gaji di bawah *f*100,00 sebulan bisa diberhentikan seketika. Gajinya dibayar sampai akhir bulan.
  3. Pegawai jam-jam, harian dan bulanan yang berpokok gaji *f*100,00 atau lebih sebulan, bisa diberhentikan seketika, tapi kepadanya diberikan ganjaran berupa gaji penuh sebulan ditambah dengan sebulan gaji dan ditambah pula dengan sebuah gaji untuk tiap tahun ia bekerja pada maskapai itu.
  4. Pembagian ransum, pengobatan, perumahan bagi bekas pegawai dihentikan pada saat ia diberhentikan. Sementara itu akan diadakan hubungan dengan Kantor Perburuhan (*Arbeidsbeurs*), perusahaan perkebunan, perusahaan pertambangan dan jawatan kereta api untuk menempatkan orang-orang tadi pada lowongan yang mungkin ada.

  Dengan demikian pekerjaan-pekerjaan kasar seperti membersihkan mesin pabrik, membersihkan rumput, menebang kayu dan membuka hutan di sekitar tanah konsesi sebagian besar akan terhenti pula. Pegawai-pegawai yang lazim disebut "*employee*" masih bisa terus bekerja. (*Antara*, 14/9/1949)

1949 SEPTEMBER 14.

* Hari ini sidang Badan Pekerja KNIP membicarakan rencana undang-undang tentang kekuasaan Acting Perdana Menteri di Sumatra, Mr. Sjafruddin Prawiranegara, untuk membuat peraturan darurat sebagai pengganti undang-undang atau pengganti peraturan pemerintah yang harus selekas-lekasnya diberitahukan kepada Presiden, dan kemudian jika Presiden menyetujuinya, diajukan kepada Badan Pekerja.

Alasan pemberian kekuasaan itu ialah bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Sumatra sesuai dengan keadaan dan kepentingannya mungkin memerlukan peraturan istimewa, sementara perhubungan dengan Pemerintah Pusat amat sukar. (*Antara*, 14/9/1949)

* Ir. Dipokusumo, salah seorang utusan Republik ke sidang ECAFE yang diadakan baru-baru ini di Bangkok, menerangkan kepada *Antara*, bahwa ada baiknya RIS kelak berhubungan dengan India, Jepang dan Australia untuk meminta bantuan guna memajukan industri berat Indonesia. Bantuan yang diharapkan, menurut pendapatnya, adalah bantuan teknik dan technical training yang prinsipnya telah diterima oleh PBB bagi negara-negara yang belum maju.

  Kecuali itu Indonesia memerlukan bantuan luar negeri. Faktor-faktor yang mendukung industri berat di Indonesia adalah kekayaan bahan mentah dan tenaga buruh yang kelak dapat dididik menjadi ahli. Ekonomi Indonesia di masa depan akan maju, karena sifatnya saling melengkapi dengan ekonomi negara Asia lainnya, demikian Dipokusumo.

  Dalam sidang tersebut, Indocina diwakili oleh Perancis, dan Malaya oleh Inggris. Sidang ECAFE mendatang di Singapura akan lebih penting dari sidang di Bangkok, karena di sana akan dilakukan sidang pleno yang akan membicarakan "pembangunan ekonomi Asia Tenggara". (*Antara*, 15/9/1949)

* Sidang Kabinet Pasundan pada 13/9 a.l. telah membicarakan:

  1. Pemilihan Wali negara. Untuk keperluan ini dibentuk sebuah kepanitiaan yang anggota-anggotanya terdiri dari beberapa anggota parlemen dan beberapa orang yang ditunjuk oleh pemerintah Pasundan.
  2. Sikap Residen Van der Harst sehubungan dengan suratnya kepada Bupati Garut yang isinya menyatakan supaya Bupati Garut tidak mengundang anggota-anggota Partai Surya Legawa dan Pemuda Indonesia Pasundan dalam acara pemilihan Dewan Perwakilan Kabupaten Garut.
  3. Kabinet akan memperhatikan pembagian Ransum yang belum merata, sehingga orang-orang yang berupah minimum mendapatkan bagiannya masing-masing.

4. Menyelidiki lebih jauh duduk perkara insiden Bendera Merah Putih. Permasalahan ini diserahkan kepada Pokrol Jenderal Pasundan.

* Tentang insiden Bendera Merah Putih ini menurut berita adalah sbb.: Seorang sopir, yang pada opletnya berkibar Bendera Merah Putih dalam perjalanan dari Bandung ke Subang telah ditembak mati oleh militer Belanda. Dikabarkan, ketika digeledah, pada sopir tersebut terdapat tanda anggota Brigade Citarum. (*Antara*, 15/9/1949)

* Kongres Muslimin Indonesia pada November mendatang di Bandung akan mencakup segala macam organisasi Islam di seluruh Indonesia: politik, ekonomi, sosial, budaya, wanita, dan pemuda. Akan ambil bagian juga para ahli dan pemimpin Islam (ulama dan intelek) yang tidak tergabung dalam salah satu organisasi Islam.

* Pokok acara dalam kongres tersebut adalah:
  1. Pemandangan umum tentang suasana dalam dan luar negeri, terutama dunia Islam.
  2. Menyempurnakan kehidupan dan kesadaran politik umat Islam Indonesia dengan membentuk pedoman perjuangan dan menyusun program usaha di segala lapangan (kenegaraan, ekonomi, sosial dan kebudayaan).
  3. Menyambut perkembangan kenegaraan Indonesia seluruhnya dengan persiapan-persiapan yang selaras dengan ideologi Islam.
  4. Membentuk organisasi yang dapat mewakili dan memimpin seluruh umat Islam Indonesia dalam perjuangannya. (*Antara*, 15/9/1949)

* Tgk. H. Sjech Abdul Hamid, M. Nur el Ibrahimy dan Ali Hasjmy sebagai anggota Misi Haji Republik Indonesia dari Aceh bertolak dengan motor-boat dari Kotaraja (sekarang Banda Aceh) ke Sabang untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Tanah Suci.

  Misi Haji Republik Indonesia yang kedua tahun ini akan terdiri dari 5 orang, 2 orang lagi dari Pemerintah Pusat di Yogyakarta. Selain menunaikan ibadah haji, mereka akan mengemban juga tugas-tugas negara di negara-negara Arab. (TS231)

* Lewat Sabang, utusan perdagangan dari Aceh hari ini bertolak ke Jakarta dan selanjutnya Yogyakarta. Utusan terdiri dari Kepala Jawatan Perdagangan Daerah Aceh Tgk. M. Hanafiah, Manajer Atjeh Trading Company (ATC) Kotaraja Haji Ali, dan T. Daud dari CTC.

  Menurut rencana, utusan akan membicarakan berbagai masalah sekitar perkembangan perdagangan di Aceh yang selama ini telah berkembang baik. Dengan luar negeri telah terjalin hubungan dagang dengan Penang dan Singapura. (TS231)

* Haji Sjamsir, salah seorang anggota rombongan Wakil Perdana Menteri Mr. Sjafruddin Prawiranegara, hari ini bertolak kembali ke Yogyakarta lewat Sabang dan Jakarta, bersama Mayor Hasballah Daud. (TS231)

* Tgk. Muhd. Daud Beureueh termasuk dalam rombongan anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang diundang untuk menghadiri sidang istimewa DPA, yang jatuh pada hari ulang tahun ke-4 dewan tersebut pada 24 September 1949 di Yogyakarta.

  Diundang juga untuk menghadiri sidang tersebut: Dr. Kandjeng Raden Tumenggung Radjiman W. dari Walikukun, K. R. M. T. Hardjo Wirjaningrat dari Surakarta, Raden Haji Mohd. Adnan dari Surakarta, Ir. Pangeran Mohd. Noor dari Jakarta, R.A. Suwarti Pringgodigdo dari Jakarta, F. Laoh dari Jakarta, Kyai Haji Abdul Wahab dari Surabaya, Dr. Setiabudi dari Bandung, anggota DPA dari Semarang (tidak jelas namanya), dan anggota DPA dari Bukittinggi (tidak jelas namanya). (TS231)

* Di Langsa berdiri Persatuan Wartawan Aceh Timur yang bertujuan mempertahankan kemerdekaan, mengeluarkan buah pikiran lewat tulisan, mempertinggi mutu persuratkabaran, dan memperbaiki kedudukan wartawan, dengan Ketua Irawan Pandu, dan Wakil Ketua Achmid Abdullah. (TS232)

1949 SEPTEMBER 15.

* Sidang kabinet Republik untuk membicarakan laporan Delegasi Republik dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) sampai tanggal 5 September 1949. (*KU127*)

* Di Istana Presiden, Yogyakarta, Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) secara resmi melantik Letnan Kolonel Sadikin sebagai Panglima Divisi IV merangkap Gubernur Militer Jawa Barat.

* Pada kesempatan itu juga dilantik Dr. Erie Sudewo sebagai Kepala Staf Divisi IV. (*KU127*)

* Wakil Perdana Menteri Mr. Sjafruddin Prawiranegara mengumumkan bahwa untuk menyehatkan keuangan dan ekonomi Sumatra Utara umumnya dan Aceh khususnya Pemerintah mulai mengambil beberapa tindakan.

  Tindakan pertama ditujukan untuk menyempumakan alat-alat pemerintahan sipil maupun militer lewat rasionalisasi, pembagian kerja secara tepat, dan perbaikan nasib pegawai negeri dan anggota TNI.

  Perbaikan nasib pegawai negeri dan anggota TNI penting untuk memperbaiki derajat alat kekuasaan negara, tapi hal itu tidak bisa dicapai sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Demi keberhasilannya, pemerintah dengan sangat minta kepada para pegawai dan tentara untuk melakukan sebaik mungkin segala instruksi dan petunjuk atasan.

  Dikatakan oleh Wakil Perdana Menteri, akibat tindakan Pemerintah ini mungkin dalam satu-dua bulan ini pegawai negeri dan tentara akan menderita lebih hebat, tetapi memang setiap operasi pasti mendatangkan penderitaan. Tapi Pemerintah yakin penderitaan tersebut akan dapat dipikul oleh pegawai negeri dan tentara, dengan keinsafan bahwa "lebih baik kita menderita untuk menjadi sembuh daripada terus-menerus menderita oleh karena sesuatu penyakit".

  Wakil Perdana Menteri minta agar perintah dan instruksi dijalankan dengan jujur atas dasar cinta kepada tanah air. Selanjutnya dikatakannya:

  "Di samping menyempurnakan alat kekuasaan negara, pemerintah sedang meninjau kembali segala peraturan yang berlaku, terutama di lapangan keuangan dan ekonomi, dengan maksud menambah pendapatan negara dan mempertinggi kemakmuran rakyat.

  Tindakan Pemerintah ini tentu akan menimbulkan kegelisahan dan reaksi, terutama dari mereka yang merasa kedudukan atau kepentingannya terancam. Memang ada orang atau golongan yang lebih suka melihat

keadaan yang kurang baik sekarang dilanjutkan daripada diakhiri. Sebab justru dalam keadaan yang kurang baik itu mereka dapat menjalankan rolnya dan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri.

Mereka ini mungkin akan melakukan berbagai provokasi licin, hingga apabila provokasi itu didengar rakyat, mungkin usaha Pemerintah akan gagal. Oleh karena itu Pemerintah berharap mendapat bantuan rakyat, tidak hanya secara pasif, tapi lebih-lebih secara aktif.

Kepentingan Pemerintah adalah kepentingan rakyat, kepentingan rakyat adalah kepentingan Pemerintah. Hanya Pemerintah bersama dengan rakyat yang akan dapat menggagalkan tiap usaha orang atau golongan yang hendak menggagalkan maksud baik Pemerintah: menyelenggarakan pemerintahan yang adil dan mendatangkan kemakmuran bagi rakyat, selaras dengan Undang-undang Dasar kita." (TS232-233)

* Menjawab pertanyaan *Antara*, apakah menurut ukuran keadaan sekarang KMB dapat selesai dan membawa hasil dalam dua bulan ini, Sjahrir mengatakan: "Mungkin, kalau satu pihak suka memberi konsesi lebih banyak." Sjahrir berpendapat, soal terpenting yang mestinya diselesaikan lebih dulu adalah penyerahan kedaulatan dan penarikan tentara Belanda. Lain-lainnya menjadi konsekuensi darinya.

* (*Antara*) Definisi 'uni-ringan' sedang menjadi soal. Bagaimana pendapat saudara?

  (Sjahrir) Mungkin sekali yang dikehendaki Republik ialah hubungan uni seperti antara India dan Inggris, di mana raja Inggris berkedudukan hanya sebagai simbol. Dapat dimengerti bahwa delegasi Republik tidak menyetujui sifat uni yang dikemukakan Belanda, yang sekalipun oleh Belanda tidak boleh dinamakan suatu '*superstaat*' (karena memang tidak ada batas-batasnya, tidak ada tentaranya dsb.), tetapi tak boleh disangkal merupakan suatu '*super-organisatie*' atau '*super-structuur*', karena oleh pihak Belanda dikehendaki adanya unie-hof, unie-ministers, unie-perlement. Dalam *structuur* seperti ini raja bukan lagi simbol, tetapi raja yang aktif."

* (*Antara*) Apa konsekuensinya, menurut saudara?

(Sjahrir) Soalnya adalah soal lama: soal ekonomi, keuangan, ketentaraan, pembelaan, perwakilan luar negeri, semuanya syarat-syarat pokok bagi suatu negara yang berdaulat. Kalau delegasi Republik menolak sifat uni yang dikemukakan pihak Belanda, ini karena dapat diduga lebih dulu uni demikian akan membawa ekor atau konsekuensi panjang dalam soal-soal penting tersebut tadi. Di samping itu sangat boleh jadi akan dikehendaki pula jaminan tentang adanya suatu *'deugdelijk bestuur'* di Indonesia, dan untuk ini diperlukan lagi suatu aparat lainnya, dst.

* Menurut Sjahrir, satu dari soal pokok ialah adanya 5 sampai 6 miliar rupiah modal asing di Indonesia, sebaliknya India mempunyai 800 juta pound sterling di Inggris. Situasinya lain, tetap akibatnya serupa: uni. Sifat uni di sini yang belum ditetapkan.

* (*Antara*) Apakah benar anggapan orang bahwa sekarang lebih banyak terasa desakan diplomasi dari negara ketiga terhadap perundingan ini, daripada desakan UNCI?

(Sjahrir) Boleh jadi.

* (*Antara*) Bilamana saudara pergi ke Den Haag?

(Sjahrir) Belum tentu.

* (*Antara*) Apa maksud kepergian saudara ke Yogya?

(Sjahrir) Ah, iseng-iseng saja. Sudah kangen pada Yogya. (*Antara*, 15/9/1949)

* Dalam pertemuan pers pagi ini di kantor besar polisi, Kepala VID, Jasin, menerangkan bahwa tidak ada pembatasan (*beperking*) tentang berdirinya partai-partai politik di daerah federal, kecuali Partai Komunis.

Berbeda dengan negara-negara demokrasi di Eropa yang membolehkan Partai Komunis mendirikan cabang-cabangnya di negara-negara tersebut, di daerah federal tidak dibolehkan sama sekali berdirinya Partai Komunis.

Mengenai rapat-rapat, Jasin menerangkan bahwa mengingat masih berlakunya undang-undang Staat van Oorlog en Beleg, untuk rapat yang di-

adakan secara tertutup (*besloten vergaderingen*) cukup pemberitahuan kepada VID, sedangkan untuk rapat terbuka (*openbare-openlucht*) diharuskan minta ijin lebih dahulu, sebaiknya dengan datang sendiri, untuk mendapat petunjuk yang diperlukan dari pihak VID. (*Antara*, 15/9/1949)

* Dari kalangan yang dapat dipercaya diperoleh kabar, di Semarang dua pemuda Indonesia—Sukono dari tentara dan Kasbul dari Polisi Negara—telah dijatuhi hukuman mati, dan menurut kabar, hukuman akan dilaksanakan pada 18 September.

  Sehubungan dengan itu, delegasi Republik Indonesia akan berikhtiar menanyakan hal itu pada kabinet HVK, dan minta dengan sangat agar hukuman tersebut ditinjau kembali, karena dikhawatirkan akan mengeruhkan suasana dan menggelisahkan masyarakat kebangsaan Indonesia.

  Menurut kabar, Dr. Abu Hanifah dan Mr. Ali Budiardjo akan bertemu hari ini dengan HVK untuk membicarakan hal tersebut. (*Antara*, 15/9/1949)

* Dari Mr. Sujudi yang berada di Semarang diterima kabar oleh pihak resmi Republik, bahwa mahkamah Belanda di Semarang telah mengambil putusan menunda eksekusi hukuman mati terhadap Sukono dan Kasbul yang menurut rencana akan dilaksanakan pada 18 September.

  Mr. Sujudi yang menjadi penasihat Panitia Tawanan Politik delegasi Republik telah datang di Semarang dari Yogyakarta untuk mengurus masalah Sukono dan Kasbul itu. (*Antara*, 16/9/1949)* Betapa hebat reaksi terhadap hukuman mati atas Monginsidi, 7 pemuda di Sidoarjo dll. oleh Belanda baru-baru dapat diketahui dari berita-berita di bawah ini:

  Parkindo, Persatuan Wanita Kristen Indonesia, Persatuan Pemuda Kristen Indonesia yang mewakili umat Kristen di Indonesia menyampaikan protes kepada Presiden, CJB, Dewan Menteri, Delegasi Republik di KMB dan di Jakarta, menyatakan bahwa tindakan Belanda itu memperkosa asas-asas kekristenan, perikemanusiaan, dan Persetujuan Rum-Van Roijen, dan janji WTM (Wakil Tinggi Mahkota) untuk menunda semua eksekusi tak cukup memberi jaminan.

  Ketiga badan tersebut pun mengirimkan seruan senada kepada Young Men Christian Association dan Young Women Christian Association di

Jenewa, Christian Missionary Alliance di New York, Delegasi BFO di KMB dan Sekretariat Nederlands Hervormde Kerk di Nederland, dan World Christian Students Federation di Jenewa.

Sementara itu Sekretariat Pemuda Indonesia yang pada hari Rabu yang lalu mengadakan rapat dihadiri oleh 14 organisasi pemuda, memutuskan a.l.:

- Mendesak supaya wakil-wakil pemuda duduk dalam panitia-panitia tawanan sebagai anggota dan mengakui secara resmi semua orang yang dihukum mati oleh Belanda karena perjuangan kemerdekaan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional.
- Sekretariat Pemuda Indonesia mengajak semua organisasi pemuda seluruh Indonesia untuk memperkuat organisasi dan menyempurnakan segera syarat dan alat perjuangan dalam menghadapi segala kemungkinan.
- Seterusnya menyatakan bahwa tindakan Belanda itu memperkuat rasa tidak percaya pemuda Indonesia terhadap Belanda.

Kepada Dr. Azis Saleh, salah seorang anggota LJC di Semarang, dan Delegasi Republik di Jakarta, dikirimkan kawat berisi desakan supaya segera bertindak. (*Antara*, 16/9/1949)

* Berita terlambat menyatakan, dengan putusan komando militer Belanda Jawa Tengah, mulai 10/9 yang lalu lalu-lintas umum telah dibuka kembali, yaitu:

- Jurusan Magelang-Purworejo dan Kutoarjo.
- Jurusan Salatiga-Boyolali-Kartosuro dan Solo.

* Mulai 16/9 telah dibuka kembali lalu-lintas umum:

- Jurusan Kudus-Pecangaan-Jepara-Keling-Tayu-Juwana-Pati dan Kudus.
- Jurusan Tayu-Trangkil dan Pati.
- Jurusan Rembang-Cepu.

* Mulai 16/9 juga kereta api jurusan Rembang-Cepu dibuka bagi umum.

* Sementara itu diumumkan bahwa ada kemungkinan di daerah-daerah masih diberlakukan peraturan-peraturan oleh territoriaal-onder-commando, untuk menjamin keamanan. (*Antara*, 16/9/1949)

* Menyambung berita tentang pembelian gedung "*Harmonie*" oleh Panitia Penyelenggara Gedung Rakyat Indonesia Semarang, diperoleh kabar bahwa mulai hari ini gedung tersebut telah ditempati Sekretariat "GRIS".

  Menurut kabar, pembelian gedung tersebut telah terlaksana. Berbeda dengan kabar semula, harganya gedung tersebut bukan *f*500.000, tetapi hanya *R[p]* 375.000. (*Antara*, 16/9/1949)

* *RRI* Yogyakarta memberitakan bahwa perusahaan penerbangan Belanda KLM akan membuka hubungan penerbangan Kotaraja-Jakarta.

  Sementara itu dikabarkan juga dari Jakarta, di Kotaraja akan dibuka sebuah Perguruan Tinggi Agama, dan akan diusahakan pengiriman para pelajar Aceh ke luar negeri untuk meneruskan pendidikan. (TS233)

* Kongres Pendidikan Nasional yang semula akan dilangsungkan di Bandung pertengahan Oktober, diundur sampai waktu yang belum ditentukan.

  Sementara itu Perkumpulan Pendidikan Indonesia di Bandung akan mengirimkan wakil-wakilnya ke Yogyakarta, yang a.l. terdiri dari Sumardja, Gazali, dan Panggabean. (*Antara*, 16/9/1949)

* Berita terlambat dari Sumedang menyatakan: Empat orang polisi Negara Pasundan telah tewas dan seorang lagi luka berat akibat penyerangan gerombolan DI berkekuatan 150 orang pada 13 September jam 11.00 di kampung Cipari dan Sukahayu, Sumedang Selatan.

  Waktu itu kesatuan polisi berkekuatan 10 orang sedang mengantarkan pegawai pengairan ke Desa Sukahayu, dan tiba-tiba mendapat serangan dari belakang. Pertempuran segera terjadi, hingga polisi kehabisan peluru. Di antara korban tewas terdapat seorang *hoofdposthuiscommandant* (komandan pos). Selain itu polisi kehilangan 1 *thompson-gun*, 1 *stengun*, dan 3 *Lee Enfield*. Di pihak DI pun jatuh banyak korban.

  Menurut keterangan, Desa Sukahayu adalah tempat markas DI. (*Antara*, 17/9/1949)

* Pemanukan dan Tjiasemlanden baru-baru ini telah dibeli oleh pemerintah pre-federaal dengan harga *f*5,5 juta dan kemudian diserahkan kepada Pasundan untuk diurusnya.

  Bagian-bagian yang dibeli itu berupa sawah, tanah reserve dll., kecuali tanah *cultuur-onderneming*. Mula-mula P. & T-landen tidak termasuk dalam rencana pembelian kembali tanah-tanah partikulir.

  Dengan demikian, sekarang telah ada 15 tanah partikulir yang dimasukkan dalam negara Pasundan, dan sepanjang rencana tahun 1949 hanya 3 tanah partikulir lagi yang akan dibeli, yaitu Cilebut, Yanlapa-Oost, dan Trogong.

  Tanah partikulir lainnya yang akan dibeli dalam tahun 1950 ialah Kedawung-West, Karawaci, Periukbong, Cihuni, Ciampeti (yang semuanya di bawah kekuasaan N.V. Javasche Particuliere Landerijen), Suradita, Gunung Mas, Kedungbadak, Tanah-Baru, Cisarua-Noord, Cisarua-Zuid, Cicongokganda, dan Bolang.

  Jika penyerahan semua tanah partikulir itu telah selesai, daerah Pasundan akan bertambah luas sekurang-kurangnya seperlima dari wilayahnya sekarang. (*Antara*, 16/9/1949)

* Wakil Konsul India di Yogyakarta, Mani, menyatakan kepada pers bahwa di India telah terbentuk South Asia Cultural Group yang bertujuan melakukan pertukaran budaya antara negeri-negeri Asia Selatan.

  Beberapa ribu orang Indo-India di Indonesia menurut Mani tidak akan menolak kewarganegaraan Indonesia. Ia pun menyatakan bahwa rakyat India ingin menerima lebih banyak buku-buku dan majalah-majalah yang sudah ada tentang Indonesia.

  Pemerintah India akan menggunakan basa Hindustani sebagai basa pengantar di sekolah, dan dalam 10 tahun basa Inggris tak akan digunakan lagi sebagai basa pengantar di seluruh India, demikian Mani. (*Antara*, 16/9/1949)

1949 SEPTEMBER 16.

* Presiden menerima kawat pernyataan kaum terkemuka Irian asli Biak sbb.:

  1. Menolak Nieuw Guinea dijadikan mandat Belanda.

2. Minta masuk RIS dan menolak mosi Afrika yang tidak diakui sebagai wakil rakyat.
3. Mengesahkan S. Papare dari Partai Kebangsaan Indonesia Irian Serui sebagai wakil rakyat Irian seluruhnya; dan menyokong usul Kurubuy.

* Presiden pun menerima kawat dari rakyat Sumatra Barat yang menyatakan tidak mengakui Dr. Anas sebagai wakil Minangkabau, dan mengharap agar hal ini disampaikan kepada delegasi Republik di Den Haag. (*Antara*, 16/9/1949)

* Terjadi jalan buntu dalam perundingan di Konferensi Meja Bundar karena kedua belah pihak (Indonesia dan Belanda) berkukuh pada pendirian masing-masing mengenai masalah Uni Indonesia-Belanda.

  Delegasi Indonesia berpendapat bahwa konsepsi Belanda tentang Uni itu merupakan selubung bagi niat mereka untuk meneruskan penjajahan atas Indonesia. Walau dikatakan bahwa Uni itu terdiri atas dua negara merdeka dan berdaulat, tetapi persekutuan itu dikepalai oleh Raja Negeri Belanda.

  Menurut usul Belanda, Kepala Uni itu harus dinamakan "Mahkota Uni" yang dipegang oleh Ratu Juliana turun-temurun.

  Baik delegasi Republik maupun delegasi BFO menghendaki agar Uni Indonesia-Belanda itu merupakan suatu perjanjian internasional yang biasa diadakan antara dua negara merdeka dan berdaulat. (AT289)

* Penarikan mundur tentara Belanda dari Solo yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan, rupanya masih sulit. Letak kesulitan, menurut kabar, terutama karena status Surakarta dan Mangkunegaran di dalam Republik belum nyata. Menurut keterangan, pihak Kasunanan dan Mangkunegaran tetap menuntut kembalinya daerah itu.

  Dasar kesukaran bagi Belanda untuk menarik mundur tentaranya dari daerah Surakarta ialah bahwa jika ditarik, kedua daerah itu kabarnya akan diserahkan langsung kepada kedua raja.

  Mengenai kekacauan di Kota Solo diperoleh kabar, bahwa dalam perundingan terakhir antara komandan TNI dan Belanda, pihak Belanda telah

menyanggupi menarik mundur Green caps dari daerah Surakarta, tapi hingga kini belum ada berita apakah penarikan sudah dimulai. (*Antara*, 16/9/1949)

* Perguruan Taman Siswa dari seluruh daerah di luar Republik yang telah mengadakan konferensi di Jakarta antara 11-15 September yang lalu akhirnya mengambil beberapa keputusan mengenai perguruan Taman Siswa khususnya dan satu resolusi mengenai perguruan dan pendidikan umumnya.

  Di antara keputusan yang penting adalah:

  - Pendirian Taman Guru sebanyak-banyaknya guna memenuhi kebutuhan tenaga guru di perguruan-perguruan Taman Siswa dan perguruan-perguruan nasional lainnya di seluruh Indonesia.
  - Meminta kepada organisasi-organisasi mahasiswa untuk turut membantu usaha memperluas dan mempertinggi pendidikan dan pengajaran dengan jalan mengajar di perguruan-perguruan nasional, tidak hanya di kota-kota besar saja akan tetapi juga di kota-kota kecil.
  - Pendirian badan pengarang dan penerbit buku-buku pelajaran.
  - Penerbitan majalah.
  - Pendirian perguruan-perguruan Taman Siswa sebanyak-banyaknya.
  - Memperluas dan mempertinggi pendidikan kesenian (seni rupa-suara-sastra-tari).

* Dan resolusi yang ditandatangani oleh Sukemi dan Mohd. Said berbunyi sbb.:
  Menganjurkan kepada segenap organisasi pelajar dan organisasi mahasiswa untuk ikut serta di dalam usaha perguruan-perguruan nasional untuk memperluas dan mempertinggi pengajaran dan pendidikan nasional, sebagai sumbang bakti kepada Ibu Pertiwi, dengan jalan menyumbangkan tenaganya sebagai guru secara bergiliran, tidak hanya di kota-kota besar saja akan tetapi juga di kota-kota kecil. (*Antara*, 16/9/1949)

* Dari Yogyakarta dikabarkan, sidang Himpunan Serikat Sekerja/Buruh Indonesia pada 14/9 yang dihadiri oleh 24 wakil PB Serikat Buruh yang tergabung di dalamnya, telah memutuskan mengesahkan pokok pen-

dirian umum massa organisasi buruh, program usaha pembentukan *vakcentrale* buruh Indonesia. Sidang menyampaikan keputusan itu kepada segenap serikat buruh gabungan, Serikat Buruh Seluruh Indonesia, untuk mempertimbangkan dan mempergunakan pokok-pokok pendirian tersebut sebagai pedoman perjuangan sampai terbentuknya vakcentrale seluruh Indonesia. Diputuskan juga untuk membentuk panitia vakcentrale seluruh Indonesia di kota-kota, daerah-daerah, dan di pusat.

Dalam pokok-pokok pendirian itu a.l. disebut, bahwa Serikat Buruh bersifat umum dan bebas, mempersatukan segenap kaum buruh, tidak membeda-bedakan jenis bangsa, pekerjaan, agama, aliran politik, dan merupakan suatu bangunan yang demokratis. Tujuannya a.l. memperjuangkan keadilan dalam masyarakat yang menjamin hak tiap manusia menjabat pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Sesuai dengan itu menuntut tercapainya hak-hak berserikat, berkumpul, kemerdekaan menyatakan fikiran, perasaan secara tulisan maupun lisan, demonstrasi dan mogok.

Pimpinan HISSBI berupa sekretariat, terbagi dalam beberapa seksi. Didapat kabar, sedikit hari lagi ditunggu kedatangan wakil-wakil Pusat Sementara Organisasi Buruh Seluruh Indonesia Bandung, di antaranya Mr. Kusna Puradiredja yang akan mengadakan hubungan dengan HISSBI. (*Antara*, 17/9/1949)

* Dalam waktu 9 bulan penduduk kota Surabaya telah bertambah dengan 100.000 orang. Pada 1 Desember 1948 (sebelum Aksi Militer Belanda II) telah tercatat 432.707 jiwa. Sampai akhir Agustus 1949 jumlah itu sudah menjadi 552.024 jiwa, terdiri dari 414.392 orang Indonesia, 91.347 orang Tionghoa, 37.354 orang Belanda, 6.301 orang Arab, 1.746 orang Hindustani, dan 384 orang asing lain. (*Antara*, 16/9/1949)

* Dalam resepsi Muktamar Gerakan Muslimin Indonesia (GMI) semalam, wakil PB Masyumi Mr. Jusuf Wibisono menyatakan tidak menganggap GMI sebagai *konkuren* politik, melainkan sebagai adik Masyumi. Ia nyatakan itu dalam sambutannya terhadap keterangan Ketua GMI Kyai Abdul Halim tentang asas dan tujuan GMI.

Wakil PB Masyumi lainnya, anggota BPKNIP Prawoto Mangkusasmito, menyatakan dalam sambutannya bahwa berdirinya GMI berarti

bertambahnya partai politik Islam untuk memperjuangkan cita-cita mencapai kemerdekaan nusa, bangsa dan agama.

Wakil PM Pasundan Ardiwinangun menerangkan kepada *Antara* bahwa kini antara militer Belanda di satu pihak dan TNI serta penganut Republik yang bersenjata di lain pihak, nyata ada ketaatan terhadap perintah *cease fire*. Tentang pasukan DI di daerah selatan Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan Sumedang dikatakannya, itu adalah soal militer Belanda, bukan soal Pemerintah Pasundan.

Mengenai adanya berita bahwa TNI dan polisi Negara Pasundan bertindak bersama terhadap DI, Kepala Staf Divisi Siliwangi Letkol Dr. Eri Sudewo menyatakan bahwa sampai kini belum ada perintah dari panglima tentara. Ia terangkan bahwa konsepsi DI berlainan dengan konsepsi Republik, terbukti dari proklamasi Negara Islam Merdeka pada 7/8 yang lalu. Dengan adanya perbedaan konsepsi tersebut, DI tidak akan dapat bekerja sama dengan pihak yang oleh DI dianggap tidak sepaham ideologinya, dan mungkin anggapan itu tertuju pula kepada TNI. (*Antara*, 17/9/1949)

* Konferensi kedua Front Nasional Sumatra Timur di Medan menerima baik resolusi yang a.l. mendesak kepada yang berwajib agar memperbaiki dewan-dewan dalam arti yang seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya, serta selekas mungkin mencabut staat van oorlog en beleg. Juga menuntut ditariknya selekas mungkin semua tentara Belanda dari Indonesia sesudah penyerahan kedaulatan.

Selain itu dituntut: pembebasan tawanan politik, penghapusan hukuman yang bersangkut-paut dengan revolusi, perubahan hukuman mati yang bersangkutan dengan revolusi, pencabutan larangan mengibarkan bendera Merah Putih di seluruh Indonesia dst. (*Antara*, 17/9/1949)

* Dikabarkan lebih lanjut tentang 217 tawanan dan hukuman yang pada 11/9 yang lalu meloloskan diri dari penjara Pematang Siantar, bahwa 7 orang di antaranya dapat ditangkap kembali.

Jumlah 217 itu hampir sepertiga dari jumlah seluruh penghuni penjara, dan mereka melarikan diri setelah lebih dulu merampas pistol sipir. (*Antara*, 17/9/1949)

* Misi Amerika yang dinamakan *Far Eastern Survey Mission* dalam kunjungannya ke seluruh daerah Asia Timur akan tiba di Indonesia pada 26/9 yad.

  Menurut rencana, misi ini pada 27/9 akan mengadakan pembicaraan di Jakarta, esoknya berkunjung ke Yogyakarta, dan pada 29/9 meninggalkan Indonesia.

  Kepada *Antara* Direktur Kabinet HVK, Dr. Koets, menyatakan bahwa ia tidak merasa bahwa kunjungan misi ini ada hubungan dengan perundingan Belanda-Indonesia yang sedang berlangsung di Den Haag sekarang, sebab yang dikunjunginya bukan hanya Indonesia, tapi juga negara-negara Asia Timur lain.

  "Waktu kedatangan mereka ini bersamaan dengan waktu perundingan-perundingan itu adalah suatu hal yang kebetulan. Dan melihat kepada waktu perkunjungannya ke Indonesia hanya begitu singkat saja, berartilah perkunjungan mereka ini hanya sebagai suatu orientasi saja," demikian Dr. Koets.

  Misi ini terdiri dari M. G. Burnside (ketua), dengan anggota Walter B. Huber, R. Walter Diehlman, Harold O. Lovre, Charles B. Deane yang semuanya anggota Kongres, Mayor Wayne W. Thompson dari Angkatan Udara, Allen D. Moreland dari Kementerian Luar Negeri, dan William A. Young dari Staf Kongres. (*Antara*, 16/9/1949)

1949 SEPTEMBER 17.

* Wakil Ketua INP, Ch. R. Cotey, hari Jumat menghadap Presiden, dan sampai satu setengah jam berbicara mengenai soal kaum Indo. Kepada *Antara* ia menerangkan bahwa Presiden Sukarno bersimpati besar terhadap kaum Indo. 90% kaum Indo dengan sukarela ingin menjadi warga negara Indonesia.

  Cotey mengatakan, baginya Presiden Sukarno adalah pemimpin besar yang pasti akan diterima oleh kaum Indo sebagai Presiden pertama RIS.

  Ditanya tentang apa sebab INP memilih *stelsel passief*, ia menjawab bahwa menurut *stelsel passief* dasar-dasar demokrasi RIS tidak diperkosa, dan *rasdiscriminatie* (diskriminasi rasial) tercegah. (Seperti diketahui, Republik pun sudah punya undang-undang kewarganegaraan yang dasarnya *systeem passief* bagi kaum peranakan.)

Cotey mengatakan juga, *stelsel passief* meringankan administrasi RIS, sebab 80% kaum Indo adalah pegawai. Ia berpendapat sudah seadilnya jika 1 juta kaum Indo di antaranya 90% buta politik itu diberi kesempatan memilih *systeem passief* dengan hak *repudiatie*.

"Kini golongan Indo diberi propaganda salah oleh golongan reaksioner yang dibantu surat-surat kabar Belanda, sehingga jika pada permulaan RIS golongan Indo tidak diberi kesempatan mengalami perubahan baru di masyarakat Indonesia (yaitu kalau bagi mereka diadakan systeem actief), pastilah mereka akan salah pilih, yakni memilih menjadi warga negara Belanda," demikian Cotey. (*Antara*, 18/9/1949)

* Untuk mengatasi kebuntuan dalam perundingan di Konferensi Meja Bundar (KMB), dibentuk panitia kecil terdiri atas Van Roijen, Rum, dan Anak Agung Gde Agung. Mereka berunding sendiri (tanpa UNCI) di Namur, tempat kecil di Belgia yang terkenal sebagai pusat perjudian, tapi waktu itu sedang sepi. (AT289)

* Ir. Suwarno sebagai kurir ke-II Delegasi Republik Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) tiba di Yogyakarta untuk melaporkan jalannya KMB kepada Pemerintah Indonesia. (*KU127*)

* Empat puluh orang pedagang/perusahaan terkemuka di Yogyakarta telah memutuskan dalam pertemuan Kamis malam (15/9) untuk mengadakan Konferensi Ekonomi Inter Indonesia di Yogyakarta dengan mengundang pedagang dan pengusaha Indonesia dari seluruh kepulauan. Tujuan konferensi ialah:

1. Memajukan persatuan seluruh pedagang/pengusaha bangsa Indonesia, dan membantu usaha Pemerintah Nasional dalam melaksanakan program ekonomi.
2. Mempersatukan modal, pikiran dan tenaga untuk menyelenggarakan segala usaha di lapangan perdagangan, perindustrian, bank dan pengangkutan modern.
3. Membantu moril dan materiil rencana ekonomi yang telah mendapat persetujuan permusyawaratan Inter Indonesia.

* Kapan konferensi akan dilakukan, masih akan ditentukan.

* Pertemuan malam itu dipimpin oleh Ramelan, Wakil Ketua Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE) dan pemilik pabrik teh.

  Dalam kesempatan itu Menteri Kasimo menegaskan, sudah menjadi kewajiban bagi pedagang dan pengusaha untuk membantu negara meningkatkan mutu penghidupan rakyat. (*Antara*, 17/9/1949)

* Pemerintah Republik Indonesia (RI) melarang kongres gerilya yang akan diadakan pada 17 Agustus 1949 di Prambanan di bawah pimpinan seorang pemuka Partai Komunis Indonesia (PKI) Merah bernama Djoni. (*LUxxi*)

  Berita "UP" yang mengatakan bahwa *initiatiefnemer* (pemrakarsa) kongres, Moh. Djoni, adalah Ketua Partai Murba, keliru. PKI Merah bukan anggota FDR, dan di masa pemerintahan Amir Sjarifuddin merupakan partai oposisi. (*Antara*, 18/9/1949)

* Golongan Arab Surakarta dalam rapatnya hari ini telah mengambil resolusi berisi tuntutan agar daerah Surakarta dikembalikan selekas mungkin kepada Pemerintah Republik menurut status sebelum 19 Desember 1948. Alasannya, karena Pemerintah Republik adalah satu-satunya pemerintah yang dapat menjamin keamanan dan ketenteraman daerah Surakarta. (*Antara*, 26/9/1949)

* Tentang berdirinya Gerakan Muslimin Indonesia (GMI) di Bandung, Moh. Natsir mengatakan: "Baik, karena GMI patut berdiri melihat suasana sekarang, asal saja langkah-langkah GMI ini tidak bertentangan dengan tujuan Masyumi."

  Menurut Natsir, tujuan GMI akan sama dengan Masyumi, walaupun demikian, jika keadaan menghendaki GMI harus bergabung dengan Masyumi.

  Seperti diketahui, Moh. Natsir tiba di Bandung kemarin untuk memberikan *preadvies* (sambutan) dalam muktamar GMI. (*Antara*, 18/9/1949)

* Sesuai rencana Jawatan Candu dan Garam Yogyakarta sebelum Aksi Militer Belanda II, akhir tahun ini 25.000 orang pemadat akan berhenti

menjadi pemadat karena dikuranginya ransum madat bulanan. Dalam keadaan biasa, dalam sebulan para pemadat membutuhkan 200 kg candu. Kini ransum candu hanya diberikan kepada 600 pemadat di daerah Yogyakarta, di antaranya 200 orang Tionghoa yang tiap bulan membutuhkan 8 kg candu. (*Antara*, 17/9/1949)

* Diperoleh kabar bahwa dua surat kabar yang sebelum perang terbit di Jakarta—*Pemandangan* dan *Java Bode*—bulan depan akan terbit kembali. Keduanya dengan orang-orang yang lama: yang pertama a.l. dengan Mr. Sumanang dan Anwar Tjokroaminoto. Nomor contoh untuk "Pemandangan" mungkin akan keluar pada 20/9.

  Sementara itu *Sumber*—surat kabar sesudah perang yang mati karena *breidel*—akan terbit juga kembali.

  Dengan terbitnya kembali *Java Bode*, surat kabar *Het Dagblad* dimatikan. Surat kabar ini diterbitkan sesudah perang oleh Nederlandse Dagbladpers sebagai gabungan 3 surat kabar sebelum perang, yaitu *Het Nieuws van den Dag, De Java Bode* dan *Het Bataviaasch Nieuwsblad*.

  Het Bataviaasch Nieuwsblad telah terbit kembali beberapa waktu yang lalu lepas dari gabungannya, yang menurut *Het Dagblad* tanpa memberitahu dan dengan menyalahi janji, maka dengan sendirinya gabungan berupa *Het Dagblad* tidak diperlukan lagi, dan *Java Bode* akan diterbitkan kembali.

  Mengenai *Het Nieuws van den Dag* belum ada kabar. Dengan terbitnya kembali tiga surat kabar tersebut di atas, di Jakarta akan terbit 5 harian Indonesia, 3 harian Belanda, dan 3 harian Tionghoa-Indonesia. (*Antara*, 17/9/1949)

* Kesatuan Pemuda Rakyat Murba, salah satu badan perjuangan yang didirikan sejak Renville, menggabungkan diri dengan TNI pimpinan Mayor Rukman. Dengan ini di Cirebon tak ada lagi badan perjuangan di luar TNI, kecuali DI.

  Akhir-akhir ini banyak orang pindah dari daerah-daerah yang dikuasai oleh DI, kabarnya karena adanya ancaman terhadap para pemimpin dan anggota DI yang menggabungkan diri dengan TNI. DI terdapat terutama di daerah Indramayu (Losarang, Jatibarang, Karangampel). (*Antara*, 17/9/1949)

1949 September 18.

* Hari ini telah diadakan rapat pembentukan Persatuan Indonesia Raya yang dihadiri oleh Mr. Latuharhary (anggota Dewan Partai Yogyakarta) dan De Quelyu (ketua PIR Jakarta). Dalam kesempatan tersebut baik Mr. Latuharhary maupun De Quelyu memberikan penjelasan mengenai asas dan tujuan partai serta kewajiban kaum *intelektuelen* masa kini.

  Panitia pembentukan terdiri atas Abdurrachman (ketua), Dr. Mohede (wakil ketua), Mohamad Sjarfie (bendahari), Burhanan (penulis), dan Rd. Djajusman (pembantu).

* Atas permintaan hadirin, rapat pembentukan pengurus diundurkan sampai pekan depan, dan dalam kesempatan itu Mr. Wongsonegoro akan diminta mengucapkan pidato. (*Antara*, 19/9/1949)

* Pengurus Besar Gasida mengharapkan, mudah-mudahan dengan dukungan rakyat, provokasi licin dari orang atau golongan yang hendak menggagalkan maksud baik Pemerintah dapat ditindak dengan tepat.

  Selanjutnya Pengurus Besar Gasida menyerukan kepada seluruh cabang-nya agar berusaha bekerja sama dengan Pemerintah dalam mengatasi kemelut ekonomi yang sedang dihadapi bersama. (TS233)

* Direktur Pesindo Trading Company (Petraco) H.M. Zainuddin menyatakan kepada wartawan *Semangat Merdeka* bahwa untuk mencapai perekonomian yang sehat dan lancar, rakyat juga harus mencurahkan perhatian pada pertanian.

  "Kalau pertanian tidak maju dan petani tidak bergiat melipatgandakan hasil bumi, dengan sendirinya negara tidak akan makmur dan perdagangan akan mundur," demikian katanya. "Agar segala kesulitan yang kita hadapi sekarang dapat diatasi, kita semua harus membantu usaha Pemerintah."

  Petraco sendiri telah mendatangkan bibit sayuran seperti lobak, sawi putih dan kol dari luar negeri, yang akan dibagi-bagikan kepada petani dengan cuma-cuma lewat Jawatan Pertanian Sumatra Utara di Kotaraja (sekarang Banda Aceh). (TS235)

* Di Malalayang, 6 km dari Manado, di rumah orang tua Wolter Monginsidi, hari ini telah dilangsungkan upacara adat memperingati wafat Wolter Monginsidi. Hadir a.l. para pemimpin partai *republikein* Barisan Nasional Indonesia, PSI, dan KRIS.

* Ketua PSI Kartawinata mengucapkan pidato, demikian juga wakil KRIS dll. Wakil BNI, Dauhan, mengucapkan kata penghibur: “Tak ada korban hilang terbuang, Pahlawan Monginsidi gugur bukan sia-sia.”

  Upacara berlangsung 4 jam. Juga di Kawangkoan pada jam yang sama diadakan rapat terbuka di bawah pimpinan Madjid, dilengkapi dengan mengheningkan cipta dan pembacaan riwayat hidup singkat Wolter Monginsidi. (*Antara*, 20/9/1949)

* Pencalonan untuk menjadi anggota Parlemen NIT di daerah Sulawesi Utara telah siap. Pemilihan akan diadakan pertengahan Oktober. Daerah Sangir untuk 2 anggota mencalonkan hanya 2 orang, ialah Dauhan dan Tatengkeng, keduanya dari Barisan Nasional Indonesia. Minahasa mencalonkan 20 orang untuk 2 anggota. Barisan Nasional Indonesia, dan PSII masing-masing memajukan Tumbel dan Madjid. Gorontalo-Mongondow memajukan 7 calon untuk 2 anggota. PSII dan Barisan Nasional Indonesia mencalonkan 1 orang, yaitu Ketua PSII NIT, Kartawinata.
  (*Antara*, 18/9/1949)

* Harian Siam berbahasa Inggris *Liberty* yang terbit di Bangkok mengumumkan pada 15 September bahwa kabinet Siam dalam sidang kabinet terakhir telah mengakui de facto Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan. Pengumuman itu diberikan oleh Letnan Jenderal Luang Romashita Phikang, Direktur Jenderal Kementerian Penerangan Siam, dalam suatu pers konferensi.

  Tidak diterangkan lebih lanjut, apakah yang dimaksud dengan Pemerintah Indonesia itu Pemerintah Republik atau “Indonesia” (Belanda). (*Antara*, 18/9/1949)

1949 SEPTEMBER 19.

* Karena panitia kecil yang dibentuk untuk memecahkan kebuntuan dalam perundingan KMB masih mengalami kesulitan, maka hari ini Merle

Cochran dari UNCI diminta hadir sebagai perorangan pribadi dalam perundingan.

Berkat bantuannya, hari ini juga persetujuan tentang segala hal (*agreements on all matters*) tercapai. Rumusan Cochran tentang Kepala Uni dapat disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu: *The Head of the Union symbolizes and personifies the voluntary and lasting cooperation between the Union Partners* (Kepala Uni melambangkan dan menjelmakan kerja sama sukarela dan kekal antara sekutu-sekutu Uni).

Rumusan tentang Uni berbunyi: *The Union shall effectuate cooperation in the field of foreign relations. Where both Union Partners feel that it is in their interests and so decide, the conference of Ministers may provide for joint of common representation in international intercourse* (Uni akan memungkinkan kerja sama di bidang hubungan luar negeri. Apabila kedua belah sekutu merasa bahwa demikian itu akan sesuai dengan kepentingan mereka dan memutuskan demikian, maka Konferensi menteri-menteri bisa memutuskan untuk mengadakan perwakilan gabungan atau bersama di dalam hubungan internasional.) (AT290)

* Kalangan yang amat bisa dipercaya dan amat mengetahui di Jakarta menerangkan kepada wartawan politik *Antara* bahwa telah tercapai persetujuan antara Indonesia dan Belanda mengenai tanggal penyerahan kedaulatan. Menurut kalangan tersebut, penyerahan kedaulatan akan dilakukan pada 1 Januari 1950.

Menjawab pertanyaan, apakah itu berarti bahwa semua soal sekitar perbedaan pendirian kedua pihak mengenai pasal-pasal ekonomi, keuangan dsb. yang sekarang kelihatan belum selesai sebenarnya telah diselesaikan di belakang layar, kalangan tersebut tidak dapat memberikan keterangan. Pengumuman mengenai penyerahan kedaulatan tersebut oleh kedua pihak akan dilakukan tidak lama lagi, mungkin antara 19-21 September. Kalangan tersebut menambahkan bahwa persetujuan ini dapat dicapai dengan cepat karena desakan Amerika Serikat yang menghendaki beresnya keadaan di Indonesia sehubungan dengan keadaan umum di Asia sekarang. (*Antara*, 19/9/1949)

* Pertemuan ramah-tamah “Jawa Timur” yang dipimpin oleh Bung Tomo dan dihadiri oleh l.k. 300 pengungsi dari Jawa Timur kemarin

memutuskan untuk memajukan permohonan kepada Pemerintah agar jangan sampai TNI Jawa Timur dihijrahkan dari daerah tersebut.

Dalam pertemuan itu pun dibentuk kontakbiro untuk menolong para pengungsi tersebut dalam bidang sosial dan ekonomi. (*Antara*, 20/9/1949)

* Menurut berita terlambat dari Cirebon, Suiman, anak umur 13 tahun, pelajar sekolah menengah Islam kelas I di kota tersebut, pagi pada 15/9 di Jalan Kejaksaan telah dipukul dan ditendang oleh seorang tentara KNIL karena anak itu mengabaikan perintah yang diberikan sampai 3 kali untuk melepaskan lencana dan bendera Merah Putih dari sepedanya.

  Kemudian anak itu menghentikan jeep MP yang lewat, dan bertanya apakah pemakaian Merah Putih masih dilarang, tetapi MP itu tidak memberikan jawaban yang memuaskan. (*Antara*, 19/9/1949)

* Pemuda Indonesia Pasundan yang didirikan pada 28 Februari 1949 kini telah berganti nama menjadi Pemuda Kebangsaan Indonesia, disingkat Pekindo.

  Pada 18 September organisasi tersebut telah mengirim surat kepada Ketua Parlemen Sementara Pasundan yang isinya a.l. mendesak supaya diusahakan kebebasan berdirinya organisasi-organisasi pemuda lainnya di Pasundan, sesuai dengan hasil konferensi pemuda baru-baru ini di Yogyakarta. Juga mengingat bahwa di NIT kini telah berdiri tak kurang dari 60 organisasi pemuda.

  Pada penutup surat tersebut dinyatakan bahwa Pekindo tidak terikat pada salah satu partai politik di Pasundan. (*Antara*, 20/9/1949)

* Berhubung dengan adanya persetujuan sementara untuk meng-“kazerneer” TNI, sebagian daerah di Bogor telah ditinggalkan pasukan TNI, dan daerah-daerah itu kini menjadi tidak aman.

  Di daerah Dramaga keadaan di enam tempat kurang terpelihara, hingga penduduk minta agar pasukan TNI tidak ditarik, bahkan sebaliknya dimasukkan ke daerah-daerah yang lebih luas lagi. (*Antara*, 19/1949)

* Rombongan *Indonesian Federal Commercial Organisation* (IFCO) sebagai utusan Pemerintah Pusat tiba hari ini di Kotaraja (sekarang Banda

Aceh). Rombongan terdiri dari Widyo Kartono, Presiden Direktur IFCO, Sarwono, Kepala Bagian Inter-Islands, Abdullah, Kepala Bagian Batik, dan Junus Anis, Bagian Perhubungan.

Widyo Kartono menerangkan, kedatangan rombongan ini adalah atas permintaan Wakil Perdana Menteri, untuk mengusahakan pembukaan industri batik di Aceh. Rombongan akan melakukan peninjauan untuk melihat potensi ekspor daerah ini. Dan dalam waktu dekat akan dibuka hubungan praktis dan cepat demi kelancaran usaha perekonomian antara Yogyakarta dan Kotaraja.

Dalam hal batik, di Aceh akan dibuka sekolah pembatikan untuk mendidik tenaga pembatikan. Rombongan merasa optimis usaha tersebut akan berhasil, mengingat Aceh kaya akan bahan keperluan batik. (TS235)

* Rakyat Titawaay (Ambon) menghalangi usaha Sersan Tomasoa, propagandis Persatuan Timur Besar di Nusalaut, untuk mengadakan rapat di sana beberapa hari yang lalu. Usaha untuk mengadakan rapat di gereja pun ditolak oleh majelis gereja. Penolakan-penolakan tersebut dinyatakan sebagai tanda setia rakyat kepada NIT. (*Antara*, 20/9/1949)

* Menteri Keuangan Inggris Sir Stafford Cripps mengeluarkan pengumuman tentang devaluasi Poundsterling Inggris. (*KU127*)

1949 September 20.

* Hari ini (20/9) Pemerintah Republik, diwakili oleh Mr. Susanto dan Mr. Wongsonegoro, dalam sidang tertutup memberi keterangan kepada BP KNIP tentang perundingan KMB.

Atas pertanyaan *Antara*, apakah keterangan Pemerintah itu tidak mungkin sudah didahului oleh kenyataan (*achterhaald door de feiten*), Susanto menjawab “mungkin, sebab laporan mengenai perundingan sebelum diadakan *week-end*”.

Selanjutnya didapat kabar, bahwa dalam keterangan Pemerintah itu a.l. ditegaskan bahwa kerja sama antara Republik dan BFO tetap terpelihara dengan baik. Dasar kerja sama itu telah disusun di Yogyakarta dan di Jakarta tempo hari, sehingga kini merupakan satu front. Antara Republik dan BFO ada persetujuan, bahwa tujuan KMB ialah penyerahan kedaulatan kepada RIS sebelum 1 Januari 1950. Soal-soal yang masuk dalam

perjanjian dengan Belanda nantinya hanya yang bersangkut-paut dengan kerja sama RIS-Belanda, sedangkan soal-soal yang masuk dalam kedaulatan RIS tidak menjadi acara KMB dan tidak masuk dalam perjanjian nanti. (*Antara*, 21/9/1949)

* Rapat HISSBI yang diadakan baru-baru ini telah mengesahkan program usaha pembentukan *vakcentrale* (konfederasi) seluruh Indonesia sbb.:

  Kesatu: Mengadakan penerangan-penerangan dengan rapat-rapat, penyiaran-penyiaran untuk membangunkan, menguatkan kesadaran kaum buruh untuk berorganisasi dalam serikat buruh.

  Kedua: Mengkoordinir serikat buruh berbagai daerah untuk mengadakan fusi di antara yang satu dan lain.

  Ketiga: Menyiapkan pembentukan satu *vakcentrale* seluruh Indonesia.

  Untuk itu dibentuk panitia *vakcentrale* pusat, panitia *vakcentrale* di kota industri dan daerah. Panitia berkewajiban antara lain mengumpulkan bahan untuk menyusun rencana organisasi dan rencana pekerjaan vakcentrale yang akan dibentuk dan mengadakan kongres pembentukannya.

  Selain itu rapat HISSBI memutuskan berdirinya dua badan dalam organisasinya, yakni legislatif terdiri dari 62 anggota diambil dari tiap wakil PB Serikat Buruh 2 orang, dan eksekutif terdiri dari 12 anggota. (*Antara*, 20/9/1949)

* Telah meninggal dunia dalam usia 40 tahun pada hari Sabtu yang lalu Ny. Djuhaeni Maskun karena *hersenvliesontsteking* (radang selaput otak), dan dimakamkan di Yogyakarta keesokan hatinya.

  Ny. Djuhaeni adalah istri Maskun, Penasihat Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang bersama Suwarni Pringgodigdo dan Susanna Hamdani merupakan tiga pelopor Isteri Sedar—gerakan wanita Indonesia pertama di bidang politik—pada 1927. (*Antara*, 20/9/1949)

* Rapat Sarbupri Minggu yang lalu yang dihadiri oleh wakil-wakil Sarbupri daerah Surakarta, Yogyakarta dan Kedu telah memutuskan hapusnya kontak-biro yang dibentuk pada 8 Agustus yang lalu dan mengesahkan duduk kembalinya dalam pucuk pimpinan: Ahem Erningpradja sebagai

Ketua I, Koordian Ketua II, Suparna Penulis Umum, Memed Bendahari, dengan Pembantu-pembantu Pengurus lama, serta Mr. Sumarno dan Hardjono sebagai Penasihat.

Diputuskan juga untuk minta kepada instansi yang berwajib agar memanggil nama-nama tersebut di atas, yang karena Peristiwa Madiun kini tidak diketahui tempatnya. (*Antara* 20/9/1949)

* Sejak kembalinya Republik di daerah Yogyakarta terdapat banyak penganggur. Daftar penganggur yang dibuat oleh Kementerian Perburuhan dan Sosial dari Juli sampai pertengahan September meliputi 9.144 orang, di antaranya 6.860 yang berhak atas sokongan, dan dari jumlah itu 3.050 sudah mendapat sokongan yang mencapai jumlah seluruhnya *f*43.000.

  Penyelidikan lebih lanjut menunjukkan, jumlah penganggur dari 10 pabrik dan perusahaan gula di Yogyakarta (akibat bumi hangus) mencapai 4.000 orang. Di Jawatan Kereta Api buruh nonkooperator-nonaktif yang masih menerima gaji 914 orang, kooperator-nonaktif tidak menerima gaji 1.098 orang. Di Kantor Pos buruh nonkooperator-nonaktif 132 orang, kooperator-nonaktif 36 orang. Di BIN penganggur 350 orang. Anggota Serikat Buruh Angkutan Bermotor 500 orang sudah bekerja, 400 masih menganggur.

  Untuk memberantas pengangguran, Kantor Penempatan Tenaga Pusat Kementerian Perburuhan dan Sosial memberikan secara cuma-cuma kursus pendidikan kader pertanian dan perkebunan, yaitu untuk *laagvlakte-cultuur*, *berg-cultuur*, mesin dan *fabrikage* gula, untuk masing-masing vak 6 bulan. 35% dari 200 peserta memilih vak mesin.

  Pun diberikan kursus gratis pertukangan, yaitu pembetulan mobil selama setahun, pendidikan tukang plat (bengkel) 6 bulan, di samping pelajaran ilmu kemasyarakatan. (*Antara*, 20/9/1949)

* Buruh kereta api Solo dalam kawatnya menyatakan tetap setia dan taat kepada Pemerintah Republik, sekalipun mereka telah bekerja pada pihak Belanda.

  Dinyatakan selanjutnya, mereka sanggup menjalankan segala perintah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik, dengan segala konsekuensinya. (*Antara*, 20/9/1949)

* Menurut komunike Kementerian Pertahanan, Dewan Siasat yang bersidang hari Senin telah membicarakan soal-soal yang bersangkutan dengan hasil perundingan berbagai panitia, a.l. tentang penyelenggaraan pasal 7 Rum-Van Roijen.

  Disebutkan juga bahwa wakil INP, Cotey, telah bertemu dengan Wakil Kepala Staf Angkatan Perang Kol. Djatikusumo, membicarakan kedudukan kaum Indo dalam ketentaraan RIS, dan umumnya dimufakati apa yang sudah menjadi persetujuan dalam Konferensi Inter Indonesia. (*Antara*, 21/9/1949)

* Hari ini diadakan rapat pembentukan Persatuan Isteri Buruh Indonesia dengan Ketua Ny. Sardjono, dan Penulis Ny. Maruto. Perkumpulan ini berasas mempersatukan dan mempereratkan persaudaraan isteri buruh, dengan tujuan memperkuat perjuangan kaum buruh. Usahanya a.l. memperbesar kerajinan rumah, mengadakan koperasi, memperhebat pemberantasan buta huruf, mengadakan *studiefonds*, penerangan tentang ilmu jiwa, budi pekerti, kesehatan rakyat, dan pemeliharaan bayi. (*Antara*, 22/9/1949)

* Pihak Inspeksi Perguruan Sekolah Menengah Pasundan di Bandung telah mengirim utusan untuk menyelidiki duduk perkara dan menyelesaikan peristiwa pemogokan murid Sekolah Menengah di Purwakarta.

  Menurut keterangan, sejak pemerintah pre-federal mencabut larangan memasang Merah Putih, murid-murid SM Purwakarta telah mengajukan permintaan kepada direktur sekolah dan guru-guru untuk mengibarkan bendera tersebut. Karena permintaan tidak juga dikabulkan, mereka pun melakukan pemogokan. (*Antara*, 21/9/1949)

* Wartawan *Antara* Sukrisno mengabarkan, bahwa dalam lomba pertunjukan budaya dalam rangka pertemuan pemuda segala bangsa yang diadakan di Budapest oleh WFDY (World Federation of Democratic Youth, Gabungan Pemuda Demokratik Sedunia) dan IUS (International Union of Students, Gabungan Pelajar-pelajar Sedunia), wakil Indonesia telah memperoleh hadiah pertama. (*Antara*, 20/9/1949)

* Hari ini telah berangkat ke Jakarta dari Yogyakarta ketua Indonesian goodwill mission ke Saudi Arabia, Teuku Sjech Abdul Hamid, ulama

Aceh, dengan anggota rombongan Moh. Nur Ibrahim dan Ali Alhasjimi, keduanya dari Aceh, Abd. Kahar Muzakkir, guru besar Islam University Yogyakarta, Syekh Awas Sjachbal, bekas Kapten Arab Solo, dan Haji Samsjir dari Solo.

Maksud misi ialah menyampaikan amanat Presiden Sukarno kepada Raja Ibn Saud dan merapatkan tali persaudaraan dengan rakyat negeri-negeri Islam lainnya, juga untuk menunaikan ibadah haji.

Surat Presiden Sukarno kepada Raja Ibn Saud itu disimpan dalam kotak perak. Selain itu akan diserahkan suvenir berupa tongkat yang seluruhnya terbuat dari gading. (*Antara*, 21/9/1949)

* Di Simpang Teritit, Takengon, diselenggarakan bermacam permainan seperti didong, stambul Jawa, canang dll. dalam rangka penggalangan dana untuk Panitia Penyokong Yogya.

  Sementara itu dalam kunjungannya ke Takengon, Nyonya Kolonel Hidajat telah memberikan ceramah di hadapan pengurus dan anggota organisasi-organisasi wanita Takengon. Dalam ceramah itu Ny. Hidajat menguraikan keadaan di Yogyakarta selama diduduki Belanda.

  "Istri-istri kaum *Republikein* merasakan pahit getirnya penanggungan akibat perlakuan Belanda. Selama pendudukan itu, wanita Yogya berkorban lahir-batin menyokong para suami yang berjuang mempertahankan kemerdekaan," demikian Ny. Hidajat. "Para suami yang berjuang mati-matian menghadapi Belanda harus mendapat sokongan sekuat-kuatnya dari kaum wanita. Bahkan bila diperlukan, wanita pun harus siap menggantikannya." (TS235-236)

* *Antara* mendapat kabar dari Florence, Italia, bahwa dua serangkai pelukis Indonesia terkenal, Agus Djaja dan Otto Djaja, kini sedang berada di sana.

  Kedua saudara itu sedang mempelajari seni rupa dan seluk-beluk organisasi museum dan akademi di Italia, Swiss, Spanyol, Perancis, Belgia dll. (*Antara*, 20/9/1949)

1949 SEPTEMBER 21.

* Sarekat Buruh Kehutanan akan berkongres mulai tanggal 17 hingga 21 Oktober di Yogyakarta untuk menentukan bentuk, aliran, dan program

usaha. Cabang-cabang serikat buruh tersebut akan mengirimkan 2 orang utusan dan satu utusan untuk SBK keresidenan. Seusai kongres akan diadakan konferensi dengan SBK Pasundan. (*Antara*, 21/9/1949)

* Presiden Direktur NV “Marba” F. Martak, tidak dapat memberikan keterangan lengkap, berapa harga hotel “Merdeka” dan “Tugu” di Yogyakarta yang telah dibelinya, tetapi dapat diduga di atas satu juta rupiah. “Marba” membeli kedua hotel itu dari bank “Escompto” yang memegang 65% andilnya. Siapa pemegang 35% selebihnya, tidak diketahui.

  Martak menerangkan bahwa pembelian ini sudah disetujui oleh para pejabat Republik. Telah pula disetujui pembukaan cabang “Marba” di Yogyakarta.

  Pada 29/9 Martak akan berangkat ke Kairo untuk urusan pembukaan cabang baru di sana, setelah itu meneruskan perjalanan ke Eropa. (*Antara*, 21/9/1949)

* Partai Rakyat Pasundan kemarin dilebur menjadi Partai Rakyat Demokrasi Indonesia (PRDI), dengan anggaran dasar yang baru pula. Asas dan tujuan PRDI adalah mencapai kesempurnaan dan kemuliaan negara Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ke luar dan ke dalam, berdasarkan demokrasi, nasionalistis dan berbentuk federalistis (kerakyatan, kebangsaan dan berbentuk serikat).

  Susunan pengurus PRDI: Ketua Suria Kartalegawa, Wakil Ketua I M.S. Judawinata, Wakil Ketua II H. Djunaedi, dan Sekretaris Hidajat Sondjaja. (*Antara*, 21/9/1949)

* Sebuah mosi yang diajukan dalam sidang Parlemen Pasundan menyatakan bahwa anggota parlemen tidak boleh merangkap dua pekerjaan, dan Parlemen telah mengesahkan mosi tersebut.

  Mereka yang tidak dibolehkan merangkap dua pekerjaan adalah: Wali Negara, menteri, direktur kabinet, sekretaris jenderal, residen, bupati, wali kota, sekretaris jenderal kementerian, direktur kabinet Wali Negara, ketua dan anggota pengadilan tinggi, dan pokrol jenderal. (*Antara*, 21/9/1949)

* Sidang parlemen sementara Pasundan yang menurut rencana semula akan dilangsungkan sampai Rabu yang lalu diperpanjang sampai Rabu 28 September.

  Peraturan pemilihan untuk anggota parlemen mendatang ini sudah dibicarakan dalam 4 seksi. Umumnya suara dalam seksi-seksi menunjukkan sikap sementara tidak menyetujui adanya pemilihan.

  Usul Parki yang menghendaki agar semua anggota parlemen dipilih, agar seluruh Pasundan menjadi satu kiesdistrik, agar tahun ini juga diadakan pemilihan, dan agar pemilih berumur 18 tahun, rupanya ditolak. Alasannya ialah karena semuanya perlu menunggu hasil perundingan KMB, dan karena teknis akan sukar menyelenggarakan pemilihan yang bertentangan dengan asas-asas Renville. Pendapat seksi-seksi itu akan disampaikan kepada pemerintah dan belum dibicarakan dalam sidang pleno.

  Dalam beberapa hari ini parlemen akan membicarakan mosi tentang huisvesting dan gedung-gedung sekolah yang masih dipakai oleh bermacam instansi, dan tentang perubahan dalam anggaran belanja pada 1949. (*Antara*, 22/9/1949)

* Rombongan delegasi wanita Aceh ke Kongres Wanita Seluruh Indonesia di Yogyakarta telah tiba kembali di Kutaraja (sekarang Banda Aceh).

  Ny. Munir, salah seorang anggota delegasi, menguraikan pertemuan delegasi selama 2 jam dengan Presiden Sukarno. Dalam kesempatan itu Presiden menyatakan: “Saya tidak menduga bahwa Aceh sanggup datang kemari, berhubung dengan kesulitan perhubungan. Tetapi saya berkeyakinan sungguh, wanita Aceh tidak akan mau ketinggalan dalam permusyawaratan wanita ini.” Presiden pun menyatakan penghargaannya atas kesanggupan wanita Aceh menghadiri kongres tersebut.

  Ny. Munir mengatakan, di mana saja mereka tiba selalu dikerumuni wartawan yang mencari berita tentang Daerah Modal ini.

  Sementara itu hubungan silaturahmi antara wanita seluruh Indonesia sangat erat dan bagus sekali. Dari Aceh yang berbicara dalam kongres adalah Ny. Saribanun Daud, yang mendapat sambutan meriah.

  “Wanita di sana lebih maju dari wanita di sini. Di sana telah ada dokter, mahasiswa, wartawan, fotograf dll. wanita. Kita boleh bangga bahwa

wanita Indonesia tidak kalah dengan wanita negeri lain," demikian Ny. Munir. (TS236)

* Misi Dagang Republik Indonesia yang diwakili IFCO mengadakan pertemuan khusus dengan Pengurus Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (Gasida). Dalam kesempatan itu seorang anggota IFCO menjelaskan status IFCO sebagai badan partikelir yang mendapat kepercayaan dari Pemerintah untuk melancarkan jalannya perekonomian, di dalam dan luar negeri.

  Diungkapkannya betapa morat-marit perekonomian Indonesia di masa lampau, dan diharapkannya bahwa di masa merdeka ini kita akan dapat memupuk semangat dagang dan ekonomi. Tujuan dan usaha IFCO adalah memasukkan barang-barang untuk Pemerintah, dan melakukan kontak dengan maskapai-maskapai besar luar negeri.

  IFCO pun mengharapkan kerja sama dengan Gasida. IFCO akan meminta konsesi dan mendirikan perwakilan di Aceh. Karena sudah majunya perusahaan batik di Jawa, dan bahan-bahan cukup banyak terdapat di Aceh, maka IFCO percaya Daerah Aceh dapat menjadi daerah batik terkenal sesudah Jawa. (TS237)

* Ketua Delegasi Belanda Mr. Jacob datang di Yogyakarta untuk menyampaikan usul kepada Pemerintah Republik mengenai pemerintahan bersama di Jawa Timur dan Jawa Barat. (*KU127*)

1949 SEPTEMBER 22.

* Di Istana Presiden hari Rabu yang lalu telah dilakukan upacara pelantikan Kol. Bambang Sugeng, Gubernur Militer Jawa Tengah, menjadi Wakil I Kepala Staf Angkatan Perang. Upacara dihadiri a.l. oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Besar. (*Antara,* 23/9/1949)

* Baik kalangan Islam maupun tentara di Jawa Tengah dan Jawa Timur menyangkal kebenaran berita yang dimuat oleh surat-surat kabar Belanda pada tanggal 16 yang lalu berjudul "Communisten tegen Islam".

  Bunyi "berita" itu sbb.:

  "Menurut berita dari Surabaya, kegiatan kaum komunis di Jawa Timur pada waktu yang akhir-akhir ini makin hari makin hebat, ditujukan terhadap

kaum Muslimin. Di Blitar sebuah sekolah agama dibakar dan sebuah menara dirusakkan. Di Dawuhan Wetan orang-orang Islam dihina dan anjing-anjing dilepaskan dalam langgar, sedang beberapa kyai dirampok. Di daerah Kediri beberapa kyai diculik dan dibunuh. Di Malang Selatan beberapa Masjid dirusak dan Qur'an dirobek dan dilempar ke jalan besar."

Membaca "berita" yang tidak ketentuan tempat dan tanggal terjadinya itu, Acting Ketua Umum Masyumi Mr. Kasman Singodimedjo menerangkan bahwa di daerah tersebut sesudah affaire Madiun tidak pernah terjadi hal-hal seperti itu. Kalau terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, itu bukan antara "merah" dan "Islam", tetapi antara orang-orang Islam sendiri yang kurang mengerti keislamannya, sebab menurut pendapatnya, komunis atau bukan komunis orang Indonesia umumnya adalah Islam.

Kasman berpendapat, dengan pekabaran serupa itu soal kecil-kecil mau dibesar-besarkan dengan maksud politik. Kolonel Sungkono sebagai komandan TNI di Jawa Timur menerangkan bahwa apa yang disebut "merah" yang bersenjata di daerahnya, sekarang semuanya di bawah *kontrole*-nya dan tunduk pada TNI. Yang paling kiri yang disebut "merah" dan paling antimerah yang disebut "Darul Islam" (menurut anggapan umum), di Jawa Timur tidak ada.

Menurut pembantu *Antara* di Surabaya, seorang pemimpin Islam terkemuka di Jawa Timur yang mempunyai beribu-ribu pengikut berpendapat bahwa berita mengenai "aktiviteit komunis" di Jawa Timur itu dilebih-lebihkan. Paham Islam dan komunis memang tidak sejalan, dan karenanya memang kadang-kadang terjadi pertentangan. Seorang pemuka Islam lainnya menyatakan tidak percaya telah terjadi hal-hal seperti diberitakan oleh surat-surat kabar Belanda itu. (*Antara*, 22/9/1949)

* "Dua macam tugas kewajiban yang terpikul bagi kita di Sumatra sekarang ialah melaksanakan hal-hal yang telah kita setujui di dalam RR-Statements dan menjalankan pemerintahan di daerah-daerah dalam kekuasaan Republik," demikian diterangkan oleh Mr. T. M. Hasan, bekas Gubernur Sumatra yang menjadi anggota delegasi Republik, tentang keadaan di Sumatra sekarang.

* Dikatakannya selanjutnya:

“Tentang pelaksanaan RR-Statements itu kita telah melihat tanda-tanda permulaan yang baik, yaitu berjalannya perintah penghentian tembak-menembak yang pada umumnya lebih baik dari di Jawa.

Dalam menjalankan pemerintahan masih terasa beberapa kesulitan yang perlu diatasi, pertama soal perhubungan antara Wakil Perdana Menteri di Sumatra, Mr. Sjafruddin, dengan para gubernur militer, dan perhubungan di dalam daerah-daerah para gubernur itu sendiri. Berhubung dengan itu pengembalian Bukittinggi kepada Republik merupakan faktor penting sekali, karena kedudukannya yang sentral.

Dan kedua, mulai terasa adanya anasir-anasir yang mungkin dapat memecah persatuan partai-partai politik di Sumatra. Karena itu Mr. Sjafruddin dalam menanggung beban yang berat ini seharusnya dibantu oleh badan penasihat yang terutama terdiri dari wakil-wakil partai. Dengan demikian ’*democratiseering*’ dalam pemerintahan dapat lebih dipenuhi. Lain halnya dengan Wakil Perdana Menteri di Jawa, Sultan Hamengku Buwono, yang senantiasa mendapat bantuan dari Kabinet dan Dewan Perwakilan Republik yang lengkap di Yogyakarta. Sementara itu harus kita ingat betul betapa rapat kedudukan Sumatra dengan Malaya. Tentang pergolakan suasana di Malaya sekarang, kita telah sama-sama mengetahui.”

Tentang kedudukan Sumatra dalam ekonomi diterangkannya bahwa jika pelabuhan-pelabuhan kita telah dapat dibuka kembali, dan blokade laut dihapuskan, akan lancar export bahan-bahan penting kita seperti minyak nilam, lada dan gambir sebagai barang spesifik dari Aceh, Tapanuli, Lampung dan Sumatra Barat, di samping bahan-bahan penting dari daerah lain seperti getah, tembakau, batu arang, kina dsb.

Tentang tawanan politik di Sumatra diterangkannya, telah tercapai persetujuan untuk memerdekakan mereka di September sebanyak 25%, di Oktober 50%, dan di November 25%. (*Antara*, 22/9/1949)

* Dengan maksud a.l. “mendatangkan buku-buku yang sangat penting bagi pembangunan, buku-buku pelajaran, majalah-majalah dll.”, di Jakarta telah dibentuk Gabungan Pedagang Buku Bangsa Indonesia, terdiri dari toko buku Bookstore Ganeça, Mariz’ Store, Elita, Tinta Mas, Martaco, Intrabook dll. (*Antara*, 22/91949)

* Akte NV “Bank Timur”, usaha Indonesia, ditandatangani dan disahkan oleh notaris di Semarang. Modal pertama *f*2.000.000,00 terbagi atas andil-andil dari *f*1.000,00 yang dibagi dalam dua bagian dari *f*500,00. Presiden Direktur adalah Mr. Djojoputranto. Di antara komisaris terdapat orang-orang Tionghoa, Drs. The Bing Liang dan Tan Liat Tiong. Tempat di bekas gedung “Taiwan Bank” yang pernah terbakar dan kini sudah diperbaiki. (*Antara*, 22/9/1949)

* Anggota parlemen Pasundan, Wirasupena, menyatakan bahwa semua rumah penjara dan rumah tahanan sudah berjejal-jejal, karenanya tak mungkin lagi memenuhi syarat kesehatan.

* Ia mengajukan pertanyaan tertulis kepada Pemerintah, dan minta keterangan, tindakan apa yang telah diambil Pemerintah untuk memperbaiki keadaan rumah-rumah penjara itu. Ia mengharap memperoleh penjelasan, berapa seharusnya isi rumah penjara, dan berapa isinya dewasa ini. (*Antara*, 23/9/1949)

* Kabar yang diterima dari Tasikmalaya menyatakan, hari-hari ini keadaan di sekitar Manonjaya keruh oleh serbuan pasukan-pasukan liar di luar TNI. Yang menjadi sasaran adalah desa Cikareo, Cibaregbeg, Panglayuan, Cibaur, dan Cibeber. Banyak rumah terbakar, dan banyak sekali penduduk mengungsi ke kota Manonjaya. (*Antara*, 22/9/1949)

* Kemarin telah tiba di Medan dari Tapanuli A. Hakim dan Nawi Harahap. A. Hakim adalah bekas Residen Republik di Tapanuli yang akan berangkat ke Den Haag via Jakarta sebagai penasihat delegasi Republik di KMB. Nawi adalah dari Front Kaum Republik (FKR) di Sibolga yang bersama dengan Letkol Kawilarang akan berangkat ke Jakarta guna mengadakan pembicaraan dengan CJB mengenai supply di Tapanuli. Turut juga dalam rombongan ini Mayor Djamin Ginting dan Maimun Habsjah dari LJC.

  Tentang Gerakan Abbas, Hakim menerangkan bahwa gerakan itu hanya disokong kelompok kecil; rakyat Tapanuli boleh dikata seluruhnya berjiwa Republikein. Gerakan Abbas terbatas hanya di kota-kota, dan kalau mengadakan rapat perlu dikawal.

Tentang Front Kaum Republik di Tapanuli, menurut Nawi, anggotanya 5.000 orang, tapi FKR tak dapat lagi bergerak, cuma ada di Tarutung, Padang Sidempuan dan Sibolga. FKR menghidupkan terus ideologi Republik. Hasil gerakan FKR terutama adalah bahwa pada 17 Agustus boleh dikibarkan Sang Saka Merah Putih tanpa syarat. (*Antara*. 23/91949)

* Wakil Perdana Menteri Mr. Sjafruddin Prawiranegara mengadakan konferensi ekonomi dengan para saudagar yang dihadiri oleh wakil-wakil Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (Gasida) dan Gabungan Saudagar Tionghoa dari Lhokseumawe dan Sigli.

Tujuan konferensi ialah memperkuat rencana Pemerintah di bidang ekonomi agar tercapai hasil yang memuaskan. Konferensi berhasil menyusun langkah-langkah ke arah perbaikan ekonomi.

Sementara itu dikabarkan bahwa di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) telah didirikan *Kamer van Koophandel* (Kamar Dagang) yang anggotanya adalah para saudagar dan karyawan. Didirikan pula *Commissie van Toezicht & Bijstand* (Komisi Pengawas dan Pendamping) untuk mengamati bank dengan anggota: 2 orang dari Gasida, 2 orang dari Gabungan Saudagar Tionghoa, dan seorang dari Pemerintah. (TS237)

* Wakil Perdana Menteri Mr. Sjafruddin Prawiranegara mengadakan pertemuan di tempat kediaman resminya di Kotaraja dengan wakil-wakil partai, pembesar sipil dan militer. Dalam kesempatan itu Perdana Menteri mengatakan a.l.:

"Kita akan berikhtiar terus menambah kemakmuran masyarakat dan mempertinggi peri kehidupan rakyat dengan jalan mengimpor barang-barang dari luar negeri dan memproduksi sendiri dengan industri yang ada dalam negeri kita.

[...] Untuk mencegah naiknya harga barang, hendaklah diberikan pengertian yang sesungguhnya kepada masyarakat, supaya anggota masyarakat tidak gila-gilaan membeli barang luks yang tidak begitu perlu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berlomba-lomba membeli, dengan sendirinya penjual pun berlomba-lomba pula menaikkan harga barang-barangnya. Akhirnya umum menjadi kecewa, karena harga barang melambung tinggi.

Penjualan barang kepada umum dengan memakai kupon akan diperluas kepada segenap rakyat, sehingga tiap rumah tangga akan mendapat bahagian membeli barang dengan harga yang murah.

[...] Sebuah panitia yang terdiri dari semua golongan penduduk akan dibentuk untuk mengatur penetapan harga barang pasaran dan juga untuk mengadakan pengawasan atas kurs.

Semoga dengan usaha yang akan dijalankan dalam waktu singkat ini, derajat hidup semua golongan masyarakat kita akan dapat kita perbaiki." (TS237-239)

* Atas nama Presiden RI, Wakil Perdana Menteri di Sumatra mengeluarkan Peraturan No. 2 1949 mengenai stabilisasi harga barang-barang yang penting bagi kehidupan rakyat sehari-hari.

  Untuk sementara waktu, sampai diadakan peraturan lebih lanjut, dilarang mengirim barang-barang dagangan ke luar daerah Sumatra Utara.

  Pelanggaran atas peraturan ini dapat dihukum kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp1.000.000,00 dan barang yang bersangkutan disita.

  Peraturan ini tidak berlaku bagi barang-barang yang pada hari ditetapkannya peraturan ini sudah mendapat ijin, sudah dibayar beanya, atau sudah ada di pelabuhan siap untuk dimuat. (TS239).

* Dari Jawatan Kesehatan Provinsi Sumatra Utara di Kotaraja diterima dengan selamat obat-obatan untuk Panglima Sudirman yang menderita sakit di daerah gerilyanya.

* Atas kiriman itu Panglima Sudirman menyatakan lewat surat yang ditulis tangan:

  Assalamu 'alaikum! Merdeka!

  Kiriman paduka Tuan sampai dua kali berupa obat suntik streptomycin sebanyak 20 flacon yang sangat penting, berharga dan berguna bagi kesehatan kami, telah kami terima dengan baik.

  Atas kiriman obat suntik tersebut, kami melahirkan rasa syukur dan gembira beserta ucapan beribu-ribu terima kasih.

Kami sangat terharu sewaktu menerima kiriman paduka Tuan, karena di dalam saat kami menderita kesulitan tentang dapatnya obat suntik tersebut, sekonyong-konyong datang pertolongan, mendapat kiriman obat dari paduka Tuan.

Semoga kita bersama tetap mendapat perlindungan Tuhan, sehingga selamatlah kita bersama dalam perjuangan yang berat, tetapi suci ini. Amin. (TS239-241)

1949 SEPTEMBER 23.

* Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim menyatakan kepada *Antara* bahwa ia belum yakin benar akan kemenangan Mao Tse Tung dan kemungkinan terbentuknya pemerintahan komunis di Tiongkok dalam waktu dekat. Pernyataan ini diberikan berhubung dengan datangnya berita-berita yang menyatakan bahwa Inggris dan Perancis berdiri di belakang Amerika Serikat dalam politiknya terhadap Tiongkok.

  Dikatakannya, kalaupun kemenangan Mao Tse Tung akan menambah bahaya komunisme di Asia, bangsa Indonesia tidak perlu menghiraukan soal itu, karena bagi bangsa Indonesia yang penting ialah menunjukkan sikap tegas: tidak akan memihak kepada siapa pun juga. Indonesia menghendaki sebagai negara merdeka terlepas dari pengaruh siapa pun, demikian Haji Agus Salim. (*Antara*, 23/9/1949)

* Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Sutardjo Kartohadikusumo, menyatakan kepada *Antara* bahwa yang mendorong DPA untuk membicarakan soal mempraktekkan hidup kekeluargaan dalam sidangnya mulai 24 September ini ialah adanya perbedaan filsafat tentang kebenaran dan keadilan antara Barat dan Timur.

  Menurut filsafat Barat, kebenaran dan keadilan ditimbulkan dari orang lain, sedang filsafat Timur menyatakan, kebenaran dan keadilan datang dari diri sendiri. Sebagai akibat pandangan pihak Barat ini, maka sebagai dasar kebenaran dan keadilan ini, golongan yang satu hendaknya dituntut oleh golongan lain, golongan majikan dituntut oleh golongan pekerja. Ini tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia yang mempunyai sendi dasar tolong-menolong.

  Menjawab pertanyaan apakah hidup kekeluargaan ini dapat dipraktekkan dalam masyarakat, Sutardjo menyatakan dapat, karena dasar Timur asli

ada pada rakyat Indonesia. Hidup kekeluargaan ini hendaknya dimulai dari masyarakat keluarga, meningkat ke rukun tetangga, ke jawatan, ke kementerian dst., hingga terdapat pertalian kekeluargaan antara rakyat dengan para pemimpin negara. Demikian Sutardjo Kartohadikusumo.

Selanjutnya dikabarkan oleh *Antara* Yogyakarta, bahwa dalam sidang peringatan tgl. 24 September nanti pidato peringatan akan diucapkan oleh Ketua DPA, disusul dengan amanat Presiden Sukarno. Sidang akan dihadiri oleh para menteri dan pembesar, anggota BP KNIP, wakil partai dan lembaga, wakil ulama dan golongan. Jalannya peringatan akan disiarkan lewat *RRI* mulai jam 19.30. (*Antara*, 23/9/1949)

* Menteri Perburuhan-Sosial Kusnan menerangkan kepada *Antara* bahwa pegawai Republik Indonesia di mana pun kedudukannya, yang sampai sekarang tetapi setia, jadi di luar Yogyakarta, peraturan mengenai hal itu akan dijalankan sesudah tercapai persetujuan tentang pasal 7 Rum-Van Roijen Statement.

Kedudukan mereka yang ada di luar daerah Renville masih dalam pembicaraan, tapi pemerintah tetap mempertahankan status di mana pegawai-pegawai sipil itu berada, sedangkan Belanda menghendaki agar mereka itu ditarik ke daerah Renville.

Diterangkan oleh Menteri, sudah dikeluarkan sejumlah 50.000 rupiah untuk menyokong mereka yang berada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Surakarta dan Bukittinggi. Pegawai-pegawai di daerah pendudukan yang sampai kini masih nonkooperatif, tidak usah khawatir tidak akan mendapat tempat di RIS nanti.

Sebagai penghargaan nyata Pemerintah Republik kepada pegawai yang setia disebutkan misalnya hadiah dan *verdubbeling* masa kerja selama nonkooperatif. Artinya, nonkooperasi selama 2 tahun dihitung sebagai masa kerja 4 tahun.

Menteri berpendapat, Republik harus memegang teguh peraturan. (*Antara*, 24/9/1949)

* Penduduk Kota Yogyakarta kini berjumlah 200.000 jiwa sedangkan sebelum Aksi Militer II sejuta, dan sebelum perang 1942 150.000 jiwa. Sungguhpun sudah berkurang dari sebelum Aksi Militer II, perumahan jauh dari mencukupi. Paling sedikit di Yogyakarta harus didirikan 500

rumah lagi, demikian keterangan Mr. Sudarisman, Wali Kota Yogyakarta. Ia menganjurkan supaya maskapai-maskapai perumahan menguruskan hal itu, lebih-lebih karena 100 rumah di kota ini menjadi rusak akibat pertempuran. (*Antara*, 24/9/1949)

* Pusat Pimpinan Sarekat Sekerja Persenjataan Indonesia telah tersusun kembali sbb.:

Ketua Umum I	Suhardjo;
Ketua Umum II	H. Subroto;
Penulis Umum I	Muchamad Chawas;
Penulis Umum II	Mochtar Affandie. (*Antara*, 24/9/1949)

* Di Surakarta berlangsung Konferensi Pemerintahan Militer Wilayah Surakarta, dihadiri oleh para pejabat camat ke atas, dipimpin oleh Letkol Mursito, Residen Sudiro, Kepala Polisi Negara Surakarta Sakah Sastranegara, dan Mayor Achmadi.

  Konferensi membahas dan memberikan *briefing* tentang *follow-up* roda pemerintahan sesudah berlakunya gencatan senjata Indonesia-Belanda. (*PEH92*)

* "Soal gerakan Darul Islam yang memproklamirkan Negara Islam Indonesia menurut pendapat Pemerintah Pasundan adalah soal yang tidak dapat dipecahkan secara lokal oleh Pemerintah Pasundan. Walaupun Darul Islam berpusat di Pasundan, tetapi politis gerakan ini mengenai pula Republik. Sikap Pemerintah secara politis harus dirumuskan dahulu dengan Republik," demikian bunyi surat PM Pasundan kepada ketua parlemen sebagai jawaban atas pertanyaan anggota Wiradiputra.

  Dinyatakan selanjutnya, apabila RIS sudah berdiri, soal tersebut juga menjadi soal RIS, karena proklamasi Darul Islam bertentangan dengan kedaulatan RIS. Gerakan Darul Islam tidak didukung oleh rakyat, tetapi hanya bersandar pada kekuatan senjata.

  Dewasa ini usaha Pemerintah Pasundan terhadap gerakan Darul Islam hanya terbatas pada penggunaan kekuatan polisi negara, dan di daerah-daerah yang diduduki TNI, bersama dengan TNI. Demikian bunyi surat tersebut selanjutnya.

Seperti diketahui, proklamasi DI pada 7 Agustus 1949 itu ditandatangani oleh Kartosuwirjo dengan memakai sebutan Imam Negara Islam Indonesia. (*Antara*, 24/9/1949)

* Wakil Wali Negara Sumatra Selatan mengumumkan, mulai 1 Oktober bendera Merah Putih diizinkan berkibar karena situasi dan kondisi Sumatra Selatan dinilai aman dan tertib. Merah Putih diperbolehkan berkibar selama RIS yang merdeka dan berdaulat belum tertbentuk dan belum memiliki bendera.

* Untuk mencegah agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan, diambil ketentuan-ketentuan sbb.:

  Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk mengibarkan bendera ini. Selama menurut Hukum Negara dan Hukum Internasional bendera Merah Putih Biru adalah bendera resmi, hendaklah, manakala bendera Merah Putih dikibarkan, bendera resmi itu dinaikkan pada sebelah kanannya dan di sebelah kanan bendera resmi itu dikibarkan juga bendera Negara.

  Jika empat bendera yang dikibarkan, maka bendera Merah Putih harus dinaikkan di tempat yang paling kiri.

  Bendera resmi tiada boleh lebih kecil ukurannya atau lebih rendah ditempatkan dari bendera-bendera yang lain. (*Antara*, 24/9/1949)

* Menteri Pertahanan Hamengku Buwono IX mendarat di lapangan terbang Blang Bintang, Aceh Besar, disertai rombongan yang terdiri dari a.l. Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat Mr. Assaat dan Menteri Penerangan Mr. Sjamsuddin.

  Datang menyambut di lapangan terbang: Wakil Perdana Menteri Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Gubernur Militer Tgk. Muhd. Daud Beureueh, Panglima Sumatra Kolonel Hidajat, Residen Tuanku Mahmud, Sri Sultan Siak, para anggota Badan Pekerja Daerah Perwakilan Sumatra Utara, dan barisan kehormatan dari Angkatan Perang.

* Kepada ribuan penduduk yang menyambutnya, Menteri Pertahanan mengatakan a.l.:

  “Kedatangan saya ke Aceh bersama dengan satu rombongan yang terdiri

dari pembesar-pembesar militer dan sipil hari ini, ialah untuk meninjau dengan mata kepala sendiri tentang hasil-hasil yang telah diperoleh dalam pelaksanaan perintah cease fire, supaya segala apa yang tersebut dalam Statemen Rum-Royen itu dapat berhasil dengan sebaik-baiknya."

Selanjutnya Menteri Pertahanan menyatakan kegembiraan hatinya "bahwa pada saat yang baik ini telah dapat mengunjungi daerah Aceh untuk menyampaikan terima kasih kepada Angkatan Perang dan rakyat kita di sini yang telah berjuang mati-matian dalam mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan suasana di tanah air kita sekarang ini akan bertambah jernih untuk mendatangkan kesejahteraan rakyat dan masyarakat kita seluruhnya." (TS241)

* Atas nama Presiden RI, Wakil Perdana Menteri di Sumatra mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 3 1949 mengenai pembentukan Badan Pembantu dan Pengawas Bank Negara untuk Sumatra, dan menetapkan peraturan tentang kedudukan dan tugas kewajiban badan tersebut.

  Badan Pembantu dan Pengawas Bank Negara terdiri atas lima orang, yaitu seorang ketua dan empat orang anggota. Empat orang diambil dari para pedagang atas usul golongan itu sendiri, sedang seorang adalah pegawai negeri yang ditunjuk oleh Wakil Perdana Menteri.

  Badan Pembantu dan Pengawas Bank Negara bertugas membantu Bank Negara menyelenggarakan dan menjalankan peraturan-peraturan untuk melancarkan jalannya perekonomian dan perdagangan khususnya, menjaga jangan sampai timbul hal-hal yang merugikan masyarakat, dan memberikan pelayanan kepada Pemerintah tentang soal-soal bank yang bermanfaat bagi kemajuan perekonomian dan perdagangan.

  Dalam mengeluarkan peraturan, Kepala Bank Negara diwajibkan mendengarkan dan memperhatikan usul-usul badan ini. (TS241-242)

* Di Kotaraja berlangsung pertemuan antara Komisariat PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia) Sumatra Utara dengan Sekretaris Jenderal Lajnah Tanfiziyah PSII Harsono Tjokroaminoto yang datang dari Yogyakarta sebagai anggota rombongan Menteri Pertahanan. Pertemuan dihadiri oleh anggota Komisariat PSII, anggota Dewan Pimpinan PSII Kabupaten Aceh Besar, dan beberapa wakil cabang PSII.

Tentang persatuan umat Islam, Harsono menjelaskan bahwa dewasa ini di Jawa sedang diusahakan hal itu dengan penuh kebijaksanaan. Seperti diketahui, di Jawa berpusat tiga partai politik Islam, yaitu Masyumi, PSII dan Gerakan Muslimin Indonesia. "Ketiga partai politik Islam ini, kendatipun kadang-kadang ada timbul perbedaan-perbedaan pendapat, tetapi saya rasa akan dapat bergabung dalam satu federasi sebagaimana dicita-citakan oleh PSII," kata Harsono.

Dari hari ke hari usaha ke arah itu semakin giat dilakukan, karena memang ketiga partai sependapat tentang perlunya front Islam yang kuat. (TS242)

* Malam: Di halaman Masjid Raya Baiturrakhman, Kotaraja, berlangsung rapat raksasa yang dikunjungi penduduk dalam dan luar kota. Di mana a.l. Mr. Assaat mengatakan:

"Uraian saya ini saya mulai dengan tanggal 19 Desember 1948. Pada tanggal tersebut kita semua tahu, pihak Belanda memulai serangan dan memperkosa kedaulatan NRI.

Tujuan perkosaan itu ialah menghancurkan Republik sebagai negara dari muka bumi. Tujuan kedua ialah menyatakan kepada dunia bahwa NRI hanyalah usaha Bung Karno dan Bung Hatta serta beberapa pemimpin saja. Mereka ingin menunjukkan kepada dunia, bahwa jika Bung Karno dan Bung Hatta serta beberapa pemimpin itu bisa ditangkap dan diasingkan, akan hancurlah Republik, dan mereka akan dapat mengembalikan keamanan dan kemakmuran di tanah Indonesia.

Mereka memang pintar memilih waktu untuk memulai serangannya, yaitu waktu Republik Indonesia habis menyelesaikan Peristiwa Madiun, di mana tentara kita dikerahkan untuk menghapuskan pemberontakan PKI yang terjadi pada 15 September 1948.

Kedua, waktu Paduka yang Mulia Presiden hendak berangkat ke luar negeri, dan waktu Paduka yang Mulia Wakil Presiden sedang sakit, dan waktu tentara kita sedang mengadakan latihan di luar kota Yogya. Pendek kata, segala faktor yang menjamin kemenangan mereka kumpulkan waktu itu.

Memang, dalam sehari saja ibukota Yogyakarta dapat diduduki, dan hari itu juga Presiden, Wakil Presiden, dan beberapa Menteri dapat ditangkap.

Dilihat dari sudut ketentaraan, memang pandai betul Belanda memilih waktu.

Tetapi dilihat dari sudut politik, waktu itu tidak tepat. Mereka melakukan serangan di waktu Komisi Tiga Negara berada di Yogya, waktu kita masih berunding. Selagi berunding kita diserang. Ini bukan saat yang tepat dari sudut politik, dan terbukti seluruh dunia marah oleh perbuatan kejam ini.

Maksud untuk menghancurkan Republik ini terbukti dari pidato Wakil Tinggi Mahkota Belanda Dr. Beel, dan kemudian dari keterangan Dr. Brouwer dari Mr. Van Gieben kepada kami di Bangka, bahwa Republik Indonesia tidak ada lagi dalam pandangan Pemerintah Belanda. Namun keterangan ini tidak diucapkan di Negeri Belanda, hanya diucapkan di Indonesia.

Tetapi, Saudara, tujuan Belanda ini tidak tercapai. Karena apa? Tentara kita sampai sekarang masih utuh, walaupun Pemerintah Belanda beberapa kali mengumumkan bahwa Tentara Republik Indonesia telah luluh, dan puluhan ribu—katanya—sudah mendaftarkan diri kepada Belanda." (TS243-244)

* Menteri Penerangan Mr. Sjamsuddin menjelaskan kepada rapat raksasa itu juga bahwa usaha Belanda untuk menghilangkan Republik Indonesia tidak berhasil. Bukannya Republik hilang, bahkan sebaliknya menjadi lebih kuat dari sebelum 19 Desember 1948.

Pada waktu ini kita sedang menginjak fase baru. Di Negeri Belanda delegasi kita sedang menghadapi Konferensi Meja Bundar, sedangkan di Jakarta delegasi kita sedang memperjuangkan pelaksanaan Statemen Rum-Van Roijen.

Selanjutnya Menteri Penerangan menjelaskan perkembangan politik sejak Dewan Keamanan PBB mengambil keputusan, sampai berlangsungnya Konferensi Meja Bundar sekarang. (TS244)

* Selanjutnya Sultan Hamengku Buwono memberikan amanatnya. Rakyat mendahului dengan pekik: "Merdeka! Merdeka! Hidup orang kuat Indonesia!"

Sesudah mengungkapkan rasa gembira dapat berhadapan muka dengan rakyat Aceh, Sultan mengatakan a.l.:

“Kami datang kemari sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang melakukan kewajiban sekitar pelaksanaan cease fire di daerah-daerah Republik di Sumatra.
Dengan menginjak fase baru dalam perjuangan kita ini, janganlah berpikir bahwa perjuangan kita sudah selesai. Perjuangan kita akan memakan tempo yang masih lama. Kita harus menyiapkan diri dengan mengikut fase baru ini. Dan cara berpikir saudara-saudara sekalian harus pula berubah. Jangan mempunyai pikiran yang sempit. Kita janganlah berjuang untuk daerah Yogya saja, untuk Sumatra atau Jawa saja, tetapi kita berjuang adalah untuk mencapai kedaulatan bagi sekalian warga negara seluruh Indonesia.

Penyerahan kedaulatan akan kita hadapi. Dari sekarang bersiaplah untuk menerimanya. Jangan sampai pada waktu penyerahan itu nanti kita belum siap. Pemerintah telah mengambil tindakan-tindakan yang sesuai dengan kehendak perjuangan.

Di masa lalu rakyat Aceh telah membuktikan kemampuannya. Ada satu persamaan antara Aceh dengan Yogya, yaitu tidak pernah takluk kepada Belanda. Oleh karena itu perjuangan rakyat Aceh sangat dihargai di Yogyakarta. Rakyat di Yogya kini masih lemah sebagai akibat pendudukan Belanda selama 7 bulan ini. Perjuangan rakyat Aceh akan menjadi sinar di dalam kegelapan. Saya atas nama rakyat Yogya menyampaikan salam kepada rakyat Aceh seluruhnya.” (TS244)

* Dalam pidato perpisahannya dengan rakyat Aceh, Menteri Pertahanan Hamengku Buwono IX menyatakan a.l.:

“Saya akan meninggalkan Aceh. Rasanya amat berat, walaupun hanya beberapa hari saja, berhubung masih banyak pekerjaan yang akan diselesaikan.

Kepergian saya ialah untuk melihat-lihat kepentingan rakyat kita di Tapanuli, Sumatra Barat dan Sumatra Selatan. Tetapi kalau perlu saya sanggup duduk di hadapan saudara-saudara dan mati di tengah-tengah saudara-saudara.

Kita baru mengalami kesulitan perekonomian. Hari-hari belakangan ini keadaan mulai reda, tetapi belum sebegitu rupa keadaannya, belum lagi memuaskan bagi saya dan tentu bagi saudara-saudara. Banyak lagi tindakan-tindakan yang perlu dilakukan.

Pesan saya, sepeninggal perjalanan saya ke Yogya hendaknya menjaga jangan sampai kurs uang ORIPS terhadap dollar diubah lagi.

Marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam mempertahankan kemerdekaan." (TS245)

1949 SEPTEMBER 24.

* Peringatan ulang tahun ke-4 Dewan Pertimbangan Agung (DPA) diselenggarakan di Yogyakarta, diketuai oleh M. Sutardjo Kartohadikusumo. (*LU t.h.*)

* Kolonel Sungkono yang baru tiba dari Yogyakarta bersama Dr. Murdjani dan Mayor Tjiptoharsono menerangkan di Surabaya bahwa kepergiannya ke Yogyakarta atas panggilan Presiden Sukarno itu tidak hanya untuk soal pelaksanaan *cease fire*, melainkan juga untuk memberikan laporan umum dan membicarakan soal-soal organisasi Angkatan Perang.

  Ditanya mengenai benar tidaknya berita yang menyatakan bahwa pihak Belanda menghendaki agar pasukan TNI diundurkan dari seluruh daerah Recomba Jawa Timur, Sungkono menyatakan bahwa seumpama ada tuntutan serupa itu, satu hal dapat dipastikan, yaitu bahwa TNI tidak akan hijrah lagi.

* Menjawab pertanyaan apakah ia masih percaya akan bisa keluar dari suasana tegang di Jawa Timur, Sungkono menyatakan bahwa sikap TNI sama di seluruh Indonesia, di Jawa Barat maupun di Jawa Timur. Bahwa di Jawa Barat dan Solo umpamanya keadaan lebih lancar daripada di Jawa Timur, sebabnya pasti tidak terletak pada pihak Indonesia, tapi pada komandan-komandan setempat pihak Belanda.

  Soal lain, di Jawa Barat ada semacam pemerintahan yang relatif bersifat nasional, yang membantu perjuangan bangsa dan TNI umumnya, yang memelihara kekuatan nasional dan menyediakan alat-alat yang dibutuhkan untuk melancarkan *cease fire*. Di Jawa Timur sebaliknya, keadaan tidak tergantung pada Negara Jawa Timur. Sampai sekarang kekuasaan di sana berada di seputar Recomba dan militer Belanda. Suara-suara yang "stimulerend" saja pun dari orang-orang yang pada 1 Oktober nanti akan menerima "penyerahan kekuasaan Negara Jawa Timur", sampai sekarang

belum kita dengar. Kiranya baik, kalau mereka ini melihat sikap bangsanya di Jawa Barat, demikian Sungkono. (*Antara*, 25/9/1949)

* Berita terlambat dari Malang menyatakan bahwa pasukan TNI yang semula menduduki Klayatan (l.k. 10 km selatan Malang) telah ditarik mundur hingga 5 km. Penarikan yang dilakukan pada 7 September itu berjalan dengan teratur, tidak menimbulkan kesulitan apa pun.

Penarikan itu diperintahkan oleh TNI, sesuai dengan persetujuan yang telah tercapai antara TNI dan pihak Belanda, yaitu menjadikan daerah Klayatan sebagai daerah tak bertuan. Maksudnya agar kedua tentara tidak saling berhadapan, yang mungkin menimbulkan kesulitan. (*Antara*, 24/9/1949)

* Ketua fraksi Masyumi dalam Badan Pekerja KNIP, Prawoto Mangkusasmito, yang telah melakukan peninjauan ke daerah Bandung dan sekitarnya hingga seminggu lamanya menyatakan kepada *Antara*, gerakan Darul Islam itu bukan soal militer, melainkan terutama soal politis. Pun timbulnya gerakan Darul Islam bukan "sebab" (oorzaak), tapi "akibat" (gevolg).

Dalam gerakan apa saja selalu kita dapati golongan lunak, moderate, dan *ekstreem*. Dan gerakan Darul Islam ini merupakan golongan ekstrim dari kalangan Islam, yang memandang perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia makin hari makin mundur, terutama sejak tercapainya Linggajati.

Dan gerakan Darul Islam ini ada hubungannya juga dengan jalannya KMB. Kalau KMB itu berjalan memuaskan bagi rakyat Indonesia dan dapat memberikan hasil-hasil sebagai yang kita harapkan semua, maka gerakan Darul Islam ini akan berangsur-angsur hilang dengan sendirinya. Tetapi sebaliknya, kalau KMB berat jalannya, maka gerakan Darul Islam ini akan dapat menjadi semakin besar.

"Memang ada orang yang menganggap gerakan DI ini dapat dihilangkan dengan kekuatan militer," kata Prawoto. "Tapi menurut pendapat saya, dengan jalan itu akan sukar dicapai penyelesaian. Penyelesaian secara baik ialah berhasilnya KMB dengan baik dan dengan jalan menginsyafkan golongan DI itu."

Menurut Prawoto, kepada Republik memang sukar dapat dilemparkan tanggung jawab adanya gerakan Darul Islam di Pasundan itu, apalagi sesudah pihak Republik dengan kekuatan senjata pada Aksi Militer pertama terpaksa meninggalkan daerah tersebut. Kalau sesudah itu dilakukan plebisit di Pasundan, maka tentu tidak akan timbul kesukaran-kesukaran sebagai yang kita alami di Pasundan pada waktu ini. Demikian Prawoto. (*Antara*, 24/9/1949)

* Menteri Pertahanan Sultan Hamengku Buwono IX dan rombongan (Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat Mr. Assaat dan Menteri Penerangan Mr. Sjamsuddin, dan Mr. Kasman Singodimedjo) meninggalkan Kotaraja (sekarang Banda Aceh) melalui pelabuhan udara Blang Bintang, Aceh Besar.

  Ikut berangkat juga bersamanya Wakil Perdana Menteri Mr. Sjafruddin Prawiranegara dalam rangka menunaikan tugas di Yogyakarta.

  Menteri Pertahanan singgah di Medan dan menghadiri rapat umum yang diselenggarakan oleh Front Nasional Sumatra Timur. Dalam kesempatan itu Menteri Penerangan Mr. Sjamsuddin dan Mr. Kasman Singodimedjo memberikan sambutan masing-masing. (TS245)

1949 SEPTEMBER 25.

* Pemerintah Pasundan telah menyatakan persetujuannya untuk mengangkat seorang wanita, Ny. Mimi Ijos Wiriaatmadja, sebagai anggota parlemen sementara untuk mengisi lowongan yang ditinggalkan oleh almarhum Achmad Natalegawa (Parki). Ny. Ijos merupakan seorang dari 4 calon yang diajukan oleh Parki.

  Pemerintah Pasundan menyatakan, sudah tiba sekarang saatnya untuk mengangkat wanita sebagai anggota parlemen. (*Antara*, 25/9/1949)

* Diperoleh kabar bahwa sudah beberapa waktu ini Sultan-Sultan Cirebon dibayar oleh Pemerintah Pasundan, dengan alasan kesultanan-kesultanan tersebut terletak di daerah Negara Pasundan.

  Uang pembayaran itu disediakan oleh pemerintah pre-federal yang menyerahkannya kepada Negara Pasundan, dan oleh Negara Pasundan dimasukkan anggaran Kementerian Dalam Negeri. (*Antara*, 25/9/1949)

* Komisaris Tinggi Perancis untuk Pasifik Selatan telah minta kepada Konsul Jenderal Perancis di Jakarta, A. Salade, agar diusahakan hilangnya tiap salah faham yang mungkin ada mengenai kehidupan warga negara Indonesia di New Caledonia.

  Selanjutnya A. Salade telah menyampaikan sepucuk surat kepada Ketua Parlemen Sementara Pasundan, berisi permohonan Komisaris Tinggi agar Ketua Parlemen menunjuk dua anggota parlemen disertai seorang wakil Kementerian Sosial, yang akan mendapat keleluasaan bergerak untuk meneliti keadaan pekerja Indonesia di tanah jajahan Perancis itu. Segala ongkos perjalanan dan keperluan di sana akan dipikul oleh Pemerintah Perancis. (*Antara*, 25/9/1949)

* Pemerintah India telah memutuskan untuk memberikan *dharmasiswa* (*scholarship*) kepada pelukis Indonesia Affandi dan Kerton.

  Kerton yang tinggal di Bandung telah mendapat juga tawaran dari Negeri Belanda, tetapi ia memutuskan memilih India. (*Antara*, 25/9/1949)

* Setelah penyerahan kedaulatan kepada RIS terciptalah keadaan baru sama sekali yang akan mempengaruhi jalannya pengangkutan tentara Belanda dari Indonesia, demikian keterangan juru bicara delegasi Republik di KMB berhubung dengan keterangan pihak Pemerintah Belanda mengenai penarikan tentara Belanda dari Indonesia. Ditegaskan oleh juru bicara tersebut bahwa salah satu soal penting dalam agenda KMB ialah penarikan tentara Belanda dari Indonesia. Selaras dengan perundingan di KMB, akan disusun rencana baru sama sekali mengenai penarikan ini.

  Keterangan yang dikeluarkan oleh pihak Pemerintah Belanda baru-baru ini mengenai penarikan tentara Belanda berada di luar garis perundingan KMB, demikian juru bicara delegasi Republik.

  Seperti diketahui, menurut Menteri Pertahanan Belanda, Schokking dalam *toelichtingsmemorie* tentang anggaran belanja perang, tentara Belanda di Indonesia pada 1950 akan berjumlah 16.300. Pada 1950 untuk menggantikan tentara Belanda di Indonesia dari Nederland akan dikirim brigade infanteri tersendiri, ditambah lagi dengan enam batalion. Di dalam *toeliahtingsmemorie* tersebut tidak ada ketegasan tentang penarikan tentara Belanda dari Indonesia dan kepastian kapan penarikan akan dimulai. (*Antara*, 25/9/1949)

1949 September 26.

* Dalam pidato perayaan ulang tahun ke-4 Dewan Pertimbangan Agung, Presiden Sukarno mengingatkan bangsa Indonesia agar tetap berjaga-jaga dan bersatu, apapun hasil terakhir Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Presiden menyatakan kepada ke-16 anggota dewan tersebut bahwa ia berharap penyelesaian yang memuaskan akan diperoleh dari konferensi di Den Haag itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Menurutnya, persetujuan informil yang telah tercapai tentang Uni di Belgia itu "hanya '*meeting of minds*'". Dan kelihatannya hal itu dimaksud untuk menenteramkan pers dan partai-partai politik Indonesia yang telah menentang keras persetujuan tentang Uni.

  Sutardjo menguraikan sejarah DPA selama 4 tahun yang lalu. Diterangkannya bahwa dari anggota yang semula 21 orang, 3 orang telah meninggal dunia dan 2 orang berhenti sebagai anggota. Ketua dan Wakil Ketua akan tetap tinggal di Yogyakarta, sedang anggota-anggota lain tersebar di pelbagai daerah agar nantinya dapat memberikan laporan langsung kepada Presiden tentang situasi di daerah-daerah tersebut. Ditegaskannya, kewajiban DPA adalah sebagai "dewan orang tua". (*Antara*, 27/9/1949)

* Juru bicara delegasi Republik mengumumkan bahwa "di saat ini" Hatta tidak akan pulang ke Indonesia. Selanjutnya dibantah kabar-kabar seolah-olah Hatta dipanggil kembali atau akan pulang ke Indonesia "sekarang".

  Seperti telah dikabarkan, Hatta akan pulang pada pertengahan Oktober. Mr. Sujono Hadinoto sebagai ketua PNI menerangkan bahwa ia berharap ada keputusan mengenai soal-soal pokok finansiil-ekonomis dalam minggu ini. Dikatakannya bahwa perundingan tidak bisa berjalan "*sleepende*" dengan tiada berketentuan. Sujono Hadinoto berpendapat bahwa Indonesia dan Belanda mesti mendapat kecocokan dulu tentang soal-soal pokok. Detailnya bisa dikerjakan belakangan. Ia mengatakan, pihak Indonesia tidak bisa menerima sesuatu hal yang bertentangan dengan kedaulatan; di lapangan finansiil-ekonomis keputusan terakhir mesti terletak di tangan RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Indonesia tidak boleh terikat dalam soal finansiil dan ekonomis, sebab kalau demikian kedaulatan dan kemerdekaan tiada artinya.

  Sujono Hadinoto akan pergi ke Indonesia setelah tercapai hasil dalam pembicaraan mengenai soal finansiil-ekonomis untuk memberi penjelasan

kepada partainya. Ia adalah wakil ketua komisi finansiil-ekonomis Republik.

Seperti dikabarkan, kesulitan terbesar dalam pembicaraan mengenai soal finansiil-ekonomis itu adalah mengenai status Bank Sirkulasi dan soal utang piutang. Pendirian Indonesia-Belanda masih tetap berbeda jauh, dan dengan singkat dapat dikatakan: Pihak Indonesia berpendirian, Bank Sirkulasi harus tunduk kepada politik dan peraturan finansiil-ekonomis RIS juga selama masa utang kepada Nederland, sedang pihak Belanda mau campur tangan dalam politik bank RIS. Dalam hal utang, pihak Indonesia bersedia mendekati tuntutan pihak Belanda. (*Antara*, 27/9/1949)

* Sewaka sebagai kurir ke-III Delegasi Republik Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) memberikan keterangan tentang perkembangan perundingan KMB dalam sidang tertutup Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP). (*KU127*)

* Perlu diadakan sebuah kamp rehabilitasi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dan mengurangi penderitaan yang dialami oleh para bekas tawanan politik dan perang, demikian dinyatakan oleh Ketua Panitia Sosial untuk para bekas tawanan politik dan perang, Nona Erna Djajadiningrat. Dengan kamp tersebut para bekas tawanan mendapat kesempatan untuk menyelaraskan diri, hingga dapat menceburkan diri ke dalam masyarakat. Usaha ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Menurut catatan Panitia Sosial di Jakarta, dari ribuan orang Indonesia yang tertawan akibat perjuangan kemerdekaan, baru l.k. 620 orang yang telah dibebaskan dari Nusakambangan, Bukitduri, Glodok, Struiswijk (Jakarta) dan Pandeglang (Banten.)

Kesukaran-kesukaran para bekas tawanan itu ialah: Pertama, seringkali mereka tidak memperoleh "*ontslagbrief*" (surat pembebasan) sehingga ada yang di tempat asalnya ditangkap lagi oleh yang berkuasa di sana. Kedua, seringkali mereka tidak lagi menjumpai keluarganya untuk menumpang. Karena sebab-sebab itu antara lain mereka kembali ke Panitia Sosial untuk menyerahkan diri dan meminta perlindungan.

Belum diketahui, apa yang akan dilakukan oleh Departemen Urusan Sosial (Pemerintah Federal Sementara) dalam hal ini. (*Antara*, 26/9/1949)

* Di Kotaraja (sekarang Banda Aceh) berlangsung peringatan ulang tahun keempat Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) Daerah Aceh dalam suatu resepsi.

  Dalam kesempatan itu Ketua IPPI Daerah Aceh, Jahja Zamzami, menguraikan sejarah IPPI, juga cita-citanya untuk menginsafkan para pemuda agar menjadi pemuda yang sungguh bertanggungjawab terhadap negara dan bangsa. Ia pun menyerukan agar para pemuda berpandangan jauh.

  Atas nama Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Penasihat IPPI Karim M. Duryat mengharapkan agar kerja sama antara IPPI dan PPK bertambah baik.

  Sementara itu Kepala Jawatan Penerangan Provinsi Sumatra Utara, Osman Raliby, memberikan nasihat kepada para pemuda anggota IPPI, serta menjelaskan tentang suasana politik terakhir.

  Khusus mengenai Konferensi Meja Bundar Osman Raliby mengatakan, kita harus memandang konferensi itu dengan rasa optimis, walau harus juga berpikir pesimis.

  “Anggota-anggota IPPI harus bekerja keras menghadapi tanggal 1 Januari 1950, tanggal penyerahan kedaulatan yang sungguh-sungguh, lengkap, dan tidak bersyarat. Ini membawa tanggung jawab penuh kepada pelajar-pelajar,” kata Osman Raliby. (TS245-246)

* Baru-baru ini di Palembang telah diresmikan berdirinya Gerakan Indonesia Muda yang dihadiri l.k. 150 pemuda penyusun anggaran dasar gerakan tersebut.

  Untuk menyusun organisasi selanjutnya serta urgensi programnya dibentuk sebuah panitia terdiri atas 5 orang yang akan bekerja sama dengan badan pimpinan. (*Antara*, 27/9/1949)

* Hari ini telah tiba di Jakarta 5 anggota Kongres Amerika Serikat, yang akan melakukan peninjauan di Indonesia selama beberapa hari. Rombongan terdiri dari M.G. Burnside (ketua), Charles Bonnet Doano dan Walter B, Huber, ketiganya dari Partai Demokrat, dan Harold O. Lovre dan Walter R. Riehlman dari Partai Republik.

  Di Jakarta mereka akan melakukan pertemuan dengan WTM Belanda, H.J. Lovink, juga dengan para pedagang AS dan para ondernemer Belanda.

Pada 28 September mereka akan ke Yogyakarta untuk bertemu dengan pembesar-pembesar Republik, dan esoknya ke Bandung. Dari Indonesia mereka melanjutkan perjalanan ke India. (*Antara*, 27/9/1949)

1949 SEPTEMBER 27.

* Menteri Pertahanan tiba di Yogyakarta dari perjalanan ke Sumatra, bersama Wakil Perdana Menteri Mr. Sjafruddin Prawiranegara dan Panglima Komando Sumatra Kolonel Hidajat. (*KU127*)

* Wakil Perdana Menteri Mr. Sjafruddin Prawiranegara menerangkan kepada wartawan *RRI* di Yogyakarta bahwa kedatangannya di ibukota ialah untuk melakukan kontak dengan Pemerintah Pusat.

  Ia akan melakukan pembicaraan dengan Pemerintah Pusat, akan tinggal beberapa hari di Yogyakarta, dan seterusnya kembali lagi ke Aceh.

  Dikatakannya, daerah Aceh merupakan satu-satunya daerah yang masih perlu sekali diperhatikan. Diharapkannya agar Sumatra tidak sekadar menjadi pulau harapan, tetapi benar-benar diisi sepenuhnya, terutama kekurangan akan tenaga kerja di segala bidang. (TS246)

* Ketua Kowani Ny. Pudjobuntoro menerangkan bahwa bukan hanya kaum lelaki tidak sabar lagi menunggu keterangan resmi Pemerintah mengenai jalannya perundingan KMB, tapi juga kaum wanita. Memang Kowani tidak berjuang di lapangan politik, namun kaum wanita tetap akan terbawa dalam segala peristiwa mengenai tanah air.

* Ia sangat menyesalkan pengiriman pasukan Belanda yang baru ke Indonesia, karena menurut pendapatnya syarat terpenting penyerahan kedaulatan ialah a.l. penarikan kembali tentara Belanda dari Indonesia. Kepergian Ny. Leimena ke Negeri Belanda sebagai wakil wanita Kristen Indonesia adalah untuk melakukan hubungan dengan organisasi-organisasi wanita Belanda mengenai pengiriman pasukan baru tersebut.

  Menjawab pertanyaan apakah Kongres Wanita Indonesia baru-baru ini dapat menggalang persatuan wanita seluruh Indonesia, Ny. Pudjobuntoro mengatakan “pasti”, sebab adanya kesamaan perasaan dan penderitaan, misalnya sebagai akibat hilangnya anak, suami atau saudara karena

pertikaian Indonesia-Belanda itu tidak mudah dilupakan oleh wanita. (*Antara*, 27/9/2949)

* Rapat terakhir HISSBI dengan Pusat Sementara Organisasi Buruh Seluruh Indonesia yang berlangsung sejak 21/9 telah mengambil keputusan sbb.:

Kesatu: Mempergunakan "pokok-pokok pendirian umum massa organisasi buruh".

Kedua: Melaksanakan seluruhnya dengan tertib usaha-usaha sebagai tersebut dalam program bersama mengenai pembentukan vaksentral untuk seluruh Indonesia.

Ketiga: Mengadakan kerja sama dengan jalan permufakatan dalam hal yang mengenai kepentingan bersama dan yang mengenai nasib kaum buruh umumnya di seluruh Indonesia.

Keempat: Menyampaikan keputusan ini kepada segenap serikat buruh = serikat sekerja dan gabungan-gabungannya serta instansi-instansi dan pihak-pihak yang bersangkutan.

Hari ini wakil-wakil PSOBI, dipimpin oleh Mr. Kusna Puradiredja, menghadap Presiden. (*Antara*, 27/9/1949)

* Diperoleh kabar bahwa biaya pengawal perkebunan (ondernemingswacht) di Pasundan tiap bulan berjumlah *f*159.000,00 yang dibayar oleh pemerintah pre-federal.

Atas pertanyaan, mengapa biaya perkebunan (perusahaan partikelir) harus dibayar oleh pemerintah federal, pihak berwajib di Bandung menjawab, perkebunan adalah sumber *deviezen* yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah, karenanya pemerintah merasa berkepentingan untuk membangun dan menjaganya baik-baik. (*Antara*, 27/9/1949)

1948 SEPTEMBER 28.

* Berhubung dengan keterangan juru bicara delegasi Republik di Den Haag yang seolah menyatakan bahwa tidak ada alasan bagi rakyat Indonesia untuk merasa gelisah mendengar berita-berita basi, kalangan partai-partai di Yogyakarta menyatakan sbb.:

Juru bicara Masyumi: "Masyumi tetap menghendaki keterangan lengkap dari Dr. Sukiman sebagai Ketua Masyumi dan anggota delegasi. Dipanggilnya Sukiman tidak berarti ditariknya Sukiman dari keanggotaan delegasi, melainkan untuk memberikan laporan, sebab selama ini kurang sekali laporan Sukiman dan Rum kepada partainya. Kurangnya keterangan dari Pemerintah pun menimbulkan kegelisahan rakyat. Menurut pendapatnya, keterangan Sewaka kepada BP tidak memberikan gambaran yang terang, dan lagi bersifat pendapat pribadi."

Sukarni, Ketua Partai Murba: "Kegelisahan kalangan rakyat tetap ada selama pihak Pemerintah belum mengajak rakyat dengan perantaraan partai-partai memberikan penjelasan mengenai KMB. Menurut Sukarni, yang penting adalah persatuan rakyat yang bulat, dan Partai Murba berpendapat, kedaulatan penuh tidak akan dapat diberikan oleh kaum imperialis."

Kalangan Dewan Partai PNI: "Keragu-raguan tetap ada selama Pemerintah belum memberikan penjelasan resmi, akibat berita-berita pers yang saling bertentangan. Hingga kini belum ada keputusan Dewan Partai untuk memanggil Sujono Hadinoto.

Dr. Maas, Wakil Ketua Dewan Partai PBI: PBI belum tahu keadaan sesungguhnya, dan menunggu keterangan resmi, sebab kabar-kabar dalam tempo singkat telah dikejar oleh kejadian yang baru. Jadi PBI mengharap Pemerintah jangan mengesampingkan rakyat yang berjuang dan turut memikirkan jalannya KMB." (*Antara*, 28/9/1949)

* Di Yogyakarta telah tercapai koordinasi badan-badan kesenian dengan terbentuknya kerjasama delapan perhimpunan kesenian di bawah Institut Kebudayaan Indonesia yang diketuai oleh Ir. Purbodiningrat.
Kedelapan badan itu ialah Pembangunan Kesenian di bawah Ny. Moh. Yamin, Persatuan Artis di bawah Srimurtono, Raksi Seni di bawah D. Suradji, Institut Citra di bawah Djokolelono, Persatuan Seni Tari Indonesia di bawah Pangeran Hadinegoro, Badan Seni Suara di bawah Sitompul, Lembaga Indonesia-Tionghoa Bagian Kebudayaan di bawah Mr. Djojodiguno, dan Himpunan Musik Indonesia di bawah Ir. S. Prawironegoro. (*Antara*, 28/9/1949)

* Pada perayaan 5 Oktober, Hari Angkatan Perang, akan dilakukan peletakan batu pertama “makam pahlawan yang tidak dikenal”, dan diselenggarakan parade. Sehari sebelumnya Panglima Tertinggi akan mengeluarkan amanat, sedang Panglima Besar akan mengeluarkan perintah harian. (*Antara*, 28/9/1949)

* Berhubung dengan pesan Presiden Sukarno kepada korban-korban revolusi sosial di Sumatra Timur beberapa waktu yang lalu, Panitia Korban Revolusi Sosial Sumatra Timur Medan mengirim kawat kepada Presiden Sukarno yang bunyinya a.l. sbb.:

  Pesan dan janji Paduka Yang Mulia kepada wanita Sumatra Timur yang diberikan dengan perantaraan Ny. Amiruddin dan Ny. Abbas telah disampaikan. Dengan penuh pengharapan dan bersyukur, ibu-isteri dan yatim akibat revolusi sosial menanti dengan penuh pengharapan akan janji kedatangan yang Mulia ke Sumatra Timur. (*Antara*, 18/90/1949)

* Rapat pleno PB Persatuan Pemuda Kristen Indonesia memutuskan untuk mengadakan Kongres Pemuda Kristen Indonesia di Yogyakarta di Januari mendatang dengan mengundang organisasi-organisasi pemuda Kristen seluruh Indonesia. Untuk itu telah dibentuk panitia kongres. (*Antara*, 28/9/1949)

* Oleh Perkumpulan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan (PMIK) pada 15 Oktober yad. akan dibuka di Jakarta Sekolah Lanjutan Tinggi (SLT) yang pada awalnya akan memberikan pelajaran untuk jurusan sosial-ekonomi, ilmu pasti dan alam, ilmu hayat dan fisika-kimia, menggambar, dan bahasa Indonesia, Inggris dan Jawa.

  Para pelajar akan terdiri dari mereka yang memenuhi syarat di antara 400 murid SMA yang sedang menempuh ujian penghabisan sekarang. Selain itu, sampai 3 hari yang lalu telah tercatat 80 calon pelajar dari golongan lain.

  Masa belajar 2 sampai 3 tahun, dengan syarat ijazah SMT atau SMA, HBS atau AMS, atau yang sederajat. Pelajaran diberikan dalam bahasa Indonesia. Di antara pengajar terdapat Mr. Gunawan, Ir. Urip, Ir. S. Danusaputro, Drs. Tan Goan Po, Adam Bachtiar, St. M. Zain, Wachendorff, Ir. Alamza Pohan, dan Sastrosuwignjo.

Untuk sementara SLT ini akan melaksanakan kegiatan pelajarannya di waktu sore dan malam di gedung SMA (Salemba), KRIS, dan Sekolah Rakyat Cikini. Biaya untuk membangun gedung permanen sudah tersedia, sumbangan dari para dermawan Tionghoa, Arab dan Indonesia di Jakarta, tinggal menunggu lokasinya. Demikian keterangan Pengurus PMIK kemarin. (*Antara*, 28/9/1949)

* Wali Negara Jawa Timur mengangkat Sudarmo sebagai Direktur Departemen Dalam Negeri, Ir. Sutedjo sebagai Direktur Lalu-lintas, Mr. C. Wuffelie sebagai Direktur Keuangan, A.W. Sudjak sebagai Direktur Pendidikan, Kebudayaan dan Pengetahuan, Ir. Subiarto sebagai Direktur Ekonomi, dan Mr. C. de Rooy sebagai Sekretaris Umum.

Hari ini mulai jam 09.00 diadakan sidang pertama Kepala-kepala Departemen bertempat di kediaman Wali Negara, dengan acara beleid pemerintah dan pengerahan pegawai negeri. (*Antara*, 28/9/1949)

* Dikabarkan bahwa tidak lama lagi di kalangan bupati seluruh Pasundan akan terjadi mutasi luas. Bupati Sumedang diduga akan dipindahkan ke daerah distrik federal dan akan diganti oleh Bupati Subang; jabatan Bupati Kuningan yang masih kosong mungkin akan diisi oleh Bupati Bogor. Selain itu, diduga Bupati Sukabumi, Cianjur, Garut, dan Ciamis pun akan mengalami mutasi.

Kalangan Pemerintah Pasundan tidak membantah bahwa mutasi akan terjadi, hanya belum dapat mengumumkan bagaimana mutasi akan dilaksanakan.

Seperti diketahui, kekuasaan untuk mengangkat bupati dan patih masih berada di tangan pemerintah pre-federal (WTM). Mutasi ini pun harus mendapat persetujuan darinya. Kini di Pasundan ada 21 orang bupati, 13 orang di antaranya berada dalam *actieve dienst*, sedang lain-lainnya diperbantukan pada kementerian-kementerian dan kantor-kantor. (*Antara*, 28/9/1949)

* Dalam sidang Parlemen Sementara tadi pagi telah dilakukan upacara penerimaan anggota wanita pertama, Ny. Mimi Ijos Wiriaatmadja.

Dalam sidang itu juga telah dibicarakan undangan Konsul Jenderal Perancis yang mengharapkan adanya 2 orang anggota Parlemen yang

melakukan peninjauan ke New Caledonia. Undangan itu pada pokoknya telah diterima dengan baik, sedang pemilihan 2 orang utusan akan dilakukan dalam sidang tgl. 6 Oktober yad. (*Antara*, 29/9/1949)

* Berita terlambat dari Indramayu mengatakan bahwa tiga anggota TNI di daerah tersebut atas perintah kepala komando militer daerah Indramayu telah dijatuhi hukuman tembak.

  Hukuman dijatuhkan setelah dari pemeriksaan terbukti bahwa mereka terang bersalah, yaitu melakukan pemerasan atas rakyat. (*Antara*, 28/9/1949)

* Berita dari Padang menyatakan bahwa anggota DPA dan tokoh pendidik Moh. Sjafei telah mendapat undangan dari Paedagogisch Genootschap Bandung untuk turut mencurahkan tenaga di sana. Dikabarkan, Moh. Sjafei menerima baik undangan tersebut.

  Menurut keterangan, sejak Aksi Militer II, Moh. Sjafei terus berada di pedalaman, dan sekarang menderita sakit asma. (*Antara*, 28/9/1949)

* Anggota KNI Pusat dan KNI Sumatra Selatan M. Ali Chanafiah sampai kini masih ditahan di penjara Bengkulu oleh Belanda, demikian kabar yang diterima dari Bengkulu. Ia ditahan ketika mendatangi keluarganya di sana, sesudah ada perintah *cease fire*.

  Ali Chanafiah adalah tokoh terkemuka di Sumatra Selatan, terutama di bidang politik dan pendidikan. (*Antara*, 28/9/1949)
* Kemarin genap empat tahun berdirinya PTT Republik. Berhubung dengan itu, telah dikirimkan kawat kepada Biro Internasional Perhimpunan Pos Sedunia di Bern (Swiss) dan Sekretariat Umum Perhimpunan Perhubungan Internasional di Jenewa (juga di Swiss). Isinya meminta hubungan dan kerja sama dengan segenap PTT seluruh negeri di dunia demi perdamaian dan kesejahteraan seluruh umat manusia. (*Antara*, 28/9/1949)

* Mengenai kemungkinan besar terpilihnya Ir. Sukarno sebagai Presiden RIS, Opu Tomarilalang, Menteri Dalam Negeri Kerajaan Luwu Palopo, dengan tegas mengatakan bahwa menurut pandangan *zelfbestuurders* memang sudah pada tempatnya Sukarno menjadi Kepala Negara Indonesia, karena jasa perjuangannya sejak dahulu sangat besar.

Ditanya, sikap apakah sebaiknya yang diambil apabila KMB gagal, ia menjawab: "Kita harus tenang dan tetap berusaha; perjuangan harus kita lanjutkan."

Tentang penarikan tentara Belanda dari seluruh Indonesia dikatakannya, tidak ada kegelisahan apa-apa di kalangan *zelfbestuurders*, karena menurutnya tentara Belanda akan segera diganti oleh Tentara Nasional RIS yang dapat menjamin keamanan. (*Antara*, 29/9/1949)

* Calon Barisan Nasional untuk anggota Parlemen NIT dari Sangir dan Talaud Selatan, Gu Dauhan Sjah, karena tak ada kandidat lainnya, maka pasti ia menang. Calon Sangir dan Talaud Utara, Jan Tangekeng, yang juga dicalonkan oleh Barisan Nasional, 90% kemungkinan menang.

Minahasa sibuk dengan pemilihan 10 Oktober yad. Kedudukan Barisan Nasional kuat baik di utara maupun selatan. (*Antara*, 29/9/1949)

1949 SEPTEMBER 29.

* Berhubung dengan berita *ANP* dan *Aneta* yang menyatakan seolah dalam rapat intern delegasi Republik Hatta menyatakan rasa tak senangnya terhadap kritik dari Yogyakarta atas beleidnya di KMB, juru bicara delegasi Republik menerangkan bahwa kabar itu sama sekali tidak benar.

Dikatakannya bahwa suara-suara di Indonesia sudah tentu mendapat perhatian delegasi Republik di Scheveningen. Kritik-kritik itu sebagian diakibatkan oleh rasa kurang sedap karena tidak adanya hasil nyata KMB. Tetapi delegasi Republik menginsafi benar bahwa, seperti biasa kritik-kritik semacam itu dilebih-lebihkan oleh kalangan pers tertentu.

Diterangkan bahwa delegasi berharap, sesudah diberikan penerangan kepada kedua belah pihak, baik pihak Indonesia maupun Belanda, salah paham dan gambaran keliru itu dapat dihilangkan.

Tentang pembicaraan informil di Namur, di Yogyakarta sudah diberikan penjelasan oleh kurir Sewaka. Seorang anggota BP KNP telah menyatakan tentang ini bahwa "berita-berita sensasionil dan spekulatif tentang pembicaraan informil Namur ternyata umumnya tidak benar". *Aneta* pun pernah mengabarkan tentang keterangan Sewaka, seolah "dalam delegasi Republik tidak ada perbedaan paham". (*Antara*, 29/9/1949)

* Sukamto sebagai kurir ke-IV Delegasi Republik Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) tiba di Yogyakarta untuk melapor kepada Pemerintah Indonesia tentang jalannya KMB. (*KU127*)

* Presiden Sukarno menetapkan Undang-undang No. 2 1949 tentang kedudukan dan kekuasaan Wakil Perdana Menteri yang berkedudukan di Sumatra.

  Wakil Perdana Menteri yang berkedudukan di Sumatra (di Kutaraja, sekarang Banda Aceh) ialah Mr. Sjafruddin Prawiranegara.

  Wakil Perdana Menteri diberi kekuasaan, dalam keadaan yang memaksa, untuk daerah Sumatra atau sebagian dari daerah Sumatra, atas nama Presiden, menetapkan peraturan:

  1. Yang masalahnya seharusnya diatur dengan Undang-undang; peraturan ini dinamakan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Undang-undang; dan
  2. Yang masalahnya diatur dengan Peraturan pemerintah; peraturan ini dinamakan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah.

  Dalam menjalankan kekuasaan menetapkan peraturan dimaksud, Wakil Perdana Menteri diwajibkan mendengar lebih dahulu pertimbangan sebuah Badan Penasihat yang anggota-anggotanya diangkat oleh Presiden, sedangkan susunan Badan Penasihat tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

  Selanjutnya Peraturan-peraturan Wakil Perdana Menteri dimaksud harus selekas-lekasnya diberitahukan kepada Presiden. Presiden berhak membatalkan atau mengubah suatu Peraturan Wakil Perdana Menteri dimaksud, seberapa dapat setelah mendengar pertimbangan Wakil Perdana Menteri.

  Jika suatu Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Undang-undang mendapat persetujuan Presiden, maka selekas-lekasnya Peraturan tersebut dimasukkan oleh Presiden kepada Badan Pekerja Komite Nasional Pusat.

* Terhadap peraturan ini berlaku aturan-aturan dalam pasal 22 ayat 2 dan 3 Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

Ditentukan, bahwa kepada Wakil Perdana Menteri oleh Presiden dapat diberikan hak, atas nama Kabinet atau atas nama seorang Menteri, mengambil segala keputusan pelaksanaan pemerintahan (eksekutif) yang dipandang perlu untuk mewujudkan stabilisasi dan penyehatan di berbagai lapangan pemerintahan di Sumatra. Dan dalam keadaan yang memaksa kepada Wakil Perdana Menteri oleh Presiden dapat diberikan hak mengambil, atas nama dan sambil menunggu pengesahan Presiden, suatu keputusan yang termasuk kekuasaan Presiden.

Undang-undang ini ditandatangani oleh Presiden Sukarno, Menteri Kehakiman Susanto Tirtoprodjo dan Akting Perdana Menteri Hamengku Buwono IX, dan diumumkan pada 30 September 1949 oleh Sekretaris Negara A. G. Pringgodigdo. (TS246-247)

* Hari ini di depan kantor-kantor di Yogyakarta berkibar bendera setengah tiang sebagai penghormatan yang penghabisan atas 8 anggota Tentara Pelajar (TP) yang gugur di masa pendudukan Kota Yogyakarta dan kini jenazahnya dipindahkan ke Taman Bahagia.

Penghormatan dilakukan juga dengan pawai murid-murid dan tokoh-tokoh terkemuka, yang mencapai panjang 1 km. (*Antara*, 30/9/1949)

* Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Semarang minta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Djawa Tengah Sementara (DPRDTS) supaya mendesak kepada Pemerintah agar daerah Jawa Tengah digabungkan kembali dengan daerah Republik, supaya daerah itu tidak terpisah. Demikian bunyi mosi anggota Nasuchun yang diterima dengan suara bulat oleh Dewan Kabupaten Semarang dalam rapatnya tgl. 27/9/1949.

Pertimbangannya ialah karena suasana politik sekarang, baik berdasar riwayat maupun budaya, daerah yang kini disebut daerah Recomba Jawa Tengah itu tidak seharusnya dipisahkan.

Turunan mosi tersebut selain dikirim kepada DPRDTS dikirim juga kepada Pemerintah Belanda di Jakarta dan kepada Pemerintah Republik Indonesia. (*Antara,* 30/9/1949)

* Telah berangkat ke Jakarta dari Yogyakarta hari ini Asrarudin dan Kobarsih dari Fraksi Buruh, untuk meninjau keadaan perburuhan di sana. Di Jakarta mereka akan tinggal beberapa hari, kemudian meneruskan perjalanan

ke Bandung. Ny. Mangunpuspito tidak jadi ikut dalam rombongan itu. (*Antara*, 30/9/1949)

* Hari ini mulai terbit *Harian Umum*, sebuah surat kabar baru di Surabaya, dipimpin oleh Ronggodanukusumo, bekas pemimpin redaksi *Hariwarta* Kediri sebagai direktur, dan redaktur Sunarjo, bekas wartawan *Antara* Malang. Surat kabar ini dicetak di percetakan *De Vrije Pers*. (*Antara*, 30/9/1949)

* Jawatan Penerangan Sumatra Utara menyiarkan sejumlah tulisan untuk membantu usaha Pemerintah memperbaiki jalannya perekonomian.

  Dijelaskan dalam tulisan itu, usaha memperbaiki keadaan ekonomi tidak akan berhasil sebagaimana diinginkan oleh Pemerintah jika rakyat tidak membantu sepenuhnya.

  Rakyat hendaknya menginsafi bahwa tujuan Pemerintah ialah memperbaiki susunan ekonomi dan kemakmuran seluruh rakyat, hingga beban penghidupan sekarang dapat dikurangi.

  Rakyat pun wajib ikut memperhatikan, apakah barang-barang yang dijual dengan sistem kupon benar-benar dijual dengan harga yang ditentukan Pemerintah.

  Rakyat hendaknya memperhatikan, apakah kupon yang dikeluarkan itu oleh pembeli benar-benar digunakan untuk membeli barang yang dimaksud, bukan menjadi alat untuk mencari keuntungan atau menimbun barang.

  Rakyat hendaknya tidak berlomba-lomba membeli barang, baik dengan atau tanpa kupon, dan hendaknya hanya membeli barang yang memang diperlukannya.

  Sementara itu Pemerintah akan tetap mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki kehidupan rakyat di daerah ini. Tapi langkah-langkah itu hanya dapat berhasil jika seluruh rakyat menaati peraturan Pemerintah, dan turut pula memperhatikan apakah peraturan Pemerintah itu berjalan dengan baik. (TS248)

1949 SEPTEMBER 30.

* Atas inisiatif Panitia Tahanan Politik delegasi Republik di Indonesia tidak lama lagi akan didirikan sebuah badan oleh perkumpulan-perkumpulan

sosial di daerah pendudukan untuk mengurus tahanan politik dan perang yang baru keluar dari tahanan Belanda. Diinginkan ikut bergabung juga perkumpulan-perkumpulan sosial golongan federalis. Badan tersebut akan dipimpin oleh Dr. Abu Hanifah.

Menurut catatan yang dihimpun sampai 2 Agustus dari berbagai daerah, tahanan politik dan perang yang masih meringkuk dalam penjara Belanda berjumlah l.k. 5.000 orang, sedangkan catatan yang dihimpun oleh Palang Merah Internasional sampai hari-hari terakhir ini jumlahnya l.k. 8.000 orang. (*Antara*, 30/9/1949).

* Kurir ketiga delegasi Republik di KMB, Kepala Polisi Negara Sukanto, tiba di Jakarta kemarin dengan pesawat Contellation KLM. Pagi ini ia akan meneruskan perjalanan ke Yogyakarta.

Sukanto menolak memberikan keterangan sekitar KMB sebelum tiba di Yogyakarta. Dikatakannya, kini oleh delegasi Republik di KMB sedang diusahakan untuk menyempurnakan hubungan delegasi di Den Haag dengan Yogyakarta. Dalam hal ini masih terdapat banyak kesulitan Namun Sukanto yakin, dalam November ini sudah ada kepastian mengenai KMB.

Sukanto baru kali ini kembali ke Indonesia sejak meninggalkannya setahun yang lalu untuk mempelajari masalah kepolisian. Menurut keterangannya, sesudah memberikan laporan ke Yogyakarta mengenai KMB ia akan segera kembali lagi ke Den Haag. Waktu ia meninggalkan Den Haag, belum diketahuinya siapa yang akan diutus sebagai kurir yang keempat. (*Antara*, 30/9/1949)

***

(Akhir September 1949)

OKTOBER 1949

1949 OKTOBER.

* Sekolah-sekolah di Solo mulai dibuka lagi. (*PEH92*)

1949 OKTOBER 1.

* Hari ini batas waktu pembentukan Majelis Konstituante Republik Indonesia menurut resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 23 Desember 1948. (*LUxxii*)

* *Regeringscommissaris voor bestuurlijke aangelegenheden* (Recomba, Komisaris Pemerintah Urusan Pemerintahan) Jawa Tengah mengumumkan bahwa Merah-Putih boleh dikibarkan di daerah Recomba Jawa Tengah. (*LUxxii*)

* Panitia Pusat Konferensi Meja Bundar (KMB) menyelenggarakan *week-end* di Hoge Vuurse untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi dan keuangan. (*KU127*)

* AURI Bagian Penerbangan Sipil mengeluarkan Pengumuman No. 9/P, ditandatangani oleh Wakil Kepala Staf 3 Angkatan Udara RI, Opsir Udara I

Sujoso Karsono, bahwa mulai awal bulan ini akan dibuka hubungan udara Yogyakarta-Kotaraja (sekarang Banda Aceh).

* Dijelaskan dalam Pengumuman itu, penerbangan akan dimulai tanggal 1 Oktober 1949, sekali seminggu, tiap hari Kamis. Tiap keberangkatan dari Kutaraja disediakan 5 tempat duduk, terbagi dalam tiga prioritas: pertama untuk tentara, kedua untuk sipil, dan ketiga untuk partikelir.

* Seminggu sebelum keberangkatan, surat perintah atau surat keterangan harus sudah diperlihatkan pada kantor Angkatan Udara RI Bagian Penerbangan Sipil untuk dimintakan *clearance* ke Jakarta dan Yogyakarta.

* Pembayaran dilakukan tunai dengan uang Federal atau uang Belanda dahulu, dengan tarif: Kutaraja-Yogyakarta *f*.500,-, Kutaraja-Jakarta *f*.390,-, Kutaraja-Medan f.90,

* Tiap penumpang diperbolehkan membawa bagasi seberat tak lebih dari 25 kg. (TS250)

1949 OKTOBER 2.

* Ch. Tambu tiba di Jakarta dari Filipina untuk menemui Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim.

* Ia menerangkan bahwa Pemerintah Filipina akan memberikan pinjaman kepada Pemerintah Indonesia. (*KU127-128*)

1949 OKTOBER 4.

* Pihak Belanda menyatakan pendiriannya dalam perundingan Panitia Ekonomi/Keuangan Konferensi Meja Bundar (KMB), bahwa Republik Indonesia Serikat (RIS) nantinya harus mengambilalih utang Hindia Belanda. Dalam hal ini Belanda bersedia membantu dengan jalan:

  1. Memberikan potongan pada jumlah utang;
  2. Membebaskan RIS dari pembayaran bunga dan cicilan. (*KU128*)

* Menteri Dalam Negeri Mr. Wongsonegoro menerangkan kepada pers bahwa pada prinsipnya Republik Indonesia dapat menerima “usul Mr. Jacob”.

* Selanjutnya Republik Indonesia pun mengajukan usul-usul amandemennya sendiri. (*KU128*)

1949 OKTOBER 5.

* Hari Angkatan Perang diperingati di seluruh Indonesia dalam suasana *cease fire* (gencatan senjata) dan menghadapi pembentukan tentara nasional Republik Indonesia Serikat (RIS) yang akan datang.

* Presiden Sukarno sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) memberikan amanat di Yogyakarta, a.l. dengan kata-kata sbb.:

  "Wahai para prajurit sekalian. Kamu telah dapat menunjukkan budi-baktimu dalam membela tanah air dan bangsa. Langkah dan perbuatanmu selanjutnya akan menentukan arti inti sari Tentara Nasional Indonesia dalam angkatan perang nanti."

* Sementara itu Letnan Kolonel Slamet Rijadi meletakkan karangan bunga di makam Panglima Divisi V, Kolonel Sutarto, saat diadakannya peringatan empat tahun berdirinya Brigade V Divisi III di Solo. (*LUxxii; LU t.h.; PEH92*)

* Hari Angkatan Perang RI keempat diperingati di lapangan Blang Padang, Kutaraja (sekarang Banda Aceh). Mewakili Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatra Utara, Residen Tuanku Mahmud mengatakan a.l. di hadapan para prajurit:

  "Prajurit-prajurit kita dari TNI dalam dua kali agresi Belanda telah banyak melakukan kewajiban yang berat untuk kehormatan bangsa dan negara."

* Selanjutnya ia menguraikan riwayat angkatan perang di Aceh, mulai dari berdirinya API (Angkatan Pemuda Indonesia), pertempuran-pertempuran merebut senjata dari tangan Jepang, sampai usaha terus mempertahankan kemerdekaan dewasa ini, yang semuanya merupakan prestasi yang tak dapat dilupakan. (TS250-252)

* Mayor Husin Sjah membacakan Order Harian Panglima Divisi X yang bunyinya sbb.:

"Saudara-saudaraku anggota APRI,

Hari ini genap 4 tahun usianya Tentera Nasional Indonesia.

Dalam tempo yang sekian lama pula kita sudah mengalami bermacam-macam percobaan dalam mempertahankan kemerdekaan negara.

Di samping bertempur melawan Belanda, kita menyusun dan memperbaiki organisasi TNI sehingga sedikit demi sedikit dalam tempo yang singkat tersusunlah satu Tentera yang dapat kita banggakan.

Kita semuanya sejak prajurit sampai pimpinan tertinggi harus bekerja dengan saling mengerti dan saling menghargai untuk menciptakan satu Tentera yang baik.

Kita lahir dari satu revolusi rakyat Indonesia pada empat tahun yang silam. Dan karena itulah kita harus merupakan betul-betul Tentera pembela rakyat dan negara yang berpedoman pada Pancasila. Tentera harus merupakan alat negara benar-benar yang sungguh-sungguh patuh dan tunduk pada negara.

Pada waktu ini kita sedang berhenti berperang dengan Belanda. Waktu menghentikan tembak-menembak ini harus kita pergunakan sebaik-baiknya untuk meninjau ke dalam dan memperbaiki keadaan kita, sehingga apabila terjadi lagi peperangan dengan Belanda kita sudah siap dengan tenaga baru dan organisasi yang baik untuk menghadapi mereka.

Jika perundingan Indonesia-Belanda berhasil dan kedaulatan diserahkan sepenuhnya pada bangsa Indonesia, maka TNI mempunyai tugas yang lebih luas lagi.

Ingatlah bahwa daerah kekuasaan kita itu bukan lagi Jawa dan Sumatra saja, tetapi seluruh Indonesia. TNI adalah menjadi tulang kekuatan daripada bangsa Indonesia yang hendak menerima kedaulatan seluruh Indonesia, di mana pernah dikatakan oleh panglima Tertinggi APRI bahwa TNI adalah menjadi intisari dari Tentera Indonesia Serikat. Apakah nantinya TNI ini akan berganti nama dengan yang lain, itu bukan soal kita. Yang penting bagi kita ialah TNI tidak akan dipecah-pecah dan dicampuradukkan dengan KNIL.

Percayalah pada pimpinan APRI.

Dari dulu perundingan menemui jalan buntu tak lain ialah soal tentera, di mana Pemerintah kita mempertahankan kedudukan Tentera Nasional Indonesia tetap dan teguh kepada petunjuk pimpinan APRI.

Selain itu jangan lupa pertinggilah nilai mutu TNI dengan jalan terus melatih diri di waktu senggang dengan jalan apa saja.

Perbaharuilah tekad dengan melanjutkan terus perjuangan ini dengan jujur dan ikhlas.

Dengan perjuangan dan perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan yang suci, kita akan mencapai apa yang dimaksud.

Selesai.

Dikeluarkan di Staf Divisi X TNI pada tanggal 5 Oktober 1949, pada jam 10.00 WS." (TS252-253)

1949 Oktober 6.

* Menteri Penerangan Republik Indonesia (RI), Mr. Samsudin, selaku utusan Pemerintah Pusat berangkat ke Negeri Belanda untuk meninjau jalannya Konferensi Meja Bundar (KMB). (*LUxxii*)

* Panitia Ketatanegaraan Konferensi Meja Bundar (KMB) mulai membicarakan masalah Irian. (*KU128*)

* Pesawat KLM untuk pertama kali mendarat di lapangan Blang Bintang, Aceh Besar, membawa Wakil Perdana Menteri Sjafruddin Prawiranegara dan rombongan: Anggota BP KNIP Djohan Sjahruzah, Anggota BP KNIP Zainal Baharuddin dan istri, Ir. Iskandar dari Jawatan Kereta Api RI (DKARI), Ir. Utji dari Pekerjaan Umum, Murdat Sastropupito, Sukaton, dan Muharram.

  Ikut juga menumpang pesawat itu dari Yogyakarta Letkol Husin Jusuf, Letkol Tje' Mat Rahmany, Komandan CPM Sumatra Mayor Widya, dan Kapten Geudong. (TS254)

1949 Oktober 7.

* Mr. Nazir Sutan Pamuntjak sebagai kurir ke-V Konferensi Meja Bundar (KMB) tiba di Yogyakarta untuk menyampaikan laporan tentang jalannya KMB kepada Pemerintah Indonesia. (*KU128*)

* Menjawab pertanyaan wartawan, Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatra Utara Mr. S. M. Amin yang telah sebulan berada di Medan, menyatakan a.l.:

"Umumnya bangsa kita di Medan dan Pematang Siantar berhaluan nasional. Partai Kebangsaan yang telah lama berdiri di sana, yaitu Front Nasional yang diketuai oleh Sugondo Kartoprodjo baru-baru ini, telah mengadakan kongres seluruh Sumatra Timur di Medan.

* Dan sekarang majalah partai tersebut, *Front Nasional*, yang pada waktu agresi militer Belanda dihentikan penerbitannya, kembali telah meneruskan penerbitan sebagai sediakala.

* Partai kebangsaan lain yang baru didirikan oleh Mr. Tadjuddin Noor di Medan, yaitu Partai Indonesia Raya (PIR), memiliki anggota baik dari kalangan nasionalis maupun dari golongan federalis. Bahkan beberapa anggota terkemuka pemerintahan Negara Sumatra Timur menjadi anggotanya pula." (TS255)

1949 0ktober 8.

* Konferensi Palang Merah Indonesia (PMI) dibuka dengan resepsi di tempat kediaman Pangeran Purubojo di Yogyakarta.

  Konferensi diadakan untuk membicarakan penyempurnaan organisasi PMI. (*KU128; LUxxii*)

* Douwes Dekker merayakan ulang tahunnya yang ke-70 di Bandung.

  Dalam kesempatan itu Presiden Sukarno mengirim kawat ucapan selamat dari Yogyakarta: "Atas nama seluruh bangsa kita, saya juga menyatakan terima kasih atas apa yang Anda lakukan dengan tidak mengkhianati cita-cita kita, dan atas pengorbanan Anda terhadap tanah air dan rakyat kita. Pada diri Anda kami melihat dan menyambut bapak nasionalisme politik Indonesia." (RMU169-171)

* Setiba kembali di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dari Yogyakarta, Letnan Kolonel Husin Jusuf menerangkan bahwa selagi singgah di lapangan terbang Kemayoran telah terjadi insiden kecil dengan militer Belanda.

  Menjelang keberangkatan pesawat, tiba-tiba datang Polisi Militer Belanda yang minta agar ketiga militer Indonesia (a.l. Husin Jusuf sendiri dan Letnan Kolonel Tje' Mat Rahmany) tinggal, sebagai jaminan atas tentara Belanda yang masih ditawan pihak Republik di Aceh.

Tindakan Polisi Militer Belanda itu baru dibatalkan setelah mendapat protes keras dari Wakil Perdana Menteri. Gara-gara insiden itu, keberangkatan pesawat tertunda satu jam. (TS257)

1949 OKTOBER 10.

* Partai Kemerdekaan Indonesia Irian yang beranggotakan 4.000 orang menuntut agar Irian masuk dalam wilayah Republik Indonesia Serikat (RIS). (*LUxxii*)

* GPII Sumatra Utara mengadakan resepsi peringatan hari ulang tahunnya yang keempat di kantor Jawatan Agama Provinsi Sumatra.

  Dalam kesempatan itu Ketua GPII Sumatra Utara A. R. Hasjim menguraikan riwayat GPII sedjak didirikan pada 2 Oktober 1945 di Jakarta hingga dewasa ini. Ketua GPII Puteri, Ainul Mardliah, dalam pidatonya menyerukan agar para wanita mengambil contoh dari perjuangan kaum wanita Aceh dahulu.

  Wakil Perdana Menteri Mr. Sjafruddin Prawiranegara dalam sambutannya menyatakan bahwa sejak Proklamasi kita sudah didorong oleh 1001 cita-cita. Kemerdekaan sangat kita junjung tinggi, karenanya demi kemerdekaan itu kita rela mengorbankan beribu-ribu jiwa, dan itu belum semuanya. Ia pun menguraikan bagaimana seharusnya sikap seorang pemimpin.

  Tentang keadaan ekonomi dewasa ini ia katakan: “Perbaikan ekonomi di sini jangan diharapkan dari saya saja, sedang saya sebenarnya bukan dewa. Kalau tidak mendapat bantuan dari Saudara-saudara, tidak bisa tindakan Pemerintah berhasil.”

  Dikatakannya, Pemerintah telah mengundang berbagai organisasi—buruh, tani, pemuda, wanita, dll.—untuk mempersoalkan perbaikan ekonomi.

  “Penyakit masyarakat yang terbesar sekarang ialah tidak adanya pembagian pekerjaan. Tidak seorang pun tahu hak dan kewajibannya, hingga tak dapat dibedakan mana pemimpin dan mana yang dipimpin. Barang-barang pemerintah digunakan seperti barang kepunyaan sendiri. Untuk dinas tidak ada, tapi untuk prive ada.”

  Pada penutup sambutannya ia mengharapkan agar pemuda menyumbangkan sebesar-besar tenaganya untuk tanah air dan bangsa. (TS257-258)

1949 OKTOBER 11.

* Delegasi Republik Indonesia dan *Bijeenkomst voor Federaal Overleg* (BFO) mengajukan usul alternatif kepada Konferensi Meja Bundar (KMB) tentang soal ekonomi-keuangan, khususnya mengenai:

  1. penyelesaian utang-piutang;
  2. pembentukan panitia istimewa untuk memeriksa soal utang. (*KU128*)

* Setelah berada di Aceh selama 3 minggu, rombongan Misi Dagang Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden Direktur Indonesian Federal Commercial Organization (IFCO) Widyo Kartono, Sarwono Abdullah dan Junus Anis, hari ini meninggalkan Aceh menuju Yogyakarta.

  Menyampaikan kesan-kesannya mengenai perjalanannya bersama pengurus Gasida di Aceh Besar, Aceh Pidie, Aceh Utara, Aceh Tengah dan Aceh Timur, Widyo Kartono mengatakan bahwa ia yakin usaha mendirikan anak maskapai IFCO di Aceh akan mendapat sambutan baik. Tinggal kini menanti hasil penelitian teknis mengenai soal-soal kecil.

  Menurut Widyo, Jawatan Pertanian Sumatra Utara telah minta didatangkan mesin-mesin, a.l. untuk pabrik gula, dan ia telah menyatakan kesanggupannya.

  Mengenai pembangunan industri batik ia katakan, pihaknya telah menemukan tempat yang menurutnya tepat untuk perusahaan batik tersebut. Dan tentang ini ia telah mengadakan audiensi dengan Wakil Perdana Menteri. Sedang mengenai perbaikan perkebunan, ia telah menyampaikannya kepada Pemerintah. Pemerintah pun menerima baik usul-usulnya. Selanjutnya dikatakannya, pertengahan bulan November mendatang di Yogyakarta akan berlangsung Konferensi Ekonomi. Diharapkannya, Aceh akan mengirimkan wakil-wakilnya, sekurang-kurangnya lima orang. (TS258)

1949 OKTOBER 12.

* Ketua Partai Kemerdekaan Irian, S. Papare, menghadap Presiden Sukarno untuk dapat diterima sebagai anggota Delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB), mewakili rakyat Irian. (*KU128*)

* Gubernur Militer Aceh, Tengku Daud Beureueh, tiba di Yogyakarta memenuhi panggilan Presiden Sukarno. (*KU128*)

* Direktur Javasche Bank, Paulus Spies, dan E. A. Olive menemui Menteri Keuangan, Mr. Lukman Hakim, dan R. Gondosuwirjo untuk membicarakan masalah-masalah keuangan. (*KU128*)

* Panitia Ketatanegaraan KMB bersidang untuk mendengarkan pendapat golongan minoritas Belanda mengenai kebangsaan mereka. (*KU128*)

* Kantor berita *Antara* memberitakan bahwa hari ini akan dibuka dengan resmi dinas penerbangan KLM Yogyakarta-Kutaraja (sekarang Banda Aceh).

  Sementara itu Wakil Kepala Staf 3 Angkatan Udara Republik Indonesia di Kutaraja mengumumkan akan memperbaiki lapangan terbang Blang Bintang. (TS259)

1949 0KTOBER 13.

* Atas pertanyaan *Semangat Merdeka* Wakil Perdana Menteri Sjafruddin Prawiranegara menyatakan bahwa peraturan distribusi yang diberlakukan di Aceh merupakan usaha Pemerintah yang sangat kecil, yang dapat diumpamakan setitik minyak yang dijatuhkan di tengah lautan.

  “Sebab itu saya anjurkan agar usaha yang terbesar dan yang sebenarnya untuk pemulihan ekonomi itu harus ditimbulkan dan disokong sendiri oleh masyarakat dengan jalan agar para petani dan pelaut menggabungkan diri dalam koperasi yang musti tumbuh dari kalangan dan usaha sendiri. Dalam hal ini Pemerintah bersedia memberikan bantuan selayaknya kepada koperasi tersebut, asal saja dituruti peraturannya. Dan Pemerintah sendiri akan mendatangkan ahli-ahli koperasi ke daerah ini,” demikian Wakil Perdana Menteri.

  Mengenai blokade Belanda dikatakannya: “Memang sudah didapat persetujuan dengan pihak Belanda. Beberapa pelabuhan seperti Pekanbaru, Tembilahan, Sibolga, Padang dan Palembang akan dibuka untuk ekspor dan impor. Banyak barang boleh dimasukkan, asal saja melalui kontrol Belanda. Terhadap Daerah Aceh dilakukan pengistimewaan, yaitu di sini boleh dimasukkan barang sebanyak-banyaknya.”

Tentang kunjungannya ke Jakarta dikatakan: “Telah didapat kata sepakat untuk membeli barang dari Belanda dengan harga semurah-murahnya. Dalam bulan ini juga akan datang barang-barang kebutuhan masyarakat.”

Ia pun mengatakan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Aceh akan diperbaiki, dan harus selesai dalam bulan ini juga. (TS259)

* Telah tiba kembali di Kotaraja (sekarang Banda Aceh) Letkol Dr. Majudin dari Komando Divisi X TNI setelah menghadiri permusyawaratan mengenai obat-obatan di Medan.

  Menurut Dr. Majudin, telah dicapai persetujuan mengenai perbekalan obat-obatan untuk Sumatra Utara. Dalam hal ini Belanda tidak akan campur tangan dalam urusan pembagian obat-obatan di daerah patroli Republik. Semuanya kita sendiri yang akan mengurus. Juga Belanda bersedia merawat prajurit TNI yang sakit di tempat perawatan mereka. Dan setelah sembuh, prajurit itu tidak akan ditawan. (TS259-261)

* Jawatan Perdagangan Sumatra Utara di Kotaraja mengumumkan bahwa untuk dapat membeli barang impor, mulai hari ini pedagang eceran untuk barang-barang yang jenisnya ditentukan oleh Pemerintah harus mendaftarkan diri pada Kantor Jawatan Perdagangan RI dan menyetorkan uang tanggungan sebesar:

  1. Rp150.000 untuk pedagang yang bertoko atau berkedai;
  2. Rp50.000 untuk pedagang yang berjualan dengan bangku (rombengan).

  Penyetoran dilakukan pada Bank Negara Kotaraja dengan daftar penyetoran yang dibuat oleh Jawatan Iuran Negara. Pembelian barang impor hanya dapat dilakukan dengan menunjukkan surat ijin membeli barang (*toewijzingsbrief*) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberian Ijin Membeli Barang. Adapun Komisi memberikan surat ijin setelah kepadanya diperlihatkan tanda pembayaran uang tanggungan. (TS261)

1949 0KTOBER 14.

* Delegasi Republik dan Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) menyatakan dalam sebuah *aide memoire*

tentang kesediaannya mengambil alih utang Hindia Belanda sebesar 3,4 miliar gulden.

Sebaliknya kedua delegasi menolak garansi Belanda dalam hal perjanjian timah. (*KU128*)

* Rombongan prajurit TNI yang ditawan Belanda di Sabang hari ini tiba di Kutaraja, terdiri atas 21 perwira (a.l. Letnan I T.M. Usman) dan 34 prajurit, dipimpin oleh Kapten Suprapto dan Kapten Zain Hamid. (TS261)

1949 OKTOBER 15.

* Kongres Pendidikan Inter Indonesia diselenggarakan di Yogyakarta, yang mendapat perhatian dan kunjungan luar biasa. (*KU128-129; LUxxii*)

* Wakil Perdana Menteri atas nama Presiden RI mengeluarkan Peraturan No. 5 Tahun 1949 yang menetapkan bahwa semua badan Pemerintah maupun partikelir di Daerah Aceh yang menyimpan atau memiliki hasil perkebunan, wajib mendaftarkannya pada kantor yang ditunjuk dari 15 Oktober 1949 s/d 10 November 1949.

  Yang dimaksud dengan hasil perkebunan ialah: getah, minyak kelapa sawit, damar, terpentin, kopi biji, dan teh. Pendaftaran disertai keterangan tentang banyak barang, tempat penyimpanan, dan nama serta alamat pemilik.

  Barang yang telah didaftarkan tidak boleh dijual, digadaikan atau dipindahkan tanpa persetujuan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatra Utara.

  Barang siapa tidak mematuhi kewajiban di atas, dapat dihukum paling lama 3 bulan atau didenda setinggi-tingginya Rp1.000.000,- sedangkan barang bersangkutan dapat disita dan/atau dijadikan milik negara. (TS262-263)

1949 OKTOBER 16.

* Dr. Sukiman sebagai kurir ke-V Delegasi Republik Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) tiba di Yogyakarta untuk melaporkan jalannya KMB. (*KU129*)

* Ulang tahun keempat berdirinya Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) diperingati di gedung BPKNIP, Yogyakarta. (*KU129*)

* Persatuan Istri Tentara Nasional Indonesia (PITNI) menyelenggarakan pertemuan dengan para bekas tawanan perang dan tawanan politik di Taman Ksatria, Kutaraja.

  Dalam pembukaan acara itu Ketua Umum PITNI Ny. Tjut Andjung mengatakan a.l.:

  "Kalau saya memandang wajah saudara-saudara prajurit tanah air ini, terbayanglah di depan mata saya gambaran pahlawan-pahlawan gagah perwira yang menunaikan tugasnya dengan penuh rasa cinta kepada kemerdekaan Ibu Pertiwi."

  Dilanjutkan dengan tafakur sejenak, mengheningkan cipta untuk arwah pahlawan yang telah gugur. Lalu Ny. Tjut Andjung, Ny. Husinsjah dan Ibu Kamariah melakukan *peusijuek* pada para bekas tawanan.

  Dalam pidatonya, Ny. Hidajat, istri Panglima Komando Sumatra, mengatakan a.l.:

  "Kami mengerti bagaimana sikap dan semangat para tawanan yang tidak dapat dipujuk mulut manis Belanda. Semua ikhlas berkorban dan ikhlas menderita untuk kemerdekaan Indonesia. Pengorbanan saudara-saudara tidak akan sia-sia, masyarakat akan menghargainya."

  Kapten Sjarif yang baru dibebaskan menyatakan a.l.:

  "Pulau Weh memang cantik permai sebagai pintu gerbang Kepulauan Indonesia. Tetapi di sanalah meringkuk para tawanan bangsa Indonesia, justru karena mempertahankan kemerdekaan. Pulau Weh telah menjadi sejarah kami, sejarah para tawanan perang dan tawanan politik. Makanan yang diberikan kepada kami memberi sedikit harapan untuk hidup, tapi lebih banyak untuk mati. Inilah kesan utama kami tentang pengalaman 2 tahun menjadi tawanan Belanda. Kami menghadapi pekerjaan yang sulit dan berat, tetapi penderitaan itu justru menambah semangat kami untuk menuju Indonesia Merdeka."

  Letnan I T.M. Usman mengatakan a.l.:

  "Kami lihat para opsir dilistrik, dipukul dan lain-lain, tetapi mereka tetap gemuk karena geest-nya bagus. Semua itu kami tanggung, karena kami

tahu, kami musti berkorban. Jiwa kami ditekan. Belanda selalu membujuk, tetapi tidak berhasil.

Anak-anak kami diperas keringatnya dalam pekerjaan di hutan dan di laut dengan cara paksa. Walaupun begitu, dalam kamp tawanan di Sabang, kami tetap mendidik mereka, mengajari mereka berbagai ilmu pengetahuan, seperti sosiologi, psikologi, ekonomi, boekhouding, chemie, bahasa dan lain-lain.

Belanda memperlakukan kami dengan melanggar *wet-wet* internasional, tetapi kami maklum, tidak ada kemerdekaan *zonder* perjuangan."
(TS261-262)

1949 OKTOBER 17.

* Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) memperingati hari ulang tahunnya yang ke-4. (*LUxxii*)

* Tgk. M. Hanafiah dari Jawatan Perdagangan Daerah Aceh selaku kepala rombongan perutusan dagang yang baru kembali dari Jawa menyampaikan kesan-kesannya bahwa rakyat bekerja rajin dan pembangunan terus berkembang.

  "Tanpa mengindahkan perang, mereka terus giat berusaha, bertani, memperbaiki segala sesuatu yang rusak, dan menggerakkan pembangunan di segala lapangan.

  Jadi, selain mengharapkan hasil usaha Pemerintah dalam mengatasi kemelut ekonomi dewasa ini, rakyat pun perlu membantu dengan segala macam pembangunan. Terutama untuk menghasilkan barang keperluan sehari-hari seperti bahan makanan, bahan pakaian dsb. Dengan demikian dapatlah lambat laun kita mengurangi pemasukan barang dari luar negeri."
  (TS263)

* Wakil Perdana Menteri RI mencabut Ketetapan Komisariat Pemerintah Pusat RI tanggal 14 Agustus 1948 No. 7/IN/PPd/48 tentang pengutipan iuran pendapatan dari tiap barang impor/ekspor.

  Pencabutan ditetapkan dengan Ketetapan Wakil Perdana Menteri No. 1. Alasan pencabutan: karena Ketetapan Komisariat Pemerintah Pusat RI tidak lagi mencapai tujuan sebagaimana dimaksud semula. (TS264-266)

1949 OKTOBER 18.

* Kabinet Republik bersidang untuk membicarakan soal-soal dalam negeri, terutama keadaan di Jawa Timur. (*KU129*)

* Atase perburuhan Amerika untuk Asia Tenggara, T. Duncan Combell, melakukan perundingan dengan pejabat perburuhan Indonesia, Afandi, mengenai berbagai soal perburuhan. (*KU129*)

  Rombongan delegasi Pemerintah Pusat yang terdiri dari Menteri Keuangan Mr. Lukman Hakim, Menteri Kemakmuran I. Kasimo, dan Menteri Sosial dan Perburuhan Kusnan tiba di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dari Yogyakarta.

  Seperti delegasi-delegasi lainnya yang datang di Aceh sesudah Yogyakarta dikembalikan oleh Belanda, mereka menyatakan kagum atas kegigihan Aceh dalam menghadapi Aksi Militer Belanda kedua.

  Mereka pun menjelaskan hal-ihwal perundingan dalam KMB yang sedang berlangsung di Negeri Belanda. (TS266)

* Ketiga Menteri yang sedang berada di Aceh menyatakan kepada wartawan bahwa kedatangan mereka dimaksudkan untuk menjalin hubungan yang erat antara jawatan-jawatan pemerintah di Aceh dengan Pemerintah Pusat di Yogya, untuk mengadakan pembicaraan langsung dengan Wakil Perdana Menteri mengenai situasi terakhir, dan untuk melakukan peninjauan untuk melancarkan jalannya pemerintahan.

  Menjawab pertanyaan tentang kedudukan uang RIS nanti, Menteri Keuangan Mr. Lukman Hakim mengatakan, uang RIS itu adalah uang nasional kita. Bentuknya tidak menjadi soal. Yang penting kepercayaan rakyat pada uang itu, dan harganya jangan sampai naik-turun. Ditambahkannya, di daerah Yogya sekarang beredar dua macam uang, yaitu uang Belanda dan ORI. Uang Belanda berlaku di kota Yogya dan sekitarnya, sedang ORI meluas di kalangan rakyat, bahkan sampai Jawa Barat.

  Berbicara tentang kemakmuran, Menteri Kemakmuran Kasimo menyatakan bahwa yang penting dalam masalah ini adalah transpor. Dengan Belanda sudah dilakukan pembicaraan, dan ada harapan seluruh Sumatra, termasuk Aceh, akan mendapat alat pengangkutan. Sekarang tinggal pelaksanaannya.

Sementara itu Menteri Perburuhan dan Sosial Kusnan menerangkan bahwa kepergian Sekretaris Jenderal Kementerian Perburuhan dan Sosial ke luar negeri sekarang adalah untuk mempelajari soal perburuhan dan sosial. Pemerintah akan berusaha agar seluruh kaum buruh terpelihara dan terjamin hidupnya. Ini hanya mungkin tercapai dengan ketabahan dan perjuangan. (TS266-267)

* Ulang tahun keempat harian *Semangat Merdeka* Kutaraja dirayakan di lingkungan sendiri dengan hadirnya para pendiri, yaitu A. Hasjmy, Abdullah Arif (A. Arify), T. Alibasjah (Talsya), Ibenu Rasjid, T. Usman Basjah (Tusbasja), Abdul Manaf, M. Syarif Alimy, dll. Hadir juga Pemimpin Umum sekarang, Amelz.

  Untuk memperingati hari jadinya *Semangat Merdeka* hari ini terbit dengan tinta warna biru. (TS266)

1949 0KTOBER 19.

* Gabungan Perkumpulan Tionghoa Perantauan (GPTP) Komisariat Kotaraja (sekarang Banda Aceh) menyelenggarakan resepsi untuk merayakan hari ulang tahunnya yang keempat.

  Hadir dalam acara itu a.l. Wakil Perdana Menteri, tiga orang Menteri yang baru tiba dari Yogyakarta, Komisaris Pemerintah untuk Sumatra Utara Mr. S. M. Amin, para pembesar sipil dan militer.

  Komisaris Pemerintah dalam sambutannya mengharapkan agar hubungan antara dua bangsa yang merdeka ini dipererat di masa mendatang.

  Wakil Perdana Menteri menguraikan adanya berbagai masalah ekonomi dan cara-cara memecahkannya. Ia mengharapkan agar penduduk Tionghoa bekerja sama dengan golongan penduduk lain dalam usaha memakmurkan masyarakat. Dalam memperbaiki ekonomi Indonesia, mereka hendaknya selalu tolong-menolong.

  Sementara itu Sulaiman Mahmud dari Kantor Urusan Bangsa Asing mengharapkan supaya segenap penduduk Tionghoa di Daerah Aceh hidup rukun dan damai dengan semua pihak. (TS267)

1949 0KTOBER 20.

* Mr. Ali Budiardjo bertolak ke Jakarta untuk menyampaikan surat Menteri

Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX kepada Wakil Tinggi Kerajaan Belanda di Indonesia, A. H. J. Lovink.

Surat itu berisi usul-usul Republik mengenai cara mengatasi keadaan di Jawa Timur. (*KU129*)

* Bupati Militer Bengkalis menyampaikan pernyataan setia rakyat Siak kepada Sultan Siak Sjarif Kasim yang kini berada di Aceh, dan kepada Republik Indonesia.

  Rakyat Siak pun memprotes usaha Belanda membentuk *Siak-raad* (Dewan Siak) yang diketuai oleh Abubakar, dengan anggota Dt. Ahmad dan Dt. Kasim. Rakyat Siak hanya mengakui Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bengkalis yang dibentuk rakyat pada November 1948.

  Pidato Sultan Siak yang disiarkan *RRI* Kutaraja mendapat sambutan baik di Siak. Pidato itu kemudian diperbanyak dalam bentuk brosur, dan disebarkan kepada rakyat.

  Sementara itu Jawatan Penerangan Sumatra Utara menyatakan, Sultan Siak tidak mengakui badan apapun yang tidak dibentuk atas dasar kemauan rakyat. Sultan tetap setia kepada Republik Indonesia, dan menyerukan kepada seluruh rakyat untuk mengikuti jejaknya. (TS269)

* Komisaris Pemerintah untuk Sumatra Utara Mr. S. M. Amin, Residen Tuanku Mahmud, anggota BPKNIP Zainal Baharuddin, Ketua Sementara Badan Eksekutif Sumatra Utara Anmelz, Bupati Aceh Besar Zaini Bakry, dan pimpinan organisasi saudagar hari ini menjenguk para bekas tawanan Belanda yang kini ditampung di Kutaraja.

  Dalam kesempatan itu dibagikan pakaian sumbangan Gasida, Indolco, dan Gabungan Perkumpulan Tionghoa Perantauan (GPTP).

  Dalam pidato singkatnya Komisaris Pemerintah mengatakan,

  “Kami hargai tinggi ketabahan saudara-saudara. Semoga pengalaman selama dalam tawanan akan menambah keteguhan hati saudara-saudara dalam perjuangan kita di masa depan. Masih panjang jalan yang harus kita tempuh, dan keteguhan hati menjadi syarat penting untuk itu.” (TS269)

* Wakil Perdana Menteri mengadakan pertemuan dengan alim ulama dan cendekiawan di tempat kediamannya.

Dalam kesempatan itu secara bergiliran para ahli memberikan ceramah menurut bidang masing-masing.

Acara demikian sudah beberapa kali diadakan, dan akan terus diadakan, mengingat manfaatnya bagi ilmu pengetahuan maupun kontak antar-pribadi. (TS269-270)

1949 OKTOBER 22.

* Mr. Sujono Hadinoto sebagai kurir ke-VII Delegasi Republik Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) tiba di Yogyakarta untuk melapor tentang jalannya KMB kepada Pemerintah Indonesia. (*KU129*)

* Wakil Perdana Menteri mengumumkan bahwa mulai 1 November 1949 Pemerintah RI akan mengeluarkan Uang Republik Indonesia Baru (URIB) dari satuan 10 sen, 50 sen, 1 rupiah dan 100 rupiah.

  Uang dari satuan 100 rupiah hanya dapat digunakan sebagai pembayaran antarjawatan atau oleh Pemerintah kepada pedagang, dengan catatan, uang tersebut harus segera disetorkan ke Bank Negara atau Kantor Pos untuk ditukar dengan uang kecil menurut kebutuhan si pedagang. Uang ini berlaku sah untuk seluruh Sumatra.

  Uang dari satuan 1 rupiah berlaku untuk Daerah Militer Istimewa Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, bernilai 250 rupiah URIP untuk Sumatra Utara.

  Perbandingan nilai antara URIB dengan URIP untuk daerah-daerah lain baru akan ditetapkan kemudian.

  Pengeluaran URIB untuk Daerah Militer Istimewa Aceh, Langkat, dan Tanah Karo tiap bulan tidak boleh melebihi jumlah uang yang tiap bulan dikeluarkan oleh Pemerintah di Sumatra Utara.

  Dengan dikeluarkannya URIB, maka URIPSU (Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatra Utara) tidak dikeluarkan lagi. Sementara itu URIPSU tetap berlaku sah sampai ditarik kembali dari peredaran. (TS270-271)

* Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo mengeluarkan peraturan No. 319/GM/1949 berisi ketetapan sbb.:

  “Memasuki dan/atau keluar dari Daerah Kemiliteran Aceh, Langkat, dan Tanah Karo berada di bawah penilikan (pengawasan) Gubernur Militer.

Barang siapa hendak memasuki dan/atau keluar dari Daerah Kemiliteran Aceh, Langkat, dan Tanah Karo harus memperoleh ijin dari Gubernur Militer atau instansi yang ditunjuk olehnya.

Untuk itu yang berkepentingan harus memasukkan surat permohonan kepada Gubernur Militer dengan mencantumkan: 1. nama, kebangsaan, umur, pekerjaan dan alamat; 2. tempat dan nama yang akan dituju; 3. untuk keperluan apa; 4. untuk berapa lama; 5. dengan melalui jalan mana dan dengan alat pengangkutan apa; 6. keterangan lain yang dianggap perlu.

Surat permohonan terlebih dahulu harus diajukan kepada Kepala Polisi setempat, terkecuali anggota tentara yang harus mengajukannya lewat hirarki ketentaraan.

Barang siapa melanggar peraturan ini dikenai hukuman sesuai dengan Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 30 yang ditandatangani oleh Acting Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, Letnan Kolonel Husin Jusuf." (TS271-272)

* Menteri Perburuhan Kusnan memberikan penjelasan mengenai berbagai masalah perburuhan kepada jajaran Jawatan Sosial dan Perburuhan, bertempat di gedung DPRD Kutaraja.

Dikatakannya, salah satu masalah yang sukar dipecahkan ialah masalah perburuhan. Dalam memperjuangkan masalah ini, kerapkali kita tak dapat melepaskan diri dari sesuatu aliran politik. Akibatnya kerapkali timbul perbedaan antara kita dengan kita. Sering perjuangan gerakan buruh dicampuradukkan dengan perjuangan politik, hingga gerakan buruh yang sudah kuat sering pecah.

Kalau sekarang keadaan belum memuaskan, itu bukannya kesalahan Pemerintah, tetapi mungkin kesalahan beberapa orang yang tak dapat menjalankan politik Pemerintah. Kita mengetahui, bahwa tidak semua orang dapat memimpin dan bertindak adil, dan tak semua orang dapat mengerjakan sesuatu menurut undang-undang, walau Undang-undang Dasar Republik Indonesia baik sekali.

Menteri Perburuhan menyesalkan bahwa banyak pemimpin gerakan buruh tidak suci, dan melakukan kegiatan yang tidak diinginkan. (TS272)

1949 OKTOBER 24.

* Acting Perdana Menteri, Sultan Hamengkubuwono IX, atas nama Pemerintah Republik Indonesia memberikan keterangan kepada Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) dalam sidang terbuka yang membahas jalannya Konferensi Meja Bundar (KMB) dan pelaksanaan Statemen Rum-Roijen. (*KU129*)

* Menteri Penerangan, Mr. Samsudin, bertolak dari Den Haag ke Kairo, selanjutnya ke Indonesia lewat Karachi dan Bangkok. (*KU129*)

* Pihak Indonesia dan pihak Belanda dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) akhirnya mencapai persetujuan bahwa Republik Indonesia Serikat (RIS) akan mengambil oper dari Hindia Belanda pinjaman-pinjaman yang semuanya berjumlah 4.300 juta gulden.

  Sebagai imbalan dari beban yang berat ini RIS tidak diwajibkan memberi jaminan apa pun kepada Negeri Belanda untuk pembayaran kembali pinjaman yang begitu besar itu. (AT294)

* Pihak Indonesia dan Belanda dengan resmi menyatakan sepakat untuk mengadakan pertukaran Komisaris Tinggi. (*KU129*)

* Di lapangan kemiliteran tercapai persetujuan prinsip Indonesia-Belanda mengenai penarikan pasukan dan reorganisasi tentara yang semula berada di bawah komando Belanda. (*KU129*)

* Staf Divisi Siliwangi mengeluarkan Mutasi Order (Perintah Mutasi) No. 126/1949 berisi penugasan Letnan Kolonel R. Taswin Natadiningrat sebagai Komandan Komando Basis Jakarta.

  Kekuasaan atas kota Jakarta waktu itu masih berada di tangan Belanda, tapi sesuai dengan hasil Konferensi Meja Bundar yang ditandatangani pada 2 November 1949, kota Jakarta harus diserahkan kepada TNI. Untuk itu telah dibentuk Local Joint Committee yang merupakan badan di bawah pengawasan UNCI (United Nations Commission for Indonesia). Pihak Indonesia diwakili oleh Letnan Kolonel Taswin Natadiningrat, dibantu oleh Kapten Ashari Zikir. (SDA109)

1949 Oktober 25.

* Penasihat Delegasi Republik pada Konferensi Meja Bundar (KMB), Abikusno Tjokrosujoso, berangkat ke Suriname untuk membicarakan masalah kewarganegaraan sekitar 300.000 orang Indonesia yang berada di negeri tersebut. Kewarganegaraan orang-orang tersebut merupakan salah satu masalah sulit yang dihadapi oleh KMB. (*KU129*)

* Di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) berlangsung rapat umum untuk mendengarkan wejangan Menteri Kemakmuran Kasimo, Menteri Keuangan Mr. Lukman Hakim, dan Menteri Perburuhan dan Sosial Kusnan.

  Menteri Kusnan memperkenalkan kementerian yang dipimpinnya, karena menurutnya belum banyak orang mengenal kementerian tersebut.

  Dasar politik perburuhan Pemerintah tidak lepas dari Pancasila. Dengan industrialisasi, pertambangan, perkebunan dll. di daerah ini akan terbuka lapangan kerja bagi buruh. Dikatakannya, di negara Indonesia yang kaya raya ini tidak boleh ada kemiskinan dan kemelaratan, dan tidak boleh ada pengemis dan anak yatim yang terlantar. Ini tugas Kementerian Perburuhan dan Sosial.

  Menteri Kasimo menjelaskan bahwa tujuan kementerian yang dipimpinnya a.l. adalah mencapai taraf hidup rakyat yang lebih tinggi dan sempurna. Di masa lampau dikatakan, rakyat cukup hidup dengan segobang sehari. Itu karena kita tidak merdeka.

  Kini kita akan mewujudkan cita-cita kita. Seperti dikatakan oleh Wakil Presiden Hatta, kemerdekaan adalah jembatan emas. Tidak berarti bahwa Pemerintah wajib langsung memberikan kemakmuran kepada seluruh warga negara. Pemerintah hanya wajib menyediakan syarat-syarat untuk mencapai kemakmuran tersebut bagi warga negara yang mau menyingsingkan lengan baju untuk mencapai kebahagiaan hidup.

  Menteri Lukman Hakim menjelaskan sebab-sebab tidak lancarnya perundingan mengenai keuangan dan utang-piutang di KMB. Pemerintah Belanda mengharuskan Indonesia menerima utang Belanda yang jumlahnya 6.000 juta rupiah. Kalau itu kita terima, berarti tiap bulan kita harus membayar bunganya saja sebesar 200 juta rupiah. Ini tidak mungkin, karena kita tak akan punya uang lagi untuk jaminan sosial, kemakmuran, dan pembangunan.

Akhirnya Wakil Perdana Menteri Sjafruddin menyatakan bahwa dengan selesainya KMB pada 1 November nanti, di Daerah Aceh akan dilancarkan juga rencana pembangunan ekonomi.

Salah satu langkahnya adalah pengeluaran uang Republik yang baru jenis 100 rupiah, 10 rupiah, 1 rupiah, dan 50 sen. Uang itu akan diberi nama URIBA, Uang Republik Indonesia Baru, yang nilainya berbanding dengan uang lama 1:250. Uang lama tetap berlaku. Pemerintah tidak bermaksud merugikan masyarakat, karenanya uang baru tidak akan dikeluarkan lebih banyak dari yang selama ini beredar.

Wakil Perdana Menteri menganjurkan agar penduduk menyimpan uangnya sebanyak mungkin di Kantor Pos atau Bank, tanpa takut tidak akan dikembalikan oleh Pemerintah. Ia pun menganjurkan didirikannya koperasi. (TS273-274)

1949 OKTOBER 26.

* Jawatan Penerangan Sumatra Utara di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) mengumumkan bahwa mulai malam ini *Radio Republik Indonesia* Sumatra Utara memancarkan siarannya pada dua gelombang, yaitu 33,5 meter dengan getaran 8.94 Mc/s dan 39,37 meter dengan getaran 7.62 Mc/s. Jam siaran tetap sebagaimana biasa, yaitu dari jam 19.30 sampai jam 22.00 waktu Indonesia.

  Sebelum ini, siaran dipancarkan pada gelombang 33,5 meter. (TS274)

1949 OKTOBER 28.

* United Nations Commission for Indonesia (UNCI) bersidang untuk membicarakan keadaan di Jawa Timur, terutama mengenai penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh militer Belanda. (*KU129*)

1949 OKTOBER 29.

* Panitia Pusat KMB mengadakan rapat pleno untuk merundingkan masalah Irian Barat yang mengalami jalan buntu.

  Dalam kesempatan itu Bung Hatta menandaskan bahwa Hindia Belanda selamanya diperintah sebagai suatu kesatuan dan belum pernah didengar tentang pemisahan Irian Barat dari daerah Hindia Belanda. Pada waktu perundingan di Linggajati, Irian Barat diakui sebagai bagian dari

Keresidenan Maluku, dan Hindia Belanda diakui pula dalam Persetujuan Linggajati sebagai satu kesatuan tanpa mengecualikan Irian Barat.

Ketua delegasi Belanda Van Maarseveen menyatakan "*het doet de Nederlandse Regeering leed, dat zij op dit punt niet—zoals in behandelde aangelegenheden—kan tegemoet komen aan de verlangens van de Indonesische delegaties. Nederland kan namelijk niet de souvereiniteit over Nieuw-Guinea aan Indonesie overdragen,*" 'Pemerintah Negeri Belanda amat menyesal bahwa tentang hal ini—berlainan dengan hal-hal yang telah dibicarakan—tidak dapat memenuhi keinginan delegasi-delegasi Indonesia. Yaitu Negeri Belanda tidak dapat menyerahkan kedaulatan-nya atas Irian Barat kepada Indonesia'". (AT295-296)Naskah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) disetujui oleh delegasi Republik Indonesia (RI) dan wakil-wakil negara bagian Indonesia di Kurhaus, Scheveningen, Negeri Belanda, selama berlangsungnya Konferensi Meja Bundar (KMB).

Penandatangan naskah Konstitusi tersebut untuk:

Republik Indonesia: Drs. Mohammad Hatta.

Kalimantan Barat: Sultan Hamid II;

Indonesia Timur: Anak Agung Gde Agung;

Madura:Dr.Supomo;

Banjar: A. A. Rivai;

Bangka: Saleh Achmad;

Belitung: K. A. Moh. Jusuf;

Dayak Besar: Mochram bin Haji Mohammad Ali;

Jawa Tengah: Dr. R. Sudjito;

Jawa Timur: R. T. Djuwito;

Kalimantan Tenggara: M. Jamani;

Kalimantan Timur: Adji Pangeran Sosronegoro;

Pasundan: Mr. R. T. Djumhana Wiriaatmadja;

Riau: Raja Mohamad;

Sumatra Selatan: Abdul Malik;

Sumatra Timur: Raja Kaliamsjah Sinaga.

Naskah tersebut kemudian dibicarakan dan disetujui oleh Permusyawaratan Federal di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta, yang dihadiri oleh wakil-wakil pemerintah RI dan pemerintah negara-negara bagian yang akan menjadi anggota RIS, juga oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masing-masing negara bagian pada tanggal 14 Desember 1949. (*KU130; PSPB2 39; Star Weekly*, 13 November 1949: 25)

* Mr. Samsudin dan kurir ke-VIII Delegasi Republik Indonesia pada KMB, Ahmad Kosasih, tiba di Yogyakarta untuk memberikan laporan kepada Pemerintah Indonesia mengenai jalannya KMB. (*KU130*)

* Konferensi Muhammadiyah Daerah Aceh, Langkat, dan Tanah Karo di Takengon mengambil resolusi yang menganjurkan kepada Pemerintah agar pembelaan nasib guru mendapat perhatian istimewa dan pengurusan cepat, sementara politik personalia guru diselaraskan dengan martabat mereka sebagai guru.

  Resolusi diambil setelah memperhatikan nasib guru sejak jaman Jepang hingga sekarang, dan kurangnya penghargaan kepada guru, padahal guru adalah golongan masyarakat yang memikul tanggung jawab menangani pendidikan demi kemajuan bangsa. (TS275)

1949 OKTOBER 30.

* Sidang KMB dibuka kembali untuk meneruskan pembicaraan mengenai status Irian Barat.

  Dalam kesempatan itu delegasi Indonesia menyatakan belum dapat menerima usul kompromi UNCI, yaitu “agar keresidenan Irian Barat tetap di bawah Pemerintah Belanda, dengan syarat bahwa sebelum akhir tahun pertama daripada kedaulatan RIS soal status Irian Barat di kemudian hari akan ditetapkan dengan jalan perundingan antara RIS dan Negeri Belanda”.

  Dilihat dari teksnya, Irian Barat akan dikecualikan dari penyerahan kedaulatan, sedangkan tentang status daerah itu sesudah setahun kedaulatan Indonesia tidak ada ketentuannya sama sekali. (AT297)

* Mayor Jenderal Belanda, S. De Waal, yang mempertahankan kota minyak Tarakan di Kalimantan terhadap invasi Jepang tahun 1942, mendesak dilancarkannya Aksi Militer Belanda III terhadap Republik Indonesia. Ia berpendapat bahwa dengan pasukan yang mereka punya di Indonesia, Belanda dapat merebut lagi Yogyakarta dan tempat-tempat strategis lain, walau tidak begitu mudah dibandingkan dengan aksi bulan Desember 1948. Ia katakan, bukan tidak mungkin Belanda memperoleh kerja sama dari beberapa "tokoh nasionalis penting" atau mungkin banyak tokoh nasionalis penting sesudah mereka dapat diyakinkan bahwa Republik sudah hapus untuk selama-lamanya.

  Jenderal De Waal memberikan pernyataan di atas dalam wawancara dengan harian *Nieuw Haagsche Courant*. (*Antara*, 1 November 1949)

1949 OKTOBER 31.

* Rombongan Menteri Keuangan, Mr. Lukman Hakim, tiba di Yogyakarta dari perjalanan ke Aceh.

  Di Yogyakarta ia menyatakan bahwa pada 1 November 1949 akan dikeluarkan Oriba (Uang Republik Indonesia Baru) di Aceh. (*KU130*)

* Sesudah mengalami jalan buntu lagi dalam membahas masalah status Irian Barat, Konferensi Meja Bundar (KMB) bersidang lagi. Pembicaraan tetap seret. Tapi kali ini UNCI mengajukan usul kompromi yang bunyinya:

  "That the status quo of the residency of New-Guinea shall be maintained through continuing the Government of the Netherlands with the stipulation that within a year from the date of the transfer of sovereignty to the RIS the question of the political status of New-Guinea be determined through negotiation between the RIS and the Netherlands, 'bahwa status quo keresidenan Irian Barat akan dilangsungkan dengan melanjutkan Pemerintahan Belanda, dengan pengertian bahwa di dalam setahun dari tanggal penyerahan kedaulatan kepada RIS, soal status politik Irian Barat akan ditentukan dengan jalan perundingan antara RIS dan Negeri Belanda'".

  Atas instruksi ketua delegasi RI, Bung Hatta, wakil delegasi Republik menyetujui usul itu karena terasa sekali tekanan dari Cochran, yang membayangkan juga bahwa Pemerintah Amerika tentu akan mendukung formulasi kompromi itu. (AT298)

* Dalam sidangnya kemarin di Yogyakarta, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) yang mencakup 13 serikat buruh telah mengambil resolusi sbb.:

  Berusaha mengirim wakil-wakil ke Kongres WFTU untuk buruh Asia dan Australia yang akan diselenggarakan di Peking pertengahan November 1949.

  Menyerukan kepada Kongres tersebut untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan:

  - Menuntut penarikan segera pasukan Belanda dari seluruh Indonesia;
  - Menuntut pembebasan para tawanan politik dan perang dari penjara-penjara Belanda;
  - Mendesak pemberlakuan kembali hak-hak demokratis dan hak-hak serikat buruh di seluruh Indonesia.
  - Menyerukan kepada WFTU untuk meringankan penderitaan rakyat Indonesia dengan mengirimkan perlengkapan kesehatan, alat-alat pertanian dsb.
  - Meminta kepada WFTU untuk mengirimkan wakil-wakilnya guna mempelajari serikat-serikat buruh Indonesia dan mengeratkan hubungan persahabatan antara serikat-serikat buruh Indonesia dengan organisasi-organisasi sejenis di bagian-bagian lain dunia. (*Antara*, 1 November 1949)

* Tentara Belanda telah merampas instruksi-instruksi rahasia dari perserikatan gerilya Indonesia di Jawa Timur, Gabungan Pembela Proklamasi, yang menyatakan bahwa Republik Indonesia Serikat akan menjadi “negara boneka yang diciptakan oleh kaum kapitalis imperialis”.

  Juru bicara resmi Belanda, Dr. P. J. Koets, mengatakan kepada para wartawan hari ini bahwa organisasi itu dipimpin oleh komunis dan merupakan ancaman nyata terhadap negara baru tersebut. Dokumen bertanggal 25 Juli itu menyatakan bahwa 4 kapal Amerika yang memuat pasukan dan perbekalan perang telah tiba di Surabaya untuk dipakai menghadapi tentara komunis Tiongkok.

  Instruksi yang diberikan kepada para komandan militer dan politik dari organisasi tersebut menyatakan bahwa mereka harus siap menyerang basis-

basis ekonomi dan kota-kota strategis yang masuk dalam lingkup "skema pertahanan imperialis Pasifik pada suatu saat psikologis yang tepat, baik secara internal maupun eksternal". (*Antara*, 1 November 1949)

* Berkat pelaksanaan *cease fire* di Jawa Timur, maka rehabilitasi jalan kereta api di Jawa Timur dapat dimulai lagi, demikian disampaikan kepada *Antara* hari ini oleh Kepala Kereta Api Departemen Eksploitasi Jawa Timur, Dr. Kosher. Ia menyatakan bahwa kereta api ekspres "*Fast* 6" yang melayani rute Surabaya-Malang telah berjalan lagi sejak beberapa waktu yang lalu. Dari 80 jembatan yang hancur, hanya 2 buah yang masih menanti perbaikan.

  Dr. Kosher mengungkapkan bahwa sejak Aksi Militer II bulan Desember y.l., kereta api di Jawa Timur telah mendapat sabotase 316 kali (93 kali selama perempat pertama tahun 1949, 137 kali selama perempat kedua, 63 kali selama bulan Juli, dan 23 kali antara 1-11 Agustus). Setelah Yogyakarta memerintahkan *cease fire*, hanya tercatat satu peledakan ranjau, yaitu di Sumobito pada 8 Oktober.

  Akhirnya ia ungkapkan bahwa kerugian yang diderita oleh Kereta Api Jawa Timur berjumlah sekitar *f*15.000.000,–. (*Antara*, 2 November 1949)

* Penarikan pasukan Belanda dari Indonesia sedapat mungkin dilakukan dalam enam bulan sesudah penyerahan kedaulatan. Hal ini telah disetujui dalam sidang Komisi Militer Konferensi Meja Bundar. Juga masalah asimilasi bekas tentara kolonial Hindia Belanda (KNIL) telah disetujui, yaitu KNIL akan menjadi bagian dari tentara federal di bawah satu komando. Selanjutnya disetujui bahwa segala perlengkapan militer yang telah dibeli oleh Pemerintah Hindia Belanda akan ditinggalkan di Indonesia. (*Antara*, 1 November 1949)

1949 Oktober (akhir).

* Konsul Jenderal Amerika Serikat di Jakarta, Jake Beam, datang menemui kepala Direktorat Timur Jauh Kementerian Luar Negeri Belanda di Jakarta, Dr. J. G. de Beus.

  Ia memberitahukan laporan intel pengamat militer Amerika di Indonesia waktu itu, bahwa seorang yang bernama Kapten Westerkamp dari KNIL

sedang menyusun pasukan sendiri yang akan dipakai untuk merebut kekuasaan negara, setelah berlangsung penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia. Jake Beam yang baru bertugas di Jakarta tidak tahu, bahwa Westerkamp yang disebutnya itu adalah Kapten Raymond Pierre Westerling. (RMU180-181)

***

(Akhir Oktober 1949)

NOVEMBER 1949

1949 NOVEMBER 1.

* *Aneta* mengumumkan berita tentang penandatanganan Rancangan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat di Kurhaus, Scheveningen, Negeri Belanda, oleh delegasi Negara Republik Indonesia dan delegasi Bijeenkomst Federaal Overleg (BFO). (*Star Weekly*, 13 November 1949: 25)

* Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) dalam sebuah komunikenya menuntut perombakan total Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) agar dapat meratifikasi keputusan Konferensi Meja Bundar yang kini berlangsung di Den Haag.

  PSII menyatakan bahwa ratifikasi hanya dapat dilakukan oleh apa yang dalam komunike itu disebut "parlemen penuh". Komunike menuntut agar perombakan yang diusulkan itu dilaksanakan"secara adil dan memuaskan dalam batas-batas situasi darurat sekarang ini".

  Diminta agar perombakan dibicarakan dan digodok oleh Badan Pekerja KNIP. Sedemikian jauh belum dicapai sesuatu keputusan. (*Antara*, 1 November 1949)

* Persatuan Pendidik Islam Indonesia (Perpisi) Daerah Aceh menyelenggarakan konferensi kilat di Kotaraja (sekarang Banda Aceh), dihadiri oleh pimpinan dan para utusan dari seluruh Aceh.

  Konferensi mengambil beberapa keputusan, a.l. akan memenuhi undangan Kongres Muslimin Indonesia yang akan diadakan di Bandung, mengusahakan agar pendidikan di negara kita didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, dan mengambil langkah-langkah perbaikan organisasi. (TS278)

* Rapat wanita yang dibuka pada 29 Oktober 1949 berakhir hari ini, dihadiri oleh wakil-wakil organisasi wanita dalam Kongres Wanita Seluruh Indonesia di Yogyakarta baru-baru ini, yaitu Muslimat Masyumi, Aisyiah, Perwari, PPI, Perguruan Kaum Ibu, GPII Puteri, Persatuan Isteri Tentera (Persit), Wanita Protestan Indonesia, Perpiindo Puteri, dan para undangan.

  Dalam rapat disampaikan laporan tentang hasil-hasil Kongres Wanita Seluruh Indonesia. Dibicarakan juga cara-cara melaksanakan keputusan-keputusan kongres, cara-cara untuk mempererat persatuan dan kerja sama antara organisasi wanita di Daerah Aceh, dan bagaimana mempersatukan tekad wanita menghadapi masa depan.

  Diputuskan untuk mengadakan Permusyawaratan Wanita Seluruh Aceh antara 25-31 November 1949 di Kutaraja. (TS278)

1949 NOVEMBER 2.

* Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dimulai tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag menghasilkan suatu persetujuan yang ditandatangani hari ini.

  Sidang penutup hari ini dibuka di *De Ridderzaal* oleh Perdana Menteri Belanda Dr. Willem Drees. Isi pokok Persetujuan KMB:

  1. Pengakuan kedaulatan atas Republik Indonesia (RI) dilaksanakan oleh Belanda selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949;
  2. Pembentukan negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berkewajiban menanggung utang Hindia Belanda (HB) sebesar 4,3 miliar gulden;

3. Tentang Irian Barat akan diadakan perundingan tersendiri dalam waktu satu tahun setelah pengakuan kedaulatan atas RIS;
4. Pembubaran tentara Hindia Belanda, KL (Koninklijk Leger) dan KNIL (Koninklijk Nederlands-Indisch Leger) yang kemudian diintegrasikan ke dalam APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat);
5. Pembentukan Uni Indonesia-Belanda.

Khusus tentang Irian, Mohammad Hatta menyatakan dalam sidang penutup: “Kegembiraan kami sedikit tertekan oleh karena tidak segala soal dapat diselesaikan pada Konferensi Meja Bundar ini. Irian atau Nieuw Guinea masih dalam persengketaan dan akan diusahakan menyelesaikannya dalam tahun sesudah penyerahan kedaulatan kepada RIS. (HKP317)

* KMB memutuskan juga:

1. Bahwa KL (Koninklijke Landmacht, Angkatan Darat Kerajaan Belanda) sesegera mungkin akan ditarik dari Indonesia dan dipulangkan ke Negeri Belanda;
2. Bahwa KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger, Tentara Hindia Belanda) akan dilebur ke dalam Angkatan Perang Indonesia Serikat (APRIS);
3. Dan bahwa TNI akan menjadi inti dari APRIS ini.

* Dunia internasional ikut gembira dengan tercapainya persetujuan tersebut, namun ada juga pihak-pihak di dalam negeri yang tidak puas dengannya. Sebagian menyatakan bahwa persetujuan itu merupakan salah satu saja dari konsesi Pemerintah Indonesia kepada negara asing, khususnya Belanda, yang kemudian menjadi penyebab terjadinya konflik-konflik di tubuh RI khususnya, dan dalam masyarakat Indonesia umumnya. (ST8) Bahkan ada yang menyatakan bahwa persetujuan tersebut menempatkan Indonesia sebagai negeri setengah jajahan dari Kerajaan Belanda. Maka dengan selesainya konferensi tersebut, berturut-turut anggota delegasi Indonesia bertolak pulang ke tanah air: Mohammad Hatta, Mohammad Rum, dan T.B. Simatupang.

Menurut Ali Sastroamidjojo yang menjadi anggota delegasi Indonesia, konferensi itu berhasil karena tiga sebab. Pertama, karena pendapat umum

di dunia internasional menghendaki segera tercapainya penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda. Kedua, karena baik pihak Indonesia maupun pihak Belanda saling memberikan kompromi yang dapat memuaskan masing-masing pihak. Dan ketiga, karena baik pihak Belanda maupun UNCI (dan tentu juga Dewan Keamanan) mengetahui bahwa Angkatan Perang kita masih mempunyai kekuatan untuk meneruskan perjuangan bersenjata kalau kali ini perundingan gagal lagi. (AT288-289, 299; *KU130*; LM53; *LUxxii; LU t.h.*; *PSPB2 39*, RKZ110; SDA108-109; S6 71; ST59; TS279; WG180, 212)

* Konferensi Meja Bundar (KMB) berakhir dengan hasil yang "sangat memuaskan", yaitu a.l.: Indonesia akan membayar utang sebesar 4.300 juta gulden kepada Belanda; penyerahan kedaulatan atas wilayah bekas Hindia Belanda kepada Indonesia akan dilakukan oleh Belanda pada 27 Desember 1949; terkecuali kedaulatan atas Irian Barat yang akan ditentukan kemudian, berarti tetap berada dalam kekuasaan Belanda;

Sebagai ketua delegasi Indonesia, Perdana Menteri Mohammad Hatta menyatakan a.l. dalam pidato penutupan KMB:

"Kegembiraan kami sedikit tertekan karena tidak semua soal dapat diselesaikan pada KMB ini. Irian atau Nieuw Guinea masih dalam persengketaan dan akan diusahakan penyelesaiannya dalam satu tahun sesudah penyerahan kedaulatan kepada RIS." (AT160; BHS48; SME28; "Peaceful settlement in Indonesia", h. 20, dalam *FAK132*)

* J.L. Latumahina, Ketua Liga Kemerdekaan Rakyat Irian hari ini menyatakan kekecewaannya karena Irian tetap berada di bawah kekuasaan Belanda, dan tidak masuk dalam Republik Indonesia Serikat. Ia menyatakan penyesalannya kepada Delegasi Republik yang mengikuti Konferensi Meja Bundar karena tidak berpegang kuat pada wacana yang dinamakan "Kedaulatan harus diserahkan secara penuh dan tak bersyarat".

Ia menyatakan bahwa selama setahun Irian berada di bawah kekuasaan Belanda, Belanda akan berusaha untuk selama-lamanya mencengkeram negeri itu dengan memusatkan segala kekuatannya untuk menghancurkan setiap organisasi rakyat yang berjuang memperoleh kemerdekaan. Menurut pemimpin Irian ini, Belanda dapat dengan mudah "dengan pegangan

demokrasi semu" menjamin kepemilikan atas negeri itu untuk selamanya, a.l. dengan mengimpor orang Belanda dan Indo ke sana hingga jumlahnya melebihi jumlah penduduk pribumi, untuk memudahkan memperoleh kemenangan apabila diadakan plebisit.

Latumahina menyatakan selanjutnya bahwa keyakinan rakyatnya tetap pada Republik sebagai arus utama aspirasi kemerdekaan rakyat Indonesia. Ia menyarankan agar Parlemen Republik menolak resolusi Konferensi Meja Bundar, lebih-lebih, katanya, karena dewan ini sudah mendukung resolusi Liga Kemerdekaan Rakyat Irian yang menuntut dimasukkannya Irian dalam Republik Indonesia Serikat. (*Antara*, 2 November 1949)

* Mr. Mohammad Assaat, Ketua KNIP melaporkan hari ini tentang kegagalan menemukan sistem untuk merevisi struktur Parlemen Republik menghadapi ratifikasi mendatang atas keputusan Konferensi Meja Bundar tentang Indonesia di Den Haag. Kepada konferensi pers ia sampaikan bahwa BP KNIP telah bersidang selama dua bulan membahas sistem apa yang akan ditempuh untuk melakukan perombakan. Kelima usul telah ditolak oleh Badan Pekerja, demikian dikatakannya.

Ia jelaskan bahwa penyebab kegagalan berturut-turut ini ialah karena tiadanya kriteria yang pasti. Ia katakan bahwa Dekrit Presiden No. 6 tahun 1946 mengenai penambahan jumlah anggota parlemen atas inisiatif Presiden semata terbukti tidak efektif. Ia tambahkan, untuk menghindari terulangnya kegagalan sehubungan dengan dekrit ini, maka setiap penambahan jumlah anggota harus lebih dahulu mendapat persetujuan dari BP KNIP dan juga Presiden.

Namun ia nyatakan bahwa "pintu belum sepenuhnya tertutup" untuk menemukan jalan keluar dari kebuntuan. Ia sarankan agar Pemerintah mengambil inisiatif untuk memperkenalkan rencana undang-undang pembaharuan parlemen, karena hanya inilah yang dapat mengatasi kemandekan sekarang.

Sementara itu Sjamsuddin Sutan Makmur, Ketua Panitia Revisi, menyatakan bahwa kesulitan lain dalam menemukan pemecahan ialah definisi mengenai organisasi-organisasi yang menuntut kursi di dalam Parlemen. (*Antara*, 2 November 1949)

1949 NOVEMBER 3.

* Rombongan delegasi Republik ke Konferensi ECAFE (Economic Commission for Asia and the Far East tanggal 5-29 Oktober 1949 di Singapura tiba kembali di Yogyakarta. (*KU130*)

* Penasihat Delegasi Republik ke Konferensi Meja Bundar (KMB), Abikusno Tjokrosujoso, bertolak ke Indonesia dari Paramaribo. (*KU130*)

* "Saya sangat menyayangkan bahwa Uni Indonesia-Belanda mulai dengan konflik," demikian Anak Agung Gde Agung, Perdana Menteri Indonesia Timur, mengenai penandatanganan keputusan Konferensi Meja Bundar tadi malam.

  Anak Agung menunjuk Irian yang tetap menjadi titik sengketa, dan ia menambahkan bahwa"ini bisa membahayakan kerja sama dalam Uni".

  Perdana Menteri Indonesia Timur itu menekankan bahwa tidak seperti digambarkan oleh pers Belanda, Irian tidak menyangkut Indonesia Timur saja, melainkan seluruh rakyat Indonesia. Ia katakan, sejak jaman dahulu Irian merupakan bagian dari bangsa Indonesia, dan gagasan inilah yang mendasari semboyan"dari Sabang hingga Merauke".

  Ia tekankan bahwa segera sesudah penyerahan kedaulatan, masalah Irian harus ditangani, dan ia tidak bisa mentolerir penundaannya, sebab masalah ini tidak boleh lagi menjadi tawar-menawar. Ia mengingatkan bahwa penyelesaiannya harus dicapai dalam setahun, seperti dinyatakan dalam persetujuan.

  Ketika diingatkan bahwa Komisi PBB harus menjadi mediator masalah ini, Anak Agung menekankan bahwa bagaimanapun pembicaraan harus dilakukan oleh dua bangsa yang berdaulat. (*Antara*)

* Indonesia menginginkan guru-guru, teknisi, peralatan pangan dan industri dari Australia, demikian dikatakan oleh wakil pemerintah Indonesia di Australia, Dr. Usman, kepada AFP hari ini. Usman mengatakan, bahasa Inggris akan menjadi bahasa asing utama yang diajarkan di sekolah-sekolah. Para guru sedang menyiapkan buku-buku pelajaran untuk mengatasi kekurangan di Indonesia, demikian ia tambahkan. Usman menerangkan bahwa sekretaris Departemen Penerbangan Sipil Republik, Dr.

Sugoto, akan datang di Melbourne hari Minggu ini untuk mempelajari sistem penerbangan sipil Australia. Akhirnya Usman mengatakan bahwa Australia dan Republik Indonesia Serikat yang baru berdiri akan mengembangkan hubungan budaya dan dagang yang erat dengan Australia. (*Antara*)

1949 NOVEMBER 4.

* "Walau cara penyelesaian masalah pangkalan angkatan laut Surabaya dan Irian akan menjadi pil pahit bagi orang Indonesia, partai-partai politik yang besar di Republik Indonesia akhirnya tampak tidak menunjukkan semangat menolak seperti pada waktu penandatanganan persetujuan Linggajati dan Renville," demikian dinyatakan dalam tajuk rencana harian Yogyakarta *Nasional* hari ini.

  Tajuk rencana berpendapat bahwa keputusan Hatta untuk menerima"kekalahan" itu kemungkinan akan disetujui oleh para pemimpin parpol-parpol Republik yang ada di Den Haag. Tajuk rencana menyatakan pula bahwa parpol-parpol di Yogyakarta tampak dengan sabar menantikan kedatangan para pemimpin mereka. Harian itu meramalkan bahwa parpol-parpol itu akan menerima keputusan yang diambil di Den Haag.

  Nasional membenarkan bahwa akan ada oposisi kuat, tapi seperti di waktu persetujuan Linggajati, Presiden Sukarno akan menghadapkan rakyat Indonesia pada alternatif: "terima hasil-hasil Konferensi Meja Bundar dengan Sukarno-Hatta, atau tolak hasil-hasil itu tanpa Sukarno-Hatta", dan parpol-parpol akan memiliki Sukarno-Hatta dengan menelan pil pahit. Menurut *Nasional*, parpol-parpol Republik tampak tidak dapat atau belum dapat mengambil alih tanggung jawab berat yang sedemikian jauh telah dipikul oleh Sukarno-Hatta. (*Antara*)

* Ketua Persatuan Kebangsaan India di Kotaraja (sekarang Banda Aceh) Jagir Singh menyampaikan ucapan selamat kepada Pemerintah Republik Indonesia berhubung dengan tercapainya Persetujuan KMB antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia pada 2 November 1949. Isi ucapan selamat a.l.:

  "Saya sebagai mewakili bangsa India di sini mengucapkan selamat atas kemenangan yang telah diperoleh dengan hasil yang gilang-gemilang.

Saya merasa girang karena mengingat bahwa akhirnya Belanda terpaksa tunduk kepada semangat kemerdekaan bangsa Indonesia dan terpaksa menyerahkan kedaulatan kepada yang berhak, bangsa Indonesia.

Kami bangsa India di sini bertambah merasa girang hati bila mengingat bahwa negara kami dan bangsa kami memegang peranan yang istimewa dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia untuk menutup riwayat penjajahan Belanda untuk selama-lamanya dari muka bumi Indonesia, hanya karena dorongan perasaan persaudaraan dan senasib.

Perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah selesai dan telah tiba waktunya bagi bangsa India di sini untuk membanggakan bahwa tiada kedapatan seorang pun bangsa India di Indonesia yang mencari keuntungan diri sendiri dalam masa bangsa Indonesia sedang mati-matian memperjuangkan kemerdekaannya atau pun merintang-rintangi perjuangan itu, atau menolong Belanda untuk menjajah kembali di sini. Malahan sebaliknya, bangsa India di Indonesia mengikuti dan turut membantu dengan segala tenaga, hingga ada juga yang menjadi korban untuk membela saudara-saudara bangsa Indonesia.

Kami bangsa India di sini memandang masa yang gilang-gemilang yang akan datang, di mana dua bangsa besar, India dan Indonesia, akan memutar rol yang terpenting untuk kemerdekaan dan perdamaian dunia atas dasar-dasar Ahimsa menurut ajaran Mahatma Gandhi." (TS280)

* Pemerintah Indonesia Timur telah memberhentikan 4 pejabat pemerintah di Minahasa dari jabatannya karena kegiatan mereka sebagai fungsionaris eksekutif sebuah gerakan yang bertujuan menolak "wilayah hukum dan konstitusi Pemerintah Indonesia Timur", demikian laporan yang sampai di sini dari Makassar, ibu kota Indonesia Timur.

Mereka adalah Ratunbuysang, Tulaar, Mangula dan Momuat, keempatnya pejabat Komisi Ketatanegaraan Minahasa, sebuah gerakan politik yang bertujuan memisahkan Minahasa dari Indonesia Timur dan menempatkannya langsung di bawah Mahkota Belanda. (*Antara*)

* Letnan Jenderal D.C. Buurman van Vreeden, panglima angkatan bersenjata Belanda di Indonesia, menyatakan dalam pidato radio tadi malam bahwa pemulangan pasukan Belanda ke Negeri Belanda tampaknya tidak

mungkin dilakukan dalam enam bulan sesudah penyerahan kedaulatan sebagai akibat tercapainya persetujuan di Konferensi Meja Bundar di Den Haag hari Rabu lalu.

Ia jelaskan bahwa penarikan itu tergantung dari tersedianya akomodasi perkapalan, dan “dari beberapa faktor lain”.

Berbicara kepada para perwira dan prajuritnya, jenderal itu menyatakan: “Saya harus nyatakan kepada kalian, segala yang telah disetujui di Den Haag masih harus disetujui oleh Pemerintah di Belanda dan Indonesia, jadi kalau saya bicara tentang fakta, yang saya maksud adalah fakta-fakta yang diputuskan dalam Konferensi Meja Bundar.”

Ia katakan: “Tentang personil tentara Belanda di negeri ini, direncanakan sedapat mungkin agar personil ini dapat dipulangkan dalam enam bulan sesudah penyerahan kedaulatan.” Namun ia tambahkan bahwa personil tentara ini tentunya belum dapat diharapkan semua sudah pulang sekitar Juli 1950.” (*Antara*)

* Sehubungan dengan diterimanya usul kompromi UNCI (Komisi PBB untuk Indonesia) mengenai Irian, Delegasi Republik di Jakarta menekankan bahwa penerimaan itu tidak berarti bahwa delegasi Republik dan FCA telah mengabaikan tuntutan agar Irian masuk dalam RIS, demikian komunike yang disiarkan hari ini.Komunike menyatakan, kedua delegasi masih berpendapat bahwa Irian harus menjadi bagian dari wilayah RIS.

“Penerimaan usul kompromi UNCI hanya berarti bahwa pemecahan final untuk status Irian ditunda setahun.”

Usul kompromi UNCI itu a.l. berbunyi sbb.:

“Direkomendasikan bahwa Residensi New Guinea terus berada di bawah Pemerintah Belanda, dengan ketentuan bahwa pada akhir tahun pertama kedaulatan RIS, masalah status politik masa depan New Guinea ditentukan dengan perundingan antara RIS dan Negeri Belanda.” (*Antara*)

* Menteri Luar Negeri Dean Acheson mengatakan hari Kamis bahwa Amerika Serikat sedang mempelajari cara-cara memberikan bantuan kepada Republik Indonesia Serikat yang baru didirikan, “sekiranya bantuan demikian diminta”.

Acheson mengucapkan selamat kepada Negeri Belanda dan Indonesia atas tercapainya persetujuan. (*Antara*)

1949 November 5.

* Kabinet Republik bersidang untuk mendengarkan laporan Menteri Penerangan Mr. Samsudin mengenai Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. (*KU130*)

* Delegasi Belanda ke KMB mengirim surat kepada Delegasi Republik dan Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) agar memasukkan ahli-ahli yang dipercayainya untuk jabatan-jabatan federal. (*KU131*)

* Di Lhokseumawe, Aceh, berlangsung rapat pembentukan Komisariat Serikat Buruh Islam Indonesia Sumatra Utara. Komisariat diketuai oleh Mohd. Ali Balwy, dengan ketua Dewan Penasihat Tgk. Sulaiman Daud, dan ketua Pengurus Harian K.H.A. Madjid Abdullah. (TS281)

* Surat kabar "*Het Vrije Volk*" yang berhaluan sosialis mengatakan hari ini sehubungan dengan berakhirnya Konferensi Meja Bundar mengenai Indonesia di Den Haag bahwa era kolonial sudah lewat dan tidak mungkin kembali lagi.

  Sementara menantikan perkembangan hubungan yang baru di masa depan, kita boleh merasa puas dengan hasil-hasil yang telah dicapai, demikian dikatakannya.

  Surat kabar itu percaya bahwa kerja sama militer akan menjadi batu ujian keberhasilan. Barangkali tidak mudah memandang bekas musuh sebagai sekutu, dan membantu serta memberikan nasihat kepada sekutu tersebut dalam membangun kekuatan tempurnya, tetapi penting sekali agar Negara Baru ini akan menjadi negara yang kuat, dan agar Pemerintahnya memiliki otoritas yang diperlukan bagi pembangunan yang mantap.

  Bahwa persetujuan yang telah tercapai dalam Konferensi itu masih perlu diratifikasi oleh parlemen kedua belah pihak, surat kabar itu menambahkan, "akan menjadi bencana jika persetujuan itu tidak mendapat ratifikasi yang diperlukan. Mengenai parlemen Belanda, kami percaya bahwa ia tak akan berani meriskir kegagalan." (*Antara*)

* Perdana Menteri Republik Indonesia, Mohammad Hatta, menyatakan kepada pers hari ini bahwa Negara Indonesia yang baru akan menyetujui politik netralitas yang mengutamakan kerja sama dengan semua bangsa. Hatta menunjukkan simpatinya kepada politik Pandit Nehru, namun menambahkan bahwa ia tidak menyetujui pembentukan "Blok Asia" karena "kata blok selalu mengandung arti permusuhan terhadap seseorang". Berbicara tentang masalah Irian, Perdana Menteri Republik itu menyatakan bahwa klaim Indonesia atas wilayah itu tidak berarti Negara Indonesia yang baru mengklaim juga bagian Australia dari Irian, bagian Inggris dari Borneo, atau bagian Portugis dari Timor.

  Hatta membenarkan bahwa Republik Indonesia Serikat akan menghadapi tugas ekonomi dan politik yang paling sulit. Ia pun berpendapat bahwa kaum ekstremis akan bangkit menentang hasil-hasil Konferensi Meja Bundar, tapi Hatta menyatakan percaya kepada angkatan bersenjata Indonesia. Masalah utama rencana ekonomi bagi rehabilitasi Indonesia, menurut Hatta, adalah industrialisasi negeri dan transmigrasi dari Pulau Jawa yang terlalu padat penduduknya. Negara yang baru ini, kata Hatta, akan meminta pinjaman luar negeri untuk membantu mengembangkan sumber-sumber alam, khususnya hutan. Dibukanya kembali bantuan Marshall kepada Indonesia sudah dibicarakan dengan para pejabat Amerika. Hatta akan meninggalkan Belanda menuju Indonesia hari Senin mendatang. (*Antara*)

* Abdul Rachman Raoufi, Kepala Departemen Politik Kementerian Luar Negeri Afghanistan yang berada dalam rombongan Wakil Perdana Menteri Republik Sjafruddin di Medan dalam perjalanan ke Yogyakarta mengatakan kepada *Antara* kemarin siang bahwa ia berencana tinggal lebih lama di Indonesia dan bertemu dengan Perdana Menteri Republik Mohammad Hatta.

  Ia menyatakan senang mendengar tentang berakhirnya dengan sukses Konferensi Meja Bundar di Den Haag karena negerinya berkepentingan dengan berdirinya Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Ia katakan bahwa Afghanistan adalah negeri pertama yang memberikan pengakuan de-jure kepada Republik Indonesia.

  Abdul Rachman Raoufi telah datang di Indonesia bersama wakil Republik di Afghanistan, Jenderal Mayor Abdul Kadir. (*Antara*)

* Pertemuan “Lembaga Masyarakat”, sebuah komite politik yang kabarnya berpengaruh di Yogyakarta tadi malam, telah membicarakan politik AS terhadap Indonesia, seperti diumumkan oleh USIS di Jakarta.

  Dalam pertemuan itu Sekretaris Komite di hadapan hadirin yang terdiri dari wakil-wakil 49 partai politik dan organisasi nasional mengatakan bahwa reaksi Pejabat Menteri Penerangan Republik Ruslan Abdulgani terhadap pengumuman politik AS itu adalah sbb.:

  a. Jalan pikiran AS dalam rumusan politik itu tidak obyektif dan tidak didasarkan pada fakta-fakta nyata.
  b. Kemerdekaan politik bagi rakyat Indonesia bukan merupakan aspirasi terakhir, melainkan hanya merupakan alat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

  Ia katakan selanjutnya bahwa Statemen Wakil Presiden Hatta sebelum ia meninggalkan Indonesia menuju Den Haag menekankan bahwa kemerdekaan politik tidak akan ada artinya bila tidak disertai kemerdekaan ekonomi. Menurut pendapatnya, statemen itu dengan sendirinya berarti bahwa Republik Indonesia akan punya kekuasaan penuh untuk mewujudkan apa yang sudah ditentukan dalam Undang-undang Dasar Republik bahwa:

  a. Perusahaan-perusahaan ekonomi harus diselenggarakan secara kolektif berdasarkan konstitusi keluarga.
  b. Perusahaan-perusahaan produksi yang vital bagi negeri dan melibatkan orang dalam jumlah besar harus dikuasai oleh negara.
  c. Tanah dan udara serta sumber-sumber alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

  Pembicaraan tersebut menekankan bahwa hanya dengan mengikuti kebijakan ekonomi tersebut di atas Pemerintah Republik dapat berharap memenuhi janji dalam konstitusi tentang “pekerjaan dan penghidupan bagi tiap warga negara yang layak bagi manusia”.

  Pembicara mengatakan bahwa selama empat setengah tahun Belanda telah terus melakukan usaha-usaha antara lain dengan melancarkan dua kali perang kolonial untuk memaksa rakyat Indonesia mengubah prinsip ekonomi yang menurut Belanda merugikan status ekonominya yang istimewa di Indonesia.

Pembicara menyimpulkan bahwa gambaran tentang RIS yang dipunyai Kementerian Luar Negeri AS tidak memuaskan aspirasi rakyat Indonesia, dan setiap tekanan dalam bentuk apa pun dan negeri mana pun, bahkan dalam membentuk RIS, adalah bertentangan dengan hak rakyat Indonesia untuk memerintah diri sendiri, seperti dinyatakan dalam Piagam Atlantik maupun Piagam PBB.

Ia katakan, rakyat Indonesia selalu bersedia menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda dengan cara damai, namun tanpa mengurangi hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dalam makna politik dan ekonomi yang sebenar-benarnya.

Akhirnya pembicara mendesak partai-partai politik dan organisasi-organisasi nasional yang diwakili dalam pertemuan itu untuk menentukan sikap terhadap statemen AS itu dan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan program politik masing-masing. (*Antara*)

* Pembicaraan tentang dimulainya lagi bantuan Amerika kepada Indonesia sedang diadakan di Paris oleh Menteri Luar Negeri Belanda Dr. Stikker, menurut Dr. Mohammad Hatta, pemimpin delegasi Republik ke Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Dr. Hatta menambahkan bahwa Dr. Stikker telah melakukan pembicaraan tak resmi dengan para pemimpin Indonesia sebelum pergi ke Paris untuk menghadiri pembicaraan Dewan Eropa. Ditanya apakah Belanda dan Indonesia telah membuat rencana untuk bersama-sama mengajukan permintaan dimulainya lagi bantuan Marshall sesudah kini dicapai persetujuan mengenai masa depan Indonesia, Dr. Hatta menjawab: “Tidak. Rencana ini sekarang ada di tangan Dr. Stikker.” Bantuan Marshall kepada Indonesia dihentikan oleh Amerika Serikat segera sesudah terjadinya aksi militer Belanda di Indonesia Desember lalu. Namun diumumkan di Paris bulan September lalu, bahwa 37 juta dollar telah dimasukkan dalam hibah umum untuk 6 bulan yang berakhir tanggal 31 Desember nanti.

Ada kemungkinan Menteri Luar Negeri Stikker membicarakan juga posisi Indonesia sesudah menjadi negara berdaulat dengan Paul Hoffman, Administrator Bantuan Marshall. Sesudah itu Indonesia tidak akan lagi berhak atas bantuan Amerika ini, yang hanya dapat diberikan kepada negeri-negeri Eropa serta wilayah-wilayah yang tergantung kepadanya.

Berbicara tentang politik luar negeri Republik yang baru itu, Dr. Hatta mengatakan bahwa mereka akan "berjuang bagi perdamaian internasional lewat kerja sama dengan semua bangsa lain". Indonesia akan bersikap netral dalam konflik politik yang terjadi di antara kelompok-kelompok dunia, katanya. "Kami tidak setuju dengan bentuk blok Asia apa pun, sebab ini akan berarti kami bersikap antagonis terhadap blok lain. Tapi tentu saja kami bersimpati sepenuhnya terhadap politik Asia Perdana Menteri Nehru."

Ditanya apakah Indonesia tidak hendak menyatukan dengan Republik Indonesia Serikat wilayah Borneo Inggris, Timor Portugis, atau New Guinea daerah mandat Australia, yang semua terletak berdekatan dengan Negara Federal Baru ini, Dr. Hatta menjawab: "Saya tak tahu apakah kami harus mempertimbangkan hal seperti itu." Pemimpin delegasi Republik itu menambahkan bahwa ia tidak mengajukan sesuatu tuntutan atas wilayah-wilayah itu. Ia mengatakan bahwa menurut perasaannya problem terbesar Indonesia adalah problem ekonomi.

Ia membenarkan bahwa kelompok sayap kiri ekstrim barangkali akan meneruskan oposisi dan tidak setuju dengan hasil-hasil Konferensi Meja Bundar. "Kami akan memberikan kebebasan penuh kepada mereka untuk menyuarakan pandangan-pandangannya," katanya, "tapi kami percaya penuh kepada Tentara Republik dalam menangani tindak kekerasan apa pun yang mungkin digunakan oleh kaum ekstremis." (*Antara*)

* Dr. Assaat, ketua BP KNIP menyatakan kepada *Antara* sebelum berangkat ke Jakarta pagi ini, bahwa sepengetahuannya hasil-hasil KMB akan diratifikasi secara bulat oleh parlemen-parlemen negara anggota RIS. Ditambahkannya bahwa penolakan satu negara anggota terhadap rancangan persetujuan itu sudah cukup bagi kegagalan Indonesia untuk meratifikasi persetujuan Den Haag. Namun Assaat menyatakan optimis terhadap kemungkinan ratifikasi.

Assaat menyatakan selanjutnya bahwa ia belum dapat memberikan informasi apakah ratifikasi akan diberikan oleh Badan Pekerja ataukah oleh KNIP pleno. Ia katakan bahwa pengubahan susunan KNIP dan Badan Pekerja yang disebabkan oleh situasi Republik yang berubah sesudah terjadinya aksi militer kedua Belanda sedang berjalan. (*Antara*)

* Harian *Nasional* Yogyakarta melaporkan hari ini bahwa Menteri Luar Negeri Republik, Haji Agus Salim bermaksud mengundurkan diri dari jabatan sesudah terbentuknya RIS. Harian itu melaporkan bahwa Menteri Luar Negeri yang sudah berusia lanjut itu bermaksud menulis buku tentang Revolusi Indonesia. (*Antara*)

1949 NOVEMBER 6.

* Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) mengadakan sidang untuk meratifikasi hasil-hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). Sidang berlangsung sampai tanggal 14 Desember 1949. (*S6 71*)

* Menteri Keuangan Republik, Mr. Lukman Hakim, menyatakan hari ini bahwa diperlukan waktu kira-kira empat puluh tahun untuk melunasi utang nasional sebesar 4,3 miliar gulden yang diambil alih oleh Republik Indonesia Serikat (RIS). Ia tambahkan bahwa adalah untuk kepentingan para kreditor sendiri bahwa pembayarannya ditunda sementara, hingga uang surplus pada perbendaharaan negara dapat dipergunakan untuk pekerjaan rehabilitasi.

Menteri Keuangan mengatakan bahwa pajak-pajak barangkali harus dinaikkan untuk menambah pemasukan pemerintah yang lain seperti dari pendapatan ekspor, keuntungan dari perusahaan negara dan perusahaan patungan. Ia benarkan bahwa utang nasional sebenar 4,3 miliar gulden itu merupakan beban yang sungguh berat, berarti sekitar 60 gulden yang harus keluar dari kantong setiap orang Indonesia, ditambah bunganya. Ia berpendapat bahwa tahun-tahun pertama RIS kehidupan rakyat akan tetap sukar, namun ia yakin bahwa kehidupan akan berangsur-angsur membaik. (*Antara*)

1949 NOVEMBER 7.

* Mr. Mohammad Rum dan Kolonel T.B. Simatupang tiba di Yogyakarta dari Den Haag untuk melaporkan hasil-hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) kepada Presiden. (*KU131*)

* “Kami menyayangkan bahwa masalah Irian belum terpecahkan dan tetap menjadi sengketa,” demikian dinyatakan oleh Mr. Mohammad Rum, anggota Delegasi Republik ke Konferensi Meja Bundar di Den Haag, yang

tiba kembali di Indonesia siang ini. Bersamanya datang juga Kolonel Simatupang dan Mayor Harjono. Di lapangan terbang, Mr. Rum dijemput oleh Mr. 's Jacobs, ketua Delegasi Belanda di Indonesia.

Mr. Rum telah menyiapkan statemen, yang dibagikannya kepada para wartawan setiba di lapangan terbang di Jakarta. Esok ia akan meneruskan perjalanan ke Yogyakarta, ibu kota Republik.

Statemen itu menyatakan bahwa Konferensi Meja Bundar telah memulihkan kesatuan orang Indonesia yang akan memasuki keluarga bangsa-bangsa sebagai rakyat yang berdaulat. Sebagai bangsa yang merdeka, kata statemen, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya orang Indonesia akan dapat memulihkan kesejahteraan rakyat yang telah hilang di waktu yang lalu. Dikatakan: "Dengan Negeri Belanda kami akan bekerja sama dengan tulus atas dasar persamaan dan kesukarelaan demi kepentingan rakyat. Sebagai bangsa yang merdeka kami dapat memberikan sumbangan kami untuk menegakkan kembali perdamaian dan kesejahteraan dunia."

Mengenai Irian yang masih akan tetap berada di bawah kedaulatan Belanda, Rum mengatakan: "Kami menyayangkan bahwa masalah Irian belum terpecahkan dan tetap menjadi sengketa. Kami betul-betul mengharapkan bahwa hal ini tidak akan menghalangi kerja sama dengan Negera Belanda, dan bahwa masalah ini akan terpecahkan secara memuaskan selekas mungkin." (*Antara*)

* Kolonel Simatupang, kepala staf Tentara Republik dan penasihat militer utama Delegasi Republik ke Konferensi Meja Bundar di Den Haag menyatakan dalam wawancara pers hari Minggu bahwa pasukan Belanda dan KNIL akan dipusatkan di tempat-tempat yang berdekatan dengan pelabuhan laut atau tempat-tempat lain yang ditentukan menunggu pengangkutannya ke Belanda dan reorganisasinya dalam Tentara Federal RIS. Kolonel Simatupang menyatakan bahwa beberapa hal sekitar pembentukan misi militer Belanda ke Indonesia belum disetujui oleh delegasi Belanda dan Indonesia. Ia katakan, untuk Pemerintah Republik struktur misi militer ini tidak merupakan masalah sulit. Pihak Indonesialah yang akan menentukan jumlah dan ahli-ahli apa yang akan ditunjuk sebagai instruktur dalam membentuk Tentara Federal.

Menurut Kolonel Simatupang beberapa unit TNI akan ditempatkan di tempat-tempat yang ditentukan oleh Pemerintah, segera sesudah kedaulatan diserahkan. Semua orang Indonesia yang tergabung dalam KNIL dan semua warga negara Indonesia lainnya diijinkan untuk mendaftarkan diri dalam Tentara Federal, dan tidak ada diskriminasi dalam hal darah atau keturunan, demikian dikatakannya. (*Antara*)

* Delegasi Indonesia di Jakarta mengeluarkan komunike. Isinya: Dengan diterimanya usul United Nations Commission for Indonesia (UNCI) mengenai Irian berarti bahwa keputusan akhir mengenai Irian ditangguhkan untuk 1 tahun. (*KU131*)

* Bertepatan dengan ulang tahunnya yang pertama Partai Murba hari ini mengirim kawat kepada Mao Tse Tung, pemimpin Rejim Komunis Tiongkok Baru, berisi pernyataan simpati atas keberhasilan Kung Chan Tang (Komunis) mendirikan pemerintah rakyat yang "merupakan jaminan bagi perdamaian di Asia Tenggara". (*Antara*)

* Kecewa dengan dipisahkannya Irian dari RIS yang berdaulat, Silas Papare yang mewakili keinginan rakyat Irian hari ini mengirim kawat kepada Dr. Carlos Romulo, ketua Majelis Umum PBB, berisi pernyataan bahwa "Irian memiliki hak kemerdekaan seperti diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta", dan menghimbau agar dunia memperhatikan hal itu. Silas Papare menyatakan bahwa "rakyat Irian sendiri telah berhasil mengusir tentara Jepang ketika orang Belanda menyerah". Tentang ini, kata Silas Papare, "Jenderal Mac Arthur, panglima Sekutu di Pasifik, bisa memberikan kesaksian." (*Antara*)

* Sukarni, ketua Partai Murba menyatakan bahwa "Kemerdekaan yang 100%, penuh, nyata, dan tak bersyarat mustahil dapat diberikan oleh kaum imperialis". Sukarni memberikan komentar mengenai hasil Konferensi Meja Bundar, dan mengatakan, "Secara politis, ekonomi dan militer Irian dan pangkalan angkatan laut di Surabaya tetap berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda", sedangkan masa depan Indonesia "praktis hanya merdeka secara administratif".

  Partai Murba memandang persetujuan Linggajati, Renville, dan *aide-memoire* Republik sebagai usaha "meniadakan proklamasi Republik

tanggal 17 Agustus 1945". Selanjutnyas Sukarni menyatakan bahwa statemen Rum-Roijen dan Konferensi Meja Bundar di Den Haag telah berkulminasi menjadi "kalkulasi politik yang oportunis dan defaitis". (*Antara*)

* *The Evening Star* dalam tajuk rencananya menyambut persetujuan Belanda-Indonesia sebagai "perkembangan cemerlang di dunia yang rusuh". Kerja sama bersahabat ini merupakan usaha kepeloporan lain di jalur yang sudah ditempuh oleh Inggris dalam mentransformasikan bekas kerajaan kolonial menjadi persekutuan di mana bekas tanah jajahan memperoleh kemerdekaan namun masih memperoleh keuntungan berupa pengalaman dan bantuan serta pengetahuan yang dimiliki oleh bekas penjajahnya. Prinsip saling menguntungkan dari hubungan demikian itu jelas, dan akan berakibat baik tidak hanya bagi pihak-pihak yang terlibat langsung, melainkan juga bagi dunia secara keseluruhan. Apa yang paling dibutuhkan oleh negeri-negeri yang dimerdekakan ini adalah pembangunan dan pengembangan ekonomi, yang kiranya tidak dapat mereka peroleh dari rejim-rejim pribumi yang belum berpengalaman tanpa bantuan Barat. (*Antara*)

* Wakil Republik Indonesia di PBB, L.N. Palar, meramalkan bahwa pemerintahnya akan meratifikasi persetujuan Den Haag yang ditandatangani dengan Negeri Belanda minggu yang lalu serta membentuk negara Indonesia merdeka, walau dengan susah-payah. Dalam wawancara radio Palar mengatakan: "Saya pikir akan agak alot bagi Indonesia maupun Negeri Belanda untuk meratifikasi persetujuan ini", tapi ia meramalkan bahwa Negara Republik maupun Negara Federal Indonesia akan menyetujuinya. Palar mengatakan, Indonesia Timur yang harus berurusan dengan Irian akan mengalami kesulitan khusus untuk menyetujui persetujuan ini. (*Antara*)

1949 November 8.

* Pemerintah Federal Sementara minta kepada Delegasi Republik dan Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) agar menunjuk wakil-wakilnya yang akan bertugas meninjau pekerjaan di dalam aparat pemerintahan, khususnya di departemen-departemen. (*KU131*)

* Kabupaten Banjarnegara diserahkan kepada Republik oleh pihak Belanda. (*KU131*)

* Perpiindo Sumara Utara membentuk Panitia Penyokong Kongres Pelajar Islam Indonesia ke-III di Yogyakarta yang akan berlangsung bulan Desember mendatang, dengan ketua I M. Amin Hanafiah, dan ketua II M. Ali Jusuf. (*TS282*)

* Untuk memperingati Hari Pahlawan 10 November 1949 di Kotaraja (sekarang Banda Aceh) dibentuk panitia dengan Ketua Kapten Said Usman, Komandan KMK.

  Acara dimulai jam 07.30, terdiri dari:
  1. Upacara di Lapangan Blang Padang;
  2. Mengunjungi pusara pahlawan;
  3. Mengunjungi rumah sakit;
  4. Menjamu para invalid;
  5. Memberikan hadiah kepada keluarga pahlawan yang telah gugur;
  6. Mengadakan pertandingan untuk umum. (*TS282*)

* Para pejabat Belanda telah minta wakil-wakil Indonesia untuk menyebutkan berapa banyak pegawai negeri Federal dan Republik dapat bekerja untuk RIS mendatang dan menyusun detil administratif dengan pihak Belanda.

  Tentang ini Dr. P.J. Koets, juru bicara resmi Belanda, mengatakan bahwa soal ini penting sekali, sebab sesudah persetujuan Den Haag mengenai Republik yang baru ini diratifikasi, hanya tinggal sekitar seminggu kedaulatannya akan berlaku. (*Antara*)

* Setiba di lapangan terbang Meguwo, Yogyakarta, hari ini, Mr.M. Rum, pejabat ketua delegasi Republik ke Konferensi Meja Bundar di Den Haag, menyatakan kepada pers bahwa kita tak perlu terlalu kecewa dengan hasil-hasil yang dicapai oleh delegasi Republik dalam konferensi tersebut. Ia mengakui bahwa masalah Irian tidak mendapat pemecahan yang memuaskan. Penundaan pemecahan selama setahun itu sama sekali tidak berarti bahwa delegasi Republik mengabaikan tuntutan-tuntutannya. Ia katakan bahwa masalah Irian tidak sedemikian penting untuk menjadi alasan bagi

penundaan penyerahan kedaulatan Indonesia. Mr. Rum menekankan bahwa hasil-hasil KMB tidak melemahkan perjuangan Indonesia untuk mencapai aspirasi-aspirasinya, karena menurutnya hasil-hasil konferensi tersebut berasal dari "kalkulasi yang berimbang".

Selanjutnya ia tekankan bahwa Surabaya adalah pangkalan pertahanan Indonesia, dan bukan Belanda. Walau komandannya Belanda, nantinya komandan adalah orang Indonesia yang bertanggungjawab kepada Menteri Pertahanan RIS. Ia ungkapkan bahwa Kabinet RIS harus dibentuk sesegera mungkin sebelum penyerahan kedaulatan.

Ditanya pendapatnya tentang apakah rancangan ratifikasi atas persetujuan KMB akan diberikan oleh KNIP maupun Badan Pekerja KNIP, Rum tidak dapat memberikan jawaban tegas, tetapi ia katakan bahwa ia akan membantu pemerintah dalam mengusahakan agar persetujuan itu dapat diterima oleh rakyat.

Mr. Rum akan segera melaporkan hasil-hasil KMB itu kepada Presiden. (*Antara*)

* Pertemuan umum di Gedung Seni hari ini menandai dibukanya Minggu Kanak-kanak yang diselenggarakan di Yogyakarta untuk anak-anak yang menderita berbagai kekurangan karena situasi perang.

Ny. Susanto Tirtoprodjo dalam pidato pembukaannya mengatakan bahwa pendidikan anak-anak telah terabaikan selama berlangsungnya perang Indonesia-Belanda. Berdasarkan pengalaman itu, katanya, ia ingin bergabung dengan kaum wanita bangsa lain dalam usahanya menghindari timbulnya perang. (*Antara*)

* Sesudah reses seminggu, hari ini Parlemen Pasundan memulai pemandangan umum bagian kedua mengenai anggaran belanja tahun 1949 Pasundan.

Sidang ini dijadwalkan akan berlangsung sampai akhir Desember dan diperkirakan juga akan membicarakan kemungkinan untuk meratifikasi persetujuan Den Haag. (*Antara*)

* Konferensi Wanita Seluruh Pasundan yang berlangsung di ibu kota Pasundan, Bandung, dan dihadiri oleh 170 wakil 19 organisasi wanita, hari

Minggu pagi tanggal 6 November mengambil resolusi-resolusi sbb.:

1. Membentuk Komite Wanita untuk mengontrol pelaksanaan undang-undang dan untuk menekan perkawinan anak-anak dan perkawinan paksa.
2. Membentuk Komite Wanita untuk meneliti masalah-masalah perkawinan dipandang dari sudut undang-undang Islam.
3. Mendesak serikat-serikat buruh untuk membentuk departemen wanita khusus, dan mendesak semua organisasi wanita untuk memberikan kursus penerangan umum kepada buruh wanita dan untuk membentuk *"Kretches"* (tempat penitipan anak) untuk anak-anak ibu yang bekerja. (*Antara*)

* Pejabat Penerangan Belanda, Dr. V.d. Velde, menyatakan kepada para wartawan dalam negeri hari ini bahwa persiapan menyeluruh Pemerintah Hindia Belanda bagi penyerahan kedaulatan harus menunggu datangnya delegasi Indonesia dari Den Haag. Sementara itu "Jakarta" sudah mengambil langkah-langkah persiapan yang dimulai dengan Departemen Luar Negeri dan Departemen Perekonomian.

Ia katakan bahwa juga Departemen Pertahanan telah mengambil langkah-langkah serupa dengan menempatkan beberapa perwira TNI di Kantor Ajudan Jenderal Belanda. Ia katakan bahwa langkah-langkah persiapan harus diambil sementara menunggu ratifikasi persetujuan Den Haag. Ia nyatakan pula bahwa usul-usul Jacobs kepada pihak Republik telah tersusul oleh fakta-fakta nyata.

Sehubungan dengan penarikan pasukan Belanda, V.d. Velde mengatakan bahwa akan terjadi berbagai kesulitan dalam proses penarikan pasukan karena prosesnya harus berjalan sesegera mungkin, yaitu enam bulan setelah penyerahan kedaulatan. Kesulitan terbesar, adalah menghimpun kapal-kapal transpor dan akomodasi untuk mengumpulkan pasukan Belanda sebelum ditarik. (*Antara*)

1949 NOVEMBER 9.

* Economic Cooperation Administration mengumumkan hari ini bahwa Konferensi Meja Bundar yang sukses antara Belanda dan Indonesia telah memungkinkan segera dimulainya lagi bantuan Marshall untuk Indonesia.

Bantuan ini telah dihentikan oleh Amerika Serikat segera sesudah terjadinya aksi militer Belanda di Indonesia bulan Desember lalu. Tetapi diumumkan di Paris dua bulan lalu bahwa sejumlah 37 juta dollar telah disediakan bagi Indonesia untuk enam bulan, yang berakhir tanggal 31 Desember nanti.

Penyerahan kedaulatan kepada RIS berlangsung tanggal 1 Januari 1950. Sebagaimana terjadi dengan tahap pertama bantuan Program Pemulihan Eropa untuk Indonesia, alokasi ini akan diberikan kepada Belanda atas nama Indonesia, dan akan dapat diambil dalam bentuk hibah langsung dan pinjaman tambahan. Dana ini akan dipergunakan untuk membeli barang-barang konsumen yang sangat diperlukan, terutama di Amerika Serikat. (*Antara*)

* Pemerintah Republik tidak akan mencegah delegasi SOBSI, sebuah federasi serikat buruh di Yogyakarta, untuk pergi ke Peking guna menghadiri Konferensi Buruh Asia-Australia yang akan diadakan di kota itu tidak lama lagi. Pernyataan ini diberikan oleh Mohammad Hatta, Wakil Presiden Republik dan sekaligus Ketua Delegasi Republik pada KMB di Den Haag, dalam suratnya kepada tokoh Belanda D. Blokzyl, Wakil Presiden organisasi buruh internasional tersebut. Hatta menyatakan dalam suratnya, SOBSI bebas untuk mengikuti konferensi apa pun yang disukainya karena Indonesia adalah negeri demokrasi. Ia tambahkan, ia tak tahu apakah SOBSI telah menyampaikan permohonan ijin kepada Pemerintah Republik.

  Hatta mengirim surat kepada Blokzyl sebagai jawaban atas surat World Federation of Trade Unions (WFTU) yang meminta Hatta memberikan mediasi untuk mempercepat keberangkatan delegasi SOBSI ke Peking.

  Perlu dicatat bahwa SOBSI baru-baru ini telah meminta WFTU membantu memecahkan berbagai kesulitan dalam mengirimkan delegasi ke Peking. (*Antara*)

* Berita tentang penahanan Ny. Salawati Daud, anggota Dewan Kotapraja Makassar, oleh pasukan Belanda, yang diduga ada hubungannya dengan kerusuhan di kota Masamba, 60 km di tenggara Palopo, Sulawesi, baru-baru ini, telah mendatangkan reaksi dari Mr. Maria Ulfah Santoso, kepala

Biro Kontak Wanita Indonesia di Yogyakarta. Mr. Maria Ulfah Santoso menyatakan bahwa kalau berita itu benar, hal itu betul-betul sangat mengherankan, terutama karena keberhasilan KMB menurut pendapatnya harus menghilangkan suasana keruh di Indonesia. Ia nyatakan bahwa ia berencana membicarakan masalah itu dengan organisasi wanita Indonesia Kowani untuk melakukan aksi bersama melawan tindakan yang telah diambil oleh pasukan Belanda tersebut.

Dinyatakan bahwa kerusuhan di Masamba itu dimulai dengan pelucutan kesatuan polisi Masamba, peledakan jembatan-jembatan, pemutusan kabel telepon dan lain-lain tindak kekerasan oleh sekelompok orang yang kemudian berhasil menguasai uang tunai pemerintah kota sejumlah *f*9.000. Dilaporkan bahwa delapan orang polisi telah melarikan diri beserta pada penyerang. (*Antara*)

* Markas besar Federasi Olah Raga Indonesia PORI mengumumkan hari ini bahwa mereka akan berusaha agar PORI dapat diwakili dalam Permainan Olimpiade Asia yang dijadwalkan akan diselenggarakan di India bulan November tahun y.a.d.

Mereka katakan bahwa mereka telah menghubungi Panitia Persiapan Asian Olympic Games di India tentang keikutsertaan PORI tersebut. (*Antara*)

* Bekas Menteri Penerangan Republik, Mohammad Natsir, sekembali dari kunjungan ke Yogyakarta menyatakan kepada *Antara* kemarin bahwa sedemikian jauh telah terjadi perkembangan baru di bidang politik Indonesia. Ditambahkannya, ini adalah “ketenangan menjelang badai”!

Ditanya apakah Republik telah melakukan persiapan menjelang penyerahan kedaulatan, ia katakan, “Belum sekarang, tapi akan segera dilakukan.” Ia berpendapat bahwa langkah-langkah konkret dalam hubungan ini tentu saja harus menanti kembalinya delegasi Republik dari Den Haag. (*Antara*)

* Ekspor buruh kontrak dari Pasundan diistilahkan dengan “lalu-lintas manusia” hari ini oleh anggota Parlemen Pasundan Hamid Sutan, yang menyatakan bahwa sekalipun dilarang secara resmi oleh Pasundan, ekspor apa yang dinamakan “kuli kontrak” masih ada dilaporkan dari Cileduk, Sindanglaut, Majalengka dan Kejaksaan, semuanya di Keresidenan Cirebon.

Hamid Sutan mengatakan, dari daerah-daerah itu para kuli yang direkrut itu dibawa ke pelabuhan Tegal di Jawa Tengah, dan baru di sana mereka diberitahu ke mana mereka akan dibawa selanjutnya.

Hamid Sutan mengatakan selanjutnya, Pemerintah Pasundan telah diberitahu tentang kenyataan ini, dan para anggota Parlemen telah mendesaknya untuk "mengambil langkah-langkah segera". (*Antara*)

* Sidang Parlemen Pasundan hari ini mencatat 13 orang pembicara yang kebanyakan mengungkapkan sikap pro-Republik.

Dessanvagie dari organisasi Indo menyatakan bahwa ribuan orang Indo akan mengambil kewarganegaraan Indonesia apabila RIS terbentuk.

Sidang secara bulat menerima resolusi untuk tutup pada Hari Pahlawan 10 November, walau Pemerintah Pasundan telah memutuskan hanya sekolah-sekolah yang diijinkan menyambut hari itu sebagai hari libur. Tanggal 10 November menandai awal perlawanan bersenjata Indonesia terhadap dominasi asing. Hari itu adalah hari terakhir ultimatum Inggris kepada kaum nasionalis Surabaya untuk menyerahkan senjata mereka. (*Antara*)

* Dalam pidatonya mengenai revolusi sosialis Oktober kemarin di Jakarta, Wakil Presiden Perkumpulan Persahabatan Tiongkok-Sovyet Kuo Mo Jo mengatakan bahwa kaum komunis Tiongkok dengan teguh akan melanjutkan revolusi sampai selesai dan mengubah Tiongkok yang terbelakang dalam pertanian menjadi Tiongkok yang maju dalam industri, demikian "NCNA". Ia katakan: "Kami rakyat Tiongkok telah sama-sama berjanji. Di dalam negeri di bawah pimpinan Partai Komunis Tiongkok dan Ketua Mao Tze Tung kami akan melaksanakan kediktatoran demokrasi rakyat, melawan imperialisme, feodalisme dan kapitalisme birokratik, dan berjuang demi kemerdekaan, demokrasi, persatuan dan kemakmuran Tiongkok. Secara internasional kami akan bergabung dengan semua negeri dan rakyat yang cinta perdamaian dan kemerdekaan di seluruh dunia, terutama Uni Sovyet, semua negeri demokrasi rakyat dan semua bangsa yang tertindas serta berpihak pada perdamaian internasional dan demokrasi, untuk bersama-sama melawan agresi imperialis dan mempertahankan perdmaian dunia yang abadi." (*Antara*)

* Untuk memperingati “kemenangan besar” melawan pasukan Inggris tahun 1945, sebuah organisasi pemuda Indonesia di Jawa Timur hari ini “memerintahkan” kepada penduduk Jawa Timur di luar wilayah yang dikuasai oleh Belanda untuk mengibarkan bendera Merah Putih. Sebuah manifesto yang dikeluakan oleh organisasi tersebut menyatakan bahwa pemuda Jawa Timur “telah memenangkan pertempuran besar melawan imperialisme Inggris pada 8 November 1945”.

  Laporan resmi dari Batavia menyatakan telah terjadinya penghadangan di dekat Surabaya hari ini, di mana seorang prajurit tentara India dan 17 orang gerilyawan Indonesia terbunuh. Kalangan resmi Indonesia di Batavia menjelaskan bahwa menurut mereka manifesto itu “tidak memiliki bobot politik”. (*Antara*)

* Kabinet Republik bersidang tadi malam untuk mendengarkan laporan Rum mengenai hasil-hasil Konferensi Meja Bundar.

  Kalangan resmi menyatakan kepada *Antara* hari ini bahwa Kabinet tidak mengambil sesuatu keputusan sementara Kabinet menanti kedatangan Hatta di Yogyakarta. Namun mereka mengatakan bahwa susunan kabinet sekarang menjamin diterimanya Persetujuan Den Haag oleh Pemerintah Republik. Mereka pun menyatakan bahwa Pemerintah Republik belum memajukan calon-calon untuk Pemerintah RIS. (*Antara*)

* Markas besar SOBSI menyampaikan kepada pers kemarin bahwa delegasi SOBSI ke Konferensi Buruh Asia-Australia dari WFTU akan berangkat ke Peking pada 11 November.

  Menurut pengumuman itu, delegasi mencakup Njono (ketua delegasi), Subandiono (sekretaris), Salera, Kendro, Dasuki, Gondopratomo, dan Siti Fudjimah. Dua dari sembilan anggota delegasi belum dicalonkan sebelumnya. (*Antara*)

1949 November 10.

* Bertepatan dengan Hari Pahlawan hari ini, Pemerintah Republik Indonesia (RI) menganugerahkan 300 bintang gerilya kepada para gerilyawan yang telah berjasa istimewa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

  Bintang yang berbentuk segilima sebagai lambang Pancasila itu terbuat dari pecahan mortir, bom dan lain-lain.

Penerima bintang bukan hanya prajurit yang memanggul senjata, melainkan juga mereka yang berjasa di lapangan sosial, pemerintahan dsb. Seorang di antaranya adalah Nona Erna Djajadiningrat yang banyak jasanya dalam mengurus tawanan perang dan keluarganya. (*LU t.h.; PEH92*)

* Republik dan Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) memberikan jawaban kepada Delegasi Belanda. Isi jawaban telah dilakukan persiapan-persiapan reorganisasi di dalam Pemerintah Federal Sementara khusus untuk menghadapi penyerahan kedaulatan. (*KU131*)

* Bertepatan dengan Hari Pahlawan yang merupakan kontak pertama pasukan Republik dengan tentara asing (Inggris) di Surabaya tahun 1945, Presiden Sukarno telah mengeluarkan statemen sbb.: "Pahlawan yang sesungguhnya tidak menginginkan dipuji jasanya. Bunga mawar menyebarkan baunya tanpa menyebut namanya. Namun bangsa yang tahu menghargai para pahlawannya bisa menjadi bangsa yang besar. Karenanya hargailah pahlawan-pahlawan kita." (*Antara*)

* Presiden Sukarno telah menunda penandatanganan rancangan undang-undang tentang pendidikan yang telah disetujui oleh BP KNIP baru-baru ini. Tidak ada keterangan, mengapa Presiden bersikap demikian. Rancangan undang-undang itu berisi peraturan-peraturan mendasar di bidang pendidikan. (*Antara*)

* Dr.F.L. Tobing menghadap Presiden Sukarno untuk memberikan laporan mengenai Tapanuli. (*KU131*)

* Perkumpulan pegawai PTT (Dinas Pos, Telegraf, Telepon) akan menyelenggarakan konferensi umum di Yogyakarta dari tanggal 4 sampai 8 Desember. Utusan dari seluruh Indonesia akan diundang untuk hadir. Konferensi bertujuan membicarakan kepentingan para pegawai sehubungan dengan akan segera lahirnya Republik Indonesia Serikat akhir tahun ini. (*Antara*)

* Larangan terhadap harian "Buruh" yang berpihak pada kepentingan buruh telah dicabut sejak tanggal 7 November. Larangan telah diberlakukan

tanggal 19 September tahun lalu sehubungan dengan pemberontakan komunis di Madiun. Pimpinan surat kabar akan segera melakukan persiapan untuk memulai kembali penerbitannya. (*Antara*)

* Sumber-sumber yang dapat dipercaya mengatakan bahwa Pemerintah Republik mengetahui benar telah dimulainya lagi kegiatan kaum komunis di Jawa, namun kalangan pemerintah sama sekali tidak memandang kegiatan itu dengan pesimis, sebab mereka yakin bahwa segera sesudah kedaulatan berada di tangan orang Indonesia, situasi di negeri ini akan kembali normal. Komentar ini diberikan karena adanya laporan pers asing bahwa kegiatan kaum komunis telah mulai lagi di Jawa Barat dan Timur. Laporan sebelumnya menyatakan bahwa kaum komunis mendapat kesempatan untuk bergerak bebas di negeri ini asalkan mereka tetap berada dalam batas-batas hukum dan tidak cenderung menciptakan kekacauan atau kerusuhan (*Antara*)

* Mr. Mohammad Rum, wakil ketua Delegasi Republik ke Konferensi Meja Bundar di Den Haag baru-baru ini, menyatakan kepada wartawan hari ini bahwa RIS akan mengambil alih sekitar 500 perjanjian internasional. Ia tambahkan bahwa semua perjanjian itu telah dipelajari dengan teliti dan telah terbukti tidak mengganggu integritas RIS. Mengenai nasionalisasi perusahaan-perusahaan vital, Mr. Rum katakan: “Itu harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana.” Tentang ratifikasi Persetujuan Den Haag, Rum katakan bahwa kegagalan salah satu negara bagian untuk meratifikasi persetujuan itu sama sekali tidak akan menghalangi pembentukan RIS. (*Antara*)

* Mr. Anak Agung Gde Agung, Perdana Menteri Indonesia Timur, mengungkapkan hari Rabu bahwa Panitia Persiapan Nasional beranggotakan maksimum 23 orang akan segera dibentuk untuk memilih presiden RIS. Ia ungkapkan itu setibanya di lapangan terbang di Jakarta dari Belanda tempat ia menghadiri Konferensi Meja Bundar yang telah mengambil keputusan untuk menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia akhir tahun ini. Sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Federal ia telah menyiapkan daftar nama anggota pemerintah federal sementara, tapi ia menolak untuk mengungkapkan nama-nama tersebut. Ditanya tentang status badan ke-

amanan yang baru-baru ini dibentuk di Indonesia Timur menghadapi pembentukan tentara federal Indonesia mendatang, Gde Agung katakan: “Badan ini hanya diberi tugas kepolisian.”

Hari ini Gde Agung akan meneruskan perjalanan ke Makassar. Ia katakan, Parlemen Indonesia Timur akan bersidang bulan ini untuk meratifikasi persetujuan yang telah dicapai di Den Haag.

Bersama dengan Gde Agung telah datang juga dari Belanda banyak pejabat lain, termasuk. Dr. Sukiman dari Republik, Arnold Mononutu (Indonesia Timur), Makmun Sumariparadja (Pasundan), Andi Masarappi (Indonesia Timur), Tengku Daudsjah (Republik), Suwarto dan Sabaruddin (Republik) Dr. Sudjito (Jawa Tengah), A. Sinaga (Banjar, Borneo), I.A. Muis (Borneo Timur), A.F. de Rozario, penasihat delegasi Belanda. (*Antara*)

* Dr. Sukiman, anggota Delegasi Republik dalam perundingan Den Haag baru-baru ini, menyatakan hari Rabu bahwa ratifikasi Persetujuan Den Haag harus dilakukan oleh sidang pleno Komite Nasional Republik (perlemen sementara). Namun ia tambahkan bahwa masih merupakan pertanyaan, apakah sidang pleno demikian bisa berlangsung dalam keadaan sekarang. Menurut Dr. Sukiman, pemilihan presiden RIS oleh Panitia Persiapan Nasional kemungkinan akan dilakukan tanggal 25 November. (*Antara*)

* Arnold Mononutu dari Indonesia Timur menyatakan kepada pers setibanya dari Belanda hari Rabu, bahwa kedaulatan yang akan diserahkan kepada Indonesia “adalah betul-betul penuh dan tanpa syarat”. Ia tambahkan bahwa hanya wilayah negara mendatang ini tidak penuh, menunggu pemecahan masalah Irian. Ia katakan: “Kita akan berjuang terus sampai Irian masuk dalam RIS.” Ditanya tentang masa depan RIS, Mononutu katakan: “Saya berpengharapan besar.” (*Antara*)

* A.F.J. de Rozario, tokoh Indo yang bertindak selaku penasihat Delegasi Belanda dalam perundingan Den Haag, menyatakan kepada wartawan hari Rabu bahwa ia kecewa karena Delegasi Belanda tidak memberikan perhatian secukupnya kepada masa depan kelompok ras yang dia wakili. Ia katakan bahwa selama Konferensi Den Haag tampak jelas tidak ada perhatian terhadap masa depan kelompoknya. Namun ia tambahkan bahwa

berlawanan dengan Delegasi Belanda, masalah yang dihadapi kelompok-nya terus mendapat perhatian dari delegasi Republik dan delegasi Federal. Rozario menyatakan selanjutnya bahwa kelompok Indo tidak ada alasan untuk merasa khawatir akan masa depannya jika ada perhatian terhadap hasil-hasil perundingan Meja Bundar, terutama sehubungan dengan peraturan kewarganegaraan. (*Antara*)

* Empat puluh sembilan orang pejuang Republik tiba di Kotaraja (sekarang Banda Aceh) dari Sabang, setelah lebih dari dua tahun meringkuk dalam tahanan Belanda. Mereka tiba di pelabuhan Uleelheue menumpang kapal dagang N.V. Tat Ann. (TS285)

* Hari Pahlawan ke-4 diperingati di Kotaraja dengan upacara di Lapangan Blang Padang. Hadir pegawai negeri, pelajar, Tentara Nasional Indonesia dan Mobile Brigade.

Hadir juga Gubernur Militer Tgk. Muhd. Daud Beureueh, Residen Tuanku Mahmud, Komandan Divisi X TNI Letnan Kolonel Husin Jusuf, Letnan Kolonel Tje' Mat Rahmany, dan Ketua Sementara Badan Pekerja Dewan Perwakilan Sumatra Utara, Amelz.

Acara dimulai dengan pengibaran bendera Merah-Putih, menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya", dan mengheningkan cipta.

Sesudah pidato pembukaan singkat oleh Ketua Panitia Kapten Said Usman,. Gubernur Militer Tgk. Muhd. Daud Beureueh memberikan pidato sambutan. A.l. ia mengatakan bahwa sekarang adalah saat yang menentukan bagi nasib tanah air kita.

Pahlawan-pahlawan tanah air telah mengirami bumi ibu pertiwi dengan darah dan jiwanya. Kekejaman Belanda tak dapat mengamankan Indonesia, hingga terpaksa mereka mengundang Presiden Sukarno untuk menghentikan permusuhan.

Kita memperingati Hari Pahlawan dengan dua tujuan. Pertama, untuk mengenang pengorbanan para pahlawan. Dan kedua, bertekad melanjutkan perjuangan. Para pahlawan telah mempertahankan tanah air dengan gagah berani, karena itu menjadi kewajiban kita untuk mempertahankannya pula.

Atas nama Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatra Utara, Amelz, a.l. menyatakan bahwa rakyat Indonesia yang hidup kini, menerima

pusaka dari para pahlawan yang telah gugur. Maka mereka hendaknya meneruskan perjuangan hingga tercapai pulau cita-cita, dengan mempertahankan dan meneruskan pembangunan negara secara jujur di bidang masing-masing.

Banyak kesulitan kita alami. Tetapi kita terus maju di segala bidang. Kedudukan Pemerintah bertambah kuat ke luar dan ke dalam. Segala hal akan terus diperbaiki dan disempurnakan. Kita harus berusaha agar terjamin kehidupan yang bercahaya bagi rakyat. Dan itu hanya dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang mempusakai semangat dan jiwa pahlawan.

Panglima Divisi X menyampaikan pesan kepada Angkatan Darat, Laut dan Udara serta seluruh pejuang, supaya tanggal 10 November selalu diperingati untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur.

Kita memandang ke depan dalam menghadapi tugas-tugas yang akan datang, agar makin sempurna tekad dan kesanggupan kita sebagai bangsa yang merdeka. Dalam pada itu kita harus insaf bahwa masih ada gelombang kesulitan yang akan kita hadapi. Tetapi dengan pengalaman kita selama 4 tahun ini, kita tidak ragu-ragu menghadapi tugas-tugas tersebut. (TS185-186)

1949 NOVEMBER 11.

* Sumarsono dari Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), yang pada tanggal 18 September 1948 menjabat sebagai Gubernur Militer Madiun, memberikan keterangan mengenai Peristiwa Madiun.

  Menurut Sumarsono, baik Sukarno maupun Hatta telah berusaha secara lisan maupun tertulis, agar Persetujuan Renville memperoleh persetujuan umum. (KP39)

* Menjawab pertanyaan *Antara*, Panglima Komando Sumatra Kolonel Hidajat mengatakan bahwa kepergiannya ke Yogyakarta adalah untuk memberikan laporan kepada Pemerintah.

  Ia pun menyatakan, TNI di Sumatra sudah melakukan persiapan penuh bila sewaktu-waktu kedaulatan diserahkan pihak Belanda kepada RIS.

  Mengenai tentara Belanda di Sumatra ia katakan bahwa hingga sekarang belum ada tanda-tanda mereka akan ditarik dari Palembang, Bukittinggi dan kota-kota lain. (TS286)

* Supeno, sekretaris jenderal Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) yang radikal menekankan dalam pertemuan di Yogyakarta hari Rabu malam untuk memperingati ulang tahun Pesindo yang keempat bahwa organisasi pemuda ini bersifat nonpartai. Dalam pidatonya itu Supeno mengatakan bahwa Pesindo adalah organisasi pemuda nonpartai yang tidak campur tangan dengan politik. "Namun ini tidak berarti," tambah Supeno, "bahwa kami tidak siap mendukung partai yang konsekuen dalam politik antikolonialnya."

  Mengenai komitmennya dalam pemberontakan komunis di Madiun Supeno menyatakan bahwa pemberontakan itu dimulai tanpa sepengetahuan Pesindo. "Kami tidak mengeluarkan sesuatu instruksi, lisan maupun tertulis," katanya.

  Ki Hadjar Dewantoro, pendidik Indonesia terkemuka yang hadir dalam pertemuan itu, menggunakan kesempatan tersebut untuk berbicara tentang Konferensi Meja Bundar yang belum lama diakhiri. Ia katakan bahwa Persetujuan Den Haag memang harus dilakukan, dan karena persetujuan itu merupakan kompromi, maka ia tidak akan memuaskan salah satu pihak yang bersengketa. Ia berpendapat bahwa persetujuan sedemikian itu tidak akan abadi, karena menurutnya dalam kenyataan, kepentingan Belanda dan Indonesia berlainan. (*Antara*)

* *Antara* mendapat kabar bahwa kedatangan Hatta di Indonesia barangkali akan tertunda dari jadwal. Mungkin sekali Hatta akan menerima undangan Komisaris Inggris Mac Donald dan tinggal di Singapura selama dua hari, hingga ia barangkali baru akan tiba di Jakarta hari Selasa atau Rabu mendatang.

  Sementara itu laporan dari Yogyakarta menyebutkan bahwa BP KNIP maupun Kabinet Republik menanti dengan tidak sabar kembalinya Hatta di Yogyakarta, karena kalangan politik di Yogyakarta semakin prihatin dengan masalah yang berhubungan dengan Irian dan pangkalan angkatan laut Surabaya. Menurut tafsiran mereka, pangkalan ini *de facto* akan tetap berada di bawah komando Belanda untuk waktu yang tak dapat diramalkan, walaupun de jure akan berada di bawah yurisdiksi RIS. (*Antara*)

* Kemarin Hari Pahlawan yang menandai terjadinya kontak bersenjata pertama orang Indonesia dengan tentara pendudukan Inggris di Surabaya

tahun 1945, diperingati di hampir semua kota penting di Jawa, baik di wilayah pendudukan Belanda maupun wilayah Republik.

Di ibu kota Republik hari itu diperingati dengan defile militer ke makam prajurit tak dikenal dan penganugerahan bintang gerilya kepada 9 prajurit Divisi 3 TNI.

Namun di Surabaya, tempat terjadinya insiden yang diperingati tersebut, pertemuan umum yang dijadwalkan telah dilarang oleh Gubernur Jawa Timur tanpa menyebutkan alasan-alasan pelarangannya. (*Antara*)

* Menteri Perhubungan dan Pekerjaan Umum Ir. Laoh yang tiba di Jakarta dari Manila kemarin mengatakan kepada *Antara* bahwa masalah pembelian barang-barang surplus oleh Republik dari Filipina telah terpecahkan.

  Laoh mengungkapkan bahwa kiriman pertama barang-barang senilai 300.000 pesos yang terdiri dari stomwals, fasilitas pelabuhan, radio dan perlengkapan komunikasi, jembatan Baily dan berbagai barang lain itu akan dikirim ke Indonesia tanggal 15 November, dan akan tiba di sini dalam sebulan. Ia katakan bahwa barang-barang itu semuanya dari kelas A1 dan telah dibeli dengan harga maksimum 30% dari harga aslinya. Barang-barang itu akan diangkut ke wilayah Republik di Jawa lewat Tanjung Priok atau Semarang, dan di Sumatra lewat pelabuhan-pelabuhan yang ada dalam tangan Republik.

  Ditambahkannya, wakil-wakil Republik di Manila telah menerima tawaran pinjaman tak terbatas dari perusahaan-perusahaan swasta dalam bentuk kapal dan sarana pengangkutannya. Ia katakan, Australia dan beberapa negeri Asia Timur telah menawarkan pinjaman yang ingin dibicarakannya dengan Kabinet di Yogyakarta.

  Ir. Saroso, seorang dari anggota stafnya, menyatakan bahwa misi Laoh telah juga mempelajari kemungkinan hubungan dagang jangka panjang Filipina-Indonesia yang akan dilakukan dalam kerangka ECAFE.

  Ia menyatakan bahwa barang-barang belian itu dari jenis yang tidak dapat diimpor oleh Belanda karena kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi sekarang. (*Antara*)

* Beberapa orang utusan Persatuan Gereja Sedunia kemarin berkunjung ke Desa Paniwen di selatan Malang, Jawa Timur, untuk menyelidiki laporan

tentang terjadinya pembunuhan atas para jemaah dan pemerkosaan para jururawat rumah sakit Protestan di desa itu oleh serdadu-serdadu Belanda bulan Februari yang lalu. Berita ini diperoleh hari ini dari pendeta Protestan setempat, Martodipuro.

Kejadian ini mendapat publikasi di seluruh dunia, dan menimbulkan protes kalangan gereja dari banyak pihak.

Baik pihak Gereja maupun pejabat Belanda telah mengumumkan pandangan masing-masing mengenai masalah itu. (*Antara*)

* Proses perkembangan sosial dan politik di Indonesia sehubungan dengan pengalaman-pengalaman masa lalu yang menjurus kepada pemberian pemerintahan sendiri kepada Indonesia mendapat perhatian dari para ahli sosiologi Amerika. Seorang dosen bidang politik pada Universitas Yale di Amerika, Dr. Paul M. Kattenburg, yang kini sedang berkunjung ke Yogyakarta, menyatakan bahwa ia bermaksud mempelajari proses ini di Jawa Tengah. Ia nyatakan bahwa ahli-ahli sosiologi Amerika menaruh perhatian besar terhadap perkembangan pemerintahan sendiri di Indonesia. Ia katakan juga bahwa sesudah penyerahan kedaulatan kepada Indonesia, Amerika Serikat berharap segera meningkatkan jumlah organisasi penelitian sosial Amerika di negeri ini. Dr. Kattenburg berharap bahwa di masa depan akan banyak sosiolog Amerika berkunjung ke Indonesia. Selama berada di Indonesia Dr. Kattenburg akan melakukan kontak dengan beberapa profesor Indonesia dari Universitas Gajah Mada, demikian juga dengan Menteri Pendidikan, Sarmidi Mangunsarkoro. (*Antara*)

* Dalam sebuah pertemuan perpisahan semalam, Dr.S.C. Alagappan, Konsul Jenderal India untuk Indonesia, mengatakan kepada para pejabat tinggi Belanda dan Indonesia bahwa ia berharap persetujuan yang telah tercapai di Den Haag untuk memberikan kemerdekaan penuh kepada Indonesia akan mendatangkan kerja sama erat antara Indonesia dan Belanda. Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan yang diperoleh India dari Inggris telah mendatangkan saling mengerti dan sikap saling menghargai. Selanjutnya Dr. Alagappan menyatakan yakin bahwa persetujuan Den Haag pun merupakan hasil saling pengertian dan sikap saling menghargai. Ia katakan bahwa kemerdekaan politik semata tidak akan membahagiakan sesuatu

negeri. Ia sarankan agar sesudah mendapat kemerdekaan politik, negeri ini selanjutnya harus berjuang dengan bebas di bidang ekonomi. Ia tunjukkan bahwa walau India telah memperoleh kemerdekaan politik, negerinya masih berusaha memperoleh bantuan luar negeri untuk melakukan perbaikan atas situasi ekonomi dalam negeri. (*Antara*)

1949 NOVEMBER 12.

* Wakil Perdana Menteri Sjafruddin Prawiranegara datang di Yogyakarta dari Sumatra untuk memperoleh keterangan lengkap mengenai hasil-hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) dari Perdana Menteri Mohammad Hatta. (...)

* Perdana Menteri Mohammad Hatta menerangkan di Karachi, Pakistan, bahwa Republik Indonesia bersedia mengakui Tiongkok komunis, asalkan Tiongkok pun mau mengakui Republik Indonesia Serikat (RIS). (*KU131*)

* *Antara* memperoleh berita bahwa daftar kesepuluh nama yang disediakan oleh BFO untuk duduk dalam Komite Persiapan Nasional mencakup Anak Agung, Dr. Tan Eng Oen, Dr. Kosasih, Sultan Hamid, Dr. Suparmo, Abdul Malik, Dr. Indrakusuma, Tatengkeng, Kaliamsjah, dan Abdul Muis. Keanggotaan Republik berjumlah 8 orang, tetapi jumlah itu dan nama-nama anggotanya masih terus mengalami perubahan.

  Menurut keterangan, delegasi Republik dan Federal berencana mengadakan sidang pertama Komite Persiapan Nasional di Jakarta tanggal 25 November. Dinyatakan bahwa salah satu tugas besar Komite ini adalah mengatur pembentukan Dewan Pemilih untuk memilih Presiden Republik Indonesia Serikat. (*Antara*)

* Perdana Menteri Indonesia, Mohammad Hatta, mengatakan di Karachi malam ini bahwa negerinya bersedia mengakui Tiongkok Komunis sebagai imbalan atas diakuinya Indonesia.

  Hatta yang singgah di Karachi dalam perjalanan pulang dari Konferensi Meja Bundar mengatakan bahwa kerja sama dengan negeri-negeri Asia, khususnya Asia Tenggara, akan merupakan bagian integral dari politik luar negeri Indonesia mendatang.

Hatta berharap bahwa Indonesia akan segera menunjuk duta besar untuk India, Pakistan, Birma, dan Filipina sesudah penyerahan kedaulatan akhir bulan Desember nanti. Negeri Belanda akan mensponsori Indonesia menjadi anggota PBB. Segera sesudah kedaulatan diserahkan, Indonesia akan menerima bantuan sebesar 40.000.000 dollar dari Amerika Serikat, yang telah dicadangkan namun belum dibayarkan, demikian Hatta. Diharapkan bahwa anggaran belanja negeri ini akan berimbang dalam 5 tahun, "tetapi ada beban berat yang harus ditanggung oleh negara muda ini". "Kami menghadapi defisit sebesar 15.000.000 gulden. Keadaan keuangan kami ini harus diakui," demikian Hatta.

Tugas-tugas dalam negeri yang pokok sesudah menyeimbangkan anggaran belanja adalah memperbaiki pendidikan, menciptakan jaminan sosial dan kondisi perburuhan yang lebih baik. "Kalau Pemerintah yang baru ini dapat memperbaiki kondisi ekonomi, tidak ada kekhawatiran bahwa komunisme bisa terlalu mempengaruhi rakyat," demikian Hatta. (*Antara*)

* Upacara timbang terima/penyerahan Kota Solo dari tentara pendudukan Belanda yang diwakili oleh Kolonel Ohl kepada TNI yang diwakili oleh Letkol Slamet Rijadi di stadion Sriwedari. (*PEH92*)

* Sebuah pameran lukisan diselenggarakan di Balai Seni Yogyakarta pada Hari Pahlawan 10 November oleh 14 pelukis Indonesia angkatan muda yang semuanya tergabung dalam Pelukis Rakyat. Dalam pidato peresmiannya Hendra, ketua Pelukis Rakyat, mengatakan bahwa lukisan yang dipamerkan ini sedemikian jauh lebih baik dari lukisan yang ditampilkan dalam pameran 9 bulan sebelumnya. Ia katakan bahwa para pelukis yang sebagian di antaranya ikut bergerilya saat Yogyakarta diduduki oleh Belanda, telah mengalami kenyataan hidup yang sebenar-benarnya, hingga ketrampilan kreatif dan imajinasinya terasah.

Pelukis Indonesia terkemuka, Sudjojono, menyatakan demikian juga. Ia katakan bahwa para pelukis itu telah memperlihatkan banyak bakat. Hadir dalam upacara peresmian itu a.l. Presiden Sukarno dan Menteri Penerangan Sjamsuddin. (*Antara*)

* Penyerahan Kota Klaten di utara Yogyakarta serta 5 tempat lain di sekitarnya (Gondangwinangun, Ketandan, Jatinom, Jumiring dan Ceper) oleh

pasukan Belanda kepada TNI telah berlangsung tanggal 11 November tanpa insiden.

Pasukan Belanda menarik diri sekitar jam 08.30, dan setengah jam kemudian pasukan TNI memasuki tempat-tempat yang telah ditinggalkan itu dan menempati pos-posnya.

Sekitar tengah hari penduduk yang sebelumnya diperintahkan untuk tinggal di dalam rumah sepanjang pagi itu kembali diijinkan melakukan pekerjaan sehari-hari, walau jam malam masih berlaku. (*Antara*)

* Di Kotaraja (sekarang Banda Aceh) berlangsung pertemuan untuk membicarakan usaha-usaha guna memberikan bantuan kepada pelajar tak mampu yang kini sedang menuntut ilmu di luar Aceh.

  Pertemuan berhasil membentuk badan *studie-fonds* (beasiswa) dengan ketua I Tgk.Abd. Wahab Seulimeun dan ketua II Tgk.Muhd. Nur el Ibrahimy, dengan pelindung: Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Tgk.Muhd. Daud Beureueh, Mr.S.M. Amin, Tuanku Mahmud, Tgk. Hasbullah Indrapuri, Letkol Husin Jusuf, Tgk.H. Mohd. Amin, dan T.T. Mohd. Daudsjah. (TS286-287)

* Panitia Penolong Pemerintah Pusat dan Rakyat Yogyakarta (PPPPRD) Kewedanaan Idi yang meliputi Kenegerian Idi Rayek, Darul Aman, Julok dan Simpang Ulim menyerahkan kepada Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatra Utara sumbangan berupa 100 gram emas 23 karat, dan uang sebanyak Rp. 263.475,- untuk disampaikan kepada yang berhak. Selain itu telah dikumpulkan 5.000 kg sheets I (karet) dan 1.485 kg padi. (*TS287*)

* Panglima tertinggi angkatan bersenjata Belanda di Indonesia, Letjen Buurman van Vreeden mengucapkan pidato radio hari ini, yang terutama ditujukan pada anggota KNIL. Ia peringatkan kepada para anggota KNIL yang “menghadapi kesulitan-kesulitan terbesar saat ini” untuk “tetap berkepala dingin dan dengan tenang menghadapi konsekuensi-konsekuensi keadaan dewasa ini”.

  Ia himbau mereka “untuk memahami era baru ini dan untuk menyadari apa yang akan terjadi”. Dikatakannya bahwa lembaga-lembaga dan gagasan-gagasan baru berkembang pesat di seluruh dunia, dan Indonesia tidak dapat tertinggal di belakang.

Panglima mengucapkan kata-kata ini sehubungan dengan pembubaran KNIL dan pembentukan tentara RIS. Ia berjanji kepada personil KNIL untuk melakukan apa yang dapat dilakukannya dalam membela kepentingan mereka dan keluarga mereka. (*Antara*)

* Ir. Sukarno, Presiden Republik Indonesia, “yakin akan menjadi” Presiden RIS yang perrtama, menurut Drs. Mohammad Hatta, ketua delegasi Indonesia ke Konferensi Meja Bundar di Den Haag.

  Drs. Hatta yang singgah di Kalkutta hari ini dalam perjalanan ke Jakarta, mengatakan bahwa Kabinet RIS akan terdiri dari 3 anggota di samping Presiden. Sebagai wakil negara-negara yang baru itu, tambahnya, ia akan datang ke Den Haag untuk menerima kekuasaan dari Ratu Belanda. (*Antara*)

* Oto Subrata menyarankan masuknya Indonesia dalam blok dollar kemarin dalam debat Parlemen mengenai anggaran belanja Negara Pasundan tahun 1949. Ia katakan, kebijakan keuangan Indonesia yang ditentukan oleh Belanda telah dibuat tergantung pada sterling Inggris, suatu kebijakan yang menurut Oto Subrata menanggung kerusakan parah, yang akibatnya ialah runtuhnya keuangan Indonesia.

  Oto Subrata menyampaikan saran itu sehubungan dengan kegagalan Pasundan untuk mengadakan anggaran belanja yang berimbang.

  Berbicara tentang bantuan ECA, ia sarankan selanjutnya agar bantuan itu diberikan dalam bentuk perlengkapan industri dan produksi. (*Antara*)

* Pendeta dari Misi Katolik Belanda ordo Fransiskan, Pastor Waterreus, ditahan minggu lalu di Pulau Samosir di Danau Toba oleh anggota tentara Republik, tapi kemudian dibebaskan atas jasa baik seorang anggota Palang Merah Internasional yang kebetulan ada di Medan. Pendeta Belanda yang lain dari ordo itu juga, Pastor Jenniskens, mendapat serangan ketika sedang melakukan turne dengan dua orang pembantunya di sisi barat Danau Toba. Pendeta itu berhasil meloloskan diri ke pos militer terdekat, tetapi kedua pembantunya terbunuh. (*Antara*)

* Republik Indonesia Serikat siap ambil bagian dalam Persatuan Negeri-negeri Asia Tenggara, kata Perdana Menteri Mohamad Hatta di Rangoon

hari ini. Namun persatuan demikian menurutnya harus didasarkan pada "perdamaian, persamaan dan saling kerja sama".

Perdana Menteri Republik Indonesia tiba di Rangoon bersama istri dari Den Haag di mana ia memimpin delegasi Republik dalam Konferensi Meja Bundar.

Dalam persatuan demikian, tambah Hatta, tidak satu negeri pun boleh mencoba mendominasi negeri yang lain. "Semboyan kami adalah kemerdekaan bagi semua rakyat Asia yang tertindas."

Indonesia tidak berkeberatan dengan tipe pemerintah yang dipilih oleh bangsa-bangsa lain bagi dirinya sendiri, kata Perdana Menteri, tapi tidak ada tempat bagi komunisme di tengah rakyat yang sudah aman dan senang.

Indonesia memerlukan modal asing untuk mengembangkan sumber-sumber alamnya, tapi "kami hanya akan menerima modal yang tidak melanggar kepentingan nasional kami," demikian Perdana Menteri. Hatta akan melakukan pembicaraan tak resmi dengan Perdana Menteri Birma Thakin Nu, dan besok akan menghadiri acara makan siang kenegaraan. Selanjutnya esok malam akan menghadiri santap malam dengan Presiden Sao Shwe Thaike. (*Antara*)

* Pemerintah Pasundan kini sedang mengumpulkan bahan dan mempelajari kemungkinan memasukkan daerah federal Jakarta ke dalam wilayah Pasundan, demikian keterangan dari Kementerian Dalam Negeri Pasundan. Menurut Menteri, pemasukan itu sejalan dengan ketentuan dalam Undang-undang Dasar Sementara RIS dan mosi parlemen Pasundan tanggal 30 Maret 1949 yang menolak usul menjadikan Jakarta sebagai daerah federal.

Mosi tersebut hanya mengakui status kota Jakarta sebagai Ibu kota Federal dengan kemungkinan untuk diluaskan. (*Antara*)

1949 NOVEMBER 13.

* Sekitar 200 pejabat Penerangan Republik akan berkumpul di Yogyakarta bulan ini untuk menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Penerangan untuk menyesuaikan kembali kebijakan publisitas Pemerintah sehubungan dengan berakhirnya Konferensi Meja Bundar. (*Antara*)

* Telah diputuskan bahwa Konferensi Ekonomi Inter-Indonesia akan dimulai tanggal 2 Desember dan akan berlangsung sampai 8 Desember. Konferensi akan membahas perencanaan ekonomi umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah RIS mendatang sebagai sumbangan terhadap kebijakan ekonomi negara yang baru tersebut. (*Antara*)

* Baik sekarang maupun nanti Singapura tetap merupakan pusat yang paling penting dan khusus bagi hubungan Indonesia di Asia Timur, baik secara politik, ekonomi maupun budaya, demikian dinyatakan oleh Dr. Utoyo, wakil Republik di Singapura dalam wawancara dengan *Antara* hari Sabtu.

  Dr. Utoyo tiba di Jakarta sekitar seminggu yang lalu untuk mengikuti pembicaraan Republik-Belanda mengenai masa depan hubungan luar negeri Indonesia. Untuk sementara ia tidak akan kembali ke posnya seraya menanti reorganisasi perwakilan Indonesia di luar negeri sehubungan dengan akan terbentuknya negara RIS.

  Menurut pendapat Dr. Utoyo, Indonesia tidak hanya harus memperkuat perwakilannya di Singapura dan Malaya, tetapi juga membuka perwakilan baru di tempat-tempat lain seperti Hongkong dan Brunei (Borneo Inggris).

  Selanjutnya ia membenarkan bahwa hubungan dagang antara Sumatra dan Singapura sekarang sudah dimulai lagi karena telah tercapainya persetujuan antara pejabat-pejabat Republik dan Belanda.

  Dr. Utoyo mengatakan tidak mengetahui adanya rencana menunjuk seorang komisaris dagang Republik di Singapura, tapi ia menambahkan: “Sepanjang pengetahuan saya, departemen perbekalan akan menunjuk orang-orangnya di Singapura untuk urusan perdagangan, keuangan dan pelayaran. Dan Tahir Ibrahim adalah orang yang telah dipercaya untuk urusan itu.” Departemen perbekalan ini menurut Dr. Utoyo dipimpin dan diawasi oleh Kementerian Luar Negeri Republik. (*Antara*)

* Anggota Local Joint Committee (LJC) Jawa Barat, Sewaka, tiba di Yogyakarta untuk menyampaikan laporan kepada ketua delegasi Republik dalam CJB, Mr. Wongsonegoro. (*KU131*)

1949 NOVEMBER 14.

* Wakil Presiden Mohammad Hatta tiba kembali di Yogyakarta setelah mengikuti Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag yang dimulai tanggal 23 Agustus 1949 dan diakhiri tanggal 2 November 1949.

  Di lapangan terbang Maguwo ia disambut oleh Presiden Sukarno, para pembesar Republik, beserta rakyat.

  Kepada para wartawan radio dan surat kabar Hatta berkata: “Sembilan puluh lima persen dari cita-cita kebangsaan kita telah tercapai.”

  Selanjutnya ia mengatakan:

  “Dipukul rata, hasil yang dicapai pada KMB itu boleh dikatakan memuaskan, sungguhpun tidak segala orang sudah merasa puas. Orang yang tidak merasai sulitnya perundingan, mudah mengabaikan pendirian dan kemauan lawan. Ia hanya melihat tuntutan sendiri, sebab itu ia tidak akan puas dengan hasil yang dicapai itu. Tetapi dengan peninjauan seluruhnya, historis dan internasional, apa yang kita capai pada KMB itu, adalah yang sebaik-baiknya yang mungkin dicapai pada waktu ini.

  Kami tahu, bahwa ada di antara kita yang akan berkata bahwa hasil KMB itu belumlah kemerdekaan 100%. Berhubung dengan itu kami hanya ingin bertanya: apakah yang dikatakan kemerdekaan 100%? Indonesia Merdeka bukanlah tujuan akhir bagi kita. Indonesia Merdeka adalah syarat untuk mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Indonesia Merdeka tidak ada gunanya bagi kita, apabila kita tidak sanggup mempergunakannya untuk mencapai cita-cita rakyat kita: hidup bahagia dan makmur, dalam pengertian jasmani maupun rohani. Maka dengan tercapainya penyerahan kedaulatan, perjuangan belum lagi selesai. Malahan kita baru pada permulaan perjuangan yang lebih berat dan lebih mulia, yaitu perjuangan untuk mencapai kemerdekaan manusia daripada segala tindisan. Kemajuan yang diperoleh dalam perjuangan itu tidak saja bergantung kepada kemajuan yang kita peroleh di dalam negeri, tetapi juga dan istimewa terpengaruh oleh keadaan dunia dan masyarakat internasional. Perjuangan ini menghendaki idealisme yang tetap, pandangan realiteit yang benar dan rasa sabar yang tak kunjung lenyap.

  Soal Irian menjadi satu soal perundingan antara dua negara yang samasama berdaulat, yaitu RIS dan Kerajaan Belanda. Dengan putusan semacam ini, Indonesia tidak melepaskan tuntutannya atas Irian.

Orang yang mempunyai kepercayaan, bahwa waktu ada pada fihak kita, berani menerima penyelesaian soal Irian di masa datang." (*KU131; LUxxii; LU t.h.*)

* Hari ini Presiden Sukarno mengirim ucapan selamat kepada Perdana Menteri India, Pandit Nehru, berkenaan dengan ulang tahun ke-60 Pandit Nehru. Presiden mengirim ucapan serupa kepada *Free Press Journal*, Bombay, berisi pernyataan simpati rakyat Indonesia terhadap Perdana Menteri dan rakyat India. Ucapan selamat sbb.:

  "My dear Panditji:

  Although I know that you are not used to celebrating birthdays a nation of over 300 million is joyously celebrating the occasion of your 60th birthday and are lifting their hearts to the almighty in their prayer to bless you with a long life and happiness. The Indonesian people also join in this great occasion, and pray that you may live long to serve not only India but the whole of Asia and the world. On behalf of the people of the Republic of Indonesia and on my own behalf I extend to you our warm greetings and best wishes for an increasingly happy and prosperous future. I look anxiously forward to the day when we can meet each other. Jai hind and merdeka. Sukarno."

  "I am very happy to send a message to the Free Press Journal, Bombay, on the occasion of the 60th birthday of Pandit Jawaharlal Nehru. Panditji is a great champion of freedom and he has valiantly supported the Indonesian cause. The Indonesian people esteem him highly and pray to God that he may live long to fulfill all his great plans for the advancement of the Indian people who, I have no doubt, will cherish his leadership increasingly. I avail of this opportunity to convey the greetings and best wishes of the Indonesian people to the great prime minister of India for increasing success and happiness in the service of India, Asia and the world. Sukarno, President of the Republic of Indonesia." (*Antara*)

* Sidang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang dimulai tanggal 6 November 1949 berakhir hari ini. Sidang menerima hasil-hasil KMB dengan suara 226 pro, 62 kontra, dan 31 meninggalkan sidang. (S6 71)

* Bekas Menteri Perekonomian Republik, Dr.A.K. Gani, menekankan perlunya penanaman modal asing bagi Indonesia untuk rehabilitasi ekonominya, namun ia menyatakan kepada *Antara* hari Minggu bahwa Republik Indonesia Serikat harus berhati-hati terhadap kemungkinan Indonesia kehilangan nilai kemerdekaan politiknya dengan tetap menjadi "koloni" di bidang ekonomi.

  Gani dalam perjalanan dari Sumatra Selatan ke Yogyakarta mengatakan bahwa dengan menghilangnya sisa-sisa kolonialisme secara politik "kita harus juga meniadakan kolonialisme ekonomi dan menggantikannya dengan ekonomi nasional".

  Bekas Menteri Perekonomian itu setuju dengan sistem "usaha campuran" untuk setiap bentuk perusahaan. Dijelaskannya: "Kita harus menangani pekerjaan itu bersama, dan membagi keuntungannya atas dasar fifty-fifty." Ditambahkannya; "Mesin-mesin dan ahli-ahli dari luar negeri, kami menyediakan sumber-sumber alam dan tenaga kerja." (*Antara*)

* Di Solo berlangsung serah terima komando militer Solo dari pihak tentara Belanda kepada pihak tentara Indonesia, dalam hal ini kepada Letnan Kolonel Slamet Rijadi. (*KU131; LU t.h.*)

1949 NOVEMBER 15.

* Kembali ke Indonesia sesudah berakhirnya dengan sukses Konferensi Meja Bundar, Perdana Menteri Republik Indonesia Drs. Mohammad Hatta menyatakan: "Hasil Konferensi Meja Bundar harus dapat diterima oleh partai-partai politik di Indonesia."

  Hatta berharap bahwa pemecahan yang memuaskan atas masalah Irian akan dapat segera ditemukan. Perdana Menteri itu disertai istri singgah di Batavia sebelum meneruskan perjalanan ke ibu kota Republik Yogyakarta. Di lapangan terbang ia disambut oleh Sultan Yogyakarta, Dr. Koets, Direktur Kabinet Gubernur Jenderal Belanda, dan lain-lain pejabat.

  Sekitar 5.000 orang berkerumun di sekitar lapangan terbang, dan dua kali menerobos barisan militer Belanda. Mereka baru dapat ditenangkan sesudah Hatta berbicara kepada mereka. Untuk pertama kali selama 4 tahun, bendera Merah Putih dikibarkan di lapangan terbang, dan gadis-gadis berpakaian merah putih menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sementara Hatta turun dari pesawat.

Dengan datangnya Hatta, persiapan bagi pengambilalihan kekuasaan oleh negara RIS mendatang akan dipercepat, demikian menurut kalangan Republik. (*Antara*)

* Wakil Presiden Republik Hatta beserta istri dan rombongan tiba di lapangan terbang Kemayoran Jakarta hari ini jam 12.00, dan menunggu satu jam lamanya sebelum meneruskan perjalanan ke Yogyakarta. Ikut menyambutnya di lapangan terbang a.l. pejabat Perdana Menteri Hamengku Buwono, Ajudan Komisaris Tinggi Belanda, dan para anggota BFO, UNCI dan konsulat asing di Jakarta.

  Kerumunan beberapa ribu orang sudah beberapa jam menanti pendaratan pesawatnya, dan dengan bersemangat mengumandangkan pekik "merdeka" ketika ia menuruni tangga pesawat.

  Kepada para penyambutnya Hatta menyatakan kegembiraannya telah kembali berada di Indonesia, sedang kepada para wartawan ia menyampaikan statemen yang telah ia sampaikan di Karachi, berisi pernyataan bahwa RIS siap mengakui rejim Mao Tse Tung sebagai imbalan atas pengakuan terhadap RIS. Ia katakan bahwa Pemerintah Tiongkok yang ia maksudkan adalah pemerintah (Tiongkok Mao Tse Tung atau pun Nasionalis) yang telah dipilih oleh rakyat Tiongkok bagi dirinya sendiri. Pengakuan pemerintah tersebut terhadap RIS akan segera diikuti dengan pengakuan RIS atas pemerintah tersebut, demikian ditambahkannya. (*Antara*)

* Perdana Menteri Republik, Mohammad Hatta, bersama istri dan beberapa anggota delegasi yang dipimpinnya tiba di Yogyakarta hari ini jam 14.30. Di lapangan terbang Meguwo ia disambut oleh Presiden Sukarno dan istri, para anggota kabinet, dan para pejabat sipil dan militer. Sesudah memeriksa barisan kehormatan, rombongan meneruskan perjalanan ke istana presiden, di mana ia memberikan pernyataan yang disiarkan kepada umum.

  Ia katakan bahwa ia senang tiba kembali di Indonesia dan berada di tengah rakyat. Ia nyatakan, dalam perjalanan pulang ia singgah di Kairo, di mana ia disambut oleh wakil-wakil Pemerintah Mesir dan Liga Arab, untuk mempererat hubungan baik dengan negeri-negeri Liga Arab yang untuk pertama kali telah memberikan pengakuan de jure kepada Republik Indonesia. Ia katakan bahwa ia pun singgah di Baghdad dan Karachi di

mana ia disambut dengan hangat oleh para pejabat Pakistan dan beberapa anggota kedutaan besar asing di sana.

Akhirnya ia katakan, ia telah berhubungan dengan Pemerintah Birma yang ingin menjalin hubungan dengan Indonesia. Hatta mengatakan bahwa acaranya dalam perjalanan kembali ke tanah air adalah sukses, "walau melelahkan".

Mengenai hasil-hasil Konferensi Meja Bundar ia menyatakan bahwa hasil-hasilnya memuaskan, walaupun masalah Irian masih belum terpecahkan. Menurut Hatta, Belanda menyatakan Irian bukan milik bangsa Indonesia, sedangkan pandangan delegasi Indonesia sebaliknya dari itu.

Hatta mengakhiri pidatonya dengan menyatakan harapannya agar dengan tercapainya persetujuan ini, sengketa Indonesia-Belanda akan terpecahkan untuk selamanya, dan Republik Indonesia Serikat akan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keanggotaan dalam PBB akan diusulkan oleh Belanda sendiri kepada PBB.

"Kita tidak melalaikan Irian," katanya, "tapi kita berpendapat bahwa masalah ini dapat dipecahkan dengan damai di antara dua negara yang berdaulat." Ia nyatakan selanjutnya bahwa pasukan Belanda akan ditarik seluruhnya dalam 6 bulan sesudah penyerahan kedaulatan. (*Antara*)

* Menteri Pertahanan, Sultan Hamengkubuwono IX, mengadakan konferensi dengan para gubernur militer Republik Indonesia dan para panglima Komando Jawa dan Sumatra untuk membahas segala masalah yang bertalian dengan perubahan-perubahan sebagai akibat hasil-hasil Konferensi Meja Bunda (KMB). (*KU132*)

* Untuk mengatasi kurangnya jumlah pegawai negeri sehubungan dengan pembentukan RIS dan untuk memenuhi permintaan beberapa negara anggota RIS mendatang akan pegawai negeri Republik, Departemen Dalam Negeri Republik telah menyelenggarakan kursus pegawai negeri selama 3 bulan di Yogyakarta. Kursus itu telah diresmikan hari ini dengan rombongan awal sebanyak 40 siswa, semuanya lulusan Lembaga Pendidikan Tinggi. Tiga puluh satu orang pengajar mengajar pada kursus ini, kebanyakan ahli hukum. (*Antara*)

* Sidang KNIP bulan ini dibuka hari ini di bawah ketua Mr. Sartono. Sesudah pembacaan keputusan yang telah diambil dalam sidang sebelumnya, diadakan sidang tertutup untuk membicarakan hal-hal yang akan dimasukkan dalam agenda sidang mendatang.

  Dari *Front* Demokrasi Rakyat yang berhaluan komunis hanya Suwarti dari Persatuan Buruh Indonesia yang hadir. Dapat dicatat bahwa pada waktu meletus pemberontakan komunis di Madiun sedang berlangsung Kongres PBI untuk memutuskan apakah PBI akan bergabung dengan Partai Komunis Indonesia atau tidak. (*Antara*)

* Terjalinnya hubungan Indonesia-Filipina akan menguntungkan kedua negeri, demikian dinyatakan kepada *Antara* hari ini oleh Mr. Saroso yang baru tiba di Yogyakarta dari misinya ke Manila. Ditambahkannya, Indonesia akan lebih diuntungkan, karena Filipina adalah tetangga terdekat Indonesia yang masuk dalam blok mata uang keras.

  Ia katakan, Filipina memiliki arti ekonomi khusus sebagai batu loncatan AS, dan dapat memberikan barang-barang yang murah harganya untuk rehabilitasi pasca perang dari negeri-negeri mata uang keras.

  Mr. Saroso menganjurkan diteruskannya hubungan dagang dengan Filipina, karena hal itu akan sejalan dengan kebijakan ECAFE bagi kerja sama regional. Mr. Saroso hari ini telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Perekonomian dan Keuangan Republik. (*Antara*)

* Dalam statemennya hari ini federasi serikat buruh SOBSI menyatakan bahwa delegasi SOBSI ke Konferensi World Federation of Trade Unions (WFTU) di Peking terpaksa menunda keberangkatannya karena harus menantikan kepastian tentang paspor, kliring dan lain-lain fasilitas.

  Dikatakannya, bahwa delegasi akan berangkat sekalipun terlambat, dan akan mendapat informasi dari kantor penghubung WFTU tentang resolusi WFTU dan tentang usul-usul SOBSI kepada Konferensi.

  SOBSI telah menerima dua undangan lagi dari WFTU, satu untuk menghadiri konferensi buruh transpor yang akan diadakan di Bucharest bulan Desember mendatang, dan satu lagi ke Konferensi Kehutanan dan Perkebunan di Bologna, Italia. Statemen tidak menyebutkan, kapan Konferensi Bologna akan diadakan.

SOBSI menyatakan selanjutnya bahwa departemen wanitanya merencanakan mengirimkan pengamat ke Konferensi Wanita Internasional di Peking bulan Desember nanti. Akhirnya statemen itu menyatakan bahwa ia belum dapat memberikan informasi yang pasti tentang laporan yang menyatakan bahwa pengamat pemerintah akan menyertai delegadi SOBSI ke Peking. (*Antara*)

* Sumber resmi menyatakan kepada *Antara* hari ini bahwa sidang Kabinet akan diadakan minggu ini untuk membicarakan perkembangan politik dewasa ini.

  Pejabat Perdana Menteri Hamengku Buwono menurut sumber tersebut akan menyerahkan kembali mandatnya sebagai Perdana Menteri.

  Sumber itu mengatakan bahwa berkenaan dengan pembentukan RIS belum ditentukan prosedurnya, bagaimana Pemerintah Republik akan mengajukan calon-calonnya untuk pemerintahan federal. Juga belum ditentukan bagaimana mengisi kekosongan yang terjadi apabila beberapa Menteri Republik terpilih untuk menduduki jabatan federal.

  Ditanya tentang kemungkinan meneruskan Kabinet Presidentil saat ini, sumber itu menyatakan bahwa belum ada suara-suara negatif terdengar di kalangan pemerintah.

  Sementara itu beberapa partai politik di Yogyakarta dilaporkan sibuk mempelajari hasil-hasil Konferensi Meja Bundar, sedang lainnya sibuk membuat daftar calon untuk menduduki jabatan federal. Masyumi dilaporkan sudah siap dengan daftar (nama-namanya belum diumumkan) untuk diajukan kapan saja Pemerintah Republik memintanya. (*Antara*)

* Wakil Gubernur Jawa Timur, Dul Arnowo, yang sejak Februari 1949 ditangkap oleh Belanda, dibebaskan dan diantarkan ke Markas Gubernur Militer di Nganjuk. (*KU132*)

* Daerah Madiun dikembalikan kepada pihak Indonesia dengan disaksikan oleh wakil-wakil sipil dan militer. (*KU131*)

* Daerah Kediri mulai dikosongkan oleh tentara Belanda. (*KU132*)

* Pemogokan buruh BAT (British American Tobacco) yang dimulai tanggal 7 November di Cirebon berakhir hari ini sesudah tercapai pemecahan dalam pembicaraan yang diadakan di bawah inspektur Kantor Inspeksi Perburuhan Pasundan hari Sabtu.

  Pimpinan perusahaan menyetujui kenaikan upah pokok buruh sebesar 50% mulai 19 November, dan membayar penuh gaji buruh pada hari-hari mereka melakukan pemogokan.

  Pemogokan buruh Dewan Perminyakan Indonesia Belanda yang sudah berlangsung seminggu, berakhir juga hari ini, ketika pimpinan perusahaan setuju untuk menaikkan upah harian sebesar 25 sen bagi buruh harian. (*Antara*)

* Di gedung Sekolah Menengah Islam (SMI) Kotaraja (sekarang Banda Aceh) berlangsung upacara peresmian pembukaan Sekolah Menengah Islam Tingkat Atas (SMI-A).

  Hadir dalam kesempatan itu Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatra Utara Mr.S.M. Amin, Gubernur Militer Tgk.Muhd. Daud Beureueh, Residen Tuanku Mahmud, Sekretaris Wakil Perdana Menteri Mr. Imam Sudjahri, Prof. Sulaiman, dan para anggota Badan Pekerja Dewan Perwakilan Rakyat Sumatra Utara.

  Pelajar SMI-A angkatan pertama ini berjumlah 50 orang, terdiri atas bagian putra, bagian putri, dan bagian pendengar, dengan direktur Syekh Abdullah Afifuddin.

  Abdullah Afifuddin dalam pidatonya memberikan gambaran tentang corak pendidikan dan pengajaran yang akan diberikan di sekolah tersebut. Ia mengharapkan bantuan lahir batin dari segenap kaum Muslimin, hingga apa yang menjadi harapan sekolah tersebut terkabul.

  Mr. S.M. Amin mengucapkan selamat atas berdirinya sekolah tersebut, dan berharap supaya semangat Islam dipompakan sebanyak mungkin ke dalam jiwa pemuda-pemudi kita yang akan menjadi tiang negara dan masyarakat di masa mendatang. Semoga bijana ilmu pengetahuan ini akan memberikan kepuasan kepada pelajar kita umunya. (TS288)

* Di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Sumatra Utara berlangsung pertemuan antara anggota Badan Pekerja KNIP Seksi Kemakmuran Maruto

Nitimihardjo dan Lobo I.R. dengan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatra Utara, para anggota Badan Pekerja Dewan Perwakilan Sumatra Utara, para kepala kantor/jawatan, dan para wakil partai.

Maruto Nitimihardjo menjelaskan pentingnya peninjauan yang dilakukannya di daerah ini, yaitu untuk menyelidiki kesan masyarakat, untuk mengetahui sampai di mana peraturan-peraturan dapat berjalan, dan apa-apa kesukaran yang dihadapi.

Ia menyatakan bersedia menerima anjuran-anjuran atau usul-usul mengenai perekonomian dan keuangan, sebagai bahan perbincangan dalam sidang-sidang Badan Pekerja.

Lobo I.R. memberikan petunjuk dan anjuran mengenai pertanian, irigasi, perikanan, perkebunan, perindustrian, kehewanan dll. Ia menganjurkan agar sumber alam yang banyak terdapat di daerah ini dijadikan mata pencaharian, demi pembangunan perekonomian rakyat. Menurutnya, keadaan perekonomian memburuk karena blokade Belanda. Maka ia menganjurkan agar pertemuan mengambil resolusi yang mendesak Belanda segera mencabut blokade tersebut. (TS288-289)

1949 NOVEMBER 16.

* Dengan mayoritas besar, Persetujuan KMB (Konferensi Meja Bundar) diterima oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

  "Yang menyolok mata," kata Perdana Menteri Mohammad Hatta, "ialah bahwa hampir seluruh Fraksi PSI (Partai Sosialis Indonesia) menolak hasil itu." Dan ia pun menambahkan pula sebuah komentar, "Banyak orang berpendapat, PSI menolak karena bukan Sjahrir yang melaksanakan KMB dengan sukses." (LM53)

* Acting Perdana Menteri, Sultan Hamengkubuwono IX, menyerahkan kembali mandatnya kepada Perdana Menteri Mohammad Hatta.

  Ia pun menyerahkan kembali portefolio Luar Negeri yang dipegangnya sementara Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim menderita sakit. (*KU132*)

* Kementerian Penerangan mengumumkan bahwa pada akhir bulan November akan diadakan konferensi Kepala Jawatan Penerangan Daerah seluruh Jawa dan Sumatra di Yogyakarta.

Untuk itu selambat-lambatnya tanggal 23 November Kepala Dinas Penerangan Provinsi disertai 2 orang stafnya harus sudah berada di Yogyakarta. Dan untuk ijin perjalanan melewati tempat kedudukan Belanda, hendaknya segera dihubungi Delegasi Republik di tiap Local Joint Committee atau Pemerintah Militer Republik Indonesia.

Menanggapi pengumuman tersebut, Jawatan Penerangan Sumatra Utara mengutus 3 orang peserta, yaitu T. Alibasjah Talsya, Abdul Mu'thi, dan Muhammad Hasan. (TS289)

* Penyerahan resmi tanggung jawab atas Kabupaten Madiun dari Belanda kepada Indonesia telah terjadi tanggal 15 November. Kekuasaan militer telah diambil alih oleh pasukan Republik, dan kekuasaan sipil diambil alih oleh Residen Republik, Pamudji.

Pada jam 11.00, penduduk yang telah diperintahkan untuk tinggal dalam rumah selama berlangsungnya upacara tersebut, menghambur ke jalan-jalan dan mengungkapkan kegembiraan yang selama itu terpendam. Suasana pesta selama 3 hari berturut-turut melanda seluruh kabupaten.

Perlu dicatat bahwa kereta api, dinas pos, dan beberapa perusahaan monopoli federal lain masih berada di tangan Belanda. (*Antara*)

* Singaparna, Salawu, Cikajang, Mangunreja dan beberapa distrik lain di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, telah ditinggalkan hari ini oleh pasukan Belanda.

Sambil menanti datangnya pasukan TNI, penjagaan hukum dan ketertiban diambil alih oleh "batalion keamanan" Pasundan.

Seorang sumber yang mengetahui menyatakan bahwa pengunduran pasukan Belanda dari distrik-distrik itu merupakan awal penarikan pasukan Belanda dari kabupaten tersebut. (*Antara*)

* Di Kotaraja (sekarang Banda Aceh) berlangsung pertemuan ramah tamah antara Komandan Militer Kota Kutaraja Kapten Said Usman dengan ke-49 bekas tawanan perang Republik yang baru dibebaskan Belanda.

Dalam kata sambutannya Gubernur Militer Tgk.Muhd. Daud Beureueh mengucapkan selamat datang, dan memberikan petunjuk agar mereka yang baru pulang dari sekapan Belanda tetap meneruskan perjuangan hingga kemerdekaan kita mencapai kejayaan.

Mewakili Jawatan Penerangan Sumatra Utara Kusen Tjokrosentono menyatakan bahwa dibandingkan dengan perjuangan di masa lampau, perjuangan di masa depan akan lebih besar. Dari kita semua dituntut kesiapsiagaan penuh dan keikhlasan berkorban yang sungguh-sungguh. Dengan demikian kita tidak menyia-nyiakan harapan ibu pertiwi yang menantikan kebaktian kita semua.

Seorang dari bekas tawanan menyatakan rasa harunya atas sambutan yang mereka terima sejak mereka menjejakkan kaki di daratan Aceh. Setelah menguraikan pengalaman selama berada dalam tawanan, ia menyatakan bahwa demi tanah air dan bangsa mereka tetap sedia berkorban, kapan saja dan di mana saja. (TS289)

* Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1949 tentang susunan Badan Pesanihat Wakil Perdana Menteri yang berkedudukan di Sumatra.

Untuk menjalankan kekuasaan yang diberikan kepada Wakil Perdana Menteri yang berkedudukan di Sumatra perlu diadakan Badan Penasihat yang terdiri dari sedikit-dikitnya 3 dan sebanyak-banyaknya 7 orang anggota.

Presiden mengangkat seorang ketua dan seorang wakil ketua dari antara mereka.

Wakil Perdana Menteri dengan kemauan sendiri atau atas undangan Badan Penasihat dapat menghadiri rapat badan tersebut. Peraturan Tata Tertib Badan Penasihat ditetapkan oleh badan itu sendiri dengan pengesahan Wakil Perdana Menteri. Badan Penasihat berkedudukan di tempat kedudukan Wakil Perdana Menteri.Peraturan Tata Tertib Badan Penasihat ini mulai berlaku hari ini. (TS289-290)

* Gubenur Negara Sumatra Timur, Dr. Mansur, menyatakan kepada pers tadi malam bahwa belum tercapai pemecahan atas status Asahan Selatan dan Labuhanbatu, yang sebelum aksi militer kedua Belanda merupakan wilayah Republik dan kini masuk dalam yurisdiksi Sumatra Timur.

Mansur mengatakan bahwa sedemikian jauh pemerintahnya masih mempertahankan status kedua distrik itu sebagai bagian wilayah Sumatra Timur. Sampai sekarang belum ditemukan cara pemecahannya, karena

Wakil Presiden Republik, Hatta, dengan siapa ia membicarakan masalah itu, sepenuhnya dapat memahami kesulitan Sumatra Timur itu.

Sementara itu sebuah pertemuan umum di Panai pada 6 November, yang dihadiri oleh segala lapisan masyarakat di distrik tersebut, telah mengambil resolusi untuk menuntut dikembalikannya Asahan Selatan dan Labuhanbatu kepada Republik dan untuk tidak mengakui perwakilan lain daripada perwakilan yang telah dibentuk sebelum aksi militer Belanda 19 Desember 1948. (*Antara*)

* Lima puluh tahanan politik yang disekap Belanda di Kotabaru, ibu kota Borneo Selatan, telah mendobrak penjara dan menghilang pada 14 November. Peristiwa itu didahului hari itu oleh menghilangnya 11 polisi kota lengkap dengan perlengkapannya bersama sejumlah pemuda.

Laporan lain dari Menado, Selebes Utara, menyebutkan bahwa pada 13 November sejumlah pemuda telah melucuti 2 polisi yang sedang mengawal bis antara Tompaso dan Amurang, dan pada 14 November melucuti tiga polisi lainnya yang sedang bertugas di Worotican, 5 km dari Amurang. (*Antara*)

* Sumber yang sangat mengetahui dan ambil bagian dalam Konferensi Den Haag baru-baru ini, di mana Belanda menyetujui pembentukan Republik Indonesia Serikat yang merdeka, mengatakan bahwa satu-satunya bahaya terbesar yang dihadapi negara yang baru itu adalah infiltrasi besar-besaran TNI oleh kaum komunis. Menurut sumber tersebut, bulan-bulan terakhir ini sejumlah besar kaum komunis yang merupakan pengikut langsung Moskow telah menyelinap ke dalam tentara Republik.

Unsur kedua yang mengancam stabilitas kekuasaan baru yang akan muncul segera sesudah Parlemen Belanda dan Pemerintah Indonesia meratifikasi persetujuan itu adalah kaum Muslim fanatik yang bisa menolak mengakui yurisdiksi Pemerintah Republik dan “gerombolan perampok yang siap menerkam negeri ini”.

Dikatakannya, walau pemberantasan unsur-unsur perusak pertama-tama menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia, Amerika Serikat dan Pemerintah Belanda memiliki taruhan besar dalam hal ini karena kepentingan dagang mereka keinginan mereka untuk melihat ekspor

Hindia mengalir ke Eropa dalam jumlah yang lebih besar. Sejauh ini perdagangan ekspor Hindia hanya mencapai 35% dari ekspor rata-rata sebelum perang.

Untuk membantu Indonesia memulihkan dan menjaga ketertiban, Pemerintah Belanda akan menyediakan unit-unit angkatan darat dan laut untuk beberapa waktu lamanya sesudah penyerahan kedaulatan. Tujuannya adalah untuk dapat menarik pasukan Belanda dari Kepulauan ini dalam waktu 6 bulan, tapi angkatan laut akan tinggal setahun lamanya. Namun unit-unit dan personil angkatan laut akan berada di bawah komando umum Kementerian Pertahanan Indonesia, selama mereka ada di Kepulauan ini. (*Antara*)

1949 NOVEMBER 17.

* BP KNIP dijadwalkan akan mengadakan sidang tertutup besok untuk membicarakan prosedur yang akan ditempuh dalam memperdebatkan kemungkinan meratifikasi Persetujuan Den Haag dan dalam menggantikan Presiden Republik Indonesia sekiranya ia terpilih menduduki jabatan Presiden negara Republik Indonesia Serikat yang akan dibentuk.

  Menurut kalangan yang mengetahui, sedemikian jauh belum diambil keputusan oleh Pemerintah, yang mana di antara dua badan legislatif, Badan Pekerja ataukah sidang pleno KNIP, yang diberikan wewenang untuk memberikan ratifikasi kepada Persetujuan Den Haag itu.

  Sementara itu status persetujuan itu kini sedang dipelajari. Ratifikasi oleh sidang pleno KNIP akan diperlukan jika persetujuan itu merupakan persetujuan penuh, sedangkan suara kepercayaan dianggap sudah cukup jika persetujuan itu merupakan kebijakan pemerintah.

  Badan Pekerja diberi wewenang hukum untuk melakukan kegiatan rutin parlemen, termasuk meratifikasi sebuah persetujuan, tetapi diberi wewenang juga untuk menyerahkan ratifikasi sebuah persetujuan kepada sidang pleno KNIP. Namun pemerintah memiliki hak untuk secara langsung menyerahkan ratifikasi kepada KNIP.

  Dalam menghadapi Persetujuan Den Haag yang penting ini, Badan Pekerja memandang dirinya tidak representatif karena tidak lengkapnya keanggotaan, dan karena ia tidak mampu menyusun kembali KNIP akibat situasi dewasa ini, ia telah menyerahkan masalah ini ke tangan peme-

rintah. Sedemikian jauh belum ada laporan tentang adanya pemecahan, hanya ada desas-sesus bahwa diperlukan dana sebesar *f*1.000.000 untuk menyelenggarakan sidang KNIP.

Mengenai penggantian Presiden Republik Indonesia, kalangan yang mengetahui menyebut tiga tokoh nonpartai sebagai calon yang mungkin diajukan: Sultan Hamengku Buwono, Pejabat Perdana Menteri sekarang, Mr. Assaat, Ketua KNIP, dan Ki Hadjar Dewantoro, tokoh pendidikan.

Namun pembicaraan besok akan berkisar sekitar masalah apakah Presiden Republik yang akan menggantikan Sukarno itu akan menjadi presiden penuh ataukah presiden dengan kekuasaan terbatas, sementara menunggu rakyat memilih Presiden yang baru. (*Antara*)

* Sidang Kabinet Republik hari ini diisi dengan mendengarkan laporan Perdana Menteri Hatta tentang hasil-hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag.

Sumber resmi menyatakan kepada *Antara* sesudah sidang bahwa belum ada anggota Kebinet yang menyatakan pendapatnya. Sumber itu tidak dapat mengungkapkan apakah dapat dicapai keputusan positif dalam sidang Kabinet mendatang, yang dijadwalkan akan diadakan hari Jumat mendatang.

Namun sumber itu meramalkan bahwa besar kemungkinan Pemerintah akan menerima kebijakan Hatta, walau masalah Irian dan pangkalan angkatan laut Surabaya akan diperdebatkan. (*Antara*)

* Untuk mengatasi hambatan psikologis dalam mewujudkan penyatuan TNI (tentara Republik) dengan KNIL (angkatan bersenjata kolonial) menjadi angkatan bersenjata federal, agaknya perlu sekali menunjuk orang yang tepat untuk jabatan Menteri Pertahanan dan Panglima Tertinggi Republik Indonesia Serikat. Pandangan ini dikemukakan oleh Sultan Hamid II, ketua delegasi kaum federal ke Konferensi Meja Bundar di Den Haag.

Sultan Hamid tiba di Jakarta kemarin sore bersama beberapa tokoh penting lain dari perundingan Den Haag, termasuk Mr. Indrakusuma (Jawa Timur), Mr. Djumhana (Perdana Menteri Pasundan), Mr. Slamet Sutikno (Republik), Dr. Kusuma Atmadja (Republik), Dr. Isa (Republik), Mr. Hakim, Dr. Rustamadji (BFO).

"Penunjukan para fungsionaris ini harus dilakukan terhadap orang-orang yang dapat diterima oleh kedua belah pihak," tambah Hamid dalam wawancara dengan *Antara*. "Kalau hambatan psikologis ini telah diatasi, usaha kita untuk membangun tentara federal akan mendatangkan hasil dalam tiga bulan."

Sultan Hamid menggambarkan bahwa penarikan pasukan Belanda dari Indonesia dalam enam bulan seperti diputuskan itu "hanya mungkin jika diberikan perhatian sewajarnya kepada beberapa masalah teknis dan organisasi; satu di antaranya yang penting, yaitu berlanjutnya pekerjaan staf dewasa ini, intendans jenderal dan ajudan jenderal, yang memungkinkan pengunduran pasukan dalam waktu sesingkat mungkin."

Dikatakannya selanjutnya, BFO tercatat akan bersidang pada 21 atau 22 November sebelum sidang umum Komite Persiapan Nasional yang akan memilih presiden pertama. Ia tambahkan bahwa BFO akan menyusun skema pendapatnya yang akan diserahkan kepada Komite Persiapan Nasional.

Anak Agung Gde Agung, Perdana Menteri Indonesia Timur, disebut oleh ketua BFO ini sebagai salah seorang calon BFO untuk pembentukan Pemerintah Federal.

Sultan Hamid menekankan dalam percakapan dengan *Antara* bahwa mengenai tahap-tahap awal Pemerintah Federal tidak perlu ada pesimisme terhadap masa depannya. Ia katakan: "Mungkin pada hari-hari pertama akan muncul kesulitan karena adanya unsur-unsur ekstrem di kubu Indonesia maupun Belanda." "Namun bagaimanapun Pemerintah RIS akhirnya akan berhasil menjaga hukum dan ketertiban di wilayah-wilayah yang dikuasainya," demikian Sultan Hamid. (*Antara*)

* Dalam sebuah statemen tadi malam, PIR (Partai Indonesia Raya) menyatakan bahwa "walaupun hasil-hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag belum memuaskan partai itu sepenuhnya, dapat dimengerti bahwa hasil konferensi itu merupakan prestasi terbaik, mengingat adanya kesulitan-kesulitan dan beberapa faktor yang dihadapi oleh delegasi Republik". Dikatakan selanjutnya di dalam statemen bahwa masalah Irian (yang akan tetap berada di bawah kedaulatan Belanda setahun lamanya) tetap menjadi program urgensi PIR. Partai ini tidak mempersengketakan dilema

mengenai apakah Persetujuan Den Haag akan diratifikasi oleh Badan Pekerja KNIP atau oleh sidang pleno Komite Persiapan Nasional. Namun ia menyatakan keinginannya bahwa ratifikasi akan dilakukan oleh badan perwakilan yang mencerminkan aliran-aliran politik yang memang ada.

Partai itu tidak bermaksud mengemukakan calon-calon untuk pemerintah Republik Indonesia Serikat mendatang. Ia berpendapat bahwa pos-pos pemerintah harus dijabat oleh orang-orang yang tepat, demikian statemen tersebut. (*Antara*)

* Delegasi Belanda minta agar Republik mengirimkan ahli-ahlinya untuk mengawasi organisasi di berbagai departemen Belanda di Jakarta mengingat akan berlangsungnya penyerahan kedaulatan, demikian disampaikan kepada *Antara* hari ini oleh Mr. Susanto Tirtoprodjo, ketua Delegasi Republik.

Ia katakan bahwa setiap kementerian akan mengirimkan sejumlah wakil sesuai dengan bidang kegiatan kementerian tersebut. Menurut Susanto Tirtoprodjo, sekalipun perundingan dalam Konferensi Meja Bundar telah diakhiri, Delegasi Republik di Indonesia akan terus bekerja, khususnya dalam melaksanakan penghentikan tembak-menembak. Central Joint Board dan Local Joint Committee akan terus ada. Ia katakan, kegiatan kedua badan ini diharapkan dapat berjalan lancar, karena kini konferensi telah mencapai hasil. Kedua delegasi kini meneruskan diskusi mengenai penyerahan seluruh wilayah Renville kepada Republik. (*Antara*)

* Diperoleh keterangan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik bahwa beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia bentukan Belanda kepada para pelajar Indonesia akan dipelajari dan dipertimbangkan oleh Departemen tersebut. (*Antara*)

* Diperoleh keterangan dari sumber yang dapat dipercaya bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik pada prinsipnya telah menyetujui usul yang baru-baru ini disampaikan oleh Subagio Reksodipuro, sekretaris Organisasi Pemuda Indonesia, untuk mengirimkan para pemuda ke luar negeri guna mempelajari gerakan pemuda di sana. Selanjutnya diperoleh keterangan, Kementerian itu telah menjanjikan bahwa usul tersebut akan diwujudkan segera. (*Antara*)

* Ketua-ketua delegasi Indonesia dan Belanda, Mr. Susanto Tirtoprodjo dan Mr. 's Jacobs, akan menginspeksi wilayah-wilayah di Jawa Tengah dan Timur hari Senin mendatang, menurut laporan yang diterima oleh *Antara*. Laporan itu menyebutkan bahwa kedua ketua delegasi akan meninjau pemerintahan sipil di tempat-tempat yang telah ditinggalkan oleh pasukan Belanda. Dijadwalkan mereka akan mengunjungi Madiun, Surakarta dan Surabaya. (*Antara*)

* Hari Pelajar Internasional kemarin diperingati oleh organisasi pelajar Indonesia di Yogyakarta dengan pidato radio mengenangkan peranan yang pernah dimainkan oleh para pelajar Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan. Pembicara mengatakan bahwa sebagai akibat wajar dari perjuangan itu para pelajar terpaksa meninggalkan pelajarannya. Ia tekankan bahwa para pelajar yang telah ikut berjuang kini mengalami kekurangan pengetahuan sekolah umumnya, tetapi mereka memperoleh rasa tanggung jawab terhadap masyarakat.

  Akhirnya pembicara mendesak masyarakat untuk tidak membedakan para pelajar yang hanya mengejar pengetahuan dan berada di luar perjuangan, dengan mereka yang ikut dalam revolusi "demi persatuan dalam usaha kita meneruskan perjuangan sampai titik akhir". (*Antara*)

* Abikusno yang telah melakukan perjalanan ke Suriname baru-baru ini, setiba di lapangan terbang Kemayoran, Jakarta, kemarin menceritakan tentang keadaan orang Indonesia yang tinggal di wilayah tersebut. Ia katakan bahwa 36.000 orang Indonesia yang tinggal di Suraname kebanyakan adalah petani kecil dan buruh berupah rendah. Selama 60 tahun tinggal di sana, hanya 10 orang sempat memperoleh pendidikan menengah. Kebanyakan pemuda berpendidikan hanya memperoleh pendidikan di sekolah dasar yang standarnya dapat dibandingkan dengan sekolah dasar untuk pribumi di masa kolonial di Indonesia. Orang Negro dan Hindu lebih beruntung karena mereka dapat masuk sekolah di mana diajarkan bahasa Belanda, hingga sesudah lulus, mereka dapat memasuki dinas pemerintah.

  Abikusno katakan, penduduk Indonesia di sana hanya diwakili oleh satu orang dalam *raad van state* (senat).

Ia katakan juga, orang Indonesia di Suriname menyatakan ingin kembali ke Indonesia, dengan harapan mereka akan menikmati kehidupan yang lebih baik. Ia nyatakan, Pemerintah Suriname telah menjanjikan perbaikan, tetapi Abikusno menyangsikan dapat dicapai perubahan segera, karena menurutnya keuangan negeri itu tidak mencukupi untuk mendirikan sekolah-sekolah selekas mungkin.

Mengenai kunjungannya selama 6 hari di New York dan Washington, yang menurutnya ia gunakan untuk meneliti kemungkinan bagi hubungan (ekonomi dan sosial) Amerika-Indonesia, ia katakan bahwa pembicaraannya dengan para pejabat Departemen Luar Negeri dan beberapa teknisi Amerika telah memberikan kepadanya "banyak harapan". (*Antara*)

* Pembelian baru produk-produk tekstil Jepang untuk Indonesia dengan pembayaran dari Marshall Plan telah disetujui, sesudah ECA mengumumkan otorisasi senilai 16.500.000 dollar untuk Indonesia. Ini adalah sebagian dari pembelian beras dan tekstil untuk Indonesia senilai 37.500.000, yang diumumkan hari Rabu dan untuk pertama kali disetujui sejak dihentikan pada 22 Desember 1940.

Pembelian tekstil serupa untuk Indonesia senilai 11 juta dollar telah diotorisasikan dari Amerika Serikat, dan pembelian beras Amerika Serikat senilai 10 juta termasuk dalam jumlah total itu. Tanggal penyerahan akhir untuk tekstil adalah 31 Mei 1950.

ECA menyatakan bahwa semua pengadaan barang dengan otorisasi ini akan dilakukan lewat saluran swasta, dan kontrak-kontrak harus dilakukan sebelum 31 Desember 1949, ketika Indonesia diharapkan akan sudah menjadi negara merdeka. Tanggal penyerahan terakhir untuk beras adalah 31 Mei 1950. Para pejabat mengatakan bahwa otorisasi ini diharapkan dibuat hanya satu kali dalam rangka keputusan yang diumumkan oleh ECA pada 7 November untuk memperbarui bantuan pemulihan bagi Indonesia. Angka-angka ini menjadikan bantuan total kepada Indonesia sejak awal Marshall Plan berjumlah 9.924.100 dollar. (*Antara*)

* Dr. Jan van Roijen, Duta Besar Belanda untuk Kanada, tiba di New York hari Kamis dalam perjalanan ke Ottawa sesudah menghadiri Konferensi Meja Bundar di Den Haag antara Belanda dan Indonesia. Ia katakan

kepada wartawan bahwa Konferensi Den Haag itu merupakan sukses. Itu membuktikan bahwa insiatif Belanda merupakan inisiatif yang bijak dan merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri kesulitan antara kedua bangsa. Ia katakan: “Secara pribadi saya berpendapat, (persetujuan) ini akan jalan sangat baik. Untuk Indonesia itu berarti penyerahan kedaulatan yang nyata, lengkap dan tanpa syarat kepadanya. Untuk Negeri Belanda itu berarti keamanan bagi rakyat dan kepentingannya. Ini adalah paduan praktis yang paling tidak sama pentingnya dengan Persemakmuran Inggris. Untuk dunia pada umumnya itu berarti perdamaian di bagian dunia tersebut, dan berarti benteng terhadap komunisme.” (*Antara*)

* Konsul Jenderal Amerika Serikat, Jacob D. Beam, melakukan kunjungan ke Yogyakarta untuk menjajaki kemungkinan membuka Kantor Perwakilan Amerika Serikat di Yogyakarta. (*KU132*)

* Dr.A. J. Bernet Kempers dan Ir. van Romondt melakukan kontak dengan para pejabat Jawatan Purbakala Republik. (*KU132*)

* Penyerahan pos Belanda di Barus, Sorkam, Kolom dan Arse, Aekgodang dan Sipahutar, semuanya di Tapanuli, Sumatra, kepada TNI berlangsung lancar pada 10, 11, 12, 13 dan 14 November. Tidak dilaporkan terjadinya insiden dalam peristiwa itu. (*Antara*)

* Konsulat Kongres Muslimin Indonesia Sumatra Utara dibentuk di Kotaraja (sekarang Banda Aceh) dengan ketua Amelz, dan dengan penasihat: Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Mr.S.M. Amin, dan Tgk.Muhd. Daud Beureueh. (TS290)

1949 NOVEMBER 18.

* Sidang kabinet Republik Indonesia (RI) menerima baik hasil-hasil Konferensi Meja Bundar (KMB).

  Sidang pun berpendapat bahwa ratifikasi atas Persetujuan KMB harus dilakukan dalam Sidang Pleno Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). (*KU132; LUxxii; LU t.h.*)

* Dewan Pertimbangan Agung (DPA) bersidang di Istana Presiden untuk

membahas hasil-hasil KMB dan politik dalam dan luar negeri Republik Indonesia. (*KU132*)

* Baik Dr. J. Leimena maupun Kolonel van Langen merasa tidak mungkin menuntaskan penarikan pasukan Belanda dari Indonesia dalam enam bulan sesudah penyerahan kedaulatan, karena adanya beberapa kesulitan teknis. Namun Leimena yakin bahwa dalam waktu enam bulan pasukan itu dapat dipusatkan di tempat-tempat yang telah disetujui bersama. Sementara itu Pemerintah Belanda telah mulai mencarter kapal-kapal untuk mengangkut pasukannya selekas mungkin, demikian Leimena kepada *Antara*. (*Antara*)

* Dr. van Konijnenburg, kepala lalu-lintas interinsuler KLM meninggalkan Den Haag malam ini menuju Indonesia untuk melanjutkan perundingan yang pernah ia lakukan dengan para pejabat Indonesia di sini mengenai pembentukan perusahaan penerbangan bersama antara Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan KLM. Untuk maksud ini Van Konijnenburg akan melakukan pembicaraan dengan para pejabat Republik di Yogyakarta, dan di antara masalah penting yang akan ditangani adalah masalah manajemen, kedudukan perusahaan ini menurut hukum RIS, saham masing-masing, dan pelatihan personil terbang dan darat masing-masing.

  Didapat keterangan bahwa Dr. Flesman, Direktur KLM, telah menyerahkan rencana perusahaan gabungan ini kepada Perdana Menteri Muhammad Hatta. Dikatakan, apabila pembicaraan yang akan diadakan oleh Konijnenburg dengan para pejabat Republik membawa hasil, akan dibuat persetujuan antara Pemerintah RIS dengan KLM mengenai pendirian perusahaan campuran ini.

  Diperoleh keterangan bahwa KLM menolak nasionalisasi, namun menyetujui manajemen gabungan. Dapat dimengerti bahwa perusahaan ini akan menduduki tempat penting dalam perhubungan ekonomi, dan akan menjadi faktor penting dalam memperkokoh RIS. Selanjutnya KLM ingin agar perusahaan yang baru itu akan mendapat hak monopoli agar terbebas dari persaingan dengan dunia luar. KLM pun akan menyetujui syarat bahwa keuntungan ekstra tidak akan dibawa ke Negeri Belanda.

Diperoleh keterangan bahwa pihak Indonesia akan ambil bagian dalam manajemen perusahaan penerbangan ini.. Sebuah proposal telah diserahkan agar perusahaan dikelola bersama untuk masa 15 tahun, sesudah itu seluruh manajemen dialihkan sepenuhnya ke tangan Indonesia.

Pada waktu ini 23 buah Dakota dan 4 buah Catalina beroperasi di Indonesia. Karena pesawat itu milik Pemerintah Hindia Belanda, maka kepemilikan akan beralih pada RIS sesudah penyerahan kedaulatan. Diperoleh keterangan bahwa aset KLM akan ditambah dengan 4 buah Catalina. (*Antara*)

* Sebuah kawat telah diterima di Yogyakarta dari Asosiasi Indonesia di Ternate (di Maluku) pimpinan Arnold Mononutu, anggota Parlemen Indonesia Timur, oleh Asosiasi Kemerdekaan Irian yang berpusat di Yogyakarta. Kawat berisi persetujuan atas resolusi yang telah diambil oleh Asosiasi Kemerdekaan Irian pada 12 Oktober yang menuntut masuknya tanpa syarat Irian ke dalam Republik Indonesia Serikat.

Sementara itu para pemimpin gerakan Irian, Papare dan Latumahina, telah minta audiensi pada Presiden Sukarno. (*Antara*)

* Rapat organisasi-organisasi pemuda yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pemuda Daerah Aceh mengambil resolusi yang mengakui adanya Dewan Pimpinan Pemuda Daerah Aceh sebagai suatu kenyataan, dan menolak apa yang dinamakan Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia Sumatra Utara yang berkedudukan di Langsa.

Resolusi ini ditandatangani oleh wakil-wakil Pesindo Darurat Sumatra Utara, Pemuda/Puteri Indonesia Darurat Sumatra Utara, Perbepis Daerah Aceh, Nasyiatul Aisyiah Daerah Aceh, IPPI Daerah Aceh, Persatuan Sastrawan Indonesia Daerah Aceh dll.

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Konferensi Pemuda Inter Sumatra Utara akhir November 1949, di Langsa dibentuk Panitia Penghubung Konferensi dengan ketua Achmid Abdullah dan wakil ketua Dja'far Abdullah. (*TS290-291*)

* Konsul Jenderal Amerika, Mr. Beame, disertai Dr. Williard Hanna dari USIS dan Mr.Lawrence dari Konsulat AS kemarin menghadap Presiden

Sukarno. Konsul Beame telah kembali ke Jakarta kemarin, sedangkan yang lain tinggal untuk beberapa waktu lamanya di ibu kota Republik.

Diperoleh keterangan bahwa Konsul Amerika telah membicarakan kemungkinan pembukaan Konsulat Amerika Serikat di Yogyakarta. Dr. Hanna dikabarkan juga akan menyiapkan peredaran film-film USIS untuk Pemerintah Republik. (*Antara*)

* Ahli-ahli arkeologi Belanda telah tiba di Yogyakarta kemarin dan telah melakukan pembicaraan dengan para pejabat Kementerian Pendidikan Republik, juga dengan para profesor universitas. Mereka adalah Prof. Dr.A.J. Bernet Kempers dan Ir.V.M. van Remondt dari Biro Arkelologi Belanda di Indonesia. Para tamu akan berkunjung ke candi Hindu Prambanan dan museum arkeologi "Sono Budoyo".

Prof. Kempers mengatakan kepada *Antara* bahwa kunjungannya dan kunjungan rekan-rekannya adalah untuk menghubungi ahli-ahli arkeologi Republik dan para pejabat Kementerian Pendidikan untuk membicarakan cara dan sarana untuk menyusun dinas arkeologi Republik Indonesia Serikat. Perlu dicatat bahwa tidak banyak terdapat ahli arkeologi Indonesia.

Para tamu akan kembali ke Jakarta hari Selasa. (*Antara*)

1949 NOVEMBER 19.

* Diperoleh keterangan dari sumber yang dapat dipercaya bahwa Kabinet Republik dalam sidangnya tadi pagi telah memutuskan untuk menerima Persetujuan Den Haag. Sumber itu menyatakan bahwa Kabinet pada prinsipnya setuju mengadakan sidang pleno KNIP untuk memperdebatkan ratifikasi persetujuan itu, dan bahwa KNIP harus membuka sidang selambat-lambatnya tanggal 5 Desember mendatang. Ketua KNIP, Mr. Assaat, menurut sumber itu, telah ikut menghadiri sidang Kabinet. (*Antara*)

* Sehubungan dengan keputusan Kabinet Republik bahwa Persetujuan Den Haag harus diratifikasi oleh KNIP, dan sidang plenonya harus dibuka paling lambat tanggal 5 Desember mendatang, maka masalah besar yang harus dipecahkan sekarang adalah pembentukan kembali badan tersebut, yang karena perkembangan politik akhir-akhir ini harus diubah. Dari 516

anggota KNIP yang terakhir terdaftar dari semua pos di Indonesia, sebagian telah meninggal atau terbunuh, sebagian lagi melakukan disersi ke pihak Belanda. Sementara itu partai-partai baru telah lahir, dan itu harus diwakili, sedangkan partai-partai lama yang besar pengikutnya bisa tidak terwakili karena sukarnya transpor.

Dalam hal ini sumber-sumber yang dekat dengan Badan Pekerja mengatakan bahwa KNIP haruslah representatif seperti juga Badan Pekerja (yang kini tidak begitu representatif bagi rakyat). Beberapa legislasi harus diterima dahulu untuk menjamin agar KNIP representatif, demikian ditekankan oleh sumber tersebut. (*Antara*)

* Menteri Mr. Wongsonegoro, I.J. Kasimo, dan Kusnan berkunjung ke Solo berkenaan dengan akan dikembalikannya pemerintahan sipil di daerah tersebut. (*KU132*)

* Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) melakukan sidang tertutup untuk membahas prosedur ratifikasi hasil-hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). (*KU132*)

* Sekretariat Jenderal partai politik Masyumi mengeluarkan statemen hari ini, berisi pengumuman bahwa Dewan Politik Masyumi dalam sidangnya tadi malam yang khusus membicarakan hasil-hasil Konferensi Meja Bundar, telah memutuskan untuk menerima Persetujuan Den Haag.

  Statemen menyatakan bahwa karena kebijakan itu diterima sebelum sidang Kongres Partai, maka Dewan Politik akan bertanggungjawab atas keputusan yang diambilnya sampai Kongres Masyumi mendatang.

  Sehubungan dengan laporan baru-baru ini (bukan dari *Antara*) yang mengatakan bahwa Masyumi telah menuntut jabatan Menteri Agama RIS (Haji Rasjidi), Wakil Menteri Luar Negeri RIS (Mr. Rum atau Mr. Sjamsuddin) dan Perdana Menteri Republik (Sjafruddin Prawiranegara), Sekretariat mengatakan kepada *Antara* bahwa laporan itu tidak benar. Dapat dicatat dalam hubungan ini bahwa Masyumi telah menyiapkan daftar calonnya, namun tanpa mengungkapkan nama-nama mereka. (*Antara*)

* Para pedagang dan pengusaha Yogyakarta menyatakan kepada *Antara* bahwa mereka menyambut baik tawaran pinjaman 5 juta peso yang diberikan oleh kalangan bisnis Filipina ketika misi Laoh berada di Manila.

  Mereka katakan bahwa kemungkinan besar mereka akan segera mengirimkan seorang wakil, kemungkinan Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Dr. Djody, ke Filipina.

  Organisasi Pengusaha Federal Indonesia dan beberapa asosiasi pengusaha lain dilaporkan telah mengumpulkan beberapa ratus ton padi untuk dibarter dengan barang-barang Filipina. (*Antara*)

* Konferensi Gasida (Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh) kedua dibuka hari ini di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan resepsi yang diadakan di Taman Ksatria.

  Ketua Umum Gasida M. Djuned Js. menjelaskan bahwa Konferensi Gasida kedua ini diadakan untuk membicarakan langkah-langkah perdagangan sehubungan dengan akan dibentuknya Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya Djuned mengisahkan perjuangan Gasida sejak mulai berdiri sampai memiliki 26 cabang kini di seluruh Aceh. Ia menyatakan yakin bahwa Gasida akan dapat melayarkan bahteranya menju kemakmuran tanah air.

  Pelindung Gasida Mr. S.M. Amin mengharapkan agar para saudagar menuruti dan menaati undang-undang dan ketentuan Pemerintah. Memang sifat saudagar adalah mencari laba. Tetapi dalam pada itu saudagar hendaknya memiliki rasa sosial. Janganlah hanya mengejar laba, tapi harus juga memikirkan kepentingan masyarakat. Lebih-lebih di saat sekarang.

  Sesudah terbentuknya RIS nanti perjuangan kaum saudagar akan bertambah berat, karena menghadapi persaingan yang lebih luas. Oleh karena itu dari sekarang para saudagar harus melakukan persiapan.

  Penasihat Gasida, Tgk.Muhd. Daud Beureueh menganjurkan agar para saudagar selalu mementingkan persatuan dan perasaan sosial. Di masa kolonial, para saudagar berdiri sendiri-sendiri dan berusaha mengaut keuntungan sebanyak-banyaknya. Sikap demikian kini harus diubah. Kita hendaknya insaf bahwa kini kita bangsa yang merdeka. Tidak ada artinya kemerdekaan, jika ekonomi kita masih dijajah oleh bangsa asing

Akhirnya ia menganjurkan agar kaum saudagar membantu pelajar kita yang sedang menuntut ilmu di mana-mana. (TS291-292)

* Kolonel Victor Sulliwan, peninjau militer Amerika Serikat yang diperbantukan pada Komisi PBB untuk Indonesia meninggal pagi ini karena stroke.

  Kolonel Sullivan bertugas di Indonesia selama lebih dari setahun sebagai perwira kesehatan pada staf PBB. (*Antara*)

* Wakil MGM untuk Asia Tenggara, Edward O'Conner, dijadwalkan akan terbang ke Yogyakarta minggu depan untuk menyerahkan hadiah kepada Presiden Sukarno berupa film dua *reel* berisi perjalanan Pandit Nehru di Amerika Serikat.

  Film itu telah dipertunjukkan kepada wakil-wakil Indonesia dan India di Singapura. (*Antara*)

1949 NOVEMBER 20.

* Hari ulang tahun ke-4 Kementerian Penerangan diperingati di Yogyakarta. (*KU132*)

* Negara merdeka Indonesia yang baru secara resmi akan meminta pinjaman sebesar sekitart 100 juta dollar dari Bank Ekspor-Impor Amerika Serikat akhir Desember mendatang, demikian dikatakan oleh New York Journal of Commerce hari ini.

  Ia tambahkan bahwa Dr. Sumitro, Menteri Negara Indonesia di Amerika Serikat, mengatakan bahwa ia telah berbicara dengan para pejabat Departemen Luar Negeri minggu ini mengenai pinjaman tersebut, dan berharap akan membicarakannya dengan para pejabat Bank Ekspor-Impor dalam beberapa hari ini.

  Ia katakan, menurutnya para pejabat pemerintah Amerika Serikat "sangat simpatik" dan "menyadari sepenuhnya" pentingnya bertindak cepat membantu Republik di tahun pertamanya. (*Antara*)

* Rehabilitasi sistem komunal desa, investasi modal asing, hasil bumi yang dapat diperdagangkan, sistem organisasi koperasi, dan mekanisasi perta-

nian merupakan sebagian dari masalah-masalah penting dalam agenda kongres petani yang akan dibuka hari Selasa di Yogyakarta, demikian menurut juru bicara panitia kongres hari ini. Walaupun tiga organisasi petani yang menjadi sponsor kongres ini berbeda ideologi, pembentukan satu *front* petani yang kuat tampak diperlukan untuk melayani kepentingan umum kelompok penduduk ini, demikian juru bicara. Menurut para sponsor, untuk rehabilitasi negeri ini adalah penting mengintensifkan produksi, melakukan disurbanisasi, dan mendorong industrialisasi.

Sejalan dengan kongres, sebuah pameran pertanian akan diadakan di ibu kota Republik ini. (*Antara*)

* Dewan Keamanan bersidang singkat hari ini untuk mendengarkan laporan Komisi PBB untuk Indonesia, tapi sidang ditunda tanpa perdebatan.

  Beberapa anggota mengatakan mereka ingin menunggu sampai lampiran Persetujuan Belanda-Indonesia tersusun, sebelum melakukan diskusi mengenai Konferensi Meja Bundar di Den Haag.

  Dalam wawancara pers kemudian, Dr. Van Roijen, Menteri Belanda yang ambil bagian dalam perundingan, mengatakan bahwa walau tidak ada pihak yang puas sepenuhnya dengan hasil konferensi, sebuah pondasi yang kokoh telah diletakkan bagi masa depan uni yang dapat diandalkan.

  Persetujuan itu, kalau telah diratifikasi dan dilaksanakan dengan jujur oleh kedua belah pihak, akan menciptakan kondisi terbaik bagi perdamaian dan ketertiban di bagian dunia ini, dan menjadi “benteng melawan komunisme”. (*Antara*)

* Empat orang luka parah (seorang di antaranya kemudian meninggal) hari Sabtu malam di Jakarta, ketika sebuah mobil yang dikendarai seorang Tionghoa menyeruduk rumah gadai yang sedang ramai di daerah Tanah Abang. Dikatakan bahwa sopir telah keliru menginjak gas, dan bukan rem. (*Antara*)

1949 November 21.

* Wakil Perdana Menteri Mr. Sjafruddin Prawiranegara bertolak kembali ke Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dari Yogyakarta setelah memperoleh keterangan lengkap mengenai hasil-hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, dalam sidang-sidang Kabinet Republik.

Di Yogyakarta, Wakil Perdana Menteri telah mengadakan beberapa kali pertemuan dengan para menteri untuk membicarakan penyempurnaan susunan dan perlengkapan berbagai jawatan di Aceh khususnya., dan di Sumatra umumnya.

Informasi dari Yogyakarta menyatakan bahwa penunjukan Kutaraja sebagai tempat kedudukan Wakil Perdana Menteri adalah dalam rangka persiapan menjadikan Aceh sebagai basis perjuangan dan pemerintahan Republik Indonesia apabila Belanda mengkhianati lagi janji-janjinya dan melakukan aksi militer baru. (*KU132*; TS292)

* Dr. J. Leimena dan Letnan Kolonel Daan Jahja tiba kembali di Yogyakarta dari Den Haag. (*KU133*)

* Gubernur Militer Jawa Tengah merangkap Panglima Divisi II, Kolonel Gatot Subroto, bersama Gubernur Jawa Tengah, Budijono, melakukan kunjungan resmi ke Daerah Surakarta. (*KU133*)

* Dewan pemerintahan wilayah khusus Yogyakarta dan dewan kotapraja Yogyakarta menerima resolusi bersama hari ini yang isinya meminta kepada Presiden Republik dan Badan Pekerja KNIP untuk mengimplementasikan dalam bulan ini peraturan-peraturan mengenai institusi wilayah khusus Yogyakarta yang ditetapkan bulan Desember 1948 dan berlaku efektif bulan Februari 1949. (*Antara*)

* Pengurus Besar PSII, partai kecil pecahan dari partai politik Islam Masyumi, mengeluarkan statemen berisi pengumuman bahwa PSII belum dapat menyatakan dukungannya kepada persetujuan Den Haag. Statemen menyatakan bahwa partai itu masih menanti jawaban atas referendum yang telah dikirimkannya ke cabang-cabang untuk menentukan kebijakan yang akan dianut sehubungan dengan persetujuan Den Haag.

  Sementara itu Biro Sentral Acoma, Organisasi Komunis Muda yang juga organisasi kecil, mengeluarkan statemen pada 15 November, yang menyatakan bahwa hasil-hasil yang dicapai delegasi Republik dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag bertentangan dengan kebijakan partai itu dan dengan resolusi-resolusi yang telah diambil oleh Konferensi Pemuda Seluruh Indonesia pada 17 Agustus 1949. Statemen menyatakan bahwa

Acoma tidak dapat mendukung kebijakan Pemerintah Republik terhadap aset asing yang didasarkan pada manifes politik Republik tahun 1945, dan kebijakan untuk berunding dalam usaha mewujudkan kemerdekaan 100%, bukannya pengakuan kemerdekaan 100% Indonesia. (*Antara*)

* Berbicara dalam upacara peringatan ulang tahun ke-4 Kementerian Penerangan Republik, Pejabat Menteri Penerangan Ruslan Abdulgani menyatakan hari ini bahwa selama RIS yang akan dibentuk belum menjadi kenyataan, Kementerian ini tidak akan menyimpang dari kebijakan penerangannya sekarang, yaitu:

1. Memberikan penerangan kepada rakyat mengenai kebijakan dan tindakan pemerintah;
2. Memperdalam pengertian rakyat mengenai ideologi bangsa seperti tersebut dalam konstitusi;
3. Mengembangkan pengertian politik dan kritik rakyat;
4. Menjaga semangat juang rakyat demi tercapainya aspirasi-aspirasinya;
5. Memperkenalkan Republik Indonesia kepada luar negeri.

Abdulgani mengatakan bahwa beberapa pejabat yang mampu akan dipindahkan ke Kementerian Penerangan RIS, namun dengan cara demikian rupa hingga Kementerian Republik tidak dilemahkan.

Mengenai Kementerian Penerangan RIS ia menyarankan agar kementerian itu diberi tugas mengembangkan kesiapan mental rakyat, pendidikan massa rakyat, dan penerangan ke luar negeri. (*Antara*)

* Dalam telegramnya kepada Serikat Buruh Mobil di Jakarta, federasi serikat buruh SOBSI menyatakan bahwa delegasinya ke Peking akan meninggalkan Yogyakarta besok. Telegram menyatakan juga bahwa persiapan bagi keberangkatan itu telah selesai. Dikatakannya bahwa penerbarangan akan dilakukan lewat Jakarta dan Hongkong.

Mengenai laporan yang dimuat oleh New China News Agency bahwa Mardjono mewakili Indonesia, SOBSI menyatakan kepada *Antara* bahwa Biro Sentral SOBSI tidak pernah menunjuk wakil lain daripada delegasi yang akan berangkat besok yang diketuai oleh Njono. (*Antara*)

1949 November 22.

* BFO melakukan sidang pleno hari ini di Yogyakarta untuk membicarakan pembentukan Panitia Persiapan Nasional yang bertugas memilih presiden pertama RIS.

  Di Den Haag, BFO telah mencalonkan sepuluh orang untuk duduk dalam panitia itu. Mereka adalah Anak Agung Gde Agung, Perdana Menteri Indonesia Timur, Dr. Tan Eng Han, Dr. Kosasih, Sultan Hamid, Dr. Suparmo, Abdulmalik, Dr. Indrakusumah, Tatengkeng, Kaliamsjah dan Abdulmuis. Diketahui sekarang bahwa lima anggota lainnya akan ditambahkan pada jumlah sebelumnya.

  Sementara itu Republik akan menunjuk delapan orang untuk duduk dalam panitia.

  Kalangan BFO mengemukakan pandangannya bahwa dengan akan berlangsungnya penyerahan kedaulatan, diinginkan untuk membentuk dewan kolegial terdiri dari wakil-wakil Republik, BFO, dan pemerintahan federal sementara yang disponsori Belanda untuk menyusun langkah-langkah pemerintah yang perlu sebelum penyerahan kedaulatan.

  Kalangan federal ini mengatakan bahwa pemerintahan federal sementara itu sesungguhnya "dalam keadaan likuidasi", karena itu sukar mengatakan bahwa pemerintahan tersebut memiliki makna politik yang dapat membenarkan langkah-langkah yang akan diambilnya sebelum penyerahan kedaulatan. (*Antara*)

* Vicente L. Pastrana, Konsul Jenderal Republik Filipina yang baru untuk Indonesia, menyatakan kepada *Antara* tadi malam bahwa Filipina mungkin akan membuka perwakilan di Indonesia sesudah penyerahan kedaulatan kepada RIS. Pastrana mengatakan, sukar bagi negerinya membuka kedutaan besar di negeri ini. Ia menyebutkan bahwa satu-satunya perwakilan tingkat duta besar Filipina adalah di Washington D.C.

  Konsul Filipina itu mengatakan bahwa tidak lama lagi ia akan berkunjung ke Yogyakarta bersama dengan Marciano A. Joven yang akan ditunjuk sebagai wakil konsul di ibu kota Republik. Ia katakan bahwa tugasnya yang utama di Indonesia kini adalah mencari sarana untuk memperkokoh lebih lanjut hubungan dagang antara negerinya dengan Indonesia. Negerinya membutuhkan hasil pertanian Indonesia, termasuk kopi, teh, barang batik, kedelai, tapioka, kapok, kulit dsb. (*Antara*)

* Konferensi Tani Seluruh Indonesia diselenggarakan di Yogyakarta oleh Barisan Tani Indonesia (BTI), Serikat Tani Islam Indonesia (STII), dan Petani untuk membicarakan modernisasi pertanian, demokratisasi alat-alat negara, dan soal modal asing. Resepsi pembukaan konferensi yang diselenggarakan di Gedung Taman Siswa itu dihadiri oleh Menteri Kemakmuran dan Pembagian Makanan Rakyat, I.J. Kasimo. (*KU133; LUxxii; LU t.h.*)

* Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Sutardjo Kartohadikusumo, menyampaikan keputusan sidang DPA mengenai hasil-hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) kepada Presiden Sukarno. (*KU133*)

* Pembentukan Panitia Kecil PPN (Panitia Persiapan Nasional), yang akan menetapkan kekuasaan PPN dan menyusun peraturan tata-tertib PPN. (*KU133*)

* Mr. Mohammad Rum menjumpai Wakil Tinggi Kerajaan Belanda di Indonesia, A.H.J. Lovink, di Jakarta untuk membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan akan dibentuknya PPN. (*KU133*)

* Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan sebagai daerah terbuka. (*KU133*)

* Dikabarkan bahwa anggota Local Joint Committee Dr. Abdulmanap dari pihak Republik di Surabaya telah dibebaskan dari tahanan Belanda pada 1 November. Dr. Abdulmanap ditahan Belanda beberapa waktu yang lalu. Kini ia bermaksud pergi ke Yogyakarta. (*Antara*)

* Diperoleh kabar dari Kalimantan bahwa situasi militer dan politik di Kalimantan Selatan telah kembali normal. Terdapat indikasi kerja sama antara pasukan Republik dan pasukan Belanda.

  Untuk urusan dinas, personil TNI bisa bergerak bebas di Kota Banjarmasin. (*Antara*)

* Pemimpin-pemimpin puncak (Partai Nasional Indonesia) PNI akan bersidang sore ini untuk membicarakan hasil-hasil Konferensi Meja Bundar

baru-baru ini. Sujono Hadinoto, Ketua PNI, yang ikut ambil bagian dalam konferensi tersebut, telah tiba kemarin dari Negeri Belanda. (*Antara*)

* Konferensi surat-surat kabar nasional yang dijadwalkan akan diselenggarakan di Yogyakarta akhir bulan ini ditunda sampai pertengahan Desember mendatang. Tempat konferensi pun dipindahkan ke Jakarta.

  Prakarsa untuk menyelenggarakan pertemuan ini datang dari surat-surat kabar setempat, *Nasional* dan *Kedaulatan Rakyat*. (*Antara*)

* Partai Buruh Indonesia (PBI) akan menyelenggarakan kongres di Yogyakarta bulan Desember mendatang. Pembicaraan akan berkisar di sekitar persetujuan yang telah tercapai di Negeri Belanda baru-baru ini, yang menjadi dasar bagi penyerahan kedaulatan kepada Indonesia akhir tahun nanti. (*Antara*)

* Dr.A.Y. Helmi, Kepala Departemen Perekonomian Kementerian Luar Negeri Indonesia, akan berangkat ke Ankara (Turki) minggu ini untuk mempelajari situasi di kota itu sehubungan dengan rencana pembukaan perwakilan Indonesia di sana sesudah terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Langkah ini akan diambil kemudian sesudah adanya persetujuan resmi dari Pemerintah Turki.

  Selama kunjungannya di Turki, Helmi akan menghubungi juga Kedutaan Besar Belanda di Ankara untuk membicarakan kedudukan orang-orang Indonesia yang akan bekerja pada Kedutaan Besar Indonesia.

  Kunjungan Helmi ini merupakan hasil pertemuan yang baru-baru ini berlangsung antara Republik, BFO, dan Biro Timur Jauh Belanda di Jakarta, yang membicarakan perwakilan RIS di luar negeri mendatang.

  Diberitakan bahwa para pejabat Belanda telah menyarankan kepada Helmi untuk mempelajari Departemen Perekonomian Kementerian Luar Negeri Belanda di Amsterdam, yang hasilnya dapat dijadikan bahan oleh Kementerian Luar Negeri RIS nanti.

  Helmi akan disertai istrinya yang berdarah murni Turki, dan akan tinggal di Ankara selama beberapa bulan. Ia sendiri lulusan Universitas Istanbul, di mana ia memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Ekonomi.

  Dr. Helmi pulang ke tanah air sesudah penyerahan Jepang, dan tinggal beberapa waktu lamanya di Singapura. Dari sini ia dipanggil ke Yogyakarta,

dan sejak itu menduduki jabatan penting dalam Pemerintah Republik. Helmi telah berulang kali ikut dalam Konferensi ECAFE sebagai anggota delegasi Republik. (*Antara*)

* Mr. Sutardjo Kartohadikusumo, Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA), hari ini menghadap kepada Presiden Sukarno untuk menyampaikan pertimbangan-pertimbangan DPA mengenai Persetujuan Den Haag dan mengenai dimasukkannya agama dalam kurikulum sekolah-sekolah Pemerintah Republik.

Mr. Kartohadikusumo tidak hendak mengungkapkan resolusi DPA, tapi mengatakan bahwa ia pribadi menerima Persetujuan Den Haag, karena persetujuan itu menurut pendapatnya merupakan hasil logis taktik yang ditempuh oleh kaum Republiken dalam mencapai kemerdekaan, yaitu berjuang dan berunding sekaligus.

Ia katakan bahwa hasil-hasil Konferensi Meja Bundar merupakan konsekuensi logis dari konsolidasi internal dalam melawan politik kolonial Belanda, gerilya yang kuat dan gerakan pemuda, bangkitnya gerakan kemerdekaan di seluruh Asia, serta “antitesis” Rusia-Amerika yang telah mengubah konstelasi politik internasional.

Ia katakan, keuntungan besar Persetujuan Den Haag adalah:

1) penyerahan kedaulatan atas seluruh wilayah Indonesia (Irian Barat menurutnya dapat dengan mudah dipecahkan);
2) berakhirnya perpecahan bangsa Indonesia menjadi kaum Republiken dan kaum Federalis;
3) uni Indonesia-Belanda yang merupakan persetujuan internasional dan tidak terbatas masa berlakunya.

Berbicara tentang uni ia katakan bahwa itu merupakan hal yang riskan, tapi akan menguntungkan kedua belah pihak jika masing-masing memiliki “cukup modal moral” bagi usaha bersama.

Ditanya pendapatnya mengenai diterimanya Undang-undang Dasar Sementara RIS sekarang sebagai undang-undang dasar yang permanen, ia menyatakan keyakinannya bahwa orang Indonesia akan lebih menyukai agar Undang-undang Dasar RIS diproses oleh Konstituante RIS.

Mengenai pertimbangan DPA sekitar dimasukkannya agama dalam kurikulum sekolah-sekolah pemerintah, yang telah mengakibatkan “deadlock”

dalam sidang Badan Pekerja KNIP, Mr. Kartohadikusumo tidak hendak membocorkan saran-saran DPA. Namun ia tekankan bahwa menjaga persatuan nasional saat ini merupakan faktor yang paling vital, karena dengan persatuan, bangsa ini akan dapat memecahkan masalah tersebut tanpa kesulitan, demikian Mr. Kartohadikusumo. (*Antara*)

* Menteri Keuangan Ir. Djuanda dalam wawancara khusus dengan *Antara* menjelaskan kebijakan RIS terhadap privilese, konsesi, dan permit yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan asing yang kini beroperasi di Indonesia.

  Ia katakan bahwa secara umum kebijakan RIS akan didasarkan pada pengakuan privilese, konsesi dan permit tersebut. Ia katakan bahwa pengambilalihan perusahaan-perusahaan asing akan dilakukan sesuai dengan hukum internasional dan dilakukan demikian rupa hingga ekonomi bangsa tidak akan dimusuhi.

  Ia jelaskan bahwa Persetujuan Den Haag tidak mengatur bahwa komitmen ekonomi atau keuangan RIS harus dilakukan bersama dengan pihak Belanda. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kedaulatan ekonomi dan keuangan Indonesia adalah penuh. Ia katakan, menjaga kedaulatan ini terhadap pelanggaran asing merupakan tugas utama Pemerintah RIS yang akan dibentuk. Ia katakan, PBB merekomendasikan perdagangan bebas dan penghapusan rintangan perdagangan, dan untuk menghadapi banjir modal asing, "kita harus mengesahkan undang-undang yang memberikan bimbingan dan perlindungan kepada rakyat", hingga ekonomi nasional akan terbentuk.

  Akhirnya ia sarankan agar RIS tidak menganakemaskan sesuatu bangsa. RIS harus menjalin hubungan dengan negeri yang dapat "memberikan kepada kita prospek-prospek yang paling menguntungkan". (*Antara*)

* Orang Inggris pemilik kapal dagang "Hong An" yang ditahan oleh penguasa Belanda di Palembang sejak 1 November dan diperintahkan membongkar muatan karena diduga menyelundupkan lada, dilaporkan menuntut 4.000 Str. dollar plus 750 dollar per hari atas kerugiaan yang diderita pemilik akibat penahanan kapal tersebut.

  Dilaporkan bahwa pemilik kapal telah menyatakan lada itu bukan miliknya, melainkan milik sebagian awak kapalnya. (*Antara*)

* Tweede Kamer (Majelis Rendah) Belanda meratifikasi Persetujuan KMB dengan suara 71 pro dan 29 anti. (AT299)

* Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo mengeluarkan ketetapan No. 337/GM/49 yang mewajibkan kepada semua orang yang masuk dan/atau keluar dari Daerah Kemiliteran Aceh, Langkat, dan Tanah Karo untuk memiliki surat keterangan cacar (*vaccinebewijs*) yang ditandatangani dokter. Mereka yang bepergian ke luar negeri dengan pesawat, selain surat tersebut harus memiliki juga surat kesehatan badan (*gezondheids-certificaat*) dari dokter.

  Surat keterangan cacar dan surat kesehatan badan diperoleh dengan mencacarkan diri di rumah sakit sekurang-kurangnya 14 hari sebelum bertolak. (TS293)

1949 NOVEMBER 23.

* Mr.A.K. Pringgodigdo, sekretaris delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar, telah tiba kemarin di Jakarta dari Belanda.

  Ia menyatakan bahwa prosedur yang akan ditempuh dalam menyerahkan kedaulatan oleh Belanda kepada Indonesia belum ditentukan. Ia nyatakan bahwa tanggal 27 Desember 1949 pernah disebut sebagai tanggal penyerahan kedaulatan tersebut.

  Selanjutnya Pringgodigdo menyatakan bahwa ia akan kembali ke Belanda beberapa hari lagi sesudah ia berkonsultasi dengan para pejabat Republik.

  Ia tidak mengkonfirmasikan nama Komisaris Tinggi Indonesia yang baru-baru ini disebut dalam pers, namun ia mengatakan bahwa "Bakkershove" di Wassenaar, Belanda, sedang dipersiapkan sebagai tempat kediaman Komisaris Tinggi Indonesia.

  Wim Latumeten, pejabat pers yang tiba bersama dengannya, memberikan komentar, bahwa melihat perkembangan politik dewasa ini di Belanda, Parlemen Belanda bisa jadi akan menerima Persetujuan Den Haag. (*Antara*)

* Berita terlambat dari Amboina, Maluku, menyatakan bahwa rapat raksasa yang diadakan di Kota Ambon, ibu kota Maluku, pada 13 November telah

mengambil resolusi untuk meneruskan perjuangan bagi tercapainya kemerdekaan seluruh Indonesia dan menuntut dimasukkannya Irian Barat atau New Guinea dalam wilayah Republik Indonesia Serikat.

Resolusi itu didasarkan pada pertimbangan bahwa suku bangsa Maluku tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia dan Kepulauan Maluku dari Kepulauan Indonesia yang menghampar dari Sabang di barat sampai Merauke di timur, dari Talaud di utara sampai Timor Kupang, dan sudah demikian banyak patriot Maluku menumpahkan darah bagi perjuangan kemerdekaan.

Rapat raksasa itu dikabarkan telah dihadiri oleh 3.000 orang dari berbagai lapisan masyarakat dan diselenggarakan oleh sekitar 10 partai politik di Maluku yang keanggotaannya mencapai 50.000 orang. (*Antara*)

* Pasukan Belanda dijadwalkan akan meninggalkan Distrik Sukabumi besok, namun para administratur sipil dan pejabat polisi Belanda diperkirakan akan tetap tinggal di posnya jika mereka mau.

  Sebagai kepala pemerintahan sipil di distrik itu Republik telah menunjuk Mr. Akuan. (*Antara*)

* Sebuah rancangan undang-undang tentang pembaruan parlemen tidak lama lagi akan diserahkan oleh Pemerintah Republik kepada Badan Pekerja KNIP untuk dibahas, demikian diberitakan di Yogyakarta hari ini. Sebuah sumber tidak resmi menyatakan bahwa rancangan undang-undang itu membuka kemungkinan bagi pencalonan wakil-wakil tambahan partai-partai politik yang sampai kini tidak diwakili, baik di dalam Badan Pekerja maupun di KNIP (parlemen sementara) yang telah berakar di tengah masyarakat. Sidang pleno KNIP untuk meratifikasi Persetujuan Den Haag dijadwalkan akan dibuka tanggal 5 Desember mendatang. (*Antara*)

* Sebuah sekolah asisten ahli farmasi akan dibuka di Yogyakarta pada 1 Desember yad. (*Antara*)

* G.J. Palstra, wakil menajer jenderal India Overseas Bank Ltd. yang bermarkas di Madras (India), dalam kunjungan singkatnya di Yogyakarta telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Perekonomian Kasimo, Menteri Keuangan Lukman Hakim, dan Direktur Bank Negara Margono

Djojohadikusumo. Pembicaraan dikabarkan berkisar sekitar rencana pembukaan cabang-cabang bank tersebut di Indonesia, yang jika tercapai persetujuan, akan melayani perdagangan antara Indonesia dan India. Palstra akan kembali ke Madras lewat Jakarta besok.

Pengusaha India itu mengatakan kepada *Antara* bahwa ia mendapat kesan para pejabat Republik menyambut baik tawaran dari bank-bank India untuk membantu perdagangan antara India dan Indonesia, juga penanaman modal India yang dibutuhkan oleh Indonesia. Ia tambahkan bahwa rencana itu tentu saja baru dapat dilaksanakan sesudah penyerahan kedaulatan kepada Indonesia tahun depan.

Menjawab pertanyaan, Palstra menyatakan bahwa rumah-rumah dagang India menanti kemungkinan bagi kerja sama India-Indonesia di bidang perdagangan.

Perlu dicatat bahwa hubungan dagang antara India dan Indonesia praktis telah mengalami gangguan tahun-tahun terakhir ini.

Mendukung prinsip perdagangan bebas sebagai salah satu sistem terbaik yang harus dipilih Indonesia, seperti juga India, Palstra menyatakan bahwa akan bijaksana bagi kebijakan ekspor Indonesia untuk menghindari saluran rumah-rumah dagang besar, sebaliknya memilih kontak langsung dengan negeri-negeri pembeli.

Ia katakan, keuntungan, kalau ada, yang diperoleh bank-bank India di negeri ini tidak akan ditransfer ke India, tapi akan digunakan di negeri ini untuk meluaskan usaha di sini. Sistem serupa telah dipraktekkan di Siam, Birma dan Sailan. (*Antara*)

* Konferensi Tani yang diselenggarakan oleh dua perkumpulan tani (BTI dan STII) telah dibuka di Yogyakarta tadi malam.

Menteri Perekonomian Kasimo, Menteri Perburuhan Kusnan, Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Sutardjo Kartohadikusumo dan banyak pemimpin politik lain hadir dan sidang pembukaan.

Dalam kesempatan itu diadakan juga pameran pertanian. (*Antara*)

* Gerombongan bersenjata tak dikenal minggu lalu telah meneror penduduk Tionghoa di Banjarmasin. Gerombolan itu telah mendatangi rumah-rumah pada malam hari, dan meminta uang dan perhiasan dengan ancaman

senjata. Dilaporkan bahwa pos TNI di Gambut (desa di luar Banjarmasin) pun belakangan ini beberapa kali mendapat serangan, disusul dengan tembak-menembak.

Untuk menjaga ketentraman, Pemerintah Kalimantan Selatan telah menggelar satuan polisi di daerah-daerah luar kota di mana ketentraman dan keamanan harus dijaga dalam kerja sama dengan Divisi Lembu Mangkurat dari TNI.

Untuk memperkokoh langkah-langkah keamanan itu, pemerintah telah membuka kursus pelatihan kilat untuk personil kepolitisan. Diharapkan, sekitar 300 polisi akan sudah menyelesaikan pelatihan tersebut minggu depan. (*Antara*)

* Beberapa kalangan di Yogyakarta menyatakan keprihatinannya bahwa di antara para tahanan yang dipindahkan ke New Guinea oleh Belanda untuk kerja paksa masih ditemukan tahanan politik. Mereka mengatakan, bahwa karena kekacauan dan belum adanya kesepakatan apakah tahanan itu tahanan kriminil atau politik, maka penentuan mengenai klasifikasinya harus dilakukan dengan pengertian pihak Republik juga.

Sementara itu kalangan resmi Republik menyatakan, bahwa di New Guinea sendiri pun masih banyak tahanan politik yang kasusnya harus diselidiki. (*Antara*)

* Diberitakan di Surabaya bahwa seorang manajer terkemuka sebuah perusahaan perkebunan besar di Jawa Timur telah menemui pejabat Republik di Jawa Timur untuk membicarakan cara dan sarana untuk menjaga keamanan di perkebunan.

Dikatakan, tokoh tersebut telah mengindikasikan bahwa hukum dan ketertiban mutlak dapat dipercayakan kepada TNI (tentara Republik). Ia telah berusaha memenuhi kebutuhan TNI di perkebunannya, dan menyatakan bahwa masa depan ekonomi RIS sebagian akan tergantung pada hukum dan ketertiban di berbagai perkebunan. (*Antara*)

* Pemogokan 150 buruh perusahaan batubara Belanda NISHM di Tanjung Priok sejak Minggu 2 November, yang mengakibatkan kelumpuhan sebagian kegiatan di pelabuhan Tanjung Priok, diteruskan hari ini, sesudah

ultimatum pimpinan NISHM agar para pemogok bekerja kembali pada jam 08.00 pagi ini ditolak para pemogok.

Pemogokan itu diteruskan atas nasihat Serikat Buruh Kapal dan Pelabuhan. Menurut para perunding serikat buruh ini, tuntutan para buruh belum cukup dipenuhi. Kepada *Antara* mereka mengungkapkan bahwa para pemogok mengajukan tuntutan-tuntutan berikut, yang oleh pers Belanda telah dipelintir:

1. Memperpendek jam kerja dari 12 jam menjadi 5 jam sehari.
2. Memberikan pembayaran untuk kerja ekstra sebesar 1% dari gaji harian pokok pada hari-hari kerja, dan 1½% dari hari Minggu dan hari libur lain.
3. Memberikan hari libur sesudah tugas malam.
4. Melengkapi buruh dinas pukat dengan jas hujan pada musim hujan.
5. Memberikan kesempatan kepada buruh Muslim untuk menjalankan ibadah pada hari Jumat antara jam 11.30-14.30.

Usul-usul NISHM disertai ultimatum bahwa para buruh akan dipecat jika mereka tak bekerja kembali pada jam 08.00 pagi ini, menurut Serikat Buruh Kapal dan Pelabuhan berbunyi sbb.:

1. NISHM setuju memperpendek jam kerja dari 12 jam menjadi 8 jam, namun semua buruh harus bekerja 12 jam, dengan pengertian bahwa mereka akan dibayar untuk 4 jam tambahannya.
2. Kerja ekstra akan dibayar dengan jumlah yang telah ditetapkan, namun tidak akan ada pembedaan untuk pekerjaan malam atau siang, pada hari kerja atau pada hari Minggu dan hari libur lain.
3. Buruh yang bekerja malam hari akan mendapat libur hari berikutnya, tapi mereka yang hanya meronda harus bekerja hari berikutnya.
4. Pimpinan perusahaan akan mencoba mendapatkan jas hujan untuk buruh lewat sistem distribusi Pemerintah.
5. Para buruh diijinkan menjalankan ibadah per kelompok.

Akhirnya Perserikatan Buruh Kapal dan Pelabuhan menyatakan bahwa menurut sistem yang kini dianut oleh perusahaan itu, seorang buruh harus bekerja 36 jam bertutut-turut untuk dapat mengantongi upah ekstra untuk kerja yang harus dilakukannya malam hari. (*Antara*)

* Di New York, Dr. Sudarsono membicarakan masalah perwakilan Republik Indonesia (RI), khususnya mengenai dimasukkannya perwakilan RI dalam Republik Indonesia Serikat (RIS). (*KU133*)

* Wakil Direktur Indian Overseas Bank, C.J. Palstra, berkunjung ke Yogyakarta untuk merundingkan kemungkinan dibukanya cabang-cabang bank tersebut di Indonesia. (*KU133*)

1949 NOVEMBER 24.

* Wakil Presiden Hatta hari ini menerima kawat dari Perdana Menteri India Nehru sebagai jawaban atas kawat yang dikirimkan Hatta dari Singapura dalam perjalanan pulang ke Indonesia berisi ucapan selamat ulang tahun kepada Perdana Menteri India.

  Kawat itu berisi ucapan selamat kepada Hatta sehubungan dengan hasil-hasil yang telah dicapai dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, dan pernyataan menyesal dari Nehru yang tidak dapat menjumpai Wakil Presiden ketika Wakil Presiden dalam perjalanan ke Indonesia. (*Antara*)

* Sidang lengkap Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) di Jakarta mengambil keputusan mengenai perwakilan rakyat di negara Republik Indonesia Serikat (RIS) mendatang.

  Perwakilan tersebut adalah: 50 kursi untuk Republik Indonesia (RI), 29 kursi untuk BFO, dan 3 kursi untuk penduduk yang bukan daerah bagian, seperti Sabang, Padang, dan Kota Waringin (di Kalimantan). (*KU133*)

* Konferensi Tani Seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta antara 22-26 November kemarin mengambil resolusi sbb.:

  1. Mengembangkan kecakapan dan pemikiran intelektual rakyat dengan memberantas buta huruf dengan cara menyediakan sekolah yang cukup jumlahnya bagi anak-anak desa, menyelenggarakan kursus-kursus pengetahuan umum, ilmu ekonomi dsb. serta memelihara semangat kemerdekaan mereka.
  2. Membina kehidupan spirituil rakyat dengan mengadakan pelajaran-pelajaran agama dan lain-lain kursus pendidikan spirituil, sopan-santun Timur.

3. Meningkatkan taraf hidup rakyat dengan menaikkan produksi, serta memodernisasikan, menyempurnakan dan melengkapi alat-alat produksi.
4. Memperbaiki kondisi kesehatan rakyat dengan memperbaiki sanitasi dan perawatan.
5. Mendemokratisasikan dan menciptakan organ-organ administratif desa otonom.
6. Mendidik pemuda desa membantu menjaga hukum dan ketertiban di daerahnya sendiri.
7. Memodernisasikan desa.
8. Menyempurnakan organisasi-organisasi petani.
9. Konferensi Tani Seluruh Indonesia ini diselenggarakan oleh beberapa organisasi tani Indonesia, yang terbesar di antaranya Barisan Tani Indonesia yang sebelum Aksi Militer Belanda menyatakan memiliki anggota sebanyak 3 juta orang. (*Antara*)

* Sidang pleno BFO pada 24 November menerima resolusi yang menuntut 97 dari 100 kursi dalam Dewan Perwakilan Rakyat RIS yang akan dibentuk, untuk wilayah di luar Republik Indonesia. Menurut resolusi tersebut, tiga kursi lagi akan diserahkan kepada wilayah yang tidak ambil bagian dalam BFO.

Pembagian 97 kursi yang diatur berdasarkan jumlah penduduk itu adalah sbb.: Indonesia Timur 17, Pasundan 21, Jawa Timur 15, Madura 5, Sumatra Timur 4, Sumatra Selatan 4, Jawa Tengah 12, Bangka 2, Belitung 2, Riau 2, Kalimantan Barat 4, Dayak Besar 2, Banjar 3, Kalimantan Tenggara 2, dan Kalimantan Timur 2.

Resolusi menyatakan bahwa akan diusahakan agar wilayah-wilayah yang ikut dalam BFO memilih anggotanya sesuai aturan berdasarkan prinsip perwakilan proporsional oleh pemerintah masing-masing wilayah sebelum tanggal 15 Desember 1949. (*Antara*)

* Empat anggota Subkomite Hibah Senat Amerika tiba di Jakarta dengan pesawat dari Saigon sore ini. Dalam dua hari kunjungannya di Indonesia mereka akan melakukan pembicaraan dengan para pejabat Belanda.

Keempat senator akan pergi ke Yogyakarta sebelum kembali ke Manila. Sedemikian jauh anggota Kongres Amerika ini telah berkunjung ke London, Paris, Madrid, Roma, Ankara, Kairo, Teheran, Baghdad, Karachi, New Delhi, Bangkok dan Saigon. Misi mereka ialah mempelajari persyaratan bagi penggunaan dana ECA dan prospek-prospek ekonomi di negeri-negeri yang mereka kunjungi.

Delegasi ini mencakup Senator Allen J. Allender, demokrat dari Louisiana, ketua delegasi, Theodore F. Green, demokrat dari Rhode Island, Homer Ferguson, Republiken dari *Michigan*, dan William de Johner, Republiken dari Indiana. (*Antara*)

* *New Time* dalam sebuah artikel penuh hari Kamis mengenai persetujuan Indonesia-Belanda mengecapnya sebagai "agresi imperialis" dan mengatakan bahwa orang Indonesia kini tetap meneruskan dan mengintensifkan perjuangan bagi kemerdekaannya. Artikel menyebutkan bahwa langkah awal dalam Keputusan Meja Bundar di Den Haag bukanlah langkah menuju perdamaian. Itu adalah jenis baru agresi imperialis terhadap 70 juta rakyat Indonesia. Perang di Indonesia sedang berlangsung. Rakyat Indonesia akan mempertahankan negeri mereka terhadap tentara pendudukan imperialis. (*Antara*)

1949 NOVEMBER 25.

* Wakil *Presiden* Mohammad Hatta memberikan keterangan kepada sidang terbuka Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) sebagai awal tanggung jawab Pemerintah yang akan diberikan kepada KNIP awal Desember 1949. (*KU133; LUxxii; LU t.h.*)

* Perkumpulan Tionghoa Seberang Lautan Chung Hua Tsung Hui dalam statemen yang ditandatangani oleh ketuanya Khoe Giok Swie dan sekretarisnya Thio Giok Swie melukiskan adanya hukum dan ketertiban yang sempurna di Purworejo sejak Purworejo ditinggalkan oleh pasukan Belanda dan diserahkan ke tangan TNI.

Statemen menyatakan bahwa berkat langkah-langkah bijaksana yang diambil oleh TNI dan pegawai negeri Republik, hubungan persahabatan di antara penduduk dapat dijaga. Dikatakan bahwa Chung Hua Tsung Hui telah ikut meredakan kepanikan yang timbul di kalangan penduduk

Tionghoa beberapa waktu yang lalu sebelum pasukan Belanda meninggalkan Purworejo, karena beredarnya desas-desus (yang sumbernya tak diketahui) bahwa penduduk Tionghoa akan diperiksa sedatang pasukan TNI. Statemen selanjutnya menyatakan bahwa berkat tindakan pencegahan yang diambil oleh perkumpulan itu, hanya 1% dari 4.000 penduduk Tionghoa, beberapa orang Indonesia dan beberapa pejabat Pemerintah Belanda telah mengungsi.

Menurut kabar, statemen ini telah dikirim kepada Konsul Jenderal Tionghoa di Jakarta, Wakil Konsul Tionghoa di Yogyakarta, Kementerian Dalam Negeri Republik di Yogyakarta, dan Perkumpulan Tionghoa Seberang Lautan di Jakarta, Yogyakarta, Semarang dan Porwokerto. (*Antara*)

* Delegasi SOBSI beranggotakan sembilan orang di bawah pimpinan Njono waktu ini berada di Jakarta menantikan fasilitas lebih lanjut bagi penerbangannya ke Peking di mana mereka akan menghadiri konferensi WFTU.

Njono menyatakan kepada pers kemarin di Jakarta bahwa SOBSI tetap menjadi anggota WFTU di Peking untuk dapat meloloskan resolusi yang pada hakekatnya menyerukan diperkuatnya dan ditingkatkannya bantuan WFTU kepada "perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia" dengan jalan:

1. Menuntut penarikan segera pasukan Belanda dari Indonesia;
2. Membebaskan semua tahanan politik dan tawanan perang;
3. Memulihkan hak-hak demokratis dan kemerdekaan berserikat bagi kaum buruh Indonesia.

SOBSI dipandang sebagai federasi buruh kuat yang menyatakan beranggotakan 16 serikat buruh. Njono mengatakan, federasi buruh ini mempunyai anggota 1.264.066 sebelum Agresi Militer I Belanda terhadap Republik. Sesudah Aksi Militer II anggotanya merosot tinggal 220.392. (*Antara*)

* Badan Pekerja KNIP dalam sidangnya sore ini telah menerima resolusi untuk menambah jumlah anggota KNIP, dengan perbandingan suara 13 lawan 11.

Sidang juga diperuntukkan mendengarkan laporan Perdana Menteri Mohammad Hatta mengenai hasil-hasil Konferensi Meja Bundar. (*Antara*)

* Ali Sastroamidjojo, kepada Komite Kebudayaan Delegasi Republik ke Konferensi Den Haag baru-baru ini, menyatakan kepada *Antara* hari ini bahwa menurut persetujuan Den Haag RIS dan Negeri Belanda akan bekerja sama di bidang budaya sebagai dua negara yang berdaulat dan sederajat. Ia katakan bahwa kerja sama itu akan dilakukan atas dasar sukarela, karena itu berlainan dengan kerja sama wajib di masa kolonial. Ia katakan bahwa RIS akan menempuh kebijakan budaya yang independen, karena itu ia katakan, "Kami tidak takut akan penetrasi budaya terhadap RIS", lebih-lebih karena "kami merasa kuat di bidang budaya".

  Ia katakan bahwa kalau orang Indonesia harus mengambil alih budaya Belanda atau budaya sesuatu negeri lain, hal itu akan dilakukan sesudah melakukan seleksi yang bijak. Akhirnya ia tutup keterangannya dengan mengatakan bahwa dasar sukarela bagi persetujuan budaya antara Belanda dan Indonesia akan menjamin hasil-hasil abadi keuntungan bersama kedua negeri. (*Antara*)

* Konferensi Tani Seluruh Indonesia dalam sidangnya kemarin telah menerima resolusi untuk memekanisasikan pertanian Indonesia. Untuk maksud itu penyelidikan dan penelitian akan dilakukan di daerah-daerah di mana ribuan hektar lahan tinggal tak tergarap di musim kemarau, di pulau-pulau luar Jawa di mana lahan-lahan tak berpengairan tidak digarap secara intensif, dan di daerah-daerah di mana hutan dapat ditebang untuk menanam tanaman pangan.

  Resolusi lain mendesak dibentuknya struktur ekonomi nasional dalam kerja sama dengan pemerintah dengan membangun koperasi-koperasi, memberlakukan undang-undang yang melindungi koperasi, dan menyerukan kepada organisasi-organisasi lain untuk bekerja sama dalam mewujudkan "koperasi-koperasi rakyat" ini bersama pemerintah.

  Resolusi-resolusi penting lain adalah:

  1. Modal asing yang memulai kembali atau akan memulai kegiatannya harus menyesuaikan diri dengan struktur ekonomi nasional Indonesia, artinya harus mempertimbangkan kepentingan penduduk pribumi,

dan harus dilakukan demi keuntungan kedua belah pihak, asing dan nasional; sebagian besar jabatan-jabatan kunci harus dipercayakan kepada orang Indonesia.

2. Semua undang-undang yang melindungi hak istimewa, konsesi, hak milik pribadi dsb. dan yang jelas menghambat dimasyarakatkannya alat-alat produksi pertanian harus ditiadakan.
3. Perkebunan-perkebunan di tanah-tanah spekulatif yang tidak digarap harus sesegera mungkin diurus oleh pemerintah.
4. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang produksi pertanian vital harus dikontrol oleh pemerintah.
5. Perkebunan-perkebunan yang akibat politik bumi hangus telah rusak dan kini digarap dan ditinggali rakyat harus dinyatakan sebagai milik desa. (*Antara*)

* Wakil Presiden Mohammad Hatta kemarin menerima telegram dari Menteri Luar Negeri Iran Asghar Hekmat berisi ucapan selamat kepadanya atas tercapainya hasil-hasil Konferensi Meja Bundar mengenai Indonesia di Den Haag. (*Antara*)

* Gerombolan Darul Islam dilaporkan aktif di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, minggu ini. Pertempuran antara gerombolan DI dan pasukan TNI terjadi beberapa hari yang lalu di Cimarangas dan sekitarnya. Selama beberapa hari perhubungan antara Tasikmalaya dan Banjar lewat Cimarangas terputus.

Akibat pertempuran itu 200 rumah dekat Cimarangas menjadi abu, dan 4.000 orang dilaporkan mengungsi ke Tasikmalaya. Menurut laporan yang belum ditegaskan kebenarannya, lima belas orang kulit putih ikut dalam gerombolan yang menyerang pos TNI di Banjarsari.

Semua serangan itu dapat dihalau dengan baik, demikian dilaporkan. (*Antara*)

* Wakil Perdana Menteri Sjafruddin Prawiranegara menyatakan kepada wartawan bahwa maksud perjalanannya ke Yoguyakarta baru-baru ini ialah untuk berusaha memasukkan barang-barang yang dibutuhkan penduduk dan bahan-bahan penting pembangunan Aceh.

Barang-barang tersebut sudah tersedia, hanya pengangkutannya tertunda karena buruknya perhubungan. 150 ton gula menunggu pengangkutan, sementara dari pihak Belanda tidak ada usaha untuk menghalangi.

Ia tambahkan bahwa tanggal 27 November mendatang Wakil Presiden Hatta akan datang ke Aceh untuk menyampaikan secara langsung kepada rakyat Aceh hasil-hasil Konferensi Meja Bunda. (TS293)

* Konferensi Wanita Daerah Aceh dibuka dengan resepsi yang dihadiri a.l. oleh Wakil Perdana Menteri Sjafruddin Prawiranegara, Gubernur Militer Tgk. Muhd. Daud Beureueh, pembesar sipil dan militer, serta wakil partai dan organisasi.

Baik Wakil Perdana Menteri maupun Gubernur Militer memberikan petunjuk kepada kaum wanita sebagai ibu rumah tangga dan anggota masyarakat yang sedang berjuang membela kemerdekaan bangsa dan tanah air. (TS295)

* Dua ribu orang menghadiri rapat umum yang diselenggarakan oleh Gerakan Indonesia Merdeka di teater “Flora” di Menado kemarin. Pembicara utama adalah M. Sondakh, anggota delegasi Minahasa dalam Konferensi Meja Bundar. Ia mengungkapkan kepuasannya terhadap hasil-hasil Konferensi di Den Haag itu, namun menyayangkan penundaan masalah Irian. Ia katakan, Irian tidak dapat dipisahkan dari kesatuan Indonesia.

Beberapa orang pembicara pun menyatakan harapannya agar Irian segera dimasukkan dalam yurisdiksi Republik Indonesia Serikat. (*Antara*)

1949 NOVEMBER 26.

* Perdana Menteri Mohammad Hatta bertemu dengan Wakil Tinggi Kerajaan Belanda di Indonesia, A.H.J. Lovink. (*KU134*)

* Panitia Persiapan Nasional bersidang untuk pertama kali.

Panitia ini berkewajiban menyelenggarakan persiapan penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). Untuk itu ditetapkan:

1. Mr. Mohammad Rum sebagai ketua, Anak Agung Gde Agung sebagai wakil ketua, dengan 31 orang anggota: 15 orang dari Republik dan 16 orang dari Bijeenmkomst voor Federaal Overleg (BFO);

2. Peraturan tata-tertib PPN;
3. Delapan anggota Panitia Pusat PPN, yaitu: Mr. Mohammad Rum, Anak Agung Gde Agung, Dr. J. Leimena, Ir. Djuanda, Dr. Suparmo, Raja Kaliansjah, Mr. Kosasih, dan Prof. Supomo. (*KU133-134; LUxxii*)

* Diperoleh berita dari sumber yang dapat dipercaya bahwa Panitia Persiapan Nasional akan mengadakan sidangnya yang pertama dan meresmikan pelantikannya pada jam 21.00 malam ini. Sidang itu menurut sumber tersebut akan diadakan di bawah pimpinan Wakil Presiden Republik merangkap Perdana Menteri Mohammad Hatta yang merupakan "anggota tertua dalam hubungan perjuangan kemerdekaan nasional".

  Ketua untuk sidang-sidang selanjutnya akan ditentukan kemudian oleh Panitia Persiapan Nasional.

  Selanjutnya diungkapkan oleh sumber tersebut bahwa pelantikan resmi PPN akan disusul dengan pembentukan resmi Departemen Luar Negeri dan Panitia Perwakilan (*Posts Committee*) yang menurut laporan telah mengadakan beberapa pertemuan tak resmi di Jakarta baru-baru ini. Panitia ini terdiri dari 9 anggota, 3 di antaranya dari pihak Republik, 3 dari pihak Federalis, dan 3 dari Kantor Timur Jauh (*Far Eastern Office*), dan mereka akan bertanggungjawab langsung kepada PPN. (*Antara*)

* Sidang pleno KNIP ditetapkan akan dibuka kembali di Yogyakarta pada 5 Desember, demikian diumumkan oleh Mr. Assaat, Ketua BP KNIP, dalam sidangnya hari ini. (*Antara*)

* Konferensi Surat Kabar Seluruh Indonesia yang semula akan diadakan pada 15 Desember di Yogyakarta, diajukan penyelenggaraannya. Konferensi itu akan dibuka tanggal 7 Desember untuk memberikan kesempatan kepada peserta konferensi mengikuti jalannya sidang-sidang KNIP yang akan dimulai pada 5 Desember. (*Antara*)

* Dewan Perwakilan Pulau Bangka dalam sidangnya pada 23 November untuk mendengarkan laporan delegasi Bangka mengenai Persetujuan Den Haag telah menerima resolusi untuk mendesak semua partai yang peduli terhadap sengketa Indonesia-Belanda agar memulai kembali pembicaraan mengenai masalah Irian Barat segera sesudah penyerahan kedaulatan.

Resolusi itu menyatakan keinginan seluruh penduduk Bangka agar Irian masuk dalam yurisdiksi RIS sebelum akhir tahun 1950. (*Antara*)

* Empat orang senator dari Amerika Serikat—Janner, Green, Kllender, dan Ferguson—berkunjung ke Yogyakarta untuk memperoleh keterangan tentang penggunaan bantuan ECA (Economic Cooperation Administration). (*KU133*)

* Konferensi Tani Seluruh Indonesia berakhir. (*KU134*)

* Penasihat Delegasi RI dalam Konperenmsi Meja Bundar di Den Haag, Residen T.Muhd. Dausjah tiba kembali di Kutaraja (sekarang Banda Aceh). Kepada wartawan ia menyatakan bahwa di mana-mana ia mendapat sambutan, termasuk di Negeri Belanda.

  Menurut pendapatnya, keadaan Indonesia dibandingkan keadaan di negara-negara Asia lainnya lebih baik, terkecuali India.

  Tentang KMB ia menyatakan, waktu kita menerima Persetujuan Rum-Roijen, kita sudah tahu bahwa kita akan menuju perundingan KMB di Den Haag untuk mencapai perdamaian. "Saya yakin, KMB tidak mengecewakan kita, karena di dalam konferensi itu masing-masing pihak tidak mendapat tekanan," katanya.

  Mengenai utang, ia katakan, sudah sepantasnya kita menerimanya, sebab penyerahan kedaulatan itu ada syarat-syaratnya pula.

  Mengenai daerah-daerah *Zelfbestuur* di Indonesia dikatakannya, daerah-daerah itu akan masih dianggap berdiri sesudah penyerahan kedaulatan nanti, kecuali Aceh.

  Menurut T. Muhd. Daudsjah, hasil-hasil KMB itu memuaskan, dan kedaulatan yang akan kita terima itu penuh 100%. (TS295)

1949 NOVEMBER 27.

* Perdana Menteri Republik Dr. Mohammad Hatta yang tiba di Jakarta hari Sabtu sore dari Yogyakarta, akan terbang ke Sumatra hari ini (Minggu). Ia akan disertai oleh Dr. Mohammad Rum, dan Dr. Abu Hanifah. Dalam perjalanan keliling Sumatra Perdana Menteri Hatta akan mengadakan pertemuan dan mengucapkan pidato untuk menjelaskan tentang hasil-

hasil Konferensi Meja Bundar baru-baru ini di Den Haag, yang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia akhir tahun ini.

Ikut datang hari Sabtu kemarin Menteri Pertahanan Sultan Hamengku Buwono, Dr. Mohammad Rum, Dr. Susanto Tirtoprodjo (ketua delegasi Republik), Menteri Penerangan Dr. Sjamsuddin, Dr. Sukiman, Dr. Leimena, Kolonel Simatupang, Kolonel Nasution, Dr. Utojo dari Kantor Republik di Singapura, Letnan Kolonel Daan Jahja, Mr. Konijnenburg dari Perusahaan Penerbangan Belanda (KLM).

Di lapangan terbang tokoh-tokoh Republik ini disambut oleh Perdana Menteri Negara Indonesia Timur Anak Agung Gde Agung, Perdana Menteri Negara Pasundan Dr. Djumhana, Walikota Jakarta Dr. Sastromuljono, Dr. J.P. Koets, Kepala Kabinet Wakil Tinggi Mahkota, Ajudan Wakil Tinggi Mahkota, Mr. Creutzberg dari Perusahaan Penerbangan Belanda. (*Antara*)

* Wakil Presiden Mohammad Hatta bertolak ke Sumatra untuk memberikan penjelasan tentang hasil-hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) kepada masyarakat di Sumatra. (*LUxxii*)

* Panitia Kecil Urusan Militer dalam PPN (Panitia Persiapan Nasional) bersidang untuk membicarakan pengunduran diri tentara Belanda. (*KU134*)

* Wakil direktur kantor berita *Aneta*, Roosdorp, bertemu dengan Menteri Penerangan Mr. Samsudin untuk menanyakan masalah kedudukan kantor berita *Aneta* di negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dan hubungannya dengan surat-surat kabar di Indonesia. (*KU134*)

* Wakil Presiden Mohammad Hatta tiba di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan pesawat UNCI (United Nations Commission for Indonesia).

Sesuai dengan maksud kedatangannya untuk menjelaskan hasil-hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag kepada rakyat Aceh, di Kutaraja Hatta mengadakan pertemuan dengan pimpinan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, pimpinan sipil dan militer serta badan-badan perjuangan.

Ia menjelaskan proses perundingan di dalam konferensi, hasil-hasilnya, serta manfaatnya bagi Republik Indonesia. Kemudian ia minta agar semua pihak mendukung hasil-hasil yang telah dicapai, yang akan dijadikan sebagai titik tolak perjuangan selanjutnya.

"Aceh telah menjadi modal dalam perjuangan kemerdekaan, merupakan modal dalam pertarungan dengan senjata, maka hendaknya sekarang pun menjadi modal dalam penyelesaian revolusi kita," demikian Wakil Presiden. (*TS297*)

* Wakil Presiden Mohammad Hatta hadir dalam pertemuan dengan pembesar sipil dan militer, wakil partai, pemuka rakyat dan kaum wanita di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Sumatra Utara di Kutaraja.

Dengan panjang lebar ia menguraikan jalannya perundingan dalam Konferensi Inter Indonesia dan kemudian dalam KMB serta hasil-hasilnya.

Ia menganjurkan kepada hadirin khususnya dan kepada bangsa Indonesia umumnya agar sesudah penyerahan kedaulatan nanti bekerja lebih giat dan bertanggungjawab demi kebahagiaan bangsa dan negara. (TS297)

* Dr. Mohammad Rum telah ditunjuk sebagai Ketua Panitia Persiapan Nasional yang harus memilih Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) dan menyusun jadwal lebih lanjut guna menerima kedaulatan akhir tahun ini. Wakil Ketuanya adalah Anak Agung Gde Agung.

Panitia itu telah dibentuk dalam sidangnya yang pertama hari Sabtu malam.

Sidang juga telah memutuskan menerima rancangan aturan kerja terdiri atas 14 butir, dan menunjuk panitia pusat dengan delapan orang anggota, yaitu Mohammad Rum, Anak Agung Gde Agung, Dr. Leimena, Djuanda, Dr. Suparmo, Radja Kaliamsjah, Kosasih, dan Prof. Supomo.

Ketika membuka sidang itu, Perdana Menteri Republik Dr. Mohammad Hatta menyatakan: "Apa yang kita lakukan sekarang ini bukan hal baru. Waktu mendesak. Dalam lima-enam minggu kedaulatan akan diserahkan kepada kita. Untuk menerima kedaulatan ini kita harus menyiapkan diri untuk melancarkan prosedurnya. Yang harus kita tangani sekarang adalah menjaga agar pemerintahan terus berjalan. Yang paling penting adalah

menjaga hukum dan ketertiban. Bersamaan dengan itu kita harus mencari cara-cara terbaik untuk memilih kepala negara yang baru."

Selanjutnya Hatta mengatakan, barangkali panitia persiapan ini dapat mencari bantuan dari organisasi-organisasi di luar, khususnya sehubungan dengan penegakan hukum dan ketertiban. (*Antara*)

* Dr. Sukiman, ketua partai Islam "Masyumi" dalam wawancara dengan *Antara* tadi malam membantah desas-desus seolah-olah partainya akan melancarkan kup di Jakarta. Dr. Sukiman tiba di Jakarta bersama dengan Perdana Menteri Hatta Sabtu sore.

Dr. Sukiman mengatakan, desas-desus itu tidak berdasar dan "absurd", sebab menurutnya, Masyumi adalah partai yang punya wakil di pemerintah, dalam delegasi, dan dalam Badan Pekerja Parlemen, dan sepenuhnya bekerja sama dalam urusan-urusan negara yang penting, misalnya ia telah ambil bagian dalam Konferensi Meja Bundar di Negeri Belanda.

Menurut Sukiman, "tuduhan ini bisa saja dilancarkan oleh mereka yang berkepentingan sebagai tirai untuk menutupi maksud-maksud jahatnya sendiri terhadap Pemerintah Republik". Selanjutnya ia mengira maksud kup itu ada pada kelompok-kelompok yang tidak ambil bagian dalam Pemerintah atau delegasi Republik, dan menentang kebijakan pemerintah sekarang. (*Antara*)

* Sejumlah pasukan Republik akan ditempatkan di Jakarta demi ketenteraman umum sehubungan dengan penyerahan kedaulatan akhir tahun ini, demikian dinyatakan oleh Kolonel Simatupang dari TNI setibanya di Jakarta dari Yogyakarta hari Sabtu sore. Namun perwira Republik itu tidak bersedia mengungkapkan tanggal masuknya dan kesatuan mana yang akan ditugaskan untuk itu. Ia menekankan bahwa tidak akan ada kekosongan dalam hal keamanan selama berlangsung penyerahan kedaulatan. Ia katakan, segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ini akan ditentukan oleh Komite Militer. (*Antara*)

* Sumber resmi Belanda menyatakan bahwa H.J. Lovink, wakil Tinggi Mahkota Belanda, akan mengundurkan diri pada saat penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Sumber itu mengatakan bahwa

Lovink sudah mengajukan pengunduran dirinya kepada Pemerintah Belanda. Sumber tersebut mengungkapkan bahwa Pemerintah Belanda telah memutuskan untuk tidak meminta Wakil Tinggi Mahkota Belanda yang sekarang untuk menjadi Komisaris Tinggi yang pertama di Republik Indonesia Serikat. (*Antara*)

1949 NOVEMBER 28.

* Dalam perjalanan kelilingnya di Sumatra, Perdana Menteri Mohammad Hatta tiba di Medan dan mendapat sambutan meriah dari rakyat. (*KU134*)

* Suwirjo bertolak ke Jakarta dari Yogyakarta untuk memegang jabatannya yang baru sebagai Koordinator Jawatan-Jawatan Republik. (*KU134*)

* Wakil Presiden Mohammad Hatta menghadiri rapat umum Permusyawaratan Wanita Indonesia Seluruh Aceh di Taman Kesatria Kutaraja (sekarang Banda Aceh).

  Dalam wejangannya ia menyatakan bahwa menurut anggapannya konferensi ini penting artinya, justru pada saat kita menghadapi pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat. Ia kemukakan hasil-hasil yang telah dicapai dalam KMB, dan ia ingatkan pengorbanan yang telah diberikan oleh para wanita sebelumnya.

  Dikatakannya, di masa lalu perjuangan kita membutuhkan semangat dan keberanian, sedangkan di masa mendatang pembangunan negara kita membutuhkan kecerdasan otak dan ilmu pengetahuan. Dengan terbentuknya RIS nanti, kita harus mulai membangun kembali segala yang rusak selama ini. Dalam hal ini peranan kaum ibu sangat besar. (TS298)

* SOBSI mengeluarkan komunike hari Minggu yang menyatakan bahwa delegasinya ke konferensi WFTU di Peking pada waktu ini masih menantikan ijin dari penguasa Belanda untuk melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan. Komunike menyatakan bahwa sebelum memberikan persetujuannya, penguasa Belanda meminta konfirmasi tertulis dari Pemerintah Republik tentang validitas paspor yang mereka pegang, "walaupun para anggota delegasi ini sudah memiliki informasi yang cukup dan ijin perjalanan resmi, misalnya persetujuan perjalanan tertulis dari Gubernur

Militer Yogyakarta, sertifikat vaksinasi dari Kementerian Kesehatan, sertifikat sehat dari Rumah Sakit Pusat Yogyakarta, kartu pengenal yang cukup dan mandat dari kantor pusat SOBSI yang dikeluarkan oleh Kementerian Perburuhan dan Sosial Republik". (*Antara*)

* Perpustakaan "Kutubkhanah Iskandar Muda" dibuka resmi di Kutaraja dalam suatu upacara yang dihadiri oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta, Wakil Perdana Menteri Sjafruddin Prawiranegara, Gubernur Militer Tgk. Muhd. Daud Beureueh, Letkol Husin Jusuf, Residen T.T.Mohd. Daudsjah, Dr. Abu Hanifah, Tgk.H.A. Hasballah Indrapuri, pembesar sipil dan militer, pemuka masyarakat dan cerdik pandai.

H. Abu Bakar Atjeh yang besar andilnya dalam mendirikan perpustakaan tersebut menguraikan riwayat perpustakaan yang diprakarsai oleh Wakil Perdana Menteri dan ditunjang oleh alim ulama dan cerdik pandai Daerah Aceh tersebut. Ia katakan, dalam perpustakaan ini terhimpun banyak buku agama dan ilmu pengetahuan dalam bahasa Indonesia maupun asing, hingga merupakan semacam perpustakaan internasional.

Wakil Presiden menguraikan pentingnya perpustakaan bagi kecerdasan bangsa. Pendidikan dan pengetahuan sesuatu bangsa tidak sempurna, jika perpustakaannya tidak teratur. "Barangkali saudara-saudara sudah tahu bahwa di antara benda-benda yang saya cintai adalah buku. Saya bersedih karena beribu buku saya yang baru saja saya pindahkan dari Banda Neira telah dibakar oleh Belanda di Kaliurang.

Tetapi kita jangan berpatah hati karena peristiwa yang telah berlalu. Di masa datang kita akan berusaha terus melengkapi kembali perpustakaan kita.," demikian Wakil Presiden.

Wakil Perdana Menteri Sjafruddin a.l. mengatakan bahwa pembukaan perpustakaan di Kutaraja ini memberikan kesempatan luas kepada kita untuk belajar. Mudah-mudahan dengan ini masyarakat mendapat pikiran dan pengalaman baru dalam menempuh kemajuan di masa datang.

Penasihat Delegasi Indonesia dalam KMB Dr. Abu Hanifah mengatakan bahwa ia mengenal pemikir-pemikir Aceh terkenal di masa lalu seperti Abdur Rauf, Raniri, Hamzah Fansuri, yang oleh generasi sekarang jarang didengar. Ia mengharapkan agar jejak para ulama pengarang Aceh itu diikuti oleh para pemuda sekarang. Semoga dengan terbentuknya Republik

Indonesia Serikat nanti, Aceh yang di masa lalu disebut Serambi Mekkah, akan menjadi serambi ilmu pengetahuan. (TS298-299)

* Persatuan Pegawai Polisi (P3) Daerah Aceh menerbitkan majalah bulanan dengan nama “Suara Polisi”. Isinya ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, kepolisian, ketentaraan dan olah raga, ditambah karangan para pembesar dan pemimpin masyarakat. (TS299)

* Rapat raksasa menyambut kedatangan Wakil Presiden Mohammad Hatta berlangsung di Taman Sari, Kutaraja, dihadiri oleh penduduk kota dan kampung-kampung di Aceh Besar.

  Wakil Presiden a.l. mengatakan, banyak rakyat Indonesia gelisah menantikan hasil KMB, sebagian menduga KMB akan gagal.

  “Dari dahulu telah saya katakan, juga di tempat ini, bahwa KMB akan mencapai hasil, dan akan berhasil. Sebelum KMB telah diadakan Konferensi Inter Indonesia di Yogya dan Jakarta untuk mencapai kesepakatan antara Republik dan BFO. Dan ternyata kedua belah pihak sama pendiriannya, yaitu mencita-citakan kemerdekaan Indonesia.

  KMB kini telah berhasil dengan baik. Satu piagam penyerahan kedaulatan kepada bangsa Indonesia dengan disaksikan UNCI telah ditandatangani. Dalam piagam tersebut dinyatakan bahwa penyerahan kedaulatan kepada RIS itu penuh dan tidak bersyarat. Kita berdaulat atas tanah air kita, dan bisa menyusun sesuka-suka kita. Penyerahan kedaulatan itu akan dilakukan nanti sebelum tanggal 30 Desember 1949.”

  Wakil Presiden mengharapkan agar bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan. Mengenai Irian, kita masih harus menekan perasaan, karena Irian belum masuk dalam RIS, dan ditunda penyelesaiannya dalam satu tahun.

  “Di masa yang akan datang kita menghadapi perjuangan yang lebih berat. Sebagai bangsa yang berdaulat kita mempunyai tanggung jawab terhadap anak kita, untuk menjadikan negara Indonesia ini adil dan makmur.”

  Sebagai penutup Wakil Presiden menandaskan bahwa sebagai bangsa yang merdeka, kita harus berani menghadapi masa depan, dan kesulitan-kesulitannya harus dapat kita atasi dengan disiplin dan kerukunan. Tapi dengan membanting tulang kita akan dapat membangun keadilan dan kemakmuran yang kita cita-citakan. (TS299-301)

* Kolonel Laut Adam dari ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia) bertemu dengan Vice Admiral Kist dari Angkatan Laut Amerika Serikat.

  Dalam pertemuan itu mereka bertukar informasi tentang kedudukan angkatan laut masing-masing. (*KU134*)

* Ulang tahun pertama Negara Jawa Timur yang disponsori Belanda oleh Pemerintah Jawa Timur yang sedianya dirayakan secara besar-besaran, hanya dirayakan sejalan dengan nasihat Parlemen Jawa Timur. Walau demikian, perayaan itu merupakan kegagalan. Hanya sebagian kecil dari anak-anak sekolah yang harus ambil bagian dalam ubade di depan Gubernur hadir, dan kebanyakan mereka anak-anak Eropa dan Tionghoa. Resepsi resmi malam hari dihadiri kebanyakan oleh orang asing, sedangkan orang Indonesia agaknya tidak menunjukkan semangat untuk merayakan.

  Para anggota Parlemen menggunakan kesempatan itu dengan mengadakan pertemuan khusus, dan pidato-pidato diucapkan tentang peranan Jawa Timur dalam perjuangan kemerdekaan bagi seluruh Indonesia. Komisaris Belanda van der Plas menggunakan kesempatan itu untuk menyatakan bahwa kaum komunis bertanggungjawab atas kerusuhan-kerusuhan yang kini terjadi di sekitar Probolinggo dan Kraksaan. Ia katakan, teror dan intimidasi masih ada di Jawa Timur karena “pihak lain” dalam persengketaan sekarang ini mencoba mencapai tujuannya dengan menggunakan kekerasan. Tapi, demikian dikatakannya, Jawa Timur akan ambil bagian dalam membebaskan Indonesia dari teror. (*Antara*)

* Sultan dari Waringin, Kalimantan, yang pada waktu ini berada di Yogyakarta, hari ini berkunjung kepada Presiden Sukarno dan melakukan pembicaraan selama lebih dari satu jam dengan Presiden Sukarno.

  Sesudah kunjungan itu Sultan menyatakan kepada *Antara* ia telah datang di Yogyakarta untuk menyatakan kesetiaan kepada Presiden Sukarno. Ia katakan bahwa Belanda tidak memberikan kemudahan padanya dalam perjalanan ini.

  Selanjutnya ia katakan bahwa ia diturunkan dari tahta oleh Belanda pada 4 Desember 1949, tapi ia katakan bahwa wilayahnya praktis berada di tangan pasukan Angkatan Laut RI.

  Hari ini juga ia meneruskan perjalanan ke Solo. (*Antara*)

* Perdana Menteri Indonesia Timur Anak Agung Gde Agung diharapkan akan datang di Yogyakarta dan bertemu dengan Presiden Sukarno dalam beberapa hari ini. (*Antara*)

* Secara resmi dibantah di Den Haag bahwa dana yang dihibahkan kepada Indoesia lewat Mashall Plan seolah-olah telah digunakan untuk keperluan yang lain daripada untuk membeli produk-produk dari zona dollar. Bantahan itu dimaksud sebagai jawaban atas laporan pers bahwa para senator Amerika telah menyatakan ketidaksenangannya karena Marshall Plan telah digunakan oleh Pemerintah Belanda untuk melunasi utangnya. Dinyatakan secara resmi bahwa uang dollar dari Marshall Plan telah digunakan semata-mata untuk membeli beras dan bahan makanan lain, tekstil dan perlengkapan industri. (*Antara*)

1949 NOVEMBER 29.

* Persiapan besar-besaran sedang berlangsung menghadapi sidang pleno Parlemen Republik yang akan dimulai 5 Desember mendatang untuk membahas dan diharapkan meratifikasi Persetujuan Den Haag mengenai penyerahan kedaulatan kepada Indonesia akhir tahun ini.

  Bagian depan "Kraton" Sultan Yogyakarta yang disebut "Sitinggil" disiapkan bagi berlangsungnya sidang parlemen tersebut. 1.500 tempat duduk disiapkan untuk para anggota dan umum. Sementara itu ruang-ruang khusus disediakan untuk kantor penerangan, kantor pers, kantor pos, radio dan ruang makan. Untuk memberikan kesempatan kepada umum mengikuti jalannya sidang akan ditempatkan sejumlah pengeras suara di aloon-aloon depan istana. Sebuah panitia sudah dibentuk untuk melakukan pekerjaan persiapan bagi para anggota instansi pemerintah dan swasta.

  Di dalam Badan Pekerja KNIP telah dibentuk panita lain untuk menyusun prosedur dan peraturan sekitar hal-hal yang berhubungan dengan hasil-hasil perundingan di Den Haag baru-baru ini. Salah satu tindakannya adalah menyusun rancangan peraturan untuk dibicarakan, mengenai pengganti Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta apabila keduanya terpilih sebagai pejabat tertinggi pertama Pemerintah Republik Indonesia Serikat. Rancangan peraturan itu menyebutkan bahwa Ketua Parlemen Indonesia akan dituinjuk sebagai Pejabat Presiden.

Rancangan peraturan yang lain adalah mengenai prosedur pemilihan anggota Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat yang 50 kursinya telah dialokasikan untuk kaum Republiken.

Rancangan peraturan yang ketiga adalan mengenai penyerahan kekuasaan Republik kepada RIS sejalan dengan penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia. (*Antara*)

* Jam 07.15: Wakil Presiden Mohammad Hatta bersama rombongan meninggalkan Kutaraja (sekarang Banda Aceh). Rombongan terdiri dari: Wakil Perdana Menteri Sjafruddin Prawiranegra, Panglima Teritorium Sumatra Kolonel Hidajat, anggota KNIP Amelz dan Sutikno Padmosumarto, Wakil Jawatan Penerangan Sumatra Utara ke Konferensi Kementerian Penerangan di Yogyakarta T. Alibasjah Talsya, Abd. Mu'thi dan Moh. Hassan.

Di lapangan Polonia Medan rombongan disambut Wali Negara Sumatra Timur Dr.T. Mansur dan para pemimpin Republiken. Tiga puluh ribu orang menyambut kedatangan Wakil Presiden dan rombongan, berdesak-desakan ingin berkenalan dan berjabat tangan. Dr.T. Mansur memberikan kata pengantar, disusul dengan wejangan Wakil Presiden.

Dalam wejangannya Wakil Presiden menasihatkan agar hadirin selalu mengeratkan persatuan, karena perjuangan kita masih belum mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Wejangan ditutup dengan pekik "merdeka" tiga kali, diikuti oleh hadirin. (TS301-302)

* Dewan Perwakilan Sementara Jawa Tengah bentukan Belanda di Semarang pada 28 November telah menerima resolusi yang meminta pemerintah segera mengembalikan wilayah Jawa Tengah yang diduduki Belanda, dikenal sebagai daerah Recomba, kepada Republik Indonesia.

Resolusi diterima dengan pertimbangan bahwa daerah Recomba di Jawa Tengah secara etnologi, geografi, ekonomi, historis dan politik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Jawa. Rakyat di seluruh Jawa Tengah pun telah memperlihatkan keinginannya untuk disatukan kembali ke dalam yurisdiksi Republik Indonesia seperti dibuktikan oleh diterimanya baru-baru ini resolusi-resolusi oleh Dewan-dewan Perwakilan Banyumas,

Pekalongan, Semarang dan daerah-daerah lain di Jawa Tengah yang diduduki Belanda.

Panitia Persiapan beranggota sembilan orang yang diketuai oleh tokoh Republiken Purbonegoro telah ditunjuk untuk melaksanakan pengembalian wilayah-wilayah itu dan penyerahan wewenang kepada Republik. (*Antara*)

* Departemen Sosial Pemerintah Prafederal telah mengambil prakarsa menyelenggarakan diskusi tiga pihak di antara wakil-wakil Departemen, Manajemen, dan Buruh.

Diskusi akan diadakan di Bandung pada 30 November dan akan mencakup masalah upah, jam kerja dan persyaratan kerja. (*Antara*)

* Djaswadi, Wakil Ketua Fraksi Nasional yang menyatakan menguasai 39 dari 70 kursi Parlemen Jawa Timur yang disponsori Belanda menyatakan kepada *Antara* hari ini bahwa satu-satunya cara untuk menegakkan hukum dan ketertiban di Jawa Timur adalah dengan segera menyerahkan tanggung jawab hukum dan ketertiban di seluruh Jawa Timur kepada pasukan TNI. Ia katakan, diperlukan penerangan yang luas kepada rakyat.

Tapi ia tambahkan, rakyat Jawa Timur hanya mendengarkan kata-kata para pemimpin Yogya, dan penerangan hanya akan ada nilainya jika diberikan oleh Kementerian Penerangan Republik. Ia nyatakan bahwa Fraksinya akan mencoba meyakinkan anggota-anggota Parlemen yang lain tentang perlunya menyerahkan tanggung jawab hukum dan ketertiban kepada TNI. Sementara itu ia katakan bahwa Parlemen sedang mempertimbangkan untuk menekan Pemerintah agar secara resmi meminta bantuan Republik untuk memberikan penerangan kepada rakyat mengenai situasi politik dewasa ini. (*Antara*)

* Gubernur Militer Jawa Timur Republik, Kolonel Sungkono, telah datang di Surabaya atas undangan Komandan Belanda Scheffelaar yang merayakan pengangkatannya sebagai Jenderal Mayor. Dikabarkan, malam ini Sungkono telah melakukan pembicaraan dengan penguasa militer Belanda, juga dengan para pemilik perusahaan minyak Cepu.

Kolonel Sungkono direncanakan akan melakukan pertemuan dengan

penguasa militer Belanda besok untuk membicarakan pengembalian wilayah-wilayah Republik di Jawa Timur yang diduduki Belanda sesudah penandatangan Persetujuan Renville. Penyerahan diperkirakan akan dilakukan paling lambat tanggal 20 Desember. (*Antara*)

* Anggota Parlemen Negara Pasundan, Sujoso, tiba di Yogyakarta untuk berunding dengan para pejabat Republik Indonesia tentang:

1. Soal-soal keamanan di Negara Pasundan;
2. Keadaan tawanan yang baru kembali di Negara Pasundan dan berada dalam keadaan belum terurus. (*KU134*)

* Dr. Makmun Sumadipradja, Menteri Dalam Negeri Pasundan, menyatakan kepada *Antara* hari ini bahwa keamanan dalam negeri bukan hanya tanggung jawab negara-negara anggota RIS, karena itu masalah ini akan dibicarakan oleh Subkomite Keamanan dan Militer Panitia Persiapan Nasional, badan yang mengatur pembentukan administrasi persiapan penyerahan kedaulatan.

Ia katakan bahwa pembicaraan mengenai keamanan yang dijadwalkan diadakan di Yogyakarta itu barangkali akan diselenggarakan di Jakarta, karena para pemimpin Republik pada waktu ini sedang berada di kota tersebut.

Mengenai status Pasundan, Menteri mengatakan bahwa pada saat ini eksis atau tidak eksisnya Pasundan sebagai negara tidak menjadi masalah. Ia katakan bahwa masalah yang paling vital sekarang adalah mempersatukan berbagai kelompok untuk melaksanakan tanggung jawab yang harus dipikul, dan memperlihatkan kepada dunia bahwa orang Indonesia suka melakukan hal itu. (*Antara*)

* Sidang Parlemen Pasundan untuk membicarakan ratifikasi Persetujuan Den Haag yang dijadwalkan akan diadakan tanggal 2 Desember terpaksa diundur menjadi 6 Desember karena Parlemen hanya memiliki teks Belanda dan Inggris dari Persetujuan Den Haag, sedangkan teks Indonesia belum diterima.

Sementara itu Kabinet Pasundan dalam sidang terakhirnya telah menerima persetujuan tersebut. (*Antara*)

* T. Alibasjah Talsya, Abd. Mu'thi dan Moh. Hassan mewakili Jawatan Penerangan Sumatra Utara dalam Konferensi Kementerian Penerangan RI pertama di Yogykarta.

Dalam perjalanan dari Jakarta ke Yogyakarta mereka mendapat pengawalan ketat dari Polisi Militer (MP) Belanda.

Dengan bantuan Teuku Hadi Thajeb dari Kantor Perwakilan Republik di Jakarta, segala kesulitan dapat diatasi. Menjelang keberangkatan ke Yogyakarta mereka menginap di kantor tersebut di Jalan Merdeka Selatan. (TS302)

* Surat kabar *Suara Forni* di Balikpapan melaporkan tentang terjadinya gangguan keamanan di Balikpapan beberapa hari ini.

Dilaporkan bahwa pada malam tanggal 27 November sebuah granat telah dilemparkan ke markas polisi di kota itu. Malam sebelumnya seorang detektif telah terkena ledakan granat.

Suara Forni tidak melaporkan akibat insiden-insiden tersebut, tapi menyebutkan bahwa penduduk merasa tidak tenang. (*Antara*)

* Kantor Indonesia Timur di Jakarta mengungkapkan bahwa Parlemen Indonesia Timur kemarin telah menerima hasil-hasil Konferensi Den Haag dan Rancangan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat. (*Antara*)

* Diberitakan dari Makassar bahwa Parlemen Indonesia Timur dengan suara 50 lawan 1 telah menyetujui hasil-hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag dan Undang-undang Dasar Sementara Indonesia. Ini adalah negara Indonesia kedua yang telah mengambil keputusan demikian; yang pertama adalah Negara Sumatra Selatan. Indonesia Timur yang berpenduduk 12.000.000 adalah salah satu dari negara-negara pokok Federasi Indonesia.

Parlemen Republik Indonesia akan bersidang di Yogyakarta tanggal 5 Desember mendatang untuk membicarakan penerimaan atas hasil-hasil Konferensi Den Haag tersebut. (*Antara*)

* Wakil Perdana Menteri Belanda Dr.D.R.H. Schaik dan Menteri Luar Negeri Dr.D.U. Stikker singgah di Kalkutta pagi ini dalam perjalanan ke Jakarta di mana mereka akan membicarakan masalah-masalah yang berhubungan dengan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia. (*Antara*)

1949 NOVEMBER 30.

* Di Yogyakarta diselenggarakan Konferensi Kementerian Penerangan yang diikuti oleh wakil-wakil jawatan penerangan di seluruh daerah Republik Indonesia (RI) serta para peninjau dari jawatan penerangan di negara-negara bagian yang tergabung dalam Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), juga dari RVD (Regeerings Voorlichtings Dienst dan pers umumnya.

  Dalam kesempatan itu Menteri Penerangan Mr. Samsudin menguraikan tentang politik penerangan, dan ketua penyelenggara membentangkan arti dan maksud konferensi penerangan itu. (*KU134; LU t.h.*)

* Mr. Mohammad Yamin, anggota delegasi Republik ke Konferensi Meja Bundar baru-baru ini menyatakan kepada *Antara* bahwa hasil Konferensi Den Haag itu “hampir memuaskan”. Pertama, karena kekuatan tak tergoyahkan dari delegasi Hatta benar-benar telah melakukan tugasnya dengan baik. Kedua, karena delegasi Belanda lambat-laun menyadari kuatnya gerakan nasional di Indonesia yang terbukti berani mempertahankan kemerdekaan penuh dengan cara yang bijaksana, di samping dengan perang gerilya. Ketiga, karena seluruh dunia menyaksikan bahwa delegasi Hatta dan delegasi kaum federalis telah didukung oleh Kesatuan Indonesia di tangan Ir. Sukarno. Yamin menegaskan, ketiga faktor inilah penyebab lancarnya jalan konferensi.

  Mengenai New Guinea, Yamin mengatakan bahwa kedua delegasi Indonesia telah gagal memisahkan Belanda dari Inggris dan Amerika Serikat, namun berhasil menyingkirkan semua maksud dan rencana kelompok itu untuk menggagalkan konferensi. Yamin mengatakan, kaum Republiken yakin akan keberhasilannya untuk pada akhirnya menyatukan pulau itu dengan RIS. Ia tambahkan bahwa kedua delegasi Indonesia teguh pada pendiriannya bahwa secara ekonomis, teritorial, strategis dan nasional, New Guinea merupakan bagian dari Indonesia.

Mengenai bagian ekonomi dan keuangan Persetujuan Den Haag, Yamin menyampaikan adanya tiga hal pokok. Pertama, semua perkebunan di Indonesia yang beroperasi sebelum Perang Dunia II akan diberi kesempatan meneruskan kegiatannya. Kedua, perusahaan-perusahaan swasta yang harus dikuasai oleh negara Indonesia akan diberi ganti rugi. Ketiga, tanah perusahaan-perusahaan akan dijamin penggunaannya karena berdasarkan undang-undang Republik tahun 1948 apa yang dinamakan "hak konversi" di keresidenan Surakarta dan Yogyakarta sudah dicabut. (*Antara*)

* Kemungkinan untuk merealisasikan "Ekonomi Nasional" sesuai dengan jiwa konstitusi Republik sudah terkandung dalam Persetujuan Den Haag, demikian dinyatakan oleh Sujono Hadinoto, Ketua PNI, hari ini. Untuk mencegah apa yang dinamakan "penghisapan" seperti biasa dilakukan untuk perusahaan-perusahaan asing, Ketua PNI mengusulkan agar RIS dengan undang-undang melarang apa yang dinamakan investor *agreement policy*. Ia tambahkan bahwa serikat-serikat buruh dan gerakan tani bisa mencegah hal itu. Namun Sujono Hadinoto belum dapat mengungkapkan berapa banyak investasi asing akan diijinkan beroperasi di RIS, juga belum bisa membayangkan cara-cara pembagian keuntungannya. (*Antara*)

* Komite Tahanan Politik di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Madura dikabarkan sedang bekerja keras untuk memecahkan masalah pembebasan tahanan politik. Di Jawa Tengah tanggal yang direncanakan untuk pembebasan sepenuhnya para tahanan adalah tanggal 16 Desember atau sebelum itu. Sumber-sumber yang mengetahui mengatakan bahwa tahanan Republik di penjara-penajara Belanda sukar ditetapkan jumlahnya, karena buruknya sistem administrasi Belanda.

  Di Jawa Timur, semua tahanan politik diharapkan akan dibebaskan pada 12 Desember atau sebelum itu. Organisasi-organisasi Republik yang bertujuan mengembalikan para tahanan ke kehidupan masyarakat bekerja keras walau agak sulit karena kurangnya dana. Dikabarkan bahwa Republik sudah membebaskan 56 tahanan Belanda, yaitu seluruh tahanan yang ada di tangan Republik di Jawa Timur.

  Ke-8 sisa tahanan dari 356 tahanan di Madura sedang menanti pembebasannya. Komite Tahanan Politik sampai sekarang belum dapat mengetahui jumlah tepat orang Republik yang berada dalam tahanan Belanda

di pulau itu, karena sejumlah besar tahanan yang ditangkap di laut tidak dapat dipastikan jumlahnya.

Menurut sumber tersebut, penguasa Belanda merahasiakan jumlah pasti tahanan yang ada dalam tangannya.

Tabrani, Sekretaris Jenderal Komite Tahanan Politik Republik diharapkan akan berkunjung ke Makassar dan Irian untuk memeriksa para tahanan di sana. Di Sumatra jumlah tahanan tidak sebanyak di Jawa. (*Antara*)

* Parlemen Jawa Timur secara bulat hari ini menerima mosi yang diajukan oleh Djaswadi, wakil ketua Fraksi Nasional untuk menekan Pemerintah Jawa Timur agar segera mulai menyerahkan tanggung jawab menjaga hukum dan ketertiban di seluruh Jawa Timur kepada TNI. Mosi ini juga mengajak tokoh-tokoh Republiken yang mampu untuk memperbaiki situasi negara dengan memberikan informasi mengenai perkembangan politik dewasa ini kepada penduduk.

  Mosi itu diajukan berdasar keyakinan bahwa tanggung jawab menjaga hukum dan ketertiban serta penerangan harus diserahkan kepada badan-badan dan perorangan yang dipercayai rakyat (TNI dan para pejabat Kementerian Penerangan Republik). (*Antara*)

* Parlemen Negara Indonesia Timur (NIT) menerima baik Persetujuan KMB (Konferensi Meja Bundar) dengan suara 50 setuju, 1 tidak setuju, dan 5 blanko. (*LUxxii*)

* Menteri Luar Negeri Belanda D.U. Stikker dan Wakil Perdana Menteri J.R.H. van Schaik telah tiba hari Selasa sore di Jakarta dari Negeri Belanda. Kepada pers Stikker menyatakan bahwa kunjungan rekannya ke sini adalah untuk membicarakan sekitar penyerahan kedaulatan mendatang. Ia menyatakan bahwa Parlemen Belanda akan bersidang minggu depan untuk membicarakan penerimaan atas Persetujuan Den Haag. Kedua menteri akan berkunjung ke Yogyakarta dan akan bertemu dengan Panitia Persiapan Nasional. (*Antara*)

* Wakil Perdana Menteri Th.S.G.J.M. van Schaik dan Menteri Luar Negeri D.U. Stikker dari Belanda berkunjung pada Presiden Sukarno. (*LUxxii*)

* Sekitar 50 orang alim ulama, kepala jawatan, ahli ilmu pengetahuan dan hartawan berkumpul di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) untuk membicarakan kemungkinan mendirikan Sekolah Tinggi Islam di Daerah Aceh.

  Tgk. Muhd. Daud Beureueh, H. Abu Bakar Atjeh dan Prof. Sulaiman dengan panjang lebar membeberkan uraian masing-masing mengenai pentingnya sekolah tersebut.

  Sebagai kesimpulan diputuskan untuk mendirikan sekolah itu, dan dibentuk panitia persiapan terdiri dari T.M. Amin, H.M. Ali, T.P.P. Mohd. Ali, Abdullah Arif, Najan, Jahya Siregar dan Mochtar, dengan penasihat Tgk.Muhd. Daud Beureueh dan Tgk. Abdul Wahab. (TS302-303)

* Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo Tgk.Muhd. Daud Beureueh tiba di Yogyakarta untuk bertemu dengan Pemerintah Pusat. Ia didampingi oleh Tgk. Abdul Wahab Seulimeum, Tgk. Hasan Aly, A.Gani Usman, dan Sekretaris Gubernur Militer, Ibnu Saadan. (TS303)

***

(Akhir November 1949)

DESEMBER 1949

1949 DESEMBER.

* Mayor Kemal Idris, Komandan Batalion Kala Hitam, Divisi Siliwangi, yang berkedudukan di sekitar kota Cianjur, ditugaskan untuk mengirimkan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang pertama ke kota Jakarta untuk diperbantukan kepada Letnan Kolonel R. Taswin Natadiningrat yang telah mendapat tugas dari Divisi Siliwangi untuk menjadi Komandan Komando Basis Jakarta. (SDA109)

1949 DESEMBER 1.

* Presiden Sukarno dan Sultan Hamengkubuwono IX melakukan pembicaraan dengan dua orang menteri Belanda: J.R.H. van Schaik dan D.U. Stikker. (*KU134*)

* Rancangan undang-undang tentang peninjauan kembali susunan KNIP yang telah disetujui kini menunggu penandatanganan Presiden Sukarno untuk menjadi undang-undang. Menurut RUU tersebut keanggotaan Badan Pekerja akan ditambah dengan satu orang, dan KNIP ditambah dengan 12 orang.

  Menteri Kehakiman Susanto Tirtoprodjo diharapkan hadir ikut menandatangani RUU tersebut.

Peninjauan kembali tersebut dilakukan sehubungan dengan perdebatan mendatang sekitar penerimaan Persetujuan Den Haag. Banyak kalangan beranggapan bahwa Parlemen Republik tidak cukup representatif menyuarakan kehendak rakyat sehubungan dengan ratifikasi Persetujuan Den Haag. (*Antara*)

* Mr. Sartono, Subardjo, Abidin, Tedjasukmana dan Sadjarwo diutus oleh Badan Pekerja KNIP untuk meninjau sidang-sidang Panitia Persiapan Nasional yang akan diselenggarakan di Jakarta.

  Mereka akan meninjau sidang-sidang itu dalam kapasitas sebagai utusan Seksi Politik Panitia Badan Pekerja KNIP dan berhak memberikan nasihat kepada anggota Panitia Persiapan Nasional dari pihak Republik. (*Antara*)

* Fraksi buruh dalam Badan Pekerja KNIP menyampaikan surat kepada Pemerintah berisi permohonan agar gaji pegawai negeri Republik dibayarkan "sebelum berlangsungnya penyerahan kedaulatan kepada Indonesia".

  Fraksi itu mengingatkan bahwa sejak Belanda memulai aksi militer kedua terhadap Republik, gaji pegawai negeri belum dibayarkan. Fraksi memintakan juga pembayaran untuk mereka yang tidak aktif selama pendudukan Belanda. (*Antara*)

* Prof. Dr. Supomo telah ditunjuk sebagai anggota Fakultas Hukum Universitas RIS. (*Antara*)

* Parkindo (Partai Kristen Indonesia) sesudah menyelenggarakan konferensi dewan pusat dan dewan-dewan daerah partai selama dua hari pada 29 dan 30 November, telah menerima persetujuan yang dicapai baru-baru ini di Den Haag. Keputusan ini diambil sesudah pertemuan mendengarkan laporan Dr. J. Leimena, anggota pengurus besar partai itu, mengenai Konferensi di Den Haag tersebut. (*Antara*)

* Hubungan kereta api Yogyakarta-Semarang secara resmi dibuka hari ini, didahului dengan perjalanan percobaan dari Yogyakarta ke Muntilan oleh serombongan pejabat Jawatan Kereta Api dan pejabat-pejabat lain, a.l. Gubernur Militer, wakil Bupati Sleman, dan para perwira Polisi Militer.

Perjalanan percobaan dimulai jam 09.35 dan sampai Muntilan pada jam 10.51. Sesudah beristirahat sebentar, rombongan kembali ke Yogyakarta. (*Antara*)

* Diperoleh kabar bahwa Susuhunan Solo (Pakubuwono XII) akan meneruskan pendidikannya di luar negeri, kemungkinan besar di London, tahun depan. Belum diketahui, bidang apa yang akan dipelajarinya. (*Antara*)

* 260 tawanan perang Indonesia dibebaskan oleh Belanda hari ini di Surabaya, termasuk di dalamnya 13 perwira, a.l. Letkol Chandra Hasan dari Madura, Letkol Sumanteri, Komandan Territorial Madiun, Mayor Abu Djamal, Komandan Jokotolo, Mayor Peramu Rahardjo, bekas ajudan Presiden Sukarno, dan Mayor Hafiludin yang terkait dengan peristiwa Chandra Hasan.

  Dua ratus dua puluh tujuh [227] orang dibawa ke Jombang untuk diserahkan kepada Komandan Teritorial Surabaya, Letkol Kretarto, sedang 13 perwira dibawa ke Nganjuk untuk diserahkan kepada Gubernur Militer Sungkono. (*Antara*)

* Studio *ROIO* (*Radio Omroep Indonesia in Overgangstijd*) Solo diserahkan kepada *RRI*. (*PEH92*)

* Mr. Suwarso, Jaksa Agung Pasundan, menyatakan kepada *Antara* bahwa Persetujuan Den Haag kemungkinan akan mengurangi tindakan agresif dan mengalihkannya ke bidang politik.

  Ia mengingatkan bahwa sebelum dicapainya persetujuan tersebut, banyak desas-desus beredar bahwa rakyat akan "beraksi" apabila perundingan Den Haag gagal. Jaksa Agung berpendapat bahwa penyerahan kedaulatan kepada Indonesia harus dilakukan selekas mungkin agar situasi tegang berubah menjadi situasi tenang. (*Antara*)

* Delegasi Republik dalam *Local Joint Commission* di Medan melaporkan bahwa 217 tawanan perang Indonesia telah dibebaskan oleh Belanda dari "*Uniekampong Camp*" di Belawan. Para tawanan itu berasal dari berbagai tempat di Sumatra Timur. (*Antara*)

* Delapan belas asosiasi dan organisasi telah mengajukan petisi kepada Dewan Daerah di Balikpapan agar misi militer Republik dari Kalimantan Selatan datang ke daerah itu untuk mengembalikan ketenteraman. Dikatakan, bahwa penduduk tercekam kegelisahan dan ketakutan karena kejadian-kejadian belakangan ini. Kecuali kalau perasaan itu dihilangkan, orang-orang yang selama ini bersedia menyiapkan perayaan bagi penyerahan kedaulatan akan mengundurkan diri. (*Antara*)

* The Maritime Unions di Australia hari ini mencabut larangan melayani kapal-kapal Belanda yang untuk pertama kali dikenakan lima tahun yang lalu ketika terjadi pertempuran antara orang Belanda dan orang Indonesia.

Kapal Belanda "Tjipanas" 6343 ton yang diharapkan berangkat akhir bulan ini akan menjadi kapal pertama yang akan mengangkut muatan dari Australia ke Indonesia sesudah pencabutan larangan tersebut. Enam kapal lain kemudian akan menjalani pelayaran dari Australia ke Indonesia.

Larangan itu pernah dicabut delapan bulan yang lalu, namun dikenakan kembali sesudah berlangsungnya "aksi kepolisian" di Jawa.

Diperkirakan bahwa larangan ini telah mengakibatkan kerugian perdagangan senilai empat puluh juta pound (sterling Australia). (*Antara*)

* Mr.J.P. Snel, ketua INP (Asosiasi Indo-Belanda), dalam wawancara pers di Jakarta kemarin mengabaikan propaganda Belanda terhadap kelompoknya untuk beremigrasi ke Irian dan menjadikan pulau itu sebagai tempat kediamannya. Ia menyebutkan dua bahaya jika Irian tetap berada di tangan Belanda. Pertama, kelompok ini tidak pernah bercocok tanam dan mereka akan mengalami kesulitan mencari makan di pulau itu. Kedua, kalau terjadi perang lagi di Pasifik, secara strategis pulau ini bisa dipertahankan hanya oleh para kolonis sendiri. (*Antara*)

1949 DESEMBER 2.

* Presiden Sukarno dan Menteri Pertahanan Republik Hamengku Buwono melakukan pembicaraan hari Kamis lalu dengan Menteri Belanda Van Schaik dan Stikker yang sedang berkunjung untuk bertukar pendapat mengenai penyerahan kedaulatan mendatang dan kerja sama di masa

depan antara bangsa-bangsa di Indonesia, yang “merupakan prasyarat penting bagi perkembangan negara yang baru lahir”.

Komunike yang dikeluarkan oleh Delegasi Indonesia tadi malam mengatakan: “Dapat dikatakan bahwa suasana saling pengertian dan kerja sama yang terjalin dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag dapat disaksikan juga di Indonesia.” Hal itu menandai kunjungan kedua Menteri Belanda sebagai “sumbangan lebih lanjut ke arah itu”.

Komunike menyatakan bahwa telah berlangsung pertukaran pendapat intensif mengenai penyerahan kedaulatan mendatang, juga mengenai cara kerja sama di masa depan antara semua bangsa yang ada di Indonesia, yang merupakan prasyarat penting bagi perkembangan negara yang baru lahir. Tidak lama lagi Presiden Sukarno akan melakukan pembicaraan radio mengenai kerja sama ini. (*Antara*)

* BP KNIP akan melakukan sidang pleno hari Sabtu petang untuk membicarakan syarat-syarat bagi pencalonan pengganti presiden, wakil presiden, dan wakil ketua KNIP.

Pemilihan wakil ketua KNIP yang sampai saat ini lowong dianggap perlu untuk menghadapi kemungkinan ketua KNIP menerima jabatan Pejabat Presiden Republik. BP KNIP telah memilih dua wakil ketua. (*Antara*)

* Konferensi Inter Indonesia dimulai.

Pokok pendapat yang dikemukakan antara lain, kemerdekaan politik harus disertai kemerdekaan ekonomi. Dalam Konferensi itu ikut memberikan sambutan Wakil Presiden Mohammad Hatta. (*LUxxii; LU t.h.*)

* Suwirjo, bekas Wali Kota Jakarta, telah diangkat menjadi koordinator Kantor Perwakilan Republik di Jakarta. Suwirjo membantah laporan yang mengatakan bahwa ia datang ke kota ini sebagai Komisaris Tinggi Republik. Tugasnya sebagai koordinator sama sekali terpisah dari hal-hal yang ada di tangan Delegasi Republik.

Karena banyak masalah timbul di luar yurisdiksi Delegasi Republik, maka Pemerintah merasa perlu membentuk kantor khusus untuk menangani hal-hal yang menyangkut pegawai negeri dan penerangan yang perlu mengenai kebijakan Pemerintah. (*Antara*)

* Sebuah komisi perbatasan untuk Sumatra Selatan telah dibentuk di Jakarta, terdiri dari Dr. Isa (Gubernur Sumatra Selatan). Letnan Kolonel Simbolon, Komisaris Tinggi Mursodo (dari Kepolisian Republik), dan Dr. Slamat, bekas Residen Republik di Sumatra Selatan.

  Tugas komisi perbatasan adalah mengumpulkan bahan dan informasi untuk dipakai menetapkan garis perbatasan yang memisahkan wilayah Republik dari wilayah Negara Sumatra Selatan sehubungan dengan resolusi Konferensi Inter-Indonesia dan persetujuan yang telah tercapai baru-baru ini di Den Haag.

  Para anggota komisi dalam waktu dekat akan berangkat ke Sumatra Selatan untuk tinggal di sana selama kurang lebih dua minggu. (*Antara*)

* Dengan Surat Penetapan No. 21 tahun 1949 Residen Republik Indonesia mengangkat A. Hasjmy sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) menggantikan Mr.S.M. Amin.

  Keanggotaan Mr.S.M. Amin dalam KNIP gugur karena pengangkatannya menjadi Gubernur Sumatra Utara. (TS306)

* Sebuah komite kontak Belanda terdiri atas 8 orang telah dibentuk oleh Pemerintah Federal Sementara di bawah ketua Mr.H.L. 's Jacob. Belanda mengumumkan bahwa pembentukan komite ini akan membantu memudahkan penyerahan pemerintahan kepada Pemerintah RIS yang akan datang. Komite akan melakukan kontak akrab dengan komite pusat dari Panitia Persiapan Nasional yang tugas utamanya adalah menyediakan persyaratan bagi lancarnya penyerahan pemerintahan. (*Antara*)

* Sumber Belanda melaporkan bahwa sebuah pesawat Catalina milik Royal Dutch Shell Oil Company telah mendarat darurat di Teluk Muntok (Pulau Bangka) hari Jumat. Mereka mengatakan, belum rincian beritanya, tetapi dikhawatirkan telah jatuh beberapa korban. (*Antara*)

1949 DESEMBER 3.

* Perdana Menteri Republik Mohammad Hatta telah kembali dari kunjungannya ke Sumatra selama seminggu kemarin petang. Bersamanya telah kembali juga Dr.A.K. Gani, Sjafruddin Prawiranegara, Kolonel Hidayat, dan Dr. Isa.

Berbicara tentang kesannya selama perjalanan, Hatta mengatakan: "Saya bisa melihat di mana-mana semangat rakyat dan situasi yang baik dan gembira."

Hatta yakin bahwa kerja sama yang tertib kini dapat diwujudkan antara kelompok Republiken dan kelompok federalis di Sumatra, "asalkan semua orang sadar akan tugasnya".

Para anggota rombongan Hatta menyatakan bahwa kunjungan Perdana Menteri ke Sibolga (Tapanuli) tidak hanya berhasil menyaksikan hasrat rakyat untuk melihat kembali para pemimpinnya, tetapi juga membantu melancarkan pekerjaan yang harus dilakukan di sana. Mereka ungkapkan bahwa Dr. Tobing, Residen Tapanuli, telah menyatakan, kedatangan Hatta di sana betul-betul telah menghidupkan kembali rasa merdeka pada rakyat yang selama beberapa waktu tertindas sebagai akibat permusuhan antara Republik dan Belanda.

Mereka katakan, fakta lain yang telah menggerakkan emosi rakyat ialah bahwa bendera nasional (Merah-Putih) telah diijinkan untuk dikibarkan kembali di daerah-daerah yang diduduki Belanda di Sumatra Barat.

Mereka katakan juga, kunjungan Hatta ke Pulau Nias di sebelah barat Sumatra terpaksa ditunda sampai perjalanan berikutnya. (*Antara*)

* Perdana Menteri Mohammad Hatta berunding dengan J.R.H. van Schaik dan D.U. Stikker di Istana Rijswijk tentang rencana penyerahan kedaulatan dari pihak Belanda kepada pihak Indonesia. (*KU134; Antara*)

* Dalam sebuah wawancara khusus, Perdana Menteri Dr. Mohammad Hatta mengungkapkan pendapat pribadinya, "Sebagaimana layaknya, kabinet pertama RIS harus berwatak nasional, namun intinya harus merupakan kabinet orang-orang mampu, tanpa mengabaikan keinginan partai-partai politik yang ada, sebab sebuah pemerintah tanpa dukungan partai politik tidaklah efektif, terutama mengingat adanya ketentuan bahwa pemerintah pertama RIS itu tidak dapat dibubarkan oleh Parlemen dalam setahun." Hatta menjelaskan bahwa orang-orang mampu yang akan duduk dalam kabinet itu akan dipilih dari tengah partai-partai politik.

Ditanya tentang apa tindakan penting dalam keamanan yang menurutnya perlu diambil sebelum dan sesudah penyerahan kedaulatan, Perdana

Menteri mengatakan bahwa untuk maksud ini TNI dan angkatan kepolisian harus dilengkapi dengan persenjataan sebaik mungkin. Namun Hatta menambahkan bahwa "kapasitas yang mencukupi dari kedua angkatan ini tidak perlu diragukan".

Di bidang ekonomi ia menyarankan agar orang Indonesia mengambil prakarsa dan mewujudkan prakarsa tersebut sampai menjadi organisasi ekonomi nasional dalam waktu sesingkat mungkin sesuai dengan situasi baru. Syaratnya yang pertama menurut Hatta ialah bersatunya semua pengusaha Indonesia. Ia tambahkan, "kalau persatuan ini tak dapat diwujudkan, dan organisasi mereka tidak cukup kuat, akan kalah mereka berhadapan dengan orang asing. Dalam usaha ini rakyat kita harus mencontoh pengusaha asing, tetapi organisasi ini sama sekali tidak boleh lalai terhadap kepentingan dan kesejahteraan rakyat umumnya." (*Antara*)

* Komite Kontak Pemerintah Federal Sementara yang baru-baru ini dibentuk telah mengadakan pertemuan pertama dengan Komite Pusat Panitia Persiapan Nasional Kamis lalu di bawah ketua Dr. Mohammad Rum.

Pertemuan itu dihadiri oleh UNCI. Ketua Komite Kontak, Mr. Jacobs, mengisyaratkan dalam pertemuan itu maksud untuk membagi diri dalam tiga kelompok kerja sejalan dengan pembagian Komite Pusat Panitia Persiapan Nasional: pertama, untuk prosedur, kedua untuk militer dan keamanan, dan ketiga untuk penyerahan pemerintahan.

Mr. Rum menyatakan kepada peserta pertemuan, bahwa Panitia Persiapan Nasional telah membentuk subkomite penerangan yang akan melakukan kegiatan di bawah pengawasan langsung Komite Pusat.

Selanjutnya disetujui bahwa ketua berbagai komite dari Panitia Persiapan Nasional dan kelompok-kelompok kerja yang akan disahkan oleh Komite Kontak Pemerintah Federal Sementara itu akan melakukan kontak satu dengan yang lain. Akan diusahakan agar pada hari Jumat kelompok-kelompok kerja sudah dapat saling bertemu.

Ketua mingguan UNCI, Mr. Daw, menyatakan kepuasannya mengenai pembentukan Panitia Persiapan Nasional dan Komite Kontak, dan menyatakan bahwa UNCI siap memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan. (*Antara*)

* Panitia Persiapan Nasional dalam sidang plenonya hari Kamis pagi telah membentuk tiga panitia:

  1. panitia prosedur,
  2. panitia urusan militer dan keamanan, dan
  3. panitia penyerahan pemerintahan. Sidang dengan suara bulat memilih Sultan Hamengku Buwono, Menteri Pertahanan Republik, sebagai "pihak yang akan bertanggungjawab kepada Panitia Persiapan Nasional untuk urusan keamanan".

  Sidang berpendapat bahwa orang yang akan dipercaya mengemban tanggung jawab itu haruslah yang memiliki kecakapan yang diperlukan untuk melaksanakan kewajibannya dan dapat diterima oleh segala lapisan penduduk Indonesia.

  Menurut komunike yang dikeluarkan, Kolonel Simatupang telah melaporkan tentang langkah yang telah dan akan diambil di bidang keamanan.

  "Karena sidang berpendapat bahwa masalah keamanan merupakan masalah yang paling urgen sekarang, maka sidang menunjuk Kolonel Simatupang sebagai anggota Panitia Persiapan Nasional," demikian bunyi komunike itu. (*Antara*)

* Sebuah komunike resmi Belanda menyatakan hari ini bahwa sehari sesudah diakhirinya dengan baik Konferensi Meja Bundar, Wakil Tinggi Mahkota dengan konsultasi Pemerintah Federal Sementara Indonesia telah memutuskan untuk memberikan amnesti kepada semua mereka yang terlibat dalam pelanggaran hukum yang dengan jelas bersumber pada konflik politik antara Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia. Putusan ini, menurut komunike tersebut, akan mulai berlaku pada tanggal 4 November mendatang. (*Antara*)

* Menurut sebuah sumber Katolik, Monsinyur Soegijopranoto, Apostolis Vicaris Indonesia, termasuk dalam tokoh-tokoh penting Katolik yang ikut berbicara kepada Kongres Katolik Indonesia yang akan diselenggarakan di Yogyakarta dari 7 hingga 12 Desember 1949. Pembicara lain yang diharapkan akan berbicara kepada Kongres, menurut sumber itu, adalah Menteri Perekonomian Republik Kasimo, anggota Palemen Indonesia Timur Tong Tsjin Leng, anggota KNIP Nitimihardjo, Drs. Tan Swan Bing dari Kian

Gwan Concern yang perkasa, dan beberapa tokoh Katolik Indonesia dan Belanda yang terkemuka. (*Antara*)

* Kalangan politik dan perdagangan di Jakarta tidak terlalu antusias dengan hasil-hasil yang dicapai Delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, yang berakhir kemarin.

Kalangan politik mengatakan, walau hasil-hasil yang dicapai Delegasi Indonesia jauh di bawah harapan umum, diperolehnya kedaulatan itu berarti bahwa aspirasi orang Indonesia untuk hidup dengan status yang sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia hampir terwujud.

Republik baru yang berdaulat itu akan memberikan kepada orang Indonesia status baru, kemungkinan baru, dan akan memberikan kepada mereka kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar bagi tercapainya semua aspirasi mereka, demikian kalangan tersebut.

Kalangan perdagangan Indonesia menyatakan puas bahwa dengan berakhirnya Konferensi Meja Bundar akan berakhir juga keadaan tak aman yang merintangi kemajuan perdagangan Indonesia. Mereka berharap bahwa pajak-pajak yang terlalu tinggi akan dihapuskan oleh Republik Indonesia Serikat yang akan dibentuk, dan para pedagang Indonesia akan mendapat dorongan dan dukungan dalam menjalin hubungan perdagangan dengan pedagang-pedagang asing.

Namun mereka katakan bahwa menurut pendapat mereka, pasal yang berkenaan dengan "hubungan perdagangan dengan negeri-negeri asing" itu agaknya terlalu mengikat, hingga Republik Indonesia Serikat (RIS) yang akan dibentuk itu tidak akan bebas berdagang dengan negeri-negeri asing, dan ini dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap perdagangan Indonesia umumnya. Pasal itu menyatakan bahwa berhadapan dengan pihak ketiga, masing-masing pihak memiliki wakilnya sendiri, namun akan bertindak dengan persetujuan pihak lain. (*Antara*)

* Dua puluh tujuh juta dollar dari 37,5 juta dana ECA yang tersedia bagi Indonesia akan digunakan untuk membeli tekstil, demikian dinyatakan oleh Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Komisaris Perdagangan Republik di Amerika Serikat kepada *Pedoman* hari ini. Sumitro tiba di Jakarta hari Kamis untuk berbicara dengan Pemerintah Republik mengenai pinjaman dari Bank Impor dan Ekspor.

Komisaris Perdagangan menolak mengungkapkan jumlah pasti pinjaman yang diusulkan, tapi mengatakan bahwa “pada prinsipnya sejumlah besar sudah dijanjikan”.

Sumitro mengatakan, harus diingat bahwa semua pinjaman yang diperoleh harus digunakan untuk tujuan yang direncanakan, yaitu untuk meningkatkan produksi dan taraf hidup petani. Ia tekankan bahwa petani Indonesia selama sembilan tahun terakhir merupakan kelompok produsen satu-satunya, karena itu penting menyediakan bahan keperluan yang sangat mereka butuhkan, misalnya tekstil. (*Antara*)

* Ketua Fraksi Nasional dalam Parlemen Pasundan, Mr. Sujoso yang sedang berkunjung di Yogyakarta, telah bertemu dengan Presiden Sukarno hari ini. Ia katakan kepada pers bahwa ia telah menggunakan audiensinya dengan Presiden untuk membicarakan masalah-masalah keamanan di Pasundan sesudah penyerahan kedaulatan. Sujoso merasa khawatir akan terjadinya bentrokan antara TNI dengan Darul Islam. Sujoso mengatakan bahwa Belanda sampai kini tidak mengambil tindakan terhadap pasukan Darul Islam ini di Pasundan, terutama di Priangan Selatan di mana penduduk paling menderita dibandingkan di tempat-tempat lain. Banyak rumah telah dibakar oleh gerombolan Darul Islam, dan banyak sekali orang telah dibunuh. Ia katakan, di samping Darul Islam, ada juga di Jawa Barat beberapa “barisan” lain.

Sujoso mengusulkan agar sesudah penyerahan kedaulatan Negara Pasundan ditiadakan dan dimasukkan kembali ke dalam Republik. Ia katakan, ia akan berjuang untuk itu di dalam Parlemen Pasundan, sebab, katanya, hal itu sesuai dengan konstitusi RIS.

Hari ini juga Sujoso kembali ke Jakarta. (*Antara*)

* Sembilan kepala distrik dan 28 pemimpin organisasi rakyat di wilayah Padalarang, Cimahi, Cipatat dan Bandung mengajukan petisi kepada Parlemen Pasundan untuk “membentuk kembali” Negara Pasundan menjadi wilayah Republik Indonesia. (*Antara*)

* L.M. Palar, Utusan Utama Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hari ini mengucapkan terima kasih kepada Australia dan India yang telah membawa sengketa Belanda-Indonesia ke depan Dewan Keamanan

dan Majelis Umum. “Tanpa campur tangan PBB, sengketa kami dengan Negeri Belanda hanya akan dapat diselesaikan dengan kekuatan senjata,” demikian dikatakannya. (*Antara*)

* Di markas ALRI Kutaraja (sekarang Banda Aceh) berlangsung peringatan setahun usia ALRI Daerah Aceh.

  Hadir dalam peringatan tersebut Gubernur Militer Tgk.Muhd. Daud Beureueh, Komandan AURI Daerah Aceh Sujoso Karsono, Residen T.T. Mohd. Daudsjah, Residen Tuanku Mahmud dan para undangan yang terutama terdiri dari perwira Angkatan Darat.

  Acara dimulai dengan pengibaran bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, disusul dengan sambutan-sambutan.

  Komandan ALRI Daerah Aceh Mayor Martadinata menyatakan bahwa Komando ALRI Daerah Aceh adalah bagian dari ALRI yang semenjak Aksi Militer II telah dapat menunaikan tugasnya dengan baik. Aceh sebagai daerah yang belum menjadi daerah pendudukan membuktikan bahwa Angkatan Lautnya dapat menunaikan kewajibannya dengan berhasil.

  “Tak perlu kami panjangkan amanat ini dengan perkataan yang muluk-muluk, tetapi cukup dibuktikan dengan cara kerja yang berhasil untuk kepentingan negara dan bangsa,” demikian Komandan ALRI Daerah Aceh.

  Gubernur Militer menyatakan gembira, dan menghargai prestasi Komandan serta para prajurit Angkatan Laut ini.

  “Pemuda-pemuda Angkatan Laut kita haus melaksanakan kewajiban sebagai kesatria bangsa yang berjiwa kelautan, yang tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dengan begitu cita-cita kita untuk menyempurnakan kemerdekaan negara akan lekas tercapai.

  Bangsa kita harus dapat maju di hari kemudian, sebagai bangsa yang merdeka. Sebagai Daerah Modal, daerah ini dapat bergerak dengan leluasa. Angkatan Laut di daerah ini harus menjadi contoh dan cermin bagi Angkatan Laut di daerah lain,” demikian Gubernur Militer. (TS306)

* Sidang penutup konferensi serikat buruh negeri-negeri Asia dan Australia di Peking kemarin menerima seruan kepada kaum pekerja di AS, Inggris, Perancis dan Belanda untuk meminta solidaritas dan dukungan bagi

rakyat-rakyat tertindas yang sedang berjuang bagi kemerdekaan dan kebebasan mereka, demikian dilaporkan oleh NCNA dari Peking.

Seruan berbunyi a.l.: *"Pemerintah-pemerintah kalian berpura-pura menghormati hak-hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Itu bohong. Dalam kenyataan mereka melaksanakan politik kolonial yang kejam di Asia."*

Seruan menyinggung pendudukan Amerika atas Korea Selatan, aksi militer Belanda di Indonesia di mana "25.000 pejuang patriotik dan anggota serikat buruh yang tergabung dalam SOBSI telah terbunuh atau dipenjarakan", pelarangan atas serikat buruh di Malaya oleh Inggris, dan pengiriman kaum pekerja Perancis untuk memerangi orang Vietnam. (*Antara*)

* Sesudah lima hari bersidang, Dewan Kalimantan Timur secara bulat menerima persetujuan yang dicapai pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag, demikian juga Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat (RIS). (*Antara*)

* Dr. C.J. van Heuven Goedhart, Wakil Ketua Delegasi Belanda, menyampaikan kepada Mejelis Umum PBB tentang telah tercapainya persetujuan yang sempurna di Den Haag. Pernyataan itu segera mendapat tepuk tangan sebagian besar dari lembaga dunia beranggotakan 59 bangsa itu.

  Andrei Vishinskii, Menteri Luar Negeri Sovyet, Dmitri Manuelskii dari Ukraina, dan Dr. Vladimir Clementis, Menteri Luar Negeri Cekoslowakia, termasuk yang tidak bertepuk tangan. (*Antara*)

* Enam orang tewas ketika sebuah kapal terbang Catalina milik Royal Dutch Shell Oil Company jatuh di lepas pantai Pulau Bangka, demikian diumumkan oleh perusahaan itu di Den Haag. Lima orang lagi mengalami luka-luka. Empat orang di antara yang tewas adalah awak kapal terbang, termasuk dua warga negara Inggris dan dua warga negara Belanda. Dua orang lainnya adalah ahli penerbangan Belanda. (*Antara*)

* Dalam kawatnya kepada Presiden Sukarno hari ini Perdana Menteri India Pandit Nehru menyatakan penyesalannya tidak dapat memenuhi undangan Presiden Republik untuk menghadiri peresmian Republik Indonesia

Serikat. Nehru menyatakan, ia berharap dapat mengunjungi Indonesia tahun depan.

Pemerintah India akan mengutus Menteri Kesehatan Rajkumari Amrit Kaur untuk menghadiri upacara tersebut. Selanjutnya Nehru mengundang Presiden Sukarno untuk menghadiri ulang tahun Republik India 26 Januari tahun depan. (*Antara*)

1949 DESEMBER 4.

* Perdana Menteri Republik Dr. Mohammad Hatta telah kembali ke Yogyakarta hari Minggu pagi. Bersamanya telah datang juga Konsul Jenderal Amerika dan Filipina Jacob D Beam dan Pastrana, Mr. Sujono Hadinoto, Dr. Sumitro Djojohadikusumo dan beberapa anggota KNIP.

  Diperoleh kabar bahwa Menteri Pertahanan Hamengku Buwono akan berkunjung kembali ke Jakarta minggu depan untuk berkonsultasi dengan Panitia Persiapan Nasional mengenai urusan militer dan keamanan. Hamengku Buwono telah dipercayakan untuk menangani urusan keamanan dalam sidang Panitia baru-baru ini. (*Antara*)

* Pemerintah Republik Indonesia, khususnya pemerintahan di Sumatra, telah memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada para industrialis asing di luar Republik untuk melakukan observasi terhadap pabrik-pabriknya di pulau itu, yang akan memungkinkan mereka mengoperasikannya kembali.

  Keputusan itu termuat dalam statemen yang dikeluarkan hari Sabtu di Jakarta oleh Wakil Perdana Menteri Republik untuk Sumatra, Sjafruddin Prawiranegara. Statemen menyatakan bahwa dengan sendirinya rekonstruksi pabrik-pabrik itu harus memperhatikan jaminan sosial khususnya berkenaan dengan kondisi buruh dan kerja, sejalan dengan persetujuan yang dicapai di Den Haag baru-baru ini.

  Dinyatakan, Pemerintah Republik akan memberikan segala bantuan kepada para pemilik pabrik asing ini dalam batas-batas yang ada dalam kemungkinan dan kekuasaan untuk menjamin keamanan para tamu tersebut. (*Antara*)

* Menteri Luar Negeri Belanda D.U. Stikker telah kembali ke Negeri Belanda hari Sabtu pagi sesudah melakukan kunjungan empat hari di Indonesia.

Sebelum bertolak, Stikker menyatakan kepada para wartawan bahwa selama kunjungan singkatnya ia telah menarik kesimpulan, terdapat kerja sama yang baik antara semua pihak. Ia katakan, saat ini kerja sama itu sangat diinginkan baik di kalangan para pejabat maupun para pengusaha swasta, polisi, dan terutama angkatan bersenjata. Ia tambahkan, memang ada beberapa kesulitan dalam beberapa hal. Namun ia yakin kesulitan-kesulitan itu akan dapat diatasi dengan baik. Menjawab pertanyaan, ia katakan bahwa salah satu kesulitan itu ialah adanya gerombolan bersenjata, yang perlu ditangani demi hukum dan ketertiban.

Stikker menyatakan kepuasannya mengenai pertemuannya dengan Perdana Menteri Mohammad Hatta hari Jumat untuk "membicarakan beberapa hal".

Stikker tiba di Jakarta bersama Wakil Perdana Menteri Belanda Van Schaik yang akan tinggal di Indonesia untuk beberapa waktu. Kapan ia akan pulang ke Negeri Belanda, belum ditetapkan. (*Antara*)

* Menteri Luar Negeri Belanda D.U. Stikker hari ini meramalkan masa depan yang sangat cemerlang bagi Republik Indonesia Serikat. Stikker yang sedang dalam perjalanan pulang ke Den Haag setelah berkunjung secara singkat ke Jakarta menyatakan kepada pers di lapangan terbang Karachi bahwa menurut pendapatnya negara yang baru itu akan berkembang baik, pasalnya ia terbukti mampu menjaga hukum dan ketertiban, "karena masih adanya sejumlah bandit di beberapa tempat".

Menteri Luar Negeri menyatakan, ia tidak melihat adanya kesulitan keuangan pada Republik Indonesia. Ia berharap bahwa Republik Indonesia akan dapat menyeimbangkan anggarannya dalam 2 atau 3 tahun mendatang. Walau bisa saja terjadi beberapa kesulitan sesudah penyerahan kedaulatan di Indonesia, diharapkan bahwa kesulitan-kesulitan itu akan dapat diatasi, demikian ia tambahkan.

Komisariat tinggi untuk Republik di Den Haag maupun Jakarta akan mulai berfungsi sejak tanggal penyerahan kedaulatan, yaitu tanggal 27 Desember 1949.

Akhirnya Stikker menyatakan bahwa Perdana Menteri Indonesia Mohammad Hatta akan datang di Den Haag untuk menerima kedulatan dari tangan Ratu Juliana. (*Antara*)

1949 DESEMBER 5.

* Presiden Sukarno menyatakan di hadapan sebuah resepsi tadi malam untuk menghormati Kongres Ekonomi Inter-Indonesia bahwa ekonomi kolonial harus dihapuskan untuk memberikan kesempatan kepada ekonomi nasional di mana para pedagang, penguasaha, petani dan buruh Indonesia bahu-membahu menyumbangkan tenaganya kepada Pemerintah. Dengan demikian, kata Presiden, "kita akan berhasil memainkan peranan kita dalam memajukan ekonomi dunia untuk menjamin kesejahteraan seluruh umat manusia."

Presiden menekankan bahwa kesejahteraan manusia tidak terbatas pada mereka yang berkulit putih. Dalam membangun ekonomi nasional Indonesia, para pengusaha dan pedagang harus tetap ingat akan gagasan-gagasan nasional dan tidak lagi cenderung untuk hanya memikirkan keuntungan pribadi. (*Antara*)

* Sidang pleno KNIP mendatang yang akan membicarakan penerimaan atas persetujuan Den Haag akan dianggap sah jika dihadiri oleh mayoritas mutlak dari ke-516 angggotanya, dan keputusannya pun akan diambil dengan mayoritas mutlak. Hal ini telah disepakati dalam sidang BP KNIP kemarin dengan 21 lawan 8 suara. (*Antara*)

* Walau sidang pleno KNIP telah ditetapkan akan dimulai hari Selasa pagi, jumlah anggota yang terdaftar sampai Minggu malam masih belum mencukupi untuk mencapai kuorum darurat yang ditetapkan untuk mengambil keputusan. Diharapkan bahwa Presiden Sukarno dengan Dekrit Nomor 6 Tahun 1946 akan menunjuk 36 anggota tambahan dari PIR (Partai Indonesia Raya), PSII (Partai Islam) yang keduanya sampai kini belum terwakili, juga dari PKRI (Partai Katolik) yang akan mendapat kursi tambahan.

Anggota-anggota yang sudah berkumpul kebanyakan menyatakan bahwa peluang untuk menerima persetujuan Den Haag besar. 252 anggota yang sudah mendaftarkan diri di Sekretariat memberikan kemungkin sbb.:Diperkirakan pro: PNI 30, Masyumi 42, Petani 20, Kristen 9, Katolik 2, total 103. Diperkirakan menolak persetujuan terdiri dari Partai Buruh 18, Komunis 3, Sosialis Indonesia (Partai Sjahrir) 15, Murba 1, Kelompok Buruh 19, total 58.

Tak berpartai dan kelompok-kelompok lain yang mungkin memberikan persetujuan untuk mencapai jumlah 80 persen mencakup tak berpartai 36, Sumatra 26, Borneo 3, Maluku 5, Sunda Kecil 4, Sulawesi 10, Minoritas Tionghoa 2, lain-lain 2, total 91. Dapat diperkirakan bahwa sekitar 175 dari 252 anggota akan menerima persetujuan Den Haag. (*Antara*)

* Alimin, pemimpin komunis Indonesia yang terkenal dan diperkirakan sudah mati atau dieksekusi menyatakan dalam wawancara khusus dengan *Antara* di sebuah desa jauh di pedalaman bahwa hasil Konferensi Meja Bundar "jauh kurang" dari persetujuan Linggajati yang dicapai Maret 1947. Ia menuduh para pemimpin Indonesia yang memegang jabatan di masa lalu tidak mengambil manfaat dari "faktor-faktor obyektif dan subyektif politik luar negeri Republik".

Pemimpin komunis itu menyatakan bahwa keputusan di medan internasional seperti PBB akan memiliki nilai yang lebih tinggi daripada persetujuan yang dicapai di Den Haag, walaupun, demikian ia tambahkan, penyelesaian lewat organisasi internasional ini akan makan waktu lebih lama. Menurut Alimin situasi sekarang ini adalah akibat dari anggapan para pemimpin yang diasingkan di Pulau Bangka bahwa keadaan mereka buruk.

Alimin mendesak rakyat Indonesia umumnya untuk terus memperkokoh kesatuan nasional, melaksanakan perjuangan untuk membawa revolusi nasional ke tingkat yang lebih tinggi dan menyelesaikannya dengan kekuatan nasional sendiri. "Demokrasi," kata tokoh komunis itu, "haruslah untuk massa rakyat." Menurut pendapatnya, "segalanya tinggal masalah waktu". Ia menyatakan kegembiraannya dengan situasi internasional sekarang yang menurut pendapatnya merupakan berkah bagi rakyat Indonesia. Ia memandang kemenangan rakyat Tiongkok di bawah pimpinan Mao Tse Tung sebagai kemenangan yang menguntungkan rakyat-rakyat Asia Tenggara.

Pada waktu berbicara dengan koresponden *Antara*, keadaan fisik dan suasana hati Alimin baik sekali. (*Antara*)

* Konferensi dinas penerangan mengakhiri sidang empat harinya hari ini dengan memutuskan untuk melakukan reorganisasi atas kebijakan penerangan umum di waktu yang akan datang. Sementara itu kalangan peserta

konferensi berpendapat bahwa Republik Indonesia Serikat (RIS) harus memiliki kementerian penerangan, mengingat bahwa dalam hubungan nasional maupun internasional, penerangan umum dianggap sebagai hak dasar manusia. Untuk efisiensi, konferensi berpendapat bahwa di antara negara-negara anggota RIS hanya Republik Indonesia dan Negara Indonesia Timur yang mendapat hak memiliki kementerian penerangan, sedangkan negara-negara anggota yang lain cukup memiliki dewan penerangan tanpa status kementerian.

Dalam pidato penutupan konferensi, Perdana Menteri Republik, Dr. Mohammad Hatta, menyatakan bahwa kemerdekaan yang akan segera kita terima adalah hasil perjuangan rakyat yang telah dimulai 40 tahun yang lalu, dan bukan keberhasilan Republik Indonesia sendiri. (*Antara*)

* Konferensi Ekonomi Inter-Indonesia (KEII) malam ini akan membicarakan mosi delegasi Pasundan untuk memasukkan pasal 33 Undang-undang Dasar Republik yang merupakan dasar jaminan sosial dalam rancangan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat. KEII telah bersidang tiga hari lamanya, tapi belum mencapai tahap final dalam menerima sebuah resolusi. Diperkirakan resolusi tersebut akan diterima dalam sidang penutupan.

  Hal menarik dalam KEII ialah munculnya berbagai pandangan delegasi, yang dianggap paling cocok untuk dasar rehabilitasi ekonomi Indonesia di masa depan. Namun dari berbagai teori yang tinggi dan pandangan ekonomi empiris itu dapat ditelusuri “benang nasional” delegasi-delegasi tersebut. Dinilai dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan, konferensi mungkin akan memutuskan dilembagakannya “*economique dirigée*” (ekonomi terpimpin). (*Antara*)

* INP (Indo National Party) menyatakan pendapatnya kepada PPN (Panitia Persiapan Nasional) bahwa presiden pertama Republik Indonesia Serikat (RIS) haruslah Ir. Sukarno. (*KU134-135*)

* Dunia pers Indonesia tergolong salah satu yang terbaik di Asia Tenggara dan dapat dikatakan hampir sama tingkatnya dengan dunia pers India, demikian dinyatakan oleh B.M. Diah, direktur dan redaktur kepala harian *Merdeka* setiba kembali di Jakarta dari perjalanan jurnalistik di Asia Tenggara, Eropa

dan Amerika. Diah telah berkunjung ke Negeri Belanda, Jerman, London, Amerika, dan kesannya ialah, terutama di Amerika, dunia jurnalistik di Indonesia mendapat perhatian terbesar dari seluruh dunia. Ia tambahkan bahwa dibandingkan dengan dunia surat kabar di Asia Tenggara, misalnya di Siam, Birma dll, tingkatan pers Indonesia relatif lebih tinggi. Hanya India, katanya, dapat dikatakan hampir disamai oleh Indonesia.

Diah mengusulkan kepada rekan-rekannya untuk memperbaiki profesinya dan mengorganisasi diri agar dapat menduduki posisi di dunia pers internasional sejalan dengan posisi maju Indonesia dalam Republik Indonesia Serikat. Diah bermaksud menempatkan wartawan-wartawan Indonesia di luar negeri untuk mewakili sesuatu surat kabar dan kelompok surat kabar. (*Antara*)

* Memberikan sambutan kepada konferensi penerbit dan redaktur surat kabar Indonesia yang dimulai hari ini, *Kedaulatan Rakjat* memuat tajuk rencana yang menyerukan kepada Pemerintah untuk membendung masuknya surat-surat kabar asing ke negeri ini, bersamaan dengan itu mendorong para wartawan dan penerbit untuk taat kepada kode jurnalistik nasional. Tajuk rencana itu menyatakan bahwa sampai sekarang dunia surat kabar Indonesia, khususnya di wilayah Republik, harus menanggung tekanan dengan munculnya secara berangsur-angsur surat-surat kabar yang dibiayai oleh orang asing yang mempekerjakan redaktur-redaktur Indonesia dan memiliki peralatan yang lengkap.

Dikatakannya, publikasi asing ini tampaknya membanjiri negeri ini dengan bahan bacaan tentang hal-hal yang cocok untuk rakyat Indonesia, tetapi sesungguhnya mewakili kepentingan investor asing. Dinyatakannya, Pemerintah telah kehilangan perhatian terhadap perkembangan dan perlindungan terhadap pers Indonesia, karena itu didesaknya agar Pemerintah mencurahkan lebih banyak perhatian terhadapnya.

Tajuk rencana mendorong para penerbit Indonesia untuk berpegang teguh pada kode jurnalistik nasional, dan mendesak Pemerintah untuk menerima undang-undang yang membatasi masuknya publikasi asing, bersamaan itu menghimbau massa untuk memberikan dukungan moral dengan lebih banyak membaca surat kabar milik Indonesia sendiri. “Siapa memiliki pers sendiri, paling tidak ia memiliki setengah haknya,” demikian *Kedaulatan Rakjat*. (*Antara*)

* Anggota UNCI dari Australia, Thomas Critchley, tiba di Jakarta kemarin dari Negeri Belanda. Di lapangan terbang ia disambut oleh wakil-wakil UNCI dan lain-lain pejabat Belanda dan Indonesia. Mr.A.K. Pringgodigdo hadir juga atas nama Panitia Persiapan Nasional. (*Antara*)

1949 DESEMBER 6.

* Membuka sidang pleno KNIP pagi tadi Presiden Sukarno meminta dengan sangat kepada sidang agar membicarakan secara mendalam hasil persetujuan yang telah dicapai di Den Haag baru-baru ini, dan memutuskan menerimanya atau tidak. Presiden menyatakan tidak akan mentolerir jika badan pembentuk undang-undang ini sekadar mengambil keputusan yang menyimpang seperti hanya menerima baik kebijakan pemerintah. "Bicarakanlah dengan pikiran terdalam yang sadar bahwa kita masih terlibat dalam penjuangan nasional. Perjuangan berarti penentuan hidup kita, dan kehidupan itu melibatkan perjuangan terus-menerus. Kedua istilah ini tak bisa dipisahkan satu dari yang lain."

  Menyatakan bahwa perjuangan berarti aksi yang dinamis, Presiden meminta KNIP untuk mempertimbangkan apakah hasil-hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag menyalahi dinamisme perjuangan kita atau mendatangkan nilai tambahan pada saat ini. Ia pun mempertanyakan apakah dapat kita mengambil manfaat dari hasil-hasil itu untuk melanjutkan perjuangan nasional, ataukah kita telah semakin mendekati atau semakin menjauhi tujuan akhir kita.

  Presiden mendesak untuk mengambil keputusan selekas mungkin, kalau bisa dalam beberapa hari ini, sebab kata Presiden: "Kalau badan legislatif Belanda dan Indonesia meratifikasi persetujuan ini, program kita yang ada sekarang akan mencapai titik tertinggi dalam bentuk penyerahan resmi kedaulatan kepada Indonesia." Ia mengingatkan hadirin akan tanggung jawab terberat yang ada di tangan mereka.

  Presiden mengakhiri pidato tanpa persiapan itu dengan mengatakan: "Kalau parlemen Belanda maupun Indonesia menolak persetujuan Den Haag, dengan tegas saya katakan, saya tak tahu apa yang akan terjadi." (*Antara*)

* Peristiwa di dalam BP KNIP silih berganti dengan tempo yang tak terbayangkan, sehubungan dengan akan segera dimulainya sidang KNIP untuk membicarakan Persetujuan Den Haag.

Pemerintah kemarin telah menyetujui RUU tentang penggantian presiden apabila Sukarno terpilih menjadi Presiden RIS. Penggantinya adalah Ketua KNIP, atau kalau ia menolak, Wakil Ketua KNIP.

Pemerintah pun telah menerima RUU tentang penentuan "kuorum darurat". Dengan keputusan untuk mengabsen para anggota yang telah "menyeberang ke pihak sana" dan menunjuk anggota-anggota tambahan yang mewakili PSII (Partai Islam) dan PKRI (Partai Katolik), kuorum telah ditetapkan dengan angka 231, yaitu setengah tambah satu dari total 459 anggota KNIP yang baru. Anggota yang hadir sekarang berjumlah lebih dari 250 hingga sidang dapat secara sah mengambil keputusan

Sidang dijadwalkan akan berlangsung delapan hari. Sidang telah dibuka hari Selasa dengan pidato pembukaan oleh Presiden Sukarno, disusul dengan pidato Ketua KNIP, dan pernyataan pemerintah yang diucapkan oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta. Besok hari libur untuk memberikan kesempatan kepada para anggota untuk mendalami bahan yang akan dibicarakan. (*Antara*)

* Sidang pleno Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibuka di Pagelaran, Yogyakarta.

Sukarno dengan suara bulat dipilih sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) yang pertama dan terakhir. (LM53; *LUxxii*)

* Sesudah penyerahan kedaulatan, RIS akan berada dalam posisi mengontrol dan mempercepat penarikan pasukan Belanda dari Indonesia dalam waktu enam bulan sesudah penyerahan kedaulatan, demikian dinyatakan oleh Perdana Menteri Dr.Mohammad Hatta kepada sidang pembukaan KNIP pagi ini.

Sebagian besar pidato itu mirip dengan pidato yang diucapkan sebelumnya di hadapan BP KNIP sekembalinya dari Negeri Belanda. Ia minta agar dalam menilai persetujuan Den Haag para anggota KNIP menyadari realitas; ia ulangi bahwa apa yang sudah dicapai di Den Haag adalah maksimal yang dapat dicapai saat ini, walau "kita menginginkan kedaulatan yang bebas dari segala kekurangan".

Hal yang terpenting, kata Hatta selanjutnya, ialah bahwa kedaulatan yang akan diserahkan itu tidak bersyarat dan tak dapat ditarik kembali. Uni yang

dianggotai Indonesia dan Belanda adalah uni yang longgar, kata Hatta; ia ingatkan bahwa uni dan gagasan tentang federasi itu sudah ada sejak penandatanganan persetujuan Linggajati tahun 1946.

Mengenai Konstitusi RIS Sementara, Hatta menyatakan bahwa “walau tidak memuaskan kita sepenuhnya, karena Konstitusi itu disusun oleh dua pihak, kaum Republiken dan kaum Federalis, maka masih banyak kemiripannya dengan Konstitusi Republik yang berdasarkan Pancasila”. (...)

* Dr. J. Leimena, ketua komite militer dan keamanan Panitia Persiapan Nasional (PPN) menyatakan bahwa empat subkomite telah dibentuk untuk melaksanakan bagian militer dari persetujuan Den Haag. Ia nyatakan ini dalam sidang pleno kedua PPN hari ini di bawah pimpinan Dr.Mohammad Rum. Keempat subkomite itu:

1. penjagaan keamanan di waktu penyerahan kedaulatan;
2. realisasi bagian militer dari persetujuan Den Haag;
3. rancangan struktur militer bagi pertahanan; dan
4. kekuatan kepolisian, semuanya sudah mulai bekerja dengan intensif, kata Dr. Leimena.

Selanjutnya Kolonel Simatupang, Dr. Abuhanifah, dan Dr. Ateng menyampaikan pendapat mereka masing-masing kepada sidang mengenai keamanan di waktu penyerahan kedaulatan. Pidato mereka disusul permintaan anggota Mr. Aflus untuk mengirim misi militer Republik ke Borneo Timur sesegera mungkin sesuai dengan keinginan rakyat di sana.

Prof. Supomo, ketua komite prosedur, menyampaikan beberapa usul mengenai pemilihan presiden, pembentukan kabinet, penyerahan kedaulatan di Amsterdam dan upacara di Jakarta serta kedatangan presiden di Jakarta. (*Antara*)

* Berkaitan dengan ratifikasi persetujun Den Haag, Pemerintah Republik hari ini menyampaikan dua rancangan undang-undang kepada KNIP: satu tentang diterimanya Konstitusi Sementara RIS, dan satu lagi tentang ratifikasi persetujuan Den Haag. Telah disampaikan juga rancangan dekrit Presiden tentang penyerahan kedaulatan kepada RIS. (*Antara*)

* Diperoleh kabar bahwa Presiden Sukarno telah menerima uang sebesar *f*50.000,-- dari rakyat Madura untuk rehabilitasi Yogyakarta. (*Antara*)

* Orang banyak memekikkan “bubarkan kabinet” hari Selasa, ketika Parlemen memulai perdebatan 3 hari mengenai persetujuan yang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesudah 300 tahun dikuasai Belanda. Orang-orang itu, termasuk banyak orang Indo, memenuhi lapangan depan gedung Parlemen. Sementara mereka memekikkan slogan-slogan menentang persetujuan kabinet atas pemberian kemerdekaan, dibagikan pamflet-pamflet penolakan atas persetujuan yang akan melahirkan negara Republik Indonesia Serikat menjelang tahun baru.

  Pemerintah dapat mengandalkan dukungan kaum Katolik dan Sosialis yang menguasai 59 dari 100 suara, berhadapan dengan partai-partai antirevolusioner dan partai-partai kanan kecil dengan 16 suara dan kaum komunis dengan 8 suara. Diperlukan 2/3 suara mayoritas untuk meratifikasi persetujuan itu. (*Antara*)

* Kolonel Sungkono telah diundang oleh Wali Negara Madura untuk berkunjung ke pulau itu minggu ini, demikian laporan yang diterima di Surabaya dari Madura. Perjalanan Sungkono bersifat tidak resmi dan berkaitan dengan urusan keamanan menjelang lahirnya Indonesia yang berdaulat dan berkaitan juga dengan hubungan TNI dengan Pengawal Dalam Negeri, korps “Tjakra”, dan Kepolisian Negara Madura.

  Diperoleh berita bahwa garnisun TNI nantinya akan ditempatkan di Sampang, Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep. (*Antara*)

* Dua tempat di daerah Banten, Labuan dan Sekati, telah dikembalikan kepada Republik pada 5 Desember, dan TNI mengambil alih kekuasaan atasnya. Pengunduran diri pasukan Belanda berlangsung tanpa insiden, menurut laporan yang sampai di Jakarta hari ini.

  Penguasa militer Republik hari itu juga mengumumkan bahwa Keresidenan Banten sesudah ditinggalkan oleh pasukan Belanda telah dinyatakan sebagai wilayah tertutup. Sesuai dengan dekrit ini orang-orang yang ingin tinggal atau masuk ke wilayah itu diharuskan memperoleh ijin. Markas besar militer Republik secara resmi telah dipindahkan dari pedalaman ke kota.

Hari ini 160 polisi Republik memasuki daerah Banten. Kelompok ini berasal dari luar Jakarta dan Krawang. Sebelumnya 320 orang telah dikirim ke sana, dan sebagian lagi diperkirakan akan menyusul. Kesatuan polisi ini akan ditempatkan di sembilan tempat di Banten. (*Antara*)

1949 DESEMBER 7.

* Sidang pleno Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) di Siti Hinggil, Yogyakarta, untuk membicarakan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB), dihadiri oleh 300 orang.

  Dalam kesempatan itu Presiden Sukarno menyatakan a.l.:

  "Kalau hasil-hasil KMB tidak diterima, sungguh saya tidak tahu, apa yang akan terjadi." Sidang berlangsung sampai tanggal 15 Desember 1949. (*KU135; LU t.h.*)

* Sebuah mosi telah diterima oleh Konferensi Ekonomi Inter-Indonesia (KEII) di Yogyakarta untuk menentang sistem ekonomi kolonial dan liberal.

  Dengan mosi itu KEII akan mendesak Pemerintah RIS dan seluruh rakyat Indonesia untuk memasukkan ke dalam Konstitusi Sementara RIS ketetapan yang termuat dalam Konstitusi Republik (pasal 33 dan 27 paragraf dua) yang meminta agar pemerintah menguasai industri-industri vital untuk menjamin program kesejahteraan umum. (*Antara*)

* Di Yogyakarta berlangsung Kongres Umat Katolik Seluruh Indonesia untuk membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan akan berdirinya Republik Indonesia Serikat (RIS).

  Ikut memberikan sambutan Mgr. Soegijopranoto. (*LU*xxii; *LU* t.h.)

* Fakultas-fakultas yang tergabung dalam Balai Perguruan Tinggi Kebangsaan Gajah Mada diserahkan kepada Pemerintah. Sebagai tindak lanjut, dengan PP No. 23 tahun 1949 semua perguruan tinggi negeri di Yogyakarta digabungkan menjadi satu universitas. (*lj. 19 Desember 1949*)

* Sebuah Perserikatan Penerbit Suratkabar Indonesia telah didirikan sebagai hasil konferensi direktur dan editor surat kabar hari ini. Keputusan ini

diambil dengan 25 suara, dengan dua suara absten dari B.M. Diah atas nama *Merdeka* dan *Berita Indonesia* di Jakarta.

Pertemuan itu dibuka oleh Samawi, direktur *Kedaulatan Rakjat* Yogyakarta, yang mengusulkan pembentukan sebuah perserikatan surat kabar murni Indonesia untuk seluruh Indonesia. Djawoto, editor dalam negeri Kantor Berita *Antara* memberikan tinjauan tentang bagaimana menolak pers tanah air dipengaruhi oleh modal asing.

Sesudah membicarakan semua prasarana itu, B.M. Diah, direktur *Merdeka* Jakarta mempertanyakan kemungkinan untuk menggabungkan semua surat kabar Indonesia dengan "Verenigde Dagblad Pers" yang sudah ada, yang menghimpun semua surat kabar di Jakarta tanpa pandang bahasa dan kebangsaan penerbitnya. Sahmud dari *Pedoman* mendukung pandangan Samawi untuk mendirikan persekutuan pers Indonesia sendiri.

Usai voting, Mr. Sumanang, direktur *Nasional* Yogyakarta menyatakan bahwa perserikatan yang baru itu kemudian dapat melakukan pembicaraan dengan "Verenigde Dagblad Pers" dalam rangka kerja sama mendatang.

Dua komite telah dibentuk, pertama untuk meneliti bisnis surat kabar, kedua untuk menangani periklanan. Komite pertama terdiri dari Jakub Jahja dari *Harian Rakjat* Medan, Adam Malik, direktur *Antara*, Sumanang dari *Nasional* Yogyakarta, Sahmud dari *Pedoman* Jakarta, Nakahua dari *Pedoman* Makassar. Komite kedua terdiri dari A.S. Nasrun, Sahmud, dan Burhan. B.M. Diah membacakan prasaran tentang pers cetak dan cetak berita.

Anggota perserikatan baru yang terdaftar adalah: *Pedoman*, Jakarta; *Sumber*, Jakarta; *Pemandangan*, Jakarta; *Warta Indonesia*, Jakarta; *Nasional*, Semarang; *Tanah Air*, Semarang; *Indonesia*, Bandung; *Sipatahunan*, Bandung; *Harian Umum*, Surabaya; *Berita*, Surabaya; *Trompet Masjarakat*, Surabaya; *Pedoman*, Makassar; *Menara*, Menado; *Pertja Selatan*, Palembang; *Harian Rakjat*, Medan; *Warta Berita*, Jakarta; *Mimbar Umum*, Medan; *Fikiran Rakjat*, Palembang; *Suara Kalimantan*, Banjarmasin; *Kalimantan Berdjuang*, Banjarmasin; *Buruh*, Yogya; *Bergerak*, Pare; *Suara Bogor*, Bogor; *Kedaulatan Rakjat*, Yogya; *Nasional*, Yogyakarta. (*Antara*)

* Pihak penguasa Belanda mengumumkan tadi malam, bahwa tidak ada tawanan Indonesia (tahanan atau narapidana) yang akan dipindahkan

ke New Guinea. Langkah macam itu saja pun tak terpikirkan, demikian pengumuman itu. Sebaliknya, orang-orang Indonesia yang kini dipenjarakan di Sorong—satu-satunya penjara di New Guinea—dalam waktu singkat akan dikembalikan ke daerahnya karena mereka bukan penduduk asli New Guinea.

Pengumuman ini diberikan karena adanya desas-desus dalam pers Indonesia tentang pemindahan tawanan ke New Guinea, terutama tawanan politik. (*Antara*)

* Rombongan pembesar dan alim ulama Daerah Aceh meninggalkan pelabuhan Uleelheue menuju Sabang dan selanjutnya Yogyakarta dengan pesawat udara.

  Dalam rombongan terdapat a.l. Residen t/b Tuanku Mahmud, Bupati Aceh Besar Zaini Bakri, Sultan Siak Sjarif Kasim dan keluarga, Tgk.H. Ahmad Hasballah Indrapuri, Tgk. di Lam U, dan Sulaiman Mahmud. Ketiga orang terakhir akan menghadiri Kongres Muslimin Indonesia di Yogyakarta. (TS307)

* Kalangan politik di Jakarta menyambut baik penunjukan Merle Cochran, anggota UNCI dari Amerika, sebagai duta besar Amerika yang pertama untuk Republik Indonesia Serikat. Mereka katakan, keputusan Pemerintah Amerika itu sesuai dengan situasi sekarang, karena Cochran dinilai mengenal sifat dan tujuan perjuangan rakyat Indonesia, serta detil hubungan baru antara Indonesia dan Belanda sesudah Indonesia menjadi berdaulat. Sementara itu dinilai Cochran menyadari sepenuhnya maksud rakyat Indonesia untuk bekerjasama dalam kerangka hubungan internasional.

  Kalangan itu bahkan menyarankan agar Australia dan Belgia memutuskan mengangkat masing-masing Thomas Critchley dan Heremans, keduanya anggota UNCI, sebagai utusan untuk Indonesia. (*Antara*)

* PBB secara resmi hari ini menerima baik persetujuan Den Haag antara Belanda dan Republik Indonesia. Sidang Umum dengan suara 41 menerima, 5 menentang, dan 2 abstain, menyetujui sebuah resolusi yang memuji pihak Belanda, Indonesia dan UNCI atas sumbangannya yang menyebabkan keberhasilan persetujuan Den Haag.

Resolusi pun menyambut baik “akan dibentuknya Republik Indonesia Serikat, sebuah Negara yang Merdeka dan Berdaulat”. (*Antara*)

1949 DESEMBER 8.

* Komite Prosedur Panitia Persiapan Nasional telah mengajukan kepada Komite Pusat sebuah rencana prosedur yang akan diikuti dalam hal penandatanganan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, pemilihan Presiden, disusul dengan penerimaan jabatan olehnya, dan pembentukan Pemerintah Republik Indonesia Serikat.

1. Pada 12 Desember 1949 para utusan yang dikuasakan oleh Reopublik Indonesia dan Negara-negara serta Daerah-daerah yang terhimpun dalam BFO akan berkumpul di Pegangsaan Timur 56 Jakarta untuk membubuhkan tanda tangan pada Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Tempat itu telah dipilih sebagai latar belakang historis karena di sanalah pada 17 Agustus 1945 kemerdekaan rakyat Indonesia diproklamasikan.
2. Kamis 15 Desember 1949 badan pemilihan yang terdiri dari para utusan negara-negara bagian akan memilih Presiden pertama Republik Indonesia Serikat di Yogyakarta. Dalam memilih Presiden Republik Indonesia Serikat, para anggota badan pemilihan akan berusaha memperoleh suara bulat. Selanjutnya Presiden akan disumpah di hadapan para anggota badan pemilihan. Upacara penerimaan jabatan akan berlangsung di Yogyakarta juga.
3. Selanjutnya dengan persetujuan badan pemilihan, Presiden akan menunjuk tiga orang formatur kabinet dan—atas rekomendasi ketiga formatur—Presiden akan menunjuk Perdana Menteri dan lain-lain Menteri Kabinet. Pengumuman nama-nama anggota kabinet pertama Republik Indonesia Serikat diharapkan berlangsung antara 15 dan 20 Desember.
4. Sampai hari ini badan-badan perwakilan sepuluh negara telah menyetujui rancangan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan telah meratifikasi persetujuan Konferensi Meja Bundar, yaitu Indonesia Timur, Borneo Barat, Banjar, Dayak Besar, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo Timur, Riau, Sumatra Selatan dan Sumatra Timur. Republik Indonesia, Pasundan, Madura, Bangka, Biliton dan Borneo Tenggara

belum memutuskan sikap terhadap Konstitusi dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam Konferensi Meja Bundar. (*Antara*)

* Partai Masyumi bersedia memberikan dukungan materiil dan moril bagi terwujudnya hukum dan ketertiban di Jawa Barat sebagaimana diserukan dalam komunike bersama hari Selasa yang lalu di Bandung oleh Koordinator Keamanan Letnan Jenderal Sultan Hamengku Buwono dan Perdana Menteri Pasundan Djumhana Wiriaatmadja. Isyarat ini dimuat dalam pengumuman yang dikeluarkan kemarin oleh wakil dewan politik Masyumi di Jakarta. Partai itu menyerukan kepada semua lapisan dalam masyarakat untuk menjaga hukum dan ketertiban secara kolektif sebagai satu bangsa, walau di sana-sini terdapat perbedaan pendapat. Pengumuman Masyumi ini ditandatangani oleh Mr. Mohammad Natsir, Mr. Jusuf Wibisono, M.K. Wachid Hasjim, K.H. Abdulwahab, dan Dr. Abu Hanifah.

  Komunika bersama itu mengumumkan juga pengangkatan resmi Kolonel Sadikin sebagai gubernur militer Jawa Barat, yang dalam hal ini dibantu oleh Menteri Dalam Negeri Pasundan Mr. Makmun Sumadipradja. Dinyatakan juga bahwa semua alat kekuasaan Pasundan akan tunduk kepada gubernur militer dan para komandannya. (*Antara*)

* Perserikatan Penerbit Suratkabar Indonesia yang didirikan kemarin sebagai hasil konferensi direktur dan editor surat kabar secara resmi diketuai oleh Mr. Sumanang, direktur harian *Nasional* di Yogyakarta. Pengurus besar harian akan berpusat di Jakarta, terdiri dari para direktur penerbit surat kabar di sana. Sementara itu komisariat-komisariat yang juga terdiri dari para direktur surat kabar akan dibentuk di beberapa tempat di Indonesia.

  Selanjutnya diperoleh kabar bahwa semua surat kabar anggota perserikatan baru ini telah memutuskan untuk mengambil saham Kantor Berita Indonesia *Antara*. *Antara* akan memperingati hari ulang tahunnya yang ke-12 pada 13 Desember mendatang, dan telah diakui sebagai satu-satunya kantor berita nasional.

  Sidang perserikatan kemarin telah memutuskan mengirim petisi kepada Pemerintah Republik untuk memperjuangkan kebebasan pers dan menjamin diterimanya undang-undang pers dalam negara RIS mendatang, melindungi pers nasional, dan memberikan fasilitas dan perlindungan

sebaik mungkin kepadanya—paling tidak sesuai dengan keputusan Konferensi Kebebasan Informasi PBB di Jenewa Maret-April yang lalu.

Sidang juga mendesak kepada Pemerintah Republik untuk segera membebaskan para wartawan yang karena keyakinan politiknya kini dipenjara atau dihukum. Dua puluh tujuh peserta konferensi tadi malam dijamu oleh Menteri Penerangan Republik, Mr. Sjamsuddin. (*Antara*)

* Monsinyur Soegijopranoto, Vikaris Apostolik di Yogyakarta, menyatakan bahwa komunitas Katolik mendapat kebebasan luas di Republik Indonesia untuk melaksanakan dan menyebarkan agama Katolik. Ia menyatakan harapannya bahwa di Indonesia yang merdeka dan berdaulatan nanti rakyat benar-benar dapat menikmati manfaat kemerdekaan,yaitu keamanan dan kesejahteraan. Akhirnya ia menyerukan kepada umast Katolik di Indonesia untuk membantu negara dengan mempertahankan kesatuan nasional.

Vikaris Apostolik mengucapkan pidatonya ini dalam resepsi di Yogyakarta tadi malam sehubungan dengan pembukaan Kongres Katolik Seluruh Indonesia yang akan berlangsung sampai 12 Desember. (*Antara*)

* “Plebisit tidak diperlukan sekarang ini untuk menetapkan status Asahan Selatan dan Labuhan Batu di Sumatra Timur, sebab kehendak rakyat di wilayah itu sudah sangat jelas,” demikian Ki Hadjar Dewantara, ketua Komisi Investigasi Republik mengenai status kedua wilayah tersebut. Hal itu dapat diselesaikan oleh Pemerintah Republik bersama Pemerintah Sumatra Timur, katanya. “Kalau masih belum mungkin, obatnya baru plebisit dalam waktu setahun, untuk menghindari pertumpahan darah yang tidak kita inginkan,” sambung Ki Hadjar.

Ketua komisi menyatakan bahwa walupun komisi tidak diijinkan meneruskan perjalanan ke wilayah itu, komisi merasa bahwa kegiatannya telah mendatangkan hasil, dalam arti bahwa telah diperoleh gambaran yang baik mengenai kehendak dan keinginan rakyat di wilayah tersebut. Ia ungkapkan bahwa sekitar 30 pemimpin wakil wilayah itu telah berkunjung kepadanya di Medan dan menyampaikan situasinya dalam seperangkat resolusi. Para pemimpin itu pun telah menceritakan kepadanya riwayat pemasukan kedua wilayah itu dalam Negara Sumatra Timur.

Ki Hadjar menjelaskan bahwa Konferensi Inter-Indonesia di Yogyakarta dan Jakarta telah menyetujui digabungkannya kedua wilayah sengketa itu dengan Republik, namun delegasi Sumatra Timur dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag telah menyatakan keberatannya. Untuk mencegah agar masalah kecil ini tidak menghalangi penyelesaian masalah yang jauh lebih penting, delegasi Republik menyetujui—tapi tidak menyerah—menganggap kedua wilayah itu *de facto* masuk Sumatra Timur, tapi *de jure* masuk Republik. Ia kemukakan, telah timbul perbedaan pendapat baru, yaitu Sumatra Timur menginginkan diadakannya plebisit setahun sesudah pembentukan RIS, sedangkan menurut Republik plebisit dapat dilakukan setiap waktu. Suara rakyat faktor yang menentukan, kata Ki Hadjar. Ia katakan, Republik telah mengirimkan satu tim investigasi ketika kerusuhan terjadi di wilayah itu. Menurut pandangan Pemerintah Sumatra Timur, kedatangan tim Republik itu bisa menambah keresahan, namun telah terbukti tim dapat meredakan situasi, dan sebabnya ialah karena komisi itu dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesulitan.
Ki Hadjar kembali ke Jawa hari ini. (*Antara*)

* Surat kabar Sovyet “Izvestia” menuduh Sukarno-Hatta mengkhianati rakyat Indonesia dengan tindakannya menerima Persetujuan KMB (Konferensi Meja Bundar). (...)

* Di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dibentuk Panitia Pusat Menyambut Pengakuan Kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat.

Panitia terdiri atas: Pelindung Wakil Perdana Menteri Mr. Sjafruddin Prawiranegara; Penasihat: Komisaris Pemerintah Pusat Mr.S.M. Amin dan Gubernur Militer Tgk.Muhd. Daud Beureueh; Ketua: Residen T.T. Mohd. Daudsjah; Wakil Ketua: Komandan Divisi X TNI Letnan Kolonel Husin Jusuf; Pembantu: Para anggota Badan Pekerja Dewan Perwakilan Rakyat Sumatra Utara: Amelz, Tgk.M. Nur el Ibrahimy, M. Yunan Nasution dan Jahja Siregar, Komandan CPM Sumatra Widya, dan Kepala Kepolisian Daerah Aceh M. Insja.

Acara akan dilaksanakan secara sederhana, diwujudkan dalam kegiatan bakti bagi para invalid dan keluarga korban perang. (TS307)

* Wakil Perdana Menteri Sjafruddin Prawiranegara yang baru tiba dari Yogyakarta menyatakan kepada wartawan:

  "Kedaulatan kita yang penuh dalam politik sudah pasti akan kita terima akhir bulan ini. Kedaulatan dalam politik ini kita pergunakan untuk mencapai kesempurnaan dalam kedaulatan ekonomi, sehingga kemakmuran negara kita dapat dirasakan oleh warga negara seluruhnya.

  Untuk melancarkan pembangunan ekonomi negara kita, kita memerlukan modal asing, seperti alat-alat teknik, mesin-mesin dsb. Kita memperoleh bantuan dari luar negeri dengan dua cara, yaitu dalam bentuk pinjaman langsung, atau memperkenankan modal asing berusaha di sini dengan syarat-syarat tertentu, terutama sekali jaminan mereka atas kesosialan kaum buruh kita.

  Dalam hal ini Pemerintah akan mengamati perjalanan modal asing itu, sehingga jaminan hidup kaum buruh betul-betul terlaksana."

  Menurut Wakil Perdana Menteri, tidak lama lagi akan datang di Aceh beberapa *ondernemer* asing untuk melihat kemungkinan memperbaiki perusahaannya yang telah rusak akibat perang. Kedatangan mereka tidak untuk mencampuri urusan politik negara kita, dan mereka akan menghormati kita sebagai bangsa dan negara yang merdeka. Juga Sabang akan diserahkan kepada kita. (TS307-309)

1949 DESEMBER 9.

* Panitia Persiapan Nasional telah memberikan kepada Letjen Hamengku Buwono IX tanggung jawab untuk menjaga keamanan di seluruh Indonesia, demikian diumumkan secara resmi tadi malam.

  Dalam kapasitas tersebut, Sultan telah berkunjung ke Semarang pada 7 Desember 1949 untuk melakukan pembicaraan dengan Recomba, Komite Eksekutif Badan Perwakilan Jawa Tengah, dan Komandan angkatan bersenjata Belanda di sana.

  Sebagai hasil pembicaraan tersebut, Sultan telah menunjuk Komandan Divisi III TNI Kol. Gatot Subroto beserta staf untuk memegang kekuasaan atas nama Koordinator Keamanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Gubernur Militer akan dibantu oleh Gubernur Jawa Tengah Mr. Budiono dan Dr. Rustamadji.

Mayor Suhardi ditunjuk sebagai Komandan Pangkalan Semarang dibantu oleh polisi sipil dan Mr. Slamet Tirtosubroto, anggota Badan Perwakilan Jawa Tengah urusan sipil kotapraja.

Semua organ kekuasaan daerah Recomba dan daerah TBA (*Territoriaal-Bestuur Adviseur*, penasihat pemerintahan teritorial) Jawa Tengah akan tunduk kepada Gubernur Militer dan semua komandan dalam melaksanakan tugasnya.

Penunjukan ini mendapat persetujuan dari semua hadirin, sebab untuk mewujudkan tujuan rakyat Indonesia diperlukan tindakan-tindakan yang efektif dengan mengabaikan perbedaan-perbedaan berdasarkan sentimen.

Semua orang, tanpa memandang ras, agama atau keyakinan politik perlu ikut bertanggungjawab dalam menjaga keamanan dan dengan demikian membantu melaksanakan tugas yang berat dan bertanggungjawab dalam menjaga hukum dan ketertiban di seluruh Indonesia. (*Antara*)

* Sebagai hasil diskusi dengan Pemerintah Jawa Timur, Sultan secara resmi menunjuk Kol. Sungkono, Komandan Divisi I TNI yang bersama staf hadir dalam diskusi sebagai Gubernur Militer Jawa Timur, dengan kekuasaan bertindak atas nama Koordinator Keamanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Gubernur Militer akan dibantu oleh Gubernur Jawa Timur Dr. Murdjani, wakil Wali Negara Mr. Sudarmo, dan seorang wakil Wali Negara Madura (yang akan ditunjuk kemudian), demikian menurut pengumuman resmi.

Mayor Djarot Subiantoro ditunjuk sebagai Komandan Pangkalan Surabaya, dibantu oleh polisi sipil dan Wali Kota Surabaya Mr. Indrakusuma; Letkol. Sudjono ditunjuk sebagai Komandan Pangkalan Malang, dibantu oleh polisi sipil dan Wali Kota Malang Mr. Suhari.

Dalam melaksanakan kewajibannya, semua organ kekuasaan Negara Jawa Timur, Madura dan Republik Indonesia di Jawa Timur akan tunduk kepada Gubernur Militer dan semua komandan yang lain.

Dalam kapasitasnya sebagai Koordinator Keamanan, Sultan telah berkunjung ke Surabaya pada 8 Desember 1949 untuk melakukan diskusi dengan Pemerintah Jawa Timur dan Komandan angkatan bersenjata Belanda di sana. (*Antara*)

* Konferensi Ekonomi Inter-Indonesia hari Kamis telah memutuskan membentuk Dewan Ekonomi dan sekretariat tetap nonpemerintah namun diakui hukum. Mosi yang telah diterima mencakup:
  1. Mendirikan sekretariat tetap nonresmi namun diakui hukum dan dibantu oleh konsul-konsul jenderal, konsul-konsul dan subkonsul-subkonsul seluruh Indonesia, dengan tugas:
     a. Melaksanakan resolusi-resolusi;
     b. Membentuk dewan-dewan ekonomi regional;
     c. Menerima usul-usul regional;
     d. Menyiapkan pembentukan asosiasi perusahaan dan pedagang;
     e. Melakukan kontak dengan kaum buruh dan tani;
     f. Memberikan saran-saran kepada daerah-daerah;
     g. Menyelenggarakan kongres-kongres;
     h. Mengirimkan utusan kepada Pemerintah untuk membentuk Dewan Ekonomi Indonesia yang terdiri dari orang-orang swasta.
  2. a. Membentuk Dewan Ekonomi dengan calon formatur Mr. Rudjito;
     b. Dengan Sekretaris Jenderal Mr. Muljadi,
     Asisten Sekretaris Jenderal Mr. Ramelan;
     c. Dewan Ekonomi akan dibantu oleh sejumlah sekretaris, termasuk:
     Mr. Wahab untuk urusan perdagangan;
     Mr. Tedjosukmana untuk urusan pertanian;
     Mr. Achmad Sumadi untuk urusan perburuhan;
     Mr. Masihono untuk urusan industri. (*Antara*)

* Konferensi II Persatuan Pegawai Polisi (P3) Daerah Aceh dan Langkat dibuka hari ini dengan resepsi di Taman Ksatria Kutaraja (sekarang Banda Aceh), dihadiri oleh Wakil Perdana Menteri Sjafruddin Prawiranegara, Gubernur Militer Tgk.Muhd. Daud Beureueh, Komandan TNI Divisi X Letnan Kolonel Husin Jusuf, para pejabat sipil dan militer serta utusan badan-badan kepolisian seluruh Aceh dan Langkat.

Kepala Kepolisian Provinsi Sumatra Utara M. Insja mengatakan a.l. bahwa di samping menjaga keamanan, kita pun turut membangun RIS dengan tenaga, pikiran, dan pendidikan.

"Kita ini bukan polisi fasis, bukan polisi kolonial, tetapi Polisi Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Polisi kita harus menjadi pelindung rakyat dan si lemah, tempat si miskin meminta tolong," demikian Kepala Kepolisian.

Gubernur Militer memberikan beberapa nasihat sebagai pedoman bagi para anggota kepolisian. Dikatakannya, polisi kita harus menjadi cermin dan contoh bagi polisi-polisi lain yang akan memasuki RIS nanti. "Polisi ibarat saudara tua bagi masyarakat, dan harus memberikan teladan dengan sifat dan kelakuannya."

Wakil Perdana Menteri panjang lebar menguraikan tugas polisi yang lebih berat di masa RIS nanti dalam menegakkan keamanan dan ketertiban.

Tentang kritik terhadap Pemerintah dikatakannya, itu boleh, tetapi mesti *zakelijk* , jangan menghasut dan dengan cara membabi buta. Wakil Perdana Menteri yakin bahwa anggota kepolisian sanggup menghadapi masa depan, dengan semangat kemerdekaan. (TS309-310)

1949 DESEMBER 10.

* Sekitar 20 atau 25 anggota KNIP akan berbicara hari ini dan malam ini untuk meneruskan debat termin pertama selama dua hari mengenai persetujuan Den Haag yang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia akhir tahun ini.

  Dalam sidang tadi malam Djohan Sjahrusah (PSI) mengecam pernyataan Pemerintah yang menggambarkan penandatanganan persetujuan Den Haag sebagai awal kesejahteraan sosial "karena kedaulatan ada di tangan kita". Pembicara mengatakan bahwa kedaulatan itu hanya akan bersifat "teoretis", mengingat adanya peraturan-peraturan yang bersifat membatasi. Sjahrusah mengabaikan pernyataan Pemerintah bahwa konstitusi sementara Indonesia telah diresapi "pancasila", karena menurut pembicara, konstitusi sementara tidak menjamin realisasi ekonomi politik seperti ditetapkan dalam pasal 27 dan 33 Undang-undang Dasar Republik.

  Sjahrusah menambahkan, adanya Pengadilan Uni merupakan indikasi lain tentang adanya campur tangan Belanda yang membatasi kedaulatan. Ia

tegaskan bahwa ekonomi RIS jelas akan serupa dengan susunan ekonomi sebelum perang, yaitu dilanjutkannya politik "pengurasan" oleh modal asing. Ia ingatkan, kalau Pemerintah tidak memberikan dukungan penuh kepada kelompok buruh dan tani dalam organisasinya, mereka akan menghadapi "konsekuensi yang sangat buruk". Ia mendesak Pemerintah untuk meresapi konstitusi sementara dengan cita-cita rakyat "agar semangat juang mereka tidak patah".

Prawiro (Partai Buruh) mengatakan, ia tidak perlu menyatakan pro atau kontra persetujuan Den Haag sebelum Pemerintah menegaskan bahwa hak-hak demokrasi dan sosial dijamin di Indonesia merdeka yang baru.

Rekannya, Abidin, mengecam dipertahankannya investasi asing di Indonesia, karena keuntungan yang akan ditariknya dari negeri ini ternyata dua kali lipat dari pemasukan Negara.

Suhardi (Partai Kristen) menyatakan bahwa secara umum hasil Den Haag telah membawa negeri ini lebih dekat kepada cita-cita proklamasi kemerdekaan: "Walaupun agak mengecewakan, tapi segalanya akan tergantung pada kekuatan tak terpatahkan dari rakyat Indonesia sendiri." Mengenai politik ekonomi, pemimpin Partai Kristen itu mengusulkan agar Pemerintah Indonesia mendatang membentuk dewan ekonomi resmi terdiri dari para ahli untuk melayani struktur ekonomi yang sehat.

Sarpan (Nasionalis) mengeritik para pembicara sebelumnya yang mengatakan bahwa pasal 33 Undang-undang Dasar Republik telah diabaikan sepenuhnya. Ia menegaskan bahwa konstitusi sementara RIS berisi ketentuan bahwa kekuasaan dimanfaatkan untuk memajukan kesejateraan umum, perkembangan materil dan moril rakyat, jaminan sosial, untuk melawan pengangguran dsb. Ketentuan-ketentuan ini akan meniadakan diskriminasi rasial di dalam RIS, sebab sudah ditentukan bahwa setiap warga negara berhak atas perlakuan yang sama. (*Antara*)

* Delegasi Republik, beberapa *Local Joint Committees* (Komite Gabungan Lokal) dan lain-lain badan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah Indonesia-Belanda sekarang dibanjiri petisi dari rakyat bagian timur Jawa Barat yang menyatakan kesetiaannya kepada Pemerintah Republik dan meminta pembentukan kembali seluruh Jawa Barat sebagai Provinsi Republik, untuk mendukung usul yang baru-baru ini diajukan oleh anggota

parlemen Pasundan Oli Setiadi. Petisi itu memuat cap "Negara Republik Indonesia" dan ditandatangani oleh beberapa kepala daerah dan pemimpin penting. (*Antara*)

* RIS akan diundang menghadiri konferensi regional International Labor Organization (ILO) yang akan diselenggarakan bulan Januari tahun depan di Srilanka. Hal itu dinyatakan oleh Mr. Wilopo, Sekjen Kementerian Sosial dan Perburuhan Republik, sekembali dari Eropa kemarin. Wilopo di samping mengikuti Konferensi Meja Bundar, telah juga melakukan pembicaraan dengan Menteri Sosial Belanda dengan dihadiri oleh Ragength Rao, wakil ILO. Ia telah juga melakukan perjalanan keliling Jenewa di mana ia telah menyaksikan dari dekat situasi perburuhan di sana. Ia tinggal 10 hari di sana dan memberikan ceramah tentang serikat buruh Republik kepada ILO.

Dari Jenewa Wilopo mengunjungi New Delhi, Karachi, dan Kalkutta. Ia telah juga mempelajari situasi perburuhan di Belanda. Menjawab pertanyaan wartawan, Wilopo menyatakan bahwa urusan serikat buruh di Indonesia di masa datang akan mengikuti pola Eropa Barat dalam hal hak-hak perburuhan. Dalam menangani masalah perburuhan di Indonesia di masa depan, Wilopo mendukung struktur Pemerintah India. "Paling tidak," katanya, "Kementerian Sosial RIS akan memberikan perhatian yang luas kepada urusan perburuhan." (*Antara*)

* Pasukan pelopor Tentara Nasional Indonesia telah memasuki ibu kota Batavia pada jam 10.45 hari ini. Pasukan itu terdiri dari empat truk pejuang gerilya Republik dari Divisi Siliwangi yang terkenal, yang sebelumnya melawan Belanda di Jawa Barat. Kedatangan mereka tidak diduga-duga dan tidak diumumkan. Enam ribu pasukan tambahan diharapkan akan segera datang menyusul.

Pasukan TNI itu bermarkas di depan markas Tentara Belanda di pusat kota Batavia. Pasukan pelopor itu baik perlengkapannya dan mengenakan seragam hijau tropis dengan baret hitam. Mereka di bawah komando Letkol Taswin. Truk yang mereka kendarai ditulisi "Cianjur". Mereka mengibarkan bendera Merah-Putih. (*Antara*)

* Sultan Siak (Sumatra Timur) tiba di Jakarta kemarin dari Kotaraja, untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Yogyakarta. Sultan Siak telah mengasingkan diri di Aceh (wilayah di Sumatra yang dikuasai Republik) menyusul terjadinya aksi militer Belanda II. (*Antara*)

* Dalam rangka penyerahan kedaulatan oleh Kerajaan Belanda kepada Negara Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949 mendatang, Pemerintah Republik Indonesia mengambil beberapa langkah persiapan di bidang keamanan dan ketertiban.

  Sambil menunggu instruksi dari Pemerintah Pusat di Yogyakarta, Kolonel A.E. Kawilarang selaku Koordinator Keamanan Sumatra Utara melakukan pertemuan dengan para komandan batalion TNI Divisi X di Aceh

  Keputusan pertemuan: Kompi Letnan I Radja Sjahnan dipersiapkan memasuki Kota Medan untuk mengambil alih pengawalan dan penjagaan keamanan dari tangan pasukan Belanda dan pasukan pengawal Negara Sumatra Timur. Detasemen Polisi Militer di bawah Letnan I Hasanuddin juga akan memasuki Kota Medan untuk tugas keamanan dan ketertiban umum, di samping tugas militer. Sementara itu Batalion Artileri di bawah Kapten Nukum Sanany akan menduduki Sabang.

  Keputusan itu dikuatkan dengan Surat Perintah Komandan Tentara & *Territorium* Aceh. (TS310-311)

* Peleburan TNI Divisi X menjadi Tentera & Territorial Aceh dilakukan secara resmi dalam resepsi malam ini di Taman Ksatria Kutaraja (sekarang Banda Aceh), dihadiri oleh pembesar sipil dan militer, a.l. Gubernur Militer Tgk.Muhd. Daud Beureueh, Letnan Kolonel Husin Jusuf, dan Residen T.T. Mohd. Daudsjah.

  Dalam pidatonya Gubernur Militer dengan panjang lebar menguraikan sejarah berdirinya TNI Divisi X sejak bernama Angkatan Pemuda Indonesia (API), lalu Tentera Keamanan Rakyat/Tentera Keselamatan Rakyat (TKR), kemudian Tentera Republik Indonesia (TRI), dan akhirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI).

  "Tentara di derah ini terbentuk dari kalangan rakyat dan oleh rakyat. Karena itu seluruh warga tentara mesti bekerja sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat, menjaga keamanan dan ketentraman serta ketertiban dengan sempurna," demikian Gubernur Militer.

Letnan Kolonel Husin Jusuf mengatakan: “Senjata yang telah diserahkan oleh rakyat dengan sukarela adalah semata-mata untuk menjamin keamanan dan ketertiban harta benda rakyat dan negara. Maka senjata itu hendaknya digunakan dengan semestinya, agar rakyat puas dengan segala pengorbanannya. (TS311)

* Kiriman barang yang ketiga dari Filipina untuk Republik akan dimuat di Manila hari ini, dan diharapkan akan sampai di Tanjung Priok dalam seminggu, demikian berita hari ini. Kiriman seberat 2,5 ton ini terdiri atas peralatan untuk memperbaiki jalan dan membangun jembatan.

  Dengan datangnya kiriman kedua baru-baru ini, yang terdiri a.l. atas 141 peti pesawat radio, maka peralatan radio untuk lapangan terbang Maguwo di Yogyakarta akan terlengkapi. (*Antara*)

1949 DESEMBER 11.

* Perdana Menteri Mohammad Hatta menyampaikan jawaban Pemerintah sekitar hasil-hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) kepada sidang pleno Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). (*KU135*)
* PKI yang menentang persetujuan Den Haag mengumumkan lewat Politbironya bahwa diterimanya persetujuan itu oleh partai-partai lain dan KNIP agaknya akan mendatangkan “beban berat” bagi rakyat dan akan sangat menghambat kemajuan negeri ini. Karena itu, menurut pengumuman tersebut, PKI mengusulkan kepada rakyat Indonesia untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini:

  1. Persatuan nasional melawan imperialisme atau semiimperialisme;
  2. Ekonomi dipisahkan dari watak kolonialnya dengan:
     a. Mewujudkan susunan ekonomi sebagaimana disebutkan dalam pasal 33 dan 27 Undang-undang Dasar Republik;
     b. Meniadakan rahasia bank untuk memungkinkan pemerintah mengontrol keuntungan besar yang diperoleh modal besar, termasuk bank Belanda, Amerika dsb.;
     c. Membuat undang-undang yang membatasi kekuasaan trust-trust;
     d. Produksi besar-besaran untuk memerangi pengangguran, meringankan pajak rakyat, mendorong perdagangan;

e. Undang-undang agraria baru;

f. Kontrak kolektif untuk kaum buruh; undang-undang sosial;

g. Kebebasan berserikat untuk mengecek kekuasaan industri pertanian dan pertambangan;

3. Pemerintah demokratis dengan meniadakan pembatasan perwakilan daerah; demokratisasi seluruh sistem pemerintahan; hak-hak demokratis tanpa batasan (kebebasan pers, bersidang, berdemonstrasi; pemogokan, melawan propaganda kolonial); PKI harus bebas dari diskriminasi. Pembebasan segera tahanan politik, termasuk anggota Parlemen komunis.
4. Kesatuan-kesatuan PNI yang antikolonialis harus disatukan dengan tentara RIS; pertahanan harus didukung oleh tentara yang bebas dari ideologi kolonial dan oleh gerilya rakyat;
5. Kerja sama dengan bangsa-bangsa yang antiimperialis dan organisasi-organisasi asing lain. (*Antara*)

* Tujuh belas anggota KNIP yang sedang bersidang telah mengajukan usul untuk menghidupkan kembali hak-hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat secara lisan maupun tulisan, berdemonstrasi, bersidang dan berserikat di seluruh Indonesia. Dalam penjelasan atas usul-usul itu dinyatakan bahwa di daerah-daerah yang dikuasai Belanda hak-hak ini telah dibatasi oleh berlakunya keadaan darurat dan perang, sedang di wilayah Republik sendiri pelaksanaan dari hak-hak ini sebagian terganggu sejak terjadinya pemberontakan komunis di Madiun. (*Antara*)

* Tercapainya persetujuan Den Haag antara Indonesia dan Belanda a.l. adalah karena kemenangan kaum komunis di Tiongkok mengharuskan Amerika Serikat dan Inggris membangun garis pertahanan baru. Hal ini dikemukakan oleh angggota parlemen Republik dalam debat umum yang sekarang berlangsung mengenai persetujuan Den Haag yang menetapkan pembentukan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Sajuti Melik, nonpartai, menyatakan bahwa karena situasi itu juga undang-undang dasar sementara RIS menunjukkan berbagai kekurangan, seperti tiada hadirnya lima kode moral undang-undang dasar Republik. Ia katakan, tidak tampilnya ketentuan pasal 33 undang-undang dasar Republik

dalam undang-undang dasar sementara RIS adalah bukti bahwa kode moral itu hanya “kulit dan bukan isi”.

Berbicara tentang kemungkinan Perang Dunia III, Melik katakan bahwa jika perang demikian meletus, Indonesia yang tidak berpihak pada salah satu pihak pasti akan terseret dalam konflik tersebut. “Kalau Amerika yang menang, ia akan menguasai Indonesia, dan kalau Rusia yang menang, Indonesia akan dikuasai oleh URSS.”

Kembali pada persetujuan Den Haag, Melik katakan: “Kalau Republik menolak resolusi Den Haag, Indonesia akan dapat menentukan masa depannya sendiri.” Selanjutnya ia katakan, sesudah itu masalah Indonesia akan kembali masuk PBB.

Pembicara menenangkan mereka yang mungkin takut akan terjadinya “aksi polisionil” Belanda dengan mengatakan bahwa rakyat Indonesia siap untuk berjuang terus. Ia tambahkan bahwa keamanan pasti di Asia Tenggara yang didambakan oleh seluruh dunia merupakan titik yang menguntungkan dalam strategi politik Indonesia.

Melik mengakhiri dua jam pidatonya dengan mengatakan bahwa kemenangan Tiongkok komunis akan mempercepat kesadaran seluruh dunia mengenai perlunya segera mengakui kemerdekaan Indonesia “dalam arti yang sesungguhnya dan dengan segala isi yang diinginkan oleh rakyat”. (*Antara*)

* Kalau KNIP menolak persetujuan Den Haag, Republik bisa menghadapi risiko “didiskualifikasi” oleh bangsa-bangsa peserta Konferensi New Delhi, demikian juga oleh PBB, demikian Sutardjo Kartohadikusumo, ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik, kepada *Antara* hari ini.

Ia katakan, penerimaan oleh Majelis Rendah Parlemen Belanda kini meminta tanggung jawab sebesar-besarnya dari KNIP yang kini sedang bersidang, terutama ketika negara-negara yang tergabung dalam BFO sudah menyatakan penerimaannya.

Ia tambahkan, kalau dalam keadaan demikian terjadi konflik bersenjata ketiga, posisi Indonesia di mata dunia bisa tidak sebaik sebelumnya. Ia katakan, dalam keadaan demikian Republik bisa menempuh politik “mendambakan segalanya, tapi kehilangan segalanya”.

Ditanya pendapatnya tentang perdebatan selama sidang KNIP sekarang, ketua DPA itu mengatakan bahwa mayoritas pembicara "tidak membicarakan masalahnya" melainkan melakukan "propaganda partai". Dengan demikian "gambaran tentang hasil-hasil Konferensi Meja Bundar bisa kabur".

Sutardjo menyatakan keheranannya kenapa tak ada pembicara yang menyinggung "utang kehormatan" Belanda yang di masa lalu berjumlah 800 juta gulden dan tidak pernah dibantah oleh Belanda. Ia tak bisa lain daripada mendukung seorang pembicara yang khawatir akan diteruskannya sistem kolonial, bukan oleh orang kulit putih melainkan oleh orang kulit sawo matang sendiri, sebab menurut ketua Dewan, "sistem ekonomi yang berlaku sekarang kurang lebih mirip dengan sistem kolonial, karena kecenderungannya pada kepentingan kota-kota dan lapisan-lapisan atas masyarakat dan mengabaikan massa rakyat bawahan".

Sebagai orang yang secara pribadi mendukung persetujuan Den Haag, Sutardjo berpendapat bahwa resolusi Den Haag dapat menjadi batu loncatan untuk melanjutkan perjuangan mencapai cita-cita bersama, yang menurutnya akan tergantung dari hasil pemilihan umum mendatang sebagai penentu langkah-langkah dan tindakan-tindakan di masa depan.

Ia yakin bahwa nasionalisme yang sekarang sedang tumbuh di Indonesia tidak mungkin digagalkan oleh ketentuan-ketentuan sementara dalam Undang-undang Dasar RIS. Yang harus dihindari menurut Sutardjo adalah bahwa "bantuan asing apa pun tidak boleh mengambil bentuk pengaruh asing pada kita, untuk ini para pemimpin negara harus orang-orang yang jujur dan kebal terhadap suapan". Ia nyatakan selanjutnya bahwa kekuasaan *de jure* RIS menjamin kemerdekaan untuk mewujudkan kesatuan Asia. "Kita harus menyiapkan diri dari sekarang untuk menempa kekuatan yang menjadi sifat generasi muda menghadapi perkembangan negeri di masa depan," demikian Sutardjo. (*Antara*)

* *Eerste Kamer* (Majelis Tinggi) Belanda meratifikasi Persetujuan KMB (Konferensi Meja Bundar) dengan suara 74 pro dan 15 anti. (AT299)

1949 DESEMBER 12.

* Untuk pembangunan ekonominya Indonesia tidak hanya memerlukan kredit pemerintah, tapi juga penanaman modal asing swasta, yang tentu

saja akan masuk Indonesia jika hukum, ketertiban dan keamanan serta pemerintah yang stabil ada di Republik Indonesia yang baru. Hal ini dinyatakan oleh L.M. Methven, direktur Chartered Bank of India, Australia and China dalam wawancara dengan *Antara* hari ini. Methven sudah mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Mohammad Hatta, Direktur Bank Negara R.M. Gondosuwirjo, dan Komisaris Perdagangan Republik di Amerika Dr. Sumitro Djojohadikusumo, dan akan kembali ke Jakarta besok. Bankir itu mengatakan bahwa modal Inggris sangat tertarik kepada teh dan karet Indonesia. Ia tambahkan bahwa ada indikasi, perusahaan-perusahaan Inggris bersedia melakukan usaha gabungan dengan pebisnis Indonesia. (*Antara*)

* Panitia Persiapan Nasional (PPN) di Jakarta telah memutuskan mendirikan kantor penghubung untuk tujuan penerangan dengan nama Badan Koordinasi Penerangan PPN.

Kantor penghubung ini akan menyebarkan informasi kepada pers dan publik mengenai kemajuan dalam mempersiapkan penyerahan kedaulatan dan mengenai kontrole atas mesin pemerintah. Kantor ini sedang dipersiapkan oleh PPN dalam kerja sama dengan komite yang dibentuk untuk maksud ini oleh penguasa Belanda, dan akan berada di bawah kendali langsung Ketua dan Wakil Ketua PPN, Mr Moh. Rum dan Mr. Anak Agung Gde Agung. Beberapa ahli teknik di bidang publisitas telah ditugaskan untuk membantu. (*Antara*)

* Sebuah pesan kesetiaan, cinta dan kepercayaan kepada Bapa Suci telah dikirimkan hari Minggu kepada Paus di Roma oleh Konferensi Katolik yang dihadiri oleh sekitar 700 utusan dari seluruh Indonesia. Konferensi itu telah berakhir kemarin. Pesan itu menyatakan bahwa wakil-wakil komunitas Katolik dari seluruh Indonesia yang bertemu di Yogyakarta di bawah Mgr. Sugyopranoto telah membicarakan tuntutan misi Katolik sehubungan dengan perluasannya di bawah pemerintah Indonesia yang baru, dan memohon berkah Bapa Suci bagi tanah air Indonesia. (*Antara*)

* Menteri Kehakiman Republik Susanto Tirtoprodjo mengatakan dalam penjelasannya mengenai kebijakan Pemerintah sehubungan dengan pemberontakan komunis di Madiun bahwa Pemerintah Republik akan

menuntut mereka yang benar-benar bersalah telah melanggar hukum. Ia jelaskan bahwa waktu dan cara penuntutan tergantung pada faktor-faktor obyektif dan subyektif, artinya kepentingan negeri, keamanan umum dan sikap mereka yang terlibat dalam pemberontakan sekarang. (*Antara*)

1949 DESEMBER 13.

* Koordinator Keamanan Sultan Hamengku Buwono dari Yogya pagi ini terbang ke Medan. Dari sana akan bergabung Kolonel Hidajat dan Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Perdana Menteri Republik untuk Sumatra, dalam perjalanan ke Padang sore ini. Dari Padang rombongan akan meneruskan perjalanan ke Palembang dan diharapkan akan kembali ke Jakarta, dan apabila mungkin ke Yogyakarta hari ini juga.

  Dalam perjalanan ke Medan Sultan disertai Kolonel Nasution, Mayor Sastraprawira, Mr. Alibudiardjo, Mohammad Natsir, dan Letkol Dr. Subijono. Sebelum berangkat ke Sumatra, Sultan semalam bertemu dengan Mr. Fockema Andreae, Sekretaris Pertahanan Belanda, dihadiri oleh panglima tentara Belanda Letjen Buurman van Vreeden, dan Dr. J. Leimena serta Letkol Daan Jahja.

  Kemarin Koordinator Keamanan disertai Letkol Daan Jahja melakukan diskusi di Jakarta dengan Gubernur Hilman Djajadiningrat mengenai urusan pemerintahan dan keamanan. Sumber-sumber yang mengetahui mengatakan bahwa hasil-hasil pertemuan Sultan itu sama dengan hasil-hasil pertemuan sebelumnya di Bandung, Semarang dan Surabaya. (*Antara*)

* Pemungutan suara KNIP barangkali akan dilakukan sore ini sesudah Pemerintah memberikan jawaban atas debat termin kedua mengenai persetujuan Den Haag. KNIP kemarin memutuskan membuka termin kedua "terbatas" hari ini untuk anggota yang ingin memberikan reaksinya terhadap pernyataan Pemerintah kemarin.

  Setiap fraksi diijinkan mengajukan seorang pembicara dan nonpartai akan diijinkan berbicara lewat dua penentang dan dua pendukung persetujuan Den Haag. (*Antara*)

* Dewan Perkebunan Negara akan dibentuk, menurut pengumuman Kementerian Perekonomian Republik hari ini.

Dewan itu menurut rencana akan bertugas mengawasi pabrik-pabrik gula di wilayah Republik. (*Antara*)

* SOBSI bersama serikat-serikat buruh kecil lainnya telah memutuskan untuk meminta kepada wakil-wakil buruh di dalam KNIP untuk tidak memberikan suara mengenai persetujuan Den Haag. (*Antara*)

* Partai Islam "Masyumi" telah menyusun daftar para pemimpinnya yang akan duduk dalam pemerintah RIS mendatang, demikian diperoleh kabar di Yogyakarta hari ini. Para calon akan mencakup Mr. Mohammad Rum (untuk Menteri Luar Negeri) dan Mr. Sjafruddin Prawiranegara (untuk Menteri Keuangan). Para calon akan diusulkan untuk menjadi formatur kabinet RIS.

  Dalam daftar termuat juga nama H. Rasjidi (duta besar Republik untuk Mesir sekarang) dan Mr. Subardjo (kini pegawai tinggi Kementerian Luar Negeri Republik) sebagai calon-calon duta besar atau jabatan-jabatan lain dalam perwakilan RIS di luar negeri. (*Antara*)

* Kontak segera antara Pemerintah Republik dan Pemerintah Negara Sumatra Timur dan penyelenggaraan segera plebisit untuk menentukan status Asahan Selatan dan Labuhan Batu di bagian selatan Sumatra Timur akan diusulkan kepada Pemerintah Republik di Yogyakarta oleh tim investigasi beranggota 6 orang diketuai oleh Ki Hadjar Dewantara. Rombongan Dewantara kembali dari Medan kemarin, di mana ia telah bertemu dengan tiga orang dari Sumatra Timur, seorang tokoh resmi, dua lainnya tidak resmi. Ki Hadjar Dewantara menyatakan kepada pers setibanya di Jakarta bahwa walau Pemerintah Sumatra Timur tidak mengijinkan timnya meneruskan perjalanan ke wilayah yang disengketakan, ia anggap tugas tim telah terlaksana. Ia katakan, penguasa Sumatra Timur berkeberatan mengadakan plebisit lebih dini dari setahun sesudah terbentuknya RIS, dan ia merasa optimis bahwa konflik dapat diselesaikan dengan baik sesudah RIS menjadi kenyataan. Ditanya tentang kesan-kesannya mengenai Sumatra Timur, Ki Hadjar Dewantara mengatakan bahwa menurutnya administrasi di bagian Sumatra itu masih bau kolonialisme. "Namun rakyat cukup loyal dan bersemangat."

  Perlu diingat bahwa Konferensi Den Haag baru-baru ini telah menetapkan wilayah Asahan Selatan dan Labuhan Batu de jure tetap di bawah Republik,

tetapi *de facto* di bawah Negara Sumatra Timur. Status finalnya akan dibicarakan antara Republik dan Sumatra Timur. (*Antara*)

* Sesuai dengan perintah yang diberikan kepada Komandan Batalion Kala Hitam, Divisi Siliwangi, Mayor Kemal Idris, maka Letnan II Marzuki Sulaiman dengan 2 peleton pasukan Siliwangi dari Cianjur diberangkatkan ke Jakarta dengan 5 buah truk pinjaman dari perkebunan, untuk diperbantukan kepada Letnan Kolonel R. Taswin Natadiningrat yang telah mendapat tugas sebagai Komandan Komando Basis Jakarta.

  Semula bendera Merah-Putih besar yang dibawa oleh pasukan akan tetap digulung, sesuai petunjuk komandan batalion sebelum berangkat, agar tidak menimbulkan reaksi yang tak diinginkan dari pihak tentara Belanda yang mungkin belum mengetahui penugasan pasukan TNI tersebut.

  Namun setelah 15 menit berjalan, ternyata anak buah Letnan Marzuki tanpa sepengetahuan komandannya yang duduk di dekat pengemudi membuka dan mengibarkan bendera tersebut.

  Pengibaran bendera Merah-Putih itu menjadi tontonan orang di sepanjang jalan yang dilalui, dan rakyat secara spontan menyambut meriah dengan pekik, "Merdeka, merdeka!" (SDA110)

* Pejabat Belanda sedang menyelidiki laporan bahwa sebuah pesawat Dakota hitam yang misterius telah menjatuhkan silinder-silinder berat yang diperkirakan berisi senjata untuk gerombolan teroris di pegunungan dekat Ciamis, Jawa Barat, minggu lalu. Kantor keamanan di Sumatra dan Jawa telah beberapa waktu lamanya sibuk mengecek laporan tentang penyelundupan senjata lewat udara, kemungkinan dari Siam atau Filipina. Ada desas-desus bahwa orang-orang telah diturunkan dengan parasut di Jawa dan Sumatra, dan bahwa kaum teroris di Jawa Barat dilaporkan telah menerima senjata baru, termasuk senapan-senapan otomatis Amerika, bulan lalu. (*Antara*)

* Wakil Sovyet di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Semyon Tsarapkin, menganggap Persetujuan KMB (Konferensi Meja Bundar) sebagai tontonan yang memalukan, karena belenggu kolonial kembali dikenakan pada rakyat Indonesia dengan dukungan klik Sukarno-Hatta. (...)

* Konferensi Persatuan Pegawai Polisi (P3) Daerah Aceh dan Langkat yang dibuka pada 10 Desember 1949 mengambil keputusan:
    1. Reorganisasi Persatuan Pegawai Polisi Daerah Aceh dan Langkat.
    2. Menuntut kepada Pemerintah supaya Kepolisian NRI menjadi inti Kepolisian Republik Indonesia Serikat.
    3. Menuntut kepada Pemerintah supaya mengadakan Kementerian Kepolisian dan menolak dimasukkan ke dalam Kementerian lain.
    5. Memberi keluasan kepada pegawai polisi yang terus-menerus berjuang dalam Kepolisian RI melanjutkan pendidikan kepolisian sehingga mencapai mutu kepolisian yang ditetapkan.
    6. Mengadakan perpustakaan yang menjadi bagian dari Kutubkhanah Iskandar Muda. (TS313)

* Dr. H.D. Hirschfeld, Komisaris Belanda untuk Program Rehabilitasi Eropa, akan menjadi Komisaris Tinggi Belanda pertama untuk RIS sesudah penyerahan kedaulatan, demikian sumber-sumber yang mengetahui tadi malam.

  Dapat dimengerti bahwa Hirschfeld akan mengisi jabatan ini "hanya dalam jangka waktu yang relatif singkat" karena ia tak dapat lama meninggalkan jabatannya sekarang. (*Antara*)

1949 Desember 14.

* Di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta, diselenggarakan Permusyawaratan Federal.

  Hadir wakil-wakil pemerintah Republik Indonesia (RI) dan pemerintah negara-negara bagian yang akan menjadi bagian Republik Indonesia Serikat (RIS), juga para anggota Komie Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masing-masing negara bagian.

  Dalam permusyawaratan tersebut dibicarakan dan kemudian disetujui naskah Konstitusi RIS, yang sebelumnya sudah disetujui oleh delegasi RI dan wakil-wakil daerah di Scheveningen, Negeri Belanda, selama berlangsungnya Konferensi Meja Bundar (KMB).

  Mr. Susanto Tirtoprodjo membubuhkan tanda tangannya atas nama RI selaku negara bagian sementara RIS. (*KU135; LUxxii; LU t.h.*; S6 71)

* Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) di Yogyakarta meratifikasi Persetujuan KMB (Konferensi Meja Bundar) dengan suara 226 pro, 62 anti, dan 31 blanko. Perdebatan sebelumnya cukup hebat, tetapi akhirnya jawaban-jawaban dan keterangan Perdana Menteri Mohammad Hatta dapat memuaskan para anggota. (AT299)

Catatan: Seminggu kemudian (21 Desember 1949) Parlemen Belanda meratifikasinya juga. (*PSPB2 39*)

Di bawah ini daftar suara yang diberikan kepada Persetujuan KMB:

	Pro	Kontra
Partai Sosialis	0	5
Partai Buruh Indonesia (PBI)	3	11
Tani	3	12
Kalimantan	7	0
Anggota non partai	32	10
Wakil-wakil buruh	8	1
Sumatra	27	9
Sulawesi	7	2
Partai Katolik Indonesia (PKRI)	10	0
Sunda Kecil	5	0
Partai Komunis Indonesia (PKI)	0	6
Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	8	0
Partai Nasional Indonesia (PNI)	42	0
Masyumi	49	0
Kelompok Arab	2	0
Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII)	6	0
Kelompok Tionghoa	1	1
Partai Murba	0	4
Maluku	6	1
	226	62

(*Antara*)

* Kebanyakan dari 27 anggota KNIP yang berbicara kemarin mengecam Pemerintah atau menentang persetujuan Den Haag, menurut laporan dari Yogyakarta sampai jam 22.00.

  Di antara pembicara oposisi yang menonjol adalah A.J. Patty dari Partai Kemerdekaan Irian, Danuhusodo dari Buruh, Sadjarwo dari Serikat Tani, Sukarni dari Partai Murba, Subadio dari Partai Sosialis Indonesia, Arudji Kartawinata dari PSII.

  Pemecahan masalah Irian yang tak memuaskan, kecenderungan liberal dalam sistem ekonomi RIS, program Pemerintah yang tak jelas, keberpihakan Indonesia pada salah satu blok dunia merupakan topik-topik untuk mengecam kebijakan Pemerintah Republik atau persetujuan Den Haag.

  Dua anggota nonpartai menyatakan juga ketidakpuasannya terhadap perkembangan keadaan. Hanya juru bicara Masyumi yang mendukung Pemerintah dan hasil konferensi di Den Haag tanpa melancarkan kritik terhadap Pemerintah atau kebijakannya. (*Antara*)

* Panitia Persiapan Nasional mengeluarkan pengumuman yang mendesak mereka yang bertanggungjawab atas Keperluan Umum dan Komunikasi, tidak pandang ras dan kebangsaan, agar melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh selama dua hari libur yang disetujui untuk penyerahan kedaulatan, dan menjaga agar "dinas-dinas penting itu tetap berjalan". (*Antara*)

* Mosi Sajuti Melik dalam sidang pleno KNIP tadi malam untuk mengamandemen Dekrit No. 9 sehubungan dengan masalah kuorum, telah ditolak dengan suara 233 lawan 77. Dekrit No. 9 mengubah kuorum mayoritas 2/3 menjadi mayoritas ½ + 1 dalam sidang ke-6 darurat KNIP.

  Mosi Sajuti Melik untuk mengijinkan anggota tidak memberikan suara dan untuk melakukan pemungutan suara secara rahasia juga ditolak, dengan suara 231 lawan 79. (*Antara*)

* Divisi Siliwangi yang tercatat telah berhasil memadamkan pemberontakan komunis di Madiun berencana memperingati *long march*-nya pada tanggal 19 Desember 1949. *Long march* adalah perjalanan kembali ke Jawa Barat yang harus mereka tinggalkan sesudah ditandatanganinya persetujuan

Renville, dari Jawa Tengah. Di Jawa Tengah mereka telah menyelesaikan operasi terhadap sisa-sisa pemberontak komunis, kemudian melancarkan perang gerilya melawan Belanda yang menyerang Yogyakarta.

Perayaan itu akan dilakukan di Taringgul, ibu kota wilayah yang dikuasai Republik di Jakarta. Komandan Divisi Kol. Sadikin yang memimpin *long march* akan hadir dalam perayaan tersebut. (*Antara*)

* Tiga perhimpunan guru, Serikat Guru Indonesia, Persatuan Guru Indonesia, dan Persatuan Guru Republik Indonesia, pada tanggal 6 Desember telah menerima resolusi untuk bergabung menjadi Persatuan Guru Indonesia.

  Penggabungan itu tidak hanya beralasan ekonomi tapi juga politik. Di samping program kerja yang biasa mengenai kenaikan upah, jaminan sosial, hak-hak buruh dll., perhimpunan yang baru ini telah menetapkan tujuan dasar:

  1. Mencapai keadilan sosial yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang pantas bagi seorang manusia;
  2. Menolak setiap bentuk kolonialisme dan menjunjung tinggi demokrasi di bidang ekonomi dan sosial;
  3. Mewujudkan struktur ekonomi atas dasar koperasi. (*Antara*)

* Dinas *Penerangan Tentara* Belanda mengumumkan bahwa pasukan Belanda di Keresidenan Bengkulu (Sumatra) telah menyerahkan tanggung jawab menjaga hukum dan ketertiban di daerah itu kepada TNI pada 12 Desember.

  Sementara itu sumber-sumber Republik menyatakan bahwa Kabupaten Serang (Jawa Barat) akan dikembalikan kepada Republik pada 17 Desember. Sumber itu mengungkapkan bahwa dengan kembalinya Serang, maka seluruh wilayah Banten akan berada di bawah yurisdiksi Republik. (*Antara*)

* Ratu Juliana dari Belanda akan menunjuk seorang gubernur untuk mengelola New Guinea Belanda sampai 31 Desember 1950, sesuai dengan rancangan undang-undang yang diajukan kepada Parlemen hari ini.

Rencana undang-undang itu menetapkan bahwa pemerintahan di New Guinea tetap berjalan setahun lagi sesudah penyerahan kedaulatan kepada Indonesia. (*Antara*)

1949 DESEMBER 15.

* Dalam pidato radio tadi malam yang ditujukan terutama kepada kelompok-kelompok non-Indonesia di Indonesia, Presiden Sukarno menyatakan bahwa RIS merupakan negara konstitusional yang akan menjamin adanya keamanan hukum bagi penduduk negeri ini.

Berbicara kepada kaum Indo ia mendorong mereka untuk bersikap tenang karena konstitusi RIS akan menjamin perlindungan kepada golongan minoritas.

Kepada orang Belanda, Presiden Sukarno menjelaskan bahwa mereka yang mengambil kewarganegaraan Indonesia akan mendapat hak-hak dan kewajiban yang sama dengan orang Indonesia asli. Ia katakan bahwa mereka yang tidak memilih mengambil kebangsaan Indonesia akan ditunjuk sebagai penasihat teknik, walau tidak diizinkan menduduki jabatan politik dan tidak punya hak memilih dan dipilih dsb.

Ia katakan bahwa orang sipil yang bekerja pada pemerintahan prafederal Indonesia akan diambil alih oleh RIS. Para pejabat berkebangsaan Belanda akan mendapat jaminan dua tahun dalam status hukumnya.

Presiden mengatakan bahwa sejalan dengan manifesto politik Republik tahun 1945, semua perusahaan swasta dan perkebunan akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, sebaliknya pemilik perusahaan dan perkebunan harus mencurahkan perhatian kepada kepentingan buruh, tani, dan penduduk. Ia katakan bahwa salah satu tujuan perusahaan-perusahaan itu haruslah melatih orang Indonesia agar dalam batas waktu tertentu sebagian besar personilnya mencakup orang Indonesia. Ia katakan bahwa barangkali tidak akan ada pengambilalihan, nasionalisasi dan tindakan lain seperti itu, tapi tindakan-tindakan demikian akan dilakukan sesuai dengan kebiasaan hukum.

Presiden Sukarno menekankan bahwa ia tidak pernah membenci orang Belanda. Yang dia benci adalah sistem kolonialisme Belanda dan imperialisme Belanda.

Tentang keamanan Presiden Sukarno menyatakan keyakinannya bahwa

kaum patriot Indonesia yang kini berdinas pada angkatan bersenjata dan kepolisian akan dapat menjaga hukum dan ketertiban di seluruh Indonesia agar semua kelompok, semua golongan, dan semua anggota masyarakat dapat melakukan pekerjaan masing-masing tanpa rasa takut. Ia katakan bahwa TNI punya kewajiban melindungi rakyat dan bukan mengejar-ngejar sesuatu kelompok atau komunitas.

Orang Indonesia yang kini bekerja pada angkatan bersenjata Belanda oleh Presiden Sukarno didorong untuk mengatasi kesulitan psikologisnya dan membuang rasa ragu dan rasa curiga. Ia ingatkan mereka akan kebangsaan dan kewajiban mereka terhadap negeri, rakyat dan tanah airnya, dan bertindak sebagai orang Indonesia sejati, apakah mereka bergabung dengan angkatan bersenjata RIS atau tidak.

Akhirnya Presiden Sukarno mengatakan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia telah mencapai tahap ketika perjuangan itu bukan perjuangan untuk membalas dendam atas kesalahan-kesalahan dan tindakan-tindakan permusuhan di masa lalu, tetapi perjuangan membimbing mereka yang memerlukan bimbingan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. (*Antara*)

* Hari terakhir sidang pleno Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang dibuka tanggal 7 Desember 1949 untuk menentukan sikap terhadap hasil-hasil Konferensi Meja Bundar (KMB).

Ternyata Persetujuan KMB diterima dengan suara 236 pro lawan 62 kontra. (*KU135; LU t.h.*)

* Tajuk rencana harian Yogya *Kedaulatan Rakyat* hari ini menyatakan bahwa dengan diterimanya hasil-hasil Den Haag oleh KNIP, maka panggung kegiatan politik akan berpusat di Jakarta. Namun ini tidak berarti bahwa Yogyakarta akan kehilangan peranannya sebagai kota yang mengilhami.

Dikatakannya, Yogyakarta harus tetap memainkan peranan vital di negara RIS dan tetap menjadi tenaga pendorong dalam memberikan arti kepada kemerdekaan yang telah diperoleh. Didesaknya agar para pemimpin melakukan pengelompokan yang bijak, siapa akan menduduki jabatan dalam negara RIS, dan siapa akan tetap di Yogyakarta.

Dikatakannya bahwa Yogyakarta harus menjadi tenaga pengendali apabila RIS mendatang menyeleweng dari garis yang sejalan dengan aspirasi nasional rakyat Indonesia. (*Antara*)

* KNIP hari ini telah memilih Prawoto Mangunsasmito dari Masyumi sebagai wakil ketua KNIP dengan suara 168 lawan 119, mengalahkan calon lain Arudji Kartawinata. Pemilihan wakil ketua KNIP yang sampai sekarang tidak ada itu dianggap perlu untuk mengantisipasi penggantian Presiden Sukarno apabila Presiden Sukarno terpilih menjadi presiden RIS.

  Calon pejabat presiden Republik, menurut undang-undang, adalah ketua KNIP. Apabila ketua KNIP menolak, maka wakil ketua harus menggantikannya.

  Badan pembentuk undang-undang Republik ini tadi malam memperdebatkan pengajuan calon-calon yang akan duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat RIS. (*Antara*)

* Pemilihan Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan calon tunggal Ir. Sukarno. Ir. Sukarno terpilih esok harinya, 16 Desember 1949. (S6 71)

* Sekitar 500 anggota KNIL dari pangkat kapten sampai prajurit telah menghadiri malam sosial tadi malam di gedung Delegasi Republik, di mana mereka menjadi tamu para perwira dan prajurit Republik. Pertemuan itu diprakarsai oleh panitia khusus yang diketuai oleh Mr. Tangkilisan dari Republik. Hadir juga dalam acara itu Dr. J. Leimena, ketua subkomite urusan militer Panitia Persiapan Nasional, dan Arnold Mononutu, anggota Parlemen Indonesia Timur, demikian juga beberapa perwira Belanda dari Dinas Kontak Tentara Belanda.

  Pertemuan itu dianggap sebagai langkah pertama untuk meniadakan halangan psikologis yang memisahkan kedua organisasi sehubungan dengan perjuangan politik yang melibatkan Indonesia dan Belanda dalam tiga tahun terakhir, dan untuk melancarkan kerja sama dalam mempertahankan negeri ini di masa datang, di mana kedua organisasi bersenjata akan disatukan. (*Antara*)

* Panitia Persiapan Nasional menyatakan dalam sebuah komunike bahwa kemarin Panitia sudah membicarakan masalah pembebasan tawanan politik dan tawanan perang. Menurut komunike tersebut, Pemerintah Sementara sudah menyampaikan kepada Panitia Persiapan Nasional bahwa sesudah perintah penghentian tembak-menembak, penguasa Belanda telah membebaskan seluruhnya 8.777 tawanan politik dan tawanan perang di Indonesia, dan bahwa sejumlah 1.574 lainnya masih ditahan. Disebutkan juga, 1.300 tawanan akan dibebaskan minggu depan, sedangkan 3.194 orang yang ditahan dengan tuduhan kriminal akan diberi amnesti.

  Komunike menyebutkan selanjutnya bahwa Panitia Persiapan Nasional juga membicarakan masalah upacara dan prosedur lain yang berhubungan dengan acara penyerahan kedaulatan. (*Antara*)

* Resolusi dan pernyataan setia kepada Republik Indonesia telah diterima dari wilayah-wilayah di luar Republik. Pernyataan setia telah diterima dari penduduk Cipatat (kabupaten Bandung), penduduk Asahan Selatan (Sumatra), para pejabat Dinas Penerangan Pasundan, 900 pemimpin Madura, para pejabat Departemen Sosial Cirebon, para kepala desa dan pemimpin rakyat Padalarang (Jawa Barat), semua personil kereta api wilayah Cilacap/Kroya/Prupuk/Wonosobo/Banjarsari/Probolinggo dan berbagai tempat lain.

  Sementara itu sebuah laporan dari Probolinggo menyatakan bahwa rapat terakhir Dewan Kebupaten Probolinggo telah mengambil resolusi untuk meminta dibubarkannya Negara Jawa Timur. (*Antara*)

* Sidang ke-6 KNIP berakhir hari ini sesudah memilih calon-calon anggota Senat RIS. Calon-calon itu adalah Mr. Sumanang, Ki Hadjar Dewantoro dan Prof. Johannes untuk Jawa, dan Mr. Teuku Hasan, Mr. Mohammad Rasjid, dan Mr. Jusuf untuk Sumatra. (*Antara*)

* Dua mosi penting telah diterima secara bulat oleh sidang pleno KNIP hari ini.

  Mosi pertama yang diajukan oleh Arudji Kartawinata dari PSII menyerukan dicabutnya pembatasan-pembatasan atas hak demokratis rakyat di

seluruh Indonesia, terutama pembatasan hak menyatakan pendapat secara lisan maupun tulisan, hak untuk berdemonstrasi dan hak untuk bersidang dan membentuk perkumpulan.

Mosi kedua yang diajukan oleh Djawoto, Diah dan Sumanang (ketiganya wartawan) mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah-langkah untuk:

1. Melindungi pers nasional dengan memberikan kepadanya fasilitas yang diperlukannya dan berkonsultasi dengannya dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan pers nasional;
2. Mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk mengakui kantor berita *Antara* sebagai lembaga nasional yang harus diberi fasilitas dan perlindungan yang diperlukannya;
3. Mendesak kepada Pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah agar para wartawan yang masih ditahan di berbagai tempat di Indonesia dibebaskan. (*Antara*)

* Para pejabat tinggi Dinas Pos dan Telegraf Republik menyatakan kepada *Antara* bahwa sampai kini belum ada kepastian tentang nasib Suharto, kepala Dinas Pos dan Telegraf Republik yang ditahan oleh Belanda pada 17 Januari 1949.

Para pejabat mengatakan bahwa beberapa bulan yang lalu Belanda mengumumkan bahwa Suharto telah melompat dari jip yang mengangkutnya, dan sejak itu tidak diketahui jejaknya. Para pejabat mengatakan, mereka meragukan pengumuman Belanda itu. (*Antara*)

1949 DESEMBER 16.

* Serombongan wakil negara-negara anggota RIS yang akan ikut memilih Presiden RIS tanggal 17 dan 18 Desember kemarin telah tiba di Yogyakarta. Mereka adalah Anak Agung Gde Agung dari Indonesia Timur, Radja Kaliamsjah Sinaga dari Sumatra Timur, Mr. Suparmo dari Madura dan Mr, Kosasih dari Pasundan. Rombongan lain diharapkan datang hari ini.

Sebuah resepsi dijadwalkan akan diadakan di gedung Kepatihan malam ini untuk menghormat tamu-tamu yang datang. (*Antara*)

* Presiden Republik Indonesia Sukarno secara bulat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia Serikat (RIS) oleh Panitia Pemilihan Presiden

RIS, termasuk para anggota Panitia Persiapan Nasional dan para utusan ke-16 negara anggota, dalam sidangnya di gedung Kepatihan, Yogyakarta, sore tadi.

Pemilihan itu dilakukan dengan pintu tertutup sesudah pidato pembukaan ketuanya Mr. Mohammad Rum yang menyebutkan beratnya tanggung jawab Panitia dalam memilih seorang Presiden yang harus menjadi kekuatan pengikat persatuan nasional. Sidang berlangsung hanya 40 menit. Jam 18.00 tepat ketua Panitia Pemilihan Presiden RIS merangkap ketua Panitia Persiapan Nasional (PPN) Mr. Mohammad Rum, dan wakil ketua PPN Anak Agung Gde Agung menyerahkan keputusan Panitia itu kepada Presiden Sukarno. Sesudah membaca surat tersebut Presiden Sukarno menyatakan kepada Mr.Rum bahwa ia tidak dapat mengatakan apakah bisa menerima jabatan Presiden RIS. Ia katakan bahwa ia harus berkonsultasi dulu dengan Badan Pekerja KNIP yang akan segera ia beritahu tentang keputusan Panitia Pemilihan itu. Ia katakan juga bahwa nasihat Badan Pekerja akan memungkinkannya memberikan jawaban positif.

Badan Pekerja dijadwalkan akan bersidang pada jam 21.45 malam ini untuk membicarakan pemilihan Sukarno sebagai presiden RIS, dan Panitia Pemilihan pada jam 22.30 untuk membicarakan jawaban Sukarno. Keputusan terakhir akan diumumkan pada jam 23.00 malam ini.

Dapat dicatat bahwa Panitia hanya punya seorang calon untuk jabatan Presiden RIS, yaitu Sukarno. (*Antara*)

* Dalam sidang Dewan Pemilih, Ir. Sukarno terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) yang pertama oleh wakil-wakil negara bagian yang bersidang di Kepatihan, Yogyakarta.

Pasal 69 (2) Konstitusi RIS tahun 1949 menyatakan:

"Presiden dipilih oleh orang-orang yang dikuasakan oleh pemerintah daerah-daerah bagian (negara-negara bagian). Dalam memilih Presiden orang-orang yang dikuasakan itu berusaha mencapai kata sepakat." (*KU135; LUxxii; LU t.h.;* S6 71; *Kompas*, 13 Juli 1998)

* Koordinator Keamanan Negara, Letnan Jenderal Hamengkubuwono IX, mengeluarkan Surat Keputusan No. PPN/KK/1 yang membuat pengangkatan perwira-perwira sbb.:

1. Letnan Kolonel Daan Jahja sebagai Gubernur Militer Jakarta Raya dan Wakil Koordinator Keamanan Negara untuk Jakarta Raya;
2. Letnan Kolonel R. Taswin Natadiningrat sebagai Komandan Komando Basis Jakarta dibawahkan pada Gubernur Militer Jakarta Raya;
3. Mayor Kemal Idris sebagai Komandan Brigade di Jakarta, dibawahkan pada Gubernur Militer;
4. Mayor Sudigdo sebagai Komandan Polisi Militer untuk Jakarta Raya, dibawahkan pada Gubernur Militer. (*SDA111*)

* Indo Nationale Partij hari ini mengirim ucapan selamat kepada Presiden Sukarno yang telah terpilih menjadi Presiden RIS yang pertama. Ucapan selamat juga menyatakan keyakinan partai tersebut atas kebijaksanaan Presiden dalam memimpin Indonesia menuju keamanan dan keadilan sosial untuk keuntungan semua kelompok ras di Indonesia. (*Antara*, 16, 17 Desember 1949)

* Persatuan Pegawai Pemerintah dan Lembaga Swasta seluruh Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, pada 12 Desember yang lalu mengambil resolusi untuk mendesak Parlemen Jawa Timur agar mengembalikan Jawa Timur kepada Republik Indonesia pada tanggal penyerahan kedaulatan. Mosi itu menyatakan bahwa pembentukan negara Jawa Timur bertentangan dengan kehendak rakyat Jawa Timur, dan lebih dari itu hanya menjadi beban penduduk. Resolusi itu ditandatangani oleh 1.158 wakil 86 dinas pemerintah dan lembaga swasta.

Sementara itu penduduk Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, telah mengirimkan resolusi kepada Presiden Republik, KNIP, Gubernur dan Parlemen Pasundan serta berbagai organ lain berisi permintaan untuk membubarkan negara Pasundan dan untuk menggabungkannya sebagai Provinsi Republik Indonesia. Resolusi itu menyebutkan bahwa Pasundan karena tak punya tentara tidak dapat memberikan keamanan kepada penduduk, dan hukum serta ketertiban di Kabupaten Indramayu hanya dapat ditegakkan oleh pasukan TNI. (*Antara*)

* Seluruh struktur pemerintahan menghentikan pekerjaannya hari ini sebagai protes karena masuknya TNI ke kota Cirebon tertunda dari waktu yang dijadwalkan semula. Diketahui bahwa dilihat dari sudut pandang

penguasa militer Belanda, masuknya TNI itu harus berlangsung secara tidak menyolok, untuk menghindari terjadinya insiden. Diperkirakan 50.000 orang kemarin berkumpul di lapangan setempat, dan mengambil resolusi untuk memprotes penguasa Belanda. Orang-orang itu telah berkumpul di sana sejak kemarin pagi sambil membawa bendera Merah-Putih menantikan masuknya pasukan TNI. Namun penguasa Belanda menganggap penerimaan seperti itu tidak diinginkan. Komandan TNI setempat sudah membicarakan masalah ini dengan penguasa militer Belanda, namun tanpa hasil. (*Antara*)

* Delegasi Departemen Luar Negeri Republik ke Negeri Belanda di bawah Mr. Icksan, Sekretaris Jenderal Departemen, tiba di Den Haag kemarin. Delegasi ini akan mempelajari cara-cara kerja Kementerian Luar Negeri Belanda.

  Mr. Icksan yang direncanakan akan tinggal 3 minggu di Negeri Belanda, mengatakan bahwa dibutuhkan waktu 3 bulan bagi delegasinya untuk mempelajari pekerjaan rutin Kementerian Luar Negeri Belanda. (*Antara*)

1949 DESEMBER 17.

* Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) secara resmi dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung Mr.Dr. Kusumaatmadja didampingi oleh penghulu dan saksi, bertempat di bangsal Siti Hinggil, Yogyakarta.

  Untuk itu Presiden mengucapkan sumpah yang bunyinya a.l. sbb.:

  "Saya akan melindungi dan mempertahankan kebebasan-kebebasan dan hak-hak umum dan khusus sekalian penghuni Negara," dan "saya akan mengabdi dengan setia kepada Nusa, Bangsa, dan Negara."

  Setelah itu Presiden RIS mengucapkan pidato panjang lebar kepada rakyat Indonesia. Ia mengingatkan rakyat Indonesia akan para korban perjuangan dalam menegakkan kemerdekaan, kemudian mengatakan a.l.:

  "Alangkah baiknya jikalau di kelak kemudian hari rakyat Indonesia dapat memilih Presidennya dengan cara yang lebih langsung dengan cara-cara pemilihan rakyat. Lebih dari 30 tahun saya ikut bercita-cita kerakyatan dan nasional. Oleh karena itu, lebih sesuai dengan jiwa saya, jikalau pemilihan Presidn itu dijalankan oleh rakyat semuanya, dengan cara langsung, atau setidak-tidaknya oleh satu Majelis besar, pilihan rakyat langsung."

"Saya ini adalah abdi daripada rakyat, bukan tuan daripada rakyat. Maka saya tadi pun suka mengucapkan kalimat di dalam sumpah yang berbunyi bahwa saya akan setia mengabdi kepada nusa dan bangsa, dan negara. Saya adalah hamba rakyat. Di dalam fatsal 34 daripada Undang-Undang Dasar RIS ada tertulis dengan tegas, bahwa kemauan rakyat, kehendak rakyat, menjadi dasar mutlak daripada pemerintahan ....!!"

Selesai pelantikan diadakan defile Tentara Nasional Indonesia (TNI) di depan Presiden RIS yang pertama. Diingatkan kepada hadirin—wakil-wakil rakyat seluruh Indonesia—bahwa segala sesuatu yang tercapai hingga kini sebagiannya adalah hasil dari perjuangan dan pengorbanan tentara. (*KU135; LU t.h.; Antara; Kompas*, 13 Juli 1998; *lj*. 19 Desember 1949)

* Republik Indonesia akan meneruskan program pembangunan Hatta, demikian dinyatakan oleh ketua KNIP Assaat yang secara otomatis akan menjadi penjabat Presiden ketika Sukarno dan Hatta meninggalkan Yogyakarta untuk menduduki jabatan mereka yang baru di RIS.

  Assaat menyatakan bahwa sebagai pejabat Presiden ia menginginkan Kabinet Nasional perlementer yang diwakili oleh semua partai, dan ia ingin menunjuk seorang formatur kabinet yang dapat membentuk kabinet seperti itu. Ia katakan bahwa kabinet presidensiil sekarang ini tidak lagi diperlukan. Selanjutnya ia katakan bahwa di samping pembangunan, demokratisasi negeri ini akan merupakan salah satu masalah vital yang akan ditangani oleh Kabinet Baru.

  Akhirnya ia menyatakan perlunya mereorganisasi Departemen Ekonomi yang sekarang menjadi tiga departemen terpisah, yaitu Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan,dan Departemen Pertanian. (*Antara*)

* Koordinator Keamanan Sultan Hamengku Buwono menyampaikan kepada *Antara* hari ini bahwa langkah-langkah persiapan menyangkut tanggung jawab menjaga hukum dan ketertiban di wilayah yang akan ditinggalkan pasukan Belanda sudah mendekati penyelesaiannya. Sultan mengatakan bahwa TNI cukup kuat untuk menjamin keamanan di seluruh Indonesia. Ia katakan, di tempat-tempat di mana tidak ada TNI, tugas tersebut akan diserahkan kepada unit-unit kepolisian Republik.

Ditanya apakah pasukan Belanda akan diminta membantu apabila terjadi kekacauan, Sultan menyatakan bahwa pasukan Belanda tak akan diminta mencampuri urusan dalam negeri ini. Mengenai Darul Islam yang mungkin menimbulkan kekacauan, Sultan mengatakan yakin masalah Darul Islam akan dapat dipecahkan secara memuaskan.

Akhirnya Sultan menyatakan bahwa pasukan TNI akan dikirim selekas mungkin ke Indonesia Timur. (*Antara*)

* Atas nama Presiden Republik Indonesia, Wakil Perdana Menteri menetapkan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM Tahun 1949 tentang Pembentukan Provinsi Aceh mulai 1 Januari 1950.

  Sesuai dengan peraturan tersebut dibentuk Provinsi Aceh (yang pertama) dengan Gubernur Tgk.Mohd. Daud Beureueh, dan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Aceh beranggotakan 27 orang.

  Pelantikan Gubernur akan dilakukan pada 27 Januari 1950 di Kutaraja (sekarang Banda Aceh). (TS313-314; *Kompas*, 23 Juli 2005: 25)

* Upacara pelantikan Presiden Sukarno menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) di bangsal Sitihinggil Keraton Yogyakarta, dihadiri juga oleh anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dari Aceh, Amelz dan Sutikno Padmosumarto, utusan Jawatan Penerangan Provinsi Sumatra Utara ke Konferensi Penerangan di Yogyakarta, T. Alibasjah Talsya, Abd. Mu'thi dan Muhammad Hasan. (TS316)

* Konferensi Kristen Indonesia yang diadakan di Yogyakarta dari 12 sampai 16 Desember telah mengeluarkan pernyataan hari ini yang isinya mendesak kepada semua orang Kristen di Indonesia untuk menyumbangkan kemampuan masing-masing bagi kegiatan di semua bidang kehidupan "untuk memberikan arti kepada kemerdekaan dan kedaulatan negeri ini".

  Pernyataan selanjutnya menerangkan bahwa selama 4 hari itu konferensi telah membicarakan masalah-masalah yang berhubungan dengan aspek pendidikan, ekonomi dan politik dalam kehidupan orang Kristen di Indonesia. Dikatakan bahwa berbagai organisasi akan dibentuk untuk menangani masalah-masalah itu. Konferensi pun mengambil resolusi

untuk selekas mungkin menyelenggarakan Konferensi Wanita Kristen Indonesia guna membicarakan pembentukan Organisasi Wanita yang dianggap penting oleh konferensi. (*Antara*)

* Semua kalangan, baik Indonesia, Belanda maupun asing lain memandang terpilihnya Sukarno sebagai presiden pertama RIS sebagai "umumnya sudah diduga". Kalangan-kalangan politik Indonesia berkomentar lebih lanjut bahwa Sukarno yang sampai kini merupakan lambang persatuan Indonesia tidak sangsi lagi akan tetap menjadi lambang tersebut. (*Antara*)

* Dengan ditariknya pasukan Belanda hari ini dari Kota Magelang, maka seluruh Keresidenan Kedu telah dikembalikan pada Republik. TNI memasuki kota itu jam 07.00, dan sejam kemudian penyerahan resmi zona patroli berlangsung di bekas tempat kediaman Komisaris Belanda, dihadiri oleh penguasa sipil dan militer kedua belah pihak.

Masuknya pasukan TNI disaksikan oleh para pengamat militer UNCI Mayor de Smidt (Belgia) dan pemimpin skuadron Medley (Australia). Untuk keamanan diterapkan jam malam yang berlaku hari ini dari jam 19.00 sampai jam 05.00 (waktu Yogya). (*Antara*)

* Pemerintah Pasundan bersedia mengundurkan diri segera sesudah keamanan di negara tersebut terjamin, demikian dinyatakan oleh juru bicara pemerintah di hadapan Parlemen hari Sabtu. Menurut juru bicara tersebut, struktur pemerintahan negara yang baru akan ditinjau kembali dan disesuaikan dengan pemasukan negara, karena struktur yang sekarang dinilai mahal dan dapat membahayakan pendapatan pegawai bawahan dan kaum buruh. (*Antara*)

1949 DESEMBER 18.

* Baru sesudah bersidang dua hari sejak kemarin, Presiden Sukarno pada jam 15.00 waktu setempat hari Minggu akhirnya menunjuk badan pembentuk kabinet beranggotakan 4 orang, terdiri dari Dr. Mohmamad Hatta, Anak Agung Gde Agung, Sultan Hamengku Buwono dari Yogyakarta, dan Sultan Hamid II dari Pontianak. Presiden menyatakan kepada wartawan sore ini bahwa keputusan menunjuk empat orang formatur

itu tidak berarti ia bertindak bertentangan dengan Konstitusi, karena dalam sidang itu telah tercapai "persetujuan bulat" dengan semua utusan negara-negara anggota. Sukarno menambahkan bahwa pemerintah pertama Republik Indonesia Serikat (RIS) itu akan terdiri dari orang-orang yang kapabel, tanpa mengabaikan keinginan partai-partai politik. Ia katakan "*no comment*" kepada pertanyaan wartawan apakah ada kesulitan mendasar yang menyebabkan ditunjuknya empat orang dan bukan tiga orang sebagaimana ditetapkan dalam Konstitusi. Tetapi Sukarno menambahkan bahwa ia mengambil keputusan ini karena "saya menginginkan persetujuan yang tanpa cacat". "Itu sebabnya dibutuhkan dua hari untuk memutuskannya," kata Presiden.

Walau sumber-sumber yang dekat dengan para utusan negara-negara anggota menolak merinci halangan dalam membentuk badan pembentukan pemerintah, diyakini bahwa setiap negara anggota memiliki sudut pandang sendiri mengenai orang-orang yang harus duduk di dalam badan tersebut. Diketahui bahwa terutama utusan Pasundan dan Sumatra Timur tidak mau sekadar menerima calon-calon yang diajukan. (*Antara*)

* Dua komunike dikeluarkan sore ini sebagai hasil pertemuan Presiden Sukarno dengan para utusan negara anggota RIS, pertama, keputusan untuk menunjuk formatur kabinet beranggota empat orang, kedua, nama-nama badan tersebut yang beranggota Dr. Mohammad Hatta, Ide Anak Agung Gde Agung, Sultan Hamengku Buwono, dan Sultan Hamid.

  Komunike pertama menyatakan bahwa walaupun pasal 74 Konstitusi menetapkan bahwa "Presiden menunjuk panitia tiga orang untuk membentuk kabinet, sesuai dengan jumlah utusan wilayah peserta", pertemuan berpendapat bahwa persetujuan itu merupakan syarat penting bagi penunjukan formatur kabinet. Pertemuan menyatakan bahwa mengingat sifat persetujuan, pertemuan telah memutuskan bahwa Presiden tidak bertindak berlawanan dengan Konstitusi jika ia menunjuk lebih dari tiga orang formatur. (*Antara*)

* Dr. Mohammad Hatta telah diangkat sebagai perdana menteri pemerintah pertama RIS sebagai hasil sidang formatur kabinet beranggota empat orang yang ditunjuk oleh Presiden Sukarno. Hatta sedang mengadakan pertemuan malam ini dengan tiga formatur lainnya, termasuk Anak

Agung Gde Agung, Sultan Hamengku Buwono dari Yogyakarta, dan Sultan Hamid II dari Pontianak mengenai pengangkatan menteri-menteri yang lain. Hatta mengatakan kepada wartawan bahwa pembicaraannya dengan rekan-rekannya itu masih bersifat penjajagan. (*Antara*)

* Keberangkatan Presiden Sukarno ke Jakarta secara pasti telah ditetapkan, yaitu pada 28 Desember. Presiden akan menumpang pesawat dengan penerbangan khusus. Ia akan dikawal satu kompi polisi militer dan satu seksi polisi negara. (*Antara*)

* Perdana Menteri Mohammad Hatta menyatakan hari ini bahwa delegasi yang secara resmi akan menerima kedaulatan di Negeri Belanda akan berangkat ke Amsterdam pada 23 Desember. Ia katakan, ia belum tahu siapa yang akan memimpin delegasi, tapi sumber-sumber yang mengetahui mengatakan, delegasi itu akan dipimpin oleh Perdana Menteri Hatta sendiri. Selanjutnya diperoleh berita bahwa delegasi yang akan menerima kedaulatan di Jakarta akan dipimpin oleh Sulatan Hamengku Buwono. (*Antara*)

* Tentara Nasional Indonesia Komando Militer Kota Cepu mengeluarkan Pengumuman No. 3/KMK/Tjo/49 tentang Simpanan Alat-alat Senjata sbb.:

Untuk menyempurnakan terjaminnya keamanan umum kota:

Diumumkan: Kepada seluruh penduduk:

1. Kecuali anggota Angkatan Perang tidak diperkenankan membawa senjata.
2. Semua gerombolan atau perorangan yang bersenjata supaya menggabungkan diri kepada Ibu Pasukan masing-masing.
3. Atau mereka yang tidak berhasrat masuk ke dalam Angkatan Perang, dan bersenjata, supaya menyerahkan senjata tersebut kepada Komando Militer Kota.
4. Siapa yang tahu tempat-tempat simpanan senjata/ditanam dan sebagainya supaya melaporkan kepada Komando Militer Kota.
5. Alat senjata untuk Jawatan yang dipandang perlu supaya dimintakan surat ijin kepada Komando Militer Kota.

6. Siapa yang menyimpan alat senjata dengan tidak ada surat ijin dan atau mereka yang ketempatan alat senjata dengan tidak memberitahukan kepada Komando Militer Kota, berarti melanggar pengumuman dan akan dirampas.
7. Alat senjata yang dimaksudkan: bagian-bagian alat senjata/onderdelen, alat peledak, bayonet, topi baja, macam-macam peluru dan sebagainya.
8. Siapa yang melanggar pengumuman, akan diambil tindakan keras.
9. Indahkan.
10. Berlaku sejak diumumkan.

Dikeluarkan di: Cepu

Pada tanggal: 18-12-1949

Pada jam: 08.00

Komando Militer Kota Cepu

Komandan,

ttd

(Iskandar Djayusman, Letnan II)

Terkirim kepada:

1. Tn. Kmd. CPM Det. 44.
2. Tn. Kmd. KKM Cepu.
3. Tn. Kep. Politie Cepu.
4. Archief.

Tembusan kepada:

1. P.T. Kmd. Bn. 15/I/I.
2. Tn2 Kmd. Ki. II.III.Bn. 15/I/I. (*Peta, Juli/Agustus 1993*)

1949 DESEMBER 19.

* Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) Sukarno diambil sumpahnya.

“Pada tanggal 19 Desember 1949 aku disumpah menjadi Presiden RIS di Yogyakarta. Sumpah tersebut berbunyi a.l.: ‘Saya akan melindungi dan mempertahankan kebebasan-kebebasan dan hak-hak umum dan khusus

sekalian penghuni negara ... saya akan mengabdi dengan setia kepada Nusa, Bangsa, dan Negara.'." (AB238; *lj. 17 Desember 1949*)

* Keempat formatur kabinet yang bertugas membentuk Kabinet RIS pertama bersidang sore ini pada jam 16.00. Setelah dua jam berdiskusi, belum dapat dicapai persetujuan mengenai struktur kabinet.

  Untuk memecahkan jalan buntu, Ketua Masyumi Sukiman dan Perdana Menteri Pasundan Djumhana diundang untuk mengemukakan pendapatnya.

  Sesudah sidang yang berakhir jam 19.00, Perdana Menteri Hatta menyatakan kepada *Antara* bahwa nama-nama menteri baru dapat diumumkan besok, namun ia ungkapkan bahwa kabinet itu akan dilantik oleh Presiden Sukarno pada jam 10.00 besok.

  Sementara itu kepada *Antara* Sultan Hamid menyatakan kepuasannya atas hasil akhir sidang tersebut. (*Antara*)

* Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS) yang disusun oleh empat orang formatur—Mohammad Hatta, Sultan Hamengkubuwono IX, Anak Agung Gde Agung, dan Sultan Hamid II—terbentuk.

  Susunan kabinet tersebut adalah sbb.:

  Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri: Mohammad Hatta;

  Menteri Pertahanan: Sultan Hamengkubuwono IX;

  Menteri Dalam Negeri: Anak Agung Gde Agung;

  Menteri Keuangan: Mr. Sjafruddin Prawiranegara;

  Menteri Kemakmuran: Ir. Djuanda;

  Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum: Ir. Laoh;

  Menteri Kehakiman: Prof.Mr.Dr. Supomo;

  Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan: Dr. Abu Hanifah;

  Menteri Kesehatan: Dr. J. Leimena;

  Menteri Perburuhan: Mr. Wilopo;

  Menteri Sosial: Mr. Kosasih Purwanegara;

  Menteri Agama: H. Abdul Wachid Hasjim;

  Menteri Penerangan: Arnold Mononutu;

Menteri Negara: Sultan Hamid II;

Menteri Negara: Mr. Mohammad Rum;

Menteri Negara: Dr. Suparmo.

Program kabinet adalah sbb.:

1. Menyelenggarakan supaya pemindahan kekuasaan ke tangan bangsa Indonesia di seluruh Indonesia terjadi dengan saksama; mengusahakan reorganisasi KNIL dan pembentukan Angkatan Perang RIS dan pengembalian tentara Belanda ke negerinya dalam waktu yang selekas-lekasnya.
2. Menyelenggarakan ketenteraman umum, supaya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya terjamin berlakunya hak-hak demokrasi dan terlaksananya dasar-dasar hak manusia dan kemerdekaannya.
3. Mengadakan persiapan untuk dasar hukum, cara bagaimana rakyat menyatakan kemauannya menurut asas-asas Undang-Undang Dasar RIS, dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Konstituante.
4. Berusaha memperbaiki keadaan ekonomi rakyat, keadaan keuangan, perhubungan, perumahan dan kesehatan, mengadakan persiapan untuk jaminan sosial dan penempatan tenaga kembali ke dalam masyarakat, pengawasan Pemerintah atas kegiatan ekonomi agar kegiatan itu terujut kepada kemakmuran rakyat seluruhnya.
5. Menyempurnakan perguruan tinggi sesuai dengan keperluan masyarakat Indonesia dan membangun pusat kebudayaan nasional; mempergiat pemberantasan buta huruf di kalangan rakyat.
6. Menyelesaikan soal Irian dalam setahun ini juga dengan jalan damai.
7. Menjalankan politik luar negeri yang memperkuat kedudukan RIS dalam dunia internasional dengan memperkuat cita-cita perdamaian dunia dan persaudaraan bangsa-bangsa. Memperkuat hubungan moril, politik dan ekonomi antara negara-negara Asia Tenggara. Menjalankan politik dalam Uni, supaya Uni ini berguna bagi kepentingan RIS. Berusaha supaya RIS menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Perdana Menteri Mohammad Hatta dan para menteri melakukan sumpah jabatan di hadapan Presiden RIS, Sukarno. (*KU135-136; LUxxii; LU t.h.;* S6 71; *Antara*, 20 Desember 1949)

* Universitas Gajah Mada diresmikan pembentukannya, dengan Rektor Prof. Dr. Sardjito, dan dengan 6 fakultas: Kedokteran, Hukum, Teknik, Sastra dan Filsafat, Pertanian, dan Kedokteran Hewan. (*TI88; lj. 7 Desember 1949*)

* Partai Parindra mengumumkan programnya sbb.:

  Politik:

  a. Menyatukan Irian Barat selekas mungkin dengan RIS;
  b. Mewujudkan negara kesatuan (nonfederal) Indonesia;
  c. Mempercepat pemilihan umum;
  d. Menyempurnakan pemerintahan daerah.

  Ekonomi:

  a. Undang-undang agraria (pembagian tanah kepada rakyat);
  b. Peningkatan produksi dengan memperbaiki alat-alat kaum tani;
  c. Mendorong industri kecil dan besar;
  d. Mengontrol distribusi komoditas dagang;
  e. Menasionalisasi industri-industri yang vital;
  f. Memberikan kredit yang adil kepada rakyat yang menggunakan sistem koperasi;
  g. Mewujudkan selekas mungkin anggaran negara yang berimbang.

  Sosial:

  a. Melaksanakan transmigrasi selekas mungkin dan membatasi imigrasi;
  b. Menjamin legislasi sosial, termasuk pekerjaan, perumahan, penyediaan air, jam kerja maksimum, kerja wanita dan anak-anak, pensiun untuk para janda dan orang tua;
  c. Pemerataan taraf hidup bagi tenaga pengajar.

  Pertahanan:

  a. Meningkatkan apresiasi terhadap TNI;
  b. Membangun pertahanan negara dengan TNI sebagai intinya.

  Politik Luar Negeri:

  Kerja sama yang erat dengan bangsa-bangsa Asia. (*Antara*)

* Kolonel Sadikin sebagai Panglima Divisi Siliwangi/Gubernur Militer IV memasuki kembali kota Bandung.

Di batas kota sebelah timur ia disambut pembesar-pembesar Negara Pasundan, wakil-wakil militer Belanda, dan rakyat Bandung. (*LU t.h.*)

* Satu batalion Korps Polisi Militer Republik memasuki Bandung pada jam 11.00 hari ini. Tidak dilaporkan adanya insiden dengan masuknya polisi militer tersebut.

Hari ini juga akan masuk Bandung satu batalion infanteri. Kedua batalion itu adalah bagian dari empat batalion pasukan TNI yang direncanakan memasuki Bandung sebelum penyerahan kedaulatan. (*Antara*)

* Ir. Indratjaja menyatakan setiba di Medan dari Sabang, bahwa mulai 1 Januari 1950 akan dibuka hubungan pos dengan Aceh.

Hubungan kereta api Aceh dengan Sumatra Timur masih mengalami kesulitan karena jembatan Pelawi-Pangkalan Berandan masih rusak. Akan ditinjau kemungkinan membangun jembatan darurat. Kereta api Aceh hanya dapat menjalani trayek tetap Kutaraja (sekarang Banda Aceh) sampai perbatasan Aceh-Sumatra Timur, tiap hari.

Sementara itu telah dibicarakan dengan Kepala PTT di Medan tentang hubungan dengan Tapanuli dan Aceh. Langkah-langkah ke arah itu sedang giat dilakukan, agar hubungan yang telah putus sekian lama dapat dipulihkan. (TS317)

1949 DESEMBER 20.

* Diperoleh berita dari kalangan yang mengetahui bahwa Presiden Sukarno telah memberikan nama "Garuda Indonesian Airways" kepada perusahaan penerbangan sipil yang akan menggantikan perusahaan "Inter-Insular Airways".

Sebuah pesawat dari perusahaan baru tersebut, dengan Merah-Putih pada ekornya, akan menerbangkan Presiden Sukarno dari Yogyakarta ke Jakarta pada 28 Desember mendatang. (*Antara*)

* Mohammad Hatta dilantik menjadi Perdana Menteri RIS. (TS316)

* Pencalonan 50 anggota Parlemen RIS Sementara dari Republik Indonesia yang dijadwalkan selesai hari ini ternyata masih belum selesai, karena beberapa partai dan kelompok belum dapat memutuskan siapa yang mereka calonkan.

  Berikut ini adalah daftar calon anggota Parlemen RIS tersebut:

Partai atau kelompok	*Calon*
Partai Nasional Indonesia	Mr. Sartono
	Mr. Sujono Hadinoto
	Manai Sophiaan
	Saleh Umar
Barisan Tani Indonesia	Sadjarwo
	Mohammad Taufik
Partai Sarikat Islam Indonesisa	Arudji
Partai Sosialis Indonesia	Subadio
	Sugondo
Partai Murba	Maruto Nitimihardjo
Kelompok Tionghoa	Siauw Giok Tjhan
	Drs. Yap Tjwan Bing
Kelompok Arab	Hamid Algadri
Sarikat Tani Islam Indonesia	Mohammad Daljono
PKRI	Harjadi
Sumatra	Amelz (PSSI)
	Dr. Sinaga (Parkindo)
	J. Nasution (Masyumi)
	Sarwono Sastrosutardjo (Pesindo)
	Z.A. Achmad (Masyumi)
	Sutan Sajid Ali (PKI)
	S. Abai (PPI PTI)
	Tedjasukmana (nonpartai)
	Basri (PSI)
	K.H. Tjikwan (Masyumi)

Borneo	Abdul Muis
Sunda Kecil	Lobo

* Masyumi, Partai Komunis Indonesia, Persatuan Buruh Indonesia, Partai Sosialis, Parkindo, Kelompok Buruh, Sulawesi dan Maluku, dan kelompok nonpartai belum mengajukan calon-calonnya. (*Antara*)

* Ruslan Abdulgani, Sekretaris Jenderal Kementerian Penerangan Republik hari ini secara resmi diangkat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Penerangan RIS. (*Antara*)

* Konferensi Islam Seluruh Indonesia yang berlangsung 5 hari dan diikuti 165 organisasi Islam dibuka tadi malam dengan sebuah resepsi di gedung Kepatihan, Yogyakarta, dihadiri oleh Presiden Sukarno dan pejabat-pejabat Republik lain.

  Presiden Sukarno menggunakan kesempatan itu untuk berpidato dan menyatakan bahwa kemerdekaan nasional merupakan syarat bagi tumbuh suburnya agama. Ia katakan, pembentukan RIS bukan berarti jaminan adanya syarat itu.

  Akhirnya ia dorong umat Islam untuk bekerja sama dengan lain-lain kelompok masyarakat di Indonesia dalam membangun negara nasional bagi terwujudnya persyaratan yang memungkinkan tumbuh suburnya agama. (*Antara*)

* Mr. Susanto Tirtoprodjo, Menteri Kehakiman Republik sekarang, telah diangkat sebagai Pejabat Perdana Menteri Republik Indonesia menggantikan Mohammad Hatta yang telah ditunjuk sebagai Perdana Menteri pertama Republik Indonesia Serikat (RIS). Hal ini diputuskan dalam sidang kabinet semalam yang dipimpin oleh Hatta sendiri.

  Kabinet telah juga menunjuk Dr. Sukiman sebagai Pejabat Menteri Luar Negeri. Pemerintah Republik akan demisioner segera sesudah kedaulatan diserahkan pada 27 Desember mendatang. (*Antara*)

* Di Yogyakarta diselenggarakan Kongres Muslimin Indonesia.

  Kongres berlangsung sampai tanggal 25 Desember 1949. Salah satu

keputusannya adalah membentuk badan penghubung antar organisasi Islam dengan nama Badan Kongres Muslimin Indonesia, sebuah badan musyawarah bersifat permanen yang disetujui dan dianggotai oleh 129 organisasi Islam, kecuali Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII).

Karena tidak mendapat dukungan dari anggota, akhirnya badan ini bubar dengan sendirinya. (MH207)

* Universitas Gajah Mada secara resmi disahkan sebagai lembaga pemerintah kemarin, mencakup fakultas kedokteran, farmasi, pertanian, kedokteran hewan, dan hukum. Pusat pendidikan tinggi ini sebelumnya merupakan usaha swasta yang hanya mencakup fakultas hukum dan sastra. (*Antara*)

* Kompi Prakosa dikirim ke Semarang untuk melaksanakan tugas keamanan bersama Ki. IV (Marwoto) dan ki. SA/CSA (Muktio). (*PEH92*)

* Malam ini Wakil Perdana Menteri Sjafruddin Prawiranegara mengadakan resepsi perpisahan di tempat kediaman resminya berhubung dengan penunjukannya sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS) yang diumumkan di Yogyakarta.

  "Saya masih suka lebih lama tinggal di Aceh, di tengah-tengah rakyat di sini, tetapi karena negara memanggil untuk tugas yang lebih penting lagi, maka mau tidak mau saya akan meninggalkan Aceh, menjabat jabatan baru sebagai Menteri Keuangan RIS," demikian Sjafruddin. "Pekerjaan itu memang berat, lebih banyak makan hati daripada berbesar hati. Tetapi untuk kepentingan negara, tugas itu akan saya jalani."

  Selanjutnya ia memberikan petunjuk dan nasihat sebagai pedoman bagi pejabat yang ditinggalkannya dalam menghadapi pekerjaan yang lebih berat di masa RIS nanti. (TS318)

* Dua puluh satu organisasi kesenian bergabung dalam Gabungan Kesenian Indonesia (Gabsi) di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Pemimpin Umum Dada Meuraxa dan Ketua I Raden Sumitro. (TS317)

* Miss Laura Boulton dari New York City, AS, telah tiba di Indonesia untuk meneruskan penelitiannya mengenai kebudayaan-kebudayaan lama Asia Tenggara, khususnya musik rakyat yang belum dikenal dan direkam,

demikian siaran pers USIS hari ini. Miss Boulton adalah seorang penjelajah dunia, musikolog, etnolog dan penjelajah yang terkenal. Ekspedisinya yang kelima belas akan membawanya ke Indonesia, Filipina, Birma, Thailand, India, dan Tibet. (*Antara*)

* *Voice of America* akan mulai melakukan siaran dalam bahasa Indonesia hari Minggu, ketika Republik Indonesia Serikat akan menjadi negara berdaulat. Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa siaran pertama akan diisi dengan penyampaian ucapan selamat kepada republik baru ini dari berbagai pejabat Amerika. Selanjutnya program akan diisi dengan berita. Bahasa Indonesia akan menjadi bahasa ke-23 dari Voice of America. Sebelumnya telah dimulai siaran dalam bahasa Turki dan Ukraina. Acara berbahasa Indonesia akan dilakukan lewat 5 transmitter gelombang pendek di Amerika Serikat, dan direlai oleh 2 transmitter di Honolulu dan 4 transmitter di Manila. Acara akan berlangsung dari jam 19.15 sampai jam 19.30 waktu Indonesia. (*Antara*)

1949 DESEMBER 21.

* Serombongan menteri RIS yang pertama telah tiba di Jakarta dari Yogyakarta kemarin. Mereka adalah Perdana Menteri Mohammad Hatta, Menteri Pertahanan Sultan Hamengku Buwono, Menteri Dalam Negeri Anak Agung Gde Agung, Menteri Penerangan Arnold Mononutu, Menteri tanpa portofolio Sultan Hamid II, Mr. Suparmo dan Perdana Menteri Pasundan Djumhana.

  Kepada wartawan dalam dan luar negeri Perdana Menteri Hatta mengungkapkan bahwa ia akan berangkat ke Negeri Belanda pada 23 Desember untuk menerima kedaulatan Indonesia. Ia katakan bahwa ia akan memimpin delegasi yang terdiri dari Sultan Hamid II, Prof. Supomo, Dr. Sukiman, Mr. Suparmo dan Mr. Sujono Hadinoto.

  Ia ungkapkan bahwa pencalonan Komisaris Tinggi Indonesia yang pertama di Negeri Belanda dan masa jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri ad interim akan sepenuhnya tergantung pada keputusan yang akan diambil oleh sidang pertama Kabinet RIS.

  Sementara itu Menteri Penerangan Mononutu mengatakan bahwa Kabinet RIS yang pertama akan terus ada sampai terbentuknya Konstituante RIS. (*Antara*)

* Panitia Persiapan Nasional mengungkapkan bahwa delegasi yang akan berangkat ke Amsterdam, Belanda, pada 23 Desember 1949 untuk menerima kedaulatan atas nama Pemerintah RIS dari Kerajaan Belanda telah terbentuk. Delegasi itu akan terdiri dari:

1.	Dr. Mohammad Hatta	Ketua delegasi, Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri RIS
2.	Prof. Supomo	Menteri Kehakiman
3.	Sultan Hamid II	Menteri tanpa portefolio
4.	Mr. Suparmo	Menteri tanpa portefolio
5.	Mr. Kusuma Atmadja	Ketua Mahkamah Agung
6.	Dr. Sukiman	Ketua Partai Islam Masyumi
7.	Mr. Sujono Hadinoto	Ketua Partai Nasional Indonesia (PNI)
8.	Mr.A.K. Pringgodigdo	Sekretaris
9.	Mr.Mohd. Yahya	Sekretaris. (*Antara*)

* Atas nama Presiden Republik Indonesia, Wakil Perdana Menteri Mr. Sjafruddin Prawiranegara mengeluarkan Keputusan No. 14/Keh/WKPM mengenai abolisi (pembebasan dari tuntutan) bagi mereka yang baik langsung maupun tidak langsung tersangkut dalam sesuatu tindak kejahatan di Daerah Aceh.

  Adapun tindak kejahatan yang dimaksud adalah dalam Peristiwa Cumbok dan peristiwa lain yang terkait dengannya, juga dalam Peristiwa Revolusi Nasional, dan peristiwa yang terkenal dengan nama Peristiwa Said Ali al Sagaf.

  Keputusan ini mulai berlaku pada 27 Desember 1949. (TS319)

* Menteri Perburuhan RIS Mr. Wilopo menyatakan kepada *Antara* hari ini bahwa program kabinet RIS pada umumnya dan program perburuhan khususnya hanya merupakan prinsip-prinsip mendasar, karena kabinet ini hanya punya masa tugas satu tahun.

  Ia katakan, salah satu langkah konkret yang akan diambilnya ialah menyiapkan bahan untuk menyusun undang-undang perburuhan, seperti undang-undang lain yang telah disusun oleh Republik Indonesia.

Ia katakan juga, ia akan menyelenggarakan kursus-kursus inspektur perburuhan dan keselamatan kerja untuk mengatasi kurangnya personil di bidang ini. Para inspektur ini diperlukan untuk menjamin agar undang-undang perburuhan diikuti seketat mungkin.

Selanjutnya ia akan berunding dengan para pemimpin serikat buruh untuk membicarakan kemungkinan menyelenggarakan kursus-kursus untuk melatih calon pemimpin serikat buruh. Ia nyatakan perlunya lebih banyak pemimpin serikat buruh yang dapat mengorganisasikan serikat buruh, dan bukan beragitasi.

Akhirnya ia nyatakan bahwa dengan undang-undang perburuhan, inspektur perburuhan dan serikat buruh yang baik ia harapkan konstituante RIS akan banyak dipengaruhi oleh konsepsi Republik mengenai struktur ekonomi nasional, untuk menetralisir pengaruh buruk modal asing. (*Antara*)

* Kongres Masyumi yang diadakan di Yogyakarta antara 15-19 Desember telah memutuskan untuk mengirimkan resolusi berikut kepada pemerintah RIS dan Republik Indonesia.:

1. Menyerukan kepada RIS dan Pemerintah Republik untuk membentuk komisi yang bertugas menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh suburnya agama di semua lapangan dan membatasi tindakan-tindakan yang buruk akibatnya terhadap orang Islam dan melukai rasa keagamaannya.
2. Berpegang teguh pada pendirian Masyumi untuk menjunjung tinggi kedaulatan negeri di seluruh wilayah Indonesia dan mewujudkan aspirasi Islam dalam urusan negara. (*Antara*)

* Partai Masyumi yang sedang berkongres di Yogyakarta hari ini mengetok kawat kepada Pemerintah Mesir di Kairo dan Pemerintah Pakistan di Karachi berisi pernyataan simpati yang mendalam berhubung dengan tewasnya 20 pemimpin Islam penting akibat kecelakaan pesawat. Kecelakaan itu terjadi pada 16 Desember dalam perjalanan dari Karachi ke Kairo. (*Antara*)

* Harian *Nasional* di Yogyakarta dalam tajuk rencananya kemarin menyatakan bahwa Kabinet RIS yang pertama dapat diterima, walau beberapa

nama menteri menimbulkan pertanyaan, apa dasar pencalonannya. Tajuk rencana itu menyatakan bahwa struktur kabinet itu menimbulkan kesan bahwa beberapa menteri telah dipilih bukan atas dasar jasa atau kompetensinya, melainkan karena tekanan untuk berkompromi. Dikatakannya, tidak satu nama pun dari sayap kiri masuk dalam kabinet, karenanya oleh sayap kiri kabinet ini dapat disebut “reaksioner”.

Diharapkannya bahwa kabinet ini lebih progresif dari yang terkesan saat ini.

Harian *Kedaulatan Rakyat* Yogyakarta pun berpendapat bahwa sebagian menteri diangkat hanya untuk berkompromi. (*Antara*)

* Misi Haji Republik Indonesia tiba kembali di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) setelah menunaikan tugas di Tanah Suci dan beberapa negara Arab lain selama 3 bulan.

A. Hasjmy, salah seorang anggota Misi, menyatakan kepada wartawan: “Karena berbagai halangan, sehari sebelum Hari Arafah, baru Misi Haji Republik Indonesia tiba di Mekkah. Sungguh tak dapat dilupakan usaha Syekh Abdul Wahab, Inspektur Jenderal Departemen Keuangan Saudi Arabia, dalam membntu Misi. Beliau berasal dari Aceh.

Di lingkungan Kerajaan Hejaz kini terdapat 3.000 orang Indonesia yang telah menetap. Di antaranya ada yang telah menjadi warga negara Saudi. Jumlah orang Indonesia yang menunaikan ibadah haji tahun ini 13.000 orang mengunjungi Tanah Suci.

Tidak ada di antara orang Indonesia itu yang berhubungan dengan Konsulat Belanda, kecuali untuk urusan paspor. Semangat Republiken bergelora dalam dada mereka. Sewaktu berkumpul di Padang Arafah, hanya satu bendera Belanda kelihatan, di tengah ratusan Sang Merah Putih.

Dalam perjalanan pulang, Misi singgah di Mesir. Di sana banyak orang Indonesia—menjadi mahasiswa atau pekerja. Tak lama lagi akan berangkat ke Indonesia kapal yang mengangkut orang Indonesia.

Setelah 27 hari di Kerajaan Saudi Arabia dan 43 hari di Mesir, Misi Haji Republik Indonesia dari Daerah Aceh tiba kembali hari ini di sini.” (TS318-319)

* Pemogokan umum di Cirebon telah berakhir hari ini dengan masuknya TNI ke dalam kota. Oleh komando kota TNI diharapkan agar para pegawai kantor pemerintah dan perusahaan swasta bekerja kembali. Masuknya TNI disaksikan oleh penduduk dengan penuh semangat. Dua puluh truk pasukan di bawah komando Komandan Batalion Kapten Mahmud telah memasuki kota jam 09.00. Peristiwa itu disaksikan oleh ribuan rakyat dan para pejabat sipil dan militer serta peninjau militer dari UNCI. Rapat umum diadakan, di mana berbicara para perwira Belanda maupun Indonesia.

  Perlu dicatat bahwa pemogokan diadakan sebagai protes terhadap penundaan masuknya TNI ke dalam kota. (*Antara*)

* F. Sprengers, orang Belanda yang telah dua tahun tinggal di Indonesia dan menjadi salah seorang pejabat partai politik federal Pardafi, kemarin menyampaikan permohonan kepada Pangadilan Federal di Jakarta untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Sprengers merupakan warganegara Belanda pertama yang memilih kewarganegaraan Indonesia.

  Persetujuan Meja Bundar menetapkan bahwa warganegara Belanda yang tinggal di Indonesia paling tidak 6 bulan terakhir, dalam batas waktu tertentu dapat menyatakan memilih kewarganegaraan Indonesia. (*Antara*)

* Parlemen Belanda meratifikasi Persetujuan KMB (Konferensi Meja Bundar).

  Di Majelis Tinggi disetujui dengan suara 34 setuju dan 16 menolak, berarti hanya satu suara di atas keharusan mayoritas mutlak 2/3. Di Majelis Rendah disetujui dengan suara 71 setuju dan 29 menolak.

  Seminggu sebelumnya (14 Desember 1949) Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) secara keseluruhan meratifikasi persetujuan tersebut. (*PSPB2 39*; ...)

  Ratu Juliana barangkali akan menandatangani rencana undang-undang itu dalam minggu ini juga. Penyerahan kedaulatan akan berlangsung serentak di Amsterdam dan Jakarta pada 27 Desember. Upacara di Negeri Belanda akan berlangsung di Istama Kerajaan di Amsterdam, di mana Ratu Juliana secara resmi akan menyerahkan kedaulatan kepada Perdana Menteri Indonesia Mohammad Hatta. (*Antara*)

1949 Desember 22.

* Mr. Assaat yang akan menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia sesudah penyerahan kedaulatan kepada Indonesia masih menolak untuk memberikan pernyataan hari ini.

Namun menurut kalangan politik di Yogyakarta, Mr. Susanto Tirtopridjolah yang paling mungkin ditugaskan oleh pejabat Presiden untuk membentuk kabinet, walau nama-nama Mr. Tambunan dan Dr. Halim pun sering disebut-sebut.

Kalangan itu selanjutnya menyatakan bahwa kabinet yang akan dibentuk akan merupakan kabinet nasional-parlementer dengan lebih banyak tokoh muda. (*Antara*)

* Rombongan Menteri Pertahanan melakukan peninjauan ke Banjarmasin, Makassar, Bali, dan Madura.

Peninjauan berlangsung sampai tanggal 25 Desember 1949. (*KU136*)

* Mr. Mohammad Natsir, bekas Menteri Penerangan Republik, telah dipilih menjadi ketua Dewan Partai Masyumi. Tempat kedudukan markas besar partai akan dipindahkan ke Jakarta.

Dr. Sukiman tetap menjabat sebagai ketua partai. (*Antara*)

* Sumber yang biasanya mengetahui mengungkapkan bahwa Mr. Sjamsuddin, Menteri Penerangan Republik dan bekas Perdana Menteri dalam Kabinet Sjarifuddin, akan ditunjuk sebagai duta besar pertama RIS untuk Karachi, Pakistan. (*Antara*)

* Menteri Keuangan Belanda A. Oudt mengatakan hari Rabu lalu bahwa Indonesia memiliki peluang untuk menyeimbangkan neraca anggarannya tahun 1952, walau situasi keuangannya tidak menguntungkan sekarang. Ia katakan, Republik yang baru ini akan mulai memikul tanggung jawab keuangan sesudah penyerahan kedaulatan berlangsung tanggal 27 Desember nanti. Oudt katakan, "karena itu pemerintah kami ingin menguraikan secara terbuka posisi keuangan negeri ini menjelang peristiwa yang bersejarah ini".

Ia katakan, utang Indonesia sekarang berjumlah 6.200.000.000 gulden (1.631.000.000 dollar), sedangkan utang sebelum perang adalah

1.500.000.000 gulden (973.000.000 dollar). Utang sekarang itu belum mencakup uang yang dikeluarkan untuk aksi-aksi militer Belanda di Indonesia, sedangkan anggaran tahun 1950 "tentu saja akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah". (*Antara*)

* Diperoleh kabar dari sumber yang dapat dipercaya bahwa markas besar Partai Buruh akan dipindahkan ke Jakarta. Ketua Partai Buruh, Prof. Abidin, dilaporkan akan dicalonkan untuk menduduki jabatan dalam Parlemen RIS. (*Antara*)

* Konferensi Pemuda Sumatra Utara dibuka di Medan dengan sebuah resepsi yang dihadiri oleh para opsir TNI, orang Eropa, konsul negara lain, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Negara Sumatra Timur (NST) , Sultan Deli, dan anggota Kabinet NST.

  Mimbar dihias dengan Merah Putih, gambar Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta, juga semboyan yang a.l. berbunyi: Pemuda hanya mengakui 17 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan, Tujuan gerakan pemuda hanya satu, antiimperialisme.

  Pimpinan resepsi, Subagio, mengharapkan dalam upacara pembukaan agar di masa depan perjuangan pemuda ditujukan pada usaha-usaha yang langsung dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

* "Sekarang semua orang mengatakan bahwa kolonialisme sudah mati. Tetapi sebaliknya mentalitet kolonialisme masih hidup subur di dalam jiwa bangsa Indonesia. Justru karena itu perjuangan pemuda harus ditujukan kepada kesempurnaan masyarakat yang lebih adil dan makmur," kata Subagio.

  Selanjutnya ia tekankan supaya di dalam berjuang pemuda hendaknya tidak terpengaruh oleh sentimen. Perjuangan pemuda harus dilancarkan dengan perhitungan. Pemuda harus merancang, dan bergerak dengan sadar, supaya tujuannya tercapai.

  Resepsi itu dihadiri juga oleh 40 pemuda Aceh yang mewakili 16 organisasi pemuda. Habib Djailani dan Rumiati, wakil-wakil dari Aceh, menguraikan peranan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan di Aceh dan langkah-langkah pemuda se-Sumatra Utara yang harus diambil di masa depan. (TS319-320)

* Pemerintah di Sumatra Utara mendirikan Kopra Fonds yang bertugas membeli, mengumpulkan, dan menjual (membagi-bagikan) kopra, terutama kepada para saudagar yang berniaga ke luar negeri.

  Dengan ini tak seorang pun lagi dibenarkan membeli kopra seperti sediakala. Kopra Fonds didirikan sejalan dengan usaha Wakil Perdana Menteri untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan keuangan. (TS320)

1949 DESEMBER 23.

* Delegasi Republik Indonesia Serikat (RIS) untuk mengikuti acara penyerahan kedaulatan dari pihak Belanda, bertolak ke Negeri Belanda.

  Delegasi terdiri atas:

  Ketua: Drs. Mohammad Hatta;

  Anggota-anggota: Sultan Hamid II, Sujono Hadinoto, Dr. Suparmo, Mr.Dr. Kusumaatmadja, dan Prof.Mr.Dr. Supomo.

  Untuk acara penyerahan kedaulatan di Indonesia, delegasi RIS terdiri atas:

  Ketua : Sultan Hamengkubuwono IX;

  Anggota-anggota: Anak Agung Gde Aung; Mr. Kosasih; dan Mr. Mohammad Rum; dan untuk kedaulatan dari tangan Republik Indonesia (RI), delegasi RIS diketuai oleh Arnold Mononutu. (*KU136-137; LUxxii;* S6 72)

* Mr. Susanto Tirtoprodjo, Pejabat Perdana Menteri Republik yang kemungkinan akan dipercaya membentuk Kabinet Republik yang baru, menyatakan kepada *Antara* hari ini bahwa Kabinet Republik akan dibentuk sesudah penyerahan kedaulatan. Susanto belum dapat mengatakan seberapa luas perubahan dalam kabinet tersebut, namun diungkapkan bahwa tidak akan ada lagi Kementerian Pertahanan dan Luar Negeri. (*Antara*)

* Kesatuan TNI yang akan memasuki kota-kota besar di Jawa dan Sumatra beberapa hari lagi akan melakukan persiapan bagi penyerahan tanggung jawab keamanan dan ketertiban dari pasukan di bawah komando Belanda (KL dan KNIL), demikian pengumuman Panitia Persiapan Nasional hari ini. Dari saat penyerahan kedaulatan dan pengambilalihan pemerintahan, tanggung jawab KL dan KNIL dalam keamanan dan ketertiban akan berakhir dan beralih pada pasukan TNI.

Dalam pengumuman itu diserukan kepada segenap penduduk di Indonesia untuk tetap tenang dan memberikan bantuan yang mungkin diharapkan oleh penduduk Negara Konstitusional. (*Antara*)

* Mr. Saroso yang hari ini tiba bersama Mr. Susanto Tirtoprodjo di Jakarta menyatakan kepada *Antara* bahwa ia tidak lagi akan menjadi wakil perdagangan Republik untuk Asia Tenggara. Ia katakan bahwa ia akan mendapat jabatan di Kementerian Perekonomian RIS, namun ia belum dapat mengungkapkan jabatan apa yang akan didudukinya. (*Antara*)

* Duta-duta besar RIS pertama-tama akan dikirimkan ke negeri-negeri di lingkungan Asia Tenggara dan negara-negara besar, demikian dinyatakan oleh Dr. Mohammad Hatta, Perdana Menteri pertama RIS, kepada pers sebelum berangkat ke Negeri Belanda hari ini. Hatta akan memimpin delegasi untuk menerima kedaulatan di Negeri Belanda pada 27 Desember mendatang.

Hatta membenarkan bahwa menurutnya benar yang harus dibentuk adalah PERSATUAN Asia Tenggara, bukan BLOK yang kemudian, menurut Hatta, dapat ditafsirkan secara internasional ditujukan untuk menentang sesuatu blok yang lain. Sifat ini, jelas Hatta, tidak ada dalam PERSATUAN.

Ia tekankan bahwa kesejahteraan umum merupakan tujuan terpenting Pemerintah RIS. Ia katakan, kemerdekaan dan kebebasan tidak akan ada artinya jika ia gagal memberikan kebahagiaan kepada rakyat. Untuk mencapai ini harus ada kerja sama antara pemerintah dan rakyat. Ia desak bangsanya untuk memahami politik pemerintah. Ia tambahkan: “Kalau kita menerima pinjaman luar negeri, salahlah kalau itu ditafsirkan bahwa pemerintah menjadi kapitalistis atau cenderung pada kapitalisme.” Ia katakan, pinjaman luar negeri perlu untuk membangun negeri, “kalau kita tak hendak tetap primitif”. (*Antara*)

* Komisaris Tinggi Belanda untuk Indonesia, Lovink, dan istri disertai Dr. Koets, Prof. Boetzelaer dan istri telah tiba di Yogyakarta untuk kunjungan sehari kepada Presiden Sukarno.

Di istana kepresidenan pada jam 14.00 para tamu beserta semua menteri Republik yang hadir mendapat jamuan makan siang.

Sebelum meninggalkan Yogyakarta Komisaris Tinggi menyampaikan kepada *Antara* bahwa ia datang ke Yogyakarta untuk minta diri kepada Presiden Sukarno dan para pejabat Republik lainnya sebelum kembali ke Negeri Belanda. Ia belum dapat mengatakan, kapan akan pergi, tapi paling tidak sesudah penyerahan kedaulatan.

Ditanya pendapatnya tentang masa depan RIS di bidang ekonomi ia katakan masa depan itu "penuh harapan", namun ia tak dapat memasuki masalah yang rinci. Ia katakan, masa depan Indonesia akan dimasukkannya dalam sambutan yang akan diucapkannya dalam penyerahan kedaulatan.

Ditanya apakah pasukan Belanda dapat ditarik dalam 6 bulan sejalan dengan Persetujuan Den Haag, sambil tersenyum ia katakan bahwa Belanda sudah melakukan persiapan agar pasukan itu dapat ditarik dalam batas waktunya.

Ditanya pendapatnya tentang Yogyakarta yang untuk pertama kali ia kunjungi, ia katakan ia senang dapat mengunjungi Yogya. Ia katakan bahwa istrinya pun senang melihat Yogya. Akhirnya ia katakan bahwa ia yakin RIS akan menjadi salah satu negeri besar di Asia Tenggara. (*Antara*)

* Ketua Partai Murba, Sukarni, menyatakan kepada *Antara* hari ini bahwa Partai Murba tidak akan pernah ikut dalam Kabinet RIS karena prinsip-prinsip kebijakan yang ditempuh oleh RIS bertentangan dengan pendirian Partai Murba yang menuntut kembalinya kepada proklamasi 17 Agustus 1945 dan kemerdekaan 100% di bidang politik, ekonomi dan sosial bagi seluruh Indonesia.

Sukarno menyatakan bahwa partainya menyetujui cara parlementer dalam mencapai tujuan sebagai bagian dari kampanye sistematis Partai Murba. (*Antara*)

* Gubernur Militer Jakarta, Daan Jahja, menyatakan kepada pers hari ini bahwa 6 batalion (6.000 orang) pasukan TNI akan ditempatkan di Jakarta untuk menjaga hukum dan ketertiban. Ke-6 batalion itu mencakup 4 batalion infanteri, 1 batalion Polisi Militer, dan 1 batalion Brigade Mobil. Dinyatakan bahwa sebagian dari pasukan itu sudah ada di Jakarta. (*Antara*)

* Parlemen Jawa Timur kemarin secara bulat menerima mosi untuk mendesak Pemerintah Jawa Timur agar mempertimbangkan kembali status Jawa Timur dalam struktur RIS.

  Menjawab mosi tersebut dan resolusi sebelumnya dari berbagai daerah, Pemerintah Jawa Timur hari ini mengeluarkan pernyataan bahwa Pemerintah Jawa Timur akan tunduk pada keinginan rakyat, hingga Jawa Timur sebagai negara anggota RIS atau sebagai Provinsi Republik Indonesia tidak lagi menjadi masalah.

  Dikatakan dalam pernyataan itu bahwa masalahnya sekarang tinggal bagaimana menemukan cara terbaik untuk mewujudkan keinginan rakyat tanpa membahayakan keamanan umum, karena ada unsur-unsur tertentu yang mencoba mengganggu suasana sekarang dan status RIS sebagai Negara Konstitusional. (*Antara*)

* Ratu Juliana menawarkan kerja sama penuh dan sukarela kepada RIS dalam sambutan Hari Natal selama 10 menit yang disiarkan oleh radio Hilversum. Ia mendesak bangsa Belanda untuk "siap membantu" Indonesia siang dan malam, dan berharap bahwa penyerahan kedaulatan hari Selasa nanti akan merupakan penyerahan yang terus terang dan sukarela. (*Antara*)

* Wakil Tinggi Kerajaan Belanda di Indonesia, A.H.J. Lovink, dan istri berkunjung ke Yogyakarta untuk minta diri dari Presiden RIS Sukarno. (*KU137; LU t.h.*)

* Garuda Indonesian Airways, perusahaan penerbangan sipil gabungan Belanda-Indonesia, diharapkan dalam dua bulan akan sudah mulai beroperasi, demikian sebuah pengumuman resmi hari ini. Perusahaan itu akan mengambil alih dinas udara interinsuler KLM (perusahaan penerbangan Belanda). Peserta perusahaan penerbangan baru ini adalah Pemerintah RIS dan KLM.

  Dalam pengumuman dinyatakan bahwa Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan RIS di satu pihak dan pimpinan KLM di lain pihak sepakat untuk selekas mungkin membentuk perusahaan gabungan untuk melakukan penerbangan sipil di Indonesia, juga antara

Indonesia dan negeri-negeri yang berdekatan. Kantor pusat perusahaan ini akan berada di Jakarta.

RIS akan memberikan konsesi selama 30 tahun kepada Garuda sebagai imbalan atas dihentikannya KNILM (perusahaan penerbangan Hindia Belanda). Disetujui bahwa sesudah lewat 10 tahun—bila dikehendaki oleh RIS—KLM akan memberikan sebagian besar saham kepada RIS. Manajemen Garuda selama paling tidak sepuluh tahun akan dipegang oleh KLM. Dewan direktur akan ditunjuk bersama oleh RIS dan KLM, sedang kepala dewan direktur akan dipilih dari antara para direktur atas rekomendasi Pemerintah RIS.

Selanjutnya dinyatakan dalam pengumuman itu bahwa untuk memungkinkan pelaksanaan dinas penerbangan sipil, KLM menyetujui untuk selekasnya memanfaatkan personilnya dan segera mulai secara intensif melatih tenaga-tenaga Indonesia agar apabila diperlukan mereka dapat berangsur-angsur mengambil alih dinas tersebut.

Pemerintah RIS dan KLM akan berusaha keras agar perusahaan yang baru ini dapat mulai beroperasi dalam dua bulan mendatang. (*Antara*)

* Pemerintah Kolonial Singapura menolak permintaan ijin wakil Republik Indonesia setempat untuk mengibarkan bendera nasional Indonesia Merah-Putih pada 27 Desember, ketika Belanda menyerahkan kedaulatan kepada RIS. Menunjukkan lambang dan bendera asing dilarang menurut peraturan darurat daerah koloni tersebut, dan permintaan wakil Indonesia untuk mendapat perkecualian telah ditolak secara resmi. (*Antara*)

* Kongres Islam Indonesia menerima kawat dari Mufti Besar Palestina, Amin Husseini, yang menyerukan kerja sama erat antara Indonesia dengan dunia Islam pada umumnya. Kawat itu ditujukan kepada Wali Alfatah, seorang pemimpin Islam yang penting. (*Antara*)

* Para bekas mahasiswa Indonesia di Mesir telah membentuk perhimpunan di Jakarta di bawah pimpinan Ismail Banda, seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Republik.

  Tujuan organisasi yang baru ini adalah berusaha memadukan budaya Timur yang religius dengan peradaban Barat. (*Antara*)

* Perhimpunan Tionghoa Perantauan Medan Hua Chiao Chung Hui memprotes larangan pemerintah Sumatra Timur untuk mengibarkan bendera Republik Rakyat Tiongkok pada hari penyerahan kedaulatan.

  Di dalam protes dinyatakan bahwa karena Republik Rakyat Tiongkok didirikan pada 1 Oktober yang lalu, maka Pemerintah Nasional Tiongkok tidak lagi eksis sebagai pemerintah de jure, dan sejalan dengan itu bendera Tiongkok Nasional harus digantikan dengan bendera bintang 5 yang kini dicintai oleh rakyat Tiongkok.

  Dapat dicatat bahwa Pemerintah Sumatra Timur di dalam pernyataannya hanya mengijinkan dikibarkannya bendera Tiongkok Nasional pada hari penyerahan kedaulatan. (*Antara*)

* Rombongan delegasi Republik dari Kutaraja (sekarang Banda Aceh) yang berangkat ke Sabang untuk merundingkan penyerahan kota tersebut kepada Republik telah tiba kembali di Kutaraja. Mereka terdiri dari Kepala Staf Tentera Territorium Aceh Mayor Husinsjah, Kapten Sihar Hutahuruk, A. Kamil dan Tgk. Syekh Marhaban dari pemerintahan sipil, beberapa orang perwira Angkatan Laut, Corps Polisi Militer, dan wartawan *Semangat Merdeka*.

  Mayor Husinsjah menerangkan bahwa dalam perundingan informal antara dirinya dengan Komandan Militer Setempat di Sabang Letnan Geerlings semula timbul perbedaan pendapat, tetapi kemudian tercapai persesuaian. Penyerahan Sabang kepada Republik hanya masalah waktu, yaitu menunggu perintah dari Medan.

  Apabila telah tiba waktunya, Tentara Nasional Indonesia dan para pejabat pemerintah yang akan menerima penyerahan akan berangkat ke Sabang. Menurut Mayor Husinsjah, di Sabang kini tinggal tentara KNIL, karena tentara KL sudah ditarik.

  Penduduk Sabang umumnya bersemangat Republiken. Memang mereka takut-takut bertemu dengan rombongan yang datang dari Kutaraja, karena oleh Belanda pernah dikeluarkan peraturan yang melarang mereka berhubungan dengan orang Republik.

  Untuk menyambut penyerahan kedaulatan 27 Desember nanti, di Sabang akan diadakan pasar malam 7 hari lamanya. Sementara itu rombongan delegasi sudah menyerahkan 700 bendera Merah Putih kepada penduduk Sabang untuk dikibarkan di rumah masing-masing. (TS321)

* Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatra Utara mengeluarkan maklumat berisi ketentuan-ketentuan berikut mengenai Kopra Fonds:
  1. Mulai 22 Desember 1949 di Daerah Aceh didirikan Kopra Fonds oleh Pemerintah, berpusat di Kutaraja.
  2. Kewajiban Kopra Fonds adalah membeli, mengumpulkan, dan menjual (membagi-bagikan) kopra, terutama kepada saudagar yang berniaga ke luar negeri (eksportir).
  3. Dengan berdirinya Kopra Fonds ini, tak seorang pun dari eksportir dibenarkan lagi membeli kopra seperti sediakala.
  4. Sekalian agen hasil bumi yang telah ada, diakui sah sebagai agen eksportir. Hanya dari jenis-jenis hasil bumi yang dibelinya, kopra dikecualikan dari lisensi.
  5. Karena pembelian kopra dikecualikan dari lisensi, maka agen-agen kopra harus mempunyai lisensi untuk agen kopra. Kepada mereka akan diberikan lisensi khusus sebagai agen kopra dari Kopra Fonds Daerah Aceh, oleh Bupati setempat.
  6. Kepada eksportir kopra yang tidak diperoleh dari Kopra Fonds tidak diberikan lisensi ekspor, kecuali untuk kopra yang masih tersisa.

     Maklumat ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 1950. (TS322)

* Direktur KLM (perusahaan penerbangan Belanda), Dr.E. van Konijnenburg, telah kembali ke Negeri Belanda hari ini. Ia datang di Jakarta pertengahan November untuk memulai pembicaraan tentang penerbangan sipil di Indonesia. Dr. Konijnenburg akan kembali ke Indonesia pertengahan Januari tahun depan untuk membantu segera dibentuknya perusahaan penerbangan yang baru, Garuda Indonesian Airways. (*Antara*)

1949 DESEMBER 24.

* Delegasi Indonesia di bawah pimpinan Dr. Hatta, Perdana Menteri pertama RIS, singgah di Kalkutta malam ini dalam perjalanan ke Amsterdam untuk menerima penyerahan kedaulatan dari Ratu Juliana hari Selasa mendatang.

  Dr. Hatta kepada wartawan menyatakan bahwa penyerahan kedaulatan itu akan berlangsung di Amsterdam, dan serentak dengan itu berlangsung

upacara di Yogyakarta, di mana bendera Belanda akan diturunkan dan bendera Merah-Putih dikibarkan.

Ia tambahkan, persetujuan Den Haag telah diratifikasi oleh parlemen Republik dan parlemen lain-lain negara di Indonesia dan “secara keseluruhan telah diterima oleh rakyat”.

Dr. Hatta mengucapkan terima kasih kepada India atas peranannya dalam mengusahakan pemecahan masalah Indonesia. Rakyat Indonesia mengharapkan bahwa pada suatu hari Perdana Menteri India Nehru akan berkunjung ke Indonesia.

Segera sesudah kedatangan Dr. Hatta, Menteri Kesehatan India Rajkumari Amrit Kaur tiba di lapangan terbang dalam perjalanan ke Yogyakarta untuk mewakili India dalam upacara penyerahan kekuasaan.

Rajkumari Amrit Kaur dan Dr. Hatta bertukar salam dan melakukan pembicaraan singkat. Menteri Kesehatan akan berangkat ke Indonesia besok pagi, disertai calon Duta Besar India Dr.P. Subbaroyan. (*Antara*)

* Di Jakarta berlangsung upacara serah terima Komando Basis Jakarta dari Letnan Kolonel De Vries dari Divisi C/7 Desember Belanda kepada Letnan Kolonel R. Taswin Natadiningrat dari Divisi Siliwangi.

Sejak saat itu tanggung jawab keamanan dan pertahanan wilayah kota Jakarta berada di tangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). (SDA111)

* Di Semarang berlangsung upacara timbang terima Kota Semarang dari pihak Belanda kepada pihak RI. (*PEH92*)

* Konferensi Islam Seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta antara 20-25 Desember dan dihadiri oleh 175 organisasi Islam mewakili 5 juta orang Islam telah mengambil resolusi berikut:

1. Membentuk Kongres Islam Indonesia dengan Sekretariatnya.
2. Mengembangkan satu kebijakan politik Islam untuk ditawarkan kepada semua organisasi Islam.
3. Mendukung mosi Masyumi tentang pembentukan sebuah Komisi untuk mempelajari masalah Darul-Islam.
4. Membentuk organisasi wartawan Islam.

5. Melebur semua organisasi pemuda dan mahasiswa Islam dalam satu organisasi.
6. Menyatakan kesetiakawanan kepada bangsa-bangsa yang sedang berjuang memperoleh kemerdekaannya.
7. Mengucapkan terima kasih kepada negeri-negeri yang bersimpati kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya negeri-negeri Islam. (*Antara*)

* Wakil Perdana Menteri atas nama Presiden Republik Indonesia mengeluarkan pengumuman berisi keputusan yang menyatakan bahwa:

1. Jabatan Komisaris Pemerintah dan Gubernur Militer dihapuskan;
2. Provinsi Sumatra Utara dipecah menjadi dua: 1) Provinsi Aceh yang meliputi Keresidenan Aceh dan sebagian daerah Kabupaten Langkat dahulu, yang terletak di luar daerah Negara Sumatra Timur; 2) Provinsi Tapanuli/Sumatra Timur yang meliputi Keresidenan Tapanuli, sebagian daerah Kabupaten Tanah Karo dan daerah Sumatra Timur Selatan di luar Negara Sumatra Timur

Keputusan ini ini mulai berlaku pada 1 Januari 1950. (TS322)

* Wakil Perdana Menteri mengumumkan pemberhentian dengan hormat dari jabatannya: Komisaris Pemerintah untuk Sumatra Utara Mr.S.M. Amin, Komisaris Pemerintah untuk Sumatra Tengah Mr.Mohd. Nasrun, dan Komisaris Pemerintah untuk Sumatra Selatan Dr.M. Isa.

Diberhentikan juga dengan hormat dari jabatannya: Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Aceh, Langkat, dan Tanah Karo Tgk.M. Daud Beureueh, dan ditetapkan menjadi Kepala Daerah dengan pangkat Gubernur untuk Daerah Provinsi Aceh.

Diberhentikan juga dengan hormat dari jabatannya: Gubernur Militer Tapanuli Dr.F. Lumbantobing, dan ditetapkan menjadi Kepala Daerah dengan pangkat Gubernur untuk Provinsi Tapanuli/Sumatra Timur, Gubernur Militer Sumatra Tengah Mr.St.Mohd. Rasjid dan ditetapkan menjadi Kepala Daerah dengan pangkat Gubernur untuk Provinsi Sumatra Tengah, Gubernur Militer Sumtra Selatan Dr.A.K. Gani dan menetapkan Dr.M. Isa menjadi Kepala Daerah dengan pangkat Gubernur Provinsi Sumatra Selatan.

Keputusan ini berlaku mulai 1 Januari 1950. (TS323)

* Dr. H.M. Hirschfeld, Komisaris Tinggi Belanda untuk RIS, telah berangkat ke Jakarta dengan pesawat malam ini.

  Ia katakan, ia pergi ke Indonesia “dengan penuh kepercayaan” untuk memegang jabatannya yang baru ini sesudah penyerahan kedaulatan kepada Indonesia hari Selasa mendatang.

  “Tugas saya ini berat dan rawan, tapi saya percaya akan ada kerja sama ekonomi yang bermanfaat antara Belanda dan Indonesia,” tambahnya.

  “Saya akan berusaha keras untuk memperoleh kepercayaan dari para pemimpin Indonesia.”

  Di antara mereka yang melepas Dr. Hirschfeld adalah Menteri Seberang Lautan J.H. van Maarseveen, Menteri Perekonomian. J.R. van den Brink, Menteri Luar Negeri D.U. Stikker, Menteri Pertahanan W.F. Schokking, dan Mr.I. Goetzen, Menteri tanpa portefolio. (*Antara*)

* Dalam sebuah pesan menjelang keberangkatannya ke Jakarta, calon Duta Besar India untuk Indonesia Dr.P. Subbaroyan mengatakan: “*Asia sekarang hidup, dan era baru perdamaian dimulai. Banyak hal tergantung dari bangsa-bangsa Eropa, menyadari bahwa hari imperialisme kolonial sudah lewat dan hubungan baik antara Asia dan Eropa hanya dapat dibangun atas dasar persamaan.*”

  Laporan di atas disiarkan oleh Dinas Penerangan India tadi malam. (*Antara*)

* Untuk pertama kali sebuah pesawat komersial India akan bertolak ke Jakarta dalam perjalanan ke Australia, demikian Dinas Penerangan India mengumumkan.

  Sementara itu diperoleh kabar bahwa sebuah pesawat Bharat Airways akan tiba besok (25 Desember), yang beberapa jam kemudian akan meneruskan perjalanan ke Australia. (*Antara*)

* Menteri Kesehatan India Rajkumari Amrit Kaur disertai calon Duta Besar India untuk Indonesia Dr.P. Subbaroyan dan Tuan J.K. Atal, Wakil

Sekretaris Kementerian Luar Negeri India, akan tiba di Jakarta besok (25 Desember) sekitar jam 13.50 dengan pesawat, demikian Dinas Penerangan India mengumumkan. Untuk menyambut Menteri Kesehatan itu akan diadakan resepsi terbuka untuk masyarakat India di tempat kediaman Konsul Jenderal India pada jam 17.00. (*Antara*)

1949 DESEMBER 25.

* Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat (RIS) Mohammad Hatta telah tiba dengan pesawat di Amsterdam hari ini. Di Negeri Belanda ia akan menghadiri upacara penyerahan kedaulatan kepada Indonesia, yang akan berlangsung pada 27 Desember. (*Antara*)

* Kesatuan-kesatuan Tentara Nasional Indonesia mulai memasuki Kota Medan untuk mengambil alih tugas-tugas keamanan dan garnisun dari pihak Belanda. Prajurit-prajurit Indonesia berbaris dengan teratur menuju tempat-tempat kedudukan yang telah ditentukan. (TS323)

1949 DESEMBER 26.

* Selama Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Serikat (RIS) Mohammad Hatta tidak hadir, Menteri Negara Mr. Mohammad Rum akan dipercaya memimpin Kementerian Luar Negeri, demikian menurut dekrit Presiden Sukarno. (*Antara*)

* Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta tiba di lapangan terbang Schiphol kemarin. Delegasi disambut oleh Menteri Luar Negeri Belanda D.U. Stikker, Menteri Seberang Lautan Van Maarseveen, dan Ketua Majelis Tinggi Prof. Kranenburg.

  Menjawab pertanyaan wartawan Hatta mengatakan bahwa belum diambil keputusan siapa yang akan menjadi Komisaris Tinggi Indonesia di Negeri Belanda. Hatta menolak membenarkan atau membantah dicalonkannya Sultan Hamengku Buwono sebagai Komisaris Tinggi di Negeri Belanda. Tentang disebutkannya Sjahrir sebagai bakal Menteri Luar Negeri RIS, Hatta menyatakan sukar bagi Sjahrir memegang jabatan Menteri Luar Negeri, karena partainya menolak menerima tanggung jawab kebijakan Pemerintah Republik yang menghasilkan Persetujuan Den Haag. Delegasi Hatta direncanakan kembali ke Indonesia pada 31 Desember.

Dua jam sesudah kedatangan Hatta, utusan Indonesia ke PBB, L.N. Palar, mendarat dari New York. Palar akan kembali ke AS pada 26 Desember bersama Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Komisaris Perdagangan Republik di AS yang diharapkan kedatangannya di Den Haag besok dari Indonesia. (*Antara*)

* Menjelang penyerahan kedaulatan kepada RIS, Sultan Hamengku Buwono, Menteri Pertahanan merangkap Koordinator Keamanan menghimbau kepada setiap penduduk Indonesia untuk membantu menjaga keamanan, masing-masing di lingkungan sendiri, dan membantu pemerintah melaksanakan tugasnya.

Ia katakan, ia telah memberikan kuasa kepada pejabat di berbagai tempat di Indonesia untuk melaksanakan tugas keamanan sebelum dan sesudah penyerahan kedaulatan sampai kekuasaan tersebut ditarik kembali olehnya.

Koordinator Keamanan menyatakan bahwa ia telah menginstruksikan kepada para wakilnya untuk memberikan segala bantuan kepada pejabat yang sah dalam melaksanakan tugas, dan sedapat mungkin menghindari tindakan yang dapat mendatangkan kekhawatiran dan kekecewaan pada penduduk.

Ketika menjelaskan bahwa tindakan preventif punya nilai lebih besar dari tindakan represif, Sultan Hamengku Buwono mengatakan: “Di mana gangguan terhadap keamanan umum terjadi, atau kepentingan negeri terbahayakan, dan Pemerintah Sipil dan kekuasaannya tidak dapat mengatasi, jangan ragu-ragu bertindak cepat dan tegas.”

Menteri Pertahanan menyatakan bahwa rasa puas dengan terwujudnya penyerahan kedaulatan secara de facto dan de jure tidak seharusnya dirayakan dengan pesta dan dengan pengeluaran banyak uang. Ia katakan: “Perlu disadari bahwa beribu-ribu rakyat kita masih menderita sebagai akibat perang, lebih dari itu kita harus menyadari bahwa negara kita masih harus memulai eksistensinya dengan ekonomi sebaik mungkin. Kalau toh penyerahan kedaulatan ini harus dirayakan, sebaiknya dirayakan secara khidmat di dalam hati kita.”

Sultan mendesak industri vital agar tetap bekerja pada hari penyerahan kedaulatan, sehingga kehidupan normal dan kegiatan ekonomi dapat

berjalan terus. "Saya beranggapan bahwa tidak terganggunya kehidupan normal dan kegiatan ekonomi merupakan salah satu syarat hidup yang penting, oleh karena itu setiap gangguan seperti menaikkan harga, menyebarkan desas-desus dsb. akan dianggap sebagai pelanggaran hukum yang harus ditindak dengan keras."

Sultan mengingatkan mereka "yang tidak senang melihat kemerdekaan Indonesia", mereka "yang akan memulai aksi menghalangi perkembangan RIS", atau mereka "yang untuk keuntungan diri sendiri dan tanpa mempedulikan kepentingan negeri dan rakyat" menyalahgunakan masa transisi demi tujuan mereka sendiri, bahwa seluruh kekuatan negara siap bertindak apabila terjadi gangguan terhadap kedamaian. "Kalau terpaksa, mereka akan bertindak cepat, keras dan tegas, kalau perlu dengan senjata," kata Sultan, "tapi saya dengan tulus berharap bahwa tindakan demikian tidak akan diperlukan." (*Antara*)

* Sesudah berwawancara dengan Perdana Menteri Hatta selama dua setengah jam di Hotel Wittebrug, Palar menyatakan kepada pers bahwa sesudah penyerahan kedaulatan, masalah Indonesia akan tetap masuk agenda Dewan Keamanan PBB. Palar mengatakan bahwa New Guinea (Irian Barat) tetap menjadi isu antara Belanda dan Indonesia. Menurutnya, "selama isu ini belum dipecahkan, masalah Indonesia ini akan tetap masuk dalam agenda Dewan Keamanan PBB".

Palar datang di Negeri Belanda untuk melaporkan kepada Hatta situasi di PBB, demikian juga pandangan-pandangan dalam Departemen Luar Negeri AS dan Pemerintah Amerika mengenai Indonesia. Mengenai veto Rusia terhadap ucapan selamat PBB untuk RIS dan Belanda sehubungan dengan hasil-hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Palar menyatakan bahwa beberapa anggota PBB menganggap sikap Rusia itu merupakan pendahuluan veto Sovyet mendatang terhadap keanggotaan Indonesia dalam PBB.

Namun Palar menambahkan bahwa sebagian anggota PBB beranggapan, walau Rusia memveto ucapan selamat tersebut, masih belum pasti apakah Sovyet Rusia akan memveto masuknya RIS dalam PBB. Menurut Palar, Rusia rupanya ingin menunggu dan melihat dahulu bagaimana sikap bangsa-bangsa di Indonesia, dan apakah mereka mendukung atau menolak hasil-hasil Konferensi Meja Bundar.

"Bagaimanapun juga," sambung Palar, "Sovyet Rusia tidak mau berisiko kehilangan reputasi di tengah bangsa-bangsa di negeri-negeri dan koloni-koloni Asia yang menghargai kemerdekaan Indonesia." Palar menyimpulkan: "Sehubungan dengan ini saya berpendapat, akan baik kiranya bagi RIS untuk tidak lekas-lekas mengajukan lamaran untuk menjadi anggota PBB." (*Antara*)

* Persiapan untuk upacara penyerahan kedaulatan berjalan lancar, sementara itu kehidupan di Jakarta menjelang kejadian besar itu berlangsung seperti biasa. Gapura di tempat-tempat penting dan kibaran bendera Merah-Putih memberikan kesan pesta, sementara penduduk dengan tenang menanti terjadinya perubahan kekuasaan itu. Menurut pejabat militer Republik, penyerahan kekuasaan de facto akan terjadi dengan datangnya pasukan TNI di Jakarta.

Koordintor Keamanan Hamengku Buwono memberikan ulasan terakhir pada persiapan pengambilalihan tanggung jawab menjaga keamanan dengan mengucapkan pidato radio kepada rakyat. Di dalam pidatonya ia mendesak rakyat supaya tenang, dan kepada para pejabat baik sipil maupun militer untuk memperhatikan faktor psikologis dalam melaksanakan kewajiban menjaga hukum dan ketertiban. Ia nyatakan bahwa pengganggu kedamaian akan ditindak sesuai dengan peraturan keadaan perang.

Sementara itu wakil-wakil negeri asing, termasuk negeri-negeri Liga Arab, Australia, Birma, Tiongkok, Mesir, Inggris Raya, India, Portugal, Filipina, dll. yang akan menghadiri upacara sudah berdatangan.

Upacara akan berlangsung hari ini jam 17.00 dengan pidato Wakil Tinggi Mahkota Belanda Lovink. Sesudah pembacaan dan penandatanganan protokol penyerahan kedaulatan, penurunan bendera Belanda Merah-Putih-Biru, dan pengibaran bendera Indonesia Merah-Putih, Komisaris Tinggi akan berangkat ke lapangan terbang untuk kembali ke Negeri Belanda.

Presiden yang baru diharapkan tiba di lapangan terbang Kemayoran besok jam 11.15. Bendera pusaka Merah-Putih yang pernah dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaana tahun 1945, dan menyertai Sukarno ke kamp interniran di Bangka, akan mengawal perjalanannya ke istana kepresidenan.

Direncanakan, Presiden akan mengucapkan pidato dalam upacara pelantikan di istana, dan petang harinya Presiden akan menjamu tamu-tamu dalam dan luar negeri. (*Antara*)

* Panglima Tentara & Territorium Aceh mengirim delegasi ke Sabang di bawah Kepala Staf Tentara & Territorium Aceh, Mayor Husinsjah, sebagai inisiatif untuk membuka perundingan dengan Komando Militer Belanda di Sabang mengenai penyerahan Sabang kepada kekuasaan RIS.

Dengan alasan belum mendapat instruksi dari atasannya, Komando Militer Belanda di Sabang menolak berunding.

Sementara itu hubungan antara pembesar Belanda dengan utusan Republik Indonesia menjadi tegang karena pembesar Belanda tidak mau menerima kedatangan delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Bupati Aceh Besar, Zaini Bakry.

Menurut Residen Belanda, Molenaar, yang memimpin pemerintahan di Pulau Weh, penyerahan pemerintahan dari tangan Kerajaan Belanda ke tangan Republik Indonesia Serikat telah dilakukan. Pulau Weh tunduk langsung kepada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dan bukan kepada Pemerintah di Aceh. Dan kewenangan masalah keamanan/ketertiban umum telah dilimpahkan kepada Komisaris Polisi Vermulen. (TS325)

* "Saya bahagia berada di bumi Indonesia untuk kedua kali ini. Saya ingat dengan jelas kunjungan saya yang pertama ke negeri ini pada 1940, sebentar sebelum meletusnya Perang Pasifik," demikian dinyatakan oleh Jenderal Wu Tu-Chen kepada pers setibanya di Jakarta pada jam 16 hari ini. Jenderal Wu akan mewakili Pemerintah Tiongkok dalam upacara penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada Indonesia besok. Ia katakan, penyerahan kedaulatan ini betul-betul merupakan kejadian historis yang "membuka bab baru dalam hubungan antara kedua bangsa". Ditambahkannya, kenegarawanan para pemimpin bangsa Belanda dan Indonesia telah membuktikan mereka sama dalam menanggapi tuntutan hubungan antar mereka, dan telah menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan internasional yang tidak dapat dipecahkan dengan kemauan baik dan saling pengertian.

Menurut Jenderal Wu, bagi Pemerintah Tiongkok, diperolehnya kedaulatan dan kenegaraan penuh oleh bangsa Indonesia ini tidak boleh tidak me-

rupakan kepentingan khusus, sebab di Indonesia selama ratusan tahun, lebih sejuta orang asal Tiongkok dan berdarah Tiongkok telah hidup dan berkembang, bekerja dan mencucurkan keringat untuk memainkan peranannya bagi perkembangan ekonomi dan budaya negeri yang mereka terima sebagai negeri mereka sendiri ini.

"Melalui mereka telah tumbuh hubungan persaudaraan antara rakyat Tiongkok dan rakyat Indonesia, begitupun antara rakyat Tiongkok dengan rakyat Kerajaan Belanda. Dengan datangnya fajar era baru, saya percaya hubungan ini akan diperkokoh dan ditingkatkan demi kemaslahatan tidak hanya diri mereka sendiri, tetapi juga demi perdamaian dunia," demikian Jenderal Wu.

Mengenang kunjungannya yang pertama sebelum Perang Pasifik, Jenderal Wu mengatakan, "kesopanan dan keramahtamahan yang waktu itu ditunjukkan kepada saya masih segar terpateri dalam ingatan saya. Persahabatan yang waktu itu terjalin dengan para pemimpin rakyat tetap terjaga bertahun-tahun yang lewat ini, dan selalu menjadi sumber kepuasan besar dalam diri saya." (*Antara*)

* Komisaris Tinggi Inggris di Asia Tenggara Malcolm MacDonald telah berangkat hari ini ke Jakarta. Ia akan mewakili Inggris dalam upacara penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada RIS. (*Antara*)

1949 DESEMBER 27.

* Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), Mr. Assaat, dilantik menjadi Pejabat Presiden Republik Indonesia (RI), dan Prawoto Mangkusasmito dilantik menjadi Wakil Ketua KNIP, di istana kepresidenan, Yogyakarta. (*LUxxii; LU t.h.;* TS317)

* Presiden Sukarno dan seluruh staf pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) memasuki ibukota Jakarta dari Yogyakarta. (*PSPB2 31*; RKZ111; RM189)

* Kapten Poniman mendapat kepercayaan memimpin pasukan kehormatan dalam rangka upacara pengakuan kedaulatan di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam upacara itu bendera Triwarna Belanda diturunkan, digantikan

dengan bendera Dwiwarna Merah-Putih, sebagai tanda berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia.

Selepas upacara, Wakil Tinggi Kerajaan Belanda di Indonesia, A.H.J. Lovink, langsung terbang ke Negeri Belanda. (*PEH92*; RKI127)

* Jam 09.00: Lebih dari 3.000 orang berhimpun di Istana Presiden ketika Menteri Kesehatan India Rajkumari Amrit Kaur disertai calon Duta Besar India Dr. Subbaroyan tiba dari Jakarta untuk menjumpai Presiden Sukarno dan secara pribadi menyampaikan kepadanya ucapan selamat Pandit Nehru atas nama pemerintah dan rakyat India.

  Rajkumari pergi ke Yogyakarta tanpa pemberitahuan sebelumnya, karena itu ketika mendengar kabar tentang kedatangan untuk pertama kali seorang menteri dari India, rakyat berbondong-bondong datang ke Istana. Di lapangan terbang Yogyakarta, Rajkumari disambut oleh Pejabat Perdana Menteri, dan dari sana ia langsung menuju Guest House Presiden. Jam 09.00 ia dan rombongan menuju ke Istana.

* Ia melukiskan pertemuannya yang pertama dengan Presiden dan istri dengan kata-kata “sangat menyenangkan”, dan menambahkan: “Mereka adalah kepada negara yang paling mempesona yang pernah saya temui.”

  Rajkumari dan calon Duta Besar India kagum akan pengetahuan mendalam Presiden mengenai India dan pengetahuan pribadinya mengenai pemimpin-pemimpin politik India. Rajkumari khususnya merasa terharu ketika Presiden, di tengah percakapan, banyak mengutip tulisan-tulisan Gandhi.

  Ketika memperkenalkan Rajkumari kepada khalayak di depan Istana sebagai Wakil Panditji (Nehru), Presiden mengatakan bahwa tidak ada teman yang lebih akrab dari Indonesia selain Panditji. Dengan penuh perasaan Presiden menekankan betapa berutang budi Indonesia kepada India atas segala yang dilakukan India bagi kemerdekaan Indonesia.

  Membalas kata-kata Presiden yang hangat mengenai India, Rajkumari mengingatkan adanya ikatan budaya yang lama antara India dan Indonesia, dan ia katakan bahwa ikatan itu akan terus diperkokoh, karena India maupun Indonesia kini sudah merdeka.

Dari Istana Presiden, Rajkumari dan rombongan mengunjungi Ny Hatta, dan kembali ke Jakarta sebelum makan siang. Di Jakarta ia akan menemui wakil-wakil pemimpin wanita dalam sebuah acara makan siang, selanjutnya ia akan menemui lebih banyak lagi wanita pada 29 Desember.

Tanggal 30 Desember antara jam 10.30-12.00 masyarakat India di Jakarta akan mengadakan resepsi untuk menghormati Menteri Kesehatan India. (*Antara*)

* Jam 09.00: Penyerahan komando dari Jenderal Mayor P. Schouten di pihak Belanda kepada Kolonel A.E. Kawilarang di pihak Republik Indonesia di markas komando Jalan Serdang, Kutaraja (sekarang Banda Aceh). (TS323)

* Jam 10.00: Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr.A.M.J.A. Sassen, dan Ketua Delegasi RIS, Mohamad Hatta, membubuhkan tandatangan pada piagam penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada RIS sebagai anggota Uni Indonesia-Belanda dalam upacara yang khidmat di Istana Den Dam, Amsterdam.

  Dengan demikian berdirinya negara RIS yang merdeka dan berdaulat menjadi kenyataan.

  Sementara itu di Yogyakarta berlangsung upacara penyerahan kedaulatan dari tangan Republik Indonesia (RI) kepada RIS.

  Jam 17.00: Di Istana Gambir, Jakarta, Wakil Tinggi Kerajaan Belanda di Indonesia, A.H.J. Lovink, dan Sultan Hamengkubuwono IX membubuhkan tanda tangan pada naskah penyerahan kedaulatan kepada RIS.

  Sultan Hamengkubuwono IX didampingi oleh Kolonel T.B. Simatupang dan Letnan Kolonel Daan Jahja beserta sejumlah pejabat militer dan Indonesia lain.

  Selain pejabat Pemerintah Belanda, hadir juga sejumlah undangan yang terdiri dari perwakilan negara asing yang kebanyakan dari Asia, seperti Pote Sarasin dari Thailand, seorang senator dari Filipina, seorang menteri wanita dari India, Duta Besar Pakistan dll.

  Dengan demikian secara formil Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dan kedaulatan penuh negara Indonesia di seluruh bekas wilayah Hindia

Belanda (kecuali Irian Barat). (AT299; *KU137;* LM2,7,54; SDA113; S6 72; WG180,212)

* Ratu Juliana dari Negeri Belanda menandatangani "akta penyerahan kedaulatan" hari Selasa ini dan dengan demikian membentuk Republik Indonesia Serikat dan mengakhiri 350 tahun kekuasaan Belanda atas Jawa dan Sumatra. Dengan akta itu juga Ratu meresmikan Uni Indonesia Belanda dengan dirinya sebagai Kepala Tituler, yang dimaksudkan sebagai kerja sama sukarela kedua negeri untuk "memajukan kepentingan bersama". Upacara khidmat berlangsung di "ruangan warga negara" Istana Kerajaan yang kuno. Duduk juga bersama Ratu di sekitar meja oval adalah suaminya, Pangeran Bernhard, semua anggota Kabinet Belanda, dan delegasi Indonesia di bawah pimpinan Perdana Menteri Mohammad Hatta.

  Pembentukan negara baru dan Uni Indonesia Belanda menjadi resmi sesudah Ratu menandatangani dua dokumen. Dengan dokumen pertama ia "menyetujui tertib hukum yang baru" sebagaimana tertulis dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag yang telah diratifikasi oleh parlemen Belanda maupun Indonesia. Dokumen kedua adalah "teks resmi penyerahan kedaulatan dan pengakuan" atas Republik Indonesia Serikat. Dalam akta penyerahan Ratu Juliana menjamin bahwa "penyerahan kedaulatan akan memiliki kekuatan hukum" dan mengumumkan bahwa "Uni Indonesia Belanda telah dibentuk". Hatta menerima kedaulatan atas nama Republik dan menyetujui "pembentukan Uni Indonesia Belanda".

  Para menteri Kabinet Belanda dan anggota delegasi Indonesia memberikan kontrasein. Sesudah penandatangan pakta itu Ratu mengucapkan pidato singkat kepada kedua delegasi dan sejumlah pejabat yang hadir. Beberapa menit kemudian Lonceng Istana yang tua memainkan lagu kebangsaan Belanda dan Indonesia. (*Antara*)

* Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia Sjafruddin Prawiranegara mengeluarkan Keputusan No. 14/Keh/Wkpm tentang abolisi (pembebasan dari tuntutan) bagi mereka yang tersangkut dalam pelanggaran hukum di Daerah Aceh.

  Keputusan dibuat setelah mendengarkan pendapat dari Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatra Utara, Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, Kepala Kejaksaan, dan Kepala Kepolisian Daerah Aceh.

Dasar pertimbangan: Suasana tanah air telah berubah ke arah kejernihan, dan tanggal 27 Desember 1949 telah ditetapkan sebagai tanggal penyerahan kedaulatan oleh Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat.

* Sore: Di Lapangan Esplanade, Kutaraja, berlangsung acara untuk mengikuti upacara penyerahan kedaulatan di Istana Gambir, Jakarta, dan di Negeri Belanda.

  Acara didahului dengan bunyi sirene, menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya", dan pengibaran bendera Merah Putih. (TS323)

* Jam 14.00: di Pendopo, tempat kediaman resmi Wakil Perdana Menteri Sjafruddin Prawiranegara di Kutaraja (sekarang Banda Aceh), berlangsung acara pengikuti siaran Radio Jakarta sekitar penyerahan kedaulatan oleh Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, diikuti oleh pembesar sipil dan militer serta ribuan rakyat.

  Kemudian acara dilanjutkan dengan acara daerah.

  Dalam pidatonya, Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatra Utara, Mr.S.M. Amin, a.l. mengatakan:

  "Pada saat yang bersejarah ini tercapailah cita-cita kita bersama, karenanya kita harus mengucap syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Taala.

  Hari ini berakhirlah keadaan yang telah lama menjadi pokok perselisihan antara dua aliran di dunia ini, aliran reaksioner dan aliran progresif. Aliran reaksioner yang berupa kekuasaan dengan pengikut yang tak sedikit jumlahnya di satu pihak, melawan aliran progresif yang juga berupa kekuasaan yang maha hebat, dengan pengikut yang tidak sedikit jumlahnya di seluruh pelosok negeri ini.

  Empat tahun lamanya pengikut kedua aliran itu berhadapan satu dengan yang lain, menggunakan segala usaha dan tenaga untuk mempertahankan tuntutan masing-masing.

  Tidak sedikit jumlahnya pencinta kemerdekaan gugur meninggalkan istri, ibu, bapak, anak atau sanak saudara yang bersedih. Dengan karunia Allah Yang Maha Kuasa, akhirnya segala pengorbanan itu ternyata tidak sia-sia. Berkat pengorbanan jiwa, tenaga dan harta bangsa kita, tercapailah persetujuan antara Kerajaan Belanda dengan Pemerintah Indonesia, dalam

mana pihak Belanda menyatakan kesediaannya menyerahkan kedaulatan kepada Negara Republik Indonesia Serikat.

Cita-cita bangsa Indonesia untuk mengambil kedudukan di samping negara-negara merdeka yang lain di dunia ini telah tercapai. Di hadapan kita membentang masa depan yang penuh pengharapan, kebahagiaan, kesentosaan, dan kemakmuran.

Sekalipun demikian janganlah kita lupa bahwa di samping kenikmatan, akan ada juga pengalaman pahit, penderitaan berat, dan kesulitan hebat yang mungkin kita hadapi.

Menjadi kewajiban kita segenap warga negara untuk memelihara dan menghormati hukum. Kita harus insaf, bahwa hak-hak demokrasi yang dijamin oleh Undang-undang Dasar tidak berarti membuka pintu untuk melancarkan kritik di luar garis perikemanusiaan.

Kemerdekaan tidak berarti kemerdekaan liar, tetapi kemerdekaan teratur yang hanya dapat diwujudkan dengan cara-cara tertentu menurut garis-garis yang ditetapkan dalam undang-undang, sesuai dengan perikemanusiaan, tata tertib, dan sopan santun.

Bangsa Indonesia saat ini berdiri di depan pintu gerbang memasuki jaman baru, jaman kejayaan dan kebesaran yang kekal abadi. Untuk itu bangsa Indonesia masih harus melakukan perubahan agar dapat mengatasi kesulitan dan rintangan yang masih akan dihadapinya.

Bangsa kita pernah mengenal jaman emas, ketika beberapa kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit, Mataram, Aceh dll. tegak berdiri dengan jayanya. Waktu itu segala lapangan penghidupan mengalami kemajuan tanpa ada tolok bandingannya. Sejarah menyatakan kepada kita, kapal-kapal Indonesia sudah mengarungi samudra luas, saudagar bangsa kita dapat dijumpai di seluruh penjuru dunia, kebudayaan kita, perguruan kita, pendek kata segalanya berjalan dengan baik dan teratur, dan setiap warga negara hidup dalam kebahagiaan dan kesentosaan.

Marilah kita melakukan persiapan lahir dan batin untuk menjelang jaman di mana setiap kita dapat hidup sebagai warga dari negara yang merdeka dan berdaulat, dalam keamanan dan ketenteraman, dalam rukun dan damai, dalam kebahagiaan, kesentosaan, dan keadilan."

Selanjutnya Gubernur Militer Tgk. Muhd. Daud Beureueh mengatakan a.l. bahwa saat kita bergembira menerima pengakuan kedaulatan yang bulat

dan tidak bersyarat sebagai hasil jerih payah, usaha, dan perjuangan nenek moyang kita, marilah kita mengucap syukur dan berdoa ke hadirat Allah SWT semoga kita sebagai bangsa yang telah merdeka dapat mengatur dan menyusun kemakmuran bangsa.

Dan semoga kita sanggup mengekang dan mengendalikan hawa nafsu, berpedoman kepada akal yang suci.

Kemudian atas nama rakyat Sumatra Utara, anggota Badan Eksekutif Tgk. Mohd. Nur el Ibrahimy menyatakan kegembiraannya atas berlangsungnya penyerahan kedaulatan. Ia menyatakan keyakinannya bahwa ini adalah berkat kerja sama yang erat antara rakyat dan pemerintah.

Ia pun minta perhatian dari Pemerintah agar semua pasal perjanjian yang dihasilkan dalam KMB dapat dilaksanakan. Kalau tidak, pasal-pasal perjanjian itu hanya akan mengekalkan pengaruh dan penjajahan di Indonesia. (TS327-328)

* Di Lapangan Blang Padang, Kutaraja, berlangsung pasar malam untuk menyambut penyerahan kedaulatan oleh Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat.

  Menurut rencana, pasar malam akan berlangsung sampai 3 Januari 1950. (TS330)

* Upacara penyerahan kedaulatan oleh Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat di Amsterdam, di Istana Gambir, Jakarta, dan di Yogyakarta diikuti oleh rakyat Aceh dengan tenang lewat siaran radio. (TS330)

* Sebelum berangkat ke Negeri Belanda hari ini, Komisaris Tinggi Mahkota Belanda H.J. Lovink mengucapkan pidato radio ditujukan kepada orang Belanda di Indonesia dan mendesak mereka untuk menjunjung tinggi reputasinya di negara RIS yang baru di mana mereka akan menjadi tamu dan teman bangsa baru yang bersama rakyat Belanda terikat dalam Uni Indonesia-Belanda. Lovink mengatakan bahwa ia yakin orang Belanda baik yang bersedia menerima kewarganegaraan Indonesia karena cinta kepada negeri ini maupun yang tidak, akan menjunjung tinggi dan menjaga nama baik orang Belanda di negara RIS yang baru. Ia mendesak rekan-rekan senegerinya untuk terus bekerja bagi negeri ini sebagaimana mereka

lakukan di masa lalu, dan berharap mereka akan setia kepada tugas rakyat Belanda di Indonesia. (*Antara*)

* India hari ini bergembira dengan datangnya kemerdekaan bagi Indonesia. Gubernur Jenderal Shri G. Rajagopalachari, Perdana Menteri Pandit Nehru, dan para pemimpin penting lainnya telah mengirimkan ucapan selamat kepada Republik yang baru ini.

  Gubernur Jenderal dalam pesannya kepada Presiden RIS menyatakan:

  "Pada hari peresmian khidmat Republik Indonesia Serikat ini, Tuan Presiden, terimalah ucapan selamat dari rakyat dan Pemerintah India, dan ucapan selamat dari diri pribadi saya dengan lahirnya Republik Tuan."

  "Ini adalah suatu kejadian yang sangat penting dalam sejarah Asia dan dunia, bahwa kemerdekaan Tuan telah disempurnakan dengan usaha bersama di meja perundingan. Saya tidak sangsi bahwa pengaruh Republik Tuan yang baru akan merupakan faktor yang menstabilkan, ketika bangsa-bangsa di dunia di mana-mana mendambakan perdamaian dan kemajuan."

  Perdana Menteri India Pandit Nehru dalam pesannya kepada Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat menyatakan:

  "Atas nama rakyat dan Pemerintah India saya sampaikan ucapan selamat yang sehangat-hangatnya kepada rakyat dan pemerintah Republik Indonesia Serikat. India mengikuti dengan kagum usaha-usaha rakyat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaannya, dan kami bergembira bahwa tujuan itu telah dicapai dalam suasana perdamaian dan persahabatan—MERDEKA."

  Shri S.K. Patil, Wali Kota Bombay dan Presiden Liga Indonesia di India, menyatakan dalam pesannya:

  "Seperti kami, rakyat Indonesia telah bekerja keras dan mencucurkan darah untuk kemerdekaannya. Bersama India, Indonesia harus memainkan peranan penting dalam mewujudkan tujuan rakyat Asia."

  Banyak lagi pemimpin terkemuka India telah mengirimkan ucapan selamat kepada Indonesia dalam kesempatan ini, termasuk Shri K.M. Munshi, Anggota Majelis Konstitusi India Shri K.V. Rao, Sekretaris Kongres Shri V.V. Giri, Komisaris Tinggi India di Srilanka, dan Shri C.P. Kamaswamy Iyer, bekas Ketua Dewan Travancore (India Selatan). (*Antara*)

1949 Desember 28.

* Jam 10.00: Presiden Sukarno dan keluarga dengan pesawat istimewa berwarna Merah-Putih dari perusahaan Garuda Indonesian Airways yang baru didirikan, terbang ke Jakarta dari Yogyakarta.

  Riuh rendah sorak ribuan rakyat yang sejak pagi berjejal-jejal menunggu di Kemayoran.

  Jam 11.40 pesawat tiba di lapangan terbang Kemayoran. Berita tentang kedatangan Presiden di Jakarta itu disiarkan melalui radio. Ia dijemput dengan mobil terbuka dan dikawal secara ketat dari lapangan terbang Kemayoran. Dari mobil ia melambaikan tangan kepada masyarakat yang bagaikan lautan manusia di sepanjang jalan dari Kemayoran sampai istana.

  Dengan kata-kata Presiden sendiri:

  "28 Desember 1949, Bung Karno dengan membawa kemenangan kembali "pulang" [...]. Jam 11.40 pagi pesawat kepresidenan, satu-satunya pesawat dari Garuda Indonesian Airways yang berumur satu hari itu, mendarat di lapangan terbang Kemayoran Jakarta. [...] Dengan hati yang memukul-mukul aku turun menuju lautan manusia."

  [...] dalam suasana kemerdekaan dan kemenangan, Bung Karno 'pulang' ke Jakarta. Dan ia ingat benar betapa berjuta-juta orang membanjiri jalan-jalan. Mereka menangis, berteriak, memekik, 'Hidup Bung Karno, Hidup, Merdeka, Alhamdulillah'. Aku menangis. Kita telah merdeka." (AB390; LM54; *LUxxii*; *LU t.h.*; RKI127; SDA113)

* Surat kabar *Semangat Merdeka* di Kutaraja (sekarang banda Aceh) memberitakan bahwa Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatra Utara Mr.S.M. Amin akan meletakkan jabatan pada 1 Januari 1950. Ia pun akan meletakkan jabatannya sebagai Hakim Pengadilan Tinggi, Hakim Pengadilan Tinggi Tentara, dan Hakim Mahkamah Tentara Agung.

  Selanjutnya ia akan meninggalkan daerah ini pertengahan Januari mendatang. (TS332)

* Delegasi Pemerintah Republik Indonesia meninggalkan Kotaraja menuju Sabang untuk membicarakan penyerahan Pulau Weh oleh pihak Belanda

kepada Republik Indonesia Serikat. Delegasi dipimpin oleh Kepala Staf Tentara Territorium Aceh, Mayor Husinsjah.

Sepanjang jalan mulai dari pelabuhan, delegasi disambut oleh penduduk dan anak-anak pandu. Adapun penyambutan resmi dilakukan oleh Asisten Residen, Kontrolir, Kepala Polisi, dan Plaatselijk Militair Commandant Belanda.

Dalam perundingan resmi antara kedua belah pihak dicapai persetujuan mengenai penyerahan secepat mungkin Pangkalan Sabang berikut komandonya kepada Tentara Nasional Indonesia. (TS332)

1949 DESEMBER 29.

* Presiden Sukarno dan istri mengadakan resepsi di istana untuk kurang-lebih 2.000 orang tamu segala bangsa dan lapisan masyarakat. (*LUxxii*)

* “Di hadapan lautan manusia yang menyambut kedatanganku kembali ke Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 29 Desember 1949 aku mengucapkan: ‘Alhamdulillah, kita Merdeka!’ ... Saya menyampaikan salam kepada semua, kepada para perwira dan para prajurit tentara, kepada pegawai, kepada saudara-saudara tukang beca, saudara-saudara tukang sayur, si pegawai yang sekecil-kecilnya, tidak ada satu yang terkecuali ... sekali lagi aku mengucapkan terimakasih.” (AB239)

* Menteri Penerangan RIS Arnold Mononutu mengadakan pertemuan pertama dengan para wartawan Indonesia hari ini di gedung Kantor Berita *Antara*. Hadir Sekretaris Jenderal Kementerian Penerangan Ruslan Abdulgani.

  Dalam pertemuan itu Mononutu menghimbau kerja sama para wartawan dan organ-organ pers dalam memberikan arti kepada “perjuangan” lebih lanjut Indonesia sesudah penyerahan kedaulatan. Ia katakan, kalau di masa lalu setiap usaha Pemerintah ditujukan untuk mempertahankan semboyan “Pax Neerlandica”, maka sejak sekarang usaha itu harus diganti dengan semboyan “Pax Indonesiana”. Dan ini hanya dapat diwujudkan jika “usaha-usaha kita dimahkotai keberhasilan dalam menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan di tengah massa rakyat Indonesia”.

  Menteri Penerangan menyatakan bahwa satu faktor dalam tugas pemerintah adalah tekanan pada “nasionalitas” yang menurutnya tidak seperti

yang dijunjung tinggi oleh pemerintah totaliter. Mononutu memutuskan hubungan dengan kebijakan pemerintah kolonial yang telah mati, yang melakukan diskriminasi terhadap berbagai kelompok ras. Ia tekankan bahwa Pemerintah Indonesia yang baru dalam melakukan kebijakannya hanya akan mengakui adanya satu nasion Indonesia dan orang asing, termasuk orang Belanda dengan siapa kita harus bekerja sama sekarang dan di masa depan.

Mengenai bantuan Pemerintah kepada pers nasional Menteri Penerangan mengatakan bahwa hal itu merupakan kewajiban aktual Pemerintah, tapi bantuan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai kedermawanan. (*Antara*)

* Netherlands New Guinea kemungkinan akan disatukan dengan RIS dalam waktu sekitar setahun, hingga hubungan erat antara Indonesia dan Australia menjadi lebih penting lagi dibandingkan sekarang, demikian dinyatakan oleh wakil Pemerintah Indonesia di Australia Dr. Usman hari ini sebelum terbang ke Manila.

Usman yang akan mewakili Indonesia dalam pelantikan Presiden Filipina menyatakan harapannya bahwa Pemerintah Australia yang baru akan melanjutkan hubungan dagang dan budaya yang seerat-eratnya dengan Indonesia. Ia tambahkan, Menteri Luar Negeri Australia Percy Spender telah memperlihatkan sikap persahabatan kepada Pemerintah Indonesia yang baru.

Usman akan kembali ke Australia dua minggu lagi untuk membentuk misi diplomatik Indonesia yang permanen di Australia. (*Antara*)

* Pemerintah Djumhana hari ini mengajukan pengunduran diri kepada "Wali Negara" Pasundan. Kepala negara itu meminta kabinet untuk melanjutkan pekerjaannya sampai pemerintah yang baru terbentuk.

Sementara itu Wali Negara telah berunding dengan Mr. Djuarsa, Mr. Kusna dan Dr. Yap Tjwan Bing tentang pembentukan pemerintah yang baru.

Mr. Kusna mengatakan kepada wartawan bahwa syarat pembentukan pemerintah yang baru adalah mencari kesepakatan antara berbagai partai politik untuk menyusun program kerja yang baru sama sekali. Ia tambahkan bahwa salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah peninjauan

kembali pemilihan anggota Parlemen RIS. Ia ungkapkan bahwa Wali Negara telah menyetujui untuk tidak membentuk kabinet baru sebelum membicarakan seluruh masalahnya dengan organisasi-organisasi rakyat dan partai-partai politik. (*Antara*)

* Segera sesudah pengakuan de jure Republik Indonesia Serikat (RIS) oleh Amerika Serikat, Presiden Truman mengirim ucapan selamat kepada rakyat Indonesia dan menyambutnya di tengah "masyarakat bangsa-bangsa yang merdeka", dan mengungkapkan rasa persahabatan AS kepada negara yang baru ini. "Masyarakat bangsa-bangsa merdeka dapat mengandalkan simpati dan dukungan mereka yang percaya kepada demokrasi dan hak atas pemerintahan sendiri," demikian dinyatakannya. Indonesia telah menunjukkan bahwa tujuan negara yang baru ini adalah nasionalisme yang sesungguhnya bagi Indonesia, dan bahwa tindakan agresi dan usaha kediktatoran asing untuk menindas kemerdekaan yang baru diperoleh ini akan dilawan dengan penuh kewaspadaan. (*Antara*)

* Kesatuan-kesatuan kecil pasukan Belanda akan dikirim ke Indonesia selama tahun 1950 untuk menggantikan kesatuan-kesatuan yang sudah tiba waktunya untuk didemobilisasikan, demikian dikatakan oleh Menteri Peperangan Belanda W.F. Schokking kepada Majelis Tinggi hari ini.

  Kekuasaan legal untuk mengirim pasukan ke luar negeri akan berakhir hari Sabtu mendatang. Menteri mengatakan bahwa penarikan seluruh pasukan Belanda dari Indonesia akan makan waktu, tapi tidak adil kiranya menahan mereka di sana lebih lama dari waktu yang ditentukan.

  Tapi Indonesia mungkin akan minta bantuan sebagian teknisi tentara Belanda untuk membangun negara yang baru ini. (*Antara*)

* A.H.J. Lovink, Wakil Tinggi Mahkota Belanda terakhir di Indonesia, telah tiba di Schiphol dari Jakarta sore ini. Lovink yang dijemput oleh beberapa menteri kabinet menyatakan kepada wartawan bahwa ia percaya penuh pada masa depan negara Indonesia yang baru, khususnya pada kerja sama Belanda-Indonesia.

  Ditanya tentang perasaan orang Belanda di Indonesia, Lovink mengatakan bahwa mereka mengerti sepenuhnya pentingnya penyerahan kedaulatan

yang historis itu. Ia tambahkan, walau masih ada beberapa kerusuhan, ia merasa yakin perdamaian dan ketertiban akan segera dipulihkan sepenuhnya di negeri itu. (*Antara*)

* Sekretaris Jenderal Liga Arab Azzam Pasha menyambut baik pembentukan RIS merdeka yang baru sebagai "kemenangan seluruh Timur dan semua rakyat yang terjajah di mana saja". Azzam Pasha mengenang dukungan aktif yang konsisten dari Liga Arab kepada Indonesia, dan menyatakan penghargaan kepada Negara Pakistan dan Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru dari India atas pembelaannya terhadap kemerdekaan Indonesia. Ia katakan bahwa sukses Indonesia ini merupakan tanda bahwa "imperialisme sedang menutup bab-babnya yang terakhir". (*Antara*)

* Warga Pakistan bersama warga Indonesia merayakan lahirnya Republik Indonesia Serikat berdaulat pada hari Selasa yang dinyatakan sebagai hari libur umum di seluruh negara dominion ini. Sang Dwiwarna berkibar dengan megah di samping bendera Pakistan Bulan-Bintang di atas gedung-gedung pemerintah dan swasta di seluruh negeri. Lautan manusia memenuhi pertemuan-pertemuan "Hari Indonesia", dan pesan-pesan *goodwill* dipertukarkan oleh kedua rakyat. Doa pun dikumandangkan di Masjid-Masjid bagi kesejahteraan republik yang baru.

  Di ibu kota Karachi, wakil Indonesia Mohamad Idham mengibarkan "Dwiwarna" di tengah tepuk tangan riuh lebih dari 100.000 orang dalam rapat umum yang juga dimeriahkan dengan sambutan Presiden Liga Muslimin, korps diplomatik, dan tokoh-tokoh penting. Sorak-sorai berkumandang lagi ketika Mohammad Idham mengucapkan terima kasih kepada Pakistan atas segala bantuan yang telah diberikannya, juga karena rakyat Pakistan telah menunjukkan bahwa "Indonesia dan Pakistan sama-sama mereka cintai".

  Fatima Jinnah, saudara perempuan pendiri Pakistan Ali Jinnah mengatakan: "Hari ini adalah puncak kebahagiaan bagi perjuangan kemerdekaan yang lama dan berat dari rakyat Indonesia, dan hari tercapainya tujuan rakyat Indonesia. Sebagai ungkapan kegembiraan rakyat Pakistan, dengan ini saya sampaikan ucapan selamat yang sehangat-hangatnya kepada rakyat dan pemerintah negeri yang besar ini, yang akan menjadi faktor kuat di dunia."

Di Lahore arak-arakan penjaja surat kabar menelusuri jalan-jalan utama sambil memekikkan slogan-slogan pro-Indonesia.

Di Peshawar dan wilayah-wilayah kesukuan, orang Pathan yang gemar berperang berkumpul menyambut hari penyerahan kedaulatan ini, sementara rapat-rapat di Bengala Timur menyambut dengan sorak-sorai lahirnya negara yang baru ini, dan berdoa bagi kesejahteraannya. (*Antara*)

* Turki telah mengakui Republik Indonesia Serikat (RIS). (*Antara*)

* Irlandia telah memutuskan untuk memberikan pengakuan penuh kepada Republik Indonesia yang baru, demikian diumumkan secara resmi di Dublin hari ini. Sementara itu Presiden Sean Okelly telah mengucapkan selamat kepada Presiden Sukarno. (*Antara*)

1949 DESEMBER 30.

* Diperoleh berita dari sumber yang mengetahui bahwa sidang pertama Kabinet RIS akan diselenggarakan pada 4 Januari mendatang.

  Program di bidang politik dalam dan luar negeri akan merupakan masalah yang akan ditangani oleh Kabinet. (*Antara*)

* Resepsi umum pertama Presiden RIS di tempat kediamannya di Jakarta dihadiri sekitar 4.000 tamu dari berbagai lapisan masyarakat. Ruangan istana dan halamannya hampir tak dapat menampung seluruh tamu yang datang untuk bertukar salam dengan Presiden. Resepsi itu berawal pada jam 19.00 dan berakhir sekitar jam 23.00. (*Antara*)

* Nama resmi ibu kota RIS adalah *Djakarta* sebagai pengganti *Batavia*, demikian pengumuman Kementerian Penerangan. Nama *Djakarta* sekarang menggantikan *Batavia* dalam semua komunikasi dan dokumen resmi. Dalam bahasa Inggris digunakan juga ejaan *Djakarta,* demikian pengumuman tersebut. (*Antara*)

* Sejak tanggung jawab penjagaan hukum dan ketertiban diambil alih oleh pasukan Republik, kriminalitas di Kabupaten Bandung telah banyak menurun, demikian sumber resmi Pasundan.

Di masa pendudukan Belanda rata-rata 4 atau 5 kasus dilaporkan tiap hari, namun selama empat hari terakhir hanya dilaporkan 5 kasus, 3 perampokan di daerah Cisarua, dan dua pencurian di Ciparai.

Keamanan di seluruh daerah ini akan menjadi fakta nyata jika TNI dan Pemerintah Pasundan dapat memecahkan masalah pasukan nonreguler, demikian sumber tersebut. (*Antara*)

* Delegasi Saudi Arabia untuk upacara penyerahan kedaulatan dengan disertai Menteri Agama Wachid Hasjim hari ini melakukan sholat di Masjid Tanah Abang, Jakarta.

Sesudah sholat, salah seorang anggota delegasi berbicara di depan jamaat dan menyatakan bahwa hubungan agama sudah lama ada antara Saudi Arabia dan Indonesia. Ia berharap di masa depan hubungan antara kedua negeri akan bertambah akrab. (*Antara*)

* Enam belas negara mengakui secara de jure Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS). (*KU137*)

* Komisaris Tinggi Belanda yang pertama di Indonesia, Dr. H.M. Hirschfeld, menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada Presiden RIS, Sukarno. (*LUxxii*)

* Merle H. Cochran, Duta Besar AS pertama untuk RIS pagi ini menyerahkan surat-surat kepercayaannya kepada Presiden Sukarno. Cochran disertai oleh Jacob D. Berm, Kuasa Usaha AS.

Peristiwa itu disaksikan oleh Mohammad Rum, Pejabat Menteri Luar Negeri RIS, dan Subardjo dari Kementerian Luar Negeri. (*Antara*)

* Tajuk rencana *Herald Tribune* memuji ditunjuknya H. Merle Cochran sebagai Duta besar Amerika untuk Indonesia. Dikatakannya bahwa penunjukan itu pantas mendapat "sambutan setinggi-tingginya". Ditambahkan, "sebagai diplomat karir dan pakar keuangan yang akrab dengan Timur Jauh, Cochran sebagai ketua Komisi PBB telah memberikan jasa tak ternilai dalam mendekatkan Belanda dan Indonesia. Ia akan mendatangkan simpati terhadap tugas cerdasnya mewakili Amerika di Jakarta

di tahap awal yang sulit bagi kehidupan Indonesia sebagai bangsa muda, dan dapat diharapkan mampu melaksanakan sepenuhnya janji Presiden untuk mendukung negeri ini". (*Antara*)

* Perancis hari ini mengakui RIS. Dalam sebuah komunike, Menteri Luar Negeri Perancis menyatakan, "Pemerintah Perancis hari ini mengakui negara baru RIS dan memutuskan untuk menjalin hubungan diplomatik dengannya." (*Antara*)

* Hari ini adalah hari kemerdekaan Indonesia, menurut dokumen yang ditandatangani di Istana Den Dam, Amsterdam, pada tanggal 27 Desember 1949.

  Tapi tanggal ini tidak pernah diperingati oleh orang Indonesia, karena bagi orang Indonesia kemerdekaan sudah mulai pada tanggal yang ditentukannya sendiri, yaitu 17 Agustus 1945. (HA180)

* Van Maarseveen, Menteri untuk Uni dan Urusan Wilayah Seberang Lautan Belanda, akan datang ke Indonesia paruh kedua bulan Januari mendatang. Ia akan melakukan peneletian umum mengenai situasi di Indonesia. (*Antara*)

1949 Desember 31.

* Selesai mengikuti upacara penyerahan kedaulatan di Istana Den Dam, Perdana Menteri Mohammad Hatta bertolak pulang ke tanah air dari lapangan terbang Schiphol. (RMU193)

* Sampai hari ini tercatat sudah 59 negara memberikan pengakuan kepada negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Hal ini melicinkan jalan bagi masuknya Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. (AT300)

* *Central Commitee* PKI (Partai Komunis Indonesia) menuntut Pemerintah RIS untuk sesegera mungkin membebaskan semua tahanan politik. Partai itu mengetahui bahwa masih banyak tahanan politik. (*Antara*)

* Bantuan Marshall dalam bentuk tekstil dan beras akan mulai datang bulan Januari mendatang, menurut Duta Besar AS H. Merle Cochran

dalam wawancara pers tadi malam. Ia katakan bahwa Indonesia mendapat sebagian bantuan itu sebagai negeri yang tergantung pada Belanda tahun 1948. Bantuan itu untuk sementara ditangguhkan, tetapi diberikan kembali bulan Desember sesudah tercapainya persetujuan antara Belanda dan Indonesia di Den Haag. Ia katakan, RIS sebagai negeri berpemerintahan sendiri memenuhi syarat untuk mendapat bantuan, tetapi telah diputuskan bahwa pembelian dan kontrak mengenai beras dan tekstil akan diteruskan.

Mengenai dipertimbangkannya pinjaman kepada Indonesia oleh Bank Impor-Ekspor Amerika, ia katakan bahwa ia berharap akan membicarakannya dengan Pemerintah RIS dalam waktu dekat. Namun Duta Besar tidak bersedia berkomentar mengenai kemungkinan bantuan militer AS untuk Indonesia. (*Antara*)

* Rajkumari Amrit Kaur, Menteri Kesehatan India yang telah mewakili Pemerintah India dalam upacara penyerahan kedaulatan kepada Indonesia hari Selasa yang lalu, hari ini kembali ke tanah airnya.

Dalam resepsi kemarin di Hotel des Indes, Jakarta, yang disponsori oleh masyarakat India, Menteri Amrit Kaur mengatakan bahwa perjuangan para pemimpin Indonesia dan India adalah sama. “Dan kini mereka telah mencapai cita-citanya,” ujarnya. Ia menghimbau adanya kerja sama yang lebih erat di masa datang antara kedua negeri. Ia pun menyarankan kepada orang India di negeri ini untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara India yang terhormat, di negeri tuan rumah yang boleh juga mereka anggap sebagai tanah air sendiri.

Di antara tokoh-tokoh Indonesia yang hadir dalam resepsi tersebut adalah Mr. Mohammad Rum, Mr. Anak Agung Gede Agung, Arnold Mononutu yang masing-masing adalah Menteri Negara, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Penerangan RIS. Adapun tamu luar negeri termasuk juga Thomas Critchley, anggota UNCI dari Australia.

Dalam kesempatan itu Amrit Kaur memperkenalkan Duta Besar India yang baru untuk Indonesia, Dr. Subbaroyan. (*Antara*)

* Duta Besar pertama India untuk Indonesia Dr.P. Subbaroyan telah menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada Presiden Sukarno kemarin

disaksikan oleh beberapa ratus orang. Sesudah upacara resmi, Duta Besar beserta rombongan melakukan pembicaraan dengan Presiden selama 45 menit, dengan dihadiri oleh Menteri Rajkumari Amrit Kaur. (*Antara*)

* Istri industrialis pesawat terbang India, Ny. Patnaik, telah menyumbangkan Rp13,000,-- untuk mengembangkan bakat musik anak buta umur 14 tahun yang ditemukannya ketika ia mengikuti suami berkeliling Sumatra tahun lalu bersama para pejabat Republik. Dalam sebuah malam musik anak-anak di Padang Panjang Ny. Patnaik terpesona oleh bakat musik anak itu dalam memainkan biola.

  Permainan biola itu diajarkan oleh Tuan Sjafei dan Dr. Rasidin, dua orang penganjur seni Indonesia yang terkemuka di Sumatra. Tuan Sjafei adalah juga pendidik terkemuka yang memiliki sekolah sendiri di Kayutanam, di mana banyak sekali anak muda dididik hidup praktis.

  Anak buta yang namanya belum diketahui itu akan dikirim atas biaya Ny. Patnaik ke salah satu sekolah musik di luar negeri, di mana ia dapat mengembangkan bakat musiknya.

  Anak itu mulai bermain biola di bawah bimbingan Tuan Sjafei dan Dr. Rasidin pada umur 9 tahun. Ia memainkan lagu-lagu populer dan karya-karya sederhana komponis Barat seperti Schubert dan Mendelsohn. (*Antara*)

* Maulid Nabi Besar Muhammad saw diperingati di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dalam suatu upacara yang dihadiri ribuan penduduk.

  Syekh Abdullah Afifuddin dari Langkat menitikberatkan uraiannya pada sejarah lahir dan perjuangan Nabi Muhammad serta suka duka yang dialaminya. Ia menganjurkan agar riwayat Nabi Muhammad direnungkan dan dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia yang kini telah merdeka, karena di dalamnya terkandung paham yang sehat, yang telah mendapat ujian berabad-abad lamanya. Ditegaskannya, pekerjaan yang dihadapi bangsa Indonesia sungguh berat. Dibutuhkan usaha keras untuk melaksanakannya.

  Menyusul dua pembicara lain, Tgk.M. Nur el Ibrahimy yang berbicara tentang kewajiban umat Islam, dan Tgk. Abdulwahab yang mengharapkan agar segenap lapisan masyarakat menyokong usaha Pemerintah dalam melaksanakan segala sesuatu yang bersangkutan dengan keagamaan.

Untuk upacara ini, pasar malam yang sedang berlangsung di Kutaraja sengaja dihentikan. Esok harinya, Panitia menjamu orang miskin dan yatim piatu. (TS332-333)

* Perusahaan film Amerika Metro-Goldwyn-Meyer (MGM) telah menandatangani kontrak dengan PERFEBI (Perusahaan Distributor Film Indonesia) untuk pemutaran film-film Amerika di dalam wilayah negara Republik selama setahun.

  Kontrak itu akan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1950. Dengan kontrak itu PERFEBI akan memutar 48 film per tahun, termasuk film-film yang diproduksi tahun 1949 dan 1950. (*Antara*)

***

(Akhir Desember 1949)

Lampiran
Kronik Revolusi Indonesia 1949

Lampiran 1.

KETERANGAN PEMERINTAH KEPADA BADAN PEKERJA KNI PUSAT
(19 Juli 1949)

Saudara Ketua,

Politik pemerintah sampai sekarang ini, dalam mencapai penyelenggaraan kemerdekaan seluruh Indonesia, berdasar kepada dua sendi:

1. politik luar negeri yang berpedoman dengan politik damai untuk mencapai bagi Republik Indonesia kedudukan yang kuat dalam politik internasional;
2. kekuatan sendiri yang berdasarkan atas tenaga rakyat dan kesanggupan tentara kita untuk membela negara apabila diserang oleh musuh.

Politik negara kuat apabila kedua dasar itu sama dipakai. Sebaliknya, politik luar negeri lemah apabila tidak disokong oleh Persatuan rakyat yang kuat di belakang pemerintah. Pertahanan ke dalam lemah, apabila tidak disokong oleh politik luar negeri yang didasarkan kepada realitas internasional.

Sejarah yang akhir ini menyatakan sekali lagi kebenaran politik ini. Apa pun juga yang terjadi, keadaan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka tidak dapat lagi dilenyapkan atau dibatalkan. Aksi militer Belanda yang kedua ini menegaskan sekali lagi, bahwa dunia internasional mengakui adanya Republik Indonesia sebagai negara dan sebagai suatu faktor yang terpenting untuk mencapai perdamaian di Asia Tenggara ini. Kedudukan ini kita capai berangsur-angsur dalam masa tiga tahun karena kita sanggup melakukan politik luar negeri kita dengan bijaksana.

Tatkala Belanda pada tanggal 19 Desember 1948 melakukan aksi militer yang kedua dengan menurunkan tentara payungnya di Maguwo dan membom ibu kota dan sekitarnya selama tujuh jam lebih, pemerintah terkepung di Yogyakarta. Belanda pada waktu itu beruntung memilih saat yang baik untuk melakukan serangannya terhadap Yogyakarta, karena pada hari itu tentara kita berada di luar kota sedang mengadakan latihan perang, mengadakan manoeuvre. Itulah sebabnya maka dengan hampir tidak mendapat perlawanan tentara Belanda dapat menyerbu ke dalam kota.

Kalau sekiranya kita memusatkan perjuangan kita kepada perang gerilya saja, maka presiden dan wakil presiden sebenarnya harus menyingkirkan diri ke luar dengan menghadapi risiko bertemu dengan tentara payung Belanda. Tetapi setelah ditinjau dengan saksama, maka anggota-anggota kabinet dan penasihat pemerintah yang ada di Yogyakarta memutuskan bahwa pemerintah tidak dapat menanggung risiko sebesar itu terhadap dirinya kepala negara dan memutuskan supaya kedua dasar politik tetap dijalankan, yaitu berjuang secara gerilya karena Belanda telah menyerang, dan seren-

tak dengan itu menjalankan dengan aktif politik internasionalnya dengan memajukan soal Indonesia kepada Dewan Keamanan.

Untuk melakukan pertahanan mati-matian, maka dikeluarkan dua buah order yang ditandatangani oleh presiden dan wakil presiden terhadap rakyat dan tentara dengan menganjurkan supaya berjuang terus membela kemerdekaan negara dengan tiada memusingkan nasib orang-orang yang menjadi kepala negara atau yang duduk dalam pemerintahan. Dalam order itu pemerintah menyatakan sebagai keyakinannya, bahwa kemerdekaan kita yang telah kita proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan telah meresap pada jiwa kita mustahil akan dapat ditindas dengan kekerasan.

Untuk menjalankan politik internasional guna memperkuat kedudukan Republik, maka perlu pemerintah dapat berhubungan selalu dengn KTN dan karena itu diputuskan tetap tinggal di ibu kota dengan kesekuensinya ditawan oleh Belanda. Menurut kepercayaan pemerintah, Belanda dengan menawan kami tak akan dapat memutuskan perhubungan kami dengan KTN. Perhitungan ini ternyata tak salah.

Sejak aksi militer Belanda pertama teranglah sudah bahwa Dewan Keamanan menghendaki supaya soal Indonesia diselesaikan dengan jalan damai, dengan jalan berunding. Siapa yang menentang pendirian Dewan Keamanan itu pasti akan lemah kedudukannya dalam dunia internasional. Tekanan internasional yang diderita oleh Belanda berbulan-bulan lamanya sejak aksi militernya yang kedua itu, sehingga ia terpaksa menawarkan penyerahan yang dipercepat daripada kedaulatan kepada Indonesia dengan tidak bersyarat, menyatakan kebenaran pendapat pemerintah.

Jika didasarkan kepada perasaan saja dan kepentingan diri sendiri, memang tak enak rasanya menjadi orang tawanan. Tetapi kalau pada suatu ketika berhubung dengan keadaan korban jiwa itu perlu untuk lekasnya tercapai penyelesaian soal tanah air, korban itu harus diterima. Berlainan dengan kewajiban orang militer yang harus berperang apabila negara diserang, pemerintah sipil harus melakukan siasat yang memperkuat kedudukan Republik di dunia internasional. Apa pun juga yang akan terjadi dengan diri orang-orang yang duduk dalam pemerintah, presise negara harus dikembalikan.

Untuk menjaga kontinuitas daripada pemerintah negara, maka pada pagi tanggal 19 Desember itu juga pucuk pimpinan pemerintah yang terkepung di Yogyakarta menguasakan dengan kawat kepada Menteri Kemakmuran Mr. Sjafruddin Prawiranegara, yang berada di Bukittinggi, untuk membentuk Pemerintah Republik Darurat di Sumatra. Mulai saat itu kekuasaan pemerintah pindah kepada PDRI di Sumatra.

Berdasar kepada kedua sendi perjuangan kita tadi, yaitu perjuangan politik internasional dan melakukan perang gerilya apabila diserang, maka Presiden Sukarno dalam tawanan menolak permintaan Jenderal Meyer untuk memerintahkan kepada TNI meletakkan senjata guna menghindarkan penumpahan darah lebih lanjut.

Demikianlah jadinya. Tentara berperang secara gerilya untuk membela kehormat-

an negara yang dilanggar, dan jalan politik internasional ditempuh untuk mencapai penyelesaian soal yang memuaskan bagi kita. Dari semulanya kita berpendirian, bahwa persengketaan senjata hanya bisa dihentikan, apabila Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan berkuasa dan melakukan pemerintahan dengan merdeka dari ibu kota Yogyakarta. Setelah kami diasingkan ke Pulau Bangka, politik ini sering-sering terkenal sebagai politik "Kembali ke Yogya". Kembali ke Yogya bagi kita adalah simbol pengakuan atas Republik Indonesia sebagai negara dan sebagai faktor yang terpenting untuk menyelesaikan soal Indonesia. Dengan tidak adanya Republik, soal Indonesia tidak akan selesai. Selanjutnya pemulihan Pemerintah Republik ke Yogya kita pandang sebagai langkah pertama untuk mengembalikan daerah Republik menurut *status quo* Renville. Ini adalah satu *dasar yang riil* untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia dengan pemindahan kedaulatan yang tidak terbatas dari tangan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Pengakuan *status quo* Renville itu adalah dasar untuk permulaan menyusun Negara Indonesia Serikat dalam bagian-bagiannya sementara. Seperti diketahui daerah Indonesia di luar Republik menurut *status quo* Renville sudah tersusun dalam beberapa negara dan daerah, yang sekarang tergabung dalam BFO. *Antara* BFO dengan Republik telah ada perhubungan yang baik dan permulaan kerja sama untuk melakukan tindakan yang terakhir dalam mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu tuntutan kita supaya Republik dikembalikan dengan daerahnya menurut *status quo* Renville adalah suatu tuntutan yang riil, sesuai dengan keadaan di Indonesia sebelum tanggal 19 Desember 1948.

Seperti diketahui Republik Indonesia tetap berpegang kepada Persetujuan Linggajati bahwa Negara Indonesia Serikat yang akan dibentuk terdiri daripada 3 Negara Bagian, yaitu Republik, Borneo dan Indonesia Timur. Tetapi Republik menjunjung tinggi dasar demokrasi apabila kelak Konstituante yang dipilih secara demokrasi oleh seluruh rakyat Indonesia memutuskan pembagian yang lain daripada yang ditentukan dalam Persetujuan Linggajati, Republik akan menghormati putusan itu. Kita tak pernah buta memandang kepada daerah Republik saja atau kepada Jawa dan Sumatra saja, melainkan cita-cita perjuangan kita ialah kemerdekaan Indonesia seluruhnya. Republik adalah simbol kemerdekaan bangsa, yang kita pergunakan sebagai modal dalam perjuangan kita untuk mencapai Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Bagi kita yang terpenting ialah bahwa susunan Indonesia dalam beberapa negara bagian kelak adalah soal antara kita sama kita, tak boleh dicampuri oleh orang luar, oleh Belanda. Inilah tanda suatu negara yang berdaulat! Republik Indonesia Serikat tidak akan berdaulat apabila susunannya dipaksakan dari luar. Menentukan sendiri susunan negara, dengan berdasar kepada kemauan rakyat yang dinyatakan secara demokrasi adalah suatu hak dasar bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Itulah makanya kita memegang keras pokok ini.

Saudara Ketua! Oleh karena Republik dengan jujur menjalankan politik damai dan berunding untuk menyelesaikan soal Indonesia dan bersedia berperang hanya untuk membela diri apabila diserang, maka Belanda dengan aksi militernya yang kedua disalahkan oleh Dewan Keamanan. Simpati dunia internasional ada pada pihak kita. Dalam putusan Dewan Keamanan tanggal 24 Desember 1948, kepada kedua belah partai diperintahkan menghentikan permusuhan dan kepada Pemerintah Belanda diminta supaya dengan segera melepaskan Presiden Sukarno dan tawanan politik lainnya yang ditangkap dan ditahan sejak 18 Desember 1948.

Di sini tidak pada tempatnya untuk menyebutkan satu persatu tanda simpati dunia internasional kepada Republik. Kita semuanya sama mengetahuinya. Cukuplah kalau saya peringatkan saja dua resolusi yang sama kita mengetahui, yaitu resolusi Konferensi Asia di New Delhi pada tanggal 23 Januari 1949 dan resolusi Dewan Keamanan pada tanggal 28 Januari 1949. Dalam kedua resolusi itu dituntut supaya Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan berkuasa di ibu kota Yogyakarta, sedangkan daerah Republik Indonesia diakui menurut *status quo* Renville. Dengan putusan Dewan Keamanan itu maka terdapatlah suatu pengakuan internasional tentang Republik dengan daerahnya yang tertentu, yang tidak dapat lagi dihapuskan oleh kekuasaan apa pun juga.

Perubahan Komisi Jasa Baik menjadi UNCI dengan boleh mengambil putusan dengan suara terbanyak menyatakan bahwa Dewan Keamanan memandang soal Indonesia sebagai soal internasional dan ikut campur tangan dalam penyelesaiannya dengan kedudukan yang lebih daripada memberikan jasa baik saja seperti dahulu. Ini adalah suatu kemajuan ke jurusan yang kita kehendaki dari semulanya, yang tercapai karena aksi militer Belanda yang kedua. Kita tahu bahwa Pemerintah Belanda menolak resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 1949, *tetapi resolusi itu tidak dicabut dan tetap berlaku*. Oleh karena itu kita senantiasa dapat berpegang kepada resolusi itu, apabila permusyawaratan dengan Belanda kandas pada suatu waktu.

Sesuai dengan sifatnya sebagai badan yang mengandung banyak aliran, Dewan Keamanan mencari jalan untuk mengadakan penyelesaian yang seboleh-bolehnya berdasar kepada kompromis. Jalan kompromis itu ialah *ruling* tanggal 23 Maret 1949, yang dipandang sebagai langkah pertama untuk menyelenggarakan Resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 1949. UNCI diserahi dengan kewajiban untuk membawa kedua belah pihak, yaitu Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia, berunding untuk mencapai persetujuan dalam tiga hal:

1. Pengembalian Pemerintah Republik ke Yogyakarta.
2. Mengadakan order peletakan senjata.
3. Mengadakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag untuk merundingkan penyerahan yang tak bersyarat daripada kedaulatan yang riil dan penuh kepada Indonesia.

Berdasar kepada putusan itu, maka UNCI mengundang kedua pihak berunding di Jakarta, yang berhasil dengan Persetujuan Roem-Van Royen pada tanggal 7 Mei 1949. Di sini saya tidak akan menguraikan dengan panjang lebar isi persetujuan itu, karena telah cukup diketahui dan Badan Pekerja sendiri cukup mendapat kesempatan untuk mempelajarinya dengan saksama. Yang perlu saya terangkan di sini ialah dasar persetujuan itu dan jaminan yang diberikan oleh presiden dan wakil presiden, bahwa kemungkinan besar sekali yang persetujuan itu akan diterima oleh Pemerintah Republik setelah kembali ke Yogyakarta.

Terlebih dahulu perlu saya jawab di sini berbagai kritik yang mengatakan mengapa presiden dan wakil presiden di Bangka terus saja menjalankan politik negara, sedangkan kekuasaan pemerintah telah diserahkan kepada PDRI? Apakah hal ini tidak melemahkan kedudukan PDRI?

Sebagai ternyata daripada ucapan-ucapan kami, kami selalu menegaskan bahwa kekuasaan pemerintah berada pada PDRI dan apa yang kami perbuat di Bangka tak lain daripada sekadar membantu PDRI dalam hubungannya ke luar.

Kita tak dapat mencegah bahwa mata politik internasional memandang ke Bangka tempat pengasingan presiden dan wakil presiden. Dan kami akan bodoh sekali kalau kami tidak akan mempergunakan kenyataan itu untuk memperkuat kedudukan Republik dalam politik internasional. Tak ada keuntungan yang diperoleh dengan mengatakan: Kami tak lagi berkuasa, kekuasaan pemerintah ada pada PDRI, sedangkan kita tahu PDRI sukar dicapai oleh dunia luaran. Satu bukti yang nyata pula ialah bahwa Dewan Keamanan tetap berpendapat bahwa Pemerintah Republik Indonesia yang resmi ialah Kabinet Hatta, yang kesempatannya melakukan pemerintahan hanya terganggu oleh tindakan Belanda. Karena pendapat Dewan Keamanan itu maka wakil kita di Lake Success, *Palar*, mengambil modus, bahwa Pemerintah Republik yang resmi ialah Kabinet Hatta, sedangkan PDRI melakukan pekerjaan sehari-hari selama pemerintah itu terhalang melakukan kekuasaannya karena tindakan Belanda.

Saudara Ketua! Pokok perselisihan paham dengan Belanda ialah, bahwa delegasi Belanda hanya setuju pemerintah Republik dipulangkan ke Yogya apabila Pemerintah Republik berjanji akan menjalankan perintah *cease fire* dan ikut serta pada Konferensi Meja Bundar. Pada pendapat kita, keputusan tentang *cease fire order* dan Konferensi Meja Bundar hanya dapat diberikan oleh Pemerintah Republik yang lengkap setelah memegang kekuasaan negara kembali di Yogyakarta. Akhirnya didapat kompromis yang memberi jaminan kepada Belanda tentang *cease fire order* dan Konferensi Meja Bundar, tetapi jaminan itu bukanlah suatu perjanjian yang telah mengikat pemerintah seluruhnya. Jaminan itu ialah garansi *persoonlijk* dari presiden dan wakil presiden.

Bagi kita pemulihan Pemerintah Republik ke Yogyakarta dengan bulat berkuasa di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta adalah suatu soal yang maha penting, suatu kemenangan moril bagi Republik, yang bisa dibalas dengan jaminan tersebut. Kembalinya

Pemerintah Republik ke Yogya berarti suatu pengakuan bahwa Republik tetap berdiri dengan alat kekuasaannya yang sepenuhnya. Kalau benar bahwa Republik adalah simbol daripada kemerdekaan bangsa Indonesia, maka soal pemulihan Pemerintah Republik ke Yogyakarta dengan merdeka melakukan kekuasaannya adalah soal yang nomor satu sekali. Kita tak dapat menyetujui pendapat yang berlainan, yang mengatakan bahwa soal pemulihan Pemerintah Republik ke Yogya adalah soal sekunder. Bagi kita pemulihan itu bukanlah soal yang sekunder, tapi suatu soal yang vital. Amat salah paham mereka yang mengatakan seolah-olah kita hanya memikirkan "Republik Yogya" saja dan lupa bahwa daerah Republik berlipat ganda lebih luas daripada itu. Kita tidak kenal akan Republik Yogya, kita hanya kenal Republik Indonesia. Bagi kita "Yogya" adalah simbol kemerdekaan Republik, adalah pusat pemerintahan Republik seluruhnya. Kembalinya Yogya ke tangan kita berarti pula hidupnya Republik dalam kekuasaan penuh sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Bahwa daerah Republik seluruhnya tidak diabaikan ternyata dari jaminan yang kita kehendaki dari pihak Belanda, supaya Belanda tidak akan mendirikan negara baru di atas daerah kita yang didudukinya dan tidak pula akan memperluas daerah negara yang sudah ada ke atas daerah kita yang didudukinya sementara. Pun kita minta dijamin, bahwa pegawai sipil Republik, polisinya dan pegawai lainnya yang masih terus bekerja pada tempat-tempat yang tak ada pegawai administrasi Belanda, akan tetap dalam jabatan mereka. Hal ini adalah pengakuan daripada keadaan yang sebenarnya bahwa tentara Belanda hanya menduduki beberapa pusat dan tidak menduduki seluruh daerah di mana ada pemusatan tentara atau pasukannya. Daerah itu tetap daerah Republik.

Jaminan itu diberikan oleh Belanda dalam keterangan Van Royen tanggal 7 Mei 1949, pada pasal 4, 5 dan 7.

Sekarang orang mungkin bertanya, apakah jaminan yang diberikan oleh presiden dan wakil presiden itu tidak terlalu banyak menanggung risiko dan apakah ini tidak melanggar dasar demokrasi? Tia-tiap tindakan politik ada risikonya, karena adanya risiko itu maka dalam negeri demokrasi pemerintah diminta bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Marilah kita lihat hingga mana risiko yang kami pikul waktu memberikan jaminan tentang *cease fire order* dan Konferensi Meja Bundar. Di sini boleh kami kemukakan bahwa risiko itu telah diperhitungkan dengan teliti. Kami memperhitungkan apakah kiranya sebagian besar daripada anggota kabinet, Badan Pekerja, dan partai yang besar-besar dapat menyetujui apa yang kami jamin itu. Menurut dugaan kami dapat dan barulah diberikan jaminan itu.

Pertama, *cease fire order* adalah tuntutan daripada Dewan Keamanan dalam resolusinya tanggal 28 Januari 1949, sehingga sukar bagi pemerintah kita yang bertanggungjawab untuk menolaknya. Yang sulit ialah cara menyelenggarakannya dan soal

itulah yang harus dirundingkan matang-matang. Sekalipun Resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari yang lalu tidak begitu memuaskan kepada kita, kita telah sudi menerimanya dan pelaksanaannya tentu harus kita terima pula.

Konferensi Meja Bundar menurut dugaan kami waktu itu dapat diterima oleh pemerintah dan Badan Pekerja dan sebagian besar daripada rakyat kita, oleh karena tujuan daripada Konferensi Meja Bundar itu ialah penyerahan dengan tidak bersyarat daripada kedaulatan yang riil dan penuh kepada Indonesia. Sebab itu kami sanggup memberi jaminan, bahwa Pemerintah Republik akan menerimanya.

Saudara Ketua! Di sini kami tidak akan memberikan uraian yang panjang lebar tentang apa yang disebut "*meeting of minds*" dari hal pelaksanaan *cease fire order*, karena teksnya yang lengkap dapat dibaca dan dipelajari sendiri oleh anggota-anggota Badan Pekerja.

Banyak sekali kesangsian yang terdapat pada berbagai pihak tentang kemungkinan mengadakan *cease fire order* itu. Terpengaruh oleh suasana psikologi dan hal-hal yang bersejarah timbul pada beberapa golongan kekhawatiran kalau-kalau pasukan-pasukan kita harus pula ditarik kembali dari kantong-kantong yang didudukinya sekarang, yang sudah tentu merugikan kepada kita.

Berhubung dengan itu baiklah kami tegaskan di sini bahwa sekarang tak ada soal *pockets* yang harus dikosongkan, tak ada soal garis demarkasi yang mengharuskan tentara masing-masing mundur ke belakangnya.

Dasar yang disetujui tentang *cease fire* ialah, bahwa tentara kedua belah pihak duduk pada tempatnya masing-masing, bahwa peraturan detail yang akan diadakan tak boleh menguntungkan tentara yang satu dengan merugikan yang lain.

Cease fire order harus diadakan karena ini adalah putusan Dewan Keamanan, yang menuntut supaya permusuhan jadi terhenti sehingga suasana baik untuk perundingan Meja Bundar bisa timbul.

Yang harus kita jaga ialah supaya peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan *cease fire order* itu tidak merugikan kita. Dibandingkan dengan Persetujuan Renville maka dasar sekarang ini adalah suatu kemajuan yang menguntungkan kita. Seperti kukatakan tadi, tentara kita tetap di tempat ia berada dan tidak akan diundurkan ke garis demarkasi yang memang tidak ada lagi. Juga jalannya sejarah mengubah pandangan Belanda terhadap kedudukan TNI. Orang masih ingat bahwa segala perundingan di masa yang lampau selalu kandas karena pihak Belanda selalu menuntut pembubaran TNI. Tuntutan itu tidak ada lagi sekarang! Malahan cita-cita yang dikemukakan sekarang ialah, supaya pasukan TNI dan pasukan Belanda yang bersimpang siur letaknya itu diberi tanggungjawabnya masing-masing untuk menjaga keamanan rakyat. Dari hidup dalam permusuhan senantiasa dicoba mengadakan kerja sama dalam masa perundingan pada beberapa bulan di muka untuk mencapai penyerahan kedaulatan kepada bangsa kita. Bukan kerja bersama seperti yang dimaksud

dengan "*gendarmeri bersama*" dulu, di mana TNI harus tunduk ke bawah pimpinan tentara Belanda, melainkan kerja sama antara dua pasukan yang berlainan, yang berdiri di bawah komandonya masing-masing. Maksudnya yang dalam ialah kerja sama untuk menghindarkan bentrokan dan permusuhan.

Memang tak mudah mengubah suasana dengan sekaligus, karena psikologi perang dan permusuhan dalam masa yang lalu tidak dapat diatasi dengan begitu saja. Tetapi dengan memperbesar *goodwill* pada kedua belah pihak, permusuhan dapat dikurangi.

Cita-cita yang dikemukakan itu mengandung pengakuan, bahwa TNI adalah suatu realitas dan suatu faktor yang tak dapat ditiadakan.

Mungkin, aliran sejarah yang memastikan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia—dengan *tiada* melalui masa peralihan dengan soal pemerintah interimnya yang begitu banyak menimbulkan kesulitan, mengubah pandangan itu terhadap kedudukan TNI, alat pertahanan Negara Republik Indonesia.

Kalau kita tinjau semuanya itu, dengan pandangan sosiologi dan histori, maka ternyata tidak sia-sia kita berjuang. Banyak korban yang telah diberikan, tetapi tak ada korban yang terbuang percuma. Sekarang kita sudah lebih dekat kepada yang dituju, kepada penyelenggaraan Indonesia merdeka yang berdaulat, penyelenggaraan inilah yang akan dirundingkan nanti pada Konferensi Meja Bundar.

Tidak benar, kalau setengah orang berkata bahwa keadaan kita lebih jelek daripada tanggal 17 Agustus 1945, dan terus-menerus merosot sejak Linggajati dan Renville. Pandangan semacam itu hanya didasarkan kepada luas daerah yang tampak atau diciptakan sebagai daerah Republik. Tetapi kedudukan kita tidak bergantung kepada luas tanah yang langsung kita kuasai. Tatkala kita memproklamirkan kemerdekaan bangsa kita, kita belumlah lagi memperoleh pengakuan internasional, pun belum semua daerah kita itu langsung kita kuasai. Kedudukan Republik di waktu itu bergantung semata-mata kepada adanya daerah yang dikuasainya. Kalau daerah itu lenyap, maka lenyaplah pula Republik 17 Agustus 1945. Sekarang kedudukan Republik tidak lagi semata-mata bergantung kepada luasnya daerah yang langsung kita kuasai. Andaikata seluruh Republik habis diduduki oleh tentara Belanda, Republik tetap diakui oleh Dewan Keamanan, oleh dunia internasional. Kedudukan kita *realiter* adalah demikian rupa seolah-olah kita sudah memperoleh pengakuan *de jure*.

Demikianlah adanya! Jauh daripada kemunduran terus-menerus, dasar kedudukan Republik sekarang jauh lebih kuat daripada saat manapun juga di masa yang lampau. Inilah hasil perjuangan yang kita capai dengan politik dua-dasar seperti yang kami sebutkan pada permulaan keterangan ini.

Penderitaan rakyat bertambah banyak, memang. Kesengsaraan rakyat bertambah besar, memang. Penghidupan rakyat bertambah sukar, memang. Tetapi semuanya itu adalah akibat daripada perjuangan rakyat kita yang terus-menerus sejak empat tahun yang akhir ini.

Republik 17 Agustus 1945 adalah baru cita-cita. Kekuasaan kita atas seluruh daerah bangsa Indonesia adalah baru di atas kertas belumlah satu kenyataan yang riil. Karena hal itu bukan suatu realitas yang diakui dunia internasional, maka pada persetujuan Linggajati daerah cita-cita itu telah terbatas hingga Jawa/Madura dan Sumatra. Daerah kita sekarang, sekalipun lebih kecil [dari] yang diciptakan pada tanggal 17 Agusrtus 1945, adalah daerah yang diakui sebagai daerah Republik Indonesia dan tak dapat dipisahkan daripada kita. Ini ternyata daripada Resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 1949.

Republik sebelum 19 Desember 1948 adalah surtu kenyataan yang tak dapat dihancurkan, adalah simbol kemerdekaan bangsa dan adalah modal untuk menyelenggarakan cita-cita 17 Agustus 1945, sekalipun dalam bentukan negara yang berlainan daripada yang diciptakan dulu. Memang, bentuk negara *boleh berubah*, tetapi tetap dan tak berubah cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi *suatu bangsa yang bersatu-padu, tak kan terpisah-pisah dalam sengsara maupun gembira*.

Untuk menyelenggarakan cita-cita bangsa itulah kita akan meningkat ke Konferensi Meja Bundar, di mana akan diletakkan batu penghabisan untuk menyudahi susunan Indonesia merdeka yang berdaulat.

Marilah kita didik dalam jiwa kita *rasa percaya*, bahwa Konferensi Meja Bundar itu akan berhasil, sehingga sebelum tahun 1949 berakhir Republik Indonesia Serikat telah bangun, diperlengkapi dengan kedaulatan yang penuh dan nyata.

Dari mulai saat sekarang titik berat daripada politik yang kita jalankan diletakkan pada politik perdamaian, yang dilakukan di bawah penilikan Dewan Keamanan. Kita akan berunding dan perundingan menghendaki suasana damai, supaya saling mengerti dan saling percaya dapat dicapai. Keduanya ini adalah faktor yang penting untuk mencapai persetujuan.

Likuidasi daripada perhubungan kolonial adalah terutama soal psikologi. Sebab itu, kepada rakyat Indonesia maupun rakyat Belanda kami anjurkan: marilah kita coba bekerja dalam suasana saling percaya untuk mencapai dalam tempo paling lama 4 bulan penyelenggaraan daripada apa yang diciptakan oleh rakyat Indonesia dan apa yang dijanjikan oleh Pemerintah Belanda di muka forum resmi internasional: *penyerahan kedaulatan yang penuh dan nyata dengan tiada bersyarat kepada bangsa Indonesia*.

Saudara Ketua! Kepada Badan Pekerja pemerintah berharap membantu pemerintah, pada saat penting yang datang ini, untuk memperkuat persatuan rakyat. Lebih daripada di masa yang silam, pada saat penting yang datang ini kita harus mengujudkan semboyan kita yang lama: bersatu kita teguh, berpecah kita jatuh!

***

Lampiran 2.

PIDATO PEMBUKAAN KONFERENSI INTER-INDONESIA DI YOGYAKARTA (20 Juli 1949)

Hadirin yang terhormat,

Saudara-saudara sebanga dan setanah air!

Sebagai tuan rumah saya gembira sekali menerima kedatangan Saudara-saudara utusan BFO pada Konferensi Inter-Indonesia ini.

Seperti diketahui, niat mengadakan konferensi ini berdasar kepada keinginan bahwa sebelumnya Konferensi Meja Bundar diadakan, antara kita sama kita, yaitu Republik Indonesia dan BFO, didapat persetujuan dalam hal-hal yang menjadi pokok dalam hal penyerahan kedaulatan yang penuh dan riil dengan tiada bersyarat kepada bangsa Indonesia. Timbul pula soal apakah delegasi yang akan berangkat ke Konferensi Meja Bundar itu merupakan suatu delegasi gabungan saja ataukah terpisah sebagai delegasi Republik dan delegasi BFO. Setelah ditinjau daripada sudut pembicaraan yang dilakukan di Bangka atau pun di Jakarta oleh kedua belah pihak, maka ternyata bahwa soal satu atau dua delegasi itu tidak begitu penting. Yang penting ialah bahwa dalam pokok-pokok soal yang akan dibicarakan pada Konferensi Meja Bundar kita mencapai persamaan pendapat atau persetujuan pikiran.

Jika kita tinjau Konferensi Inter-Indonesia ini dari sudutnya waktu, maka nyatalah bahwa konferensi yang hanya beberapa hari lamanya tidak akan dapat membicarakan sepenuh-penuhnya dan sedalam-dalamnya segala soal yang akan dipecahkan pada Konferensi Meja Bundar. Kalau ini sekiranya yang diujud, maka Konferensi Inter-Indonesia ini akan memakan waktu sekurang-kurangnya antara satu dan dua bulan. Sebab tidak masuk akal, bahwa segala masalah yang akan dipecahkan pada Konferensi Meja Bundar yang waktunya telah dirancangkan kira-kira 6 sampai 8 minggu, akan dapat kita persoalkan di sini dalam waktu yang kurang satu minggu. Oleh karena itu nyatalah sudah, bahwa pada konferensi ini kedua belah pihak, delegasi BFO dan delegasi Republik, di luar dan di dalam sidang, dapat bertukar pikiran tentang soal-soal yang akan menjadi acara pada Konferensi Meja Bundar itu. Apakah pertukaran pikiran itu akan mencapai di sini suatu kebulatan pendapat, hal itu menurut pendapat saya tidak begitu penting. Karena, pertemuan kedua delegasi tidak akan habis pada Konferensi Inter-Indonesia ini saja, tetapi selama Konferensi Meja Bundar berjalan pertemuan dan permusyawaratan kedua delegasi dapat diteruskan. Dengan tinjauan ini maka menurut pendapat saya Konferensi Inter-Indonesia yang bermula hari ini, pada hakikatnya terus berlangsung selama Konferensi Meja Bundar, dan belum tentu

berakhir setelahnya perundingan Konferensi Meja Bundar selesai, juga apabila Konferensi Meja Bundar telah mencapai suatu hasil, sesudah itu akan ada pertemuan dan kerja bersama yang erat antara kedua delegasi untuk meninjau cara bagaimana melaksanakan hasil-hasil Konferensi Meja Bundar itu.

Sudah tentu kita akan bergirang hati dan gembira sekali, apabila pertukaran pikiran yang kita adakan di sini dapat membawa kita kepada persesuaian pikiran dan persatuan pendapat tentang hal-hal yang menjadi pokok.

Sesudah Konferensi Inter-Indonesia yang resmi ini, kita akan meneruskan mencari persesuaian pikiran yang akan dibawa ke dalam Konferensi Meja Bundar. Yang paling penting ialah kemauan kita untuk *kerja bersama*, untuk memperoleh persamaan pendapat tentang *cara kita melaksanakan penyerahan kedaulatan* yang tidak bersyarat kepada bangsa kita. Selain daripada menerima hak dalam arti memperoleh Indonesia merdeka, kita juga akan menghadapi soal-soal menerima kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat daripada penerimaan kedaulatan itu. Soal ini tidak mudah dan banyak seluk-beluknya, sehingga tak habis ditinjau dalam beberapa hari.

Saudara-saudara, bagi saya bukanlah tercapainya persesuaian dalam segala hal yang terpenting pada Konferensi Inter-Indonesia ini melainkan Konferensi Inter-Indonesia ini *penting* karena ia adalah satu saat yang bersejarah dalam hidup kita. Konferensi Inter-Indonesia ini adalah satu simbol daripada *persatuan kita kembali*, simbol daripada *kemauan* kita untuk melaksanakan cita-cita rakyat kita dalam perjuangan yang berpuluh-puluh tahun, yaitu melaksanakan Indonesia bersatu dan tak terpisah-pisah. Di sini terletak arti yang sebesar-besarnya daripada Konferensi Inter-Indonesia. Kita yang menjadi penyelenggaranya di sini barangkali belum dapat merasakan sedalam-dalamnya akan arti pertemuan kita di sini, tetapi ahli sejarah di kemudian hari akan lebih dalam meninjau makna dan arti kejadian ini dalam sejarah perjuangan rakyat Indonesia.

Teringat bagiku beberapa saat di masa yang lampau! Ada masanya dalam sejarah kita, yang bangsa kita menduduki tempat yang agung, disegani oleh lain bangsa. Terbayang sepintas lalu di mukaku gambaran Kerajaan Sriwijaya yang kekuasaannya meliputi seluruh tanah air kita. Ditinjau dengan ukuran masanya dan pengertian masanya, boleh dikatakan Sriwijaya menggenggam Indonesia dalam persatuan. Kita tahu Sriwijaya lenyap ke dalam sejarah, oleh karena persatuan yang terpadu pada mulanya retak di kemudian hari.

Ada lagi masanya, yang Indonesia bersatu kembali dalam genggaman Kerajaan Majapahit, menjadi suatu negara besar yang harum namanya ke seluruh pojok dunia. Tetapi juga Kerajaan Majapahit gugur dan tenggelam ke lautan sejarah yang berlalu karena percekcokan dan perpecahan di dalamnya. Seperti diketahui Majapahit gugur lama sebelum orang Barat datang menjajah ke sini.

Satu kali lagi kita dipadu menjadi satu dalam suatu lingkungan administrasi yang

kokoh sentralisasinya, oleh pemerintah kolonial Belanda. Belanda menyatukan kita untuk keperluan kekuasaannya. Tetapi di bawah kekuasaan penjajahan itulah hidup kembali cita-cita yang dasarnya sudah lama: Indonesia bersatu tidak terpecah-pecah di bawah pemerintah bangsa sendiri. Keluarlah semboyan dari pemuda kita yang dimajukan ke dunia dengan segala upacara, bahwa:

Kita hanya berbangsa satu, ialah bangsa Indonesia;
Kita hanya bertanah air satu, ialah tanah air Indonesia;
Kita hanya mempunyai bahasa persatuan yang satu, ialah bahasa Indonesia.

Sejarah Indonesia dalam abad ke-20 ini ialah sejarah perjuangan bangsa kita untuk mencapai Indonesia merdeka, bersatu dan tidak berpisah-pisah. Ada masanya pula, yang bangsa kita seolah-olah dipecah-pecah, yaitu di bawah kekuasaan administrasi militer Jepang, di mana Indonesia dibagi-bagi menurut keperluan strategi militer mereka. Jawa terpisah dari Sumatra, Kalimantan hidup terpencil, Sulawesi dan lain-lainnya hidup sendiri terlepas daripada perhubungan dengan pulau-pulau yang lain. Pada masa itulah sangat meresap dalam jiwa kita perasaan persatuan, hidup dalam hati kita keinginan untuk bersatu kembali. Memang benar apa yang dikatakan oleh seorang ahli filsafat, bahwa dalam waktu kehilangan kita insaf akan nilaian yang sebenarnya daripada harta kita. Pada waktu pendudukan Jepang itu kita insaf benar akan kepentingan persatuan kita sebagai bangsa.

Menurut keyakinan kami, keinsafan itu tidak hanya lahir sebagai buah daripada pergerakan kebangsaan kita, yang menanam dalam jiwa rakyat kita cita-cita Indonesia satu dan tidak terpecah-pecah, melainkan adalah juga pengaruh daripada susunan tanah air kita yang melingkung sebagai rangkaian pulau-pulau pada khatulistiwa, dipisah oleh lautan besar daripada negeri dan daratan sekitarnya, sedangkan ditinjau daripada perhubungan internasional letaknya pun di tengah-tengah. Ciptaan alam menentukan sifat nusantara kita sebagai suatu ikatan kesatuan. Karena itulah maka setiap kali apabila kita hidup dalam perpisahan, cita-cita kita menuju kembali kepada persatuan. Betapa juga kita menyusun bentuk negara kita ke dalam dasar desentralisasi apa pun juga yang kita pakai dalam pemerintahan, terhadap ke luar kita hanya satu, dan hanya dalam kesatuan kita bisa menghadapi dunia luaran, bisa hidup sebagai bangsa yang merdeka.

Sekarang Saudara-saudara, kita menghadapi suatu saat yang maha penting, menghadapi suatu tanggungjawab yang maha berat, yaitu menyelenggarakan cita-cita yang hidup dalam jiwa bangsa kita: Indonesia merdeka yang berdaulat. Besar tanggungjawab kita terhadap anak cucu kita! Karena, di atas dasar yang dapat kita hasilkan dan kita buahkan sebagai Republik Indonesia Serikat kelak, anak cucu kita akan hidup makmur dan tetap bersatu ataukah akan tenggelam lagi ke dalam penjajahan.

Kita bertanggungjawab akan keselamatan tanah air kita untuk di kemudian hari. Janganlah kita, angkatan sekarang, yang meletakkan batu penghabisan daripada bangunan Indonesia merdeka, yang fundamental sampai ke susunannya ke atas telah diselenggarakan oleh pergerakan kebangsaan kita di masa yang lalu dengan memberikan korban yang tidak sedikit,—janganlah kita terpengaruh oleh cita-cita untuk memetik sendiri hasil usaha puluhan tahun ini. Marilah kita menciptakan Indonesia merdeka yang kita bangunkan untuk anak cucu kita, untuk keselamatan bangsa kita, yang usianya jauh lebih lanjut dan lebih kekal daripada umur manusia.

Saudara-saudata, marilah kita pahamkan Konferensi Inter-Indonesia ini, yang berlaku dalam satu saat yang bersejarah, sebagai suatu simbol persatuan Indonesia dan hendaknya segala usaha kita terpengaruh oleh cita-cita kerja bersama dalam persatuan untuk keselamatan bangsa seluruhnya, terlepas daripada kepentingan daerah masing-masing. Marilah ktia susun dan persatukan segala tenaga kita supaya dalam waktu yang beberapa bulan saja dunia internasional dapat mempersaksikan lahirnya suatu Indonesia merdeka yang berdaulat. *Sekianlah.*

***

Lampiran 3.

JAWABAN PEMERINTAH KEPADA BADAN PEKERJA KNI PUSAT
(29 Juli 1949)

Saudara Ketua,

Kalau pemerintah pada hari ini berhadapan lagi dengan Badan Pekerja, maka terlebih dahulu pemerintah hendak menyatakan terima kasih kepada Saudara-saudara anggota yang telah memperhatikan Keterangan Pemerintah dengan saksama dan menyatakan pendiriannya terhadap Keterangan Pemerintah itu dengan tegas.

Kami merasa girang, bahwa dari pernyataan pendirian para anggota itu ternyata beleid politik pemerintah oleh sebagian besar daripada fraksi-fraksi Badan Pekerja disetujui atau tidak ditolak.

Pernyataan pendirian demikian itu tidak saja berarti bahwa beleid politik pemerintah dibenarkan oleh Badan Pekerja, tetapi pendirian itu pun sudah barang tentu akan memperkuat kedudukan pemerintah ke luar dan ke dalam.

Maka dari itu pantaslah kami menyatakan di sini, bahwa pendirian Badan Pekerja ini memberikan harapan yang beralasan untuk tercapainya penyelesaian soal Indonesia seluruhnya dalam waktu yang singkat dengan cara yang telah digariskan dalam memorandum tanggal 22 Juni yang telah lalu itu.

Bahwa Konferensi Inter-Indonesia harus dipandang sebagai peristiwa politik yang berhubungan erat dengan politik pemerintah pada waktu sekarang ini, diakui juga oleh saudara-saudara yang menyinggung hal ini. Dan sekali lagi kami mengemukakan di sini betapa pentingnya Konferensi Inter-Indonesia itu dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa kita.

Apabila pemerintah sekarang tiba pada penjawaban uraian-uraian Saudara-saudara anggota yang telah dikemukakan pada hari Senin yang lalu dalam sidang ini, maka terlebih dahulu pemerintah akan mengemukakan hal umum yang dikeluarkan oleh hampir semua pembicara, yaitu tentang alasan-alasan yang lebih dalam daripada tindakan-tindakan politik yang dijalankan oleh presiden dan wakil presiden.

Saudara Ketua! Dalam keterangannya pada hari Selasa tanggal 19 yang lalu pemerintah dengan tegas telah mengemukakan dua sendi pokok sebagai dasar daripada politiknya yang dilakukan hingga waktu ini. Pun tindakan-tindakan politik presiden dan wakil presiden disandarkan atas dua sendi pokok itu. Dengan singkat sendi pokok politik pemerintah itu dapat dikatakan secara ringkas sebagai politik keseimbangan antara kekuatan ke luar dan kekuatan ke dalam.

Oleh karena imbangan kekuatan itulah makanya presiden dan wakil presiden di Bangka menjalankan politiknya terhadap dunia internasional sebagaimana yang telah diketahui itu.

Pemerintah telah menegaskan pula, bahwa tindakan-tindakan politik yang demikian itu tidak bermaksud untuk melemahkan atau mengabaikan Pemerintah Darurat yang dipimpin oleh Saudara Sjafruddin Prawiranegara, tetapi ialah untuk membantu PDRI yang terhadap dunia internasional ada di dalam polisi yang terpencil.

Tindakan-tindakan politik presiden dan wakil presiden pada waktu itu harus ditinjau dari keadaan darurat, yang kita hadapi pada waktu itu. Tetapi meskipun lepas daripada keadaan darurat itu, tindakan-tindakan politik presiden dan wakil presiden dapat pula disandarkan atas hak-haknya yang ada dalam undang-undang dasar kita. Tentang hal ini tidak perlu agaknya diterangkan bahwa sistem dan terutama jiwa daripada hukum ketatanegaraan dan undang-undang dasar kita memberi kedudukan dan kekuasaan-kekuasaan kepada presiden dan wakil presiden yang lain daripada sistem pemerintahan-pemerintahan demokrasi Barat yang mempunyai seorang Presiden. Bahwa sistem ketatanegaraan Republik Indonesia ternyata dapat berjalan dengan baik terutama untuk mengatasi keadaan-keadaan genting dan bahaya kita semua telah mengalami selama 4 tahun masa pergolakan yang hebat ini.

Maka dari itu pula, Saudara Ketua, kesulitan yang dihadapi oleh PDRI oleh karena terpisahnya dari dunia internasional dapatlah diatasi dengan tindakan-tindakan politik luar negeri yang dijalankan presiden dan wakil presiden dari tempat pengasingan itu.

Cukuplah agaknya keterangan tentang alasan-alasan yang lebih dalam yang dipakai untuk menetapkan persetujuan 7 Mei dan "*meeting of minds*" pada anggal 22 Juni seperti yang dimaksud Saudara Mr. Samsudin, dengan menyesal pemerintah dalam fase politik pada waktu sekarang ini belum dapat memberikan keterangan-keterngan dalam rapat terbuka Badan Pekerja ini.

Pemerintah percaya bahwa Badan Pekerja dapat mengikuti pula pendapat Saudara Mr. Samsudin tentang hal ini, yang mengatakan bahwa berhubung dengan kepentingan negara pemerintah tidak dapat menjawab pertanyaannya itu di dalam rapat terbuka Badan Pekerja. Begitu pun pula pemerintah belum dapat menjawab di rapat terbuka ini beberapa pertanyaan yang khusus mengenai politik dalam negeri. Kalau pertanyaan-pertanyaan itu tidak dijawab di sini, itu tidak berarti bahwa semuanya itu diabaikan pemerintah.

Saudara Ketua! Soal umum lagi yang dikemukakan oleh beberapa pembicara ialah soal susunan Badan Pekerja. Pemandangan-pemandangan tentang soal ini hampir semua ditujukan pada pertanyaan apakah susunan Badan Pekerja sekarang ini dapat dianggap cukup representatif untuk menghadapi masalah-masalah politik negara yang benar-benar dan sangat mungkin akan menentukan nasib tanah air dan rakyat Indonesia di kemudian hari.

Pemerintah pada umumnya dapat mengikuti pemandangan-pemandangan demikian itu dan berharap supaya dari Badan Pekerja sendiri timbul suatu inisiatif yang

kongkret tentang perubahan atau pembaharuan susunan Badan Pekerja itu, sehingga dalam waktu yang singkat keinginan-keinginan tentang hal ini dapat dipenuhi dengan peraturan undang-undang yang perlu.

Adapun tentang soal *reshuffle* kabinet dan pembentukan delegasi untuk ke Konferensi Meja Bundar pemerintah dapat menerangkan, bahwa keinginan-keinginan dan anjuran-anjuran yang dikemukakan oleh beberapa anggota akan diperhatikan sedapat-dapatnya.

Saudara Ketua, beberapa pembicara mengemukakan pula soal yang dapat dianggap sebagai soal umum, yaitu soal pelaksanaan daripada Persetujuan 7 Mei 1949.

Sebagaimana Saudara-saudara mengetahui, beberapa komisi bersama telah dibentuk di bawah *suspicien* UNCI.[4] Boleh dikatakan bahwa pekerjaan komisi-komisi bersama ini sudah selesai atau hampir selesai. Yang kami maksudkan ialah komisi I yang mengenai persiapan dan persediaan pemulihan Pemerintah Republik ke Yogyakarta dan komisi II yang mengenai hal ihwal penghentian tembak-menembak dan permusuhan. Komisi II ini hingga sekarang masih bekerja terus dan sedang bekerja keras untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tentang pelaksanaan *cease fire* itu.

Adapun hal-hal lain terpenting dalam Van Royen-Roem Statement yang masih harus dilaksanakan ialah soal pembebasan tawanan-tawanan politik dan soal pelaksanaan artikel 7 daripada Pernyataan Van Royen.

Pemerintah berpendirian, bahwa untuk pelaksanaan janji-janji itu pun juga harus dibentuk komisi-komisi bersama di bawah *suspicien* UNCI.

Komisi bersama pelaksanaan pasal 7 daripada Statement Van Royen akan segera dibentuk, sedangkan komisi tentang pembebasan tawanan-tawanan politik yang mula-mulanya belum ada persesuaian paham dapat diharap lekas pula akan dibentuk.

Memang Saudara Ketua, pemerintah dan delegasi Republik Indonesia pun berpendapat bahwa pembebasan tawanan-tawanan politik itu harus dilaksanakan secepat-cepatnya karena telah dijanjikan dengan pasti dalam Statement pihak Belanda pada 7 Mei.

Bahwa delegasi dalam hal ini tidak diam saja, bahkan bekerja keras, dapat dibuktikan dengan usaha-usahanya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang timbul dalam lapangan ini.

Kesulitan pertama yang menyebabkan pelaksanaan janji pembebasan itu ialah perbedaan paham dengan arti dan makna "tawanan politik" (*political prisoners*).

Setelah beberapa minggu pertukaran pikiran dan berdebat, maka dapatlah permufakatan bahwa istilah "*political prisoners*" itu harus diartikan demikian:

"Bahwa mereka yang telah dihilangkan kemerdekaannya karena keyakinan atau fungsi politik mereka, atau karena mereka memegang senjata dalam organisasi-organisasi perjuangan dari salah satu pihak mesti dibebaskan selekas mungkin." (*Than*

---

[4] United Nations Commission for Indonesia.

those who have been deprived of their freedom, because of political convictions of functions, or because they have carried arms in the fighting organisations of one of the parties shall be released as soon as possible).

Lain daripada itu sudah dapat permufakatan juga bahwa istilah *political prisoners* itu tidak terbatas hanya pada orang-orang politik yang ditawan saja, tetapi juga diperluas sampai pada semua orang yang akan dituntut atau telah dihukum karena menjalankan perbuatan-perbuatan yang biasa disebut kriminil, tetapi terang perbuatan-perbuatan itu dilakukan sebagai akibat daripada persengketaan politik antara Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia. (*That those who are being prosecuted or have been condemned because of crimes whih are clearly a consequence of the political conflict between the Kingdom of the Netherlands and the Republic will be released from prosecution or repprived from penalty in accordance with legislative or other measures to be enacted as soon as possible*).

Jadi Saudara Ketua, terhadap mereka itu selekas mungkin penuntutan akan diberhentikan dan hukuman akan ditiadakan menurut tindakan-tindakan undang-undang atau lain-lain tindakan.

Lain daripada itu tentang hasil pemulihan mereka dalam masyarakat akan diadakan kerja sama antara kedua belah pihak menurut peraturan-peraturan yang akan dibikin. (*Measures concerning their social rehabilitation will be worked out in co-operation between the parties*).

Berhubung dengan ini, delegasi telah membentuk suatu organisasi yang dinamakan Komisi Tawanan-tawanan Politik, sehingga pihak kita sudah siap bekerja apabila sedikit hari lagi dibentuk komisi bersama di bawah *suspicien* UNCI untuk melaksanakan janji-janji tersebut.

Pemerintah dapat menerangkan di sini, bahwa delegasi menerima pemberitahuan dari pihak Belanda, bahwa untuk melakukan apa yang disebut tindakan-tindakan legislatif tadi pihak Belanda sudah mengerjakannya dengan membentuk suatu komisi kecil.

Memang, pemerintah dan delegasi tidak puas tentang cara pelaksanaan janji untuk membebaskan dengan segera tawanan-tawanan politik yang menurut pandangan pemerintah berjalan terlampau lambat.

Maka dari itu pemerintah dan delegasi mendesak agar supaya tawanan-tawanan politik yang beribu-ribu itu dapat segera dibebaskan. Organisasi-organisasi yang telah dibentuk oleh delegasi kita mempunyai cabang-cabang di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan daerah Sumatra (Medan, Sumatra Tengah, dan Sumatra Selatan).

Dengan Saudara-saudara pembicara yang terhormat, yang mengemukakan soal tawanan politik ini, pemerintah menyatakan penghargaannya terhadap korban-korban perjuangan kita bersama ini dan senantiasa memperhatikan dan berusaha untuk mengembalikan mereka itu ke masyarakat kita supaya dapatlah lekas turut serta di dalam usaha pembangunan dan pendidikan.

Saudara Ketua! Kalau pemerintah sekarang tiba pada gilirannya menjawab para pembicara yang terhormat di dalam hal-hal yang khusus, maka pertama-tama pemerintah menjumpai Saudara Soendjoto yang minta perhatian pemerintah terhadap faktor yang terpenting dalam masyarakat kita ini, ialah kaum tani. Pemerintah memang senantiasa berusaha memajukan dan mempertinggi derajat kaum tani yang memang merupakan faktor terpenting di dalam masyarakat Indonesia yang bersifat pertanian ini. Dalam pada itu pemerintah tidak melupakan bahwa usaha memajukan dan mempertinggi derajat serta kemakmuran kaum tani itu, kita menghadapi soal-soal yang maha sulit dan tidak dapat dipecahkan dalam tempo yang singkat. Maka dari sebab itu politik pemerintah di dalam hal ini sering-sering nampak sebagai *longterm-policy*, yang sudah barang tentu tidak dapat memperlihatkan hasil-hasil yang seketika dapat dirasakan oleh kaum tani.

Tetapi pemerintah akan tetap berpegang pada politik demikian itu di samping menjalankan usaha-usaha yang perlu ditindakkan untuk meringankan beban-beban kaum tani yang dipikulnya sebagai akibat jaman penjajahan.

Pemerintah bersama-sama dengan anggota yang terhormat, Saudara Soendjoto, menyatakan dari tempat ini penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kaum tni yang di dalam perjuangan kemerdekaan ini merupakan suatu faktor yang penting sekali, dan membuktikan kepada kita keuletan dan kesetiaan yang tidak terhingga besarnya.

Saudara Soendjoto mengemukakan sebagai dasar dan tabiat yang utama daripada kaum tani kita; jiwa perdamaian. Memang jiwa yang demikian itu adalah jiwa murni dan kuat asal saja janganlah perdamaian itu diartikan sama dengan jiwa melempem. Kita harus berusaha supaya jiwa perdamaian itu menjadi jiwa yang dinamis dan kreatif.

Lebih lanjut Saudara Soendjoto berpesan kepada pemerintah supaya dalam Konferensi Meja Bundar jangan dilupakan dan harus diperhatikan sungguh-sungguh soal yang mengenai perekonomian dan keuangan. Pemerintah dengan senang hati akan memperhatikan pesanan-pesanan itu karena soal-soal ekonomi dan keuangan memang akan menjadi acara yang terpenting dalam konferensi itu.

Saudara Ketua! Soal yang dengan kongkret diajukan oleh Saudara Muchtar Abidin ialah hal kepastian tentang soal pegawai dan buruh yang sekarang belum dipekerjakan. Dalam hal ini pemerintah menjawab, bahwa soal perburuhan mendapat perhatian yang sebesar-besarnya. Tiap-tiap pegawai yang setia kepada pemerintah, walaupun belum mempunyai pekerjaan yang tertentu, menerima hadiah dan gaji seperti pegawai yang telah dipekerjakan. Tiap-tiap buruh yang oleh karena sesuatu terpaksa menganggur, menerima sokongn pengangguran. Dalam hubungan ini dapatlah dikemukakan bahwa Kabinet sekarang inilah yang pertama mengeluarkan peraturan tentang sokongn pengangguran itu.

Lain daripada itu, bagian kerjantara (*arbeidsbeurs*) daripada Kementerian Perburuhan dan Sosial, mulai bekerja aktif, sehingga telah banyak penganggur tertolong

dengan pekerjaan. Soal yang amat sukar dipecahkan ialah soal mempekerjakan semua pegawai dalam daerah Keresidenan Yogyakarta yang sekecil ini. Maka dari itu hal ini akan dihubungkan rapat dengan pelaksanaan pasal 7 daripada Statement Van Royen tanggal 7 Mei.

Saudara Ketua! Saudara Mr. Samsudin di dalam pemandangannya memberi alasan-alasan yang kritis dan bersifat membangun untuk menjelaskan sikap partai dan fraksinya terhadap politik pemerintah. Atas perhatian yang demikian itu, Pemerintah mengucapkan banyak terima kasih.

Tetapi Pemerintah sayang sekali tidak dapat mengikuti pendapat Saudara Samsudin, yang mengatakan, bahwa keterangan Pemerintah adalah *sumier* dan kurang jelas untuk memberi gambaran daripada alasan-alasan bahwa Statement Rum-Van Royen adalah *"het uiterst bereikbare"*.

Di muka sudah diterangkan, bahwa untuk kepentingan negara tidak dapatlah pemerintah mengemukakan segala hal di muka rapat terbuka daripada Badan Pekerja. Tetapi dapatlah dikemukakan di sini, bahwa segala faktor-faktor politik ekonomis dan sosial di dalam dan di luar negeri, telah menjadi pertimbangan dan perhatian pemerintah.

Sudah barang tentu bahan-bahan yang didapat tentang faktor-faktor dalam dan luar negeri itu akan lebih sempurna apabila kita mempunyai alat-alat yang teratur dengan rapi sebagai terdapat di lain-lain negeri merdeka yang tidak terlibat di dalam pertikaian politik yang mahahebat seperti Republik Indonesia ini.

Adapun tentang hubungan Bangka[5] dan PDRI yang disinggung pula oleh Saudara Samsudin, dapatlah kami peringatkan apa yang telah kami kemukakan dalam Keterangan Pemerintah pada hari Selasa tanggal 19 yang lalu. Kami pun tidak puas, bahwa hubungan Bangka dengan PDRI tidak dapat dijalankan sebagimana mestinya, karena kami tak mempunyai alat perhubungan sendiri. Tetapi dengan Saudara Mr. Maramis di New Delhi yang diangkat oleh PDRI sebagai Menteri Luar Negeri Darurat, dapat kami berhubungan dengan melalui Jakarta. Dengan Saudara Mr. Maramis itulah kami di Bangka dapat berhubungan dengan baik, sehingga kalau ditinjau dari sudut formal hubungan Bangka dengan PDRI itu ada, walaupun tidak memuaskan.

Di samping usaha itu, kami di Bangka pun mengusahakan perhubungan dengan berkunjungan ke Aceh. Ini dapatlah dipandang sebasgai salah satu usaha pula, untuk mendapat perhubungan dengan PDRI di Sumatra.

Tentang kedudukan UNCI dan wakil kita dalam Dewan Keamanan, Pemerintah dapat menyetujui pendapat Saudara Mr. Samsudin. Lain daripada itu, Pemerintah mengatakan terima kasih atas nota Saudara Mr. Samsudin yang telah disampaikan kepada pemerintah dan akan diperhatikannya pada waktu yang tepat.

[5] Tempat pembuangan Bung Karno, Bung Hatta, dan lain-lain sebelum kembali ke Yogyakarta.

Saudara Ketua! Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Saudara Rasuna Said mengandung kekhawatiran dan syak-wasangka, dan di sini dapat kami katakan bahwa pemerintah cukup waspada. Terhadap pertanyaan Saudara Rasuna Said yang khusus-khusus, jawabannya cukuplah sebagaimana yang diterangkan tadi terhadap pemandangan Saudara Mr. Samsudin.

Demikian juga tentang kekuasaan Pemerintah Darurat yang disinggung oleh Saudara Rasuna Said! Pemerintah telah mengemukakan pendapatnya dalam keterangannya pada hari Selasa tanggal 19 yang lalu dan juga di dalam jawaban yang telah diberikan tadi.

Tentang soal *cease fire* Saudara Rasuna Said bertanya apakah perintah penghentian tembak-menembak itu akan berlaku buat seluruh daerah pertempuran dan apakah *cease fire* itu jadi syarat bagi kembalinya Pemerintah Republik ke Yogyakarta? Menurut resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari dan persetujuan yang telah didapat antara kedua belah pihak, memang *cease fire* itu akan berlaku buat seluruh daerah pertempuran di Indonesia ini, tetapi *cease fire* itu bukanlah menjadi syarat buat kembalinya pemerintah, malahan syarat untuk memerintahkan *cease fire* yang dituntut oleh resolusi Dewan Keamanan tadi ialah kembalinya Pemerintah Republik ke Yogyakarta terlebih dahulu. Oleh karena itu setelah sekarang pemerintah kembali di Yogyakarta maka usaha pelaksanaan *cease fire* itu akan selekas mungkin diwujudkan.

Tentang turut sertanya negara-negara Bagian dan wakil-wakil minoritas pada KMB, Pemerintah mempersilakan Saudara Rasuna Said mempelajari Memorandum tanggal 22 Juni di mana disebutkan siapa yang akan ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar itu.

Untuk menghindarkan salah paham, pemerintah menegaskan di sini, bahwa prinsip yang termuat dalam pasal 1 Persetujuan Renville adalah mengenai situasi politik yang berhubungan dengan masa peralihan menurut konsepsi pada waktu Persetujuan Renville itu ditandatangani. Jadi oleh karena situasi itu telah berubah dan lain sama sekali, dan pada masa sekarang konsepsi politik yang mengenai penyerahan kedaulatan pada bangsa Indonesia sudah berbeda, yaitu tidak melalui suatu masa peralihan dengan Pemerintah Interim, maka pasal 1 dari *Renville Principles* tidak terpakai lagi.

Peringatan Saudara Rasuna Said untuk memelihara kuburan-kuburan para pahlawan yang berserak-serak akan diperhatikan oleh pemerintah.

Saudara Ketua! Pemandangan yang dikemukakan Saudara Syaranamual yang bersifat umum sudah terjawab dengan uraian kami tadi.

Pertanyaan Saudara Syaranamual apakah penduduk dari berbagai-bagai daerah di Indonesia ini masih tetap mempunyai hak untuk menentukan status daerahnya masing-masing apabila kedaulatan telah diserahkan kepada Indonesia, dapat kami jawab begini. Menurut persetujuan yang telah didapat hak itu masih tetap ada dan ketentuan yang terakhir adalah dalam konstituante, jadi pada hakikatnya adalah di tangan rakyat sendiri yang memilih anggota konsituante itu.

Saudara Ketua! Terhadap pembicara Saudara Zainal Arifin, terlebih dahulu pemerintah girang dapat menyertai penghargaannya yang tinggi itu terhadap Angkatan Perang Republik Indonesia yang gagah berani, dan selama perjuangan ini membuktikan kecakapannya tidak saja untuk berperang, tetapi juga untuk berorganisasi sebagai alat negara yang dapat dibanggakan. Soal yang mengenai pasal 4f daripada resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 1949, memang soal ini merupakan suatu soal yang sulit, sebab itu adalah hak daripada UNCI. Tetapi sebagaimana telah berulang-ulang dinyatakan, baik oleh pemerintah maupun oleh delegasi Republik, kita berpegang teguh kepada resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari itu.

Adapun tentang tempat-tempat bernafas bagi perekonomian rakyat, pemerintah sependapat dengan Saudara Zainal Arifin bahwa hal ini harus diperjuangkan sebaik-baiknya. Selanjutnya pemerintah ingin menegaskan bahwa Saudara Zainal Arifin tak perlu khawatir tentang nasib TNI di kemudian hari, karena pemerintah tetap berpendirian bahwa di dalam Tentara Nasional Republik Indonesia Serikat di kemudian hari TNI akan menjadi bagian yang penting.

Saudara Ketua! Banyak daripada pemandangan Saudara Abidin Ahmad telah terjawab dalam uraian kami tadi. Hanya beberapa hal yang khusus perlu dijawab, yaitu pertama tentang Siak Sri Indrapura. Pemerintah tidak dapat memberikan kepastian tentang kabar bahwa pihak Belanda telah mengadakan kontrak baru dengan salah seorang keluarga sultan itu, tetapi pemerintah bersedia akan mengusahakan penyelidikan tentang hal ini.

Pemandangan Saudara Abidin Ahmad tentang pasal 4 dari statement Roem-Van Royen diperhatikan benar oleh Pemerintah dan akan berguna sekali dalam perundingan nanti seterusnya.

Saudara Ketua! Pemerintah merasa girang bahwa analisa Saudara Mangunsarkoro tentang dua sendi pokok yang dikemukakan oleh pemerintah sebagai dasar politknya pada umumnya sesuai dengan pendirian pemerintah. Lain daripada itu memang betul bahwa dalam memorandum yang telah menjadi "*meeting of minds*" itu terdapat kepastian-kepastian bahwa:

1. Penyerahan kedaulatan itu berarti bahwa kekuasaan atas Indonesia daripada Parlemen Belanda, Mahkota, Gubernur Jenderal dan Dewan Rakyat (Volksraad) akan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat.
2. Pembentukan Uni Indonesia Belanda berlaku atas dasar merdeka dan hak sama daripada kedua belah pihak yaitu negeri Belanda dan Negara Indonesia Serikat.

Ketentuan-ketentuan inilah, Saudara Ketua, yang menyebabkan posisi Republik pada masa sekarang ini kuat dan ketentuan-ketentuan itu pulalah yang akan dipegang teguh oleh pemerintah dan delegasi dalam perundingan seterusnya.

Pemerintah pun dapat mengikuti ide yang dikemukakan Saudara Mangunsarkoro tentang penyerahan kekuasaan-kekuasaan kedaulatan yang sekarang dimiliki oleh Republik Indonesia kepada Indonesia Serikat di kemudian hari. Bagaimana caranya menyelenggarakan ide itu, sekarang pemerintah belum dapat memberikan kepastian.

Tentang koordinasi pekerjaan perwakilan-perwakilan kita di luar negeri, hal ini diperhatikan dengan saksama oleh pemerintah.

Saudara Ketua! Pemandangan yang dilahirkan oleh Saudara Maruto Nitimihardjo sudah banyak terjawab.

Tetapi baiklah pemerintah menegaskan, bahwa pemerintah bersedia untuk menerima segala kritik terhadap beleid politik yang telah dilakukan itu. Memang benar apa yang dikatakan Saudara Maruto, bahwa Keterangan Pemerintah bersifat pembelaan. Tiap-tiap pemerintah di dalam negeri demokrasi diberi hak membela beleid politknya di muka sidang Perwakilan Rakyat. Tetapi sebaliknya di dalam demokrasi tiap-tiap pemerintah diberi hak pula untuk menjalankan beleid politiknya dengan tidak diberi mandat secara "*gedetailleerd*" terlebih dahulu oleh parlemen, sebab kalu demikian maka akan hilanglah arti pertanggungjawaban parlementer yang jadi sendi daripada demokrasi politik.

Kalau pemerintah menyatakan, bahwa pemerintah telah memperhitungkan faktor-faktor di dalam negeri, maka sudah barang tentu caranya perhitungan itu mungkin dapat lain dari perhitungan Saudara Maruto Nitimihardjo. Ini disebabkan oleh karena visi politik pemerintah mungkin berbeda pula daripada pandangan politik Saudara itu.

Bersandar atas apa yang dikemukakan dengan begitu tegas oleh anggota yang terhormat Zainal Arifin, terbuktilah pula bahwa perhitungan pemerintah tentang disiplin tentara adalah benar.

Adapun tentang soal *cese fire* yang dikemukakan oleh Saudara Maruto yang terhormat, pemerintah tidak dapat memberikan keterangan lebih daripada apa yang kami uraikan di sini berhubung dengan tingkat pembicaraan *cease fire* yang masih berlangsung pada waktu ini.

Hal-hal yang mengenai soal tawanan politik telah kami kemukakan di atas. Tentang pertanyaan Saudara Maruto yang mengenai beban penghidupan keluarga-keluarga tawanan-tawanan itu pemerintah dalam prinsipnya menyetujui anjuran untuk meringankan bebannya itu. Sampai pada waktu ini pemerintah dan delegasi sedang berusaha mengumpulkan bahan-bahan supaya mendapat pengetahuan yang jelas dalam hal ini.

Pertanyaan anggota tersebut tentang anggaran belanja dapat kami jawab, bahwa telah diputuskan oleh kabinet bahwa *begroting* akan dbikin sebaik-baiknya dan untuk ini telah dibentuk suatu interdepartemental komisi.

Peredaran dua macam mata uang harus dipandang dari sudut kedaruratan dan peralihan, supaya penghidupan penduduk, terutama buruh dan pegawai tidak akan diperberat. Tetapi sebagaimana telah diumumkan pula alat pembayaran resmi dan sah daripada Republik ialah tetap URI.

Saudara Ketua! Demikianlah jawaban pemerintah terhadap pemandangan Badan Pekerja. Pemerintah girang dapat mengambil kesimpulan bahwa walaupun disertai dengan kritik-kritik dan peringatan-peringatan pada umumnya Badan Pekerja dapat memenuhi harapan pemerintah akan bantuan Badan Pekerja yang begitu berharga untuk menjaga kekuatan persatuan rakyat pada saat penting yang datang ini. Untuk bantuan itu pemerintah menyatakan penghargaan dan terima kasih. *Sekianlah!*

***

Lampiran 4.

PIDATO SAMBUTAN PADA PEMBUKAAN KONFERENSI INTER-INDONESIA BAGIAN II DI JAKARTA (30 Juli 1949)

Sri Paduka Sultan Hamid,

Saudara Ketua,

Konferensi Inter-Indonesia bagian pertama di Yogyakarta berjalan dengan baik, dalam suasana saling mengerti, dan kita sudahi dengan rasa persaudaraan. Demikianlah, permusyawaratan *antara kita sama kita itu* mengembalikan kita ke dalam dunia perasaan: satu bangsa dan satu tanah air, dengan satu bahasa nasional. Kita mendapat kata mufakat bahwa Sang Saka "Merah Putih" adalah simbol kehormatan bangsa Indonesia dan Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan kita. Indonesia merdeka ciptaan bangsa akan bernama "Republik Indonesia Serikat", suatu negara *demokrasi* yang berbentu *federasi*.

Di sini tak perlu saya ulangi menyebutkan hal-hal yang telah kita mufakati, karena semuanya itu telah sama kita ketahui dan adalah pula hasil daripada pertukaran antara kita. Lekasnya *pertukaran* pikiran menjadi *persesuaian* pikiran adalah sebabnya karena di masa yang lampau pikiran kita banyak berjalan seiring. Dan apabila kita benar-benar mengingini demokrasi, tentu saja banyak terdapat persesuaian paham antara kita terhadap dasar-dasar pemerintahan negara.

Demokrasi adalah suatu dasar yang membawa pengertian bersama. Tetapi sebaliknya demokrasi menjamin kemerdekaan berpikir dengan tanggungjawab sendiri, dan kemerdekaan berpikir membawa perbedaan paham. Malahan perbedaan paham itu membawa kita kepada kebenaran yang lebih tinggi, karena "*du choc des opinions jaillit la vérité*".

Demikianlah pula, dalam waktu yang begitu singkat, pada Konferensi Inter-Indonesia bagian pertama, tidak mungkin tercapai persesuaian paham tentang segala hal yang menjadi pokok. Ada lagi hal-hal yang harus kita rundingkan, terus atau akan kita mulai merundingkannya pada Konferensi Inter-Indonesia bagian kedua ini. Tetapi apa yang tercapai pada permusyawaratan pertama itu tidak sedikit jumlahnya dan besar sekali nilainya. Lebih banyak dan lebih mendalam daripada yang dapat diduga bermula.

Konferensi Inter-Indonesia bagian pertama menyatakan ada *kemauan* besar pada kita, Republik dan BFO untuk *kerja sama*, untuk memperoleh persamaan pendapat tentang mengadakan persediaan untuk *menerima* kedaulatan yang akan diserahkan kepada kita dengan tiada bersyarat.

Ini adalah penting! Karena, kalau antara kita sama kita tak ada kemauan untuk kerja sama, kalau antara kita tak ada persesuaian pendapat, tak ada orang luar akan dapat menolong kita dalam hal penyerahan kedaulatan itu. Persengketaan antara Republikk Indonesia dengan Belanda dapat ditolong menyelesaikannya oleh Dewan Keamanan, akan tetapi perselisihan antara kita sama kita dengan tak memungkinkan kata sepakat sukar dicampuri oleh orang luar. Sebab itu besar tanggungjawab yang kita pikul dalam Konferensi Inter-Indonesia ini, tanggungjawab yang harus kita buktikan terhadap sekarang dan masa datang. Anak cucu kita akan berterima kasih kepada kita atau akan menuntut kita di muka mahkamah sejarah apabila usaha kita tak berhasil atau pun membahayakan nasib bangsa.

Saudara Ketua, barangkali karena kita semuanya insaf, akan beratnya tanggung-jawab kita bersama itu, maka Konferensi Inter-Indonesia bagian pertama berjalan dengan begitu lancar dalam suasana persaudaraan yang semakin hari semakin kuat rasanya. Harapan saya pada permulaan Konferensi Inter-Indonesia bagian kedua ini Cuma satu: marilah kita perbarui suasana persaudaraan itu dalam permusyawaratan kita selanjutnya, supaya betul-betul terbukti kepada dunia, bahwa kita adalah suatu bangsa yang mau bersatu-padu, tak akan terpisah dalam sengsara maupun gembira.

Saudara Ketua! Tadi saya telah peringatkan akan kemauan kita yang tepat, bahwa *demokrasi* harus menjadi dasar Republik Indonesia Serikat, menjadi cita-cita hidup daripada seluruh bangsa kita. Hanya dengan dasar demokrasi federasi bisa hidup sebagai bentuk negara. Apabila demokrasi tak ada, federasi tak akan menjadi, akan tinggal nama saja. Karena *federasi* pada hakikatnya tak lain daripada *perkembangan demokrasi*.

Demokrasi sering disebut pemerintahan rakyat. Agaknya lebih tepat apa yang dikatakan oleh pujangga besar *Thorbecke* dengan *adagium*-nya yang begitu kesohor, bahwa demokrasi adalah suatu *pemerintahan dari yang diperintah*. Rakyat menerima perintah, akan tetapi pemerintahan didasarkan atas kemauan rakyat, yang sewaktu-waktu ternyata pada hasil pemilihan umum untuk membarui Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pemerintahan demokrasi rakyatlah pada akhirnya yang bertanggungjawab tentang menentukan nasibnya bukan saja dalam hal menentukan nasibnya sebagai bangsa rakyat bertanggungjawab, melainkan juga dalam hal-hal yang mengenai urusan hidupnya serta perbaikan nasibnya sehari-hari. Hanya, apabila rakyat merasakan senantiasa tanggungjawabnya tentang urusan hidup bersama, barulah hidup demokrasi. Karena itu, maka adalah kewajiban mutlak bagi kita bersama untuk menghidupkan demokrasi yang sedang tumbuh sekarang dalam kalangan rakyat. Rancangan konstitusi sementara yang akan kita siapkan untuk menerima penyerahan kedaulatan haruslah menjamin tumbuhnya dan hidupnya demokrasi.

Bagi kita bangsa Indonesia tak ada soal memilih antara sistem demokrasi dan sistem totaliter.sejak berpuluh abad yang silam masyarakat Indonesia berdasar kepada

demokrasi. Segala hal-hal yang mengenai kepentingan hidup bersama dibicarakan dalam rapat dengan mencari kata mufakat. Demokrasi adalah dasar hidup bangsa kita! Kewajiban kita sekarang ialah menumbuhkan demokrasi yang sudah ada rumpunnya itu menjadi pohon yang rindang, sehingga dapat memenuhi tuntutan hidup bangsa kita di masa sekarang dan masa datang.

Sejarah bangsa kita bolehlah menjadi cermin untuk mendapat bukti bahwa hanya dengan demokrasi Indonesia bisa kuat. Pada kata pembukaan Konferensi Inter-Indonesia bagian pertama saya peringatkan, bahwa dua kali dalam sejarahnya bangsa Indonesia mencapai derajat yang gilang-gemilang, dalam Zaman Sriwijaya dan Zaman Majapahit, tetapi senantiasa zaman emas itu berakhir dengan kerubuhan. Sebabnya yang sedalam-dalamnya ialah bahwa demokrasi di masa yang silam itu hanya ada di lapisan bawah saja, dalam pemerintahan desa. Di pucuk berlaku semata-mata autokrasi, kekuasaan orang-seorang. Kebesaran negara bergantung kepada kekuasaan orang-seorang. Kebesaran negara bergantung kepada kebijaksanaan orang-seorang yang memegang kekuasaan, tidak bersendi kepada tanggungjawab rakyat seluruhnya.

Pada adatnya kecakapan luar biasa itu untuk memimpin dan mengikat adalah *pembawaan* diri seorang pemimpin besar, suatu pembawaan yang tidak menurun kepada anaknya. Pembawaan pemimpin besar itu bukanlah barang pusaka, oleh karena itu dibawanya lenyap ke dalam kubur. Itulah sebabnya maka kekuasaan negara yang digantungkan kepada diri orang-seorang, raja atau pun pujangga negara, tidak bisa kekal. Dan kita tahu, bahwa orang luar biasa itu tidak terdapat di segala negeri dan setiap masa. Pertaburannya sangat sepi, sepi dalam ruang maupun dalam waktu. Itulah sebabnya maka Indonesia mengalami dalam sejarahnya masa "hilang dan timbul"; tak ada kebesaran yang kekal.

Indonesia hanya bisa kekal dengan demokrasi, dengan satu pemerintahan yang dipikul oleh *rasa* tanggungjawab rakyat seluruhnya. Hanya, apabila rakyat merasai bahwa nasibnya adalah dalam tangannya sendiri, rakyat berani mempertahankan dan membela kemerdekaannya. Dan apabila kita perhatikan lagi susunan nusantara kita, terbagi atas beratus-ratus pulau, besar dan kecil dalam berjenis ukuran, tersebar antara jarak yang luas sekali, maka jelaslah sudah bahwa susunan yang semacam itu hanya bisa hidup bersatu dalam sistem demokrasi. Sistem demokrasi, di mana pimpinan yang tegas dari pucuk sejalan dengan tanggungjawab dari bawah. Ringkasnya, tiap-tiap lingkungan kesatun masyarakat dari bawah sampai ke atas, desa kabupaten, Provinsi dan negara harus mempunyai otonomi yang seimbang. Ditinjau dari sudut ini, maka besar sekali artinya perseiaan pendapat yang telah kita capai bahwa "pembagian negara dalam daerah-daerah otonom menurut sistem demokrasi diatur di dalam konstitusi negara bagian". Di sini dasar otonomi bagi daerah-daerah dijamin, sedangkan kekuasaan mengaturnya diserahkan pula kepada bagian yang meliputi daerah-daerah itu.

Dengan cara demikian, maka diferensiasi yang masih ada dalam Indonesia sekarang tentang sifat daerah yang kecil-kecil akan mendapat perhatian sepenuhnya dalam mengatur otonominya.

Saudara Ketua! Demokrasi yang meletakkan titik berat pada pesertaan tanggungjawab rakyat seluruhnya senantiasa menghadapi soal pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah yang berotonomi. Garis pembagian kekuasaan itu tidak dapat sekali ditetapkan untuk selama-lamanya, karena hal itu bergantung kepada keadaan dan masa. Sejarah tata negara di negeri-negeri yang terutama dan ternama di dunia sejak krisis ekonomi tahun 1929 cukup melahirkan bahan untuk pengetahuan kita, bahwa di masa sulit dan masa pembangunan luar biasa yang menghendaki keputusan cepat untuk keselamatan negara, kelihatan tendensi yang besar sekali untuk memperbesar lingkungan kekuasaan pemerintah pusat. Tetapi, di masa normal, di mana urusan negara berlangsung sebagaimana biasa, ada besar tendensi untuk menyerahkan sebanyak-banyaknya urusan kepada pemerintah daerah.

Kedua-dua tendensi itu akan kita alami juga di Indonesia ini. Asal kita dapat melihat, dari mulai sekarang, segala kemungkinan itu yang akan ditentukan oleh jalannya keadaan, maka dapatlah kita mengadakan lingkungan pembagian kekuasaan yang tidak kaku.

Yang penting bagi kita ialah adanya *desentralisasi*, yang memungkinkan memberikan kekuasaan mengatur sendiri, tidak saja kepada kesatuan daerah yang sekecil-kecilnya, tetapi juga kepada golongan yang berkepentingan dan bersangkutan dalam masyarakat.

Saudara Ketua, dengan mengemukakan beberapa buah pikiran ini, inginlah saya menegaskan, bahwa demokrasi yang dipikul dengan rasa tanggungjawab oleh seluruh rakyat adalah soal hidup bagi bangsa Indonesia. Abad yang ke-20 ini menyatakan adanya aliran paham yang mau menguasai seluruh dunia dari suatu *centrum*, dan aliran ini besar sekali pengaruhnya pada berbagai negeri. Kalau aliran ini juga merajalela di Indonesia ini, maka kemerdekaan yang kita capai akan hilang kembali, dan Indonesia akan kembali ke dalam penjajahan. Hanya rakyat yang mempunyai rasa tanggungjawab atas nasibnya sebagai bangsa, sanggup mempertahankan kemerdekaan.

Selanjutnya, konstitusi yang akan kita bentuk untuk sementara, guna menerima penyerahan kedaulatan, hendaklah pula memberi jaminan kepada rakyat bahwa Indonesia tidak saja merdeka dalam arti politik, tetap juga dalam arti ekonomi.

Saudara Ketua, dengan ini saya sudahi tinjauan saya yang sepintas lalu ini untuk menyambut Konferensi Inter-Indonesia bagian kedua, yang kita mulai hari ini. Mudah-mudahan hasilnya dan semangat persaudaraannya tak kurang daripada konferensi bagian pertama. *Sekinlah, dan terima kasih!*

***

Lampiran 5.

BATIK, PAYUNG, DAN TEKSTIL INDUSTRI DI TASIKMALAYA

Tasikmalaya, 20/8 (Antara).

Berbagai perindustrian di sekitar daerah Tasikmalaya dan Ciamis, baik di waktu sebelum perang maupun sesudahnya, tetap merupakan kota kerajinan, terutama tentang batik dan payung.

Menurut penyelidikan kini, banyaknya pabrik batik di Tasikmalaya dan Ciamis telah melebihi di waktu sebelum perang, hanya produksinya ada sedikit kurang disebabkan bahan-bahan hanya terdapat dari pembagiansaja, ;yang menyebabkan para pembatik terpaksa membeli bahan dari luar dengan harga gelap. Jumlah pabrik batik di sekitar Tasikmalaya dan Ciamis l.k. 400 buah dan sebagian besar tiap bulannya mendapat pembagian bahan-bahan dari pemerintah dengan harga E.Z. (*Economische Zaken*, Departemen Perekonmian).

Hasil produksi tiap bulan rata-rata 300.000 potong.

Harga dari bermacam-macam batik keluaran Tasikmalaya rata-rata terbagi dalam 3 bagian, yaitu halus, sedang, dan kasar, dengan harga masing-masing *f*800,--, *f*600,--, dan *f*400,-- per kodi. Banyaknya pegawai tiap hari rata-rata 5.000 orang terdiri dari tukang cap, mandor godog, dan tukang tulis perempuan, dan upah yang didapat mereka tiap harinya ialah: tukang cap dari *f*5,-- sampai *f*10,--, tukang tulis perempuan dari *f*1,50 sampai *f*3,--, dan mandor godog *f*2,50.

Persatuan

Semua pabrik batik yang kalau di waktu sebelum perang satu sama lain terus bersaingan, sedang harga pun satu sama lain terus-menerus saling banting, kini hal-hal semacam itu tidak terdapat lagi, sebab semua pabrik telah bersatu padu bernaung dalam sebuah organisasi.

Di antara sekian banyak pabrik terdapat beberapa persatuan, misalnya "Mitra Batik", "H. Zeini Bond", "Tionghoa Indonesia Bond", "Central Pasundan" dll. Soal persatuan bukan saja terdapat di kalangan para majikan saja, tapi juga para pegawainya tak mau ketinggalan dan satu sama lain telah bersatu pula dengan mendirikan "Persatuan Tukang Cap", "Persatuan Mandor Godog", dan "Persatuan Tukang Canting".

Payung

Perusahaan payung kalau dibandingkan dengan sebelum perang, kini banyak berkurang. Kalau di waktu sebelum perang terdapat 300 pabrik dan hasil produksinya

rata-rata sampai 400.000 payung, kini baru terdapat l.k. setengahnya. Hal ini adalah semata-mata karena sulitnya didapat bahan-bahan.

Di waktu jaman pendudukan Jepang sampai jaman Republik, yang dapat melanjutkan perusahaan hanya terdiri dari beberapa orang bangsa Tionghoa, tapi kini boleh dikatakan 70% berada dalam tangan bangsa Indonesia. Seperti perusahaan batik, pun perusahaan payung mendapat bahan-bahan dari pemerintah. Hasil produksi tiap bulan rata-rata baru 200.000 payung yang berkualiteit sedang dan kasar, serta ada pula yang berkualiteit baik.

Di waktu sebelum perang payung keluaran Tasik telah mempunyai pasar di sekitar kepulauan Indonesia dan tidak sedikit mendapat pesanan dari luar negeri. Perusahaan payung pun mempunyai ikatan yang dinamakan "Mitra Payung".

Tekstil

Sebelum perang di sekitar daerah Tasikmalaya hanya terdapat beberapa orang yang mempunyai tustel tenun dan sama sekali tidak mendapat perhatian. Di jaman pendudukan Jepang dan Republik penduduk Tasik baru mempunyai hasrat, dan sebagian penduduk menujukan perhatiannya terhadap itu, serta Pusat Koperasi Tasikmalaya telah membikin sebuah gedung yang besar dan telah mempunyai 35 tustel dan ratusan tustel tangan. Tapi sayang pabrik tersebut telah hancur karena bumi hangus di waktu aksi polisi ke-1 yang menyebabkan Koperasi menderita kerugian tidak sedikit. Kini yang mendirikan pabrik tenun di sekitar daerah Tasik dan Ciamis adalah seakan-akan jamur di musim hujan. Puluhan pabrik telah didirikan orang dan ratusan tustel dikerjakan. Hasil produksi tiap bulan rata-rata 11.000 potong. (*Antara*, 20 Agustus 1949)

***

Lampiran 6.

KETERANGAN RESMI DELEGASI REPUBLIK
(Bagian 2)
(*Bagian 1 tidak ditemukan*)

Melakukan perjalanan untuk mengunjungi sendiri Komandan-komandan tentara dan pembesar-pembesar sipil di Jawa Barat. Kol. Nasution telah mengunjungi Panglima Divisi TNI di Jawa Barat dan keempat komandan-komandan brigade. Selain dari itu telah diadakan pembicaraan dengan komandan divisi, antara lain soal pemerintahan sipil, soal perbekalan dan soal-soal obat-obat, telah dibicarakan dengan pemerintah Pasundan. Segera akan diadakan pertemuan-pertemuan di antara Komandan-komandan Brigade kedua pihak, dan di kota-kota kabupaten segera akan diadakan kantor-kantor penghubung dari TNI.

Kesan umum dari Kol. Nasution tentang keadaan di Jawa Barat ialah bahwa setelah kunjungan-kunjungan yang diadakan, diharapkan penglaksanaan yang sempurna dari penghentian permusuhan.

Jawa Tengah:

Beberapa kesulitan yang terdapat di Solo pada waktu permulaan ini telah diatasi dengan persetujuan sementara antara Komandan kedua pihak; anggota-anggota dari pihak Indonesia telah bersedia untuk mengadakan rapat *Local Joint Committee* yang pertama untuk mencari peraturan-peraturan yang lebih sempurna. Daerah-daerah di Jawa Tengah dalam minggu depan akan dikunjungi oleh Yang Mulia Menteri Pertahanan dan Kol. Nasution, sebagaimana yang telah dilakukan di Jawa Barat, di mana sudah tercapai suasana baik dan saling mengerti antara kedua pihak.

Jawa Timur:

Setelah kunjungan Jenderal Mayor Suhardjo, waktu itu direncanakan pertemuan antara Kol. Sungkono dan Komandan Tentera Belanda di Jawa Timur. Pertemuan ini tidak berlangsung, oleh karena Komandan Tentera Belanda tidak dapat hadir.

Waktu Jenderal Mayor Suhardjo berada di Surabaya, beliau mendapat laporan, bahwa beberapa pasukan TNI di bwah perintah Mayor Djarot telah beberapa lama berada di kota dan sekitarnya. Jenderal Mayor Suhardjo menganjurkan supaya hal ini diberitahukan kepada Military Observer sebelum perintah penghentian permusuhan berlaku.

Menurut instruksi pada tanggal 10 Agustus 1949, Mayor Djarot akan diperkenalkan dengan Military Observer yang berada di Surabaya. Sesudah Jenderal Mayor Suhardjo

meninggalkan Surabaya, sebelum perintah cease fire berlaku, pimpinan tentara belum menerima laporan lebih lanjut. Oleh karena ada pengumuman dari pihak Belanda mengenai Mayor Djarot, maka pada tanggal 19 Agustus 1949 Yang Mulia Menteri Pertahanan telah datang ke Surabaya dari Jakarta untuk mengetahui bagaimana duduk perkara yang sebenarnya. Berhubung dengan waktu yang singkat, Yang Mulia Menteri Pertahanan tidak berhasil untuk mengadakan pembicaran dengan Panglima Divisi TNI di Jawa Timur.

Hari Minggu tanggal 18 Agustus setelah mengikuti kunjungan ke Jawa Tengah, Yang Mulia Menteri Pertahanan akan mengunjungi Jawa Timur. Yang Mulia Menteri Pertahanan tidak memperoleh kesan bahwa keadaan adalah genting. Beliau percaya, bahwa kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul akan dapat diatasi.

Sumatra:

Panglima Sumatra Kol. Hidajat sedang mengadakan perjalanan di seluruh daerah di Sumatra untuk menemui Komandan-komandan Tentera dan pembesar-pembesar sipil di Tapanuli, Sumatra Timur, Sumatra Tengah dan Sumatra Selatan.

Juga di Sumatra kesulitan dianggap akan dapat diselesaikan apabila perhubungan baik di antara kedua pihak yang sampai sekarang terbukti ada, dilanjutkan. 20 opsir sedang disebarkan ke seluruh Sumatra untuk menyampaikan perintah-perintah dan instruksi-instruksi.

Kalimantan:

Utusan-utusan Republik ke Kalimantan untuk menyelenggarakan segala sesuatu yang berkenaan dengan penghentian permusuhan telah sedia untuk berangkat dan sekarang menunggu pengangkutan ke Kalimantan. (Terputus di sini; *Antara*, 20/8/2949)

***

Lampiran 7.

KETERANGAN RESMI DELEGASI REPUBLIK
Tentang Penglaksanaan Penghentian Permusuhan

Hari ini pada jam 13.00 Delegasi Republik Indonesia telah mengeluarkan sebuah keterangan resmi tentang penglaksanaan penghentian permusuhan yang isi lengkapnya adalah sbb.:

1. Dalam pembicaraan-pembicaraan mengenai aturan-aturan penghentian permusuhan, maka kedua pihak setuju, bahwa segala daya upaya harus diadakan untuk menghindarkan perang pengumuman. Untuk itu antara lain kedua pihak menyetujui dalam pasal 17 dari Pedoman (Manual):

   "Tiap pihak tidak akan mengumumkan sesuatu tindakan dari pihak lain yang dianggapnya pelanggaran atas persetujuan, kecuali apabila tuduhan pelanggaran itu dan pengumumannya telah dibicarakan dalam Panitia Pusat Bersama."

   Selanjutnya di dalam persetujuan telah ditetapkan cara menyelesaikan tuduhan-tuduhan tentang pelanggaran-pelanggaran.

   Pemerintah Republik sangat menyesalkan bahwa sekarang oleh pihak Belanda telah dimulai mengadakan pengumuman-pengumuman yang bertentangan dengan isi dan jiwa pasal tersebut di atas. Dalam Panitia Pusat Bersama, Republik akan memajukan protes terhadap hal ini.
2. Berhubung dengan pengumuman-pengumuman dan berita-berita yang telah tersiar mengenai penglaksanaan penghentian permusuhan, dengan ini ditegaskan sbb.: Dua hal harus diingat mengenai penghentian permusuhan:

   Pertama: Penghentian permusuhan dimaklumkan setelah lebih dari 7 bulan terdapat permusuhan-permusuhan di darat, di laut dan di udara, permusuhan mana dijalankan dengan berbagai-bagai cara. Mengalirkan perasaan dan keadaan permusuhan kepada keadaan yang dikehendaki oleh persetujuan-persetujuan penghentian permusuhan, meminta waktu, kebijaksanaan dan kemauan baik dari kedua pihak serta pengertian terhadap kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan oleh keadaan.

   Kedua: Gerakan-gerakan militer selama lebih dari 7 bulan telah mengakibatkan rusaknya perhubungan cepat dari Tentara Republik. Dengan mengingat hal-hal ini, Pemerintah Republik telah mengambil 2 tindakan:

   1. Pemerintah Republik dan pimpinan tentara telah mengirim utusan-utusan ke berbagi-bagai daerah di Jawa dan Sumatra untuk menyampaikan perintah-perintah dan untuk memberikan penjelasan-penjelasan. Sampai sekarang pimpinan tentara telah mengirimkan lebih dari 50 opsir-opsir ke bagian-bagian

daerah di Jawa dan Sumatra. Segala sesuatu yang mungkin dapat dijalankan dalam keadaan yang dihadapi, telah dijalankan. Sportiviteit memaksa untuk mengakui, bahwa dalam hal ini kedudukan tentara Belanda yang mempunyai perhubungan-perhubungan yang baik adalah lebih menguntungkan baginya, dan bahwa usaha-usaha Republik untuk menjalankan penghentian permusuhan adalah lebih sulit dari usaha-usaha Belanda.

2. Pemerintah Republik telah beberapa kali meminta bantuan UNCI dan Belanda, agar Republik dapat mengadakan kembali hubungan-hubungan yang cepat dengan semua daerah. Permintaan-permintaan ini sampai sekarang tidak berhasil.
3. Rapat-rapat Panitia Pusat Bersama sampai sekarang baru diadakan 2 kali dan satu rapat yang telah disetujui akan diadakan di Yogyakarta telah tertunda oleh karena pada saat pesawat terbang akan berangkat dari Jakarta, pihak Belanda memberitahukan tidak dapat berangkat ke Yogyakarta. Rapat-rapat yang telah diadakan sampai sekarang belum mencapai hasil yang dapat memberikan petunjuk-petunjuk yang tegas kepada daerah-daerah, terutama dalam perbatasan daerah patroli, sedangkan petunjuk-petunjuk ini adalah satu syarat yang penting bagi penglaksanaan penghentikan permusuhan di daerah. Juga pembentukan Local Joint Committee sampai sekarang berjalan sangat lambat; di beberapa tempat pembentukan Local Joint Committee menunggu kedatangan Military Observer. (Terputus di sini, *Antara*, 20/8/1949)

***

Lampiran 8.

MAKLUMAT BERSAMA NO. 3
Peraturan Wajib Bekerja Guna Pembangunan Negara

Mengingat : kerusakan-kerusakan, kerugian-kerugian, terlantarnya alat-alat dan bangunan-bangunan negara, karena akibat peperangan; dan

Menimbang : kerusakan harus selekasnya dibangun kembali untuk kepentingan rakyat dan negara;
Rakyat Indonesia memiliki tenaga raksasa dalam adat lembaga "Gotong Royong".

Memutuskan : mengadakan peraturan sebagai berikut:

Fasal 1 : Semua warga negara Republik Indonesia, berumur antara 16 sampai 50 tahun, diwajibkan bekerja "gugur gunung" 1 hari (8 jam) dalam seminggu guna kepentingan pembangunan Negara.

Fasal 2 : Rencana pembngunan ditetapkan oleh KDM atau KODM bersama Bupati, Wedana atau Camat yang bersangkutan.

Fasal 3 : Pekerjaan "gugur gunung" ini pada umumnya dilakukan tidak lebih jauh dari 10 km dari tempat kampung halaman, kecuali dalam soal-soal yang khusus.

Fasal 4 : Dibebaskan dari kewajiban ini ialah:
a. pegawai pemerintah.
b. anggota angkatan Perang dan Polisi Negara.
c. alim ulama (guru).
d. orang-orang yang sedang sakit.

Fasal 5 : Barang siapa yang melanggar peraturan ini dihukum: Penjara selama-lamanya 3 bulan subider hukum denda sebanyak 300 *ranggeong* (sehari 3 *ranggeong*).

Fasal 6 : Peraturan ini berlaku mulai 11 Agustus 1949 sampai waktu ditariknya kembali, dan dimulai setelah ada perintah dari KDM atau KODM bersama-sama Bupati, Wedana atau Camat.

Maklumat ini disertai penjelasan tentang apa-apa yang harus diperbaiki, misalnya jalan-jalan besar, jembatan, kantor-kantor pemerintahan daerah, Masjid, sekolah, saluran irigasi dsb. Pun ditetapkan apa-apa yang mesti disediakan, misalnya bambu, balok dan papan, untuk hal mana akan diberi gantian kerugian. (*Antara*, 23/8/1949)

***

Lampiran 9.

MENUJU KEPADA PENYERAHAN KEDAULATAN BAGI BANGSA INDONESIA

oleh Arnold C. Brackman
Koresponden *United Press*

Persengketaan Indonesiaan-Belanda sekarang tiba pada tahun kelima, tetapi beberapa peninjau berpendapat bahwa sengketa ini akan berlangsung lebih lama lagi. Mereka meletakkan harapannya pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag yang dimulai besok, di mana penyerahan kedaulatan akan diperbincangkan.

Harapan akan tercapainya penyelesaian sekarang ini lebih benderang dari waktu manapun juga semenjak habis perang, kecuali barangkali penandatanganan Persetujuan Linggajati yang malang itu dalam tahun 1947.

Dalam bulan-bulan yang lalu kedua pihak banyak mundurnya, jika dibandingkan dengan pendirian-pendirian mereka semula, tetapi dengan demikian itu mereka semakin dekat-mendekati.

Republik sudah melepaskan cita-citanya membentuk Republik kesatuan untuk seluruh Indonesia. Mereka menerima rancangan Belanda menciptakan Indonesia Serikat yang federalistis, meskipun tetap Republik Indonesia Serikat. Karena diterimanya cita-cita federalistis ini, maka kaum federalis yang dijelmakan oleh Belanda dan kaum Republik berlebur dalam satu blok persatuan.

Di lain pihak, Belanda melepaskan pula cita-citanya untuk menghancurkan Republik dari muka bumi, dan terpaksa mengakui kemerdekaan Indonesia yang tidak bersyarat dengan pimpinan yang terbesar dipegang oleh Republik.

Kedua pihak ternyata, dengan tidak langsung, sudah mundur karena bahaya kemenangan Komunis di Tiongkok yang, dengan sendirinya, menimbulkan tekanan langsung dari pihak Amerika Serikat terhadap Indonesia.

Tetapi pertumpahan darah dan perusakan selama empat tahun ini banyak meninggalkan bekas-bekas kehancuran di Indonesia.

Semboyan bagi bangsa baru ini adalah pembangunan.

Untuk ini harus banyak dimasukkan modal asing, juga modal Amerika—ini adalah satu faktor yang memperkuat campur tangan Amerika dengan perantara Komisi PBB untuk Indonesia.

Peperangan selama empat tahun ini telah membawa Pemerintah Belanda ke tepi kebangkrutan. Juga telah menimbulkan perasaan tidak percaya di antara bangsa Indonesia, hal mana dapat dilihat pada kegelisahan dari beberapa kalangan bangsa Belanda tentang hari kemudian mereka.

Sebaliknya, peperangan ini telah meniwaskan banyak pemuda dan calon-calon

pemimpin, telah menghebatkan kejahatan seperti biasa sehabis tiap peperangan dan telah mengacau kehidupan keluarga; telah membawa bangsa muda ini ke arah inflasi dan korupsi.

Tetapi bangsa Indonesia dapat menerima ini sebagai korban: mereka berhasil memperoleh kemerdekaannya.

Tidak satu pun dari kedua pihak merasa sangat kuatir terhadap bahaya komunis dari dalam. Kebanyakan pemimpin-pemimpin Komunis sudah mati terbunuh atau dipenjarakan, atau melarikan diri semenjak pembrontakan Komunis yang gagal itu pada bulan September tahun lampau.

Satu hal yang mengherankan setelah empat tahun berkelahi itu ialah perhubungan yang harmonis antara bangsa Belanda dan bangsa Indonesia: tidak satu pihak pun berpikir dengan kata-kata "kulit hitam dan kulit putih".

Sekalipun ada curiga dan pergeseran, peninjau-peninjau yang ulung merasa bahwa Indonesia Baru, dalam tingkat-tingkat pertama nanti, merasa perlu sekali akan bantuan Belanda, materiel dan teknis. Sedangkan hanya sedikit orang saja yang ragu-ragu akan kecakapan bangsa Indonesia di lapangan politik dan sosial dan kesanggupan mereka mengurus rumah tangganya dengan baik, bangsa Indonesia ini akan sangat membutuhkan ahli teknik dari luar negeri, dari ingenieur hingga ahli ekonominya. Inilah yang harus dimulai oleh Belanda.

Kesanggupan Negeri Belanda mempertahankan kedudukan ini sangat tergantung pada kejujuran dan kecakapan dari tiap-tiap orang Belanda untuk mengikuti jalan sejarah. Pemimpin-pemimpin dari kedua pihak berulang-ulang melahirkan keinginannya mengikat tali persahabatan yang erat antara kedua bangsa itu di masa muka.

"Diehards" (kaum keras kepala) cepat menemui ajalnya.

Beberapa orang Belanda menentang keras konsesi-konsesi kepada Indonesia dan berterus terang (*tak terbaca, KST*).

Sebaliknya peninjau-peninjau meramalkan akan adanya hari kemudian yang terang benderang bagi Indonesia dan bagi hubungan Indonesia-Belanda—seandainya konferensi di Den Haag itu berjalan lancar.

Tetapi tidak seorang pun mengharapkan sesuatu pertukaran yang hebat ini dapat terlaksana dengan sekaligus. (UP; *Antara*, 23/8/1949)

***

Lampiran 10.

PIDATO PERDANA MENTERI BELANDA DR. W. DREES PADA PEMBUKAAN KONFERENSI MEJA BUNDAR (23 Agustus 1949)

Dengan ucapan selmat datang kepada segenap delegasi yang menghadiri Konferensi Meja Bundar hari ini, dengan ini perlu kiranya saya menandeskan di sini, bahwa dengan berlangsungnya konferensi ini, seluruh rakyat Belanda dan rakyat Indonesia menunggu kepastian yang tertentu dari hasil-hasil yang akan dibawa pulang sebagai hasil daripada konferensi ini. Akan menjadi suatu bayangan sejarah bagi rakyat di Indonesia dan di negeri Belanda sesudah perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya sekian lamanya ini, bilamana nanti bisa didapatkan hasil-hasil yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Dan bukan hanya sesuatu persetujuan saja yang penting dan akan membawa jalan baru bagi kita yang pada dasarnya nanti akan dijalankan dan diberikan kepada suatu negara yang souverein penuh, suatu negara yang merdeka, berdaulat, suatu Republik Indonesia Serikat. Dengan penyerahan yang penuh inilah nanti diharapkan bisa didapatkan persahabatan antara kedua bangsa ini dengan mengindahkan hakikat rohani dan hakekat jasmaninya perjuangan.

Rasanya perlu saya nyatakan di sini, perlu saya kemukakan di sini pidato Ratu Wilhelmina 7 tahun y.l. di mana dinyatakan, bahwa segera dengan berakhirnya perang yang sedang menghebat pada saat dan waktu itu, segera akan dilangsungkan Konferensi Meja Bundar di negeri Belanda yang diharapkan bisa dihadiri oleh wakil-wakil dari Indonesia, Suriname, Antillen dan negeri Belanda sendiri. Dalam konferensi ini hendaknya dapat nanti dibicarakan peraturan tata hukum yang baru yang akan meliputi negara-negara atau bagian-bagian yang ikut dalam perundingan itu nanti.

Dengan mengingat hubungan antara Belanda dan Indonesia dan Indonesia dengan Belanda pada masa-masa yang telah lalu dapat kiranya segala usaha yang akan mendekatkan kedua belah pihak, segala ikhtiar yang akan menarik kedua belah pihak dalam satu perundingan, bisa mendapatkan suatu keputusan yang dapat dilaksanakan dengan sempurna di dalam praktek.

Memang menjadi sesuatu kenyataan yang tak dapat dimungkiri lagi, bahwa satu masa datang yang baik akan menjadi bagian daripada perjuangan Indonesia yang akan datang. Telah berkali-kali kita dapatkan persetujuan—persetujuan Linggarjati, persetujuan Renville dan perundingan di Jakarta yang juga telah mendapatkan satu persetujuan—yang semuanya itu akan bisa memberikan sumbangan penting dalam perundingan yang akan diadakan di sini nanti. Walaupun segala persetujuan tersebut menemui jalan buntu, walaupun persetujuan tadi tidak dapat dilaksanakan di dalam

prakteknya, tetapi persetujuan ini mempunyai satu arti yang tegas, yang akan dapat mewujudkan satu persetujuan yang dapat membawa kita bersama ke arah tujuan yang sama-sama kita kehendaki.

Adapun maksud yang tertentu daripada konferensi ini adalah untuk memberikan satu isi yang riil, satu isi yang nyata yang akan berguna bagi kader kita yang akan melanjutkan pekerjaan kita di masa datang, yang akan berguna buat generasi yang akan datang.

Maka kepada delegasi Indonesia saya nyatakan dan saya harapkan di sini supaya bisa memberikan suatu kata putusan yang pasti, yang tidak lagi didasarkan atas sentimen, karena dengan tegas saya nyatakan di sini, bahwa lambat laun dalam kalangan kita rakyat Belanda telah timbul satu anggapan, bahwa *souvereiniteit* bagi Indonesia adalah hal yang mutlak. Tindakan ini adalah dijalankan dengan mendapat persetujuan dari kebanyakan rakyat kita. Kita percaya kita telah mendapatkan teman kembali; maka kita pun menumpahkan kepercayaan sepenuhnya, bahwa segera akan didapatkan suatu bentuk yang nyata dari sesuatu negara yang demorkatis yang dipertalikan dengan Belanda dalam sesuatu pertalian baru. Dan dengan demikian adalah menjadi salah satu tujuan daripada konferensi ini untuk menghilangkan segala persimpangan jalan yang hingga saat ini belum bisa dilalui

Memang masih ada juga rasa syak dan khawatir dan tidak percaya atas hasil yang akan bisa didapatkan konferensi ini. Tetapi dengan cara kerja yang teliti dan saksama akan bisa didapatkan satu jalan keluar yang nyata dari segala persengketaan. Dan dengan ini hendaknya didasarkan cara berpikir kita atas taktik baru dengan diisi oleh cita-cita yang baru pula.

Saling percaya-mempercayai perlu pada masa ini, pada masa akan ditentukan sesuatu yang akan selama sejarah berlaku ini, yang dengan demikian akan memberikan dan menimbulkan pula rasa percaya dari partai lain.

Saya percaya, bahwa konferensi akan membawa hasil yang memuaskan. Dengan adanya satu hubungan baru antara Indonesia dan Belanda dan dengan diikuti pikiran yang sehat akan didapatkan peraturan dan perjanjian yang sudah dipikirkan dengan masak-masak. Dan Republik Indonesia Serikat yang demokratis akan segera berdiri, dengan hubungan baru dengan Nederland dalam satu Uni di mana ratu menjadi kepalanya.

Di samping ini saya mersa gembira, bahwa konferensi ini dihadiri pula oleh Komisi PBB Untuk Indonesia yang akan membawa konferensi ini nanti ke tingkat internasional. Hingga kelak dunia akan insyaf, bahwa kali ini diadakan satu perundingan yang akan memberikan kata keputusan yang tegas. Dengan ini konferensi saya buka. (*Antara*, 24/8/1949)

***

Lampiran 11.

PIDATO KETUA DELEGASI REPUBLIK INDONESIA DRS. MOH. HATTA PADA PEMBUKAAN KONFERENSI MEJA BUNDAR (23 Agustus 1949)

Tuan Ketua yang Mulia,

Sidang yang terhormat,

Apabila kita sekarang berkumpul di keliling Meja Bundar ini, maka segala pihak pasti mempunyai keyakinan bahwa permusyawaratan kita di sini harus mencapai ujudnya, yaitu penyerahan kedaulatan yang penuh dan nyata kepada bangsa Indonesia dengan tiada bersyarat. Akhirnya, setelah empat tahun berunding dan bertempur dengan pengorbanan jiwa dan harta yang tidak sedikit, yang sebenarnya berguna bagi pembangunan masyarakat dan produksi, maka terbukalah pikiran bahwa penyelesaian yang cepat harus dicapai. Pengalaman yang pahit di masa yang lampau memberi kenyataan, bahwa hanya satu-satunya jalan untuk menyelesaikan soal Indonesia ialah penyerahan kedaulatan dengan tidak bertangguh. Kisah perundingan di masa yang lampau memberi kenyataan bahwa pokok kesulitan terletak pada soal kedaulatan itu.

Kedaulatan Belanda atas Indonesia berdasar dalam sejarah. Tetapi sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diumumkan dengan segala upacara kepada dunia sebagai suatu pernyataan daripada hak bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri, maka bangsa Indonesia merasa dirinya mempunyai kedaulatan, diakui atau tidak oleh bangsa asing. Apalagi karena Republik Indonesia lahir ke dunia dengan penumpahan darah dan air mata! Beribu-ribu pemuda Indonesia tewas dalam merebut kekuasaan dan senjata dari Jepang, dan keadaan ini menambah kuat perasaan, bahwa kemerdekaan yang diperoleh dengan begitu banyak pengorbanan harus dipertahankan mati-matian. Jangan pula dilupakan pengaruh perasaan jiwa, bahwa kemerdekaan Indonesia itu direbut dari tangannya Jepang dan tidak dari kekuasaan Belanda. Dengan sendirinya kemerdekaan yang dibayar dengan harga yang begitu besar, tak sudi orang melepaskannya kepada Belanda.

Perubahan jiwa yang begitu besar terdapat pada bangsa Indonesia pada permulaannya sukar sekali dipahamkan oleh bangsa asing yang hanya mengenal Indonesia sebelum Perang Dunia kedua. Bukan saja rakyat umum di sini, tetapi juga ahli pikir dan ahli negara yang seharusnya pandai melihat jauh, tak sanggup memahamkan bahwa "*het zachtste volk ter aarde*" menjadi rakyat yang berontak dan dimasuki oleh semangat yang dinamis. Orang tak dapat melepaskan dirinya dari pengertian yang salah bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah semata-mata buatan beberapa pemimpin yang

berdemagogi saja. Orang sering lupa mengadakan peninjauan yang dalam yang dapat membuktikan bahwa proklamasi 17 Agustus 1945 itu adalah pelaksanaan daripada cita-cita pergerakan nasional Indonesia yang telah berjalan 40 tahun lamanya. Penderitaan yang mahasangat di Zaman Jepang memperkuat hasrat *mau merdeka*!

Maka sejak semulanya—karena salah pengertian itu—terjadilah suatu konflik psikologi antara bangsa Belanda dan bangsa Indonesia yang menjadi sumber daripada tragedi yang kita alami 4 tahun lamanya. Saya sebut tragedi, karena tujuan sebenarnya adalah sama, ialah memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Hanya tentang cara penyelenggaraannya terdapat perselisihan paham, yang begitu banyak menimbulkan percideraan.

Betapa juga kuatnya dikemukakan alasan yuridis dari pihak Pemerintah Belanda bahwa Kerajaan Belanda mempunyai kedaulatan atas Indonesia, rakyat Indonesia dalam Republik berpendapat dan merasakan bahwa negaranya berdaulat. Mereka mempunyai pemerintah sendiri yang tak tunduk ke bawah pemerintah lain, mereka mempunyai tentara dan polisi sendiri untuk menjaga keamanan ke luar dan ke dalam, mereka mempunyai uang sendiri yang dikeluarkan oleh pemerintahnya, dan *last but not least* mereka mempunyai politik luar negeri dan perwakilan di luar negeri yang semakin lama semakin kembang dan erat perhubungannya dengan negeri lain.

Semuanya itu dirasakan sebagai suatu tanda daripada kedaulatan, yang tak mudah dikikis daripada jiwa rakyat. Semakin lama waktu berjalan, semakin biasa rakyat hidup merdeka dan berdaulat dan semakin sukar melenyapkan kemerdekaan itu. Benar atau tidak, diakui atau tidak, rakyat Indonesia dalam Republik menganggap dirinya sebagai negara yang berdaulat. Apalagi pula karena kekuasaan *de facto* Republik Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatra telah diakui sesudah Persetujuan Linggajati, bukan saja oleh Kerajaan Belanda, tetapi juga oleh negara-negara besar sebagai Inggris dan Amerika Serikat dan beberapa negeri lainnya.

Maka karena itu, tiap-tiap persetujuan yang telah dicapai seperti Persetujuan Linggajati dan Daar-dasar Renville, selalu kandas dalam penyelenggaraannya, tersangkut pada pemecahan soal kedaulatan dalam praktek. Menurut pendapat pihak Belanda, selama kedaulatan belum diserahkan kepada bangsa Indonesia, kedaulatan masih penuh dalam tangan Kerajaan Belanda. Menurut pendapat pihak Indonesia sifat masa peralihan ialah peralihan dari status jajahan ke status negara merdeka dan karena itu sifat pemerintahan pada masa peralihan itu harus banyak merupai corak pemerintah negara merdeka yang dituju. Dan karena itu beberapa hak dan tanggungjawab dapat diserahkan oleh Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Indonesia sementara. Untuk mencapai kemerdekaan Indonesia seluruhnya dengan melalui masa interim, Republik bersedia berkorban, turun dari negara yang berdaulat menjadi negara bagian. Akan tetapi ia berkehendak supaya segala atribut kedaulatannya itu, sebagai tentara dan politik luar negeri diterimakan kepada pemerintah interim dan diteruskan olehnya.

Dalam teori kedaulatan pada masa interim itu tetap berada di tangan Kerajaan Belanda, tetapi pelaksanaannya dalam praktek dapat diserahkan dalam berbagai hal kepada pemerintah sementara itu. Menurut pendapat pihak Indonesia konsepsi ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam Dasar-dasar Renville pasal I daripada dasar tambahan yang 6. Konsepsi pihak Indonesia ini menimbulkan soal pembagian tanggungjawab antara Wakil Tinggi Mahkota di Indonesia dan pemerintah interim, yang tak dapat diterima oleh pihak Pemerintah Belanda. Dan pada soal pembagian tanggungjawab inilah tersangkut segala perundingan yang sampai dua kali menimbulkan pertempuran senjata.

Semuanya ini menunjukkan bahwa masa interim menimbulkan berbagai kesulitan yang sukar diatasi, sehingga tinggal lagi satu jalan untuk menyelesaikan soal Indonesia, ialah dengan penyerahan kedaulatan. Kalau saya tak salah menduga, dalam kalangan politik Belanda umumnya penyerahan kedaulatan yang tidak ditangguhkan itu sudah diterima sebagai suatu konsekuensi yang tak dapat dielakkan. Dan kalau kedaulatan toh akan diserahkan kepada bangsa Indonesia, maka baiklah penyerahan itu berlaku secepat-cepatnya dan perundingan yang mengenai penyerahan itu pada Konferensi Meja Bundar ini hendaklah berlaku dalam tempo yang singkat.

Persengketaan Indonesia Belanda pada pokoknya adalah *soal psikologi* yang berakar dalam sejarah kolonial dan diperkusut pula oleh konflik psikologi yang sudah berjalan 4 tahun lamanya. Oleh karena itu tiap-tiap saat yang melambatkan penyerahan kedaulatan itu setelah tercapai suatu persetujuan, dirasakan oleh rakyat Indonesia sebagai siasat politik untuk meneruskan kekuasaan kolonial di Indonesia dan karena itu menambah curiga atas maksud Belanda. Di atas dasar curiga tidak dapat diadakan perhubungan kerja sama yang kekal. Perhubungan Indonesia Belanda di masa datang hanya bisa berjalan lama kalau ia berdasar kepada saling mengerti dan saling percaya. Oleh karena itu usaha kita yang terutama ialah menghilangkan rasa curiga dan memperkuat kemauan untuk saling mengerti dan kerja sama. Dan karena itu pula segala hal-hal yang mungkin menimbulkan curiga harus disingkirkan.

Tidak bersyarat sama sekali penyerahan jkedaulatan itu juga tidak. Kami tahu, Pemerintah Belanda meminta jaminan bahwa kedaulatan itu diserahkan kepada Indonesia yang berbentuk federasi, dan antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda diadakan uni, sesuai dengan Dasar-dasar Renville. Di mana pihak Indonesia, Republik maupun BFO, setuju dengan bentuk federasi dan dengan Uni Belanda Indonesia, maka syarat-syarat tersebut tidaklah dirasakan sebagai syarat yang membatasi kedaulatan. Federasi disetujui oleh Republik sejak Persetujuan Linggajati dan baru-baru ini ditegaskan dalam putusan Konferensi Inter-Indonesia. Uni diadakan oleh dua negara yang sama-sama berdaulat, dalam kedudukan yang sama. Tak ada antara dua partai yang memberikan hak kepada uni berlebih dari yang lain. Maka dengan begitu terdapatlah suatu bangunan uni sebagai suatu asosiasi yang

bebas antara dua buah negara yang sama-sama berdaulat. Syarat bagi uni yang akan diadakan itu ialah bahwa ia tidak membatasi kedaulatan yang penuh dan nyata, yang harus diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat.

Konsepsi uni yang berupa "*superstaat*" yang dahulu dipertahankan oleh pihak Belanda di Kaliurang besar sekali pengaruh psikologi atas rakyat Indonesia, sehingga menimbulkan syak wasangka bahwa Nederland mempergunakan nama uni itu untuk menyelimuti cita-cita "*rijksverband*" yang dituju. Syukurlah bahwa Pemerintah Belanda dan delegsinya di Lake Success dan di Jakarta telah berkali-kali menegaskan, bahwa cita-cita "uni" sebagai "*superstaat*" tidak dituju oleh Nederland.

Oleh sebab soal uni ini—karena sejarahnya—sangat mempengaruhi psikologi massa, maka hendaklah kita berhati-hati dalam menyusun bangunan dan cara membentuknya. Uni itu haruslah suatu asosiasi yang bebas, tidak kaku dalam bentuknya dan ikatannya. Sebab, kalau memang ujud uni itu ialah kerja sama yang erat untuk waktu yang lama antara Nederland dan Indonesia, maka janganlah bentuknya terlalu kaku dan mengikat sehingga mudah menimbulkan reaksi atas jalannya. Akhirnya menjauhkan apa yang dituju. Kalau pada dasarnya uni itu adalah suatu asosiasi yang bebas antara dua negara yang sama-sama merdeka dengan *paritet* yang sama pula, maka tiap-tiap ikatan yng kaku akan putus sendirinya karena tidak dituruti. Dan tiap-tiap peraturan yang diperbuat dan tidak terpakai akan mati sendirinya. Malahan berbahaya, apabila peraturan itu dirasakan sebagai paksaan kepada suatu jurusan. Suatu asosiasi yang bebas untuk mencapai kerja sama untuk waktu yang lama tak dapat dipaksakan, mestinya diterima oleh jiwa yang merdeka. Tiap-tiap persekutuan yang dirasai sebagai paksaan akan menimbulkan lawannya, yaitu dorongan untuk memutus persekutuan paksa itu.

Sebab itu, dalam hal membentuk uni itu perlu ada bijaksana dan pandangan yang jauh, agar supaya tujuan jangan dikorbankan kepada bentuk susunan!

Kami tidak akan menyembunyikan pengetahuan kami, bahwa banyak sekali orang di Nederland merasa takut, kalau-kalau kapital dan kepentingan ekonomi Belanda di Indonesia akan terancam apabila Indonesia jadi merdeka dan berdaulat. Ketakutan itu menimbulkan sikap dan politik yang menoleh ke belakang, mau menahan apa yang seharusnya telah diberikan, sehingga konflik psikologi bertambah besar. Hal ini menimbulkan pertentangan, yang berakhir dengan pertempuran senjata yang hakikatnya tidak dikehendaki. Produksi yang harus dimajukan jadi terhenti sebagian besar, alat-alat penghasilan yang harus dipelihara jadi hancur karena dibumihanguskan. Aturan menghasilkan untuk dunia yang kekurangan barang dan bahan, segala tenaga ditujukan untuk memusnahkan.

Alangkah baiknya, apabila sejak semulanya dicapai persetujuan dengan penyerahan kedaulatan yang tidak ditangguhkan! Kerja sama antara Indonesia dan Nederland tentu sudah berjalan, produksi tentu sudah lama bermula dan kapital serta alat penghasilan lainnya tentu terpelihara.

Tetapi tak ada gunanya mengadakan koreksi atas jalannya sejarah yang telah berlalu. Nasi telah menjadi bubur. Dan seperti kita ketahui, penghidupan jiwa di masa yang lalu itu adalah demikian rupa sehingga apa yang terjadi itu berlaku menurut hukum psikologinya sendiri.

Ketakutan bahwa kapital dan kepentingan ekonomi Belanda di Indonesia akan terancam apabila Indonesia jadi merdeka, tidak beralasan sama sekali. Dalam manifes politik Pemerintah Republik Indonesia tanggal 1 November 1945 diterangkan dengan nyata bahwa kepentingan itu akan dijamin. Demikianlah bunyinya.

"Kita mengetahui dan mengerti benar, bahwa untuk keperluan negeri dan bangsa kita di dalam beberapa tahun yang akan datang ini, kita akan memerlukan pertolongan bangsa asing di dalam pembangunan negeri kita berupa kaum teknik dan kaum terpelajar, pun juga kapital asing.

Di dalam memenuhi keperluan itu kita tidak akan menghindarkan kenyataan, bahwa orang yang berbahasa Belanda, yaitu orang Belanda, mungkin akan lebih banyak dipergunakan, oleh karena mereka telah ada di sini dan lebih biasa akan keadaan di sini. Sehingga pelaksanaan kemerdekaan kita itu belum perlu berarti kerugian besar untuk pihak Belanda jika diukur dengan uang atau jiwa, akan tetapi tentu sekali berarti perubahan yang sebesar-besarnya di dalam kedudukan politiknya.

Kita yakin, bahwa tanah kita yang kaya raya ini jika diusahakan dengan sesungguhnya untuk meninggikan derajat penghidupan bangsa kita serta dunia umumnya, akan masih banyak benar memberi ruangan untuk tenaga dari seluruh dunia, terutama dari Amerika Serikat, Australia dan Filipina, untuk turut dalam pembangunan negara dan bangsa kita.

Akan tetapi sekalian itu hanya akan dapat dimulai jikalau pertentangan kedaulatan antara Belanda dan kita dapat selesai dengan pengakuan hak kita untuk menentukan nasib kita sendiri, yaitu dengan pengakuan negara dan pemerintah yang telah kita pilih. Bukan saja kita dan barangkali pihak Belanda berkepentingan dengan lekasnya terlaksana hal ini, akan tetapi juga seluruh dunia yang menunggu-nunggu sumbangan tanah dan bangsa Indonesia terhadap kekurangan yang ada di dunia sekarang.

Dengan pengakuan kemerdekaan kita, kita akan menanggung segala yang patut kita tanggung menurut kedudukan kita. Segala utang Hindia sebelum penyerahan Jepang dan patut menjadi tanggungan kita, kita akui sebagai utang kita.

Segala milik bangsa asing selain daripada yang diperlukan oleh negara kita untuk diusahakan oleh negara sendiri, dikembalikan pada yang berhak, serta yang diambil oleh negara akan dibayar kerugian dengan seadil-adilnya."

Sampai sekarang pendirian Pemerintah Republik tidak berubah!

Orang di Nederland harus pandai melihat ke muka dengan pandangan yang dinamis, bahwa Indonesia merdeka dan berdaulat tidak akan merugikan, malahan lambat laun akan menguntungkan kepada rakyat Belanda. Terutama, kerja sama

antara Indonesia dan Nederland dalam ekonomi dapat diatur dengan sedemikian rupa, sehingga pembangunan di Indonesia menurut plan yang akan berjalan berpuluh tahun lamanya dapat dikordinir dengan pembangunan industri baru di Nederland yang akan memenuhi pesanan Indonesia akan berbagai barang dan alat.

Dalam satu hal memang kapital Belanda di Indonesia akan merasa rugi. Suasana baru menghendaki dari pemerintah suatu politik kemakmuran bagi rakyat, yang akibatnya bakal menipiskan keuntungan kapital dalam pembagian hasil. Indonesia merdeka tidak akan merupakan lagi suatu "*inlander kolonie*" seperti zaman dulu, yang menghasilkan kuli dengan upah yang sangat rendah. Indonesia baru yang merdeka akan menuntut suatu "*living wage*" dan "*social security*" bagi kaum buruhnya sebagaimana juga berlaku di negeri-negeri yang adab, sesuai dengan dasar kemerdekaan yang keempat dari marhum Roosevelt, yaitu "*freedom from want*". Akan tetapi, rakyat Indonesia yang makmur dan mempunyai tenaga pembeli lambat laun tidak akan merugikan bagi negeri luaran, istimewa Belanda, melainkan akan menguntungkan.

Penyerahan kedaulatan oleh Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat disertai juga dengan penyerahan utang-piutang serta hak dan kewajiban. Dan karena itu hal ini tentu akan menjadi suatu acara daripada Konferensi Meja Bundar. Kita semuanya telah dapat menduga, bahwa soal ini banyak sekali seluk-beluknya dan berbagai pula detailnya. Persoalan itu, menurut anggapan saya, tidak boleh memperpanjang waktu Konferensi Meja Bundar. Kita harus dapat membatasi pembicaraannya hingga yang mengenai pokok-pokok dan prinsipnya saja, supaya Konferensi Meja Bundar dapat lekas berakhir dan tidak berlangsung lebih lama daripada waktu yang psikologis dapat dipertanggungjawabkan. Segala detail dapat diselesaikan kemudian antara Nederland dan Republik Indonesia Serikat.

Tanggal 1 Januari 1949 yang begitu besar pengaruhnya atas jiwa rakyat Indonesia telah lama lewat. Semua perhitungan sekarang tertuju kepada tahun 1949. Penyerahan kedaulatan kepada bangsa Indonesia harus berlangsung dalam tahun ini juga. Sebelum fajar tahun 1950 menyingsing, hendaklah Indonesia sudah merdeka, Republik Indonesia Serikat telah berdiri, diperlengkapi dengan kedaulatan yang penuh dan nyata. Ini adalah suatu tuntutan psikologi massa yang tak boleh kita abaikan. Satu soal irasionalisme, memang, tetapi jangan disiar-siakan!

Tuan Ketua yang terhormat! Saya berpendapat, manakala kita yang berunding di keliling meja bundar ini dengan sungguh-sungguh mau mencari penyelesaian dalam soal Indonesia, yang akan berakhir dengan penyerahan kedaulatan yang penuh dan nyata dengan tidak bersyarat, maka kita harus memusatkan minat kita kepada kepentingan masa datang daripada bangsa kita kedua belah pihak. Apabila pandangan kita dipusatkian ke situ, maka pertikaian paham akan kecil sekali, dan maksud Konferensi Meja Bundar ini akan lekas terselenggara.

Empat tahun lamanya rakyat kita timbal-balik hidup dalam persengketaan dengan merasa dendam dalam hati. Empat tahun lamanya kita berjuang dan berbunuh-bunuhan, mengorbankan jiwa dan harta dengan percuma.

Marilah kita sekarang memulai sejarah baru di atas dasar damai dan kerja sama. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagiannya. Anak cucu kita, angkatan kemudian, akan berterima kasih kepada kita.

Moga-moga Tuhan Yang Mahakuasa memberkati pekerjaan kita pada Konferensi Meja Bundar ini.

Sekianlah dan terima kasih! (*Antara*, 24/8/1949)

***

Lampiran 12.

PIDATO KETUA DELEGASI BFO SULTAN HAMID II PADA PEMBUKAAN KONFERENSI MEJA BUNDAR (23 Agustus 1949)

Saya gembira bahwa setelah kita sekian lama mengalami penderitaan dan pertengkaran, kini kita berada di meja perundingan; satu perundingan yang akan menentukan penyerahan kedaulatan yang penuh tiada bersyarat kepada kita bangsa Indonesia.

Saya gembira, bahwa setelah sekian lama ada persengketaan, kita kini berada dalam semangat yang sama serta satu tujuan bersama pula. Saya nyatakan semangat yang sama karena kini telah didapat saling percaya dalam mencapai cita-cita kita bersama, satu tujuan yang luhur.

Saling percaya ini didapatkan sewaktu dilangsungkan Konferensi Inter Indonesia yang bagian pertamanya dilangsungkan di Yogyakarta, sedang bagian kedua di Jakarta dan dilangsungkan sesudah dicapainya persetujuan Rum-Van Royen. Dengan adanya konferensi ini, yang telah memberikan keputusan-keputusan, pada hakekatnya tidak ada permusuhan antara kita bangsa Indonesia, karena kita bercita-cita sama, karena kita ingin bersatu dan akan tetap bersatu. Dan dengan bekal ini kita mempunyai satu tujuan dengan selekas mungkin hendaknya penyerahan kedaulatan yang tidak bersyarat diberikan pada kita bangsa Indonesia yang nantinya akan menciptakan satu Republik Indonesia Serikat yang maju bersama-sama kerja sama dalam hubungan dengan Nederland sebagai dua negara yang sama-sama merdeka dan sama-sama berdaulat.

Jalan panjang sudah kita lalui, dan sepanjang ini banyak sudah korban yang kita berikan, banyak sudah derita yang kita pikul. Tetapi dengan adanya persetujuan Rum-Van Royen, dengan adanya penghentikan tembak-menembak akan berakhirlah malapetaka yang mengancam rakyat Indonesia, yang mengancam rakyat Belanda.

Memang, dengan pertumbuhan nasionalisme yang ada dalam kita bangsa Indonesia yang sudah sekian puluh tahun itu, terdapatlah perbedaan politik antara kita dengan kita. Tetapi dengan segera pula ini dapat disalurkan karena kita mempunyai cita-cita dan tujuan yang sama.

Banyak sudah yang telah kita berbuat sewaktu masa pendudukan Jepang. Dan sesudah kapitulasi daripada Jepang, pada tanggal 17 Agustus 1945 dinyatakanlah kepada dunia proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Sejak itulah selalu diusahakan ikhtiar supaya bisa didapatkan jalan melalui impasse yang selalu ada antara bangsa Indonesia dengan bangsa Belanda. Perundingan di Hoge Veluwe pernah

diadakan. Sesudah itu persetujuan Linggarjati, dan kemudian menyusul persetujuan Renville. Tetapi tiap kali timbul harapan daripada persetujuan tersebut, tiap kali harapan ini kandas dan sia-sia.

Kini kita kembali menghadapi satu persetujuan. Dan syukurlah dalam persetujuan yang akhir ini BFO telah diakui sebagai pihak yang sederajat yang ikut dan turut dalam perundingan-perundingan yang dilangsungkan. BFO yang akan dapat memberikan sumbangan buat memecahkan perselisihan yang ada antara Indonesia dan Belanda. BFO dapat diterima sebagai pihak yang ikut berunding, karena sebetulnya kita adalah satu bangsa dengan satu cita-cita. Perpisahan yang dinyatakan berkali-kali itu sebetulnya hanyalah bersifat masa belaka. Dengan berdirinya Republik Indonesia Serikat nanti, diharapkan bisa dijamin ketertiban, ketentraman dan kepastian hidup.

Dan demokrasi serta federalisme menjadi tiang daripada dasar-dasar negara baru ini. Mengenai ini semua banyak sudah yang telah diputuskan dalam Konferensi Inter Indonesia, baik di Yogyakarta maupun di Jakarta. Dan keputusan ini meliputi seluruhnya terutama dalam lapangan keuangan dan perekonomian, tindakan RIS ke dalam dan keluar negeri.

Dalam langkah keluar negeri sebagai anggota dari kekeluargaan Perserikatan Bangsa-bangs, RIS menghendaki menjadi satu mata rantai yang kuat, yang akan dapat memberikan sumbangan yang layak dalam pemeliharaan perdamaian dunia seluruhnya.

Sebagai penutup saya mengharap semoga Tuhan hendaknya memberkahi konferensi ini, hingga kelak bisa didapatkan hasil-hasil yang nyata, hasil-hasil yang berguna bagi masyarakat kita bersama, bagi masyarakat Indonesia dan bagi masyarakat Belanda.

***

Lampiran 13.

PIDATO MENTERI DAERAH SEBERANG LAUTAN BELANDA MR. J.H. VAN MAARSEVEEN PADA PEMBUKAAN KONFERENSI MEJA BUNDAR (23 Agustus 1949)

Telah sekian lama terjadi pertengkaran, dan pertumpahan darah di Indonesia. Pertengkaran yang membawa korban, pertengkaran yang membutuhkan biaya banyak yang mustinya lebih berguna diperuntukkan bagi usaha-usaha pembangunan dalam negeri. Pembangunan yang sangat dibutuhkan itu baik oleh Indonesia maupun oleh Belanda sendiri sesudah berkhirnya perang dunia kedua ini.

Dan kini kita mengadakan perundingan, sudah sepatutnya kalau di saat ini, di waktu saat pembukaan Konferensi Meja Bundar ini saya nyatakan harapan saya agar dengan berkat kebijaksanaan segenap delegasi, dengan kata sepakat KMB memberikan hasil yang berfaedah bagi kita semua.

Memang jika ada kemauan baik dari kedua belah, persetujuan akan dapat lekas tercapai. Maka dengan ini karena inilah delegasi Belanda akan selalu mendekati kedua delegasi untuk mendapatkan persesuaian faham dan untuk melancarkan kerja selanjutnya. Ini dengan tegas saya nyatakan di sini, karena dengan adanya persetujuan, dengan adanya hasil-hasil yang baik dalam perundingan ini akan besar pengaruhnya bagi nasib Indonesia juga bagi nasib Belanda sendiri.

Jangan hendaknya perundingan ini menghasilkan sesuatu yang memenuhi cita-cita belaka, tetapi juga hendaknya sesuatu yang bersifat materiil, ialah kemajuan bagi bangsa kedua belah pihak di masa datang. Bukan hanya cita-cita belaka yang kita letakkan titik berat dalam perundingan-perundingan yang akan kita lakukan ini, tetapi juga hendaknya memberikan pula hasil-hasil yang bersifat kebendaan.

Dengan ini dengan tegas saya nyatakan, bahwa sesudahnya penyerahan kedaulatan, kedaulatan tidak akan kembali lagi ke tangan Belanda. Karena dengan ini Belanda yakin akan dapat tercapai terwujudnya satu cita-cita yang akan memberikan hasil dalam mengurus kepentingan kedua belah pihak, kepentingan kedua bangsa. Dan sesudah penyerahan kedaulatan ini, hanyalah bangsa Indonesia sendiri yang mempunyai tugas membina negerinya itu. Nederland tidak akan turut campur, Nederland hanya menjadi penonton, tetapi penonton yang punya perhatian penuh. Perhatian ini sudah selayaknya ada, karena adanya hubungan antara Nederland dan Indonesia selama tiga abad lebih ini, dan ini akan diwujudkan dalam suatu Uni yang akan menjadi bantuan yang kuat bagi berdirinya RIS yang merdeka dan berdaulat nanti.

Dan hasil materiil hendaknya diperhatikan ketertiban dalam masa peralihan nanti yang hendaknya dapat menyembuhkan luka-luka yang ada sebagai akibat daripada

pertempuran-pertempuran yang sekian lama telah dijalankan. Karena semuanya inilah maka persetujuan tentang penghentian permusuhan dan yang perintahnya telah dikeluarkan bersama-sama baru-baru ini hendaknya ditaati.

Sama-sama kita bekerja untuk mencegah segala kekeruhan yang akan berakibat besar, sama-sama kita mencegah malapetaka yang akan datang. Dengan demikian sifat keragu-raguan yang ada dalam kalangan tentera Belanda pada saat-saat akhir-akhir ini akan dapat dihilangkan, karena yakin bahwa bangsa Indonesia dapat memerintah dirinya sendiri.

Marilah kita tempuh jalan yang baru ini, dan mudah-mudahan jalan baru ini diberkahi Tuhan hendaknya, dapat memberikan peraturan-peraturan yang baik, yang akan dapat mempererat hubungan antara kedua belah pihak, dan maksud kita ini tentu berhasil karena adanya kemauan baik di antara kita bersama. (*Antara*, 24/8/1949)

***

Lampiran 14.

PIDATO
KETUA MINGGUAN KOMISI PBB UNTUK INDONESIA (UNCI)
T.K. CRITCHLEY (AUSTRALIA)
PADA PEMBUKAAN KONFERENSI MEJA BUNDAR
(23 Agustus 1949)

Sudah sekian lamanya terjadi perselisihan senjata di Indonesia ini. Dan selama ini pula telah sekian kali pula terdapat persetujuan-persetujuan.

Sekali ini kita menghadapi satu persetujuan yang akan menghadapi pula satu penglakksanaan yang berat. Tetapi ini dapat dilaksanakan kalau delegasi kedua belah pihak mempunyai kemauan teguh, dan dalam ini hendaknya selalu diingat bahwa dengan memperkecil masalah-masalah yang dihadapi, dapat kita lalui segalanya tadi dengan selamat. Dapat kita ketemukan satu persetujuan yang layak dalam lapangan politik, ekonomi dan militer.

Sejak peristiwa Indonesia ini masuk dalam acara persidangan Dewan Keamanan, dan sejak itu Komisi PBB untuk Indonesia menjalankan kewajibannya di Indonesia ini, sejak itulah Komisi selalu memberikan bantuan-bantuan yang diminta oleh kedua belah pihak dan sekali ini Komisi—sesuai dengan instruksi daripada Dewan Keamanan—akan memberikan bantuannya pula dalam penyelesaian masalah Indonesia dalam KMB ini.

Harapan saya hendaknya kedua belah pihak mau bersedia untuk membangunkan masa depan. Hendaknya bangsa Belanda dan Indonesia dengan ini mengkhiri segala pertikaian dan persengketaan dan sedia mengadakan perhubungan baru. Dengan demikian akan memberikan sumbangan berguna bagi Uni yang akan dibentuk.

Dengan pengertian yang benar-benar, mudah-mudahanlah konferensi ini dapat berlangsung dengan membawa hasil yang memuaskan, baik bagi Belanda, baik bagi Indonesia dan juga yang terutama bagi seluruh dunia. (*Antara*, 24/8/1949)

***

Lampiran 15.

KETERANGAN SEORANG DELEGASI REPUBLIK DI DEN HAAG
Mgr. Sugyopranoto Diminta Datang

“Saya mempunyai harapan baik pada KMB,” demikian keterangan seorang anggota delegasi Republik yang terkemuka dalam percakapan dengan wartawan *Antara*, beberapa jam sebelumnya KMB dimulai pada tgl. 23/8 siang. “Tetapi sebaliknya kita tidak boleh mempunyai optimisme yang berlebihan.”

Menurut pendapatnya, KMB sudah harus memberi hasil pada akhir Oktober yad., sehingga sebelum akhir tahun ini kedaulatan sudah ada di tangan bangsa Indonesia, sebab kalau persetujuan tidak lekas tercapai, maka keadaan akan menjadi demikian buruknya, sehingga akan menjadi sangat sukarlah untuk mendapatkan persetujuan lagi di antara Indonesia dan Nederland.

Atas pertanyaan ia menerangkan, bahwa selain soal ekonomi dan keuangan, kesukaran-kesukaran juga akan dihadapi mengenai soal pangkalan militer dan marine, yang selama perundingan di Jakarta telah dimajukan oleh pihak Belanda. Masalah tentera tidaklah mudah. Setelah penyerahan kedaulatan, tentera Belanda harus meninggalkan Indonesia.

Selain itu soal New Guinea juga mungkin akan menjadi masalah perbincangan yang tidak mudah, karena pihak Belanda menghendaki terlepasnya New Guinea dari RIS. Seperti diketahui, dalam soal New Guinea ini, BFO sependirian dengan Republik, yaitu bahwa New Guinea harus menjadi satu bagian dari RIS.

Mengenai utang-piutang Belanda, pihak Republik bersedia menerima utang yang telah dibuat oleh Hindia Belanda sebelum tahun 1942. Utang yang dibuat kemudian oleh pemerintah Hindia Belanda untuk keperluan peperangan dan militer tak dapat dipikulkan pada rakyat Indonesia.

Mengenai soal ekonomi, ia katakan, bahwa Indonesia akan memerlukan sangat modal asing guna pembangunan negeri. Modal asing ini harus cukup mendapat kemungkinan berkembang, tetapi sebaliknya kaum buruh harus cukup juga mendapat perlindungan, sehingga bisa mendapat penghidupan yang layak. Dan ini akan bisa dilakukan dengan mengadakan Undang-undang Perburuhan yang baik.

Mengenai kerja sama dalam soal kebudayaan, dikatakannya, bahwa Sekolah Tinggi Indonesia, umpamanya, dapat memakai profesor-profesor Belanda dengan syarat, bahwa dalam tempo yang tertentu profesor-profesor Belanda itu harus dapat memberikan college-nya dalam bahasa Indonesia.

“Pertukaran pelajar antara Indonesia dan Belanda juga akan dapat dilakukan, sekalipun saya sendiri berpendapat, bahwa pelajar-pelajar Indonesia yang hendak

melanjutkan pelajarannya ke luar negeri pergi ke negeri lain," demikian kata seorang anggota delegasi Republik lainnya, ketika ditanya pendapatnya tentang soal ini. "Tetapi untuk pendahuluan ia belajar di luar negeri, ada baiknya pergi dahulu ke Nederland," katanya selanjutnya.

Dari kalangan delegasi Republik lebih lanjut didapat kabar, bahwa kini sedang dipertimbangkan untuk meminta Mgr. Sugyopranoto datang ke Den Haag buat menjelaskan kepada rakyat Nederland umumnya dan umat Katholik di Nederland khususnya, bahwa umat Katholik Indonesia berdiri sepenuhnya di belakang Republik Indonesia. Diduga kedatangan Mgr. Sugyopranoto ini akan terjadi setelah KMB berjalan 3 atau 4 minggu lamanya. Kedatangannya dipandang perlu untuk menghilangkan salah paham di kalangan kaum Katholik Nederland yang berpendapat, bahwa umat Katholik Indonesia, katanya, tidak mendapat kebebasan cukup untuk menjalankan kewajiban agama mereka dan bahwa umat Katholik Indonesia tidak menyokong perjuangan Republikk Indonesia. (*Antara*, 24/8/1949)

***

Lampiran 16.

PANDANGAN DR. P.J. KOETS TERHADAP SOAL INDONESIA-BELANDA

"Melihat perkembangan keadaan sekarang ini bolehlah saya merasa optimistis," demikian Dr. P.J. Koets, direktur kabinet HVK (Wakil Tinggi Mahkota Belanda) dalam percakapan dengan wartawan kita hari ini.

Berkata tentang pandangannya terhadap keadaan sekarang ini, Dr. Koets menerangkan selanjutnya:

Saya sendiri sudah 3½ tahun serta dengan perundingan-perundingan di antara Republik dengan Nederland ini. Di dalam masa itu dua bagai perjanjian telah diadakan, yaitu pertama "Linggarjati" dan kedua "Renville" yang telah tidak berhasil memberikan pemecahan terhadap soal Indonesia-Belanda ini.

Maka sekarang, tentu tuan bertanya mengapa sekali ini saya berpemandangan akan dapat tercapai pemecahan ini. Sebab-sebabnya, ialah di masa yang lalu yang menjadi kesulitan adalah tentang soal masa peralihan. Sekarang tentang masa peralihan ini tidak diperbincangkan lagi melainkan yang dibicarakan adalah tentang bagaimana cara penyerahan kedaulatan kepada Indonesia. Dalam ini terasalah pandangan yang tepat dari Dr. Beel dengan plannya tempo hari itu yang memungkinkan memecahkan soal masa peralihan ini. Berkenaan dengan hal inilah pula saya berharap bahwa pokok untuk masing-masing percaya-mempercayai itu sudah dapat dipergunakan.

Sebab yang kedua, adalah didapati dalam pekerjaan-pekerjaan BFO dan Konferensi Inter Indonesia. Dengan peristiwa-peristiwa ini dapatlah sudah diatasi jurang yang tadinya ada di dalam masyarakat Indonesia. Sehingga kalaupun masih ada garis perbedaan, itu hanya di antara kaum nasionalis yang konstruktip dengan mereka yang mempunyai kepentingan jika kekacauan masih ada di Indonesia ini.

Berkata seterusnya tentang soal masa depan Indonesia, Dr. Koets menerangkan bahwa yang dituju oleh Van Mook dulu adalah menciptakan negara Indonesia yang merdeka, teratur dan berupa negara hukum, (tak terbaca, KST) kemerdekaannya perlu diakui dan untuk mendukung kemerdekaan ini negara itu perlu teratur dengan pemerintahan yang teratur pula. Karena itu dari pihak bangsa Belanda dikehendaki pada waktu ini sikap buat mengakui kemerdekaan ini secara loyal dan sempurna dan bangsa Indonesia sendiri akan memerlukan bantuan teknis dari bangsa Belanda buat melaksanakan soal kemerdekaan itu seterusnya. Dengan demikian dapat dibangunkan negara Indonesia yang dapat memenuhi syarat-syarat kenegaraan dan dengan demikian pula dapat menduduki tempat yang penting di Asia Tenggara ini.

Terhadap soal Uni Indonesia-Belanda itu, Dr. Koets berpendapat bahwa Uni ini tidak boleh merupakan suatu *super-staat* dan juga bukan untuk membela kekuasaan

pemerintah Belanda, melainkan suatu badan kerja sama di antara negara Belanda dan negara Indonesia yang berkedudukan sama, yang secara bebas bekerja sama yang untuk memelihara kepentingan masing-masing. Dengan demikian dapatlah usaha ini dijadikan dasar buat bekerja sama di antara negara-negara Eropah Barat dengan Asia Tenggara, yang sampai sekarang ini belum ada didapati.

Tatkala ditanyakan, apakah pemerintah Belanda tidak merasa perlu buat meringankan tekanan terhadap hubungan-hubungan ekonomi bagi daerah-daerah tertutup (yaitu daerah-daerah yang tidak diduduki oleh tentera Belanda) supaya di samping soal militer juga soal ekonomis dalam menciptakan keamanan di dalam negeri dapat dipenuhi, Dr. Koets menerangkan, bahwa hal ini kebetulan hari ini pun akan dibicarakan oleh Central Joint Board. “Bagi kami,” demikian katanya lagi, “adalah pendirian kami buat mengurus soal-soal ekonomi Indonesia secara suatu kesatuan. Dan memanglah pula dengan cara demikian kekuatan Indonesia dalam soal-soal ekonomi ini baru dapat dipertahankan.”

Berkenaan dengan permintaan Bengkulen untuk serta dalam Konferensi Meja Bundar itu, Dr. Koets berpendapat bahwa permintaan ini didasarkan kepada pertimbangan bahwa selain daripada delegasi-delegasi Republik dan Belanda diperdengarkan juga suara-suara dari kalangan yang berkepentingan besar dalam soal Indonesia. Tetapi tentu lebih tepat, jika soal-soal berkenaan dengan Indonesia sendiri dibicarakan di antara bangsa Indonesia sendiri pula. Keputusan terhadap permintaan ini tentulah terserah kepada perlu atau tidaknya ia diterima oleh delegasi-delegasi yang berunding di KMB sekarang ini.

Di dalam akhir pembicaraan ini Dr. Koets berharap, agar Indonesia jika kesulitan-kesulitan yang sekarang ini telah dapat diatasi, di dalam 25 atau 30 tahun ini akan dapat menjadi negara yang dikagumi oleh dunia seumumnya. Tetapi untuk itu (*terputus di sini, KST*). (*Antara*, 24/8/1949)

***

Lampiran 17.

KEGIATAN GERILYA DI KALIMANTAN SELATAN

Pada tgl. 22 Agustus malam, pos polisi di jembatan kota Martapura telah diserang oleh orang-orang yang bersenjata, yang banyaknya l.k. 20 orang. Siangnya ternyata, bahwa kawat-kawat tilpon di antara kampung Jawa-perbatasan Martapura/ Pleihari telah putus.

Pada hari Selasa 23 Agustus, bus "Favoriet" yang membawa penumpang dari Banjarmasin ke Hulu Sungai, pada 4 km sebelum tiba di Martapura telah ditahan oleh orang-orang bersenjata. Penumpang-penumpang disuruh turun, isi auto digeledah dan sejumlah makanan untuk polisi Martapura dirampas. Sesudah itu bus tsb. Boleh meneruskan perjalanannya.

Pada tgl. 21 Agustus siang Hoofd Commies Kantor Residen, Antung Djohansjah dan tuan Badjuri dari CKC telah diculik.

Pagi tgl. 24 Agustus, Kyai Jusran, pengganti sementara dari tuan A. Basuni yang baru-baru ini dikabarkan telah diculik, sebagai Kepala Pemerintahan Distrik telah diculik juga. Siang tgl. 24 Agustus, oleh pemerintah Belanda telah ditahan tuan Ibrahim Sedar, Kyai Besar. Sebab-sebabnya belum diketahui.

Dalam maklumat-maklumat yang disebarkan oleh gerilya Kalimantan Selatan antara lain dinyatakan, bahwa mereka tidak mengakui seluruh dewan-dewan di Kalimantan Selatan, termasuk Dewan Banjar, Dewan Dayak Besar dan Dewan Borneo Tenggara, dan akan mereka gantikan dengan Komite Nasional Indonesia. Didengar kabar, bahwa Wali Daerah M. Hanafiah yang baru-baru ini mereka culik akan mereka serahi menjalankan komite tsb. Dengan dibantu oleh pegawai-pegawai tinggi lainnya yang mereka culik kitu. Dikatakan pula, bahwa Komandan Sujoto yang baru-baru ini juga hilang dari pos polisi Gambut akan dijadikan sebagai Kepala Kepolisian pemerintahan gerilya.

Mengenai kedatangan Jenderal Mayor Suhardjo ke Kalimantan Selatan didengar kabar, bahwa sebagai anggota penyambutan dari pihak gerilya antara lain P. Arya (dari badan penerangan gerilya), Gt. Aman dan Bambang Sugito. Dalam selebaran-selebaran ada disebutkan, bahwa kaum gerilya akan terus menyerang kota Banjarmasin dan baru akan berhenti sesudah didapat penyelesaian dan setelah datangnya Jenderal Mayor Suhardjo mereka akan tunduk.

Kota Banjarmasin pada tgl. 23 Agustus malam telah diserang pula oleh orang-orang yang bersenjata yang ditujukan kepada kedudukan pos-pos polisi, di darat dan di air, demikian juga kedudukan militer. Kantor Waterleiding yang letaknya 3 km di luar kota diserbu dan polisi-polisi di sana sempat malarikan diri.

Sepuluh orang pelajar jururawat Ulin Hospitaal telah hilang beserta beberapa alat-alat rumah sakit, pada sore 23 Agustus.

Pada tgl. 20 Agustus siang gerilya menyerang kota Kandangan (Hulu Sungai) tetapi serangan ini dapat digagalkan oleh tentera Belanda. Besoknya tgl. 22 Agustus pada sekitar Jambu di kota itu juga terjadi tembak-menembak, demikian pula sekitar kali Amandit Selatan. Pun pada tgl. 22 ke-23 dan siang 23 Agustus ada terdengar tembakan-tembakan.

Dalam sebuah maklumat pihak gerilya ada dianjurkan, agar pohon-pohon dan kawat-kawat tilpon dipotong dan jembatan-jembatan kalau perlu dirusak.

Lain sumber mengabarkan tentasng penculikan yang terjadi pada tgl. 25 Agustus, bahwa selain dari wakil kyai besar Moh. Jusran, telah diculik juga wakil kyai kepala Gusti Hidajat dan tuan-tuan Aliansjah dan Sjahrinsjah, masing-masing hoofdcommies dan commies kepolisian Banjarmasin.

Sementara itu dikatakan pula, bahwa 7 orang pegawai kepolisian Martapura telah menghilang dengan senjatanya.

Tentera Belanda bertindak terus dan mencari dengan giat tempat-tempat persembunyian gerilya di kampung-kampung di luar kota Banjarmasin.

Kemerdekaan pers dibatasi

Pada tgl. 24 Agustus ybl. Oleh Residen Kalimantan Selatan telah diberitahukan kepada harian-harian *Kalimantan Berdjuang* dan *Suara Kalimantan* di Banjarmasin, bahwa kedua s.k. tsb. Dilarang menyiarkan berita-berita yang didapatnya sendiri, atau gambar-gambar yang memuat sekitar gerilya.

Patut pula diterangkan, bahwa menurut proklamasi pihak gerilya pada tgl. 17 Agustus dinyatakan, bahwa surat-surat kabar di Kalimantan Selatan tidak boleh memuat berita-berita yang disiarkan oleh pemerintah Belanda. (*Antara*, 28/8/1949)

***

Lampiran 18.

USAHA MENAMBAH SEKOLAH MENENGAH DIPERGIAT

Sejak Cirebon menjadi kota pendudukan, sekolah-sekolah lanjutan yang ada hanya satu Sekolah Menengah dan satu Sekolah Kepandaian Gadis. Sekolah-sekolah Menengah di Kuningan, Indramayu dan Majalengka yang didirikan sejak jaman Jepang terus dilanjutkan.

Setelah keadaan agak reda, oleh pihak partikelir telah dibangunkan kembali sekolah-sekolah menengah Islam, Taman Dewasa dan SMA "Pekerti". Yang belakangan dijadikan Taman Madya dari Taman Siswa Cirebon.

Tapi sekarang ternyata sekolah-sekolah itu pun tidak mencukupi kebutuhan anak-anak kita.

Berhubung dengan kekurangana tempat di Sekolah Menengah Pemerintah, maka pihak partikelir mempergiat usahanya dan akan membuka lagi dalam tahun ini, Taman Dewasa Sindanglaut, Sekolah Menengah Katholik dan Sekolah Teknik Radio, sedang Kweekschool Islam akan dibuka pada tanggal 1 September yang akan datang.

Pun sekarang ini sedang diusahakan membuka Sekolah Menengah sore. (*Antara*, 25/8/1949)

***

Lampiran 19

SEKITAR KONFERENSI MEJA BUNDAR

Niat kedua delegasi Republik dan BFO pada Konferensi Meja Bundar di sini ialah menyusun secepat-cepatnya “sebuah naskah yang pasti tentang undang-undang dasar sementara bagi Republik Indonesia Serikat”, demikian didengar kabar hari ini.

Panitia politik yang besok hari mulai bekerja menyusun naskah ini, akan mempelajari pelbagai “working papers” tentang hal ini.

Juru bicara dari kedua delegasi hari ini mengatakan, bahwa “tidak ada suatu kesukaran yang istimewa yang akan dihadapi” untuk melebur kedua rencana tentang undang-undang dasar itu hingga soal-soal yang terkecil.

Ketika masih di Indonesia sebuah panitia istimewa terdiri dari orang-orang Indonesia telah sejak beberapa lama menyediakan satu rancangan undang-undang dasar.

Baik delegasi Republik maupun delegasi BFO kedua-duanya mengakui, bahwa sungguh pantas bahwa Belanda meminta suatu rencana undang-undang dasar yang pasti agar parlemen Belanda tahu, betapa bentuknya pemerintah yang akan menerima kedaulatan nanti.

Mereka juga menerima pendapat Belanda, bahwa undang-undang dasar Belanda seperti yang diamandir tahun yang lalu, menetapkan, bahwa Uni Indonesia-Belanda harus memberikan jaminan akan adanya suatu pemerintah yang sehat.

Dalam Konferensi Meja Bundar yang telah dimulai di sini, telah terdapat persesuaian paham tentang kedudukan Raja Belanda sebagai kepala Uni Indonesia-Belanda.

Kedua delegasi Indonesia bermaksud dengan segera menjalankan pemerintahan baru di Indonesia dengan seketika, bilamana terdapat persetujuan dengan Belanda tentang rencana undang-undang dasar.

Kewajiban pertama ialah memilih seorang Presiden oleh Republik dan BFO. Seorang juru bicara Republik menerangkan di sini; “agar mendapat waktu, maka kita ingin soal ini segera dimulai di Den Haag ini.”

Kemudian Presiden akan memilih tiga orang kabinets-formateurs. Mereka ini akan mencari dua orang lagi agar dapat dibentuk satu kern-kabinet yang terdiri dari 5 orang menteri, yang masing-masing memegang portefeuille pertahanan, luar negeri, dalam negeri, keuangan dan ekonomi.

Kedudukan para menteri yang lain akan dibagi-bagi misalnya, pendidikan, pengangkutan dan urusan sosial.

Kern-kabinet ini akan mengambil putusan-putusan darurat, dan putusan-putusan ini akan berlaku nanti sama sahnya dengan yang diambil oleh kabinet penuh.

Bilamana Presiden dengan kabinet sudah terbentuk, maka Republik Indonesia Serikat akan siap untuk menerima kedaulatan dari Negeri Belanda, seperti yang telah dimufakati oleh Belanda dan Indonesia.

Segera setelah kedaulatan diserahkan, maka RIS akan menjadi satu kenyataan dan perwakilan sementara akan dibentuk dari anggota kedua delegasi Indonesia yang turut serta dalam Konferensi Meja Bundar sekarang dan jika perlu ditambah dengan beberapa orang lagi dari Badan Perwakilan Rakyat Sementara Republik (KNIP).

Dewan Perwakilan ini, sama halnya dengan kabinet sementara, akan berjalan hingga pemilihan agung sudah berhasil menjelmakan suatu parlemen yang sejati.

Dapat diduga, bahwa pemilihan agung akan dilakukan 6 atau 9 bulan setelah penyerahan kedaulatan.

Beberapa kalangan mengakui, bahwa RIS akan menghadapi banyak masalah selama masa peralihan, tetapi baik kaum Republik maupun BFO yakin mereka akan dapat menjalani kesukaran-kesukaran ini.

Rencana umum dari pemerintahan RIS sudah disediakan oleh kedua delegasi itu.

"Working paper" tentang soal ini melingkungi juga rencana tentang urusan dalam negeri, pemusatan deviezen dari berbagai pemerintah daerah dan pemerintah pusat, tentera federal, dewan perwakilan rakyat.

Dalam soal-soal lain akan diselenggarakan peleburan dari jawatan-jawatan Republik dan negara-negara yang terliput dalam BFO sesuai dengan tuntutan keadaan dan keperluan dalam negeri. (*Antara*, 26/8/1949)

***

Lampiran 20.

MERAH PUTIH BERKIBAR DI PEGANGSAAN KEMBALI
Gedung Beriwayat Dikembalikan pada Republik

Tidak banyak orang yang mempersaksikan pengembalian kembali gedong Pegangsaan Timur 56 kepada Republik kemaren sore.

Hanya beberapa orang wartawan surat kabar Republik, seorang wartawan dari *Aneta* dan *Sin Po*, Jusuf Jahja dan Ir. Sututo sebagai wakil ketua delegasi Republik Indonesia untuk menerima gedung dan inventarisnya kembali, dan Pak Munar serta Ibu Munar yang selama ini tinggal mengawal gedung itu.

Dua orang Belanda dari jawatan bangunan-bangunan atau perusahaan pemerintah bersama Ir. Sututo dan Jusuf Jahja dan Pak Munar masuk kamar menghitung korsi, meja, vaas kembang, buku-buku, lukisan-lukisan, taplak meja, seprei, tikar, hingga ke bantal dan kasur.

Paviliun Gedong Pegangsaan Timur 56 yang selama ini dizegel oleh VID lalu dibuka. Setahun lebih paviliun itu dizegel. Debu telah lebih seinci tebalnya menutup lantai, meja dan korsi. Lima buah mesin tik telah berkarat tidak pernah dipakai. Sebuah pesawat radio menganggur terletak disudut berselimut debu.

Semua inventaris dihitung. Disesuaikan dengan daftar yang dibikin ... setahun yang lalu. Cocok semuanuya. Kedua Belanda berkata, “Oke!” dan mereka pergi. Kepada polisi yang menjaga mereka mengatakan, “Sekarang gedong sudah diserahkan. *Ingerukt marsch*!” Kelima polisi pengawal nyeringis tertawa, beri tabik, dan loncat di sepeda, keluar dari pekarangan gedong.

Gedong Pegangsaan Timur 56, tempat proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia dimaklumkan, telah merdeka kembali.

Sebuah bendera merah putih yang besar dikibarkan di puncak tiang bendera di depan. Banyak orang yang lewat di jalan besar berhenti menonton. Dan ketika bendera tiba di puncak, mereka pun bertepuk tangan dan bersorak memberi selamat.

Persis satu tahun sembilan hari.

Ir. Sututo delegasi Republik mengatakan belum ada keputusan apa gedong itu akan dibikin jadi kantor delegasi atau perumahan tamu-tamu Republik. Tetapi pekarangan belakang yang luas akan dipinjamkan untuk tempat anak-anak sekolah belajar.

Pada pengembalian gedong Pegangsaan Timur 56 ini, marilah didoakan kebahagiaan arwah pemuda Suprapto yang tewas ketika timbul insiden penembakan di dalam gedong itu pada tanggal 17 Agustus tahun yang lalu. Banyak suara-suara timbul, oleh karena kedudukannya yang penuh arti bagi perjoangan kemerdekaan bangsa Indonesia, untuk meminta supaya gedong ini dijadikan semacam gedong Nasional,

yang dipergunakan sebagai museum tempat menghimpan bukti-bukti perjoangan kemerdekaan Indonesia, seperti naskah asli proklamasi kemerdekaan, bendera pusaka, dan lain-lain tanda-tanda perjoangan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Dikabarkan pula bahwa ada dimaksud untuk mendirikan panitia pengumpulan uang untuk membeli gedong itu dan memeliharanya sehingga menjadi milik nasional Indonesia sesungguhnya. (*Antara*, 27/8/1949)

***

Lampiran 21.

STATEMENT WAKIL KETUA UNCI DALAM SIDANG KMB 27 AGUSTUS 1949

Kita bersidang sore hari ini untuk melanjutkan perundingan yang diadakan oleh UNCI antara delegasi Belanda dan delegasi Republik Indonesia, untuk melaksanakan resolusi Dewan Keamanan pada tanggal 28 Januari serta perintah-perintahnya (*directives*) pada tanggal 23 Maret 1949. Sebagaimana tuan-tuan ketahui ealiz pertama telah diadakan pada tgl. 14 April y.l. dan setelah mengadakan perundingan beberapa bulan lamanya dalam taraf terakhir turut juga wakil-wakil BFO perundingan-perundingan itu telah berakhir dengan membawa hasil dalam suatu ealiz di ruangan ini pada tanggal 1 Agustus y.l.

Sebagai hasil dari perundingan-perundingan itu, maka dapatlah dilangsungkan Konferensi Meja Bundar di Den Haag sekarang untuk menyelesaikan soal penyerahan Kedaulatan kepada Indonesia dan untuk membentuk Uni Belanda-Indonesia.

Saya insyaf bahwa saya berbicara atas nama tuan-tuan semuanya untuk mengharapkan semua pihak di Den Haag mudah-mudahan mereka dapat mencapai hasil dengan segera pada Konferensi Meja Bundar dan memberi jaminan bahwa kita di Indonesia akan menumpahkan segenap tenaga agar mereka jangan sampai mendapat rintangan dalam pekerjaan mereka.

Kewajiban kita di sini ialah untuk menyelesaikan hasil-hasil yang telah diperoleh dalam perundingan-perundingan di Jakarta. Yang terpenting ialah pemberhentian tembak-menembak dan mengembalikan keamanan dan ketertiban umum di Indonesia. Tugas kewajiban ini akan dilaksanakan oleh Central Joint Committee bersama dengan 13 local joint committee. Yang tinggal, pertama, penglaksanaan fasal 7 dari Statement Rum-Van Royen pada tgl. 7 Mei. Untuk ini telah dibentuk sebuah Sub-Committee; kedua, pembebasan tawanan-tawanan politik dan perang dengan segera; ketiga, organisasi perbekalan untuk Republik, sebagaimana telah dirundingkan oleh Sub-Committee I setelah Yogya dipulihkan dan sebagaimana sudah menjadi kewajiban bagi Republik seperti telah ditetapkan dalam persetujuan penghentian tembak-menembak.

Dalam menyambut kedatangan tuan-tuan di sini, wakil-wakil UNCI merasa yakin bahwa segala pihak akan terus bekerja dengan hati yang sabar, goodwill dan kerja sama yang telah memberikan bantuan besar atas tercapainya hasil-hasil dalam perundingan-perundingan yang terdahulu di Jakarta. (*Antara*, 27/8/1949)

***

Lampiran 22.

BERCAKAP-CAKAP DENGAN DR. A.K. GANI, GANI DAN RUM-ROYEN STATEMENT

Dalam percakapan dengan wartawan *Antara*, Dr.A.K. Gani yang kini berada di Palembang menyatakan, bahwa berita yang mengatakan, dia tidak menyetujui Rum-Royen Statement dan akan meneruskan perjuangan dengan cara sendiri, adalah tidak benar.

Pertanyaan: "Bagaimanakah reaksi dari partai-partai yang berada di daerah Republik di Sumatra Selatan terhadap Rum-Royen Statement," dijawabnya: "Pada mulanya terdapat juga keruwetan. Tetapi ini yang menjadi pokok bukan Rum-Royen Statement itu, hanyalah Pemerintah mana yang harus dipatuhi: Bangka atau Daruratkah? Dan mana yang telah melahirkan Rum-Royen Statement itu. Apalagi banyak berita yang mengatakan, bahwa Pemerintah Darurat tidak menyetujui Rum-Royen Statement. Tetapi setelah ada penjelasan, segenap partai-partai dan pemimpin-pemimpinnya pada umumnya taat pada Pemerintah Pusat."

Mengenai KMB A.K. Gani menerangkan, bahwa pada dasarnya KMB tersebut adalah penerusan dari Linggarjati dan Renville. Soal-soal yang harus dipecahkan adalah soal militer dan ekonomi. Diterangkan, bahwa sekarang nampaknya kedua belah pihak sudah saling mengerti dalam hal-hal ini. Soalnya sekarang: Berani menerima dan harus berani pula memberi.

A.K. Gani menerangkan, bahwa selain dari itu faktor luar negeri akan menekan pula supaya soal Indonesia lekas beres guna lapangan pasar bahan mentah internasional. Dengan KMB perselisihan antara Indonesia dengan Belanda akan beres. Kalau tidak kekuatan militer yang akan menentukan, tetapi A.K. Gani yakin, soalnya akan beres dengan perundingan. Pertanyaan mengenai perundingan-perundingan cease fire yang telah dilakukannya dalam beberapa hari ini, dijawabnya dengan: "No comment."

Soalnya: Merdeka atau dijajah

Pertanyaan: "Bagaimanakah dengan anasir-anasir yang timbul di daerah-daerah TBA sekarang untuk menggabungkan diri dengan negara Sumatra Selatan?", dijawab oleh A.K. Soalnya sekarang ini bukan federalis atau Republikein atau soal negara-negara bagian, tetapi merdeka atau dijajah! Sudah tegas baik dalam Rum-Royen Statement maupun pendirian Pemerintah Republik dalam bentukan negara Indonesia Serikat nanti. Dan ini semuanya kelak akan kembali kepada pokok yaitu: "konstituante". Di sinilah kita akan melihat kehendak rakyat sendiri, dan rakyat—kata Gani—tentu akan berfihak kepada yang benar.

Pertanyaan apakah ia dalam menjalankan hak-hak rakyat ini tidak akan kuatir akan dibelokkan orang, dijawabnya: "Biar bagaimana juga rakyat tetap akan memilih yang benar. Andaikata saya menjadi salah satu calon untuk Sumatra Selatan ini, saya jamin saya akan terpilih. Jadi tidak ada kesangsian dalam hal ini. Apalagi semuanya nanti akan dilakukan di bawah pengawasan badan internasional. Hanya tentu saja pemimpin-pemimpin rakyat mulai sekarang harus mengadakan persiapan-persiapan guna menghadapi ini.

Gubernur Militer angkatan rakyat

"Menurut berita-berita, angkatan Saudara sebagai Gubernur Militer Sumatra Selatan adalah serobotan, tegasnya, Saudara mengangkat diri sendiri. Benarkah itu?"

A.K. Gani menjawab: "Dalam soal ini keangkatan saya adalah lain dari yang lain. Kalau biasanya Gubernur Militer itu diangkat oleh Presiden, maka saya tidak. Saya memang diserobot. Saya dipilih oleh Badan Pekerja Dewan Perwakilan Sumatra Selatan dan Staf Subkomando Sumatra Selatan untuk memangku jabatan itu. Jadi saya adalah pilihan dan angkatan dari wakil-wakil rakyat sendiri. Jadi saya diserobot, bukan menyerobot."

Kerja bersama antara rakyat dan Pemerintah Republik

"Bagaimanakah semangat kerja bersama antara rakyat dan Pemerintah Republik di Sumatra Selatan seumumnya?"

Diterangkan oleh A.K. Gani: "Tentang ini akan saya tunjukkan bukti. Di daerah yang dekat dari kota ini saja, umpamanya di Tanjung Raja. Semua usaha kita dalam bergerilya memakan ongkos sangat besar. Kesatuan-kesatuan TNI tersebar di seluruh Sumatra Selatan. Perhubungan kita sangat sulit. Mata uang kita hanya Urips yang tidak berharga di daerah pendudukan Belanda.

Bagaimanakah anak-anak kita dapat makan? Tentu saja dari rakyat. Yang nyata sekali rakyat menghargai mata uang kita sama dengan nilai mata uang Belanda. Nah, semuanya ini menunjukkan bagaimana semangat kerja bersama antara instansi Pemerintah dengan rakyat. Memang ada suka terjadi insiden-insiden kecil, tetapi ini tidak jadi alasan orang untuk mengatakan adanya perpecahan antara rakyat dan Pemerintah atau institusinya."

Tentang gerakan pemuda di Sumatra Selatan—menurut A.K. Gani—tidak mempunyai kepala. Maksudnya "orang kuat" yang dapat memegang pimpinannya tidak ada. Hingga dalam revolusi ini pemuda tidak dapat memberikan pimpinan. Pergerakan pemuda di sini adalah sebagai mata air yang tidak berair, tidak ada energie dan spontaniteit. Demikian A.K. Gani.

Patut diketahui, bahwa Dr.A.K. Gani tiba di Palembang dari Muara Aman pada tgl. 23/8 y.l. bersama-sama dengan Mayor Dr. Ibnu Sutowo, Kepala Staf TNI

Sumatra Selatan, Lekol Muchtar dari Lampung dan beberapa orang lainnya untuk membicarakan soal-soal yang berkenaan dengan penglaksanaan cease fire. (*Antara*, 28/8/1949)

***

Lampiran 23.

RESEPSI KONFERENSI WANITA SELURUH INDONESIA
Dalam Suasana Persatuan yang Erat

Di bawah ini kita muat *verslag* lengkap dari resepsi konferensi wanita seluruh Indonesia yang berita pendahuluannya telah kita siarkan dalam siaran berita *Antara* tgl. 28/8 siaran jam 05.00 sbb.:

Konferensi Wanita Seluruh Indonesia yang bertujuan membawa wanita kepada perjuangan bangsa, mempertinggi tingkat perjuangan wanita dan mempererat hubungan pergerakan wanita, dimulai semalam dengan resepsi yang meriah dalam suasana persatuan yang erat kekal. Sambutan-sambutan dari utusan-utusan organisasi wanita dari dalam dan luar daerah Republik menegaskan kesanggupan mereka untuk bersatu meneruskan perjuangan dan turut membina negara yang dicita-citakan, yakni Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat. Presiden Sukarno pun memberikan pesanannya, bahwa nasib kaum wanita hanya ditentukan oleh kaum itu sendiri dalam kesanggupan mereka untuk berjuang.

Bangsal Kepatihan yang luas itu penuh dengan hadirin dan karangan-karangan bunga, di antaranya ada sebuah yang sangat besar berbangun daerah istimewa Yogyakarta. Hadir juga Sri Sultan. Resepsi yang diiringi juga oleh musik yang merdu itu, dipimpin oleh Ny. Jusupadi dari Kowani, yang dalam kata pembukaannya mengatakan, bahwa konferensi wanita harus meninjau keadaan politik sekarang dan membawa perjuangan kepada perjuangan bangsa, supaya menjadi *backing* untuk konferensi meja bundar dan supaya juga diadakan *organisatorisch verbond* di antara kaum wanita seluruh Indonesia guna menghadapi pembentukan Republik Indonesia Serikat yang harus didasarkan atas keadilan sosial.

Jumlah organisasi yang mengirimkan wakilnya ada 65, di antaranya 18 dari Yogya.

Sambutan-sambutan

Ny. Abdul Malik utusan Sumatra Selatan mengatakan, bahwa cita-cita yang terkandung oleh konferensi wanita adalah murni, dan menegaskan, bahwa pun kaum wanita di Sumatra Selatan tidak akan mengasingkan diri dari gerakan wanita Indonesia seluruhnya.

Ny. Saribanon Daud, utusan Aceh mengatakan, bahwa semangat perjuangan wanita Aceh dari dulu sampai sekarang tak kunjung padam dan mengajak seluruh wanita Indonesia bersatu mengajar cita-cita kemerdekaan yang 100%.

Ny. Abbas, utusan Sumatra Timur dan Tapanuli mengatakan, bahwa waktu sudah dekat sekali untuk pembinaan negara RIS, sedang kini belum ada rencana

menggerakkan kaum wanita dalam hal itu. Ia mengharapkan adanya satu *front* wanita dalam usaha membina dan memelihara negara dan meminta dihilangkannya perbedaan sebutan antara Republikein dan federalis.

Nona Djumantan, utusan Kalimantan Barat, Timur dan Selatan mengatakan, bahwa siasat Belanda untuk memecah belah kaum wanita di Kalimantan gagal karena memang sudah menjadi hak kaum wanita mentaati cita-cita, yaitu pembentukan negara yang berdaulat, dan siap menerima tugas pembinaan RIS yang akan datang.

Ny. Salawati, utusan NIT mengatakan, bahwa datangnya ke Yogya tidak untuk melihat Presiden (tertawa ramai, juga Bung Karno), tetapi karena panggilan pekik "Merdeka" dari Yogya. Bahwa NIT dalam perjuangan kemerdekaan tidak tinggal diam, terbukti dengan pengorbanan jiwa 40.000 di Sulawesi Selatan di waktu y.l., demikian pembicara. Ia akui, bahwa pembentukan negara yang pertama oleh Belanda ialah NIT, tetapi apabila "jalan ke Roma ada banyak", begitu pula jalan ke kemerdekaan Indonesia pun banyak, dan NIT terpaksa menempuh siasat yang seperti dijalani sekarang. Pembicara menutup pidatonya yang bersemangat itu dengan harapan, hendaknya keputusan konferensi wanita itu mempunyai arti dan daya seperti proklamasi kemerdekaan di tahun 1945.

Ny. Supakoa, utusan Maluku menghendaki supaya keputusan-keputusan konferensi disusul dengan usaha-usaha kewanitaan untuk masyarakat secara konkrit.

Ny. Amsjiah, utusan Bangka-Beliton menerangkan, bahwa kaum wanita di daerah itu akan terus berjuang sampai tercapai kemerdekaan.

Ny. Djuwarsah dari Pasundan menegaskan adanya pertalian batin yang erat antara kaum wanita di daerah Republik, di daerah di luar Republik dan daerah gerilya.

Ny. Pudjobuntoro dari Kowani Pusat dengan suara yang merdu dan lancar sekali menegaskan, bahwa eratnya perhubungan bathin antara wanita seluruh Indonesia tidak akan dapat dipatahkan dengan jalan yang bagaimanapun juga. Ia terangkan, bahwa tujuan konferensi ialah membawa wanita seluruh Indonesia kepada perjuangan bangsa, mempertinggi tingkat perjuangan wanita dan mempererat hubungan pergerakan wanita.

Pesan Bung Karno

Presiden Sukarno menerangkan, bahwa perbedaan antara penjajahan dan kemerdekaan, ialah bahwa penjajahan tidak memberi kemungkinan untuk perbaikan nasib rakyat, tetapi kemerdekaan memberi kemungkinan RIS yang merdeka pun demikian hakekatnya, dan jika kemungkinan itu tidak dikerjakan dan perjuangkan, maka perbaikan nasib rakyat, begitu juga wanita, tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, nasib kaum wanita terletak pada kaum itu sendiri, ditentukan oleh kesanggupan mereka berjuang, demikian Presiden.

Jika kaum wanita menghendaki supaya pasal 27 Undang-undang Dasar Republik

yang bermaksud menjamin keadilan sosial bagi rakyat, yang juga bagi wanita, hendaknya kaum wanita turut aktif dalam pemilihan umum, supaya banyak korsi-korsi dalam konstituante nanti diduduki juga oleh kaum wanita, kata Presiden.

Selanjutnya Bung Karno tegaskan pentingnya kedudukan wanita bagi perjuangan kemerdekaan. Presiden berpendapat, bahwa mungkin sekali lemahnya perjuangan Republik di kepulauan-kepulauan luar tanah Jawa dan Sumatra di masa y.l., ialah karena kaum wanitanya kurang aktif dalam perjuangan kemerdekaan seperti yang dilakukan oleh kaum lelakinya. (*Antara*, 29/8/1949)

***

Lampiran 24.

SULTAN DELI TENTANG PELBAGAI SOAL
Rela Menarik Diri sebagai Zelfbestuurder

Dalam percakapan dengan wartawan *Antara* di Medan, Tuan Otteman, Sultan Deli, antara lain menerangkan, bahwa tidak ada orang selain Presiden Sukarno yang tepat untuk menjadi Presiden RIS di belakang hari. Hatta dianggapnya sebagai seorang politikus yang realistis.

Mengenai KMB ia nyatakan, sayang sekali kedua pihak tampaknya seperti terpaksa, sedangkan menurut dia, perundingan sekali ini hendaknya berjalan dengan penuh kemauan dan hati rela. Sungguhpun demikian ia berharap supaya perundingan sekali ini berhasil baik. Oleh karena jika tidak demikian, berapa tahun lagi kita akan menderita.

Berkenaan dengan akan dibicarakannya soal "zelfbestuurders" di KMB, ia katakan, bahwa instruksi yang diberikan oleh raja-raja di Sumatra Timur kepada Raja Kaliamsjah Sinaga dan Dt. Kamil sebagai wakil *zelfbestuurder*, ialah supaya kedudukan raja-raja di Sumatra Timur tidak kurang daripada kedudukan raja-raja di NIT umumnya. Ia tambah keterangannya, bahwa tentu saja keadaan daerah akan membawa lain keadaan pula dari kedudukan itu.

Atas pertanyaan, apa sebab ia tidak turut ke Negeri Belanda, dinyatakan bahwa ia merasa lebih perlu berdiam di Indonesia, oleh karena pembicaraan mengenai *zelfbestuurder* di Sumatra Timur sudah dilakukan di Medan lebih dulu, meskipun pembicaraan-pembicaraan itu hanya bersifat informil.

Ketika ditanya, apakah ia tidak berniat menjadi satu politik *figuur*, dijawabnya, bahwa kini ia belum berpikir ke jurusan itu. Yang terpenting baginya adalah soal *zelfbestuurder* di NST, oleh karena soal itu sampai sekarang belum bekerja, sedangkan oleh badan mana pun sudah diakui kedudukannya. Pun dalam RIS akan demikian keadaannya.

Mengenai struktuur RIS ia nyatakan, bahwa semenjak dulu ia adalah seorang yang pro federasi. Indonesia masih menuju menjadi negara, katanya, dan oleh karena itu kepentingan pelbagai golongan atau fihak janganlah sampai tersinggung; oleh karena itu perlulah diadakan federalisme, akan tetapi menurut pendapatnya, sesudah satu generasi mungkin timbul dengan tegas perasaan kesatuan.

Soal ekonomi. Ia kemukakan pendapatnya, bahwa di KMB soal ekonomi dan hutang-piutang Belanda akan merupakan satu soal sulit.

Tentang modal asing terutama yang didapati di Sumatra Timur dan yang banyak digolakkan dalam perkebunan-perkebunan, ia nyatakan, bahwa modal itu memang

diperlukan, tetapi kaum modal harus juga memikirkan keadaan sosial, umpamanya gaji buruh.

Atas pertanyaan mengenai sikap maskapai perkebunan sekarang dengan akan berdirinya RIS kelak, ia terangkan bahwa mereka masih mengambil sikap menunggu. Sebagaimana diketahui, katanya selanjutnya, modal itu tentu mengharapkan keamanan, di mana modal itu dapat digolakkan.

Ia tambahkan pula, bahwa adalah satu rakhmat Tuhan, bahwa hanya tanah Delilah dapat menghasilkan daun tembakau yang terkenal di seluruh dunia dengan "Deli Dekblad". Percobaan-percobaan yang dilakukan oleh maskapai-maskapai tembakau untuk menanam tembakau semacam itu di daerah dunia lain tidak memberi hasil.

Ia terangkan juga, bahwa maskapai-maskapai tembakau di Langkat/Deli dan Serdang telah menyerahkan tanah seluas 100.000 ha kepada rakyat.

Pengganti Dr. Mansur? Desas-desus yang menyatakan bahwa Sultan Deli akan menggantikan Dr. Mansur, ia bantah dengan berkata, bahwa ia sama sekali tidak berniat menjadi seorang wali negara. Ia hanya tumpahkan perhatiannya kepada soal kedudukan *zelfbestuurder*, dan kalau kedudukan ini kelak dirasa tidak perlu maka ia akan rela mengundurkan diri.

Atas pertanyaan, dijawabnya bahwa ia tidak dicalonkan untuk menduduki pangkat Wali Negara di dalam pemilihan umum yang sedikit lagi akan diadakan di NST. (*Antara*, 29/8/1949)

***

Lampiran 25.

PENGUMUMAN
KEMENTERIAN PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA

Kementerian Penerangan di Yogyakarta mengeluarkan maklumat sbb.:

Mengingat pentingnya penerangan di dalam usaha melaksanakan perintah perhentian permusuhan, maka Dewan Bersama Pusat (Central Joint Board) memutuskan memperbantukan pegawai-pegawai Jawatan Penerangan daerah kepada Comite Bersama Daerah (Local Joint Committee) sebagai Pegawai Penerangan yang diperbantukan (Accredited Information Official—AIO).

Berhubung dengan itu hendaknya pegawai-pegawai Penerangan Daerah yang namanya tersebut di bawah ini, selekas mungkin mengadakan hubungan dengan wakil-wakil Republik dalam Dewan Bersama Daerah (LJC) yang bersangkutan untuk menerima tugasnya.

Adapun pegawai-pegawai Jawatan Penerangan Daerah yang telah ditunjuk sebagai Accredited Information Official (AIC) untuk masing-masing Local Joint Committee (LJC) adalah sbb.:

LJC	AIO	Supaya hubungan dengan:
1. Bandung	Tn. Osaka Maliki	1. Lt.Kol.Dr. Rubiono 2. Ir. Lyar
2. Serang	Akan ditentukan di belakang	1. Lt.Kol.Dr.E. Sudewo 2. Dr. Jusuf Adiwinata
3. Purwokerto	Tn. Sumarno	1. Lt.Kol. Bahrun 2. Budiono
4. Solo	Tn. Maladi *Reserve:* 1. Purwosuratmo 2. Purwanto	1. Lt.Kol. Suprapto 2. Saleh
5. Magelang	Tn. Sutardjo	1. Lt.Kol. Sarbini 2. Salamun
6. Semarang	Tn. Sutjipto	1. Lt.Kol.Dr. Aziz Saleh 2. Milono 3. Sugeng 4. Sumardjito

7. Surabaya	Tn. Sutomo Djauhar Arifin *Reserve:* 1. Murdijanto 2. Dr. Manap 3. Sapari 4. Gapar	1. Lt.Kol.Sudjono 2. Dr. Murdjani
8. Bojonegoro	Tuk Hassan	1. May. Sudirman 2. Mr. Manu *Reserve:* Dul Arnowo
9. Kediri	Muljadi *Reserve:* Sudjojo Purworudjito	1. Lt.Kol. Surachmat 2. Samadikun
10. Palembang	Masih akan ditunjuk	1. Lt.Kol. Mutiara 2. Dr. Isa
11. Bukittinggi	Suska	1. May. Akil 2. Mr. Rasjid 3. Ruslan
12. Medan	Osman Raliby	1. May. Nazir *Reserve:* Kapt. Nip
13. Sibolga	Abdullah Jusuf	1. Lt.Kol. Kawilarang 2. Dr. Tobing

***

Lampiran 26.

PIR TETAP BERDIRI DI BELAKANG DELEGASI REPUBLIK
Kata Mr. Tadjuddin Noor

Medan, 5/9 (Antara).

Dalam percakapan wartawan *Antara* dengan Mr. Tadjuddin Noor yang tiba di Medan pada hari Jumahat, beliau menerangkan bahwa sikap Persatuan Indonesia Raya terhadap soal Uni Indonesia-Belanda, seperti diketahui, sefaham dengan delegasi Republik, yaitu menghendaki Uni ringan dan Kemerdekaan yang tidak bersyarat serta sempurna.

Tentang soal ekonomi dan keuangan yang kini menjadi pembicaraan hangat di KMB, beliau menyatakan bahwa dalam prinsipnya PIR tetap berdiri di belakang delegasi Republik, dan sudah barang tentu hasil-hasil perundingan di KMB itu akan diratificeer kelak oleh KNIP di mana PIR juga akan mendapat tempat.

Menjawab pertanyaan yang dikemukakan tentang hak keistimewaan yang diminta pihak Belanda untuk golongan kecil Belanda di Indonesia, beliau menyatakan bahwa mungkin yang dimaksud hak keistimewaan yang diminta Belanda itu serupa dengan kedudukan keistimewaan warga-warga Inggeris di dominion-dominionnya.

Ketika ditanya bagaimana pendapatnya kalau KMB gagal, maka beliau menjawab bahwa kerugian akibat kegagalan itu bukan saja terletak pada bangsa Indonesia akan tetapi juga pada bangsa Belanda yang mempunyai kepentingan besar di Indonesia ini. Karena, kata beliau selanjutnya, untuk menghadapi serangan dari luar perlu ada national defence, yaitu suatu tentara kebangsaan yang modern, dan hal ini hanya bisa diadakan apabila ada pemerintahan nasional yang dikehendaki rakyat. Oleh karena itu kalau pihak Belanda insyaf dalam hal ini tentu mereka tidak akan mengundur-undurkan KMB. Dan juga untuk satu tentara kebangsaan diperlukan waktu yang akan memakan paling sedikit dua tahun.

Mengenai soal penanaman modal asing di Indonesia, beliau berpendapat, bahwa hal ini memang kita perlukan, dan kalau pemerintah sudah di tangan kita, tentu ia akan dapat mengatur dengan sebaik-baiknya kedudukan modal itu sehingga kemakmuran rakyat dan kehidupan yang selayaknya bagi kaum buruh terjamin.

Mengenai hutang pihutang Hindia Belanda beliau mengatakan bahwa dalam hal ini tentu delegasi Republik akan mengambil jalan yang sebaik-baiknya, akan tetapi pada umumnya tentu akan ditolak untuk membayar ongkos-ongkos yang dikeluarkan pihak Belanda untuk menentang perjuangan nasional, seperti yang diajukan Belanda supaya RIS membayar ongkos aksi militer Belanda yang pertama dan kedua.

Mengenai Irian ia mengatakan bahwa PIR sepaham dengan delegasi Republik dan

BFO, sebab PIR juga menghendaki kemerdekaan yang melingkungi daerah Hindia Belanda dahulu.

Tentang Dr. Mansur dan Abdul Malik, dikatakan beliau bahwa dalam pembicaraan yang tidak resmi di Jakarta kedua tuan itu telah berjanji akan menolong mendirikan cabang PIR di Sumatra ini. Beliau menerangkan pula bahwa Menteri Dalam Negeri Mr. Wongsonegoro yang menjadi salah satu pengurus besar PIR dan duduk pula dalam Central Joint Board akan datang ke Sumatra untuk meninjau pelaksanaan cease fire, dan mungkin di samping itu akan mengadakan penerangan-penerangan yang mengenai PIR.

Selain Mr. Tadjuddin Noor, juga telah tiba di kota ini untuk urusan prive Gobnor Aceh, Mr. Mohd. Amin. (*Antara*, 5/9/1949)

***

Lampiran 27.

PSII SELURUH INDONESIA BERGERAK KEMBALI

Jakarta, 6/9 (Antara)

Menurut maklumat Lajnah Tanfidziyah PSII (Executief Comite) yang ditandatangani oleh tn Abikusno Tjokrosujoso sebagai Ketua dan Harsono Tjokroaminoto sebagai Sekretarisk Jenderal, Partai Syarikat Islam Indonesia di Pulau Jawa dan Madura yang sejak zaman Jepang dihentikan gerakannya, dimaklumkan bergerak kembali.

Seperti diketahui, PSII di luar Jawa dan Madura tidak pernah berhenti bergerak, dan kini di seluruh Indonesia ada 345 cabang, tidak terhitung calon cabang-cabang.

Kepada cabang-cabangnya diberi instruksi supaya bergerak lagi dengan mengingat hukum-hukum yang berlaku di tempatnya masing-masing.

PSII adalah partai politik tertua di Indonesia, yang mula-mula dipimpin oleh marhum Haji Umar Said Tjokroaminoto.

Untuk diketahui umum, maka Pucuk Pimpinan Harian PSII yang berpusat di Yogyakarta sampai adanya Majlis Tahkim (Kongres) adalah seperti berikut:

Lajnah Tanfidziyah (Executief Comite) terdiri daripada: Abikusno Tjokrosujoso ketua, Anwar Tjokroaminoto wakil ketua ad interim, Harsono Tjokroaminoto sekretaris jenderal, Husin sekretaris, A.S. Mattji keuangan.

Dewan Partai Harian terdiri dari W. Wondoamiseno ketua, Arudji Kartawinata anggota dan H. Zainul anggota.

Labih jauh diumumkan, bahwa sebagai wakil-wakilnya di Jakarta telah ditunjuk tuan-tuan: Sjahbuddin Latif wk. Dewan Partai, Anwar Tjokroaminoto wk. Ketua LT PSII, Muslim Arif, Anwar dan Ahmad Tjokroaminoto memegang sekretariat, A.S. Mattji keuangan dan sebagai pembantu-pembantu ialah Sjawal dan M. Zain Arif.

Alamat sementara ialah: Tanah Tinggi VII No. 7, Jakarta. Selama lalu-lintas tak mengidzinkan maka Pucuk Pimpinan yang di Jakarta itulah yang akan mengurus kepentingan semua cabang-cabangnya di seluruh Indonesia.

Konferensi PSII daerah Indonesia Timur

Konferensi PSII daerah Indonesia Timur yang sedianya akan dilakukan dalam bulan September 1949, akan ditangguhkan sampai selesainya Konferensi Meja Bundar. Penundaan ini ialah untuk memberi kesempatan kepada tn. Abikusno (ketua LT PSII) buat menghadiri konferensi tersebut sekembalinya dari KMB di Den Haag. (*Antara*, 6/9/1949)

***

Lampiran 28.

INDONESIA DI HARI BESOK DENGAN SOAL PERDAGANGANNYA
Beberapa Pandangan Drs. Caron dari "Unilever"

Dalam suatu intervieuw spesial dengan wartawan *Antara* kemarin, Drs.A.W.J. Caron, direktur-umum dari "Unilever" Jakarta, memberikan beberapa pendapat dan pandangannya terhadap soal-soal yang mengenai perdagangan dan perekonomian Indonesia di hari besok, yang disimpulkannya dengan kata-kata "Kami melihat harapan baik."

Atas pertanyaan, bagaimana ia melihat perkembangan politik di Indonesia sekarang ini selaku seorang pedagang, Drs. Caron menjawab sbb.:

"Bagi kehidupan dunia usaha, di dalam mana termasuklah juga kehidupan dunia industri, pada umumnya terlihatlah akan timbulnya tahun-tahun yang sukar sebelum dapatnya disusun suatu keadaan yang normal. Tahun-tahun yang sukar ini tidaklah begitu rapat hubungannya dengan penyerahan hak kedaulatan itu, tetapi terutamanya dengan keadaan ekonomi dari Indonesia yang sebagaimana diketahui selamanya ini hidup dari exportnya.

Dan export ini pada waktu sekarang tidak mencukupi baginya, pertama karena produksi dari berbagai-bagai barang belum mencukupi, dan kedua karena harga pasaran dunia di dalam beberapa tahun ini telah tidak mencukupi pula. Maka itu jumlah uang masuk dari deviezen di negeri ini karena hal-hal ini tidak mencukupi pula buat mendukung kepentingan ekonomi tadi ke taraf yang normal. Tetapi dalam keyakinan saya di dalam tahun-tahun sukar di masa depan itu Negara Indonesia Serikat akan dapat menerima bantuan keuangan dari pihak Belanda dan Amerika.

Apa yang dapat dilakukan dengan "deviezen-pot" yang kecil ini adalah terutamanya untuk mengadakan "export-industrie", seperti untuk membeli mesin-mesin dan bahan-bahan reparasi dsb. Dan keduanya, harus diimport barnag-barang yang oleh Indonesia ini sendiri masih belum cukup dapat dihasilkan, yang terutama akan berupa barang-barang tekstil. Seterusnya harus diimport sejumlah besar beras, dan dengan demikian akan tinggallah bagian dari "deviezen-pot" ini yang teruntuk bagi kepentingan-kepentingan industri.

Bagi kepentingan industri ini pada umumnya, termasuk golongan Indonesia, Tionghoa dan Eropah, dirasa perlu supaya kira-kira 20% dari "eind-product" itu dipergunakan untuk deviezen. Dalam hal ini saya terpikir kepada umpamanya bahan-bahan mentah, alat-alat pembungkus dll. Semuanya yang perlu untuk membangunkan usaha produksi yang sehat di sini. Kesimpulannya: yang 20% itu adalah penting sekali dan boleh dikatakan tidak dapat tidak harus diadakan."

Melanjutkan soal ini Drs. Caron berkata:

"Pada umumnya kita memandang yang Indonesia akan menemui kesukaran-kesukartan di hari besok dalam hal menjualkan bahan-bahan exportnya, umpamanya tentang getahnya yang sebahagian besar disebabkan saingan dari getah sintetis sekarang ini. Dari itu timbul dugaan, bahwa jumlah yang akan diperoleh dari import ini di tahun-tahun yang akan datang akan menjadi kecil daripada perobahan-perobahan susunan (*structuurveranderingen*) di pasar dunia dan berkenaan dengan usaha untuk menjaga supaya rakyat mendapat cukup akan barang-barang untuk dapat bekerja dengan gembiranya. Oleh karena itu untuk Negara Indonesia penting sekali jikalau di sini industrinya dapat bertambah luas jadinya. Maka itu sudah dapat dilihat dari sekarang, bahwa soal mengimport barang-barang yang sudah siap lengkap akan dapat diseimbangi jika industri di Indonesia ini mendapat kansnya.

"Dan untuk kembali kepada soal perkembangan politik tadi tentang membangunkan industri ini, kita boleh gembira karena dari pihak bangsa Indonesia telah dinyatakan yang ia menyukai industrialisasi, sehingga dalam soal ini kita tidak perlu merasa khawatir bagi masa depan."

Sebagai pertanyaan kedua yang kita majukan kepadanya adalah bagaimana pandangannya—berdasarkan praktek dan pengalamannya sekarang—bagi harapan orang-orang dan usaha-usaha perdagangan nasional Indonesia di masa depan. Atas hal ini Drs. Caron menerangkan:

"Hal yang perlu bagi Indonesia buat memperdagangkan bahan-bahan yang ada padanya, ialah apparat nasional buat perdagangan dalam negeri. Suatu usaha yang akan dilakukan di segenap tempat dan kota dan dari situ dengan cara penjualan menyampaikannya ke pasarannya. Di waktu sekarang ini apparat perdagangan ini terdiri dari badan-badan perdagangan bangsa Eropah. Tetapi mulai sekarang baik badan-badan perdagangan bangsa Eropah itu maupun kaum fabrikantnya telah menyatakan kesediaannya untuk menghubungkan para pedagang perantara bangsa Indonesia dalam usahanya itu dan barangkali pula perdagangan bangsa Indonesia sendiri pun pasti telah dapat begitu rapi tersusun sehingga dapat mendukung sendiri apparat perdagangan tersebut.

Dalam pada itu para pedagang bangsa Indonesia sendiri tentulah pula mempunyai kelebihan dari pedagang-pedagang lain tentang soal lebih mengetahuinya keadaan dan keinginan negeri dan rakyatnya. Dengan sebab itu lebih sangguplah mereka mengukur kepentingan dari bangsanya dan dengan demikian dapat menjadi orang yang sangat berfaedah bagi kaum fabrikant yang menyediakan barang-barang keperluan rakyat Indonesia.

Maka itu pengaruh yang besar bagi pembangunan perdagangan nasional Indonesia ini adalah keuletan yang dapat dihidupkan bangsa Indonesia sendiri untuk hal mana sekarang badan-badan perdagangan bangsa Eropah telah sebanyak-banyak

mungkin menyatakan kesediaannya buat membantu pedagang-pedagang Indonesia ini memenuhi keperluan akan barang-barang kepentingan itu," demikian Drs.A.W.J. Caron akhirnya.

Sebagaimana diketahui, Unilever ini adalah suatu badan perdagangan yang bermodalkan separoh Ingeris dan separoh Belanda dan mempunyai pabrik-pabriknya di 39 buah negeri dan kantor-kantor di segenap negara, selain Russia dan Jepang. Sekarang di Indonesia Unilever mempunyai 4 pabrik sabun dan mentega (margarine) yang sedikit waktu lagi akan ditambahnya dengan sebuah lagi yang baru di Makasar.

Oleh suatu kalangan pedagang Indonesia yang tergabung dalam Gindo di Jakarta diterangkan, bahwa keterangan Drs. Caron tentang badan-badn perdagangan bangsa Eropah yang sekarang telah menyatakan kesediannya sebanyak-banyak mungkin buat membantu pedagang-pedagang Indonesia dalam memenuhi keperluan akan barang-barang kepentingan itu, di dalam keadaannya sekarang ini baru merupakan sebahagian kecil saja. Dan seorang pedagang Republik menyatakan, bahwa ini semua masih harus dibuktikan. (*Antara*, 9/9/1949)

***

Lampiran 29.

DESAKAN-DESAKAN KAUM BURUH

Kongres Buruh Seluruh Indonesia yang dilangsungkan di Bandung dalam pertengahan bulan Agustus y.l telah dihadiri oleh wakil-wakil 38 organisasi buruh dari Jawa Barat (Bandung dan Jakarta), Gabungan Serikat Buruh dari Semarang, Badan Penghubung Makasar yang mewakili 23 organisasi, dan seorang peninjau dari Yogyakarta, baru kemarin mengumumkan putusan-putusannya yang terdiri atas 2 resolusi, yaitu mengenai: 1. Buruh Wanita dan 2. Penoneelspolitiek, serta 3 mosi tentang Tahanan Politik dan Perang, Bahasa Indonesia, dan BBL.

Buruh Wanita

Menurut isi resolusi tentang Buruh Wanita, kongres tersebut menyokong putusan Buruh Wanita Indonesia yang diambil di Makasar tanggal 13 Juli serta mendesak kepada pemerintah NIT supaya:

a. Keadaan perburuhan di dalam perusahaan-perusahaan yang bersangkutan diselidiki dengan seksama;
b. Majikan-majikan uyang bersangkutan dituntut menurut undang-undang sepadan dengan kekejamannya; dan
c. Mengambil tindakan yang perlu untuk melindungi Buruh Wanita.

A.l. resolusi ini diambil karena Buruh Wanita di pelbagai perusahaan di Makasar diserahi pekerjaan yang berat, tidak sepadan dengan tenaga mereka, upahnya tidak memadai keperluan hidup mereka, perlakuan kejam di luar peri kemanusiaan terhadap buruh wanita itu, dan tiadanya perhatian dan perlindungan dari kaum majikannya.

Personeelspolitiek

Tentang personeelspolitiek kongres mendesak kepada pemerintah (biar yang disebut sekarang pemerintah umum atau pre-federal maupun yang bernama pemerintah negara) supaya:

a. Dari sekarang bertindak ke arah cara pengangkatan dan penempatan pegawai yang berdasarkan kebangsaan;
b. Membuang jauh segala sifat dan sikap yang berbau penjajahan;
c. Memberi kesempatan yang selaras dengan cita-cita nasional kepada tenaga muda yang memenuhi sjarat-syaratnya.

Tawanan-tawanan

Adapun mosi-mosi tentang 3 soal tersebut adalah sbb.:

Perihal pertahanan politik dan perang, kongres menyokong mosi Persatuan Wartawan Indonesia tentang pembebasan tahanan-tahanan politik dan menganjurkan kepada seluruh kaum buruh supaya menaruh perhatian atas soal tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ealiz dan ekonomi.

Ini tertinjau dari sudut perjoangan dan kepentingan buruh khususnya dan masyarakat umumnya dan mengingat akan adanya pelaksanaan penghentian permusuhan serta masih banyaknya tahanan akibat konflik Belanda-Republik.

Bahasa Indonesia

Mosi yang kedua mendesak kepada pemerintah umum dan pemerintah negara bagian supaya memerintah kepada segenap kementerian dan jawatan-jawatan pemerintah di seluruh Indonesia, agar menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar yang resmi di dalam laporan-laporan, verslag-verslag, surat-surat resmi dll.

BBL (= Peraturan Gaji Pegawai Negeri, PGPN)

Dalam mosi ketiga yang mengenai BBL, kongres mendesak supaya pemerintah segera membentuk sebuah komisi yang diserahi kewajiban untuk mempelajari dan menyusun rancangan peraturan gaji pegawai Negara dan Pemerintah yang sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan sosial serta mengingatkan dan berdasarkan keperluan hajat hidup para pegawai dari segala golongan dan tingkatan sebagai Manusia.

Dalam alasannya disebutkan, bahwa BBL 1938 banyak mengandung anasir dan sifat-sifat yang bertentangan dan dasar peri kemanusiaan dan keadilan sosial; buktinya perbedaan dan perbandingan pegawai yang terendah dan yang tertinggi adalah seperti 1:117 dan menurut BAG (*Business Advisory Group*) perbandingan itu adalah seperti 1:97.

Di dalam zaman Republik perbandingan itu adalah seperti 1:16, dan dalam masa itu gerakan buruh ingin mencapai perbandingan 1:13, mendekati perbandingan buruh internasdional, ialah antara 1:10. (*Antara*, 11/9/1949)

***

Lampiran 30.

KONGRES PENDIDIKAN INTER-INDONESIA HARUS PECAHKAN SOAL-SOAL PRAKTIS

Berhubung dengan akan diadakannya Kongres Pendidikan Inter-Indonesia di Yogya atas inisiatif Badan Kongres Pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantoro sebagai ketua panitia kongres atas pertanyaan-pertanyaan wartawan *Antara* menerangkan sbb.:

Suggestie dari utusan-utusan NIT

Suggestie untuk mengadakan Kongres Pendidikan Inter-Indonesia dengan maksud mempersatukan dasar-dasar dan garis-garis besar systeem pendidikan buat seluruh Indonesia adalah datangnya dari perutusan "Goodwill Mission" NIT di bawah pimpinan Mononutu tempo hari, kemudian diulangi oleh NIT ketika diadakan Konferensi Inter-Indonesia.

Dalam pada itu oleh NIT sendiri telah diadakan konferensi pendidikan di Makasar, sedang Pemerintah Pasundan pun dalam bulan Oktober akan menyelenggarakan konferensi yang serupa. Pihak Badan Kongres Pendidikan sangat bergembira dan bersyukur atas berlangsungya konferensi-konferensi itu yang boleh dipandang sebagai suatu persiapan guna Kongres Pendidikan Inter-Indonesia yang mendatang, demikian Ki Hadjar Dewantoro.

Persiapan-persiapan

Diterangkan selanjutnya, bahwa kini di Yogya telah diadakan persiapan-persiapan, antara lain sudah dibentuk panitia besar terdiri atas 55 anggota yang akan menyelenggarakan kongres itu, dengan Ki Hadjar sendiri sebagai ketua, Dr. Sutopo wakil ketua, dan Brodjonagoro sebagai sekretaris. Selain itu, diadakan *adviseur-adviseur* (penasihat) yang terdiri dari para ahli (*academici*), dan sebuah subpanitia *praeadvies* (prasaran).

Atas pertanyaan, apakah betul kabar-kabar di luar, bahwa Presiden akan menjadi pelindung kongres, Menteri Pendidikan menjadi ketua kehormatan, dan Menteri-menteri Pendidikan Negara-negara BFO menjadi anggota-anggota kehormatan, Ki Hadjar menjawab, bahwa mudah-mudahan betul kabar-kabar itu.

Harus pecahkan soal-soal praktis

Berdasarkan pengalaman, bahwa dalam sesuatu kongres tidak mungkin dibicarakan sekaligus banyak-banyak hal dengan mendalam (seperti yang terjadi dalam

Kongres Pendidikan di tahun 1947 di Solo, yang boleh dikata *overbelast* [terlalu banyak beban]), maka menurut Ki Hadjar kongres yang akan ealiz ini sebagai langkah pertama akan membatasi pembicaraan melulu mengenai: soal menyatukan dasar-dasar dan garis-garis besar ealiz pendidikan untuk seluruh Indonesia yang dibagi dalam tiga pokok pembicaraan, yaitu: 1. sifat dan dasar-dasar pengajaran, 2. bentuk (*school*- dan *ondewijssysteem* [ealiz sekolah dan ealiz pengajaran]), dan 3. isinya mata pelajaran.

Harus dapat dipecahkan soal-soal yang praktis, misalnya bagaimanakah soal basa, berapa tahunkah pelajaran sekolah menengah, ealiz Angelsaksisch (praktis) ataukah Jerman (banyak *ballast* [beban berlebihan]) yang akan dipakai, sekolah tinggi yang bagaimanakah kelak yang akan menjadi tanggungan RIS, dan mana yang ditanggung oleh ealiz bagian dsb.

Bahan-bahan yang telah ada

Atas pertanyaan, apakah akan selesai persiapan-persiapan itu, kalau diingat bahwa kongres mungkin diadakan di bulan Oktober, Ki Hadjar menjawab, bahwa sebetulnya persiapan untuk mengadakan kongres serupa itu sudah lama sekali dimulai, bahkan di jaman penjajahan Belanda, yakni dengan adanya Kongres Persatuan Pendidikan di tahun 1938 di Solo, diketuai oleh K.R.M.T. Wurjaningrat, yang membentangkan pendidikan dan pengajaran nasional terutama yang diselenggarakan oleh pihak partikulir.

Kemudian Kongres Pendidikan Indonesia di tahun 1947 di Solo juga yang telah mengupas berbagai soal yang sesungughnya terlalu banyak untuk dikupas dalam sesuatu kongres secara mendalam, sudah cukup sebagai suatu orientasi mengenai pokok-pokok dari segala bagian pendidikan dan pengajaran, misalnya kebudayaan, bahasa, agama, ealiz, hubungan antara daerah-daerah Indonesia yang berlainan eali istiadatnya dsb.

Kecuali itu yang merupakan juga bahan penting, ialah hasil Panitia Penyelidik Pengajaran 1947 yang diketuai juga oleh Ki Hadjar berisi penyelidikan pengajaran rendah sampai tinggi dan sekolah-sekolah vak. Diterangkan, bahwa hasil itu sudah dijadikan suatu buku yang agak tebal, tetapi ini di seluruh daerah Republik hanya dapat diketemukan 10 buah.

Pun rencana onderwijswet (undang-undang pendidikan) yang tempo hari sudah ealiz selesai pembicaraannya di BP KNIP merupakan bahan yang sangat penting dalam kongres itu.

Sungguhpun begitu, dengan terjadinya penyerbuan di daerah Republik oleh militer Belanda yang baru lalu itu, pastilah timbul soal-soal baru yang pada waktu menyusun bahan-bahan tersebut belum ada, misalnya tentang pembanterasan *moreele- verwording* (kemerosotan moral), tentang *militieplicht* (wajib milisi) dan pembanterasan pengangguran yang tiada dapat lepas dari sangkut-paut pendidikan dan pengajaran, demikian Ki Hadjar.

Hasil Konferensi

Selanjutnya Ki Hadjar menerangkan, bahwa kongres nanti akan diajukan sebagai suatu kehendak partikulir (rakyat) kepada pemerintah masing-masing dengan melalui badan perwakilan selaras dengan systeem demokrasi. Ki Hadjar menutup keterangannya dengan penuh harapan akan datangnya waktu yang gemilang bagi pendidikan dan pengajaran bangsa Indonesia seluruhnya. (*Antara*, 12/9/1949)

***

Lampiran 31.

MOSI-MOSI DAN PROTES DI MAKASAR

Berita terlambat dari Makasar menunjukkan adanya aksi yang dilakukan oleh 60 organisasi pemuda serta 54 partai-partai politik yang menyatakan berbagai mosi dan protes. Rapat-rapat mereka diadakan pada tanggal 11 September y.l.

Soal tawanan politik

Dalam mosinya mengenai ini mereka mendesak kepada Pemerintah Hindia Belanda dan pemerintah NIT supaya:

a. Meninjau kembali soal-soal tawanan, soal-soal mana harus dilihat dari sudut perjuangan bangsa untuk kemerdekaan.
b. Melaksanakan pembebasan segala tawanan-tawanan perjuangan kemerdekaan Indonesia berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945 dan sesuai dengan Rum-Royen Statement.
c. Melaksanakan pembebasan segala orang-orang perjuangan yang telah dihukum menurut pengadilan kriminil yang ada di seluruh Indonesia.

Sebelum itu juga Gapki dalam mosinya tanggal 28/8 "mendesak dengan sangat kepada pemerintah agar supaya kepada tahanan, hukuman dan buangan segera diberikan kebebasan kembali". Mosi ini pada tanggal 11/9 disokong oleh Patriot Indonesia dan Badan Penunjang Keluarga Tahanan Makasar.

Anggota Dewan Sulawesi Selatan A. Waris memajukan pertanyaan kepada Hadat Tinggi, benar-tidaknya Andi Mappanjuki, bekas Arumpone, dan Andi Pangerang yang kini di Makasar, sedikit hari lagi akan diasingkan ke Poso. Kalau benar, penanya minta penjelasan sebab-sebabnya. Kalau mereka jadi diasingkan, menurut pendapat penanya, ini politis dan psikologis tidak tepat dan pasti mengeruhkan suasana.

Soal Irian

Mengenai ini rapat tersebut menyatakan sbb.:

Mengetahui:

a. Adanya keinginan-daya upaya-usaha-aksi-aksi dari pihak lain untuk memperoleh Irian.
b. Adanya panitia-panitia seperti "Nieuw Guinea als Stamland" dan "Kolonisatie Nieuw-Guinea" yang membayangkan dengan nyata nasib buruk dari daerah ini di kemudian hari yang dengan sendirinya hanya akan menjadi suatu *tanah jajahan* berbentuk baru.

Menyatakan:

Dengan ini bahwa Irian adalah menjadi sebahagian dari Indonesia yang tidak dapat dipisahkan.

Soal golongan kecil

Mereka memprotes tindakan pemerintah Belanda yang telah mengijinkan turut hadirnya golongan-golongan kecil seperti P.T.B. Twapro dan K.K.M. dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, walaupun selaku golongan "significant interest".

Sebab:

a. Golongan-golongan kecil tersebut adalah perkumpulan-perkumpulan yang tidak mempunyai pengaruh sedikit jua pun dan tidak berarti dalam masyarakat Negara Indonesia Timur.
b. Perkumpulan-perkumpulan tersebut semata-mata mempunyai corak politik yang menyetujui dan memperkuatkan politik reaksioner Belanda.
c. Penerimaan golongan-golongan itu hanya mengabui mata dunia internasional, bahwa seolah-olah adalah membawa suara rakyat dari suatu lapisan yang besar.
d. Pengiriman golongan-golongan tersebut dilakukan dengan tidak setahu Pemerintah Negara yang bersangkutan.

MANIFEST

Rapat 60 organisasi pemuda pada tanggal 11 September itu mengeluarkan manifest tentang pendirian dasar pemuda NIT dalam melanjutkan perjuangannya sbb.:

1. Dasar: Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17Agustus 1945.
2. Tujuan: Kesempurnaan Negara Republik Indonesia, Merdeka dan berdaulat ke luar dan ke dalam, yang meliputi seluruh kepulauan Indonesia (termasuk Irian) dan berdasarkan Pancasila.
3. Semboyan perjuangan: Satu bangsa—bangsa Indonesia.
   Satu bahasa—bahasa Indonesia.
   Satu Tanah Air—Tanah Air Indonesia.
   Satu Negara—Negara Indonesia.
4. Lambang kebangsaan: Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya, bendera Negara ialah Sang Merah Putih. (*Antara*, 14/9/1949)

***

Lampiran 32.

SEKITAR PERGURUAN TINGGI DAN PENDIDIKAN UMUM DI INDONESIA

Berhubung dengan akan diadakannya Kongres Pendidikan di Yogya di dalam bulan depan itu, wartawan *Antara* telah menanyakan pandangan tuan-tuan Dr. Bahder Djohan selaku ketua Perkumpulan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan dan Prof. Frans Vreede dari Departemen Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen di Jakarta.

Di samping sekolah-sekolah tinggi perlu perguruan-perguruan yang semi-akademis, kata Dr. Bahder Djohan

Tatkala ditanyakan suggestiesnya terhadap Kongres Pendidikan yang direncanakan akan diadakan di Yogya bulan depan itu, Dr. Bahder Djohan menerangkan, supaya kita jangan terlalu mempermudah dan mempermurah mutu Perguruan Tinggi kita, oleh karena pendirian yang demikian akan merugikan, seperti yang baru-baru ini juga ditegaskan oleh Prof. Raadama. “Uitgangspunt” ini pada umumnya diterima oleh umum. Tetapi, kata Dr. Bahder Djohan seterusnya, yang tidak boleh pula kita lupakan, kita tidak boleh terlalu lama menunggu hasil dari perguruan tinggi ini.

Maka itu di samping Perguruan-perguruan Tinggi yang kita dirikan dengan berpegang kepada dasar tersebut, kita harus mengadakan pula buat sementara perguruan-perguruan yang bersifat semi-akademis, yang mungkin dalam 3 a 4 tahun dapat menciptakan orang-orang yang sudah dapat kita pergunakan dalam masyarakat, lebih-lebih dalam keadaan masyarakat kita sekarang yang perlu tenaga-tenaga pemimpin di segala lapangan. Umpama perguruan yang akan didirikan di Jakarta oleh Perkumpulan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan.

Anggapan bahwa kita akan kekurangan tenaga-tenaga untuk memimpin perguruan-perguruan ini, tidak usah kita beratkan betul, kata Dr. Bahder Djohan. Sebab ada jalan pemecah soal ini, yaitu mengambil guru-guru dari negara-negara lain seperti yang juga dilakukan oleh negara-negara baru lainnya. Memang kita harus dulu melalui phase di mana kita menjadi assistent, tetapi phase ini haruslah sependek-pendeknya untuk dapat mempersiapkan kita menjadi pemimpin-peimpinnya sendiri nanti.

Berkata tentang sifat perguruan tinggi itu, Dr. Bahder Djohan melanjutkan harapannya supaya di waktu nanti perguruan tinggi kita itu jangan menjadi tempat yang terasing dari masyarakat kita, melainkan suatu pusat dari tenaga masyarakat. Maka itu kepada mahaguru-mahagurunya sendiri dituntut supaya mereka pun turut berdiri di tengah-tengah masyarakat.

Akhirnya ia harapkan bantuan dan kerja sama dari segenap badan-badan

pemerintahan dan pers buat mengembangkan pendirian badan-badan yang hendak memajukan ilmu di samping perguruan-perguruan yang resmi.

Prof. Vreede tentang Universiteit Rakyat

Untuk menentukan gratis-garis pedoman yang tepat di masa depan bagi pendidikan Indonesia, sangat berfaedah sekalijika kita disini meninjau evolusi pendidikan yang berjlan diIndia sejak negeri tersebut telah merdeka, demikian kata Prof.F. Vreede.

Sewaktu saya dalam tahun 1936 sampai 1941 mengadakan *studiereis* di Indonesia, Mesir dan India, saya saksikan, tatkala itu India telah mengadakan dasar-dasar herorientasi nasional dalam lapangan pendidikan. Dalam hal ini saya akan mengemukakan saja dua buah badan pendidikan, di mana juga banyak putra-putra Indonesia menuntut pelajarannya, yaitu Jamia Millia Islamia di Delhi dan Vishva Bharati di Shantiniketan.

Kedua badan ini sangat menarik perhatian karena memperguakan kombinasi yang harmonis dan asli dari kebudayaan nasional dan orientasi yang universil, yang mengingatkan kami kepada Pri-Pusat Taman Siswa di Yogya; seterusnya karena mempergunakan bahasa aslinya sebagai bahasa pengantar dan karena pembentukan yang metodis dari perasaan sosial di kalangan pelajar-pelajar dan mahasiswa-mahasiswanya.

Kedua badan tersebut terkenal pula karena guru-gurunya bekerja dengan tidak mengharapkan keuntungan di bawah pimpinan ahli-ahli yang bersemangat, seperti ahli pendidik tingkatan tinggi Dr. Zakir Hussain dan Rabindranath Tagore (juga di sini kita dapat memperbandingkannya dengan pimpinan Ki Hadjar Dewantara).

Pendeknya,usaha pada kedua badan itu adalah *pendidikan* dalam arti kata yang seluas-luasnya, yang menurut Gandhi harus ditujukan supaya setiap anak dan orang dewasa sepenuhnya tumbuh dalam soal rokhani, kecerdasan dan jasmani, sebab menambahkan pengetahuan saja belum berarti pembentukan.

Yang diinginkan oleh kedua badan ini ialah mendidik pemuda-pemuda menjadi warga negara yang mempunyai kepercayaan pada diri sendiri dan inisiatip, yang efficient oleh karena lapangan pekerjaannya sejalan dengan pembawaannya, dan pendidikan modernnya dengan tradisi nasional dan kebudayaan yang baik.

Kedua badan ini, yang bertahun-tahun lamanya oleh pihak resmi dipandang enteng, sejak kemerdekaan India dengan resmi digabungkan dalam usaha pembentukan pemimpin-pemimpin onderwijs berdasarkan tujuan kemasyarakatan dan perseorangan yang patut.

Dengan demikian, kata Prof. Vreede lagi, dapatlah di India dicegahnya suatu kesalahan yang pernah diperbuat a.l. oleh Rusia yang dalam permulaannya hanya mewatasi usahanya dengan mengorganiseer pendidikan-pendidikan vak yang spesial, tetapi 15 tahun kemudian harus diakuinya, bahwa kekurangan kekayaan batin dari

angkatan barunya, yang menjadi akibat dari cara pendidikannya itu, hanya merintangi pembangunan suatu negara yang modern dan karena itu harus bertindak dengan memasukkan kembali pelajaran-pelajaran seperti sejarah, kesusasteraan dan kesenian buat mengejar kembali waktu-waktu yang telah hilang percuma itu.

Hal ini dapat dicegah di India karena contoh yang diberikan oleh kedua ahli pendidiknya tadi itu, yang dapat membawakan pendidikan nasionalnya sesuai dengan tuntutan-tuntutan masa.

Dari itu, jika Indonesia seperti India, ingin berdiri pribadi di tengah-tengah dunia internasional yang modern ini, maka mustilah pendidikan di negeri ini dengan sedar ditujukan kepada pembentukan sempurna dari "menselijke persoonlijkheid". Bahwa hal ini memang sudah disedari pula oleh ahli-ahli pendidik Indonesia sekarang, ternyata dari diadakannya dasar Pancasila untuk masyarakat itu. Dan untuk mencapai tujuan ini haruslah di samping pendidikan umum itu diadakan pembantrasan buta huruf sejalan dengan pendidikan yang positip menjadikan orang-orang dewasa, yang tidak pernah menerima pelajaran-pelajaran di sekolah dan besar jumlahnya itu, suatu bentukan baru bagi "sociale en culturele saamhorigheid". Maka itu kewajiban terutma dari Universiteit Rakyat di Indonesia, seperti di India, ialah memupuk kecerdasan rakyat. (*Antara*, 15/9/1949)

***

Lampiran 33.

KABINET MEMBICARAKAN LAPORAN KMB

Semalam kabinet bersidang, terutama untuk mendengarkan laporan dari KMB yang dibawa Letkol Daan Jahja. Laporan itu akan dibicarakan lebih lanjut dalam sidang kabinet yad. Sampai di mana pendapat Pemerintah terhadap laporan tersebut, mungkin akan ditegaskan dalam sidang itu.

Menurut Menteri Penerangan, laporan dibuat sampai tanggal 5 September. Ia berpendapat bahwa menilik tingkatan perundingan sekarang, belum nampak gambaran akan terjadi deadlock.

Partai-partai dan seretnya KMB

Mengenai seretnya perundingan di KMB kalangan partai-partai politik di Yogya menerangkan pada *Antara* sbb.:

Gatot Mangkupradja dari Dewan Partai PNI: Ketetapan tentang uni di KMB menentukan sampai berapa derajat kemerdekaan RIS selanjutnya. Uni berat yang dikehendaki Belanda berarti penjajahan kembali dengan cara baru. Lebih-lebih kalau Ratu Juliana ditentukan jadi Kepala Uni, hal itu berarti suatu "illegaal koninkrijk der Nederlanden". Gatot menghendaki supaya delegasi Republik di KMB menambah aktiviteit mendapatkan world opinions yang membenarkan tuntutan pihak Indonesia.

Mr. Kasman, Acting Ketua Umum Masyumi, mengatakan: Masyumi tidak puas dengan jalannya perundingan, dan menyetujui pidato pendahuluan Hatta untuk membicarakan pokok-pokok dan garis besar saja. Tapi ternyata kini pembicaraan justru menuju ke soal-soal detail, sehingga ia ingin bertanya pada diri sendiri: "Apakah delegasi kita tidak sudah terjebak?"

Masyumi akan memperjuangkan supaya yang menentukan haluan politik ialah Pemerintah di Yogya, agar pembicaraan di KMB jangan tergelincir. Untuk itu Menteri Penerangan perlu selalu menyelenggarakan hubungan antara Yogya dengan KMB; bukan lewat kurir yang tidak dapat dimintai keterangan, malinkan lewat pembawa instruksi dari Pemerintah Pusat.

Dengan uni ringan Belanda tidak perlu takut, sebab toh dapat diharapkan persaudaraan yang baik antara Belanda dengan RIS.

Sukarni, Ketua Dewan Partai Murba, mengatakan: Sikap Partai Murba terhadap KMB pasif, dengan demikian memberikan kesempatan kepada Pemerintah Republik dan aliran-aliran yang mengikutinya untuk menghabiskan perhitungan politik, yaitu "penerimaan kemerdekaan 100% dan tidak bersyarat dari imperialis Belanda".

Partai Murba sudah dapat mengukur janji Belanda dan puncak hasil KMB. Karena

itu Partai Murba tetap berpendirian sedia berunding dan bekerja sama dengan siapa pun asal atas dasar pengakuan kemerdekaan 100%, dan penarikan tentara asing dari Indonesia.

Mr.M. Tambunan, Ketua Parkindo, mengatakan: Pemerintah Belanda takut pada suara pihak militernya dan kaum reaksioner golongan Gerbrandy, Welter cs., sehingga kelihatan mengubah sikap progresif yang diperlihatkannya di waktu yang sudah-sudah. Dalam hati kecilnya pihak Belanda memang sampai kini tetap ingin mempertahankan kedudukan ekonominya seperti di masa silam, tapi karena desakan dari luar, terutama dari AS, mereka harus mengubah sikap itu.

Soal deadlock atau tidak dalam hal uni keuangan dan ekonomi, hal itu banyak bergantung pada sikap Amerika dan BFO. Jika Amerika mendesak, Belanda akan mundur juga, dan jika BFO tetap berpendirian seperti di Konferensi Yogya dan Jakarta, bahaya deadlock tidak akan besar. (*Antara*, 16/9/1949)

***

Lampiran 34.

FORMULE BARU BAGI UNIE INDONESIA-BELANDA
Ujudnya seperti Perjanjian Eropa Barat

Untuk menghilangkan mega-mendung yang kini meliputi KMB, baik pihak Indonesia maupun Belanda sibuk mencari satu formule baru mengenai Unie, supaya dapat diterima kedua fihak. Kabarnya pendirian Belanda mengenai Unie mendekati konsepsi Indonesia, tapi sebaliknya Belanda kini meletakkan titik berat dari tuntutan mereka pada soal keuangan-ekonomi, sehingga di lapangan ini masih sulit tercapai sesuatu persesuaian, dan kepentingan di KMB tidak menjadi hilang dengan berubahnya sikap Belanda dalam Unie.

Nederland masih tetap menghendaki pengawasan atas keuangan dan ekonomi RIS selama hutang kepada Nederland, yang di saat penyerahan kedaulatan harus dipikul oleh RIS, belum lunas. Nederland mau mengawasi deviezen RIS, sedangkan pinjaman luar negeri diinginkan melalui Nederland.

Nederland menghendaki supaya Bank Pusat Nederland terlepas dari politik Pemerintah RIS, sehingga jatuh pula ke dalam pengawasan Nederland.

Pihak Indonesia berharap keputusan tentang bentukan Unie di dalam minggu depan, sekembalinya steering-committee dari "week-end"-nya di Chateau d'Ardennes, dekat Brussel (Belgia). Perundingan penting di sana akan dihadiri juga oleh Premier Drees.

Formule baru dari fihak Indonesia mengenai Unie, ialah supaya badan-badan Unie (Kehakiman Unie, Menteri-menteri Unie dsb.) yang diusulkan oleh Belanda dan menjadikan Unie ini sebagai superstaat, dihapuskan. Kerja sama dalam Unie dilakukan dengan mengadakan sebuah lembaga permusyawaratan menteri-menteri kedua anggota Unie yang bersifat consultatief untuk membicarakan soal-soal yang menyangkut kepentingan bersama dari kedua negara. Keputusan sidang menteri-menteri itu masih harus disahkan oleh masing-masing parlemen.

Unie-hof (Kehakiman Unie) diganti dengan Unie-hof van Arbitrage (Kehakiman Unie untuk Arbitrage) yang bertindak sebagai arbiter (pemisah), apabila salah satu pihak umpamanya tidak menjalankan kewajibannya sebagai anggota Unie, seperti tercantum dalam perjanjian (verdrag).

Menurut fihak yang mengetahui, konsepsi Unie baru ini berasal dari Unie Eropa Barat, ialah perjanjian di antara negara-negara Benelux, Perancis dan Inggris untuk mengatur dasar kerja sama negara-negara tadi dalam lapangan ekonomi, kebudayaan dan juga pertahanan.

Di hari-hari yang akhir ini pihak-pihak yang bersangkutan berhubungan rapat dengan UNCI. (*Antara*, 17/9/1949)

***

Lampiran 35.

PUTUSAN-PUTUSAN KONGRES GERAKAN MUSLIMIN INDONESIA

Muktamar Gerakan Muslim Indonesia yang dilangsungkan di Bandung mulai 15 hingga 18 September y.l. dalam putusannya menyatakan penyesalan terhadap tindakan pemerintah Belanda yang telah menjatuhkan hukuman mati kepada Wolter Monginsidi dan 7 pemuda di Sidoarjo pada waktu dilakukan usaha penyelesaian politik antara bangsa Indonesia di Belanda.

Kepada delegasi Republik Indonesia dituntut supaya menentukan sikap tegas agar hukuman mati itu tidak akan terjadi lagi. Dinyatakan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada para syuhada yang telah gugur sebagai pahlawan kemerdekaan. Menuntut supaya segera dilaksanakan persetujuan Rum-Royen, a.l. dengan pembebasan tawanan politik dengan tidak bersyarat.

Gerakan Muslimin Indonesia tidak meneruskan tuntutannya terhadap adanya Kementerian Agama dalam Negara Pasundan dan juga tidak meneruskan tuntutan untuk mendapatkan perwakilan dalam Parlemen Sementara Pasundan. GMI yang ingin mengemukakan suara umat Islam belum dapat menentukan sikapnya terhadap negara-negara yang dibentuk di bekas daerah Republik Indonesia, selama "Staat van Oorlog en Beleg" masih berlaku, di mana kemerdekaan bersuara sangat terbatas.

GMI belum akan memasuki bdan-badan perwakilan rakyat di negara-negara tersebut di atas. Menuntut kepada yang berwajib supaya dasar-dasar demokrasi dapat diwujudkan a.l. dengan diperbolehkan berdirinya partai-partai apa pun juga. Di samping itu dituntut pula dicabutnya "Staat van Oorlog en Beleg". Untuk mewujudkan susunan perjuangan umat Islam, GMI berhasrat supaya dalam Kongres Muslimin Indonesia yang akan dilangsungkan dalam bulan November 1949 dapat terbentuk pemusatan perjuangan Umat Islam Indonesia.

Putusan yang ditujukan ke dalam a.l.: Gerakan Muslimin Indonesia ditetapkan menjadi gerakan politik. Dalam tingkatan suasana sekarang, usaha gerakan ditujukan kepada memperkuat susunan organisasi, penyusunan kader Islam, mempertinggi kecerdasan politik dalam kalangan anggota gerakan. Susunan Pengurus Pusat Gerakan Muslimin Indonesia yang dipilih oleh muktamar (kongres) tersebut ialah: ketua tetap Kyai Haji Abdulhalim, wakil ketua I Djaja Rachmat, wakil ketua II Achsien, wakil ketua III M. Isa Anshari, dan sebagai sekretaris Wirasandjaja.

Natsir dalam rapat umum

Dalam rapat umum yang diadakan oleh Gerakan Muslimin Indonesia hari Minggu

18 September, bekas Menteri Penerangan Natsir menganjurkan supaya dalam melakukan perjuangan janganlah kita terlalu menaruh harapan yang bukan-bukan, supaya kita tidak merasa kecewa di kelak kemudian hari. Kata Natsir, kemerdekaan itu adalah tanggungjawab dan bukan kegembiraan yang membikin tidur sehingga lalai akan kewajiban-kewajiban selanjutnya.

Dalam rapat umum itu berbicara pula Harsono Tjokroaminoto dari PB PSII. (*Antara*, 19/9/1949)

***

Lampiran 36.

INDONESIA DAN PEKERJAAN-BERSAMA INTERNASIONAL
Pendapat Drs. Tan Goan Po

"Penanaman kapital Barat di Asia Tenggara dapat mempercepat perkembangannya dan selanjutnya jadi sumber penghasilan aditionil bagi negara-negara Barat. Bila hasil konferensi Meja Bundar itu sedemikian rupa, sehingga perkembangan Indonesia diperlambat oleh kewajiban-kewajiban keuangan yang sangat berat, dengan sendirinya Unie Indonesia-Belanda itu tidak berfundamen yang kuat," demikian *Drs. Tan Goan Po* dalam causerienya kemarin di ruangan Perguruan Rakyat (Salemba) Jakarta yang diusahakan oleh Perkumpulan Memajukan Ilmu & Kebudayaan.

Membicarakan Indonesia dan Pekerjaan-Bersama Internasional sebagai acara dalam causerienya ini, Drs.Tan Goan Po berkata seterusnya: Karena meningkatnya derajat kemakmuran di Asia Tenggara tidak tetap, keadaan pasar perniagaan di Asia Tenggara ini dilihat dari sudut ekonomi hilang untuk Eropah. Rencana Marshall yang maksudnya meninggikan kekuatan produksi negara-negara di Eropah dengan tidak menghiraukan keadaan di negara-negara yang ada di Asia Tenggara tidak mengingat bahwa sukses hanya tercapai jika tidak saja sektor yang berproduksi disokong tetapi juga sektor yang hanya memakai saja (consumptief)

Kelepasan dari keadaan ini hanya tercapai bila diadakan perangsangan (stimulans) di antara tenaga-tenaga produktif yang ada di Asia Tenggara, sehingga keseimbangan yang telah patah dibetulkan kembali. Untuk itu industrialisasi Asia Tenggara adalah suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan yang primair dan murah dengan barang-bartang industri, di samping mempertinggi hasil pertanian. Menaiknya tenaga pembeli yang terjadi oleh keadan tersebut di atas akan menjadikan pasar perniagaan ini sanggup menerima produksi Eropah. Dengan begitu akan tercapailah juga permulaannya Pekerjaan-Bersama Internasional yang bercorak dan berbentuk lebih tinggi dan lebih baik.

Kata beliau lagi: Penanaman kapital Barat di Asia Tenggara dapat mempercepat perkembangannya dan selanjutnya jadi sumber penghasilan aditionil (tambahan) untuk negara-negara Barat. Dalam keadaan itu Amerika akan mengambil bagian yang besar sekali. Sebagai sisi ketiga dalam segi tiga Pekerjaan-Bersama Internasional, ia dapat mencukupi Eropah maupun Asia Tenggara dengan bahan-bahan kapital yang diperlukan yang banyak sekali padanya. Indonesia ada dalam keadaan yang sama seperti negara-negara lainya di Asia Tenggara. Karena bermacam-macam faktor Indonesia dalam pada itu terpaksalah bekerja sama dengan Nederland.

Indonesia dengan kepentingan kehidupan nasionalnya

Untuk industri nasional Indonesia, kata Tan Goan Po selanjutnya, adalah seharusnya dasarnya kerajinan-rumah (huisindustrie) nasional. Dan setiap pinjaman luar negeri yang kita adakan dalam prinsipnya tidak boleh dipakai untuk merangsang (stimuleren) hak-hak milik luar negeri, tapi disediakan untuk: a. Kepentingan-kepentingan umum nasional, b. pertanian rakyat nasional sebagai dasar untuk kemakmuran nasional, dan c. kepentingan-kepentingan industri nasional. Hal-hal ini sangat pentingnya untuk merupakan perlawanan keseimbangan terhadap pengaruh dunia luar.

Sekarang pada Konferensi Meja Bundar tekanan berpindah dari politik ke suasana ekonomi-keuangan. Bila hasil itu sedemikian rupa, sehingga perkembangan Indonesia diperlambat oleh kewajiban-kewajiban keuangan yang sangat berat, dengan sendirinya Unie Indonesia-Belanda itu tidak berfundamen yang kuat.

Berkata tentang keseimbangan sosial dalam suatu negara demokrasi, Drs. Tan menerangkan akhirnya, bahwa pekerjaan bersama antara golongan yang bercorak nasional di Indonesia tidak saja suatu keharusan hidup untuk Indonesia, tetapi penting juga bagi semua golongan. (*Antara*, 19/9/1949)

***

Lampiran 37.

YAMIN PIDATO DI MUKA MASYARAKAT INDONESIA DI DEN HAAG

Wartawan kita Sukrisno mengawatkan:

Dalam rapat yang diadakan oleh Perhimpunan Indonesia, Rukun Pelajar Indonesia, Perserikatan Indonesia, Perkumpulan Islam, Persatuan Penduduk Indonesia dan Verbond Indonesische Burgers pada tanggal 18/9 y.l. Penasihat Delegasi Republik Mr. Mohammad Yamin yang duduk juga sebagai anggota Komisi Ketatanegaraan menyatakan, bahwa setelah diproklamirkan kemerdekaan tanggal 17 Agustus1945, Republik Indonesia merdeka dan berdaulat.

RTC tidak menerima, melainkan terutama mengatur kedaulatan seluruh Indonesia. RTC membuka pintu bagi tujuan proklamasi. Pemerintah Federal Sementara dibentuk hanya sekedar untuk menerima kedaulatan dan menjaga kemerdekaan. Di konstituante akan terbentuklah negara hukum Indonesia Merdeka yang berkonstitusi menurut keinginan rakyat yang sudah merdeka berdaulat. Hal itu terjadi di tahun 1950, dan Yamin yakin di tahun itu akan ada stabiliteit di negara dan masyarakat berdasarkan demokrasi di segala lapangan.

Stabiliteit itu dijamin karena bersama membangun sesudah penyerahan kedaulat-an dan membangun itu menjadi program bersama bagi seluruh Indonesia. Keadaan Indonesia tahun 1950 penuh kegiatan di segala lapangan sebagai anggota PBB dan sebagai anggota suatu blok politik istimewa untuk mengadakan balance of power di dunia dengan tidak melupakan geopolitiek Indonesia di Asia Tenggara dan perwujudan kemerdekaan yang telah tercapai.

Tentang RTC dikatakan oleh Yamin, sampai sekarang belum ada penukaran working-paper, tapi baru oral notes, dan sudah tegaslah bagaimana pendirian Indonesia-Belanda. Dalam soal ketatanegaraan, ekonomi dan keuangan perbedaan paham agak besar. Republik dan BFO bersatu dan tetap pada pendirian dan goodwill menyelesaikan sengketa. Selanjutnya Yamin mengingatkan kepada kegagalan dalam lapang politik dari Belanda setelah menjalankan Aksi Militer kedua yang menjadi bumerang bagi Belanda.

Pemerintah Belanda menelan satu persatu segala ucapannya, mengakui kembali dan mengembalikan Pemerintah Republik ke Yogyakarta.

Di RTC Indonesia berdiri atas persatuan dan tuntutan pergerakan kemerdekaan, sedang Belanda atas opportunisme dan bersifat “in matters of commerce the fault of the Dutch is giving too little and asking too much”, kata Yamin.

Menurut dia, nasib Indonesia tidak tergantung pada RTC. Bagaimana juga akhirnya Indonesia akan menang, dan terserah kepada Belanda apakah berangkat dari Indonesia

dengan muka manis atau masam. Kalau manis, harus menyesuaikan diri dengan pendirian Indonesia. Gerakan kemerdekaan rakyat akhirnya akan menang, dan Drees sendiri membilang, kegagalan RTC akan berakibat yang tak terkira. Demikian Yamin.

Rapat tersebut dihadiri oleh 400 pelajar dan kaum buruh Indonesia di Nederland. Berbicara pula Mr. Ali Sastroamidjojo tentang prakteknya partai-pasrtai di Republik, dan Mononutu tentang pergerakan kebangsaan di NIT. (*Antara*, 20/9/1949)

***

Lampiran 38.

INDONESIA PENTING ARTINYA BAGI DUNIA

Keterangan Dr. Sumitro Djojohadikusumo

Dalam pidato radio yang diucapkan oleh Dr. Sumitro Djojohadikusumo, anggota delegasi Republik ke KMB hari Senin malam dinyatakan, bahwa karena faktor-faktor yang nyata dapat ditegaskan di depan forum dunia, bahwa Indonesia penting artinya bagi dunia. Hingga kini orang memandang Indonesia sebagai suatu negeri yang menghasilkan bahan mentah, yang nantinya juga akan perlu dan diperlukan oleh Eropa Barat. Karena faktor inilah maka industrialisasi dan peninggian tingkat produksi akan penting artinya bagi Indonesia.

Pidato radio di atas itu diucapkan oleh Dr. Sumitro melalui stasiun radio Nederland (Hilversum).

Kata Dr. Sumitro selanjutnya, hendaknya kita dapat memusatkan fikiran dan tenaga kita pada kemungkinan-kemungkinan produksi baru yang akhirnya akan dapat mempertinggi susunan ekonomi Indonesia. Dari sumber-sumber inilah akan didapatkan rencana ekonomis yang akan dapat membelanjai project penting bagi ketinggian mutu ekonomi seluruhnya.

Indonesia adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan begitu saja dari AsiaTenggara, terutama dalam lapang ekonomi. Ini mempunyai arti besar, bukan saja untuk Asia Tenggara sendiri, tetapi juga untuk Eropa Barat terutama—juga Amerika Serikat, yang akan mendapatkan bahan-bahan penting yang dibutuhkan di Asia Tenggara, juga di Indonesia ini.

Dengan adanya susunan ekonomi di Eropa sekarang, Eropa Barat insyaf, bahwa hanya dengan bantuan rencana Marshall saja mereka tidak akan dapat mengatasi keadaan di dalam negeri. Eropa tidak cukup dapat mengadakan stabilisasi di dalam negeri dengan hanya menjagakan kepada bantuan Marshall terutama untuk jangka lama.

Krisis yang kini sedang mengancam di Eropa Barat terutama adalah disebabkan oleh keinginan pemulihan keadaan produksi dan di samping itu mencari daerah baru untuk pasar barang-barang eksport mereka. Juga mendapatkan daerah baru yang dapat memberi bahan mentah yang tidak tergantung pada dollar. Karena inilah maka kedudukan Asia Tenggara menjadi penting. Dan pada khususnya bagi negeri-negeri di Asia Tenggara ini menjadi masaalah penting mengenai soal penyempurnaan: industrialisasi, pertambangan, pengairan dan pertanian dll. yang semuanya ini harus dihadapi oleh Asia Tenggara. Dengan demikian diminta planning yang regionaal dan dibutuhkan alat-alat penting dalam pertanian, pertambangan dll. dan juga modal untuk mengusahakannya.

Pada dasarnya ekonomi di Asia Tenggara dan di Indonesia khususnya ditujukan untuk mempertinggi derajat penghidupan rakyat, karena ini penting juga bagi stabiliteit ekonomi dunia. Masuknya modal asing ke Asia Tenggara sebagai pada permulaan abad ke-19 tidak akan terjadi lagi. Karena dengan itu akan timbul ekonomi kolonialisme lagi.

Dengan mempertinggi derajat produksi di Asia Tenggara ini adalah berarti bahwa modal akan dialirkan terutama untuk mempertinggi derajat penghidupan rakyat. Dan lakon baru bagi modal asing ini akan lebih menguntungkan bagi mereka yang mempunyai modal. Demikian pidato radio yang diucapkan Dr. Sumitro Djojohadikusumo. (*Antara*, 20/9/1949)

***

Lampiran 39.

SUARA PERS DI JAKARTA TENTANG DEVALUASI

Devaluasi pound-sterling dan akibatnya bagi Indonesia menjadi pokok soal penting bagi induk karangan harian-harian Indonesia dan Tionghoa di Jakarta. Harian-harian Belanda di Jakarta (Nieuwsgier, Het Dagblad dan Bataviaasch Nieuwsblad) hingga Selasa sore belum ada yang memberikan komentarnya mengenai devaluasi itu. Di bawah ini beberapa induk karangan yang ditulis hingga Selasa sore, jadi sebelum diucapkan pidato Drs.A. Oudt dari pemerintahan Belanda di Indonesia.

Harian *Pedoman* menulis: Mengingat rapatnya hubungan ekonomi Inggeris dengan Nederland, Nederland pun sukar akan dapat mempertahankan harga mata uangnya, hingga akan terpaksa menurunkan pula harga mata uangnya. Dalam hubungan Nederland-Indonesia yang sekarang ini, Indonesia pun tentu akan menurunkan pula harga mata uangnya.

Keadaan demikian itu kita takut akan mudah mengakibatkan kacaunya perekonomian negeri, jika dari pihak yang berwajib tidak diadakan penerangan dan/atau pengawasan yang baik. Kaum spekulan-pemegang-uang-banyak sudah mulai kelihatan menghamburkan uangnya di pasar gelap, karena takut nanti tidak bisa beli sebanyak itu dengan uangnya. Dan di samping itu para pedagang menyembunyikan barangnya menunggu baiknya lagi harga-harga. Proses demikian akan mengakibatkan membubungnya harga-harga pasar.

Dalam keadaan demikian yang memegang kekuasaan wajib memberikan penerangan yang sebaiknya tentang arti devaluasi, supaya rakyat agak bisa ditenteramkan dan para spekulan agak bisa direm dalam kerjanya yang busuk itu. Di samping itu hendaknya yang berwajib menetapkan serta pegang teguh harga-harga maksimum dan harus dijaga supaya para spekulan jangan sampai menimbun barang-barangnya.

Harian *Keng Po* dalam induk karangannya menyatakan tidak dapat menyetujui dengan ucapan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan ad interim NIT Drs. Tan Tek Heng yang menyatakan, bahwa "Indonesia akan memetik buahnya devaluasi ini dan keuntungannya akan bertambah besar, apabila Indonesia berhasil mempertahankan tingkatan harga-harga di dalam negeri".

Kata *Keng Po*, tingkatan harga-harga di dalam negeri tidak mungkin dipertahankan. Hal ini ternyata dalam dua minggu yang akhir ini. Tiap devaluasi, jika ada keuntungannya, pada hakekatnya merupakan semacam "tipu-daya" terhadap rakyat dan kaum buruh.

Dengan menurunkan kurs rupiah, memang betul harga-harga barang export menjadi lebih menguntungkan bagi kaum exporteurs, sehingga menambah jumlah export

itu, tetapi keuntungan itu terdapat oleh karena upah-upah tidak naik bersamaan dan sama cepatnya. Jadi keuntungan sementara itu sebenarnya terdapat dari penurunan upah yang riil.

Keng Po menyatakan keyakinannya, bahwa di Indonesia harus diadakan perubahan dan penyesuaian harga dan upah secara umum dalam tempo secepat mungkin. Perkumpulan-perkumpulan buruh harus beraksi, mulai menuntut kenaikan umum yang sesuai dan berimbang dengan perubahan-perubahan haibat dalam waktu belakangan ini. Dalam menindas upah-upah buruh, janganlah dilupakan, bahwa efficiency pekerjaan tidak mengijinkan meliwatkan suatu minimum. Membayar gajih murah kepada buruh yang sakit hongeroedeem bukan murah, tetapi sebaliknya mahal. Belum lagi dipertimbangkan akibatnya sosial yang sangat jelek, seperti: menambah kriminaliteit, membahayakan keamanan, menambah bahaya penyakit epidemi, merosotnya moraal dll. Demikian *Keng Po*.

Harian *Sin Po* dalam tulisannya menyatakan, bahwa pada permulaan umumnya sangat dikuatirkan perubahan uang Belanda menjadi uang Indonesia, jika kedaulatan telah diserahkan kepada RIS. Terutama para pedagang sangat waspada terhadap kemungkinan ini, yang pasti akan datang tetapi tidak tahu, kapan. Tapi apa mau dikata: Belanda menaikkan accijns dan harga berbagai barang. Akibatnya harga barang-barang lain ikut naik.

Devaluasi pound-sterling menyeret juga turun mata keuangan negeri-negeri lain. Para pedagang umumnya di Indonesia tidak terpukul oleh keadaan itu, malahan jadi untung. Ini disebabkan persediaan barang-barang mereka yang dengan sendirinya naik pula harganya. Tapi buruh akan merasakan ini semua lebih heibat. Demikian *Sin Po*. (*Antara*, 21/9/1949)

***

Lampiran 40.

PERSETUJUAN SEMENTARA NAMEN
Keterangan Hatta Sangat Tiba-tiba

Di pertemuan pers pada tanggal 20/9 sore, Hatta membuka tabir perundingan informeel di Namen. Dikatakannya, prinsipnya tercapai persetujuan tentang konferensi menteri-menteri anggota Unie sebagai dua negara merdeka dan berdaulat. Uniehof, yang hanya akan bertindak sebagai arbiter di perselisihan yuridis di antara kedua anggota Unie, masih dalam pembicaraan. Mengenai functie Mahkota belum terdapat kecocokan. Mengenai kedudukan Mahkota ini Hatta menerangkan tidak mau mendahuluinya.

Soal keuangan-ekonomi dan "gewichtige belangen"

Dikatakannya, untuk mempercepat KMB, ketua-ketua komisi keuangan-ekonomi dari ketiga delegasi pada tanggal 23/9 akan didengar oleh Steering Committee dan melaporkan kepadanya hal-hal yang sudah didapat kecocokan dan perbedaan-perbedaan paham yang masih ada mengenai soal-soal financieel-ekonomis.

Steering Committee pada tanggal 20/9 memutuskan bukan saja mendengar wakil-wakil "gewichtige belangen" tapi juga golongan-golongan yang berlainan pendapatnya dari mereka.

Kesulitan soal Mahkota

Dari kalangan KMB yang mengetahui *Antara* mendapat kabar, bahwa kesulitan yang masih ada mengenai functie Mahkota, ialah yang mengenai "symbolise handeling" Mahkota. Belanda menghendaki Mahkota bukan sekedar symbool, tapi juga bisa melakukan "symbolise handeling". Umpamanya putusan-putusan konferensi menteri-menteri Unie partners setelah disyahkan oleh parlemen masing-masing harus dilihat dulu oleh Mahkota sebelum berlaku. *Kini yang masih merupakan buah persengketan ialah, dalam hal apa "symbolise handeling" itu dijalankan.*

Soal Uniehof

Mengenai "Uniehof van arbitrage", yang belum tercapai persetujuan hanya susun-annya. Di samping konferensi menteri-menteri tersebut yang bersifat consultatief, yang putusannya bisa ditiadakan oleh parlemen masing-masing, utusan-utusan parlemen dan Unie partners dengan sukarela bisa mengadakan kontak di waktu-waktu tertentu bila dipandang perlu oleh kedua pihak untuk membincangkan soal-soal mengenai kepentingan kedua negara.

Pendapat peninjau netral

Peninjau "politik netral" berpendapat, bahwa dalam tercapainya persetujuan sementara di Namen, Cochran mempunyai bagian penting sekali. Diduga ia sudah mempunyai rencana sendiri tentang seluruh masalah penyelesaian pertikaian Indonesia-Belanda yang ia bisa kemukakan kepada pihak-pihak bersangkutan, baik dengan lisan maupun tertulis.

Diminta sikap lebih tegas

Di kalangan delegasi Republik ada beberapa anggota dan penasehat yang tidak dapat menunjang *"Persetujuan Sementara Namen"*. Juga beberapa pemimpin BFO terkemuka merasa kecewa. Di kalangan mereka belakangan ini kentara perasaan kurang puas dengan jalannya perundingan. Mereka mengharapkan sikap lebih tegas dari delegasi Republik.

Pertemuan Hatta-pers menimbulkan kesan, bahwa diadakannya sangat tiba-tiba. Wartawan Indonesia hanya diberitahukan tentang pertemuan itu 5 menit sebelum dimulai. Jarak Den Haag (tempat tinggal wartawan-wartawan) dan Scheveningen tempat tinggal delegasi Republik 5 km, sehingga wartawan-wartawan Indonesia banyak tidak hadir atau terlambat sekali. Konferensi pers itu diadakan sebelum Persetujuan Sementara Namen dibicarakan di rapat delegasi pleno Republik yang direncanakan tanggal 21/9. Wartawan-wartawan Belanda dan luar negeri banyak hadir juga dari Den Haag karena diberitahukan terlebih dulu. (*Antara*, 22/9/1949)

***

Lampiran 41.

STATEMENT DELEGASI REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA

Berhubung dengan keterangan yang diberikan oleh pihak Belanda kepada *Aneta*, termuat dalam berita *Aneta* tgl. 20 September 1949, di mana seakan-akan digambarkan, bahwa 50 orang KL dan 300 orang dari KNIL yang *hilang* (*vermisten*) adalah jadi *tawanan perang* Republik, maka delegasi Republik Indonesia di Jakarta dalam statementnya semalam mengemukakan dengan tegas, bahwa gambaran itu adalah *tidak benar*.

Delegasi Republik menyesalkan publikasi itu oleh karena ini menyebabkan kesan seakan-akan delegasi Republik dituduh lalai oleh Belanda, sedangkan delegasi Republik dan delegasi Belanda sudah saling bertukar keterangan dalam beberapa perundingan informeel, hal mana memang belum diumumkan di dalam pers.

Sebenarnya dari antara orang-orang yang hilang itu, mungkin ada yang sudah mati. Dan tentang mereka yang masih hidup, istimewa dari KL, sudah diberi kabar oleh delegasi Republik kepada delegasi Belanda di mana dan berapa yang ada ditawan oleh Republik. Malahan 6 orang dari KL di Bobotsari, Purwokerto, dan buat 7 orang di Aceh sudah diperintahkan supaya segera dilepaskan, dan diserahkan pada Belanda.

Kesukaran-kesukaran perhubungan antara pasukan-pasukan Republik di pelbagai daerah menyebabkan pula sukarnya segera mendapat keterangan tegas tentang masih adanya tawanan-tawanan di daerah-daerah. Tetapi delegasi Republik senantiasa berikhtiar penuh buat selekas mungkin menambah keterangan-keterangan yang ada padanya, dan menyerahkan tawanan itu selekas mungkin kepada Belanda pada tempat-tempat yang tertentu.

Delegasi Republik berpendapat, bahwa nasib tawanan politik umumnya demikian pentingnya, sehingga segala yang harus diperbuat, diikhtiarkan sepenuhnya.

Tentang beberapa “ribu” bangsa Tionghoa yang seakan-akan ditahan oleh gerombolan-gerombolan Republik, sudah beberapa kali dikemukakan, bahwa mereka tidak ditahan, dan jumlahnya juga tidak begitu banyak.

Di Jawa Timur sekarang ada usaha, antara TNI dan Chung Hua Chung Hui buat mengembalikan bangsa Tionghoa ke tempatnya masing-masing. Juga dalam hal ini soal pengangkutanlah yang menjadi halangan besar buat lancarnya pengembalian itu. Lain daripada itu berpuluh-puluh bangsa Tionghoa belum mau kembali, karena mereka sudah dapat mencari nafkah di tempat mereka berada sekarang.

Sebagai tambahan diulangi lagi, bahwa baik Mr. Wongsonegoro, Menteri Dalam Negeri, maupun Kolonel Sungkono, Komandan Jawa Timur, sudah memerintahkan memberi “faciliteiten” kepada segala bangsa Tionghoa yang akan berangkat ke daerah Belanda.

Tentang peristiwa almarhum *Monginsidi*, yang juga dibawa-bawa oleh *zegsman Aneta*, delegasi Republik Indonesia tetap menyesalkan terlangsungnya hukuman mati itu. Sekalipun dalam "perundingan informeel" sudah mulai pendekatan "pendirian" tentang artinya "tawanan politik", delegasi Republik selalu berpegang kepada dasar yang terletak pada keterangan bersama ("joint proclamation") artikel 1, 2 dan 3, dan dalam suasana "goodwill" Rum Royen Statement.

Selain daripada itu, menurut delegasi Republik, hendaknya dalam waktu RTC masih berjalan, segala hukuman mati diundurkan, dan hendaknya pula segala vonnis-vonnis itu ditinjau kembali, sebab segala faktor-faktor psychologis dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia seharusnya diteliti dengan seksama.

Mungkin sekali dengan peninjauan yang luas itu bukanlah hukuman mati yang akan dijatuhkan.

Dalam dasarnya, delegasi Republik Indonesia juga tidak sudi memperlindungi penjahat-perampok-pembunuh (*selanjutnya tak terbaca, KST*).

Tetapi dalam soal tawanan politik, delegasi Republik berpegang kepada pedoman, bahwa pada hakekatnya segala tawanan yang di dalam tangan Belanda sebagai akibat politik-conflikt Indonesia-Belanda, adalah umumnya di luar arti penjahat biasa.

Sungguhpun begitu, ditegaskan sekali lagi, bahwa pendirian delegasi Belanda dan delegasi Republik dalam perundingan informeel sudah mulai saling mendekati, sehingga sudah nampak beberapa kemajuan. Keterangan-keterangan tegas baru bisa diberikan sesudah tercapai hasil pasti dalam perundingan formeel. (*Antara*, 23/9/1949)

***

Lampiran 42.

AZAS PERSETUJUAN TERCAPAI
Mengenai Uniestatuut

Steering-committee menerima laporan dari panitia pekerja komisi ketatanegaraan yang berkewajiban menyiapkan uniestatuut, bahwa sebagia hasil pembicaraan informeel setelah steering-committee kembali dari Namen di antara ketiga delegasi, dalam azasnya telah tercapai persetujuan mengenai uniestatuut, yaitu tentang: *pertama,* sifat uniestatuut; *kedua,* kedudukan dan functie uniehoofd; *ketiga,* kewajiban dan susunan konferensi menteri-menteri anggota unie yang akan diadakan di waktu-waktu tertentu; *keempat,* kewajiban dan susunan uniehof-arbitrage; *kelima,* hubungan baik dan kerja sama di waktu-waktu tertentu antara parlemen unie-partners.

Laporan ini disampaikan di rapat ke-8 steering-committee pada tgl. 23/9 yang diketuai oleh Hatta sebagai ketua minggu ini dan dihadiri oleh UNCI.

Di rapatnya yang lalu steering-committee memutuskan meninjau pekerjaan salah satu dari kelima komisi yang didirikannya berdasarkan laporan yang dimajukan komisi bersangkutan, dengan maksud mempercepat KMB.

Komisi keuangan-ekonomi memajukan laporan panjang yang akan dibicarakan dalam rapat steering-committee yad., dihadiri juga oleh ketua-ketua keempat subkomisi dari komisi keuangan-ekonomi.

Perlu diformeelkan

Ketegangan dalam pembicaraan mengenai unie sudah liwat sejak Indonesia-Belanda pada tgl. 22/9 mendapat kecocokan bukan saja tentang soal-soal pokok, tetapi juga formuleeringnya, umpamanya mengenai kedudukan kepala unie, konferensi menteri-menteri unie di waktu-waktu tertentu yang bersifat konsultatif, dan uniehof van arbitrage yang akan memutuskan pertentangan yuridis yang dimajukan salah satu anggota unie kepada yang lain.

Menurut kecocokan baru itu yang masih harus diformeelkan di rapat steering-committee ialah: kepala unie hanya sebagai penglaksanaan semangat kerja sama sukarela yang kekal di antara Indonesia-Belanda dan tidak berkedudukan staatsrechtelijk; hakim-hakim uniehof diangkat oleh kepala negara masing-masing, dan harus melakukan dua sumpah, yaitu “setia kepada kepala negaranya masing-masing” dan “adil dan tak berpihak dalam melakukan kewajibannya”. Sumpah belakangan dilakukan terhadap kepala unie dengan Qur’an atau Bijbel yang merupakan perbuatan ceremonie semata-mata.

Kesatuan terpelihara

Dengan putusan-putusan tersebut di atas terjadilah beberapa perubahan dalam konsepsi Namen, yang tidak dapat disetujui seluruhnya oleh sebagian pihak Indonesia di KMB. Juga kesulitan intern delegasi Republik dengan ini dapat diatasi, sehingga terpeliharalah kesatuannya.

Soal penting yang dibicarakan di Namen yang tidak dapat diterima oleh pihak Indonesia ialah: putusan yang diambil dalam kontak perlementer kedua anggota unie harus "geconstateerd" oleh kepala unie sebelum diumumkan, yang disebut sebagai "symbolische handeling". Pasal ini sekarang ditiadakan.

Pihak Belanda, terutama persnya, ribut menuduh Hatta mau menarik diri dari putusan Namen, yang menurut pihak Indonesia baru informasi dan tidak mengikat. Maksud Namen pun hanya mengadakan pembicaraan informeel.

Kecocokan dalam handelspolitiek

Selanjutnya didapat kabar, dalam pembicaraan keuangan-ekonomis Indonesia-Belanda mendapat kecocokan tentang handelspolitiek. Kedua negara akan kerja sama dalam bentuk "gecoordineerd samengaan" dalam perdagangan dengan negeri-negeri Eropah dengan tidak mengurangi kebebasan bertindak kedua anggota unie sebagai negara merdeka dan berdaulat sehingga keputusan terakhir terletak di tangan masing-masing negara. "Gecoordineerd samengaan" ini hanya berlaku selama tahun pertama sesudah penyerahan kedaulatan. (*Antara*, 24/9/1949)

***

Lampiran 43.

MEMERIKSA KEMUNGKINAN MEMBANTU "NEGARA-NEGARA TERBELAKANG"

Satu dari Maksud Kedatangan Anggota-anggota Kongres USA

Lima orang anggota Kongres Amerika, M.G. Burnside, Charles B. Deane, Walter B. Huber, R.Walter Riehlman, Harold O. Lovre yang kemarin dulu tiba di Jakarta dalam melakukan perjalanan penyelidikan di Timur Jauh kemarin jam 17.30 telah mengadakan konferensi pers dengan wartawan-wartawan dalam dan luar negeri di Jakarta, bertempat di Hotel des Indes.

Dalam konferensi pers yang lebih kurang setengah jam lamanya kelima anggota Kongres ini telah berhasil tidak mengeluarkan pendapat mereka tentang sesuatu soal yang ditanyakan oleh para wartawan pada mereka.

Ditanyakan tentang bantuan Amerika terhadap kaum nasionalis di Timur Jauh, Huber, Ketua Komisi, mengatakan, bahwa adalah maksud Amerika untuk membantu semua tenaga demokrasi di bagian dunia ini.

Ketika ditanya, apakah menurut pikirannya Pemerintah Ho Chi Minh di Indocina termasuk dalam term "tenaga-tenaga demokrasi" ini, Huber menjawab, bahwa itu tidak bisa dijawabnya, karena dia belum ke Indocina dan tidak mempunyai keterangan-keterangan.

Ditanya pula, apakah menurut pikirannya Pemerintah Kuomintang di Tiongkok juga termasuk dalam "tenaga-tenaga demokrasi" yang dikatakannya, Huber berkata sambil tersenyum: "That is a 46 dollar question." Dalam bahasa Si Dul artinya: "Berat deh menjawabnya."

Seorang wartawan menanyakan, apakah komisi anggota Kongres ini juga telah melakukan pemeriksaan tentang pemakaian barang-barang militer Amerika Serikat di Indocina dan Indonesia, dari tank hingga makanan, anggota Kongres itu menjawab bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang itu. Mereka pun mengatakan tidak tahu apa pun tentang berita-berita yang menyebutkan bahwa Amerika Serikat berhasrat mendapatkan pangkalan marine Surabaya.

"Kami adalah sekumpulan anggota Kongres yang amat sedikit mendapat kabar," kata mereka tertawa.

Ditanya apakah Amerika Serikat telah menggunakan uangnya dengan bijaksana di Timur Jauh dan Asia, mereka menjawab bahwa inilah yang sedang mereka periksa, dan untuk mendapat pemandangan yang terakhir mereka lebih dulu harus mengnalisir keterangan-keterangan yang telah mereka dapat.

Seorang wartawan bertanya, apakah anggota-anggota Kongres itu mengetahui

bahwa di sini ada k.l. 300 mobil Amerika yang disimpan oleh Belanda dan tidak diberikan untuk dipakai publik, dijawab bahwa hal itu tidak mereka ketahui, tetapi mereka melihat di jalan-jalan amat banyak mobil baru buatan Amerika.

Selanjutnya mereka menerangkan bahwa perjalanan mereka ke Yogyakarta telah direncanakan selagi mereka masih berada di Amerika. Pertanyaan-pertanyaan mengenai kunjungan mereka ke Indonesia ini belum dapat mereka jawab, karena mereka belum mendapat cukup keterangan. "Tetapi kita akan mendengar keterangan dari semua pihak yang ada di sini," kata ketua Komisi Kongres ini.

Dapat disebutkan bahwa kewajiban Komisi Kongres ini ialah:

1. Memeriksa pemakaian uang oleh Pemerintah amerika Serikat.
2. Memeriksa seluruh soal pekerjaan Pemerintah Amerika Serikat di luar negeri.
3. Memeriksa guna Pakta Pasifik, dan kemungkinan-kemungkinan ekonomi dan perdagangan. (*Antara*, 28/9/1949)

***

Lampiran 44.

SEKITAR PERSELISIHAN PAHAM DI KMB

Mengenai usul-usul Belanda dalam lapangan keuangan-ekonomi (kontrole atasnya di masa RIS), pihak Indonesia berpendapat bahwa itu, kalau diterima, akan berarti senantiasa adanya kekuasaan veto dari pihak Belanda terhadap tiap-tiap aksi pemerintah baru di Indonesia yang berkehendak membangun ekonomi nasionalnya. Pendirian umum dari pihak Indonesia ialah bahwa kemerdekaan ekonomi adalah soal terpenting dari konferensi ini, dan semboyan-semboyan yang muluk-muluk dalam lapangan politik yang tampak di luar hanya kecil sekali artinya, kalau negara baru itu tidak berkuasa membentuk sendiri ekonominya untuk kepentingan sendiri.

Pihak Indonesia bersedia menerima dan menghormati semua perjanjian-perjanjian yang telah diadakan oleh Pemerintah Belandan untuk kepentingan Indonesia. Ini boleh dikatakan mudah, karena boleh dikatakan semua perjanjian itu diadakan sebelum perang.

Mengenai sumber-sumber minyak dan mineral pihak Indonesia menghendaki supaya dapat meninjau kembali perjanjian-perjanjiannya. Dalam soal perkapalan dan perdagangan, pihak Indonesia setuju untuk memperlangsung perhubungan dengan Belanda. Mereka pun setuju selama waktu yang ditetapkan mengadakan politik dagang dengan negara-negara Eropah lainnya dengan meminta pertimbangan-pertimbangan Belanda.

Sampai sekarang pihak Belanda tidak mau mundur dari pendiriannya untuk memelihara dan membela kepentingan-kepentingan mereka di Indonesia. Oleh karena itu kalau steering committee tidak dapat mencari jalan penyelesaian dengan memperdekatkan perselisihan kedua pihak, maka rupa-rupanya sukar untuk menghindari deadlock.

Delegasi-delegasi Indonesia merasa perlu supaya perundingan dipercepat. Setidak-tidaknya beberapa anggota delegasi Indonesia makin menjadi keras kepala, dan menurut kabar-kabar yang telah mereka terima dari Jakarta dan Yogyakarta, juga rakyat di tanah air mulai gelisah. Mereka tidak dengan terang-terangan menuduh Belanda memperlambat kemajuan perundingan, tetapi mereka jengkel karena dalam usaha bagi Indonesia memperoleh kedaulatannya ini Belanda memajukan tuntutan yang tidak semestinya dengan menghendaki veto atau urusan Indonesia sendiri.

Pihak Indonesia acap kali menunjukkan contoh India dan memberi sugesti, kalau Belanda suka menunjukkan sikap yang besar itu adalah lebih baik, dan mereka akan lebih besar kansnya untuk memelihara goodwill dan perdagangan dengan Indonesia. Tetapi Belanda tidak lambat dalam jawabannya, bahwa pada waktu Inggeris

menyerahkan kedaulatan kepada India, Inggerislah yang berhutang pada India, oleh karena itu bagi Inggeris tidak ada alasan untuk mencari jaminan.

Orang tidak bisa lupakan, bahwa di antara kedua pihak ini masih terbayang telah terjadinya dua aksi militer.

Pada awal pekan ini tersiar kabar-kabar yang kuat bahwa pihak Indonesia sedang mempertimbangkan suatu "deadline" bagi konferensi ini. Tgl. 15 Oktober disebut-ebut. Pada waktu itu harus sudah tercapai persetujuan. Dengan demikian masih tinggal dua minggu lagi.

Hari ini terdengar kabar, bahwa panitia politik delegasi mempertimbangkan soal tersebut, tetapi tidak mengambil putusan.

Peninjau-peninjau politik hari ini membuat komentar atas kedatangan Palar tidak lama lagi. Peninjau-peninjau itu berpendapat, pihak Republik akan dapat cepat mengemukakan soalnya kepada UNO apabila deadlock yang tidak dikehendaki itu sampasi terjadi. (*Antara*, 28/9/1949)

***

Lampiran 45.

PIDATO
KETUA DELEGASI REPUBLIK INDONESIA
PADA SIDANG PENUTUP KONFERENSI MEJA BUNDAR
(2 November 1949)

Tuan Ketua,

Lebih dari dua bulan lamanya kita bermusyawarah untuk mencapai penyelesaian dalam persengketaan antara Belanda dan Indonesia, dan pada hari ini dapatlah kita berkumpul dalam sidang ini untuk menyatakan dengan upacara bahwa pekerjaan kita telah berhasil.

Hari ini adalah suatu saat yang bersejarah dalam perhubungan Indonesia dengan Nederland. Hari ini kita akan membubuhkan tanda tangan kita di atas suatu rencana Piagam Penyerahan Kedaulatan.

Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan yang penuh atas Indonesia dengan tiada bersyarat kepada Republik Indonesia Serikat dan mengakui sebagai suatu negara yang berdaulat. Penyerahan kedaulatan secara resmi dengan upacara akan berlaku sebelum tanggal 30 Desember 1949.

Kegembiraan kami sedikit tertekan oleh karena tidak segala soal dapat diselesaikan pada Konferensi Beja Bundar ini. Irian atau Nieuw Guinea masih dalam persengketaan dan akan diusahakan menyelesaikannya dalam tahun sesudah penyerahan kedaulatan kepada RIS.

Pada saat yang bersejarah ini rakyat Indonesia akan merasa lega dalam hatinya. Hari ini dengan resmi dimaklumkan *lenyapnya* kekuasaan kolonial dari Indonesia, dan lahirnya susunan hukum baru yang berdasarkan Pancasila. Empat tahun lamanya Republik Indonesia memperjuangkan dasar ini sebagai pimpinan hidup bagi bangsa Indonesia, dan pada hari ini diresmikan tercapainya tujuan itu. Republik Indonesia Serikat akan berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial.

Dengan ini dinyatakan bahwa rakyat Indonesia ingin hidup sebagai bangsa yang membela kemanusiaan, demokrasi dan persaudaraan. Bangsa Indonesia tidak saja ingin melihat negaranya jadi *Rechtsstaat* (Negara Hukum), tetapi juga sebagai suatu *Kultuurstaat*, Negara Peradaban.

Di atas dasar persaudaraan bangsa Indonsia akan berhubungan dengan bangsa-bangsa lain di dunia, agar supaya perhubungan itu memperlebar kebahagiaan dan kemakmuran rakyat kedua belah pihak.

Dengan keyakinan ini pula kami bangsa Indonesia bersedia mengadakan *uni*

dengan Nederland, di atas dasar sukarela dan sama rasa. Seperti ternyata dalam statutnya, uni ini menyelenggarakan kerja sama yang teratur antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Nederland dengan dasar sukarela dan persamaan dan dengan hak yang sama. Uni ini tidak mengurangkan status kedua belah pihak sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Bagi kami, bangsa Indonesia, arti uni itu terutama terletak pada kerja sama antara *Timur* dan *Barat*. Terutama kami memandang uni ini sebagai suatu ciptaan kultuur-idealisme.

Bagaimana caranya uni ini akan bekerja, itu tak dapat diatur dari semulanya. Hanya praktek hidup dalam dunia internasional akan membuktikannya. Tetapi nyatalah, bahwa uni itu hanya dapat berjalan, apabila ada saling percaya pada kedua belah pihak. Mudah-mudahan hal-hal yang akan diselenggarakan bersama antara Nederland dan RIS yang tidak sedikit jumlahnya, dapat membuktikan gunanya uni itu.

Kalau KMB dapat membuahkan hasil yang kita resmikan hari ini, maka tidak sedikit kita berterima kasih kepada UNCI yang tidak putus-putusnya memberi bantuan. Apalagi pada beberapa saat di waktu yang akhir ini, yang kesulitan sangat memuncak, UNCI menunjukkan sikapnya yang cerdas dan bijaksana, yang dihargai benar oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Terima kasih kami akan kami tegaskan sekali lagi dengan menyatakan kegembiraan kami bahwa UNCI, atau suatu badan lain daripada Perserikatan Bangsa-Bangsa, akan menilik di Indonesia penyelenggaraan persetujuan yang telah tercapai dalam Konferensi Meja Bundar ini.

Dengan melalui UNCI, kami, atas nama pemerintah dan delegasi Republik Indonesia, menyampaikan terima kasih kepada Dewan Keamanan, yang telah berhasil menyelesaikan persengketaan Nederland dan Indonesia dengan jalan damai.

Last but not least, atas nama delegasi Republik Indonesia kami mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pemerintah dan delegasi Belanda atas penerimaan kami yang begitu baik di negeri ini. Suasana dalam perundingan senantiasa baik, juga apabila pendirian sewaktu-waktu sangat bertentangan. Pada konferensi ini kita belajar harga-menghargai pendirian masing-masing.

Mudah-mudahan suasana yang baik dalam perundingan KMB ini menyertai kita juga dalam segala perundingan di masa datang.

Sekianlah, Tuan Ketua, dan terima kasih! (...)

***

Lampiran 46.

KETERANGAN PEMERINTAH KEPADA BADAN PEKERJA KNI PUSAT
(25 November 1949)

Saudara Ketua!

Sambil menunggu sidang KNIP pleno yang akan menimbang dan mengesahkan hasil-hasil yang dicapai pada Konferensi Meja Bundar yang berlangsung di Den Haag dari tanggal 23 Agustus sampai 2 November yang lalu, pemerintah merasa gembira dapat membentangkan di muka sidang Badan Pekerja hari ini dasar politik pemerintahan yang dijalankan hingga mencapai hasil itu.

Perundingan dalam Badan Pekerja tentang hal yang disebut boleh dipandang sebagai suatu persiapan kepada permusyawaratan dalam KNIP pleno. Lebih daripada KNIP pleno, Badan Pekerja mempunyai kesempatan yang luas untuk meninjau hasil-hasil KMB itu dengan pandangan yang dalam. Usaha pendahuluan ini daripada Badan Pekerja dapat menyingkatkan kelak perundingan dalam KNIP.

Berhubung dengan waktu yang mendesak, perundingan dalam KNIP harus singkat. Dekat penghabisan tahun 1949 ini penyerahan kedaulatan atas Indonesia oleh Kerajaan Belanda kepada RIS akan diselenggarakan secara *resmi* dan secara *bukti*. Sejalan dengan itu Republik Indonesia pun akan menyerahkan kedaulatan yang ada padanya sampai sekarang kepada RIS untuk menerima kedaulatan itu, maka haruslah terbentuk lebih dahulu pemerintah RIS sementara, yang disusul pula dengan pembentukan Parlemen Darurat RIS.

Sebelum pertengahan Desember yang akan datang seharusnya pemerintah sementara itu telah terbentuk, didahului sebagaimana diketahui oleh pemilihan Presiden RIS. Jika sekiranya pembicaraan dalam KNIP tentang hasil-hasil KMB tidak dapat diakhiri dengan cepat, maka sukar mencapainya supaya pemilihan presiden dan pembentukan pemerintah RIS selesai pada pertengahan bulan Desember. Suatu *conditio sine qua non* untuk mengadakan pemilihan presiden ialah bahwa Dewan Perwakilan Rakyat di Republik dan dalam daerah BFO telah meratifikasir induk persetujuan yang dicapai pada KMB.

Sebab itu saya berpesan sangat kepada anggota-anggota Badan Pekerja untuk bekerja segiat-giatnya mempelajari dan menimbang hasil-hasil KMB sebagai persediaan bagi permusyawaratan dalam KNIP.

Saudara Ketua! Uraian kami hari ini tidak bersifat sebagai penjelasan atau keterangan daripada pasal-pasal yang dimufakati pada KMB, sungguhpun dengan sendirinya tergambar garis besar daripada isi permufakatan itu. Seperti disebutkan tadi, ujud uraian kami ialah memberi keterangan tentang dasar politik yang dijalankan oleh pemerintah hingga mencapai hasil tersebut.

Kita sama mengetahui, bahwa sering-sering orang tak sabar menunggu hasil perundingan dalam Konferensi Meja Bundar. Ada yang berpendapat bahwa, kalau perundingan itu sesudah 6 atau 7 minggu tidak membayangkan hasilnya, perundingan itu pasti gagal. Dengan hati yang tidak sabar itu orang menimpakan kritik atau tuduhan yang bukan-bukan kepada delegasi Republik yang sedang berunding. Mungkin kegelisahan ini terbit karena tempat perundingan jauh dari sini dan orang tak dapat mengikuti jalannya. Mungkin pula karena tak tahu membedakan antara buruk dan baik yang disebarkan oleh pers sana untuk menimbulkan perpecahan dalam kalangan ktia. Mungkin lagi karena lidah tidak bertulang dan tanggungjawab terhadap nasib bangsa hanya dapat dirasakan seberat-beratnya oleh mereka yang memikul tanggungjawab itu sehari-hari.

Antara Badan Pekerja KNIP dengan pemerintah syukurlah tidak ada timbul pergeseran. Tetapi *"the men in the street"* sering-sering merasa tak puas. Sungguhpun demikian Badan Pekerjalah tempat pemerintah memberikan tanggungjawabnya.

Saudara Ketua! Suatu keluh kesah yang pernah terdengar dan tertulis selama KMB berjalan dan juga sesudah mencapai hasilnya ialah: *"Ke mana kita akan dibawa oleh pemerintah?"*

Pertanyaan ini lebih bersifat demagogi daripada suatu keyakinan bahwa orang tak tahu ke mana ia dibawa oleh pemerintah. Dengan tegas kami dapat mengatakan, bahwa pemerintah membimbing rakyat ke Indonesia merdeka. Politik pemerintah selama ini, sejak proklamasi Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, tidak lain dan tak bukan melainkan menuju kemerdekaan Indonesia yang penuh dan nyata, dengan tiada bersyarat. Pendirian ini belum pernah dilepaskan oleh pemerintah. Dalam pendiriannya membela cita-cita kemerdekaan ini pemerintah tidak kurang sikapnya daripada golongan yang bersemboyan "Kembali kepada Proklamasi 17 Agustus 1945".

Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah dasar politik kita semuanya. Proklamasi itu adalah suatu pernyataan daripada bangsa Indonesia yang menentukan nasibnya sendiri, bahwa ia adalah suatu bangsa yang merdeka, yang tidak mau dijajah lagi.

Dan sekarang semua orang dapat mengerti, bahwa pernyataan kemerdekaan itu tidak serentak berarti terselenggaranya kemerdekaan itu. *Antara* pernyataan kemauan bangsa sebagai suatu cita-cita dan penyelenggaraan cita-cita itu terletak suatu padang perjuangan, yang harus ditempuh sebagai cobaan untuk merdeka.

Alangkah bagusnya, kalau semua kehendak dapat kita capai dengan mengeluarkan semboyan saja. Tetapi dunia yang lahir tidak memberikan jalan yang begitu mudah bagi kita. Tiap langkah menuju kelonggaran hidup harus dicapai dengan perjuangan. Tiap langkah ke jurusan likuidasi daripada kolonialisme dicapai dengan penderitaan dan pengorbanan yang tidak sedikit. Lebih dari 35 tahun lamanya rakyat kita bergerak secara teratur, dengan organisasi politik, untuk mencapai cita-cita bangsa. Lebih dari 35 tahun berdengung, perlahan-lahan dan keras, semboyan "Indonesia Merdeka",

tetapi realisasi daripada ciptaan jiwa itu baru terbayang sesudah Perang Dunia kedua. Alangkah kerasnya bunyi tuntutan "Indonesia Merdeka Sekarang" sejak jaman Liga Menentang Imperialisme di tahun 1927, tetapi "sekarang" dahulu itu baru sekarang menjadi *sekarang*. Dua puluh dua tahun berlalu dahulu, barulah ciptaan menjadi kenyataan.

Demikianlah pula riwayat Proklamasi 17 Agustus 1945. Tatkala kita memproklamirkan kemerdekaan bangsa kita, kita belumlah lagi mempunyai kekuasaan yang nyata atas seluruh Indonesia. Malahan mempunyai alat kekuasaan pun kita belum, sekalipun besar hasrat pemuda dan rakyat untuk menghadapi meriam dengan bambu runcing. Dalam cita-cita pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu Indonesia telah merdeka. Tetapi pada lahirnya, tanggal 17 Agustus itu berarti bagi kita sebagai suatu starting point yang tidak boleh diusik lagi untuk mulai berjuang dengan tekad yang tak kunjung patah guna menyelenggarakan cita-cita bangsa tadi.

Perjuangan untuk suatu cita-cita besar tidak mencapai tujuannya dengan sekaligus. Ia memerlukan ruang dan waktu. Siapa yang menuju ke arah cita-citanya dengan kepercayaan yang penuh dan tekad yang tak kunjung padam, ia akan berhasil merebut waktu, sekalipun pada satu-satu ketika ia kerugian ruang.

Demikianlah juga dengan Republik Indonesia, yang menjadi lambang kemerdekaan bangsa dan menjadi modal untuk mencapai Indonesia Merdeka. Tidak sedikit korban yang diberikan untuk mencapai penyelenggaraan cita-cita bangsa seluruhnya, yang disangkutkan pada langit yang tinggi. Rakyat, tentara, pegawai dan polisi semuanya berkorban dan menderita dan semuanya itu diberikan dengan keyakinan bahwa Indonesia merdeka pasti datang. Dalam perjuangan yang mahasangat ini ada yang patah di tengah, ada yang jatuh pada akhir jalan, tetapi yang sampai kepada penghabisan harus tetap berhati perwira dan ksatria, harus bersedia senantiasa mengampuni saudara yang lemah, memaafkan mereka yang khilaf. Indonesia di masa datang menghendaki orang ksatria dan jiwa ksatria. Aku ingin melihat, supaya orang Republik tetapi menjadi contoh kepada saudaranya yang lain dalam kecintaan kepada negara dan cita-cita dan dalam kerelaan terus berkorban untuk kemajuan masyarakat dan kemuliaan bangsa.

Abad kita ini melahirkan suatu zaman besar bagi Indonesia. Tetapi saat yang besar ini janganlah hendaknya menjumpai manusia picik hati. Manusia picik hati akan membawa tenggelam biduk yang dilayarkan tadi. Baiklah kita bercermin kepada sejarah revolusi Perancis, yang tak sanggup membuahkan ciptaannya sungguhpun kesempatan cukup padanya. Pertentangan yang sedih antara ideal dan realisme di Perancis pada waktu itu menyebabkan keluarnya suatu gubahan syair yang tepat dari ujung pena pujangga Schiller. Ia menulis:

"Eine grosse Epoche hat das Jahrhundert geboren;
Aber der grosse Moment findet ein kleines Geschlecht."

Mudah-mudahan bangsa Indonesia terpelihara daripada lukisan masa yang digambarkan oleh Schiller itu terhadap negeri Perancis. Orang Republik haruslah awas dari semulanya, tetap setia kepada janjinya ... menjadi pandu ibuku!

Saudara Ketua! Sejarah Republik empat tahun yang lalu ini adalah sejarah perjuangan yang berkelaluan. Perjuangan membela cita-cita, dan bukanlah sikap menyampingkan cita-cita. Ribuan jiwa yang melayang dalam perjuangan itu, yang kuperingati dengan rasa terharu pada saat ini, adalah bukti yang nyata bahwa tak mudah menyelenggarakan cita-cita bangsa.

Ada masanya orang menyangka bahwa politik berunding yang dijalankan oleh pemerintah akan membawa hapusnya Republik dan mengembalikan penjajahan Belanda ke Indonesia. Tetapi ternyata hidupnya Republik ulet sekali, karena dikemudikan oleh politik yang bijaksana, yang didasarkan kepada perhitungan dan pertimbangan kekuatan di dalam dan di luar negeri. Setiap kali setelah orang menyangkanya mati, ia bangun kembali dengan kepercayaan yang lebih kuat kepada dirinya sendiri. Hanya orang yang tidak mempunyai kepercayaan akan diri sendiri berputus ada di masa yang lampau ini dan melakukan politik yang merugikan negara. Orang yang beriman dan berkeyakinan tak pernah goncang dalam kepercayaannya: Indonesia merdeka mesti tercapai.

Terhadap kaum *défaitis* itu kami telh memberikn gmbaran yang nyata tentang majunya Republik dalam keterangan pemerintah kepada Badan Pekerja di bulan Juli yang lalu, setelah pemerintah Republik pulih ke Yogya. Marilah kukutip beberapa kalimat dari keterangan itu di sini, karena mungkin sekarang lebih ternyata kebenarannya dari empat bulan yang lalu. Beginilah kataku di waktu itu:

"Tidak benar, kalau setengah orang berkata bahwa keadaan kita lebih jelek daripada tanggal 17 Agustus 1945, dan terus-menerus merosot sejak Linggajati dan Renville. Pandangan semacam itu hanya didasarkan kepada luas daerah yang tampak atau diciptakan sebagai daerah Republik. Tetapi kedudukan kita tidak bergantung kepada luas tanah yang langsung kita kuasai. Tatkala kita memproklamirkan kemerdekaan bangsa kita, kita belumlah lagi memperoleh pengakuan internasional, pun belum semua daerah kita itu langsung kita kuasai. Kedudukan Republik di waktu itu bergantung semata-mata kepada adanya daerah yang dikuasainya. Kalau daerah itu lenyap, maka lenyaplah pula Republik 17 Agustus 1945. Sekarang kedudukan Republik tidak lagi semata-mata bergantung kepada luasnya daerah yang langsung kita kuasai. Andaikata seluruh Republik habis diduduki oleh tentara Belanda, Republik tetap diakui oleh Dewan Keamanan, oleh dunia internasional. Kedudukan kita *realiter* adalah demikian rupa seolah-olah kita sudah memperoleh pengakuan *de jure*.

Demikianlah adanya! Jauh daripada kemunduran terus-menerus, dasar kedudukan Republik sekarang jauh lebih kuat daripada saat manapun juga di masa yang lampau. Inilah hasil perjuangan yang kita capai dengan politik dua-dasar ...."

Saudara Ketua, sekian sedikit petikan dari ucapan saya dalam sidang ini pada bulan Juli yang lalu. Saya tahu, pada masa itu masih ada orang yang skeptis menerimanya. Tetapi hasil perundingan yang dibawa pulang dari KMB menunjukkan bahwa ucapan kami di waktu itu tidak berlebih-lebihan. Ucapan itu didasarkan kepada keyakinan bahwa jalan politik yang ditempuh adalah benar dan dengan politik itu Indonesia merdeka pasti tercapai.

Hasil KMB membuktikannya. Kami pulang dari KMB dengan membawa keputusan yang dimufakati, bahwa *Kerajaan Belanda akan menyerahkan kedaulatan yang sepenuh-penuhnya atas Indonesia dengan tiada bersyarat dan pasti kepada Republik Indonesia Serikat dan mengakui beserta itu RIS sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat*.

Republik Indonesia Serikat akan menerima kedaulatan itu berdasar kepada *peraturan-peraturan undang-undang dasarnya, yang disusun sendiri oleh delegasi Republik dan delegasi BFO*, yang isinya diberitahukan kepada Kerajaan Nederland.

Penyerahan kedaulatan itu akan berlaku secara resmi dengan upacara di Amsterdam sebelum tanggal 30 Desember 1949, dan secara bukti sesudah itu di Jakarta sebelum matahari yang penghabisan dalam tahun ini turun ke laut.

Suatu penyerahan kedaulatan yang akan dipersaksikan oleh dunia internasional dan akan tertulis dalam buku register Perserikatan Bangsa-Bangsa!

Pada saat itu Indonesia merdeka yang berdaulat tidak saja akan terbukti, tetapi ia juga akan dimajukan oleh Kerajaan Nederland untuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Saudara Ketua! Hasil perundingan KMB ialah Indonesia merdeka dan berdaulat. Dasar penyerahan kedaulatan itu ialah Undang-Undang Dasar RIS yang diperkuat oleh kita, bangsa Indonesia sendiri, dan bukanlah suatu barang yang disorongkan oleh Belanda kepada kita. Suatu pernyataan pula, bahwa dengan penyerahan kedaulatan itu bangsa Indonesia menentukan nasibnya sendiri. Diakui haknya sepenuhnya untuk memilih macam pemerintahan yang disukainya. Undang-Undang Dasar Sementara itu diperbuat menurut patokan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila: Ketuhanan Yang Mahaesa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial.

Saudara Ketua! Dipukul rata, hasil yang dicapai pada KMB itu boleh dikatakan memuaskan, sungguhpun tidak segala orang sudah merasa puas. Orang yang tidak merasai sulitnya perundingan mudah mengabaikan pendirian dan kemauan lawan. Ia hanya melihat tuntutan sendiri, sebab itu ia tidak akan puas dengan hasil yang dicapai itu. Tetapi dengan peninjauan seluruhnya, historis dan internasional, apa yang kita capai pada KMB itu adalah yang sebaik-baiknya yang mungkin dicapai pada waktu kini.

Kami tahu, bahwa ada di antara kita yang akan berkata bahwa hasil KMB itu belumlah kemerdekaan 100%. Berhubung dengan itu kami hanya ingin bertanya:

apakah yang dikatakan kemerdekaan 100%? Kalau soal ini dikupas, mungkin terdapat berbagai paham tentang kemerdekaan 100% itu.

Bagi kami sendiri, dan hal ini telah sering kami bentangkan, Indonesia merdeka bukanlah tujuan akhir bagi kita. Indonesia merdeka adalah syarat untuk mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Indonesia merdeka tidak ada gunanya bagi kita, apabila kita tidak sanggup mempergunakannya untuk mencapai cita-cita rakyat kita: Hidup bahagia dan makmur, dalam pengertian jasmani maupun rohani. Maka dengan tercapainya penyerahan kedaulatan, perjuangan kita belum lagi selesai. Malahan kita *baru* pada permulaan perjuangan yang lebih berat dan lebih mulia, yaitu perjuangan untuk mencapai kemerdekaan *manusia* daripada *segala tindasan*. Kemajuan yang diperoleh dalam perjuangan itu tidak saja bergantung kepada kemajuan yang kita peroleh di dalam negeri, tetapi juga dan istimewa terpengaruh oleh keadaan dunia dan masyarakat internasional. Perjuangan ini menghendaki idealisme yang tetap, pandangan realitas yang benar dan rasa sabar yang tak kunjung lenyap.

Dalam pada itu, Saudara Ketua, orang akan berkata bahwa kemerdekaan 100% belum tercapai, karena soal Irian masih tergantung. Memang, soal Irian adalah suatu soal yang sulit menyelesaikannya dalam KMB, sungguhpun mudah pada pokoknya. Saya katakan mudah pada pokoknya, karena soal ini tidak banyak seluk-beluknya. Soalnya adalah soal *ya* atau *tidak*. Irian masuk RIS ataukah tidak?

Pihak Indonesia berpendapat bahwa Irian masuk dalam lingkungan Indonesia, sedangkan Belanda mengatakan bahwa Irian tidak termasuk. Ada juga pendapat yang dimajukan di luar KMB, supaya Irian dijadikan *con-dominium* antara Belanda dengan Indonesia. Tetapi cita-cita *con-dominium* itu tidak dapat kita terima, karena ia berarti bahwa kita ikut serta dengan Belanda mempunyai kekuasaan di sana sebagai penjajah. *Con-dominium* adalah tanah jajahan bersama. Dan Indonesia yang baru lepas dari penjajahan tidak ingin menjajah.

Dalam pertentangan pendirian yang begitu tajam antara Belanda dengan kita, hanya ada dua jalan untuk mencapai penyelesaian. Pertama, menunda penyelesaian soal ini sampai kemudian hari, atau kedua, tegas pada pendirian masing-msing dengan menerima *deadlock*.

Deadlock berarti gagal segala persetujuan yang dicapai dan lambat laun mungkin berakhir dengan pertempuran senjata lagi. Dengan ini penyelesaian soal Indonesia tidak tercapai, sedangkan Irian sendiri tidak tertolong dengan cara begitu. Dalam pada itu jangan dilupakan, bahwa opini publik di dunia tidak memihak kita apabila kita berkeras kepala dalam soal Irian ini. Usul kompromis yang dimajukan oleh UNCI diterima oleh Belanda, sehingga pada suatu waktu kedua delegasi Indonesia berhadapan dengan Belanda dan UNCI.

Dalam keadaan yang semacam itu maka jalan yang sebaiknya ialah menunda penyelesaian soal Irian sampai kemudian hari. Permufakatan didapat, berkat adanya

goodwill pada kedua belah pihak, bahwa Irian tetap jadi soal persengketaan antara Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia Serikat, dan akan diselesikan secara damai dalam lingkungan pembicaraan antara kedua anggota uni, yaitu Belanda dan Indonesia. Sedikit kemajuan terdapat dalam penyelesaian semacam itu. Soal Irian menjadi satu soal perundingan antara dua negara yang *sama-sama berdaulat*, yaitu RIS dan Kerajaan Belanda. Dengan putusan semacam ini, Indonesia tidak melepaskan tuntutannya atas Irian.

Orang yang berpendirian bahwa semuanya harus tercapai 100% sekaligus, tentu tidak puas dengan cara begitu. Tetapi adakah jalan untuk mencapai tuntutan itu sekarang juga?

Orang yang mempunyai kepercayaan bahwa waktu ada pada pihak kita, berani menerima penyelesaian soal Irian di masa datang. Dan Belanda nanti akan mengalami dengan sendirinya di dalam waktu, bahwa penahanan Irian itu di luar Indonesia tidak akan menguntungkan kepadanya. Politik tidak, ekonomi pun tidak. Politik tidak, karena suatu waktu soal hak menentukan diri sendiri akan berlaku pula terhadap Irian, sedangkan penahanan hal ini sebagai soal persengketaan mungkin mengganggu kerja sama dalam uni. Dipandang dari jurusan ekonomi penahanan itu merugikan Belanda, karena Irian adalah suatu daerah minus. Sebelum perang saja ongkos pemerintahannya tak kurang dari sepuluh juta rupiah setahun, yang dibayar dari bagian lain daripada Hindia Belanda. Sekarang tentu lebih banyak lagi. Jika Irian dilepaskan dari Indonesia, maka biayanya harus dibayar langsung oleh rakyat Belanda. Untuk memajukan perekonomian di Irian, tidak cukup dengan mengadakan kapital saja. Tenaga pekerjaan pun perlu, dan itu belum bisa dihasilkan oleh penduduk Irian. Dengan tiadanya Indonesia, maka Irian umumnya sukar dapat dimajukan.

Saudara Ketua! Bagi Indonesia soal Irian terutama adalah soal moral. Kita sama-sama terjajah dengan bangsa Irian oleh Belanda, dan karena itu mempunyai nasib yang sama di masa yang lampau. Oleh karena itu kita ingin pula sama-sama merdeka. Kalau kami dari tempat ini boleh menyampaikan sepatah kata kepada penduduk Irian, maka kami ingin mengatakan: Sabarlah sementara, kemerdekaanmu akan datang juga. Indonesia tidak akan melupakan engkau.

Saudara Ketua! Sebenarnya tidaklah betul kalau orang menyangka, bahwa penundaan penyelesaian soal Irian itu mengurangkan kedaulatan yang diserahkan kepada RIS. Penundaan penyelesaian soal Irian hanya menyinggung besarnya daerah dan tidak mengenai soal kekuasaan RIS dalam melakukan kedaulatannya sebagai suatu negara yang merdeka. Ke luar dan ke dalam RIS mempunyai kekuasaan yang penuh. Kedaulatannya riil dan nyata.

Juga peraturan tentang uni tidak mengurangkan kedaulatan masing-masing. Uni yang diadakan antara Kerajaan Nederland dan Republik Indonesia Serikat bukanlah suatu *superstaat*, seperti yang diciptakan dahulu oleh pihak Belanda, tetapi adalah

suatu asosiasi yang bebas antara dua negara yang sama-sama merdeka dan berdaulat. Seperti ternyata di dalam *statut*-nya, uni itu menyelenggarakan kerja sama yang teratur antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Nederland dengan dasar sukarela dan persamaan dan dengan hak yang sama. Dengan tegas pula disebutkan bahwa uni itu tidak mengurangkan status kedua belah pihak sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Segala keputusan yang mengenai kerja sama diambil secara mufakat oleh menteri-menteri kedua belah pihak dalam konferensi yang mereka adakan. Menteri-menteri yang bermusyawarah itu tetap bertanggungjawab kepada parlemen mereka masing-masing. Dan oleh karena itu segala keputusan yang mereka mufakati haruslah disahkan lebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakyat masing-masing pihak. Kalau tidak ada persetujuan antara kedua belah pihak untuk mengadakan tindakan bersama atau kerja sama, maka tak ada yang bisa terjadi. Kepala uni pun, yang menjadi pelambang cita-cita kerja sama yang merdeka, tidak mempunyai kekuasaan ketatanegaraan dan juga tidak mempunyai jabatan sepanjang hukum internasional. Pada umumnya ia hanya mempunyai jabatan *ceremonieel*.

Terhadap kekuasan RIS *ke dalam*, juga tak ada suatu peraturan yang mengurangkan kedaulatannya. RIS merdeka mengambil segala muslihat yang dipandangnya baik untuk pemeliharaan dan kemakmuran rakyatnya, asal segala peraturannya itu berdasarkan hukum.

Dengan ini semua berani kami mengatakan, bahwa RIS berdaulat penuh, ke luar dan ke dalam. Kalau kedaulatan telah diserahkan, maka tentara Belanda yang ada di Indonesia tidak lagi mempunyai jabatan dan kewajiban di sini. Sambil menunggu pemulangannya ke negeri Belanda, ia berada di sini sebagai tamu saja. Keselamatan negara ditanggung semata-mata oleh pemerintah RIS dengan mempergunakan alat-alat kekuasaannya sendiri.

Saudara Ketua! Dengan keterangan ini saya tidak bermaksud menggambarkan kedudukan Indonesia dan kemerdekaannya lebih bagus daripada yang sebenarnya. Kita semuanya tahu, bahwa dalam jentera perhubungan internasional sekarang tak ada satu negeri yang merdeka sebulat-bulatnya dalam segala tindakannya dan perbuatannya. Luasnya kemerdekaan tiap-tiap negeri sering-sering bergantung kepada kebijaksanaan pemerintah dan rakyatnya dan kepada kewajiban yang telah dipikulnya terhadap dunia luaran. Negeri yang banyak utangnya kepada luar negeri, pasti tak bebas dalam segala langkah dan tindakannya, sekalipun pada hukumnya ia merdeka dan berdaulat. Sebab itu, negeri yang ingin mempunyai kemerdekaan bergerak yang luas harus berusaha mengecilkan utangnya terutama negeri harus menjaga supaya anggaran belanjanya jangan terus-menerus menyatakan kekurangan.

Kesulitan yang dihadapi oleh RIS sejak mula berdirinya ialah defisit yang tidak sedikit pada budgetnya, yang diterimanya sebagai pusaka zaman yang lampau. Selain daripada itu ia harus memikul sebagian daripada utang Hindia Belanda dulu, yang

jumlahnya terhadap luar negeri tidak kurang daripada 1.400 juta. Sungguhpun kita berhasil mengurangi utang bermula dengan jumlah 2.000 juta rupiah, bagi rakyat kita yang miskin utang kepada luar negeri sejumlah 1.400 juta rupiah tetap berat. Belum lagi berbagai beban lainnya yang harus kita pikul sebagai akibat daripada perpisahan Hindia Belanda kepada Indonesia merdeka, yang juga berpuluh juta jumlahnya, yang semuanya itu memberati anggaran belanja negara.

Tetapi, kalau kita benar-benar mau menjadi bangsa yang merdeka dan terhormat, kita harus berani juga memikul pahitnya kemerdekaan itu. Kita bertanggungjawab atas nasib kita sendiri. Dari ini ke atas buruk baik dalam nasib kita adalah tanggungan kita dan tergantung kepada kebijaksanaan kita sendiri.

Saudara Ketua! Ada satu lagi yang harus kita perhatikan, kalau kita nanti menerima kedaulatan yang diserahkan oleh Kerajaan Belanda kepada kita. Dari mulai saat itu kita, seluruh *rakyat* dan *pemerintah* bertanggungjawab akan keamanan dan keselamatan dalam tanah air kita. Undang-undang dasar kita bersendi kepada Pancasila sedangkan di dalamnya seterusnya dijamin pula dasar-dasar dan hak kemanusiaan. Tiap-tiap penduduk dengan tiada membedakan bangsa dan warna—orang Indonesia atau orang asing—harus terjamin keselamatan dirinya dan keselamatan hartanya, selama ia tiada mengadakan komplotan atau ancaman terhadap keselamatan negara. Selain daripada negara berperikemanusiaan, negara kita adalah pula *negara hukum*.

Saudara Ketua! Kalau kita melakukan tinjauan yang agak dalam kepada sejarah perundingan yang telah berjalan empat tahun lamanya, maka nyatalah bahwa apa yang dapat kita capai pada KMB jauh lebih besar daripada persetujuan di masa yang lalu, yang selalu gagal dalam melaksanakannya. Apa yang kita capai sekarang, dua atau satu tahun yang lalu belum lagi mungkin. Waktu itu masanya belum masak. Bukan saja tentang penyerahan kedaulatan yang penuh dengan tiada bersyarat, yang sekarang mungkin dan dahulu tidak, akan tetapi juga tentang konsepsi yang mengenai uni ada perbedaan antara dulu dan sekarang. Uni menurut konsepsi Linggajati lebih berat daripada uni yang disetujui sekarang. Waktu dan perubahan keadaan membawa perubahan paham ke jurusan pendirian kita.

Selain daripada pengaruh waktu dan keadaan, hasil yang diperoleh pada KMB itu adalah pula buah daripada kerja sama yang erat antara delegasi Republik dan delegasi BFO. Boleh dikatakan, terhadap segala soal terdapat persatuan pendirian. Jalan dan hasil KMB membuktikan sekali lagi, bahwa bersatu kita teguh.

Persatuan yang kita peroleh itu, yang telah membuahkan hasil yang baik, harus kita pelihara dan kita lanjutkan ke masa yang akan datang. Untuk mengatasi kesulitan yang bakal kita hadapi dalam menyusun Republik Indonesia Serikat, segala minat hendaklah ditujukan kepada memperkuat persatuan rakyat. Segala pertentangan harus kita hilangkan, segala dendam kita lenyapkan. Hanya dengan begitu rakyat kita dapat menumbuhkan suatu Indonesia merdeka yang berdaulat, adil dan makmur.

Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya.
Marilah kita mendoa: “Indonesia bahagia!”
Marilah kita berjanji: “Indonesia abadi!” (...)

***

Lampiran 47.

SUSUNAN TENTARA PELAJAR PADA AWAL PERJUANGAN (1945)

Koordinator: IPI (Ikatan Pelajar Indonesia) Bagian Pertahanan yang diketuai Mahatma dengan laskar-laskar pelajar sbb.:

1. Alap-alap
2. Garuda
3. Jelata
4. Kere
5. Pendawa
6. Satria
7. BPI "SMT"
8. Corps Mahasiswa (CM).

SUSUNAN TENTARA PELAJAR MASA KONSOLIDASI (1946)

Dewan Pertahanan Negara memutuskan bahwa kesatuan-kesatuan Pelajar Pejuang harus dipersatukan dan dibentuklah Markas Pertahanan Pelajar (MPP), terdiri dari tiga Resimen, yaitu: Resimen A (Jatim), Resimen B (Jateng) dan Resimen C (Jabar).

MPP RESIMEN B

Komandan : Subroto
Kepala Staf Ketentaraan : Tabiat;
Kepala Staf Administrasi : Drajat Dianto;
Perwira-perwira Staf : Bambang Sutopo, Sudarsono (Son); Danardojo; Sudono dll.

Batalyon 100 Solo dengan Komandan : Prakoso;
Batalyon 200 Semarang dengan Komandan : Marwoto;
Batalyon 300 Yogyakarta dengan Komandan : Martono;
Batalyon 400 Cirebon dengan Komandan : Salamun A.T.

Kompi-kompi di Solo dan sekitarnya
Kompi 110 dengan Komandan : Sukandar;

Kompi 120 dengan Komandan	: Achmadi;
Kompi 130 Klaten dengan Komandan	: ...;
Kompi 140 Boyolali dengan Komandan	: .... (*PEH101-102*)

***

Lampiran 48.

KESATUAN RESERVE UMUM (KRU)

Dengan penetapan Presiden No. 14/1948 (Reorganisasi dan Rasionalisasi Angkatan Perang) semua kesatuan Tentara Pelajar dikelompokkan dalam Kesatuan Reserve Umum (KRU).

Ada tiga KRU, yaitu: KRU W, KRU X, KRU Y. Seluruh Tentara Pelajar dimasukkan dalam KRU W, di bawah Kolonel A.H. Nasution.

KRU "W" Batalion 1 di bawah Mayor Nasuhi (Siliwangi);

KRU "W" Batalion 2 di bawah Mayor Achmadi (TP);

KRU "W" Batalion 3 di bawah Mayor Isman (TRIP)'

Setelah Tentara Pelajar, khususnya Kompi 120 berhasil mengadakan Gerakan Pembersihan tanggal 27 Maret 1948 dan dipuji serta dibenarkan oleh Presiden/Wakil Presiden dan Panglima Besar Sudirman, Mayor Achmadi diangkat menjadi Komandan KMK (Komandan Batalion 2 KRU "W") dengan pangkat Mayor, sedang pangkat para Staf dan Komandan pasukannya disesuaikan dengan formasi. Susunan KMK dan Anggota-anggota TP yang diperbantukan pada KMK adalah sbb.:

KOMANDO MILITER KOTA (KMK) SOLO

Komandan KMK	:	Mayor Achmadi;
Kepala Staf KMK	:	Kapten Sumitro;
Perwira Operasi KMK	:	Kapten Sudarmono;
Perwira Keamanan KMK	:	Kapten Suhendro;
Perwira Tugas Khusus KMK	:	Lettu Sumarto;
Perwira Administrasi KMK	:	Lettu Suwandiono;
Perwira Perumahan	:	Lettu Suratman;
Para Perwira Staf	:	Letda Suradio Gajah; Letda Nartomo; Letda Sujono Tekle; Letda Bob Dengah; Letda Suwondo Lento; Letda Suwito dll.

Selanjutnya Kesatuan-kesatuan Pelajar/Mahasiswa yang semula tergabung dalam Corps Mahasiswa (CM), Tentara Genie Pelajar (TGP), Pasukan Imam dan KRU "W" digabungkan dalam satu Brigade, yaitu Brigade 17 TNI di bawah pimpinan Letkol Sudarto dengan beberapa Detasemen dan Depo sbb.:

SUSUNAN BRIGADE 17 TNI

Komandan Brigade 17 TNI	: Letkol Sudarto;
Komandan Det I (Jatim)	: Mayor Isman;
Komandan Det II (Solo)	: Mayor Achmadi;
Komandan Det III (Jogja)	: Kapten Martono;
Komandan Det IV (Jabar)	: Kapten Solichin;
Komandan Det Kesatuan Teknik	: Kapten Hartawan;
Komandan Corps Mahasiswa (Jogja)	: Kapten Hartono.

SUSUNAN FORMASI DET II BRIG 17 TNI (TP SOLO) SEBELUM AKSI MILITER KE-II

Komandan Det II Brig 17 TNI	: Mayor Achmadi;
Komandan Kompi I	: Kapten Prakoso;
Komandan Seksi I	: Lettu Sukandar;
Komandan Seksi II	: Letda Muktio;
Komandan Seksi III	: Letda Budihardjo;
Komandan Kompi II	: Kapten Abdul Latief;
Komandan Seksi I	: Lettu Mudjiono;
Komandan Seksi II	: Letda Supangat;
Komandan Seksi III	: Letda Murtijo-Djungkung.

SUSUNAN FORMASI DET II BRIG 17 TNI SESUDAH AKSI MILITER KE-II

Komandan Det II Brig 17 TNI	: Mayor Achmadi;
Komandan Stafr Det II Brig 17 TNI	: Kapten Muljoto;
Komandan Kompi I	: Kapten Prakoso;
Komandan Seksi I	: Lettu Budihardjo;
Komandan Seksi II	: Letda Surtijo;
Komandan Seksi III	: Letda Suradijo;
Komandan Kompi II	: Kapten Abdul Latief;
Komandan Seksi I	: Lettu Sutadi;
Komandan Seksi II	: Letda Tabiat;

Komandan Seksi III : Letda Murdijo-Djungkung;

Komandan Kompi III : Kapten Suhendro;
Komandan Seksi I : Lettu Harjono Luwing;
Komandan Seksi II : Lettu Darmadi;
Komandan Seksi III : Lettu Suparno Negro;

Komandan Kompi IV : Kapten Marwoto;
Komandan Seksi I : Lettu Masruri Jusuf;
Komandan Seksi II : Lettu Mochamad Lud;
Komandan Seksi III : Lettu Kusnihadi-Kentus;

Komandan Seksi IV : Latda Pongky Supangat;
Komandan Seksi V : Letda Sally Muljono.

(Kompi IV ini adalah panggabungan sebagian ex Batalion 200 dan sebagian ex Batalion 500.) (*PEH102-104*)

***

Lampiran 49.
Sangat Rahasia

LAPORAN KEADAAN KOTA SOLO
Dari Tanggal 7-8-1949 hingga
Tanggal 11-8-1949

Laporan singkat yang kami tuliskan di bawah ini didapat dari dua orang utusan Pt. Residen Surakarta, yang sengaja diutus untuk melihat (opnemen) kekejaman tentara Belanda di Kota Solo.

Pada tanggal 7-8-1949 : Dua buah pesawat terbang melakukan bombardemen dan metrailleurement diikuti dengan tembakan-tembakan mortir di daerah bata daya Kota Solo. Enam buah bom dijatuhkan, yaitu di kelurahan:

1. Japanan;
2. Jamsaren;
3. Harjopuran;
4. Sondakan;
5. Tegalayu;
6. Lawiyan.

Pada tanggal 8-8-1949 : Tembakan 2 kanon dari KARTASURA dan KLECO, juga pesawat-pesawat terbang terus-menerus beraksi.

Pada tanggal 9-8-1949 : Jalan Purwosari menjadi batas. Selatan Jalan TNI, utara Jalan Belanda. Serangan pesawat udara dari jam 09.00-14.00 dan 16.00-18.00.

Pada tanggal 11-8-1949 : Penyembelihan besar- besaran di Kelurahan:

1. Notosuran;
2. Jodiningrat;
3. Serengan.

Juga di rumahnya Dr. Padmonegoro ketua PMI cabang Solo, di mana juga Kantor PMI Solo berada diadakan penyembelihan besar-besaran yang dilakukan oleh pasukan Baret Hijau dan memakan korban 23 (dua puluh tiga) orang, di antaranya 8 (delapan) orang anggota PMI dan 15 (lima belas) orang penduduk yang mengungsi di situ.

Sore harinya jam 16.00 di LOJI-GANDRUNG diadakan permusyawaratan antara Letkol. SLAMET RIJADI dan Kol. Ohl di bawah pengawasan USCI (mungkin Milob). Putusan yang diambil ialah:

a. TNI harus keluar;
b. daerah yang telah diduduki TNI dipinjamkan kepada Tentara Belanda;

c. Tentara Belanda tidak boleh mengadakan pembersihan;
d. Tentara Belanda dipercepat keluarnya dari daerah SOLO, paling lambat akhir bulan ini.

NOOT: Dugaan kami Kota Solo, yang Dimaksudkan dengan daerah Solo itu.

Korban yang sudah jelas ialah 164 (seratus enam puluh empat) orang penduduk, yaitu dari kelurahan:

1. Punggawan 32
2. Turisari 20
3. Patangpuluhan 30
4. PMI Pusat 23
5. Pasarkembang 23
6. Kraton 4
7. Teposanan 32

Kota Solo terdiri dari 4 kecamatan (onderdistrict). Oleh karena hampir seluruh Kota Solo dapat serangan dari udara dan mengalami serbuan dan "penyembelihan dari tentara "baret ijo", maka saya dapat menaksir bahwa korban rakyat tidak akan kurang dari 1.500 (terbilang seribu lima ratus).

Mulai hari Jumat tanggal 12-8-1949 siang hari sehingga hari Sabtu tanggal 13-8-1949, tidak ada lagi terdengar tembakan.

Pada hari Jumat siang yang dikuasai oleh tentara kita ialah garis jalan besar Purwosari sampai ke selatan, ditambah jalan kelilingnya pura Mangkunegaran. Belanda bertempat di sebelah utara dari jalan tersebut.

Mulai tanggal 8-8-1949 ribuan orang laki telah meninggalkan kota. Mulai hari Rebo tanggal 10-8-1949, dari banyaknya penyembelihan dan tembakan stengun dari "baret ijo" yang ditujukan kepada tiap orang yang kelihatan, maka orang-orang perempuan mulai juga meninggalkan kota.

Mulai tanggal 12-8-1949, telah mulai banyak andong kluwar masuk kota. (Ini berarti telah aman kembali.)

Yogyakarta, 14 Agustus 1949
Jen. May.

(S. Hardjowardojo)

Dituturkan Yth.:

1. Ym. Panglima Besar;
2. Pt. Wk. KSAP;
3. Secretariat “Centr. Joint Board” untuk diteruskan kepada:
    a. Pt. Kol. Djatikusumo d/a Kantor Delegasi, Jakarta;
    b. Ym. Sri Sultan, Bandung.

***

Lampiran 50.

THE ROUND TABLE CONFERENCE

The Hague, 2 Nov (Antara/AFP)

The Round Table Conference at the Hague ended this afternoon after three months and one week of sitting. The following results were achieved.

1. The Netherlands have decided to hand over a complete sovereignty to an independent Republic of the United States of Indonesia before December 30, 1949. New Guinea alone will remain under the Dutch sovereignty. In the delay of one year from the date of the transfer the status of New Guinea will have to be defined by negotiations between the Netherlands and the United States of Indonesia (USI).
2. The Netherlands and the USI have decided to collaborate on a footing of complete equality within the framework of a Union headed by Queen Juliana who impersonates this durable collaboration. This collaboration comprises the external relations, defence, finance, economy and cultural relations. Decisions taken at the ministerial meetings regarding the implementation of the legislation to be applied in both countries are to be submitted to both parliaments for approval. Conflicts between both parties will be submitted to court of Arbitration composed of three Netherlands representatives and three Indonesians. If no majority of vote can be reached in this court the conflict will be submitted to the president of the International Court of Justice or to any other international organization.

   The Netherlands and the USI will exchange high commissioners having the rank of ambassadors. Although both parties have their own diplomats they agreed to coordinate their activities and envisaged the possibility for common representation in certain foreign countries.
3. Military collaboration of the Netherlands and the USI are responsible for their own defense on the sea, on land and in the air. Ther Netherlands will, however, assist the USI by providing them with technicians and equipment. A Netherlands military mission which will exist during three years will be the channel through which this assistance will be delivered. In case of an external threat against one of the parties concerned, consultations will take place. The Netherlands navy will leave the Indonesian waters within one year's time. As soon as the sovereignty is transferred, the Netherlands navy will hand over several light units to Indonesia. The Netherlands Government is willing to facilitate the acquisition of ships by the Federal Government of Indonesia. It will permit Indonesians to utilize on board these ships Dutch technical personnel. The naval base of Surabaya will be entirely placed under the Indonesian sovereighty, but the Indonesians and the

Netherlands navies will be entitled to use it jointly. The commander of the base will be a Dutch officer who will be appointed by the Indonesian authorities on the proposal of the Netherlands Government. This officer will be responsible to the Indonesian authority. The Netherlands troops now in Indonesia will be evacuated "as soon as possible". The United Nations commission for Indonesia will be allowed to intervene if difficulties arise in this connetion. The soldiers of the Netherlands Indies troops (KNIL) or native troops trained by the Netherlands, will eventually be incorporated into the Indonesian army. The Netherlands air force will be evacuated simultaneously with the units to which the various groups are attached.

In economic field it was decided that:

1. The USI recognized the rights and concessions granted to the Netherlands authorities. Nationalisations and expropriations can be decided only in general interest, and compensations will be paid. Private ownership is guaranteed so as to foster economic activity and the rise of the standard of living of the population. The Indonesian Federal Government committed itself not to indulge in discriminative practices against Netherlands nationals or enterprises.
2. Both parties will consult on their currency policy, in particular regarding any readjustment in the exchange rate between the Netherlands and Indonesian currencies. As long as the USI have not paid their debts to the Netherlands, they will consult the Dutch Government before changing their monetary laws or the statutes of the Bank of Indonesia. Under reserve that ealized to protect Indonesian currency will be implemented, Indonesia will allow the transfer of dividends and revenues. Under certain reserves transfer will also be possible for compensations paid after eventual ealizeddns.
3. Although the USI bear the entire responsibility for their external commercial relations, they judge it useful to coordinate their commercial policy with the Netherlands. In negotiations with third parties both countries will each have their own delegations, but will act in common agreement. On the date of transfer, the USI will take upon themselves to fulfill commercial agreements signed by the Netherlands and interesting Indonesia. Preferential treatment will be granted to the Netherlands in her commerce with Indonesia.
4. In the division of debts Indonesia takes upon her the budget of 4 milliard 500,000 guilders debt including 3 milliard guilders internal debt and 1,5 milliard external one, while the Netherlands will be responsible for a debt of 2 milliards.
5. The Netherlands and the USI have decided to intensify their cultural relations on a basis of complete freedom and reciprocity. As soon as the round table ealizedd have been ratified by the Netherlands parliament and by the various assemblies in Indonesia, the transfer of sovereignty will be carried out. The sovereignty will be

transferred to the Provisional Government of Indonesia whose constitution was submitted to the conference. (*Antara/AFP*, 3 November 1949)

***

Lampiran 51.

CRITICISM ON THE RESULTS OF THE ROUND TABLE CONFERENCE

Yogyakarta, November 3 (Antara).

The criticism launched by Republican newspapers here on the results of the round Table Conference majorly centers around New Guinea which for the duration of one year is to remain under the Dutch sovereignty.

The "Kedaulatan Rakjat" here editorially declared that the results "were far from what had been expected," terming the New Guinea question as "a sore to the eye". The journal reminded that in the beginning the Indonesian people had been glad because of their confidence in the idealized solution of the Indonesian issue, later their confidence had been shaken due to the very slow progress of the talks, and finally they became "disappointed" because the results were "far from what had been expected". The paper asked: "If the New Guinea issue was termed by Dr. Hatta as a minor one, why, then, had it been defended to the utmost by the Dutch with the aid of the United States? Is it not true that New Guinea is strategically located in the defense realm of the Pacific, and did the Republican delegation not play in an important card which might have an important bearing on the Russian veto later, if Indonesia requests to be admitted to the United Nations because of the agreement being American influenced?"

According to the newspaper, with the conclusion of the Round Table talks the fighting area has been displaced to Indonesia gain, and this is not less important that what the Round Table talks has produced, especially viewed from the political development in Asia.

The "Kedaulatan Rakjat" said: "Because the Round Table conference's decision has still to be approved by the people there will be a campaign of comparing and mutual testing between the people and the Government with a view to the continuation of the struggle and its final result will determine the quality of the agreement reached at the Round Table: whether or not it represents a mere scrap of paper."

Meanwhile the *Nasional* Daily Wednesday in its editorial captioned "don't mortgage", opened that "New Guinea is being mortgaged for one year, and it means that the independence given is not complete but divided, not in accordance with the wish of the people and not in line with the mandate which should have been adhered to by the Republican Delegation at the Hague because the latter did not dare to risk a failure of the conference".

The *Nasional* futher forsaw that because the Republican Delegation did not have the courage to face a failure of the talks and was "obsessed by a third Dutch military

action", there was reason for anxiety that the Republic might be forced to risk "an internal action" opposing a divided independence.

This, according to the editorial, if well considered, is much more dangerous than a third military attack because "our internal forces would then be divided". The victor in this internal contest will, the journal said, again be obliterated by the Dutch as they had intended when launching their second military attack against the Republic following the oppression of the Madiun revolt last year "when our strength were divided then".

In conclusion the *Nasional* said: "Supposing the Hague talks had failed and a third military action was launched, our strength would still be intact, whereas a third attack that is only postponed for a while in wait for a split in our strength would result in the dishonorable obliteration of the Republic." (*Antara*, 3 November 1949)

***

Lampiran 52.

US RESPONSE

US response to agreements on Indonesia reached at the Hague last week is expected to take the form of both economic and diplomatic support of the new United Indonesian Republic when it comes into being before the end of the year. In hailing the Hague settlement, Secretary of State Acheson said that this country was "engaged in study of ways and means by which it may be of assistance, should such assistance be requested." Officials here have forecast that such assistance will include renewed economic aid through the US Economic Cooperation Administration, and consideration of loans through the US Expor-Import Bank for rehabilitation of the new nation when it is officially inaugurated. This is scheduled to take place following ratification of the Hague agreements by both parties and before December 31, 1949. The United States is also expected to back the new state for membership in the United Nations. Under the Hague agreements, the Netherlands agreed to promote UN membership for the new republic.

ECA aid to Indonesia, designed to benefit the population directly and, as well, to spur production and exports for recovery there and in Western Europe, was suspended last December upon renewal of hostilities there. At that time, through agreements with the Netherlands, ECA had made available to Indonesia over $60 million worth of rice, wheat, testiles, and other incentive goods. As for Export-Import Bank loans, there are a number of rehabilitation projects in Indonesia which could be helped at an estimated cost of between $50 and $100 million. Now with peace apparently restored, it is forecast that the Bank will probably be glad to consider specific applications, though there are none before it at the moment. In the meantime, the United States is expected to act promptly on an Indonesian request for seven additional military observers to serve during the period when sovereignty is being transferred to the new regime. There are 36 neutral military observers in Indonesia at present—18 from the United States and 18 from other countries. The Hague agreements call for staged withdrawals of Netherlands forces upon transfer of sovereignty, and although US officials are confident that the new regime will be able to control any outbreaks, there may be some disorders during the transfer process.

US gratification over the Hague agreements which paved the way for the emergence of the new sovereign Indonesian state has been expressed both in official statements and through wide press comment hailing the settlement. This country cooperated fully with UN efforts to settle the dispute through the discharge of its responsibilities as a member of the UN commission for Indonesia, set up by the Security Council to lend

its good offices in helping the Netherlands and Indonesia reach agreement. (*Antara*, 7 November 1949)

***

Lampiran 53.

ON SOBSI

The SOBSI (Indonesian Labor Federation) has resumed its activities and currently embodies 16 trade unions. The actual membership at present is still unascertained. Prior to the first Dutch military action against the Republic in 1947 the federation incorporated 34 trade unions, the total membership numbering 1,264,066. The partial disintegration of the federation actualized following the Madiun communist revolt in September last year due to the fact that the greater part of the federation sympathized with the revolt. Mr. Njono, the spokesman of SOBSI, explained today to *Antara* that the federation has not had the opportunity to reorganize its supreme council because many top leaders had been arrested or killed during the Madiun uprising. He further suggested that the government render its cooperation for the guarantee of freedom of trade unions as one of the principles of democracy. Commenting on the recent invitation of an American labor attaché to actuate cooperation between Indonesian and American workers this SOBSI spokesman said that his federation is willing to accept any help from anywhere unless it does not impair the interests of Indonesia working class. Queried whether the American Labor Attache (Mr. Campbell) has already filed concrete proposals for the intended cooperation and assistance this spokesman replied: “Not yet.”

Regarding SOBSI’s program to be taken to the forthcoming World Federation of Trade Unions’ conference at Peiping, this spokesman said that SOBSI will bring up and defend its working scheme adopted by the federation’s general conference three years ago at Malang (East Java).

Mr. Njono disclosed that one point his federation will bring into discussion at the Peiping conference is the SOBSI’s attitude with regard to the attempts of “reactionaries to oppose the Indonesian trade unions in Indonesia and South East Asia.” He asserted that since a long time these “reactionaries had endeavored to precipitate a split in the workers *front*.” The tactics to be adopted by SOBSI, to challenge this move is, according to Mr. Njono, to strengthen labor organizations in Indonesia. (*Antara*, 10 November 1949)

***

Lampiran 54.

DUTCH TROOPS TO LEAVE

Dutch troops are scheduled to leave several places in Central Sumatra including Payakumbuh and Pariaman, declared Sjafruddin Preawiranegara, the Republican vice-premier, who arrived here yesterday afternoon from Palembang, South Sumatra. He has been visiting Medan, Padang and Palembang, since November 4 last. He proceeded this morning to Jogjakarta together with the Republican commander in Sumatra Colonel Hidajat, and the Parliament members Zainal Baharuddin and Djohan Sharuzah, who had been accompanying him on his tour.

According to the vice-premier the withdrawal of Dutch troops from East and South Sumatra seemed somewhat improbable on account of direct great Dutch economic interests existing in these areas.

In his interview with *Antara* correspondent the vice-premier confined himself to the economic situation especially in the Republican controlled areas in Sumatra and said that a Republic Trade officer, Mr. Rusli Rachman, is presently visiting various ports in Sumatra to set up Republican offices there to cace for the expert of raw materials from the Republican areas to outside as well as the import of manufactured goods into the island which are needed for the supply of the TNI (Republican troops). According to him the parts to be used for this purpose include Bengkulen, Padang, Medan, Sibolga, Pakanbaru, Tembilahan (Riouw), and probably also Palembang now being under discussion with the Dutch authorities.

The communications between Atjeh with the outside world are, according to Sjafruddin, short of running smoothly. This is, he said, due to the fact that the Dutch authorities insisted on having their regulations to be enforced also in this area. Asked how to settle this question Sjafruddin said: “This is an area where the Republican government is being still in full control of all ports. We had better suspend the question until the sovereignty is transferred to Indonesia.”

Meanwhile, according to the vice-premier, agreement has been arrived at with the Dutch Consulate at Singapore for the import of several goods into Atjeh which used to flew thereinto in the form of contraband. Up to now 15 automobiles and trucks have already acquired access into Atjeh, and according to him another 5 trucks and motorcars are waiting for the authorization of the Dutch Consul at Singapore.

Sjafruddin disclosed that he has enacted new import and export regulations for Atjeh, like the limitation of the import of luxary articles and the stepping up of the quality of export products like copra by cutting the export quota from 1200 tons to 800 tons monthly.

In a casual manner Sjafruddin said that he has launched a protest against the control of his ealize insisted upon by the Dutch customs officials when he arrived at Palembang from Padang.

He also said that thanks to an understanding with the local Dutch officials at Padang a member of the Republican Parliament (National Committee), a certain Mr. Marzuki Jatim, who had been detained, had been released from prison. (*Antara*, 10 November 1949)

***

Lampiran 55.

MUTUAL ADVANTAGES

The United Nations Indonesian Commission reported today it was confident that new relationship between Indonesia and the Netherlands, following the Round Table Conference here, can revolve to their mutual advantage. The report submitted to the Security Council said: "The commission takes pleasure in reporting that, in its judgement, the negotiations conducted at the Hague were eminently successful."

The conference decided on what the Commission called the "transfer of real, complete and unconditional sovereignty" to the United States of Indonesia by the end of the year. Its final agreements were signed on November 2. The achievements of the conference justified the hope, expressed in the Commission's first interim report, for a settlement that would mark the "beginning of a new era for the people of the Netherlands and Indonesia", the Commission said.

Commenting on the Commission's part in the conference, the report added that as unsolved problems turned up when it was hoped agreement would have been reached "parties turned increasingly to the commission for help". It made acceptable compromise proposals on 12 problems in which the Dutch and Indonesian delegates had not been able to gain. These were on New Guinea, cooperation in foreign relations, the right of self-determination, ealizedd on monetary matters, the transfer of pensions and other payments, the transfer of indemnities, the revision of existing shipping agreements, representations of foreigh enterprises in Indonesia, most-favoured nation treatment in economic field, Dutch warships in Indonesian waters, the Sourabaya naval base, and troop withdrawals. The Commission said, it would "continue to carry out its functions in accordance with its terms of reference and observe in Indonesia the implementation of the agreements reached at the conference".

The main report, consisting of 60 typed pages, summarises the conference procedure and various agreements. Appendixes to the report include the full texts of all agreements and copies of letters exchanged between the Commission and the Dutch and Indonesian delegations They covered financial, economic, military, defence, social and cultural matters, and the interpretation of points in the Charter of Sovereignty and the Union Charter. (*Antara,* 14 November 1949)

***

Lampiran 56.

MILITARY ASPECTS OF THE HAGUE AGREEMENT

Colonel Simatupang, Republican member of the Military Subcommittee to the recent Round Table Conference in a press-conference today disclosed the military aspects of the Hague agreement, summed up roughly as follows:

1. After the transfer of sovereignty all Dutch responsibilities for the defence and the maintenance of law and order in Indonesia cease to exist.
2. The withdrawal of the Dutch army, navy and air force should be implemented in as short a time as possible.
3. The Dutch army should at the time of the transfer of the sovereignty be concentrated at several places and will have no duties towards the defence of the maintenance of law and order except upon RUSI's request.
4. The time limit for the withdrawal of the Dutch Royal Army provided a thorny problem in the RTC but with the assistance of the UNCI it could be settled as follows:
   a joint technical Commission is set up which warrants that all the technical facilities for transporting the troops are ealized as soon as possible, and if the withdrawal cannot be completed within 6 months, the Committee will give the necessary clarification with UNCI assisting.
5. The withdrawal of the Dutch navy will be completed within 1 year. Meanwhile pending the upbuilding of RUSI's navy, she will be charged with several duties, however, she will be responsible to the RUSI.
6. The withdrawal of the Dutch air force will be completed within 6 months. Meantime RUSI's air force will be formed.
7. Indo/Dutch cooperation in defence is only possible if each party considers it will be to her advantage, and every time such a cooperation is felt necessary by both parties, a separate agreement will be concluded. (*Antara*, 19 November 1949)

***

Lampiran 57.

ON THE HAGUE AGREEMENT

Communist oriented parties and organizations within the Republic of Indonesia have almost solidly lined up against the Hague Agreement, a United Press surveu shows.

However, with ratification assured by the leading Moslem and Nationalist parties, as well as by the Republican Government itself, leftwing extremist opposition is reduced to the level of a loud vocal minority.

These "communist fringe" groups hold no posts within the Republican Government nor a seat in the Republican Parliament. Whatever seat they once held (mainly by the orthodox communists) were forfeited during the abortive communist revolt against the Republic last year.

Despite intra-party feuds, all communist factions within the Republic uniformly reject the Hague Agreement on the grounds that "100%" independence is not won. They explain this by pointing to the unsettled New Guinea question, the retention of the Surabaya Naval Base by the Dutch, and the fact that the new Republic will be linked in Union with Holland and under the Queen –albeit a loose Union.

Early Jogjakarta reports indicate that their opposition is gaining little, if any, ground. Most Indonesians seem to adopt the attitude that "they would have rejected the agreement even if it stipulated that we colonize Holland".

Spokesman for the various Marxist groups at Jogjakarta speak for themselves:

1. Sukarni, Chairman of the Murba-party—Tan Malakka *front* group—said his party rejected the Hague Agreement "because it is the fruit of a ealizedd policy". He said Murba (which means *masses*) stands with the August 17 proclamation of independence issued in 1945. He said that all negotiations are unjustified unless the 100% independence of Indonesia is recognized. Sukarni said independence does not only mean political freedom, but social and economic freedom as well. He said that Murba will continue the struggle for complete independence and will continue towork outside the parliament in "a democratic fashion".
2. A spokeman for the fugitive orthodox Communist Party of Indonesia curtly said the communists will "ignore" the Hague Agreement since the Republican Government which negotiated the accord does not represent the people. The question at the moment, he said, is not whether to accept of reject the Hague results but to continue the national struggle. (Moscow radio broadcasts have condemned the Republican leaders as "traitors" and have described the Hague Agrement as a "new form of colonialism".)

3. Mohammad Djoni, Chairman of the Red Communist Party—a loose, undefined Marxist splinter group—said his party "regretted" the fact that there is no strong opposition in the Republican Parliament against the Hague results. Djoni demands that the Dutch recognize Indonesia's proclamation of "100%" independence. He contends that under the new agreement Indonesia does not even achieve dominion status. "We hardly get 40% independence," Djoni said.

4.Akoma, a communist youth league and study group which is an offshoot of the orthodox communist party, reject the Hague Aggreement on the grounds that Indonesia has not achieved "100%" independence. Akoma made public this decision in an announcement through its Central Bureau. This outfit, however, has always opposed the Republic because the Republican proclamation and political manifesto guarantees foreign investments in Indonesia.

5.SOBSI, a Marxist-oriented federation of labor unions, has publicly taken no stand on the Hague Agreement because—as the spokesman explained—"we have been too busy preparing to send a delegation to the WFTU Congress at Peking". Most SOBSI members, however, privately reject the agreement because it makes "too many economic concessions". SOBSI, which consisted of 34 trade unions before the ill-fated communist revolt last year, today claims a membership of 16. Informed neutral souces describe these as mainly "paper unions".

The position of these minor Marxist-fringe groups should be placed in proper perspective. They are extremely vocal but carry little, if any, weight with the possible exception of the Murba Party. Murba makes a strong Marxist-nationalist appeals as opposed to the intenational-marxism of the orthodox Communist Party of Indonesia. (*Antara*)

***

Lampiran 58.

WORKING COMMITTEE'S SESSION

The Republican Premier, Mohammad Hatta, urged the Parliamentary Working Committee today to "deeply study and deliberated on the results of the recent Round Table Conference at the Hague as a preparation for the forthcoming plenary session of the KNIP (National Committee) (temporary parliament), because, he said the Working Committee had a wide apportunity to observe the Round Table conference results in deeper dimensions. In this manner, said Hatta, the coming plenary session of the KNIP could be limited in view of the short space of time available. According to the Premier, before mid-December the provisional government of RUSI should already come into being, and this should be preceded by the election of a president.

The prerequisite of the presidential election is, according to Hatta, the ratification of the Hague Agreement by the parliaments of the Republic and the Federalist areas. Hatta, therefore, urged the members of the Working Committee to deeply study and deliberate on the Hague Agreement as a preparation for the forthcoming plenary session of the KNIP.

Hattasaid that "the man in the street" might not be satisfied with the Round Table Conference results, perhaps because of the distant seat of the parley and perhaps also because "he can not make a distinction between therights and wrongs of the press reports disseminated by the other ealized order to create a split in our ranks, perhaps also because it is easy to criticize" Hatta continued.

"But the heaviest responsibility toward the future of the nation can only be felt by those who daily have to bear that responsibility on their very shoulders." According to the Premier, one of the complaints was embodied in the question, "where will the government take us?" Hatta assured that the government was leading the Indonesian people toward a free Indonesia, and "the government has never deserted this stand since the proclamation of the Republic in August 1945 and has clung to the determination to defend this freedom ideals." The government, said Hatta, had never been less in its determination that the groups who propagated the slogan "back to the proclamation of August 17, 1945".

The Republican premier emphasized that August 17, 1945 constituted a starting point, which could never been ignored, of beginning to a fight with the greatest determination. He added, however, every struggle for the attainment of a great ideal could never be achieved overnight, because it needed space and time. "And this is also the case with the fight of the Indonesian Republic as the symbol and capital of the freedom of the whole nation," said Hatta.

The premier continued to state that in this fight for independence it would be wise for people to recollect the history of the Frence revolution which had not succeeded in producing results although endowed with a wide opportunity. And the cause to this, according to Hatta, was nothing else but the anguish conflict between ideal and reality. Hatta pointed out that there were times when people thought that a "negotiating policy" followed by the government might lead to the obliteration of the Republic and the return of the Dutch colonialism, however it had now been proved that the Republic revived vigorously, because steered with wisdom based on calculations and the balancing of internal with international forces.

Hatta observed that when fighting toward an ideal with strong determination "one could succeed in wrestling time although at one time he loses space".

The premier opined that, on the average, the results of the Round Table Conference could be regarded satisfactory, although not all people might have that satisfaction.

"Takes as a whole, historically and internationally," said Hatta, "what we have achieved is the best achievable at this time." He clarified that the transfer of sovereignty would be witnessed by the whole world and would be recorded in the United Nations register, and not only Indonesia would be sovereign but would be proposed by the Dutch Kingdom as member of the United Nations. He said: "The constitution of the RUSI, as bases for its sovereignty, was not one that had been forced upon us by the Dutch but one that had been worked out by the Indonesians themselves according to the outlines of the Republican Constitution founded on the five moral code."

Hatta further pointed out that free Indonesia was not the ultimate aim for the Indonesian people but merely represented a requisite for the attainment of happiness and welfare of the people physically and mentally. He said: "Just at this time our fight will be heavier and loftier for the obtainment of the freedom of humanity from any oppression of which the development not only depends on the progress within the country but especially in correlation with the whole world. "This struggle, according to Hatta, required "unshaken idealism, true sense of reality and unexhaustable tolerance."

As regards New Guinea which has reflected dissatisfaction in certain quarters, the Republican premier declared: "Everybody who has confidence that space is available for Indonesia, is courageous to accept a future settlement of New Guinea because the Dutch, in the space of time, will later experience by themselves that keeping New Guinea out of Indonesia cannot turn out to be advantageous to themselves. Not politically, because there will be a time that the right of self-determination will be applied to New Guinea, whereas the maintenance of this question as a point of dispute might disturb the cooperation within the Indonesian-Netherlands Union. Nor economically, because their holding of this might be disadvantageous to them because New Guinea is a minus-area."

Hatta further made plain that before the war the Dutch Indies Government had annually earmarked not less than 10 million guilders for that island which was covered by the revenues from other parts of Indonesia. He continued, “If New Guinea is snatched off from Indonesia the expenses are to be borne by the Dutch people themselves.” Besides, he said, the economic exploitation of New Guinea could not be covered by capital investment alone, but should also be assisted by the necessary manpower and this, for the time being, could not be supplied by New Guinea alone and without Indonesia, generally speaking, New Guinea could difficultly be developed.

The Republican premier further revealed that amidst the sharp conflict between Indonesia and Netherlands there had been only two methods to settle the New Guinea question, namely to postpone the settlement or to accept a deadlock which might have been followed by an armed conflict, while New Guinea itself could not be saved in this latter manner. He further declared that outside the Round Table Conference there had emerged a proposal that New Guinea be made a condominium between the Netherlands and Indonesia, however this proposal was not acceptable to the Indonesians, because it would mean that “we share with the Netherlands a joint colonial rule over New Guinea”. He added: “Indonesia who has been freed from the shackles of colonialism does not desire to rule over other people.”

He said that, under those circumstances, the only way out was to postpone settlement until later as the results of a compromise proposal put forward by UNCI, and New Guinea will later be negotiated between two sovereign countries.

In this passage of his speech Premier Hatta extended his address to the New Guinea people saying, “Be patient, your freedom shall come. Indonesia shall not forget you.”

Hatta stated that the deferment of the New Guinea question did not reduce the sovereignty to be transferred to RUSI. “It only concerns a territorial boundary, but it does not affect the authority of RUSI as a free country,” he said.

Concerning the Indonesian-Netherlands Union, the Republican premier stated that the Union did not lessen the status of signatory parties as free and sovereign countries. “All decisions regarding cooperation shall be taken with common consent of the minister of both countries in a conference to be held, and all decisions to be agreed apun shall be ratified by te parliaments of both parties. Without this ealizedd nothing will happen.”

The head of the Union, said Hatta, had no political authority and neither had any position within the scope of Internasional Law, but generally, was only endowed with a ceremonial function.

As regards the authority of the RUSI internally, the premier said that there were no measures encroaching on it, and RIS was free to embark on any policy it regards suitable for preserving the welfare of the people provided that all these measures were lawful. All this proves, said Hatta, that RIS was sovereign outwardly as well as inwardly.

Speaking about independence, the premier stated that at present there existed no completely independent country free to take any actions and commitments. These, he said, depended on the wisdom of the government and the people and on the obligations it carried in respect of the outside world.

He said: "A country who has large debts to pay to foreign countries is positively not free in its steps and actions. Although in law it is possessed of a wide freedom of action, it is held to decrease its debts. The national debts Indonesia has to bear is heavy. The difficulty free Indonesia is faced with since its inception is a deficit of no small magnitude. Besides, RIS has to pay part of the debts of the former Dutch East Indies amounting externally not less that 1400 million guilders.

Although Indonesia succeed in decreasing its debts in the beginning with, say, 2 million guilder, this 1400 million guilders foreign debts remains a heavy burden to the Indonesian people. Not to speak of other burdens incidental to the transformation of Dutch Indies in to a free Indonesia amounting to tens of millions of guilders." "However," said Hatta, "if Indonesian people actually desire to become a free and repectable nation, we should be courageous to swallow the bitter pill of freedom."

The Republican premier further stated that from the moment of the transfer of sovereignty that whole Indonesian people and government were responsible for the security and the welfare of the country. He said, the Constitution guaranteed the basic human rights, therefore, all subjects, without discrimination of nationality and race, whould be guaranteed their personal security of their properties as long as they were not plotting against or threatening the security of the country, because besides being a country that respects humanity, our country is also a lawful country."

Hatta clarified that the results of the Hague Conference was far greater than agreements concluded in the past which failed in their implementation, and what happened now could not possibly have happened one or two years ago. "Time and a momentary situation are bound to charge our standpoint," Hatta said. According to the premier, the Union as embodied in the Linggadjati agreement was "heavier" that the one now arrived at. He clarified that besides the influence of time and situation, the results of the Round Table Conference had been the fruit of tight cooperation between the Republican and Federalist delegations which could be said to be united in their attitude facing every question. According to Hatta, this unity was a proof to the good results. It should be preserved and continued in time to come because to surmount the difficulties ahead in building RUSI all attention should be focused on the strengthening of the unity of the people.

"Any difference should be ironed out and any feeling fo revenge should be discarded," said Hatta concluding his declaration before the Parliamentary Working Committee. (*Antara*, November 25, 1949)

***

Lampiran 59.

DEBATE AT THE U.N. GENERAL ASSEMBLY

During the debate at the U.N. General Assembly on the Indonesian question regarding the 14-power resolution, congratulating the Netherlands and Indonesia for their agreement at The Hague Conference, theUkrainian delegate, Manuilsky, charged "Netherlands assurances two weeks ago to the plenary session of the Assembly that peace will prevail in Indonesia. The Hague agreement do not correspond to the reality. War is being waged now with no less ferocity than in the past." He said, 70.000 Indonesian in Java and Sumatra are "being detained on political grounds although Hague manifesto calls for the liberation of jailed political leaders. How can the Assembly acknowledge an agreement founded on force and lawlessness.

The resolution was sponsored by Australia, Burma, China, Egypt, India, Iran, Lebanon, Pakistan, the Philippine, Saudi Arabia, Syria and Yemen.

India's Sir Benegal Rau presented it to the Committee. Rau said, the agreement was "particularly gratifying to India since she convoked the New Delhi conference on the question last January which had a material influence on the subsequent course of events."

Manuilsky contends that the Government in Indonesia is not presentative of the people. "There are parts of Indonesian forces which do not accept orders from Hatta.

Manuilsky called for withdrawal of Dutch forces to the lines December 1948 also freedom for political prisoners the United Nations commission to supervice the implementation of these recommendations and abolition of present United Nations good offices commission which has handled Indonesia case so far.

Pointing to the Arab states named as sponsors of 14 power resolution, Manuilsky asked how they could sign it "when on August 7th the Islamic area in West Java was the consistent target of attacks by Dutch troops."

Netherlands delegate C.J. van Heuven Goedhart in reply defended Hatta Government as the "true representatives of the overwhelming majority of the Indonesian people. There is a full proof of their deep love of many millions for which they are spokesmen. To label them traitors as Ukraine has done for no better reason than that they do not belong to a communist party is in my view a sad and an additional proof of communist disappointment.

Warren Austin said: "I believe they can count upon continued United Nations assistance in the future—the United States welcomes the agreements and in the successful application of the principles of the nation—the United Nations commission

for Indonesia has correctly characterized the results of the Hague conference as the beginning of the new era for the peoples in Natherlands and Indonesia".

The special Political Committee with 43 to 5 with 4 abstentions approved the 14 power resolution congratulating the Netherlands and Indonesia for the Hague agreement establishing the United States of Indonesia.

The Soviet bloc delegates made repented and insistent attempts in the debate to prevent the 14 power resolution from the vote. They insisted that they had not had the time to study the detailed account of the Hague conference and the text agreement.

The congratulatory resolution in its 4th point stated that the United Nations "welcomes the forthcoming establishment of the Republic of the United States of Indonesia as an independent sovereign state".

Katzsuchy (Russia) told the committee that it was "such a serius question for Indonesian peole that it should be studied. Manuilsky charges that the terms of the Hague agreement actually leave Indonesian people as "continuing appendage of Netherlands colonial system with no real independence".

The Committee chairman Nahrollah Entzam of Iran put to the Committee for vote the request of Byelorussian Republic that the debate on the question be continued next week. The request was defeated by 36 to 5 with 8 abstentions.

The Ukraine's resolution would have astablished a United Nations commission composed of representatives of members of the Security Council—to investigate the activities of the Natherlands authorities which have taken a form of brutal terrorism, murder and persecution democratic leaders of Indonesian people.

It would have dissolved the current United Nations Commission for Indonesia on which the Russian bloc not represented. Tharapkin (Poland) insisted that the United States opened the way for "betrayal" the Indonesian people by inducing Indonesian President Sukarno and Premier Mohammed Hatta to "stifle once and for all the national liberation movement" meaning the leftwing element including the communist groups.

Manuilsky asked what had become of the former Indonesian Premier Sjarifuddin the leftwing socialist reportedly imprisoned. Indonesian communist leaders Muso and Tan Malakka have been reported killed.

Mauro Mendez (Philippines) said that the Philippines would support the congratulatory resolution "with sincere hope that it will set an example for all peoples especially those with grievances still to air and score to settle up." He said, it was the United Nations duty to forget pre-Indonesian quarrels and "sincerely address ourselves to the task of helping to implement the terms of the Hague agreement."

Russian delegate Semyon Tharapkin claimed that the "Indonesian people have rejected the shameless agreement of the Hague. He said, "the Indonesians have been places in financial and economic chains—the agreement is nothing less that a deal between betrayers of Indonesian national interests and Dutch colonizers". Russian charges that

under the guise of establishing the Republic, the Netherlands intends to establish a series of puppet states whereunder the area will remain colonial appendage of the Netherlands. He said, the regime of Dutch military occupation is being imposed and claimed that the special naval base at Surabaya is permanently assigned to the Dutch.

Thus under the cloak of assisting the Republic the Dutch will maintain their colonial armies in Indonesia and keep under political and military control the whole territory. (*Antara*, 3 Desember 1949)

***

Lampiran 60.

A STRONG NATIONAL ECONOMY

Ways and means to build up a strong national economy incidental to the birth of a new State independent and sovereign Indonesia at the close o this year were propounded by the Republican premier, Dr. Mohammed Hatta, at the reception here last night for the Inter Indonesian Economic Conference attendants.

Pointing out that Jogjakarta, the Republican capital, remained the focus of political and economic attention with the imminent political and economic sovereignty of Indonesia, the premier warned the audience that "if the condition of our people in time to come remained bad, we ourselves are responsible for it and cannot blame others."

He said that the Indonesian themselves should guarantee the well-ordered and wide-spread public welfare for which "we can work out laws for social security."

Hatta bluntly said that "too many ideals" had already been propagated so far and that the most important step how was the implementation of these ideals. He said that Indonesian traders and enterprisers formed the group intrusted with the realization of the so many economic plannings. Production should be accelerated and stepped up, international trade should be intensifield. In the vocabulary of national economy import is a contribution to production of commodities for the benefit of the people. According to Hatta, export is not the end in itself but a means to acquire foreign exchange to pay for imported goods needed by the people an necessary for rehabilitation purpose. As regards the future of Indsonesia's economy, the premier stated that RUSI (Republic of the United States of Indonesia) was bound to encounter two kinds of difficulties, namely to bear the national debts agreed upon at the recent Round Table Conference, on to face the deficit inherited from the Dutch pre-federal administration..

He stated that of the 3 milliard guilders budget of the prefederal government, a deficit of 1½ milliard guilders had to be settled. He said that this great deficit could not simply be checked off but "we have to bear it." The premier said that the RUSI budget later should properly keep a balance with the state revenues," it not our country will plunge into national bankcrupty.

All our efforts should be concentrated in eliminating this deficit. To meet this production should be realized throughout Indonesia, and for this purpose the country has to secure foreign loans."

Another important factor facing the country is, according to Hatta, the food problem. He reminded that before the war Indonesia had imported rice to fill the shortage of people's food. In time to come, he added. Indonesia will be forced to produce its own food supplies. Wide tracts of fallow ground in Sumatra are to be tilled

in a modern manner by means of modern machineries from abroad.

The clothing problem should be tackled by the people themselves. The cultivation of cotton and the erection of textile factories are to be encouraged. Hatta said that Indonesia can produce a quality of cotton which, of courses, cannot compete with better species like Egyptian. He mentioned the island of Flores to be a fertile soil for cotton planting. Hatta recognized that the native textile industries would turn out to be less satisfactory in producing good quality textiles, however, he pointed out that good quality had to be imported.

Hatta was convinced that for the consumption of the people a comparative low-grade textile will do in the realized. Speaking of housing premier Hatta proposed that as many as possible cement factories should rise in the country breaking with the past experience that whole Indonesia had only one cement factory. Power supply had necessarily to be spread to the smallest village cottages making people acquainted with the products of modern science from which they had for quite a long time stood aloof. (*Antara*, December 5, 1949)

***

Lampiran 61.

GENERAL DEBATE OF THE KNIP
(1)

Seventy-four members are on the speakers' list during the general debate of the KNIP (Republican Parliament) opened today on the Hague agreement. Chairman Assaat inaugurating the session said that two days and two nights will be reserved for speakers and that, if this period turned out to be inadequate, a third day will be made available.

Among the four spakers today only one openly denounced the results of the Hague's round table conference. Dr. Sigit, a non-party delegate, branded the announcement of the forthcoming unconditional sovereignty for Indonesia as mere "Government propaganda", and added, "If there was anyone who was satisfied with the results of the round table parley, he would be the victim of an ostrich policy".

Speakers reminded that even President Sukarno had found some unsatisfactory points in the ealized. Sigit continued: "If the Government said that the agreement was carried by 95% of the will of the people, I say it is only 40%. And if this 95% were the outcome of 40 years struggle, the other 5% shound have been attained in three years".

In his spirited speech Sigit disapproved of the decision of the Government and the Parliamentary Working Committee to impose an emergency quorum and voting because of it being contrary to the Republican Constitution. He said: "If it was taken just to speed up the decision on the Hague agreement, it would be better to postpone the transfer of sovereignty instead of plunging into consequences of measures that are erroneous".

Touching the Dutch military mission, Sigit demanded further explanation as to the number of members, the volume of the KNIL (Dutch Royal Est Indies Army) to be amalgamated into the Federal Army. He asked what was the answer to be given to the problem resulting from the rationalization of TNI troops, if the number of the KNIL to join the Federal Army proved to be too large. He wondered if this Dutch military mission would later not turn out to be the "sword of Damocles".

Sigit asserted that the farmers group was bound to be forgotten even if the country had become independent and this group had sacrificed so much for the desired freedom. He added that the Government could remedy this evil only by concluding big foreign loans. And this, he said, under the already heavy burden of debts taken over from the Netherlands, so that there was a chance of provoking a serious foreign influence.

He warned that the fate of RUSI would be like China's, whilst, according to speaker, the "difficulties arising out of such situation would not be necessarily less than the difficulties in the event of the continuation of guerilla warfare".

He concludes his vitriolic speech by saying: “If the Government desires to create chaos, this can be accomplished by the results of the round table conference. But I do not want a social chaos and shall be grieved if such should happen. If I should be a communist, I should enjoy to be it”.

Pangeran Suriohamidjojo from Solo (non-party) endorsed the Hague agreement and said that a peaceful settlement, if not disregarding the national ideals, was better than one with armed might because “if the war has been won, disaster would ealized have been the inevitable aftermath”. Speaker emphasized that the sovereignty to be transferred was not a “present” but a compensation for the fight of a people who desired freedom. He added: “Had there been no round table conference, the Indonesian people would, in any way, have become independent”.

Sadjarwo of the Farmers group (BTI) flayed the provision of restoring foreign interests which, according to him, ealizedd a threat to the position of the laborers and farmers. He stated that even if the Government of RUSI could work out social legislation, the sum total of public welfare would only have been adequate if the profits were booked in the State’s treasury. The farmers leader pointed out that the basis for the future economy of Indonesia will always be curtailed by the phrase “general interest” which in turn will be limited by “the interests of agricultural estates” and “the interest of industrial security”, so that, according to speaker, the labour and farmers group whose economy is actually weak is bound to face the circumstances with great difficulty. (*Antara*, 8 Desember 1949)

***

Lampiran 62.

GENERAL DEBATE OF THE KNIP
(2)

Mr.M.P. Oud, leader of the Freedom Party (the party of Foreign Minister Stikker) told Parliament today that he did not think the bill to transfer the sovereignty to Indonesia was in conflict with the Dutch constitution.

But he had "serious objections to it from the policy point of views. Speaking in the resumed debate in the Second Chamber Mr. Oud said his party had still not made up its mind whether to support or object to the measure.

The arrangements made for the position of the Crown were "most unsatisfactory", he said, while the economic and financial agreements were "by no means entirely acceptable".

Declaring that the whole bill was "not very acceptable" Mr. Oud said, he expected a clear statement from the Government, especially from Foreign Minister Stikker on the visit to Indonesia from which he had just returned.

But the Freedom Party leader agreed the rejection of the bill "would mean chaos and the weakening of Holland's international position".

Mr.J. de Graffi, Catholic, ealizedd the arrangements made for the continuation of service of Dutch officials in Indonesia. He suggested that the officials should have been allowed to remain in Dutch service, so that they could act as a sort of "aid corps" in the new state.

He pointed out to Britain's attitude towards civil servants when India was given independence and said Holland should have followed that example.

Professor P.S. Gerbrandy, anti revolutionary member and former premier of the Dutch government in London, said that the bill meant "unconditional surrender to revolution and international forces".

Yet the Government was going ahead with its plans as if Parliament had already gave its assent. "The main figures at the Round Table Conference," said Prof. Gerbrandy, "were the Republican's leaders who had been put behind barbed wire during the last military action."

He then added: "If only they were still there." Complaining that the Government had not published "the Republican's documents found at Jogjakarta", he said he know they intended to do so, as he had managed to secure a proof.

Prof. Gerbrandy recalled that it was 7 years ago today that Queen Wilhelmina made her speech offering Indonesia independence. "I was co-responsible for that speech," he declared. "But I had never imagined that we would face with such a monster as the lies on the table before us today."

The former Premier, Prof.W.Schermerhorn (Labour) supporting the bill urged that "the best Dutchmen should continue to go to Indonesia". Another anti revolutionary spokesman, Mr.J.W. Meyerink, said that though he could not support the bill he ealized that rejecting it would produce "chaos". He therefore suggested that a new conference should be called with the same participants as the Round Rable Conference to work out "a better preparation for the transfer of sovereignty".

Mr.J.R. Schmal made the shortest speech of the debate by saying that as the Chamber had been presented with an accomplished fact it is not worth the trouble to talk about it.

Mr.P. Zandt, Political Reformed Party, said that American policy in China had failed and he thought the "same thing would happen in Indonesia". He held the Government and supporting parties responsible for the Round Table Conference, which was "a complete capitulation of Holland".

The session then adjourned until tomorrow morning when the government will reply to the speakers in the debate. Overseas Territories Minister J.H. van Maarseveen and Foreign Minister D. Stikker, will reply for the Government, and the Premier, Willem Drees, may also address the Chamber. (*Antara*, 7 Desember 1949)

***

Lampiran 63.

ON REPUBLICAN PARLIAMENTARY SESSION

(by G. Harsono, *United Press* Special Correspondent)

The three-day Republican parliamentary session debating ratification of the Hague agreement ended Saturday night with little doubt that the accord will be accepted in Monday's or Tuesday's vote.

The Republican Government is expected to reply Monday and a vote is expected soon thereafter.

Parliament indicated, however, that it will demand that article 27 & 33 of the Republican constitution be incorporated into the new constitution of the new Republic. The new constitution, scheduled to be signed at President Sukarno's Djakarta home Monday, has been postponed 48 yours pending ratification by the Republic.

The two articles from the Republican constitution cover social welfare and nationalization.

Article 27 declares in part: "Every citizen shall have the right to work and expect a reasonable standard of living."

Article 33 declares in full: "Section 1. The nation's economy shall be organized cooperatively.

"Section 2. Branches of production which are important to the State and which affect the life of most of the people shall be controlled by the State.

"Section 3. Land and water and natural riches therein shall be controlled by the State and shall be exploited for the greatest welfare of the people."

How these articles will be incorporated into the constitution of the new Republic is not made clear, especially since 10 Dutch-formed Federal States have already ratified the Hague Accord as it is.

Speakers at the Republican parliamentary session reaffirmed the right of protection of foreign enterprises in Indonesia.

During the debate, spokesman for the two major parties, the Moslem and Nationalist parties, threw strong support behind the agreement. The minor Islamic and Catholic parties also voiced approval.

However, various speakers hotly scored the Dutch retention of the Surabaya Naval Base, the New Guinea problem and the undetermined length of stay of the Dutch Army before its withdrawal from Indonesia is completed.

Leftwing spokesman sharply criticized President Sukarno's now famous remark, "If the Hague Agreement is rejected I do not know what will happen next."

A spokesman for the Marxist, pro-Tan Malaka "Masses Party" declared in rebuttal: "I do not know what will happen next if the Hague Agreement is accepted."

Sutan Sjahrir's "moderate" Socialist Party is expected to abstain from the final vote, although most Socialist speakers clearly rejected the agreement on the grounds of "too much American influence".

Some leftwing spokesman felt if the Netherlands-Indonesian Union is truly between two equal partners the President of the new Republic should alternate with the Queen of Holland as head of the Union.

The Chinese minorities voiced disagreement during the three-day debate with constitutional discrimination between Indonesian citizens and Indonesian subjects of Chinese origin.

All in all, however, observers predict an easy ratification of the Hague Agreement early next week. (*Antara,* 11 Desember 1949)

***

Lampiran 64.

CRITICISMS TOWARD THE ROUND TABLE CONFERENCE

Fierily challenging the various criticisms launched by various KNIP (Parliament) members toward the concluded agreement at the Hague Round Table Conference, the Republican premier Dr. Mohammed Hatta in his declaration before KNIP today emphasized that the RUSI (Republic of the United States of Indonesia) to be established as a result of the conference was actually independent and sovereign and that the new State's economic structure was to be different from the liberal pattern which, in the past, used to carry out a production system of their own free will.

Hatta added that sovereign RUSI will continuously be in a position to set bounds to the power of foreign investments and carry on an economic policy aiming at the equitable distribution of national revenues.

The premier emphasized that the Government had never flinched in upholding the independence proclamation in 1945 and would set to work speediestly to accomplish the realization of that proclamation.

Hatta remarked that both the proponents and opponents of the "negotiating policy" had one aim in common: the unification of the country. He said that the Government, who adopted the policy of discussions was fully cognizant of the difficulties to be faced in the coming RUSI, and therefore urged national unity.

Hatta said that the considerations of the Indonesian delegation in accepting the Irian settlement was to firmly hold what had been achieved and to continue to struggle to achieve what had not been achieved yet.

Replying to the concern expressed by various speakers about the fate of the democratic rights, Hatta said that in the RUSI constitution such rights were assured. Hatta said that the Republican constitution would continue to function and need not be included in the RUSI; further he said that the formation of the RUSI constitution had better be left to the RUSI People Representative Council to be formed later.

About the Union status which according to various speakers would bind the RUSI tightly to the Dutch, Hatta said that the Union being an international agreement could not bind too tightly as to transgress the sovereignty of either of the participants of the Union. He said that there were no sanctions in cases of transgression of the sovereignty by one of the members for, he said, such sanctions would mean limitations to the sovereignty.

As regards the concern of some members as to the necessity of the Union head to state ("constateren") agreements made between RUSI and the Netherlands, Hatta said, that such "stating" would not mean any constitutional power as it does not represent a

"countersign". He said that it was the duty of the Union head to make the "statement" and that would not mean that the Union head had the right of veto. Hatta further explained that such agreements would not number much, as the interest of RUSI in the Netherlands would not amount much. And what is more, Hatta said, the RUSI could not be forced to implement the decision of the Court of Arbitration.

As to the Culture agreement, Hatta said that such agreement was needed to supervise to the extent of the possibilities of the Dutch cultural infiltration, but in this case, Hatta said he was convinced that the Indonesian culture was sufficiently strong to stand the challenge of foreign culture.

To the charge that the exclusion of art. 33 of the Republican constitution would lead to a liberal economy, Hatta said that the existence of foreign capital in Indonesia was a hard reality and could not be obliterated. But, he said, such economic structure as existed during the colonial regime, a system which gave power to foreign investments to raise unlimited productions so that the labour and land factors were disaffected, would not return.

The reason, according to Hatta, was that the system and the goal of productions of foreign capital in the RUSI would be subject to the supervision of the RUSI in the capacity of a country which must be able to guarantee a fair national production, a system which according to Hatta would not be much different from the aims as contained in article 33, and 27 of the Republican constitution.

As regard depreciation and transfer of capital which according to various speakers would cause an outflux of money Hatta said the RUSI would impose limits in line with the situation of her foreign credits.

Hatta stated the decline of the current production in the country and opined that it was the duty of the Indonesians to increase the country's production. As the first step towards the increase of production he said that textile and goods for the use of the common people must be imported next to equipments for production. He said that the future import policy must be the vital concern of the RUSI and must be brought in line with the industrialization policy of the country. He said that he disapproved of a one-sided policy as had been carried on during the defunct colonial regime, a policy wholly dependent upon world market prices.

Hatta said that the RUSI would carry on the transmigration policy. The Prime Minister expressed his conviction that the current bad economic situation would be overcome and within 4 years production in Indonesia would reach such a stage that there would be a balance between payments for import and export revenues, while a profitable balance would be achieved within 5 or 6 years.

Speakers who expressed their concern of the consequences the results of the Hague agreement which they said would lead to another colonialism, he termed "afflicted with inferiority-complexes" and lacking in self-confidence. He scorned "such leaders" who

should be examples to the people. He advised them to improve people's organizations and give them leaderships, as he said, organization must be faced with organization.

As to the military agreement, Hatta said that it was more profitable to take over the sovereignty although the Dutch army was still in Indonesia, than to wait for the transfer after all the Dutch troops had been evacuated. He said that with the transfer of sovereignty the RUSI in conformity with her new status would be more free to take various measures externally as well as internally.

Hatta said that one need not be concerned about the fate of the Republican army T.N.I. as the army is building up, while the Dutch army is being liquidated. Hatta said that the Government is fully cognizant of the difficulties relating to the inclusion of the Dutch Indian army KNIL in the RUSI's army, but he said he was confident that the difficulties could be overcome. Hatta expressed his confidence that there were enough factors guaranteeing that the structure of RUSI army would be popularly grounded.

Relating to the guarantee for the officials of Dutch nationality in the coming RUSI Hatta said that changes in their legal status should not disaffect them, but as to the officials of Indonesian nationality viz. those working in the pre-federal government, the RUSI could if it chose eliminate them. Hatta said, that according to the decision taken by the Republican Cabinet Republican officials would be given the same 2-years guarantees, some months' extra payments and the same salary scale as that enjoyed by RUSI government officials.

He said that students and invalids would be given guarantees. In answer to a question why the Indonesian nationality was required for the President of the RUSI, he said that this was based upon the Indonesian majority. Hatta explained that the Indonesian nationality was required only for the President, all other offices being open for all citizens.

In defence of President Sukarno's statement that he did "not know what happens next" if the Hague agreement was not accepted, Hatta denied that the statement contained any threat as had been charged by some KNIP members.

Hatta gave a picture of what an independent RUSI could do in the future. He pictured the large-scale reconstructions and the reorganization of the social structure which the country could take up, and described the international status of the country as member of the world community of nations or as member of the UNO.

He further pointed out the grave responsibility of the KNIP members if they did not avail of the possibilities which could bring the Indonesians nearer their goals of achieving what was meant and aimed by the proclamation of independence.

Hatta said that the state of war would be revoked the civil administration abolished and the democratic rights reinstituted in the Republic of Indonesia, when the conditions allowed the Government to do so. (*Antara*, 12 Desember 1949)

***

Lampiran 65.

PROVISIONAL CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF THE UNITED STATES OF INDONESIA

Jakarta, Dec. 14 (Antara)

The Provisional Constitution of the Republic of the United States of Indonesia (RUSI) was signed today by Representatives of the 16 constituent states at 7.25 p.m at the ceremony today in the inner room of the Republican House (the former residence of President Sukarno and subsequently the ex-premier Sutan Sjahrir, 56, Pegangsaan Timur Str.) here.

This signing followed on the heels of the approval of the Hague agreement by the Republican Parliament (KNIP) at Jogjakarta this afternoon. The first signer was Dr. Susanto Tirtoprodjo on behalf of the Republic, followed by Sultan Hamid for West Borneo, and subsequently by the other 14 states' representatives signing totally 21 copies of the Consitution.

The ceremony was commenced with the address of Dr. Mohammed Rum, chairman of the National Preparatory Committee, saying that two most important features of the provisional Constitution were its function as a basis of national unity and its democratic basis.

The members of the Committee will proceed to Jogjakarta in two groups Thursday and Friday where they will meet to elect the first president of the RUSI on December 17.

The full text of Rum' address is as follows:

"We are met here today by the merciful blessing of the Almighty and it is therefore with a deep sense of gratitude that I welcome you at this historical site.

We are gathering to consummate the work that you and our friends who are now not present here have initiated in the Nertherlands—the framing of the Provisional Constitution of the United States of Indonesia.

There was rejoicing in the Indonesian Delegations in Scheveningen when they received the Draft of the Provisional Constitution on October 29, 1949, since it marked the realization of our ideals of welding strong unity among ourselves.

We reached our objective only after having been through an arduous road, strewn with obstacles particularly in the past 4½ years.

With the Constitution we can prove to the world and to ourselves that the sense of being people, having one language and one country, is a strong invincible power with which we shall realize the ideals of the nation.

However, any law, as any creation of the human mind and human hands, has its flaws, which people will be quick to notice. Such is also the case with the laws of this Provisional Constitution. I think that we are all aware that our Provisional Constitution is far from being perfect. In framing it, we strove to have a set of laws which would a least enable us to work during a period of one year. It may be possible that after that one year much of what is in the present Constitution proves to be workable, but the main thing is that within the year the people will have adequate opportunity for national development. Viewed from this angle, I feel that the makers of the Provisional Constitution have been successful.

The Provisional Constitution affords the people opportunity to express their desires concerning the ultimate status of their respective regions which, now as before, is the cause of many difficulties, and eventually the people will elect a Constituent Assembly which will establish the final Constitution.

The basis of belief in One God, humanity, nationalism, democracy, and social justice, as contained in the Preamble, underlie all laws contained in this Constitution.

I am convinced that this basis will also educate and inspire the people. In this respect we must give full credit to the Provisional Constitution.

It would be inappropriate, and it would even be impossible, to discuss here the political ramifications of the Provisional Constitution. In the one year to come we will have ample time for such discussions.

I only wish to call attention to the two most important features of the Provisional Constitution: its function as a basis of national unity and its democratic basis, which we will have to defend in the year ahead.

May the Lord give us the strength for our heavy task in the time before us.

And may I now invite you to set your signature to the Charter of the Signing.

Merdeka!" (*Antara*)

***

Lampiran 66.

PRESIDENT SUKARNO'S SPEECH

Jakarta, December 17. (Antara)

The following text of President Sukarno's speech is issued by the Delegation of the Republik of Indonesia.

President Sukarno after having been sworn in as the first President of the RIS, (10.30 hrs) today, said in an address to the Indonesian people which lasted from 10.50 hrs till 11.30 hours inter alia the following:

I have been sworn in as the first President of the RIS. Personally, it is the most momentous event in my life. May God help me in the discharge of my heavy task. I hereby render my thanks to those who have elected me, since they have put their trust in me.

At this moment my mind went back to the Indonesian people who have sufferrend, to the war-victims. May God close the deceased who have given their lives for our common cause.

Yesterday I was elected by a council of representatives from the Republic of Indonesia and the other member-states of the RIS. It would be more perfect if there could be held a more direct election, by the people or, at least, by an electoral body directly elected by the people.

I have actively taken part in the national struggle for thirty years. For more than thirty years I have shared the national feelings of our people.

I am a servant of the people, not their master. Therefore, I solemnly swore to serve my people and country.

In the preamble of the RIS Constitution is put as basis of our government: the Pantjasila, of which the first item is: belief in God Almighty. Therefore, I have sworn as a religious man.

My religion demands that each of us gives guidance to his brothers. Therefore, I shall try to give guidance to you.

For us, Indonesians democracy is not a new conception. There is a difference, however, between Indonesian democracy and other ones. Ours is a democracy with leadership. The leader has an arduous task. He must know how to lead. For me, there are three types of leaders:

1. there are leaders leading from the top only;
2. there are those who are only the mouthpieces of the people;
3. and there are those who combine the qualities of 1 and 2, teaching the people and learning from the people, and this is the very type we need.

You may ask me: “What kind of guidance will you give us?”

At the plenary KNIP session for the discussion of the RTC results, I have said that our thoughts should be dynamic. “All flows, nothing is static,” I have said. Therefore, the RIS is not our ultimate goal. May God bless us, and make us a great nation. Our position is strategical, politically, economically and militarily as well. We wish to arrive at still higher levels, higher than the present RIS.

Therefore, let us continue our work. Our task is not yet done. Up to now the achievement of our goal has taken tens of years, and it will still take scores of years.

When I was in Banka with Hatta, I have shown you a new tracee: return to Jogja—cease fire—RTC—transfer of sovereignty. This is only a tracee, not the ultimate goal. Therefore, go on.

What I also ask of you is to give a meaning, contents, to what we have achieved, to give contents to Indonesia’s independence.

We have only just emerged from an ordeal. We have stood the test. God has blessed us. As a nation we could still hold our heads high, but we are still bleeding from several wounds. Thousands of people, young and old, have died. Economics are still in disorder.

It is our primary task to heal those wounds. Give the people prosperity and security, the natives as well as the foreigners, who seek a subsistence and protection in our country. A conditio sine qua non to achieve this purpose is: solid unity.

In some countries there is a civil war raging. To me, the sun does not shine in those countries.

At this momentous event, I appeal to you: be one. *We have come to a stage to work for ourselves and our demands to ourselves, for the achievement of our goal.* Therefore, I ask of whatever group there may be in our country, to weld a solid unity.

And I ask of the world: give us your greatest possible goodwill. We wish to live peacefully with the whole world and contribute to the making of a better world.

May God bless us. (*Antara*)

***

Lampiran 67.

RADIO SPEECH OF COMMANDER IN CHIEF OF THE NETHERLANDS FORCES IN INDONESIA

Jakarta, Dec. 24. (Antara).

Commander of Chief of the Netherlands Forces in Indonesia last night made a radio speech directed to the Netherlands and the Netherlands Indonesian troops condensed as follows:

It is now only a few days to the moment that we will transfer our task as maintainers of justice and order to our constitutionally appointed successors.

On the 27th of December next a new state will be born with its own complete sovereignty.

The conception of sovereignty is indissolubly connected with the idea that the responsibility for the internal and external safety rests with the government of the sovereign state which will, as a matter of fact, aim at maintaining order and peace with its own means.

Keeping this in mind it will be easy for us to understand that afterall for the troops under Netherlands command there is no more to do in connection with the maintenance of order and peace. Besides RUSI will only request those services needed for the reconstruction, organisation and training of its army. This will have to happen only with the permission of the Netherlands Government.

This entails that the proper “fighting-units”, as far as they belong to the Royal Netherlands Army or will belong to it, will be repatriated as soon as possible. As you will know the Royal Netherlands Indonesian Army will be reorganised.

As I have already told you before, for many of you the task in this country has not yet ended, but has only entered a completely new phase.

Furthermore we all have, although the maintenance of justice and order has been taken from our shoulders, irrespective of the fact whether we have still to fulfill a task in this country or not, to make our last important contribution to the reconstruction of the Netherlands-Indonesian Union, projected in the Hague and this contribution will be our deportment and conduct in the near future.

Therefore I demand from all personnel of the Royal Netherlands-Indonesian Army and the Royal Netherlands Army to behave themselves during and after the transfer of the sovereignty as become good soldiers. We have constantly and strictly to see to it that none of us will become the direct or indirect cause of untoward incidents.

Our deportment must be orderly and correct, our uniform and outward appearance faultless.

We will have to adapt ourselves, even under probably difficult circumstances to the new relations and also have to show this in our conduct.

***

Lampiran 68.

MESSAGES BY INDIAN LEADERS

New Delhi, Dec. 26. (Antara/IIS)

Following are some of the meassages by Indian leaders on the occasion of the inauguration of the Indonesian Republic:

Dr.B.C. Roy, Premier of East Bengal in a message says:

"I extend my cordial greetings to free Indonesia on the day of their achievement of freedom. May I in all humility tell my Indonesian friends that the precious freedom which they fought for and won is to be consolidated by years of solid work. Resistance from outsiders having been overcome, now is the time for the venerable leaders to keep ready to meet the resistance groups composed of their own people. Their success in their struggle against forces of disruption would be a crowning achievement of the leaders of Indonesia."

Dr. Ram Manohar Lohia, Chairman of the Foreign Policy Commission of the Socialist Party says:

"On behalf of the people of India and in particular the Socialist Party, I greet the Republic of Indonesia as a powerful link in Asia's resurgence. The people of Indonesia and India will assuredly follow the policy of revolutionary peace, which will reject all efforts of violent chaos as also of the status quo paralysis. Peoples of the world are yearning for a new force of peaceful change. Asia is suffering from stagnation as Europe is suffering from chaos. Our first job therefore is to revive Asia by ending all vestages of internal tyranny and poverty. Indonesians and Indians can then in brotherhood become the torch-bearers of a new civilisation of tranquil activity and uncompromising struggle against evil and of sympathy for all."

Dr. Pattabhi Sitaramayya, President of the Indian National Congress, on behalf of the Indian National Congress, has also sent the warmest greetings to the Indonesians.

Dr.D.R. Bhattacharya, Vice Chancellor of the Allahabad University, on behalf of the University expressed his pleasure in sending to the people of Indonesia "our warmest greetings on felicitations on the eve of the inauguration of the Indonesian Republic. May the independence acquired bring peace and prosperity to the country and add glory to the Eastern world." (*Antara*)

***

Lampiran 69.

TRANSFER OF SOVEREIGNTY

Jakarta, Dec. 27 (Antara).

The 4¼ year-old political and armed battle between the Indonesian Republic proclaimed on August 17, 1945, and the Netherlands ended finally with the formal transfer of sovereignty by the Netherlands to the Republic of the United States of Indonesia (RUSI) simultaneously at Amsterdam dan Jakarta today. Some 150 Dutch and Indonesian officials and guests gathered at the Koningsplein Palace here this afternoon to witness the historic moment which was the result of the recent Round Table Conference at the Hague where it was agreed to set up an independent and sovereign Indonesia within the Netherlands-Indonesian Union. 22 Countries were represented to witness the ceremonies. Some 20 thousands of people gathered in *front* ot the Palace to see the occasion. The formalities climaxed in the striking down of the Dutch flag and the hoisting of the Indonesian Red-White flag accompanied by the respective national anthems "Wilhelmus" and "Indonesia Raya". At the conclusion of the function the Dutch Crown's High Representative, H.J. Lovink, proceeded to Kemayoran airfield from where he left Indonesia for good.

The Indonesian delegation taking over the sovereignty in Indonesia was headed by the RUSI Defense Minister Sultan Hamengku Buwono, whilst that in the Netherlands was led by RUSI Premier Dr. Mohammad Hatta.

Inaugurating the function the Dutch Crown Hugh Representative H.J. Lovink declared that without underestimating the difficulties which the young state was to encounter in realizing its ideals, "I would like to express my profound confidence in the constructive forces inherent in the Indonesian people and the wisdom of its leaders in protecting the new state in the consciousness of responsibility for law and order". He said: "The fight for independence of your people is now ended. Under capable and unselfish leadership, with an authority that inspires and unites all forces, young and old may now be joined together in work for peace and prosperity within the country. Indonesia's great past may be the inspiration for a society charactered by a sense of responsibility and readiness to make sacrifices. Humanity through the ages has linked up peace and its permanent foundations with eras of material and spiritual prosperity. The Indonesian tradition knows this self-same conception."

Lovink expressed his hope that particularly the youth which had always been the latent sources of power in every community now be the stimulus par excellence in building up the new state. In Indonesia, he said, the younger generation were the pioneers of the urge to "Kemerdekaan" (Freedom). "May they now devote their

"Semangat" (Spirit) to the benefit of the future of the new independent Indonesian state. May their "Perjuangan" (Fight) tend with all its strength and devotion, to the "Pembangunan" (Reconstruction), and may construction and reconstruction characterize their actions," said the Crown High Representative.

He continued to say: "For the people of Indonesia and all those who are linked to them by ties of the blood, by a sense of community and by tradition, by interest or ideals, large possibilities are now upon the horizon. Initiative and capacities of the Indonesian people will qualify the measure in which use is made of these possibilities."

"Freedom cannot stand alone. It has to be re-established continually deriving its strength from national ideals and their symbols, thereby drawing upon the values which spring from the soul of man."

He said that with the fulfilment of its national aspirations on the entry of Indonesia as a sovereign state in the international community other problems arise, and the solution of these problems will decide the position of Indonesia as an independent power among other nations.

Touching upon the "encroaching elements of western culture" Lovink said that they "must be offset in Indonesia by the pattern of its own culture".

He said, "In this connection I am thinking of certain forms of Indonesian democracy and of the spirit of mutual help springing from a deeply rooted sense of collective responsibility. In the long run, a revolution also can do nothing but build on the rejuvenated principles handed down to us by our ancestors. If not, chaos and the collapse of society will ensue."

The Crown Representative stated that the two countries (Netherlands and Indonesia) travelling together in a spirit of free will, equality and complete independece, "all will be well and we shall both be able to contribute in full measure to world peace and world order, especially in East Asia".

In answer to Lovink's speech Sultan Hamengku Buwono stated that this momentous of recognizing the complete and sovereign of independence Indonesia, "we all realize the importance of this moment for the Netherlands and for the Indonesian people as well as all the peoples of the world".

"Considering the importance of this moment we realize this most profoundly when we look at the transfer of sovereignty in the light of history and of international relations."

"Anyone alive to the hostoric development of Asian peoples knows that nationalist movements sprang up all over Asia at the end of the 19th century. The Asian nations which had always been guided by the Western nations had gradually become conscious of their own strength and set movements going to take over the control in all the spheres which constitute the existence of free nations."

"This movement to gain freedom is based generally on principles, political, social and economic, emanating from the Western nations. The concepts of democracy,

the people's fundamental rights, socialism, liberalism and others came into Asia as a stream which gradually gained in power and soon influenced philosophy and views all over Asia." This large scale movement did not leave the Indonesian people untouched: The Nationalist movement in Indonesia started about that same time. Initially it was, of course, very hard to meet this Western influence with one's own culture. Often Indonesians were inspired with a spirit 'more Western than that of Westerns' since Western influence was so overpowering that these people became detached from Eastern principles".

"Gradually though the Indonesian people succeeded in returning to their own culture without rejecting the spirit and the fruits of Western thought and culture."

"Although at that time there was much misunderstanding and faulty interpretations of the Nationalist movement, there were many among the Netherlanders with a larger vision able to undertstand the soul of Indonesian nationalism."

"After world war II many Asian countries gained freedom such as India, Pakistan, Ceylon, Burma and the Philippines. The Indonesian freedom movement was given solid form through the proclamation of August 17, 1945."

"From that date onward the movement for freedom grew rapidly and it is generally known how this movement developed successively. Long was the road we had to travel and many the difficulties, but thanks to God's grace and strong efforts by all positive forces, the Netherlands as well as Indonesia, the target we had set ourselves so long, has today been formally reached."

"It fitting to recall the memory at this moment those who preceded to the great beyond through carrying out their duties to their peole and country."

"In remembering those who have given their minds to the realization of this great day the Committee of Good Offices, later on called the United Nations Commission for Indonesia was as representatives of the Security Council have given valuable aid and guidance, should not be forgotten. They have helped the Netherlands and Indonesian people to emerge from their road of darkness into the light of this glorious day," said the Indonesian Delegation's head.

Stating that Indonesia this day faces a new era, "an era wrought with many obligations and quite possibly many difficulties", the Sultan said: "With a strong and calm heart we will meet all this. During the period of battle, just now ended, courage and self-reliance have been born in the soul of our people. And on this basis we are now able to set out the task of renewal and recontruction in our newly born country."

"It is evident that courage and self-reliance are not all what is required to carry out the task which is so large and arduous. And so we gladly accept the assistance of other nations, particularly the Netherlands, which is skilled and experienced and imbued with the sincere wish to help our people."

"The Union Statute and its provisions for cooperation opens the possibility for

mutual aid to the common benefit of the Netherlands and Indonesian peoples. Much has been done in Indonesia during the past years in harmony with the pattern of Indonesian life. The results reached will be the foundation for constructive work in future."

"This day, your Excellency, is for yourself, for the Netherlands people and for all Christians concerned, incorporated in the spirit of Christmas and will bring inward and outward peace for the Netherlands people, for the Indonesian people and for other nations all over the world.

As H.E. the President has explained a number of times during the past few days, the Indonesian people cherish as their ideals to contribute in freedom to the lasting peace and happiness of this world. These ideals are laid down in the Preamble to the Draft Constitution of the Republic of the United States of Indonesia and its five principles: recognition of the Divine Omnipotence, humanity, national consciousness, democracy and social justice. It is my opinion that these five principles are not only a fitting foundation for the RUSI but might serve as a foundation for strengthening peace among all the peoples of the world.

In conclusion allow me to address a few personal words to your Excellency on your departure from our country. I sincerely wish your Excellency and your Excellency's family bon voyage. It is my belief that your Excellency on arrival in the Netherlands will sow the seed of friendship between the Netherlands and Indonesian peoples so that the old ties may be strengthened on the basis of common interests."

***

Lampiran 70.

UNITED STATES REMARKS

Jakarta, Dec. 30. (*Antara*).

The following texts released by USIS were remarks addressed to President Soekarno by United States Ambassador H. Merle Cochran on the occasion of the formal presentation of the envoy's credentials at the Presidential Palace at 11.30 a.m., and President Soekarno's reply.

Your Excellency:

May I personally convey to Your Excellency the greetings and best wishes of the President of the United States of America.

May I also present the letter of credence addressed to Your Excellency and entrusted to me by my President.

For me it is a great honor to have been chosen as the first Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United States of America to the Republic of the United States of Indonesia.

It is a special pleasure to return to Indonesia and to extend congratulations on this occasion of the attainment of sovereignty. As Your Excellency well knows, I have held unfailing faith in the leadership and in the people of Indonesia and in their right to achieve their independence through a just settlement. I am confident that the Republic of the United States of Indonesia will enjoy a great future.

I am happy to have the opportunity to serve in Indonesia, among friends, as the representative of a sister Repuhlic, sharing common ideals and aspirations, and as a friend sincerely desirous of witnessing the new State take and maintain its place in the family of free nations.

Excellency,

I am profoundly grateful for Your Excellency's gracious words on the occasion of the conveyance of President Truman's letter to me.

The recent measure of the President of the United States of America have I also followed with the greatest care and attention and the most sincere gratitude fills my heart for the good wishes and kind thoughts expressed therein.

This day is one of a great significance as the newborn Republic of the United States of Indonesia receives the first Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United States of America to our Government, particularly on account of the fact that it is Your Excellency who has been designated for that function. Not only we know Your Excellency as one of the United Nations emissaries sent to this part of the world

to promote with so great a statesmanship and so successfully the aims of peace and democracy of the United Nations Organization, but Your Excellency also knows well our country and has by the force of sincere desire to promote understanding amongst nations so greatly contributed to the solution of the Indonesian-Dutch dispute.

I am deeply convinced that Your Excellency's presence amongst us in the quality of the United States Ambassador will develop and render closer the good relation and cooperation between the United States of America and the United States of Indonesia.

Your Excellency may be assured that from our side, the Republic of the United States of Indonesia and myself shall do our utmost efforts to realize our mutual desire for close friendship and cooperation to the benefit of our both country and of the world.

***

Bahan yang Dipakai

Buku:

AB Adam, Cindy
Bung Karno Penjambung Lidah Rakjat Indonesia
Djakarta, Gunung Agung, 1966. 470 h.

ABA Aboe Bakar Loebis
Agresi Militer Belanda II
Jakarta, Pusat Dokumentasi Politik "Guntur 49", 1995. 22h.

AL *Album Peringatan; Empat Tahun Sejarah Indonesia dalam Gambaran*
Djakarta, Madjalah Merdeka, 1 Agustus 11949. 108 h.

AT Ali Sastroamidjojo
Tonggak-tonggak di Perjalananku
Jakarta, P.T. Kinta Bagian Penerbitan, 1974. 595 h.

BHS Bob Hering
Soekarno Architect van een Natie, Architect of a Nation 1901-1970
Amsterdam/Leiden, KIT Publishers/KITLV Press, 2001. 96 h.

BS Boediardjo
Siapa Sudi Saya Dongengi
Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996. xiii, 289 h.

FAK *Berbagai Fakta dan Kesaksian Sekitar "Peristiwa Madiun"*
Jakarta, Pustaka Pena, 2001. 214 h.

HA Heijboer, Pierre
Agresi Militer Belanda; Memperebutkan Pending Zamrud Sepanjang Khatulistiwa 1945/1949
Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 1998. 181 h.

HKP Mohammad Hatta
Kumpulan Pidato; dari tahun 1942 s.d. 1949
Jakarta, yayasan Idayu, 1981. 332 h.

HR Hardjito
Risalah Gerakan Pemuda
Djakarta, Pustaka *Antara*, 1952. 463 h.

KU *Kutipan I. Almanak Nasional 1954. Kutipan II. Detik dan Peristiwa 17 Djanuari 1945–23 Agustus 1950*
Stensilan, t.t., 144 h.

LM Lapian, A.B. dan P.J. Drooglever (penyunting)
Menelusuri Jalur Linggarjati; diplomasi dalam perspektif sejarah
Jakarta, Grafiti, 1992. x, 318 h.

LU *Lukisan Revolusi 1945–1950 dari Negara Kesatuan ke Negara Kesatuan*
Djakarta, Kementerian Penerangan, 17 Agustus 1954 (cet. ke-2). 429 h.

MA Manai Sophiaan
Apa yang Masih Teringat
Jakarta, Yayasan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, 1991. 450 h.

MH Mahbub Djunaidi (H.)
Humor Jurnalistik
[Jakarta], Indera Aksara, [1986]. 363 h.

MMK Mangil Martowidjojo (H.)
Kesaksian tentang Bung Karno 1945–1967
Jakarta, Grasindo, 1999. 520 h.

PEH *Pertempuran Empat Hari di Solo dan Sekiranya; Bunga Rampai Cuplikan-cuplikan Sejarah*
Jakarta, Kerukunan anggota Detasemen II Be 17, Agustus 1993. 116 h.

PSPB2 *Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa; Jilid 2*

RKI Rosihan Anwar dkk.
Kemal Idris; Bertarung dalam Revolusi
Jakarta, Sinar Harapan, 1997. 295 h.

RKZ Rosihan Anwar
Kisah-kisah Zaman Revolusi
Jakarta, Pustaka Jaya, 1975. 111 h.

RM Rosihan Anwar (.H.)
Menulis dalam Air: Di Sini Sekarang Esok Hilang: Sebuah Otobiografi
Jakarta, Penerbit Sinar Harapan, 1983. 37 h.

RMU Rosihan Anwar
Musim Berganti; Sekilas Sejarah Indonesia 1925-1950
Jakarta, Grafitipers, 1985. 200 h.

S6 Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto
Sejarah Nasional Indonesia VI
Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975. 392 h.

SDA Saleh, R.H.A.
Dari Jakarta Kembali ke Jakarta
Jakarta, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Museum dan Sejarah, 1996. 119 h.

SME Subandrio (H.Dr.)
Meluruskan Sejarah Perjuangan Irian Barat
Jakarta, Yayasan Kepada Bangsaku, 10 November 2000. 243 h.

SO Soerjono
"On Musso's Return", diterjemahkan oleh Ben Anderson
Dalam *Indonesia*, 29 (April 1980), h. 59-90

SP Soebagijo I.N. (H.)
Pengalaman Masa Revolusi
Jakarta, Pustaka Jaya, 1982. 91 h.

SSA Solichin Salam
Arti Linggajati dalam Sejarah
Jakarta, Gema Salam, 1992. 57 h.

ST Siregar, M.R.
Tragedi Manusia dan Kemanusiaan; Kasus Indonesia; Sebuah Holokaus yang Diterima Sesudah Perang Dunia Kedua
[t.t.], [t.p.], 1993. vii, 470 h.

SUS Sumono Mustoffa (penyunting)
Sukarni dalam Kenangan Teman-temannya
[Jakarta], Sinar Harapan, [1986]. 323 h.

TI *30 Tahun Indonesia Merdeka*
Jakarta, Citra Lamtoro Gung Persada, 1985 (cet. ke-6). 256 h.

TS Talsya, T.A.
Sekali Republikein Tetap Republikein (Perjuangan Kemerdekaan di Aceh) 1949 Buku III
Medan, Lembaga Sejarah Aceh, 1990. 333 h.

WG Wild, Colin dan Peter Carey
Gelora Api Revolusi; Sebuah Antologi Sejarah
Jakarta, British Broadcasting Corporation (BBC) Seksi Indonesia/Gramedia, 1986. 233 h.

Buku tambahan:

Sitor Situmorang
Sitor Situmorang Seorang Sastrawan 45 Penyair Danau Toba
Jakarta, Penerbit Sinar Harapan, 1981. 224 h.

Sobron Aidit
Kisah Serba-Serbi 1999

BULETIN:

Antara	Ag. 1949, Sept. 1949, Nop. 1949, Des. 1949

MAJALAH:

Jaya Baya	24 Okt. 1993
Peta	Juli/Ag. 1993
Star Weekly	13 Nov. 1949, 18 Ag. 1956

SURAT KABAR:

Kompas	29 Des. 2004, 23 Juli 2005
Suara Karya	19 Des. 1996

****

INDEKS

A

Abdulgani, Ruslan 277, 291, 292, 302, 404, 596
Abdul Hamid, Tgk. H. Sjech 306, 330
Abdulkadir 229
Abdullah Adik 13
Abdullah Afifuddin, Syekh 50
Abdulrachman 229
Abdulrachman Saleh 158, 293
Abdul Rivai 168
Abdul Wahab, Tgk. 13, 113, 494
Abdur Rachman 13
Abdurrachman Sjihab, H. 11
Abu Darda 51
Abu Umar 300
Achmadi [Mayor] 15, 74, 82, 118, 134, 157, 161, 165, 170, 174, 183, 208, 288, 342, 732, 733, 734
Achmad Wiranatakusuma 44
Affandi 243, 280, 351
Agresi Militer Belanda II 17, 301, 784
Ahmad Hasballah Indrapuri, Tgk. H. 11, 38
Ahmad Tahir 72
Aidit, D. N. 24
Ajub Sami, M. 13
Alagappan 186, 191, 205, 425
Alaydrus, J. A. 193
ALDA (Angkatan Laut RI Daerah Aceh) 66
Ali Budiardjo 186, 188, 192, 209, 214, 311, 380
Ali Chanafiah, M. 360
Ali Hasan A. S. 41
Ali Sastroamidjojo 77, 78, 80, 106, 112, 142, 156, 166, 167, 176, 198, 238, 395, 474, 704, 784
ALRI 206, 264, 485, 506
Amelz 13, 53, 96, 121, 130, 133, 175, 206, 219, 220, 380, 421, 450, 487, 524, 553, 562
Amin, S. M. 12, 30, 42, 95, 97, 103, 107, 114, 124, 125, 127, 131, 138, 144, 181, 182, 206, 370, 380, 381
Amir Hamzah Ali 61
Anak Agung Gde Agung 33, 75, 152, 208, 231, 248, 320, 387, 398, 419, 446, 460, 476, 477, 479, 480, 486, 536, 548, 549, 554, 555, 558, 565

Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) 85, 86, 89, 153, 164, 173, 262, 308, 368
Antara
delegasi Republik untuk KMB 198
kedatangan Sultan Hamengku Buwono IX ke Jakarta 186
likuidasi harian *Warta Indonesia* 189
pembebasan tawanan di Palembang 180
pembentukan Sarekat Buruh Pelelangan Ikan 211
pembukaan Jaarmarkt 227
pembukaan KMB 202
perayaan ulang tahun kemerdekaan di Gorontalo 178
perkembangan ekspor kopi 204
persiapan transmigrasi dari Madura ke Kalimantan Selatan 197
rapat pendahuluan Kongres Gerilya Indonesia 227
susunan lengkap Central Joint Board 208
ucapan selamat ulang tahun dari Ho Chi Minh 187
Anwar Tjokroaminoto 210, 322, 682
Armijn Pane 301
Assaat 15, 142, 144, 157, 226, 343, 345, 350, 397, 406, 445, 453, 477, 552, 570, 587, 762
Asvi Warman Adam 9
Ateng Kartarahardja 33
AURI 23, 58, 149, 158, 172, 177, 185, 366, 506
Azis Saleh 312

B

Bachtiar Junus 12
Badan Pekerja Dewan Pimpinan Pemuda Republik Indonesia Sumatra Utara 29
Badan Penghubung Organisasi Pemuda 240, 303
Bahauddin 13
Balai Bahasa 278
Bambang Utojo 235
Bandaranaike, SWRD 17
Baswedan, A. R. 106, 111, 114, 115
Beel, Louis Joseph Maria 13, 14, 16, 25, 29, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 48, 50, 51, 52, 59, 60, 90, 94, 96, 104, 346, 660
Blom, N. S. 78
Bloock, J.R.L. van den 208
Bode, Juliana 282
Boediardjo 58
BPBM/Badan Pembagian Bahan Makanan 16
BPPS/Badan Perbekalan Perang Sabil 8
Brouwer [Mr.] 13
Burghard, F.J. 209
Buruh Administrasi Pemerintah dan Partikelir 292

C

Central Joint Board (CJB) 205, 210, 213
Chairil Anwar 70, 83
Cirebon 26, 201, 216, 247, 273, 322, 326, 350, 415, 439, 547, 550, 569, 664, 731
Cochran, Horace Merle xvii, 14, 42, 78, 82, 83, 86, 87, 162, 168, 201, 324, 520, 601, 602, 782
Conference on Indonesia 17, 18
Cripps, Stafford 327
Critchley, Thomas K. 14, 42, 129
CVO 189

D

Darmasetiawan 15, 78
Darmawan [Letnan II] 40
Darul Islam/DI 22, 51, 72, 167, 229, 255, 335, 342, 349, 350, 475, 505, 553
Daud Beureueh, Tgk. Muhd. 9, 11, 42, 50, 53, 65, 68, 97, 107, 111, 114, 137, 138, 181, 182, 183, 206, 276, 307, 343, 421, 476, 494, 592
Departemen Ekonomische Zaken 294
De Waarheid 290
Dewan Keamanan PBB
  petunjuk pelaksanaan resolusi 67
  resolusi 23
Dewan Pertahanan Daerah 65
Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Madura 280
Dewan Perwakilan Rakyat Sumatra Utara 3, 4, 101, 103, 114, 121, 124, 131, 139, 439, 480, 524
Dewan Siasat Militer
  sidang 153
Dhahiry D. 4
Dharsono [Mayor] 40
Di Lam U, Tgk. 11
Dipokusumo 222, 305
divide et impera 152
Dja'far Sadiq, Tgk. Haji 50
Djody Gondokusumo 284
Djojohadikusumo, Margono 157, 466
Djojohadikusumo, Sumitro 17, 157, 166, 504, 508, 536, 583, 705, 706
Djuanda 78
Djuned Js., M. 17
DK PBB 14, 21, 27, 30, 35, 36, 39, 46, 47, 49, 51, 57, 58, 59, 60, 66, 67, 76, 77, 539
Donkersloot, Nicolaas Anthonie 52
Dow, E.A. 208
DPA 226, 274, 300, 307, 340, 341, 348, 352, 360, 450, 461, 463, 464, 467, 535
Drees, Willem 16, 201, 202, 209, 394, 589, 765
Dul Arnowo 40, 210, 239, 291, 292, 438, 679
Dulo Abdullah 229

E

EAC 304
ECA/Economic Cooperation Administration 62, 478
Ecafe 222, 223, 237, 245
Eertse Kamer 52
Ema Puradiredja 299
Entus, A. 229
EVC 258, 266

F

Front Nasional 274

G

Gabungan Penjual Gula (Verkoop Combinatie voor Suiker) 189
Gabungan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia (Gabki) 150
Gabungan Wanita Indonesia Minahasa 204
Gani Mutyara, A. 10
Gasida 99, 115, 118, 133, 373, 381, 455
Gasida/Pengurus Besar Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh 17, 99, 110, 111, 115, 118, 130, 133, 138, 139, 323, 334, 338, 373, 381, 455
Gatot Subroto 118, 126, 134, 161, 165, 183, 458, 525

Gedung Republik (Pegangsaan Timur 56) 215
gedung "Sociteit Harmonie" 302
Gerakan Muslimin Indonesia (GMI) 317, 321
gerilya Republik 9, 80
gerilya Solo 9, 27, 28, 38, 45, 50, 51, 66, 69, 74, 97, 137, 139, 143, 150
Gianto 74
Gieben [Mr.] 40, 41, 42, 346
Goodden, A. 236
GPII 111
Gunen, J. 304

H

Hadirun S. 66
Hafas, Tengku 224
Haiah Kibarul Ulama 50
Hamengkubuwono IX, Sultan 27, 37, 43, 46, 47, 76, 82, 84, 86, 97, 98, 99, 118, 123, 128, 132, 133, 135, 140, 148, 166, 381, 384, 436, 440, 495, 558, 572, 589
Hamid Algadrie 193, 194, 198
Hamid II, Sultan 24, 29, 30, 57, 62, 84, 186, 201, 202, 209, 242, 387, 445, 554, 556, 558, 559, 565, 566, 572
Hamzah Junus, Tgk. 11
Hanifah, Abu 222, 243, 245, 269, 301, 311, 365, 478, 483, 522, 558
Hanna, W.A. 293
Harian Umum 364, 519
Hari Radio 293
Harjono, Mayor 91, 148, 198, 408, 735
Harsono [Tentara Pelajar] 3
Hasan Abbas, M. 13
Hasan Aly 79
Hasan Basri 166, 198, 231, 262, 264, 265
Hasan Ben, M. 61
Hasjim, A. R. 12
Hasjim, Tuanku 60
Hasjmy, A. 42, 60, 79
Hendarmin, R. 229
Herman [Seksi Murdio] 74
Herremans, R. 42, 168, 201
Heru Supardi 11
Het Bataviaasch Nieuwsblad 322
Hidajat [Kolonel] 5, 6, 18, 78, 122, 144–149, 151, 165, 170, 171, 195, 206, 209, 211, 222, 223, 238, 239, 331, 332, 343, 355, 377, 422, 487, 537, 638, 663, 747
Hildering, Ds. H. A. C. 69
HISSBI 317, 328, 356
  keputusan rapat HISBBI dengan Organisasi Buruh Seluruh Indonesia 356
Ho Chi Minh 187, 715
Holst, Henriette Roland 290
Hotel des Indes 77, 78, 88, 132, 137, 162, 213, 296, 603, 715
Hotel Merdeka 9
Husin Jusuf 60, 61, 79
  Rapat Perjuangan 60

I

Ibrahim Abduh 13
ICOS 280
Ida Anak Agung Gde Agung 33
IFCO 326, 327, 334, 373
Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) 128, 130, 269, 354
Indo-Nationale Partij (INP) 143, 292, 550
Indonesian Airways 287, 561, 575, 578, 595
Indonesian Federal Commercial Organisation (IFCO) 326

insiden Bendera Merah Putih 306
Irawan [Seksi Murdio] 74
Isa Anshary 275
Isa, M. 235, 580, 699
Iskaq Tjokroadisurjo 291
Ismail Muhammad 12
Ismail Suny 5

J

Jaarmarkt 227
Jacob, A. 78
Jacob, H.L. 226
Jahja 229
Jareban 80
Jessup, Philip C. 24
Jigido 57
Johan Ariks 236
Junus Harahap 12

K

Kahin, George McTurnan 9
Kalimantan Berdjuang 231, 519
kamp penahanan Bubutan 184
Kartosuwirjo, Sekarmadji Maridjan 72, 167, 170
Katopo 269
kebakaran di Kasteelweg Jakarta 216, 281
Kepolisian Keresidenan Aceh 117, 190
Keresidenan Aceh 3, 4, 12, 95, 96, 100, 107, 108, 110, 114, 117, 118, 132, 190, 580
Keresidenan Banten 204, 517
Ki Hadjar Dewantara 123, 144, 174, 269, 278, 523, 538, 694
Kist, F.J. 300
Kleffens, E. N. van 76
Koets, P. J. 41, 43, 390
Komarudin [Letnan] 43
Komisi Tiga Negara 23, 31, 35, 42, 49, 75, 346
Komodor Suryadarma 111, 142
Konferensi Asia 20, 21, 33, 191, 611
 resolusi kepada DK PBB 21
Konferensi Ecafe 237, 245
Konferensi Ekonomi Inter Indonesia 320
Konferensi Inter-Indonesia 163
Konferensi Masyumi 302
Konferensi Meja Bundar 162, 163, 164, 165, 166, 167, 176, 178, 182, 186, 190, 192, 193, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 206, 208, 212, 216, 217, 218, 223, 226, 230, 232, 233, 237, 238, 241
Konferensi Pemuda 176, 178, 179, 180, 189
Konferensi Pemuda Bandung 228, 240
Konferensi Pemuda Seluruh Indonesia 176, 178, 179, 180, 189, 228, 287, 458
Konferensi Pendidikan Nasional 269
Konferensi Perguruan Taman Siswa 316
Konferensi Perhimpunan Al-Irsjad 240
Konferensi PNI Daerah Aceh dan Langkat 99
Konferensi PSII 144, 682
Konferensi Serikat Sekerja Pamongpraja Pasundan 246
Konferensi Serikat Sekerja Pamong Praja Pasundan 246
Konferensi Sumatra 64, 69, 70, 127
Kongres Alim Ulama 228, 241
Kongres Gerilya Indonesia 227
Kongres Kebudayaan 301
Kongres Kowani 171
Kongres Muslimin Indonesia 306, 394, 450, 520, 563, 564, 699

Kongres Muslimin Seluruh Indonesia 275
Kongres Pemuda 169, 178, 230, 244
Kongres Pendidikan Nasional 313
Kongres Perpindo 228
Kongres Serikat Sekerja Pamong Praja 223
Kongres Wanita Indonesia 204, 207, 208, 210, 211, 226, 244, 355
KTN/Komisi Tiga Negara 14
kunjungan Wakil Presiden di Kotaraja 107
Kursus Pemimpin 229
Kusen Tjokrosentono 60, 126, 127, 442
Kusna Puradiredja 292, 294, 317, 356
Kusno Utomo [Letnan Kolonel] 26
Kusumaatmadja, A. 78
Kutacane 81

L

Laoh 78
lapangan Blang Padang 159, 368
Lapangan Terbang Blang Bintang 106, 107, 149, 343, 374
Latuharhary, J. 78
Leimena, J. 77, 78, 166, 167, 168
Lie, John 75, 146, 147
Local Joint Committee xiii, 190, 195, 210, 211, 225, 246, 248, 263, 292, 384, 431, 441, 447, 461, 637, 640, 678
Lovink, A. H. J. 94, 96, 100, 164, 186, 295, 381

M

Maarseveen, J. H. van 37, 39, 44, 91, 194, 201
Madiun 60, 101, 234, 267, 283, 298, 329, 335, 345, 419, 422, 423, 437, 438, 441, 448, 497, 533, 536, 542, 743, 746, 785
Mahmud, Tuanku 42, 53
Maimun Habsjah, Tengku 263
Maimun, Tk. 4
Maklumat Residen Aceh 3ñ4
Malik, Abdul 230, 387, 426, 673, 681
Malik, Adam 48
Manifest Politik Pemuda Indonesia 178
Mansur, T. 62ñ63, 67, 68, 70, 72, 487
Manursja 4
Maramis, A. A. 17, 18, 20, 21, 23, 25
Marjam, Encik 61
Marjono Danubroto, R. 95, 208
Marsudi [Letnan] 27
Martadinata, R. E. 12
Martapura 185, 197, 198, 257, 662, 663
Maruto Nitimihardjo 48
Masjkur, Kyai Haji 206, 216, 218, 256, 275, 282
Masyumi 13, 24, 38, 65, 80, 111, 123, 245, 302, 317, 321, 335, 345, 349, 357, 394, 438, 454, 458, 481, 510, 522, 541, 542, 546, 558, 562, 563, 566, 567, 570, 579, 696
Mawardi Noor 12
Mendelaar [Dr.] 231
Mimi Ijos Wiriaatmadja 350, 359
Mohammad Daudsjah, T. T. 42, 103, 107, 111, 114, 121, 124, 130, 131, 132
Mohammad Hatta 13, 15, 16, 24, 30, 165, 166, 167, 168, 169, 186, 194, 201, 202, 209, 220, 233, 239
Mohammad Rum 10, 75, 78, 83, 86, 87, 90, 104, 109, 120, 121, 122, 144, 151, 156, 166, 168, 395, 407, 419, 461, 476, 477, 478, 479, 480,

502, 516, 538, 549, 559, 572, 582, 601, 603
Monginsidi, Robert Wolter 262, 269, 271
putusan hukuman mati 262, 269, 270, 271, 282, 295, 296, 297, 303, 324, 699
Mononutu, Arnold 75
Mudjahid, Amir Husin al 61, 144, 151
Mudjihardjo [Kapten] 38
Muktamar Islam 302
Muktamar Sumatra 62, 66, 67, 68, 71, 99
tujuan 72
Murdjani 40
Mu'thie, A. 11

N

Nasir, M. 61
Nasution, A.H. 86
Nasution, M. Yunan 11, 13, 71, 97, 121, 130, 131, 133, 206, 219, 524
Natsir, Moh. 77, 78, 186, 188, 222, 255, 321
Nazir Dt. Pamontjak 106, 112, 190, 195, 225, 370, 679
Nederlandsche Handelsbank 261
Negara Indonesia Timur 33, 75, 80, 125, 146, 150, 155, 177, 208, 231, 241, 248, 479, 493, 512, 692
Negara Islam Indonesia 167, 170
Negara Pasundan 39, 79, 151, 174, 215, 224, 232, 246, 268, 273, 275, 280, 318, 350, 429, 479, 489, 505, 561, 699
Neher, L. 28
Neh, Nyak 79
Nehru, Pandit Jawaharlal 17, 20, 30, 62, 169, 433, 599
NICA 44, 46, 48
Nip Karim 224, 225
Noro Trigonggo 79
North Atlantic Treaty Organization/ NATO 74
Nur Ibrahimy, M. 13

O

Operasi Bratayudha 229
Operasi Janur Kuning xvi, 50
Operatie Kraai 164
OPII 169
Organisasi Buruh Seluruh Indonesia 246, 292, 294, 317, 356, 390
ORI 197, 403, 560
Orkes Studio Jakarta 196
Osman Raliby 10, 12, 53, 97, 123, 131, 354, 679

P

P4RD (Panitia Penolong Pemerintah Pusat dan Rakyat Djokjakarta) 140
pabrik tenun "Tjimalaka" 289
Pacific Affairs 250
Palang Merah Indonesia xiv, 7, 91, 110, 175, 214, 241, 371
Palar, L. N. 4, 79
Pandu Rakyat 274
Pangat 66
Pangat [Tentara Pelajar] 3
Pangkalan Berandan 115, 125, 127, 130, 134, 136, 151, 263, 561
PARAF 235
PARDAFI 235
Partai Maluku Raya 248
Partai Masyumi 13, 111, 522, 567, 570
Partai Murba 26, 48, 321, 322, 357, 409, 510, 541, 562, 574, 696, 751, 752

Partai Rakyat Demokrasi Indonesia (PRDI) 332
Partai Rakyat Maluku 248, 265, 266
Pasar Malam Semarang 302
pasukan Baret Hijau 291, 736
Patoppoi, H. Andi 229
Pedoman Kanada 67
Pekerdja 183, 184, 254
pembunuhan di kratonan Solo 175
Pemerintah Darurat Republik Indonesia/PDRI 5, 6, 7, 16, 20, 21, 23, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 55, 56, 64, 70, 92, 93, 94, 95, 104, 105, 106, 109, 120, 121, 139, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 153, 158, 208, 479
Pemuda Indonesia Pasundan 305, 326
Pencinta Bangsa 274
Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1949 166, 173
pengembalian Yogyakarta kepada Republik 219
Pengumuman Kementerian Pertahanan Staf Angkatan Perang 287
Perhimpunan Pelajar Indonesia (Perpi) 286
Perintah Siasat 167
peristiwa Cemani 3
peristiwa di Desa Belimbing 21
peristiwa Gunung Simping 252
peristiwa Joko Songo 5
Perkumpulan Pendidikan Indonesia 313
Perkumpulan Wanita Islam 222
Permusyawaratan Ulama-ulama Kabupaten Aceh Selatan
  resolusi 29
Permusyawaratan Wanita Indonesia 189, 215, 482
Perpiindo 111, 276, 295, 394, 411
Persatuan Gerakan Buruh 298
Persatuan Indonesia Raya 229, 323, 680
Persatuan Isteri Buruh Indonesia 330
Persatuan Isteri Tentara Nasional Indonesia (PITNI) 157
Persatuan Pandai Besi 275
Persatuan Pemuda Kristen Indonesia 311, 358
Persatuan Perkebunan Getah Rakyat Labuhan Batu 225
Persatuan Sastrawan Indonesia
  Cabang Labuhan Haji 5
  Cabang Tapaktuan 4
Persatuan Wanita Kristen Indonesia 311
Persatuan Wartawan Indonesia 10
Persetujuan Renville xv, 182, 207, 239, 272, 422, 489, 614, 627
pertempuran 4 hari di Solo 169
pertempuran di Bukit Securai 16
Perti [Persatuan Tarbiyah Islam] 28
Perundingan Indonesia-Belanda 78, 81
Perundingan Linggajati 244
Perwari 116, 123, 133, 171, 211, 394
Pesawat Dakota 158
Pesindo/Pemuda Sosialis Indonesia 60, 65, 77, 78, 99, 100, 101, 102, 272, 323, 422, 423, 452, 562
  resolusi 60
Peusangan, Tgk. Syekh 61
Pinke, A. S. 300
Prijowijono 229
Pringgodigdo, A. G. 106, 142, 155, 363
Pringgodigdo, A. K. 78
Prinsen, M. J. 209
Prior, C.E. 208
PRIS 235
Pritchett, W.B. 208, 226

Q

Queljoo, P. A. de 229

R

Radio Republik Indonesia (*RRI*) 3, 28, 39, 53, 57, 59, 164, 195
Rakido [Kapten] 46
Ramali Dt. Sati 13
Rasjidi, H. 17
Ratulangie, G. S. S. J. 135
Ratumbuisang, N. 7
resolusi
  Rakyat Aceh Tengah 16
  PBB 59
Roijen, Jan Herman van 7, 14, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 86, 87
romusha 286
Rozario, A.F.J. de 420
Rum-Roijen xvi, 78, 85, 88, 90, 93, 96, 104, 119, 125, 129, 132, 133, 137, 141, 148, 149, 157, 170, 184, 189, 220, 384, 410

S

Sabaruddin [Mayor] 26
Sadikin [Letnan Kolonel] 26
Said Abubakar 11
Said Jatim, M. 13
Said Muhammad 17
Salim, A. 14, 33, 142, 226
Sambas [Mayor] 239
Sanusi, M. 4
Sarekat Buruh Kereta Api 262
Sarekat Buruh Pelelangan Ikan/SBPI 211
Sarekat Sekerja Persenjataan Indonesia 342
Sarekat Tani Indonesia Islam 300
Sarmidi Mangunsarkoro 425
Sarwono Sastro Sutardjo 77
Sassen, E. M. J. A. 36, 37, 38
Schuurman, A. J. 279
sekolah guru 114
Sekolah Menengah Islam 38, 114, 127, 276, 439
Sekolah Penerbangan 172, 256
Sekretariat Pemuda Indonesia 176, 180, 203, 287, 312
Semangat Merdeka 38, 287
Sepherd, Francis 154
Serangan Umum 1 Maret [Serangan Umum terhadap Yogyakarta] xv, 27, 43, 45ñ48, 56, 58, 165, 170, 172, 173, 174
Serikat Buruh 258, 266, 316, 317, 328, 329, 402, 459, 469, 686
Siak Sjarif Kasim, Sultan 114, 119, 381, 520
Sidang Kabinet Pasundan 224, 305
Sidoarjo 284, 288, 296, 311, 699
Simatupang, Kolonel 168, 186, 192
Siregar, Jahja 13
Siregar, Malanton 13
Siti Rachmijati Meutia 239
Sjafruddin Prawiranegara 14, 18, 55, 57, 68, 70, 93, 104, 120, 122, 140, 143, 153, 159, 166, 195, 199, 206, 256, 276, 295, 299, 338, 355, 362, 370, 426, 450, 475, 500, 508, 524, 537, 558, 564, 566, 590, 591, 609, 622
  pidato Wakil Perdana Menteri 338
Sjahrir, Sutan 14, 16, 22, 78, 104, 242, 244, 767, 771
  wawancara 309
Sjamsuddin [Mr.] 212, 343, 346, 350, 397, 427, 454, 479, 523, 570
Sjamsu [Mayor] 26

Slamet Rijadi 165, 169, 170, 174, 175, 288, 368, 427, 434
Soedirman 339
Soekarno 16, 29, 80, 119, 120, 409, 782, 784
Sukarno-Hatta 194
South Asia Cultural Group 314
speerpunten-strategie 164
Spoor, Simon Hendrik 6, 98
Sri Dadio 59
Stewart, A. C. 154
Stikker, D. U. 75, 76
Suara Indonesia Merdeka 30, 33, 53, 59, 119
Subardjo 229
Sudarjo Tjokrosisworo 200
Sudarpo 79
Sudarsono 17
Sudirman 27
Sudiro 79
Sudiro [Residen] 15
Suhardi [Mayor] 82
Suhardjo, Jenderal Mayor 212, 222, 231, 236, 257, 262, 264, 299, 637, 662
Suharto xvi, 27, 37, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 58, 75, 76, 92, 134, 142, 145, 548
Sujono Hadinoto 157, 166, 176, 199, 352, 357, 382, 462, 492, 508, 562, 565, 566, 572
Sujudi 243, 311
Sukarno
undangan KMB 52
Sukawati, Presiden 215, 231
Sukiman Wirjosandjojo 106, 111, 112, 156, 166, 167
Sumadi [Kapten] 21
Sumantri 82
Sumarto 78
Sunarja, T. R. T. 224
Sungkono 222, 237, 293, 294, 335, 348, 349, 488, 497, 517, 526, 637, 711
Supeno 40, 71, 82
Supo 28
Supomo 15, 78, 152, 157, 166, 198, 387, 477, 480, 496, 516, 558, 565, 566, 572
Suprapto 183, 376, 667, 678
Surachmad 26
Suradji [gerilya Solo] 45
Suroso, Dr. 92, 166, 237
Susanto Tirtoprodjo 92, 144, 147, 167, 188, 189, 192, 226, 238, 267, 268, 270, 278, 295, 363, 412, 447, 448, 479, 495, 536, 540, 563, 572, 573, 771
Sutardjo Kartohadikusumo 300, 340, 341, 348, 461, 463, 467, 534
Sutikno Padmo Sumarto 79
Suwarno Samsudali 234

T

Tabrani, M. 253
Tadjuddin Noor ix, 144, 274, 371, 680, 681
Takdir Alisyahbana 269
Taman Dewasa 211, 664
Taman Kesatria 137, 138, 158, 183, 482
Taman Persahabatan 274
Tandio [Tentara Pelajar] 11
Tan Malaka, Ibrahim Datuk 26, 39, 294, 767
Taylor, R.W. 208
Tedja Sukmana 142
Tentara Pelajar xiv, xvii, 3, 4, 5, 8, 11, 36, 38, 61, 97, 136, 138, 149, 170, 174, 250, 287, 363, 733

Teruna 4
Tezet 4
Tiono [Seksi Murdio] 74
Tjut Andjung, Ibu 38
TNI/Tentara Nasional Indonesia 45
Tory [gerilya Solo] 45
Tracee Bangka 89
transmigrasi 197, 403, 560
Trimurti, S.K. 269
TRIP/Tentara Republik Indonesia Pelajar 3, 49, 61
Truman, Harry S. 19
Tweede Kamer 39, 188, 260, 465

U

Ukar Bratakusuma 246
UNO 5, 5ñ796, 16, 120, 718, 770
URIPS 56
Uripsu 90
USIS 293, 404, 452, 453, 565, 782
Usman Adamy 4
Utojo 17
Utojo [Mr] 17

V

Van der Harst 305
Van der Waag 235
Van Diffolon 224
Van Krieken 231
Van Langen 135
Van Maarseveen 185, 188, 209, 232, 260, 270, 387, 582, 602
Van Mook 163
Velde, J. J. van der 78
Vrij Nederland 290

W

wabah cacar 247
Wahab, Tgk. Abd. 79
Wahi 17
Wahid Hasjim, A. 245, 302
Waluyo 21
Warrahman As. 4
Warta Indonesia 189, 196, 519
Widya, Mayor 257, 370, 524
Wijk, Gerth van 225
Wongsonegoro, Mr. 144, 166, 209, 229, 257, 301, 323, 327, 367, 431, 454, 681, 711
Wonosari 56, 57, 58, 133, 142, 149

Z

Zainal Arifin Abbas 11
Zamzami Jahja, Tgk. 30

SERI BUKU TEMPO: TOKOH MILITER

Kisah tentang Sarwo Edhie adalah jilid perdana seri "Tokoh Militer" yang diangkat dari liputan khusus Majalah Berita Mingguan *Tempo* November 2011. Serial ini mengupas, menguak, dan membongkar mitos dan berbagai sisi kehidupan para perwira militer yang dinilai mengubah sejarah.

SERI BUKU TEMPO: PEREMPUAN-PEREMPUAN PERKASA

Kisah tentang Kartini adalah jilid perdana seri "Perempuan-perempuan Perkasa" yang diangkat dari liputan khusus Majalah Berita Mingguan *Tempo* April 2013. Serial ini mengangkat, mengupas, dan mengisahkan sisi lain kehidupan tokoh-tokoh perempuan yang memiliki peran besar pada setiap zamannya.

SERI BUKU TEMPO: PENEGAK HUKUM

Kisah Yap Thiam Hien merupakan jilid pertama seri “Penegak Hukum”, yang diangkat dari liputan khusus Majalah Berita Mingguan *Tempo*, Juni 2013. Menyorot sepak terjang para pendekar hukum, serial ini ingin menunjukkan bahwa di tengah sengkarut zaman kita tak selalu kehilangan harapan.
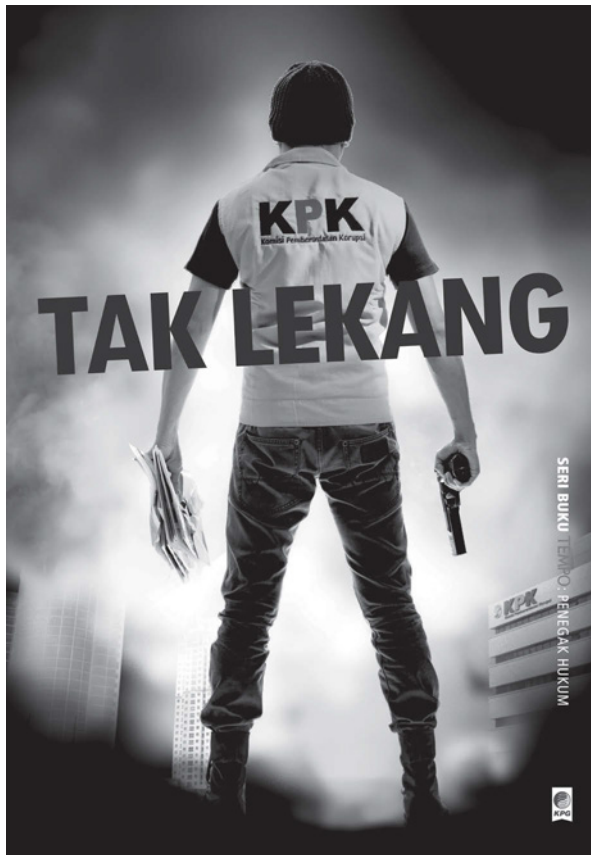
SERI BUKU TEMPO: PENEGAK HUKUM

Kisah KPK merupakan jilid kedua seri "Penegak Hukum", yang diangkat dari liputan khusus Majalah Berita Mingguan *Tempo*, awal Januari 2013. Menyorot sepak terjang para pendekar hukum, serial ini ingin menunjukkan bahwa di tengah sengkarut zaman kita tak selalu kehilangan harapan.

SERI BUKU TEMPO: PRAHARA-PRAHARA ORDE BARU

Kisah tentang Wiji Thukul adalah jilid perdana seri "Prahara-prahara Orde Baru", yang diangkat dari liputan khusus Majalah Berita Mingguan *Tempo* Mei 2013. Serial ini menyelisik, menyingkap, merekonstruksi, dan mengingat kembali berbagai peristiwa gelap kemanusiaan pada masa Orde Baru yang nyaris terlupakan.

KRONIK REVOLUSI INDONESIA

Buku ini merupakan jilid kelima dari seri kronik tentang Revolusi Indonesia, 1945–49. Seri ini dirancang untuk meliput semua peristiwa yang menjadi berita pada lima tahun pertama Indonesia merdeka. Itu berarti tidak hanya mencakup peristiwa politik dan militer, tetapi juga ekonomi, hukum, pendidikan, sains dan teknologi, agama, dan lain-lain yang biasa diistilahkan dengan bidang *cultural universals*.

Seri kronik ini terdiri dari lima jilid, meliputi rentang waktu lima tahun, masing-masing dengan ketebalan paling sedikit 500 halaman. Besarnya jumlah halaman sedikitnya memperlihatkan bahwa kronik ini lebih lengkap dan lebih melingkupi daripada buku-buku kronik tentang Revolusi Indonesia lainnya. Oleh karena itu, kronik ini diharapkan dapat menjadi acuan yang terpercaya bagi mereka yang membutuhkan.

Buku ini layak dimiliki oleh para sejarawan, ilmuwan sosial, budayawan, pustakawan, mahasiswa, dan peminat sejarah pada umumnya.

SEJARAH
ISBN: 978-979-91-0689-6
9 789799 106896
KPG: 901 14 0784

KPG (KEPUSTAKAAN POPULER GRAMEDIA)
Gedung Kompas Gramedia, Blok 1 Lt. 3
Jl. Palmerah Barat 29-37, Jakarta 10270
Telp. 021-53650110, 53650111 ext. 3351, 3366
Fax. 53698044, www.penerbitkpg.com
Facebook: Penerbit KPG; Twitter: @penerbitkpg